



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan kembali Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan kebutuhan yang ada dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah tahun 2023 serta kaidah pelaksanaannya.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksudkan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Perubahan Renja-PD, KUA, dan PPAS serta APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023; dan
 - b. penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023.

(3) Penetapan . . .

- (3) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan provinsi yang berbatasan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan tiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan triwulan II;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi yang akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD;

f. Bab VI . . .

- f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah memuat kerangka pendanaan perubahan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada tahun 2023; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (2) Isi beserta uraian sistematika RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 54 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Definisi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pada sisi lain, Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah turut mengambil peran dalam menangani kebijakan yang bersifat *top down* berupa penanganan permasalahan yang timbul dalam periode perencanaan yaitu penanganan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (SPM). Tujuh Prioritas RPJMN yang harus diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD adalah; pertama adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, serta keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima adalah memperkuat infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan Ketujuh memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional tahunan dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.1.2 Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses penyusunan RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi:

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan RKPD,
- (2) Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD dan.
- (3) Penetapan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.1.3 Kedudukan Perubahan RKPD tahun 2023 dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024

Kedudukan Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan perencanaan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Mengingat tahun 2019 merupakan periode transisi antara RPJMD tahun 2014-2019 dengan RPJMD tahun 2019-2024. Hal ini konsisten dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan Perubahan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana Perubahan RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah

yang lebih baik. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, optimalisasi sumberdaya diharapkan dapat mendayagunakan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

1.1.4 Kedudukan RKPD dengan RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2050 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 2050);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D)
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 seri E).

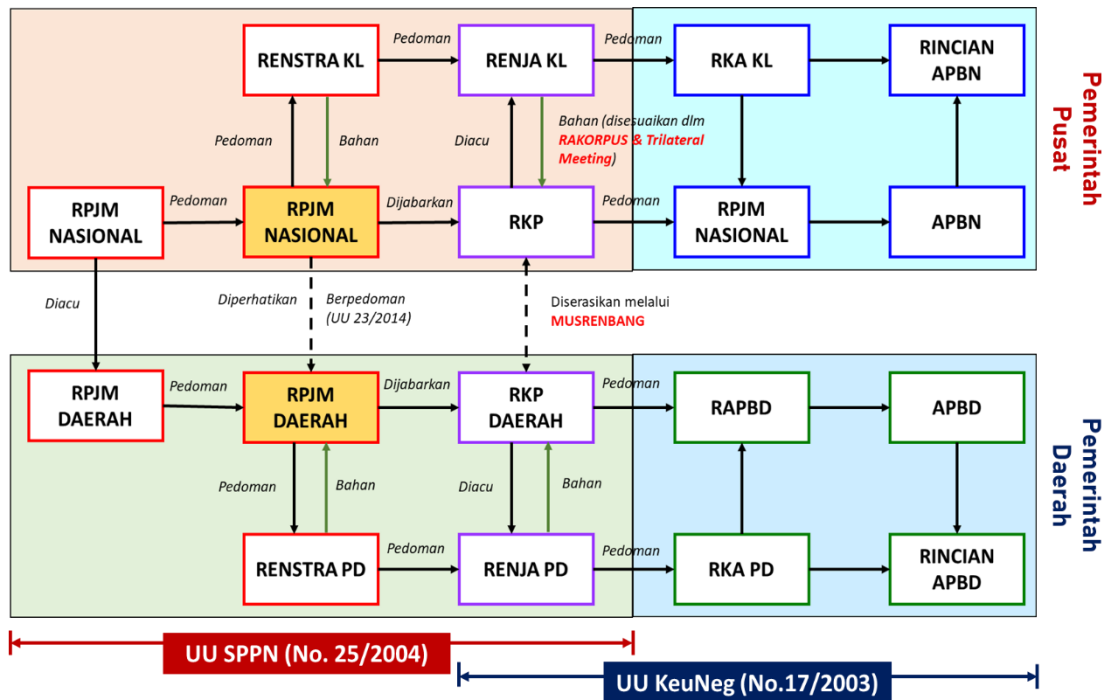
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Landasan hukum utama yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 23 Pasal 263 ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen Perubahan RKPDA menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPDA tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi triwulan 2. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD. Dokumen RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 saling berkesinambungan dan tidak berdiri sendiri. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Sedangkan tujuan perubahan RKPD 2023 adalah untuk mewujudkan program pembangunan Jawa Timur yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD 2019-2024, sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, dan sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ayat 6 meliputi perubahan:

1. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
2. Target Sasaran Pembangunan Daerah;
3. Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
5. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal

1.3 Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi, RKP/program strategis nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota didasarkan menjelaskan kinerja seluruh pembangunan di daerah baik dari sisi ekonomi maupun sosial yang merupakan bagian dari integrasi pembangunan baik ditingkat provinsi maupun pusat.

BAB 6 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB 8 PENUTUP

Menegaskan bahwa perubahan RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan perubahan APBD Provinsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (TW I)
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	2.189,78	2.352,42	2.299,46	2.454,72	2.730,91	712,63
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.563,76	1.650,14	1.610,42	1.668,75	1.757,82	448,95
Pertumbuhan Ekonomi Jatim	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
Pertumbuhan Ekonomi Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,70	5,31	5,03

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 sudah mulai membaik dan kembali di kisaran angka 5 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut lapangan usaha adalah kategori transportasi dan pergudangan sebesar 19,47 persen. Hal ini disebabkan momen natal dan tahun baru yang mendorong kenaikan jumlah penumpang pada semua moda transportasi, dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring mobilitas penduduk yang meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut pengeluaran adalah ekspor luar negeri sebesar 9,23 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur tahun 2022 tertinggi masih didominasi oleh tiga lapangan usaha, yakni industri pengolahan sebesar 30,60 persen, perdagangan sebesar 18,67 persen, dan pertanian sebesar 11,11 persen. Adapun sumber pertumbuhan tertinggi adalah industri pengolahan sebesar 1,90 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, struktur PDRB tertinggi adalah

konsumsi rumah tangga yang mencapai 59,53 persen dan sumber pertumbuhan tertinggi juga pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,58 persen.

Pembangunan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2022 kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur tahun 2022 berada diatas Nasional dan menempati peringkat kedua setelah Jawa Barat. Secara spasial di tahun 2022, Jawa Timur adalah penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24,99 persen dan penyumbang terbesar kedua secara Nasional sebesar 13,98 persen setelah DKI Jakarta.

Pada triwulan I tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara y-on-y sebesar 4,95 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 19,39 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,47 persen.

Pada tahun 2021 dan 2022 mayoritas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota mengalami perbaikan setelah sebelumnya mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Namun di tahun 2022, masih terdapat dua kabupaten yang mengalami kontraksi antara lain Kabupaten Bojonegoro dengan kontraksi sebesar -6,16 persen dan Kabupaten Bangkalan dengan kontraksi sebesar -1,12 persen, sedangkan 3 kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi antara lain Kabupaten Tuban sebesar 8,88 persen, Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,53 persen dan Kabupaten Gresik sebesar 7,38 persen.

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019*	2020*	2021*	2022**
1	Kab. Pacitan	5,47	5,08	-1,84	2,49	5,54
2	Kab. Ponorogo	5,27	5,01	-0,9	3,19	3,24
3	Kab. Trenggalek	5,03	5,08	-2,17	3,65	4,52
4	Kab. Tulungagung	5,21	5,32	-3,09	3,53	5,22
5	Kab. Blitar	5,10	5,12	-2,29	3,02	5,2
6	Kab. Kediri	5,07	5,06	-2,41	3,06	4,9
7	Kab. Malang	5,55	5,49	-2,68	3,12	5,13
8	Kab. Lumajang	5,00	4,61	-2,79	3,14	4,43
9	Kab. Jember	5,02	5,51	-2,98	4,00	4,53
10	Kab. Banyuwangi	5,84	5,55	-3,58	4,09	4,43
11	Kab. Bondowoso	5,08	5,30	-1,36	3,49	3,51
12	Kab. Situbondo	5,46	5,44	-2,33	3,26	4,39
13	Kab. Probolinggo	4,47	4,56	-2,12	3,35	4,52
14	Kab. Pasuruan	5,73	5,83	-2,03	4,34	5,32

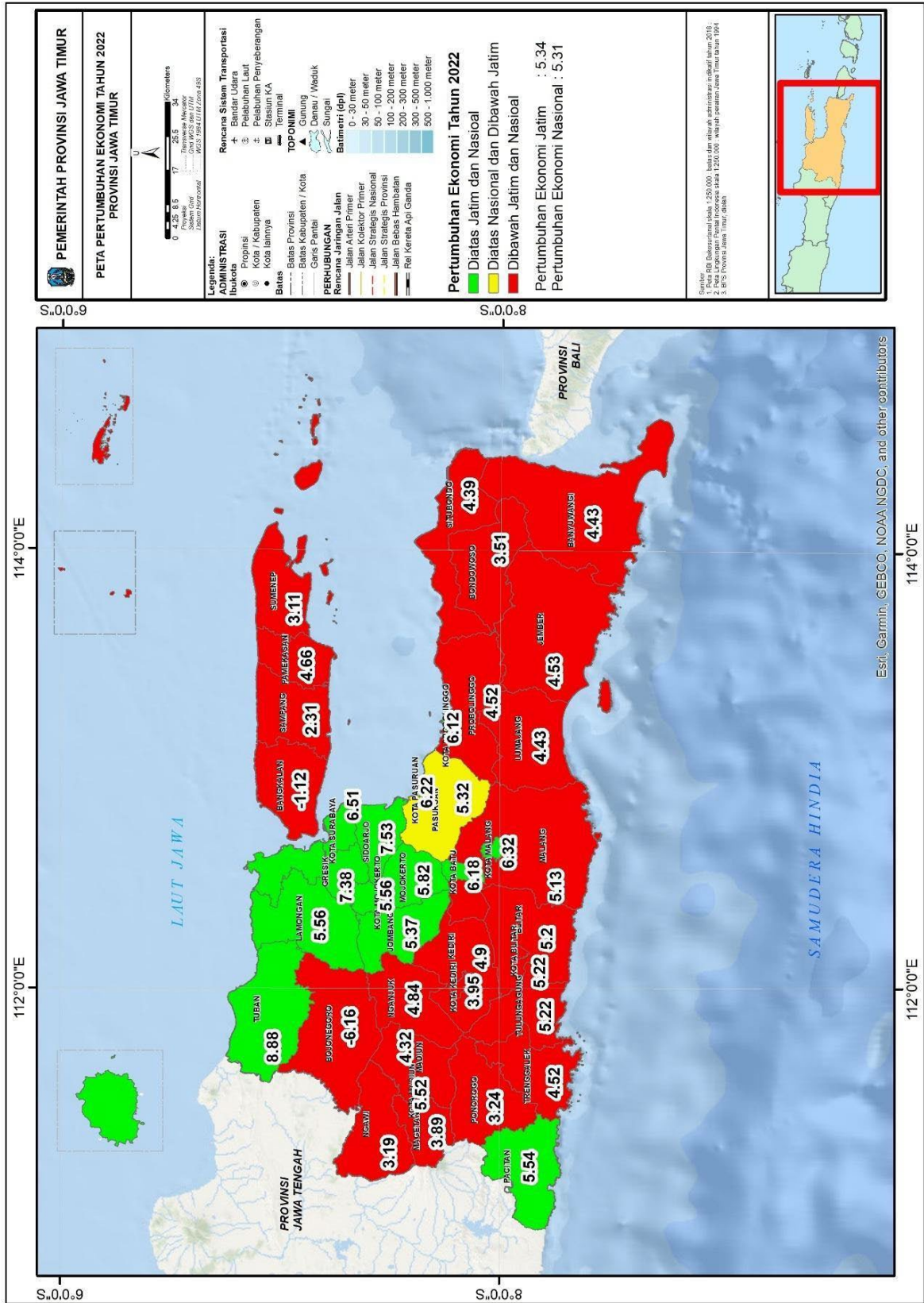
No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019*	2020*	2021*	2022**
15	Kab. Sidoarjo	6,01	5,99	-3,69	4,21	7,53
16	Kab. Mojokerto	5,88	5,81	-1,11	4,12	5,82
17	Kab. Jombang	5,29	5,10	-1,98	3,24	5,37
18	Kab. Nganjuk	5,38	5,36	-1,71	3,61	4,84
19	Kab. Madiun	5,10	5,42	-1,69	3,32	4,32
20	Kab. Magetan	5,21	5,04	-1,64	3,04	3,89
21	Kab. Ngawi	5,21	5,05	-1,69	2,55	3,19
22	Kab. Bojonegoro	4,39	6,34	-0,4	-5,54	-6,16
23	Kab. Tuban	5,15	5,14	-5,85	3,00	8,88
24	Kab. Lamongan	5,44	5,43	-2,65	3,43	5,56
25	Kab. Gresik	5,81	5,42	-3,68	3,79	7,38
26	Kab. Bangkalan	4,22	1,03	-5,59	-2,07	-1,12
27	Kab. Sampang	4,11	1,85	-0,29	0,22	2,31
28	Kab. Pamekasan	5,46	4,92	-2,54	3,41	4,66
29	Kab. Sumenep	3,63	0,14	-1,13	2,61	3,11
30	Kota Kediri	5,43	5,47	-6,25	2,5	3,95
31	Kota Blitar	5,82	5,84	-2,28	4,28	5,22
32	Kota Malang	5,72	5,73	-2,26	4,21	6,32
33	Kota Probolinggo	5,93	5,94	-3,64	4,06	6,12
34	Kota Pasuruan	5,54	5,56	-4,33	3,64	6,22
35	Kota Mojokerto	5,80	5,65	-3,69	3,65	5,56
36	Kota Madiun	5,96	5,69	-3,39	4,79	5,52
37	Kota Surabaya	6,19	6,09	-4,85	4,29	6,51
38	Kota Batu	6,50	6,51	-6,46	4,04	6,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket. * : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

Gambar 2.1 Peta Persebaran Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



2.1.1.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Analisis terhadap angka inflasi dapat dilihat secara tahunan maupun secara bulanan. Secara tahunan inflasi dapat digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari sampai dengan bulan berjalan dalam tahun yang sama). Inflasi tahun kalender dihitung dari persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember tahun lalu. Sedangkan untuk inflasi bulanan digunakan untuk melihat perubahan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, daya beli atau nilai riil uang selama satu bulan saja.

Tabel 2.3 Laju Inflasi Jawa Timur dan Nasional

Laju Inflasi	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d Juni)
Jawa Timur	2,86	2,12	1,44	2,45	6,52	1,45
Nasional	3,13	2,72	1,68	2,91	5,51	1,24

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Inflasi Jawa Timur sampai dengan semester I tahun 2023 mencapai 1,45 persen. Sampai dengan Juni 2023, komponen inti dan komponen bergejolak mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,38 persen dan 3,31 persen, sedangkan komponen yang harganya diatur pemerintah tidak mengalami perubahan.

2.1.1.1.2.1 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk Jawa Timur. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.4 PDRB Per Kapita Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022**
PDRB Per Kapita (Juta Rp.)	55,41	59,02	56,64	60,05	66,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*Ket. **): Angka Sangat Sangat Sementara*

Pada Tahun 2018-2021 PDRB per kapita Jawa Timur selalu mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tatanan

ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jawa Timur. PDRB per kapita pada tahun 2022 meningkat 10,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Gambaran ini belum bisa dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran masyarakat Jawa Timur maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi karena perubahan harga sangat dominan dalam pembentukan PDRB. Namun nilai ini dapat digunakan sebagai indikasi awal adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.1.1.3 Indeks Theil

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Sehingga, ketimpangan antar daerah seringkali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Indeks Theil berguna untuk menganalisa kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian sebaliknya, semakin kecil nilai Indeks Theil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah.

Tabel 2.5 Indeks Theil Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Theil	0,3136	0,3179	0,3077	0,3120	0,3147

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ketimpangan wilayah di Jawa Timur, yang ditunjukkan melalui Indeks Theil menunjukkan kondisi di Jawa Timur memiliki kecenderungan naik. Hal ini karena laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) rata-rata wilayah Kota lebih cepat dari rata-rata wilayah Kabupaten, namun pada tahun 2020 indeks theil Jawa Timur sempat mengalami penurunan yang disebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terganggunya produksi dan distribusi barang dan jasa, serta adanya indikasi penurunan daya beli masyarakat di semua daerah di Jawa Timur. Dampak ini paling dirasakan oleh wilayah Kota dan sebagian Kabupaten yang motor penggerak ekonominya pada sektor sekunder dan sektor tersier khususnya perdagangan dan jasa, terutama Kota Kediri dan Kota Surabaya.. Adapun demikian, hingga tahun 2022,

Indeks Theil Jawa Timur masih di bawah angka 0,4 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi wilayah di Jawa Timur masih tergolong rendah. Serta, di tahun 2022 Provinsi Jawa Timur mampu menjaga ketimpangan sebesar 0,0027 poin terhadap tahun 2021, lebih baik dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,0043 poin.

2.1.1.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan merupakan proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Wujud kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
Jawa Timur	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49	10,35
Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase penduduk miskin Jawa Timur menunjukkan tren yang positif setelah kasus pandemi covid-19 seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 10,35 persen, mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin terhadap September 2022 (10,49 persen). Jika dibandingkan dengan Maret 2022 (11,09 persen), tingkat kemiskinan Maret 2023 lebih rendah 0,74 persen poin. Sedangkan jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar

4,19 juta jiwa, berkurang sebanyak 47,7 ribu jiwa terhadap September 2022 (4,24 juta jiwa). Jumlah penduduk miskin Maret 2023 terpaut 7 ribu jiwa sedikit lebih tinggi, jika dibandingkan dengan Maret 2022 (4,42 juta jiwa). Penurunan penduduk miskin memberi arti bahwa pengurangan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dari garis kemiskinan.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Jawa Timur yang antara lain Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, pengentasan kemiskinan sesuai Bhakti Jatim Sejahtera senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa. Strategi yang digunakan adalah 3S: Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2022 (Maret), dapat dijelaskan bahwa persentase kemiskinan terendah adalah sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Batu sebesar 3,79 persen sedangkan kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten wilayah Madura, diantaranya Kabupaten Sampang sebesar 21,61 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 19,44, dan Kabupaten Sumenep sebesar 18,76 persen.

**Tabel 2.7 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
(Kondisi Maret)**

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	14,19	13,67	14,54	15,11	13,80
2	Kab. Ponorogo	10,36	9,64	9,95	10,26	9,32
3	Kab. Trenggalek	12,02	10,98	11,62	12,14	10,96
4	Kab. Tulungagung	7,27	6,74	7,33	7,51	6,71
5	Kab. Blitar	9,72	8,94	9,33	9,65	8,71
6	Kab. Kediri	11,31	10,42	11,40	11,64	10,65
7	Kab. Malang	10,37	9,47	10,15	10,5	9,55
8	Kab. Lumajang	9,98	9,49	9,83	10,05	9,06
9	Kab. Jember	9,98	9,25	10,09	10,41	9,39
10	Kab. Banyuwangi	7,80	7,52	8,06	8,07	7,51
11	Kab. Bondowoso	14,39	13,33	14,17	14,73	13,47
12	Kab. Situbondo	11,82	11,20	12,22	12,63	11,78
13	Kab. Probolinggo	18,71	17,76	18,61	18,91	17,12
14	Kab. Pasuruan	9,45	8,68	9,26	9,7	8,96
15	Kab. Sidoarjo	5,69	5,32	5,59	5,93	5,36
16	Kab. Mojokerto	10,08	9,75	10,57	10,62	9,71
17	Kab. Jombang	9,56	9,22	9,94	10	9,04
18	Kab. Nganjuk	12,11	11,24	11,62	11,85	10,70
19	Kab. Madiun	11,42	10,54	11,46	11,91	10,79
20	Kab. Magetan	10,31	9,61	10,35	10,66	9,84
21	Kab. Ngawi	14,83	14,39	15,44	15,57	14,15
22	Kab. Bojonegoro	13,16	12,38	12,87	13,27	12,21
23	Kab. Tuban	15,31	14,58	15,91	16,31	15,02
24	Kab. Lamongan	13,80	13,21	13,85	13,86	12,53
25	Kab. Gresik	11,89	11,35	12,40	12,42	11,06
26	Kab. Bangkalan	19,59	18,90	20,56	21,57	19,44
27	Kab. Sampang	21,21	20,71	22,78	23,76	21,61
28	Kab. Pamekasan	14,47	13,95	14,60	15,3	13,93
29	Kab. Sumenep	20,16	19,48	20,18	20,51	18,76
30	Kota Kediri	7,68	7,16	7,69	7,75	7,23
31	Kota Blitar	7,44	7,13	7,78	7,89	7,37
32	Kota Malang	4,10	4,07	4,44	4,62	4,37
33	Kota Probolinggo	7,20	6,91	7,43	7,44	6,65
34	Kota Pasuruan	6,77	6,46	6,66	6,88	6,37
35	Kota Mojokerto	5,50	5,15	6,24	6,39	5,98
36	Kota Madiun	4,49	4,35	4,98	5,09	4,76
37	Kota Surabaya	4,88	4,51	5,02	5,23	4,72
38	Kota Batu	3,89	3,81	3,89	4,09	3,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.1.1.4.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Pemahaman kemiskinan secara holistik sangat dibutuhkan agar dalam implementasi kebijakan yang diambil dapat terfokus dan efisien. Persoalan kemiskinan tidak hanya terkait jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi yang perlu diperhatikan salah satunya adalah tingkat kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

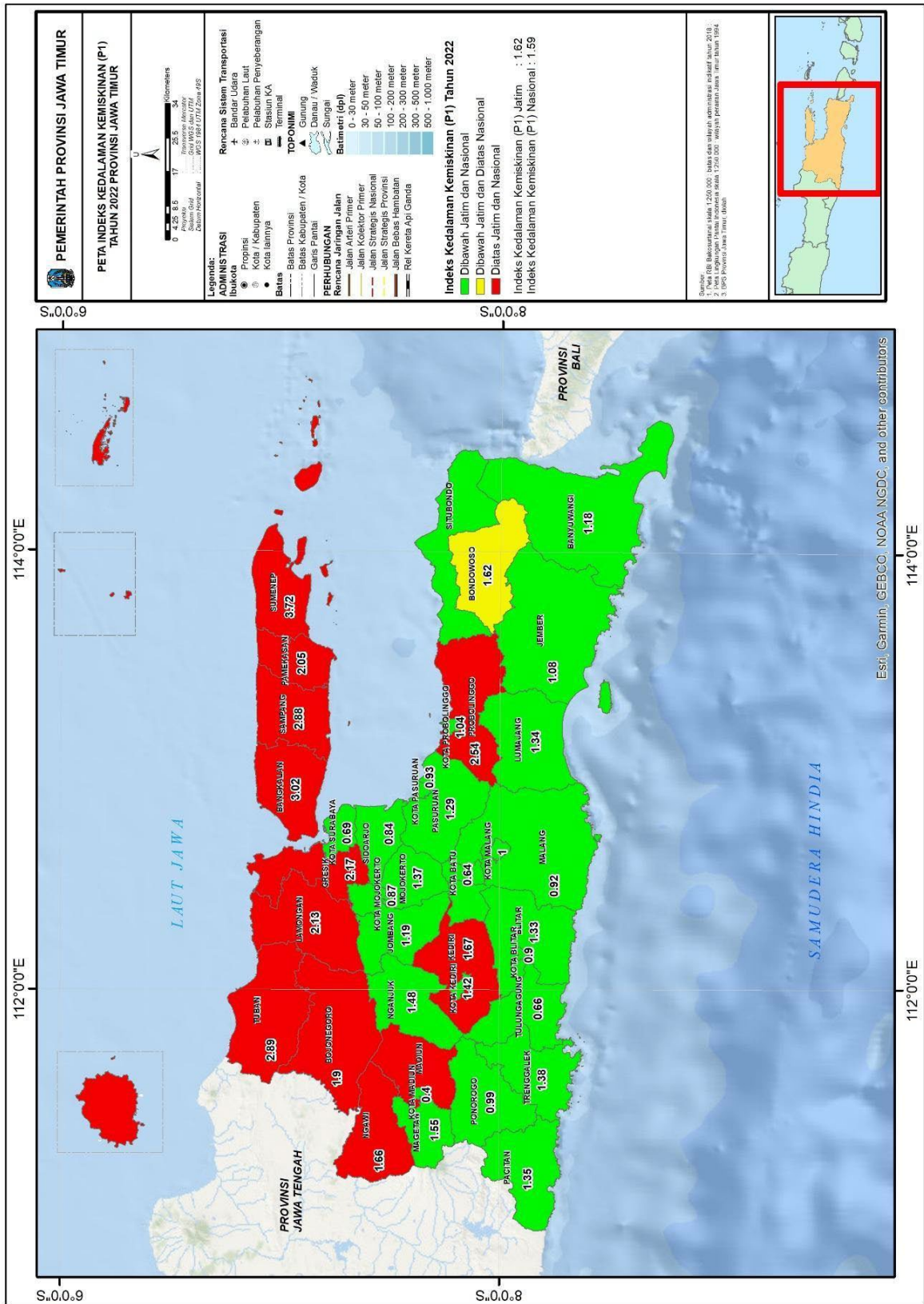
Tabel 2.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
Jawa Timur	2,07	1,61	1,97	1,58	1,62	1,63
Nasional	1,63	1,50	1,75	1,67	1,56	1,53

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Jawa Timur pada maret 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan september 2022, dimana di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Tingkat kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan (2,191) lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (1,191). Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan sumber daya lebih besar untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan dibandingkan di perkotaan.

Gambar 2.3 Peta Indeks Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 (Maret)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.1.1.4.2 Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan yang lain selain Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), untuk melihat kondisi penduduk miskin lebih mendalam adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

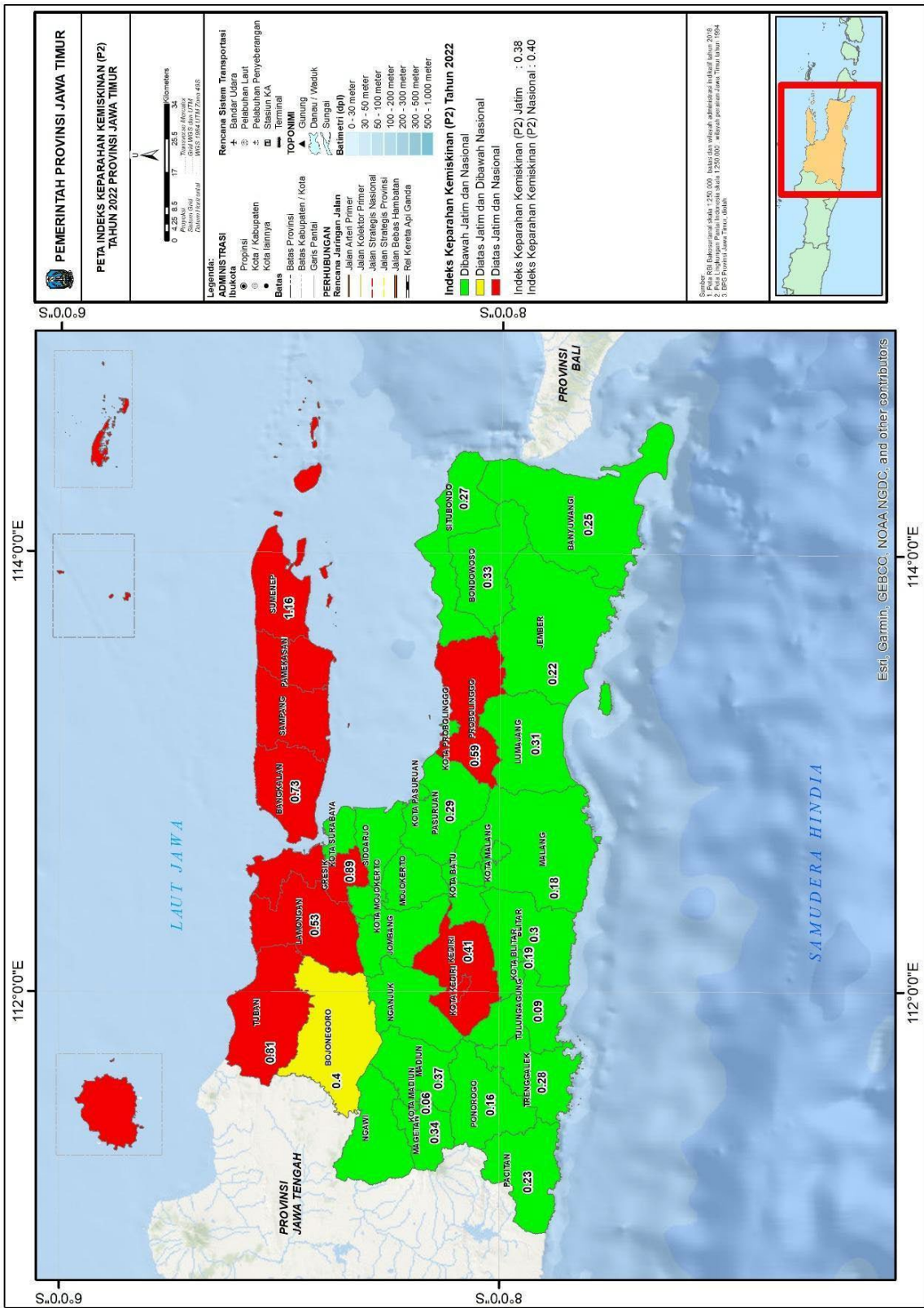
Tabel 2.9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
Jawa Timur	0,56	0,37	0,53	0,33	0,36	0,37
Nasional	0,41	0,36	0,47	0,42	0,38	0,38

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jawa Timur tidak jauh berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI). Pada maret 2023, tingkat keparahan kemiskinan di daerah perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan antar rumah tangga miskin di perdesaan sangat bervariasi.

Gambar 2.4 Peta Indeks Keperahan Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 (Maret)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.1.1.5 Indeks Gini

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Perhitungan Indeks Gini menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar maka pendapatannya besar pula.

Tabel 2.10 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Maret)
Jawa Timur	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365	0,387
Nasional	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan :

$G < 0,3$ = Ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan sedang, dan

$G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi

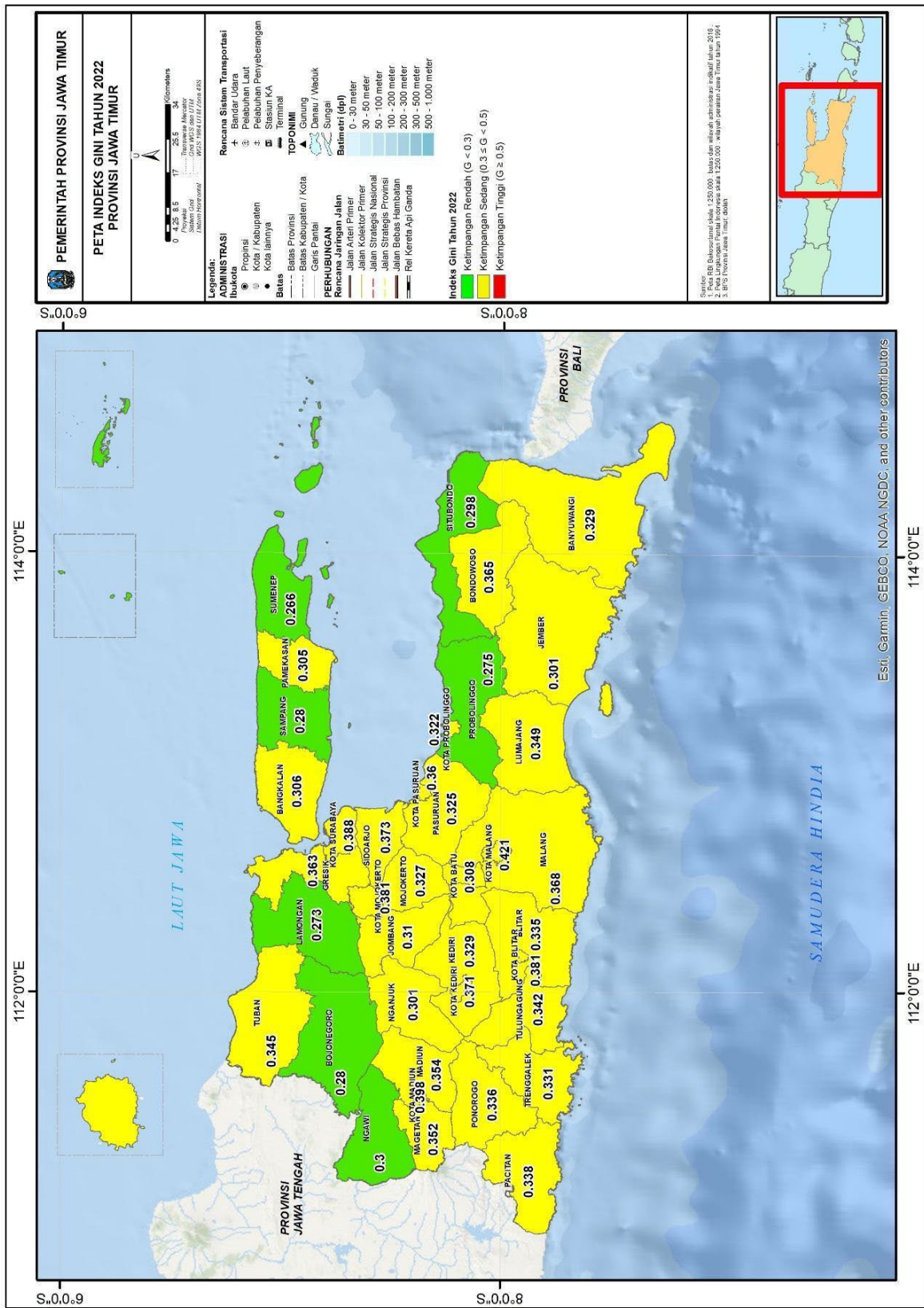
Indeks gini Provinsi Jawa Timur pada maret 2023 sebesar 0,387 mengalami kenaikan dibandingkan September 2022 sebesar 0,022 poin. Hal ini dikarenakan dampak perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023, Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen serta keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per 6 Maret 2023 sudah disalurkan kepada 163.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (KPM sebanyak 800 ribu KPM per bulan), sedangkan kondisi pasca pandemi menjadikan perekonomian golongan atas cepat berkembang. Pada Maret 2023 di Jawa Timur, distribusi total pengeluaran untuk penduduk pada kelompok 40 persen terbawah mengalami penurunan baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 2.11 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Kondisi Maret)

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	0,35	0,40	0,351	0,337	0,338
2	Kab. Ponorogo	0,35	0,35	0,380	0,369	0,336
3	Kab. Trenggalek	0,39	0,37	0,379	0,335	0,331
4	Kab. Tulungagung	0,37	0,30	0,336	0,327	0,342
5	Kab. Blitar	0,38	0,33	0,348	0,353	0,335
6	Kab. Kediri	0,33	0,30	0,325	0,330	0,329
7	Kab. Malang	0,38	0,38	0,371	0,367	0,368
8	Kab. Lumajang	0,32	0,30	0,297	0,309	0,349
9	Kab. Jember	0,34	0,30	0,318	0,336	0,301
10	Kab. Banyuwangi	0,31	0,31	0,316	0,373	0,329
11	Kab. Bondowoso	0,35	0,30	0,329	0,334	0,365
12	Kab. Situbondo	0,36	0,32	0,305	0,323	0,298
13	Kab. Probolinggo	0,34	0,33	0,326	0,326	0,275
14	Kab. Pasuruan	0,32	0,31	0,346	0,344	0,325
15	Kab. Sidoarjo	0,35	0,31	0,340	0,347	0,373
16	Kab. Mojokerto	0,31	0,27	0,325	0,294	0,327
17	Kab. Jombang	0,32	0,33	0,334	0,332	0,31
18	Kab. Nganjuk	0,31	0,42	0,335	0,308	0,301
19	Kab. Madiun	0,33	0,33	0,357	0,359	0,354
20	Kab. Magetan	0,38	0,36	0,324	0,357	0,352
21	Kab. Ngawi	0,35	0,34	0,337	0,309	0,3
22	Kab. Bojonegoro	0,35	0,31	0,303	0,340	0,28
23	Kab. Tuban	0,36	0,30	0,337	0,345	0,345
24	Kab. Lamongan	0,31	0,32	0,296	0,292	0,273
25	Kab. Gresik	0,27	0,28	0,299	0,313	0,363
26	Kab. Bangkalan	0,29	0,31	0,322	0,303	0,306
27	Kab. Sampang	0,26	0,27	0,262	0,268	0,28
28	Kab. Pamekasan	0,33	0,34	0,320	0,323	0,305
29	Kab. Sumenep	0,25	0,30	0,256	0,294	0,266
30	Kota Kediri	0,33	0,32	0,346	0,374	0,371
31	Kota Blitar	0,35	0,34	0,344	0,370	0,381
32	Kota Malang	0,41	0,34	0,395	0,407	0,421
33	Kota Probolinggo	0,31	0,27	0,311	0,299	0,322
34	Kota Pasuruan	0,34	0,31	0,301	0,350	0,36
35	Kota Mojokerto	0,34	0,31	0,355	0,334	0,381
36	Kota Madiun	0,36	0,35	0,392	0,345	0,398
37	Kota Surabaya	0,36	0,41	0,344	0,351	0,388
38	Kota Batu	0,33	0,32	0,333	0,312	0,308

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.5 Indeks Gini Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 (Maret)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.1.1.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	90,77	90,91	91,07	91,67	92,08
Nasional	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur selama tahun 2018-2022 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan capaian IPG Jawa Timur mulai tahun 2020 berada di atas Nasional. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Jawa Timur, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Jawa Timur melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkan IPM perempuan, khususnya pada indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan.

Perkembangan IPG menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022, IPG di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi diantaranya adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan IPG yang terendah berada di Kabupaten Sumenep.

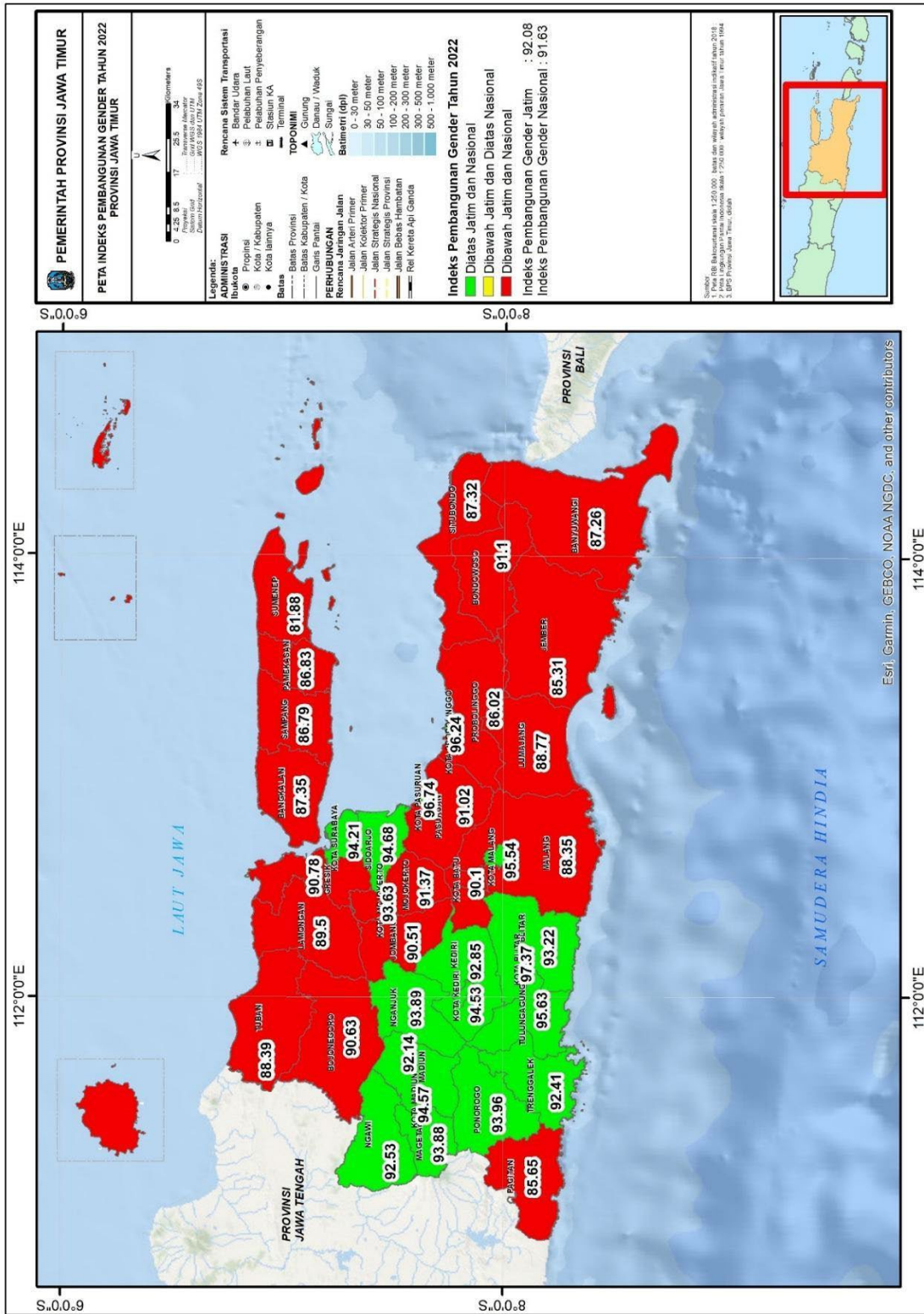
Tabel 2.13 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	84,44	85,13	84,87	85,09	85,65
2	Kab. Ponorogo	93,00	93,34	93,56	93,65	93,96
3	Kab. Trenggalek	92,52	92,74	92,93	92,56	92,41
4	Kab. Tulungagung	95,75	95,63	95,48	95,52	95,63
5	Kab. Blitar	92,33	92,73	92,70	92,76	93,22
6	Kab. Kediri	92,81	92,70	93,07	92,9	92,85
7	Kab. Malang	88,38	88,66	88,68	88,34	88,35
8	Kab. Lumajang	87,88	88,04	88,09	88,39	88,77

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Kab. Jember	84,23	84,30	84,66	84,82	85,31
10	Kab. Banyuwangi	86,44	86,81	86,66	86,96	87,26
11	Kab. Bondowoso	89,89	90,42	90,68	90,75	91,10
12	Kab. Situbondo	86,69	87,11	87,06	87,16	87,32
13	Kab. Probolinggo	84,86	84,95	85,38	85,39	86,02
14	Kab. Pasuruan	90,41	90,68	90,48	90,89	91,02
15	Kab. Sidoarjo	93,33	93,79	94,13	94,26	94,68
16	Kab. Mojokerto	90,15	90,65	91,10	91,24	91,37
17	Kab. Jombang	89,94	90,37	90,15	90,23	90,51
18	Kab. Nganjuk	93,26	93,27	93,26	93,76	93,89
19	Kab. Madiun	91,13	91,81	91,79	91,77	92,14
20	Kab. Magetan	92,93	93,16	93,36	93,65	93,88
21	Kab. Ngawi	91,72	92,52	92,19	92,32	92,53
22	Kab. Bojonegoro	89,77	89,98	90,17	90,21	90,63
23	Kab. Tuban	87,34	87,63	87,78	88,06	88,39
24	Kab. Lamongan	88,00	88,40	88,59	88,99	89,50
25	Kab. Gresik	89,72	90,05	89,93	90,2	90,78
26	Kab. Bangkalan	86,38	86,93	86,88	86,95	87,35
27	Kab. Sampang	84,33	84,79	85,50	86,32	86,79
28	Kab. Pamekasan	85,50	86,05	86,17	86,5	86,83
29	Kab. Sumenep	80,11	80,72	80,81	81,18	81,88
30	Kota Kediri	94,48	94,53	94,39	94,21	94,53
31	Kota Blitar	97,60	97,80	97,46	97,36	97,37
32	Kota Malang	94,71	94,72	94,97	95,24	95,54
33	Kota Probolinggo	95,56	95,91	95,87	96,01	96,24
34	Kota Pasuruan	96,02	96,18	96,16	96,27	96,74
35	Kota Mojokerto	93,05	93,18	93,26	93,47	93,63
36	Kota Madiun	93,47	94,05	94,38	94,42	94,57
37	Kota Surabaya	93,57	93,60	93,58	93,9	94,21
38	Kota Batu	89,27	89,71	89,72	89,89	90,10

Sumber : BPS Pusat

Gambar 2.6 Peta Persebaran IPG Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber : BPS Pusat, diolah

2.1.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*along and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pembangunan manusia di Jawa Timur yang ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun masih dibawah Nasional namun laju pertumbuhan IPM Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan IPM sebesar 0,60 persen, tertinggi dibanding Provinsi lain di Pulau Jawa dan di tahun 2022 meningkat sebesar 0,85 persen. Hal ini menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur optimis dalam meningkatkan capaian IPM.

Pada komponen kesehatan, bayi yang lahir tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup sampai usia 71,74 tahun, lebih lama 0,36 tahun

dibandingkan dengan bayi yang lahir tahun 2021. Pada komponen pendidikan, harapan lama sekolah tahun 2022 sebesar 13,37 atau lebih tinggi 0,01 persen dibanding tahun 2021, sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2022 mencapai 8,03 atau meningkat 1,90 persen dibanding tahun 2021. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan pada tahun 2022 mencapai Rp. 11.992.000,- atau meningkat 2,43 persen dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp. 11.707.000,-

Pada tahun 2022 IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,74 dan terendah di Kabupaten Sampang 63,39. Pada tahun 2022 terjadi pergeseran status pembangunan manusia di Jawa Timur. Jumlah Kabupaten/Kota yang status pembangunan manusianya tergolong “tinggi” bertambah banyak menjadi 22 Kabupaten/Kota. Adapun pertumbuhan IPM tertinggi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1,34 persen dan pertumbuhan IPM terendah di Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,46 persen. Terdapat 4 Kabupaten Kota (10,53 persen) masuk kategori “sangat tinggi”, 22 Kabupaten/Kota (57,89 persen) masuk kategori “tinggi”, 12 Kabupaten/Kota (31,58 persen) masuk kategori ”sedang”, dan tidak ada Kabupaten/kota yang masuk kategori “rendah”.

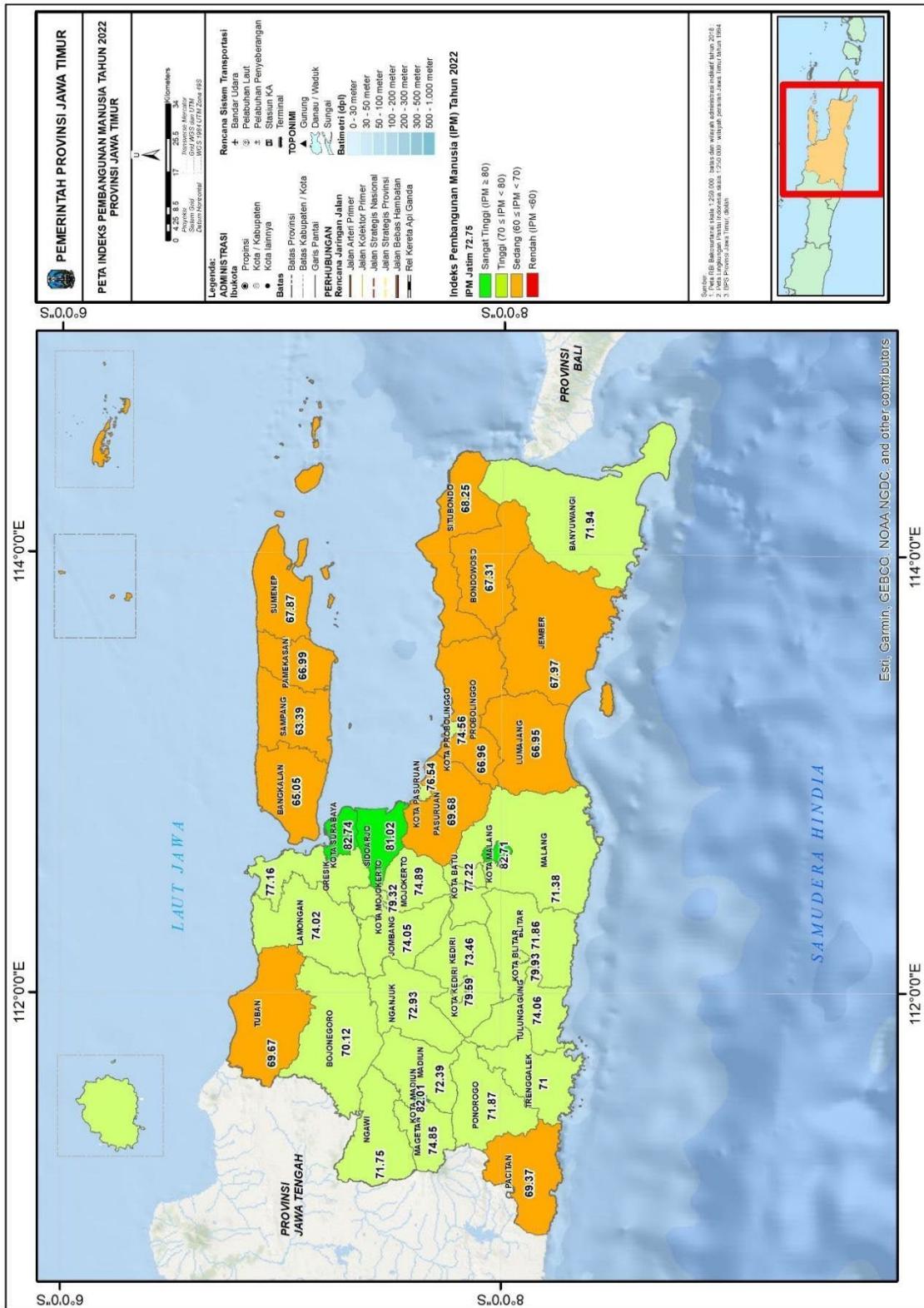
Tabel 2.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	67,33	68,16	68,39	68,57	69,37
2	Kab. Ponorogo	69,91	70,56	70,81	71,06	71,87
3	Kab. Trenggalek	68,71	69,46	69,74	70,06	71,00
4	Kab. Tulungagung	71,99	72,62	73,00	73,15	74,06
5	Kab. Blitar	69,93	70,57	70,58	71,05	71,86
6	Kab. Kediri	71,01	71,85	72,05	72,56	73,46
7	Kab. Malang	69,40	70,35	70,36	70,6	71,38
8	Kab. Lumajang	64,83	65,33	65,46	66,07	66,95
9	Kab. Jember	65,96	66,69	67,11	67,32	67,97
10	Kab. Banyuwangi	70,06	70,60	70,62	71,38	71,94
11	Kab. Bondowoso	65,27	66,09	66,43	66,59	67,31
12	Kab. Situbondo	66,42	67,09	67,38	67,78	68,25
13	Kab. Probolinggo	64,85	65,60	66,07	66,26	66,96
14	Kab. Pasuruan	67,41	68,29	68,60	68,93	69,68
15	Kab. Sidoarjo	79,50	80,05	80,29	80,65	81,02
16	Kab. Mojokerto	72,50	73,53	73,83	74,15	74,89
17	Kab. Jombang	72,64	72,85	72,97	73,45	74,05
18	Kab. Nganjuk	71,86	71,71	71,72	71,97	72,93
19	Kab. Madiun	71,23	71,69	71,73	71,88	72,39
20	Kab. Magetan	71,01	73,49	73,92	74,15	74,85
21	Kab. Ngawi	72,91	70,41	70,54	71,04	71,75
22	Kab. Bojonegoro	69,91	68,75	69,04	69,59	70,12
23	Kab. Tuban	67,43	68,37	68,40	68,91	69,67
24	Kab. Lamongan	71,97	72,57	72,58	73,12	74,02

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
25	Kab. Gresik	75,28	76,10	76,11	76,5	77,16
26	Kab. Bangkalan	62,87	63,79	64,11	64,36	65,05
27	Kab. Sampang	61,00	61,94	62,70	62,8	63,39
28	Kab. Pamekasan	65,41	65,94	66,26	66,4	66,99
29	Kab. Sumenep	65,25	66,22	66,43	67,04	67,87
30	Kota Kediri	77,58	78,08	78,23	78,6	79,59
31	Kota Blitar	77,58	78,56	78,57	78,98	79,93
32	Kota Malang	80,89	81,32	81,45	82,04	82,71
33	Kota Probolinggo	72,53	73,27	73,27	73,66	74,56
34	Kota Pasuruan	74,78	75,25	75,26	75,62	76,54
35	Kota Mojokerto	77,14	77,96	78,04	78,43	79,32
36	Kota Madiun	80,33	80,88	80,91	81,25	82,01
37	Kota Surabaya	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74
38	Kota Batu	75,04	75,88	75,90	76,28	77,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.7 Peta Persebaran IPM Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.1.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (pengangguran sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur dan Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Feb)
Jawa Timur	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49	4,33
Nasional	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	5,45

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur setiap tahunnya selalu dibawah Nasional dan memiliki kecenderungan menurun meskipun pernah meningkat di tahun 2020 akibat dampak Covid-19 yang dirasakan oleh semua daerah di Indonesia. TPT Jawa Timur tahun 2022 sebesar 5,49 persen, turun 0,25 persen poin dibanding tahun 2021. Meskipun TPT total mengalami penurunan, TPT perkotaan pada tahun 2022 sebesar 7,76 persen mengalami peningkatan sebesar 0,43 persen poin dibanding tahun 2021, sedangkan TPT perdesaan sebesar 2,78 mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin. Menurut jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 5,74 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan sebesar 5,13 persen poin.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur yang membaik juga didukung oleh TPT SMK mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat Pendidikan, hal ini membuktikan bahwa program-program yang dicanangkan oleh Pemprov Jawa Timur terkait masalah pengangguran SMK berjalan dengan efektif.

Pada Februari 2023, kondisi perekonomian di Jawa Timur yang semakin membaik mampu menyerap tenaga kerja sekitar 473 ribu orang dan berkurangnya pengangguran sekitar 95 ribu orang sehingga capaian TPT sebesar 4,33 persen. Meskipun capaian tersebut cenderung turun tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi (Februari 2020)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 8,80 persen dan terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 1,36 persen.

Tabel 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	1,43	0,95	2,28	2,04	3,65
2	Kab. Ponorogo	3,87	3,58	4,45	4,38	5,51
3	Kab. Trenggalek	4,17	3,43	4,11	3,53	5,37
4	Kab. Tulungagung	2,61	3,36	4,61	4,91	6,65
5	Kab. Blitar	3,37	3,11	3,82	3,66	5,45
6	Kab. Kediri	4,25	3,68	5,24	5,15	6,83
7	Kab. Malang	3,24	3,82	5,49	5,4	6,57
8	Kab. Lumajang	2,55	2,81	3,36	3,51	4,97
9	Kab. Jember	4,09	3,80	5,12	5,44	4,06
10	Kab. Banyuwangi	3,67	4,08	5,34	5,42	5,26
11	Kab. Bondowoso	3,90	2,96	4,13	4,46	4,32
12	Kab. Situbondo	1,92	2,82	3,85	3,68	3,38
13	Kab. Probolinggo	4,15	3,88	4,86	4,55	3,25
14	Kab. Pasuruan	6,11	5,42	6,24	6,03	5,91
15	Kab. Sidoarjo	4,73	4,72	10,97	10,87	8,80
16	Kab. Mojokerto	4,27	3,68	5,75	5,54	4,83
17	Kab. Jombang	4,64	4,39	7,48	7,09	5,47
18	Kab. Nganjuk	2,64	3,22	4,80	4,98	4,74
19	Kab. Madiun	3,81	3,62	4,80	4,99	5,84
20	Kab. Magetan	3,92	3,08	3,74	3,86	4,33
21	Kab. Ngawi	3,83	3,70	5,44	4,25	2,48
22	Kab. Bojonegoro	4,19	3,70	4,92	4,82	4,69
23	Kab. Tuban	2,83	2,76	4,81	4,68	4,54
24	Kab. Lamongan	3,17	4,00	5,13	4,9	6,05
25	Kab. Gresik	5,82	5,54	8,21	8	7,84
26	Kab. Bangkalan	5,25	5,84	8,77	8,07	8,05
27	Kab. Sampang	2,41	2,81	3,35	3,45	3,11
28	Kab. Pamekasan	2,92	2,32	3,49	3,1	1,40
29	Kab. Sumenep	1,79	2,17	2,84	2,31	1,36
30	Kota Kediri	3,63	4,22	6,21	6,37	4,38
31	Kota Blitar	4,06	4,64	6,68	6,61	5,39
32	Kota Malang	6,79	6,04	9,61	9,65	7,66
33	Kota Probolinggo	3,64	4,41	6,70	6,55	4,57
34	Kota Pasuruan	4,55	5,06	6,33	6,23	6,18
35	Kota Mojokerto	2,45	2,65	6,74	6,87	5,05
36	Kota Madiun	3,85	4,01	8,32	8,15	6,39
37	Kota Surabaya	6,12	5,87	9,79	9,68	7,62
38	Kota Batu	3,12	2,48	5,93	6,57	8,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.1.1.9 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya optimalisasi percepatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 8 (delapan) area perubahan antara lain : manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai upaya Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Peraturan Gubernur No.38 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.18 Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	72,81	73,83	76,38	76,71	80,11

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 72,81, kemudian terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 80,11. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur semakin profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, diantaranya: menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya, perbaikan beberapa penilaian hasil seperti ASN Profesional dan Kualitas Pengelolaan Arsip, penyederhanaan birokrasi, mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, serta meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.

2.1.1.1.10 Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Tabel 2.19 Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesalehan Sosial	62,52	63,26	63,50	66,33	72,03

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Peningkatan Indeks Kesalehan Sosial di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan kepedulian sosial di masyarakat yang ditandai penguatan aksi bersama (kerja sama), kelompok dan jejaring, dan toleransi, serta peningkatan kepedulian lingkungan terutama pengurangan polusi udara, penjagaan lingkungan, dan pengelolaan sampah. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

2.1.1.1.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perkembangan IKLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu Tahun 2018-2022 cenderung meningkat serta melampaui target yang ditetapkan. Secara khusus untuk capaian IKLH Tahun 2022 meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 dan berada dalam kategori sedang. Peningkatan IKLH Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif baik melalui kegiatan fisik (penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, rehabilitasi lahan kritis, dan

sebagainya) maupun kegiatan non fisik (pengawasan, pembinaan, penyusunan kebijakan, dan sebagainya) dengan turut melibatkan para *stakeholder* terkait. Beberapa upaya perlindungan dan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah percepatan pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto, penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional, rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan, *action learning* Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan Perlindungan Mata Air (PERMATA), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang lingkungan hidup baik di lingkup internal maupun eksternal melalui penyelenggaraan Program Desa BERSERI (Bersih dan Lestari), *adiwiyata*, *eco pesantren*, *kalpataru*, dan sebagainya.

Di sisi lain capaian IKLH Provinsi Jawa Timur masih harus terus ditingkatkan karena untuk kondisi saat ini masih berada di bawah capaian IKLH Nasional, yaitu 72,42 dan sudah berada pada kategori baik. IKLH Provinsi Jawa Timur perlu ditingkatkan khususnya pada capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih berada dalam kategori kurang dan cenderung memiliki banyak tekanan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk di Jawa Timur.

Tabel 2.20 Klasifikasi Kriteria IKLH

Klasifikasi Lama (Tahun 2017-2020)		Klasifikasi Baru (Tahun 2021)	
Kriteria	Skor	Kriteria	Skor
Sangat Baik	IKLH > 80	Sangat Baik	IKLH ≥ 90
Baik	70 < IKLH ≤ 80	Baik	70 < IKLH < 90
Cukup	60 < IKLH ≤ 70	Sedang	50 < IKLH < 70
Kurang	50 < IKLH ≤ 60	Buruk	25 < IKLH < 50
Sangat Kurang	40 < IKLH ≤ 50	Sangat Buruk	IKLH < 25
Waspada	IKLH ≤ 40		

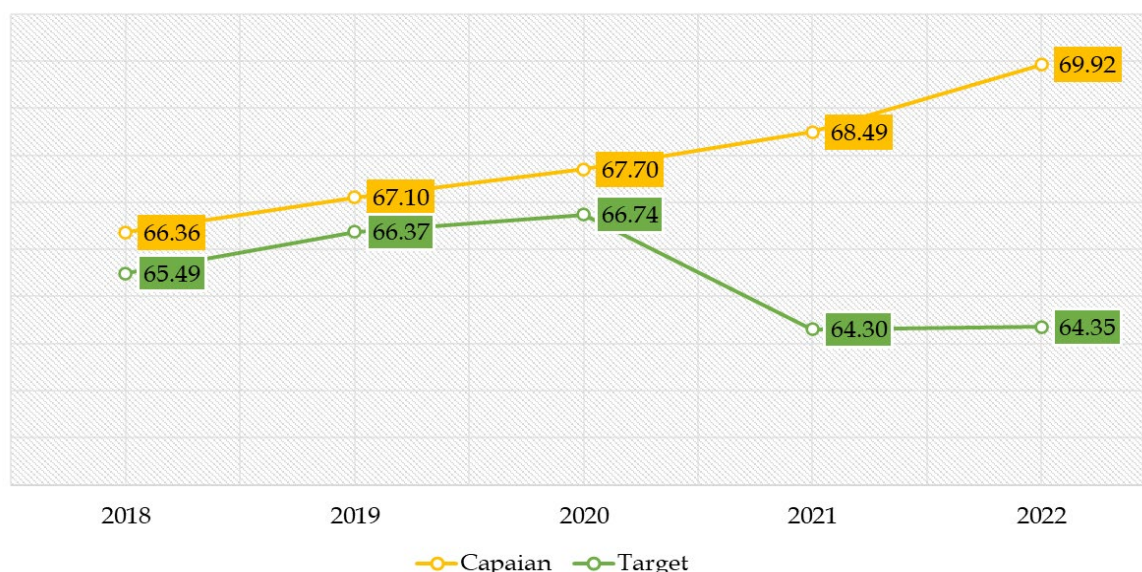
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.21 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur	66,36	67,10	67,70	68,49	69,92
Nasional	65,14	66,55	70,27	71,41	72,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.9 Target dan Capaian IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, diolah

Tabel 2.22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	73,31	73,47	72,62	71,68	64,96
2	Kab. Ponorogo	72,48	70,54	78,50	69,48	70,54
3	Kab. Trenggalek	64,30	64,92	67,69	67,82	74,27
4	Kab. Tulungagung	73,48	71,23	63,68	63,68	64,85
5	Kab. Blitar	69,50	69,90	66,74	67,17	66,8
6	Kab. Kediri	-	64,27	63,10	55,44	64,79
7	Kab. Malang	70,60	80,65	78,94	60,78	67,52
8	Kab. Lumajang	76,78	77,55	74,84	63,21	64,65
9	Kab. Jember	69,37	70,42	75,00	63,12	69,35
10	Kab. Banyuwangi	67,96	67,23	68,66	70,61	71,2
11	Kab. Bondowoso	-	64,63	71,06	66,39	68,97
12	Kab. Situbondo	-	72,53	72,05	74,49	73,02
13	Kab. Probolinggo	69,42	62,16	63,40	64,17	60,38
14	Kab. Pasuruan	57,10	57,37	62,54	63,13	59,78
15	Kab. Sidoarjo	55,10	61,03	65,30	59,81	57,54
16	Kab. Mojokerto	62,37	61,67	65,82	69,75	69,92
17	Kab. Jombang	73,57	65,44	72,09	64,03	61,73
18	Kab. Nganjuk	66,50	71,98	62,28	64,28	67,37
19	Kab. Madiun	77,91	75,98	76,58	66,69	70,45
20	Kab. Magetan	66,36	67,54	82,30	62,04	64,78
21	Kab. Ngawi	-	73,09	68,01	65,44	65,90
22	Kab. Bojonegoro	64,89	69,01	72,38	64,95	68,25
23	Kab. Tuban	-	67,55	68,76	66,43	65,53
24	Kab. Lamongan	66,20	67,92	72,67	64,92	64,70
25	Kab. Gresik	-	73,99	74,25	53,40	58,15
26	Kab. Bangkalan	-	64,39	66,09	55,36	56,84
27	Kab. Sampang	-	73,70	72,53	62,28	60,31
28	Kab. Pamekasan	-	59,74	61,79	60,55	64,04
29	Kab. Sumenep	74,74	76,55	73,94	65,73	65,20
30	Kota Kediri	58,29	63,24	63,57	61,06	63,59
31	Kota Blitar	-	63,12	66,52	61,75	64,15
32	Kota Malang	-	65,27	75,98	62,99	57,04

2.1.1.1.12 Indeks Risiko Bencana (IRB)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya

- Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.
- Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
- Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Tabel 2.23 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana	152,40	137,88	126,42	117,26	108,69

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

1. Tinggi : >144
2. Sedang : 13 – 144
3. Rendah : < 13

Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2022 sebesar 108,69 dan masuk dalam kelas sedang. Mulai tahun 2019 Indeks Risiko Bencana dihitung di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya hanya sebagian dari Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai sampel. Capaian Indeks Risiko Bencana terus menurun hingga Tahun 2022 menjadi 108,69 yang berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin serius dalam menanggulangi bencana. Hal ini dikarenakan indeks kapasitas daerah mengalami kenaikan, dimana kenaikan ini dikarenakan 7 prioritas penilaian kapasitas daerah sudah terpenuhi di Tahun 2022.

Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan di semua Kabupaten/Kota di Jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa semua Kabupaten/Kota memperbaiki kesiapan daerah apabila terjadi bencana. Seluruh Kabupaten/Kota memiliki nilai Indeks Risiko Bencana kelas sedang sama halnya dengan Jawa Timur. Hal tersebut juga menunjukkan

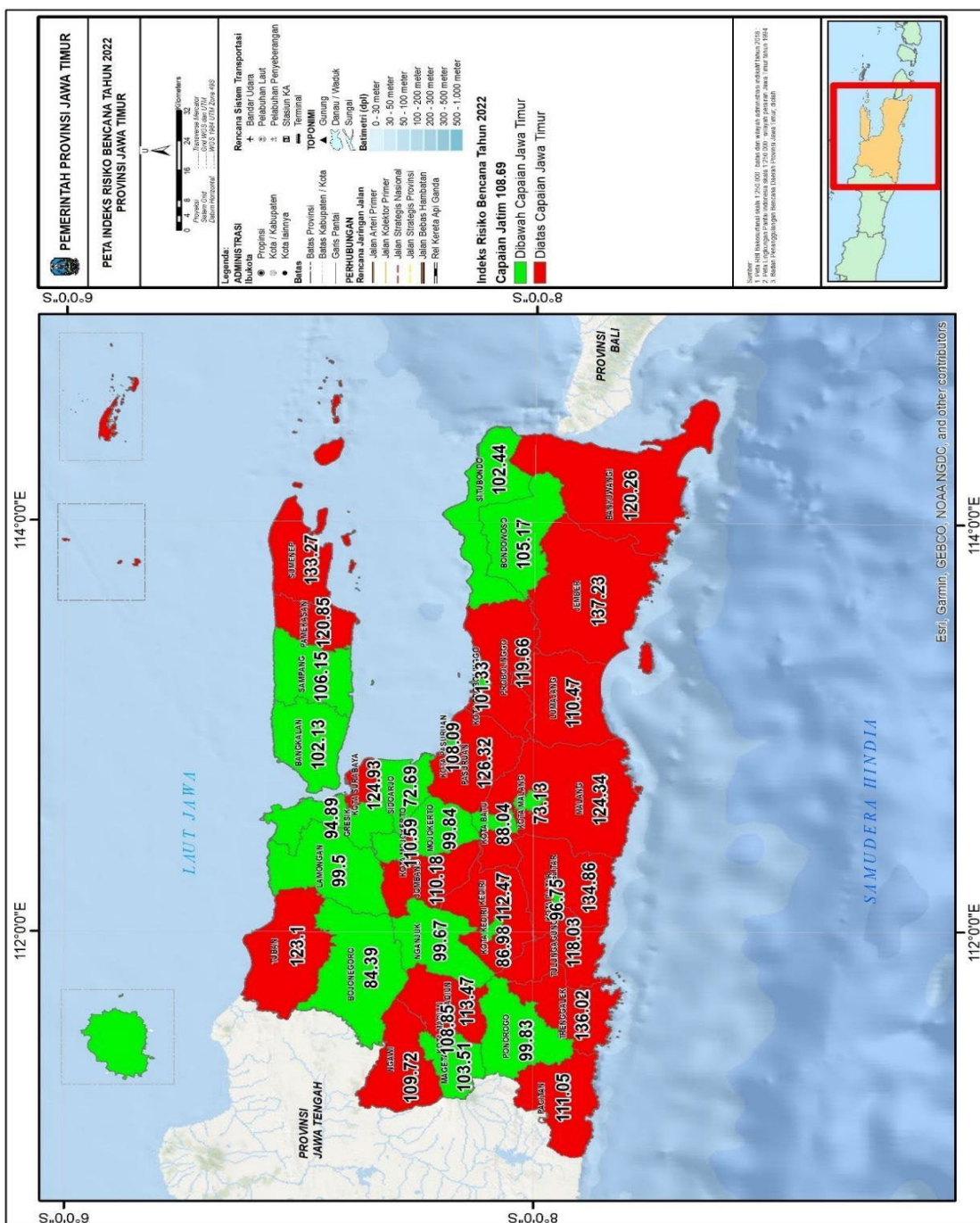
peningkatan karena pada tahun 2021 masih terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki nilai Indeks Risiko Bencana tinggi.

Tabel 2.24 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur

No	Kab/Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pacitan	126,21	123,14	121,27	116,39	111,05
2	Kab. Ponorogo	140,77	127,14	115,60	106,50	99,83
3	Kab. Trenggalek	170,91	151,25	151,25	151,25	136,02
4	Kab. Tulungagung	169,75	151,42	137,68	126,28	118,03
5	Kab. Blitar	198,06	178,37	160,26	146,14	134,86
6	Kab. Kediri	163,09	144,43	131,50	121,46	112,47
7	Kab. Malang	142,10	137,09	133,20	128,84	124,34
8	Kab. Lumajang	129,74	123,84	117,76	113,78	110,47
9	Kab. Jember	198,80	182,18	158,19	146,30	137,23
10	Kab. Banyuwangi	168,29	151,91	137,92	127,80	120,26
11	Kab. Bondowoso	166,00	150,96	128,75	112,39	105,17
12	Kab. Situbondo	168,40	149,35	128,39	113,48	102,44
13	Kab. Probolinggo	162,29	156,70	141,16	128,87	119,66
14	Kab. Pasuruan	214,00	180,34	156,26	139,18	126,32
15	Kab. Sidoarjo	85,29	81,62	79,15	75,95	72,69
16	Kab. Mojokerto	163,60	140,94	123,74	110,06	99,84
17	Kab. Jombang	154,80	138,40	128,55	119,16	110,18
18	Kab. Nganjuk	152,80	132,87	118,22	107,88	99,67
19	Kab. Madiun	155,20	134,81	130,18	121,35	113,47
20	Kab. Magetan	152,80	135,80	131,26	115,72	103,51
21	Kab. Ngawi	143,20	131,06	119,98	119,98	109,72
22	Kab. Bojonegoro	96,93	93,63	90,44	87,55	84,39
23	Kab. Tuban	175,20	160,38	145,00	133,04	123,10
24	Kab. Lamongan	139,55	125,33	115,86	107,52	99,50
25	Kab. Gresik	101,35	99,29	99,29	96,50	94,89
26	Kab. Bangkalan	139,01	129,50	118,71	109,55	102,13
27	Kab. Sampang	154,80	140,63	127,19	116,36	106,15
28	Kab. Pamekasan	180,40	172,53	160,19	139,45	120,85
29	Kab. Sumenep	204,80	184,62	160,35	146,19	133,27
30	Kota Kediri	140,80	122,79	109,69	97,63	86,98
31	Kota Blitar	132,00	118,79	106,06	102,65	96,75
32	Kota Malang	113,60	100,77	91,26	82,25	73,13
33	Kota Probolinggo	148,40	129,83	114,16	104,10	101,33
34	Kota Pasuruan	158,40	136,22	123,69	115,23	108,09
35	Kota Mojokerto	142,80	133,95	120,57	120,57	110,59
36	Kota Madiun	136,00	121,28	116,73	116,73	108,85
37	Kota Surabaya	166,80	150,34	150,34	136,36	124,93
38	Kota Batu	134,40	116,06	104,09	95,31	88,04

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.11 Peta Persebaran Indeks Risiko Bencana Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

2.1.2.2.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan indikator yang dihasilkan dari kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Namun, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Dimana angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sehingga lamanya sekolah atau *years of schooling* dari setiap penduduk merupakan sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Tabel 2.25 Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-Rata Lama Sekolah	7,39	7,59	7,78	7,88	8,03

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka rata-rata lama sekolah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, artinya kualitas Sumber Daya Manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Rata-Rata Lama Sekolah Jawa Timur tahun 2022 mencapai 8,03 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

2.1.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Tabel 2.26 Harapan Lama Sekolah Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah	13,10	13,16	13,19	13,36	13,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Harapan lama sekolah di Jawa Timur meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Jawa Timur telah mencapai 13,37 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

2.1.2.2.2 Kesehatan

2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,97	71,18	71,30	71,38	71,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama lima tahun terakhir, Jawa Timur telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 0,58 tahun, dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2021 di Jawa Timur diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 71,38 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya, serta

menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Jawa Timur.

2.1.2.2.2.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Jawa Timur pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu *stunting*. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel 2.28 Persentase Balita Gizi Buruk di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Balita Gizi Buruk	0,77	1,10	0,92	1,5	1,2

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Kasus gizi buruk di Jawa Timur tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, tercatat sebanyak 22.348 kasus atau sebesar 1,2 persen dari total 1.819.548 balita yang ditimbang dan di entry pada aplikasi sigizi terpadu. Adapun balita yang ditimbang di tahun 2021 hanya sebesar 1.462.285.

2.1.2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.2.3.1 Seni Budaya

Kesenian adalah bagian dari budaya serta merupakan sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain, misalnya sebagai pemelihara dan melestarikan

keragaman yang ada di sebuah daerah. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan, yang merupakan kegiatan dimana dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam sistem kepercayaan, sistem sosial, maupun sebagai sarana hiburan.

Memperhatikan perkembangan kebudayaan di Jawa Timur, selama kurun waktu 2018 hingga 2022 beberapa indikator mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2021. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19, sebagai contoh adalah perlombaan kesenian di Daerah dan Nasional ditiadakan. Namun seiring meredahnya kasus covid-19, perkembangan kebudayaan di Jawa Timur kembali mengalami kenaikan.

Tabel 2.29 Perkembangan Kebudayaan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah grup kesenian	5.695	4.136	4.136	1.199	4.134
Jumlah budaya Lokal	-	4.219	4.219	407	1.395
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	324	356	364	4	103
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1.362	1.532	1.532	178	178
Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10.804	11.396	11.409	11.425	11.410
Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional	22	37	1	9	7

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.3.2 Olahraga

2.1.2.2.3.2.1 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar

Sentra olahraga pelajar dilakukan dengan mengoptimalkan pembibitan dan pembinaan anak-anak berbakat olahraga melalui rekrutmen atlet secara transparan dan benar untuk selanjutnya mengikuti proses pembinaan dalam wadah Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) dan Klub Olahraga di Jawa Timur, yang tersebar di berbagai tempat di Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Tabel 2.30 Jumlah Sentra Olahraga Pelajar

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sentra olahraga Pelajar	28	28	28	47	42

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Jumlah sentra olahraga pelajar pada indikator ini terdiri dari Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar (SPOP), Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar

Khusus (SPOPK), Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), dan klub olahraga prestasi yang berada di bawah naungan Provinsi. Pada tahun 2015 – 2016, Jumlah Sentra olahraga pelajar berjumlah 13 mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 28 unit karena terdapat klub olahraga prestasi sejumlah 15 klub yang masuk dalam perhitungan sentra olahraga pelajar dan sampai tahun 2020. Pada Tahun 2021 Pemerintah membentuk sentra pembinaan olahraga pelajar dan sentra pembinaan olahraga pelajar khusus sejumlah 32 sentra dan telah diresmikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur pada bulan September 2021. Total sentra pembinaan olahraga pelajar di Jawa Timur sampai dengan Tahun 2021 sejumlah 47 sentra pembinaan olahraga pelajar.

2.1.2.2.3.2.2 Fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung olahraga aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Prasarana dan sarana olahraga sangat penting keberadaannya untuk menunjang pembinaan dan pengembangan olahraga, khususnya olahraga prestasi. Prasarana dan sarana olahraga yang diperlukan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga sebaiknya memenuhi standar nasional atau bahkan Internasional.

Provinsi Jawa Timur sebagai barometer perkembangan prestasi atlet secara nasional tidak terlepas dari permasalahan minimnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, khususnya olahraga prestasi. Berdasarkan data pada tabel diatas, pada periode 2015-2022 tercatat hanya memiliki 15 (lima belas) fasilitas atau sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur. Sampai saat ini fasilitas atau sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dimanfaatkan oleh atlet-atlet Jawa Timur sebagai tempat pemusatan latihan daerah untuk persiapan berkompetisi pada kejuaraan-kejuaraan di tingkat nasional dan internasional.

Tabel 2.31 Kondisi capaian ketersediaan fasilitas olahraga/lapangan olahraga/gedung olahraga aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jenis Olahraga	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
GOR Bulu Tangkis Sudirman	1	1	1	1	1
GOR Tennis Meja	1	1	1	1	1
Dojo Judo	1	1	1	1	1
Dojo Karate	1	1	1	1	1
Lapangan Atletik	1	1	1	1	1
Bangunan Panjat Tebing	1	1	1	1	1
Gedung Indoor Panahan	1	1	1	1	1

Jenis Olahraga	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lapangan Panahan <i>Out Door</i>	1	1	1	1	1
Gedung Gulat	1	1	1	1	1
Gedung Angkat Besi Dan Angkat Berat	1	1	1	1	1
Bangunan Kolam Renang	1	1	1	1	1
GOR Basket	1	1	1	1	1
Asrama Atlet	1	1	1	1	1
Gedung Kwarda Pramuka	1	1	1	1	1
Gedung Senam Nusantara	1	1	1	1	1
Total	15	15	15	15	15

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

➤ **Kesimpulan Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dari Indikator Kinerja Utama. Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 cukup baik. Berdasarkan target yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama Jawa Timur, diantaranya: 5 (lima) IKU melebihi target; 4 (empat) IKU mencapai target; dan 2 (dua) IKU belum mencapai target yaitu persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Namun angka kemiskinan mencapai target jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024. Tidak tercapainya angka kemiskinan akibat dampak dari kenaikan BBM yang terjadi di awal bulan September tahun 2022 sehingga menyebabkan inflasi, kondisi ini tidak hanya dialami oleh Provinsi Jawa Timur tetapi juga dirasakan oleh Provinsi lain di Pulau Jawa. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur belum mencapai target namun capaian TPT Jawa Timur lebih baik dibandingkan dengan Nasional dan terbaik kedua jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa, serta tingkat pengangguran SMK mengalami penurunan yang signifikan.

2.1.1 Aspek Pelayanan Umum

2.1.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.2.1.1 Pendidikan

2.1.2.1.1.1 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan

rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2.32 Indeks Pendidikan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks pendidikan	0,610	0,619	0,626	0,634	0,639

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2018 indeks pendidikan mencapai 0,610 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,639. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Jawa Timur sehingga berdampak produktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

2.1.2.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 – 18 Tahun

Salah satu pengukuran daya serap sekolah terhadap penduduk yang sekolah dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). Tingkat partisipasi sekolah penduduk pada suatu wilayah menunjukkan terbukanya peluang untuk mengakses pendidikan secara umum pada suatu wilayah tersebut. APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS pada suatu kelompok usia di wilayah tertentu menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar bagi penduduk di wilayah tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan menurut jenjang tertentu.

Tabel 2.33 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16 – 18 tahun	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur ⁽¹⁾	74,49	75,71	79,76	74,14	73,40
Nasional ⁽²⁾	71,99	72,36	72,72	73,09	73,15

Sumber: ⁽¹⁾ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
⁽²⁾ BPS RI

Selama periode 2018-2021, Perkembangan APS usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur menunjukkan peningkatan dan berada di atas capaian Nasional. Pada tahun 2018 capaiannya sebesar 74,49 persen, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 79,76 persen. Dan pada tahun 2022 turun menjadi 73,40, namun capaian tersebut masih berada diatas capaian APS Nasional sebesar 73,15. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi semakin besar, karena jenjang pendidikan menengah pada umumnya disyaratkan pada dunia kerja formal.

2.1.2.1.1.3 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupun alasan lain. Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Pada periode 2018-2021 di Jawa Timur Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA/MA/SMK menunjukkan kecenderungan menurun, namun di tahun 2019 menjadi 1,53 dikarenakan ada siswa yang pindah sekolah. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah tersebut. Diantaranya, meringankan pembiayaan. Kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) diharapkan bisa meringankan biaya siswa yang kurang mampu sehingga bisa kembali sekolah.

Tabel 2.34 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	0,50	1,53	0,51	0,49	0,46

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.1.1.4 Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Tabel 2.35 Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kelulusan sekolah SMA/MA/SMK	98,73	98,54	99,65	99,68	99,71

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam lima tahun terakhir (2018-2022) terus meningkat.. Sedangkan kondisi 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 98,54. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 99,65 persen. Tahun 2021 yang juga mengalami peningkatan 99,68 persen. Dan terus mengalami peningkatan angka kelulusan sekolah hingga mencapai 99,71 persen di tahun 2022..

2.1.2.1.1.5 Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PK-LK berkualifikasi minimal S1/D4

Hal lain yang turut menentukan capaian kualitas output pendidikan adalah faktor Guru, tidak hanya dari pemenuhan aspek kuantitas saja, namun juga kualitas dari seorang Guru menjadi tolak ukur keberhasilan pendidikan. Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seorang guru, maka akan berpengaruh pada kualitasnya dalam memfasilitasi proses belajar-mengajar murid di kelas. Diharapkan semakin tinggi pendidikan seorang guru maka akan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, bidang pendidikan juga terkena imbasnya.

Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun 2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP, SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun 2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang berkualifikasi minimal D4/S1.

Tabel 2.36 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4	98,40	97,42	99,9 8	99,8 0	97,2 8

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2019, Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 di Jawa Timur sebesar 97,42 persen. Pada tahun 2022 capaian Persentase Guru Jenjang SMA, SMK, Dan PK-LK Berkualifikasi Minimal S1/D4 mengalami penurunan menjadi 97,28 persen dikarenakan ada guru yang sudah purnah tugas.

2.1.2.1.1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/Sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang peruntukannya. Sehingga dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur

Angka Partisipasi Murni (APM) – SMA/Sederajat	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur ⁽¹⁾	69,92	61,77	62,24	62,63	62,10
Nasional ⁽²⁾	63,70	60,84	61,25	61,65	61,97

Sumber: ⁽¹⁾ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
⁽²⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Secara umum dalam rentang tahun 2018-2021, Perkembangan APM SMA/Sederajat di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan dan berada di atas capaian Nasional. Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat.

2.1.2.1.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/ Sederajat di Jawa Timur

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ Sederajat	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Timur ⁽¹⁾	84,94	90,78	93,75	97,48	99,82
Nasional ⁽²⁾	86,94	88,55	92,92	95,53	97,52

Sumber: ⁽¹⁾ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
⁽²⁾ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Pada tahun 2018-2022, perkembangan APK SMA/ Sederajat di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan dan berada di atas capaian Nasional, yaitu dari 84,94 persen pada tahun 2018 menjadi 99,82 persen tahun 2022. Kondisi ini mencerminkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta daya tampung satuan pendidikan di Jawa Timur semakin membaik, yang pada akhirnya dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik serta intelektual.

2.1.2.1.1.8 Rasio SMK terhadap SMA

Salah satu harapan masyarakat adalah peluang kerja yang diawali dengan pendidikan kejuruan atau SMK yang lulusannya siap kerja. Dari 3000 lebih sekolah menengah, proporsi murid SMK terhadap SMA saat ini mencapai sekitar 59%:41%, dan Pemprov menargetkan menjadi 70%:30%.

Dari pengamatan langsung di lapangan beberapa SMK terutama yang negeri biasanya lebih diminati lulusannya oleh perusahaan dan sudah "di-indent" sejak sebelum lulus, sedangkan banyak SMK yang kesulitan membangun relasi dengan perusahaan. Di tahun 2017 ada hampir 300 ribu murid yang tersebar di hampir 300 SMK negeri, dan sekitar 400 ribu murid yang tersebar di sekitar 1700 SMK swasta.

Pada tabel dibawah menunjukkan bahwa masih perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMU agar mencapai target 70:30 untuk meningkatkan rasio SMK terhadap SMA upaya yang dilakukan adalah penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan jumlah siswa SMK, serta Pemerintah Jawa Timur memperkuat pendidikan vokasional melalui program dual track tetap menjadi andalan dan sangat membantu dalam meningkatkan dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan berdaya saing. Dual track strategy diterapkan pada jalur non formal (SMK Mini, BLK dan Madin, red) serta formal seperti SMK yang di link and match kan dengan industri dan perguruan tinggi, serta filial antara SMK dengan PTN.

Tabel 2.39 Rasio SMK terhadap SMA

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
SMK :						
- Jumlah sekolah	Unit	2.037	2.037	2.134	2.137	2,150
- Jumlah Murid	Orang	709.306	745.426	776.898	773.389	763,454
- Jumlah Guru	Orang	55.524	43.511	42.005	45.875	47,661
- Jumlah Kelas	Unit	25.860	26.585	27.175	27.298	1.29
SMA						
- Jumlah sekolah	Unit	1.533	1.546	1.534	1.511	1,513
- Jumlah Murid	Orang	512.298	533.694	535.883	530.937	529,780
- Jumlah Guru	Orang	40.984	32.431	30.374	32.392	34,205
- Jumlah Kelas	Unit	17.875	17.438	17.887	17.887	1.30
Rasio murid SMK dibanding SMA	Prosen	58,06:41,94	58,28 :41,72	59,18:40,82	59,29 :40,71	1:3601:346

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.1.1.9 Jumlah Sekolah yang Sudah Bersertifikasi ISO

Pemerintah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui standar nasional pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tuntutan dari perkembangan pasar bebas. Usaha yang dilakukan sekolah adalah selain membenahi pelaksanaan sesuai standar nasional, sekolah juga melakukan pembenahan manajemen mutu sekolah. Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan oleh sekolah-sekolah sekarang adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

**Tabel 2.40 Jumlah SMK berdasarkan status standarisasi ISO TA
2022/2023**

Sertifikasi	SMK Negeri	SMK Swasta	Total
9001 2000	15	48	63
9001 2008	139	192	331
Proses sertifikasi	12	104	116
Belum sertifikasi	130	1.392	1.522
TOTAL	296	1.736	2.032

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun anggaran 2018/2019 tercatat SMK yang telah mempunyai sertifikasi 9001 2000 dan 9001 2008 adalah 394 lembaga dari 2.032 lembaga SMK. Sedangkan yang belum tersertifikasi sebanyak 1.522 lembaga. Diharapkan setiap tahun lembaga yang tersertifikasi tiap tahunnya bertambah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terkait dengan sertifikasi masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi. Dari segi jurusan, juga ada ketidakcocokan dengan arah industri prioritas diantaranya kemaritiman, pariwisata dan teknologi pangan. Sekitar 130 ribu murid mengambil jurusan terkait otomotif, dan sekitar 160 ribu murid mengambil jurusan terkait teknologi informasi.

2.1.2.1.1.10 Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang Mendapat Layanan Pendidikan

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus bukan hanya meliputi penyandang cacat yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa atau Pendidikan Khusus (PK). Pendidikan dengan cara khusus atau dinamakan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) juga dibutuhkan untuk melayani anak-anak cerdas istimewa/berbakat istimewa.

Tabel 2.41 Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) Yang Mendapat Layanan Pendidikan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ABK yang mendapat layanan pendidikan	28,08	29,16	30,46	30,20	30,82

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2018-2022, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Dengan kondisi ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus. Perhatian khusus melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada anak terus dilakukan, terutama bagi penyandang disabilitas/anak berkebutuhan khusus untuk membangun masa depan mereka, demi peningkatan kualitas kesejahteraannya. Sejalan dengan hal tersebut berbagai program dalam upaya penanggulangan masalah anak terus dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur agar anak-anak Jawa Timur dapat tumbuh berkembang secara wajar dan optimal.

2.1.2.1.2 Kesehatan

2.1.2.1.2.1 Indeks Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak cukup, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 2.42 Indeks Kesehatan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kesehatan	0,784	0,787	0,789	0,791	0,796

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Indeks Kesehatan di Jawa Timur tahun 2017-2021 mengalami peningkatan meskipun hanya meningkat sebesar 0,09 dari tahun 2017 ke 2021. Perkembangan indeks kesehatan mengikuti arus perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) yang kemudian diformulasikan dengan standar usia UNDP. Untuk meningkatkan indeks komponen kesehatan, Pemerintah

Jawa Timur perlu meningkatkan kebijakan program kesehatan. Salah satunya yaitu program pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil. Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju. Selain upaya diatas, pada layanan kesehatan rujukan, RSUD Dr. Soetomo meskipun telah memiliki pelayanan berstandar internasional namun masih dibutuhkan peningkatan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan Rumah Sakit di luar negeri.

Sementara terkait target pada indeks kesehatan pada Tahun 2023 dan 2024 perlu adanya perubahan pada target karena diasumsikan pada target yang di tuangkan pada Tahun 2023 dan 2024 target tersebut sudah tercapai di Tahun 2022.

2.1.2.1.2.2 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Langkah kegiatan Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah, Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar dan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan. Mekanisme Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, melalui edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana serta Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi : a) mendapatkan layanan medis dasar dan

layanan rujukan bila diperlukan; b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c) mendapatkan layanan gizi darurat; d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat; e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; dan f) mendapatkan penyuluhan kesehatan.

Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi pada tahun 2020 di Jawa Timur sebesar 100 persen, dimana pada tahun 2020 muncul wabah pandemi Covid-19 yang disebut sebagai bencana Nasional.

Tabel 2.43 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.1.2.3 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut : a) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi; b) KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi; dan c) Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/kota terdampak.

Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi: a) Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui

penyelidikan epidemiologis; b) Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan; c) Penyuluhan; d) Pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit; e) Isolasi atau karantina untuk mencegah penularan dari dan ke suatu wilayah lainnya; f) Penanganan jenazah, jika diperlukan; g) Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan; h) Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang meliputi : 1) Kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi). 2) Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi; 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB; 4) Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB.

Covid-19 juga termasuk salah satu kejadian luar biasa di Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi kejadian luar biasa di Jawa Timur tahun 2021 sebesar 100 persen.

Tabel 2.44 Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa Timur

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.1.2.4 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi

(AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Tingginya angka kematian bayi dipicu karena berat badan bayi lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram.

Tabel 2.45 Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Angka Kematian Bayi (AKB)	22,83	22,46	23	23	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Ket. *) : Data sudah tidak dirilis oleh BPS

Di Jawa Timur, Perkembangan AKB tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan Dikarenakan Pelaporan kematian bayi dari kab kota sudah lebih baik tidak hanya kematian bayi yang meninggal di fasilitas pelayanan kesehatan, bayi yang meninggal di non fasilitas pelayanan kesehatan sudah dapat dilaporkan serta selama pandemi ibu hamil merasa khawatir dan takut berkunjung ke pusat pelayanan kesehatan karena banyak ibu hamil yang takut terpapar Covid-19. Pada masa pandemi muncul kekhawatiran sulit untuk mendapatkan rumah sakit rujukan persalinan. Berhentinya Posyandu dikhawatirkan menghambat pemantauan tumbuh kembang balita. Maka disamping itu perlunya untuk meningkatkan perlindungan ibu hamil dari Covid-19 dengan cara memberi pelayanan khusus, skrining dan vaksinasi.

2.1.2.1.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi merupakan permasalahan kesehatan di negara-negara berkembang dan merupakan salah satu indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90 persen kematian ibu terjadi di negara berkembang (WHO, 2017). AKI Indonesia masih tinggi, menurut hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari yang tercantum pada TPB Tujuan 3 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada semua usia dan untuk mengurangi AKI secara global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (United Nations, 2015)

Dalam rangka upaya penurunan AKI yang ditujukan untuk negara yang sedang berkembang, disusun suatu gerakan yang dinamakan *Safe Motherhood*. *Safe motherhood* merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar

kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan bayi yang sehat melalui penolong persalinan dengan tenaga kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.46 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu (AKI)	91,45	89,81	98,40	234,70	93

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Timur cenderung fluktuatif, mengalami peningkatan tajam tahun 2020 yaitu menjadi 98,40 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2021 mencapai 89,92 per 100.000 kelahiran hidup tanpa penyebab covid-19 dan jika ditambah dengan penyebab kasus kematian ibu Covid-19 mencapai 234,70 per 100.000 kelahiran hidup per tanggal 12 Mei 2022 berdasarkan sumber data laporan kematian ibu kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kunjungan pemeriksaan kehamilan sehingga penapisan ibu hamil risiko tinggi kurang maksimal, ada beberapa kabupaten/kota jumlah persalinan yang ditolong dukun yang meningkat dari tahun sebelumnya, banyak ibu hamil yang seharusnya dilakukan persalinan di fasyankes rujukan, tapi dilakukan di fasyankes primer karena terbatasnya bed di RS, adanya pandemi covid-19, sehingga penyebab kematian ibu kasus lain-lain (konfirmasi Covid-19) yang memberi kontribusi naiknya jumlah kematian ibu, beberapa kab/kota yang tidak melakukan AMP minimal 1x tiap tribulan karena adanya pandemi Covid-19.

2.1.2.1.2.6 Prevalensi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami

oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita.

Tabel 2.47 Prevalensi *Stunting* di Jawa Timur

Indikator	Menggunakan Riskesdas **)		Menggunakan SSGBI (Studi Status Gizi Balita Indonesia) *)		
	2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi <i>stunting</i>	32,70	26,9	-	23,5	19,2

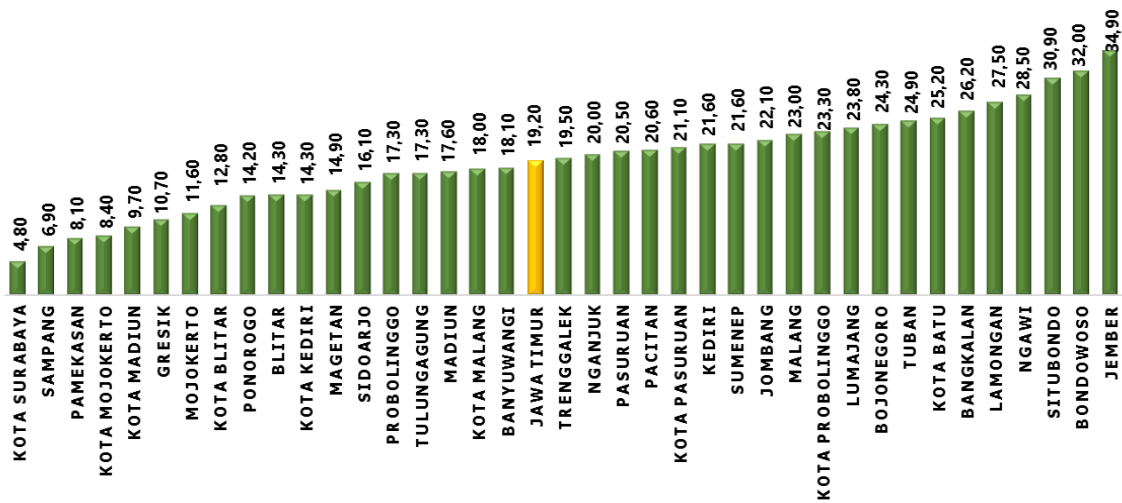
Sumber : *) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

**) Kementerian Kesehatan

Data terkait *stunting* di Indonesia dihasilkan melalui kegiatan Riskesdas, yaitu melalui pengukuran antropometri. Hal yang patut menjadi perhatian adalah Riskesdas tidak dilakukan setiap tahun, melainkan sekali dalam lima tahun. Hal ini menyebabkan evaluasi berbagai program dan kebijakan terkait penanganan *stunting* di Indonesia tidak dapat dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) tidak dilakukan integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) melakukan integrasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021. Melalui integrasi, akan dihasilkan indikator penting yaitu prevalensi *stunting* pada anak bawah lima tahun (balita). Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengukuran (antropometri) berat badan dan panjang/tinggi badan balita serta melakukan wawancara untuk konfirmasi umur, jenis kelamin, kondisi sakit/sehat, oedema dan diare dari balita yang diukur. Pengumpulan data dilakukan setelah pelaksanaan Susenas 2019 yaitu April 2019.

Gambar 2.12 Prevalensi Balita Stunting Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Stunting dipengaruhi oleh faktor multidimensi dan tidak hanya faktor gizi balita, namun juga kondisi ketika masih dalam kandungan. Oleh karena itu, intervensi penanganan *stunting* harus dimulai semenjak janin dalam kandungan hingga anak berumur dua tahun atau biasa dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan. Konvergensi program dan upaya sinergis dari seluruh pemangku kebijakan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan *stunting*.

Permasalahan *Stunting* pada usia dini terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). *Stunting* menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk *stunting* adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Penurunan *stunting* menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan khususnya akses terhadap pangan bergizi (makanan), lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak (pengasuhan), akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan (kesehatan), serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi (lingkungan). Keempat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Intervensi terhadap keempat faktor tersebut diharapkan dapat mencegah masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi.

Penyebab tidak langsung masalah *stunting* dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Selain mengatasi

penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan. Penurunan stunting memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak gagal tumbuh dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Keadaan itu kemudian akan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke.

Disamping berisiko pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, stunting juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif. Gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Stunting dan masalah gizi lain diperkirakan menurunkan produk domestik bruto (PDB) sekitar 3% per tahun (World Bank, 2014). Menurut Data World Bank, PDB Indonesia pada tahun 2020 sebesar Rp.15.434 Triliun, maka kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar Rp.308-463 Triliun (Kemenkeu.go.id).

2.1.2.1.2.7 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Akreditasi Rumah Sakit merupakan suatu pengakuan dari Pemerintah yang diberikan kepada Rumah Sakit yang telah memenuhi standar. Tujuan Akreditasi untuk mencapai sejauh mana Rumah Sakit dapat memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, sehingga peningkatan mutu terhadap pelayanan di Rumah Sakit dapat ditingkatkan, dipertahankan dan dipertanggungjawabkan.

Peningkatan jumlah kunjungan pasien dapat menyebabkan meningkatnya beban kerja staf di Rumah Sakit. Tingginya beban kerja dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan oleh staf Rumah Sakit sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pelayanan untuk pasien, sehingga pasien merasakan kepuasan dalam pelayanan kesehatan adalah pemberdayaan korporasi dalam Tata Kelola Rumah Sakit melalui implementasi *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan konsep untuk meningkatkan kewajaran, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang saat ini dianjurkan pada lembaga usaha

(Trisnantoro, 2005). Diharapkan dengan penggunaan *Corporate Governance* akan ada sistem manajemen yang meningkatkan efisiensi.

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), menjadi Komisi yang mengatur Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia. Dengan Akreditasi merupakan hal yang penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien, karena asuhan pelayanan medis dalam sistem pelayanan dan sasaran keselamatan pasien.

Tabel 2.48 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	83,42	91,15	92,19	88,50	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum selama tahun 2017-2020 persentase Rumah Sakit di Jawa Timur telah menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2021 nilai capaian akreditasi sebesar 88,50% dikarenakan pada tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan (SE Menkes No. HK.02.02/Menkes/455/2021), untuk kegiatan akreditasi RS dilakukan penundaan di masa pandemi COVID-19 sehingga untuk RS yang habis masa akreditasinya dan RS baru belum dapat berproses terakreditasi kembali. Namun, dalam rangka mengoptimalkan kemampuan RS dalam meningkatkan mutu pelayanan di masa pandemi, Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pemantauan ke RS di Jawa Timur melalui *Hospital Readiness*.

2.1.2.1.2.8 Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta

Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh *Mycobacterium leprae* yang bersifat interselular obligat. Kusta secara umum menyerang kulit dan saraf perifer, akan tetapi jika tidak segera diobati akan dapat menyebabkan kecacatan permanen yang akan berujung munculnya stigma dan diskriminasi. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kecacatan permanen, serta perubahan emosi dan psikis penderitanya. RFT (*Release From Treatment*) mengindikasikan keberhasilan pengobatan penderita kusta karena dengan berobat secara dini dan sampai tuntas merupakan upaya dalam memutus mata rantai penularan dan mencegah kecacatan karena kusta. Tantangan dalam keberhasilan pengobatan kusta adalah rasa bosan karena harus minum obat setiap hari selama 6 bulan atau 12 bulan tergantung tipe kustanya dan efek samping dari salah satu obat yang dapat menyebabkan kulit menghitam (tidak permanen).

Tabel 2.49 Persentase RFT Rate Kusta di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Persentase RFT Rate Kusta	90	93,5	92,5	92,6	90,1

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Ket. *) : Angka Sementara

Dalam kurun waktu 2017 – 2021 terjadi perkembangan yang fluktuatif terhadap persentase RFT kusta di Jawa Timur dan sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar $\geq 90\%$.

Sejak tahun 2017 Penyakit Kusta di Jawa Timur sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat karena sudah mencapai eliminasi kusta dengan angka kesakitan tahun 2021 sebesar 0.52 per 10.000 penduduk (target angka kesakitan < 1 per 10.000 penduduk), namun masih ada 5 kabupaten yang belum eliminasi kusta yaitu 4 kabupaten di Madura dan Kabupaten Lumajang.

2.1.2.1.2.9 Persentase penderita *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang mendapatkan Anti Retroviral (ARV)

HIV adalah dari *Human Immunodeficiency Virus* yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditatalaksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. ARV (Anti Retroviral) berguna untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi. ARV bekerja dengan mengontrol proses replikasi dari HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan membuat salinan palsu dari DNA. Hal itu membuat HIV tampak seperti normal dari tubuh yang tidak mengancam, sehingga sistem kekebalan tubuh tidak bisa mendeteksi virus dan keberadaan HIV dalam tubuh tetap aman.

Tabel 2.50 Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV	93	90,8	50	61	80,5

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV di Jawa Timur terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Akan tetapi, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan signifikan yaitu menjadi 50 dan 61. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 sehingga ada kekhawatiran pasien untuk datang ke layanan kesehatan. Selain itu, petugas di layanan kesehatan banyak yang difokuskan untuk pelayanan Covid-19. ARV adalah obat yang dipercaya bisa menurunkan angka kematian dan rasa sakit, meningkatkan kualitas hidup ODHA, dan meningkatkan harapan masyarakat serta menekan penyebaran virus HIV/AIDS. Pemerintah Provinsi Jawa Timur fokus dalam Peningkatan pelaksanaan skrining melalui SPM, skrining pasangan dan anak biologis serta skrining mandiri yang dibantu oleh komunitas kepada populasi yang sangat tersembunyi. Serta Meningkatkan dan mempertahankan ODHIV yang ditemukan mendapatkan pengobatan ARV melalui konseling yang baik di fasyankes dan psiko *support* yang dikerjakan oleh Komunitas untuk menekan angka *lost to follow up* pada 6 bulan pertama dan 12 bulan pertama pengobatan.

2.1.3.1.2.9.1 Tuberculosis (TB)

Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus. Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang menyerang paru-paru. Bakteri TBC membunuh jaringan dari organ yang terinfeksi dan mengancam nyawa jika tidak diterapi dengan tuntas.

Tabel 2.51 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Treatment Succes Rate (TSR) Tuberculosis</i>	90	90	89,3	89,13	89,64
<i>Treatment Coverage Tuberculosis</i>	50	66	44,7	45,1	64

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Ket. *) : Angka Sementara

Persentase keberhasilan pengobatan TBC di Jawa Timur konstan di angka 90 persen selama tahun 2017-2019. Namun tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,17 persen. Angka keberhasilan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni >90%. Ketidak berhasilan pencapaian target tersebut erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya pembatasan gerak kader dalam pemantauan minum obat serta adanya kekhawatiran tertular penyakit paru. Kegiatan untuk menemukan semua kasus

TBC dan pengobatan sampai sembuh perlu didesain ulang dengan memperhatikan kondisi pandemi dan memanfaatkan teknologi. Harapannya eliminasi TBC tahun 2030 dapat tercapai.

Mayoritas penderita TBC adalah usia produktif, sehingga dengan sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit TBC berarti produktivitas mereka bisa meningkat dan mereka bisa hidup secara normal di masyarakat. Maka impact-nya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari TBC dan masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TBC.

Hasil capaian kinerja pemecahan masalah terkait proses penemuan kasus tuberkulosis di Jawa Timur dalam jangka pendek sudah diselesaikan dengan telah tersusunnya panduan Implementasi, terlaksananya sosialisasi dan pelatihan, Implementasi optimalisasi penemuan kasus tuberkulosis berbasis self assessment dan laporan evaluasi pelaksanaan implementasi dengan melibatkan semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Serta Pembuatan branding proyek perubahan yang merupakan upaya untuk mempertajam implementasi program nasional penanganan Tuberkulosis di Indonesia yaitu "TOSS TBC DENGAN PRESTASI" = Temukan Obati Sampai Sembuh dengan Periksa Sendiri Tanda Tuberkulosis.

2.1.2.1.2.10 Malaria

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk anopheles. Sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38 kabupaten/ kota sudah mencapai Eliminasi Malaria. Tujuan program pengendalian malaria di Indonesia adalah mencapai Eliminasi Malaria pada tahun 2030, sedangkan di Jawa Timur akan dilaksanakan penilaian eliminasi tingkat provinsi pada tahun 2021 sampai tahun 2019 di Jawa Timur 38 kabupaten/kota sudah mencapai Eliminasi Malaria.

Hasil surveilans rutin malaria tahun 2020 menginformasikan terdapat penderita malaria sebanyak 299 penderita kasus malaria import dan tidak ditemukan kasus malaria indigeneous (setempat) selama tahun 2020. Dan untuk kematian akibat malaria sebanyak 2 penderita terdapat di Kota Malang dan Kab. Jember.

Tabel 2.52 Indikator Kinerja terkait Malaria di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	37	38	38	38	38
Annual Parasite Incidence (API) Malaria (permil)	0,012	0,02	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Capaian indikator kinerja selanjutnya yaitu Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini *Annual Parasite Incidence* (API) malaria merupakan angka kesakitan per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun atau indikator dalam menentukan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah. Angka *Annual Parasite Incidence* (API) malaria digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan, penemuan dini dan pengobatan tepat, adanya resistensi terhadap obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk. Pemantauan bertujuan untuk memetakan endemisitas/tingkat penularan malaria di suatu daerah sehingga intervensi pencegahan dan pengendalian kejadian malaria dapat ditentukan secara efektif dan efisien menuju eliminasi malaria.

2.1.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.2.1.3.1 Indeks Konektivitas

Hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola jaringan transportasi, pendukung kekuatan dan intensitas interaksi antarwilayah adalah kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara, maupun laut, tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi manusia, barang, dan jasa antarwilayah. Tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi.

Tabel 2.53 Indeks Konektivitas Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Konektivitas	0,686	0,713	0,758	0,707	0,824

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Untuk mengukur kinerja jalan antarwilayah di Jawa Timur disusun parameter berupa Indeks konektivitas, parameter ini merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur, dimana capaiannya pada tahun 2018 sebesar 0,686, tahun 2019 sebesar 0,713, tahun 2020 sebesar 0,758, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,707 karena adanya rencana program yang teralokasi tertunda karena *re-focusing* anggaran. Indeks konektivitas ini didukung oleh variabel Tingkat Pelayanan Jalan (*Level of Services*), jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan kondisi kemantapan jalan, yang masing-masing variabel mempunyai tingkat dukungan yang berbeda tetapi memberikan pengaruh yang kuat sehingga semakin tinggi nilai masing-masing variabel akan semakin tinggi nilai indeks konektivitas.

Sehubungan indikator Tingkat Pelayanan Jalan (*Level of Services*) belum dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur maka untuk selanjutnya akan dilakukan perubahan indikator yaitu Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75, dimana tingkat pelayanan ini berasal dari rasio volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan. Perubahan variabel pendukung ini akan mempengaruhi target indikator Indeks konektivitas pada periode berikutnya. Capaian Indeks Konektivitas tahun 2022 adalah sebesar 0,824.

2.1.2.1.3.2 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan

sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR No: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupun kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km.

Capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap antara tahun 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan. Sedangkan pada 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 92,10 persen di tahun 2020, 89,61 persen di tahun 2021 dan 89,10 persen di tahun 2022. Penurunan tersebut dikarenakan degradasi jalan yang tidak sebanding dengan tingkat penanganan, hal tersebut disebabkan adanya re-focusing anggaran untuk Pandemi Covid-19 serta kerusakan jalan akibat perubahan cuaca ekstrim.

Tabel 2.54 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	91,08	92,35	92,10	89,61	89,10

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global di Jawa Timur, antara lain meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.1.3.3 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan sebagai berikut:

- Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
- Menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

Tabel 2.55 Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan	60,02	62,32	62,55	62,55	62,57

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam 3 (tiga) tahun antara tahun 2018 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan. Capaian pada tahun tahun 2018 adalah sebesar 60,02 persen dan pada tahun 2020 adalah sebesar 62,55 persen. Peningkatan capaian sasaran tersebut merupakan hasil pelaksanaan dari kegiatan rekonstruksi, peningkatan struktur dan kapasitas jalan. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tiap daerah serta mengurangi ketimpangan wilayah. Sedangkan capaian pada tahun 2021 sebesar 62,55%, tidak mengalami perubahan atau tetap jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan capaian menjadi 62,57% dengan adanya pelaksanaan kegiatan pelebaran jalan menuju standar dan rekonstruksi jalan di UPT PJJ Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.

2.1.2.1.3.4 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)

Level of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kondisi operasional dalam arus lalu-

lintas dan penilaiannya oleh pemakai jalan. LOS sendiri terdiri dari 6 tingkatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

Tabel 2.56 Karakteristik LOS

Tingkat Layanan (LOS)	Karakteristik	Batas lingkup V/C
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,0 – 0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21 – 0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 – 0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, Q/C masih dapat ditolerir	0,75 – 0,84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas arus tidak stabil, terkadang berhenti	0,85 – 1,00
F	Arus yang dipaksakan/macet, kecepatan rendah, V diatas kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1,00

Sumber : Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997

Indikator persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan *Level of Service* (LoS) Minimal B diperoleh dari perbandingan antara Jalan Provinsi yang memiliki tingkat LoS minimal B atau memiliki nilai V/C kurang dari atau sama dengan 0,44 dan Jalan Provinsi yang memiliki nilai V/C lebih dari atau sama dengan 0,45.

Tabel 2.57 Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jalan Provinsi yang Memenuhi Tingkat Pelayanan <i>Level of Service</i> (LoS) Minimal B	23,49	31,82	54,11	32,17	-
Tingkat Pelayanan Jalan (RVK)	-	-	-	89,51	84 ,66

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa capaian persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan *Level of Service* (LoS) Minimal B meningkatkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Sedangkan capaian persentase jalan provinsi yang memenuhi tingkat pelayanan

Level of Service (LoS) Minimal B pada Tahun 2021 sebesar 32,17 persen, menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan aktivitas perekonomian mulai pulih sehingga lalu lintas harian rata-rata meningkat.

Mengingat bahwa variabel Tingkat Pelayanan Jalan (*Level of Services*) tidak bisa mewakili penilaian tingkat kinerja jalan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 19 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan disebutkan bahwa pedoman tingkat pelayanan jalan adalah rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (selanjutnya disebut RVK) dan ditetapkan sebagai berikut:

- a. RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan lima); dan
- b. RVK untuk jalan lokal dan lingkungan $\leq 0,9$ (nol koma Sembilan).

Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual tentang kapasitas jalan yang berlaku untuk Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan ditetapkan bahwa :

- a. Tingkat Pelayanan Jalan ditentukan dari nilai volume kapasitas rasio; dan
- b. Jalan sudah harus ditingkatkan kapasitasnya apabila nilai volume kapasitas rasio lebih besar dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima).
- c. Peningkatan kapasitas jalan dalam rangka peningkatan pelayanan dilakukan melalui kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, perbaikan persimpangan, pelebaran samping, pengaturan jalan keluar masuk, dan optimalisasi fungsi jalan;
- d. Umur rencana tingkat pelayanan ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- e. Tingkat pelayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas ditetapkan indikator tingkat pelayanan jalan provinsi menjadi “Persentase Jalan Provinsi yang Tingkat Pelayanannya (Rasio Volume Kapasitas/RVK) dibawah 0,75” (nol koma tujuh puluh lima). Penetapan indikator baru tersebut dipergunakan untuk menghitung kinerja tingkat pelayanan jalan mulai tahun 2021. Realisasi capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 89,51 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 84,66 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya peningkatan kepadatan lalu lintas di sebagian besar ruas jalan provinsi karena secara bertahap status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut pada tahun 2022.

2.1.2.1.3.5 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan pangan di Jawa Timur dan peran Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional maka keberlanjutan jaringan irigasi sesuai dengan fungsinya perlu menjadi perhatian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi ditetapkan bahwa terdapat 176 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur dengan total luas sebesar 164.823 ha yang terbagi menjadi 80 DI dengan luas 118.262 ha yang terletak pada satu wilayah kabupaten/kota dan 96 DI dengan luasan 46.561 ha yang lintas kabupaten/kota. Keseluruhan D.I. tersebut membutuhkan penanganan (operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi) agar jaringan irigasinya terjaga dalam kondisi baik sehingga dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan.

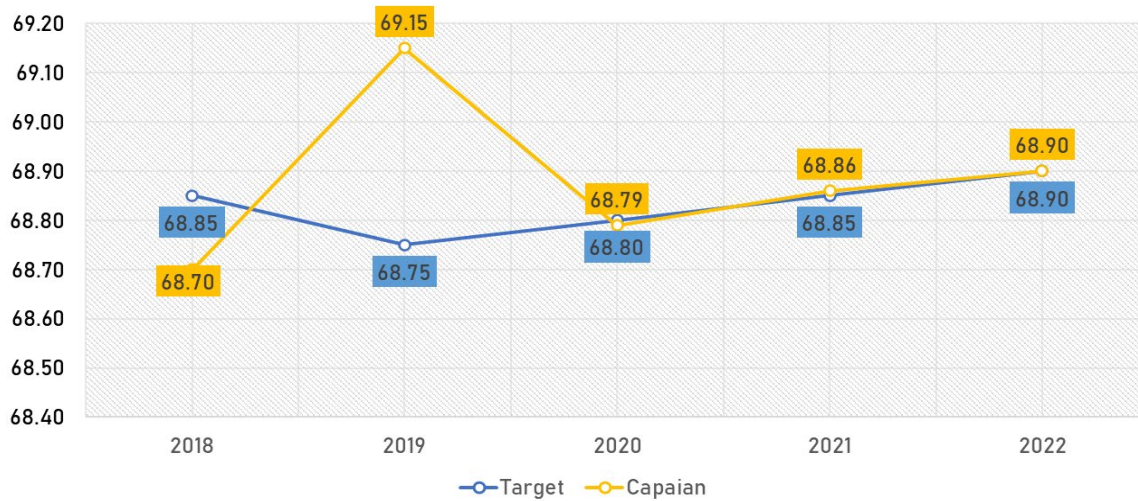
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik di Jawa Timur pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 secara perlahan mulai mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan. Peningkatan capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya upaya penanganan jaringan irigasi yang meliputi rehabilitasi fisik pada 34 (tiga puluh empat) Daerah Irigasi (DI) maupun peningkatan fungsi saluran melalui kegiatan operasi dan normalisasi pada 176 (seratus tujuh puluh enam) DI.

Tabel 2.58 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	68,70	69,15	68,79	68,86	68,90

Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.13 Target dan Capaian Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.2.1.3.6 Bangunan Gedung Negara

Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung sampai dengan tahun 2019 belum semua Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Peraturan daerah Bangunan Gedung antara lain Kota Batu dan Kota Blitar. Selain itu juga belum banyak Kab/kota yang telah memiliki Tenaga Ahli Bangunan Gedung serta Sertifikat Laik Fungsi, kecuali Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kota Malang dan Kota Probolinggo.

Tabel 2.59 Daftar Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Perda tentang Bangunan Gedung, Tenaga Ahli Bangunan Gedung dan Sertifikat Layak Fungsi Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Perda Bangunan Gedung	TA BG	SLF
1	Bangkalan	Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012	0	0
2	Banyuwangi	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014	2	0
3	Blitar	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017	2	4
4	Bojonegoro	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013	3	0
5	Bondowoso	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	1	1
6	Gresik	Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011	3	57
7	Jember	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015	0	0
8	Jombang	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011	3	0
9	Kediri	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011	0	0
10	Lamongan	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007	2	0
11	Lumajang	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016	0	0
12	Madiun	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017	1	0
13	Magetan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015	4	2
14	Malang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018	2	0
15	Mojokerto	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016	1	8
16	Nganjuk	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017	2	0
17	Ngawi	Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011	3	29
18	Pacitan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012	15	0

No	Kabupaten/Kota	Perda Bangunan Gedung	TA BG	SLF
19	Pamekasan	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015	1	19
20	Pasuruan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017	2	14
21	Ponorogo	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009	5	1
22	Probolinggo	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015	2	0
23	Sampang	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016	0	0
24	Sidoarjo	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013	7	0
25	Situbondo	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018	1	0
26	Sumenep	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014	0	0
27	Trenggalek	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015	3	0
28	Tuban	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015	0	0
29	Tulungagung	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011	2	0
30	Kota Batu	-		
31	Kota Blitar	-		
32	Kota Kediri	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014	0	0
33	Kota Madiun	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010	5	0
34	Kota Malang	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012	9	0
35	Kota Mojokerto	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017	1	0
36	Kota Pasuruan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015	1	0
37	Kota Probolinggo	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008	5	0
38	Kota Surabaya	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009	24	0

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
Catatan Keterangan:

1. TA BG : Tenaga Ahli Bangunan Gedung
2. SLF : Sertifikat Laik Fungsi

2.1.2.1.3.7 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum

Sampai tahun 2022, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Provinsi Jawa Timur mencapai 95,05 persen. Capaian tersebut berada di bawah target nasional yaitu sebesar 97,89 persen. Namun demikian, capaian tahun 2022 ini telah mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021 sebesar 95,02 persen.

Dalam pemenuhan capaian layanan air minum layak di Provinsi Jawa Timur didukung melalui berbagai kegiatan antara lain penyediaan sarana prasarana air minum pada daerah rawan air yang dilaksanakan oleh baik Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Program Pamsimas, SPAM Regional Umbulan, serta SPAM Regional Mojolagres. Terkait dengan penanganan desa rawan air, pada Tahun 2022 telah dilaksanakan penanganan pada 80 desa rawan air/ kekeringan. Beberapa kendala terkait pencapaian akses air minum layak antara lain keterbatasan sumber air baku yang ada, sehingga pengembangan air minum yang diharapkan melalui sistem penyediaan air minum regional/ lintas wilayah belum bisa terlaksana secara optimal.

Tabel 2.60 Persentase Capaian Layanan Akses Air Minum

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	93,66	94,39	95,56	95,02*	95,05*

Sumber : BPS Prov. Jatim

*)Keterangan: Terdapat perubahan data base jumlah rumah tangga

Adapun kriteria untuk Air minum layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu akses air minum layak 100 persen pada Tahun 2024 dan juga sebagai salah satu target SDG's, perlu dilakukan peningkatan cakupan air minum dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, DAK, CSR dan potensi sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.1.3.8 Persentase Capaian Layanan Akses Sanitasi

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (air limbah) Provinsi Jawa Timur 2021 telah mencapai sebesar 81.13 persen, berada di bawah target yang diberikan Nasional yaitu sebesar 83,00 persen. Capaian layanan air limbah di Provinsi Jawa Timur didukung dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan sarana prasarana sanitasi (air limbah) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat, inisiasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah regional serta kerjasama dengan berbagai program terkait antara lain USAID IUWASH PLUS, dll. Upaya peningkatan akses sanitasi layak juga dilaksanakan secara terintegrasi melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) serta program jambanisasi yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V dimana dalam mewujudkan rumah layak huni, salah satu komponennya adalah ketersediaan jamban yang layak. Pelaksanaan program jambanisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 telah merenovasi rumah tidak layak huni melalui Program Rutilahu sejumlah 2.177 unit serta Program Jambanisasi terhadap 210 unit jamban. Upaya lainnya yang dilaksanakan antara lain yaitu dengan memberikan pendampingan terhadap kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) khususnya dalam pelaksanaan

Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) serta percepatan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) / Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Tabel 2.61 Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Cakupan Pelayanan akses sanitasi (air limbah) Layak	74,28	78,78	80,98	80,97*	81,13*

Sumber : BPS Prov. Jatim

* Terdapat perubahan data base jumlah rumah tangga

Kriteria Akses layanan air limbah yang layak adalah fasilitas yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, dan tempat pembuangan akhir berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sedangkan untuk akses sanitasi aman adalah akses sanitasi layak yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir atau menggunakan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

Dalam hal pencapaian akses layanan sanitasi aman (air limbah) terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala antara lain :

- Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistem sewerage) di perkotaan. Belum semua kabupaten/kota yang memiliki sistem air limbah terpusat sehingga tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan air limbah permukiman, serta belum optimalnya pengembangan SPAL regional /SPALD lintas Kab/Kota;
- Keterbatasan penyediaan lahan untuk penempatan sarana prasarana sanitasi termasuk juga rendahnya penyiapan kabupaten/kota terhadap readines criteria dalam rangka pembangunan sarana prasarana sanitasi;
- Belum optimalnya lembaga pengelola air limbah domestik di kabupaten kota;
- Pertumbuhan penduduk yang cukup besar dan tidak diiringi dengan pertumbuhan sarana prasarana sanitasi yang tinggi;
- Perlunya sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu akses sanitasi layak 95 persen termasuk 15 persen aman dan juga sebagai salah satu target SDG's, perlu adanya peningkatan akses terhadap sanitasi yang memadai dan merata bagi semua dan menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di

tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Untuk itu perlu dukungan pelaksanaan capaian layanan akses sanitasi melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi berupa MCK di Kab/Kota, sistem pengelolaan air limbah domestik Kab/Kota serta pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dengan mengoptimalkan potensi pembiayaan baik dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, DAK, CSR, dan potensi sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.1.3.9 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai dengan RTRW

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Perda RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disini merupakan wujud struktur dan pola ruang yang disusun secara hierarkis secara nasional, regional dan lokal yang menjadi wadah dari pelaksanaan pembangunan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Timur dilihat dari persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW menunjukkan kesesuaian dengan angka 91 persen di Tahun 2019 dimana didapatkan dengan cara melakukan overlay peta kawasan budidaya dalam pola ruang RTRW Provinsi Jawa Timur dengan peta citra terbaru. Indikator kinerja daerah penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Timur mengalami perubahan formulasi perhitungan di Tahun 2020 dengan melihat dari persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan base data awal di Tahun 2020 yang telah tercapai 87,08 persen. Angka ini di dapatkan dari hasil overlay peta pola ruang (Kawasan Lindung dan Budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui peta citra terbaru. Persentase kesesuaian tata ruang sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 92,53 persen. Hal ini menandakan bahwa terdapat peningkatan ketaatan stakeholder terhadap regulasi yang disusun oleh pemerintah daerah. Peningkatan ketaatan terhadap tata ruang tersebut didorong oleh pengoptimalan sumber daya manusia dan ketepatan waktu dalam penyelesaian evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang.

Pada saat ini sedang dilaksanakan proses revisi RTRW Provinsi. Terkait dengan progress Penetapan Perda RTRW Provinsi Jawa Timur, pada Tahun 2022

telah dilakukan penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, sebagai pemutakhiran dari Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP-3-K). Selanjutnya Dokumen MTPP dimaksud dikonsultasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan telah diterbitkan Persetujuan Teknis MTPP Provinsi Jawa Timur dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Oktober 2022. Selanjutnya, telah dilakukan integrasi MTPP ke dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur oleh DPRKP CK sebagai amanat Undang – Undang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen integrasi dimaksud, telah dilaksanakan Konsultasi Publik RTRW Provinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 2022 dan 10 November 2022. Sudah diterbitkan Validasi KLHS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari aspek perpetaan, peta dasar RTRW Provinsi telah diterbitkan Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Peta Dasar untuk Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur dari BIG pada tanggal 16 Desember 2022. Pada Tahun 2023, sudah dilakukan Berita Acara Kesepakatan Substansi RTRW Provinsi antara Gubernur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur pada tanggal 30 Januari 2023. Tahun 2023 diharapkan telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR.

Tabel 2.62 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	90	91	87,08*	90,51*	92,53*

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Ket. *) : Berdasarkan hasil perhitungan dengan penambahan komponen

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan fasilitasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, melalui Forum Penataan Ruang (FPR) sebagaimana ditetapkan oleh SK Gubernur Nomor 188/155/KPTS/013/2022. Hasil fasilitasi akan disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerangkan bahwa Kabupaten/Kota dimaksud telah melaksanakan proses evaluasi. Pada saat ini, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan revisi RTRW di Kabupaten/Kota dan 7 Kabupaten/Kota sedang proses evaluasi teknis oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RTRW Kabupaten/Kota yang masih proses di Kementerian ATR adalah 18

Kabupaten/Kota. Selanjutnya, 1 Kabupaten telah selesai proses Evaluasi Ranperda oleh Gubernur Jawa Timur, dan 9 Kabupaten/Kota yang RTRW sudah ditetapkan sebagai perda.

Tabel 2.63 Status RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Perda RTRW	Status/Progress RTRW Kabupaten/Kota
1	Pacitan	Perda 3 Tahun 2010	Proses di Kementerian ATR
2	Ponorogo	Perda 1 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
3	Trenggalek	Perda 15 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
4	Tulungagung	Perda 11 Tahun 2012	Proses Evaluasi Ranperda oleh Gubernur Jawa Timur
5	Blitar	Perda 5 Tahun 2013	Proses Penyusunan Revisi RTRW di Pemerintah Kabupaten
6	Kediri	Perda 14 Tahun 2011	Proses di Kementerian ATR
7	Malang	Perda 3 Tahun 2010	Proses di Kementerian ATR
8	Lumajang	Perda 2 Tahun 2013	Proses di Kementerian ATR
9	Jember	Perda 1 Tahun 2015	Proses evaluasi teknis oleh DPRKPK Prov Jatim
10	Banyuwangi	Perda 8 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
11	Bondowoso	Perda 12 Tahun 2011	Proses di Kementerian ATR
12	Situbondo	Perda 9 Tahun 2013	Proses Penyusunan Revisi RTRW di Pemerintah Kabupaten
13	Probolinggo	Perda 3 Tahun 2011	Proses evaluasi teknis oleh DPRKP CK Prov Jatim
14	Pasuruan	Perda 12 Tahun 2010	Proses di Kementerian ATR
15	Sidoarjo	Perda 6 Tahun 2009	Proses evaluasi teknis oleh DPRKP CK Prov Jatim
16	Mojokerto	Perda 9 Tahun 2012	Proses evaluasi teknis oleh DPRKP CK Prov Jatim
17	Jombang	Perda 10 Tahun 2021	Telah ditetapkan sebagai Perda
18	Nganjuk	Perda No. 2 Tahun 2021	Telah ditetapkan sebagai Perda
19	Madiun	Perda 9 Tahun 2011	Proses evaluasi teknis oleh DPRKP CK Prov Jatim
20	Magetan	Perda 15 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
21	Ngawi	Perda 10 Tahun 2011	Proses evaluasi teknis oleh DPRKP CK Prov Jatim
22	Bojonegoro	Perda 5 Tahun 2021	Telah ditetapkan sebagai Perda
23	Tuban	Perda 3 Tahun 2020	Telah ditetapkan sebagai Perda
24	Lamongan	Perda 3 Tahun 2021	Telah ditetapkan sebagai Perda
25	Gresik	Perda 8 Tahun 2011	Proses di Kementerian ATR
26	Bangkalan	Perda 10 Tahun 2009	Proses di Kementerian ATR
27	Sampang	Perda 7 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
28	Pamekasan	Perda 16 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
29	Sumenep	Perda 12 Tahun 2013	Proses di Kementerian ATR
30	Kota Kediri	Perda 1 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
31	Kota Blitar	Perda 12 Tahun 2011	Proses Penyusunan Revisi RTRW di Pemerintah Kota

No	Kabupaten/Kota	Perda RTRW	Status/Progress RTRW Kabupaten/Kota
32	Kota Malang	Perda 6 Tahun 2022	Telah ditetapkan sebagai Perda
33	Kota Probolinggo	Perda 1 Tahun 2020	Telah ditetapkan sebagai Perda
34	Kota Pasuruan	Perda 1 Tahun 2022	Telah ditetapkan sebagai Perda
35	Kota Mojokerto	Perda 4 Tahun 2012	Proses di Kementerian ATR
36	Kota Madiun	Perda 6 Tahun 2011	Proses di Kementerian ATR
37	Kota Surabaya	Perda 12 Tahun 2014	Proses evaluasi teknis oleh DPRKPKK Prov Jatim
38	Kota Batu	Perda 7 Tahun 2022	Telah ditetapkan sebagai Perda

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Prov. Jatim

2.1.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.2.1.4.1 Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni

Kegiatan yang bersifat multi sektor dan sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam penyelenggarannya diharapkan masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman meliputi drainase, persampahan, sanitasi, dan air bersih dan PSU merupakan komponen penting dalam mewujudkan hunian yang layak dan berkelanjutan. Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada Tahun 2022 yaitu mencapai 80,82 persen, di bawah target RPJMD pada Tahun 2022 sebesar 83,56 persen. Peningkatan capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur secara tidak langsung akan meningkatkan dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan perumahan permukiman, serta kualitas hidup masyarakatnya.

Tabel 2.64 Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Dan Permukiman

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman yang Layak Huni	76,30	79,59	81,54	80,97*	80 ,82*

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
*)Keterangan: Komponen dasar perhitungannya menggunakan data BPS yaitu Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak, Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak dan Persentase Rumah Tangga Yang Bertempat Tinggal Di Rumah Layak Huni

Sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024, maka untuk selanjutnya definisi operasional dan cara perhitungan indikator Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Timur mengalami penyesuaian dimana persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni ditambahkan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan target SDGs dengan mengacu pada target nasional sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024. Komponen tersebut menjadi komponen perhitungan bersama dengan cakupan layanan akses air minum dan capaian layanan akses sanitasi (air limbah). Penambahan komponen tersebut dimaksudkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses rumah layak, aman dan terjangkau serta memperoleh layanan dasar permukiman. Sehingga pemenuhan infrastruktur dasar perumahan permukiman tidak hanya layak huni dari aspek ketahanan bangunan dan luas bangunan, namun juga dari terpenuhinya akses air minum dan akses sanitasi layak.

2.1.2.1.4.2 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni

Penanganan rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni merupakan komponen tambahan dalam perhitungan Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman Layak Huni memiliki capaian sebesar 66,28 persen pada Tahun 2022. Berada di bawah target yang telah ditetapkan Nasional sebesar 69,80 persen. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0.65 persen yang disebabkan oleh kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan rumah di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni sudah dilakukan sejak Tahun 2009 melalui berbagai program dan sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD, BAZNAS, dan CSR. Dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya serta Lantamal V Surabaya melalui Program Rumah Tinggal Layak Huni. Pelaksanaan Program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Jambanisasi selama tahun 2019-2022 melalui kerja sama dengan Kodam V Brawijaya telah terlaksana renovasi rumah sejumlah 29.961 unit rumah dan jambanisasi 1.435 unit. Sedangkan Program Rutilahu yang bekerja sama dengan Lantamal V selama tahun 2019-2022 telah terlaksana sejumlah 1.884 unit rumah. Untuk realisasi Program Rutilahu kerja sama dengan Kodam V Brawijaya tahun 2022 adalah sebesar 38 Milyar Rupiah

untuk renovasi sejumlah 1.952 unit rumah di Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Tuban, Lamongan, Probolinggo, Bondowoso, Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Untuk realisasi Program Rutilahu kerja sama dengan Lantamal V tahun 2022 adalah sebesar 4,5 Milyar Rupiah untuk renovasi sejumlah 225 unit rumah di Lamongan, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, dan Situbondo. Adapun kriteria hunian layak berdasarkan SDG's adalah kecukupan luas bangunan, ketahanan bangunan, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.

Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga yang Bertempat Tinggal di Rumah Layak Huni

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	60,96	65,61	68,08	66,9*	66,2*

Sumber : BPS Prov. Jatim

*) Keterangan: Terdapat perubahan data base jumlah rumah tangga

Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 yaitu rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau 70 persen pada Tahun 2024 dan juga sebagai salah satu target SDG's goal 11, perlu dilakukan peningkatan cakupan rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan sesuai dengan ketentuan.

2.1.2.1.4.3 Kawasan Kumuh Perkotaan

Dalam kurun waktu 2016-2019 penanganan kawasan kumuh perkotaan seluas 1.792,59 Ha telah tertangani seluas 1.717,09 Ha sehingga ada menyisakan seluas 75,5 Ha yang belum tertangani. Rincian kawasan kumuh yang belum tertangani itu terdiri dari 3,15 Ha di Kabupaten Pasuruan dan 72,35 Ha di Kota Malang. Untuk kawasan kumuh yang di Kota Malang, status tanahnya adalah milik DAS Brantas dan PT. KAI sehingga tidak bisa di tangani dan telah dianggap tuntas untuk baseline 1.792,59 Ha.

Untuk selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, maka berdasarkan usulan SK Bupati/Walikota disepakati *baseline* untuk penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu seluas 16.289,64 Ha. Dengan penanganan yang telah

dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 yaitu seluas 5.468,76 Ha, maka untuk penanganan selanjutnya adalah seluas 10.820,89 Ha.

Tabel 2.66 Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas Kumuh SK (Ha)*	Capaian Pengurangan Kumulatif Kumuh Tahun 2021 (Ha)	Capaian Pengurangan Absolut Kumuh Tahun 2022 (Ha)	Sisa Luas Kumuh di Akhir Tahun 2022 (Ha)
1	Pacitan	67,00	42,50	1,40	23,10
2	Ponorogo	87,09	44,50	0,00	42,59
3	Trenggalek	187,78	43,08	0,00	144,70
4	Tulungagung	239,49	37,83	31,71	169,95
5	Blitar	1.578,68	504,30	30,34	1.044,05
6	Kediri	218,74	73,81	11,94	132,99
7	Malang	3.223,29	14,89	2.074,64	1.133,76
8	Lumajang	1.417,03	5,71	67,91	1.343,41
9	Jember	1.324,25	71,61	0,00	1.252,64
10	Banyuwangi	916,26	77,90	177,18	661,18
11	Bondowoso	489,79	77,78	33,44	378,57
12	Situbondo	180,18	0,00	12,38	167,80
13	Probolinggo	196,87	0,00	4,87	192,00
14	Pasuruan	200,35	60,92	0,00	139,43
15	Sidoarjo	276,62	43,40	20,64	212,58
16	Mojokerto	314,00	20,60	10,59	282,81
17	Jombang	475,00	45,77	32,16	397,07
18	Nganjuk	131,20	28,01	34,74	68,45
19	Madiun	104,44	58,45	4,65	41,34
20	Magetan	430,82	27,04	75,62	328,16
21	Ngawi	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bojonegoro	100,96	34,04	59,15	7,77
23	Tuban	411,04	27,55	1,35	382,14
24	Lamongan	395,55	52,80	74,98	267,77
25	Gresik	875,43	38,95	282,18	554,30
26	Bangkalan	364,47	40,27	85,23	238,97
27	Sampang	575,22	15,88	2,76	556,58
28	Pamekasan	244,75	31,15	49,20	164,40
29	Sumenep	276,77	43,77	85,34	147,66
30	Kota Kediri	106,16	60,65	40,38	5,13
31	Kota Blitar	103,36	23,59	16,72	63,05
32	Kota Malang	274,83	50,64	55,03	169,16
33	Kota Probolinggo	53,14	16,41	10,15	26,58
34	Kota Pasuruan	58,08	25,91	3,02	29,15
35	Kota Mojokerto	40,16	38,84	0,00	1,32
36	Kota Madiun	64,49	44,06	19,52	0,91
37	Kota Surabaya	145,89	25,85	120,04	-
38	Kota Batu	140,46	67,64	23,40	49,42
JUMLAH		16.289,64	1.916,10	3.552,66	10.820,89

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, 2023

Keterangan :

*) Berdasarkan SK Bupati/Walikota, baseline per 31 Desember 2020

2.1.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

2.1.2.1.5.1 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud

Globalisasi dan teknologi informasi membawa perkembangan positif dalam meningkatkan kualitas pembangunan secara umum, namun terdapat beberapa hal negatif yang harus diberikan perhatian khusus. Salah satunya adalah munculnya isu yang berkembang di masyarakat, yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam menghadapinya, antara lain dengan melakukan fasilitasi terhadap integrasi bangsa, serta mencegah disintegrasi bangsa yang mengedepankan pemberdayaan. Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektivitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh.

Tabel 2.67 Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud	67,77	80,42	93,04	77,57	75,90

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Persentase perkembangan kejadian poleksosbud merupakan perbandingan antara jumlah kejadian terkait poleksosbud pada tahun berjalan (n) dengan jumlah kejadian terkait poleksosbud tahun sebelumnya (n-1). Jumlah kejadian terkait poleksosbud adalah jumlah data kejadian yang menonjol berlatarbelakang politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang mempunyai potensi untuk menyebabkan konflik terbuka, atau mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Jawa Timur, yang berhasil dihimpun dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2022 persentase perkembangan kejadian poleksosbud menunjukkan nilai sebesar 75,90%, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kejadian terkait poleksosbud tahun tersebut masih mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari rentang tahun 2018-2022 kejadian-kejadian poleksosbud tiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase kejadian tersebut yang setiap tahunnya tidak melebihi 100 persen sehingga menunjukkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersinergi dengan aparat terkait dalam menekan kejadian poleksosbud di Jawa Timur dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.5.2 Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman.

Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah salah satu indikator baru yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan mulai dilaksanakan pada tahun 2021. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah meliputi Pelayanan pada kegiatan :

- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur,
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Tabel 2.68 Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	99,47	99,57

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Realisasi indikator persentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat meningkat dari 99,47 persen di tahun 2021 menjadi 99,57 di tahun 2022, pengukuran capaian indikator diperoleh melalui hasil realisasi pelaksanaan kegiatan pada pencegahan dan penindakan gangguan tantribum, penegakan perda serta pelatihan dan simulasi satlinmas. Melalui Indikator ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat memperbaiki kinerja pelayanan di setiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan kinerja urusan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Jawa Timur di setiap tahunnya.

2.1.2.1.5.3 Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang berdampak pada perubahan struktur organisasi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan adanya Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga perlu ditetapkan indikator baru sebagai pengukuran capaian kinerja.

Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran adalah salah satu indikator baru yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dan **akan mulai dilaksanakan pada tahun 2022**. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran atas data realisasi kegiatan dengan target /rencana pada tingkatan program hingga sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2.1.2.1.5.4 Indeks Kapasitas Bencana

Indeks Kapasitas Bencana menggambarkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan indeks risiko bencana (IRB). Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang tertuang didalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, bahwa strategi yang digunakan untuk penurunan indeks risiko bencana adalah meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana yang diukur dengan indikator-indikator pada 7 prioritas berikut:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Tabel 2.69 Indeks Kapasitas Bencana Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kapasitas Bencana	0,49	0,54	0,57	0,60	0,63

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Sampai dengan Tahun 2020 Indeks Kapasitas Bencana Provinsi Jawa Timur berada pada angka 0,57 dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 0,60. Klasifikasi Indeks Kapasitas adalah sebagai berikut :

1. Rendah : < 0,33
2. Sedang : 0,33 – 0,66
3. Tinggi : > 0,66

Selanjutnya upaya – upaya melalui program terkait kebencanaan di Provinsi Jawa Timur yang menjadi bagian dari Misi-4 RPJMD Provinsi, diharapkan akan dapat meningkatkan indeks kapasitas bencana dan selanjutnya akan menurunkan angka indeks risiko bencana.

2.1.2.1.5.5 Desa Tangguh Bencana

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan bencana yang merupakan salah satu upaya mitigasi bencana telah dilaksanakan pembentukan desa tangguh bencana pada desa rawan bencana bertujuan untuk mengurangi resiko bencana dengan pendekatan kepada masyarakat. Pembentukan desa tangguh bencana setiap tahunnya meningkat dalam rentang 2015-2021, dan sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 702 desa rawan bencana telah ditingkatkan menjadi desa tangguh bencana. Pada Tahun 2022 bertambah 40 desa menjadi 742 desa tangguh bencana.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan desa tangguh bencana antara lain: penyusunan kajian risiko dan rencana aksi, pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) level desa, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi dan peringatan dini serta pembekalan dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), Dapur Umum (DU) dan Rescue Dasar.

Tabel 2.70 Desa Tangguh Bencana di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Desa Tangguh Bencana	556	599	662	702	742

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

2.1.2.1.6 Sosial

2.1.2.1.6.1 Persentase PMKS yang Mandiri

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS khususnya anak jalanan, gepeng, gelandangan psikotik dan WTS kesemuanya membutuhkan perhatian yang intensif dan segera agar tidak berkembang makin mencemaskan. Sejak situasi krisis, perkembangan PMKS jalanan yakni anak jalanan, gelandangan, gelandangan psikotik, pengemis, dan Wanita Tuna Susila atau PSK (Pekerja Seks Komersial) secara kualitatif semakin mengkhawatirkan. PMKS jalanan memiliki mobilitas yang sangat tinggi, seringkali terjadi lintas kota-kabupaten sehingga sulit bisa terselesaikan hingga tuntas jika hanya menggantungkan pada komitmen politik satu-dua daerah saja.

Tabel 2.71 Persentase PMKS yang Mandiri

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PMKS yang Mandiri	1,19	1,20	1,26	1,29	1,30

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2018, Persentase PMKS yang Mandiri di Jawa Timur sebesar 1,19 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga 1,30 persen di tahun 2022. Untuk mendukung program pemerintah penanganan PMKS yang inklusif, selain kebijakan kesejahteraan, juga diarahkan kepada kemandirian PMKS. Dari kebijakan ini diharapkan PMKS dapat keluar dari beban kemiskinan. Kemandirian PMKS dapat dilakukan melalui pemberdayaan sosial, pelatihan dan keterampilan, permodalan dan dukungan lingkungan sosial yang kondusif.

2.1.2.1.6.2 Menurunnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tertuang bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tabel 2.72 Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1,41	1,25	1,32	1,30	1,25

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022, penurunan jumlah PMKS mengalami penurunan sebesar 0,05 poin persen menjadi 1,25 persen. Jumlah PMKS di tahun 2022 turun sebesar 8.713, dimana di tahun 2021 sebesar 613.016 PMKS dan di tahun 2022 sebesar 604.303 PMKS. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PMKS antara lain dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara normal. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan PMKS antara lain dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan, sehingga PMKS dapat hidup secara normal.

2.1.2.1.6.3 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya Keberfungsian Sosial PMKS

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pencapaian Visi terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak bagi semua lapisan masyarakat, termasuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perlindungan dan kesejahteraan sosial berkaitan dengan keterlantaran, baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketuna-sosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun proses mengembalikan fungsi sosial PMK secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk pelayanan bagi PMKS. Oleh karena itu pada tahun 2019, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggunakan indikator persentase terpenuhinya kebutuhan dasar dan pulihnya keberfungsian sosial PMKS dengan realisasi tahun 2019 hingga tahun 2022 sebesar 100 persen.

Tabel 2.73 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya Keberfungsian Sosial PMKS

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dan Pulihnya Keberfungsian Sosial PMKS	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

2.1.1.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.2.2.1 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2.74 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,56	69,61	70,33	70,00	71,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Semakin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada tahun 2022 terdiri dari 21,61 juta orang bekerja dan 1,26 juta orang menganggur. Berdasarkan jenis kelamin, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Meski demikian, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada tahun 2022, TPAK laki-laki sebesar 85,76 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 57,28 persen.

2.1.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.2.2.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara

ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Tabel 2.75 Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pemberdayaan Gender	69,71	73,04	73,03	72,36	74,42

Sumber : BPS RI

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur memiliki kecenderungan naik. Meskipun IPG di tahun 2021 sempat mengalami penurunan karena variabel sumbangan pendapatan perempuan mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja, namun pada tahun 2022 IPG Jawa Timur sebesar 74,42. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Jatim dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

2.1.2.2.2.2 Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diketahui dari persentase penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100 persen sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, hal ini dikarenakan jumlah pengaduan dapat teratasi seluruhnya.

Tabel 2.76 Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan

	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan

2.1.2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Tabel 2.77 Indeks Perlindungan anak Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67,93	71,8	72,25	64,59	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Timur sebesar 72,25 pada tahun 2020, meningkat 0,45 dari tahun 2019, dan di atas nilai nasional 66,89. Tetapi capaian IPA pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat termasuk anak-anak sehingga menyebabkan 2 klaster indeks perlindungan anak mengalami penurunan yaitu hak sipil dan kebebasan tahun 2020 sebesar 63,49 menjadi 49,13 di tahun 2021 serta Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya tahun 2020 sebesar 64,63 turun menjadi 34,18 di tahun 2021. Tetapi pada klaster perlindungan khusus mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 74,65 naik menjadi 77,03 di tahun 2021. Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan juga mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 78,29 menjadi 79,32.

2.1.2.2.3 Pangan

2.1.2.2.3.1 Ketersediaan Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi penyangga pangan Nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan Nasional. Sebagai Provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu : (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati berbagai tingkatan yang secara hierarkis mencakup rumah tangga, regional (kabupaten, kota, provinsi) dan nasional.

Tabel 2.78 Ketersediaan Pangan di Jawa Timur (Ton)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Beras	6.002.140	5.503.726	5.618.101	7.160.483	6.301.918
b. Jagung	5.798.473	5.923.567	6.131.163	6.383.661	6.552.943
c. Kedelai	225.987	110.666	344.998	978.088	1.432.103

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022, terdapat kenaikan cadangan pangan Jagung dan Kedelai di Jawa Timur, menunjukkan kenaikan kapasitas ketahanan pangan dari 2 komoditas tersebut. Sedangkan untuk cadangan pangan Beras (padi) pada tahun 2022 terjadi penurunan karena terdapat penyesuaian kapasitas cadangan pangan Beras oleh Bulog wilayah Jawa Timur, dimana pada tahun 2021 terdapat dinamika penyediaan dan kapasitas oleh Bulog wilayah Jawa Timur sehingga tertahan dan tercatat lebih tinggi di akhir tahun 2021 oleh BPS. Adapun demikian dinamika yang terjadi tidak banyak mempengaruhi kondisi ketahanan pangan karena hanya berupa dinamika sementara saja di tahun 2021 dan kembali pada angka normal di tahun 2022.

2.1.2.2.3.2 Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.79 Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pola Pangan Harapan (PPH)	85,0	92,5	91,2	85,6	92,8

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Indeks Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Timur yang berada pada kisaran angka poin 85-92 dan nilai update terakhir pada tahun 2022 mencapai 92,8 menunjukkan bahwa konsumsi pangan di Jawa Timur relatif baik dan mencerminkan adanya keragaman pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Angka yang tinggi pada indeks PPH juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Timur cenderung memilih makanan yang sehat dan bergizi serta memperhatikan ragam makanan dalam pola konsumsi mereka.

2.1.2.2.4 Pertanahan

Pelaksanaan urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 melalui program penatagunaan tanah. Dari pelaksanaan program tersebut, telah dihasilkan dokumen rencana penggunaan lahan yang tersusun. Pada tahun 2022 – 2024 urusan pertanahan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan melalui beberapa program yaitu Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; dan Program Penatagunaan Tanah.

Kinerja urusan pertanahan diukur melalui indikator persentase kasus sengketa yang termediasi. Indikator tersebut merupakan cerminan dari terlaksananya Urusan Bidang Pertanahan dimana pemerintah provinsi menerima permohonan kasus sengketa yang selanjutnya dapat dilakukan mediasi. Terdapat 20 kasus sengketa tanah garapan terhitung dari Tahun 2021 hingga akhir tahun 2022 yang perlu dilakukan fasilitasi berupa mediasi. Dari total tersebut sebanyak 5 kasus sengketa tanah garapan yang dapat dilakukan fasilitasi berupa mediasi sesuai dengan kewenangan/tupoksi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi berupa mediasi sebanyak 5 kasus sengketa tanah garapan dengan capaian persentase kasus sengketa yang termediasi sebesar 100 persen.

Tabel 2.80 Persentase Kasus Sengketa yang Termediasi di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kasus Sengketa yang Termediasi	-	-	-	-	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

2.1.2.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.2.2.5.1 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan nilai yang mencerminkan kondisi kualitas air berdasarkan kompilasi hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ. Nilai IKA Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun 2018-2022 relatif tetap meskipun sempat menurun di Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKA yang meliputi dihapusnya parameter total coliform dan adanya penambahan parameter NO₃-N.

Pada Tahun 2022, nilai IKA kembali mencapai 56,13 dan memenuhi target RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, yaitu 48,56 namun capaian tersebut masih berada dalam kategori kurang. Parameter *Fecal Coliform* merupakan parameter yang memberikan kontribusi signifikan terhadap tingkat pencemaran air sungai di Jawa Timur, terutama pada ruas-ruas sungai yang melintasi daerah padat penduduk. Parameter lainnya yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap tingkat pencemaran air sungai adalah BOD, COD, dan Fenol. Capaian IKA di Tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pengendalian pencemaran kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung pada perusahaan/industri, gerakan aksi bersih sungai, pemantauan kualitas air secara berkala, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan lainnya terkait pengelolaan badan air. Ke depannya berbagai upaya

Tabel 2.81 Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air (IKA)	52,96	56,13	56,13	53,37	56,13

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas udara ambien dengan baku

mutu udara yang ada. Pada tahun 2018, IKU Provinsi Jawa Timur mencapai 83,50 namun pada tahun 2019 menurun menjadi 83,32. Pada tahun 2020 nilai IKU Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 84,59 dan masuk dalam kategori "baik". Tahun 2021 terdapat perubahan metode perhitungan nilai IKU. Nilai IKU Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dengan hanya mencapai nilai 83,68. Pada Tahun 2022, nilai IKU Provinsi meningkat menjadi 84,28 dan memenuhi target tahun 2022, yaitu 83,38 dan berada dalam kategori baik. Capaian IKU di Tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pengendalian pencemaran kualitas udara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui Pembinaan Program Kampung Iklim (Proklam) (Desa/Kelurahan), Program Desa BERSERI (Bersih dan Lestari), peningkatan pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana pengolahan sampah, serta pemantauan kualitas udara secara berkala

Tabel 2.82 Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	83,32	84,59	83,68	84,28

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.5.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan hasil pengintegrasian antara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) namun karena Provinsi Jawa Timur tidak memiliki lahan gambut, maka perhitungan IKL dilakukan berdasarkan IKTL. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu dalam rangka melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada area tutupan lahan tersebut.

Tabel 2.83 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,56	63,16	63,72	47,36	47,36

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 adalah sebesar 63,56 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 63,16 tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 63,72. Pada tahun 2021 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) terjadi penyesuaian perhitungan nilai IKL serta target capaian Provinsi Jawa Timur. Nilai IKL Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah 47,36 dan telah melebihi target yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai IKL tetap bertahan pada nilai 47,36 dan masih memenuhi target RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, yaitu 46 namun capaian tersebut masih berada dalam kategori kurang. Hal ini tidak terlepas dari adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan dan lahan yang mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Capaian IKL di Tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pengendalian pencemaran kualitas lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui rehabilitasi kerusakan lahan yang dilaksanakan secara berkala.

2.1.2.2.5.4 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020 – 2024 terdapat perubahan metode perhitungan dari IKLH, diantaranya dengan adanya penambahan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). IKAL dihitung berdasarkan kompilasi hasil pemantauan terhadap kualitas air yang ditinjau dari 5 (lima) parameter, yaitu TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat. Dalam rangka mendukung IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur, maka IKAL ditetapkan sebagai indikator baru dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dan baru mulai dilaksanakan perhitungan target dan capaiannya pada Tahun 2021.

Nilai IKAL Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah 82,46 dan telah melebihi target yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai IKAL meningkat menjadi 85,45 dan melampaui target RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, yaitu 60,96 dan berada dalam kategori baik. Capaian IKAL di Tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pengendalian pencemaran kualitas air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya melalui pemantauan kualitas air laut serta pembinaan dan pengawasan perusahaan/industri yang berpotensi mencemari kualitas air laut secara berkala

Tabel 2.84 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	-	82,46	85,45

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.2.2.6.1 Persentase Penduduk Ber KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen identitas bukti diri resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai dokumen identitas diri, KTP juga sangat diperlukan untuk registrasi ke beberapa tempat resmi yang membutuhkan identitas asli setempat. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Tabel 2.85 Persentase penduduk ber KTP di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penduduk ber KTP	99,98	99,47	99,95	99,84	100,91

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/ Kota. Hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan peningkatan meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yakni sebesar 99,95 persen tetapi turun di tahun 2021 menjadi 99,84 tetapi naik kembali di tahun 2022 menjadi 100,91. Saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan setempat.

2.1.2.2.6.2 Persentase Data Penduduk yang Akurat

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, DP3AK Provinsi Jawa Timur harus menyiapkan bahan pengolahan data serta bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi sebagai upaya pengendalian penduduk. Persentase data penduduk yang akurat merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data kependudukan dikarenakan hal ini berkaitan erat dengan dasar pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian penduduk. Berdasarkan perhitungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 diketahui bahwa persentase data penduduk yang akurat yang dimiliki oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur mencapai 99,47 persen dan pada tahun 2021 diketahui bahwa persentase data penduduk yang akurat yang dimiliki oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur mencapai 99,47 persen dan meningkat menjadi 99,95 persen, pada tahun 2022 naik menjadi 100.

Tabel 2.86 Persentase Data Penduduk yang Akurat

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Data Penduduk yang Akurat	99,47	99,95	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

2.1.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.2.2.7.1 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.87 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan

Persentase Penduduk Miskin	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pedesaan	15,21	14,16	15,16	13,79	13,90
Perkotaan	6,97	6,77	8,37	7,99	7,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Persentase penduduk miskin di Jawa Timur jika ditinjau menurut daerah, wilayah pedesaan persentase penduduk miskinnya cenderung lebih

tinggi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Namun kenaikan penduduk miskin pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019, yakni meningkat sebesar 1,6 persen sedangkan di daerah pedesaan meningkat sebesar 1 persen. Namun, membaiknya kondisi perekonomian di Jawa Timur karena penurunan kasus Covid-19 yang signifikan telah menekan angka kemiskinan di Jawa Timur pada Tahun 2021, khususnya di pedesaan. Persentase penduduk miskin pedesaan turun sebesar 1,37 persen menjadi 13,79. Pada Tahun 2022, angka tersebut kembali mengalami peningkatan karena didorong oleh kenaikan tingkat inflasi.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah Jawa Timur untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya, baik dari segi peningkatan kinerja perekonomian maupun upaya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan terjadi penurunan kemiskinan secara berkelanjutan baik di pedesaan maupun perkotaan.

2.1.2.2.7.2 Persentase Desa Mandiri

Salah satu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Penurunan Angka Kemiskinan. Untuk mendukung penurunan angka kemiskinan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim melalui Sasaran Indikator Kinerja Daerah yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan memasang target kinerja persentase Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dalam RPJMD tahun 2019 - 2024. Namun sampai dengan pada tahun 2020, desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur hanya 1 desa dan pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Timur, hal ini menandakan bahwa kinerja Provinsi Jawa Timur semakin baik dalam mengurangi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Oleh karena itu, mulai tahun 2021 indikator persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal diganti dengan persentase desa mandiri.

Tabel 2.88 Persentase Desa Mandiri

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Desa Mandiri	0,89	2,21	4,3	9	19,30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Sebagai kondisi awal target kinerja mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018 yaitu jumlah Desa Mandiri sejumlah 69 Desa atau sebesar 0,89 persen, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,21 persen dan 4,3 persen pada tahun 2020, pada tahun 2021 kembali meningkat

menjadi 9 persen, dan di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sekitar 10,30 persen menjadi 19,30 persen.

Adapun metode Dinas PMD Prov Jatim dalam peningkatan Desa Mandiri adalah :

- a) Memfokuskan sebagian besar sasaran kegiatan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;
- b) Optimalisasi Dana Desa difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri;
- c) Intervensi Program Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan difokuskan pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri; dan
- d) Mensosialisasikan Pembentukan / Peningkatan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Desa khusus pada lokasi Desa berstatus belum Mandiri.

2.1.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan KB

2.1.2.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Tabel 2.89 Laju Pertumbuhan Penduduk di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Laju pertumbuhan penduduk	0,53	0,50	2,44	0,70	0,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur selama periode 2017-2019 terus menunjukkan penurunan, yaitu dari 0,56 tahun 2017 menjadi 0,50 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana/KB di Jawa Timur di periode tersebut cukup terkendali. Namun pada tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,44 persen terhadap jumlah penduduk tahun 2019 yang merupakan data proyeksi. Laju pertumbuhan penduduk mulai mengalami penurunan, dimana laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,66 persen.

2.1.2.2.8.2 Cakupan KB Aktif/CPR (%)

Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi.

Perkembangan Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur pada tahun 2017 adalah sebesar 76,21 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 75,55 persen, hal ini disebabkan kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat takut mendatangi tempat pelayanan KB, masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya menggunakan alat kontrasepsi, namun belum yakin terhadap kontrasepsi modern sehingga lebih memilih kontrasepsi tradisional. Hal ini juga dikarenakan kurangnya rasio PKB/PLKB terhadap desa/kelurahan dalam binaan kinerjanya untuk melakukan KB. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program KB.

Tabel 2.90 Persentase Cakupan KB aktif di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Cakupan KB aktif	76,17	75,72	75,55	75,65	68,62*

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Kependudukan Jatim

2.1.2.2.8.3 Persentase Drop Out KB

Pembangunan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Jawa Timur dilaksanakan Mengendalikan kuantitas meningkatkan kualitas dan mengatur persebaran agar penduduk tumbuh seimbang sesuai kemampuan daya dukung lahan dan lingkungan. Beberapa indikator kinerja Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 2.91 Jumlah Drop Out KB di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Drop Out KB	16,34	16,45	16,73	19,17	-

Sumber : Radalgram BKKBN

Ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi KB (DO) dalam lima tahun menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 14,86 (tahun 2017); 16,34 (tahun 2018); 16,45 (tahun 2019); 16,73 (tahun 2020), dan menjadi 19,17 (tahun 2021). Hal ini mengindikasikan kesadaran masyarakat rendah untuk ber KB, ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang enggan ke fasilitas Kesehatan dikarenakan kuatir tertular Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 BKKBN tidak merilis indikator Persentase Drop Out KB, hal ini dikarenakan indikator tersebut tidak menjadi target nasional, dan formulasi perhitungan Persentase Drop Out KB hampir sama dengan formulasi perhitungan indikator unmeet need, peserta KB Aktif, dan MCPR.

2.1.2.2.8.4 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*Un-met need*)

Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*un-met need*) dari tahun ke tahun menunjukkan tren angka penurunan tahun 2019 capaiannya 10,03 menurun menjadi 9,52 di tahun 2020, tetapi mengalami kenaikan sejak tahun 2021 menjadi 14,90 dan naik kembali di tahun 2022 sebanyak 4,79 persen atau menjadi 19,69 persen. Hal ini disebabkan adanya tren gaya hidup Pasangan Usia Subur yang menggunakan KB alami (Kalender), dan menggunakan alat kontrasepsi yang dijual di pasaran atau bukan pada fasilitas kesehatan.

Tabel 2.92 Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*un-met need*) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jumlah kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (<i>un-met need</i>)	10,02	10,03	9,52	14,90	19,69

Sumber : Radalgram BKKBN

2.1.2.2.8.5 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*

Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah prosentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik, Pil dan Kondom). Indikator ini mulai digunakan pada tahun 2020 dengan capaian 75,55 persen yang bersumber dari BKKBN Jawa Timur, sedangkan September 2021 angka MCPR mencapai 75,65 dan diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2022, angka prevalensi kontrasepsi modern mengalami penurunan menjadi 67,24 yang dikarenakan penduduk usia subur lebih memilih memakai alat

kontrasepsi secara tradisional (alami, Kalender) dan membeli alat kontrasepsi di luar fasilitas kesehatan.

Tabel 2.93 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i>	75,55	75,65	67,24

Sumber : Radalgram BKKBN

2.1.2.2.8.6 Angka Fertilitas Menurut Umur/*Age Specific Fertility Rates* (ASFR)

Angka kelahiran menurut kelompok umur menunjukkan jumlah kelahiran yang dialami oleh wanita kelompok umur tertentu antara 15-19 tahun. Angka ini biasanya dinyatakan dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2019 ASFR Jawa Timur 30,35, artinya wanita yang berusia 15-19 tahun, dalam satu tahun rata-rata akan melahirkan 0,030 bayi (30 kelahiran untuk setiap 1000 wanita). Sedangkan pada tahun 2021 capaiannya 21,07 naik menjadi 27,8 di tahun 2022 artinya wanita yang berusia 15-19 tahun, dalam satu tahun rata-rata 27 kelahiran untuk setiap 1000 wanita. Kenaikan ini disebabkan meningkatkan kasus perkawinan anak sehingga berdampak pada meningkatnya angka kelahiran remaja (ASFR).

Tabel 2.94 Angka Fertilitas Menurut Umur/*Age Specific Fertility Rates* (ASFR) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Fertilitas Menurut Umur/ <i>Age Specific Fertility Rates</i> (ASFR)	30	30,35	31	21,07	27,8

Sumber : Radalgram BKKBN

Ket. *) : Angka Sementara

2.1.2.2.9 Perhubungan

2.1.2.2.9.1 Indeks Aksesibilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 49 TAHUN 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti Aksesibilitas Tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain

dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani.

Indikator Indeks Aksesibilitas di Provinsi Jawa Timur merupakan agregat dari indikator layanan pada seluruh sektor perhubungan meliputi pelayanan angkutan jalan, pelayanan angkutan kereta api, pelayanan angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), pelayanan angkutan laut dan pelayanan angkutan udara. Capaian Tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya *re-focusing* anggaran karena pandemi *Covid-19*. Dan capaian tahun 2021 mengalami peningkatan karena adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi darat, laut dan perkeretaapian.

Tabel 2.95 Indeks Aksesibilitas Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Aksesibilitas	51,8	51,9	51,27	53,2	76,17

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pada pengukuran indikator Indeks Aksesibilitas di tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode perhitungan baru yang merupakan agregat indikator yang menjadi layanan pada sektor Perhubungan, yaitu pada Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Pada pengukuran indikator baru merupakan keterhubungan moda yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2022, capaian Indeks Aksesibilitas adalah sebesar 76,17.

a. Pelayanan Angkutan Jalan

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan jalan disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan angkutan jalan yaitu (1) banyaknya terminal tipe B per 1000 Km² luas daratan Jawa Timur dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas di terminal tipe B terhadap kondisi optimal.

Sebagai implementasi dari UU 23 tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat pelimpahan kewenangan penanganan terminal tipe B dari Kabupaten/Kota, saat ini jumlah terminal tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 27 Terminal Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di terminal tipe B, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan modernisasi pelayanan sehingga kualitas pelayanan diharapkan bisa setara dengan bandar udara. Pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 5 terminal (Anjuk Ladang Nganjuk, Kertajaya Mojokerto, Bunder

Gresik, Maospati Magetan dan Brawijaya Banyuwangi) dan akan dilanjutkan pada terminal-terminal lainnya. Berikut daftar Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur :

Tabel 2.96 Terminal Tipe

No	NAMA TERMINAL	Lokasi
1	Terminal Larangan	Sidoarjo
2	Terminal Bunder	Gresik
3	Terminal Bangkalan	Bangkalan
4	Terminal Ronggosukowati	Pamekasan
5	Terminal Trunojoyo	Sampang
6	Terminal Kertajaya	Mojokerto
7	Terminal Hamid Rusdi	Malang
8	Terminal Landungsari	Malang
9	Terminal Batu	Batu
10	Terminal Anjuk Ladang	Nganjuk
11	Terminal Kesamben	Blitar
12	Terminal Lamongan	Lamongan
13	Terminal Padangan	Bojonegoro
14	Terminal Temayang	Bojonegoro
15	Terminal Betek	Bojonegoro
16	Terminal Caruban	Madiun
17	Terminal Maospati	Magetan
18	Terminal Magetan	Magetan
19	Terminal Ngadirojo	Pacitan
20	Terminal Untung Suropati	Pasuruan
21	Terminal Minak Koncar	Lumajang
22	Terminal Ambulu	Jember
23	Terminal Arjasa	Jember
24	Terminal Bondowoso	Bondowoso
25	Terminal Brawijaya	Banyuwangi
26	Terminal Situbondo	Situbondo
27	Terminal Kepuhsari	Jombang

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan dari tahun ke tahun terus dilakukan penambahan pemasangan untuk memenuhi kondisi jalan yang berkeselamatan. Pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan merupakan upaya untuk menekan tingginya tingkat kejadian kecelakaan pada transportasi jalan dan pada perlintasan sebidang perkeretaapian di Jawa Timur. Pada tahun 2020 jumlah kecelakaan lalu lintas jalan mencapai 21.216 kejadian dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 21.269 kejadian, karena meningkatnya penggunaan kendaraan roda dua/pribadi selama masa pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas jalan adalah sebesar 31.924 kejadian, mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021. Di sisi lain, jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang pada tahun 2021 sebanyak 43 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya menjadi 59 kejadian, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang. Selain itu, penyebab kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang perkeretaapian juga dikarenakan masih banyaknya perlintasan resmi tidak dijaga, yaitu sebanyak 470 dari 949 perlintasan resmi yang ada di Jawa Timur.

Tabel 2.97 Jumlah kejadian kecelakaan transportasi darat

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas jalan	20.791	26.454	21.216	21.269	31.924
Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	47	39	38	43	59

Sumber : Polda Jawa Timur

Data rata-rata persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan terpasang pada tahun 2019 sebesar 71,16 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 44,92 persen dikarenakan adanya *re-focusing* anggaran akibat Pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 capaian rata-rata persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan terpasang jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 45,58 persen. Pada tahun 2022, capaian rata-rata persentase pemenuhan kelengkapan fasilitas jalan terpasang jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 46,91 persen.

Tabel 2.98 Rata-rata persentase pemenuhan fasilitas kelengkapan jalan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata persentase fasilitas kelengkapan jalan terpasang	62,19	71,16	44,92	45,58	46,91

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

b. Pelayanan Angkutan Perkeretaapian

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan perkeretaapian disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan, yaitu (1) banyaknya stasiun kereta api per 1000 Km² luas daratan dan (2) panjang jalur rel per 1000 Km² luas daratan. Jumlah stasiun kereta api yang aktif saat ini sebanyak 120 buah. Untuk panjang lintas jalur kereta api adalah 910 Km, dimana 298 Km diantaranya merupakan jalur ganda (*double track*), yaitu pada lintas utara Surabaya – Bojonegoro sepanjang 133 Km yang telah beroperasi sejak tahun 2014 dan mampu meningkatkan kapasitas perjalanan kereta api dari 56

perjalanan KA per hari menjadi 112 perjalanan KA perhari, serta jalur ganda (*double track*) lintas selatan Madiun – Mojokerto sepanjang 165 Km yang telah beroperasi sejak Oktober 2020. Saat ini sedang dilakukan proses pembangunan jalur ganda lanjutan pada lintas selatan Mojokerto – Sepanjang – Wonokromo sepanjang 40 Km yang diharapkan dapat selesai dan segera beroperasi, sehingga nantinya jalur ini dapat meningkatkan kapasitas perjalanan kereta api dari 42 KA per hari menjadi 84 KA per hari. Pembangunan jalur ganda selanjutnya adalah pada lintas timur Surabaya – Banyuwangi dan lintas lingkaran Bangil – Malang – Blitar – Kertosono.

c. Pelayanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP)

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan SDP disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan yaitu (1) Banyaknya trayek penyeberangan antar pelabuhan per 1000 Km² luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan pelabuhan penyeberangan terhadap kondisi optimal.

Terdapat beberapa trayek penyeberangan di Jawa Timur dengan lintas pelayanan dalam provinsi, yaitu Paciran-Bawean, Gresik-Bawean, Ujung-Kamal, Jangkar-Kalianget, Kalianget-Sapudi, Sapudi-Raas, Jangkar-Raas, Probolinggo-Pamekasan, Kalianget-Kangean, dan Jangkar-Kangean. Selain itu, ada beberapa trayek penyeberangan lintas antar provinsi, yaitu Paciran-Bahaur (Kalimantan Tengah), Surabaya-Kalimantan, Surabaya-Sulawesi, Surabaya-Lembar, Ketapang-Lembar dan Ketapang-Gilimanuk. Saat ini sedang dalam proses pembukaan trayek penyeberangan baru lintas Jangkar-Lembar-Kupang. Beberapa pelabuhan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain Pelabuhan Paciran, Bawean, Jangkar, dan Ketapang.

d. Pelayanan Angkutan Laut

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan laut disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan, yaitu (1) banyaknya pelabuhan laut per 1.000 Km² luas perairan dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan pelabuhan laut terhadap kondisi optimal. Penetapan pelabuhan laut di Jawa Timur tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yang terdiri dari Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Terdapat beberapa pelabuhan yang telah beroperasi dan sedang dikembangkan kualitas pelayanannya, antara lain Pelabuhan Brondong, Probolinggo, Boom Banyuwangi, Gili Ketapang, Gili Mandangin, Gili Raja dan Gili Genting. Sedangkan Pelabuhan Prigi secara teknis kepelabuhanan, dapat

dinyatakan layak operasi secara minimal, tetapi masih terkendala terkait jalan akses dari dan menuju pelabuhan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pembagian kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pelabuhan Pengumpan Regional. Terdapat 14 pelabuhan pengumpan regional yang telah beroperasi di Jawa Timur, namun untuk pengelolaannya masih menunggu Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) pelabuhan regional dari Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2022, Kementerian Perhubungan melaksanakan Serah Terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) 4 pelabuhan regional kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain Pelabuhan Bawean, Sapeken, Kangean dan Masalembu.

Tabel 2.99 Pelabuhan Regional di Jawa Timur

No	Kab/ Kota	Pelabuhan
1.	Kab. Bangkalan	Telaga Biru
2.	Kab. Banyuwangi	Ketapang, Boom
3.	Kab. Gresik	Bawean
4.	Kab. Lamongan	Brondong
5.	Kab. Pamekasan	Branta
6.	Kab. Pasuruan	Pasuruan
7.	Kab. Sampang	Sampang
8.	Kab. Situbondo	Panarukan
9.	Kab. Sumenep	Kalianget, Masalembu, Sapudi, Sapeken, Kangean

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

e. Pelayanan Angkutan Udara

Pengukuran indikator untuk pelayanan angkutan udara disusun berdasarkan kontribusi dari dua sub layanan, yaitu (1) banyaknya bandar udara per 1.000 KM² luas wilayah (daratan dan perairan) dan (2) persentase pemenuhan kelengkapan bandar udara terhadap kondisi optimal. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 6 bandar udara yang melayani penerbangan sipil, yaitu Bandara Juanda Surabaya, Abd. Saleh Malang, Banyuwangi, Notohadi Negoro Jember, Trunojoyo Sumenep dan Harun Tohir Bawean Gresik. Selain 6 bandara tersebut, sedang dipersiapkan untuk pengoperasian Bandara Pagerungan (dalam proses pengurusan ijin operasional di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara), Bandara Kangean dan Masalembu (dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi), serta Bandara Kediri (sedang dalam proses pembangunan).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengelola salah satu dari ke-enam bandara yang ada di Jawa Timur, yaitu Bandara Abd. Saleh Malang. Dalam perencanaannya Terminal Abdulrachman Saleh direncanakan hanya untuk

menampung 250 ribu/ tahun. Hal tersebut yang menyebabkan layanan Bandara Abdulrahman Saleh mengalami *over capacity*. Pada tahun 2018 jumlah penumpang bandara tercatat sebanyak 1.332.863 orang dan pada tahun 2019 menurun menjadi 893.813 orang. Namun pada Tahun 2020 dan 2021, arus penumpang di Bandar Udara Abdurachman Saleh mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, arus penumpang di Bandar Udara Abdurachman Saleh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang melakukan upaya peningkatan kapasitas pelayanan dengan rencana perpanjangan runway dan pembangunan terminal terintegrasi.

Tabel 2.100 Arus Penumpang Bandara Abdulrahman Saleh

Jumlah penumpang (Orang)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
- Berangkat	671.813	452.594	148.531	82.139	178.171
- Datang	661.050	441.219	133.950	74.572	173.435
JUMLAH	1.332.863	893.813	282.481	156.711	351.606

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.9.2 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Kategori sub sektor transportasi mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

Tabel 2.101 Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jatim

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB	2,99	2,94	2,70	2,67*	3,03**
- Sub Kategori Transportasi (Angkutan Laut)	0,25	0,25	0,23	0,22*	0,25**
- Sub Kategori Transportasi (Angkutan Udara)	0,57	0,47	0,28	0,28*	0,43**
- Sub Kategori Transportasi (Angkutan Penyeberangan)	0,03	0,03	0,02	0,02*	0,02**
- Sub Kategori Transportasi (Angkutan Darat)	1,06	1,10	1,08	1,11*	1,23**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Ket. : *) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sub sektor transportasi memiliki peran vital sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas ekonomi di Jawa Timur. Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 2,99 persen, dan pada tahun 2019 sedikit menurun menjadi 2,94 persen. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebesar 2,70 persen dan tahun 2021 sebesar 2,67 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemi *Covid-19* yang sangat mempengaruhi sektor transportasi di Jawa Timur. Pandemi *Covid-19* ini sangat berpengaruh terhadap sektor transportasi dikarenakan menjadi faktor penyebab adanya keterbatasan mobilitas masyarakat, pemberlakuan pengetatan pelayanan transportasi seperti adanya syarat *rapid* maupun *swab test*, pembatasan perjalanan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2022, Persentase Sub Sektor Transportasi terhadap PDRB di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, yaitu menjadi sebesar 3,03 persen, hal tersebut dikarenakan peningkatan pergerakan masyarakat pasca menurunnya Pandemi Covid-19.

2.1.2.2.9.3 Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan

Dasar dilaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan adalah sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan implementasi terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan perubahan urusan

kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Unsur penilaian SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik antara lain: Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan; Waktu Penyelesaian Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta Sarana dan Prasarana. Masing-masing unsur tersebut disurvei pada 11 UPT PPP LLAJ di Jawa Timur dan juga Terminal Tipe B yang menjadi kewenangan masing-masing UPT PPP LLAJ tersebut. Penentuan jumlah sampel untuk analisa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), menggunakan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Tabel 2.102 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan	83,60	79,77	81,87	88,28	83,35

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2019 terdapat penurunan rata-rata IKM terhadap pelayanan perhubungan, yakni dari angka 83,60 di tahun 2018 menjadi 79,77 di tahun 2019. Penurunan nilai IKM ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya persaingan pada jarak dekat dengan pelayanan kendaraan pribadi (R2), dan layanan angkutan online yang berpengaruh pada pendapatan pengemudi sehingga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan seperti menurunnya kesadaran terhadap keselamatan dari pengemudi, kendaraan yang belum memenuhi aspek kenyamanan, keselamatan dan ketepatan waktu. Namun pada tahun 2020 capaian Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan mengalami peningkatan menjadi 81,87 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 karena adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan layanan transportasi darat, laut dan perkeretaapian. Pada tahun 2022 Rata-rata IKM terhadap Pelayanan Perhubungan mengalami penurunan yaitu menjadi 83,35, hal tersebut dikarenakan peningkatan pergerakan masyarakat pasca menurunnya Pandemi Covid-19.

2.1.2.2.10 Komunikasi dan Informasi

Upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, tidak hanya membutuhkan perubahan karakter, mentalitas, atau pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan publik, tapi juga membutuhkan reformasi sistem dan pola kerja. Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.103 Indeks SPBE

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	2,92	3,10	3,40	2,82	3,30

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) mulai tahun 2021 terdapat perubahan instrumen pengukuran pada penilaian evaluasi SPBE yang telah disesuaikan dari sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 sehingga terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, domain layanan SPBE memiliki nilai tertinggi sedangkan nilai terendah pada domain manajemen SPBE.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dimana pada aspek ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kelebihan pada layanan administrasi pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengelolaan BMN, dan pengawasan internal telah saling terintegrasi dengan penggunaan aplikasi umum yang berbagi pakai, sehingga menjadi kekuatan bagi Pemprov Jawa Timur. Selain itu pada aspek layanan publik berbasis online, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Layanan pengaduan layanan publik, serta layanan dokumentasi dan informasi hukum yang mengkomodifikasi fitur transaksional dan terintegrasi. Selanjutnya Layanan publik unggulan seperti implementasi e-Samsat, JOSS, dan PPDB telah bersifat transaksional serta terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi terkait, dan telah dilakukan pengembangan aplikasi layanan secara berkelanjutan, dimana keseluruhan

aspek tersebut mejadi kekuatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan SPBE.

2.1.2.2.11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

2.1.2.2.11.1 Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur

Melihat kontribusi sektor riil di Jawa Timur selama kurun waktu empat tahun terakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa peran koperasi dan UMKM di Jawa Timur cukup signifikan bagi perekonomian daerah khususnya kontribusinya bagi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Hasil perhitungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPS Jawa Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi sebesar 56,94%*) terhadap perekonomian Jawa Timur pada Tahun 2019. Di samping perannya bagi perekonomian daerah, koperasi dan UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan sumber hasil survei perhitungan Nilai Tambah K-UMKM yang dilakukan setiap tahun, pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami kontraksi mencapai -3,31 persen yang merupakan dampak dari terjadinya pandemi covid – 19 sehingga perekonomian mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Namun kondisi tersebut menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 sehingga pertumbuhan PDRB KUMKM mencapai 8,84 persen. Begitupula pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,19 persen dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 karena pada tahun 2021 terdapat kondisi akselerasi pemulihan ekonomi dengan adanya vaksinasi covid – 19, sedangkan pada tahun 2022 kondisi perekonomian mulai cukup stabil seiring dengan kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.104 Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan PDRB Koperasi dan UKM	5,50	5,78	-3,31	8,84	7,19

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
Ket, *) : Angka Sementara

2.1.2.2.11.2 Perkembangan Keragaan Koperasi di Jawa Timur

Jumlah Koperasi di Jawa Timur per Triwulan IV 2022 adalah sebanyak 37.283 unit, dengan koperasi aktif sebanyak 22.979 unit atau 61,63%. Terjadi kenaikan jumlah 0,69% jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2021. Seiring dengan upaya reformasi koperasi (rehabilitasi) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota juga melakukan pemetaan kembali pada jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Rehabilitasi tersebut merupakan upaya pemulihan terhadap kedudukan dengan merubah paradigma dari pendekatan Kuantitas menjadi pendekatan Kualitas yang mengarah pada digitalisasi koperasi. Secara rinci, data keragaan koperasi di Jawa Timur ditunjukkan pada tabel 2.5. Berdasarkan data di bawah ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Tahun 2021, modal sendiri naik sebesar 3,26%, dikarenakan jumlah koperasi di Jawa Timur naik, akan tetapi volume usaha mengalami penurunan 5,77% dikarenakan adanya penambahan jumlah koperasi - koperasi baru yang belum bisa melakukan usahanya secara optimal.

Tabel 2.105 Keragaan Koperasi di Jawa Timur

No	Uraian	Satuan	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
1	Total Koperasi	Unit	35.583	36.417	37.283
	Koperasi Aktif	Unit	22.450	22.848	22.979
	Koperasi Tdk Aktif	Unit	13.133	13.569	14.304
2	Koperasi bersertifikat	Unit	10.493	13.245	13.486
3	Anggota	Org/Kop	3.925.385	3.820.616	4.124.803
4	RAT	Kop	13.357	11.126	12.385
5	Manager	Orang	2.681	2.222	2.219
6	Karyawan	Orang	177.915	146.342	42.072
7	Modal Sendiri	Rp.000	14.073.006.896	20.841.516.203	22.384.253.074.439
8	Modal Luar	Rp.000	14.571.593.288	24.595.689.632	19.373.786.370.804
9	Total Asset	Rp.000	32.623.359.517	47.906.481.684	41.758.039.445.243
10	Volume Usaha	Rp.000	34.920.954.707	32.560.604.622	32.713.391.891.034
11	S H U	Rp.000	1.314.928.525	1.208.070.334	1.299.768.774.208

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan jaringan serta *networking* KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Jawa Timur melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 62 UKM untuk mengikuti 8 (delapan) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang dihasilkan mencapai 186 Juta rupiah. Rata-rata omset pameran per UKM per event adalah sebesar 3 Juta rupiah. Nilai omset pameran berbeda-beda tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang mana di Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) daerah tujuan misi dagang yaitu di Maluku Utara, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Selain melalui pameran dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan market place online (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2021 telah difasilitasi 343 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.

Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 16.223 unit atau sebesar 72.09% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi di Provinsi Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020, maka terjadi peningkatan jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV 2020 ke Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebesar 3,32%. Sedangkan untuk jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 2,67%. Hal ini karena semakin banyaknya koperasi yang tidak aktif. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan modal sendiri sebesar 48,1% pada tahun 2020 periode yang sama.

2.1.2.2.12 Penanaman Modal

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor

kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan. Perkembangan nilai realisasi investasi ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.106 Nilai Realisasi Penanaman Modal di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Realisasi Penanaman Modal (trilyun Rp.)	155.65*	-	-	-	-
	51,20	58,45	78,30	79,50	110,3

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim
Ket. *) : Terdapat Komponen Penanaman Modal Non Fasilitas

Capaian realisasi penanaman modal di Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2018-2022) memiliki kecenderungan meningkat. Realisasi penanaman modal di Jawa Timur mencapai Rp. 110,3 triliun pada tahun 2022. Realisasi ini meningkat 38,8 persen dari tahun 2021 (y on y), serta lebih tinggi dari pertumbuhan investasi nasional yang tumbuh sebesar 34 persen. Realisasi investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 44,9 triliun yang meningkat sebesar 66,7 persen dari tahun 2021 (y on y) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 65,4 triliun yang meningkat sebesar 24,5 persen dari tahun 2021 (y on y).

Dalam mendukung peningkatan investasi di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh amanat Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan wilayah Jawa Timur, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan, dan Kawasan Bromo Tengger

Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Percepatan tersebut dilakukan melalui proyek proyek strategis yang diharapkan dapat mendukung pembangunan di Jawa Timur dengan fokus pembangunan kewilayahan. Dengan skema pendanaan proyek yang tidak terbatas pada APBN/APBD, namun juga skema KPBU.

2.1.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.1.2.2.13.1 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta berperan penting untuk memetik bonus demografi. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penyusunan IPP mengacu pada tiga lapisan domain pembangunan pemuda, yakni

pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

Tabel 2.107 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	53,17	52,50	53,00	53,50	56,33*

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
*Ket. *) : Angka sementara, masih dalam proses validasi Bappenas dan BPS*

Dalam Periode 2018-2022 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mengalami capaian fluktuatif. Namun tahun 2022, IPP masih angka exercise/ sementara dari Kementerian Pemuda RI, dalam proses validasi BAPPENAS dan BPS. Diharapkan IPP tiap tahun meningkat sehingga diharapkan peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan dapat mempercepat keberhasilan mensejahterakan masyarakat.

2.1.2.2.13.2 Jumlah Atlet yang Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional

Atlet merupakan olahragawan yang berpartisipasi dalam suatu kompetisi olahraga kompetitif. Dalam suatu pertandingan atau kompetisi kemenangan merupakan suatu kebanggaan dan prestasi serta keinginan bagi setiap orang yang mengikuti pertandingan tersebut khususnya pada pemain atau atlet.

Tabel 2.108 Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional Dan Internasional

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Atlet Berprestasi Nasional Dan Internasional	1.085	1.300	0	500	840

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

Jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 1.085 orang, sedikit menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 1.088 orang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tidak ada, hanya ada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil). Walaupun pada Popwil

Jawa Timur menjadi juara umum, namun olahraga yang dilombakan di Popwil lebih sedikit dibandingkan dengan Popnas. Baru di tahun 2019 jumlah atlet berprestasi di Jawa Timur meningkat menjadi 1.300 orang, hal ini karena adanya penyelenggaraan Popnas tahun 2019 di Jakarta. Sedangkan tahun 2020 capaian jumlah atlet berprestasi tidak ada karena tidak terselenggaranya event-event olahraga yang disebabkan oleh Dampak Pandemi Covid 19 dan adanya regulasi atau surat edaran dari Kemenpora RI Nomor: 6.11.1 / MENPORA /VI/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup dalam Tatanan Normal Baru. Dan di tahun 2022 Jumlah Atlet Berprestasi Nasional dan Internasional Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan menjadi 840 Atlet, dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 500 Atlet.

2.1.2.2.13.3 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi

Pemuda sejatinya memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Tabel 2.109 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi	16,34	17,83	17,92	17,96	19,48*

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur
Ket.n *) : Data Estimasi dengan metode proyeksi, data akhir rilis awal Juli 2023

Perkembangan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 15,03 persen, naik menjadi 17,96 persen di tahun 2021. Selanjutnya, data estimasi dengan metode proyeksi di tahun 2022 menjadi 19,48 persen dikarenakan data akhirnya rilis di awal bulan Juli 2023. Kenaikan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat juga meningkatkan pertumbuhan

ekonomi sebagai salah satu wujud partisipasi pemuda berperan aktif dalam pembangunan.

2.1.2.2.14 Statistik

Data merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/ investor.

Ketersediaan dokumen statistik pada capaian tahun 2018 masih belum optimal dikarenakan urusan statistik merupakan rumpunan baru yang mulai dilaksanakan pada tahun awal tahun 2018 seiring dengan perubahan RPJMD sehingga merupakan program dan kegiatan baru pada Dinas Kominfo. Ketersediaan dokumen statistik dalam rangka mendukung Jawa Timur *Smart Province* yaitu *Smart Economy*, *Smart Environment*, dan *Smart Government*.

Capaian Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu pada tahun 2019 sebesar 70 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,37 persen dikarenakan adanya *recofusing* anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat menerbitkan buku infografis. Di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 50 persen, dan tercapai 100 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.110 Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu	70	0,37	50	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022, Dinas Kominfo menentukan target infografis sejumlah 4 buku yang akan diterbitkan, dan keseluruhan target ini dapat dipenuhi untuk rilis pada tahun 2022, sehingga realisasi indikator persentase release data statistik akurat yang tepat waktu dapat tercapai 100 persen. Capaian ini juga didukung dengan adanya komitmen kerjasama antara Dinas Kominfo selaku walidata bersama dengan Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Timur selaku Pembina data untuk mendukung Satu Data Jawa Timur. Dengan adanya komitmen kerjasama antara Pembina data dan walidata mendorong percepatan integrasi data, penyusunan metadata, serta terselenggaranya Sata Award yang

memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang telah memenuhi komitmen pengisian data pada portal satu data Jawa Timur. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Satu Data Jawa Timur dapat tercapai lebih cepat, terutama dengan adanya pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam aplikasi SATA yang berbasis *Big Data* dan memanfaatkan IoT serta teknologi AI sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan yang efisien dan tepat sasaran, serta mendukung penerapan *e-government* Jawa Timur.

2.1.2.2.15 Persandian

Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara.

Tabel 2.111 Persentase Informasi Persandian yang Diamankan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	27,5	35,0	35,4	40,9	45,2

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

Capaian persentase informasi persandian yang diamankan selalu meningkat setiap tahunnya, dari 27 persen di tahun 2017 meningkat menjadi 40,9 persen di tahun 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk GOV CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/KPTS/013/2020 tentang Tim Respon Insiden Keamanan Komputer Provinsi Jawa Timur, dan merupakan Provinsi pertama yang telah membentuk dan melaunching GOV CSIRT. Urusan persandian dan keamanan informasi dapat mengoptimalkan pengamanan informasi elektronik dan non elektronik yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan memanfaatkan JatimProv-CSIRT yang terbentuk tahun 2020.

Urusan persandian pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Seksi Persandian dan Keamanan Informasi yang memiliki keterbatasan anggaran dan kewenangan karena diampu oleh satu seksi, dimana ironisnya

pada era keterbukaan informasi seperti sekarang sangat dibutuhkan keamanan informasi dan manajemen penanganan insiden cyber yang mungkin terjadi. Persentase Informasi Persandian yang diamankan mencapai 45,2% pada tahun 2022 didukung oleh adanya peningkatan kesadaran Perangkat Daerah tentang keamanan informasi meskipun masih sangat minim jika berpedoman kepada Indeks KAMI (Keamanan Informasi), bahkan seringkali aplikasi Pemerintahan merupakan aplikasi yang rentan pada serangan hacker, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM pada masing-masing perangkat daerah yang menangani tentang teknologi informasi mengenai pentingnya upaya pencegahan insiden cyber.

2.1.2.2.16 Kebudayaan

2.1.2.2.16.1 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional

Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering melihat karya seni yang sangat beragam dan pada karya seni tersebut tak jarang kita juga telah melakukan suatu penghargaan atau penilaian pada karya seni tersebut. Seni Budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Tabel 2.112 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional	22	37	6	-	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/Internasional pada tahun 2019 sebesar 37 penghargaan dan pada tahun 2020 hanya memperoleh 6 penghargaan. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh aspek terutama anggaran dan kegiatan, kegiatan festival tingkat nasional banyak yang ditiadakan guna mencegah penyebaran Covid-19.

Pada tahun 2022 kegiatan apresiasi budaya lokal di tingkat nasional berkurang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga kegiatan apresiasi yang diikuti hanya Anugerah Kebudayaan Indonesia dimana Jawa Timur mendapatkan 3 (tiga) kategori yaitu Kategori Lembaga yang didapatkan oleh Kabupaten Ponorogo, Kategori anak remaja yang didapatkan oleh Nabil Ekri R.E dan Kategori Media melalui Media Panjebur Semangat

2.1.2.2.16.2 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan benda, situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu kepedulian terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan memelihara keberadaannya memberikan kontribusi bagi kelestarian cagar budaya itu sendiri. Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan tahun 2019 sebesar 10,58 persen dan tercapai 8,78 persen pada tahun 2020, serta telah mencapai target tahun 2019 dan 2020 sesuai yang ditetapkan di RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, masing-masing sebesar 2 dan 2,1 persen. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan terus memperhatikan cagar budaya agar kelestariannya dapat terjaga dengan baik.

Tabel 2.113 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	10,58	8,78	9,62	2,14

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022 terdapat 11 (sebelas) cagar budaya yang masuk dalam pemeringkatan Jawa Timur dan naik dari 514 cagar budaya pada tahun 2021 menjadi 525 cagar budaya pada tahun 2022.

2.1.2.2.16.3 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan

Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Timur. Indikator ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) obyek meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Terdapat 5.489 objek pemajuan kebudayaan yang sudah terdata dengan baik dan menjadi sasaran kegiatan untuk dilestarikan keberadaannya. Pada tahun 2020 setelah perubahan anggaran akibat pandemi Covid 19, hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara virtual karena kegiatan penampilan, pagelaran dan penyajian seni budaya tidak dapat dilakukan secara

offline karena rawan pelanggaran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Realisasi persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan adalah 7,72 persen atau sebanyak 435 obyek pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.114 Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	5,65	5,45	5,99	7,72	10,09

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022 terdapat 84 jenis seni dan 36 karya seni baru yang merupakan bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan menjadi 554 OPK.

2.1.2.2.17 Perpustakaan

Kegemaran membaca adalah perilaku masyarakat berpengetahuan. Membaca sebagai kegiatan konstruktif dapat membangun pola pikir sehingga kemampuan seseorang dapat menjawab dan menerima segala pergumulan hidup dan bahkan dapat lebih kreatif, inovatif dan mampu keluar dari segala persoalan hidupnya. Membaca tidak eksklusif, membaca tidak memandang usia, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial. Disinilah pentingnya budaya baca sebagai bagian integral dari budaya kolektif masyarakat Indonesia yang perlu diperjuangkan dan diupayakan terus menerus dan berkelanjutan tanpa bersyarat baik pada usia dini dan juga usia lanjut sepanjang hayat.

Hasil Kajian Perpusnas Indeks Kegemaran Membaca Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mencapai sebesar 63,96 dan tahun 2021 meningkat menjadi 64,20. Pada tahun 2022, hasil kajian Perpusnas kembali menunjukkan adanya peningkatan Indeks Kegemaran Membaca Jawa Timur menjadi sebesar 68,54. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan masyarakat dalam frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah bahan bacaan. Disamping itu Pemerintah Jawa Timur telah melakukan pendekatan diri dengan masyarakat lewat penyediaan bahan bacaan yang lebih banyak, variatif, dan menggerakkan kegiatan promosi, publikasi, pameran, mobil perpustakaan keliling, lebih banyak menginisiasi masyarakat untuk membentuk sudut baca, taman bacaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan perpustakaan selama 7 hari, 24 jam dengan perpustakaan digital/e-library.

Tabel 2.115 Indeks Kegemaran Membaca

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kegemaran Membaca	39,69	62,65	63,96	64,20	68,54 (belum expose)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

2.1.2.2.18 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan). Capaian Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur diperoleh dari nilai pengawasan eksternal sebesar 60% ditambah nilai pengawasan internal sebesar 40%. Pengawasan eksternal kearsipan dilakukan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Jawa Timur terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sedangkan pengawasan internal Kearsipan dilakukan di perangkat daerah di lingkungan provinsi Jawa Timur.

Kebijakan/peraturan kearsipan sangat dibutuhkan utamanya dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan. Dalam penyelenggaraan kearsipan setiap aspeknya harus ada dasar hukum/peraturan/pedoman yang mengatur. Lembaga kearsipan berupaya dalam mencukupi pemenuhan kebijakan/pedoman/ peraturan kearsipan dengan selalu menyusun peraturan/pedoman teknis kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, lembaga kearsipan kabupaten kota dan lembaga pendidikan, organisasi profesi, ormas, orsospol dan perseorangan yang meliputi penyediaan pedoman kearsipan, koordinasi penyelenggaraan kearsipan, supervisi, sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan. Pembinaan kearsipan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan kearsipan utamanya untuk perangkat daerah.

Pengolahan arsip dibedakan menjadi pengolahan arsip dinamis dan pengolahan arsip statis. Pengolahan arsip dinamis menjadi tugas dan tanggungjawab perangkat daerah. Sedangkan Pengelolaan arsip statis menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi. Output dari pengolahan arsip statis digunakan sebagai layanan kearsipan untuk masyarakat umum. Capaian hasil pengawasan kearsipan sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari Indeks Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.116 Indeks Penyelenggaraan Kearsipan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	88,18	76,70	81,42	82,59	91,44

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Indeks penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur sempat mengalami penurunan di tahun 2019, namun kembali membaik di tahun 2020 sebesar 81,42 dan di tahun 2021 sebesar 82,59. Pada tahun 2022 hasil Indeks Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Timur naik sebesar 91,44 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Hal ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota di Jawa Timur semakin baik dalam pengelolaan (tertib) arsip. Peningkatan Indeks Penyelenggaraan Kearsipan didukung oleh bertambahnya sumber daya manusia kearsipan, arsiparis maupun pengelola kearsipan baik di lembaga kearsipan kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi; Peraturan/pedoman teknis kearsipan yang sudah ditetapkan; Pengelola arsip statis dengan disusunnya sarana bantu temu balik arsip statis dan Pengelolaan arsip dinamis, khususnya dalam penyusunan arsip.

2.1.1.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya.

Tabel 2.117 Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (%)	5,86	6,00	5,64	5,62	5,65
Pertumbuhan PDRB Pariwisata	6,83	6,92	-9,60	6,33	13,53

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur *) Angka Sementara (data PDRB sudah menggunakan angka hasil survey di 38 kabupaten/kota yang dibuat oleh konsultan ahli dengan memasukkan sektor-sektor pendukung yang masuk dalam KLBI)

Sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 di dunia dan meluas di Indonesia sejak Februari 2020, menyebabkan pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh berbagai negara hingga berakibat pada

turunnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur. Seiring dengan turunnya konsumsi wisatawan. Hal serupa juga terjadi pada wisatawan Nusantara yang melakukan penundaan perjalanan wisata dikarenakan kekhawatiran terhadap pemberlakuan protokol kesehatan serta dampak kesehatan dari penyebaran Covid-19. Accupancy hotel dan restoran mengalami penurunan, tempat pariwisata atau DTW turun sampai 11 persen, serta seluruh angkutan wisata turun drastis sampai 20 persen, industri pendukung pariwisata turun, pertandingan olahraga turun, yang masih bertahan adalah siaran radio, televisi dan pendidikan kesenian dan olahraga. Artinya dengan kondisi pertumbuhan sektor pendukung pariwisata yang minus atau turun drastis pada tahun 2020 maka pertumbuhan pariwisata juga turun atau berkontraksi sebesar 9,60 persen.

Seiring terkendalinya Covid-19, pariwisata Jawa Timur mengalami kenaikan dengan pertumbuhan PDRB di tahun 2022 sebesar 13,53 persen dengan kontribusi sebesar 5,65 persen. Secara kumulatif di tahun 2022 jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, baik wisatawan yang menginap di akomodasi maupun wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, hal ini seiring dengan mebaiknya aktivitas ekonomi di Jawa Timur.

Tabel 2.118 Jumlah Wisatawan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021	2022
Nusantara					
- Menginap di Akomodasi	7.256.013	9.531.282	5.052.465	5.500.540	8.478.052
- Kunjungan ke Obyek Wisata	70.935.415	82.561.561	30.411.085	31.073.110	69.708.013
Mancanegara					
- Menginap di Akomodasi	830.968	770.826	113.355	41.469	191.395
- Kunjungan ke Obyek Wisata	457.077	643.791	65.163	9.766	119.663
- Melalui Bandara Juanda	322.965	243.899	34.977	689	67.793

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Sementara itu berdasarkan tabel dibawah nampak bahwa tahun 2020 jumlah daya tarik wisata di Jawa Timur sebanyak 969, dengan usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, restoran/rumah makan dan perjalanan

wisata masing-masing sebanyak 2.913 akomodasi, 4.323 restoran/rumah makan dan 774 usaha perjalanan wisata. Dalam rangka penguatan SDM para pelaku pariwisata dari total jumlah tenaga kerja bidang pariwisata tahun 2020 sebanyak 101.170 tenaga kerja, 206 tenaga kerja merupakan tenaga kerja terlatih di bidang pariwisata, angka tersebut jika dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan dikarenakan akibat dampak pandemi Covid 19 yang berdampak pada pengurangan anggaran dan kegiatan. Untuk tenaga kerja telah memiliki sertifikasi tenaga kerja bidang pariwisata sebesar 6.861 tenaga kerja di Tahun 2020. Indikator pengembangan destinasi pariwisata mulai membaik di tahun 2021 dan 2022 seiring meredanya kasus covid-19.

Tabel 2.119 Pengembangan Destinasi Pariwisata di Jawa Timur

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Daya Tarik Wisata	Unit	808	808	969	1.316	1.368
Usaha Sarana Wisata (Akomodasi)	Unit	2.180	2.217	2.913	3.617	2.973
Usaha Sarana Wisata (Restoran dan Rumah Makan)	Unit	4,169	4.203	4.323	5.402	4.084
Usaha Perjalanan Wisata	Unit	1,872	1.786	774	1.792	1.603
Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	277.159	284.467	101.170	78.472	78.472
Tenaga Kerja Terlatih Bid. Pariwisata	Orang	476	418	206	388	388
Tenaga Kerja Bersertifikat Bid. Pariwisata	Orang	5.855	4.574	6.861	3321	3.321

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi Jawa Timur

Ket. *) : Angka Sementara

2.1.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.2.1 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik

dibandingkan tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Perhitungan NTN pada tahun 2015 hingga 2018 menggunakan tahun dasar 2012 = 100, sedangkan mulai tahun 2019 menggunakan tahun dasar 2018 = 100.

Tabel 2.120 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	126,90	98,44	95,77	101,11	103.75

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2022 mengalami peningkatan di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan daya tukar dari produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produks. Jika dilihat per bulan, NTN Jawa Timur di tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021 pada bulan Januari – Agustus, namun pada bulan September – Desember 2022 lebih rendah dibanding tahun 2021.

2.1.3.3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan

PDRB sub kategori pertanian merupakan bagian dari PDRB Kagori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Laju pertumbuhan PDRB sub kategori perikanan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,71 persen.

PDRB Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

Tabel 2.121 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan	-0,86	-0,09	-0,69	2,99	5,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.3.3.3 Pertanian

Secara keseluruhan tahun 2020, PDRB Jawa Timur mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu, dimana perlambatan terjadi pada hampir seluruh komponen permintaan akibat pandemi COVID -19 dan berdampak pada

penurunan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah, investasi, dan net ekspor antar daerah.

Sampai dengan akhir 2021, PDRB ADHB kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jawa Timur mencapai 282.386,48 Milyar Rupiah, sedangkan PDRB ADHK mencapai 170.558,53 Milyar Rupiah.

Tabel 2.122 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020*	2021	2022
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,13	1,31	1,01	1,77	1,79
- Sub Kategori Tanaman Pangan	-4,10	-1,26	1,02	-0,09	-1,39
- Sub Kategori Tanaman Hortikultura	-2,62	3,69	6,60	0,67	6,15
- Sub Kategori Perkebunan	-0,07	4,21	-0,33	1,04	-0,28
- Sub Kategori Peternakan	-1,30	2,56	2,38	3,31	1,79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 1,79 persen pada tahun 2022, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 1,77 persen. Namun jika dilihat dari sub kategori, terdapat sub kategori yang mengalami kontraksi yakni sub kategori tanaman pangan dan perkebunan.

Sejak awal Mei 2022, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mulai menyebar di Jawa Timur, menyebabkan penyakit dan berisiko kematian pada ternak dan hewan berkaki empat non ternak, antara lain : sapi, kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, domba dan babi. Diperkirakan 7.000 an hewan ternak terjangkit PMK di Jawa Timur pada akhir Mei 2020. Dampak wabah ini adalah berupa penurunan produksi daging, dan akan mempengaruhi sub sektor Peternakan dan industri berbahan baku daging. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah sigap dan segera melakukan upaya penanggulangan penyebaran wabah PMK antara lain melalui pengendalian mobilitas ternak, penanganan medis veteriner ternak terjangkit, dan pelaksanaan vaksin PMK yang akan dilaksanakan segera melalui Belanja Tidak Terduga dan/atau Belanja Barang dan Jasa pada P-APBD mendahului Tahun Anggaran 2022. Diharapkan pada tahun 2023 sub sektor Peternakan, dan industri berbahan baku daging dapat pulih kembali dan tumbuh.

2.1.3.3.4 Kehutanan

2.1.3.3.4.1 Indeks Tutupan Hutan

Penghitungan Indeks Tutupan Hutan (ITH) dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Perkembangan pada tahun 2018 capaiannya sebesar 55,47 dan rata-rata meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2022 menjadi 55,95. Semakin luas tutupan hutan maka keanekaragaman hayati semakin tinggi.

Tabel 2.123 Indeks Tutupan Hutan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Tutupan Hutan	55,47	55,92	55,90	55,94	55,95

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

2.1.3.3.4.2 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu

Kehutanan dan penebangan kayu merupakan salah satu sub kategori perekonomian di dalam kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Produksi sektor kehutanan dapat bersifat ekstraktif berupa kayu hutan, rotan, daun, buah dan lain-lain; dan dapat berupa produk non-ekstraktif seperti rekreasi dan wisata hutan lainnya. PDRB sub kategori kehutanan dan penebangan kayu memiliki kecenderungan naik meskipun capaiannya masih fluktuatif setiap tahunnya, namun sejak tahun 2020 selalu mengalami peningkatan.

Tabel 2.124 PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu (Milyar Rupiah)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu	9.814,4	10.618,2	10.189,3	11.291,9	12.241,1

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.1.3.3.5.1 PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian

Sumbangan PDRB Pertambangan dan Galian terhadap perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 4,36 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3,94 persen. Sedangkan untuk pertumbuhannya pada tahun 2022 berkontraksi sebesar 7,04 persen. Sumbangan PDRB sektor ESDM di Jawa Timur oleh produksi sumber daya pertambangan, minyak, gas

dan panas bumi dikelompokkan pada sub kategori pertambangan dan penggalian lainnya.

Tabel 2.125 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalian

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perambangan dan Penggalian	2,40	1,54	-3,52	-4,48	-7,04
Kontribusi terhadap Total PDRB	4,30	4,00	3,52	3,94	4,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan PDRB pertambangan dan penggalian cenderung berfluktuasi, volatilitas pertumbuhannya dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia dan lifting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan penyebab terkontraksinya PDRB pertambangan dan penggalian di tahun 2021 dan 2022 salah satunya dipengaruhi penurunan lifting sektor pertambangan dan penggalian di Jawa Timur. Untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Galian di Jawa Timur dapat dilakukan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai kewenangan masing-masing.

2.1.3.3.5.2 Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktifitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktivitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistriki dengan total rumah tangga.

Tabel 2.126 Rasio Elektrifikasi (%) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Elektrifikasi (%)	94,64	99,29	102,57	105,47	-
		98,39*	98,86*	99,08*	99,39*

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

*Ket. *) : perubahan konsep perhitungan*

Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat, yaitu dari 94,64 persen pada tahun 2018 menjadi 99,39 persen pada tahun 2022. Di tahun 2022 terdapat

koreksi perhitungan rasio elektrifikasi, dimana Nomor Induk Kependudukan yang memiliki lebih dari satu ID Pelanggan tetap dihitung satu ID Pelanggan. Peningkatan rasio elektrifikasi ini menjadi indikasi bahwa pelayanan akan listrik di Jatim semakin baik dan hampir bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada capaian kinerja dari masing-masing pelanggan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim. Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, dan Situbondo, Rasio Elektrifikasinya masih relatif rendah.

2.1.3.3.5.3 Bauran Energi Baru Terbarukan

Solusi untuk meningkatkan ketahanan energi adalah dengan pemanfaatan energi baru terbarukan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil adalah dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Dalam kebijakan energi nasional pada tahun 2025 terwujudnya elastisitas energi yaitu pengurangan porsi BBM dalam komposisi energi primer hingga 20% dan optimalisasi bahan bakar batubara 33% dan gas 30%, sisanya dengan meningkatkan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT). Sedangkan penggunaan energi fosil utamanya Minyak Bumi dan Batubara di Provinsi Jawa Timur harus disubstitusi dengan EBT untuk meningkatkan ketahanan energi daerah. Terdapat perubahan formulasi baru perhitungan Bauran Energi dari Dewan Energi Nasional (DEN) berupa Pemutakhiran Faktor Konversi pada energi primer yakni Batubara (perubahan faktor konversi 3,4417 menjadi 4,200) dan kayu bakar (formulasi awal energi kayu bakar belum dimasukkan sedangkan formulasi baru kayu bakar dihitung dalam bauran energi), sehingga mempengaruhi energi primer lainnya. Adapun komposisi Bauran Energi Terbarukan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 4,47 persen di tahun 2018 menjadi 9,36 persen di tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya intervensi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemanfaatan energi baru terbarukan.

Tabel 2.127 Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	4,47	5,26	6,22	8,57	9,36

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur

Potensi energi baru terbarukan di Jawa Timur cukup besar, tersebar merata di seluruh wilayah di Jawa Timur, apabila dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi permasalahan belum meratanya elektrifikasi khususnya di daerah terpencil dan kepulauan yang belum terjangkau akses listrik. Selama periode lima tahun terakhir persentase bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Timur mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan diantaranya :

- Pembangunan PLTS Rooftop pada Gedung Pemerintah, Swasta, Sekolah dan Pondok Pesantren;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) pada daerah yang memiliki potensi air;
- Pembangunan Biogas sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Perkotaan; dan
- Pemanfaatan ampas tebu pada Pabrik Gula sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

2.1.3.3.6 Perdagangan

2.1.3.3.6.1 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan ekonomi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim. Besarnya jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa Timur.

Tabel 2.128 Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	5,96	-5,77	7,77	6,87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2022, Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terakselerasi sebesar 6,87

persen, setelah mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar 5,77 persen. Hal ini mengindikasikan telah pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dampak dari terkendalinya pandemi Covid-19 serta cakupan vaksinasi yang luas sehingga berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat.

2.1.3.3.6.2 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sseuai dengan Perundang-Undangan

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, barang beredar adalah barang/jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan atau sarana perdagangan lainnya untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen yang termasuk dalam proses penyimpanan di tempat penyimpanan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam prosesnya dibutuhkan pengawasan agar konsumen atau pengguna barang dapat terlindungi. Sementara itu definisi pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian Barang Beredar dan/atau Jasa dalam memenuhi Standar mutu produksi Barang Beredar dan/atau Jasa, pencantuman label dalam bahasa indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku.

Adapun formulasi dalam menghitung Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan adalah perbandingan antara jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap jumlah barang beredar yang diawasi.

Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan di Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 95,42 persen dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 96,14 persen.. Meningkatnya persentase barang beredar yang diawasi tersebut salah satunya diakibatkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 2.129 Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Perundang-undangan

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	96,68	95,36	95,42	96,14

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Sesuai amanah Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, bahwa ada 5 asas yang harus diingat sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen, yaitu (1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. (2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. (3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. (5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tabel 2.130 Jumlah Barang beredar yang diawasi

Tahun	Wilayah Surabaya	Wilayah Malang	Wilayah Jember	Wilayah Bojonegoro	Wilayah Kediri	Total
2018	40.243	38.291	36.517	34.430	40.455	190.036
2019	393.382	255.008	234.420	320.170	204.016	1.406.996
2020	230.313	224.260	8.526	49.483	104.250	616.832
2021	112.862	88.421	24.158	93.567	117.804	436.812
2022	129.045	174.333	105.933	376.369	122.031	907.711

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong pelaku usaha untuk tertib niaga agar konsumen dapat terlindungi. Implementasi dari kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa yang ada di Jawa Timur, sehingga konsumen dapat terlindungi dari potensi kerugian akibat mengkonsumsi / menggunakan barang dan jasa yang tidak sesuai standar, namun demikian jumlah barang beredar yang diawasi masih sangat terbatas.

2.1.3.3.7 Perindustrian

Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertingi dalam Perekonomian Jawa Timur, dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, yaitu 2018 sebesar 29,73%; 2019 sebesar 30,32%; 2020 sebesar 30,69% dan

2021 sebesar 30,72%. Selain sebagai penopang perekonomian, Industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Untuk menjaga performa perekonomian Jawa Timur agar terus tumbuh dan meningkat maka pertumbuhan industri pengolahan harus dijaga agar selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan.

Tabel 2.131 Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	7,55	6,82	-2,06	3,37	6,28

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur pada tahun 2022 berhasil tumbuh sebesar 6,28 persen. Terakselerasinya pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan diakibatkan adanya semakin terkendalinya pandemi covid-19 serta meluasnya cakupan vaksinasi covid-19 sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Secara umum, industri pengolahan masih berada pada fase ekspansi, khususnya industri makanan dan minuman, industri kulit, industri tekstil, dan industri barang galian bukan logam.

Dalam rangka keselarasan Indikator pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan sehingga diperlukan indikator pendukung yang lebih representatif, yaitu Jumlah Unit Usaha Industri dan Nilai Produksi Industri Pengolahan. Kedua indikator pendukung tersebut merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan.

Tabel 2.132 Indikator Pendukung Usaha Industri Pengolahan

TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perusahaan Jatim yang telah menerapkan standarisasi dan HKI *)	1.010	1.121	1.131	1.322	1.901
Total Industri Formal *)	23.524	24.322	24.359	24.426	24.929
Persentase Industri yang telah menerapkan standarisasi dan HKI *)	4,29	4,61	4,64	5,41	7,62
Jumlah Unit Usaha Industri	-	-	820.156	822.449	839.363
Nilai Produksi Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	-	-	219.244	220.076	222.693

Sumber : Disperindag Jatim

Ket. *): data tersebut merupakan data perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (belum termasuk perusahaan yang memperoleh fasilitasi secara mandiri non Pemprov Jawa Timur)

2.1.3.3.8 Ketransmigrasian

Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk (kota) ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia. Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Perkembangan persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya di Jawa Timur tahun 2019 sebesar 75,99 persen. Sementara itu pada tahun 2020 Tidak dilakukan survey terkait persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya. Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumberdaya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya.

Tabel 2.133 Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya	70,00	75,99	-	-	-
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi	-	-	-	72,07	76,22

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Mulai tahun 2021 kembali dilaksanakan survey terhadap transmigran. Terdapat perubahan indikator pada urusan transmigrasi yang semula Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya berubah.. menjadi Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosial. Berdasarkan hasil survey, terdapat penurunan persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya. Salah satu yang menjadi latar belakang penurunan angka ini adalah kondisi terdampak pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 angka

persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya mencapai 72,07 dan kembali meningkat menjadi 76,22 pada tahun 2022

2.1.1.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Urusan Perencanaan

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 180 dijelaskan bahwa Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.

Indikator untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Indikator tersebut dirumuskan berdasarkan jumlah nomenklatur program RKPD-P yang konsisten dengan nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah nomenklatur program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan. Capaian keselarasan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.134 Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100	100	94,36	100	99,35

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Perubahan RPJMD 2019 - 2024 nomenklatur program di Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2021 sebagai respon dari terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi lebih ringkas sebanyak 154 program. Sesuai tabel persentase keselarasan dokumen perencanaan di atas, pada tahun 2022 terealisasi sebesar 99,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan nomenklatur program dalam Perubahan RKPD 2022 sebanyak 1 program dari total program yang terdapat pada RPJMD, sehingga total program pada

Perubahan RKPD tahun 2022 menjadi 155 program. Penambahan Program pada RPKD 2022 dimaksud merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terkait Penganggaran APBD 2023 untuk Urusan Tantribumlinmas, yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

2.1.3.4.2 Urusan Keuangan

2.1.3.4.2.1 Nilai Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tabel 2.135 Nilai Opini BPK

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Jawa Timur telah mendapatkan opini WTP sebanyak 8 kali secara berturut-turut dan telah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 , yakni WTP.

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

2.1.3.4.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan transfer yang terdiri dari dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan bantuan keuangan. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah serta menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 201,22 persen, mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 124,62 persen. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus meningkat sehingga dana perimbangan mengalami kenaikan yang signifikan. Peningkatan pendapatan transfer tahun 2022 terhadap tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan peningkatan PAD.

Tabel 2.136 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	138,50	138,63	132,23	124,62	201,22*

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, diolah

Ket : *) sebelum revidi Inspektorat, penutupan data per tanggal 20 Januari 2023

2.1.3.4.2.3 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah. Sedangkan total pendapatan meliputi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung diluar kontrol kewenangan daerah.

Melalui kewenangan yang dimiliki daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, namun tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai keberhasilan Daerah dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah, dimana pemungutannya dikendalikan langsung oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.137 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan	58,04	46,49	45,65	55,24	66,63*

Sumber : BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur,
Ket : *) sebelum reuiu Inspektorat, penutupan data per tanggal 20 Januari 2023

Pada tahun 2022 jumlah Pendapatan Daerah yang dapat dihimpun Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 31 Trilyun 904 Milyar 599 Juta 506 Ribu 787 Rupiah, terdiri atas PAD sebesar 17 Trilyun 573 Milyar 322 Juta 019 Ribu 811 Rupiah dan Pendapatan Transfer sebesar 10 Trilyun 563 Milyar 739 Juta 586 Ribu 218 Rupiah. Apabila dibandingkan rasionya, maka penerimaan PAD mencapai 66,63 persen dari total Pendapatan Daerah, pemungutan PAD pada Tahun 2022 sudah mulai membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih cukup terkendala pandemi Covid-19, sehingga pemenuhan target yang ditetapkan di RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 57,50 persen sudah tercapai. Pembatasan pergerakan barang dan manusia sangat berpengaruh terhadap pergerakan sektor ekonomi dan daya beli masyarakat atas barang kena Pajak Daerah. Berdasarkan kondisi tersebut dan untuk menjaga kapasitas fiskal daerah, maka fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, dengan memberikan beberapa paket insentif/keringanan Pajak Daerah antara lain pembebasan denda, pengurangan sebagian pokok pajak dan pembebasan pokok pajak.

2.1.3.4.2.4 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain PAD yang sah adalah komponen dalam dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan akhir Desember tahun 2022, kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur masih berada di atas target yang ditetapkan.

Tabel 2.138 Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah	4,96	3,04	-7,14	6,00	14,09

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Adapun target persentase kenaikan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah ditetapkan pada tahun 2022, meningkat sebesar 8,09% persen, faktor pertumbuhan tersebut upaya optimalisasi penerimaan sektor Pajak Daerah yang dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah khususnya dalam intensifikasi pembayaran Pajak Daerah secara digital;
- 2) Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur berupa Pembebasan Sanksi Administratif dan Bebas Bea Balik Nama ke II dan seterusnya bagi masyarakat Jawa Timur;
- 3) Pemberian Apresiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi Wajib Pajak Patuh sebagai stimulus bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah tetap waktu.

Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dapat dijelaskan pada sektor penerimaan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor

- Pada **tahun 2022** dapat terealisasi Rp 7.621.089.134.945,00 atau **melampaui target** sebesar Rp831.089.134.945,00 (12,24%).
- Apabila **dibandingkan** dengan capaian **tahun 2021** terdapat **kenaikan** sebesar **10,87%** atau sebesar Rp746.908.781.685,00,00.
- Kinerja positif penerimaan PKB dapat tercapai dengan upaya sebagai berikut:
 - Peningkatan Sosialisasi pembayaran PKB melalui e-channel, yang memberikan dampak positif penerimaan secara elektronik sebesar Rp 865.652.562.350,00 dengan jumlah objek sebesar 1.608.128 atau naik 31,21% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 605.034.261.850,00 dengan jumlah obyek 1.225.682

- Program insentif Pajak Daerah Tahun 2022 (bebas sanksi administratif dan BBN II seterusnya), berhasil terhimpun sebesar Rp 1.998.076.885.367,00.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Pada **tahun 2022** dapat terealisasi Rp3.975.651.734.300,00 atau **melampaui target** sebesar Rp730.651.734.300,00 (22,52%) .
- apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, realisasinya naik sebesar Rp 168.472.745.338,00 atau 4,43% .

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pada **tahun 2022** dapat terealisasi Rp2.760.340.355.239,00 atau **melampaui target** sebesar Rp 635.340.355.239,00 (29.90%).
- Apabila dibandingkan dengan capaian **tahun 2021** penerimaannya **naik** sebesar Rp 526.059.252.918,00 atau 23,54%.
- Kinerja positif penerimaan PBBKB disebabkan karena :
 - **Stabilitas harga jual Bahan Bakar Minyak** yang ditetapkan oleh Pemerintah selama tahun 2022, meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan.
 - **Kebijakan Pemerintah untuk menjaga konsistensi** level penyaluran bahan bakar minyak di Provinsi Jawa Timur.

d) Pajak Air Permukaan

Pada **Tahun 2022** dapat terealisasi Rp45.051.019.757,00 atau **melampaui target** sebesar Rp15.051.019.757,00 (50,17%), salah satunya disebabkan oleh pembayaran pajak dari Wajib Pungut Air Permukaan oleh Exxon Mobil dan SPAM Umbulan. Apabila dibandingkan dengan capaian **tahun 2021**, maka penerimaannya **naik** sebesar Rp6.643.234.524,00 atau 17,30%.

e) Pajak Rokok

Pada tahun 2022 terealisasi 3.171.189.775.570,00 atau **melampaui target** sebesar Rp 315.144.132.490,00,00 (11,03%), Apabila dibandingkan dengan capaian **tahun 2021** maka penerimaannya **naik** sebesar Rp 724.373.603.875,00 **atau** 29,60% kenaikan cukup signifikan tersebut jika dibandingkan tahun sebelumnya salah satunya disebabkan pada tahun 2021 terdapat potongan langsung oleh Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

f) Retribusi Jasa Usaha (RJU)

Pada tahun 2022 terealisasi Rp3.888.273.800,00 atau **melampaui target** sebesar Rp 863.273.800,00 (28,54%), Apabila dibandingkan

dengan capaian **tahun 2021** maka penerimaannya **naik** sebesar Rp 277.448.130,00 **atau** 7,68% . kenaikan tersebut merupakan upaya dalam optimalisasi penerimaan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD).

g) Penerimaan Lain-Lain

Pada tahun 2022 terealisasi Rp22.885.002.289,00 atau **melampaui target** sebesar Rp4.635.002.289,00 (25.40%), apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.342.604.919,00 (6,23%) .

2.1.3.4.3 Urusan Kepegawaian

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, kualifikasi pendidikannya semakin meningkat dan disiplin pegawai yang tinggi. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam rencana pengembangan SDM yang lebih baik.

Tabel 2.139 Indeks Profesionalitas ASN di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	88,05	82,00	85,00	85,30	86,27

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir fluktuatif, yaitu masing-masing 88,05 (2018); 82,00 (2019); 85,00 (2020); 85,30 (2021) dan 86,27 (2022). Perhitungan IP ASN tahun 2018 dilaksanakan untuk Jabatan Pelaksana dan mulai Tahun 2019 pengukuran IP ASN dilaksanakan mulai dari Pejabat Struktural (Jabatan Tinggi, Administrator dan Pengawas) dan Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Unsur penilaian Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) terdiri dari kualifikasi bobot 25%, kompetensi bobot 40%, kinerja bobot 30% dan disiplin 5%. Adapun pengkategorian Tingkat Profesionalitas ASN adalah nilai 91 – 100 berkategori sangat tinggi, nilai 81 – 90 berkategori tinggi, nilai 71 – 80 berkategori sedang, nilai 61 – 70 berkategori rendah dan nilai 0 – 60 berkategori sangat rendah.

Tahun 2021 capaian IP ASN dengan nilai 85,30 dengan kategori tinggi rentang nilai (81-90). Sedangkan pada tahun 2022, capaian IP ASN masih tetap pada kategori tinggi yaitu pada nilai 86,27. Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih terukur, memiliki kredibilitas & reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap ASN disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

2.1.3.4.4 Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan atau pelatihan. Keberadaan aspek pengembangan kompetensi dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pengembangan kompetensi ASN diarahkan pada penciptaan dan peningkatan kompetensi atau kemampuan aparatur agar dapat memenuhi standar kompetensi jabatan yang dimiliki. Diharapkan pengembangan kompetensi ASN dapat diarahkan kepada peningkatan dalam komponen-komponen dari kompetensi tersebut yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku kerja, sehingga tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan secara profesional.

Tabel 2.140 Persentase Peserta Pelatihan Yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi Dengan Skor Evaluasi Minimal 70

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
Persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70	99,99	96,94	100

Sumber : BPSDM Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2021, pada Indikator Kinerja Daerah Persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70 terdapat capaian yang cukup baik yaitu 96,94% dari target sebesar 85,1%

dan pada tahun 2022 menjadi 100% dari target sebesar 85,2%. Capaian ini dihitung berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh oleh peserta pelatihan baik pelatihan kompetensi manajerial, pelatihan kompetensi teknis maupun pelatihan kompetensi fungsional yang mana pada umumnya nilai evaluasi yang diperoleh diatas skor minimal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan keberhasilan proses pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang mana ditandai dengan capaian realisasi di atas target yang ditetapkan.

2.1.3.4.5 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah.

Dari hasil indeks inovasi daerah ini selanjutnya dilakukan pemeringkatan/pengelompokan menjadi beberapa kategori, yaitu sangat inovatif, inovatif, dan kurang inovatif. Predikat Inovasi Daerah ini yang selanjutnya akan menjadi indikator baru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari hasil pengukuran indeks inovasi daerah, pada tahun 2018 - 2022 Provinsi Jawa Timur mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Jawa Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

Tabel 2.141 Predikat Inovasi Daerah

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Predikat Inovasi Daerah	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka mendukung pencapaian predikat inovasi daerah “sangat inovatif” Perangkat Daerah didorong dan dimotivasi untuk kreatif, membuat suatu inovasi yang mampu meningkatkan kemandirian daerah dan

kesejahteraan masyarakat. Inovasi Perangkat Daerah yang akan ditetapkan menjadi inovasi daerah harus memenuhi beberapa kriteria ditentukan, diantaranya adalah inovasi tersebut merupakan pembaharuan pada sebagian atau keseluruhan suatu program/kegiatan; inovasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; inovasi yang tidak membebani dan membatasi masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; inovasi yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; serta inovasi tersebut dapat direplikasi.

2.1.3.4.6 Kesatuan Bangsa dan Politik

Aspek Lembaga Demokrasi merupakan salah satu komponen dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia. Aspek tersebut melatarbelakangi penilaian terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, Peran Partai Politik dalam mencetak kader yang kompeten, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peradilan yang Independen.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2020-2024. Mulai tahun 2022 perhitungan IDI telah memakai metode baru, memperhatikan teori yang demokrasi yang berkembang saat ini adalah teori demonopolisasi, yang aspeknya mencakup politik, ekonomi dan sosial, serta kebutuhan akan metode yang mempertimbangkan besaran wilayah. Tingkat capaian Indeks Demokrasi Indonesia diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, yaitu aspek Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Salah satu aspek IDI yaitu Kapasitas Lembaga Demokrasi (sebelum tahun 2022 bernama aspek Lembaga Demokrasi) dengan capaian tahun 2018 sebesar 76,57, kemudian menurun pada tahun 2019 sebesar 75,97. Selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 80,55, pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 81,09, dan di tahun terakhir tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 74,81. Perlu diketahui bahwa, pencapaian realisasi Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada tahun (n) merupakan hasil dari kinerja pencapaian dari tahun (n-1).

Tabel 2.142 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Aspek Lembaga Demokrasi	76,57	75,97	80,55	81,09	74,81

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Penurunan pada Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi pada tahun 2022 terutama disebabkan karena menurunnya kinerja Lembaga Legislatif; meningkatnya putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah; menurunnya jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat dan menurunnya transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah. Penurunan capaian indikator – indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Capaian indikator Kinerja Lembaga Legislatif diperoleh dari persentase Peraturan Daerah yang disahkan dibandingkan terhadap target Propemperda yang telah ditetapkan sebelumnya, pada tahun 2021 masih banyak rancangan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Propemperda belum disahkan. Untuk indikator putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah diperoleh dari jumlah keputusan PTUN terkait kebijakan / keputusan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah per jumlah pemerintah daerah. Sedangkan indikator jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat diperoleh dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi. Indikator terakhir yang mengalami penurunan adalah transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD oleh pemerintah diperoleh dari presentasi informasi APBD yang tersedia di website pemerintah daerah.

2.1.3.4.7 Koordinasi Pelaksanaan Urusan Penghubung

2.1.3.4.7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Badan Penghubung memiliki satu tujuan utama yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah dengan Indikator Kinerja Utamanya yaitu Hasil SKM/IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melakukan Kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari kinerja pelayanan Badan Penghubung yang terdiri dari Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dan Fasilitasi Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.

Untuk mengetahui kinerja Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat dapat dilihat pada pelaksanaan Koordinasi Urusan pemerintahan

dan Pembangunan dengan pemerintah Pusat untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga sehingga memperoleh gambaran untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan, selain itu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Untuk mengukur kinerja Fasilitas Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Dapat dilihat dari persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM; Persentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta; Persentase pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitasi di Jakarta; dan Persentase peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta.

Hasil survei Indeks kepuasan masyarakat Badan Penghubung didapat dengan penunjukkan kepada pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode survei dan terdapat 200 orang sebagai responden. Nilai survei kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan dari 9 pertanyaan berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017. Hasil survei kepuasan masyarakat untuk kewajaran biaya/tarif pelayanan dan prosedur pelayanan menempati penilaian tertinggi yaitu 0.43 dan 0.42. harapan kedepan Badan Penghubung akan meningkatkan pada penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna; serta dalam lingkup badan penghubung tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.143 Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Penghubung

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
IKM Badan Penghubung	-	90,96	90,15	90,18

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur

IKM Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami perubahan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 IKM dengan nilai 90,69 hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pelayanan baik dari pagelaran kesenian daerah kab/kota Jawa Timur, pameran UKM dari Jawa Timur dan PAWARTA, fasilitasi pelayanan untuk Aparatur Sipil Negara, Legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2021 dampak Covid 19 sangat terasa di Jakarta dan mempengaruhi kunjungan wisatawan baik

domestik maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya pengunjung dan pagelaran kesenian daerah di Anjungan Jawa Timur di TMII, sehingga pada tahun 2021 nilai IKM turun menjadi 90.15. Tahun 2022 pandemi Covid 19 mulai mereda sehingga kegiatan bisa dilaksanakan dengan secara luring, namun karena adanya kegiatan revitalisasi dalam rangka menyambut kunjungan tamu-tamu ASEAN yang tergabung dalam G20 maka dalam kurun waktu tertentu TMII tidak beroperasi sehingga sebagian kesenian daerah yang telah dijadwalkan untuk tampil tidak dapat diselenggarakan di Anjungan Jawa Timur TMII. Namun demikian di tahun 2022 perekonomian secara umum mulai bangkit, aparaturnya Jawa Timur, legislatif dan eksekutif mulai banyak berkunjung di Jakarta menggunakan fasilitas dari Badan Penghubung sehingga nilai IKM mengalami kenaikan menjadi 90.18.

2.1.3.4.7.2 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti adalah Hasil Kegiatan Koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berupa Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Bakorwil, Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

Pada tahun 2018 rekomendasi hasil yang ditindaklanjuti mencapai 95 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 100 persen. Peningkatan ini mengindikasikan koordinasi yang dilaksanakan sudah terfokus dan terarah serta bersinergi dengan program kegiatan kabupaten/kota.

Tabel 2.144 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	95	99	99,2	100	100

Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jatim

2.1.3.4.8 Pengawasan

Korupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan suatu negara, praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi masih

rawan terjadi di pemerintah daerah. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus dilakukan. Survei Penilaian Integritas (SPI) dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah. Hasil SPI dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dan diharapkan mampu menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi pencegahan korupsi di instansi masing-masing dan menjadikannya sebagai gerakan perubahan.

Integritas di level individu, organisasi, dan pemerintah daerah merupakan salah satu pertahanan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi. Di Provinsi Jawa Timur upaya tersebut antara lain berupa penancangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Monitoring Center for Prevention (MCP), dan sebagainya.

Secara umum hasil penilaian integritas Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas di instansi ini memiliki risiko korupsi yang tinggi, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan.

Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas. Meskipun upaya pencegahan korupsi sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/ pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna

layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

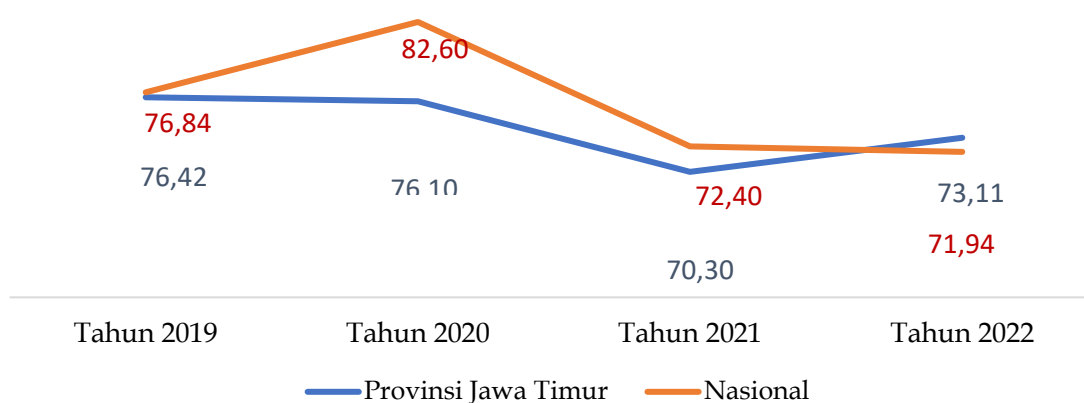
Tabel 2.145 Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Integritas	74,96	76,42	76,10	70,03	73,11

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Dari hasil Survei Penilaian Integritas Provinsi Jawa Timur, Indeks integritas yang diperoleh Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 mencapai skor sebesar 73,11, nilai tersebut terus meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 70,03 dan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil capaian dari rata rata nilai Nasional sebesar 71,94. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas instansi yang semakin baik.

Gambar 2.14 Indeks SPI Provinsi Jawa Timur dan Nasional



Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

2.1.3.4.9 Kesekretariatan DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Capaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD selama lima tahun terakhir (2018-2022) terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menggambarkan semakin membaiknya dan efektif pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada masyarakat.

Tabel 2.146 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80,69	80,79	81,05	82,32	83,91

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

2.1.3.4.10 Kesekretariatan Daerah

2.1.3.4.10.1 Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tabel 2.147 Nilai SAKIP di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	81,70	81,71	82,38	83,18	83,83

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya implementasi SAKIP, diharapkan kinerja yang akan direncanakan dan dilaksanakan berorientasi pada hasil. Perkembangan nilai SAKIP pada tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 81,70 pada tahun 2018 menjadi 83,83 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.1.3.4.10.2 Status LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan kinerja penyelenggara urusan wajib dan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. LPPD didasarkan pada ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwasanya Kepala Daerah wajib Menyusun LPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat. LPPD yang telah disusun dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah

Pusat untuk menilai seberapa baik tata Kelola pemerintah di daerah. Evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Pada Penyusunan dan Evaluasi LPPD setelah munculnya Permendagri 18 Tahun 2020 terdapat beberapa perubahan Pelaporan Indikator Kinerja Kunci dari sebelumnya 792 yang terdiri dari :

- a. 38 IKK Capaian Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan,
 - b. 672 IKK Capaian Kinerja Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum,
 - c. 82 IKK Capaian Kinerja Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan;
- Dari 792 IKK tersebut berubah menjadi 627 IKK yang terdiri dari :

- a. 6 IKK Capaian Kinerja Makro
- b. 106 IKK Outcome
- c. 499 IKK Output

Selain itu terdapat perubahan dalam metode penetapan peringkat, skor dan status Kinerja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Sebelum		Sesudah	
Skor Kinerja	Status Kinerja	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.00 – 1.59	Rendah	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
1.60 – 2.00	Sedang	1.81 – 2.60	Rendah
2.01 – 2.99	Tinggi	2.61 – 3.40	Sedang
3.00 – 4.00	Sangat Tinggi	3.41 – 4.20	Tinggi
		4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Perubahan regulasi tersebut mempengaruhi kondisi hasil evaluasi LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021, Berikut adalah kondisi data Status LPPD mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 :

Tabel 2.148 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Status LPPD	Sangat Tinggi	-	-	Tinggi	-

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki status LPPD Sangat Tinggi dengan skor 3,41. Pada pada tahun 2019 dan 2020 status LPPD tidak diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri dikarenakan pertimbangan

masih terdapat Covid - 19. Tahun 2021 status LPPD Jawa Timur menjadi Tinggi dengan adanya perubahan metode penetapan status kinerja. Skor LPPD dari tahun 2018 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan bersifat menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan.

2.1.3.4.10.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik tersebut adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

Tabel 2.149 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,24	83,32	84,02	85,44	85,69

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 83,24 (Tahun 2018); 83,32 (Tahun 2019); 84,02 (Tahun 2020); 85,44 (Tahun 2021) dan 85,69 (Tahun 2022). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga dapat mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 9 (sembilan) unsur yang terdapat dalam SKM sebagaimana disebutkan dalam PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 adalah:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik. Sejak tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menggunakan inovasi SuKMa-e Jatim (survei kepuasan masyarakat berbasis elektronik) dalam melakukan survei kepuasan kepada pengguna layanan. SuKMa-e Jatim merupakan aplikasi terintegrasi, realtime, berbasis QR Code, dan akuntabel. Adapun dasarnya yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan super admin Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

2.1.3.4.10.4 Indeks Kepedulian Sosial

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu lumrah jika manusia memiliki kepedulian sosial terhadap sesama. Kepedulian sosial merupakan sebuah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas manusia. Kepedulian sosial adalah minat atau ketertarikan individu atau kelompok untuk membantu orang lain.

Tabel 2.150 Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepedulian Sosial	74,28	74,40	78,62	81,70

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Kepedulian Sosial di Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya. Indeks kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yakni sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan aksi bersama. Dari 5 sub dimensi tersebut, selama tahun 2021-2022 sub dimensi yang mengalami peningkatan adalah toleransi sebesar 3,87 poin, kelompok dan jejaring sebesar 13,57 poin, dan aksi bersama sebesar 16,48 poin. Dengan semakin meningkatnya kepedulian sosial maka akan tercipta keharmonisan sosial yang

kuat, suasana kekeluargaan, dan saling membantu satu sama lain. Kedepan kebijakan pembangunan yang responsif pada kepedulian sosial akan menjadi salah satu pendekatan yang melingkupi pembangunan daerah Jawa Timur.

2.1.3.4.10.5 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.

Tabel 2.151 Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Produk Hukum yang tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam hal pembuatan produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat dua produk hukum yang lahir yaitu keputusan (*beschikking*) dan peraturan (*regeling*). Keputusan merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara, mendasarkan diri pada Undang-Undang yang lebih tinggi, bersifat konkrit, individual dan final. Peraturan adalah produk hukum tertulis yang substansinya atau isinya punya daya ikat terhadap seluruh atau sebagian penduduk wilayah negara, peraturan lebih ditekankan kepada isi. Namun demikian, produk hukum keputusan maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah haruslah memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan produk hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Terkait

hal tersebut, capaian pada tahun 2022, Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 100 persen.

2.1.3.4.10.6 Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian

Penetapan Indikator Kinerja Biro Perekonomian didasarkan atas Peraturan Gubernur Jawa Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu penyiapan perumusan kebijakan di bidang perekonomian. Indikator Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Biro Perekonomian pada akhir periode anggaran. Indikator Kinerja dapat dijadikan dasar sebagai pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran biro. Program dan kegiatan tersebut perlu direncanakan sejak awal agar lebih terarah dan tujuan, serta sasaran biro dapat terwujud.

Indikator Kinerja Biro Perekonomian adalah Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian yang mulai diterapkan di tahun 2022. Kebijakan Perekonomian mengacu pada tindakan sebuah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat mencakup pengoptimalan kinerja analisis makro ekonomi, pengendalian inflasi di Jawa Timur, kinerja pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal, sarana perekonomian serta kinerja perindustrian dan perdagangan. Selain itu kebijakan bidang perekonomian juga mencakup perumusan kebijakan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, dan Lingkungan Hidup, serta pengoptimalan kinerja BUMD dan BLUD.

Tabel 2.152 Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian	-	-	10	11	11

Sumber : Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2.1.3.4.10.7 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Salah satu upaya untuk mengetahui efektifitas pelayanan administrasi dan informasi pembangunan adalah melalui optimalisasi pelaksanaan

kebijakan. Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dimaksud. Untuk kebijakan pembangunan yang akan diukur pelaksanaan diantaranya adalah Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Gubernur, Pedoman Umum, serta Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan yang diperuntukkan untuk obyek kebijakan merupakan PD Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota yang terkait dengan kebijakan dimaksud.

Tabel 2.153 Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan Kebijakan	100	100	100	100	100

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan pada tiap tahunnya mampu mencapai angka maksimal, yaitu 100 persen. Hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/ Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang berupa Peraturan Gubernur, Surat Gubernur, Surat Teguran Gubernur dan Perjanjian Daerah.

2.1.3.4.10.8 Persentase Kesesuaian Jadwal Tender dengan Jadwal Tender yang ditetapkan dalam RUP

Pengadaan barang dan jasa di Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah dibentuk pada tahun 2020 sebagai UKPBJ Provinsi dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Salah satu upaya untuk mengukur akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa adalah melalui ketepatan waktu proses pengadaan barang dan jasa. Persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas tersebut. Adapun definisi operasional indikator persentase kesesuaian jadwal

tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP adalah perbandingan antara jumlah paket yang masuk LPSE sesuai jadwal RUP terhadap jumlah paket yang terjadwal dalam RUP.

Tabel 2.154 Persentase Kesesuaian Jadwal Tender dengan Jadwal Tender yang ditetapkan dalam RUP di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kesesuaian Jadwal Tender dengan Jadwal Tender yang ditetapkan dalam RUP	-	-	-	-	28,38

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

➤ Kesimpulan Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah di Jawa Timur sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Pada tahun 2022 terdapat 76 IKK yang melekat pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Secara umum realisasi IKK tahun 2022 cukup baik. Dari 76 IKK, terdapat 2 indikator yang belum rilis realisasi tahun 2022. 56 indikator yang telah mencapai target dan 18 indikator belum mencapai target atau dapat diartikan bahwa sebesar 75,68 persen IKK telah mencapai target.

2.1.3 Aspek Daya Saing

2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.3.1.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan rakyat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.155 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan	1.006.078	1.036.177	1.064.382	1.113.002	1.165.138

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabulasi diatas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2018-2022.

Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.3.1.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan

Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk non makanan akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya.

Tabel 2.156 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan	49,97	48,53	49,00	50,12	51,57
Bukan Makanan	50,03	51,47	51,00	49,88	48,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu dua tahun terakhir (2021-2022) persentase pengeluaran perkapita sebulan kelompok bukan makanan lebih besar dibandingkan dengan kelompok makanan. Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Jawa Timur untuk kebutuhan makanan dan non makanan mengalami fluktuasi namun masih stabil. Kestabilan tersebut merupakan indikasi dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Disisi lain, ada kemungkinan bahwa keadaan ini dikarenakan perubahan harga-harga barang yang sebanding dengan perkembangan pendapatan dapat dikendalikan. Kondisi ini dapat dilihat dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan.

2.1.3.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan

barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.157 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai Tukar Petani (NTP)	106,62	108,53	100,77	100,01	102,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Nilai tukar Petani dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 selalu meningkat setiap tahunnya. Namun karena dampak pandemi Covid-19, NTP Jawa Timur mengalami penurunan. Secara umum, NTP per bulan pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding dengan tahun 2021 seiring dengan membaiknya ekonomi pasca pandemi covid-19 di Jawa Timur.

2.1.3.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.3.2.1 Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Selama rentang tahun 2018-2021, kriminalitas di Jawa Timur memiliki kecenderungan menurun. Jumlah kejahatan yang dilaporkan selama tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020 namun resiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk mengalami penurunan. Angka kriminalitas diperoleh dari Data Polda Jatim melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun per 10.000 penduduk. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di tahun 2021 sebesar 61 menunjukkan bahwa terjadi 61 tindak pidana di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

Tabel 2.158 Kriminalitas

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan	38.065	31.419	24.186	24.844	-
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 10.000 Penduduk	97	80	62	61	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

2.1.3.2.2 Regulasi Penanaman Modal

Penanaman modal memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Daerah, serta penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya tersebut sekaligus untuk mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Daerah, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal.

2.1.3.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.3.3.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022) Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 di Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2018 proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1/S2/S3 ke atas adalah 399 per sepuluh ribu penduduk dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 457 persepuluh ribu penduduk.

Tabel 2.159 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lulusan D4/S1	1.507.278	1.574.481	1.632.279	1.685.732	1.768.062
Jumlah Lulusan S2	96.660	101.566	105.207	107.719	112.704
Jumlah Lulusan S3	6.991	7.262	7.476	7.574	7.972
Jumlah Lulusan D4/S1/S2/S3	1.610.929	1.683.309	1.744.962	1.801.025	1.888.738
Jumlah Penduduk (sesuai laporan layanan dari Dukcapil)	40.409.880	40.820.836	41.044.406	41.063.094	41.311.181
Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,0399	0,0412	0,0425	0,0438	0,0457

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, diolah

2.1.3.3.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Angka Ketergantungan penduduk Jawa Timur pada tahun tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Capaian rasio ketergantungan pada tahun 2022 sebesar 42,92, yang berarti bahwa dari 100 penduduk produktif pada pada tahun 2022 menanggung usia tidak produktif (usia muda dan usia tua) sebanyak 43 orang.

Tabel 2.160 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Ketergantungan	43,70	43,68	43,71	37,84	42,92

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

➤ **Kesimpulan Aspek Daya Saing**

Kinerja dari segi aspek daya saing daerah tahun 2022 lebih baik dibanding dengan tahun 2021. Hal ini selaras dengan semakin membaiknya perekonomian Jawa Timur, dimana rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat sebulan mengalami peningkatan. Risiko penduduk terjadi tindak pidana per 10.000 penduduk di tahun 2021 sebesar 61 menunjukkan bahwa terjadi 61 tindak pidana di antara 10.000 penduduk per tahunnya. Proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1/S2/S3 tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021, yakni 457 per sepuluh ribu penduduk.

2.1.4 Standar Pelayanan Minimum

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial

2.1.4.1 Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan terdiri atas SPM Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus. Operasionalisasi SPM Pendidikan berlandaskan pada Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun SPM bidang pendidikan adalah:

- a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah/kejuruan bahwa jumlah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun belajar di sekolah menengah/kejuruan.
- b. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan khusus adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan.
- c. Pencapaian pemenuhan SPM pendidikan terkait dengan guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal.

Secara umum dalam rentang tahun 2018-2022, Perkembangan Persentase partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah di Jawa Timur terus cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat Jawa Timur akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan menengah.

Tabel 2.161 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
1. Anak usia 16 - 18 tahun belajar di sekolah menengah/kejuruan					
- Persentase partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	69,92	61,77	62,24	62,63	62,10
2. Anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan					
- Persentase warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	28,08	29,16	30,46	30,01	30,82
3. Guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal					
- Persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus – pendidikan layanan khusus	-	54,64	57,25	63,30	73

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2018-2022, Persentase ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini mencerminkan

bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya pada Anak yang berkebutuhan Khusus.

Dampak penerapan Undang – Undang Nomor 23 tersebut di bidang pendidikan adalah beralihnya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan non formal ke Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pengelolaan pendidikan menengah serta pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian indikator pendidikan, salah satunya adalah indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi Minimal D4/S1. Pada tahun 2014 – 2016, variabel yang diukur adalah pendidik seluruh jenjang (SD, SMP, SMA/SMK, dan PK-PLK) yang berkualifikasi minimal D4/S1, sementara pada tahun 2017, variabel yang diukur hanya pendidik jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK yang berkualifikasi minimal D4/S1.

Pemenuhan SPM terkait dengan guru dan tenaga kependidikan adalah pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) sesuai dengan standar layanan minimal dihitung melalui indikator prosentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus-pendidikan layanan khusus dengan rumus rata-rata dari persentase pemenuhan ketersediaan GTK sesuai dengan SPM, persentase GTK yang mendapatkan kesejahteraan, dan persentase GTK yang mendapatkan perlindungan profesi. Indikator ini baru terhitung di Tahun 2019 dikarenakan perubahan fokus sasaran yaitu sasaran prosentase guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4/S1 sebagian besar sudah terpenuhi sehingga dalam perhitungan peningkatan mutu dan kualitas Guru ditambahkan variabel kesejahteraan dan perlindungan profesi. Capaian indikator pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) sesuai dengan standar layanan minimal di tahun 2019 adalah 54,64 persen dan selalu mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2022 sebesar 73 persen. Peningkatan capaian ini didukung melalui kegiatan beasiswa S2 bagi para guru di sekolah di Provinsi Jawa Timur.

2.1.4.2 Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun SPM bidang Kesehatan adalah:

- a. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan Atau Berpotensi Bencana.

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dengan target 100 persen.

- b. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB, dengan target 100 persen.

Sasaran dan realisasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 pada jenis pelayanan dasar “pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi” sebesar 229.662 jiwa, sedangkan pada jenis pelayanan dasar “pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa” sebesar 3.213.589 jiwa, dimana capaian masing-masing jenis pelayanan dasar di tahun 2020 sebesar 100 persen.

Tabel 2.162 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau / atau berpotensi bencana provinsi	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Realisasi pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2021 di dua indikator telah mencapai target yang ditentukan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Target yang ditentukan pada indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi sebanyak 850.527 orang atau 100 persen, sedangkan target pada indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi sebanyak 962.174 orang atau 100 persen.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data

- 1) Masih lamanya pengumpulan data dari kabupaten /kota.
 - 2) Pelaporan data surveilans penyakit terpadu penyakit potensial KLB (STP KLB) belum dilakukan secara maksimal dari kabupaten/kota ke provinsi, kelengkapan dan ketepatan pelaporan masih rendah.
 - 3) Belum semua kejadian penyakit potensial KLB dilaporkan dalam waktu 1x24 jam dari kabupaten/kota ke provinsi melalui formulir W1.
- a. Penghitungan Kebutuhan
- 1) Penghitungan kebutuhan kurang maksimal dikarenakan SDM yang terbatas
 - 2) Penghitungan kebutuhan belum dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan SDM dan kejadian KLB yang variatif jumlah dan jenisnya setiap tahun, sehingga memerlukan estimasi perhitungan yang lebih detail dan komprehensif.
 - 3) Kebutuhan SDM dalam penanggulangan KLB terbatas.
- c. Pelaksanaan
- 1) Adanya pandemi Covid-19 sehingga penanganan Krisis kesehatan terfokus pada Covid-19.
 - 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit potensial KLB sempat terhambat di awal tahun 2021 karena adanya pembatasan sosial pandemi Covid-19.
 - 3) Petugas surveilans terfokus pada penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga penyakit potensial KLB lainnya kurang optimal.
- d. Lain-lain
- 1) Pemahaman manajemen krisis kesehatan yang masih kurang ditingkat kabupaten / kota.
 - 2) Penyamaan pemahaman serta persepsi terkait SPM KLB perlu dilakukan kepada kabupaten/kota dan provinsi karena banyak terdapat petugas baru.

Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

- a. Pengumpulan Data
- 1) Menghimbau dan menertibkan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan pelaporan STP KLB, dengan memperhatikan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan.
 - 2) Melakukan refreshment kepada dinas kesehatan kabupaten/kota terkait pencegahan dan penanggulangan serta pencatatan dan pelaporan penyakit potensial KLB sesuai dengan PMK No.

1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan

b. Penghitungan Kebutuhan

- 1) Melakukan refreshment terkait petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan SPM (khususnya SPM KLB), termasuk persamaan persepsi terhadap setiap variabel data yang diminta dalam pelaporan SPM KLB serta refreshment terkait penyakit potensial KLB.
- 2) Melakukan analisa kebutuhan petugas surveilans di dinas kesehatan kabupaten/kota maupun provinsi sehingga akan terjadi proporsi yang memadai antara KLB yang terjadi, anggaran yang tersedia, dan jumlah petugas yang ada.

c. Pelaksanaan

- 1) Melakukan optimalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit potensial KLB .
- 2) Melakukan analisa kebutuhan petugas surveilans di dinas kesehatan kabupaten/kota maupun provinsi sehingga akan terjadi proporsi yang memadai antara KLB yang terjadi dan jumlah petugas yang ada, sehingga petugas surveilans terhadap penyakit potensial KLB yang lain tidak terhambat dengan adanya Pandemi COVID-19.

d. Lain-lain

- 1) Melakukan refreshment kepada dinas kesehatan kabupaten/kota terkait SPM KLB.

2.1.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang meliputi Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota. Capaian penerapan SPM Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota yang diukur dengan indikator Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota dicapai melalui Pembangunan SPAM Regional Umbulan dan SPAM Mojolagres, dimana dengan kedua pembangunan SPAM ini pada tahun 2022 ditargetkan memiliki kapasitas air curah sebesar ± 3.360 liter/detik dan terealisasi sebesar 2900 liter/detik. Dengan total kapasitas tersebut, telah dimanfaatkan sebesar 2.090,39

liter/detik oleh Kabupaten/Kota, yang melayani ± 836.156 jiwa (dengan asumsi 1 liter/detik dapat melayani 80KK, dan masing-masing KK sejumlah 5 jiwa).

Kemudian untuk penerapan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional, sampai dengan tahun 2022, di Jawa Timur belum memiliki pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat. Namun hal ini sudah mulai diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) serta melaksanakan Identifikasi Potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional sebagai langkah awal dalam inventarisasi potensi pengembangan air limbah regional.

Tabel 2.163 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota *)	-	2,19	23,32	88,82	86,31
Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional **)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim
Ket:

*) Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun

**)Belum memiliki SPAL Regional,

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Timur antara lain :

- 1) Belum tersusunnya Masterplan Sanitasi lintas kabupaten/kota;
- 2) Belum tersedianya database kebutuhan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- 3) Pada pelaksanaan SPAM Umbulan masih terdapat beberapa persil lahan pada rencana jalur jaringan perpipaan offtake dalam masa pelaksanaan kegiatan mengalami kendala pembebasan lahan pada lokasi yang dilewati jalur perpipaan;
- 4) Terbatasnya pendanaan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan infrastruktur sektor air minum maupun pengolahan air limbah;

- 5) Pada beberapa Pemerintah Daerah sektor air minum dan pengolahan air limbah domestik masih belum menjadi program prioritas;
- 6) Belum terjadi kesepakatan antar wilayah kabupaten/kota terkait lokasi pembangunan air minum regional maupun pengolahan air limbah regional sehingga perlu didorong atau diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi;
- 7) Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mewujudkan kesepakatan lintas kabupaten/kota karena melibatkan pucuk pimpinan di daerah;
- 8) Masih belum banyak masyarakat yang tahu tentang pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh Pemerintah;
- 9) Lambatnya progres penyiapan SPAM regional khususnya dalam hal pemenuhan Readiness Criteria (KSB, PKS, Perizinan dan Lahan);
- 10) Negosiasi tarif air curah yang berlarut-larut pada SPAM Regional;
- 11) Lemahnya kapasitas pendanaan pemerintah daerah;
- 12) Hambatan dalam pelaksanaan konstruksi SPAM regional (on going);
- 13) Lambatnya progres penyerapan hilir yang disebabkan keterbatasan pendanaan;

Permasalahan Jangka Menengah/Panjang :

- 1) Masih lemahnya kualitas perencanaan SPAM regional (RISPAM, FS, DED);
- 2) Masih lemahnya kelembagaan pengelola SPAM Regional;
- 3) Masih lemahnya mekanisme negosiasi tarif air curah antara pengelola SPAM Regional dan PDAM offtaker;
- 4) Lemahnya kapasitas PDAM dalam melakukan penyerapan air curah melalui skema alternatif.

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain :

- 1) Melaksanakan penyusunan *Masterplan* Sanitasi lintas kabupaten/kota;
- 2) Melakukan penyusunan database kebutuhan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- 3) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam proses pembebasan lahan pada jalur perpipaan SPAM lintas kabupaten/kota;
- 4) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong inisiasi percepatan pelaksanaan pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota maupun pembangunan pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota;
- 5) Perlu dilaksanakan sinkronisasi terkait tersedianya air baku;

- 6) Melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota dan sistem pengolahan air limbah domestik lintas kabupaten/kota.

Solusi Jangka Pendek :

- 1) Optimalisasi kinerja SPAM regional yang sudah beroperasi;
- 2) Pemantauan terhadap jadwal pelaksanaan konstruksi SPAM regional;
- 3) Percepatan penyiapan SPAM Regional sesuai prosedur, salah satu contohnya melalui ESP;
- 4) Pembahasan intensif dan penetapan target waktu dalam penyepakatan tarif air curah;
- 5) Peningkatan kapasitas pendanaan pemerintah provinsi, contoh melalui dana DAK air minum Kabupaten/Kota maupun APBD provinsi;
- 6) Percepatan progres penyerapan hilir khususnya melalui skema pendanaan alternatif.

Solusi Jangka Menengah/Panjang :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan SPAM regional yang holistik dan integratif (hulu hilir);
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan SPAM regional (pengelola SPAM regional dan oftaker);
- 3) Penyusunan tata cara panduan penyepakatan tarif air curah;
- 4) Pelaksanaan pilot project SPAM regional menggunakan skema pendanaan alternatif.

2.1.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi dengan indikator Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Capaian penerapan pada

kedua SPM pada tahun 2022 adalah 100 persen, hal ini dikarenakan tidak adanya Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan program pemerintah yang berdampak pada relokasi rumah rumah warga.

Tabel 2.164 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	100	100	100	100	100
Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut :

➤ Permasalahan

- 1) Data rumah yang layak huni untuk korban bencana yang menjadi tanggung jawab provinsi tidak ada sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan/dianggarkan;
- 2) Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak ada sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan.

➤ Sosial

- 1) Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar Perangkat Daerah;
- 2) Memasukkan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- 3) Pada tahun 2019 telah disusun laporan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman (RP3KP Jatim) Kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan identifikasi Kawasan terdampak bencana alam.
- 4) Mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang daerah mana

2.1.4.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman.

Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu indikator SPM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Indikator ini merupakan salah satu bagian penting dalam penyampaian informasi yang dapat memberikan gambaran keberhasilan suatu kegiatan. Indikator ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas data real kegiatan dengan target /rencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang berhubungan erat dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Dalam hal pelayanan SPM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten / Kota. Adapun Indikator dalam SPM tersebut adalah:

Tabel 2.165 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi Jawa Timur

Indikator	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Perhitungan capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki perbedaan dari perhitungan capaian SPM urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar lainnya, dimana semakin kecil persentase

capaian dari target SPM menandakan kinerja yang baik. Hal ini dapat dinarasikan bahwa Satpol PP selaku perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda dan Perkada telah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), humanis, persuasif dan edukatif sehingga tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan hukum yang dilakukan dan tidak ada warga yang dilayani akibat dampak tersebut..

**Tabel 2.166 Realisasi Pelayanan Dasar
SPM Trantibumlinmas Satpol PP Prov. Jatim Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar / Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
	Indikator Kinerja :				
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	50	100%	0	0%
	- Materiil berupa Kerusakan ringan, sedang dan berat atas barang atau aset pribadi	25	50%	0	0%
	- Cidera fisik ringan, sedang dan berat	25	50%	0	0%

Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur

Untuk SPM sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran di level Provinsi. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran hanya terdapat pada kabupaten/kota dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis. Oleh karena itu, terkait penerapan SPM Sub Urusan Bencana, Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana kabupaten/kota

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai berikut :

➤ Permasalahan

- 1) Belum adanya acuan bagi OPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait teknis perhitungan/parameter penentuan kebutuhan dalam pelaksanaan

SPM urusan Trantibum, baik mengenai penentuan Target pelayanan maupun alokasi anggaran

- 2) Belum maksimalnya operasional dan patrol ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dalam Penegakan Perda serta Perlindungan Masyarakat;
- 3) Masih rendahnya sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dalam APBD guna mendukung operasional tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang masih perlu ditingkatkan
- 5) Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak dan tidak sebanding dengan jumlah PPNS yang ada.

➤ Solusi

- 1) Perlu adanya pedoman teknis dari Kemendagri dalam penentuan kebutuhan SPM yang dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.
- 2) Perlu adanya sosialisasi dan koordinasi terhadap berbagai pihak terkait permasalahan tersebut terutama instansi pemangku Perda;
- 3) Perlu adanya Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis guna meningkatkan kompetensi anggota;
- 4) Mengusulkan tambahan sarana prasarana dan anggaran untuk menunjang kegiatan operasional.

2.1.4.6 Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi, Bab II pasal 7 (tujuh) SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) pelayanan dasar, yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.
- d. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Tabel 2.167 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	840	910	940	1.101	968
Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	2.619	2.809	2.824	1.247	3.029
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	907	987	1.050	1169	1.037
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	350	350	350	542	530
Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3.772	5.119	24.126	26.862	27.957

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan, Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Target penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Penyandang Disabilitas dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menangani Penyandang Disabilitas yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 840 orang atau 0,69 persen dari populasi penyandang disabilitas di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 120.911 orang.
- 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 910 orang atau 0,76 persen dari populasi penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 119.731 orang.
- 3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 940 orang atau 0,80 persen dari populasi penyandang disabilitas pada tahun 2020 sebesar 117.890 orang.
- 4) Tahun 2021 target penanganan sebesar 1.101 orang atau 0,93 persen dari populasi penyandang disabilitas pada tahun 2021 sebesar 117.890 orang.
- 5) Tahun 2022 target penanganan sebesar 968 orang atau 0,84 persen dari populasi penyandang disabilitas pada tahun 2021 sebesar 115.135 orang.

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Balita Sidoarjo, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Target penanganan Anak Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Anak Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di masyarakat. Penanganan Rehabilitasi Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 2.619 Anak atau 2,21 persen dari populasi Anak Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 118.718 anak.
- 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 2.809 Anak atau 2,41 persen dari populasi Anak Terlantar pada tahun 2019 sebesar 116.506 anak.
- 3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 2.824 Anak atau 2,45 persen dari populasi Anak Terlantar pada tahun 2020 sebesar 115.060 anak.
- 4) Tahun 2021 target penanganan sebesar 1.247 Anak atau 0,98 persen dari populasi Anak Terlantar pada tahun 2021 sebesar 127.783 anak.
- 5) Tahun 2022 target penanganan sebesar 3.029 Anak atau 1,99 persen dari populasi Anak Terlantar pada tahun 2021 sebesar 152.166 anak.

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Target penanganan Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan adanya penambahan kapasitas tampung pada UPT yang menangani Lanjut Usia Terlantar dan adanya penambahan bantuan permakanan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang ada di masyarakat. Penanganan

Rehabilitasi Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar 907 orang atau 0,52 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 173.871 orang.
- 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 987 orang atau 0,56 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2019 sebesar 175.261 orang.
- 3) Tahun 2020 target penanganan sebesar 1.050 orang atau 0,61 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2020 sebesar 173.261 orang.
- 4) Tahun 2021 target penanganan sebesar 1.169 orang atau 0,68 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2021 sebesar 171.183 orang.
- 5) Tahun 2022 target penanganan sebesar 1.037 orang atau 0,61 persen dari populasi Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2021 sebesar 169.043 orang

Capaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam Panti dicapai melalui Kegiatan yang dilaksanakan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan, Balai Pelayanan Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial Sidoarjo dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial. Target penanganan Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya tidak mengalami perubahan hal ini disebabkan UPT yang menanganani tidak mengalami penambahan kapasitas tampung, dan belum ada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani gelandangan dan pengemis. penanganan Rehabilitasi Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2018 target penanganan sebesar sebesar 350 orang atau 5,19 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 6.738 orang.
- 2) Tahun 2019 target penanganan sebesar 350 orang atau 5,34 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2019 sebesar 6.552.
- 3) Tahun 2020 sebesar 390 orang atau 5,41 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2020 sebesar 6.469 orang.
- 4) Tahun 2021 sebesar 542 orang atau 2,56 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2021 sebesar 21.135 orang.
- 5) Tahun 2022 sebesar 530 orang atau 4,25 persen dari populasi Gelandangan dan Pengemis pada tahun 2021 sebesar 12.479 orang.

Capaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi, dicapai melalui

Program Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat. penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapatkan dukungan psikososial pada tahun 2018 sebesar 3.772 orang, Pada tahun 2021 korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya meningkat menjadi 26.862 orang, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 27.957, Peningkatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 korban bencana alam dan sosial, disebabkan meningkatnya kasus bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, Angin Puting beliung, Gempa Bumi, Kekeringan dan erupsi Gunung Merapi serta meningkatnya korban bencana sosial terutama Pandemi Covid-19.

Permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai berikut :

➤ Permasalahan

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran APBD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sehingga berpengaruh pada persentase pencapaian.
- 2) Kondisi sarana prasarana pelayanan di UPT perlu mendapatkan perbaikan, akibatnya kurang dapat dimaksimalkan terutama dalam memperluas daya jangkauan penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) melalui Panti.
- 3) Kurang optimalnya pemberian pelayananan reunifikasi keluarga penerima manfaat.
- 4) Belum semua SDM dinsos memahami paradigma kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat.

➤ Solusi

- 1) Melakukan upaya optimalisasi sumber daya terutama APBD untuk meningkatkan daya jangkau pelayanan;
- 2) Perlu dilakukan renovasi sarana dan prasarana UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, agar memiliki kemampuan dalam memperluas jangkauan pelayanan (daya tampung).
- 3) Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan panti menyesuaikan protokol kesehatan kepada masyarakat maupun instansi dan lembaga masyarakat.
- 4) Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut dengan optimalisasi anggaran mendukung protokol Kesehatan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Laporan Evaluasi

Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
1	2	3	4							8				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		28.688,02	542.308.821.414.461,00	11.597,55	224.397.077.255.055,00	40%	41%	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		11.127,37	494.997.121.302.994,00	2.269,99	213.207.922.626.375,00	20%	43%	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	86,43	4.583.210.276.795,00	0	1.877.388.573.288,00	0%	41%	DINAS PENDIDIKAN		
				Persentase Realisasi anggaran	%	92	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN		
				indeks Profesianalitas ASN	%	88,75	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN		
				Persentase penyampaian laporan yang tepat waktu	%	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN		
				Jumlah penyelenggara yang melaksanakan kejar paket A, B, dan C	lembaga	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN		
				Prosentase Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil kegiatan tepat waktu	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	laporan	7	1.902.694.028,00	3	679.809.173,00	43%	36%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	86.258.468,00	7	81.756.906,00	100%	95%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	87.494.862,00	0	0	0%	0%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	87.494.862,00	0	0	0%	0%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	136.916.890,00	0	109.916.583,00	0	80%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	87.494.862,00	0	0	0%	0%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKP	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	609.768.023,00	1	107.242.629,00	0	18%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	807.266.061,00	3	380.893.055,00	0	47%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	4.508.687.898.800,00	0	1.865.361.088.027,00	0%	41%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	4.484.385.404.000,00	4	1.855.252.983.119,00	0	41%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen/Orang	0	22.704.394.800,00	0	9.649.039.008,00	0	42%	DINAS PENDIDIKAN
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	185	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	LAPORAN	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas asn	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					"jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN "	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					xxx01.102	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	324	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Dokumen	0	848.100.000,00	6	276.374.900,00	0	33%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	0	750.000.000,00	0	182.691.000,00	0	24%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah laporan keuangan (indikator kosong)	Laporan	0	0	6	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	1.061.480.000,00	0	155.188.000,00	0%	15%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1.061.480.000,00	0	155.188.000,00	0	15%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	1	0	8%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	laporan	12	4.508.440.000,00	0	1.463.494.034,00	0%	32%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan kab/Kota	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	452.850.000,00	117	293.878.050,00	0	65%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	180	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	508.440.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah laporan data pegawai	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah laporan data pegawai (indikator kosong)	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev	Dokumen	0	3.291.060.000,00	0	1.169.615.984,00	0	36%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah laporan SKP	laporan	0	0	3	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	31	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	0	256.090.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	115	29.047.720.720,00	0	2.834.991.258,00	0%	10%	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Paket Pengadaan (indikator kosong)	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
		jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		xxx.01	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						(indikator kosong)		0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						Jumlah Paket Pengadaan	paket	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						(indikator kosong)		0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						(indikator kosong)		0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						(indikator kosong)		0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan barang rumah tangga pakai habis	Paket	0	217.204.000,00	0	17.582.000,00	0	8%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	5	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan Persediaan Alat Tulis Kantor	Paket	0	2.135.400.145,00	0	1.132.034.378,00	0	53%	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	18	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Bahan Logistik	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	32	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan Cetak dan Fotocopy	Paket	0	1.091.861.307,00	0	368.319.310,00	0	34%	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	10	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	29	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket pengadaan	paket	0	179.640.000,00	9	51.104.000,00	0	28%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	27	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	kali	0	936.078.000,00	5	631.330.640,00	0	67%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	10	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	24.487.537.268,00	0	634.620.930,00	0	3%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dewan Pendidikan	Laporan	0	0	2	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah paket pengadaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah laporan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan administrasi	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
							5		6		7 = 6/5 x 100%			
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	2	5.812.158.000,00	0	522.814.433,00	0%	9%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	set	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	28	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	5.812.158.000,00	28	522.814.433,00	0	9%	DINAS PENDIDIKAN
					jumlah Peralatan Mesin	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Barang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	44	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	360	19.387.816.690,00	0	5.516.580.920,00	0%	28%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	39.912.109,00	8	3.051.860,00	0	8%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	30	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	4.272.205.270,00	128	1.681.146.855,00	0	39%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah penyediaan jasa	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	360	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	30	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	0	15.075.699.311,00	30	3.832.382.205,00	0	25%	DINAS PENDIDIKAN
					jasa pelayanan umum	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah penyediaan jasa	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	30	12.802.068.557,00	0	854.607.443,00	0%	7%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	0	187.151.204,00	15	58.239.010,00	0	31%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah jasa pemeliharaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	31	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	0	498.846.200,00	14	157.121.463,00	0	31%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	31	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	1.654.636.705,00	25	610.106.970,00	0	37%	DINAS PENDIDIKAN
					jumlah peralatan dan mesin yg dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	10.461.434.448,00	1	29.140.000,00	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
					jumlah gedung yang dipelihara/direhab	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(indikator kosong)	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Sarana dan prasana Gedung yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA	persen	35,97	3.927.571.261.163,00	0	1.696.600.012.448,00	0%	43%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka keterserapan lulusan SMA di Dunia Usaha/Dunia Industri dan kewirausahaan	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Persentase siswa SMA yang berPrestasi dibidang Iptek, Seni, Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Persentase penyediaan layanan akses dijenjang SMA	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
		Persentase penyediaan layanan akses di jenjang SMK	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka keteserapan lulusan SMK di Dunia Usaha/Dunia Industri dan kewirausahaan	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase siswa SMK yang berPrestasi dibidang Iptek, Seni, Olahraga, Keterampilan Vokasi di tingkat Nasional dan Internasional	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berstandar nasional	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Angka keteserapan lulusan PK-PLK di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Kewirausahaan	persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase siswa SLB yang berprestasi dibidang keterampilan, Seni, Olahraga, dan literasi di tingkat Nasional dan Internasional	persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase penyediaan layanan akses di jenjang Pk-PLK	persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase keteserapan peserta pelatihan pada dunia usaha/dunia industri dan kewirausahaan	persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/sistem dalam proses belajar mengajar	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan kesejahteraan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan perlindungan profesi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Sidoarjo	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Kabupaten Malang	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Malang	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Ponorogo	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Tulungagung	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Gresik	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Mojokerto	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Jombang	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Bojonegoro	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Lamongan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Madiun	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Pacitan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Kediri	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Nganjuk	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Blitar	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Pasuruan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Probolinggo	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Jember	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Bondowoso	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Banyuwangi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Bangkalan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Sampang	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		APM SMA/Sederajat Wilayah Pamekasan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4							8
		APM SMA/Sederajat Wilayah Sumenep	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Siswa miskin yang terlayani	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negarusia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA	%	41,93	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK	%	34,09	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	%	34,77	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM	%	56,8	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar	%	41	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase Peserta yng lulus kompetensi	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	%	84,72	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	%	43,54	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kabupaten Malang;	%	92,89	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kabupaten Malang;	%	74,62	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentasewarga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Madiun	%	75,01	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Madiun	%	49,77	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kediri	%	68,59	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kediri	%	51,62	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Mojokerto	%	84,21	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Mojokerto	%	37,09	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Blitar	%	64,79	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Blitar	%	54,32	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pasuruan	%	62,77	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pasuruan	%	44,32	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Probolinggo	%	68,53	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Probolinggo	%	21,26	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Gresik	%	83,26	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Gresik	%	27,3	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jombang	%	92,7	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4							8
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jombang	%	40,81	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bojonegoro	%	76,69	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bojonegoro	%	35,7	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Lamongan	%	89,68	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Lamongan	%	19,01	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Ponorogo	%	78,74	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	%	30,29	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pacitan	%	73,5	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pacitan	%	56,49	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Nganjuk	%	84,2	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Nganjuk	%	38,97	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Tulungagung	%	71,4	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Tulungagung	%	38,33	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Malang	%	70,79	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Kab Malang	%	27,11	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Jember	%	65,04	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Jember	%	30,75	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bondowoso	%	64,75	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Ponorogo	%	15,05	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Banyuwangi	%	73,81	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah banyuwangi	%	52,12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara a usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Pamekasan	%	63,52	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Presentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang	%	19,12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Pamekasan																													
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Sampang	%		40,43		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sampang	%		6,61		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kab. Sumenep	%		67,11		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Sumenep	%		16,38		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Bangkalan	%		49,66		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
		Prosentase warga negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus Wilayah Bangkalan	%		9,7		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
		Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah Wilayah Kota Malang	%		92,89		0		0		0		0%		0											DINAS PENDIDIKAN					
1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan	orang	0	1.444.609.706.771,00	0	617.724.747.909,00	0	43%	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah lembaga yang mendapatkan pemenuhan standart nasional pendidikan SMA yang bermutu	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba/olimpiade prestasi akademik dan non akademik	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa akademik dan non akademik	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan Bantuan DAK untuk pemenuhan sarana prasarana	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga yang bekerjasama sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan penghasilan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berkualifikasi S1/D4	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang bersertifikasi profesi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional dan internasional	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan layanan manajemen karir	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	175	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah peserta didik yang memiliki bakat istimewa	siswa	231	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah Satuan Pendidikan yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	lembaga	1.547,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah SMA yang berstandar nasional	lembaga	1.547,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMA berkualifikasi minimal S1/D4 dan mendapat tambahan kesejahteraan dan berprestasi	orang	10.134,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi jenjang SMA	orang	727	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					Jumlah produk konten pendidikan / pembelajaran jenjang SMA	paket	150	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo	lembaga	206	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah MALANG	lembaga	60	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah MADIUN	lembaga	47	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah KEDIRI	lembaga	49	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah MOJOKERTO	lembaga	53	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BLITAR	lembaga	34	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		
					jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PASURUAN	lembaga	54	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																		

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PROBOLINGGO	lembaga	92	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah GRESIK	lembaga	54	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah JOMBANG	lembaga	48	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BOJONEGORO	lembaga	87	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah LAMONGAN	lembaga	74	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PONOROGO	lembaga	43	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PACITAN	lembaga	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah NGANJUK	lembaga	30	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah TULUNGAGUNG	lembaga	42	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah KAB MALANG	lembaga	74	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah JEMBER	lembaga	96	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BONDOWOSO	lembaga	48	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BANYUWANGI	lembaga	51	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah PAMEKASAN	lembaga	81	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah SAMPANG	lembaga	84	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	lembaga	88	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		jumlah lembaga SMA penerima BPOPP Wilayah BANGKALAN	lembaga	73	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	6.009.068.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	480	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	3.549.264.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	7.467.524.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	10.440.729.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	7.840.185.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	(indikator kosong)		0	2.141.471.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	3.641.708.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	709.316.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	88	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	32.932.549.198,00	1	1.337.787.310,00	0	4%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	762	0	1	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	26.995.824.880,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	7.693.834.480,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	LEMBAGA	0	2.741.869.400,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	1.942.707.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	2.798.716.800,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	1.928.920.520,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	(indikator kosong)		0	508.256.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.01	027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	1.309.274.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
1	01	02	1.01	028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	2.041.084.320,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	6.925.254.680,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	283	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Mebel	0	24.501.195.716,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	924	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	9.483.428.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	041	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	0	1.250.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sidoarjo	siswa	0	242.742.746.042,00	0	111.944.487.888,00	0	46%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten Malang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Malang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa SMA Negeri Swasta yang mendapat BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Jombang	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bojonegoro	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA Swasta yang mendapatkan BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA negeri dan swasta yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pacitan	LS	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kediri	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Nganjuk	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Blitar	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						xxx.01	tahun	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Banyuwangi	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sampang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pamekasan	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	372.601,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Sidoarjo	Peserta Didik	91.789,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di wilayah malang	Peserta Didik	25.383,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di wilayah madiun	Peserta Didik		21.623,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Kediri	Peserta Didik		28.381,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Mojokerto	Peserta Didik		18.373,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Blitar	Peserta Didik		14.005,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Pasuruan	Peserta Didik		18.339,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Probolinggo	Peserta Didik		19.113,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Gresik	Peserta Didik		20.570,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Jombang	Peserta Didik		19.238,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Bojonegoro	Peserta Didik		29.387,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Lamongan	Peserta Didik		20.089,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Ponorogo	Peserta Didik		19.193,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Pacitan	Peserta Didik		3.891,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Nganjuk	Peserta Didik		14.898,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Tulungagung	Peserta Didik		21.731,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Kabupaten Malang	Peserta Didik		26.465,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Jember	Peserta Didik		37.580,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Bondowoso	Peserta Didik		18.189,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Banyuwangi	Peserta Didik		20.636,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Pamekasan	Peserta Didik		13.703,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Sampang	Peserta Didik		12.387,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Sumenep	Peserta Didik		15.087,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik di Wilayah Bangkalan	Peserta Didik		16.315,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
1	01	02	1.01	046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
1	01	02	1.01	047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	lembaga	0	7.104.356.282,00	228		819.515.960,00		0	12%		DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah lembaga SMA yang menyelenggarakan seleksi PPDB Online	lembaga		0		193		0		0	0		DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan		215.985,00		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Lembaga SMA yang menyelenggarakan PPDB	Lembaga		423		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah Produksi Media Pembelajaran jenjang SMA	Paket		150		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
					Jumlah siswa jenjang SMA yang mendapatkan pelatihan	Siswa		114		0		0		0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN																						
1	01	02	1.01	049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik yang memiliki Bakat Istimewa	Siswa	0	5.950.000.000,00	0		418.994.470,00		0	7%		DINAS PENDIDIKAN																						

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival olimpiade tingkat provinsi	siswa	0	0	239	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/olimpiade tingkat Provinsi di Wilayah Pasuruan, meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan ;	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/olimpiade tingkat Provinsi	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1.428,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	02	1.01	050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SMA yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	Orang	0	96.175.826.880,00	5.209,00	58.910.287.840,00	0	61%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik satuan pendidikan SMA yang berkualifikasi S2 dan bersertifikasi profesi guru	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	8.596,00	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMA yang berprestasi dan berdedikasi	Orang	0	2.541.153.150,00	0	1.381.988.498,00	0	54%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMA yang mendapatkan pelatihan TIK	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan pelatihan	Orang	0	1.065,00	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	2.240,00	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah SMA yang berstandar Nasional	lembaga	0	28.481.797.219,00	0	13.125.862.432,00	0	46%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kab/ Kota	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Malang	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					jumlah lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan pendidikan di wilayah Gresik	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kab/ Kota	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Bojonegoro	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Pacitan	LS	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kediri	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kab/ Kota	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan pendidikan di wilayah Jember	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan pelayanan Pendidikan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	211	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.01	053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa SMA yang mendapat Bantuan operasional Sekolah	Orang	0	859.900.980.000,00	0	429.630.027.331,00	0	50%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	663.950,00	0	524.484,00	0	79%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah SMK yang berstandart Nasional	lembaga	6.678,00	2.282.202.230.112,00	0	1.013.091.112.841,00	0%	44%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah satuan pendidikan yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	lembaga	2.179,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	lembaga	787	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMK berkualifikasi minimal S1/D4 dan mendapat tambahan kesejahteraan dan berprestasi	orang	13.307,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi jenjang SMK	orang	1.710,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	orang	1.703,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan inkubator bisnis dan kompetensi vokasi	orang	1.703,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo	lembaga	206	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MALANG	lembaga	60	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MADIUN	lembaga	47	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah KEDIRI	lembaga	49	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MOJOKERTO	lembaga	52	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4							8
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BLITAR	lembaga	34	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PASURUAN	lembaga	54	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PROBOLINGGO	lembaga	92	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah GRESIK	lembaga	54	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah JOMBANG	lembaga	48	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BOJONEGORO	lembaga	87	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah LAMONGAN	lembaga	74	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PONOROGO	lembaga	43	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PACITAN	lembaga	12	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah NGANJUK	lembaga	30	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah TULUNGAGUNG	lembaga	42	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah KAB MALANG	lembaga	74	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah JEMBER	lembaga	96	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BONDOWOSO	lembaga	48	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BANYUWANGI	lembaga	51	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PAMEKASAN	lembaga	81	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SAMPANG	lembaga	84	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	lembaga	88	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BANGKALAN	lembaga	73	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah produk konten pendidikan / pembelajaran jenjang SMK	paket	50	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga yang mendapatkan standart nasional pendidikan SMK yang bermutu	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		prosentase kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Metode Pembelajaran Teaching Factory (TEFA)	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diseleraskan kualitas SMK dengan Industri	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah sekolah yang memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK)	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah lembaga yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah sekolah yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba/olimpiade prestasi akademik dan non akademik sesuai dengan bidang dan keahliannya	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa akademik dan non akademik	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana dan prasarana	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan penghasilan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berkualifikasi S1/D4	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang bersertifikasi profesi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan layanan manajemen karir	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan hukum	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah peserta yang mengikuti inkubator bisnis	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah peserta yang mengikuti kompetensi vokasi	otang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah dokumen materi pelatihan inkubator bisnis	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
		Jumlah dokumen materi kompetensi vokasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						Jumlah guru dan siswa yang mendapatkan akses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru	lembaga	0	21.000.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru	lembaga	0	1.864.040.850,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa	lembaga	0	36.483.678.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan pembangunan Laboratorium Komputer	lembaga	0	18.855.585.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan pembangunan UKS	lembaga	0	2.683.548.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkna bantuan pembangunan perpustakaan	lembaga	0	2.149.560.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan pembangunan ruang osis	lembaga	0	15.940.905.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	20	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan rehab ruang kelas	lembaga	0	16.781.947.560,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	41	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan rehab ruang TU	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan rehab pagar	lembaga	0	530.400.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel	Mebel	0	5.152.169.590,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	1.300,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	6	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah pengadaan alat praktek dan peraga	Paket	0	121.004.333.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	10	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sidoarjo	siswa	0	597.261.734.658,00	0	288.326.110.121,00	0	48%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten Malang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Malang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa SMK Negeri Swasta yang mendapatkan BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bojonegoro	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK Negeri yang mendapatkan BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK negeri dan swasta yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pacitan	LS	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Kediri	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Nganjuk	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SMK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		xxx.01	tahun	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Jember	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Banyuwangi	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SMK swasta yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sampang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SMK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pamekasan	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	374.977,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	02	1.02	038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga SMK yang menyelenggarakan PPDB	lembaga	0	1.500.000.000,00	90	561.397.210,00	0	37%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	650	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	721	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lembaga yang memiliki BKK	lembaga	0	12.518.345.128,00	0	1.585.997.448,00	0	13%	DINAS PENDIDIKAN
					jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/olimpiade tingkat provinsi	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah jenis lomba yang diikuti	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/olimpiade tingkat Provinsi di Wilayah Pasuruan	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/olimpiade tingkat Provinsi	Siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah dokumen materi pelatihan inkubator bisnis dan kompetensi vokasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3.130,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SMK yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	Orang	0	99.758.884.440,00	8.138,00	61.009.486.900,00	0	61%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik satuan pendidikan SMK yang berkualifikasi S2 dan bersertifikasi profesi guru	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	13.943,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan pelatihan	Orang	0	3.869.722.900,00	956	1.360.097.894,00	0	35%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMK yang berprestasi dan berdedikasi	orang	0	0	46	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK yang mendapatkan pelatihan TIK	orang	0	0	380	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3.109,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.02	044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.02	045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	orang	0	4.692.385.986,00	0	262.731.854,00	0	6%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Sidoarjo	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Malang	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah malang	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan peayanan pendidikan di Wilayah Kab dan Kota Mojokerto	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Bojonegoro	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Pacitan	LS	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kediri	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan di wilayah Jember	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	57	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	02	1.02	046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa SMK yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah	orang	0	1.320.154.990.000,00	764.421,00	659.985.291.414,00	0	50%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		772.757,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan sarana prasarana	lembaga	410	200.759.324.280,00	0	65.784.151.698,00	0%	33%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah satuan pendidikan PK-PLK yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional	lembaga	418	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berstandar nasional	lembaga	420	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan PK-PLK yang ditingkatkan kompetensinya	orang	620	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi jenjang PK-PLK	orang	760	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah produk konten pendidikan / pembelajaran Jenjang PK-PLK	paket	50	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo dan Surabaya	lembaga	77	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Malang	lembaga	24	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kota Malang dan kota Batu	lembaga	24	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Ponorogo dan magetan	lembaga	35	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Tulungagung dan Trenggalek	lembaga	15	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Gresik	lembaga	19	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto	lembaga	16	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Jombang	lembaga	11	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Bojonegoro	lembaga	10	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Lamongan	lembaga	19	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah kabupaten Madiun dan kota Madiun	lembaga	19	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Pacitan	lembaga	9	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah kabupaten Kediri dan Kota Kediri	lembaga	16	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Nganjuk	lembaga	7	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah kabupaten Blitar dan Kota Blitar	lembaga	29	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan	lembaga	17	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo	lembaga	15	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Jember	lembaga	22	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Bondowoso dan Situbondo	lembaga	12	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Banyuwangi	lembaga	50	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Pamekasan	lembaga	7	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Sampang	lembaga	4	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Sumenep	lembaga	6	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Bangkalan	lembaga	5	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapat DAK untuk pemenuhan sarana prasarana	lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah lembaga SLB yang menyelenggarakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah/ujian nasional jenjang SDLB, SMPLE, SMALE	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti pengembangan potensi di bidang Ketrampilan, Seni, Olahraga dan Literasi	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa non akademik	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diselaraskan kualitas PK-PLK dengan industri	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah siswa SLB yang mendapat Bantuan operasional Sekolah	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan penghasilan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berkualifikasi S1/D4	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang bersertifikasi profesi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional dan internasional	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan layanan manajemen karir	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah guru yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan metode pembelajaran	guru	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah guru dan siswa yang mendapatkan akses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	LEMBAGA	0	2.350.789.005,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang	10	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	677.724.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	LEMBAGA	0	5.368.530.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	18	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	018	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	LEMBAGA	0	5.697.570.095,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	2	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	019	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	(indikator kosong)		0	774.293.470,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	020	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	(indikator kosong)		0	124.714.470,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	024	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	LEMBAGA	0	3.437.446.820,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	20	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan rehabilitasi ruang bina persepsi bunyi dan irama untu tuna rungu (B)	LEMBAGA	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel	Paket	0	2.322.465.260,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	59	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	039	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit	5	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
1	01	02	1.03	040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan alat praktek siswa	lembaga	0	907.200.000,00	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	2	0	0	0	0%	DINAS PENDIDIKAN		
1	01	02	1.03	044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah siswa PK-PLK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sidoarjo	siswa	0	16.494.015.700,00	0	10.084.572.492,00	0	61%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah siswa PK-PLK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten Malang	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7				8			
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Malang	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah ponorogo	Siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					jumlah siswa PK-PLK Negeri Swasta yang mendapatkan BPOPP	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Jombang	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bojonegoro	Siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PKLK Negeri yang mendapatkan BPOPP (indikator kosong)	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK negeri dan swasta yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pacitan	LS	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kediri	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Nganjuk	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Blitar	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pasuruan	Siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					xxx.01	tahun	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Jember	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Banyuwangi	Siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sampang	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah siswa PK-PLK negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pamekasan	Siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	5,341,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
1	01	02	1.03	046	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	-	0	956.512.600,00	0	639.194.294,00	0	67%	DINAS PENDIDIKAN																		
					(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	208	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
1	01	02	1.03	048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat dibidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi	siswa	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah Sidoarjo dan SURABAYA	siswa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah MALANG	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah MADIUN	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah KEDIRI	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	
					Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah MOJOKERTO	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4											
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah BLITAR	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah BLITAR	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah PASURUAN	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah PROBOLINGGO	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah GRESIK	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah JOMBANG	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah BOJONEGORO	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah LAMONGAN	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah PONOROGO	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah PACITAN	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah NGANJUK	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah TULUNGAGUNG	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah KAB MALANG	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah JEMBER	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah BONDOWOSO	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah BANYUWANGI	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah PAMEKASAN	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah SAMPANG	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah SUMENEP	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangkan bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi di Wilayah BANGKALAN	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	585	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta Didik	585	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN				
1	01	02	1.03	049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan PK-PLK yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	orang	0	5.629.407.780,00	244	2.570.178.000,00	0	46%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	405	0	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PK-PLK yang mengikuti pelatihan	orang	0	2.066.020.800,00	63	533.343.613,00	0	26%	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan PK-PLK yang berprestasi dan berdedikasi	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PK-PLK yang mendapatkan pelatihan TIK	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	Orang	183	0	0	0	0%	0	0	DINAS PENDIDIKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
								5		6				
					Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									
1	01	02	1.03	051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Sidoarjo	lembaga	0	3.816.567.400,00	0	882.842.799,00	0	23%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah MALANG	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah lembaga PK-PLK penerima BPOPP Wilayah Ponorego dan magetan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah lembaga PK-PLK Negeri yang mendapatkan pelayanan pendidikan di Wilayah Kab dan Kota Mojokerto	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Bojonegoro	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Pacitan	LS	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Kediri	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan di wilayah Jember	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Lembaga PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan di Wilayah Sampang	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah pembuatan aplikasi teknologi informasi/pendidikan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	5	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	1.03	052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah siswa SLB yang mendapat Bantuan operasional Sekolah	orang	0	144.097.600.000,00	27.151,00	51.074.020.500,00	0	35%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	3.674,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan layanan kebutuhan profesi	%	86	4.941.211.240,00	0	1.320.550.081,00	0%	27%	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase pemenuhan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standart Layanan Minimal	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA/SMK/PK/PLK yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan	orang	35.957,00	4.941.211.240,00	0	1.320.550.081,00	0%	27%	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan layanan manajemen karir	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA	dokumen	0	680.113.600,00	0	535.348.337,00	0	79%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMK	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PK-PLK	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA yang telah ditata dan didistribusikan sesuai kebutuhan	orang	0	4.261.097.640,00	0	785.201.744,00	0	18%	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMK yang telah ditata dan didistribusikan sesuai kebutuhan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang PK-PLK yang telah ditata dan didistribusikan sesuai kebutuhan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	laporan	589	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah menengah atas yang mendapatkan rekomendasi	lembaga	2.037,00	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	200	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang mendapatkan rekomendasi	lembaga	38	0	0	0	0%	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentasi indikator program yang tercapai	%	90	2.825.331.800,00	0	893.095.863,00	0%	32%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
						Persentase realisasi anggaran	%	85	0	31,46	0	37%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
						Indeks profesionalitas ASN	%	86	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		7 = 6/5 x 100%
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	6	0	0,37	0	6%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA	
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA	
1	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	Dokumen	4	13.700.000,00	4	13.699.920,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.725.000,00	1	3.724.920,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	3.325.000,00	1	3.325.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	3.325.000,00	2	3.325.000,00	200%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	3.325.000,00	1	3.325.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	17	19.000.000,00	0	8.290.000,00	0%	44%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	17	0	6	0	35%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Verifikasi Penatausahaan	Laporan	1	10.000.000,00	0	6.598.000,00	0%	66%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	1	1.800.000,00	1	200.000,00	100%	11%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	1	0	8%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Laporan	2	1.800.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	3.600.000,00	0	1.492.000,00	0%	41%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognostis	Laporan	1	1.800.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	2	8.090.000,00	0	3.028.000,00	0%	37%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	3.325.000,00	1	581.000,00	100%	17%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.06	010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	3	4.765.000,00	1	2.447.000,00	33%	51%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	743.277.000,00	2	348.666.008,00	17%	47%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	743.277.000,00	6	348.666.008,00	50%	47%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase peningkatan Sales Growth	%	8,33	2.041.264.800,00	16,87	519.411.935,00	203%	25%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah unit produksi yang dihasilkan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01	1.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	Paket	13	2.041.264.800,00	18	519.411.935,00	138%	25%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
							Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Paket	13	0	18	0	138%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kelulusan Siswa	%	100	82.587.000,00	100	62.109.500,00	100%	75%	SMK NEGERI 1 SURABAYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	Orang	259	82.587.000,00	0	62.109.500,00	0%	75%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
						Jumlah Siswa yang mengikuti lomba	Siswa	233	0	150	0	64%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
						Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	Orang	135	0	80	0	59%	0	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidik	1.728,00	52.110.000,00	3.456,00	52.109.500,00	200%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	33	10.000.000,00	33	10.000.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	135	37.811.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	%	99	969.711.000,00	63,69	442.139.835,00	64%	46%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Persentase realisasi anggaran	%	98,8	0	63,79	0	65%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Indeks profesionalitas ASN	%	90	0	44,62	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	15	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	14.327.800,00	2	3.196.700,00	50%	22%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	6.278.700,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	3.196.700,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	3.196.700,00	0	3.196.700,00	0	100%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	1.655.700,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	109.604.500,00	6	55.661.500,00	50%	51%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	102.216.000,00	6	51.108.000,00	50%	50%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	600.000,00	6	600.000,00	50%	100%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	12	3.600.000,00	6	1.500.000,00	50%	42%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	2	2.086.400,00	1	2.086.400,00	50%	100%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	767.100,00	6	367.100,00	50%	48%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	335.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	7.877.000,00	6	1.920.000,00	50%	24%	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	3.840.000,00	0	1.920.000,00	0	50%	SMK NEGERI 5 SURABAYA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	4.037.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	2	13.468.000,00	0	2.949.000,00	0%	22%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah paket pengadaan	Kali	10	3.350.000,00	7	2.546.000,00	70%	76%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	0	7	0	70%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	9.715.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar Arsip Aktif	Dokumen	0	403.000,00	0	403.000,00	0	100%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	636.053.700,00	0	359.098.635,00	0%	56%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	636.053.700,00	6	359.098.635,00	50%	56%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	6	188.380.000,00	1	19.314.000,00	17%	10%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	unit	8	0	4	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	Paket	111.237.500,00	188.380.000,00	29.859.000,00	19.314.000,00	27%	10%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	8	0	4	0	50%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	8.869.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	Orang	600	8.869.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	Siswa	110	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	Orang	60	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/ Dunia Industri	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar	Siswa	0	2.891.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	600	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Kali	0	2.800.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	Orang	0	3.178.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	60	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 SURABAYA																	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	85	869.915.100,00	80	317.412.787,00	94%	36%	SMK NEGERI 6 SURABAYA																	
						Presentase Peningkatan Pendapatan	%	1	0	4	0	400%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA																	
						Persentase realisasi anggaran	%	96,8	0	96,8	0	100%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA																	
						Indeks profesionalitas ASN	%	82	0	82	0	100%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA																	
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	37,69	0	0	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA																	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.512.125,00	4	3.459.270,00	100%	30%	SMK NEGERI 6 SURABAYA																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	2.621.600,00	0	513.700,00	0%	20%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	Dokumen	1	2.433.251,00	0	100.000,00	0%	4%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	4.170.074,00	0	2.845.570,00	0%	68%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	Dokumen	1	2.287.200,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	91.364.100,00	6	19.971.700,00	50%	22%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	12	59.787.500,00	0	17.102.500,00	0%	29%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	2.112.000,00	0	1.769.200,00	0%	84%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	12	3.600.000,00	0	300.000,00	0%	8%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	2	4.245.100,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	18.444.000,00	0	800.000,00	0%	4%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	3.175.500,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	2.028.000,00	6	0	50%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	12	2.028.000,00	6	0	50%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	3	35.369.000,00	1	21.356.000,00	33%	60%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	1	27.984.000,00	2	20.856.000,00	200%	75%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	1	4.885.000,00	0	500.000,00	0%	10%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	1	2.500.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	1	27.192.525,00	1	9.000.000,00	100%	33%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	1	27.192.525,00	0	9.000.000,00	0%	33%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	526.800.000,00	6	245.820.817,00	50%	47%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	526.800.000,00	6	245.820.817,00	50%	47%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap Yang Terpelihara	Laporan	1	17.416.000,00	0	2.555.000,00	0%	15%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	2	17.416.000,00	1	2.555.000,00	50%	15%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan sales growth	%	8	154.000.000,00	0	15.250.000,00	0%	10%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	Paket	15,75	154.000.000,00	5	15.250.000,00	32%	10%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Kelulusan Siswa	%	100	29.084.900,00	45	9.000.000,00	45%	31%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	Orang	375	29.084.900,00	100	9.000.000,00	27%	31%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Siswa	110	0	40	0	36%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
						Jumlah guru yang mendapat pelatihan	Orang	60	0	15	0	25%	0	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	Paket	4	20.381.000,00	2	9.000.000,00	50%	44%	SMK NEGERI 6 SURABAYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peseta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	Siswa	12	2.307.500,00	12	0	100%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa	Kali	50	2.594.600,00	25	0	50%	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	Orang	0	3.801.800,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator program yang tercapai	%	90	1.907.632.500,00	50	1.035.294.003,00	56%	54%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	53,26	0	59%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Indeks Profesionalitas ASN	%	85	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	15	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	7.274.000,00	2	750.000,00	50%	10%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	2.984.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	dokumen	0	1.730.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	dokumen	0	1.280.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	dokumen	0	1.280.000,00	0	750.000,00	0	59%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	12	21.075.000,00	6	5.452.000,00	50%	26%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	0	9.000.000,00	0	1.850.000,00	0	21%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	laporan	0	1.500.000,00	0	502.000,00	0	33%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	1.500.000,00	0	897.000,00	0	60%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	575.000,00	0	375.000,00	0	65%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	0	2	0	100%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	7.920.000,00	0	1.828.000,00	0	23%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	580.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	1.400.000,00	6	800.000,00	50%	57%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	laporan	0	1.400.000,00	0	800.000,00	0	57%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	1.950.000,00	6	0	50%	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2		3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	0	1.200.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	0	750.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	8	29.880.000,00	4	9.057.500,00	50%	30%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	4.010.000,00	0	1.200.000,00	0	30%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	0,3	0	30%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	2.500.000,00	0	1.744.500,00	0	70%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	0	2	0	67%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	3.000.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	paket	0	1.250.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	kali	0	10.000.000,00	0	2.345.000,00	0	23%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	120	0	30	0	25%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	6.000.000,00	0	3.768.000,00	0	63%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	0	0,6	0	60%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen	0	1.120.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah daftar arsip inaktif	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah daftar arsip vital	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	laporan	12	586.976.000,00	6	276.943.206,00	50%	47%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	900.000,00	0	290.500,00	0	32%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	0	0,3	0	30%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	586.076.000,00	0	276.652.706,00	0	47%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	2	1.259.077.500,00	1	742.291.297,00	50%	59%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	paket	12	1.259.077.500,00	0	742.291.297,00	0%	59%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah unit usaha yang dijalankan (unit)	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	11	0	6	0	55%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase kelulusan siswa	%	100	36.300.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	orang	63	36.300.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	siswa	45	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah lulusan yang tereserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	426	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Lulusan yang tereserap di DUDI	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	siswa	0	11.050.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah peseta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	siswa	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan	1.476,00	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa	kali	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir (orang)	orang	0	5.250.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	35	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	1.071.344.000,00	50	436.831.480,00	50%	41%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Persentase realisasi anggaran	%	100	0	40,77	0	41%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Indeks profesionalitas ASN	%	90	0	45	0	50%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	15	0	6	0	40%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Prosentase Kenaikan Pendapatan UPJ	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	688.600,00	2	0	50%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	228.650,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	190.850,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	154.750,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	114.350,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	laporan	12	80.060.800,00	6	39.505.400,00	50%	49%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	78.708.000,00	6	39.429.700,00	50%	50%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	150.050,00	6	75.700,00	50%	50%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	535.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	567.000,00	6	0	50%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	100.750,00	0,5	0	50%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	12	239.000,00	6	239.000,00	50%	100%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	239.000,00	6	239.000,00	50%	100%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	12	4.359.070,00	6	2.480.000,00	50%	57%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4.120.070,00	0,5	2.480.000,00	50%	60%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	239.000,00	0,5	0	50%	0%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	2	557.396.530,00	1	241.626.133,00	50%	43%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	535.448.530,00	6	234.773.090,00	50%	44%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	21.948.000,00	0,5	6.853.043,00	50%	31%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap yang terpelihara	laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	10	428.600.000,00	5	152.980.947,00	50%	36%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						jumlah unit produksi yang dihasilkan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	paket	0	428.600.000,00	0	152.980.947,00	0	36%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	26.911.000,00	100	16.637.070,00	100%	62%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	orang	95	26.911.000,00	45	16.637.070,00	47%	62%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	siswa	20	0	11	0	55%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	450	0	312	0	69%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	7.200.000,00	0,5	4.000.000,00	50%	56%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	25	16.111.000,00	11	11.937.070,00	44%	74%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	orang	0	3.600.000,00	0	700.000,00	0	19%	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	80	0	38	0	48%	0	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	%	81	1.269.000.000,00	0	606.152.038,60	0%	48%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Prosentase realisasi anggaran	%	81	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Indeks profesional ASN	%	84	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	5,5	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	15.300.000,00	0	1.893.800,00	0%	12%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	4.550.000,00	0	1.058.300,00	0%	23%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	1	4.550.000,00	0	835.500,00	0%	18%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	3.100.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	1	3.100.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	163.800.000,00	6	77.295.200,00	50%	47%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	100.000.000,00	6	49.878.000,00	50%	50%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	21.100.000,00	6	14.984.000,00	50%	71%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	12	23.700.000,00	6	11.176.000,00	50%	47%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	2	7.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Dokumen keuangan SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan	laporan	12	7.000.000,00	6	1.257.200,00	50%	18%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis	laporan	1	4.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan prognosis	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	12	40.300.000,00	6	34.884.000,00	50%	87%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Set	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	12	5.100.000,00	10	4.884.000,00	83%	96%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	5.200.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	14	29.150.000,00	2	6.491.455,00	14%	22%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	1	4.000.000,00	1	3.891.105,00	100%	97%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	1	2.000.000,00	0	97.850,00	0%	5%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	1	1.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Laporan	10	15.000.000,00	2	2.502.500,00	20%	17%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Paket pengadaan	kali	10	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	5.100.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan	laporan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip vital	Dokumen	1	2.050.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	2	20.000.000,00	1	19.235.747,00	50%	96%	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	paket	1	10.000.000,00	0	9.249.999,00	0%	92%	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Mebel	set	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	2	10.000.000,00	1	9.985.748,00	50%	100%	SMK NEGERI 2 MALANG

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	368.450.000,00	6	172.780.824,00	50%	47%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	5	1.000.000,00	1	454.600,00	20%	45%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah pengiriman Dokumen	paket	5	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	365.450.000,00	6	172.326.224,00	50%	47%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	1	1.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	2	25.000.000,00	1	2.495.000,00	50%	10%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	Unit	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	paket	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	3	6.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	1	14.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	7,2	607.000.000,00	4	291.076.012,60	56%	48%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah Unit Produksi yang dihasilkan	Unit	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	paket	12	607.000.000,00	6	291.076.012,60	50%	48%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	Unit Kerja	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase kelulusan siswa	%	100	60.000.000,00	0	422.000,00	0%	1%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	100	60.000.000,00	0	422.000,00	0%	1%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
		Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	siswa	100	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
		Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	orang	115	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
		Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri	orang	100	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 MALANG																					
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah paket pengadaan	paket	1	24.000.000,00	1	422.000,00	100%	2%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	Siswa	25	12.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	kali	1	12.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	orang	115	12.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 MALANG																	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Peningkatan Pendapatan	persen	20,08	1.180.300.000,00	9,9	441.325.663,00	49%	37%	SMK NEGERI 4 MALANG																	
		Presentase Indikator Program Yang Dicapai	persen	95	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 4 MALANG																					
		Presentase Realisasi Anggaran	persen	92	0	46,82	0	51%	0	SMK NEGERI 4 MALANG																					

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
							5		6		7 = 6/5 x 100%			
					Indeks Profesional ASN	persen	83	0	43	0	52%	0	SMK NEGERI 4 MALANG	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	20.000.000,00	2	103.400,00	50%	1%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	103.400,00	0%	2%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	54.300.000,00	6	16.227.100,00	50%	30%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	14.000.000,00	6	2.885.600,00	50%	21%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	17.000.000,00	6	6.836.500,00	50%	40%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	3.300.000,00	1	1.427.000,00	50%	43%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	17.000.000,00	6	5.078.000,00	50%	30%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	3.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	5.400.000,00	6	3.227.000,00	50%	60%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5.400.000,00	6	3.227.000,00	50%	60%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	1	70.000.000,00	1	69.995.900,00	100%	100%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	70.000.000,00	1	69.995.900,00	100%	100%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	5	61.100.000,00	2	28.713.027,00	40%	47%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	13.000.000,00	1	9.434.500,00	50%	73%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	2.800.000,00	1	571.545,00	100%	20%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	10.000.000,00	1	2.072.060,00	100%	21%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	33.000.000,00	1	15.478.122,00	100%	47%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.300.000,00	1	1.156.800,00	100%	50%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	281.000.000,00	6	118.347.023,00	50%	42%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000,00	1	12.000,00	100%	1%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	280.000.000,00	6	118.335.023,00	50%	42%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	Laporan	2	7.000.000,00	1	3.673.000,00	50%	52%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000,00	1	3.673.000,00	100%	52%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	Persen	15	681.500.000,00	8	201.039.213,00	53%	29%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	15	681.500.000,00	7	201.039.213,00	47%	29%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE KELULUSAN SISWA	Persen	100	65.430.000,00	100	29.384.040,00	100%	45%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	orang	100	65.430.000,00	50	29.384.040,00	50%	45%	SMK NEGERI 4 MALANG
						Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	orang	20	0	10	0	50%	0	SMK NEGERI 4 MALANG
						Jumlah lulusan yang terampil di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	orang	668	0	352	0	53%	0	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	8	30.000.000,00	2	8.972.000,00	25%	30%	SMK NEGERI 4 MALANG

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan pendidikan	900	10.430.000,00	900	10.430.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2	10.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	100	15.000.000,00	50	9.982.040,00	50%	67%	SMK NEGERI 4 MALANG
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase indikator program yang tercapai	%	87	837.737.980,00	0	369.712.312,00	0%	44%	SMK NEGERI 11 MALANG
						Prosentase realisasi anggaran	%	87	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
						Indeks Profesionalitas ASN	%	92	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	83	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	6.845.000,00	0	1.073.000,00	0%	16%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	3.485.000,00	0	1.073.000,00	0%	31%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1.630.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	1.430.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	300.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	88.853.000,00	0	38.045.000,00	0%	43%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	55.296.000,00	6	27.648.000,00	50%	50%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	5.542.000,00	6	300.000,00	50%	5%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	12	15.700.000,00	6	3.731.000,00	50%	24%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	2	2.660.000,00	1	1.027.000,00	50%	39%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	8.580.000,00	6	5.339.000,00	50%	62%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	1.075.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	5.320.000,00	0	3.581.000,00	0%	67%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	4	5.320.000,00	2	3.581.000,00	50%	67%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	12	60.500.000,00	0	20.000.000,00	0%	33%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	120	57.000.000,00	0	20.000.000,00	0%	35%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	12	3.500.000,00	6	0	50%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	6	68.004.000,00	0	27.524.575,00	0%	40%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	1	4.700.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Paket	1	3.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	1	5.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Paket	5	6.500.000,00	2	1.005.000,00	40%	15%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	47.304.000,00	2	26.519.575,00	200%	56%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, inaktif dan vital	Dokumen	1	1.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	1	17.670.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	1	17.670.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1				2		3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	303.645.980,00	2	130.669.862,00	17%	43%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	24	420.000,00	0	25.000,00	0%	6%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	303.225.980,00	6	130.644.862,00	50%	43%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	5	286.900.000,00	0	148.818.875,00	0%	52%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	5	286.900.000,00	2	148.818.875,00	40%	52%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase kelulusan siswa	%	100	84.785.020,00	0	21.222.500,00	0%	25%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	55	84.785.020,00	0	21.222.500,00	0%	25%	SMK NEGERI 11 MALANG
						Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	orang	70	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	siswa	25	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
						Prosentase Ketulunan Siswa	Orang	100	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	Siswa	275	37.635.020,00	2	2.912.500,00	1%	8%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	kali	5	30.500.000,00	5	18.310.000,00	100%	60%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan Pangkat / Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	5	16.650.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 11 MALANG
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan	%	0,04	875.890.000,00	0,02	448.476.862,00	50%	51%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	85	0	50	0	59%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Prosentase Realisasi Anggaran	%	90	0	50,74	0	56%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Indeks Profesionalitas ASN	%	80	0	45	0	56%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	8.173.300,00	2	238.000,00	50%	3%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	2.145.825,00	1	59.500,00	100%	3%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	2.145.825,00	0	59.500,00	0%	3%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	2.145.825,00	1	59.500,00	100%	3%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1.735.825,00	0	59.500,00	0%	3%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	108.186.450,00	0	51.429.090,00	0%	48%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	57.110.700,00	6	25.595.500,00	50%	45%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.394.700,00	6	59.500,00	50%	4%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	12	16.959.300,00	6	7.798.500,00	50%	46%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	2	2.179.525,00	1	1.618.500,00	50%	74%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	28.599.700,00	6	16.300.090,00	50%	57%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1.942.525,00	0	57.000,00	0%	3%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	6.427.200,00	0	2.033.000,00	0%	32%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	6.427.200,00	6	2.033.000,00	50%	32%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7		8
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan		12	1.012.700,00	0	0%	6%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen		12	1.012.700,00	6	50%	6%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12	0	6	50%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan		3	61.528.500,00	0	0%	60%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan		10	28.430.400,00	0	0%	76%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		1	31.105.200,00	0	0%	43%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen		1	1.992.900,00	0	0%	99%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah daftar arsip aktif	dokumen		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah daftar arsip inaktif	dokumen		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah daftar arsip vital	dokumen		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan		2	18.420.000,00	0	0%	100%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1	1.607.000,00	1	100%	100%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	16.813.000,00	1	100%	100%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan		12	488.226.850,00	0	0%	49%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	488.226.850,00	6	50%	49%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan		12	915.000,00	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		6	915.000,00	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%		5	183.000.000,00	0	0%	56%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	unit		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja		6	183.000.000,00	3	50%	56%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah unit usaha yang dijalankan	unit		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kelulusan Siswa	%		100	8.180.000,00	0	0%	2%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lulusan yang Tersekap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	Orang		204	8.180.000,00	204	100%	2%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	Siswa		10	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah Guru yang Mendapat Pelatihan	Orang		4	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah lulusan yang tersekap di Dunia Usaha/Dunia Industri	Orang		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		3	1.000.000,00	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan		57	900.000,00	0	0%	8%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
						Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	siswa		0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik		12	5.280.000,00	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang		4	1.000.000,00	0	0%	6%	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG												
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	%		100	1.849.000.000,00	50	50%	44%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO												
						Persentase Realisasi Anggaran	%		100	0	44,15	0	44%	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO											
						Indeks Profesionalitas ASN	%		85	0	85	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO											

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8																	
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Persentase Peningkatan Pendapatan	%	15	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																		
					Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																		
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	7.500.000,00	1	2.000.000,00	25%	27%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jmlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.750.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.750.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	76.652.000,00	6	32.478.900,00	50%	42%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	56.052.000,00	6	24.420.000,00	50%	44%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.200.000,00	6	293.900,00	50%	24%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	16.800.000,00	6	7.765.000,00	50%	46%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	JUmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.600.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	1.200.000,00	6	659.400,00	50%	55%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	1.200.000,00	6	659.400,00	50%	55%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	12	59.740.000,00	6	26.538.600,00	50%	44%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	43.900.000,00	2	19.883.000,00	67%	45%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10	2.400.000,00	0	535.600,00	0%	22%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	12.240.000,00	0	6.120.000,00	0%	50%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	1.200.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan	12	522.268.000,00	6	249.974.400,00	50%	48%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	640.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	521.628.000,00	6	249.974.400,00	50%	48%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	6.500.000,00	6	5.840.000,00	50%	90%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	6.500.000,00	8	5.840.000,00	80%	90%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	5	1.175.140.000,00	2	498.760.000,00	40%	42%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
						Jumlah Unit Produksi yang dihasilkan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	8	1.175.140.000,00	4	498.760.000,00	50%	42%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kelulusan Siswa	%	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	500	22.500.000,00	250	22.500.000,00	50%	100%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Siswa	20	0	20	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	
						Jumlah Guru yang mendapatkan pelatihan	orang	100	0	100	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	Satuan Pendidikan	1	8.600.000,00	1	8.600.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	Peserta Didik	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100	7.900.000,00	100	7.900.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	582.855.378,00	35,6	304.654.688,00	36%	52%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Prosentase Realisasi anggaran	%	74,65	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Indeks Profesionalitas ASN	%	81	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	10	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	7.484.480,00	2	1.958.380,00	50%	26%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.111.480,00	1	1.111.480,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	725.400,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.806.900,00	1	846.900,00	100%	30%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	2.840.700,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	96.843.724,00	6	43.433.600,00	50%	45%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	66.276.000,00	6	33.138.000,00	50%	50%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3.055.000,00	6	1.000.000,00	50%	33%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	17.640.000,00	6	7.840.000,00	50%	44%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	3.357.459,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.885.265,00	6	1.455.600,00	50%	37%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.630.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	9.800.000,00	6	3.920.000,00	50%	40%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	9.800.000,00	6	3.920.000,00	50%	40%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	131.941.543,00	0	70.134.800,00	0	53%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	4	0	1	0	25%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	91.350.683,00	1	49.426.500,00	50%	54%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.005.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	33.726.000,00	0	20.600.000,00	0%	61%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Arsip Vital	dokumen	0	5.859.860,00	0	108.300,00	0	2%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah arsip aktif	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah arsip inaktif	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah arsip vital	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	165.285.631,00	0	82.022.408,00	0	50%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	0	490.831,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	164.794.800,00	6	82.022.408,00	50%	50%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Produksi yang Dihasilkan	Unit	4	171.500.000,00	0	103.185.500,00	0%	60%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Persentase Peningkatan Sales Growth	%	10	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	4	171.500.000,00	2	103.185.500,00	50%	60%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	77.846.622,00	0	27.651.800,00	0%	36%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	orang	30	77.846.622,00	0	27.651.800,00	0%	36%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	siswa	50	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	60	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
						Jumlah Lulusan yang terserap di DUDI	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	15	55.045.794,00	7	23.967.600,00	47%	44%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	40	7.382.145,00	0	3.684.200,00	0%	50%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	12	15.418.683,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	95	1.048.503.400,00	0	415.835.959,00	0%	40%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Indeks profesionalitas ASN	%	92	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Persentase peningkatan pendapatan	%	5	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
					Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	2,5	0	0	0	7 = 6/5 x 100%			
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	11.630.000,00	1	60.000,00	25%	1%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	3.135.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	dokumen	1	2.885.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	2.820.000,00	0	60.000,00	0%	2%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	1	2.790.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	12	102.539.200,00	6	45.005.339,00	50%	44%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	12	51.745.000,00	6	23.195.639,00	50%	45%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	12	1.684.500,00	6	912.000,00	50%	54%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi SKPD	laporan	12	11.040.000,00	6	3.740.000,00	50%	34%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	2	3.365.200,00	2	605.200,00	100%	18%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	laporan	12	34.597.500,00	6	16.552.500,00	50%	48%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	1	107.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	18.685.000,00	2	3.640.000,00	17%	19%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	laporan	12	18.685.000,00	0	3.640.000,00	0%	19%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	12	49.325.300,00	6	47.972.500,00	50%	97%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	80	47.498.200,00	0	47.470.000,00	0%	100%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	12	585.000,00	0	275.000,00	0%	47%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	1.081.500,00	0	206.500,00	0%	19%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	12	160.600,00	0	21.000,00	0%	13%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	5	45.281.250,00	3	24.712.500,00	60%	55%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	12	7.996.700,00	0	6.022.400,00	0%	75%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	12	1.498.550,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	12	3.376.000,00	0	1.327.600,00	0%	39%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	30.910.000,00	0	16.032.500,00	0%	52%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	1	1.500.000,00	0	1.330.000,00	0%	89%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah daftar arsip inaktif	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah daftar arsip vital	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	1	89.191.850,00	0,7	39.006.162,00	70%	44%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	1	0	0,7	0	70%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	1	89.191.850,00	0	39.006.162,00	0%	44%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Laporan	12	216.197.800,00	6	76.054.408,00	50%	35%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	24	220.000,00	0	114.000,00	0%	52%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	215.977.800,00	0	75.940.408,00	0%	35%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12	28.602.000,00	7	13.408.250,00	58%	47%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	paket	2	24.407.000,00	0	11.313.250,00	0%	46%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	paket	6	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	10	4.195.000,00	0	2.095.000,00	0%	50%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan sales growth	%	5	487.051.000,00	1	165.976.800,00	20%	34%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	Unit	14	0	5	0	36%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	paket	14	487.051.000,00	0	165.976.800,00	0%	34%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	46.905.600,00	100	33.092.100,00	100%	71%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	orang	35	46.905.600,00	35	33.092.100,00	100%	71%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	siswa	17	0	17	0	100%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	160	0	160	0	100%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
						Persentase kelulusan siswa	%	100	0	100	0	100%	0	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	unit	2	8.250.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Siswa	30	4.277.800,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	Siswa	17	30.010.000,00	0	29.682.100,00	0%	99%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	Orang	33	4.367.800,00	0	3.410.000,00	0%	78%	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	95	1.177.995.000,00	0	464.368.601,00	0%	39%	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Persentase realisasi anggaran	%	96	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Indeks profesionalitas ASN	%	84,5	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	15	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	10.000.000,00	0	4.800.200,00	0%	48%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000,00	1	2.400.100,00	100%	96%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	820.000,00	0	2.400.100,00	0%	293%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	820.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	164.458.450,00	0	62.953.585,00	0%	38%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	74.320.000,00	5	33.333.335,00	42%	45%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.250.000,00	5	7.385.000,00	42%	591%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	1.250.000,00	5	10.395.200,00	42%	832%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1.250.000,00	1	2.500.000,00	50%	200%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.250.000,00	5	9.340.050,00	42%	747%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.250.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	8.000.000,00	0	2.159.600,00	0	27%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	12	849.750,00	0	1.699.500,00	0%	200%	SMK NEGERI 5 JEMBER

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	1.250.000,00	4	849.750,00	33%	68%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	849.750,00	0	849.750,00	0%	100%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	1.200.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	5	29.000.000,00	0	2.204.000,00	0%	8%	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000,00	1	900.000,00	100%	30%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	10.000.000,00	1	1.304.000,00	100%	13%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.600.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	415.686.800,00	0	169.161.716,00	0%	41%	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	434.132.000,00	6	169.161.716,00	50%	39%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	2	550.000.000,00	0	221.390.000,00	0%	40%	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	668.570.669,00	1	221.390.000,00	100%	33%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	30.000.000,00	0	3.538.000,00	0%	12%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang terasap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	Siswa	325	30.000.000,00	0	3.538.000,00	0%	12%	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Siswa	150	0	1	0	1%	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	Orang	35	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah Lulusan yang terasap di DUDI	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	5.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	4	5.000.000,00	0	2.250.000,00	0%	45%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	25	10.000.000,00	0	1.288.000,00	0%	13%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	35	10.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	90	788.607.101,00	0	319.628.112,00	0%	41%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Indeks profesionalitas ASN	%	82	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	12.735.808,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	3.515.373,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	3.105.373,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	3.057.531,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	3.057.531,00	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	12	108.719.655,00	0	44.920.600,00	0%	41%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan	Laporan	0	62.748.000,00	0	29.088.000,00	0	46%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan	Dokumen	0	9.701.279,00	0	7.663.500,00	0	79%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	22.195.000,00	0	5.915.000,00	0	27%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	3.919.688,00	0	1.692.000,00	0	43%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	8.634.920,00	0	562.100,00	0	7%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	3	0	25%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan	Laporan	0	1.520.768,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	7.081.000,00	0	2.431.200,00	0%	34%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	7.081.000,00	0	2.431.200,00	0	34%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	2.718.856,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan	Laporan	0	2.718.856,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	6	60.064.712,00	0	16.581.000,00	0%	28%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	12.197.000,00	0	1.904.000,00	0	16%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	2.996.988,00	0	1.100.000,00	0	37%	SMK NEGERI 3 MADIUN																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN																					

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	8.160.000,00	0	6.660.000,00	0	82%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	11.220.000,00	0	1.954.500,00	0	17%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	0	2	0	40%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	24.050.000,00	0	4.962.500,00	0	21%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	1.440.724,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	341.100.000,00	0	146.682.842,00	0%	43%	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman	Dokumen	0	600.000,00	0	329.500,00	0	55%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	0	13,03	0	54%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0	340.500.000,00	0	146.353.342,00	0	43%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	1	6.187.070,00	0	2.338.870,00	0%	38%	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	6.187.070,00	1	2.338.870,00	50%	38%	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	5	250.000.000,00	0	106.673.600,00	0%	43%	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	Unit Kerja	0	250.000.000,00	0	106.673.600,00	0	43%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Unit Usaha yang di jalankan	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	18	0	9	0	50%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kelulusan Siswa	%	100	67.254.899,00	0	45.957.800,00	0%	68%	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	Orang	150	67.254.899,00	0	45.957.800,00	0%	68%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Siswa	10	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	Orang	90	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri	Siswa	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Unit	0	45.069.314,00	0	45.068.800,00	0	100%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	Siswa	0	6.700.000,00	0	889.000,00	0	13%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	32	0	8	0	25%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Bakat dan Kreatifitas Siswa	Kali	0	4.615.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	32	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karier	Orang	0	10.870.585,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 3 MADIUN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	90	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 MADIUN

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2	3	4	5		6		8		
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	88	546.679.020,00	44	265.496.270,00	50%	49%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Indeks profesionalitas ASN	%	86	0	44	0	51%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Persentase realisasi anggaran	%	88	0	44	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Persentase Peningkatan Pendapatan	%	7,4	0	4	0	54%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	15.225.008,00	2	3.436.700,00	50%	23%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA	dokumen	0	5.601.300,00	0	3.029.300,00	0	54%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	5.538.500,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	dokumen	0	2.042.604,00	0	407.400,00	0	20%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	2.042.604,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	120.622.351,00	6	57.481.100,00	50%	48%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan administrasi	laporan	0	67.076.000,00	0	33.538.000,00	0	50%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan verifikasi	laporan	0	1.987.244,00	0	1.646.800,00	0	83%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan akuntansi	laporan	0	19.958.200,00	0	12.098.200,00	0	61%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen keuangan	dokumen	0	4.347.764,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan	laporan	0	26.151.043,00	0	9.900.000,00	0	38%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan prognosis	laporan	0	1.102.100,00	0	298.100,00	0	27%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	24.120.000,00	6	9.257.700,00	50%	38%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan rekon aset	laporan	0	24.120.000,00	0	9.257.700,00	0	38%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	12	2.911.800,00	6	2.401.800,00	50%	82%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Seragam dinas	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan data pegawai	laporan	0	2.911.800,00	0	2.401.800,00	0	82%	SMK NEGERI 1 PACITAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	12	0	12	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	5	55.938.700,00	2,5	35.644.700,00	50%	64%	SMK NEGERI 1 PACITAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	1	5.000.000,00	0,4	1.996.000,00	40%	40%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	16.068.000,00	0	16.068.000,00	0	100%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan alat	unit	0	5.464.000,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan rapat koordinasi	laporan	0	26.764.000,00	0	14.938.000,00	0	56%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	0	0,5	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Laporan	0	2.642.700,00	0	2.642.700,00	0	100%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah daftar arsip aktif	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
		Jumlah daftar arsip inaktif	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
		Jumlah daftar arsip vital	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	1	18.747.000,00	0,5	18.747.000,00	50%	100%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin	paket	0	18.747.000,00	0	18.747.000,00	0	100%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	0	3	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	12	206.316.061,00	6	104.181.070,00	50%	50%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman dokumen	paket	0	840.000,00	0	210.000,00	0	25%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	0	0,45	0	45%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa penunjang	bulan	0	205.476.061,00	0	103.971.070,00	0	51%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang dipelihara	laporan	2	29.298.100,00	1	16.263.000,00	50%	56%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	19.298.100,00	1	7.920.000,00	50%	41%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan	paket	0	10.000.000,00	0	8.343.000,00	0	83%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	0	5	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase peningkatan Sales Growth	%	7,4	73.500.000,00	2	18.083.200,00	27%	25%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Unit produksi yang dihasilkan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pengadaan barang dan jasa	paket	0	73.500.000,00	0	18.083.200,00	0	25%	SMK NEGERI 1 PACITAN
		Jumlah unit usaha yang dijalankan (unit)	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	6	0	2	0	33%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase kelulusan siswa	%	100	84.693.980,00	50	42.921.700,00	50%	51%	SMK NEGERI 1 PACITAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	150	84.693.980,00	150	42.921.700,00	100%	51%	SMK NEGERI 1 PACITAN
						Jumlah siswa yang mengikuti lomba	siswa	4	0	4	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
						Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	orang	175	0	175	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
						Jumlah lulusan yang teresap di Dunia Usaha/Dunia Industri	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	28.982.000,00	1	23.721.700,00	100%	82%	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta didik yang mengikuti KBM dan ujian	siswa	30	1.700.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 PACITAN
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kegiatan minat bakat	kali	0	19.200.000,00	0	19.200.000,00	0	100%	SMK NEGERI 1 PACITAN
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	3	0	3	0	100%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	GTK yang mengikuti perkembangan karir	orang	0	34.811.980,00	0	0	0	0%	SMK NEGERI 1 PACITAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	150	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	%	85	714.693.883,00	81,29	379.202.480,00	96%	53%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Prosentase Realisasi Anggaran	%	90	0	52,57	0	58%	0	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Indeks Profesionalitas ASN	%	80	0	40	0	50%	0	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	3	0	1,5	0	50%	0	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	14.280.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.441.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.441.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.699.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.699.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	17	133.398.500,00	8	70.111.200,00	47%	53%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	71.232.000,00	6	35.916.000,00	50%	50%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	15.619.500,00	6	10.719.500,00	50%	69%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	20.784.000,00	6	15.623.900,00	50%	75%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1.295.000,00	2	115.000,00	100%	9%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	18.497.000,00	6	7.736.800,00	50%	42%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5.971.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	14.047.000,00	6	7.066.850,00	50%	50%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	14.047.000,00	6	7.066.850,00	50%	50%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	48.579.550,00	3	292.250,00	25%	1%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	48.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	292.350,00	12	292.250,00	100%	100%	SMK NEGERI 2 PASURUAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	287.200,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	5	22.020.233,00	4	11.241.650,00	80%	51%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.128.593,00	3	5.041.200,00	75%	82%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.115.960,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	13.979.000,00	0	5.403.800,00	0%	39%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	796.680,00	3	796.650,00	100%	100%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	1	14.199.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	14.199.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	361.779.600,00	6	213.145.532,00	50%	59%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	180.000,00	1	35.500,00	10%	20%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	361.599.600,00	6	213.110.032,00	50%	59%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	3	106.390.000,00	1,5	77.344.998,00	50%	73%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	Unit	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	8	106.390.000,00	4	77.344.998,00	50%	73%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	42.192.117,00	100	18.682.200,00	100%	44%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	orang	95	42.192.117,00	95	18.682.200,00	100%	44%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	siswa	15	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	orang	250	0	56	0	22%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Lulusan yang terserap di DUDI	orang	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	2	11.878.400,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	2.031.500,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	15	9.600.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	95	18.682.217,00	95	18.682.200,00	100%	100%	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	%	92	704.844.300,00	0	277.628.900,00	0%	39%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	6	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG
						Prosentase Realisasi anggaran	%	92	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG
						Indeks Profesionalitas ASN	%	83	0	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	11.300.000,00	0	3.792.000,00	0%	34%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	3.390.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULLUNGAGUNG

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	3.390.000,00	1	3.390.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	2.260.000,00	0	402.000,00	0%	18%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	2.260.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Keuangan	Laporan	12	84.534.000,00	0	44.303.000,00	0%	52%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	54.104.000,00	6	26.195.000,00	50%	48%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	Laporan	12	3.390.000,00	12	3.390.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	0	12	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	12	3.390.000,00	12	3.390.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	0	12	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	2	3.390.000,00	1	1.928.000,00	50%	57%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	18.000.000,00	6	9.400.000,00	50%	52%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	2.260.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	1.695.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	12	1.695.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	12	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	3	28.899.300,00	0	24.814.000,00	0%	86%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	1	22.119.300,00	1	21.424.000,00	100%	97%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	1	3.390.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	Dokumen	1	3.390.000,00	1	3.390.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						jumlah daftar arsip inaktif	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						jumlah daftar arsip vital	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	439.136.000,00	0	201.996.100,00	0%	46%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	439.136.000,00	6	201.996.100,00	50%	46%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	23	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	3	16.430.000,00	0	2.723.800,00	0%	17%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	1	6.780.000,00	0,4	2.723.800,00	40%	40%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	1	4.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	1	5.650.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	4	122.850.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	Unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah pengadaan barang dan jasa	paket	4	122.850.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						jumlah unit usaha yang dijalankan	unit	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	153.005.700,00	0	109.358.000,00	0%	71%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	Orang	100	153.005.700,00	0	109.358.000,00	0%	71%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	Orang	50	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	siswa	20	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri	Orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	Unit	5	88.934.700,00	2	46.062.000,00	40%	52%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	5	0	2	0	40%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar	siswa	972	36.500.000,00	0	36.102.000,00	0%	99%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	siswa	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan	1	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa	Kali	50	14.237.000,00	40	13.860.000,00	80%	97%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	50	0	40	0	80%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	Orang	10	13.334.000,00	10	13.334.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	10	0	10	0	100%	0	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Indikator program yang tercapai	%	100	1.023.915.600,00	0	404.458.300,00	0%	40%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
						Persentase realisasi anggaran	%	97	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
						Indeks profesionalitas ASN	%	81	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	30	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	8.540.900,00	0	4.509.900,00	0%	53%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.293.300,00	1	2.292.900,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.188.600,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.217.000,00	1	2.217.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.842.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	92.607.700,00	0	43.686.000,00	0%	47%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	68.292.000,00	6	33.906.000,00	50%	50%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	2.965.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan	12	7.015.700,00	6	6.860.000,00	50%	98%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	1.735.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	11.200.000,00	6	2.920.000,00	50%	26%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1.400.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	0	11.800.000,00	0	4.840.000,00	0	41%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(indikator kosong)		0	11.800.000,00	0	4.840.000,00	0	41%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	3	55.419.000,00	0	21.096.500,00	0%	38%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.553.000,00	0	4.084.000,00	0%	43%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	11.297.000,00	2	5.815.000,00	200%	51%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	9.109.000,00	2	2.127.500,00	200%	23%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	23.876.000,00	2	9.070.000,00	200%	38%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.584.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	464.400.000,00	0	221.005.900,00	0%	48%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	464.400.000,00	6	221.005.900,00	50%	48%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	30	391.148.000,00	0	109.320.000,00	0%	28%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	3	391.148.000,00	1	109.320.000,00	33%	28%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	29.694.400,00	0	5.025.000,00	0%	17%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	Orang	170	29.694.400,00	0	5.025.000,00	0%	17%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	Siswa	30	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
						Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	Orang	75	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Unit	1	17.501.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1	2.211.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2	5.582.400,00	2	5.025.000,00	100%	90%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	78	4.400.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	%	100	529.743.500,00	0	221.761.059,00	0%	42%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Prosentase Realisasi Anggaran	%	86	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Indeks Profesional ASN	%	81,2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Prosentase Peningkatan Pendapatan	%	15	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	7.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.500.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Laporan	12	54.758.000,00	0	27.307.200,00	0%	50%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	48.258.000,00	6	23.808.000,00	50%	49%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	1.000.000,00	1	0	8%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00	2	1.999.400,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.500.000,00	6	1.499.800,00	50%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	2.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	253.464.000,00	0	107.883.600,00	0%	43%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	70.880.000,00	0	31.041.600,00	0%	44%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	60.000.000,00	0	20.812.000,00	0%	35%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3.000.000,00	0	1.150.000,00	0%	38%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	1	3.350.000,00	0	1.675.000,00	0%	50%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	108.234.000,00	0	53.205.000,00	0%	49%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	8.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	1	30.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	1	30.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	105.120.000,00	0	50.692.759,00	0%	48%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	105.120.000,00	6	50.692.759,00	50%	48%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	2	79.401.500,00	0	35.877.500,00	0%	45%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	7	79.401.500,00	3	35.877.500,00	43%	45%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kelulusan Siswa	%	100	71.556.000,00	0	71.496.400,00	0%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	47	71.556.000,00	0	71.496.400,00	0%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	Siswa	15	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	Orang	80	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Siswa	240	40.000.000,00	240	39.947.800,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kali	1	16.556.000,00	1	16.554.600,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	47	15.000.000,00	47	14.994.000,00	100%	100%	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	%	93	995.534.000,00	18,77	372.050.515,00	20%	37%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Prosentase Realisasi anggaran	%	92	0	35,18	0	38%	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Indeks Profesionalitas ASN	%	86	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Persentase Peningkatan Pendapatan	%	15,2	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Persentase Kenaikan Pendapatan Unit Produksi dan Jasa	%	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	14.600.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.600.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	12	121.800.000,00	6	58.895.600,00	50%	48%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	74.200.000,00	6	33.750.000,00	50%	45%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.600.000,00	6	0	50%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	1.000.000,00	12	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1.000.000,00	1	672.400,00	50%	67%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	43.000.000,00	6	24.473.200,00	50%	57%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	5	4.134.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2.534.000,00	12	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.600.000,00	1	0	100%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	600.000.000,00	6	281.223.015,00	50%	47%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	600.000.000,00	6	281.223.015,00	50%	47%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	%	6	255.000.000,00	2	31.931.900,00	33%	13%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Jumlah unit produksi yang dihasilkan	Unit	20	0	4	0	20%	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	0	255.000.000,00	0	31.931.900,00	0	13%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	%	100	116.000.000,00	0	36.000.000,00	0%	31%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	orang	12	116.000.000,00	12	36.000.000,00	100%	31%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	Siswa	102	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	orang	302	0	0	0	0%	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Jumlah Lulusan yang terserap di DUDI	orang	0	0	0	0	0	0	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	02	1.02	033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	10	31.000.000,00	4	30.000.000,00	40%	97%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	02	1.02	039	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	60	20.400.000,00	15	6.000.000,00	25%	29%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	01	02	1.02	041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	9	33.000.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5	6	7 = 6/5 x 100%				
1	01	02	1.02	043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	12	31.600.000,00	0	0	0%	0%	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			7.186,37	18.685.882.894.256,00	3.267,82	6.470.056.364.819,00	45%	35%	DINAS KESEHATAN
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	85	119.174.167.975,00	0	40.822.407.686,00	0%	34%	DINAS KESEHATAN
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
						Indeks profesionalitas ASN	...	88	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen	4	335.228.999,00	2	127.696.100,00	50%	38%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	280.208.999,00	0	119.014.600,00	0%	42%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	2.680.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	13.400.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	3.930.000,00	0	1.250.000,00	0	32%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	3.930.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	25.260.000,00	0	7.431.500,00	0	29%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	5.820.000,00	0	0	0	0%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	101.992.596.500,00	0	33.727.591.316,00	0%	33%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	12	100.416.874.000,00	6	33.066.402.848,00	50%	33%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	300	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	999.073.500,00	0	462.358.000,00	0	46%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	275.173.000,00	0	130.815.968,00	0	48%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	80.736.000,00	0	2.767.000,00	0	3%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	100.740.000,00	0	16.708.800,00	0%	17%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	Laporan	0	120.000.000,00	0	48.538.700,00	0	40%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	203.185.000,00	6	100.434.398,00	50%	49%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	203.185.000,00	0	100.434.398,00	0	49%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	476.456.000,00	6	158.503.282,00	50%	33%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	476.456.000,00	0	158.503.282,00	0	33%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	1.667.997.315,00	4,99	659.748.514,00	45%	40%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	24.292.500,00	0	23.040.755,00	0	95%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	32.327.800,00	0	10.092.500,00	0	31%	DINAS KESEHATAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5	6	7 = 6/5 x 100%				
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	196.588.000,00	0	83.973.785,00	0	43%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	201.523.440,00	0	103.053.041,00	0	51%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	107.096.500,00	0	28.706.500,00	0	27%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	11.652.000,00	0	6.000.000,00	0	51%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	0	92.440.000,00	0	29.901.500,00	0	32%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	0	914.621.075,00	0	352.635.433,00	0	39%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen	0	87.456.000,00	0	22.345.000,00	0	26%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	11	321.029.000,00	4,94	129.429.307,00	45%	40%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	321.029.000,00	0	129.429.307,00	0	40%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	11.660.942.404,00	0	5.231.886.938,00	0%	45%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	2.334.496.830,00	0	889.836.103,00	0	38%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa	paket	0	9.326.445.574,00	0	4.342.050.835,00	0	47%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	2.516.732.757,00	0	687.117.831,00	0%	27%	DINAS KESEHATAN
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan, service, BBM, PKB, STNK untuk operasi dan lapangan	paket	0	714.711.157,00	0	321.685.974,00	0	45%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	568.953.100,00	0	170.934.373,00	0	30%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	1.233.068.500,00	0	194.497.484,00	0	16%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	95,42	587.484.890.842,00	0	183.947.027.962,00	0%	31%	DINAS KESEHATAN
					Prevalensi Stunting pada Balita	%	16	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
					Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	%	50	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
					Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	%	55	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	80	46.182.543.100,00	40	1.006.869.249,00	50%	2%	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana di UPT Laboratorium Gizi yang diadakan	sarana	0	888.604.000,00	0	460.337.479,00	0	52%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah sarana di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu yang diadakan	sarana	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	15	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	012	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu yang diadakan	unit	0	529.216.000,00	0	0	0	0%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	6	31.255.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah alat kesehatan / peralatan laboratorium yang diadakan / dilakukan pemeliharaan	-	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
1	02	02	1.01	017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan alkes sesuai standar	%	0	150.000.000,00	0	59.005.200,00	0	39%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	25.197,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu yang dipelihara	sarana	0	140.845.000,00	0	46.050.250,00	0	33%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah sarana di UPT Laboratorium Gizi yang dipelihara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	3	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	019	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu yang dipelihara	prasarana	0	1.199.171.000,00	0	132.364.590,00	0	11%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah prasarana di UPT Laboratorium Gizi yang dipelihara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	4	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Instalasi Farmasi Pemerintah yang menerima sediaan farmasi dan BMHP	Sarana	0	899.518.100,00	0	175.845.660,00	0	20%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab./Kota dengan ketersediaan obat esensial	Kab./Kota	0	42.343.934.000,00	0	133.266.070,00	0	0%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota dengan angka tatalaksana penyakit menular sesuai standar	kabupaten/kota	15	529.788.501.210,00	5	172.226.347.043,00	33%	33%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Kab./Kota dengan capaian tata laksana kasus penyakit tidak menular dan keswa sesuai target	kabupaten/kota	23	0	10	0	43%	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 50% PKM terakreditasi	Kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	dokumen	3	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Kabupaten/Kota ODF	Kab?kota	28	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	0	300.000.000,00	0	131.873.091,00	0	44%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	300.000,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	0	807.152.000,00	0	564.850.250,00	0	70%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2.000,00	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah kabupaten / kota dengan persalinan di faskes sesuai target	kab/kota	0	1.398.718.000,00	0	369.999.600,00	0	26%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah kab/kota dengan cakupan kunjungan neonatal lengkap sesuai target	kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Kab/ Kota dengan capaian pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja sesuai target	kab/kota	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah kabupaten / kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin sesuai target	kab/kota	0	225.000.000,00	0	94.234.000,00	0	42%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah kab/kota dengan capaian pelayanan kesehatan santun lansia sesuai target (minimal 50%)	kab/kota	0	75.000.000,00	0	19.705.000,00	0	26%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota dengan capaian bayi mendapat ASI eksklusif sesuai target	kab/kota	0	950.000.000,00	0	516.471.450,00	0	54%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah pemeriksaan sampel yang dilakukan Laboratorium Gizi	sampel	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah jenis pelayanan yang dilakukan Laboratorium Gizi	Jenis Pelayanan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	5	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kab/ kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja	Kab/Kota	0	174.160.000,00	0	42.595.502,00	0	24%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	3	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF	Desa/Kelurahan	0	490.884.000,00	0	114.758.568,00	0	23%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	30	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	54	695.909.000,00	0	172.432.650,00	0%	25%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi/promosi pemanfaatan obat tradisional di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kegiatan promosi pelayanan Kesehatan Gizi UPT Laboratorium Gizi	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional sesuai Standart	faskes	0	125.000.000,00	0	57.193.000,00	0	46%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di FKTP	kab/kota	0	1.225.402.500,00	0	761.496.958,00	0	62%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kab/kota dengan angka penemuan penyakit menular sesuai standar	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	kab/kota	0	50.000.000,00	0	36.341.000,00	0	73%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah kab/kota memiliki puskesmas yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa	Kab/Kota	0	237.745.000,00	0	6.715.500,00	0	3%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA sesuai target	Kab/Kota	0	50.000.000,00	0	13.329.000,00	0	27%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	400	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase tersedianya anggaran untuk pembayaran iuran premi dan bantuan iuran bagi peserta JKN yang terdaftar Provinsi	%	0	519.695.960.710,00	0	168.166.067.582,00	0	32%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kab/Kota dengan verifikasi alert sesuai target	Kab/Kota	0	150.000.000,00	0	130.950.000,00	0	87%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Intervensi lanjut Keluarga Sehat	kab/kota	0	2.247.820.000,00	0	868.392.657,00	0	39%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kab/kota yang memiliki FKTP sesuai standar	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil	pelayanan	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	31	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kab./Kota dengan fasyankes yang menggunakan obat sesuai Fornas	Kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kab./Kota dengan fasyankes menerapkan POR sesuai standar	Kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Prosentase bayi usi 0 - 11 bulan yang mendoat imunisasi dasar lengkap	Persen	0	100.000.000,00	0	48.773.750,00	0	49%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan PSC (Public Safety Canter)	kab/kota	0	50.000.000,00	0	1.415.000,00	0	3%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	23	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah rumah sakit rujukan yang memberikan respon rujukan darurat < 5 menit sebanyak >80%	RS	0	50.000.000,00	0	17.629.500,00	0	35%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase sampel/spesimen KLB yang diperiksa	%	0	400.000.000,00	0	10.360.000,00	0	3%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.02	028	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan yang dilakukan di UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu	penelitian	0	289.750.000,00	0	80.762.985,00	0	28%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kajian yang dilakukan UPT Laboratorium Gizi	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Center View	Aplikasi	16	394.046.532,00	8	161.517.830,00	50%	41%	DINAS KESEHATAN
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang disusun	Dokumen	0	394.046.532,00	0	161.517.830,00	0	41%	DINAS KESEHATAN

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
							5		6		7 = 6/5 x 100%			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	6	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	rumah sakit	56	11.119.800.000,00	0	10.552.293.840,00	0%	95%	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi standar tempat tidur ICU	RS	0	50.000.000,00	0	23.357.500,00	0	47%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	14	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	50	425.000.000,00	0	105.635.570,00	0%	25%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Rumah sakit dengan tata kelola sesuai standart	rumah sakit	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS yang memenuhi standar akreditasi	RS	0	10.644.800.000,00	0	10.423.300.770,00	0	98%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah laboratorium kesehatan yang memenuhi standar akreditasi	Laboratorium kesehatan	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah kegiatan penjaminan mutu di UPT Laboratorium Gizi	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	54	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	%	100	4.770.195.000,00	0	709.136.323,00	0%	15%	DINAS KESEHATAN
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	persentase institusi kesehatan milik pemerintah yang memiliki dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan sesuai ketentuan	%	69	1.884.428.000,00	30	506.747.750,00	43%	27%	DINAS KESEHATAN
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase terpenuhinya tenaga kesehatan spesialis di daerah prioritas	%	0	1.884.428.000,00	0	506.747.750,00	0	27%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	2.397,00	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	%	98	2.885.767.000,00	40	202.388.573,00	41%	7%	DINAS KESEHATAN
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasyankes yang mengirimkan tenaga kesehatan untuk mengikuti program pendidikan formal	%	0	2.592.419.000,00	0	163.577.491,00	0	6%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	960	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	%	0	293.348.000,00	0	38.811.082,00	0	13%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	89	520.300.000,00	0	96.667.890,00	0%	19%	DINAS KESEHATAN
					Persentase alat kesehatan yang diadakan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase PBF Cabang yang sesuai standar	%	84	440.300.000,00	20	79.574.440,00	24%	18%	DINAS KESEHATAN
					Persentase PAK Cabang yang sesuai standar	%	90	0	40	0	44%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase PAK Cabang yang memenuhi syarat pengakuan cabang yang berlaku	%	0	300.300.000,00	0	70.259.300,00	0	23%	DINAS KESEHATAN
					Persentase PBF Cabang yang memenuhi syarat pengakuan cabang yang berlaku	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	46	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Persentase PBF Cabang yang melakukan laporan distribusi sesuai standar	%	0	140.000.000,00	0	9.315.140,00	0	7%	DINAS KESEHATAN
					Persentase Pelaporan PAK Cabang berbasis elektronik dalam rangka kepatuhan persyaratan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Dokumen	42	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase UKOT yang sesuai standar	%	72	80.000.000,00	0	17.093.450,00	0%	21%	DINAS KESEHATAN
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase UKOT yang memenuhi syarat perijinan yang berlaku	%	0	40.000.000,00	0	15.375.450,00	0	38%	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	10	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Kab./Kota dengan fasilitas Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sesuai standar	Kab./Kota	0	40.000.000,00	0	1.718.000,00	0	4%	DINAS KESEHATAN
					Persentase UKOT yang melakukan laporan produksi sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	%	68	3.434.770.347,00	0	625.529.633,00	0%	18%	DINAS KESEHATAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	kabupaten/kota	30	1.196.390.000,00	0	188.106.084,00	0%	16%	DINAS KESEHATAN
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan dengan LS/Ormas/ Organisasi Profesi/Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Prioritas	Dokumen	0	1.196.390.000,00	0	188.106.084,00	0	16%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kerjasama kemitraan lintas sektor dan lintas program yang dilakukan di UPT Laboratorium Gizi	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	6	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media	Tema	6	2.138.380.347,00	2	409.117.461,00	33%	19%	DINAS KESEHATAN
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase masyarakat yang terpapar informasi kesehatan prioritas dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Provinsi	%	0	2.138.380.347,00	0	409.117.461,00	0	19%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	7	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar	kabupaten/kota	27	100.000.000,00	14	28.306.088,00	52%	28%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Poskestren Madya, Purnama dan Mandiri sesuai standar	kabupaten/kota	26	0	13	0	50%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM yang disusun	Dokumen	0	100.000.000,00	0	28.306.088,00	0	28%	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	%	95	1.373.888.571.000,00	0	568.440.195.200,00	0%	41%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Presentase indikator program yang dicapai	%	94	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Presentase realisasi anggaran	%	92	0	40,19	0	44%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Indeks profesionalitas ASN	%	70	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	2	343.888.571.000,00	1	145.749.053.609,00	50%	42%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	2.187,00	343.888.571.000,00	0	145.749.053.609,00	0%	42%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
1	02	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	88,5	1.030.000.000.000,00	88,67	422.691.141.591,00	100%	41%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1	1.030.000.000.000,00	0	422.691.141.591,00	0%	41%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Persentase indikator mutu yang mencapai target	%	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	...	81	82.992.768.000,00	176,84	20.903.315.215,00	218%	25%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%x	100	82.992.768.000,00	21,67	20.903.315.215,00	22%	25%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah pembangunan; jumlah prasarana rumah sakit; jumlah alat kesehatan; jumlah alat penunjang medik yang diadakan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah pemeliharaan yang dilaksanakan di RS	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah pengadaan sarana rumah sakit	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01	012	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	4.910.147.000,00	2	0	100%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah prasarana yang diadakan di rumah sakit	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	118	78.082.621.000,00	24	20.903.315.215,00	20%	27%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah pengadaan alat kesehatan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	02	02	1.01	016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah barang penunjang operasional rumah sakit yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
						Jumlah obat/ vaksin/ makanan dan minuman yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis tenaga untuk mendukung pelayanan	Jenis tenaga	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	02	1.02	022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan honorarium tenaga pelayanan	Bulan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	1.066.542.478.000,00	0	290.423.966.200,00	0%	27%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
						Persentase realisasi anggaran	%	100	0	61,61	0	62%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
						Indeks profesionalitas ASN	%	91,4	0	190	0	208%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%	97,5	0	189,66	0	195%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	12	224.041.678.000,00	6	103.229.620.907,00	50%	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen	0	224.041.678.000,00	0	103.229.620.907,00	0	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1.257,00	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang memenuhi target	%	95,6	842.500.800.000,00	173,08	187.194.345.293,00	181%	22%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indikator mutu yang mencapai target	%	0	842.500.800.000,00	0	187.194.345.293,00	0	22%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89	27.683.800.000,00	169,09	4.745.668.000,00	190%	17%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	27.683.800.000,00	0	4.745.668.000,00	0%	17%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung rumah sakit yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	2.683.800.000,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	24	25.000.000.000,00	0	4.745.668.000,00	0%	19%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran	%	94	356.819.463.000,00	41,79	105.587.306.776,00	44%	30%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
						Indeks Profesionalitas ASN	...	97	0	85,6	0	88%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
						Persentase Indikator Program PD yang Tercapai	%	100	0	75	0	75%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
						Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar	%	96	0	94,45	0	98%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7	8	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen keuangan yang tersusun	%	100	140.219.463.000,00	50	61.472.497.934,00	50%	44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1.050,00	140.219.463.000,00	0	61.472.497.934,00	0%	44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Individu SDM dengan Kinerja Baik / Sangat Baik	%	90,5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Indikator Kinerja Individu SDM dengan Kinerja Baik / Sangat Baik	%	90,5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum yang Tersusun	%	100	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kantor	%	87,5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	%	100	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang laik Pakai	%	94,5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN	
1	02	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	%	84	216.600.000.000,00	91,62	44.114.808.842,00	109%	20%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	23	216.600.000.000,00	0	44.114.808.842,00	0%	20%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	89	19.000.000.000,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi	%	100	19.000.000.000,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	unit	220	19.000.000.000,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	12	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	012	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	4	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	6	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.01	017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyediaan layanan UKP Rujukan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	02	1.02	022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase layanan kesehatan yang terpenuhi kebutuhan operasionalnya	%	100	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	%	100	301.594.142.000,00	0	113.124.929.613,00	0%	38%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
						Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	100	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
						Persentase Realisasi Anggaran	%	94	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
						Indeks Profesionalitas ASN	Angka	88	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	131.594.142.000,00	6	59.976.844.448,00	50%	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	882	131.594.142.000,00	882	59.976.844.448,00	100%	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang Mencapai Target	%	86	170.000.000.000,00	0	53.148.085.165,00	0%	31%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit	1	170.000.000.000,00	1	53.148.085.165,00	100%	31%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91	16.900.000.000,00	91,24	1.031.433.300,00	100%	6%	PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	%	100	16.900.000.000,00	10	1.031.433.300,00	10%	6%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	012	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	1.900.000.000,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	251	15.000.000.000,00	180	1.031.433.300,00	72%	7%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	80	122.021.745.000,00	66,57	52.399.562.027,00	83%	43%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Persentase realisasi anggaran	%	93	0	48,46	0	52%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Indeks profesionalitas ASN	...	83,5	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%	86	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	70.721.745.000,00	6	29.422.051.641,00	50%	42%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	70.721.745.000,00	0	29.422.051.641,00	0	42%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	340	0	757	0	223%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	89	51.300.000.000,00	191,83	22.977.510.386,00	216%	45%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu Rumah Sakit Jiwa Menur yang mencapai target	%	0	51.300.000.000,00	0	22.977.510.386,00	0	45%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	0	2	0	200%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	...	83	33.500.000.000,00	182,89	5.436.242.446,00	220%	16%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	33.500.000.000,00	66,67	5.436.242.446,00	67%	16%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RS dibangun	Gedung	3	7.500.000.000,00	0	828.504,00	0%	0%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / peralatan laboratorium yang diadakan/ dilakukan	paket	1	20.000.000.000,00	0	4.740.616.981,00	0%	24%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
						Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	330	0	73	0	22%	0	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat/vaksin/makanan dan minuman yang diadakan	paket	5	6.000.000.000,00	4	694.796.961,00	80%	12%	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	%	83	123.946.451.000,00	83	68.907.457.946,00	100%	56%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Persentase realisasi anggaran	%	97	0	54,85	0	57%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Persentase indikator program yang tercapai	%	95	0	75	0	79%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	%	85	0	93,96	0	111%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran PD	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	47.496.451.000,00	6	20.996.614.327,00	50%	44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	47.496.451.000,00	0	20.996.614.327,00	0	44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	271	0	271	0	100%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang memenuhi target	%	85	76.450.000.000,00	89,13	47.910.843.619,00	105%	63%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indikator mutu yang mencapai target	%	0	76.450.000.000,00	0	47.910.843.619,00	0	63%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1	0	1	0	100%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	10.000.000.000,00	85,31	4.556.250.250,00	102%	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana RS yang terpenuhi	%	95	10.000.000.000,00	73,46	4.556.250.250,00	77%	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RS yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah RS yang direhabilitasi / dilakukan pemeliharaan	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan	unit/set	0	10.000.000.000,00	0	4.556.250.250,00	0	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	unit	49	0	36	0	73%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	012	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / peralatan laboratorium yang diadakan atau dipelihara	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang penunjang operasional RS yang diadakan	jenis	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah barang penunjang operasional RS yang disediakan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bahan obat/ obat-obatan lain yang diadakan	jenis	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
						Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman seta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan	jenis	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat / perangkat SIK dan jaringan internet yang diadakan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	86	68.697.776.000,00	0	27.880.269.557,00	0%	41%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
						Persentase realisasi anggaran	%	91	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
						Indeks profesionalitas ASN	%	84	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%	81,3	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	29.502.776.000,00	0	13.224.227.762,00	0%	45%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	184	29.502.776.000,00	0	13.224.227.762,00	0%	45%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang memenuhi target	%	91	39.195.000.000,00	0	14.656.041.795,00	0%	37%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	39.195.000.000,00	0	14.656.041.795,00	0%	37%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	93	133.148.364.725,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	90	133.148.364.725,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	115.000.000.000,00	0	0	0%	0%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang direhabilitasi/ dilakukan pemeliharaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02	1.01	013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi	Item	0	18.004.427.000,00	0	0	0	0%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
						Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	48	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah alat kesehatan pakai habis yang diadakan	Item	0	143.937.725,00	0	0	0	0%	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
						Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan lainnya yang Disediakan (Obat)	Item	53	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
						Jumlah isi tabung O2 yang diadakan	Item	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%	85	44.885.608.000,00	0	18.510.167.655,00	0%	41%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
						Persentase indikator program yang tercapai	%	90	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
						Persentase realisasi anggaran	%	88	0	44,24	0	50%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
						Indeks profesionalitas ASN	%	85	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	26.417.731.000,00	6	12.070.071.009,00	50%	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	0	26.417.731.000,00	0	12.070.071.009,00	0	46%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	183	0	366	0	200%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Orang Kali	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman Dokumen	Tahun	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Keluaran Daya Air dan Listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	87,5	18.467.877.000,00	174	6.440.096.646,00	199%	35%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	Pasien	0	18.467.877.000,00	0	6.440.096.646,00	0	35%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	18	0	36	0	200%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
						Jumlah Kunjungan Pasien IGD	Pasien	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
						Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	2.343.000.000,00	194,32	12.888.000,00	229%	1%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	%	86	2.343.000.000,00	0	12.888.000,00	0%	1%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2.343.000.000,00	0	12.888.000,00	0%	1%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik yang Diadakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	012	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / peralatan laboratorium yang diadakan / dilakukan pemeliharaan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	019	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Reagen / Bahan Kimia yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS																	

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1				2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
					Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
					Jumlah Obat yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
					Jumlah Gas Oksigen yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
1	02	02	1.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
1	02	02	1.02	022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Elemen Akreditasi yang memenuhi Standar	%	90	42.184.613.000,00	91,17	14.122.644.105,00	101%	33%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
						Persentase indikator program yang tercapai	%	85	0	66,6	0	78%	0	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	15,15	0	17%	0	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
						Indeks profesionalitas ASN	%	87	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	29.634.613.000,00	6	9.290.209.056,00	50%	31%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	29.634.613.000,00	6	9.290.209.056,00	50%	31%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	90	12.550.000.000,00	170,84	4.832.435.049,00	190%	39%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indikator mutu yang mencapai target	%	85	12.550.000.000,00	0	4.832.435.049,00	0%	39%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
						Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	90	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,25	8.042.546.000,00	161,52	1.656.993.000,00	199%	21%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	90	8.042.546.000,00	25	1.656.993.000,00	28%	21%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	1	8.042.546.000,00	0	1.656.993.000,00	0%	21%	RUMAH SAKIT KUSTA KEDIRI
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	80	93.976.480.000,00	0	24.011.675.450,00	0%	26%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
						Persentase realisasi anggaran	%	92	0	33,87	0	37%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
						Indeks profesionalitas ASN	%	82	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	%	80	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	41.768.842.000,00	6	18.404.692.219,00	50%	44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	12	41.768.842.000,00	6	18.404.692.219,00	50%	44%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	259	0	518	0	200%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	92	52.207.638.000,00	0	5.606.983.231,00	0%	11%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase indikator mutu RSUD Sumberglagah yang mencapai target	%	92	52.207.638.000,00	0	5.606.983.231,00	0%	11%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	0	2	0	200%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	92	19.556.700.000,00	0	7.437.470,00	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	19.556.700.000,00	0	7.437.470,00	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RS dibangun	Gedung	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	(indikator kosong)		0	3.756.700.000,00	0	7.437.470,00	0	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dilakukan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan	paket	0	15.800.000.000,00	0	0	0	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standart	%	80	73.200.853.000,00	0	24.036.237.689,00	0%	33%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
						Persentase realisasi anggaran	%	89	0	40,9	0	46%	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
						Indeks profesionalitas ASN	%	86	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	15.600.853.000,00	6	7.419.701.243,00	50%	48%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(indikator kosong)	Laporan	12	15.600.853.000,00	6	7.419.701.243,00	50%	48%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	107	0	214	0	200%	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	90	57.600.000.000,00	0	16.616.536.446,00	0%	29%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	57.600.000.000,00	1	16.616.536.446,00	100%	29%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	92.663.300.000,00	0	39.344.500,00	0%	0%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	92.663.300.000,00	0,04	39.344.500,00	0%	0%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	67.963.300.000,00	1	31.408.500,00	100%	0%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	4	23.572.000.000,00	4	0	100%	0%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	019	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	1	1.128.000.000,00	1	7.936.000,00	100%	1%	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentasi indikator program yang tercapai	%	75	77.947.901.000,00	0	31.679.575.771,00	0%	41%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						Indeks profesionalitas ASN	point	87	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						Persentase realisasi anggaran	%	94	0	43,87	0	47%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standart	%	82	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja	dokumen	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	32.652.269.000,00	6	14.853.201.896,00	50%	45%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	210	32.652.269.000,00	206	14.853.201.896,00	98%	45%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	laporan	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyelenggaraan kearsipan	set	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal	kali	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang memenuhi target	%	91	45.295.632.000,00	91,45	16.826.373.875,00	100%	37%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit kerja	1	45.295.632.000,00	0	16.826.373.875,00	0%	37%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						Persentase indikator mutu RSUD Husada Prima yang mencapai target	%	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						AVLOS	hari	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						TOI	hari	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						BTO	kali	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						NDR	permil	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						GDR	permil	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						rata-rata kunjungan poli perhari	orang	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	84	41.000.000.000,00	93,06	4.475.000,00	111%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	%	100	41.000.000.000,00	0	4.475.000,00	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						jumlah pembangunan	item	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						jumlah prasarana RS	item	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						jumlah alkes	item	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	41.000.000.000,00	0	4.475.000,00	0%	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
						jumlah pembangunan	faskes	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah prasarana rumah sakit	faskes	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01	010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01	012	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah paket pengadaan	jenis	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase indikator program yang dicapai	%	95	64.105.409.000,00	0	35.571.234.250,00	0%	55%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Presentase realisasi anggaran	persen	97	0	36,77	0	38%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN				
		Indikator profesionalisme ASN	%	74	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN				
		Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standart	%	75	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN				
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	16.605.409.000,00	6	7.806.579.128,00	50%	47%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	bulan	0	16.605.409.000,00	0	7.806.579.128,00	0	47%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	122	0	244	0	200%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	01	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	76	47.500.000.000,00	0	27.764.655.122,00	0%	58%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Presentase Indikator Mutu RS yang mencapai Target	Persen	0	47.500.000.000,00	0	27.764.655.122,00	0	58%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
					Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	89	112.301.990.275,00	87,75	17.340.957.344,00	99%	15%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	paket	95	112.301.990.275,00	0	17.340.957.344,00	0%	15%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung prasarana RS yang dibangun	gedung	0	111.225.183.275,00	0	17.340.957.344,00	0	16%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	02	1.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kedokteran yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
					Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	02	1.01	016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang yang diadakan	paket	0	1.076.807.000,00	0	0	0	0%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
					Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	36.500,00	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	02	1.01	022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Barang Operasional Pelayanan Kesehatan yang Diadakan	paket	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
					Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	85	27.739.653.000,00	20	9.087.485.741,00	24%	33%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN	
					Persentase realisasi anggaran	%	91	0	38,63	0	42%	0	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN	
					Indeks profesionalitas ASN	%	89	0	81,93	0	92%	0	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN	
					Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%	89	0	89	0	100%	0	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN	
1	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	15.739.303.000,00	6	6.958.004.232,00	50%	44%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	15.739.303.000,00	0	6.958.004.232,00	0	44%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	92	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	83	12.000.350.000,00	166	2.129.481.509,00	200%	18%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu RS Paru Manguharjo Madiun yang Mencapai Target	persen	0	12.000.350.000,00	0	2.129.481.509,00	0	18%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
						Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	unit	1	0	0	0	0%	0	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			0	941.665.616,00	0	241.587.913,00	0	26%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat	persen	100	941.665.616,00	60	241.587.913,00	60%	26%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	02	02	1.01	011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	(indikator kosong)		0	941.665.616,00	0	241.587.913,00	0	26%	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Indikator Program yang tercapai	%	88	23.024.352.000,00	108	10.800.460.377,00	123%	47%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
						Persentase Realisasi Anggaran	%	93	0	46,53	0	50%	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
						Indeks Profesionalitas ASN	%	88	0	24	0	27%	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
						Persentase clemen akreditasi Institusi pelatihan yang memenuhi standart	%	90	0	45	0	50%	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen rka	dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	1	10.900.776.000,00	0	4.630.675.799,00	0%	42%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	53	10.763.352.000,00	82	4.573.415.799,00	155%	42%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	137.424.000,00	6	57.260.000,00	50%	42%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan LRA	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.362.576.000,00	6	532.891.328,00	50%	39%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Buan	12	496.686.715,00	6	181.654.263,00	50%	37%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket	2	865.889.285,00	4	351.237.065,00	200%	41%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Kepuasan Masyarakat yang mencapai target	%	90	10.761.000.000,00	162,8	5.636.893.250,00	181%	52%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
						Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	Pelatihan	100	0	73	0	73%	0	UPT PELATIHAN KESEHATAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2					3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Kegiatan Pelatihan Kesehatan yang diselenggarakan	Pelatihan	100	0	73	0	73%	0	MASYARAKAT MURNAJATI
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	10.761.000.000,00	6	5.636.893.250,00	200%	52%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			4.683,93	23.528.701.699.416,00	5.043,49	3.066.027.199.238,00	108%	13%	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	74,23	182.421.781.000,00	33,3	65.939.639.069,00	45%	36%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Persentase realisasi anggaran	%	91	0	20,81	0	23%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Indeks Profesional ASN	%	71,14	0	160,34	0	225%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen	7	900.543.783,00	3	246.203.790,00	43%	27%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	805.543.783,00	1	243.608.790,00	14%	30%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	20.000.000,00	0	2.595.000,00	0	13%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	15.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	137.113.024.620,00	6	51.487.293.795,00	50%	38%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	135.629.294.000,00	0	51.026.659.716,00	0	38%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	600	0	1.200,00	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	955.890.000,00	0	248.226.804,00	0	26%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	2	0	17%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	3.642.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		8		
										Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA						
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dokumen	0	524.198.620,00	0	212.407.275,00	0	41%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	3	0	25%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	1.888.577.000,00	6	374.115.101,00	50%	20%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	3.577.000,00	0	2.386.000,00	0	67%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	1.885.000.000,00	0	371.729.101,00	0	20%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	12	2.272.827.400,00	6	875.421.865,00	50%	39%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg terpenuhi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	863.395.400,00	0	700.689.320,00	0	81%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	2	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	549.828.000,00	0	166.132.545,00	0	30%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	3	0	25%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Laporan	0	859.604.000,00	0	8.600.000,00	0	1%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	laporan	10	3.682.609.848,00	4	2.115.310.574,00	40%	57%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	400.000.000,00	0	305.835.525,00	0	76%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	1	0	17%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	1.066.204.000,00	0	921.941.900,00	0	86%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	3	0	25%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	377.304.348,00	0	292.478.229,00	0	78%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA												

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		8		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	540.698.500,00	0	248.941.920,00	0	46%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	0	4	0	33%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	150.000.000,00	0	87.648.000,00	0	58%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	2	0	17%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Kali	0	48.411.000,00	0	3.300.000,00	0	7%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	1	0	8%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	499.992.000,00	0	255.165.000,00	0	51%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	3	0	25%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					jumlah daftar arsip inaktif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					jumlah daftar arsip vital	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket	0	600.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	Laporan	1	101.555.000,00	2	99.500.400,00	200%	98%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Set	0	101.555.000,00	0	99.500.400,00	0	98%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	0	2	0	100%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	12.392.723.349,00	6	5.284.620.627,00	50%	43%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	2.000.000.000,00	0	664.852.869,00	0	33%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	2	0	17%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	10.392.723.349,00	0	44%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	3	0	25%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	6	24.069.920.000,00	2	33%	23%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	Paket	0	1.150.000.000,00	0	41%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	68	0	15	0	22%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	Paket	0	284.920.000,00	0	38%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	356	0	80	0	22%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa	Paket	0	13.145.000.000,00	0	28%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	232	0	1	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	1.340.000.000,00	0	23%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	370	0	80	0	22%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	7.500.000.000,00	0	7%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	30	0	1	0	3%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara	Unit	0	650.000.000,00	0	48%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	0	2	0	29%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase dokumen kajian yang ditindaklanjuti	%	100	747.860.097.000,00	50	90.144.233.533,00	50%	12%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Persentase tersusunnya dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan.	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase pelaksanaan rekonstruksi dan pelebaran jalan, penggantian/duplikasi jembatan yang tepat waktu	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase pelaksanaan pekerjaan dan administrasi teknik pada rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan yang tepat	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase terpenuhinya kualitas dan kuantitas pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Wilayah UPT PJJ Surabaya	%	100	0	181,04	0	181%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Surabaya	%	82,27	0	164,54	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Mojokerto	%	88,18	0	194,2	0	220%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Mojokerto	%	82,37	0	164,74	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Bojonegoro	%	94,64	0	160,76	0	170%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Bojonegoro	%	65,46	0	130,92	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Madiun	%	91,72	0	193,36	0	211%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Madiun	%	97,35	0	194,7	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Pacitan	%	96,68	0	159,58	0	165%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Pacitan	%	59,14	0	118,28	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Kediri	%	92,85	0	176,04	0	190%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan wilayah UPT PJJ Kediri	%	60,52	0	121,04	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap wilayah UPT PJJ Malang	%	93,47	0	184,54	0	197%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Malang	%	63,57	0	127,14	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Presentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Probolinggo	%	88,64	0	167,08	0	188%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Probolinggo	%	62,81	0	125,7	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Jember	%	92,45	0	182,48	0	197%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Jember	%	55,09	0	110,4	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	%	100	0	174,64	0	175%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Banyuwangi	%	59,12	0	118,38	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap di wilayah UPT PJJ Pamekasan	%	94,39	0	185,6	0	197%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Jalan Provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan di wilayah UPT PJJ Pamekasan	%	20,44	0	40,88	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Persentase Kepuasan Pelayanan Laboratorium Pengujian	%	100	0	200	0	200%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	010	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen kajian/studi dan dokumen lingkungan.	Dokumen	2	747.860.097.000,00	0	90.144.233.533,00	0%	12%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen hasil survei kondisi jalan dan jembatan	Dokumen	2		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah laporan kinerja penyelenggaraan jalan	laporan	3		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen leger jalan	dokumen	3		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen jaringan jalan dan laik fungsi jalan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen Kebijakan teknis perencanaan jalan dan jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen hasil perencanaan	dokumen	2		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengawasan jalan dan jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	dokumen	25		0	10	0	40%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah dokumen spesifikasi teknis	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pengembangan teknologi jalan dan jembatan	dokumen	3		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen kajian teknik jalan dan jembatan	dokumen	5		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen Sosialisasi / pelaksanaan pembinaan teknik	dokumen	2		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan jembatan	dokumen	12		0	6	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan jalan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan dan peningkatan jalan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembangunan dan penggantian jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan dan penggantian jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen bahan pembinaan administrasi teknik pembangunan jalan dan jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen fasilitasi dan pengadaan lahan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan Standar dokumen pengadaan pemeliharaan jalan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan Standar dokumen pengadaan pemeliharaan jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen standar operasional prosedur pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan	dokumen	2		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan SOP Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan SOP Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen kegiatan penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat Bencana/Kejadian Alam	dokumen	2		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
					Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan SOP Pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat Bencana/Kejadian Alam	dokumen	1		0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah dokumen pendukung untuk penyusunan SOP Pelaksanaan dan mengawasi kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat Bencana/ Kejadian Alam	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan hasil pengujian	dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen evaluasi pelayanan pengujian	dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen pemeliharaan peralatan laboratorium	dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen pedoman pengujian konstruksi	dokumen	7	0	2	0	29%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen pengendalian kualitas mutu pengujian	dokumen	8	0	4	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen hasil analisis mutu pengujian	dokumen	7	0	2	0	29%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian yang tepat waktu UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Surabaya	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Surabaya	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Surabaya	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Surabaya	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Surabaya	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Surabaya	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Surabaya	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Surabaya	km	118,82	0	48,86	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Surabaya	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Surabaya	meter	761,75	0	312,29	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Surabaya	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Mojokerto	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Mojokerto	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Mojokerto	meter	51	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Mojokerto	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Mojokerto	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Mojokerto	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Mojokerto	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Mojokerto	km	134,36	0	55,21	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Mojokerto	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Mojokerto	meter	263,2	0	107,9	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Mojokerto	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Bojonegoro	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Bojonegoro	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Bojonegoro	km	0,2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Bojonegoro	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Bojonegoro	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	130,49	0	53,65	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Bojonegoro	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Bojonegoro	meter	2.180,64	0	893,97	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Bojonegoro	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Madiun	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Madiun	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Madiun	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Madiun	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Madiun	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Madiun	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Madiun	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Madiun	km	81,41	0	25,44	0	31%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Madiun	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Madiun	meter	654,1	0	204,41	0	31%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Madiun	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Pacitan	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Pacitan	km	1,5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Pacitan	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Pacitan	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Pacitan	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Pacitan	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Pacitan	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Pacitan	km	102,29	0	42,06	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Pacitan	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Pacitan	meter	914,8	0	375,03	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Pacitan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Kediri	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Kediri	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Kediri	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Kediri	km	1,5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Kediri	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Kediri	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Kediri	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Kediri	km	167,77	0	68,98	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Kediri	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Kediri	meter	1.395,00	0	571,89	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Kediri	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Malang	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																					

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4							
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Malang	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Malang	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Malang	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Malang	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Malang	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Malang	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Malang	km	116,41	0	47,86	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Malang	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Malang	meter	923,35	0	378,54	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Malang	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Probolinggo	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Probolinggo	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Probolinggo	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Probolinggo	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Probolinggo	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Probolinggo	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Probolinggo	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Probolinggo	km	125,93	0	51,78	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Probolinggo	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Probolinggo	meter	749,21	0	307,14	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Probolinggo	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Jember	dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Jember	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Jember	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Jember	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Jember	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Jember	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Jember	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Jember	km	196,46	0	80,78	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Jember	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Jember	Meter	119	0	48,79	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Jember	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Banyuwangi	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Banyuwangi	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Banyuwangi	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Banyuwangi	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Banyuwangi	km	108,16	0	44,47	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Banyuwangi	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Banyuwangi	meter	1.244,71	0	510,28	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Banyuwangi	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen data kondisi jalan dan jembatan UPT PJJ Pamekasan	Dokumen	6	0	3	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang rekonstruksi/pelebaran jalan UPT PJJ Pamekasan	km	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pembangunan/penggantian jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran badan jalan dengan beton UPT PJJ Pamekasan	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen bahan program rekonstruksi jalan dan penggantian jembatan UPT PJJ Pamekasan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen bahan program pemeliharaan jalan dan jembatan UPT PJJ Pamekasan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Pamekasan	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pemeliharaan rutin jalan UPT PJJ Pamekasan	km	138,9	0	57,1	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Pamekasan	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang Pemeliharaan rutin jembatan UPT PJJ Pamekasan	meter	835,9	0	342,68	0	41%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Pamekasan	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Jember	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Surabaya	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Mojokerto	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Pacitan	m	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Bojonegoro	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Madiun	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Kediri	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Malang	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Panjang pelebaran Jembatan UPT PJJ Probolinggo	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	010	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen harga satuan dasar dan harga satuan pekerjaan	Dokumen	1	9.550.000.000,00	0	2.754.390.418,00	0%	29%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah dokumen pengembangan teknologi jalan dan jembatan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah dokumen kajian teknik jalan dan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan pengawasan teknik jalan dan jembatan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah hasil laporan sosialisasi / pelaksanaan pembinaan teknik (PRMS)	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah dokumen perencanaan umum jalan dan jembatan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah dokumen rumusan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah laporan kinerja penyelenggaraan jalan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah hasil laporan sosialisasi / pelaksanaan pembinaan teknik (PHJD)	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Jumlah dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8																	
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
						Jumlah dokumen kajian/studi dan dokumen lingkungan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Jumlah dokumen jaringan jalan dan laik fungsi jalan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Jumlah dokumen hasil perencanaan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	20	0	4	0	20%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
1	03	010	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah luasan pengadaaan lahan	m2	0	120.000.000.000,00	0	853.248.063,00	0	1%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M²	2.750,00	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
1	03	010	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	Dokumen	0	650.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
1	03	010	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
1	03	010	1.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang pembangunan jalan UPT PJJ Surabaya (Akses Puspa Agro)	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang Jalan yang Dibangun	KM	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
1	03	010	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Pelebaran Jalan Menuju Standar	km	0	24.000.000.000,00	0	4.116.316.705,00	0	17%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Surabaya	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Mojokerto	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Madiun	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Pacitan	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Kediri	Km	1,5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Malang	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Probolinggo	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Jember	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Banyuwangi	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang pelebaran jalan UPT PJJ Pamekasan	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	KM	1,5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
1	03	010	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Surabaya	km	0	25.794.500.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Mojokerto	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Madiun	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Pacitan	Km	1,5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Kediri	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Malang	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Probolinggo	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Jember	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Banyuwangi	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang rekonstruksi jalan UPT PJJ Pamekasan	km	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	
						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	3,5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1								3	4	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Panjang Rekonstruksi Jalan	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	010	1.01	010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Penjang Pemeliharaan Berkala Jalan	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Surabaya	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Mojokerto	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Madiun	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Pacitan	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Kediri	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Malang	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Probolinggo	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Jember	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Banyuwangi	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan berkala jalan UPT PJJ Pamekasan	km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	010	1.01	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang penanganan kondisi darurat jalan dan jembatan	km	0	109.127.135.520,00	0	43.589.440.857,00	0	40%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Surabaya	km	118,82	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Mojokerto	km	134,36	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Bojonegoro	km	130,49	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Madiun	Km	81,41	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Pacitan	Km	102,29	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Kediri	Km	167,77	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Malang	km	116,41	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Probolinggo	km	125,93	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Jember	km	196,46	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Banyuwangi	Km	108,16	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pemeliharaan Rutin jalan UPT PJJ Pamekasan	km	138,9	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	1.421,00	0	370	0	26%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	010	1.01	012	Pembangunan Jembatan	Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Surabaya	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Mojokerto	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Bojonegoro	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Madiun	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Pacitan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Kediri	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Malang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Probolinggo	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Jember	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Panjang pembangunan jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Jembatan yang Dibangun	M	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	010	1.01	016	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M	51	25.000.000.000,00	0	2.672.684.759,00	0%	11%	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Surabaya	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Mojokerto	Meter	51	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Bojonegoro	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Madiun	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Pacitan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Kediri	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Malang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Probolinggo	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Jember	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Penggantian Jembatan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	010	1.01	017	Pelebaran Jembatan	Panjang Pelebaran Jembatan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Surabaya	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Mojokerto	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Bojonegoro	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Madiun	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Pacitan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Kediri	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Malang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Probolinggo	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Jember	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Pelebaran Jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	M	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	03	010	1.01	018	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Surabaya	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Mojokerto	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Bojonegoro	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Madiun	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Pacitan	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Kediri	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Malang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Probolinggo	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Jember	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Meter	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Rehabilitasi Jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Rehabilitasi Jembatan	Meter	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
1	03	010	1.01	019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	meter	761,75	16.789.917.763,00	0	5.942.102.189,00	0%	35%	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Surabaya	meter	263,2	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Mojokerto	meter	2.180,64	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Bojonegoro	meter	654,1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Madiun	Meter	914,8	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Pacitan	Meter	1.395,00	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Kediri	Meter	923,35	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Malang	meter	749,21	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Probolinggo	meter	119	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Jember	meter	1.244,71	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Banyuwangi	Meter	835,9	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan UPT PJJ Pamekasan	Meter	10.041,66	0	2.128,33	0	21%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan	Meter	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
1	03	010	1.01	022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dokumen	1	344.416.065.000,00	0	3.608.083.139,00	0%	1%	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan dan penggantian jembatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembangunan dan peningkatan jalan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan dan peningkatan jalan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pembangunan dan penggantian jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen bahan pembinaan administrasi teknik pembangunan jalan dan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pemeliharaan jalan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pemeliharaan jalan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan pemeliharaan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pemeliharaan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pemeliharaan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen bahan pembinaan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen laporan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen kegiatan dan laporan kinerja Penunjang DAK PENERANGAN Bidang Jalan	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah laporan hasil evaluasi dan verifikasi usulan Hibah Kelompok Masyarakat	Laporan	18	0	2	0	11%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
1	03	010	1.01	023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dokumen	0	72.532.478.717,00	0	26.607.967.403,00	0	37%	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dokumen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Surabaya	dokumen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Mojokerto	dokumen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Bojonegoro	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								
					Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Madiun	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA																								

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Pacitan	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Kediri	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Malang	dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Probolinggo	dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Jember	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Banyuwangi	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT PJJ Pamekasan	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan hasil pengujian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen Spesifikasi Khusus Binamarga Provinsi Jawa Timur	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen pengendalian kualitas mutu pengujian	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah dokumen laporan aset, keuangan dan kepegawaian UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	67	0	14	0	21%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai.	%	92	136.687.962.576,00	0	56.217.837.909,00	0%	41%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR		
				Persentase realisasi anggaran.	%	92	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR		
				Indeks Profesionalitas ASN.	tidak ada	82	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR		
1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah.	dokumen	9	232.966.500,00	2	79.810.250,00	22%	34%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah.	dokumen	4	0	4	0	100%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	6	15.429.600,00	0	3.484.400,00	0%	23%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	1	19.874.150,00	0	6.483.350,00	0%	33%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	19.874.150,00	0	3.948.600,00	0%	20%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	19.874.150,00	0	6.259.100,00	0%	31%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	19.874.150,00	0	3.737.100,00	0%	19%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	4	53.638.150,00	0	1.757.600,00	0%	3%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	1	84.402.150,00	0	54.140.100,00	0%	64%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.	laporan	12	105.613.877.321,00	6	46.812.828.907,00	50%	44%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	1	103.820.041.000,00	0	46.249.495.197,00	0%	45%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	1.613.390.350,00	0	527.322.450,00	0%	33%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UPT PSDA WS Bengawan Solo	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		% penyediaan administrasi untuk pelaksanaan tugas ASNUPT PSDA WS Brantas	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR				
		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR				
		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UPT PSDA WS Sampean Detail	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR				
		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN UPT PSDA WS Welang Pekalen	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR				
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	Laporan	1	26.513.550,00	0	3.390.400,00	0%	13%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	12	21.510.950,00	0	7.853.150,00	0%	37%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran SKPD	Laporan	2	21.061.265,00	0	3.277.600,00	0%	16%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	1	18.602.350,00	0	2.601.700,00	0%	14%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	18	65.818.350,00	0	17.552.760,00	0%	27%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	1	26.939.506,00	0	1.335.650,00	0%	5%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	laporan	12	12.402.591.997,00	6	3.633.614.814,00	50%	29%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	Paket	500	6.729.853.669,00	0	1.694.307.995,00	0%	25%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi UPT PSDA WS Bengawan Solo	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Buah	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi UPT PSDA WS Brantas	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi UPT PSDA WS Sampean Detail	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi UPT PSDA WS Welang Pekalen	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	100	659.149.930,00	0	550.000,00	0%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	1	865.305.965,00	0	268.914.810,00	0%	31%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Laporan Data Pegawai UPT PSDA WS Bengawan Solo	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Laporan Data Pegawai UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					% data pegawai yang dimutakhirkan UPT PSDA WS Brantas	%	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Laporan Data Pegawai UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Laporan Data Pegawai UPT PSDA WS Sampean Detail	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Laporan Data Pegawai UPT PSDA WS Welang Pekalen	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
1	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP yang Tepat Waktu	Laporan	1	4.148.282.433,00	0	1.669.842.009,00	0%	40%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa.	laporan	2	624.577.781,00	1	331.565.676,00	50%	53%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Kali	12	566.552.300,00	0	303.078.396,00	0%	53%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan UPT PSDA WS Bengawan Solo	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan UPT PSDA WS Brantas	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan UPT PSDA WS Sampean Setail	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan UPT PSDA WS Welang Pekalen	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Vital	Laporan	100	58.025.481,00	0	28.487.280,00	0%	49%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Vital UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif, Inaktif, Vital UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	11.851.117.750,00	6	3.595.502.267,00	50%	30%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	7	2.163.875,00	0	532.500,00	0%	25%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	7	4.202.181.558,00	0	1.016.464.315,00	0%	24%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PSDA WS Bengawan Solo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PSDA WS Brantas	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PSDA WS Sampean Setail	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	7	1.200.462.786,00	0	297.421.452,00	0%	25%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PSDA WS Bengawan Solo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah unit kerja yang jasa peralatan dan perlengkapan kantornya disediakan UPT PSDA WS Brantas	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PSDA WS Sampean Setail	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%																											
1					2					3					4					5					6					7					8				
						Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PSDA WS Welang Pekalen	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	7	6.446.309.531,00	0	2.281.084.000,00	0%	35%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor UPT PSDA WS Bengawan Solo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor UPT PSDA WS Brantas	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor UPT PSDA WS Welang Pekalen	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara.	laporan	5	5.962.831.227,00	2	1.764.515.995,00	40%	30%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	4	283.835.171,00	0	56.258.407,00	0%	20%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	4	2.963.414.829,00	0	934.232.666,00	0%	32%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Jasa UPT PSDA WS Bengawan Solo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Jasa UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dikelola UPT PSDA WS Brantas	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Jasa UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Jasa UPT PSDA WS Sampean Setail	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Jasa UPT PSDA WS Welang Pekalen	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	Paket	4	5.250.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Paket	4	1.514.678.600,00	0	671.467.210,00	0%	44%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara UPT PSDA WS Brantas	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara UPT PSDA WS Sampean Setail	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara UPT PSDA WS Welang Pekalen	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	Paket	5	1.195.652.627,00	0	102.557.712,00	0%	9%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Ketahanan Air.	tidak ada	2	262.367.043.324,00	0	33.543.072.280,00	0%	13%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	% Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir sungai-sungai yang rawan setelah	% per tahun	0	133.053.980.267,00	0	16.010.806.167,00	0	12%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		pembangunan infrastruktur pengendali dan normalisasi di WS Lintas Daerah Kabupaten/Kota.												
		% Jumlah Daerah Aliran Sungai yang dilaksanakan kegiatan perlindungan, pengendalian dan pemanfaatannya.	% per tahun	0	0	0	0	0	0		DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR			
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup Tampungan air yang diselesaikan	Dokumen	2	579.388.400,00	1	219.720.237,00	50%	38%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	(indikator kosong)		0	140.000.000,00	0	81.528.800,00	0	58%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup pengendalian banjir yang diselesaikan	Dokumen	9	290.000.000,00	4	189.911.500,00	44%	65%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan dalam rangka mendukung Pola dan Perencanaan SDA yang dilaksanakan	Kegiatan	5	1.999.923.100,00	1	392.180.047,00	20%	20%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	(indikator kosong)		0	18.499.999.999,00	0	11.738.000,00	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Peta Kejadian Banjir tahunan yang dibuat	WS	6	1.750.000.000,00	2	571.995.166,00	33%	33%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	035	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Ruas Sungai yang dinormalisasi pada UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Ruas Sungai	1	1.307.879.272,00	1	184.729.305,00	100%	14%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah sungai yang disurvei tanggulnya pada UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Sungai	5	0	2	0	40%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Sampean Setail	Ruas Sungai	5	0	2	0	40%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Ruas sungai yang ditangani pada UPT PSDA WS Welang Pekalen	Ruas Sungai	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	044	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	(indikator kosong)		0	500.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	046	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah badan air yang dinormalisasi	Lokasi	8	27.271.598.988,00	4	5.265.795.446,00	50%	19%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pengendalian Banjir	Lokasi	1	2.217.519.110,00	0	873.706.550,00	0%	39%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Laporan Tanggul Kritis Sungai Rawan Banjir Jawa Timur	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	(indikator kosong)		0	2.500.000.000,00	0	13.570.245,00	0	1%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	060	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Data Pos Klimatologi Yang Dikelola Datanya di Bidang PSDA	WS	6	4.177.369.751,00	2	2.201.410.420,00	33%	53%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Kegiatan	19	0	8	0	42%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah pos klimatologi yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Pos	3	0	1	0	33%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah kegiatan kualitas air yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Sampean Setail	Titik	10	0	5	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah pos hujan yang dikelola datanya di Wilayah UPT PSDA WS Welang Pekalen	Pos	94	0	45	0	48%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	061	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air	Pokmas	3.400,00	18.625.736.000,00	0	52.986.500,00	0%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknik yang diterbitkan di Bidang Bina Manfaat	Dokumen	180	2.167.025.100,00	40	741.975.508,00	22%	34%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.01	063	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk tindak lanjuti	Laporan	2	2.288.221.752,00	1	329.841.050,00	50%	14%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk tindak lanjuti (WS Bondoyudo Bedadung)	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Kepulauan Madura)	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Sampean Setail)	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Laporan tentang Rekomendasi TKPSDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti (WS Welang Pekalen)	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.01	064	Operasi dan Pemeliharaan Danau	(indikator kosong)		0	1.000.000.000,00	0	11.131.500,00	0	1%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.01	065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah Lokasi Aset yang diamankan/ditertibkan [Bidang Binfat]	Dokmen	4	46.713.554.435,00	1	4.522.205.197,00	25%	10%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Lokasi	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Brantas	DAS	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Kep. Madura	Lokasi	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Sampean Setail	Lokasi	5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Badan air/Sungai/Waduk/DAS yang dimonitor datanya di UPT PSDA WS Welang Pekalen	Lokasi	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.01	066	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah titik biopori/bibit pohon utk kegiatan konservasi di UPT PSDA WS Bengawan Solo	Titik	0	1.025.764.360,00	0	346.380.696,00	0	34%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah titik biopori/bibit pohon utk kegiatan konservasi di UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Titik	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah DAS yang dilaksanakan Kegiatan Konservasi di UPT PSDA WS Brantas	DAS	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah lokasi kegiatan pengawetan air di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah lokasi kegiatan pengawetan air di UPT PSDA WS Sampean Setail	Lokasi	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah titik biopori/bibit pohon utk kegiatan konservasi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	Titik	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	% Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik	%	0	129.313.063.057,00	0	17.532.266.113,00	0	14%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						% tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						% Kinerja Sistem Irigasi kondisi baik	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen teknis/lingkungan lingkup irigasi yang siap bangun	Dokumen	3	290.000.000,00	1	120.050.000,00	33%	41%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
1	03	02	1.02	014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Laporan Jumlah DI yang direhabilitasi	Laporan	0	63.737.947.001,00	0	194.474.008,00	0	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Panjang Jaringan Irigasi Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo	Meter	1.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah bendung yang direhabilitasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Brantas	DI	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									
						Panjang saluran irigasi/drainase yang direhabilitasi pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	Meter	3.830,00	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Sampean Setail	DI	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi UPT PSDA WS Welang Pekalen	DI	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.02	015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah DI yang dikelola kegiatan rehabilitasinya	DI	23	11.417.373.001,00	4	1.017.829.068,00	17%	9%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.02	021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bimtek Untuk Petugas Irigasi Yang Dilaksanakan	Kegiatan	0	49.229.734.501,00	0	14.408.497.113,00	0	29%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Bendung dan Jaringan irigasi yang di operasikan UPT PSDA WS Bengawan Solo	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Bondoyudo Baru	DI	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Bengawan Solo	DI	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Kepulauan Madura	DI	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Sampean Setail	DI	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT PSDA WS Welang Pekalen	DI	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	02	1.02	028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Brantas	DI	55	4.638.008.554,00	0	1.791.415.924,00	0%	39%	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Pintu Air Yang Dipelihara UPT PSDA WS Bengawan Solo	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Kabupaten yang dikelola Rencana Tata Tanamnya	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Kabupaten Yang Dikelola Rencana Tata Tanamnya UPT PSDA WS Brantas	Kab	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Kepulauan Madura	DI	5	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah Kabupaten yang dikelola Rencana Tata Tanamnya UPT PSDA WS Sampean Setail	Kab	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
						Jumlah DI yang dikelola kegiatan Operasi dan Pemeliharannya pada DI Kewenangan Provinsi di UPT PSDA WS Welang Pekalen	DI	25	0	0	0	0%	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN (2021-2024).	poin	82	54.751.100.736,00	0	23.169.166.528,00	0%	42%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase realisasi anggaran (2021-2024).	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase indikator program yang tercapai (2021-2024).	%	90,43	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Indeks kepuasan pengguna informasi teknologi dan layanan perumahan dan permukiman (2021).	poin	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi perangkat daerah (2021).	dokumen	0	1.652.930.000,00	0	383.473.940,00	0	23%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah (2022-2024).	dokumen	4	0	3	0	75%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah (2022-2024).	dokumen	7	0	2	0	29%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	26.000.000,00	2	13.970.040,00	29%	54%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	14.020.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	dokumen	0	14.020.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	0	14.510.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	dokumen	0	14.510.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	0	1.520.430.000,00	0	342.920.770,00	0	23%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	3	0	60%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	49.440.000,00	0	26.583.130,00	0	54%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan (Dinas 2021-2024) dan (UPT 2021-2024).	dokumen	24	39.576.351.000,00	12	16.970.393.239,00	50%	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang terlayani akses informasi (UPT 2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	dokumen	0	38.028.172.000,00	0	16.221.609.589,00	0	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	185	0	370	0	200%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	727.560.000,00	0	329.294.000,00	0	45%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	laporan	0	340.813.500,00	0	145.085.750,00	0	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	172.380.500,00	0	101.709.150,00	0	59%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	135.250.000,00	0	93.740.000,00	0	69%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	0	1.000.000,00	0	999.250,00	0	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	170.175.000,00	0	77.955.500,00	0	46%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	1.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (2021).	dokumen	0	22.320.000,00	0	5.025.000,00	0	23%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (2022-2024).	laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	laporan	0	3.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	4.770.000,00	0	2.010.000,00	0	42%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	laporan	0	11.040.000,00	0	3.015.000,00	0	27%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	1	0	25%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Dokumen	0	3.510.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (2022-2024).	dokumen	12	184.233.000,00	6	6.030.000,00	50%	3%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (2021).	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Retribusi	laporan	0	184.233.000,00	0	6.030.000,00	0	3%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian.	laporan	3	523.510.022,00	0	207.375.000,00	0%	40%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	0	333.820.000,00	0	195.650.000,00	0	59%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	0	4.770.000,00	0	2.010.000,00	0	42%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	4.770.000,00	0	3.350.000,00	0	70%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	50.150.000,00	0	6.365.000,00	0	13%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	laporan	0	130.000.022,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (DINAS 2021).	dokumen	0	3.180.321.493,00	0	955.017.065,00	0	30%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Dinas dan UPT 2022-2024).	dokumen	22	0	8	0	36%	0	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang terlayani akses informasi (UPT 2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	9.707.000,00	0	5.505.000,00	0	57%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	67.641.200,00	0	30.030.000,00	0%	44%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	1	0	33%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	187.671.911,00	0	42.228.000,00	0%	23%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	164.067.774,00	0	74.373.400,00	0	45%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	3	0	75%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	104.355.225,00	0	40.703.000,00	0	39%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	2	0	200%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	65.880.000,00	0	29.694.000,00	0	45%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	68.118.729,00	0	16.537.700,00	0	24%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	9	0	5	0	56%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	539.977.500,00	0	77.950.000,00	0%	14%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	1.968.802.154,00	0	637.995.965,00	0	32%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif	Dokumen	0	4.100.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (Dinas 2021).	dokumen	0	118.786.620,00	0	90.080.400,00	0	76%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana (Dinas dan UPT 2022-2024).	laporan	22	0	2	0	9%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah orang yang terlayani akses informasi (UPT 2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah kendaraan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	0	118.786.620,00	0	90.080.400,00	0	76%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (DINAS 2021).	dokumen	0	8.370.976.435,00	0	4.313.415.360,00	0	52%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas dan UPT 2022-2024).	laporan	24	0	12	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang terlayani akses informasi (UPT 2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	0	11.100.000,00	0	5.999.000,00	0	54%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	939.202.093,00	1	399.450.675,00	8%	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	7.420.674.342,00	0	3.907.965.685,00	0	53%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian (DINAS 2021).	dokumen	0	1.121.672.166,00	0	238.356.524,00	0	21%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						jumlah laporan aset tetap yang terpelihara (Dinas dan UPT 2022-2024)	laporan	24	0	12	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang terlayani akses (UPT 2021)	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	605.989.014,00	0	197.419.024,00	0	33%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	0	11	0	37%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	0	33.600.000,00	0	9.330.000,00	0	28%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket	20	167.280.900,00	6	25.550.000,00	30%	15%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Paket	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	03	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	289.052.252,00	0	6.057.500,00	0	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	03	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	03	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.750.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan akses air minum (2021).	%	0	97.074.451.707,00	0	6.320.087.720,00	0	7%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak.	%	98,94	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan air minum yang tersusun (2021).	dokumen	0	97.074.451.707,00	0	6.320.087.720,00	0	7%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah infrastruktur air minum yang terbangun (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air minum (2021).	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi air minum yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah pendampingan teknis perencanaan air minum (2021).	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah RT yang terlayani akses air minum (2022-2024).	rumah tangga	2.400,00	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	9	2.700.000.000,00	1	983.659.800,00	11%	36%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen sepervisi	dokumen	0	9.435.688.200,00	0	1.942.237.340,00	0	21%	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	unit	0	75.029.396.707,00	0	3.394.190.580,00	0	5%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	10	0	0,4	0	4%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dikembangkan	unit	0	9.647.208.800,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR	3.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Pengelolaan SPAM	orang	0	262.158.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	Kab/Kota	28	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi (2021).	%	0	1.650.000.000,00	0	43.941.300,00	0	3%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan (2022-2024).	%	16,63	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen perencanaan persampahan yang tersusun. (2021).	dokumen	0	1.650.000.000,00	0	43.941.300,00	0	3%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan (2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah dokumen monitoring evaluasi persampahan yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah pendampingan teknis perencanaan persampahan. (2021).	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan (2022-2024).	sistem	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen persampahan	dokumen	0	780.877.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah infrastruktur persampahan yang terbangun	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	kab/kota	0	766.739.000,00	0	43.941.300,00	0	6%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang persampahan	orang	0	102.384.000,00	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok Masyarakat	50	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi (2021).	%	0	7.134.393.000,00	0	105.512.000,00	0	1%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak (2022-2024).	%	89	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun (2021).	dokumen	0	7.134.393.000,00	0	105.512.000,00	0	1%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah infrastruktur air limbah dan drainase yang terbangun (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase (2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainase yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase (2021).	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
		Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah (2022-2024).	jiwa	500	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen	0	500.000.000,00	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah infrastruktur air limbah	unit	0	6.436.000.000,00	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	30	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang air limbah domestik	orang	0	198.393.000,00	0	105.512.000,00	0	53%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	35	0	26	0	74%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA				
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi (2021).	%	0	149.533.724.137,00	0	112.465.600,00	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan (2022-2024).	%	8,33	0	0	0	0%	0	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan drainase yang tersusun (2021).	dokumen	0	149.533.724.137,00	0	112.465.600,00	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah infrastrukturair limbah dan drainase yang terbangun (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi bidang air limbah dan drainase (2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah dokumen monitoring evaluasi air limbah dan drainaseyang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah pendampingan teknis perencanaan air limbah dan drainase (2021).	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah akses air limbah dan drainase terbangun (2022-2024).	meter	1.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan teknis bidang drainase	orang	0	198.393.000,00	0	32.812.000,00	0	17%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Orang	70	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah infrastruktur drainase	paket	0	149.335.331.137,00	0	79.653.600,00	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman (2021).	poi	0	6.203.949.170,00	0	2.680.260.370,00	0	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh pemerintah provinsi (2022-2024).	rumah tangga	973	0	973	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah unit hunian rumah susun yang dikelola (2021).	unit	0	6.203.949.170,00	0	2.680.260.370,00	0	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase jumlah hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara (2022-2024).	%	100	0	100	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rusunawa yang dikelola	Rusunawa	0	6.203.949.170,00	0	2.680.260.370,00	0	43%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Sistem Jaringan	5	0	5	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (2021).	%	0	300.298.002.364,00	0	12.156.962.630,00	0	4%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase Penataan Bangunan Gedung (2022-2024).	%	100	0	30	0	30%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terbangun (2021).	gedung	0	300.298.002.364,00	0	12.156.962.630,00	0	4%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung (2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi (2021).	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi (2022-2024).	gedung	20	0	6	0	30%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun	gedung	0	245.457.807.000,00	0	11.348.144.209,00	0	5%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang direhabilitasi	gedung	0	3.949.000.000,00	0	87.931.314,00	0	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	6	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah laporan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di provinsi Jawa Timur	laporan	0	37.165.500.000,00	0	450.650.888,00	0	1%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	150	0	111	0	74%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen identifikasi bangunan gedung cagar budaya	dokumen	0	453.703.000,00	0	2.000.000,00	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	08	1.01	010	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah dokumen pendataan Rumah Negara	dokumen	0	13.271.992.364,00	0	268.236.219,00	0	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen	10	0	12	0	120%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (2021).	%	0	845.000.000,00	0	1.675.000,00	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (2022-2024).	%	28,57	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan bangunan gedung (2021).	orang	0	845.000.000,00	0	1.675.000,00	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Kawasan yang mendapatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan (2022-2024).	kawasan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTBL di kawasan strategis kabupaten/kota	dokumen	0	770.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		5		6		7 = 6/5 x 100%						
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (identifikasi dan penentuan lokasi RTBL)	dokumen	0	50.000.000,00	0	1.675.000,00	0	3%	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	2	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (koordinasi penerapan perbup RTBL)	dokumen	0	25.000.000,00	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	2	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Taba 2021).	%	0	1.587.316.416,00	0	347.667.521,00	0	22%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Persentase Pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi (Taba 2022-2024).	%	100	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman (UPT 2021).	poin	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Indeks kepuasan pengguna jasa pengujian konstruksi dan bahan bangunan (UPT 2022-2024).	tidak ada	82,5	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	011	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi Jasa Konstruksi (2021).	orang	0	758.774.000,00	0	203.343.070,00	0	27%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah Orang yang mendapatkan pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi (2022-2024).	orang	220	0	660	0	0	300%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	011	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	orang	0	451.971.000,00	0	61.677.520,00	0	14%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang	60	0	560	0	0	933%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	011	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan	orang	0	306.803.000,00	0	141.665.550,00	0	46%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	160	0	100	0	0	63%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	011	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi jasa konstruksi (Taba 2021).	orang	0	828.542.416,00	0	144.324.451,00	0	17%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (Taba 2022-2024).	orang	89	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Jumlah Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan yang terlayani (UPT 2021).	pengujian	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
					Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan (UPT 2022-2024).	%	80	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	011	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Media Informasi Jasa Konstruksi	buletin	0	75.097.000,00	0	29.677.651,00	0	40%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7		8
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA								
1	03	011	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelatihan	orang	0	219.046.500,00	0	0	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang	85	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	011	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pengujian yang diinformasikan	Dokumen	0	534.398.916,00	0	114.646.800,00	0	21%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	100	0	59	0	59%	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang (2021-2024).	%	79	6.030.000.000,00	0	1.688.003.888,00	0%	28%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (2021).	%	0	0	0	0	0	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi (2021).	%	0	0	0	0	0	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang (2022-2024).	%	70	2.840.000.000,00	0	868.131.407,00	0%	31%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Rencana Tata Ruang Provinsi yang telah disusun (2021).	RTR	0	0	0	0	0	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Progress Penetapan Perda RTRW Provinsi	%	0	2.170.000.000,00	0	859.834.157,00	0	40%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	0	350.000.000,00	0	0	0	0%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah orang yg mendapatkan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Orang	0	320.000.000,00	0	8.297.250,00	0	3%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	4	0	0	0	0%	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) (2021).	dokumen	0	1.200.000.000,00	0	353.210.279,00	0	29%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan (2022-2024).	kegiatan	12	0	0	0	0%	0		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA											
1	03	012	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1.200.000.000,00	0	353.210.279,00	0	29%		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN											

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	10	0	42	0	420%	0	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi Program Pembangunan Terhadap Rencana Tata Ruang (2021).	dokumen	0	990.000.000,00	0	186.759.415,00	0	19%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan (2021).	informasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan (2022-2024).	kegiatan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang daerah yang disusun	Dokumen	0	780.000.000,00	0	177.599.915,00	0	23%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Tata Ruang yang dipublikasikan	konten	0	210.000.000,00	0	9.159.500,00	0	4%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihilangkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah IPR yang telah dilakukan pemantauan (2021).	IPR	0	1.000.000.000,00	0	279.902.787,00	0	28%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah IPR yang telah dilakukan evaluasi (2021).	IPR	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang (2022-2024).	kegiatan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen terkait pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	jumlah dokumen Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen wasmatitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	03	012	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah pengawasan perizinan	Lokasi	0	1.000.000.000,00	0	279.902.787,00	0	28%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			38,56	1.245.565.363.875,00	0	123.195.622.059,00	0%	10%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (2021).	%	0	330.960.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa timur (2022-2024).	%	5	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi (2022-2024).	dokumen	3	330.960.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun (2021).	meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	110.320.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	0	110.320.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	Dokumen	0	110.320.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (2021).	%	0	44.287.518.400,00	0	35.415.416.910,00	0	80%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (2022-2024).	%	11,56	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani (2021).	Ha	0	285.930.100,00	0	158.778.800,00	0	56%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (2022-2024).	%	20,9	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	5	285.930.100,00	0	158.778.800,00	0%	56%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani.	Ha	9	44.001.588.300,00	0	35.256.638.110,00	0%	80%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen	0	90.000.000,00	0	59.718.400,00	0	66%	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	4	0	4	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan renovasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban keluarga	Dokumen	0	40.637.910.000,00	0	35.000.000.000,00	0	86%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah panjang PSU dibangun dalam rangka peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	Meter	0	3.273.678.300,00	0	196.919.710,00	0	6%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU.	%	22	370.569.976.225,00	0	5.649.790.443,00	0%	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (2021).	persentase	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah (2021).	unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU (2022-2024).	kawasan	24	370.569.976.225,00	0	5.649.790.443,00	0%	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan renovasi RTLH dan rumah swadaya yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah khusus yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman yang terbangun (2021).	meter	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi pelaksanaan pembangunan rumah susun umum yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah unit PSU rumah susun yang terbangun (2021)	unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah dokumen monitoring evaluasi pembangunan rumah komersil yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Swadaya	Dokumen	0	639.400.000,00	0	308.308.000,00	0	48%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah panjang PSU lingkungan permukiman Swadaya yang dibangun	Meter	0	369.707.012.625,00	0	5.341.482.443,00	0	1%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	13	0	1	0	8%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Swadaya	Laporan	0	223.563.600,00	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		13.350,72	8.443.676.028.909,00	3.807,08	3.441.667.637.029,00	29%	41%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		277	2.690.000.000,00	25	308.019.826,00	9%	11%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun (2021).	%	0	300.000.000,00	0	122.813.163,00	0	41%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (2022-2024).	%	100	0	25	0	25%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun (2021).	dokumen	0	300.000.000,00	0	122.813.163,00	0	41%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan (2022-2024).	dokumen	20	0	5	0	25%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	jumlah permohonan penetapan lokasi yang diproses	Dokumen	0	300.000.000,00	0	122.813.163,00	0	41%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen	20	0	5	0	25%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2022-2024).	%	100	50.000.000,00	0	19.486.500,00	0%	39%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
2	010	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi.	kasus	20	50.000.000,00	0	19.486.500,00	0%	39%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
2	010	04	1.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
2	010	04	1.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan	Kegiatan	0	50.000.000,00	0	19.486.500,00	0	39%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	2	0	2	0	100%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010	010			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun (2022-2024).	%	77	1.020.000.000,00	0	21.453.500,00	0%	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									
					Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun (2021).	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																										
2	010	010	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah (2022-2024).	dokumen	2	1.020.000.000,00	0	21.453.500,00	0%	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah dokumen inventarisasi data pertanahan yang tersusun (2021).	dokumen	0	0	0	0	0	0	PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	010	010	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kegiatan	0	1.020.000.000,00	0	21.453.500,00	0	2%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.186,79	361.776.991.000,00	577,14	155.006.242.421,00	49%	43%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator perogram yang tercapai	%	100	41.059.536.000,00	0	17.354.495.974,00	0%	42%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Presentase realisasi anggaran	%	95	0	40,62	0	43%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Indeks Profesionalitas ASN	%	64	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	250.000.000,00	6	50.412.600,00	60%	20%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	40.010.000,00	0	9.846.000,00	0	25%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	0	4	0	57%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	3.000.000,00	0	0	0	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA	Dokumen	0	3.000.000,00	0	2.010.000,00	0	67%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	3.000.000,00	0	0	0	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	3.000.000,00	0	0	0	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	0	121.635.000,00	0	16.828.100,00	0	14%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	76.355.000,00	0	21.728.500,00	0	28%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	32.115.622.000,00	6	13.749.494.485,00	50%	43%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	31.604.546.000,00	0	13.542.098.585,00	0	43%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1.572,00	0	786	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	418.956.000,00	0	186.003.000,00	0	44%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	Laporan	0	52.120.000,00	0	16.782.900,00	0	32%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	0	10.000.000,00	0	900.000,00	0	9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		12	0	6	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan	0	10.000.000,00	0	300.000,00	0	3%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		2	0	1	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	Dokumen	0	5.000.000,00	0	1.200.000,00	0	24%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	10.000.000,00	0	1.410.000,00	0	14%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		12	0	6	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	0	5.000.000,00	0	800.000,00	0	16%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	106.310.000,00	2	95.375.800,00	50%	90%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.005.000,00	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.105.000,00	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.200.000,00	0	600.000,00	0%	50%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	Laporan	0	100.000.000,00	0	94.775.800,00	0	95%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	658.343.386,00	2	142.521.558,00	50%	22%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1.005.000,00	1	1.005.000,00	100%	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	4.105.000,00	0	2.832.000,00	0%	69%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Laporan data pegawai	Laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	621.337.386,00	0	136.204.558,00	0	22%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		12	0	6	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	15.000.000,00	0	1.320.000,00	0	9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2	0	1	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0	6.910.000,00	0	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		30	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	9.986.000,00	0	1.160.000,00	0%	12%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7		8
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Laporan	4	202.259.400,00	2	76.976.000,00	50%	38%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Laporan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Paket pengadaan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Paket pengadaan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Paket pengadaan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket pengadaan					Paket	0	105.094.400,00	0	66.710.400,00	0	63%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					Paket	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Paket Pengadaan					Paket	0	15.000.000,00	0	6.440.000,00	0	43%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Paket Pengadaan					Paket	0	12.060.000,00	0	3.825.600,00	0	32%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Laporan	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Laporan	1	4.105.000,00	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										jumlah rapat koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal					Laporan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Jumlah Paket Pengadaan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Jumlah Paket Jasa					Paket	0	66.000.000,00	0	0	0	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Laporan	1	9.334.000,00	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Laporan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Kendaraan					Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Kendaraan					Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Mebel					paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah peralatan dan mesin lainnya					unit	0	9.334.000,00	0	0	0	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					Unit	3	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					jumlah laporan penyediaan jasa					Laporan	4	6.764.982.362,00	2	3.058.072.535,00	50%	45%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										jumlah laporan penyediaan jasa					Laporan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah pengiriman Dokumen					paket	0	5.000.000,00	0	622.400,00	0	12%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Laporan	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Bulan	0	434.000.000,00	0	159.219.580,00	0	37%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Laporan	12	0	6	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					paket	0	64.541.200,00	0	24.537.000,00	0	38%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Laporan	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	paket	0	6.261.441.162,00	0	2.873.693.555,00	0	46%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	4	952.684.852,00	2	181.642.996,00	50%	19%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	0	410.495.000,00	0	92.994.880,00	0	23%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	0	3	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	0	421.268.400,00	0	71.709.516,00	0	17%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	0	18	0	39%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	70.921.452,00	0	16.938.600,00	0	24%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	unit	0	50.000.000,00	0	0	0	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	80	8.015.000.000,00	44,86	2.604.488.764,00	56%	32%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Presentase Penegakan Perda/Perkada	%	80	0	100	0	125%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Persentase Anggota Linmas dalam Pelindungan Masyarakat	%	80	0	49,01	0	61%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Persentase SDM yang terlatih	%	80	0	70,15	0	88%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Persentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindunga Masyarakat di Jawa Timur	%	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	90	2.595.750.000,00	44,86	1.106.383.524,00	50%	43%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Trantibum	Dokumen	0	1.042.010.000,00	0	249.153.940,00	0	24%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	250	0	387	0	155%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum	Dokumen	0	54.744.000,00	0	19.588.000,00	0	36%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	20	0	62	0	310%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Dokumen	0	703.160.800,00	0	669.746.398,00	0	95%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	Dokumen	0	600.000.000,00	0	121.168.836,00	0	20%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	Laporan	0	7.476.000,00	0	7.170.000,00	0	96%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	0	50	0	100%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kegiatan	0	151.872.000,00	0	25.317.350,00	0	17%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum	Laporan	0	2.289.200,00	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	10	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kegiatan	0	23.448.000,00	0	14.239.000,00	0	61%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	10.750.000,00	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlalani	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Kegiatan	4	5.294.250.000,00	2	1.457.860.072,00	50%	28%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	Dokumen	0	3.415.802.400,00	0	964.192.972,00	0	28%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	75.000.000,00	0	7.159.000,00	0	10%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	Dokumen	0	1.803.447.600,00	0	486.508.100,00	0	27%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kegiatan	2	125.000.000,00	1	40.245.168,00	50%	32%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	0	105.000.000,00	0	39.285.168,00	0	37%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Laporan	0	20.000.000,00	0	960.000,00	0	5%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	85	600.000.000,00	37,5	218.972.760,00	44%	36%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	%	85	537.500.000,00	36,67	213.598.760,00	43%	40%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	%	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	orang	0	62.500.000,00	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	3	0	0	0	0%	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	78.042.520,00	0%	78%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
				0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1	100.000.000,00	0	84.132.440,00	0%	84%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Orang	50	90.000.000,00	0	0	0%	0%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Orang	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	010	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	2	85.000.000,00	1	41.532.800,00	50%	49%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	011	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/ Kota	1	100.000.000,00	0	9.891.000,00	0%	10%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.01	012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	85	62.500.000,00	33,33	5.374.000,00	39%	9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/ Kota	Orang	0	62.500.000,00	0	5.374.000,00	0	9%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	3	0	1	0	33%	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang Tercapai.	%	80	28.933.536.000,00	36	11.127.897.584,00	45%	38%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7	8	
						Persentase realisasi anggaran	%	95,79	0	49	0	51%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Indeks Profesionalitas ASN	tidak ada	67	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah.	dokumen	8	925.000.000,00	3	474.317.300,00	38%	51%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	550.000.000,00	0	390.158.200,00	0%	71%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	15.000.000,00	0	4.543.000,00	0	30%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	10.000.000,00	0	1.870.000,00	0	19%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	15.000.000,00	0	2.100.000,00	0	14%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	10.000.000,00	1	1.100.000,00	0	11%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	200.000.000,00	0	41.602.000,00	0	21%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	125.000.000,00	0	32.944.100,00	0	26%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	dokumen	12	16.099.960.000,00	6	6.989.824.873,00	50%	43%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	11.933.536.000,00	0	5.335.827.680,00	0	45%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	49	0	49	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	0	3.966.424.000,00	0	1.576.108.743,00	0	40%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	Dokumen	0	100.000.000,00	0	46.827.700,00	0	47%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	20.000.000,00	0	11.000.000,00	0	55%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	Dokumen	0	20.000.000,00	0	6.951.500,00	0	35%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	20.000.000,00	0	4.800.000,00	0	24%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	20.000.000,00	0	4.563.000,00	0	23%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	20.000.000,00	0	3.746.250,00	0	19%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	78.021.000,00	6	22.559.450,00	50%	29%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	25.000.000,00	0	890.000,00	0	4%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	23.000.000,00	0	15.069.450,00	0	66%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah	Laporan	0	20.000.000,00	0	4.000.000,00	0	20%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	10.021.000,00	0	2.600.000,00	0	26%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	12	1.179.684.000,00	6	759.666.000,00	50%	64%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	0	29.961.000,00	0	17.054.000,00	0	57%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	1.066.993.000,00	0	719.715.000,00	0	67%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	2	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	11.730.000,00	0	3.022.000,00	0	26%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	10.000.000,00	0	7.100.000,00	0	71%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	0	22.200.000,00	0	6.775.000,00	0	31%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Laporan	0	38.800.000,00	0	6.000.000,00	0	15%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	laporan	12	2.123.208.000,00	6	894.389.196,00	50%	42%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	35.124.000,00	0	6.778.200,00	0	19%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	7.660.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	21.326.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	2.500.000,00	0	344.000,00	0	14%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	99.116.000,00	0	25.550.000,00	0	26%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	200.750.000,00	0	96.735.001,00	0	48%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	10.000.000,00	0	470.000,00	0	5%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	120.654.000,00	0	87.959.000,00	0	73%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	1.624.414.000,00	0	676.552.995,00	0	42%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital	Dokumen	0	1.664.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	Dokumen	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	laporan	3	232.046.000,00	1	63.750.000,00	33%	27%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	232.046.000,00	0	63.750.000,00	0	27%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	12	3.119.939.000,00	6	1.290.893.452,00	50%	41%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	20.000.000,00	0	8.300.000,00	0	42%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	1.291.042.000,00	0	490.104.705,00	0	38%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa	Paket	0	423.027.000,00	0	152.142.996,00	0	36%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa	Paket	0	1.385.870.000,00	0	640.345.751,00	0	46%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	5.175.678.000,00	6	632.497.313,00	50%	12%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	Paket	0	258.090.000,00	0	79.436.809,00	0	31%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	Paket	0	445.654.000,00	0	256.048.034,00	0	57%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	1	213.755.000,00	0	57.927.350,00	0%	27%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Paket	0	3.000.000.000,00	0	159.054.120,00	0	5%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	Paket	0	1.258.179.000,00	0	80.031.000,00	0	6%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pra bencana	%	100	36.840.925.000,00	55	18.699.557.469,00	55%	51%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	0	60	0	60%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	80	0	35	0	44%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan.	desa/kelurahan	20	1.232.800.000,00	0	501.896.903,00	0%	41%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub urusan bencana	Kali	0	1.232.800.000,00	0	501.896.903,00	0	41%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	600	0	350	0	58%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dinyatakan sah/legal.	%	80	7.179.200.000,00	75	2.839.746.580,00	94%	40%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen A2R2 (Assesment Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang disusun.	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) yang disusun.	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan/pemutakhiran dokumen RPB Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Provinsi dan Kabupten/Kota	Kegiatan	0	1.586.700.000,00	0	47.343.990,00	0	3%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	150	0	90	0	60%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pemasangan rambu kebencanaan, papan informasi bencana dan sistem/alat peringatan dini bencana	Buah	0	1.815.000.000,00	0	285.985.569,00	0	16%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	5	0	2	0	40%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah penyediaan/pemutakhiran dokumen KRB Provinsi	Dokumen	0	1.316.500.000,00	0	390.765.295,00	0	30%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana (Destana) yang dibentuk di daerah rawan bencana	Desa/Kelurahan	0	2.461.000.000,00	0	2.115.651.726,00	0	86%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	40	0	40	0	100%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah dokumen laporan monitoring evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah pemulihan pasca bencana	Lokasi	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah peserta pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Orang	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah penyediaan/pemutakhiran dokumen Rencana Kontijensi Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah desa/kelurahan terdampak bencana yang ditangani.	desa/kelurahan	100	16.015.269.600,00	69,96	12.538.906.117,00	70%	78%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan distribusi logistik/peralatan penanganan bencana.	%	100	0	60	0	60%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Tim Respon Cepat (TRC) penanganan darurat bencana provinsi	Orang	0	4.215.088.200,00	0	3.126.600.238,00	0	74%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	6	0	3	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Kegiatan	0	2.069.301.600,00	0	1.777.959.661,00	0	86%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	4	0	3	0	75%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Paket	0	9.405.414.800,00	0	7.426.568.439,00	0	79%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1.000,00	0	800	0	80%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Dokumen	0	325.465.000,00	0	207.777.779,00	0	64%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan rekapitulasi kejadian bencana.	Laporan	12	12.413.655.400,00	6	2.819.007.869,00	50%	23%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah pemulihan pasca bencana	Lokasi	10	0	2	0	20%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Laporan	5	0	3	0	60%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan bencana	Kali	0	5.256.186.400,00	0	662.631.278,00	0	13%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	05	03	1.04	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	2	7.157.469.000,00	0	2.156.376.591,00	0%	30%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			4.465,00	3.489.773.162.920,00	439,11	1.374.869.200.143,00	10%	39%	DINAS SOSIAL
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	223.471.421.750,00	0	94.021.607.799,00	0%	42%	DINAS SOSIAL
						Persentase Realisasi Anggaran	%	95	0	39,11	0	41%	0	DINAS SOSIAL
						Indeks Profesionalitas ASN	%	70	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah indikator kegiatan yang tercapai	dokumen	9	1.400.000.000,00	7	703.084.239,00	78%	50%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	548.691.810,00	5	307.504.111,00	100%	56%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	37.054.900,00	0	0	0%	0%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	483.835.900,00	1	366.725.128,00	100%	76%	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	330.417.390,00	1	28.855.000,00	100%	9%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	bulan	12	173.656.219.489,00	6	70.575.861.995,00	50%	41%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	829	167.800.093.000,00	0	68.937.880.415,00	0%	41%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	Dokumen	12	5.656.126.489,00	6	1.585.194.180,00	50%	28%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di PMKS SIDOARJO	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di PMKS SIDOARJO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL				
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	200.000.000,00	0	52.787.400,00	0%	26%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (TU)	laporan	12	199.012.200,00	0	198.000.000,00	0%	99%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	199.012.200,00	1	198.000.000,00	50%	99%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	laporan	9	7.115.104.788,00	4	3.543.671.043,00	44%	50%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	142.992.660,00	1	80.701.763,00	100%	56%	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU		1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR		1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG		1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO		1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan di Bangunan Kantor yang Disediakan UPT PELAYANAN		1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIDOARJO"	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan di UPT pmks SIDOARJO"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
1	06	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	721.510.752,00	1	346.598.551,00	100%	48%	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIDOARJO	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	"Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	263.616.512,00	1	121.358.325,00	100%	46%	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER"	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanSIDOARJO"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan di UPT BALAI PMKS Sidoarjo"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang DisediakanUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	10.680.000,00	1	5.001.000,00	100%	47%	DINAS SOSIAL																		
					"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP"	"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																		

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
		"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL				
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	289.363.920,00	1	143.588.900,00	100%	50%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanSIDOARJO	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	Jumlah Paket Bahan/Material yang DisediakanUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	9.736.800,00	1	3.231.000,00	100%	33%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamuSIDOARJO	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	2.925.351.700,00	1	1.181.197.328,00	100%	40%	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDSIDOARJO"	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT BALAI PMKS SIDOARJO"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4							8			
			SKPDUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG										
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL			
		"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL			
1	06	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	6	700.228.400,00	4	280.539.673,00	67%	40%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	700.228.400,00	1	280.539.673,00	100%	40%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.07	011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	33.163.151.341,00	6	15.229.471.909,00	50%	46%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.420.000,00	1	1.302.052,00	100%	29%	DINAS SOSIAL
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
1	06	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.089.392.484,00	6	1.592.906.636,00	50%	39%	DINAS SOSIAL
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2	3	4								
			DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP								
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL	

325

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN"	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
				"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																			
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	35	29.069.338.857,00	1	13.635.263.221,00	3%	47%	DINAS SOSIAL																	
					"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO"	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		
					"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL																		

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4							
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	1	0	6	0	600%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorSIDOARJO	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di UPT Balai PMKS SIDOARJO	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL
		"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG"	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorUPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	12	0	6	0	50%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	7	7.237.705.532,00	7	3.490.978.940,00	100%	48%	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	356.197.938,00	1	132.244.650,00	100%	37%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	696.916.095,00	1	437.332.078,00	100%	63%	DINAS SOSIAL
						"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR"	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR"	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI"	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	"Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	859.483.000,00	1	270.898.947,00	100%	32%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR"	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO"	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharaSIDOARJO	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL																									
1	06	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.932.331.698,00	1	2.485.618.685,00	100%	50%	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL																									
						*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi di UPT Balai PMKS SIDOARJO	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL																									
1	06	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	unit	1	145.776.801,00	1	141.734.420,00	100%	97%	DINAS SOSIAL																									
1	06	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(indikator kosong)	Unit	1	247.000.000,00	1	23.150.160,00	100%	9%	DINAS SOSIAL																									
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	8.689.506.405,00	50	2.749.657.600,00	50%	32%	DINAS SOSIAL																									
						persentase kegiatan publikasi dan kerjasama penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL																									
						Persentase PSKS Penerima manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di UPT PTKS Malang	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL																									
						Persentase orang yang mendapatkan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL																									
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	kegiatan	6	136.008.100,00	4	86.063.520,00	67%	63%	DINAS SOSIAL																									
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	6	136.008.100,00	0	86.063.520,00	0%	63%	DINAS SOSIAL																									
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSKS yang mendapatkan pemberdayaan	orang	716	8.553.498.305,00	305	2.663.594.080,00	43%	31%	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah Kegiatan Penyuluhan Sosial dan Publikasi Kesejahteraan Sosial	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah stakeholder yang bekerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL																									
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya kewenangan provinsi UPT PTKS Malang	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL																									
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	50	63.549.600,00	0	56.586.250,00	0%	89%	DINAS SOSIAL																									
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	666	4.676.909.800,00	305	1.565.321.700,00	46%	33%	DINAS SOSIAL																									
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	5	3.813.038.905,00	2	1.041.686.130,00	40%	27%	DINAS SOSIAL																									
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	27.515.200,00	0	200.000,00	0%	1%	DINAS SOSIAL																									
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	orang	250	27.515.200,00	0	200.000,00	0%	1%	DINAS SOSIAL																									
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang	200	27.515.200,00	0	200.000,00	0%	1%	DINAS SOSIAL																									

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2				3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan	%	100	62.678.843.145,00	0	23.551.232.578,00	0%	38%	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
								Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
							5		6		7 = 6/5 x 100%			
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
					Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelayanan di dalam LKS	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSEB Pasuruan	orang	75	24.949.980.070,00	150	6.965.936.175,00	200%	28%	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBRW Pasuruan	orang	60	0	120	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBL Pasuruan	orang	255	0	510	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBG Tuban	orang	60	0	120	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBL Kediri	orang	205	0	410	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBLK Tuban	orang	100	0	200	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBN Malang	orang	105	0	210	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di LKSD	kegiatan	100	0	200	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	960	10.102.632.250,00	1.920,00	4.146.804.572,00	200%	41%	DINAS SOSIAL
					"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi LKS Disabilitas"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi LKS Disabilitas"	100	0	100	0	100%	0	DINAS SOSIAL	
					"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	105	0	210	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN"	75	0	150	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	60	0	120	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN"	60	0	120	0	200%	0	DINAS SOSIAL	
					"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN"	255	0	510	0	200%	0	DINAS SOSIAL	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Minimal Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"							
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	205	0	410	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN"	100	0	200	0	200%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	860	1.488.001.040,00	1.720,00	791.058.350,00	200%	53%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	105	0	210	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN"	60	0	120	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	255	0	255	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	205	0	410	0	200%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses bagi lanjut usia terlantar di UPT PSTW Magetan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas di UPT RSBD Pasuruan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	860	9.129.543.000,00	1.720,00	17.220.000,00	200%	0%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan ProvinsiLKS Disabilitas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan ProvinsiLKS Disabilitas	24	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	105	0	105	0	100%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	Orang	860	1.427.732.880,00	1.720,00	675.655.139,00	200%	47%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	105	0	210	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan	75	0	150	0	200%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN							
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	60	0	120	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	255	0	510	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	205	0	410	0	200%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas di dalam panti yang mendapatkan bimbingan fisik, sosial, keterampilan dan kewirausahaan	Kegiatan	860	737.554.400,00	1.720,00	403.767.914,00	200%	55%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	105	0	210	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	255	0	510	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	205	0	410	0	200%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	874	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	860	54.631.900,00	1.720,00	26.660.900,00	200%	49%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	860	49.634.100,00	1.720,00	9.474.200,00	200%	19%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN"	255	0	510	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI"	205	0	410	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan ProvinsiUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG"	105	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.01	012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	Dokumen	860	1.960.250.500,00	1.720,00	895.295.100,00	200%	46%	DINAS SOSIAL
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntarSurabaya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntarSurabaya	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntarUPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntarUPT	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
								5		6				
							REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlantarUPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI		1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PPSAA Nganjuk	anak	135	11.762.336.670,00	270	4.610.063.621,00	200%	39%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PPSAA Situbondo	anak	130	0	260	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PPSAA Sumenep	anak	100	0	200	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PPSAA Trenggalek	anak	120	0	240	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PPSA Batu	anak/tahun	55	0	110	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PPSAB Sidoarjo	anak	600	0	1.200,00	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di LKSA	tidak ada	150	0	300	0	200%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	55	150.100.000,00	110	67.700.000,00	200%	45%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1.290,00	7.643.037.416,00	2.580,00	2.895.509.801,00	200%	38%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiLKS Anak "		150	0	150	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi di LKS Lansia"		52	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO"		55	0	110	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO"		120	0	240	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK"		130	0	520	0	400%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO		100	0	200	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP		135	0	270	0	200%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	"Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	600	0	600	0	100%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	(indikator kosong)	Orang	1.140,00	811.115.900,00	2.280,00	362.843.920,00	200%	45%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK"	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK"	120	0	240	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK"	0	0	270	0	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	600	0	300	0	50%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1.140,00	33.506.810,00	2.280,00	16.753.405,00	200%	50%	DINAS SOSIAL
						"Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	"Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU"	600	0	600	0	100%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu	(indikator kosong)	Orang	1.140,00	127.545.292,00	2.280,00	65.170.716,00	200%	51%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	120	0	480	0	400%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	100	0	200	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	135	0	270	0	200%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan ProvinsiUPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	600	0	400	0	67%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	(indikator kosong)	Orang	1.140,00	313.840.000,00	2.280,00	150.770.000,00	200%	48%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Schari- Hari	(indikator kosong)	Orang	1.140,00	847.656.993,00	2.280,00	280.282.150,00	200%	33%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	55	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	120	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	135	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(indikator kosong)	Orang	1.140,00	1.387.289.460,00	2.280,00	578.634.629,00	200%	42%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	55	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	135	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	55	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	120	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	130	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	135	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	55	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.02	013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	(indikator kosong)	Dokumen	7	448.244.799,00	7	192.399.000,00	100%	43%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Bitlar	orang	135	12.969.008.144,00	135	5.939.235.742,00	100%	46%	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Pasuruan	orang	165	0	165	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Banyuwangi	orang	100	0	100	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Bondowoso	orang	100	0	100	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Jember	orang	140	0	140	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Jombang	orang	155	0	155	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSTW Magetan	orang	145	0	145	0	100%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di LKS-LU	kegiatan	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	(indikator kosong)	Orang	989	9.399.557.800,00	989	4.010.447.965,00	100%	43%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	(indikator kosong)	Orang	937	174.784.500,00	937	147.435.225,00	100%	84%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	140	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	165	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	135	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	839	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	165	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	135	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	155	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	145	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	Orang	937	901.329.473,00	937	453.771.168,00	100%	50%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	(indikator kosong)	Orang	937	121.932.000,00	937	60.348.000,00	100%	49%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Schari- Hari	(indikator kosong)	Orang	937	331.206.070,00	937	199.155.052,00	100%	60%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(indikator kosong)	Orang	937	242.962.600,00	937	116.330.732,00	100%	48%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.03	010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	165	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	145	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi (indikator kosong)	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 012	Pemulasaraan	Orang	100	111.593.000,00	100	47.706.000,00	100%	43%	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.03 013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	1.685.642.701,00	1	904.041.600,00	100%	54%	DINAS SOSIAL	
1	06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBK Pasuruan	orang	100	2.992.257.600,00	100	1.364.944.500,00	100%	46%	DINAS SOSIAL
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBK Madiun	orang	100	0	99,98	0	100%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di LKS	kegiatan	1	0	1	0	100%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	200	2.593.657.300,00	200	1.183.184.900,00	100%	46%	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	Orang	200	77.144.000,00	200	13.572.000,00	100%	18%	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal di UPT RSBK PASURUAN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah gelandangan dan pengemis yang di pulangkan ke daerah asal	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.04 011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	2	321.456.300,00	2	168.187.600,00	100%	52%	DINAS SOSIAL
1	06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSBR Blitar	orang	100	10.005.260.661,00	100	4.671.052.540,00	100%	47%	DINAS SOSIAL
			Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSBR Bojonegoro	orang	100	0	100	0	100%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSBR Jombang	orang	100	0	100	0	100%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSBR Pamekasan	orang	100	0	100	0	100%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT RSBKW Kediri	orang	150	0	150	0	100%	0	DINAS SOSIAL
			Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di UPT PSRMP Surabaya	orang	130	0	130	0	100%	0	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti di Balai PMKS Sidoarjo	orang	150	0	150	0	100%	0	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	830	4.377.534.500,00	830	1.773.386.650,00	100%	41%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	830	994.822.664,00	830	587.211.420,00	100%	59%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses bagi PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA	Orang	830	78.482.366,00	830	74.771.730,00	100%	95%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	830	582.874.909,00	830	295.342.182,00	100%	51%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	830	663.353.090,00	830	299.240.299,00	100%	45%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Schari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	830	224.911.000,00	830	148.497.200,00	100%	66%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	830	2.617.237.752,00	830	1.279.405.628,00	100%	49%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	08	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	830	224.380,00	830	133.000,00	100%	59%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	830	169.000.000,00	830	117.838.131,00	100%	70%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	830	53.755.000,00	830	16.845.500,00	100%	31%	DINAS SOSIAL
1	06	04	1.05	011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen	7	243.065.000,00	7	78.380.800,00	100%	32%	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS anak yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	176.796.172.500,00	0	73.057.252.326,00	0%	41%	DINAS SOSIAL
						Persentase PPKS lanjut usia yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Persentase anak dan disabilitas telantar yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Persentase keluarga fakir miskin yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL
						Persentase eks klien yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	0	50	0	50%	0	DINAS SOSIAL
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI yang diterbitkan	triwulan	4	124.032.500,00	2	31.272.800,00	50%	25%	DINAS SOSIAL
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	250	124.032.500,00	59	31.272.800,00	24%	25%	DINAS SOSIAL
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial melalui PKH plus	orang	55.000,00	176.672.140.000,00	96.796,00	73.025.979.526,00	176%	41%	DINAS SOSIAL
						Jumlah disabilitas telantar yang mendapatkan bantuan sosial melalui program ASPD	orang	4.000,00	0	7.113,00	0	178%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif	orang	1.651,00	0	1.623,00	0	98%	0	DINAS SOSIAL
						Jumlah eks klien yang mendapat bantuan pengembangan usaha	orang	813	0	225	0	28%	0	DINAS SOSIAL
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	59.000,00	143.410.640.000,00	103.909,00	62.878.990.497,00	176%	44%	DINAS SOSIAL
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Keluarga	9.259,00	15.813.500.000,00	0	613.048.185,00	0%	4%	DINAS SOSIAL
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	2.464,00	17.448.000.000,00	2.777,00	9.533.940.844,00	113%	55%	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang tertangani	%	100	10.113.600.000,00	0	4.991.153.688,00	0%	49%	DINAS SOSIAL
						Persentase orang terlantar yang dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	orang	17.957,00	10.113.600.000,00	3.887,00	4.991.153.688,00	22%	49%	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	13.097,00	395.880.000,00	0	263.246.050,00	0%	66%	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	500	125.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	4	800.004.980,00	1	417.098.082,00	25%	52%	DINAS SOSIAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		8		
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	360	853.600.000,00	86	310.098.839,00	24%	36%	DINAS SOSIAL
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	4.000,00	7.939.115.020,00	3.800,00	4.000.710.717,00	95%	50%	DINAS SOSIAL
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.102,50	2.519.379.162.334,00	0	1.169.754.178.260,00	0%	46%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	tidak ada	80	228.055.416.305,00	0	91.049.945.736,00	0%	40%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase realisasi anggaran	tidak ada	95	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Indeks profesionalitas ASN	tidak ada	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	4	1.001.147.000,00	0	395.258.935,00	0%	39%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	343.861.200,00	1	172.599.605,00	33%	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	31.665.200,00	0	0	0%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	13.407.000,00	0	0	0%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	144.526.500,00	0	0	0%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	30.342.100,00	0	2.680.000,00	0	9%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	206.293.000,00	0	87.097.280,00	0	42%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	231.052.000,00	0	132.882.050,00	0	58%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	200.468.001.580,00	0	78.498.003.349,00	0%	39%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	197.612.251.000,00	0	77.092.684.858,00	0	39%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	754	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	0	1.402.592.000,00	0	627.706.919,00	0	45%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan verifikasi PenataUsahaan	Laporan	0	968.532.980,00	0	561.032.000,00	0	58%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	0	391.636.400,00	0	174.146.572,00	0	44%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	Dokumen	0	19.354.100,00	0	15.478.000,00	0	80%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	56.960.100,00	0	26.955.000,00	0	47%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Dokumen	0	16.675.000,00	0	0	0	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	12	1.221.231.297,00	0	537.709.603,00	0%	44%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas SKPD	Paket	0	37.170.000,00	0	31.753.548,00	0	85%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	800	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	781.752.979,00	0	259.034.180,00	0	33%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	223.459.818,00	0	127.586.900,00	0	57%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	173	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan SKPD	Kali	0	58.242.000,00	0	24.701.000,00	0	42%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang dilaksanakan	Kali	0	120.606.500,00	0	94.633.975,00	0	78%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	250	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	12	2.890.036.986,00	0	1.450.348.280,00	0%	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	68.125.876,00	0	45.684.402,00	0	67%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	701.305.750,00	0	467.673.033,00	0	67%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	24.818.300,00	0	17.551.100,00	0	71%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	1.011.964.047,00	0	45%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penggandaan	Paket	0	365.644.013,00	0	30%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	22	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	74.599.000,00	0	36.912.000,00	0	49%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan SKPD	kali	0	9.642.000,00	0	9.390.600,00	0	97%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan SKPD	laporan	0	409.038.000,00	0	206.707.480,00	0	51%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung SKPD	Paket	0	224.900.000,00	0	97.637.627,00	0	43%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	5	632.016.000,00	0	464.970.000,00	0%	74%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel SKPD	Set	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	12	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	592.016.000,00	0	424.970.000,00	0	72%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan SKPD	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	28	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	Paket	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	0	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya SKPD	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	20.400.971.302,00	6	9.050.424.937,00	50%	44%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	4.300.000,00	0	1.793.400,00	0	42%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	4.990.761.765,00	0	2.266.279.284,00	0	45%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	36.000.000,00	0	18.000.000,00	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	15.369.909.537,00	0	6.764.352.253,00	0	44%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	1	1.442.012.140,00	0	653.230.632,00	0%	45%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	597.332.638,00	0	275.345.361,00	0	46%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	47	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																			
2	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	318.810.500,00	0	118.005.522,00	0	37%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	52	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	paket	0	510.369.002,00	0	254.233.179,00	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	0	15.500.000,00	0	5.646.570,00	0	36%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	251.371.810,00	0	203.708.330,00	0%	81%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Persentase Kab/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	%	8	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	dokumen	1	251.371.810,00	0	203.708.330,00	0%	81%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
						Persentase Perusahaan yang mempunyai perencanaan tenaga kerja	%	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Kab/kota	0	225.000.000,00	0	189.704.995,00	0	84%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Persentase	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	Perusahaan	0	26.371.810,00	0	14.003.335,00	0	53%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah kab/kota yang telah dibina dalam menyusun RTK Perusahaan	Kab./Kota		0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang		6	0	4	0	67%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi yang ditempatkan	%	0	85.852.289.112,00	0	41.765.462.882,00	0	49%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Pesentase pencarikerja yang di latih di Jawa Timur	%		73	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di perusahaan	%		65	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Timur	%		80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK SURABAYA bersertifikat kompetensi	%		90	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK MOJOKERTO bersertifikat kompetensi	%		90	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK SUMENEP bersertifikat kompetensi	%		80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK SINGOSARI bersertifikat kompetensi	%		80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK JOMBANG bersertifikat kompetensi	%		75	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK NGANJUK bersertifikat kompetensi	%		64	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK MADIUN bersertifikat kompetensi	%		80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK PONOROGO bersertifikat kompetensi	%		68	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK TULUNGAGUNG bersertifikat kompetensi	%		85	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK TUBAN bersertifikat kompetensi	%		80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK SITUBONDO bersertifikat kompetensi	%		60	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK JEMBER bersertifikat kompetensi	%		80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK KEDIRI bersertifikat kompetensi	%		75	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK PASURUAN bersertifikat kompetensi	%		75	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK BOJONEGORO bersertifikat kompetensi	%		62,5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase lulusan UPT BLK WONOGATI bersertifikat kompetensi	%		90	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	84.194.149.672,00	0	40.915.602.360,00	0	49%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7				8			
		Jumlah pencarikerja yang di latih UPT BLK SURABAYA	orang	455	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencarikerja yang di latih UPT BLK MOJOKERTO	orang	304	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencarikerja yang di latih UPT BLK SUMENEP	orang	208	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencarikerja yang di latih UPT BLK SINGOSARI	orang	528	0	384	0	73%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencarikerja yang di latih UPT BLK JOMBANG	orang	560	0	288	0	51%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencarikerja yang di latih UPT BLK NGANJUK	orang	160	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK MADIUN	orang	504	0	360	0	71%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK PONOROGO	orang	502	0	352	0	70%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK TULUNGAGUNG	orang	116	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK TUBAN	orang	452	0	225	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK SITUBONDO	orang	592	0	544	0	92%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK JEMBER	orang	600	0	520,98	0	87%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK KEDIRI	orang	196	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK PASURUAN	orang	224	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlahpencari kerja yang di latih UPT BLK BOJONEGORO	orang	560	0	288	0	51%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah pencari kerja yang di latih UPT BLK WONOJATI	orang	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Presentase peserta pemagangan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	90	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Surabaya	dokumen	20	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Mojokerto	dokumen	13	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Sumenep	dokumen	20	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Singosari	dokumen	15	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Jombang	dokumen	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Nganjuk	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Madiun	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Ponorogo	dokumen	7	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Tulungagung	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Tuban	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Situbondo	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Jember	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Kediri	dokumen	25	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Pasuruan	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Bojonegoro	dokumen	30	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Dokumen Kerjasama UPT BLK Wonorejo	dokumen	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Lembaga pelatihan yang terverifikasi dan ketersediaan instruktur pelatihan kerja	lembaga	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional	Orang	0	62.196.381.694,00	0	32.995.331.244,00	0	53%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pemagangan dalam negeri	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pemagangan luar negeri	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah program pelatihan yang tersusun/dikembangkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK SURABAYA	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK MOJOKERTO	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK SUMENEP	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK SINGOSARI	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK JOMBANG	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK NGANJUK	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK MADIUN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK PONOROGO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK TULUNGAGUNG	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK TUBAN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK SITUBONDO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK JEMBER	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK KEDIRI	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
		Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK PASURUAN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK BOJONEGORO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan Instiusional di UPT BLK WONOJATI	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK SURABAYA	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK MOJOKERTO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK SUMENEP	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK SINGOSARI	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK JOMBANG	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK NGANJUK	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK MADIUN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK PONOROGO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK TULUNGAGUNG	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK TUBAN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK SITUBONDO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK JEMBER	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK KEDIRI	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK PASURUAN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK BOJONEGORO	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Peserta Pelatihan non Instiusional di UPT BLK WONOJATI	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peserta pemagangan dalam negeri	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peserta pemagangan luar negeri	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	110	0	250	0	227%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	528	0	384	0	73%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	600	0	521	0	87%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	720	0	496	0	69%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	560	0	288	0	51%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7				8			
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		452		0		224,97		0		50%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		192		0		0		0		0%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		560		0		432		0		77%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		608		0		512		0		84%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		272		0		0		0		0%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		260		0		0		0		0%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		148		0		0		0		0%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		504		0		360		0		71%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		502		0		352		0		70%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		560		0		288		0		51%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		784		0		400		0		51%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang		304		0		0		0		0%		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah instruktur yang ditingkatkan kompetensinya	Instruktur	0	1.900.628.916,00	0	852.027.527,00	0	45%			0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK SINGOSARI	mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK JEMBER	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK MOJOKERTO	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK Jombang	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK TUBAN	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK NGANJUK	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK SURABAYA	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK SUMENEP	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK KEDIRI	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah mitra kerja di UPT BLK WONIJATI	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah peserta mitra jejaring penempatan	Mitra		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah koordinasi dan sinergitas pelatihan dan produktivitas	Kegiatan		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
					Jumlah instruktur yang ditingkatkan kompetensinya	Instruktur		0		0		0		0		0		0		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8					
		Jumlah peserta pelatihan metodologi pelatihan dan atau upgrading instruktur bagi tenaga kerja instruktur terampil Balai Latihan Kerja (BLK) dan atau Lembaga Pelatihan Kerja / LPK	LPK	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah mitra kerja di UPT BLK MADIUN	Mtra	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah mitra kerja di UPT BLK PONOROGO	Mitra	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah dokumen Inventarisasi Data Kelembagaan Pelatihan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah peserta Koordinasi & Sinergitas Kelembagaan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	58	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	20	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK	Paket	0	20.097.139.062,00	0	7.068.243.589,00	0	35%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK"	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK SURABAYA	gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK MOJOKERTO	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK SUMENEP	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK SINGOSARI	gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK JOMBANG	gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK NGANJUK	gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK MADIUN	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK PONOROGO	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK TULUNGAGUNG	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK TUBAN	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK SITUBONDO	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK JEMBER	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK KEDIRI	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK PASURUAN	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
		Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK BOJONEGORO	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah workshop yang direvitalisasi di UPT BLK WONOJATI	Gedung	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK SURABAYA	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK MOJOKERTO	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK SUMENEP	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK SINGOSARI	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK JOMBANG	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK NGANJUK	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK MADIUN	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK PONOROGO	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK TULUNGAGUNG	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK TUBAN	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK SITUBONDO	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK JEMBER	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK KEDIRI	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK PASURUAN	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK BOJONEGORO	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah peralatan pelatihan yang dibeli di UPT BLK WONOJATI	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	6	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	63	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	6	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	6	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Presentase LPK yang terakreditasi	%	90	278.500.000,00	0	186.765.340,00	0%	67%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan Akreditasi	Orang	0	278.500.000,00	0	186.765.340,00	0	67%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah LPK yang mendapatkan pembinaan	LPK	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah LPK yang di tingkatkan kualitas mutu lembaganya	LPK	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	10	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan yang dibina dan ditingkatkan produktivitasnya	perusahaan	0	518.136.000,00	0	261.618.486,00	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						jumlah perusahaan yg mendapat pelatihan dan konsultasi	perusahaan	300	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	03	1.03	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan yang dibina dan ditingkatkan produktivitasnya	Perusahaan	0	518.136.000,00	0	261.618.486,00	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peserta Yang Mendapat Pelatihan Menajemen Produktivitas Kewirausahaan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Peserta Yang Mendapat Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Produktif	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah perusahaan yang dilatih Menajemen Produktivitas Kewirausahaan di UPT. BLP2TK	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah perusahaan yang dilatih pengembangan kewirausahaan produktif di UPT . BLP2TK	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	300	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang telah diukur tingkat produktivitasnya	perusahaan	0	861.503.440,00	0	401.476.696,00	0	47%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	65	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Persentase perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang telah diukur tingkat produktivitasnya	Perusahaan	0	861.503.440,00	0	401.476.696,00	0	47%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
						Jumlah perusahaan yang mendapat Bimbingan dan konsultasi Produktivitas Kewirausahaan	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8	
1	2	3	4							8		
		Jumlah peserta yang mendapatkan pembinaan pengukuran produktivitas*	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah perusahaan yang dilatih dalam implementasi 5S/5R*	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sosialisasi dan Pembinaan Menuju Penghargaan Produktivitas*	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah perusahaan / UKM yg dilatih dan meningkat produktivitasnya	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Perusahaan yang mendapat sosialisasi dan pembinaan penghargaan produktivitas	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah perusahaan yang diberi bimbingan 5R/5S	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan pengukuran produktivitas tenaga kerja	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah perusahaan yang dinilai tingkat produktivitasnya	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah kader produktivitas yang dilatih	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan produktivitas	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Perusahaan yang mendapat bimbingan dan konsultasi produktivitas	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Dokumen pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Produktivitas dan Pengawasan/Penyeliaan Sertifikasi Kompetensi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	0	5.152.121.165,00	0	2.665.505.131,00	0	52%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK SURABAYA	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan di UPT BLK MOJOKERTO	%	75	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK SUMENEP	%	75	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK SINGOSARI	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK JOMBANG	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK NGANJUK	%	31	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK MADIUN	%	65	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan di UPT BLK PONOROGO	%	67	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK TULUNGAGUNG	%	73	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK TUBAN	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK SITUBONDO	%	65	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK JEMBER	%	75	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK KEDIRI	%	55	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK PASURUAN	%	55	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK BOJONEGORO	%	72	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Persentase penempatan peserta pelatihan UPT BLK WONOJATI	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlindungi	orang	1.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAN	orang	20.000,00	1.955.818.810,00	0	1.104.810.602,00	0%	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan ditempatkan	orang	8.100,00	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Prosentase pencari kerja yang mampu mengakses bursa kerja	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor informal	orang	200	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Petugas AKAN Kab./Kota yang mengikuti BIMTEK	Orang	0	478.113.650,00	0	283.461.076,00	0	59%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah kegiatan di Bidang Penempatan yang selaras dengan bidang yang membidangi Ketenagakerjaan di Jawa Timur	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Petugas AKAN yang mengikuti BIMTEK	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	60	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD AKL Aksus)	Orang	0	525.372.050,00	0	306.843.503,00	0	58%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan pelayanan informasi dan konsultasi kerja ke luar negeri	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAN	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisma AKAD	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	100	0	75	0	75%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan layanan Penyuluhan Bimbingan Jabatan	Orang	0	52.333.110,00	0	14.683.592,00	0	28%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	50	0	20	0	40%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pelaku wirausaha baru yang dibina	Orang	0	900.000.000,00	0	499.822.431,00	0	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Penciptaan Tenaga Kerja Freelance Baru Melalui Program Milenial Job Center (MJC)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	200	0	100	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	6.314.000,00	0	321.600,00	0	5%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	07	04	1.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang mendapatkan pembinaan	LPTKS	0	6.314.000,00	0	321.600,00	0	5%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh LPTKS	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	10	0	3	0	30%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	orang	2.000,00	679.180.635,00	0	124.123.716,00	0%	18%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK SURABAYA	peserta	500	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK MOJOKERTO	peserta	200	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK SUMENEP	peserta	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK SINGOSARI	peserta	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 diUPT BLK JOMBANG	peserta	30	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 diUPT BLK NGANJUK	peserta	25	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK MADIUN	peserta	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK PONOROGO	peserta	60	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK TULUNGAGUNG	peserta	373	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK TUBAN	peserta	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK SITUBONDO	peserta	80	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK JEMBER	peserta	175	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK KEDIRI	peserta	107	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 diUPT BLK PASURUAN	peserta	175	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 diUPT BLK BOJONEGORO	peserta	35	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang di tempatkan melalui kios 3 in 1 di UPT BLK WONOJATI	peserta	60	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan penggunaan aplikasi IPK Online	Kab/Kota	0	102.888.540,00	0	79.386.770,00	0	77%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Kab./Kota yang melakukan input pada aplikasi IPK online"	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Penciptakan Tenaga Kerja Freelance Baru Melalui Program Milenial Job Center (MJC)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah alumni pelatihan UPT BLK yang ditempatkan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah pendaftar pelatihan	Peserta	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah peserta/perusahaan mitra jejaring penempatan di UPT BLK NGANJUK	Peserta	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah peserta/perusahaan mitra jejaring penempatan di UPT BLK TULUNGAGUNG	Peserta	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	35	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	70	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	04	1.03	03	Job Fair /Bursa Kerja	Persentase penempatan pencari kerja melalui JMF	Persen	0	576.292.095,00	0	44.736.946,00	0	8%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan melalui job fair di UPT BLK Singosari	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan melalui job fair di UPT BLK Jember	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan melalui job fair di UPT BLK Pasuruan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Peserta pelatihan yang ditempatkan melalui job fair di UPT BLK Jombang	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan melalui job fair di UPT BLK Tuban	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pelatihan yang ditempatkan melalui job fair di UPT BLK Nganjuk	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepeulangannya	PMI	20.000,00	2.510.807.720,00	0	1.436.249.213,00	0%	57%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non prosedural yang terfasilitasi perlindungan	PMI	1.000,00	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)yang terlayani keberangkatannya	orang	20.000,00	0	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah lokasi sosialisasi Prosedur Penempatan PMI	lokasi	0	1.903.155.951,00	0	955.144.318,00	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah PMI yang Dilayani di Counter Bandara Juanda	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non prosedural yang mendapatkan perlindungan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang disertifikasi kompetensi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah PMI bermasalah yang difasilitasi kepeulangannya	PMI	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang menggunakan fasilitas shelter perlindungan	PMI	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	0	145	0	73%	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	46.000,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah kantor cabang dan pusat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dibina (P3MI)	Kantor	0	64.151.753,00	0	64.036.698,00	0	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	30	0	30	0	100%	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah petugas LTSA yang mengikuti Bimtek	Orang	50	543.500.016,00	0	417.068.197,00	0%	77%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah pengguna LTSA yang terlayani	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Pelayanan Operasional LTSA P2PMI"	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah Calon Pekerja Migran yang diberikan pembekalan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	20.000,00	0	0	0	0%	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang mengikuti pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah PMI Purna Produktif melalui Pembinaan Kewirausahaan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	50	0	0	0	0%	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	0	2.630.006.400,00	0	1.462.119.672,00	0	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	%	20	0	0	0	0%	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB (Syarat kerja)	%	14	284.337.289,00	0	229.770.040,00	0%	81%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit (kelembagaan)	%	6	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) (syarat kerja)	%	20	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah peserta pembinaan peraturan perusahaan (PP)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah sasaran/peserta pembinaan peraturan perusahaan (PP)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah sasaran/peserta pembinaan perjanjian kerja bersama PKB	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pembinaan perjanjian kerja bersama PKB	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah peserta pembinaan LKS Bipartit	Orang	0	284.337.289,00	0	229.770.040,00	0	81%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah sasaran/peserta pembinaan LKS Bipartit	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah peserta pembinaan LKS Tripartit	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Provinsi yang difasilitasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah sasaran /peserta pembinaan LKS Tripartit	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator HI	%	70	1.999.455.120,00	0	1.125.074.225,00	0%	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Persentase perusahaan yang berselisih	%	4	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsultasi mediator HI se Jawa Timur	Orang	75	129.283.926,00	0	53.516.518,00	0%	41%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang di fasilitasi dalam penyelesaian Hubungan Industrial	Perusahaan	40	332.892.640,00	0	218.725.116,00	0%	66%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	Perkara	60	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan aktualisasi data SP/SB	Kab./Kota	0	1.093.622.000,00	0	706.072.500,00	0	65%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah pekerja / buruh yang di fasilitasi aktivitas pertemuannya	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8																	
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	3	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah anggota LKS Tripartit yang difasilitasi	Orang	0	180.000.000,00	0	20.028.400,00	0	11%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	05	1.02	05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah anggota Dewan Pengupahan Provinsi yang difasilitasi	Orang	0	263.656.554,00	0	126.731.691,00	0	48%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	keputusan	2	346.213.991,00	0	107.275.407,00	0%	31%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	38.242.191,00	0	0	0%	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
2	07	05	1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Kali	0	307.971.800,00	0	107.275.407,00	0	35%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	1	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	05	1.03	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah sasaran / peserta pembinaan struktur dan skala upah	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah peserta pembinaan Jaminan/fasilitas kesejahteraan pekerja	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah Kab./Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tunjangan hari raya (THR) keagamaan	Kabupaten dan Kota	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah peserta pembinaan struktur skala upah	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian ketenagakerjaan	%	0	4.838.024.208,00	0	2.439.609.973,00	0	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	64	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
					Prosentase perusahaan yang melaksanakan pengujian K3 L sesuai peraturan perundangan - undangan	%	5	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	perusahaan	400	4.838.024.208,00	0	2.439.609.973,00	0%	50%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja	perusahaan	400	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
					Jumlah Penanganan kasus ketenagakerjaan	kasus	25	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
					Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengujian K3 lingkungan dilaksanakan di UPT K2	perusahaan	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
					Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Hyperkes dan Keselamatan kerja	orang	110	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah peningkatan tenaga kerja yang menjadi peresta BPJS Ketenagakerjaan	orang	0	1.066.814.400,00	0	587.819.236,00	0	55%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
					Jumlah peningkatan perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan melalui WLKP	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		
					Jumlah pekerja perempuan yang mendapatkan sosialisasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																		

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan melalui WLKP	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	400	0	100	0	25%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah gelar kasus ketenagakerjaan	Kasus	0	782.854.500,00	0	228.712.362,00	0	29%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
		Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan	Kasus	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	Kasus	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	25	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	Perusahaan	0	2.988.355.308,00	0	1.623.078.375,00	0	54%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																	
		Jumlah perusahaan yang terlayani pengujian lingkungan swadana	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah tenaga kerja yang terlayani pemeriksaan kesehatan kerja swadana	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah perusahaan yang menerima informasi hiperkes dan keselamatan kerja	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah teknisi perusahaan yang mengikuti pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah tenaga kerja yang ikut pelatihan Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja swadana	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah perusahaan / pabrik rokok yang diuji kualitas udaranya	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah petugas di Bidang lingkungan yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan K3	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan Norma K3	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah perusahaan yang terlayani pengujian lingkungan	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah tenaga kerja yang terlayani pemeriksaan kesehatan kerja	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah peserta pelatihan P3K	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah peserta pelatihan ERP	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah peserta pelatihan paramedis	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	400	0	400	0	100%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		5.182.029,04	7.261.105.198.823,00	1.984.291,30	2.993.861.906.089,00	38%	41%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
3	032	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		80	1.150.000.000,00	0	641.521.495,00	0%	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					
3	032	02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase lokasi penempatan transmigran	Persen	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																					

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
3	032	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang diidentifikasi dan dievaluasi	lokasi	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	032	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang teridentifikasi SDM / SDA nya	lokasi	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
						Jumlah lokasi yang dilakukan Identifikasi	lokasi	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	032	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah lokasi yang dievaluasi keberhasilan transmigrannya	lokasi	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3	032	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase transmigran yang ditempatkan	%	80	1.150.000.000,00	0	641.521.495,00	0%	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang memiliki kompetensi	KK	75	1.150.000.000,00	0	641.521.495,00	0%	56%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) yang dihasilkan	naskah	42	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	KK	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah peninjauan kerjasama daerah asal dengan daerah tujuan	Dokumen	2	317.576.098,00	0	227.691.425,00	0%	72%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah dokumen Kerjasama Antar Daerah (KSAD) yang dihasilkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	42	0	42	0	100%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah calon transmigran yang mendapat pelayanan di transit transmigrasi	Jiwa	0	107.820.885,00	0	0	0	0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga	100	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang terseleksi	Orang/KK	0	65.372.296,00	0	57.477.550,00	0	88%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	25	0	25	0	100%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran / transmigran yang dilatih	orang	0	362.571.150,00	0	153.410.605,00	0	42%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah lokasi yang di monitoring dan di evaluasi keberhasilan transmigrannya	lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	032	03	1.01	018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	3	296.659.571,00	0	202.941.915,00	0%	68%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			878,05	95.050.211.480,00	253,63	40.952.552.464,00	29%	43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	23.973.226.724,00	0	10.416.094.008,00	0%	43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase realisasi anggaran	%	95,9	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
		Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81,15	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																													
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	dokumen	9	495.225.458,00	5	295.562.633,00	56%	60%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	401.675.048,00	5	283.343.133,00	71%	71%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	6.368.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																													
2	08	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	0	3.734.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																													
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	4.288.000,00	0	2.000.000,00	0	47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																													
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	4.288.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																													
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	0	45.897.970,00	0	6.939.500,00	0	15%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																													
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	28.974.440,00	0	3.280.000,00	0	11%	DINAS PEMBERDAYAAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
										PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	08	01	1.02							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	dokumen	12	18.517.083.040,00	0	7.690.273.061,00	0%	42%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	01						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	17.446.733.000,00	0	7.166.787.567,00	0	41%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	70	0	64	0	91%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	02						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	473.184.000,00	0	232.763.000,00	0	49%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	03						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	492.500.290,00	0	250.172.994,00	0	51%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	04						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	0	42.200.000,00	0	17.120.000,00	0	41%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	05						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	0	9.543.000,00	0	6.190.000,00	0	65%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	06						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN	
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	0	21.406.500,00	0	10.661.250,00	0	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	24.953.000,00	0	6.578.250,00	0	26%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	0	6.563.250,00	0	0	0	0%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	14	797.619.100,00	0	375.173.746,00	0%	47%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket/LS	0	52.666.500,00	0	52.635.000,00	0	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	0	71.605.000,00	0	46.505.000,00	0	65%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	0	615.467.200,00	0	261.990.846,00	0	43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	57.880.400,00	0	14.042.900,00	0	24%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	0	7	0	64%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	13	875.647.449,00	0	602.524.803,00	0%	69%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	0	20.350.000,00	0	10.533.000,00	0	52%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	0	314.750.800,00	0	277.849.900,00	0	88%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	2	0	67%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	0	78.076.460,00	0	59.246.623,00	0	76%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	0	111.960.689,00	0	75.926.000,00	0	68%	DINAS PEMBERDAYAAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8.580.000,00	6	3.030.000,00	50%	35%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket/LS	0	108.570.000,00	0	49.395.000,00	0	45%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	201.409.500,00	0	101.602.580,00	0	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	31.950.000,00	1	24.941.700,00	100%	78%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	1.08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	24	2.094.490.141,00	0	824.852.833,00	0%	39%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	1.08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	664.908.795,00	0	266.081.858,00	0	40%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	1.08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Paket/LS	0	1.429.581.346,00	0	558.770.975,00	0	39%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	7	1.049.779.336,00	0	587.176.932,00	0%	56%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket/LS	0	224.760.640,00	0	81.868.105,00	0	36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	0	4	0	57%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	0	4	0	67%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Paket/LS	0	77.308.400,00	0	32.875.000,00	0	43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	0	5	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Paket/LS	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket/LS	0	665.500.296,00	0	404.033.827,00	0	61%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket/LS	0	82.210.000,00	0	68.400.000,00	0	83%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Produk Kehumasan yang terverifikasi	persen	100	143.382.200,00	0	40.530.000,00	0%	28%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah hasil olah konten dokumentasi Kegiatan Kepala Dinas	Paket	0	143.382.200,00	0	40.530.000,00	0	28%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah Responsif Gender	%	79	1.519.803.000,00	52,63	656.945.574,00	67%	43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase ARG Jawa Timur	%	50	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Kab/Kota yang melakukan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Capaian Kinerja PUG	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase perempuan yang menjadi anggota partai politik	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabkota yang mempunyai Peraturan perundangan PUG(Perda/Perbup/wali)	kab/kota	30	485.000.000,00	21	209.849.274,00	70%	43%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase kelembagaan PUG	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen PPRG yang telah diverifikasi	Dokumen	62	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan Kab/Kota yang telah dihasilkan	Kab/Kota	0	130.000.000,00	0	107.460.982,00	0	83%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kebijakan PUG Prov yang telah dihasilkan	PD Provinsi	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Fasilitasi Pertemuan dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasin Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG PD Provinsi dan Kab/Kota	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
														ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi sinkronisasi pelaksanaan PUG Kab/Kota	Kab/Kota	0	200.000.000,00	0	76.705.292,00	0	38%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Prov	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah fasilitasi pertemuan dalam rangka pelaksanaan PUG PD Provinsi dan Kab/kota	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kab/Kota	0	80.000.000,00	0	15.108.000,00	0	19%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah PD yang Mendapatkan Pendampingan	OPD	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah pertemuan advokasi pelaksanaan PUG kepada pengambil keputusan pemerintahan dan lembaga diluar pemerintahan	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	55	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga non pemerintahan yang mendapat sosialisasi pelaksanaan PUG	Lembaga	0	75.000.000,00	0	10.575.000,00	0	14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Pertemuan dalam Rangka Sosialisasi dan Pendampingan PPRG Tim Penggerak PUG Kab/Kota se Jatim, Auditor, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	55	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang menjadi anggota parlemen	orang	38	504.803.000,00	7	27.215.000,00	18%	5%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional	orang	38	0	18	0	47%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah perempuan yang memberikan kontribusi pendapatan keluarga	orang	80	0	28	0	35%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan lingkungan	Orang	0	432.795.000,00	0	12.715.000,00	0	3%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah peserta kegiatan pengembangan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikembangkan	Peserta	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, Sosial dan ekonomi	kali	0	72.008.000,00	0	14.500.000,00	0	20%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan kebijakan dalam politik hukum sosial budaya	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi perempuan bidang politik, sosial dan budaya	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan kebijakan dalam ekonomi dan lingkungan	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan partisipasi perempuan bidang ekonomi dan lingkungan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN				

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
										PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah senat mahasiswa perempuan yang memahami peran perempuan di bidang politik	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan SDM bagi anggota forum puspa Kab/Kota	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan partisipasi perempuan di bidang Ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan peningkatan partisipasi perempuan bidang ekonomi dan lingkungan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah aplikasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikembangkan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuptaen/Kota	Organisasi	25	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta penguatan dan pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan	orang	100	530.000.000,00	80	419.881.300,00	80%	79%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Kader Politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Brosur, leaflet, buku, banner Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Buah	0	530.000.000,00	0	419.881.300,00	0	79%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah PD dan Kab/Kota yang mendapatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Dokumen Juknis PUSPA	Buku	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Brosur/Leaflet tentang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan	Buku	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Dokumen Buku Panduan SEKOPEP	Buku	0	0	0	0	0	0	ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Buku saku pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Buku	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Buku kumpulan peraturan tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Buku	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan perempuan	kebijakan	1	1.619.125.027,00	1	911.387.586,00	100%	56%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Rasio KDRT	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penanganan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan para pihak penyedia layanan	dokumen	1	396.017.220,00	0	206.113.749,00	0%	52%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan dan TPPO terhadap perempuan	Orang	0	101.790.500,00	0	34.247.445,00	0	34%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah peserta kegiatan mekanisme pelaporan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Advokasi kebijakan layanan perlindungan perempuan	Orang	0	294.226.720,00	0	171.866.304,00	0	58%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8				
1		2		3		4		5		6		7		8	
		Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	55	0	31	0	56%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang tertangani	layanan	50	1.022.307.807,00	50	509.763.837,00	100%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	Orang	0	921.942.807,00	0	465.917.237,00	0	51%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	50	0	50	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kali	0	100.365.000,00	0	43.846.600,00	0	44%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	50	0	50	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	lembaga	15	200.800.000,00	1	195.510.000,00	7%	97%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah PD/Kab/Kota yang mempunyai sarana prasarana layanan perempuan korban kekerasan yang sesuai dengan SOP	PD/Kab kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN					

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan kualitas SDM Penyedia Layanan	Orang	0	25.800.000,00	0	25.800.000,00	0	100%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Terlaksana Koordinasi dan Sosialisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	3	0	3	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kebutuhan spesifik yang tercukupi bagi perempuan	paket	0	175.000.000,00	0	169.710.000,00	0	97%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah pelatihan spesifik perempuan yang terlaksana	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	423	0	423	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kebijakan kualitas keluarga yang dikeluarkan	%	30	1.249.203.000,00	0	238.431.062,00	0%	19%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Capaian indikator kualitas keluarga	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kebijakan kualitas keluarga	kab/kota	6	1.099.203.000,00	0	176.394.780,00	0%	16%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah PD yang melakukan kegiatan PPRG tematik	perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	38	38.236.100,00	38	37.648.700,00	100%	98%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah media sosialisasi yang digunakan untuk KIE KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga	Buah	0	100.754.024,00	0	24.610.000,00	0	24%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah peserta sosialisasi KIE,KG, dan PA	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan advokasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam keluarga	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Dokumen	3	960.212.876,00	3	114.136.080,00	100%	12%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan yang tersedia dan aktif dalam meningkatkan kualitas keluarga	Lembaga	10	130.000.000,00	0	60.273.882,00	0%	46%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	5	50.000.000,00	0	37.026.182,00	0%	74%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	50.000.000,00	0	13.112.200,00	0%	26%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	30.000.000,00	0	10.135.500,00	0%	34%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan yang wilayah kerjanya lintas kab./kota	Layanan	3	20.000.000,00	0	1.762.400,00	0%	9%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	3	20.000.000,00	0	1.762.400,00	0%	9%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memanfaatkan data gender dan anak	%	40	331.726.720,00	0	120.193.637,00	0%	36%	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase kelembagaan daerah yang responsif gender	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah PD yang memasukkan Data Gender dan Anak dalam Aplikasi SIGA	PD	50	331.726.720,00	0	120.193.637,00	0%	36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Perangkat Daerah mempunyai Data Terpilah	perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab/Kota yang mempunyai sistem pencatatan data terpilah gender dan anak	kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah PD yang memiliki data terpilah gender dan anak	PD Provinsi	0	60.667.000,00	0	5.878.000,00	0	10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah buku yang dihasilkan	buku	0	271.059.720,00	0	114.315.637,00	0	42%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah indikator data gender dan anak yang terisi	OPD dan Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100	1.433.222.160,00	100	381.679.540,00	100%	27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang melaksanakan PHA	lembaga	4	500.154.760,00	4	285.681.230,00	100%	57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SK Gugus Tugas KLA dan RAD KLA	kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
														ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA	perangkat daerah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usah yang mendapatkan pendampingan PHA	Lembaga	0	500.154.760,00	0	285.681.230,00	0	57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah fasilitasi kegiatan pada Kluster III dan IV	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	4	0	4	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan PHA	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi pada penilaian verifikasi Lapangan Evaluasi KLA	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta pertemuan koordinasi pendampingan Persiapan verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten/kota	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase lembaga/jejaring yang mendorong Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100	933.067.400,00	100	95.998.310,00	100%	10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Cakupan Kab/Kota yang membentuk Forum Anak	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang	0	933.067.400,00	0	95.998.310,00	0	10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	76	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah peserta yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak	Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Buah	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah peserta Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah peserta pertemuan Forum Anak Daerah se Jawa Timur	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah peserta Bimtek Pelatihan fasilitator Anak Kabupaten/Kota se Jawa Timur	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Jumlah lembaga / jejaring yang aktif/terdaftar	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan dan penguatan yang mendukung perlindungan anak	dokumen	1	1.042.011.489,00	0	515.941.920,00	0%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
					Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	Persen	100	0	100	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang berpartisipasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	PD Provinsi dan kab/kota	58	565.517.060,00	0	228.767.220,00	0%	40%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/Kota yang mendapatkan pendampingan pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak	Kab/Kota	0	164.200.480,00	0	44.020.720,00	0	27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta Advokasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta Advokasi Sistem Perlindungan Anak	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	38	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Orang	0	401.316.580,00	0	184.746.500,00	0	46%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta rapat pembahasan petunjuk teknis perlindungan anak	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta penguatan kapasitas jejaring perlindungan anak	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Jenis Layanan yang Tersedia	%	100	438.544.429,00	100	265.521.600,00	100%	61%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis layanan yang tersedia	Layanan	0	296.969.429,00	0	198.489.600,00	0	67%	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
										PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	Orang	50	0	50	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan	Orang	0	117.135.000,00	0	59.769.000,00	0	51%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Layanan	50	0	50	0	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi terkait KIE anak yang memerlukan perlindungan khusus	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah peserta peningkatan kapasitas Tumbuh Kembang PATBM	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Media Sosial yang dihasilkan	Buah	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jejaring / lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	Jejaring/Lembaga	0	24.440.000,00	0	7.263.000,00	0	30%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	0	2	0	0	40%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Jumlah media sosialisasi yang digunakan dalam Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Buah	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang berpartisipasi untuk perlindungan khusus anak	%	100	37.950.000,00	50	21.653.100,00	50%	57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
					Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak	%	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
														ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah sarpras Kab/Kota yang sudah terdata	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah sarpras yang sudah tersedia (UPT PPA Provinsi)	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM	Orang	0	37.950.000,00	0	21.653.100,00	0	57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah jejaring penyedia layanan anak yang aktif	Jejaring	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kasus Kekerasan Anak	Kasus	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			575	2.203.874.120,00	250,22	1.345.649.210,00	44%	61%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	100	504.244.760,00	98,7	266.026.474,00	99%	53%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Kartu Identitas Anak(KIA)	%	70	0	52,17	0	75%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Pelayanan pendaftaran kependudukan sesuai standar	%	100	445.540.000,00	100	257.566.974,00	100%	58%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu	kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	012	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional	Kab/Kota	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah kab/kota yang mengikuti peningkatan SDM kebijakan pelaksanaan penataan sistim administrasi kependudukan	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	012	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk se Jawa Timur	Kab/Kota	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
		Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
		Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	012	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pendaftaran Penduduk di Jawa Timur	Kab/Kota	0	445.540.000,00	0	257.566.974,00	0	58%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	38	0	38	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	012	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan pendaftaran kependudukan sesuai standar	Persen	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	012	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	012	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk sesuai standar	Kab/Kota	38	58.704.760,00	38	8.459.500,00	100%	14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Bimtek terkait Pendaftaran Penduduk	Kab/Kota	0	58.704.760,00	0	8.459.500,00	0	14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM Pelaksanaan Bidang Pendaftaran Penduduk	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	98	123.940.400,00	98,35	77.378.410,00	100%	62%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persen	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	Persen	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil sesuai standar	Persen	100	65.000.000,00	0	61.428.410,00	0%	95%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
2	012	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa Timur	Kab./Kota	0	65.000.000,00	0	61.428.410,00	0	95%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	38	0	38	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan Pelayanan pencatan Sipil penduduk sesuai standar	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP	Persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi Pencatatan Sipil Kab/Kota	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	100	58.940.400,00	0	15.950.000,00	0%	27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pencatatan Sipil Penduduk sesuai standar	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Kab./Kota	0	58.940.400,00	0	15.950.000,00	0	27%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)	buku DKB	2	543.888.000,00	1	426.485.622,00	50%	78%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab./Kota yang Pelayanan Adminduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Penunggalan NIK sesuai Standar	kab/kota	38	387.228.000,00	38	312.142.750,00	100%	81%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sestim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	Orang	0	168.700.000,00	0	108.464.750,00	0	64%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sestim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota	Orang	38	218.528.000,00	0	203.678.000,00	0%	93%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tersedianya Database Perorangan dapat dimanfaatkan OPD/Lembaga Masyarakat berbadan hukum yang telah mendapat Hak Akses pemanfaatan Data Kependudukan	database	1	80.000.000,00	0	46.407.872,00	0%	58%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab./Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB	kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletik kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab./Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletin kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Buku	0	30.000.000,00	0	635.000,00	0	2%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan	Edisi	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD, Lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah yang memanfaatkan Data Kependudukan	OPD/Lembaga	0	50.000.000,00	0	45.772.872,00	0	92%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah dokumen hasil koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan dgn OPD, Lembaga dan Lembaga Non Pemerintah	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data	kali	38	76.660.000,00	0	67.935.000,00	0%	89%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
2	012	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh pusat	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah Terkonsolidasi oleh Pusat	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta Peningkatan SDM Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan kab./kota	Orang	0	76.660.000,00	0	67.935.000,00	0	89%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah sumber daya manusia mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Orang	38	0	38	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim	PKS	5	155.735.000,00	0	77.597.000,00	0%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan Provinsi Jatim yg valid dan update	buku	1	155.735.000,00	0	77.597.000,00	0%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah data registrasi dari Kab/Kota	Data	0	44.253.000,00	0	5.115.000,00	0	12%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah dokumen penyediaan data kependudukan provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	012	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun	Buku	0	111.482.000,00	0	72.482.000,00	0	65%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Profil yang telah diinventarisir dari Kab/Kota	Buku	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah dokumen penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			183,5	2.461.859.440,00	0	1.573.615.106,00	0%	64%	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan 5 pilar dalam GDPK	%	32	330.929.720,00	0	118.682.853,00	0%	36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Kab/Kota yang sudah Melaksanakan Program Pengendalian Penduduk	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang telah menyusun 5 Pilar dalam GDPK	kab/kota	12	330.929.720,00	0	118.682.853,00	0%	36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Kab/Kota yang sudah Mengikuti Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi	kab/kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	02	1.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Jumlah peserta yang mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Montoring dan Evaluasi (Monev) Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program KKBP	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Pengembangan Program KKBP	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Kab/Kota	0	330.929.720,00	0	118.682.853,00	0	36%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi tentang Sekolah Siaga kependudukan (SSK)	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat								ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase jumlah kesertaan KB aktif (CPR)	%	66,5	100.000.000,00	0	1.000.000,00	0%	1%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan desain program berbasis kearifan lokal	kab/kota	38	100.000.000,00	0	1.000.000,00	0%	1%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Peserta yang mengikuti Orientasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja di Pondok Pesantren	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kab/kota yang mendapatkan media promosi	Kab/Kota	0	100.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah peserta yang memahami materi dan sarana promosi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal yang tersedia	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	03	1.01	04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan KIE program KKBPK	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah lembaga yang dibina/mendapatkan penguatan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Mitra Organisasi Kemasyarakatan di Jawa Timur yang telah mendapatkan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	%	85	800.000.000,00	0	667.124.700,00	0%	83%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Kab/Kota yang CPR nya lebih besar sama dengan 80 %	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	014	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pengelolaan desain program pembangunan keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	buah	1	133.800.000,00	0	66.359.600,00	0%	50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Persentase Kab/Kota yang BKB dan BKR nya telah terintegrasi dengan Perlindungan Anak	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.01	01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kebijakan Daerah bagi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang Tersedia	Kebijakan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.01	03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra organisasi , Kemasyarakatan kader yang dibina ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.01	04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kader remaja yang dibina tentang keluarga Berencana	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.01	05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Kader yang dibina tentang akses dan kualitas ketahanan keluarga dan ketahanan remaja	Kader	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling yang meningkat kapasitasnya	Orang	0	66.900.000,00	0	65.354.600,00	0	98%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi	38	0	38	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.01	014	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Mitra organisasi kemasyarakatan kader yang ter Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Orang	0	66.900.000,00	0	1.005.000,00	0	2%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	014	04	1.02								
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah mitra kerja aktif di tingkat provinsi yg diberdayakan di bidang KS	kelompok/organisasi/kader	76	666.200.000,00	76	600.765.100,00	100%	90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	014	04	1.02	03							
		Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKS yang mendapatkan sosialisasi dan promosi tentang Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Kelompok/Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	014	04	1.02	04							
		Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra Organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Orang	0	666.200.000,00	0	600.765.100,00	0	90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
		Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Dokumen	2	0	2	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	
2	09										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.033,75	862.544.807.096,00	144,13	369.423.740.089,00	14%	43%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	0	183.742.372.135,00	0	79.059.278.208,00	0	43%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase realisasi anggaran	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Indeks profesionalitas ASN	%	80	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,75	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	%	95	800.000.000,00	20	417.226.790,00	21%	52%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	01							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	374.300.000,00	2	221.148.240,00	50%	59%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	02							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.040.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	03							
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.040.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	04							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.040.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	05							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.040.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	06							
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.040.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.01	07							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	400.500.000,00	0	196.078.550,00	0	49%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1				2				3		4		5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
		Monitoring dan Evaluasi Kab / Kota (Pertemuan FGD, dan Observasi Lokasi)	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	0	2	0	67%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
2	09	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi anggaran	%	90	177.015.929.616,00	38	75.640.412.654,00	42%	43%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	0	164.334.188.000,00	0	69.898.760.576,00	0	43%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1.000,00	0	1.848,00	0	185%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	0	12.081.741.616,00	0	5.618.080.653,00	0	47%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan PTT	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Bulan	OB	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	100.000.000,00	0	27.100.850,00	0	27%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	100.000.000,00	0	31.076.425,00	0	31%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	100.000.000,00	0	22.507.900,00	0	23%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	100.000.000,00	0	15.558.750,00	0%	16%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	100.000.000,00	0	26.367.500,00	0	26%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	0	4	0	22%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	100.000.000,00	0	960.000,00	0%	1%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	12	15.030.000,00	6	9.717.650,00	50%	65%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	4	2.010.000,00	2	1.005.000,00	50%	50%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	1	4.020.000,00	0	1.005.000,00	0%	25%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	2	2.010.000,00	1	1.005.000,00	50%	50%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	12	6.990.000,00	6	6.702.650,00	50%	96%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pelaporan	Dokumen	12	20.220.000,00	6	11.015.000,00	50%	54%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	12	8.735.000,00	6	8.315.000,00	50%	95%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	1	5.150.000,00	0	900.000,00	0%	17%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	12	4.660.000,00	6	1.800.000,00	50%	39%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pelaporan	Orang	1	1.675.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	12	855.442.831,00	6	504.283.231,00	50%	59%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	47.860.100,00	0	30.889.920,00	0	65%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Tercapainya pelaksanaan kegiatan	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	0	20%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	2	0	40%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	1	0	20%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	2	0	40%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	301.128.338,00	0	197.126.280,00	0	65%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	2	0	33%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	1	0	17%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	4	0	67%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	0	2	0	33%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	18.989.200,00	0	12.269.000,00	0	65%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	0	2	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	53.944.000,00	0	16.059.231,00	0	30%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	0	20.403.309,00	0	11.885.000,00	0	58%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	0	2	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	10.590.284,00	0	2.935.000,00	0	28%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1.499.600,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	384.807.000,00	0	216.968.300,00	0	56%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN				
2	09	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	9.150.000,00	0	99%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	Paket	0	7.071.000,00	0	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah persentase pembelian barang	%	100	23.402.500,00	55	23.171.250,00	55%	99%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	18.065.500,00	0	17.843.250,00	0	99%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Jumlah peralatan dan mesin	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	0	21	0	91%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	5.337.000,00	0	5.328.000,00	0	100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Jasa	Bulan	12	4.293.351.513,00	6	2.097.551.501,00	50%	49%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	9.000.000,00	6	6.908.000,00	0	77%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Pelayanan jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%																															
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	1.612.465.850,00	0	740.072.238,00	0	46%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Penyediaan Jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah penyediaan jasa	bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	Paket	0	88.307.300,00	0	75.226.800,00	0	85%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Pelayanan jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	10	0	0	83%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Bulan	0	2.583.578.363,00	0	1.275.344.463,00	0	49%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Pelayanan jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Penyediaan Jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	5	0	0	42%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%																											
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
2	1.09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang	Bulan	12	718.995.675,00	6	355.900.132,00	50%	49%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	1.09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	351.423.340,00	0	186.332.482,00	0	53%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Jasa	paket/jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Jasa	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	0	3	0	18%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	0	7	0	41%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	17	0	5	0	29%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	1.09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan	Bulan	0	272.673.100,00	0	122.241.800,00	0	45%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	0	2	0	18%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	0	3	0	27%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	1.09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	12	84.536.500,00	4	47.325.850,00	33%	56%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Peralatan & Mesin	Mesin	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah peralatan dan mesin	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	1.09	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.362.735,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	90	3.203.000.000,00	23	882.989.305,00	26%	28%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah prognosa pangan dan harga	Dokumen	13	2.325.000.000,00	4	624.644.770,00	31%	27%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Neraca Bahan Makanan	Dokumen	0	75.000.000,00	0	38.766.500,00	0	52%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah informasi Harga Pangan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	13	0	7	0	54%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari	Kali	0	1.750.000.000,00	0	133.876.010,00	0	8%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah kelompok pekarangan pangan lestari yang terfasilitasi	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
						Jumlah kelompok usaha olahan pangan lokal	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	12	0	1	0	8%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Gelar Pangan Murah Berkualitas	Kali	0	500.000.000,00	0	452.002.260,00	0	90%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Koordinasi/sinkronisasi Pemantauan Harga Pangan Tingkat Produsen, Pedagang Eceran dan Grosir	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok dan Pasokan	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	12	0	14	0	117%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah cadangan pangan provinsi	ton	200	53.000.000,00	65	20.591.150,00	33%	39%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Kali	0	25.000.000,00	0	20.591.150,00	0	82%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang terfasilitas	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Analisa Ketersediaan Pangan	Dokumen	0	25.000.000,00	0	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Kali	0	3.000.000,00	0	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan UMKM yang terfasilitasi	Kali	4	825.000.000,00	1	237.753.385,00	25%	29%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal	Kali	0	700.000.000,00	0	181.517.735,00	0	26%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kali	0	100.000.000,00	0	56.235.650,00	0	56%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per tahun	Kali	0	25.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah analisa pola konsumsi pangan berbasis Skor PPH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan daerah rawan pangan	%	0	60.000.000,00	0	6.355.000,00	0	11%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Penanganan Daerah rentan rawan pangan	Kelompok	20	0	2	0	10%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	Dokumen	0	30.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah Apresiasi Analisa Peta FSVA	Kab/kota	38	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Analisis Peta FSVA Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	0	30.000.000,00	0	0	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Jumlah kabupaten / kota yang menyusun peta kerawanan pangan	Kab/Kota	0	0	0	0	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi yang dimutakhirkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi	Desa	5	30.000.000,00	1	6.355.000,00	20%	21%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Kali	0	25.000.000,00	0	6.355.000,00	0	25%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Lokasi	0	5.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Tersertifikasi/Terdaftar (%)	%	5	355.085.000,00	2	180.587.800,00	40%	51%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar	Bulan	12	355.085.000,00	6	180.587.800,00	50%	51%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Prima 2/3	Nomor	0	189.210.000,00	0	114.407.800,00	0	60%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Sertifikasi Prima	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Sertifikasi Health Certificate	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Registrasi (dokumen) Pangan segar asal tumbuhan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Registrasi (Dokumen) Registrasi Packing House	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	232	0	184	0	79%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengawasan	Lokasi	0	115.875.000,00	0	51.860.000,00	0	45%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	86	0	50	0	58%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	lokasi	0	50.000.000,00	0	14.320.000,00	0	29%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Pengawasan mutu dan keamanan pangan	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	0	4	0	33%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			286.881,62	741.505.008.532,00	1	203.659.294.096,00	0%	27%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan	%	2	2.737.858.000,00	0	927.575.544,00	0%	34%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Persentase Peningkatan produksi hortikultura	%	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Persentase Peningkatan indeks pertanaman	%	0,01	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
3	027	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana alsintan	Unit	55	2.269.926.000,00	17	745.753.966,00	31%	33%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Penyaluran pupuk bersubsidi	%	0	2.269.926.000,00	0	745.753.966,00	0	33%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah hibah alsintan pra panen	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah sarana pertanian cooperative farming	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Hibah Pasca Panen Tanaman Pangan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah hibah Pasca Panen Tanaman Hortikultura	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Fasilitasi Pembiayaan, AUDP, pelaku usaha dan analisa usaha tani	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	0	2	0	17%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Peningkatan Benih bersertifikat	%	0	467.932.000,00	0	181.821.578,00	0	39%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Benih Tersertifikasi Tanaman Hortikultura	Kg	0	185.000.000,00	0	87.790.110,00	0	47%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah penerbitan sertifikasi benih hortikultura	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah pengawasan benih hortikultura (Pelabelan Ulang)	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dokumen Pengawasan / Pengecekan Mutu Benih Hortikultura yang beredar	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih Tersertifikasi Tanaman Pangan	Ton	0	282.932.000,00	0	94.031.468,00	0	33%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah penerbitan sertifikasi benih Tanaman Pangan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah pengawasan benih Tanaman Pangan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dokumen Pengawasan / Pengecekan Mutu Benih Tanaman Pangan yang beredar	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan	%	2	18.950.708.000,00	0	2.489.736.051,00	0%	13%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Persentase Peningkatan produksi hortikultura	%	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Persentase Peningkatan indeks pertanaman	%	0,01	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Produksi Kebun Agribisnis	Kg	145.015,00	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Kawasan	Ha	679	18.950.708.000,00	139	2.489.736.051,00	20%	13%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Prasarana	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	027	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	kawasan aneka kacang dan Umbi	Ha	0	3.600.604.000,00	0	927.598.600,00	0	26%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Prasarana Kawasan Agropolitan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Prasarana Kawasan Anti Poverti Program	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Kawasan Serealia	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Kawasan Buah dan tanaman hias	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Kawasan Sayur dan Tanaman Obat	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	12	0	3	0	25%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah terbinaanya pendayagunaan lahan dan air di kabupaten/kota	Kab/Kota	0	300.000.000,00	0	146.831.400,00	0	49%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	03	1.01	010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	15.050.104.000,00	0	1.415.306.051,00	0%	9%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT dan DPI	%	0	9.903.816.700,00	0	323.675.585,00	0	3%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Pangan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman Hortikultura	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI Tanaman Hortikultura	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Serangan OPT Tanaman Pangan	%	0	9.903.816.700,00	0	323.675.585,00	0	3%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dampak Perubahan iklim Tanaman Pangan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Serangan OPT Hortikultura	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Dampak Perubahan Iklim Hortikultura	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Prosentase penurunan potensi kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI	&	2,5	0	0	0	0%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	027	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan Ketrampilan Petani dalam Pengendalian OPT (Petani Pengamat)	orang	0	493.384.700,00	0	209.850.085,00	0	43%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah laporan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dokumen)	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah lokasi menerapkan Manajemen Tanaman Sehat (Unit)	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah Petani Penerap MTS	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah Klinik Tanaman	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Peningkatan Kelembagaan PPAH	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah Pengujian mutu dan residu pestisida	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1.214.909,00	0	614.909,00	0	51%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
3	027	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	orang	0	9.410.432.000,00	0	113.825.500,00	0	1%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah kelompok penerima bantuan	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1.214.909,00	0	314.909,00	0	26%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
3	027	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Petani melalui Penyuluhan	%	2	1.582.772.165,00	1	1.064.113.984,00	50%	67%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
3	027	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi / dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM	Orang	360	30.000.000,00	360	29.838.000,00	100%	99%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
3	027	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pelaksanaan Bimtek Penyuluhan Pertanian	kali	0	30.000.000,00	0	29.838.000,00	0	99%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Penyuluh ASN yang mengikuti bimtek pengembangan kompetensi penyuluh pertanian	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	0	80	0	100%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
3	027	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani dan Petugas Lapang Teredukasi Agribisnis	Orang / petani	0	1.552.772.165,00	0	1.034.275.984,00	0	67%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang difasilitasi /dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM	Orang	80	0	40	0	50%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
3	027	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kreasi Inovasi Teknologi Pertanian (KRENOTEK TANI)	Kali	0	1.552.772.165,00	0	1.034.275.984,00	0	67%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																									
					Jumlah Petani dan Petugas yang tereduksi Agribisnis	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah kurikulum peningkatan kompetensi SDM Pertanian	Kurikulum	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kelompok serta koordinasi program penyuluhan	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah penyuluh swadaya yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas penyuluh	Penyuluh	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah penyuluh yang mengikuti workshop informasi teknologi dan manajemen dalam mendukung kostratani	Penyuluh	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah penyuluh yang mengikuti diseminasi informasi, teknis dan inovasi pertanian	Penyuluh	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah KEP yang Fasilitasi	KEP	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah pendampingan dalam pembentukan KEP	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
					Jumlah kelompok tani SL yang difasilitasi	Keltan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8	
1		2		3		4						
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	12	0	5	0	42%	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	27.609.796.859,00	0	12.117.791.928,00	0%	44%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
				Persentase realisasi anggaran	%	100	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
				Indeks profesionalitas ASN	%	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	17.204.419.919,00	0	7.486.654.213,00	0	44%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	16.033.283.919,00	0	43%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan pelaksanaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	1.171.136.000,00	0	47%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian	Laporan	1	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pelayanan administrasi kepegawaian	laporan	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi	Bulan	12	245.165.936,00	0	99%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga untuk operasional kantor	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	0	245.165.936,00	0	99%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah persentase pembelian barang	%	100	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(indikator kosong)		0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(indikator kosong)		0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa	Bulan	12	1.010.736.004,00	0	49%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk operasional	laporan	0	611.316.004,00	0	51%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum untuk mencukupi kebutuhan operasional kantor	laporan	0	399.420.000,00	0	46%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	1.09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang	Bulan	12	72.750.000,00	0	33%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	1.09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	1.09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	laporan	0	72.750.000,00	0	24.173.020,00	0	33%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	1.09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	1.09	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor/bangunan lainnya	laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan jasa	Bulan	12	9.076.725.000,00	0	3.872.310.450,00	0%	43%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah produksi benih	kg	0	9.076.725.000,00	0	3.872.310.450,00	0	43%	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
3	027	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi benih tanaman pangan	%	2,7	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
3	027	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
3	027	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih tersertifikasi tanaman pangan	kg	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	7.598.641.000,00	0	3.308.925.480,00	0%	44%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Persentase realisasi anggaran	%	93	0	44,11	0	47%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Indeks profesionalitas ASN	%	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	4	1.000.000,00	2	165.000,00	50%	17%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	0	1.000.000,00	0	165.000,00	0	17%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Bulan	12	6.898.564.800,00	6	2.976.484.882,00	50%	43%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	6.454.641.000,00	0	2.769.245.082,00	0	43%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	0	33	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	0	443.923.800,00	0	207.239.800,00	0	47%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	5	119.504.650,00	3	82.403.155,00	60%	69%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	2.765.000,00	0	2.741.700,00	0	99%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	1.986.000,00	0	1.953.500,00	0	98%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	19.745.500,00	0	19.515.805,00	0	99%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	3.355.000,00	0	43%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	0	91.653.150,00	0	62%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	208.019.350,00	6	50%	47%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	0	124.019.350,00	0	45%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	0	84.000.000,00	0	50%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	1.09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	2	27.552.200,00	1	50%	70%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
2	1.09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	paket	0	23.900.000,00	0	76%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	1	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	1.09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	3.652.200,00	0	33%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	0	6	0	60%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	1.09	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	paket	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
2	09	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan jumlah benih hortikultura bersertifikat terjual	%	2	344.000.000,00	0	39%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
2	09	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat terinformasi teknologi budidaya	Orang	100	344.000.000,00	50	50%	39%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
		Jumlah benih varietas unggul sayur bersertifikat terjual	Kg	13.350,00	0	12.000,00	0	90%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual	Batang	43.100,00	0	13.547,00	0	31%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA				
		Jumlah benih varietas unggul florikultura bersertifikat terjual	Batang	2.050,00	0	894	0	44%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA				
		Jumlah benih varietas unggul Biofarmaka bersertifikat terjual	Kg	3.050,00	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA				
		Jumlah stakeholder terakses informasi benih unggul varietas baru	Orang	5	0	3	0	60%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA				
		Jumlah Diversifikasi Usaha	Jenis	3	0	3	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA				
3	027	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hortikultura	%	1	700.000.000,00	0	334.714.534,00	0%	48%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	027	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Benih Hortikultura	%	2	700.000.000,00	0	334.714.534,00	0%	48%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	027	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi benih buah	Batang	0	700.000.000,00	0	334.714.534,00	0	48%	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
					Jumlah Produksi Benih Sayur	Kg	35.000,00	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi Benih Florikultura	Batang	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi Benih Biofarmaka	Kg	0	0	0	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
2	09	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	6.090.639.993,00	36,51	1.943.395.976,00	37%	32%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
					Persentase realisasi anggaran	%	93	0	36,51	0	39%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
					Indeks profesionalitas ASN	%	80	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2	09	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.418.000,00	2	150.000,00	67%	11%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah UPT Pengembangan Agribisnis TPH	Dokumen	3	1.418.000,00	2	150.000,00	67%	11%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	2	0	67%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2	09	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Bulan	12	3.765.766.000,00	6	1.306.009.691,00	50%	35%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	3.652.822.000,00	0	1.257.631.691,00	0%	34%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
					Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	0	17	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	0	112.944.000,00	0	48.378.000,00	0	43%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian UPT Pengembangan Agribisnis TPH (BLUD)	Bulan	12	12.600.000,00	0	0	0%	0%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	12	0	6	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian	Paket	0	12.600.000,00	0	0	0%	0%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi UPT Pengembangan Agribisnis TPH (BLUD)	Bulan	12	68.744.965,00	0	33.618.513,00	0%	49%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	4	0	2	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	7.784.000,00	0	6.239.410,00	0	80%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	11.267.600,00	0	4.905.278,00	0	44%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	2.266.450,00	0	1.169.925,00	0	52%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Paket Barang dan Cetak yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	7.275.000,00	0	3.637.500,00	0	50%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	40.151.915,00	0	17.666.400,00	0	44%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	0	5	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.242.806.628,00	6	579.127.422,00	50%	47%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	284.709.750,00	0	120.904.554,00	0	42%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS				

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8																	
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	958.096.878,00	0	458.222.868,00	0	48%	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Di Sediakan	Laporan	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
2	1.09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang UPT Pengembangan Agribisnis TPH (BLUD)	Bulan	0	70.201.900,00	0	10.490.350,00	0	15%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	Unit	2	0	1	0	50%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
2	1.09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	20.201.900,00	0	10.490.350,00	0	52%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Yang Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	2	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
2	1.09	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di pelihara	Paket	1	50.000.000,00	0	0	0%	0%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di Rehabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
2	09	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Jumlah PAD	%	5	929.102.500,00	0	14.000.000,00	0%	2%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
2	09	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	masyarakat yang dilayani sesuai dengan SOP	orang	4.600,00	929.102.500,00	2.020,00	14.000.000,00	44%	2%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pununjang Pelayanan	Unit	1	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
3	027	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Kebun Agribisnis Tanaman Pangan	Kg	62.000,00	991.284.507,00	0	890.795.213,00	0%	90%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Produksi Kebun Agribisnis Tanaman Hortikultura buah-buahan	Kg	30.000,00	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Produksi Kebun Agribisnis Tanaman Hortikultura sayuran	Kg	48.599,00	0	0	0	0%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
3	027	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di UPT Pengembangan Agribisnis TPH	Kg	62.912,00	991.284.507,00	37.989,00	890.795.213,00	60%	90%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di UPT Pengembangan Agribisnis TPH	Kg	78.599,00	0	36.753,00	0	47%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Komoditas Bersertifikat	Unit	3	0	3	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
3	027	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah stakeholder terfasilitasi edukasi teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura (sertifikat)	Orang	150	991.284.507,00	60	890.795.213,00	40%	90%	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	
						Jumlah Analisa sampel tanah dan hasil kultur jaringan	Unit	0	0	518	0	0	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
										Jumlah Produk olahan	Jenis	3	0	3	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
										Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA								
2	011				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							850,1	127.931.518.500,00	417,41	52.481.127.672,00	49%	41%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Persentase Indikator Program yang Tercapai.	%	95	34.052.864.000,00	0	14.616.920.263,00	0%	43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Persentase Realisasi Anggaran.	%	97	0	53,19	0	55%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Indeks Profesionalitas ASN.	%	79	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah.	dokumen	8	475.000.000,00	4	139.450.722,00	50%	29%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah.	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan daerah	Dokumen	8	206.100.000,00	4	49.169.497,00	50%	24%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	10.000.000,00	0	3.810.000,00	0	38%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	9.200.000,00	0	200.000,00	0	2%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	9.000.000,00	0	1.000.000,00	0	11%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	7.700.000,00	0	800.000,00	0	10%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	145.000.000,00	0	62.914.725,00	0	43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	6	0	120%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	88.000.000,00	0	21.556.500,00	0	24%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	3	0	75%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.	laporan	12	29.780.206.000,00	6	12.818.635.019,00	50%	43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan (laporan keuangan bulanan)	Laporan	0	28.949.920.000,00	0	12.553.580.431,00	0	43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1.380,00	0	690	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	662.016.000,00	0	227.344.200,00	0	34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	Laporan	0	50.000.000,00	0	23.671.100,00	0	47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	20.000.000,00	0	1.700.000,00	0	9%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	48.270.000,00	0	3.015.788,00	0	6%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	011	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	15.000.000,00	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
										Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	011	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	25.000.000,00	0	9.323.500,00	0	37%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	10.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	dokumen	1	16.459.500,00	0	8.890.000,00	0%	54%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan	0	16.459.500,00	0	8.890.000,00	0	54%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	dokumen	12	1.325.367.490,00	6	652.794.411,00	50%	49%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	Paket	0	1.274.855.690,00	0	625.694.811,00	0	49%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	4	0	1	0	25%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket/Set	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Kegiatan	0	13.315.800,00	0	6.749.600,00	0	51%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Kegiatan	0	37.196.000,00	0	20.350.000,00	0	55%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa.	laporan	5	152.152.360,00	0	39.016.201,00	0%	26%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	38.492.360,00	0	9.610.621,00	0	25%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	34.588.000,00	0	3.777.230,00	0	11%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	24.600.000,00	0	4.534.600,00	0	18%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Paket	0	34.472.000,00	0	21.093.750,00	0	61%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana.	laporan	2	48.261.600,00	0	18.264.340,00	0%	38%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Set	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	36.711.600,00	0	18.264.340,00	0	50%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
2	011	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	11.550.000,00	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	laporan	12	1.992.241.370,00	6	849.219.268,00	50%	43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	1.500.000,00	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	555.779.828,00	0	255.591.268,00	0	46%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	10.790.000,00	0	4.558.000,00	0	42%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	1.424.171.542,00	0	589.070.000,00	0	41%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara.	laporan	12	263.175.680,00	6	90.650.302,00	50%	34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	52.111.160,00	0	36.563.465,00	0	70%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	0	5	0	42%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	79.860.000,00	0	27.551.630,00	0	34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	65.157.420,00	0	6.898.650,00	0	11%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	28.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara.	Paket	0	38.047.100,00	0	19.636.557,00	0	52%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun.	dokumen	2	1.235.500.000,00	0	214.307.383,00	0%	17%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.	%	25	247.810.600,00	0	24.226.400,00	0%	10%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Pengendalian Pelaksanaan RPPLH.	%	30	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Kegiatan	0	137.310.600,00	0	20.901.400,00	0	15%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Kegiatan	0	110.500.000,00	0	3.325.000,00	0	3%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase tersusunnya dokumen KLHS .	%	75	987.689.400,00	0	190.080.983,00	0%	19%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Kegiatan	0	60.000.000,00	0	24.817.810,00	0	41%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Kegiatan	0	750.000.000,00	0	103.402.849,00	0	14%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8																	
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kegiatan	0	177.689.400,00	0	61.860.324,00	0	35%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
					Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara.	kabupaten/kota	3	3.744.804.500,00	0	1.562.479.910,00	0%	42%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi (Ha).	hektar	4	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
					Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali (kali).	kali	12	0	6	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
					PAD atau Retribusi Daerah (Milyar).	milyar	1,3	0	0,65	0	50%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air.	titik	65	2.927.117.050,00	72	1.183.547.199,00	111%	40%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah titik pantau kualitas udara.	titik	8	0	64	0	800%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
					Jumlah titik pantau kualitas air laut.	titik	24	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kegiatan	0	730.168.050,00	0	333.773.763,00	0	46%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	143	0	91	0	64%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kegiatan	0	37.130.000,00	0	12.362.500,00	0	33%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah sampel uji kualitas lingkungan	Sampel	0	2.159.819.000,00	0	837.410.936,00	0	39%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	106	0	1.223,00	0	1154%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan.	unit	8	235.304.550,00	0	95.832.106,00	0%	41%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
2	011	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah kegiatan patroli lingkungan dalam upaya peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan pada masyarakat	Kegiatan	0	235.304.550,00	0	95.832.106,00	0	41%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pemantauan sistem penanggulangan sumber pencemar dalam upaya pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penghentian kasus pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kasus	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup .	kegiatan	8	582.382.900,00	2	283.100.605,00	25%	49%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
2	011	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kegiatan	0	30.000.000,00	0	8.520.500,00	0	28%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kegiatan	0	20.000.000,00	0	18.038.075,00	0	90%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kegiatan	0	532.382.900,00	0	256.542.030,00	0	48%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	3	0	3,2	0	107%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
2	011	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI.	kab/kota	15	6.495.000.000,00	0	910.750.511,00	0%	14%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
2	011	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan di kabupaten /kota.	kegiatan	5	6.495.000.000,00	2	910.750.511,00	40%	14%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (DED)	Dokumen	0	4.000.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kegiatan	0	892.732.000,00	0	550.172.704,00	0	62%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	0,4	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	04	1.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kegiatan	0	393.242.000,00	0	193.496.687,00	0	49%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	0,06	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	04	1.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	04	1.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kegiatan	0	1.209.026.000,00	0	167.081.120,00	0	14%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	200	0	395	0	198%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	04	1.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola.	%	63,3	300.000.000,00	116,2	140.496.724,00	184%	47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.	%	100	0	100	0	100%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/ kota yang berhasil dikumpulkan oleh provinsi.	%	60	300.000.000,00	116,2	140.496.724,00	194%	47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	Kegiatan	0	170.000.000,00	0	83.206.524,00	0	49%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	10	0	11	0	110%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kegiatan	0	130.000.000,00	0	57.290.200,00	0	44%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	3	0	25	0	833%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan.	%	16	762.514.500,00	52,49	318.136.279,00	328%	42%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan.	%	65	762.514.500,00	0	318.136.279,00	0%	42%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan	0	165.014.500,00	0	37.597.500,00	0	23%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	65	0	87	0	134%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kegiatan	0	55.500.000,00	0	35.879.701,00	0	65%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	7	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Usaha/Kegiatan	0	510.000.000,00	0	226.692.425,00	0	44%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	150	0	196	0	131%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kegiatan	0	32.000.000,00	0	17.966.653,00	0	56%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
2	011	07			100	39.500.000,00	0	0	0%	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	011	07	1.01	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui.	%							
2	011	07	1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	MHA	1	14.500.000,00	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	011	07	1.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Kegiatan	0	14.500.000,00	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	1	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	011	07	1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.	kegiatan	4	25.000.000,00	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	011	07	1.02	01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan untuk Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kegiatan	0	25.000.000,00	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	011	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup.	%	55	371.194.000,00	0	82.515.923,00	0%	22%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	08	1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.	kegiatan	6	371.194.000,00	2	82.515.923,00	33%	22%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	08	1.01	01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan	0	115.000.000,00	0	34.516.950,00	0	30%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	4	0	4	0	100%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	08	1.01	02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kegiatan	0	216.194.000,00	0	46.776.973,00	0	22%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	08	1.01	03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	0	40.000.000,00	0	1.222.000,00	0	3%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	90	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.	%	11	270.000.000,00	0	98.792.547,00	0%	37%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	09	1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.	penghargaan	146	270.000.000,00	1.370,00	98.792.547,00	938%	37%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	09	1.01	01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kali	0	270.000.000,00	0	98.792.547,00	0	37%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	146	0	1.370,00	0	938%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	010		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan.	%	100	370.000.000,00	88,88	201.453.851,00	89%	54%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	010	1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan.	pengaduan	40	370.000.000,00	16	201.453.851,00	40%	54%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	010	1.01	01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Pengaduan	0	185.000.000,00	0	105.314.983,00	0	57%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	40	0	18	0	45%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	010	1.01	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Kegiatan	0	185.000.000,00	0	96.138.868,00	0	52%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	20	0	17	0	85%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola.	%	96,5	650.000.000,00	0	273.497.301,00	0%	42%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Sampah padat yang dikelola.	%	99	650.000.000,00	0	273.497.301,00	0%	42%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
2	011	011	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan dan teknis penanganan sampah yang disusun	Dokumen	0	134.000.000,00	0	65.487.317,00	0	49%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase Pemrosesan Akhir di TPA/TPST	%	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST	%	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Kegiatan	0	26.000.000,00	0	3.471.000,00	0	13%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kegiatan	0	211.000.000,00	0	74.601.100,00	0	35%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan koordinasi Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	011	011	1.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang disediakan	Unit	0	279.000.000,00	0	129.937.884,00	0	47%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	013				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			322,48	127.316.267.478,00	0	57.371.481.383,00	0%	45%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	85	24.323.397.104,00	0	10.738.407.700,00	0%	44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase realisasi anggaran	%	95	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Indeks profesionalitas ASN	%	70	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	dokumen	6	500.000.000,00	1	152.368.038,00	17%	30%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	322.500.000,00	1	141.469.119,00	33%	44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	5.000.000,00	0	2.030.000,00	0	41%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	2.010.000,00	0%	40%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	1.500.000,00	0	1.465.600,00	0	98%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	1.500.000,00	0	400.000,00	0	27%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	013	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	76.200.000,00	0	2.587.500,00	0	3%	MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	88.300.000,00	0	2.405.819,00	0	3%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	19.194.563.381,00	6	8.258.056.610,00	50%	43%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	18.195.565.000,00	0	7.862.041.061,00	0	43%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	75	0	146	0	195%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	768.998.381,00	0	376.805.849,00	0	49%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	43.000.000,00	0	8.333.500,00	0	19%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Laporan	0	37.000.000,00	0	6.066.700,00	0	16%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Laporan	0	58.000.000,00	0	1.613.500,00	0	3%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	64.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	0	5	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	28.000.000,00	0	3.196.000,00	0	11%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
2	013	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	5	2.553.537.637,00	1	1.112.741.542,00	20%	44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	2.553.537.637,00	0	1.112.741.542,00	0	44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	0	1	0	25%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum	paket	1	379.139.086,00	1	242.272.129,00	100%	64%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	0	35.000.000,00	0	20.136.510,00	0	58%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	0	38.542.688,00	0	26.823.210,00	0	70%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Paket	0	75.000.000,00	0	34.763.259,00	0	46%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Paket	0	106.470.398,00	0	86.988.750,00	0	82%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	Paket	0	119.126.000,00	0	73.560.400,00	0	62%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	5.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
								5		6				
2	013	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	1	1.379.807.000,00	1	714.657.844,00	100%	52%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	804.000.000,00	0	357.044.336,00	0	44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Paket	0	575.807.000,00	0	357.613.508,00	0	62%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	paket	1	316.350.000,00	1	258.311.537,00	100%	82%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Paket	0	247.080.000,00	0	190.681.237,00	0	77%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	0	6	0	60%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	2	69.270.000,00	2	67.630.300,00	100%	98%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
2	013	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim	%	0	1.143.781.500,00	0	391.245.116,00	0	34%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa	%	13,33	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	lembaga	0	1.143.781.500,00	0	391.245.116,00	0	34%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	desa	2	0	1	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten / Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Desa	2	1.143.781.500,00	1	391.245.116,00	50%	34%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	02	1.01	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan tertib administrasi sesuai perundang - undangan	Desa	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	03			PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA	Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim	%	0	983.007.500,00	0	486.076.076,00	0	49%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase peningkatan kerjasama desa	%	14,29	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah desa yang dikerjasamakan	desa	0	983.007.500,00	0	486.076.076,00	0	49%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah kawasan perdesaan	kawasan	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	kerjasama	2	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	Kerjasama	0	643.250.000,00	0	356.706.223,00	0	55%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kerjasama antar desa	Kerjasama	0	339.757.500,00	0	129.369.853,00	0	38%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa cepat berkembang di Jatim	%	25	15.342.670.522,00	0	7.048.628.316,00	0%	46%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	%	7	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	desa	1	15.342.670.522,00	0	7.048.628.316,00	0%	46%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	desa	400	0	310	0	78%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	orang	400	0	375	0	94%	0	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1				5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
										MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah KPM yang memiliki usaha	KPM	6.600,00	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatin	BUM Desa	3.222,00	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pembinaan	aparatur	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	desa	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	desa	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	KPM	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	BUM Desa	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	013	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa	Desa	0	165.000.000,00	0	64.632.620,00	0	39%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center	Desa	0	300.000.000,00	0	40.245.178,00	0	13%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	700	0	1.230,00	0	176%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	013	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	300	1.150.000.000,00	325	673.677.840,00	108%	59%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	Desa	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	Desa	0	928.463.261,00	0	301.950.858,00	0	33%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	300	0	125	0	42%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	013	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	0	1.000.000.000,00	0	441.320.443,00	0	44%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2.350,00	0	6.267,00	0	267%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	013	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry / update profil desa/kelurahan	Desa/Kelurahan	0	125.000.000,00	0	44.529.257,00	0	36%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	3.500,00	0	3.616,00	0	103%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
2	013	04	1.01	010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih	Aparatur	0	897.071.761,00	0	459.467.886,00	0	51%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	400	0	296	0	74%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04	1.01	011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang dilatih	Orang	0	606.391.500,00	0	162.225.061,00	0	27%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	400	0	460	0	115%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04	1.01	013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya	Desa	0	5.495.754.000,00	0	2.556.678.785,00	0	47%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	KPM	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	04	1.01	015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan	BUM Desa	0	4.674.990.000,00	0	2.303.900.388,00	0	49%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	%	3,86	6.469.052.374,00	0	3.101.453.089,00	0%	48%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase produk unggulan UEM	%	4	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	lembaga	5	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	lembaga	11	6.469.052.374,00	0	3.101.453.089,00	0%	48%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	orang	100	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	orang	700	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	produk	30	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	lembaga	10	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah lembaga adat yang terbentuk	lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah KPM yang difasilitasi	kader	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa	masyarakat adat	0	104.887.500,00	0	20.456.660,00	0	20%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya	Lembaga	0	300.793.000,00	0	175.944.915,00	0	58%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM	Lembaga	0	263.141.700,00	0	118.595.958,00	0	45%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	10	0	5	0	50%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha	UEM	0	1.400.000.000,00	0	784.349.517,00	0	56%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	10	0	2	0	20%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih	Orang	0	499.887.500,00	0	316.021.590,00	0	63%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM	Kabupaten/Kota	0	615.488.674,00	0	296.087.224,00	0	48%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	Orang	0	284.854.000,00	0	114.581.235,00	0	40%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	013	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	Orang	0	3.000.000.000,00	0	1.275.415.990,00	0	43%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	4	0	1	0	25%	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	015				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.428,24	2.896.486.962.600,00	1.176,65	889.230.776.518,00	82%	31%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai.	%	100	174.885.950.586,00	0	74.566.069.025,00	0%	43%	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Persentase Realisasi Anggaran.	%	95	0	35,09	0	37%	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Indeks Profesionalitas ASN.	%	63	0	79,92	0	127%	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	015	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	7	320.058.114,00	1	73.104.162,00	14%	23%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	4	0	4	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	18.373.500,00	3	6.073.200,00	43%	33%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	24.071.000,00	0	300.000,00	0	1%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	11.483.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	24.071.000,00	0	9.510.425,00	0	40%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	11.483.000,00	0	1.588.000,00	0	14%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	193.426.614,00	0	48.957.537,00	0	25%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	5	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	37.150.000,00	0	6.675.000,00	0	18%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.	laporan	12	119.708.054.000,00	6	50.912.301.599,00	50%	43%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	117.036.186.000,00	0	49.894.226.555,00	0	43%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	535	0	575	0	107%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	2.182.376.300,00	0	875.233.494,00	0	40%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	180	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	247.791.700,00	6	118.925.650,00	50%	48%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	4.400.000,00	6	2.852.500,00	50%	65%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	40.444.000,00	0	400.000,00	0	1%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	2	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	0	21.996.000,00	0	10.842.900,00	0	49%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	155.988.000,00	6	8.543.000,00	50%	5%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosi	laporan	0	18.872.000,00	0	1.277.500,00	0	7%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian.	laporan	12	1.818.111.816,00	6	616.411.983,00	50%	34%	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	015	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	24.925.000,00	2	24.845.000,00	100%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	271.051.000,00	0	36.047.250,00	0	13%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	880.457.684,00	6	519.536.615,00	50%	59%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	584.425.382,00	0	35.983.118,00	0	6%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	0	57.252.750,00	0	0	0	0%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa.	laporan	10	6.574.805.324,00	0	2.313.098.939,00	0%	35%	DINAS PERHUBUNGAN
						Prosentase Pertumbuhan Jumlah Penumpang Bandara Abdulrachman Saleh Malang	%	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bandara Abdulrachman Saleh	Indeks Nilai	90,99	0	81,67	0	90%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	311.830.860,00	0	94.962.857,00	0%	30%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	593.750.000,00	0	215.189.067,00	0%	36%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	489.658.920,00	0	132.587.685,00	0%	27%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	4	1.150.034.271,00	0	396.841.950,00	0%	35%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	45.445.000,00	0	17.215.000,00	0	38%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	95	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.821.000,00	0	4.800.000,00	0%	100%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pengadaan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat	Laporan	0	2.281.852.773,00	0	956.089.576,00	0	42%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah daftar arsip aktif	Dokumen	0	36.260.000,00	0	400.000,00	0	1%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah daftar arsip inaktif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah daftar arsip vital	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	1.661.152.500,00	0	495.012.804,00	0%	30%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana.	laporan	3	2.979.279.349,00	0	1.206.334.078,00	0%	40%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	paket	0	83.084.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan	paket	0	1.251.947.700,00	0	893.059.050,00	0	71%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	108	0	34	0	31%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	Paket	0	1.644.247.649,00	0	313.275.028,00	0	19%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	31.565.636.496,00	6	14.556.834.718,00	50%	46%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Dokumen	0	24.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.944.002.391,00	6	3.036.211.209,00	50%	51%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	25.597.634.105,00	0	11.520.623.509,00	0	45%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara.	laporan	12	11.920.005.487,00	6	4.887.983.546,00	50%	41%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	1.085.565.265,00	0	395.584.342,00	0	36%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	266	0	95	0	36%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	1.645.814.812,00	0	618.895.155,00	0	38%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	82	0	29	0	35%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	2.831.557.479,00	0	849.414.706,00	0	30%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	244	0	76	0	31%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah terpeliharanya aset tetap lainnya	Paket	0	3.168.762.219,00	0	1.600.530.988,00	0	51%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	0	6	0	60%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	1.724.707.712,00	0	429.498.013,00	0	25%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	0	1	0	13%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	0	1.351.250.000,00	0	978.453.342,00	0	72%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	0	4	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara	Unit	0	112.348.000,00	0	15.607.000,00	0	14%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jawa Timur.	%	35	138.757.928.100,00	0	38.005.055.460,00	0%	27%	DINAS PERHUBUNGAN
						Penurunan Angka Kecelakaan Angkutan Umum.	%	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Surabaya.	%	89,98	0	82,19	0	91%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Mojokerto.	%	86,35	0	80,05	0	93%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Lamongan.	%	95,92	0	90,32	0	94%	0	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		7 = 6/5 x 100%
1				2	3	4	5		6		7	8		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Madiun.	%	89,72	0	80,89	0	90%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Kediri.	%	91,32	0	81,84	0	90%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Tulungagung.	%	88,21	0	78,27	0	89%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Malang.	%	83,8	0	87,03	0	104%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Probolinggo.	%	87,81	0	82,55	0	94%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Jember.	%	89,98	0	79,15	0	88%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Banyuwangi.	%	78,01	0	81	0	104%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPP LLAJ Bangkalan.	%	87,41	0	75,93	0	87%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	(PTM) Prosentase pemenuhan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Sektor Perhubungan.	%	63,89	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						(PTM) Penyusunan Survey travel time angkutan umum AKDP di Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.	%	47,41	32.311.382.934,00	46,91	5.971.437.758,00	99%	18%	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Surabaya.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Mojokerto.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Lamongan.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Madiun.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Kediri.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Tulungagung.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Malang.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Probolinggo.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Jember.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Banyuwangi.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpelihara di Wilker UPT PPP LLAJ Bangkalan.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Surabaya	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Mojokerto	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Lamongan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Kediri	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Tulungagung	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Malang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Probolinggo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Kondisi Fasilitas Perlengkapan Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Bangkalan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Flashing Light Terpasang	Unit	0	17.483.358.329,00	0	2.252.427.074,00	0	13%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Terpasang	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paku Marka Terpasang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Papan Hibauan Terpasang	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Papan Informasi Lalu Lintas Terpasang	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Patok Tikungan (delineator) Terpasang	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Rambu Lalu Lintas Terpasang	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah RPPJ Model Bando Terpasang	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Traffic Light Terpasang	Lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Panjang Marka Jalan Terpasang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Panjang Pagar Pengaman Jalan Terpasang	Meter	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Kamera JTCC yang ditingkatkan	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Alat Traffic Counting yang ditingkatkan	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	8.862,00	0	4	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	015	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Traffic Light, Pelican Crossing (PCTL), dan warning light terpelihara	Unit	0	14.828.024.605,00	0	3.719.010.684,00	0	25%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						jumlah rambu lalu lintas terpelihara	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas terpelihara	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	Buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	buah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Rambu Lalu Lintas Terpelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Terpelihara	Unit	262	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Papan Hibauan Terpelihara	Unit	45	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Papan Informasi Lalu Lintas Terpelihara	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah rambu lalu lintas Terpelihara	Unit	822	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah RPPJ Model F Terpelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) model Bando Terpelihara	Buah	5	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Traffic Light Terpelihara	Unit	30	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Flashing Light Terpelihara	Unit	70	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Panjang pagar pengaman jalan (Guard Rail) Terpelihara	Meter	420	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Patok Tikungan (Deliniator) Terpelihara	Buah	455	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Alat Pantau Kendaraan Terklasifikasi terpelihara	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	281	0	72	0	26%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B.	%	50	10.624.000.000,00	48	6.520.404.225,00	96%	61%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	300.000.000,00	1	272.339.760,00	100%	91%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Standarisasi Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Pekerjaan Manajemen Sistem Informasi Terminal Penumpang Angkutan Jalan	Pekerjaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	27	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	015	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Sarana Prasarana dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan Terpelihara	Pekerjaan	0	10.324.000.000,00	0	6.248.064.465,00	0	61%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	11	0	11	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah SDM Pengelola Terminal di Bidang Angkes	Orang	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penurunan Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (black spot) di Jalan Provinsi.	%	0	5.727.819.366,00	0	1.744.448.895,00	0	30%	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase Peningkatan Tingkat Pelayanan Ruas atau Simpang di Jalan Provinsi	%	2,63	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Dokumen	0	2.362.227.544,00	0	1.266.712.858,00	0	54%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah Traffic Light Terpasang	Lokasi	0	2.372.729.422,00	0	185.875.790,00	0	8%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi wilayah UPT P3 LLAJ Surabaya	Laporan	1	514.617.400,00	0	288.406.247,00	0%	56%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi wilayah UPT P3 LLAJ Malang	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT PPP LLAJ Probolinggo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT PPP LLAJ Kediri	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT PPP LLAJ Tulungagung	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT P3 LLAJ Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT PPP LLAJ Madiun	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan di jalan Provinsi di wilayah UPT P3LLAJ Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT PPP LLAJ Lamongan	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi di Wilker UPT PPP LLAJ Bangkalan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
					Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi wilayah UPT P3LLAJ Mojokerto	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Forum LLAJ	Dokumen	0	478.245.000,00	0	3.454.000,00	0	1%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan.	dokumen	0	763.647.000,00	0	187.330.700,00	0	25%	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang Diterbitkan dari Jumlah Permohonan	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Rekomendasi Andalalin	Dokumen	0	288.500.000,00	0	54.296.600,00	0	19%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2	015	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peserta Mengikuti Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Peserta	0	301.627.000,00	0	100.153.600,00	0	33%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	015	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dokumen	0	173.520.000,00	0	32.880.500,00	0	19%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan.	%	0	5.905.078.800,00	0	2.583.454.069,00	0	44%	DINAS PERHUBUNGAN
						Penurunan angka kecelakaan akibat faktor sarana (kendaraan).	%	20	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di wilayah UPT P3 LLAJ Surabaya.	%	0,1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Mojokerto.	%	0,53	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Lamongan.	%	1,37	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Madiun.	%	0,1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Kediri.	%	0,35	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Tulungagung.	%	3,79	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Malang.	%	0,1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Probolinggo.	%	0,3	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Jember.	%	0,76	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Banyuwangi.	%	1,91	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Jumlah Kendaraan yang Melanggar Persyaratan Teknis Laik Jalan di Wilker UPT PPP LLAJ Bangkalan.	%	0,1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Pemenuhan Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	%	1,63	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas se Jawa Timur	Kali	0	149.554.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan Pengujian Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	110.420.000,00	0	28.423.550,00	0	26%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kali	12	4.448.618.000,00	6	1.944.491.305,00	50%	44%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Peserta Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	Peserta	0	1.196.486.800,00	0	610.539.214,00	0	51%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Surabaya	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT PPP LLAJ Malang	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Probolinggo	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Kediri	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Tulungagung	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Jember	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Madiun	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Banyuwangi	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Lamongan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3 LLAJ Bangkalan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Keselamatan dan Ketertiban Angkutan Jalan UPT P3LLAJ Mojokerto	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	89	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN				
2	015	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	On Time Performance Layanan AKDP.	%	100	83.426.000.000,00	0	20.997.979.813,00	0%	25%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penumpang Mudik Balik Gratis Moda Transportasi Darat Berbasis Jalan (Bus)	Orang	0	83.426.000.000,00	0	20.997.979.813,00	0	25%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran/Natal Terpadu	Kali	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	70	0	30	0	43%	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Pengusaha Angkutan	Peserta	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Peserta Pemilihan Abdi Yasa Teladan	Peserta	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Pengemudi	Kali	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase penetapan kawasan perkotaan.	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Prosentase Pemenuhan Pelayanan Bus Buy The Service Kawasan Perkotaan	%	11,11	0	0	0	0%	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi Kawasan Angkutan Perkotaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.15	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	02	1.15	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Angkutan Laut dan Penyeberangan.	%	1,09	188.188.167.114,00	0	56.620.739.878,00	0%	30%	DINAS PERHUBUNGAN
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Lamongan.	indeks nilai	81,2	0	86,32	0	106%	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan UPT PPR Banyuwangi.	indeks nilai	80,44	0	76,1	0	95%	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Sertifikat Pengawakan Kapal yang diterbitkan.	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
2	015	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan kegiatan Pelatihan/ Sertifikasi di Sektor Keselamatan Pelayaran	Laporan	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN		
2	015	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase Terpenuhinya Moda Transportasi Laut di Kepulauan.	%	20	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN		
2	015	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis yang Dilayani	Rute	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN		
						Jumlah Kapal Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN		
2	015	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yang terselesaikan.	%	32,43	3.900.000.000,00	32,07	99.000.900,00	99%	3%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	0	3.900.000.000,00	0	99.000.900,00	0	3%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	7	0	2	0	29%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Pelabuhan Pengumpan Regional.	%	45,52	181.186.332.114,00	45,17	54.971.538.709,00	99%	30%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Kapal Terperiksa di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan	Unit	50	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Kapal Terperiksa di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi	Unit	50	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan terkait Koordinasi atau Rapat untuk Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Laut	Laporan	25	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Prosentase Pembangunan Pelabuhan Laut	%	0	158.843.837.074,00	0	44.391.585.403,00	0	28%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelabuhan Laut yang Terpelihara	Unit	0	11.665.017.740,00	0	4.824.742.478,00	0	41%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan terkait koordinasi atau rapat untuk pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Lamongan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah laporan terkait Koordinasi atau Rapat untuk Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	8	0	5	0	63%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah SBNP Terbangun dan Terpelihara	Unit	0	284.064.800,00	0	150.625.960,00	0	53%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan di Wilayah PPR Lamongan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan di Wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan	10	0	5	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.09	05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit	4	10.393.412.500,00	1	5.604.584.868,00	25%	54%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Terpenuhinya Sarana Prasarana Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.	%	41,33	3.101.835.000,00	39,98	1.550.200.269,00	97%	50%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan terkait Koordinasi atau Rapat untuk Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan yang Terpelihara	Unit	0	2.014.408.500,00	0	1.141.740.159,00	0	57%	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit	3	0	2	0	67%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Sosialisasi/ Fasilitasi Pemenuhan Faktor Keselamatan Pelayaran	Laporan	0	1.087.426.500,00	0	408.460.110,00	0	38%	DINAS PERHUBUNGAN

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
							5		6		7 = 6/5 x 100%		
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	7	0	4	0	57%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Perlintasan Sebidang KA.	%	2	3.411.544.200,00	0	1.604.628.829,00	0%	47%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	05	1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Rasio kejadian kecelakaan di perlintasan KA per panjang lintas KA.	kejadian/Km	0,05	3.411.544.200,00	0	1.604.628.829,00	0%	47%	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	05	1.01	01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	05	1.01	02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Sosialisasi keselamatan perkeretaapian	laporan	0	1.918.647.700,00	0	1.064.042.860,00	0	55%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	015	05	1.01	03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dipelihara di Perlintasan sebidang Kereta Api	unit	0	1.492.896.500,00	0	540.585.969,00	0	36%	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah prasarana keselamatan jalan yang terbangun di Perlintasan sebidang Kereta Api	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	016			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			593	160.508.763.840,00	177,44	65.389.574.317,00	30%	41%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	80	44.149.722.800,00	0	17.570.086.111,00	0%	40%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Persentase realisasi anggaran	%	96	0	56,68	0	59%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Indeks profesionalitas ASN	%	87	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	8	40.005.000,00	3	2.672.250,00	38%	7%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	11	16.395.000,00	5	1.305.750,00	45%	8%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	3.000.000,00	0	920.000,00	0	31%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	2.100.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	0	5.050.000,00	0	0	0	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	3.100.000,00	0	0	0	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	0	4.235.000,00	0	356.500,00	0	8%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	5	0	2	0	40%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	6.125.000,00	0	90.000,00	0	1%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	0	1	0	25%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	17	31.353.206.000,00	0	12.701.137.964,00	0%	41%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	30.794.442.000,00	0	12.447.996.964,00	0	40%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	150	0	150	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	540.264.000,00	0	246.730.000,00	0	46%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	0	5	0	42%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	0	3.500.000,00	0	1.665.000,00	0	48%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	2.500.000,00	0	228.000,00	0	9%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	4.000.000,00	0	631.000,00	0	16%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	0	2	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	laporan	0	2.500.000,00	0	1.546.500,00	0	62%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	0	2	0	200%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	4.500.000,00	0	2.340.500,00	0	52%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	1.500.000,00	0	0	0	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	12	306.171.200,00	0	52.025.000,00	0%	17%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	laporan	12	10.800.000,00	6	2.765.500,00	50%	26%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bintek yang dilaksanakan	laporan	0	151.622.000,00	0	0	0	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	57.400.000,00	200	49.259.500,00	100%	86%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	laporan	0	86.349.200,00	0	0	0	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	200	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	6	1.599.587.753,00	0	740.375.171,00	0%	46%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	36.311.700,00	0	9.372.000,00	0	26%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	781.415.290,00	0	439.129.221,00	0	56%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	23.256.000,00	0	11.442.000,00	0	49%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	paket	0	13.051.000,00	0	500.000,00	0	4%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	722.393.763,00	0	269.567.700,00	0	37%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	0	23.160.000,00	0	10.364.250,00	0	45%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)				SATUAN		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
														K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1				2				3				4		5		6		8			
2	016	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	dokumen	12	8.346.774.447,00	0	3.609.538.846,00	0%	43%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	18.000.000,00	0	3.511.000,00	0	20%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	1.542.961.000,00	0	722.355.378,00	0	47%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	6.785.813.447,00	0	2.883.672.468,00	0	42%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	5	2.503.978.400,00	0	464.336.880,00	0%	19%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	0	378.600.000,00	0	157.530.800,00	0	42%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	65	0	6	0	9%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	434.286.000,00	0	109.067.450,00	0	25%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara	paket	0	1.691.092.400,00	0	197.738.630,00	0	12%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipeliharakan/direhabilitasi	unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PD Pemprov Jatim dan Kab/Kota yang telah mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	75	8.622.781.520,00	75	4.157.245.319,00	100%	48%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Persentase Lembaga Publik yang aktif dalam pengelolaan komunikasi publik	%	100	0	20,76	0	21%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah produksi informasi publik	kali	0	8.622.781.520,00	0	4.157.245.319,00	0	48%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Dokumen Laporan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah daerah	kelompok	75	0	20	0	27%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Penyebarluasan Informasi	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah lembaga pemerintah yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah daerah	lembaga pemerintahan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Komunitas yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah daerah	komunitas	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Prosentase informasi publik yang disebarluaskan	%	95	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat	%	100	0	100	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah lembaga pemerintah yang mengimplementasikan strategi komunikasi pemerintah daerah	Lembaga Pemerintahan	75	0	68	0	91%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa informasi publik	%	90	0	45	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring media sosial dan media online berkenaan dengan kebijakan Pemprov Jatim	Kali	0	1.532.670.580,00	0	538.898.750,00	0	35%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	dokumen	48	0	24	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita	berita	0	1.813.024.150,00	0	760.561.216,00	0	42%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2	016	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah bimbingan teknis uji konsekuensi PPID	kali	0,01	243.216.570,00	0	101.448.736,00	0%	42%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah FGD	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah SP4N Laporan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	31	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
2	016	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah dialog interaktif	kali	0	824.240.800,00	0	687.665.720,00	0	83%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Penyebaran Informasi melalui media cetak	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Penyebaran Informasi melalui media elektronik	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Penyebaran Informasi melalui media luar ruangan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Layanan Hubungan Media	layanan	11	0	6	0	55%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan strategi komunikasi publik bagi lembaga pemerintah	kali	0	2.580.329.420,00	0	1.561.479.962,00	0	61%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	02	1.01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah pelaksanaan kegiatan penerapan strategi komunikasi publik bagi komunitas dan masyarakat	kali	0	603.000.000,00	0	194.958.225,00	0	32%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	138	0	69	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	02	1.01	011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Forum Informasi Akuntabilitas (FIA)	kegiatan	0	1.026.300.000,00	0	312.232.710,00	0	30%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah penyelesaian sengketa informasi	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah sosialisasi SLIP desa	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Sosialisasi KIP	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Pemeringkatan PPID	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	dokumen	81	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang memenuhi standart teknis pembangunan aplikasi	%	65	5.407.016.200,00	25	2.182.412.673,00	38%	40%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain jatimprov.go.id	sub domain	900	828.124.175,00	0	353.270.825,00	0%	43%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone Pemprov Jatim	PD	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah penambahan sub domain jatimprov.go.id	sub domain	0	100.000.000,00	0	75.663.485,00	0	76%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pembangunan jaringan backbone perangkat daerah	Perangkat Daerah	0	728.124.175,00	0	277.607.340,00	0	38%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Pemeliharaan perangkat jaringan banckbone	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	28	0	16	0	57%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan TIK	kebijakan	1	4.578.892.025,00	0	1.829.141.848,00	0%	40%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Aplikasi yang memenuhi standarisasi apliksi sesuai peraturan yang berlaku	aplikasi	20	0	1	0	5%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Persentase downtime/availability layanan pusat data	%	99,5	0	100	0	101%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah perangkat daerah yang terlayani bandwidth	perangkat daerah	15	0	15	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan evaluasi internal SPBE	aplikasi	0	250.000.000,00	0	178.124.400,00	0	71%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	dokumen	0	175.000.000,00	0	72.075.620,00	0	41%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah hosting dan colocation	akun	0	1.662.376.340,00	0	622.442.250,00	0	37%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah pemeliharaan perangkat pusat data	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan monitoring aplikasi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	016	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	0	50.000.000,00	0	24.727.652,00	0	49%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	20	0	10	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang terbangun	aplikasi	0	1.301.581.520,00	0	523.408.680,00	0	40%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	aplikasi	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah monitoring dan evaluasi pengendalian bandwidth	laporan	0	764.934.165,00	0	331.083.750,00	0	43%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah layanan virtual Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda Prov. Jatim	kali	6	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Pehubung Layanan Pemerintah Daerah	layanan	6	0	3	0	50%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen monitoring smart city	dokumen	0	75.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah workshop TIK bagi aparatur	kali	0	300.000.000,00	0	76.279.496,00	0	25%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah workshop TIK bagi masyarakat	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	016	03	1.02	011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Perangkat Daerah yang telah berkoordinasi daam rangka pengembangan TIK	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			48	1.028.418.480,00	0	377.608.678,00	0%	37%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Renmonev Pembangunan	%	48	1.028.418.480,00	0	377.608.678,00	0%	37%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah pendampingan dan konsultasi statistik sektoral	kali	30	1.028.418.480,00	8	377.608.678,00	27%	37%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah SDM statistik yang terlatih	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Persentase Pemenuhan Ketersediaan Metadata Statistik Sektoral	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Renmonev Pembangunan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah akses data melalui portal satu data Jatim	kali	10.000,00	0	3.152,00	0	32%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Infografis Data Statistik Sektoral	dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pendampingan OPD dan Kab/Kota dalam penyelenggaraan satu data	kali	0	250.000.000,00	0	39.990.508,00	0	16%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	4	0	1	0	25%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah pelatihan bidang statistik	kali	0	108.000.000,00	0	24.604.700,00	0	23%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	396	0	204	0	52%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah workshop metadata	kali	0	410.000.000,00	0	197.329.600,00	0	48%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	10	0	4	0	40%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah sosialisasi kebijakan satu data Indonesia	kali	0	84.000.000,00	0	60.183.250,00	0	72%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	120	0	76	0	63%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah update modul layanan satu data Jawa Timur	kali	0	80.500.000,00	0	47.870.000,00	0	59%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	020	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Diseminasi Infografis Data Statistik Sektoral	dokumen	0	95.918.480,00	0	7.630.620,00	0	8%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Rekomendasi statistik sektoral	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	021				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			45	400.000.000,00	45	230.779.931,00	100%	58%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	021	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase aplikasi persandian yang di amankan	%	45	400.000.000,00	45	230.779.931,00	100%	58%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	021	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi	kebijakan	0	300.000.000,00	0	198.086.831,00	0	66%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah rumusan kebijakan tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	021	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan tata kelola keamanan informasi	kali	0	50.000.000,00	0	28.648.800,00	0	57%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	021	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aparaturnya pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang keamanan informasi	orang	0	50.000.000,00	0	12.503.911,00	0	25%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	021	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan informasi	laporan	0	100.000.000,00	0	88.639.870,00	0	89%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	021	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase insiden keamanan informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan	%	0	100.000.000,00	0	68.294.250,00	0	68%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
						Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	0	6	0	20%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	021	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaringan komunikasi sandi	%	100	100.000.000,00	0	32.693.100,00	0%	33%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	021	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaringan komunikasi sandi	%	0	100.000.000,00	0	32.693.100,00	0	33%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	64	0	0	0	0%	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
2	017				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			667	315.350.135.629,00	305,12	115.077.892.282,00	46%	36%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	37.411.942.000,00	0	16.267.190.323,00	0%	43%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
						Indeks profesionalitas ASN	%	74	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	Dokumen	4	1.531.230.768,00	1	909.709.276,00	25%	59%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	727.622.400,00	1	384.596.835,00	25%	53%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.015.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.015.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.553.600,00	0	0	0%	0%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.553.600,00	0	0	0%	0%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	769.874.168,00	1	519.024.241,00	20%	67%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	12.597.000,00	1	6.088.200,00	33%	48%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	1	25.643.032.732,00	0	11.213.762.385,00	0%	44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
						Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									
2	017	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	101	24.478.913.000,00	202	10.642.017.817,00	200%	43%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	017	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	436.044.000,00	6	203.820.000,00	50%	47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	633.158.232,00	0	359.639.768,00	0	57%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	0	20.803.800,00	0	3.028.800,00	0	15%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	7.612.500,00	0	2.032.000,00	0	27%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	45.141.100,00	0	900.000,00	0	2%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	17.180.900,00	0	2.324.000,00	0	14%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	4.179.200,00	0	0	0	0%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	2	2.404.204.954,00	3	1.216.543.481,00	150%	51%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	198.761.740,00	0	124.487.245,00	0%	63%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah sarana dan prasarana yg tepenuhi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	14.828.400,00	0	14.435.040,00	0	97%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	0	971.297.200,00	0	479.526.175,00	0	49%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	729.055.100,00	0	268.369.976,00	0	37%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11	490.262.514,00	2	329.725.045,00	18%	67%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	017	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	2.438.927.729,00	4	873.374.745,00	200%	36%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	30.274.500,00	0	24.517.960,00	0	81%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	319.954.479,00	1	134.743.967,00	33%	42%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Paket	0	118.473.300,00	0	110.149.291,00	0	93%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	218.029.450,00	0	34.356.000,00	0	16%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	10.260.000,00	0	4.795.000,00	0	47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	Paket	0	44.841.000,00	0	16.497.700,00	0	37%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Paket	0	276.480.000,00	0	29.089.000,00	0	11%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	0	3	0	100%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	1.420.615.000,00	0	519.225.827,00	0	37%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2	3.923.092.369,00	20	1.740.593.218,00	1000%	44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	5.000.000,00	0	3.000.000,00	0	60%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	017	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	1.232.215.800,00	12	582.917.278,00	50%	47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	87.219.600,00	0	20.590.500,00	0	24%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	2.598.656.969,00	7	1.134.085.440,00	50%	44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Dokumen	1	1.471.453.448,00	2	313.207.218,00	200%	21%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	276.037.100,00	0	121.244.101,00	0	44%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	0	1	0	14%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	353.442.418,00	2	94.362.520,00	25%	27%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	199.149.500,00	6	60.570.997,00	67%	30%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	642.824.430,00	0	37.029.600,00	0	6%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	1	0	50%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	%	87	800.000.000,00	0	78.421.500,00	0%	10%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase Koperasi Berkinerja Baik	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	Unit	35	400.000.000,00	0	62.880.600,00	0%	16%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam	unit	0	400.000.000,00	0	62.880.600,00	0	16%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	20	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Unit	0	400.000.000,00	0	15.540.900,00	0	4%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	%	100	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2	017	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas	unit	0	400.000.000,00	0	15.540.900,00	0	4%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	25	0	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	63	1.103.993.480,00	42,64	592.544.388,00	68%	54%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Persentase Koperasi Berkinerja Baik	%	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	%	45	1.103.993.480,00	42,64	592.544.388,00	95%	54%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas	unit	0	1.103.993.480,00	0	592.544.388,00	0	54%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	56	0	56	0	100%	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	%	22	609.437.520,00	1,2	114.808.875,00	5%	19%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Persentase Koperasi Berkinerja Baik	%	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	27	609.437.520,00	2,79	114.808.875,00	10%	19%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan	unit	0	609.437.520,00	0	114.808.875,00	0	19%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Unit Usaha	25	0	7	0	28%	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	96	7.457.433.520,00	26,67	3.469.518.427,00	28%	47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat	%	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	%	32	7.457.433.520,00	8,89	3.469.518.427,00	28%	47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate	Modul	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah SDM Koperasi peserta pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan	unit	0	7.457.433.520,00	0	3.469.518.427,00	0	47%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	232	0	192	0	83%	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	017	05	1.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan	%	69	12.931.024.149,00	109,03	2.501.433.962,00	158%	19%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase Koperasi Berkinerja Baik	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	30	12.931.024.149,00	29,16	2.501.433.962,00	97%	19%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	24	0	7,77	0	32%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	%	44	0	20,83	0	47%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	%	31	0	0	0	0%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan KUKM	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui pameran	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah KSPPS/USPPS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	Unit	0	1.150.000.000,00	0	292.063.417,00	0	25%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah KSP/USPKoperasi dan KSPPS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	270	0	90	0	33%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya	Unit	0	11.781.024.149,00	0	2.209.370.545,00	0	19%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	1.545,00	0	695	0	45%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
2	017	07		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	%	33	37.036.439.931,00	97,97	13.007.987.242,00	297%	35%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	017	07	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	Unit	75	37.036.439.931,00	156	13.007.987.242,00	208%	35%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Unit	350	0	282	0	81%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan	Unit	720	0	4.095,00	0	569%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha	Unit	350	0	210	0	60%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk K-UKM	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah KUKM yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah KUKM yang dikuatkan akses pembiayaannya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah KUKM yang dikuatkan usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah KUKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	017	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi	Unit	0	35.063.986.101,00	0	12.453.762.124,00	0	36%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah UKM yang difasilitasi pengembangan usaha	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses permodalan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	1.890,00	0	1.486,00	0	79%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	orang	560	1.972.453.830,00	80	554.225.118,00	14%	28%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	%	33	6.779.721.400,00	27,61	2.912.012.453,00	84%	43%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Pertumbuhan omset K-UKM yang dipasarkan produknya	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Unit	150	6.779.721.400,00	366	2.912.012.453,00	244%	43%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	Unit	325	0	255	0	78%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang bermitra	Unit	75	0	78	0	104%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang dikuatkan kualitas produksinya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah SDM UKM peserta pelatihan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya	Unit	0	6.244.397.650,00	0	2.848.935.953,00	0	46%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran	UKM	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1.237,00	0	968	0	78%	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	017	08	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	550	535.323.750,00	111	63.076.500,00	20%	12%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	018				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			549,25	93.020.721.000,00	545,48	39.826.817.547,00	99%	43%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	77	27.671.659.000,00	0	11.860.334.937,00	0%	43%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	36	0	40%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Indeks profesionalitas ASN	Indeks	86,25	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	9	216.000.000,00	4	67.204.240,00	44%	31%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
								5		6				
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	130.252.000,00	3	28.530.640,00	75%	22%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	7.500.000,00	0	900.000,00	0	12%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	5.500.000,00	0	1.116.000,00	0	20%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	3.758.000,00	0	1.500.000,00	0	40%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	3.460.000,00	0	1.125.000,00	0	33%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	59.500.000,00	0	31.687.600,00	0	53%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	2	0	40%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	6.030.000,00	0	2.345.000,00	0	39%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	19.078.987.000,00	6	8.460.456.136,00	50%	44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	18.241.116.000,00	0	8.069.025.323,00	0	44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	140	0	280	0	200%	0	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2	018	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	565.795.000,00	0	285.030.000,00	0	50%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	235.165.500,00	0	97.547.813,00	0	41%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	10.050.000,00	0	0	0	0%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	2.740.500,00	0	343.000,00	0	13%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	14.070.000,00	0	4.875.000,00	0	35%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	10.050.000,00	0	3.635.000,00	0	36%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	0	0	0	0	0%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	2.344.930.000,00	6	753.948.795,00	50%	32%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Laporan	0	205.700.000,00	0	90.130.000,00	0	44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	8	0	4	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	1.967.451.000,00	0	652.973.995,00	0	33%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	142.271.000,00	0	9.735.000,00	0	7%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	29.508.000,00	0	1.109.800,00	0	4%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	0	2	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6	0	1	0	17%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1.612.634.412,00	0	679.025.658,00	0%	42%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	15.095.700,00	0	10.852.500,00	0	72%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	97.832.000,00	0	59.777.600,00	0	61%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	0	3	0	43%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	219.407.200,00	0	53.279.950,00	0	24%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	0	1	0	33%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	532.206.200,00	0	212.067.415,00	0	40%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	0	1	0	33%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	120.888.812,00	0	609.000,00	0	1%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	122.650.000,00	0	18.389.900,00	0	15%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	25	0	15	0	60%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	504.554.500,00	0	324.049.293,00	0	64%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	018 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	11.08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	4.171.947.088,00	0	1.830.505.318,00	0%	44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	11.08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	1.698.364.000,00	0	813.558.706,00	0	48%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
2	11.08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	Paket	0	90.000.000,00	0	22.500.000,00	0	25%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	11.08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum	Paket	0	2.383.583.088,00	0	994.446.612,00	0	42%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Paket	1	247.160.500,00	0	69.194.790,00	0%	28%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	114.750.000,00	0	58.297.365,00	0	51%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	62	0	30	0	48%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	116	79.619.200,00	50	10.897.425,00	43%	14%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	Paket	0	52.791.300,00	0	0	0	0%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Indeks	4	1.689.742.000,00	0	426.079.865,00	0%	25%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang diberikan	%	100	1.214.742.000,00	0	263.610.175,00	0%	22%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	464.742.000,00	0	110.375.221,00	0	24%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian pemberian/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	0	750.000.000,00	0	153.234.954,00	0	20%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Kegiatan usaha	8	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	018	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Potensi Investasi yang Siap Ditawarkan	%	100	475.000.000,00	0	162.469.690,00	0%	34%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah penyusunan dan evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	0	175.000.000,00	0	79.139.780,00	0	45%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Dokumen	0	300.000.000,00	0	83.329.910,00	0	28%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah UKM yang Difasilitasi Kemitraan antar Dunia Usaha	UKM	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	Trilyun	40	2.021.974.000,00	19	615.581.250,00	48%	30%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Calon Penanam Modal Yang Berminat	%	75	2.021.974.000,00	34,78	615.581.250,00	46%	30%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan promosi penanaman modal	Dokumen	0	625.000.000,00	0	249.886.884,00	0	40%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal	Dokumen	0	1.396.974.000,00	0	365.694.366,00	0	26%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pra Perizinan Penanam Modal	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Promosi Penanaman Modal dalam dan luar Negeri	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen	25	0	18	0	72%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	87	3.928.149.000,00	176	1.937.804.668,00	202%	49%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	018	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	%	87	640.000.000,00	176	322.883.384,00	202%	50%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	%	100	0	200	0	200%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin/non izin sektor pembangunan dan perekonomian yang diterbitkan	Izin / Non Izin	0	382.000.000,00	0	191.750.742,00	0	50%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	100	0	606	0	606%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pembangunan dan Perekonomian	Izin	0	135.000.000,00	0	97.634.741,00	0	72%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Kegiatan usaha	100	0	72	0	72%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan penyelenggaraan PTSP Daerah	Laporan	0	100.000.000,00	0	21.030.401,00	0	21%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	140	0	43	0	31%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/insentif Penanaman Modal	Kali	0	23.000.000,00	0	12.467.500,00	0	54%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha	38	0	4	0	11%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	%	87	3.288.149.000,00	176	1.614.921.284,00	202%	49%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	%	100	0	200	0	200%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin/non izin sektor kesejahteraan dan lingkungan hidup rakyat yang diterbitkan	Dokumen	0	2.282.131.000,00	0	1.087.485.445,00	0	48%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Izin/Non Izin Sektor Pembangunan dan Perekonomian yang Diterbitkan	Izin/Non Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaku Usaha	5.500,00	0	26.534,00	0	482%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor kesejahteraan rakyat dan Lingkungan hidup	Izin	0	220.000.000,00	0	131.624.603,00	0	60%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sektor Pembangunan dan Perekonomian	Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan Usaha	2.000,00	0	1.315,00	0	66%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan Izin dan Non Izin yang disusun	Laporan	0	763.018.000,00	0	383.197.240,00	0	50%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Layanan Konsultasi Izin/Non Izin	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	Orang	2.000,00	0	2.502,00	0	125%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/insentif Penanaman Modal	Kali	0	23.000.000,00	0	12.613.996,00	0	55%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Kegiatan usaha	38	0	3	0	8%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi	%	65	1.463.660.000,00	114,48	752.812.728,00	176%	51%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	1.463.660.000,00	57	752.812.728,00	57%	51%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan oleh perusahaan	Dokumen	0	304.260.000,00	0	166.881.340,00	0	55%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Perusahaan yang Memperoleh Pendampingan/Pengisian Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan usaha	1.000,00	0	2.212,00	0	221%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi permasalahan penanaman modal	Perusahaan	0	741.396.800,00	0	380.366.529,00	0	51%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Perusahaan yang Memahami Peraturan Penanaman Modal	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	100	0	50	0	50%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	018	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Berita Acara Pengawasan Penanaman Modal	Dokumen	0	418.003.200,00	0	205.564.859,00	0	49%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pendampingan Pengawasan Terhadap Penggunaan Fasilitas Penanaman Modal	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan usaha	100	0	38	0	38%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses	%	100	902.219.000,00	200	513.534.225,00	200%	57%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	%	100	902.219.000,00	200	513.534.225,00	200%	57%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	018	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dokumen	0	902.219.000,00	0	513.534.225,00	0	57%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Kinerja Penanaman Modal Terverifikasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah data Penanaman Modal yang Dianalisis dan Dievaluasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	0	2	0	100%	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	019				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			927,56	838.350.413.000,00	467	466.634.021.203,00	50%	56%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	95	36.869.721.000,00	47,5	15.499.984.592,00	50%	42%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Persentase realisasi anggaran	%	95	0	47,5	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Indeks profesionalitas ASN	%	81	0	40,5	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	5	284.479.895,00	3	72.861.220,00	60%	26%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	7	0	4	0	57%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	70.000.000,00	4	7.227.300,00	57%	10%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	15.000.000,00	0	2.945.000,00	0	20%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	2	0	200%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	15.000.000,00	0	4.250.000,00	0	28%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	20.000.000,00	2	3.779.500,00	200%	19%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun	dokumen	0	15.000.000,00	0	5.410.800,00	0	36%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun	dokumen	0	43.479.895,00	0	22.904.102,00	0	53%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	106.000.000,00	0	26.344.518,00	0	25%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	31.016.139.000,00	6	13.279.306.392,00	50%	43%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	30.355.629.000,00	0	12.992.919.722,00	0	43%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	138	0	6	0	4%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	555.510.000,00	0	247.337.770,00	0	45%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	20.000.000,00	0	7.710.750,00	0	39%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	20.000.000,00	0	5.913.350,00	0	30%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD	Laporan	0	25.000.000,00	0	7.594.200,00	0	30%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	20.000.000,00	0	11.120.000,00	0	56%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	0	20.000.000,00	0	6.710.600,00	0	34%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	302.091.705,00	6	27.525.000,00	50%	9%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	0	69.850.000,00	0	21.535.000,00	0	31%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	0	149.968.977,00	0	0	0	0%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	165	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	10.000.000,00	0	5.490.000,00	0	55%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	72.272.728,00	0	500.000,00	0	1%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	0	4	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	10	1.009.810.903,00	6	199.702.861,00	60%	20%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	0	34.987.740,00	0	17.857.680,00	0	51%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	0	56.854.800,00	0	17.822.160,00	0	31%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan Peralatan Rumah Tangga	paket	0	90.101.500,00	0	42.128.940,00	0	47%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
2	019	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan Bahan Logistik Kantor	paket	0	90.825.500,00	0	42.112.910,00	0	46%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	019	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	0	100.000.000,00	0	8.658.000,00	0	9%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	paket	0	31.716.000,00	0	8.700.000,00	0	27%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	kali	0	30.000.000,00	0	3.785.000,00	0	13%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	2	0	200%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	570.325.363,00	0	58.638.171,00	0	10%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	6	0	600%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip inaktif	dokumen	0	5.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	Laporan	1	74.228.000,00	6	62.358.690,00	600%	84%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	paket	0	74.228.000,00	0	62.358.690,00	0	84%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	2	0	200%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	4	3.311.889.697,00	6	1.540.481.188,00	150%	47%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah paket pengadaan Jasa Surat Menyurat	paket	0	5.840.000,00	0	1.038.000,00	0	18%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	6	0	600%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah paket pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket	0	1.211.931.000,00	0	647.067.846,00	0	53%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	0	113.865.000,00	0	20.073.792,00	0	18%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	6	0	600%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	paket	0	1.980.253.697,00	0	872.301.550,00	0	44%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	6	0	600%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	11.09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	4	871.081.800,00	6	317.749.241,00	150%	36%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	11.09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	paket	0	404.856.000,00	0	164.840.303,00	0	41%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	15	0	2	0	13%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	11.09	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	11.09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	0	113.120.800,00	0	35.647.650,00	0	32%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	4	0	400%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	11.09	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	paket	0	298.000.000,00	0	117.261.288,00	0	39%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	11.09	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	paket	0	55.105.000,00	0	0	0	0%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	2	0	200%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	019	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase tenaga kepemudaan dan olahraga yang kompeten	%	0	3.040.000.000,00	0	1.092.489.840,00	0	36%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase Kader kepemimpinan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase pemuda potensi mandiri	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase wirausaha muda pemula	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah wirausaha muda pemula	orang	150	0	75,5	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	90	0	45,5	0	51%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase efektivitas koordinasi lintas sektor dibidang pelayanan kepemudaan	%	80	0	40	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda kader Provinsi yang difasilitasi dalam kegiatan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	1.528,00	2.990.000.000,00	400	1.091.489.840,00	26%	37%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, kesukarelawanan, serta kegiatan Sosial dan budaya	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah Pemuda berpotensi dan berkualitas jasmani mental spritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri menuju kemandirian Pemuda	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	orang	165	240.000.000,00	100	191.026.620,00	61%	80%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda	orang	135	300.000.000,00	100	182.872.100,00	74%	61%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan bahaya destruktif	orang	100	100.000.000,00	0	24.603.300,00	0%	25%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta yang difasilitasi dalam pelatihan Paskibraka Provinsi	orang	533	1.300.000.000,00	0	639.859.200,00	0%	49%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	06 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah peserta yang difasilitasi pemberian penghargaan	orang	15	800.000.000,00	0	21.082.300,00	0%	3%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.01	08 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	1	250.000.000,00	0	32.046.320,00	0%	13%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan pengembangan organisasi kepemudaan	orang	210	50.000.000,00	0	1.000.000,00	0%	2%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah pengurus Organisasi Kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi dalam latihan manajemen Organisasi	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.02	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	02	1.02	02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen Organisasi	orang	160	50.000.000,00	0	1.000.000,00	0%	2%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	03		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemasyarakatan olahraga	%	0	76.451.250.000,00	0	45.293.173.129,00	0	59%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase olahragawan olahraga khusus yang berprestasi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga yang layak fungsi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase organisasi pemuda dan olahraga yang aktif	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase tenaga kepemudaan dan olahraga yang kompeten	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Cakupan pembinaan atlet muda	%	7,06	0	4	0	57%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah atlet pelajar dan paralimpik pelajar yang berprestasi tingkat nasional	orang	275	0	138	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	%	34,5	0	18	0	52%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Persentase pelatih bersertifikasi	%	15	0	8	0	53%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	03	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah peserta kampanye olahraga olimpic dan massal di satuan pendidikan, Perguruan tinggi, pendidikan non formal dan informal	orang	11.000,00	7.226.000.000,00	6.000,00	4.773.140.113,00	55%	66%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga rekreasi	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Jumlah sarana prasarana Pemuda dan Olahraga aset Provinsi yang dioptimalkan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	03	1.01	01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan	(indikator kosong)		0	100.000.000,00	0	10.631.000,00	0	11%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
					dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha									
2	019	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah peserta kampanye olahraga olimpic dan massal disatukan pendidikan non formal dan informal, perguruan tinggi serta perkumpulan olahraga masyarakat	orang	0	2.500.000.000,00	0	1.165.401.793,00	0	47%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen	161	0	80	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana olahraga berbasis cabang olahraga olimpic	paket	0	4.626.000.000,00	0	3.597.107.320,00	0	78%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	30	0	20	0	67%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah atlet dan pelatih yang difasilitasi dan/atau ikut serta pada kejuaraan olahraga prestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	2.650,00	3.050.000.000,00	0	48.899.518,00	0%	2%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Olahragawan khusus yang dibina	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Olahragawan/atlet pelajar yang dibina	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah atlet yang difasilitasi dalam Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah atlet yang difasilitasi dalam Kejuaraan Pekan Paralimpik dan Paralimpik pelajar	orang	0	50.000.000,00	0	44.137.518,00	0	88%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah atlet yang difasilitasi pada kejuaraan Multi even dan Single event olahraga prestasi tingkat nasional	orang	0	3.000.000.000,00	0	4.762.000,00	0%	0%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	350	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah tenaga keolahragaan olimpic yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	orang	760	64.715.250.000,00	401	39.307.104.605,00	53%	61%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Olahragawan/atlet pelajar yang dibina	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet yang difasilitasi dalam pemusatan latihan daerah	orang	0	1.500.000.000,00	0	549.619.281,00	0	37%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah atlet yang difasilitasi dalam pembinaan dan pelatihan olahraga berbasis cabang olahraga unggulan	orang	0	55.700.000.000,00	0	32.232.914.556,00	0	58%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	600	0	300	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah peserta yang difasilitasi dalam pemberian penghargaan olahraga	orang	0	7.315.250.000,00	0	6.455.691.040,00	0	88%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	Orang	101	0	101	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah data sektoral Olahraga yang disusun	laporan	0	200.000.000,00	0	68.879.728,00	0	34%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah pengelola induk organisasi olahraga yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan serta pengembangan olahraga	orang	130	1.460.000.000,00	130	1.164.028.893,00	100%	80%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah naskah kerjasama Kepemudaan dan Olahraga yang disusun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah pengurus Organisasi Kepemudaan dan keolahragaan yang difasilitasi dalam latihan manajemen Organisasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Peserta Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi Kepemudaan dan Keolahragaan yang difasilitasi dalam latihan manajemen organisasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.04	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah induk organisasi yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan	orang	0	10.000.000,00	0	7.898.680,00	0	79%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
						Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	2	1.250.000.000,00	1	1.000.000.000,00	50%	80%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
2	019	03	1.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah naskah kerjasama keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral yang disusun	Naskah Kerjasama	0	200.000.000,00	0	156.130.213,00	0	78%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Persentase Pemuda Kreatif berprestasi	%	0	9.200.000.000,00	0	2.424.040.193,00	0	26%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Persentase Pramuka Garuda Jawa Timur	%	5	0	2,5	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01							DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah kader Pramuka pada kegiatan tingkat daerah Provinsi, Nasional dan Internasional	orang	500	9.200.000.000,00	516	2.424.040.193,00	103%	26%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah karya kreatif dibidang kepemudaan dan Olahraga	Karya	500	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	01						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan dimanfaatkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	02						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah pengelola organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan kepramukaan	orang	0	1.654.077.014,00	0	526.964.458,00	0	32%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	0	366	0	36600%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	03						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah kader Pramuka yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan kepramukaan	orang	0	3.130.795.200,00	0	805.810.588,00	0	26%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit	1	0	2	0	200%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	04						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah pelatih tingkat dasar dan pelatih tingkat lanjutan di kwartir cabang dan kwartir daerah	orang	0	1.171.988.500,00	0	265.130.715,00	0	23%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150	0	150	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	05						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah kader Pramuka yang difasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan kepramukaan Provinsi	orang	0	3.043.139.286,00	0	790.079.332,00	0	26%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan	1	0	3	0	300%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	07						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan dimanfaatkan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	019	04	1.01	08						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kegiatan kepramukaan	orang	0	200.000.000,00	0	36.055.100,00	0	18%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	1	0	2	0	200%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022									DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Persentase indikator program yang tercapai	%	95	67.566.677.830,00	0	28.208.208.943,00	0%	42%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Persentase realisasi anggaran	%	95	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Indeks profesionalitas ASN	%	87	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01							DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah dokumen	Dokumen	11	1.200.242.000,00	6	484.673.929,00	55%	40%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	01						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	385.000.000,00	3	312.263.864,00	100%	81%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	02						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		jumlah dokumen RKA	dokumen	0	5.000.000,00	0	4.777.300,00	0	96%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	03						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	5.000.000,00	0	1.400.000,00	0	28%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	04						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		jumlah dokumen DPA	dokumen	0	5.000.000,00	0	1.675.000,00	0	34%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	05						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		jumlah dokumen DPA perubahan	dokumen	0	5.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	06						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	0	69.700.000,00	0	23.930.000,00	0	34%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	022	01	1.01	07						DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		jumlah dokkumen evaluasi kinerja	dokumen	0	725.542.000,00	0	140.627.765,00	0	19%	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2				3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	3	48.740.403.960,00	2	19.350.454.783,00	67%	40%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	45.576.595.000,00	0	17.891.851.417,00	0	39%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	176	0	90	0	51%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	3.153.808.960,00	0	1.455.966.866,00	0	46%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	176	0	90	0	51%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	laporan	0	5.000.000,00	0	1.641.500,00	0	33%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	5.000.000,00	0	995.000,00	0	20%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	15.000.000,00	0	2.373.500,00	0	16%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	10	0	5	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi penilaian barang milik daerah	kali	0	5.000.000,00	0	1.973.500,00	0	39%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	laporan	6	0	3	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi barang yang dilakukan	dokumen	0	5.000.000,00	0	400.000,00	0	8%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah barang yang dikelola	barang	0	5.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	10	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	307	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	307	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	307	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	307	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	8	3.214.345.300,00	4	1.497.432.675,00	50%	47%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	148.675.000,00	0	42.833.400,00	0	29%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	265.222.300,00	0	244.890.560,00	0	92%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	0	4	0	100%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	158.824.000,00	0	106.528.587,00	0	67%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	0	3	0	75%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	1.810.260.200,00	0	742.205.307,00	0	41%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	171.171.800,00	0	43.332.400,00	0	25%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	022	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	paket	0	50.000.000,00	0	2.347.000,00	0	5%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	4	0	1	0	25%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2					3					4					5		6		8			
2	022	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					jumlah paket pengadaan	paket	0	150.000.000,00	0	62.112.500,00	0	41%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	5	226.192.000,00	3	139.706.722,00	60%	62%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					jumlah sistem informasi yang didukung	sistem	0	234.000.000,00	0	113.476.199,00	0	48%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	8	180.214.950,00	8	169.137.590,00	100%	94%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					jumlah peralatan dan mesin lainnya	unit	0	180.214.950,00	0	169.137.590,00	0	94%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	2	0	2	0	100%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	8	10.806.096.276,00	4	4.935.886.125,00	50%	46%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					jumlah pengiriman dokumen	dokumen	0	2.500.000,00	0	1.243.000,00	0	50%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	70	0	35	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	laporan	0	2.320.536.400,00	0	1.255.288.729,00	0	54%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	0	2	0	67%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	10	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					jumlah jasa	jasa	0	8.483.059.876,00	0	3.679.354.396,00	0	43%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	45	0	25	0	56%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	8	3.410.375.344,00	4	1.768.250.341,00	50%	52%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					jumlah jasa	jasa	0	565.000.000,00	0	377.307.621,00	0	67%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	0	12	0	60%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel					jumlah mebel yang dipelihara	unit	60	30.900.000,00	20	8.880.000,00	33%	29%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	40	967.189.200,00	15	350.196.730,00	38%	36%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					jumlah gedung yang dipelihara	gedung	0	1.416.965.500,00	0	905.062.920,00	0	64%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	4	0	3	0	75%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	unit	0	430.320.644,00	0	126.803.070,00	0	29%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	7,09	11.614.757.400,00	0	5.234.592.241,00	0%	45%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Persentase Peningkatan Seni Budaya Unggulan					Persentase Peningkatan Seni Budaya Unggulan	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	Objek Pemajuan Kebudayaan	0	7.157.205.100,00	0	2.715.289.675,00	0	38%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek	50	0	28	0	56%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	obyek	50	6.704.261.100,00	25	2.506.218.425,00	50%	37%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0	107.950.000,00	0	107.603.650,00	0	100%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya					Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	0	344.994.000,00	0	101.467.600,00	0	29%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	Kesenian	66	4.457.552.300,00	33	2.519.302.566,00	50%	57%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	47	2.637.289.000,00	25	1.240.556.806,00	53%	47%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	laporan	1	970.263.300,00	0	484.341.760,00	0%	50%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
2	022	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	sertifikat	1.010,00	850.000.000,00	1.010,00	794.404.000,00	100%	93%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
							5	6	7 = 6/5 x 100%				
2	022	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase peningkatan kesenian yang terreaktualisasi	%	2	1.617.330.890,00	0	424.883.790,00	0%	26%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	03	1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas Sumber Daya Pelaku Seni dan lembaga kesenian yang ditingkatkan	seniman	162	1.617.330.890,00	60	424.883.790,00	37%	26%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah jenis kesenian yang terreaktualisasi	kesenian	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	03	1.01	01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	orang	2.095,00	717.322.090,00	200	71.557.440,00	10%	10%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	03	1.01	03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	11	900.008.800,00	4	353.326.350,00	36%	39%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan pembinaan sejarah	%	5,2	225.000.000,00	0	128.505.500,00	0%	57%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	04	1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah dokumen Sejarah yang terinventarisir	Dokumen	232	225.000.000,00	120	128.505.500,00	52%	57%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	04	1.01	01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	jumlah SDM dan Lembaga Sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	orang	100	115.260.000,00	240	24.067.500,00	240%	21%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	04	1.01	03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	dokumen	231	109.740.000,00	272	104.438.000,00	118%	95%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan pelestarian cagar budaya	%	2,4	2.895.303.600,00	0	1.422.898.958,00	0%	49%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Presentase peningkatan pemeringkatan cagar budaya	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan di peringkatkan	Cagar Budaya	247	225.000.000,00	125	118.000.350,00	51%	52%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.01	01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	11	91.191.000,00	6	53.852.750,00	55%	59%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.01	02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	344	133.809.000,00	175	64.147.600,00	51%	48%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah cagar budaya yang di kelola	Cagar Budaya	479	2.670.303.600,00	292	1.304.898.608,00	61%	49%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.02	01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi/dilindungi	Objek	240	1.957.102.280,00	120	1.105.366.408,00	50%	56%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.02	02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	objek	10	101.800.000,00	6	62.105.500,00	60%	61%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.02	03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	201	467.258.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	05	1.02	04 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	100	144.143.320,00	240	137.426.700,00	240%	95%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan tatakelola museum Mpu Tantulur	%	5	4.429.416.800,00	0	1.668.672.822,00	0%	38%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Presentase peningkatan komunitas museum	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	06	1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah pengunjung museum yang tereduksi	Orang	450	4.429.416.800,00	150	1.668.672.822,00	33%	38%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Koleksi museum yang terawat	Koleksi	1.150,00	0	625	0	54%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	06	1.01	01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	unit	500	586.477.750,00	225	242.351.464,00	45%	41%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	06	1.01	03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	orang	400	1.231.743.650,00	150	374.016.805,00	38%	30%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	022	06	1.01	04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	unit	5	2.611.195.400,00	2	1.052.304.553,00	40%	40%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			29,5	24.597.835.660,00	0	9.973.286.813,00	0%	41%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW)	%	1	7.089.889.300,00	0	1.334.558.651,00	0%	19%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikelola	KSPP	2	4.729.889.300,00	1	1.334.558.651,00	50%	28%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.02	02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis pariwisata Provinsi	dokumen	4	825.000.000,00	1	142.294.720,00	25%	17%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.02	03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	kawasan	2	681.189.300,00	1	486.784.673,00	50%	71%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Usaha Pariwisata yang dikembangkan	usaha	82	0	60	0	73%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.02	05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	jumlah dokumen monev DPP	dok	0	810.500.000,00	0	297.169.217,00	0	37%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.02	06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	38	2.413.200.000,00	10	408.310.041,00	26%	17%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.02	07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	lokasi	12	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yg dikelola	DPP	2	2.360.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		8		
3	026	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	5	2.360.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri dan luar negeri	%	10	3.196.708.400,00	0	1.751.075.010,00	0%	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Persentase peningkatan cakupan pemasaran dalam negeri	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan baik di dalam dan luar negeri yang dipromosikan	Promosi	22	3.196.708.400,00	11	1.751.075.010,00	50%	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	7	571.208.400,00	3	271.043.456,00	43%	47%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	laporan	4	2.065.500.000,00	3	1.273.953.145,00	75%	62%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	dokumen	3	220.000.000,00	2	86.515.509,00	67%	39%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	dokumen	2	340.000.000,00	1	119.562.900,00	50%	35%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan pemanfaatan dan perlindungan HAKI produk-produk kreatif	%	10	3.600.000.000,00	0	1.542.556.000,00	0%	43%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Persentase peningkatan seni pertunjukan di Wilwatikta	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif yang terfasilitasi	Sarana prasarana	18	3.600.000.000,00	9	1.542.556.000,00	50%	43%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	laporan	200	300.000.000,00	50	42.556.000,00	25%	14%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	50	300.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	laporan	75	3.000.000.000,00	38	1.500.000.000,00	51%	50%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan sumber daya pariwisata dan ekraf	%	8,5	1.957.264.780,00	0	1.025.733.071,00	0%	52%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						Persentase peserta pembelajaran di lembaga seni	%	0	0	0	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang profesional	Orang	680	1.957.264.780,00	340	1.025.733.071,00	50%	52%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	orang	651	1.377.114.300,00	330	763.195.121,00	51%	55%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	05	1.01	08	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	30	80.000.000,00	15	39.849.000,00	50%	50%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	026	05	1.01	09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	1.520,00	500.150.480,00	760	222.688.950,00	50%	45%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	023				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			386,1	154.199.308.398,00	0	69.062.357.004,00	0%	45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	98	47.867.332.762,00	0	22.144.487.002,00	0%	46%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase realisasi anggaran	%	97	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Indeks profesionalitas ASN	%	70	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	11	242.546.269,00	0	130.777.648,00	0%	54%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	136.097.969,00	0	111.355.148,00	0%	82%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	9.935.900,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Dokumen RKA/SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	9.378.100,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA/SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	8.834.600,00	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Dokumen DPA/ SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA/SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	8.834.600,00	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA/SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA/SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	0	25.886.400,00	0	8.988.500,00	0	35%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	43.578.700,00	0	10.434.000,00	0	24%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	dokumen	17	39.639.412.187,00	0	18.348.910.805,00	0%	46%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	39.031.711.000,00	0	18.052.421.968,00	0	46%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	524.332.975,00	0	260.362.750,00	0	50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	Laporan	0	12.415.459,00	0	9.279.087,00	0	75%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	0	14.349.459,00	0	1.493.500,00	0	10%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Laporan	0	12.877.459,00	0	10.047.500,00	0	78%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	0	12.281.459,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	0	19.028.917,00	0	14.906.000,00	0	78%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis SKPD	Laporan	0	12.415.459,00	0	400.000,00	0	3%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp																			
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8																	
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	7.394.300,00	0	4.031.720,00	0%	55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2	023	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	7.394.300,00	0	4.031.720,00	0	55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian	Dokumen	6	198.649.557,00	0	124.647.440,00	0%	63%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2	023	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	14.450.000,00	0	5.385.000,00	0	37%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	90.713.500,00	1	90.495.000,00	100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2	023	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	0	7.385.500,00	0	3.713.080,00	0	50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	7.242.500,00	0	6.002.640,00	0	83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	21.311.300,00	0	9.551.720,00	0	45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	57.546.757,00	0	9.500.000,00	0	17%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan	Dokumen	11	725.164.262,00	0	403.786.857,00	0%	56%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
2	023	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Pakai Habis untuk Listrik	Paket	0	38.355.600,00	0	38.238.390,00	0	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Barang Persediaan Pakai Habis	Paket	0	30.363.500,00	0	5.225.000,00	0	17%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Barang Rumah Tangga Pakai Habis	Paket	0	39.582.500,00	0	39.360.045,00	0	99%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Barang Persediaan Pakai habis	Paket	0	147.617.700,00	0	100.754.540,00	0	68%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
2	023	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Foto Copy	Paket	0	33.924.500,00	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Foto Copy Majalah. Koran. Pengadaan Peraturan Perundang-undangan	Paket	12	37.980.000,00	0	25.260.000,00	0%	67%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Bangunan dan Lain-Lain	Paket	0	8.590.000,00	0	8.513.700,00	0	99%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan Makan. Minum. Akomsi. pengawalan. souvenir/cinderamata, plakat, sewa kendaraan	Paket	0	44.970.000,00	0	3.905.000,00	0	9%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	259.694.462,00	0	134.866.253,00	0	52%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	18.166.000,00	0	15.016.350,00	0	83%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang Didukung	Paket	0	65.920.000,00	0	32.647.579,00	0	50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	0	86.074.000,00	0	86.074.000,00	0	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0	86.074.000,00	0	86.074.000,00	0	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa	Dokumen	3	6.144.570.487,00	0	2.669.859.899,00	0%	43%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Bulan	0	360.000,00	0	360.000,00	0	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	12	0	100%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penyediaan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Bulan	0	1.087.162.481,00	0	417.620.622,00	0	38%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	Jasa	0	5.057.048.006,00	0	2.251.879.277,00	0	45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan	Dokumen	6	823.521.700,00	0	376.398.633,00	0%	46%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	134.629.700,00	0	73.848.200,00	0	55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	023	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	12	168.108.000,00	0	65.056.174,00	0%	39%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perjinannya	Unit	30	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	paket	1	10.815.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	5	109.969.000,00	0	38.030.500,00	0%	35%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	2	400.000.000,00	0	199.463.759,00	0%	50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0	2.987.181.774,00	0	659.494.118,00	0	22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.	Rasio	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	2,1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	11,71	2.162.530.689,00	0	537.539.835,00	0%	25%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi	%	0,12	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase Kepuasan Pemustaka	%	80,35	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan	Layanan	0	182.618.810,00	0	49.820.235,00	0	27%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan Elektronik yang dipelihara	Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan Elektronik yang Dipelihara dengan Managemen Layanan TIK Berbasis ISO 20000/ ITSM : Information Tecnologi Service	Perpustakaan	1	0	0,5	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kunjungan Mobil Perpustakaan Keiling	Kali	0	471.925.275,00	0	179.831.040,00	0	38%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Pemustaka di Jawa Timur	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan	Perpustakaan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Provinsi sesuai kewenangan	Perpustakaan	1	0	0,5	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Muatan Lokal	Judul	0	97.158.569,00	0	3.734.800,00	0	4%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Koleksi Perpustakaan daerah tingkat Provinsi	Eksemplar	110	0	31	0	28%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Koleksi Perpustakaan khas Daerah Tingkat Provinsi yang Dikembangkan	dokumen	110	0	10	0	9%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah sesuai Kewenangan yang Dibina	Perpustakaan	0	182.171.350,00	0	22.108.900,00	0	12%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan Sekolah Tingkat Menengah yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Sekolah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan Sekolah Menengah yang Terakreditasi	Sekolah	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan khusus yang dibina	Perpustakaan	100	0	60	0	60%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7	8	
						sesuai kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan								
2	023	02	1.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina	Perpustakaan	0	182.719.850,00	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	75	0	2	0	3%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	270.375.600,00	0	39.318.041,00	0	15%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang	125	0	63	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemustaka Layanan Rujukan di Jawa Timur	Orang	0	60.178.757,00	0	824.000,00	0	1%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Deposit	Kegiatan	0	45.632.610,00	0	17.477.728,00	0	38%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Koleksi Deposit yang dilayankan	Eksemplar	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Pemustaka Layanan Deposit	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Diadakan	Eksemplar	0	478.096.408,00	0	198.927.127,00	0	42%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Penambahan koleksi Perpustakaan	eksemplar	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah	eksemplar	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2.500,00	0	367	0	15%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.01	010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan penyusunan data perpustakaan	Kegiatan	0	191.653.460,00	0	25.497.964,00	0	13%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan yang mempunyai Nomor Pokok Perpustakaan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	100	0	118	0	118%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kegiatan	10	824.651.085,00	0	121.954.283,00	0%	15%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Gemar membaca	Lokus	5	457.279.369,00	0	45.514.366,00	0%	10%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Kegiatan Sosialisasi budaya baca dan literasi	kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan khusus	Lokus	5	0	3	0	60%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Perpustakaan	0	100.798.120,00	0	71.200.417,00	0	71%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah pojok baca yang dimiliki daerah Provinsi	Pojok baca	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Perpustakaan yang dipelihara	Perpustakaan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-tempat Umum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan	3	0	1	0	33%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	0	25.874.410,00	0	1.005.000,00	0	4%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	6	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Desa yang Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan Desa	0	190.612.600,00	0	4.234.500,00	0	2%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	02	1.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Duta Baca	Kegiatan	0	50.086.586,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	%	58	545.254.930,00	0	216.804.548,00	0%	40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	%	51	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	10	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang dilestarikan	Eksemplar	38.012,00	186.135.413,00	0	63.390.475,00	0%	34%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah KCKR yang Diolah	Eksemplar	0	98.679.933,00	0	63.390.475,00	0	64%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah KCKR yang diterima	Eksemplar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Koleksi KCKR yang terhimpun	Eksemplar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah kegiatan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	3.000,00	0	1.809,00	0	60%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	03	1.01	02	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Kegiatan Penghargaan Serah Simpan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2018	Orang/Penerbit	0	87.455.480,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit	10	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Literatur Sekunder yang diterbitkan Daerah	Naskah	1	122.728.938,00	0	74.678.013,00	0%	61%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Entry Daftar Tambahan Buku	Entry	0	118.554.200,00	0	74.678.013,00	0	63%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Katalog Induk Daerah	Entry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah KID dan literatur sekunder lainnya yang disusun	Entry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang Diterbitkan	Entry	4.000,00	0	1.589,00	0	40%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi daerah yang Diterbitkan	Naskah	1	4.174.738,00	0	0	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Eksemplar	25	143.219.850,00	0	78.736.060,00	0%	55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno	Kegiatan	0	71.795.600,00	0	58.569.960,00	0	82%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	10	0	32	0	320%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	023	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dialihmediaikan	Judul	0	71.424.250,00	0	20.166.100,00	0	28%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah pengadaan/ akuisisi naskah kuno	Eksemplar		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah kegiatan Pengolahan Naskah kuno	Kegiatan		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar		25	0	32	0	128%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dikembangkan	Eksemplar	300	93.170.729,00	0	0	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.04	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kegiatan	0	77.211.700,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Judul		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Koleksi Budaya etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar		300	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	023	03	1.04	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah	Judul	0	15.959.029,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya etnis Nusantara	Eksemplar		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan dilakukan Penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar		300	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			185,5	2.332.285.534,00	0	797.101.378,00	0%	34%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	50	1.938.895.034,00	0	656.607.866,00	0%	34%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	50	777.041.000,00	0	236.533.845,00	0%	30%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%		29,63	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Aktif Perangkat Daerah	Nomor Arsip	0	111.115.600,00	0	17.614.300,00	0	16%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Kearsipan	Orang		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan Pondok Pesantren	Orang		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Peserta Sosialisasi Forum Komunikasi masyarakat Sadar Arip (FKMSA)	Orang		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Peserta Sosialisasi Forum Komunikasi Masyarakat Sadar Arsip (FKMSA) lomba FKMSA	Orang		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Peserta dialog Interaktif (Publikasi kearsipan)	Orang		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Arsip aktif yang dibuat daftar	Nomor arsip		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah arsip inaktif yang dibuat daftar	meter linier		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah arsip inaktif perangkat daerah	meter linier		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Arsip vital yang dibuat daftar	Nomor arsip		0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	berkas	47	0	3	0	6%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	024	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang terpelihara	Meter Linier	0	28.091.000,00	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Arsip yang disusutkan	Nomor arsip	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	4.500,00	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	024	02	1.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Yang Dimonev Pengawasan Kearsipan	kab/kota	0	637.834.400,00	0	218.919.545,00	0	34%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan	PD	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Lembaga Pencipta Arsip yang tertib kearsipan	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Laporan	85	0	24	0	28%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	024	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	12,49	759.022.517,00	0	375.630.771,00	0%	49%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah laporan penyampaian arsip terjaga	Dokumen	0	43.230.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang disampaikan ke ANRI	Nomor Arsip	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	024	02	1.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	Meter linier	0	715.792.517,00	0	375.630.771,00	0	52%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Arsip Statis yang Direstorasi	Lembar	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Arsip Vital Desa yang Direstorasi	Lembar	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Arsip yang Dilyankan	Nomor Akses	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Arsip yang Dirawat dan Dilestarikan	Meter linier	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Naskah Sumber Arsip yang Diterbitkan	Judul	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Pengguna Arsip	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Arsip Statis	Nomor Arsip	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Arsip Statis Yang Diolah	Nomor Arsip	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip	10	0	4	0	40%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
2	024	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	15	402.831.517,00	0	44.443.250,00	0%	11%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah arsip yang bisa diakses melalui SIKN/JIKN	Nomor Akses	0	48.730.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Arsip yang dimasukkan SIKN melalui JIKN	Nomor Akses	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	Pengguna	3.000,00	0	1.500,00	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
2	024	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan Terlatih	Orang	0	354.101.517,00	0	44.443.250,00	0	13%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah unit Kearsipan yang dilakukan Supervisi Pendampingan di OPD	PD	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah unit Kearsipan yang dilakukan Supervisi pendampingan di BUMD	BUMD	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD yang dibina)	LKD	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Arsiparis yang Tersertifikasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Pedoman/Peraturan yang ditetapkan	Pedoman/Peraturan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Lembaga Pencipta Arsip yang Dibina	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Sosialisasi/ Pemasarakatan Kearsipan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Arsiparis	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Publikasi/ Promosi Kearsipan	Kegiatan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Laporan	9	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan	9	0	3	0	33%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	75,5	282.213.500,00	0	105.612.662,00	0%	37%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	100	44.783.000,00	0	23.376.447,00	0%	52%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Inaktif yang dinilai	Nomor Berkas	0	23.358.000,00	0	7.375.000,00	0	32%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Keputusan Penetapan Pemusnahan	Keputusan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	Arsip	2.000,00	0	150	0	8%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Inaktif yang dimusnahkan	Nomor Arsip	0	21.425.000,00	0	16.001.447,00	0	75%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi dibawah 10 tahun yang Dimusnahkan	Berkas	17	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	%	80,5	73.655.000,00	0	15.668.847,00	0%	21%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Pelaksanaan Evakuasi dan Identifikasi	Kali	0	28.900.000,00	0	9.929.400,00	0	34%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Simulasi Penanganan Arsip Akibat Bencana	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Direstorasi Akibat Bencana	Lembar	0	44.755.000,00	0	5.739.447,00	0	13%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	550	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.03								
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	%	91,5	104.165.000,00	0	58.658.368,00	0%	56%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.03	01							
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Dokumen	0	42.275.000,00	0	19.759.344,00	0	47%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	3	0	2	0	67%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.03	02							
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Dokumen	0	33.230.000,00	0	21.497.560,00	0	65%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip	3	0	2	0	67%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.03	03							
		Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan Arsip Hasil Pemekaran Kab/Kota	Kali	0	28.660.000,00	0	17.401.464,00	0	61%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan, Penyelamatan bagi Pemekaran lintas Kabupaten/Kota	Arsip	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.04								
		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	%	81,5	23.140.000,00	0	3.009.000,00	0%	13%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.04	01							
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang diautentikasi	Nomor Arsip	0	11.570.000,00	0	3.009.000,00	0	26%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	2.200,00	0	1.050,00	0	48%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.04	02							
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Hasil Alih Media yang Diautentikasi	Lembar	0	11.570.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	2.200,00	0	1.060,00	0	48%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.05								
		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	%	100	36.470.500,00	0	4.900.000,00	0%	13%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	03	1.05	01							
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Penilaian Arsip yang dinyatakan Hilang	Dokumen	0	11.570.000,00	0	4.900.000,00	0	42%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang berdasarkan Penilaian dan Penetapan	Arsip	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.05	02							
		Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Laporan Evaluasi Penetapan Arsip yang Dinyatakan Hilang	Dokumen	0	11.570.500,00	0	0	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	03	1.05	03							
		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0	13.330.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	024	04									
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	%	60	111.177.000,00	0	34.880.850,00	0%	31%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	04	1.01								
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	dokumen	1	111.177.000,00	0	34.880.850,00	0%	31%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	024	04	1.01	01							
		Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Penerapan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kali	0	81.800.000,00	0	18.803.350,00	0	23%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah Rapat Teknis Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	SOP	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8					
		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup yan Disusun dan Ditetapkan	SOP	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
2	024	04	1.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Tertutup	Dokumen	0	29.377.000,00	0	55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
					Jumlah Daftar Arsip yang bersifat Tertutup	Daftar Arsip		0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
					Jumlah Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Nomor Arsip		0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
					Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan ijin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Arsip		2	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
3	025				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.517.576,58	707.591.087.875,00	1.918.932,68	228.056.270.801,00	42%	32%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	%	92	124.852.371.000,00	0	49.868.486.713,00	0%	40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Persentase realisasi anggaran		%	92	0	28,46	0	31%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Indeks profesionalitas ASN		Indeks	85,6	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	12	4.047.614.001,00	3	1.115.971.135,00	25%	28%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen		3	0	3	0	100%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	11	3.426.330.101,00	3	773.776.815,00	27%	23%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	14.400.000,00	0	0	0%	0%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	12.150.000,00	0	0	0	0%	0%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capain kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		8	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	594.733.900,00	0	342.194.320,00	0	58%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		17	0	9	0	53%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Orang	12	84.038.751.128,00	6	35.324.067.480,00	50%	42%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	80.168.710.000,00	0	34.108.751.269,00	0	43%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		387	0	346	0	89%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	2.277.695.928,00	0	629.491.950,00	0	28%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Laporan		0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Laporan		0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPP Popoh	Laporan		0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPP Puger	Laporan		0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPP Muncar	Laporan		0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPP Bulu	Laporan		0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPP Pasongsongan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PMP2KP Surabaya	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PMP2KP Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	025	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	1.069.030.000,00	0	301.859.614,00	0	28%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PPP Puger	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PPP Bulu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PPP Pasongsongan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT Popoh	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT Muncar	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PMP2KP Surabaya	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PMP2KP Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	35.000.000,00	0	900.000,00	0	3%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	488.315.200,00	0	283.064.647,00	0	58%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan keuangan di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan keuangan di UPT PPP Puger	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan keuangan di UPT PPP Bulu	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan keuangan di UPT PPP Pasongsongan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah laporan keuangan di UPT PPP Popoh	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah laporan keuangan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di UPT PMP2KP Surabaya	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di UPT PMP2KP Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di UPT PPP Muncar	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan keuangan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	0	8	0	44%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	025	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	025	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	977.517.500,00	6	293.456.840,00	50%	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	0	494.417.500,00	0	50.416.750,00	0	10%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	119.700.000,00	0	48.820.000,00	0	41%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	13.400.000,00	0	0	0	0%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	0	350.000.000,00	0	194.220.090,00	0	55%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	8.000.000,00	6	1.900.000,00	50%	24%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Obyek Retribusi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi	Laporan	0	8.000.000,00	0	1.900.000,00	0	24%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	300.504.000,00	6	216.934.000,00	50%	72%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana yang terpenuhi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	676	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	50.504.000,00	0	14.664.000,00	0	29%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	250.000.000,00	0	202.270.000,00	0	81%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	0	50	0	100%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	6.580.458.511,00	6	2.646.875.293,00	55%	40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	658.253.674,00	0	187.424.778,00	0	28%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	2	0	100%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	4.767.686.067,00	0	2.050.748.505,00	0	43%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah barang daerah yang dikelola di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah barang daerah yang dikelola di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	025	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	0	958.905.270,00	0	379.830.510,00	0	40%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9	0	4	0	44%	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	025	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	190	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
3	025	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	0	94.245.000,00	0	2.155.000,00	0	2%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
					Jumlah paket pengadaan di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah paket pengadaan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah paket pengadaan di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	025	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	8	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	50.120.000,00	0	26.716.500,00	0	53%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	Dokumen	0	51.248.500,00	0	0	0	0%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah daftar arsip inaktif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah daftar arsip vital	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	500	0	279	0	56%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	11	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Set	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Paket	4	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	25.468.213.790,00	6	8.844.563.591,00	50%	35%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	31.167.952,00	0	7.611.820,00	0	24%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPP Pasongsongan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	6.667.554.149,00	0	2.648.809.441,00	0	40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPP Popoh	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPP Puger	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPP Muncar	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPP Bulu	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPP Pasongsongan	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PMP2KP Surabaya	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PMP2KP Banyuwangi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	025	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	025	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	18.769.491.689,00	0	6.188.142.330,00	0	33%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	025	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12	3.431.312.070,00	6	1.424.718.374,00	50%	42%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	025	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	Paket	0	72.835.000,00	0	21.438.900,00	0	29%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	26	0	12	0	46%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3	025	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	Paket	0	1.435.198.540,00	0	402.571.259,00	0	28%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
						Jumlah jasa di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4							8			
		Jumlah jasa di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	247	0	112	0	45%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	1.923.278.530,00	0	52%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	25	0	83%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah terpeliharanya aset tetap lainnya	Lapora	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah terpeliharanya aset tak berwujud	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah gedung yang dipelihara di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Dirchabilitasi	Unit	27	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PPP Puger	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PPP Muncar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PPP Bulu	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PPP Pasongsongan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PPP Popoh	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PMP2KP Surabaya	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT PMP2KP Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT Pelatihan Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
		Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	381	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	025	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	%	4	13.461.020.518,00	6,38	2.601.908.031,00	160%	19%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah produksi garam rakyat	Ton	306.000,00	0	1.155,25	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Guna	Ha	10	0	2	0	20%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Ha	36.500,00	4.279.779.588,00	476,78	1.453.835.204,00	1%	34%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Luasan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut sesuai zonasinya	Ha	200	0	17.687,09	0	8844%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	dokumen	1	841.882.500,00	0	420.364.043,00	0%	50%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Ruang Laut	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	kawasan	0	398.311.123,00	0	79.313.780,00	0	20%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi pengelolaan kawasan konservasi	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	36.476,78	0	953,56	0	3%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Ha	0	2.900.470.175,00	0	903.712.481,00	0	31%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan terumbu karang yang terabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan mangrove di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan terumbu karang di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi rencana pembentukan kawasan konservasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan mangrove di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan terumbu karang di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi rencana pembentukan kawasan konservasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan mangrove di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan terumbu karang di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi rencana pembentukan kawasan konservasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan mangrove di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah luasan terumbu karang di zona inti yang terabilitasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi rencana pembentukan kawasan konservasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	7	0	2,5	0	36%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	025	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi mitigasi bencana di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Orang	0	139.115.790,00	0	50.444.900,00	0	36%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi mitigasi bencana di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi mitigasi bencana di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat pesisir yang terakses informasi mitigasi bencana di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	142	0	105	0	74%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	12	823.500.000,00	20	281.345.178,00	167%	34%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah stakeholder terakses informasi pengajuan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	Orang	60	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang Diterbitkan	rekomendasi izin	0	437.500.000,00	0	188.774.700,00	0	43%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi	40	0	23	0	58%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah masyarakat lokal dan tradisional yang terakses informasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi masyarakat lokal dan tradisional	Orang	0	136.000.000,00	0	31.771.100,00	0	23%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah rekomendasi izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang diterbitkan	rekomendasi izin	0	50.000.000,00	0	15.409.683,00	0	31%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	0	8	0	800%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Persentase izin lokasi perairan dalam sistem kadaster laut yang terinventarisir	%	0	200.000.000,00	0	45.389.695,00	0	23%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	300	8.357.740.930,00	220	866.727.649,00	73%	10%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah KUGAR yang terfasilitasi sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	0	6.809.900.400,00	0	507.208.180,00	0	7%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah petambak garam rakyat yang terakses informasi usaha garam rakyat	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang terfasilitasi	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah jenis data statistik produksi garam rakyat	Jenis Data	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150	0	220	0	147%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah stakeholder yang terakses informasi pengelolaan pesisir dan pulau- pulau kecil	Orang	0	180.000.000,00	0	62.361.091,00	0	35%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	40	0	0	0	0%	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah masyarakat pesisir yang terakses teknologi dan informasi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	orang	0	1.367.840.530,00	0	297.158.378,00	0	22%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah masyarakat pesisir yang terakses pengelolaan sampah plastik	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan teknis pesisir dan pulau-pulau kecil di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	447.460,00	72.934.863.239,00	184.446,17	8.540.362.682,00	41%	12%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	0,08	0	-2,88	0	-3600%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan	Ton	148.197,00	7.419.652.857,00	65.391,22	1.909.402.754,00	44%	26%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah KUB nelayan yang terfasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap	Kelompok	52	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah jenis data statistik perikanan tangkap	Jenis data	0	1.262.080.300,00	0	454.943.072,00	0	36%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah KUB nelayan yang terfasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan	kelompok	0	1.333.252.000,00	0	69.572.381,00	0	5%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4	0	2	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan yang terakses informasi pemberdayaan nelayan	orang	0	4.824.320.557,00	0	1.384.887.301,00	0	29%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan tangkap di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah KUB nelayan yang terfasilitasi sarana alat bantu penangkapan	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	455	326.973.200,00	233	138.066.000,00	51%	42%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 - 30 GT yang diterbitkan	rekomendasi izin	0	326.973.200,00	0	138.066.000,00	0	42%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengajuan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 - 30 GT yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengajuan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 10 - 30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengajuan izin usaha perikanan tangkap kapal 10 - 30 GT yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Pengajuan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran diatas 10-30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	450	0	233	0	52%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	13	253.872.900,00	10	76.817.440,00	77%	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang diterbitkan	rekomendasi izin	0	253.872.900,00	0	76.817.440,00	0	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengajuan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengajuan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pengajuan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diverifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
		Jumlah Pengajuan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diverifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	7	0	10	0	143%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.05							DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tanda Daftar	243	369.694.000,00	158	146.934.678,00	65%	40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.05	02						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	tanda daftar	0	369.694.000,00	0	146.934.678,00	0	40%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah pengajuan tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan TDKP	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah pengajuan tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan TDKP	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah pengajuan tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	pengajuan TDKP	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah Pengajuan tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Pengajuan TDKP	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Dokumen	190	0	158	0	83%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.06							DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	Kapal	8.686,00	63.622.277.607,00	9.718,00	5.983.541.065,00	112%	9%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	Lokasi	14	0	9	0	64%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.06	01						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Lokasi	0	16.813.585.149,00	0	1.126.354.045,00	0	7%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	11	0	9	0	82%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.06	02						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPT/Instalasi yang terfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	unit kerja	0	42.686.034.394,00	0	4.127.946.811,00	0	10%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT PPP Muncar	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi di UPT PPP Bulu	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi di UPT PPP Pasongsongan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi di UPT Pelabuhan Popoh	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi di UPT PPP Puger	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	1.234,00	0	1.193,00	0	97%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.06	03						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan di UPT PPP Muncar	Dokumen	0	4.122.658.064,00	0	729.240.209,00	0	18%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan di UPT PPP Bulu	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan di UPT PPP Pasongsongan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan di UPT Pelabuhan Popoh	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan di UPT PPP Puger	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	17	0	34	0	200%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan di UPT PPP Popoh	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah laporan hasil pemantauan kelautan dan perikanan di UPT PPP Popoh	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan di UPT PPP Puger	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah laporan hasil pemantauan kelautan dan perikanan di UPT PPP Puger	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan di UPT PPP Muncar	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah laporan hasil pemantauan kelautan dan perikanan di UPT PPP Muncar	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan di UPT PPP Bulu	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Jumlah laporan hasil pemantauan kelautan dan perikanan di UPT PPP Bulu	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan di UPT PPP Pasongsongan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Jumlah laporan hasil pemantauan kelautan dan perikanan di UPT PPP Pasongsongan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3	025	03	1.07		Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	17	187.560.750,00	11	27.524.900,00	65%	15%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	rekomendasi	0	187.560.750,00	0	27.524.900,00	0	15%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	20	0	15	0	75%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan	Rekomendasi Izin	14	203.314.925,00	13	19.876.660,00	93%	10%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	rekomendasi	0	203.314.925,00	0	19.876.660,00	0	10%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi	11	0	12	0	109%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar	Kapal	73	283.525.700,00	86	177.595.185,00	118%	63%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	buku kapal	0	283.525.700,00	0	177.595.185,00	0	63%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan 10 - 30 GT yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT yang di verifikasi	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2				3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
					oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar									
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	150	0	86	0	57%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	Kapal	16	267.991.300,00	15	60.604.000,00	94%	23%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	buku kapal	0	267.991.300,00	0	60.604.000,00	0	23%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar	Pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang	pengajuan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	15	0	15	0	100%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.326.373,33	35.781.905.520,00	652.564,92	11.822.729.312,00	49%	33%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	1	137.772.162,00	0	51.359.637,00	0%	37%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya air payau dan air tawar yang diterbitkan	rekomendasi izin	0	125.547.774,00	0	39.882.137,00	0	32%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin usaha perikanan budidaya air payau dan air tawar yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan izin usaha perikanan budidaya Air Payau dan Air Tawar yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah permohonan izin usaha perikanan budidaya Air Payau dan Air Tawar yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah permohonan izin usaha perikanan budidaya Air Payau dan Air Tawar yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang terakses informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan	Orang	0	12.224.388,00	0	11.477.500,00	0	94%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	1	205.153.278,00	0	80.878.074,00	0%	39%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan budidaya Laut yang diterbitkan	rekomendasi izin	0	205.153.278,00	0	80.878.074,00	0	39%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin usaha perikanan budidaya Laut yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah permohonan izin usaha perikanan budidaya Laut yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan izin usaha perikanan budidaya Laut yang di verifikasi di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Blitar	Pengajuan Izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pengajuan izin usaha perikanan budidaya Laut yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	pengajuan izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	0	1	0	100%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	025	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah ketersediaan benih bermutu	Ekor	4.400.000,00	9.986.803.492,00	1.420.000,00	4.775.173.181,00	32%	48%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	Kelompok	2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pelaku usaha budidaya laut yang terakses pembinaan budidaya laut	Orang	20	0	4	0	20%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	18.800,00	0	316.213,70	0	1682%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis data statistik perikanan budidaya	Jenis data	0	231.272.216,00	0	69.218.221,00	0	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah UPT/Instalasi yang terfasilitasi prasarana budidaya laut	unit kerja	0	950.000.000,00	0	224.654.693,00	0	24%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi prasarana budidaya laut	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2	0	1	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT/Instalasi yang terfasilitasi prasarana budidaya air payau dan air tawar	unit kerja	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi prasarana budidaya Air Payau dan Air Tawar	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi prasarana budidaya Air Payau dan Air Tawar	Kelompok	0	2.646.559.724,00	0	958.392.850,00	0	36%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Produksi Benih Ikan Laut	Ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan teknis perikanan budidaya di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan pembinaan budidaya laut oleh UPT Budidaya Air Payau dan Laut	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah produksi ikan konsumsi laut	kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi ikan hasil produksi UPT/Instalasi perikanan budidaya	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan pembinaan budidaya air payau oleh UPT Budidaya Air Payau dan Laut	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah unit usaha budidaya yang memenuhi standar CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)	unit usaha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah unit usaha budidaya yang memenuhi standar CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik)	unit usaha	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pembudidaya ikan yang terakses informasi teknologi perikanan budidaya	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah POKDAKAN yang mendapatkan pembinaan budidaya air payau oleh UPT Budidaya Air Payau dan Laut	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah produksi benih ikan air payau	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah produksi ikan konsumsi air payau	kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya	kelompok	0	5.035.586.644,00	0	3.177.527.020,00	0	63%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah hasil pengujian kesehatan ikan dan lingkungan sesuai standar di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	hasil uji	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah lokasi penebaran ikan lokal Jawa Timur yang hampir punah	lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	512	0	466	0	91%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah lokasi pengendalian residu obat dan kontaminan	lokasi	0	1.123.384.908,00	0	345.380.397,00	0	31%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah lokasi pengendalian peredaran dan pemakaian obat ikan kimia dan biologi terregister	lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pembudidaya ikan yang terakses informasi kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah lokasi pengendalian penyebaran hama dan penyakit ikan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	lokasi	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah jenis ikan endemik lokal terdomestikasi di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (jenis)	jenis ikan	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah pembudidaya ikan yang terakses informasi pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan oleh UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah Pembudidaya	Orang	577	0	390	0	68%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah ketersediaan benih bermutu	ekor	16.000.000,00	25.452.176.588,00	13.679.100,00	6.915.318.420,00	85%	27%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	kelompok	110	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
		Jumlah pelaku usaha budidaya yang terakses pembinaan budidaya ikan di perairan darat	orang	800	0	128	0	16%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	56.400,00	0	336.351,22	0	596%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	04	1.06	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	26	14.763.200.573,00	8	2.536.254.827,00	31%	17%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	025	04	1.06	02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	10.688.976.015,00	0	4.379.063.593,00	0%	41%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	025	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Presentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	%	90	8.564.626.156,00	100	2.535.627.342,00	111%	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	025	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran usaha kelautan dan perikanan	Kasus	20	8.407.626.156,00	19	2.494.558.792,00	95%	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	025	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah luasan pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai 12 mil	ha	0	7.492.716.183,00	0	2.322.816.843,00	0	31%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	5	0	8	0	160%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah unit usaha perikanan tangkap sampai 12 mil laut yang diawasi	unit usaha	0	704.909.973,00	0	91.432.100,00	0	13%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	20	0	14	0	70%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah unit usaha perikanan budidaya sampai 12 mil yang diawasi	unit usaha	0	62.000.000,00	0	6.032.500,00	0	10%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	5	0	3	0	60%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Poskamladu yang beroperasi	unit	0	148.000.000,00	0	74.277.349,00	0	50%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	100	0	12	0	12%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
		Jumlah masyarakat pengawas yang terakses informasi pengawasan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
		Jumlah kapal pengawas yang beroperasi	Kapal	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
		Jumlah stakeholders yang terakses informasi penanganan tindak pidana kriminal	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penanganan pelanggaran usaha Kelautan dan Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	3	157.000.000,00	6	41.068.550,00	200%	26%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	025	05	1.02	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah unit usaha perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya yang diawasi	unit usaha	0	52.000.000,00	0	7.479.300,00	0	14%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	3	0	4	0	133%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah unit usaha perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangan yang diawasi	unit usaha	0	55.000.000,00	0	14.988.500,00	0	27%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	3	0	6	0	200%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3	025	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diawasi	unit usaha	0	50.000.000,00	0	18.600.750,00	0	37%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	3	0	8	0	267%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																					

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan UPI yang bersertifikat	Ton	1.093.955,63	15.792.907.567,00	1.080.311,28	6.212.163.166,00	99%	39%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Rekomendasi Izin	65	2.673.002.734,00	27	1.224.719.503,00	42%	46%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.01	02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	rekomendasi izin	0	651.115.412,00	0	282.138.204,00	0	43%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo	pengajuan izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar	pengajuan izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban	pengajuan izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengajuan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang di verifikasi oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang	pengajuan izin	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	30	0	29	0	97%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.01	03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang terakses informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	orang	0	2.021.887.322,00	0	942.581.299,00	0	47%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah stakeholder terakses informasi investasi di bidang kelautan dan perikanan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah jenis data statistik pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	jenis data	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah produk perikanan terstandarisasi jaminan mutu	Produk	360	8.419.904.833,00	428	2.488.960.445,00	119%	30%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Pengguna Layanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	Orang	800	0	1.008,00	0	126%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.02	01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah unit usaha terstandarisasi jaminan mutu	UPI	0	5.386.129.599,00	0	1.350.275.119,00	0	25%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah hasil pengujian sesuai standar di UPT PMP2KP Surabaya	Hasil uji	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah hasil pengujian sesuai standar di UPT PMP2KP Banyuwangi	Hasil Uji	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	350	0	200	0	57%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.02	02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah POKLAHSAR yang terfasilitasi sarana pengolahan	kelompok	0	3.033.775.234,00	0	1.138.685.326,00	0	38%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Diversifikasi Produk Hasil Kaji Terap di UPT PMP2KP Surabaya	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Diversifikasi Produk Hasil Kaji Terap di UPT PMP2KP Banyuwangi	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan teknis pengolahan dan pemasaran di UPT Pelatihan Teknis Kelautan, Perikanan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan	Unit Usaha	200	0	90	0	45%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
1	2	3	4							8				
		Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, da												
		Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang terakses informasi jaminan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah produk hasil perikanan yang tersertifikasi SNI di UPT PMP2KP Surabaya	Produk	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		Jumlah produk hasil perikanan yang tersertifikasi SNI di UPT PMP2KP Banyuwangi	Produk	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	025	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	Ton	220.000,00	4.700.000.000,00	426.610,85	2.498.483.218,00	194%	53%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersalurkan	Ton	175.000,00	0	187.811,85	0	0	107%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.03	01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ distribusi ikan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) provinsi	dokumen	0	1.672.753.800,00	0	1.185.860.675,00	0	71%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah masyarakat yang terakses informasi manfaat konsumsi ikan	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah omzet penjualan produk hasil perikanan	juta rupiah	0	2.363.023.200,00	0	989.989.342,00	0	42%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah POKLAHSAR yang terfasilitasi sarana logistik dan pemasaran hasil perikanan	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengolah dan pemasar ikan terakses informasi manajemen logistik ikan	orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	Unit Usaha	6	0	9	0	0	150%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang terakses informasi logistik ikan	orang	0	664.223.000,00	0	322.633.201,00	0	49%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	48	0	24	0	0	50%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	025	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelabuhan Perikanan Pantai	%	5	8.839.661.600,00	-7,66	3.086.837.528,00	-153%	35%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
					Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	%	92	0	55,94	0	0	61%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
					Persentase realisasi anggaran	%	92	0	35,48	0	0	39%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
					Indeks profesionalitas ASN	Indeks	85,6	0	129,26	0	0	151%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
					Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	%	70	0	93,75	0	0	134%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	64.040.800,00	0	1.419.000,00	0	2%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(indikator kosong)		0	10.000.000,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	(indikator kosong)		0	14.036.600,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	(indikator kosong)		0	14.036.600,00	0	460.000,00	0	3%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	(indikator kosong)		0	3.309.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	(indikator kosong)		0	3.309.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(indikator kosong)		0	7.048.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(indikator kosong)		0	12.300.400,00	0	959.000,00	0	8%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	0	3.161.097.800,00	0	1.404.233.759,00	0	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	2.683.443.000,00	0	1.174.088.498,00	0	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPP Mayangan	Laporan	0	420.808.000,00	0	216.610.761,00	0	51%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PPP Mayangan	Laporan	0	25.000.000,00	0	1.070.000,00	0	4%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan di UPT PPP Mayangan	Laporan	0	21.846.800,00	0	12.464.500,00	0	57%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(indikator kosong)		0	10.000.000,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	%	0	157.085.500,00	0	66.169.475,00	0	42%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	%	11	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Mayangan	Paket	0	10.000.000,00	0	5.333.550,00	0	53%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Mayangan	Paket	0	11.826.000,00	0	11.663.880,00	0	99%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Mayangan	Paket	0	9.956.700,00	0	9.712.000,00	0	98%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Mayangan	Paket	0	115.233.000,00	0	39.460.045,00	0	34%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan di UPT PPP Mayangan	Paket	0	10.069.800,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Pora	0	1.308.138.367,00	0	619.680.765,00	0	47%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah surat yang diproses	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapal	12	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(indikator kosong)		0	3.965.000,00	0	12.000,00	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPP Mayangan	Bulan	0	549.606.076,00	0	271.606.204,00	0	49%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPP Mayangan	Paket	0	754.567.291,00	0	348.062.561,00	0	46%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	49.299.133,00	0	16.240.225,00	0	33%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah laporan barang daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa di UPT PPP Mayangan	Paket	0	25.550.000,00	0	1.914.000,00	0	7%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara di UPT PPP Mayangan	Paket	0	13.935.533,00	0	12.651.225,00	0	91%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
3	025	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung yang dipelihara di UPT PPP Mayangan	Paket	0	9.813.600,00	0	1.675.000,00	0	17%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pengguna jasa yang terlayani	Laporan	0	4.100.000.000,00	0	979.094.304,00	0	24%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	Orang	88	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD	%	5	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengguna jasa yang terlayani di UPT PPP Mayangan	Orang	0	4.100.000.000,00	0	979.094.304,00	0	24%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	1,9	543.781.400,00	14,33	243.072.140,00	754%	45%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan	%	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase peningkatan kapasitas SDM non aparatur perikanan	%	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Produksi perikanan tangkap	Ton	447.460,00	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	0,08	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan	Ton	20.988,00	543.781.400,00	13.505,00	243.072.140,00	64%	45%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah kapal terlayani	Kapal	742	0	1.163,00	0	157%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah kapal perikanan yang bersandar di kolam pelabuhan	Kapal	742	0	1.100,00	0	148%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan	Dokumen	8.700,00	0	5.217,00	0	60%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah dokumen SHTI/SKPI yang diterbitkan	Dokumen	560	0	228	0	41%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan	Orang	175	0	110	0	63%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah laporan hasil pemantauan usaha kelautan dan perikanan	Laporan	12	0	12	0	100%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah kapal perikanan yang terlayani	Kapal	8.686,00	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	Lokasi	15	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi di UPT Mayangan	Unit	0	344.036.400,00	0	172.415.640,00	0	50%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan di UPT PPP Mayangan	Dokumen	0	199.745.000,00	0	70.656.500,00	0	35%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	025	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelabuhan Perikanan Pantai	%	0	3.564.406.385,00	0	1.471.593.878,00	0	41%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	%	92	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase realisasi anggaran	%	92	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Indeks profesionalitas ASN	Indeks	85,6	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	%	60	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	12	4.325.600,00	6	0	50%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	81.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	dokumen	0	81.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	dokumen	0	81.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	dokumen	0	81.400,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capain kinerja	dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	12	1.983.602.720,00	6	797.601.695,00	50%	40%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	1.742.015.000,00	0	655.567.301,00	0	38%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	232.927.000,00	0	139.525.594,00	0	60%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan verifikasi penatausahaan keuangan	laporan	0	5.530.000,00	0	2.420.000,00	0	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan	laporan	0	90.720,00	0	88.800,00	0	98%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis keuangan	laporan	0	3.040.000,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	168.350.100,00	0	85.382.843,00	0	51%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	0	7	0	64%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	22.900.400,00	0	13.637.460,00	0	60%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	25.618.000,00	0	18.469.340,00	0	72%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	paket	0	3.041.000,00	0	3.030.300,00	0	100%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	114.445.900,00	0	49.026.963,00	0	43%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	paket	0	2.344.800,00	0	1.218.780,00	0	52%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	654.826.396,00	0	284.923.852,00	0	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah surat yang diproses	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPP Tamperan	paket	0	2.520.000,00	0	1.538.960,00	0	61%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	0	331.077.066,00	0	134.535.287,00	0	41%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	0	321.229.330,00	0	148.849.605,00	0	46%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	72.905.049,00	0	6.151.050,00	0	8%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah laporan barang daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah barang daerah yang dikelola	Unit	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12	0	6	0	50%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa	paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara	unit	0	54.679.549,00	0	0	0	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	paket	0	5.625.500,00	0	3.455.550,00	0	61%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pengguna jasa yang terlayani	Orang	0	680.396.520,00	0	297.534.438,00	0	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	%	100	0	43,73	0	44%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD	%	11,39	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah pengguna jasa yang terlayani	orang	0	680.396.520,00	0	297.534.438,00	0	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0	358.005.135,00	0	107.768.454,00	0	30%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan	%	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase peningkatan kapasitas SDM non aparaturn perikanan	%	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	447.460,00	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	0,08	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	Lokasi	13	358.005.135,00	11	107.768.454,00	85%	30%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah kapal terlayani	Kapal	8.600,00	0	24.622,66	0	286%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan	Dokumen	1.200,00	0	1.686,00	0	141%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah dokumen SHTI/SKPI yang diterbitkan	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan	Orang	75	0	75	0	100%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah laporan hasil pemantauan usaha kelautan dan perikanan	Laporan	12	0	12	0	100%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi	unit	43	248.070.527,00	17	23.731.004,00	40%	10%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	025	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelaku usaha yang terakses sarana dan prasarana pelabuhan	orang	75	109.934.608,00	75	84.037.450,00	100%	76%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelabuhan Perikanan Pantai	%	0	3.876.476.300,00	0	1.661.143.191,00	0	43%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	%	92	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase realisasi anggaran	%	92	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Indeks profesionalitas ASN	Indeks	85,6	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	%	88	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	12	1.540.800,00	0	483.500,00	0%	31%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA di UPT Pondokdadap	dokumen	1	224.100,00	0	0	0%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan di UPT Pondokdadap	dokumen	1	224.100,00	0	0	0%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA di UPT Pondokdadap	dokumen	0,97	224.100,00	0	0	0%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan di UPT Pondokdadap	dokumen	1	224.100,00	0	0	0%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capain kinerja	Dokumen	12	149.400,00	6	0	50%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	12	495.000,00	6	483.500,00	50%	98%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	Dokumen	0	2.102.510.200,00	0	987.786.370,00	0	47%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	12	1.919.345.000,00	6	886.490.986,00	50%	46%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Pondokdadap	laporan	12	178.544.000,00	6	99.925.384,00	50%	56%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT Pondokdadap	laporan	12	3.127.200,00	6	1.000.000,00	50%	32%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan di UPT Pondokdadap	laporan	12	1.494.000,00	6	370.000,00	50%	25%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	0	1	0	100%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	38.989.200,00	0	19.173.400,00	0	49%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT Pondokdadap	paket	1	438.000,00	1	370.000,00	100%	84%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT Pondokdadap	paket	1	5.356.000,00	1	5.290.260,00	100%	99%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan di UPT Pondokdadap	paket	1	2.204.000,00	0	0	0%	0%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan di UPT Pondokdadap	paket	1	9.950.800,00	1	4.355.640,00	100%	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	025	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan di UPT Pondokdadap	paket	2	21.040.400,00	1	9.157.500,00	50%	44%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	1.042.460.200,00	0	471.278.034,00	0	45%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah surat yang diproses	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen di UPT Pondokdadap	paket	4	192.000,00	2	44.000,00	50%	23%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT Pondokdadap	bulan	12	396.959.802,00	6	178.933.309,00	50%	45%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT Pondokdadap	paket	4	645.308.398,00	2	292.300.725,00	50%	45%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	87.825.900,00	0	24.093.722,00	0	27%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah laporan barang daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah barang daerah yang dikelola	Unit	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa di UPT Pondokdadap	paket	4	87.825.900,00	2	24.093.722,00	50%	27%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara di UPT Pondokdadap	paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung yang dipelihara di UPT Pondokdadap	paket	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pengguna jasa yang terlayani	Orang	0	603.150.000,00	0	158.328.165,00	0	26%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	%	88	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD	%	5	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengguna jasa yang terlayani di UPT Pondokdadap	orang	0	603.150.000,00	0	158.328.165,00	0	26%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	0	146.018.700,00	0	28.353.086,00	0	19%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase penerbitan administrasi kesyahbandaran kapal perikanan	%	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase peningkatan kapasitas SDM non aparatur perikanan	%	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Produksi Perikanan Tangkap	Ton	447.460,00	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	0,08	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan	Ton	0	146.018.700,00	0	28.353.086,00	0	19%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah kapal perikanan yang bersandar di kolam pelabuhan	Kapal	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah kapal terlayani	Kapal	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah dokumen kesyahbandaran (SPB/STBLK) yang diterbitkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP				
		Jumlah dokumen SHTI/SKPI yang diterbitkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP				
		Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan	Orang	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP				
		Jumlah laporan hasil pemantauan usaha kelautan dan perikanan	Laporan	0	0	0	0	0	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP				
		Jumlah kapal perikanan yang terlayani	Kapal	8.686,00	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP				
		Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	Lokasi	15	0	0	0	0%	0	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP				
3	025	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi di UPT Pondokdadap	unit	0	87.196.000,00	0	1.498.500,00	0	2%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	025	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pelaku usaha terakses sarana dan prasarana pelabuhan di UPT PPP Pondokdadap	orang	0	58.822.700,00	0	26.854.586,00	0	46%	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	027	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	31.534.174.996,00	0	13.494.583.106,00	0%	43%	DINAS PERKEBUNAN
						Persentase realisasi anggaran	%	94	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
						Indeks profesionalitas ASN	%	75	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
						Predikat Penilaian Implementasi SAKIP	Nilai	84,5	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	0	900.000.000,00	0	358.781.235,00	0	40%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	dokumen	17	0	4	0	24%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	699.474.000,00	2	329.992.735,00	50%	47%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	5.375.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	5.375.000,00	0	725.000,00	0	13%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	5.375.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	5.375.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	79.332.000,00	0	10.760.000,00	0	14%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	1	0	20%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	99.694.000,00	0	17.303.500,00	0	17%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	55	24.777.000.000,00	24	11.046.073.804,00	44%	45%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	22.407.000.000,00	0	9.521.384.734,00	0	42%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	90	0	180	0	200%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	2.121.096.000,00	0	1.363.960.050,00	0	64%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	90	0	180	0	200%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan keuangan	Laporan	0	53.211.000,00	0	25.723.615,00	0	48%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	169.546.000,00	0	128.406.905,00	0	76%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	Laporan	0	5.675.000,00	0	5.648.500,00	0	100%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		8		
3	027	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas Pemeriksaan	Laporan	0	15.732.000,00	0	650.000,00	0	4%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Triwulan	Laporan	0	4.740.000,00	0	300.000,00	0	6%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	1	3.405.000,00	0	2.005.000,00	0%	59%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	1	3.405.000,00	0	2.005.000,00	0%	59%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	50	876.853.300,00	23	470.356.950,00	46%	54%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	kali	12	208.440.500,00	6	142.250.000,00	50%	68%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	kali	1	149.418.000,00	0	141.123.000,00	0%	94%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kali	12	212.410.800,00	6	100.212.975,00	50%	47%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	kali	0	144.904.000,00	0	69.890.975,00	0	48%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diikuti sertakan dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	0	161.680.000,00	0	16.880.000,00	0	10%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	0	7	0	54%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah	Paket	53	1.360.641.344,00	23	435.291.067,00	43%	32%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5	38.237.500,00	3	20.097.828,00	60%	53%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	21	1.000.953.552,00	11	297.597.700,00	52%	30%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	93.967.642,00	2	21.695.310,00	40%	23%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eksemplar	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	Paket	3	49.361.650,00	1	16.365.909,00	33%	33%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	15	160.739.000,00	7	78.544.320,00	47%	49%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	17.382.000,00	0	990.000,00	0%	6%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Paket	21	2.162.356.035,00	14	819.405.388,00	67%	38%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket	0	631.125.000,00	0	238.482.507,00	0	38%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	0	12	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	0	1.531.231.035,00	0	580.922.881,00	0	38%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	0	8	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	71	1.453.919.317,00	35	362.669.662,00	49%	25%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen	0	124.603.600,00	0	2.040.000,00	0	2%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	0	10	0	53%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	0	81.719.000,00	0	30.728.241,00	0	38%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	0	19	0	40%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokumen	0	1.247.596.717,00	0	329.901.421,00	0	26%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	0	3	0	43%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman semusim perkebunan	%	1	43.157.082.954,00	0	3.479.183.715,00	0%	8%	DINAS PERKEBUNAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2				3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8		
					Persentase peningkatan produksi tanaman tahunan perkebunan	%	0,5	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN	
					Persentase peningkatan benih bersertifikat	%	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN	
					Persentase pemenuhan kebutuhan benih tanaman perkebunan	%	1,2	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN	
3	027	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas budidaya tanaman perkebunan	Ha	5.600,00	35.010.615.754,00	0	1.873.710.112,00	0%	5%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana on farm	Kelompok	95	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Kelompok Tani yang terfasilitasi sarana off farm	Kelompok	125	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	62	35.010.615.754,00	29	1.873.710.112,00	47%	5%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian pada tanaman semusim	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan mutu benih tanaman perkebunan	Paket	486	8.146.467.200,00	337	1.605.473.603,00	69%	20%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih tersertifikasi	Benih	450	469.754.000,00	234	145.866.495,00	52%	31%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Inovasi Teknis Tanaman Tembakau	inovasi	0	7.676.713.200,00	0	1.459.607.108,00	0	19%	DINAS PERKEBUNAN
						Luas lahan pengembangan benih tanaman perkebunan	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
						persentase labelisasi benih yang tersertifikasi	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	36	0	16	0	44%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan yang difasilitasi sektor hilir	%	100	2.366.322.000,00	0	433.928.570,00	0%	18%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana kelompok sektor hilir perkebunan	Kelp	0	2.366.322.000,00	0	433.928.570,00	0	18%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Penataan Prasarana Pertanian	Dokumen	15	0	10	0	67%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kelompok tani rintisan korporasi perkebunan	kelp	0	655.298.000,00	0	131.381.000,00	0	20%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	6	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kelompok tani yang terfasilitasi sektor hilir	kelp	0	1.366.995.000,00	0	137.475.725,00	0	10%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Laporan	3	0	1	0	33%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah pelaksanaan koordinasi kelembagaan dan sektor hilir petani perkebunan	Kali	0	344.029.000,00	0	165.071.845,00	0	48%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	kali	6	0	4	0	67%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase pengamanan potensi kehilangan produksi tanaman perkebunan	%	5	2.890.000.000,00	0	775.299.740,00	0%	27%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah luas pengendalian dan penanggulangan bencana lahan perkebunan	Ha	0	2.890.000.000,00	0	775.299.740,00	0	27%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Laporan	3	0	1	0	33%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok terakses informasi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim Perkebunan	kelompok	0	2.300.000.000,00	0	670.884.040,00	0	29%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	143,75	0	50	0	35%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas penanganan konservasi	Ha	0	400.000.000,00	0	104.415.700,00	0	26%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	69,25	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah laporan penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan	Dokumen	0	190.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi teknis yang diberikan	%	100	195.746.000,00	0	99.752.750,00	0%	51%	DINAS PERKEBUNAN
3	027	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Sub Sektor Perkebunan	Dokumen	22	195.746.000,00	6	99.752.750,00	27%	51%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah rekomendasi teknis pengembangan usaha perkebunan	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi teknis pengembangan usaha perkebunan	rekomendasi	0	107.246.000,00	0	43.667.000,00	0	41%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	20	0	10	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kebun yang diberikan pembinaan	Kebun	0	88.500.000,00	0	56.085.750,00	0	63%	DINAS PERKEBUNAN
						Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	kebun	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERKEBUNAN
3	027	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani terakses Informasi Teknologi Pertanian	kelompok	236	16.353.461.050,00	0	3.610.831.204,00	0%	22%	DINAS PERKEBUNAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		7 = 6/5 x 100%																			
1					2					3					4					5					6					8				
3	027	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Dokumen	2	16.353.461.050,00	0	3.610.831.204,00	0%	22%	DINAS PERKEBUNAN																				
3	027	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Laporan	13	8.712.859.250,00	5	716.742.332,00	38%	8%	DINAS PERKEBUNAN																				
3	027	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	224	7.640.601.800,00	175	2.894.088.872,00	78%	38%	DINAS PERKEBUNAN																				
3	027	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	%	94	66.461.257.700,00	0	27.046.789.555,00	0%	41%	DINAS PETERNAKAN																				
						Persentase Realisasi Anggaran	%	95	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
						Indeks Profesionalitas ASN	%	85	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	15	851.764.700,00	0	455.733.765,00	0%	54%	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0	650.400.000,00	0	433.860.270,00	0	67%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah dokumen statistik peternakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	5.264.700,00	0	0	0%	0%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan RKA	Dokumen	0	3.500.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	4.000.000,00	0	700.000,00	0	18%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahanan DPA	Dokumen	0	2.000.000,00	0	1.200.000,00	0	60%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	0	70.000.000,00	0	12.279.395,00	0	18%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	0	3	0	150%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	116.600.000,00	0	7.694.100,00	0	7%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	0	3	0	60%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan	Dokumen	8	52.367.362.000,00	0	20.529.028.327,00	0%	39%	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	0	51.236.383.000,00	0	20.051.176.345,00	0	39%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	2.244,00	0	1.122,00	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	902.665.000,00	0	383.820.130,00	0	43%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi penatausahaan	Laporan	0	16.000.000,00	0	2.053.752,00	0	13%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	0	180.314.000,00	0	76.353.100,00	0	42%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0	24.000.000,00	0	14.050.500,00	0	59%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Laporan	0	4.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	3.000.000,00	0	1.574.500,00	0	52%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	0	1.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN																				
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah	Dokumen	2	225.800.000,00	0	91.250.250,00	0%	40%	DINAS PETERNAKAN																				
3	027	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan rencana kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	113.000.000,00	0	42.555.000,00	0	38%	DINAS PETERNAKAN																				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Laporan	0	24.000.000,00	0	9.095.250,00	0	38%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	0	88.800.000,00	0	39.600.000,00	0	45%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	6	2.974.552.000,00	0	1.393.510.133,00	0	47%	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	3.700.000,00	0	2.348.500,00	0	63%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	0	9.702.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	2.917.000.000,00	0	1.382.140.370,00	0	47%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	18.500.000,00	0	4.803.500,00	0	26%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	0	3.000.000,00	0	300.000,00	0	10%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	22.650.000,00	0	3.917.763,00	0	17%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	Dokumen	9	324.340.000,00	0	123.983.845,00	0	38%	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	19.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	46.000.000,00	0	3.115.750,00	0	7%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	16.500.000,00	0	2.824.000,00	0	17%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	19.000.000,00	0	6.656.940,00	0	35%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	55.200.000,00	0	7.514.700,00	0	14%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	13.800.000,00	0	2.299.500,00	0	17%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	Laporan	0	143.340.000,00	0	97.286.425,00	0	68%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	4.500.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah paket pengadaan	Paket	0	7.000.000,00	0	4.286.530,00	0	61%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan	Dokumen	1	94.500.000,00	0	37.630.000,00	0	40%	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	94.500.000,00	0	37.630.000,00	0	40%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	Dokumen	4	9.296.289.000,00	0	4.308.070.100,00	0	46%	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	3.000.000,00	0	2.453.500,00	0	82%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	1.743.989.000,00	0	817.355.322,00	0	47%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	
3	027	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa	Paket	0	1.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
3	027	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	7.548.300.000,00	0	3.488.261.278,00	0	46%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Magetan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah pelayanan umum Jasa UPT Kediri	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Jember	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Malang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Batu	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Tuban	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT IB	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Lab Malang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa pelayanan umum UPT Lab Tuban	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Jasa Pelayanan Umum UPT Madura	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan	Dokumen	2	326.650.000,00	0	107.583.135,00	0%	33%	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa	Paket	0	272.000.000,00	0	105.214.735,00	0	39%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	19	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	54.650.000,00	0	2.368.400,00	0	4%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43	0	47	0	109%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan ProduksiDaging	%	2,5	6.557.000.000,00	0	3.016.654.237,00	0%	46%	DINAS PETERNAKAN
						Persentase peningkatan produksi telur	%	2,2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Persentase Peningkatan ProduksiSusu	%	2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	5	50.000.000,00	0	33.365.550,00	0%	67%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Kelompok yang mengembangkan ternak sumber daya genetik hewan	Kelompok	0	50.000.000,00	0	33.365.550,00	0	67%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	38	835.000.000,00	0	446.773.854,00	0%	54%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok partisipatif penataan kawasan agropolitan	Kelompok	0	500.000.000,00	0	298.662.270,00	0	60%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah kelompok penerima APP	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah kelompok yang menerapkan Good Farming Practise	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah kelompok penerima manfaat ternak budidaya	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah kelompok penerima manfaat ternak bibit	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok perbibitan sapi perah yang dibina	Kelompok	0	285.000.000,00	0	139.912.189,00	0	49%	DINAS PETERNAKAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah kelompok sentra peternakan sapi perah yang dibina	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pengolahan pakan	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN				
3	027	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas pengawas mutu pakan yang mendapatkan pengembangan kapasitas	orang	0	50.000.000,00	0	8.199.395,00	0	16%	DINAS PETERNAKAN
		Jumlah petugas pengawas mutu bibit ternak yang mendapatkan pengembangan kapasitas	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	5	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN				
3	027	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	Dokumen	3	5.385.000.000,00	0	2.438.372.345,00	0%	45%	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah laporan pengendalian produksi Bibit Ternak	Laporan	0	4.335.000.000,00	0	2.048.433.870,00	0	47%	DINAS PETERNAKAN
		Jumlah produksi bibit ternak ayam buras sesuai standar mutu (UPT Magetan)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit Itik Mojosari yang dipasarkan (UPT Kediri)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit ternak Domba sesuai standar mutu (UPT Jember)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit hijauan makanan ternak yang dipasarkan (UPT Malang)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit HPT yang dipasarkan (UPT Batu)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit Sapi PO yang dipasarkan (UPT Tuban)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Madura)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah kelahiran ternak hasil Bioteknologi Reproduksi (IB)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Magetan)	stel	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit ayam buras yang dipasarkan (UPT Magetan)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah telur ayam buras yang dipasarkan (UPT Magetan)	butir	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit ternak itik sesuai standar mutu (UPT Kediri)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Kediri)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah telur itik Mojosari yang dipasarkan (UPT Kediri)	butir	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit hijauan makanan ternak yang dipasarkan (UPT Kediri)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Jember)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit Domba Sapudi yang dipasarkan (UPT Jember)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit hijauan makanan ternak yang dipasarkan (UPT Jember)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit ternak kambing sesuai standar mutu (UPT Malang)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Malang)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit kambing yang dipasarkan(UPT Malang)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah susu yang dipasarkan (UPT Malang)	liter	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit ternak sapi perah sesuai standart mutu (UPT Batu)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Batu)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit sapi perah yang dipasarkan (UPT Batu)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah susu yang dipasarkan (UPT Batu)	liter	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit ternak sapi potong sesuai standar mutu (UPT Tuban)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit hijauan makanan ternak (UPT Tuban)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah bibit hijauan makanan ternak yang dipasarkan (UPT Tuban)	stek	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah produksi bibit ternak Sapi Madura sesuai standar mutu (UPT Madura)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah Akseptor yang terlayani Inseminasi Buatan (IB)	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah semen beku berSNI yang terdistribusi ke Kabupaten/Kota	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah pelayanan Transfer Embrio	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
		Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN				
3	027	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Surat keterangan layak bibit ternak yang diterbitkan	Laporan	0	750.000.000,00	0	389.938.475,00	0	52%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Peredaran Bibit Ternak	laporan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan Hasil Pengujian (LHP)	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah sampel pakan yang diuji	sampel	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pakan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton	30.000.000,00	0	1.307.106,94	0	4%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Akseptor yang Terlayani Inseminasi Buatan (IB) dengan Benih/Bibit/Semen Beku New Breed / Jenis Baru	ekor	0	300.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Benih/Bibit Semen Beku Ternak new Breed/Jenis Baru yang tersedia dan terdistribusi (dosis)	dosis	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan	4	0	2	0	50%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah laporan pengawasan peredaran obat hewan	Dokumen	7	287.000.000,00	0	98.142.488,00	0%	34%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang diambil ditingkat distributor sesuai persyaratan yang ditentukan	sampel	0	74.000.000,00	0	6.123.000,00	0	8%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah sampel obat hewan yang diambil ditingkat pengecer sesuai persyaratan yang ditentukan	sampel	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	2	0	1	0	50%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah surat teguran atas penyimpangan yang ditemukan ditingkat distributor	Dokumen	0	213.000.000,00	0	92.019.488,00	0	43%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah laporan pengawasan obat hewan yang tidak memenuhi syarat mutu ditingkat distributor	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah laporan pengawasan obat hewan yang tidak memenuhi syarat mutu ditingkat pengecer	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah surat teguran atas penyimpangan yang ditemukan ditingkat pengecer	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah laporan pengawasan penggunaan obat hewan yang tidak memenuhi syarat mutu di unit pelayanan kesehatan hewan	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus	5	0	4	0	80%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	%	3	8.278.000.000,00	0	53.216.675,00	0%	1%	DINAS PETERNAKAN
3	027	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan / pemeliharaan yang dilakukan	Paket	2	8.128.000.000,00	0	23.991.316,00	0%	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Laporan pembangunan/pemeliharaan yang dilakukan	Laporan	3	0	0	0	0%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah pembangunan/ pemeliharaan Rumah sakit hewan	unit	0	50.000.000,00	0	23.991.316,00	0	48%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	jumlah pengelolaan cek point	paket	0	50.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS PETERNAKAN
					Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	Unit	28	0	0	0	0%	0	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelestarian Rumpun/ Galur Ternak	Dokumen	2	150.000.000,00	0	29.225.359,00	0%	19%	DINAS PETERNAKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Pelestarian Rumpun/Galur ternak	Laporan	0	75.000.000,00	0	19.957.660,00	0	27%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Pengawasan Wilayah Sumber bibit Ternak	Laporan	0	75.000.000,00	0	9.267.699,00	0	12%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan status kesehatan hewan	%	80	5.233.794.800,00	0	2.686.493.106,00	0%	51%	DINAS PETERNAKAN
						Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	%	5	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	%	3	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian PHMS	Laporan	1	2.528.263.600,00	0	1.447.812.004,00	0%	57%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah laporan bimbingan zoonosis kepada masyarakat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah masyarakat teredukasi zoonosis	orang	0	250.000.000,00	0	50.857.225,00	0	20%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah hewan/ternak yang menjadi kebal terhadap PHMS tertentu	ekor	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan/ternak yang divaksin PHMS Tertentu	ekor	0	1.878.263.600,00	0	1.239.641.344,00	0	66%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan penanggulangan	kab/kota	0	400.000.000,00	0	157.313.435,00	0	39%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan lalu lintas hewan	Dokumen	5	1.040.531.200,00	0	496.782.721,00	0%	48%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah laporan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Dokumen analisa resiko produk hewan	Dokumen	0	130.000.000,00	0	42.215.500,00	0	32%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Dokumen analisa resiko penyakit hewan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peredaran Produk Hewan	Dokumen	0	322.000.000,00	0	184.614.086,00	0	57%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	13	0	6	0	46%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah ternak yang terlayani Chek Point (Pos Pemeriksaan Kesehatan)	ekor	0	588.531.200,00	0	269.953.135,00	0	46%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan	16	0	8	0	50%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah pembinaan sertifikasi Unit Usaha	Kali	50	1.265.000.000,00	0	554.262.184,00	0%	44%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah unit usaha yang mendapatkan sertifikat	Unit	5	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah laporan pengujian produk hewan	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Penrapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Laporan	3	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1.853,00	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompartemen penyakit hewan menular strategis	unit	0	300.000.000,00	0	109.596.063,00	0	37%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah peternakan yang telah menerapkan Biosecurity 3 Zona	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit	3	0	2	0	67%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	kali	0	100.000.000,00	0	49.875.775,00	0	50%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan	20	0	17	0	85%	0	DINAS PETERNAKAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	027	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel pengujian produk hewan	sampel	0	865.000.000,00	0	394.790.346,00	0	46%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah layanan pengujian produk hewan (UPT Madura)	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah surveilans penyakit hewan Lab Malang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah layanan pengujian penyakit hewan Lab Tuban	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah surveilans produk hewan Lab Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah layanan pengujian produk hewan Lab Malang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah layanan pengujian penyakit hewan Lab Malang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah surveilans produk hewan Lab Tuban	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah layanan pengujian produk hewan Lab Tuban	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah surveilans penyakit hewan Lab Tuban	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	100	0	170	0	170%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	30	0	16	0	53%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1.285,00	0	792	0	62%	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	217	0	255	0	118%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sertifikasi persyaratan teknis yang diterbitkan	Sertifikat	20	100.000.000,00	0	47.884.000,00	0%	48%	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.04	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	sertifikat	0	100.000.000,00	0	47.884.000,00	0	48%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat	20	0	17	0	85%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	Jumlah laporan kesejahteraan Hewan	Dokumen	2	300.000.000,00	0	139.752.197,00	0%	47%	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah usaha produk hewan tersertifikasi NKV	unit	0	100.000.000,00	0	61.070.037,00	0	61%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	20	0	17	0	85%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pengawasan pengendalian pemotongan sapi betina produktif	Kab/Kota	0	200.000.000,00	0	78.682.160,00	0	39%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah masyarakat tereduksi Kesejahteraan Hewan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	%	2	300.000.000,00	0	121.985.399,00	0%	41%	DINAS PETERNAKAN
3	027	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan	Laporan	1	300.000.000,00	0	121.985.399,00	0%	41%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah laporan Izin Usaha Pertanian	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	umlah pelaku usaha yang dibina	Kelompok	0	300.000.000,00	0	121.985.399,00	0	41%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	4	0	7	0	175%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan	%	5	7.274.000.000,00	0	493.555.756,00	0%	7%	DINAS PETERNAKAN
3	027	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Dokumen	2	6.824.000.000,00	0	339.041.266,00	0%	5%	DINAS PETERNAKAN
3	027	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah promosi produk peternakan	kali	0	900.000.000,00	0	266.191.730,00	0	30%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok Hibah	Kelompok	0	5.924.000.000,00	0	72.849.536,00	0	1%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	50	0	13	0	26%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Dokumen	2	450.000.000,00	0	154.514.490,00	0%	34%	DINAS PETERNAKAN
3	027	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelompok yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi	Kelompok	0	300.000.000,00	0	97.617.525,00	0	33%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah kelompok terbina investasi/akses permodalan	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	027	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah kelompok ternak berprestasi	Kelompok	0	150.000.000,00	0	56.896.965,00	0	38%	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PETERNAKAN
3	028				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			241.398,23	5.324.539.455.649,00	629,97	2.369.141.915.803,00	0%	44%	DINAS KEHUTANAN
3	028	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	0,6	174.944.596.676,00	0	77.812.751.967,00	0%	44%	DINAS KEHUTANAN
						Persentase indikator program yang tercapai	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase indikator program yang tercapai di UPT PPHH	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase indikator program yang tercapai di UPT PTH	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase indikator program yang tercapai di UPT Tahura Raden Soerjo	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Pacitan	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Madiun	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4							8			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Trenggalek	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Malang	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Nganjuk	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Bojonegoro	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Lumajang	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Jember	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Banyuwangi	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase indikator program yang tercapai di CDK Wilayah Sumenep	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran	%	93	0	47,42	0	51%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di UPT PPHH	%	93	0	55,42	0	60%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di UPT PTH	%	93	0	53,69	0	58%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di UPT Tahura Raden Soerjo	%	93	0	44,47	0	48%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Pacitan	%	93	0	61,49	0	66%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Madiun	%	93	0	32,33	0	35%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Trenggalek	%	93	0	53,59	0	58%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Malang	%	93	0	68,46	0	74%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Nganjuk	%	93	0	61,66	0	66%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Bojonegoro	%	93	0	25,11	0	27%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Lumajang	%	93	0	61,36	0	66%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Jember	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Banyuwangi	%	93	0	45,36	0	49%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Persentase realisasi anggaran di CDK Wilayah Sumenep	%	93	0	19,61	0	21%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	2	490.590.400,00	0	149.190.449,00	0%	30%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di UPT PPHH	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di UPT PTH	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Pacitan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Madiun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Trenggalek	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Malang	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Nganjuk	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Lumajang	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Jember	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di UPT PPHH	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di UPT PTH	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Pacitan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Madiun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Trenggalek	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Malang	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Nganjuk	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Lumajang	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Jember	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di UPT PPHH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di UPT PTH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Pacitan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Madiun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Trenggalek	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Malang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Nganjuk	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Lumajang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Jember	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	225.760.400,00	0	58.500.000,00	0%	26%	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dokumen	0	22.986.400,00	0	1.808.800,00	0	8%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di UPT PPHH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di UPT PTH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di UPT Tahura Raden Soerjo	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah dokumen RKA di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN															
3	028	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	19.347.800,00	0	670.000,00	0	3%	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di UPT PPHH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di UPT PTH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di UPT Tahura Raden Soerjo	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah dokumen RKA Perubahan di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
3	028	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	0	2.100.000,00	0	0	0	0%	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
3	028	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	0	2.100.000,00	0	0	0	0%	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
3	028	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	0	103.164.960,00	0	55.288.449,00	0	54%	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di UPT PPHH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di UPT PTH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di UPT Tahura Raden Soerjo	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah dokumen capaian kinerja di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	4	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	115.130.840,00	0	32.923.200,00	0	29%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	1	161.302.144.000,00	0	70.707.561.440,00	0%	44%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di UPT PPHH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di UPT PTH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Malang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	159.492.995.000,00	0	69.902.355.914,00	0	44%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	771	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	1.307.906.640,00	0	581.670.305,00	0	44%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPHH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PTH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Tahura Raden Soerjo	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Pacitan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Trenggalek	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Jember	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Banyuwangi	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	213.980.520,00	0	102.183.900,00	0	48%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PPHH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di UPT PTH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Pacitan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Trenggalek	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Jember	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp										
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8								
1					2					3					4				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN									
3	028	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	237.594.840,00	0	115.170.461,00	0	48%	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di UPT PPHH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di UPT PTH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Pacitan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Trenggalek	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Jember	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	49.667.000,00	0	6.180.860,00	0	12%	DINAS KEHUTANAN					
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
3	028	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan	0	38.236.000,00	0	14.191.000,00	0	37%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di UPT PPHH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di UPT PTH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Jember	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Barang Daerah di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di UPT PPHH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di UPT PTH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Malang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikasi aset	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di UPT PPHH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di UPT PTH	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di UPT Tahura Raden Soerjo	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Banyuwangi	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen sertifikasi aset di CDK Wilayah Sumenep	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Jember	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	5	465.754.971,00	0	263.686.275,00	0%	57%	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di UPT PPHH	Orang	79	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di UPT PTH	Orang	28	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di UPT Tahura Raden Soerjo	Orang	145	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Pacitan	Orang	41	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Madiun	Orang	44	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Trenggalek	Orang	28	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Malang	Orang	35	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Nganjuk	Orang	40	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Bojonegoro	Orang	36	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Lumajang	Orang	41	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Jember	Orang	30	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Banyuwangi	Orang	24	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Sumenep	Orang	48	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	0	204.932.971,00	0	143.535.000,00	0	70%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Banyuwangi	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah pengadaan pakaian dinas di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	3.350.000,00	0	3.350.000,00	0	100%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	182.692.000,00	0	108.088.400,00	0	59%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di UPT PPHH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah laporan skp yang tepat waktu di UPT PTH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di UPT Tahura Raden Soerjo	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Pacitan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Trenggalek	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Jember	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																										
3	028	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	0	74.780.000,00	0	8.712.875,00	0	12%	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di UPT PPHH	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di UPT PTH	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di UPT Tahura Raden Soerjo	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Pacitan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Madiun	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Trenggalek	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Malang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Nganjuk	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Bojonegoro	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Lumajang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Jember	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Banyuwangi	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah bimtek yang dilaksanakan di CDK Wilayah Sumenep	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di UPT PPHH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di UPT PTH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di UPT Tahura Raden Soerjo	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Pacitan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Madiun	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Trenggalek	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Malang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Bojonegoro	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Jember	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Banyuwangi	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di CDK Wilayah Sumenep	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	300	0	130	0	43%	0	DINAS KEHUTANAN																										
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	79	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																										

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	145	0	6	0	4%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	41	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	41	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	24	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	0	50	0	104%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kualitas pelayanan publik	Laporan	0	3.808.519.249,00	0	2.558.823.916,00	0	67%	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di UPT PPHH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di UPT PTH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di UPT Tahura Raden Soerjo	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Pacitan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Madiun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Trenggalek	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Malang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Nganjuk	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Bojonegoro	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Lumajang	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Jember	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah surat yang diproses di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di UPT PPHH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di UPT PTH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Malang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	990.701.022,00	0	958.141.332,00	0	97%	DINAS KEHUTANAN
					jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	10.910.000,00	0	5.353.000,00	0	49%	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	595.170.966,00	0	417.695.793,00	0	70%	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	429.520.582,00	0	318.807.462,00	0	74%	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	219.038.079,00	0	137.006.048,00	0	63%	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	18.780.000,00	0	6.690.000,00	0	36%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	750.100,00	0	750.098,00	0	100%	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	146.113.500,00	0	48.933.900,00	0	33%	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah paket pengadaan di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	1.397.535.000,00	0	665.446.283,00	0	48%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di UPT PPHH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di UPT PTH	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di UPT Tahura Raden Soerjo	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Pacitan	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Trenggalek	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Nganjuk	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Lumajang	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Jember	laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4							8			
		Jumlah Laporan di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan	0	319.782.500,00	0	274.342.936,00	0	86%	DINAS KEHUTANAN
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di UPT PPHH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di UPT PTH	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Madiun	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Malang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Jember	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di UPT PPHH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di UPT PTH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Malang	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	unit	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	unit	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah kendaraan	Unit	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	0	29.924.000,00	0	10.630.000,00	0	36%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di UPT PPHH	Jumlah Mebel di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di UPT PTH	Jumlah Mebel di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di UPT Tahura Raden Soerjo	Jumlah Mebel di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Pacitan	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Madiun	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Trenggalek	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Malang	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Nganjuk	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Bojonegoro	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Lumajang	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Jember	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Banyuwangi	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Mebel di CDK Wilayah Sumenep	Jumlah Mebel di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	289.858.500,00	0	263.712.936,00	0	91%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di UPT PPHH	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di UPT PTH	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di UPT Tahura Raden Soerjo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Pacitan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Madiun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Trenggalek	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Malang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Bojonegoro	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Lumajang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Jember	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Banyuwangi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Sumenep	Jumlah peralatan dan mesin lainnya di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8	
1	2	3	4							8		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	7	0	700%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	1	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
3	028	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Madiun	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Malang	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Bojonegoro	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Banyuwangi	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud yang diadakan di CDK Wilayah Sumenep	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah gedung di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah gedung di CDK Wilayah Sumenep	paket	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya	unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di UPT PPHH	unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di UPT PTH	unit	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8	
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di UPT Tahura Raden Soerjo	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Pacitan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Madiun	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Trenggalek	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Malang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Nganjuk	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Bojonegoro	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Lumajang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Jember	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Banyuwangi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah sarpras gedung atau bangunan lainnya di CDK Wilayah Sumenep	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
3	21.08	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	6.833.163.246,00	0	3.060.096.583,00	0%	45%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di UPT PPHH	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di UPT PTH	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di UPT Tahura Raden Soerjo	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Pacitan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Madiun	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Trenggalek	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Malang	3	0	3	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Nganjuk	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Bojonegoro	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Lumajang	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Jember	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Banyuwangi	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																					
3	21.08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	15.990.000,00	0	6.671.500,00	0	42%	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah pengiriman dokumen di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
3	21.08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	1.704.987.988,00	0	874.066.169,00	0	51%	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PPHH	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT PTH	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Pacitan	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Madiun	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Trenggalek	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Malang	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Nganjuk	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Bojonegoro	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Lumajang	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Jember	bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Banyuwangi	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di CDK Wilayah Sumenep	Bulan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8				
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
3	21.08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	5.112.185.258,00	0	2.179.358.914,00	0	43%	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Madiun	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						jumlah paket pelayanan umum kantor di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Madiun	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Malang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Bojonegoro	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Banyuwangi	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Jasa di CDK Wilayah Sumenep	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
3	028	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	0	1.686.406.310,00	0	784.859.368,00	0	47%	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di UPT PPHH	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di UPT PTH	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di UPT Tahura Raden Soerjo	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Pacitan	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Madiun	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Trenggalek	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Malang	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Nganjuk	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Bojonegoro	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Lumajang	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Jember	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Banyuwangi	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Barang Daerah yang dikelola di CDK Wilayah Sumenep	Jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di UPT PPHH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di UPT PTH	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di UPT Tahura Raden Soerjo	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Malang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																		
3	028	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	0	481.151.500,00	0	277.317.820,00	0	58%	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Banyuwangi	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	7	0	700%	0	DINAS KEHUTANAN																		

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	028	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	517.857.810,00	0	258.192.532,00	0	50%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Madiun	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Jasa di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	0	2	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	75	0	30	0	40%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	0	6	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	1	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	0	1	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	0	1	0	25%	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	571.910.000,00	0	240.546.272,00	0	42%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	1	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	100%	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	0	3	0	15%	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah terpeliharanya aset tak berwujud	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aset tak berwujud terpelihara	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	115.487.000,00	0	8.802.744,00	0	8%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Yang Dipelihara di UPT PPHH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di UPT PTH	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di UPT Tahura Raden Soerjo	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Madiun	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Malang	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Bojonegoro	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Banyuwangi	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung yang dipelihara di CDK Wilayah Sumenep	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Pacitan	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Madiun	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Trenggalek	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Malang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Nganjuk	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Bojonegoro	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Lumajang	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Jember	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Banyuwangi	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah sarpras gedung/bangunan yang terpelihara di CDK Wilayah Sumenep	paket	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kemantapan kawasan hutan	%	68	11.584.583.869,00	0	5.844.776.919,00	0%	50%	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase Penurunan Gangguan Hutan	%	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Pacitan	%	0,16	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Madiun	%	1,03	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Trenggalek	%	0,29	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Malang	%	0,18	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Nganjuk	%	0,56	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Bojonegoro	%	0,79	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Lumajang	%	0,55	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Jember	%	1,05	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Banyuwangi	%	0,59	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Sumenep	%	0,54	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase peningkatan bibit tanaman hutan tersertifikasi	%	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase peningkatan produksi hasil hutan	%	1,5	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
				Persentase peningkatan unit usaha tertib penatausahaan hasil hutan	%	10	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN		
3	028	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penetapan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Dokumen	0	500.000.000,00	0	233.341.568,00	0	47%	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah dokumen penggunaan kawasan hutan	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah dokumen penetapan perubahan fungsi atau perubahan peruntukan kawasan hutan	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah dokumen data dan informasi Neraca Sumber Daya Hutan	dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah aktivitas fasilitasi perubahan fungsi dan peruntukan hutan	kali	0	500.000.000,00	0	233.341.568,00	0	47%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Luas kawasan hutan dengan status penetapan	Ha	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana penggunaan kawasan terpantau	dokumen	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah dokumen data dan informasi Neraca Sumber Daya Hutan	Dokumen	0	832.452.200,00	0	459.758.780,00	0	55%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
1								3	4	K	Rp	K	Rp		K	Rp	8
2										5	6	7 = 6/5 x 100%					
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Madiun	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Malang	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Jember	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah aktifitas Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Aktifitas Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan di Kawasan Hutan Lindung	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah pembinaan kepatuhan penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan (Kayu dan HHBK)	kali	0	213.775.000,00	0	136.322.555,00	0	64%	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah pembinaan kepatuhan penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan (Kayu dan HHBK)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah pembinaan kepatuhan penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan (HHBK)	kali	0	20.697.000,00	0	16.147.500,00	0	78%	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah pembinaan kepatuhan penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan (HHBK)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah rencana dan realisasi pengelolaan Kawasan Hutan Produksi yang dinilai	unit manajemen (KPH)	0	435.618.600,00	0	239.779.625,00	0	55%	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah dokumen rencana teknik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Banyuwangi	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah dokumen rencana tehnik tahunan yang dinilai di CDK Wilayah Sumenep	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah rencana dan realisasi pengelolaan Kawasan Hutan Lindung yang dinilai	unit manajemen (KPH)	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Pacitan	kelompok	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Madiun	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Trenggalek	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Malang	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Nganjuk	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Bojonegoro	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Lumajang	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Jember	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Banyuwangi	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Sumenep	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Pacitan	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Madiun	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Trenggalek	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Malang	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Nganjuk	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Bojonegoro	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Lumajang	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Jember	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Banyuwangi	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi legalitas pemanfaatan hutan di CDK Wilayah Sumenep	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Pacitan	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Madiun	Produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Trenggalek	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Malang	Produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Nganjuk	Produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Bojonegoro	Produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Lumajang	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Jember	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Pacitan	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Madiun	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Trenggalek	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Malang	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Nganjuk	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Bojonegoro	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Lumajang	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Jember	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Banyuwangi	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah produk yang dikembangkan (APBD) di CDK Wilayah Sumenep	produk	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
3	028	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit unggul tanaman hutan	Batang	0	7.453.067.604,00	0	4.035.385.340,00	0	54%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produksi benih tanaman hutan	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Pacitan	Ha	92,07	0	62,5	0	68%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Madiun	Ha	110,03	0	10	0	9%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Trenggalek	Ha	111,99	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Malang	Ha	123,75	0	95	0	77%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Nganjuk	Ha	60,9	0	60	0	99%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Bojonegoro	Ha	56,12	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Lumajang	Ha	155,75	0	125	0	80%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Jember	Ha	125,84	0	5	0	4%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Banyuwangi	Ha	75	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas area penanaman di CDK Wilayah Sumenep	Ha	221,5	0	25	0	11%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	195.821.800,00	0	131.763.180,00	0	67%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang ditetapkan di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Pacitan	Ha	0	3.906.754.804,00	0	3.289.515.060,00	0	84%	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Madiun	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Trenggalek	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Malang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Nganjuk	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Bojonegoro	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Lumajang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Jember	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Banyuwangi	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Pemeliharaan Hutan Rakyat di CDK Wilayah Sumenep	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Pacitan	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Madiun	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Trenggalek	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Malang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Nganjuk	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Bojonegoro	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Lumajang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Jember	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Banyuwangi	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (APBD) di CDK Wilayah Sumenep	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Pacitan	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Madiun	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Trenggalek	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Malang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Nganjuk	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Bojonegoro	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Lumajang	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Jember	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Banyuwangi	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Area Penanaman Hutan Rakyat di Lahan Kritis (DAK) di CDK Wilayah Sumenep	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	55,91	0	50	0	89%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	49,36	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	84,52	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	80	0	5	0	6%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	46,4	0	60	0	129%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	15,07	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	137	0	125	0	91%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	101,34	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	50	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	170,8	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Pacitan	batang	0	3.268.666.000,00	0	591.372.600,00	0	18%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Madiun	batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Trenggalek	batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Malang	batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Nganjuk	batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Bojonegoro	batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Lumajang	batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Jember	Batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Banyuwangi	Batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah bibit yang ditanam di CDK Wilayah Sumenep	Batang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	36,16	0	12,5	0	35%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	60,67	0	10	0	16%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	27,47	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	43,75	0	17,5	0	40%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%	
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	14,5	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	41,05	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	18,75	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	24,5	0	5	0	20%	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	25	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	112,5	0	25	0	22%	0	DINAS KEHUTANAN																									
3	028	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Pacitan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Madiun	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Trenggalek	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Malang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Nganjuk	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Bojonegoro	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Lumajang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Jember	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Banyuwangi	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA) yang terbangun di CDK Wilayah Sumenep	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Pacitan	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Madiun	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Trenggalek	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Malang	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Nganjuk	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Bojonegoro	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Lumajang	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Jember	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Banyuwangi	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Teknik KTA secara Terintegrasi (DAK) di CDK Wilayah Sumenep	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Pacitan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Madiun	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Trenggalek	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Malang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Nganjuk	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Bojonegoro	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Lumajang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Jember	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Banyuwangi	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terbangun (DAK) di CDK Wilayah Sumenep	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Pacitan	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									
						Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Madiun	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Trenggalek	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Malang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Nganjuk	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Bojonegoro	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Lumajang	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Jember	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Banyuwangi	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang terpelihara di CDK Wilayah Sumenep	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	23	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	12	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Sumber benih tanaman hutan yang dikelola	unit	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah persemaian tanaman hutan yang dikelola	unit	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah bibit tersertifikasi yang digunakan untuk rehabilitasi lahan	batang	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.04	07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Pacitan	demplot	0	12.462.500,00	0	2.562.500,00	0	21%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Madiun	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Trenggalek	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Malang	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Nganjuk	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Bojonegoro	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Lumajang	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Jember	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Banyuwangi	Demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas kaji terap teknologi rehabilitasi hutan di CDK Wilayah Sumenep	demplot	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Pacitan	kelompok	0	69.362.500,00	0	20.172.000,00	0	29%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Madiun	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Trenggalek	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Malang	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Kelompok yang Dibina di CDK Wilayah Nganjuk	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Bojonegoro	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Lumajang	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Jember	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah kelompok penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Banyuwangi	Kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Kelompok Penerima DAK Fisik yang dibina di CDK Wilayah Sumenep	kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	0	1	0	100%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
3	028	03	1.04	09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	5	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
3	028	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kelompok masyarakat terakses informasi perlindungan hutan	Kelompok	15	300.000.000,00	0	159.184.061,00	0%	53%	0	DINAS KEHUTANAN																
3	028	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Penurunan kebakaran hutan akibat aktivitas manusia	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah upaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan oleh manusia	kali	0	60.000.000,00	0	17.440.200,00	0	29%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
3	028	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	24	0	12	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah kasus konflik tenurial yang ditangani	kasus	0	90.000.000,00	0	36.184.924,00	0	40%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN																
3	028	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah aktivitas pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan	kali	0	150.000.000,00	0	105.558.937,00	0	70%	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	4	0	2	0	50%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
3	028	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Laporan	0	224.007.200,00	0	43.620.450,00	0	19%	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Pacitan	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Madiun	Kg	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Trenggalek	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Malang	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Lumajang	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Jember	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Sumenep	Kg	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah tenaga teknis unit usaha teredukasi pengukuran/pengujian hasil hutan	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah tenaga teknis unit usaha teredukasi pengukuran/pengujian hasil hutan	orang	75	0	46	0	61%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Pacitan	Kg	1.263.000,00	0	2.779.664,01	0	220%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Madiun	Kg	606.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Trenggalek	Kg	303.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Malang	Kg	19.000,00	0	83.705,00	0	441%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	Kg	1.212.000,00	0	245.667,05	0	20%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	Kg	101.000,00	0	74.960,00	0	74%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Lumajang	Kg	556.000,00	0	229.151,70	0	41%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Jember	Kg	15.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	Kg	20.000,00	0	609.783,00	0	3049%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Sumenep	Kg	30.000,00	0	29.666,48	0	99%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Pacitan	jenis	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Madiun	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Trenggalek	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Malang	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Nganjuk	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Bojonegoro	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Lumajang	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Jember	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Banyuwangi	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Sumenep	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Pacitan	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Madiun	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Trenggalek	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Malang	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Nganjuk	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Bojonegoro	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Lumajang	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Jember	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Banyuwangi	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang diolah di CDK Wilayah Sumenep	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
3	028	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu terfasilitasi layanan di wilayah I	unit	0	189.195.200,00	0	34.902.750,00	0	18%	DINAS KEHUTANAN																									
					Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu terfasilitasi layanan di wilayah II	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu terfasilitasi layanan di wilayah I	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu terfasilitasi layanan di wilayah II	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	2	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	2	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	2	0	1	0	50%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	3	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	3	0	1	0	33%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	1	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	4	0	0	0	0%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
3	028	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Pacitan	jenis	0	34.812.000,00	0	8.717.700,00	0	25%	DINAS KEHUTANAN																									
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Madiun	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Trenggalek	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Malang	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Nganjuk	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Bojonegoro	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Lumajang	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								
					Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Jember	jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN																								

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4							8			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Banyuwangi	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Sumenep	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Pacitan	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Madiun	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Trenggalek	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Malang	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Nganjuk	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Bojonegoro	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Lumajang	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Jember	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Banyuwangi	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jenis bahan baku hasil hutan bukan kayu yang dibudidayakan di CDK Wilayah Sumenep	jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	3	0	1	0	33%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibina	unit usaha	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah unit usaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibina	unit	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibina	unit usaha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah unit usaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang dibina	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah kayu legal terperiksa	m3	0	1.893.256.865,00	0	792.019.320,00	0	42%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Pacitan	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Madiun	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Trenggalek	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Malang	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Lumajang	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Jember	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Sumenep	m3	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah PBPHH yang terfasilitasi SVLK	unit manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah laporan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu	laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah PBPHH yang terfasilitasi SVLK	unit mnagemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah kayu legal terperiksa	m3	1.400.000,00	0	453.003,66	0	32%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH	dokumen	18.800,00	0	9.823,00	0	52%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Pacitan	m3	240.000,00	0	125.293,93	0	52%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Madiun	m3	74.000,00	0	32.336,30	0	44%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Trenggalek	m3	349.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Malang	m3	750.000,00	0	454.766,36	0	61%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	m3	122.000,00	0	105.438,80	0	86%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	m3	29.000,00	0	10.704,00	0	37%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Lumajang	m3	1.199.000,00	0	622.932,92	0	52%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Jember	m3	332.000,00	0	79.893,40	0	24%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	m3	381.000,00	0	62.241,89	0	16%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Sumenep	m3	38.000,00	0	21.637,62	0	57%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah UIPHHK yang mengikuti Bimtek Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	unit manajemen	0	242.665.265,00	0	80.832.400,00	0	33%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Banyuwangi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Sumenep	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	2	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7				8			
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Pacitan	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Madiun	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Trenggalek	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Malang	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Nganjuk	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Bojonegoro	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Lumajang	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Jember	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Banyuwangi	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu yang disusun di CDK Wilayah Sumenep	dokumen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah IUIPHHK yang mengikuti Bimtek Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	unit manajemen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	45	0	45	0	100%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	10	0	4	0	40%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	4	0	0	0	0%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	4	0	1	0	25%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	12	0	12	0	100%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	5	0	0	0	0%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	40	0	40	0	100%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	2	0	0	0	0%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	1	0	0	0	0%	0													DINAS KEHUTANAN							
				Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Manajemen	3	0	3	0	100%	0													DINAS KEHUTANAN							
3	028	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah IUIPHHK yang mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, penilikan SVLK dan mendapatkan fasilitasi SVLK	unit manajemen	0	1.192.579.200,00	0	516.388.730,00	0	43%											DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Pacitan	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Madiun	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Trenggalek	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Malang	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Nganjuk	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Bojonegoro	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Lumajang	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							
					Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Jember	kali	0	0	0	0	0	0												DINAS KEHUTANAN							

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Banyuwangi	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Sumenep	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Pacitan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Madiun	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Trenggalek	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Malang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Nganjuk	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Bojonegoro	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Lumajang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Jember	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Banyuwangi	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah aktivitas pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu di CDK Wilayah Sumenep	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah IUIPHK yang mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu, penilaian SVLK dan mendapatkan fasilitasi SVLK	unit manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi												
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0		DINAS KEHUTANAN			
3	028	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang terfasilitasi izin industri (Baru)	unit manajemen	0	458.012.400,00	0	194.798.190,00	0	43%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan kayu terfasilitasi layanan di wilayah I	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan kayu terfasilitasi layanan di wilayah II	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	3	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang terfasilitasi izin industri (Baru)	unit manajemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8				
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8					
		Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan kayu terfasilitasi layanan di wilayah I	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah unit usaha penampungan dan pengolahan hasil hutan kayu terfasilitasi layanan di wilayah II	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	30	0	30	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	5	0	6	0	120%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	4	0	2	0	50%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	5	0	3	0	60%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Permohonan BPPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
3	21.08	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Laporan	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
3	21.08	03	1.08	01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah dokumen terpantau pengelolaan Tempat Ibadah dan wisata Rohani di Kawasan Hutan	dokumen	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK yang difasilitasi	Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN		
3	028	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih tersertifikasi	Kg	100	381.800.000,00	212,5	121.467.400,00	213%	32%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah bibit tersertifikasi	Batang	1.150.000,00	0	83.600,00	0	0	7%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah pengada dan pengedar benih/bibit terdaftar (baru) yang ditetapkan	Unit	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah sumber benih tersertifikasi	Unit	2	0	2	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN	
						Sumber benih tanaman hutan yang terkelola	unit	6	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan lapangan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar	kali	0	30.000.000,00	0	5.248.000,00	0	17%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah pembinaan pengada dan pengedar benih/bibit terdaftar	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	1	0	1	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah pelaksanaan penilaian sumber benih tanaman hutan	kali	0	26.000.000,00	0	5.964.500,00	0	23%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah fasilitasi pembangunan sumber benih	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	2	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	03	1.09	03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah pelaksanaan pengujian mutu benih tanaman hutan	kali	0	25.000.000,00	0	1.925.000,00	0	8%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah pembinaan pengada dan pengedar benih	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	5	0	9	0	180%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.09	04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah pelaksanaan penilaian mutu bibit tanaman hutan	kali	0	118.780.000,00	0	39.532.700,00	0	33%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah pembinaan pengada dan pengedar bibit	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	15	0	13	0	87%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah laporan tata usaha benih dan/atau bibit tanaman hutan	Laporan	0	182.020.000,00	0	68.797.200,00	0	38%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	03	1.09	06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	6	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai konservasi tinggi	Ha	237.682,00	5.792.980.555,00	0	2.546.767.160,00	0%	44%	DINAS KEHUTANAN	
						Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode METT	%	77	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah kemitraan masyarakat desa konservasi	Dokumen	0	5.592.980.555,00	0	2.454.984.810,00	0	44%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah kemitraan masyarakat desa penyangga	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Spot	11	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah penurunan gangguan keamanan Kawasan Tahura	Kejadian	8	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah promosi potensi kawasan Tahura	Kali	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
										Jumlah spot wisata terbangun	Objek	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN							
3	028	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Orientasi batas kawasan Tahura	Km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Jumlah pengamanan Kawasan Tahura	kali	0	4.366.619.780,00	0	0	1.984.662.260,00	0	45%	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	12	0	9	0	75%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah upaya pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat TAHURA	aktivitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Jumlah upaya pengawetan Koridor Hidupan Liar	Aktivitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas pemulihan ekosistem/ penutupan kawasan Tahura	Ha	0	71.810.000,00	0	0	1.241.000,00	0	2%	0	0	0	DINAS KEHUTANAN									
										Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	10	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah spot wisata terbangun	objek	0	984.040.975,00	0	0	430.371.250,00	0	44%	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Spot	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan	30	0	15	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Identifikasi potensi kerjasama	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah peserta penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat TAHURA	orang	0	64.732.087,00	0	0	26.855.000,00	0	41%	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	4	0	1	0	25%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah aktivitas pembinaan daerah penyangga	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.01	011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah inventarisasi potensi, sosek dan informasi	dokumen	0	105.777.713,00	0	0	11.855.300,00	0	11%	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah unit usaha pemanfaatan keanekaragaman spesies yang tidak dilindungi	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah jasa lingkungan terbina	Unit	1	200.000.000,00	0	0	91.782.350,00	0	46%	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah desa konservasi terbina	Desa	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah pengendalian kerusakan dan pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Pacitan	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Madiun	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Trenggalek	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Malang	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Nganjuk	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Bojonegoro	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Lumajang	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Jember	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Banyuwangi	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Luas Area Rehabilitasi Mangrove di CDK Wilayah Sumenep	Ha	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
3	028	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang diberdayakan	kelompok	0	200.000.000,00	0	0	91.782.350,00	0	46%	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN								
										Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	100	0	50	0	50%	0	0	DINAS KEHUTANAN								

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	028	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah daerah penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	%	90	5.965.893.900,00	0	1.794.632.555,00	0%	30%	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Pacitan	%	72	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Madiun	%	72	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Trenggalek	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Malang	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Nganjuk	%	60	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Bojonegoro	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Lumajang	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Jember	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Banyuwangi	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Sumenep	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok pengelola hutan rakyat terfasilitasi SVLK dan mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu	Kelompok	0	5.965.893.900,00	0	1.794.632.555,00	0	30%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Pacitan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Madiun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Trenggalek	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Malang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Nganjuk	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Bojonegoro	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Lumajang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Jember	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Banyuwangi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Laporan Peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah aktivitas peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan	kali	0	1.574.285.900,00	0	952.190.725,00	0	60%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Pacitan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Madiun	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Trenggalek	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Malang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Nganjuk	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Bojonegoro	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Lumajang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Jember	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Banyuwangi	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah aktivitas peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di CDK Wilayah Sumenep	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	50	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	30	0	30	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	30	0	28	0	93%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	23	0	23	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	23	0	23	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	17	0	10	0	59%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	19	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	23	0	23	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Aktivitas Pendampingan Sertifikasi Legalitas Kayu bagi Kelompok Pengelola Hutan Rakyat	kali	0	4.019.233.500,00	0	774.301.930,00	0	19%	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Pacitan	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Madiun	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Trenggalek	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Malang	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Nganjuk	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Bojonegoro	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Lumajang	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Jember	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Banyuwangi	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan terfasilitasi sertifikasi peningkatan kelas kelembagaan di CDK Wilayah Sumenep	Kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah kelompok tani hutan tersertifikasi peningkatan kelas kelembagaan	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Pacitan	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Madiun	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Trenggalek	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Malang	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Nganjuk	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Bojonegoro	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Lumajang	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Jember	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Banyuwangi	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Sumenep	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	5	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	0	6	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	0	6	0	200%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	0	2	0	67%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	0	2	0	67%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	0	2	0	100%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
		Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	4	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN					
3	028	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok terfasilitasi pengajuan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial ke Kementerian LHK	kelompok	0	372.374.500,00	0	68.139.900,00	0	18%	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah Kelompok terfasilitasi pengajuan IPHPS/KulinKK ke Kementerian LHK	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah kelompok perhutanan sosial memiliki usaha produktif	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Pacitan	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Madiun	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Trenggalek	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Malang	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Nganjuk	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Bojonegoro	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Lumajang	Kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Jember	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Banyuwangi	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah aktivitas pembinaan KTH/LMDH dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di CDK Wilayah Sumenep	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Pacitan	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Madiun	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Trenggalek	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Malang	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Nganjuk	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Bojonegoro	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Lumajang	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Jember	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Banyuwangi	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Jumlah produk yang dikembangkan (DAK) di CDK Wilayah Sumenep	produk	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
						Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	5.000,00	0	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	300	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	669	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	10.000,00	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	3	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN				
		Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN				
3	028	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,39	166.600.000,00	0	65.962.550,00	0%	40%	DINAS KEHUTANAN	
3	028	06	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dinilai keberhasilannya	Ha	1.107,95	166.600.000,00	0	65.962.550,00	0%	40%	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Laporan Pembedayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS di CDK Wilayah Sumenep	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun	dokumen	0	166.600.000,00	0	65.962.550,00	0	40%	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi	Kab/Kota	20	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN
3	028	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan (APP)	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah KTH/Pokmas yang diberdayakan di CDK Wilayah Sumenep	kelompok	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	200	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan DAS terbentuk	Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
					Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	2	0	0	0	0%	0	DINAS KEHUTANAN	
3	028	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah monev kegiatan RHL lahan kritis	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS KEHUTANAN
3	029				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			524,41	126.552.687.643,00	209,65	47.660.368.270,00	40%	38%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	%	80	33.633.468.860,00	0	12.738.938.321,00	0%	38%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
					Persentase realisasi anggaran	%	90	0	33,51	0	0	37%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
					Indeks Profesionalitas ASN	%	62	0	61	0	0	98%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	8	616.236.684,00	3	172.162.146,00	38%	28%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	4	0	2	0	0	50%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	293.957.048,00	2	106.536.671,00	67%	36%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.999.880,00	0	3.625.000,00	0%	60%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.999.880,00	3	3.620.000,00	300%	60%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.712,00	0	930.000,00	0%	47%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.999.712,00	3	1.465.000,00	300%	73%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	158.724.688,00	0	34.300.475,00	0%	22%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	147.555.764,00	2	21.685.000,00	50%	15%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	12	21.655.700.001,00	3	9.261.052.444,00	25%	43%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	029	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	95	20.837.751.000,00	190	8.859.732.844,00	200%	43%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	724.100.163,00	6	334.874.700,00	50%	46%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	26.229.328,00	6	19.758.500,00	50%	75%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	15.699.919,00	6	13.928.900,00	50%	89%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	15.999.838,00	1	10.510.000,00	50%	66%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	14.999.958,00	1	7.475.000,00	50%	50%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	13.199.838,00	2	9.381.000,00	50%	71%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	7.719.957,00	6	5.391.500,00	50%	70%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	62.959.360,00	6	30.781.950,00	50%	49%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	777.000,00	1	600.000,00	25%	77%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	30.398.360,00	0	22.455.200,00	0%	74%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	13.568.000,00	0	2.000.000,00	0%	15%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.976.000,00	0	5.426.750,00	0%	54%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	2.000.000,00	6	300.000,00	50%	15%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2.400.000,00	0	0	0%	0%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	3.840.000,00	0	0	0%	0%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	965.801.130,00	3	357.712.846,00	25%	37%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	dokumen	12	533.297.200,00	6	250.152.350,00	50%	47%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	kali	12	244.847.530,00	6	96.677.596,00	50%	39%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	24	187.656.400,00	4	10.882.900,00	17%	6%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	7	4.972.832.334,00	4	693.342.727,00	57%	14%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.911.536,00	0	7.040.915,00	0%	32%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
										Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						
3	029	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.306.391.071,00	0	18.745.700,00	0%	1%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.400.856,00	0	9.586.719,00	0%	21%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	574.660.128,00	1	155.093.605,00	100%	27%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah pengadaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	174.478.696,00	1	46.934.306,00	100%	27%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	33.996.000,00	0	13.620.000,00	0%	40%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	815.994.047,00	0	442.321.482,00	0%	54%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset	%	5	144.362.000,00	4	97.615.990,00	80%	68%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan	Unit	5	127.026.000,00	1	97.615.990,00	20%	77%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	17.336.000,00	0	0	0%	0%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang	%	100	3.173.444.694,00	50	1.182.613.311,00	50%	37%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan	Laporan	12	1.159.819.992,00	6	285.021.794,00	50%	25%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	029	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengadaan	Paket	8	2.013.624.702,00	4	897.591.517,00	50%	45%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
						Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	21.09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan	Paket	8	2.042.132.657,00	4	943.656.907,00	50%	46%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	21.09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	19.425.000,00	0	4.338.800,00	0%	22%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												
3	21.09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	229.200.000,00	6	71.813.186,00	43%	31%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL												

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
3	21.09	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	21.09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	161.614.250,00	1	31.858.500,00	33%	20%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	21.09	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	415.675.400,00	3	170.615.500,00	43%	41%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	21.09	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	1.216.218.007,00	6	665.030.921,00	60%	55%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Presentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan	%	93	1.557.222.923,00	93	783.556.412,00	100%	50%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						IKM (UPT)	Nilai	94	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Realisasi Produksi Air Tanah	%	80	690.521.073,00	80	350.060.548,00	100%	51%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah hasil uji sampel air (UPT)	sertifikat hasil uji	892	0	326	0	37%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	430.231.353,00	1	258.133.948,00	100%	60%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah hasil uji sampel air (UPT)	Sertifikat Hasil Uji	892	0	326	0	37%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	dokumen	1	156.107.770,00	0	29.108.600,00	0%	19%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	93	104.181.950,00	60	62.818.000,00	65%	60%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen SOP Pemanfaatan Air Tanah	Dokumen	1	687.167.550,00	0	381.955.864,00	0%	56%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah prosedur dan persyaratan pemakaian air tanah yang ditetapkan	Dokumen	1	180.334.200,00	0	34.430.658,00	0%	19%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekometek pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	rekometek	1.817,00	311.495.780,00	968	179.410.240,00	53%	58%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah pemilik izin air tanah yang diawasi	badan usaha	202	195.337.570,00	149	168.114.966,00	74%	86%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang ditetapkan	1	179.534.300,00	0	51.540.000,00	0%	29%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	dokumen	1	79.002.260,00	0	16.049.500,00	0%	20%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	dokumen	1	14.641.200,00	0	0	0%	0%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah badan usaha yang melakukan penerapan NPA yang diawasi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	67	85.890.840,00	52	35.490.500,00	78%	41%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase kegiatan yang berizin	%	87	5.323.920.610,00	0	2.763.103.583,00	0%	52%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Realisasi Produksi Pertambangan Mineral Berizin	%	53	3.598.920.610,00	0	2.447.021.223,00	0%	68%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah sertifikat uji mineral batuan (UPT)	sertifikat uji	60	0	62	0	103%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	03	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	3.348.920.610,00	0	2.216.959.348,00	0%	66%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah sertifikat uji mineral batuan (UPT)	Sertifikat Uji	65	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	95	250.000.000,00	77	230.061.875,00	81%	92%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan	Dokumen	1	1.535.000.000,00	0	264.258.360,00	0%	17%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	1	150.000.000,00	0	97.671.435,00	0%	65%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai de	Dokumen	75	175.000.000,00	84	28.500.000,00	112%	16%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai denga	Laporan	1	1.210.000.000,00	0	138.086.925,00	0%	11%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan Perizinan Pertambangan Rakyat	Dokumen	1	65.000.000,00	0	16.240.500,00	0%	25%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	15	35.000.000,00	0	6.645.500,00	0%	19%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	1	15.000.000,00	0	2.664.000,00	0%	18%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.04	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan	1	15.000.000,00	0	6.931.000,00	0%	46%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perizinan IUJP	Dokumen	1	5.000.000,00	0	2.627.000,00	0%	53%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.06	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	15	5.000.000,00	1	2.627.000,00	7%	53%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah dokumen harga patokan mineral bukan logam	Dokumen	1	80.000.000,00	0	22.080.500,00	0%	28%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	65.000.000,00	0	15.783.500,00	0%	24%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1	10.000.000,00	0	3.675.000,00	0%	37%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	1	5.000.000,00	0	2.622.000,00	0%	52%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.08		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perizinan IUPK Pengangkutan dan Penjualan	Dokumen	1	5.000.000,00	0	2.592.000,00	0%	52%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	029	03	1.08	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah rekomendasi teknis IUPK Pengangkutan dan Penjualan	Rekomtek	15	5.000.000,00	2	2.592.000,00	13%	52%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	21.09	03	1.09		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perizinan IUP untuk Penjualan	Dokumen	1	30.000.000,00	1	7.309.000,00	100%	24%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									
3	21.09	03	1.09	01	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan	Jumlah rekomendasi teknis IUP untuk penjualan	Rekomtek	10	30.000.000,00	1	7.309.000,00	10%	24%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
1	2	3	4							8				
3	029	03	1.10											
				Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah dokumen persetujuan perubahan direksi bagi pemegang IUP	Dokumen	1	5.000.000,00	0	975.000,00	0%	20%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
3	029	03	1.10	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah persetujuan perubahan direksi bagi pemegang IUP	Rekomtek	15	5.000.000,00	0	975.000,00	0%	20%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Presentase Peningkatan Energi Baru Terbarukan yang terbangun	%	14	9.125.784.360,00	22,14	4.402.238.614,00	158%	48%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah pemanfaatan panas bumi skala provinsi	Lokasi	2	20.843.460,00	0	4.380.000,00	0%	21%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Ara	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan	2	20.843.460,00	0	4.380.000,00	0%	21%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengusaha bahan bakar nabati skala provinsi	Badan usaha	1	21.474.710,00	0	8.455.000,00	0%	39%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	1	21.474.710,00	0	8.455.000,00	0%	39%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana EBT yang terbangun	Unit	102	9.083.466.190,00	85	4.389.403.614,00	83%	48%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen kebijakan konservasi	Dokumen	1	731.001.050,00	0	364.561.042,00	0%	50%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pembinaan SDM yang memahami konservasi skala provinsi	Laporan	2	281.555.190,00	1	120.038.600,00	50%	43%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04	03	Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi	Instansi	40	275.761.540,00	0	17.565.000,00	0%	6%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah KK yang dapat EBT	KK	112	7.585.211.760,00	93	3.829.400.049,00	83%	50%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mengikuti bimtek	Lembaga	40	39.616.590,00	0	950.000,00	0%	2%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil audit energi	Dokumen	1	170.320.060,00	0	56.888.923,00	0%	33%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teraliri listrik	%	4,41	8.088.130.247,00	0	711.098.286,00	0%	9%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha yang memiliki IUPTL	Badan usaha	1	210.200,00	0	0	0%	0%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	210.200,00	0	0	0%	0%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha yang memiliki izin operasi	Laporan	94	623.578.576,00	73	264.980.999,00	78%	42%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	029	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomtek IO	Rekomtek	54	468.580.036,00	44	224.461.399,00	81%	48%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	40	154.998.540,00	29	40.519.600,00	73%	26%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah badan usaha yang taat aturan	Badan usaha	56	297.729.230,00	33	166.691.437,00	59%	56%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	56	174.704.540,00	65	86.678.837,00	116%	50%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.05	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	40	123.024.690,00	33	80.012.600,00	83%	65%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rumah tangga miskin (RTM) yang mendapat aliran listrik	RTM	2.496,00	7.166.612.241,00	0	279.425.850,00	0%	4%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	125.042.290,00	1	104.835.000,00	100%	84%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	2.496,00	6.846.574.471,00	0	128.346.850,00	0%	2%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	029	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	1	194.995.480,00	0	46.244.000,00	0%	24%	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	030				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			135.236,00	41.716.231.647,00	64.518,00	8.438.449.008,00	48%	20%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan	Dokumen	135.062,00	399.464.000,00	64.428,00	316.591.201,00	48%	79%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Dokumen	1	22.470.000,00	5	2.500.000,00	500%	11%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB	unit usaha	0	22.470.000,00	0	2.500.000,00	0	11%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	2	0	5	0	250%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	51.064.000,00	1	38.808.051,00	100%	76%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	unit usaha	0	51.064.000,00	0	38.808.051,00	0	76%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	Dokumen	135.060,00	325.930.000,00	64.422,00	275.283.150,00	48%	84%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah SKA yang diterbitkan	SKA	0	282.186.000,00	0	250.925.800,00	0	89%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	135.000,00	0	64.414,00	0	48%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Importir yang difasilitasi	Pelaku Usaha	0	43.744.000,00	0	24.357.350,00	0	56%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	3	0	8	0	267%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	%	1	272.258.000,00	0	94.746.540,00	0%	35%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		8		
3	030	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	sarana perdagangan	4	272.258.000,00	2	94.746.540,00	50%	35%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi yang mendapat pembinaan	Sarana Perdagangan	0	112.060.000,00	0	31.413.180,00	0	28%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang mendapatkan pembinaan	Sarana Perdagangan	0	160.198.000,00	0	63.333.360,00	0	40%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	%	2	21.128.186.000,00	0	928.209.040,00	0%	4%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok	%	90	12.010.000,00	0	708.500,00	0%	6%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Peserta yang mengikuti koordinasi dan sinkronisasi	Orang	0	12.010.000,00	0	708.500,00	0	6%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	informasi	1	21.095.176.000,00	0	927.500.540,00	0%	4%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pasar sasaran pengendalian harga dan distribusi (pasar)	Pasar	0	914.028.000,00	0	372.547.700,00	0	41%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar	Kali	0	20.181.148.000,00	0	554.952.840,00	0	3%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	511	0	174	0	34%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	kali	37	21.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pemeriksanaan Perizinan Kegiatan Distribusi	Kali	0	5.060.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Kali	0	5.060.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kali	0	5.060.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Kali	0	5.820.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas	Milyar US\$	1	10.274.070.000,00	0	3.481.880.228,00	0%	34%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	Pelaku Usaha	113	10.274.070.000,00	779	3.481.880.228,00	689%	34%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7	8	
					yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi									
3	030	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang Internasional/Nasional	Pelaku Usaha	0	63.450.000,00	0	63.284.500,00	0	100%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2	0	2	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	10.134.620.000,00	0	3.380.371.728,00	0	33%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	80	0	178	0	223%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pelaku Usaha	0	38.000.000,00	0	20.316.000,00	0	53%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	120	0	265	0	221%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan	Pelaku Usaha	0	38.000.000,00	0	17.908.000,00	0	47%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	120	0	599	0	499%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	%	80	1.839.310.647,00	0	680.377.260,00	0%	37%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	kali	80	798.308.507,00	81	231.256.250,00	101%	29%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Surabaya)	Orang	0	353.832.497,00	0	112.933.250,00	0	32%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (Wialayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Jember) yang mendapat pembinaan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Kediri) yang mendapat pembinaan	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Konsumen Dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen yang diberdayakan (wilker UPT. PK Bojonegoro)	orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	%	0	157.007.530,00	0	15.585.500,00	0	10%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Prosentase Penanganan Pengaduan Konsumen (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Jember)	persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	persen	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Prosentase Penanganan pengaduan konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	%	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	3	0	3	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	9	0	21	0	233%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	16	0	16	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	10	0	10	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM	3	0	2	0	67%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
3	030	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	kali	0	287.468.480,00	0	102.737.500,00	0	36%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Penanganan Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	65	0	14	0	22%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	12	0	22	0	183%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	20	0	18	0	90%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	18	0	15	0	83%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	36	0	12	0	33%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
3	030	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	sertifikat	3.000,00	728.902.640,00	1.357,00	316.319.260,00	45%	43%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
3	030	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT. PSMB-LT Surabaya	sertifikat	0	483.493.440,00	0	228.130.340,00	0	47%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Sertifikat yang diterbitkan di UPT PSMB LT Jember	Sertifikat	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	9	0	8	0	89%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	4	0	4	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
3	030	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT. PSMB-LT Surabaya	Akreditasi	0	84.143.200,00	0	20.415.377,00	0	24%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Akreditasi Layanan Pengujian di UPT PSMB LT Jember	Akreditasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	1.200,00	0	664	0	55%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	Dokumen	2.000,00	0	693	0	35%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
3	030	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT. PSMB-LT Surabaya	Akreditasi	0	161.266.000,00	0	67.773.543,00	0	42%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	
						Jumlah Akreditasi Layanan Sertifikasi di UPT PSMB LT Jember	Akreditasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	10	0	10	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	Sertifikat	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	barang/jasa	500.000,00	312.099.500,00	327.470,00	132.801.750,00	65%	43%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (Wilker UPT. PK Surabaya)	Barang	0	233.048.000,00	0	110.556.750,00	0	47%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	barang/jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	barang/jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	barang/jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (Wilker UPT. PK Kediri)	Barang/Jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Surabaya)	kali	0	79.051.500,00	0	22.245.000,00	0	28%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran atas Ketentaun Perlindungan Konsumen (Wilayah Kerja UPT Perlindungan Konsumen Malang)	Penanganan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Jember)	penanganan	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Bojonegoro)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (wilker UPT. PK Kediri)	kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	35	0	2	0	6%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	35	0	10	0	29%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	13	0	13	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	25	0	2	0	8%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	6	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaku Usaha	90	7.802.943.000,00	90	2.936.644.739,00	100%	38%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kali	7	7.783.179.000,00	5	2.933.862.592,00	71%	38%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaku usaha	0	7.783.179.000,00	0	2.933.862.592,00	0	38%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepesertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	257	0	90	0	35%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	kali	2	19.764.000,00	0	2.782.147,00	0%	14%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Orang	0	12.564.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	030	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Sistem	0	7.200.000,00	0	2.782.147,00	0	39%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			302,7	293.452.891.817,00	0	126.290.799.803,00	0%	43%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	88,5	93.244.522.232,00	0	41.603.511.693,00	0%	45%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Persentase realisasi anggaran	%	93	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Indeks profesionalitas ASN	%	90	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	410.000.000,00	7	218.784.877,00	35%	53%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	dokumen	0	228.987.000,00	0	146.804.907,00	0	64%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	0	2	0	40%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	2.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	2.000.000,00	0	1.636.000,00	0	82%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	171.013.000,00	0	70.343.970,00	0	41%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	3	0	75%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	031	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	61.052.611.000,00	6	26.447.195.403,00	50%	43%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	59.402.506.000,00	0	25.771.918.263,00	0	43%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	271	0	524	0	193%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	1.368.888.000,00	0	516.777.000,00	0	38%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	249.616.000,00	0	147.368.750,00	0	59%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	0	15.991.600,00	0	5.731.400,00	0	36%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	0	9.000.000,00	0	3.173.490,00	0	35%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	1.039.400,00	0	1.017.500,00	0	98%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	0	2	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	4.200.000,00	0	1.209.000,00	0	29%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	1.370.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	80.114.000,00	6	49.341.500,00	50%	62%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perennan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	100%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	19.986.000,00	0	12.101.000,00	0	61%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	18.540.000,00	0	17.604.000,00	0	95%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	9.822.000,00	0	1.200.000,00	0	12%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	0	10.820.000,00	0	9.320.500,00	0	86%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	9.946.000,00	0	2.216.000,00	0	22%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	10.000.000,00	0	5.900.000,00	0	59%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	438.675.000,00	6	106.056.000,00	50%	24%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	Paket	0	103.086.000,00	0	47.380.000,00	0	46%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	18.400.000,00	0	10.999.500,00	0	60%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	70.760.000,00	0	32.331.000,00	0	46%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	34.805.000,00	0	7.755.500,00	0	22%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Laporan	0	171.432.000,00	0	1.990.000,00	0	1%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	2	0	67%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	0	20.196.000,00	0	4.600.000,00	0	23%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	0	25	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bintek yang dilaksanakan	Kali	0	19.996.000,00	0	1.000.000,00	0	5%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	031 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	2.694.734.010,00	6	1.326.711.577,00	55%	49%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	82.313.991,00	0	17.611.400,00	0	21%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	031	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	307.530.186,00	0	127.612.380,00	0	41%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	paket	0	141.257.415,00	0	62.525.884,00	0	44%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah pengadaan	paket	0	475.459.122,00	0	194.318.130,00	0	41%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan	Paket	0	152.744.246,00	0	80.004.750,00	0	52%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	48.547.000,00	0	17.912.500,00	0	37%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	276	0	112	0	41%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	Paket	0	241.489.500,00	0	200.289.313,00	0	83%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Kali	0	79.187.000,00	0	41.571.800,00	0	52%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7	0	4	0	57%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	0	1.146.240.550,00	0	582.488.713,00	0	51%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	9.965.000,00	0	1.943.000,00	0	19%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket	0	10.000.000,00	0	433.707,00	0	4%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	127.287.000,00	1	85.102.210,00	100%	67%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	(indikator kosong)		0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
3	031	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	set	0	9.915.000,00	0	0	0	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	102.372.000,00	0	70.205.000,00	0	69%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	2	0	40%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Paket	0	15.000.000,00	0	14.897.210,00	0	99%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	26.589.250.162,00	0	12.446.505.597,00	0%	47%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	33.857.000,00	0	11.524.100,00	0	34%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	3.203.270.252,00	0	1.528.645.191,00	0	48%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	7.192.000,00	0	2.587.250,00	0	36%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	23.344.930.910,00	0	10.903.749.056,00	0	47%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	1	1.851.851.060,00	0	923.814.529,00	0%	50%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	158.968.683,00	0	65.108.407,00	0	41%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	887.361.377,00	0	437.967.982,00	0	49%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	0	5	0	33%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket	0	1.081.500,00	0	1.075.000,00	0	99%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	100%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	barang	0	303.680.600,00	0	87.198.270,00	0	29%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	0	30	0	46%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
3	031	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Paket	2	20.000.000,00	0	0	0%	0%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung	0	33.827.200,00	0	15.708.500,00	0	46%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang dipelihara	Paket	0	49.257.600,00	0	15.747.100,00	0	32%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	100	0	40	0	40%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang dipelihara	Paket	0	397.674.100,00	0	301.009.270,00	0	76%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	%	1,2	13.594.325.121,00	0	1.434.967.097,00	0%	11%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	Dokumen	2	13.594.325.121,00	0	1.434.967.097,00	0%	11%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	25.000.000,00	0	16.311.000,00	0%	65%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dan perdagangan	Kali	0	50.000.000,00	0	27.779.811,00	0	56%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaku Industri Agro yang difasilitasi	Pelaku industri	0	8.819.325.121,00	0	1.066.072.000,00	0	12%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPI-TK Surabaya	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Industri yang mendapatkan pelayanan Mutu Produk Industri dan dan Pelatihan Desain Produk Industri di wilayah kerja UPT PMPI-TK Malang	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah jasa pelayanan UPT Industri makanan minuman dan kemasan	Jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	Jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Logam dan Perekayasaan	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Kayu dan Produk Kayu	Jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						jumlah jasa pelayanan upt aneka industri dan kerajinan	jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang difasilitasi	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Aneka Industri dan kerajinan	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri makanan minuman dan kemasan	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah jasa pelayanan UPT Industri Logam dan Perekayasaan	Jasa	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kulit dan Produk Kulit	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah industri yang mendapatkan Pengembangan Teknis Industri Kayu dan Produk Kayu	Pelaku Industri	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	146	0	74	0	51%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	2	4.150.000.000,00	0	119.680.823,00	0%	3%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	20	500.000.000,00	6	194.944.363,00	30%	39%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri yang disusun	Dokumen	0	50.000.000,00	0	10.179.100,00	0	20%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	%	10	35.000.000,00	0	13.411.427,00	0%	38%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Unit Usaha	24	35.000.000,00	0	13.411.427,00	0%	38%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah industri yang difasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI	Unit Usaha	0	10.000.000,00	0	3.253.000,00	0	33%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Teri	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang diawasi	Unit Usaha	0	25.000.000,00	0	10.158.427,00	0	41%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	%	20	90.000.000,00	0	31.886.200,00	0%	35%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Informasi	2	90.000.000,00	2	31.886.200,00	100%	35%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data industri yang dianalisa	Dokumen	0	10.000.000,00	0	3.515.000,00	0	35%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi industri	Kegiatan	0	65.000.000,00	0	21.837.500,00	0	34%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	031	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah industri yang dipantau	Unit Usaha	0	15.000.000,00	0	6.533.700,00	0	44%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			3.456,50	7.025.028.551.123,00	566,01	1.921.021.151.058,00	16%	27%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			3.288,50	5.533.946.261.447,00	566,01	1.407.798.924.192,00	17%	25%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	97	9.615.805.750,00	60,9	3.565.516.729,00	63%	37%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Persentase realisasi anggaran	%	91	0	67	0	74%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Indeks profesionalitas ASN	%	80,5	0	90	0	112%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah doumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	4	0	100%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	4	9.098.910.000,00	4	3.262.436.006,00	100%	36%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	7.629.688.000,00	12	2.602.045.676,00	100%	34%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	1.469.222.000,00	12	660.390.330,00	100%	45%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	0	183.946.000,00	0	94.221.000,00	0	51%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	183.946.000,00	12	94.221.000,00	100%	51%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	0	238.039.850,00	0	171.511.150,00	0	72%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah laporan penyediaan Barang	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	100.138.745,00	5	98.157.300,00	100%	98%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	38.102.500,00	4	14.710.000,00	100%	39%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	paket	1	54.488.750,00	1	49.378.350,00	100%	91%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	45.309.855,00	1	9.265.500,00	100%	20%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan	unit	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	0	0	0	0	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	0	68.317.000,00	0	22.548.573,00	0	33%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Dokumen pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang kegiatan	unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	paket	1	68.317.000,00	1	22.548.573,00	100%	33%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Azet tak berwujud yang dipelihara	unit	1	26.592.900,00	1	14.800.000,00	100%	56%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	1	0	1	0	100%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	26.592.900,00	0	14.800.000,00	0	56%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Jumlah rumusan kebijakan dibidang kerjasama, otonomi daerah dan pemerintahan	Dokumen	0	9.911.548.250,00	0	2.321.531.275,00	0	23%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan	dokumen	5	3.198.335.349,00	0	972.537.102,00	0%	30%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dokumen	2	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Koordinasi Penataan Wilayah dan Pertanahan	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	1.636.098.349,00	1	614.030.395,00	100%	38%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	2	680.237.000,00	2	135.877.821,00	100%	20%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	1	882.000.000,00	1	222.628.886,00	100%	25%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dokumen	31	4.900.296.400,00	0	687.163.477,00	0%	14%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	31	1.375.370.000,00	30	300.990.668,00	97%	22%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	1	2.449.630.000,00	1	115.873.303,00	100%	5%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	1	1.075.296.400,00	1	270.299.506,00	100%	25%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	dokumen	30	1.812.916.501,00	30	661.830.696,00	100%	37%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah fasilitasi kerjasama antar pemerintah di Jawa Timur	kegiatan	0	808.008.666,00	0	424.860.226,00	0	53%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
						Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	15	600.214.295,00	15	188.394.777,00	100%	31%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	2	404.693.540,00	2	48.575.693,00	100%	12%	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	85	32.301.160.000,00	0	11.474.630.642,00	0%	36%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Persentase realisasi anggaran	%	97	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Indeks profesionalisme ASN	point	82	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai	persen	82	349.015.000,00	0	25.992.354,00	0%	7%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	162.207.000,00	1	8.797.550,00	50%	5%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.780.000,00	0,5	0	50%	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.780.000,00	0,25	0	25%	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Biro Kesra	Dokumen	0	7.780.000,00	0	1.575.000,00	0	20%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0,25	0	25%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	7.780.000,00	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	12.668.000,00	0	1.882.500,00	0	15%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	145.020.000,00	0	13.737.304,00	0	9%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	0,8	0	40%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	%	0	17.597.201.200,00	0	7.029.110.081,00	0	40%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
						Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat	persen	95	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	13.618.906.000,00	0	4.935.067.725,00	0	36%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	87	0	174	0	200%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	3.929.028.200,00	0	2.084.774.756,00	0	53%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	0	15.240.000,00	0	5.933.600,00	0	39%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	0	0,5	0	25%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi Biro	laporan	0	4.020.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	9.727.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	8.040.000,00	0	3.334.000,00	0	41%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	0	0,5	0	25%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	8.220.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	4.020.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	1.098.610.000,00	0	197.171.300,00	0	18%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Prosentase pegawai yang memenuhi waktu kerja efektif 75.000 menit sesuai tugas pokok dan fungsi	persen	100	0	0,25	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	laporan	0	20.600.000,00	0	6.500.000,00	0	32%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	41.228.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	0	13.900.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	laporan	0	20.600.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kegiatan yang meningkatkan kompetensi Pegawai dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi	kegiatan	0	1.002.282.000,00	0	190.671.300,00	0	19%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	0	1	0	50%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	%	0	2.756.021.152,00	0	27.266.750,00	0	1%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum	persen	88	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	43.266.450,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	821.895.400,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	1.037.426.500,00	0	7.400.000,00	0	1%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0,5	0	50%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	523.919.502,00	0	2.129.750,00	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	52.980.000,00	0	12.510.000,00	0	24%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	0	47.280.000,00	0	4.664.500,00	0	10%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0,25	0	25%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	116.840.000,00	0	562.500,00	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0,25	0	25%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.06 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	sistem	0	112.413.300,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah paket pengadaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAKET	2	1.169.787.300,00	0	0	0%	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01 01 1.07 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan	paket	0	1.169.787.300,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa yang menunjang pelayanan ketatausahaan	PAKET	4	8.205.567.600,00	0,5	4.145.991.266,00	13%	51%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	9.120.000,00	0	2.462.500,00	0	27%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	paket	0	1.528.590.500,00	0	533.950.991,00	0	35%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa	paket	0	14.000.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa	paket	0	6.653.857.100,00	0	3.609.577.775,00	0	54%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	PAKET	0	1.124.957.748,00	0	49.098.891,00	0	4%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah jasa untuk pemeliharaan aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa	4	0	2	0	50%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	paket	0	624.553.200,00	0	49.098.891,00	0	8%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa	paket	0	183.337.000,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.09 1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	317.067.548,00	0	0	0	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 01 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
4	01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	%	89	581.842.651.667,00	0	110.430.508.794,00	0%	19%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	89	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
		Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	%	89	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
		Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	%	83	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
		Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	%	83	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
		Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	%	83	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
4	01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual	%	90	570.237.478.167,00	0	108.740.248.240,00	0%	19%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
		Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang kelembagaan bina spiritual	%	90	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
		Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan dibidang bina kehidupan spiritual	%	90	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang sarana prasarana spiritual	dokumen	3	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																					

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan bina spiritual	dokumen		3		0		0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang bina kehidupan spiritual	dokumen		3		0		0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
					Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual	%		89		0		0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
					Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang kelembagaan bina spiritual	%		89		0		0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
					Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur	%		89		0		0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	1		313.162.275.280,00	1		30.980.604,00	100%	0%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	10		257.075.202.887,00	6		108.709.267.636,00	60%	42%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pendidikan	%	90		3.678.293.000,00	0		1.311.237.846,00	0%	36%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan	%	90		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang sosial	%	90		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan	dokumen	3		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kesehatan	dokumen	3		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang social	dokumen	3		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang pendidikan	%	89		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah di bidang social	%	89		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pendidikan	%	89		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang social	%	89		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	2		241.605.450,00	1		28.707.950,00	50%	12%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	2		161.070.300,00	1		17.753.600,00	50%	11%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	2		3.275.617.250,00	1		1.264.776.296,00	50%	39%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	%	90		7.926.880.500,00	0		379.022.708,00	0%	5%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Prosentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga	%	90		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	dokumen	3		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							
						Jumlah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	dokumen	3		0	0		0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																							

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				1	2	3	4	5	6		7 = 6/5 x 100%	8		
		Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	%	89	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Indeks Kepuasan Masyarakat penerima bantuan terhadap dukungan layanan administrasi bantuan hibah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan	%	89	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	%	89	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi da	%	89	0	0	0	0%	0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	3	134.225.250,00	1	38.956.100,00	33%	29%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan	Dokumen	3	7.792.655.250,00	1	340.066.608,00	33%	4%	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	76	14.847.732.500,00	0	5.573.967.270,00	0%	38%	BIRO HUKUM
						Persentase realisasi anggaran	%	93	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Indeks Profesionalitas ASN	%	75	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, dan anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	11	4.080.600,00	0	1.822.000,00	0%	45%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	8	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	485.000,00	4	474.000,00	57%	98%	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	373.500,00	0	324.000,00	0%	87%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	529.500,00	0	324.000,00	0%	61%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	667.000,00	0	324.000,00	0%	49%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen DPA	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.200.000,00	0	376.000,00	0%	31%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	544.500,00	4	0	100%	0%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	4	0	4	0	100%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	281.100,00	2	0	50%	0%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	17	13.479.018.900,00	0	5.075.767.014,00	0%	38%	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	13.243.405.000,00	5	4.957.211.714,00	42%	37%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	12	0	5	0	42%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	233.292.000,00	5	116.646.000,00	42%	50%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	0	5	0	42%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	821.500,00	6	807.300,00	50%	98%	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	679.800,00	1	679.000,00	100%	100%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	5	0	1	0	20%	0	BIRO HUKUM

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	653.500,00	0	270.000,00	0%	41%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	167.100,00	2	153.000,00	50%	92%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	0	2	0	17%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	18	1.395.100,00	0	961.000,00	0%	69%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	373.500,00	1	361.000,00	100%	97%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	1.021.600,00	6	600.000,00	50%	59%	BIRO HUKUM
						Jumlah Kegiatan dan Laporan	Kegiatan dan Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	192.736.555,00	0	11.685.000,00	0%	6%	BIRO HUKUM
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM
						Jumlah sarana dan prasana yang terpenuhi	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	8.199.600,00	6	3.624.000,00	50%	44%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	5.150.000,00	6	0	50%	0%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan data pegawai	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	373.500,00	4	361.000,00	33%	97%	BIRO HUKUM
						Jumlah laporan SKP	Laporan	12	0	4	0	33%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	179.013.455,00	1	7.700.000,00	2%	4%	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan Pegawai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	10	744.382.645,00	0	309.159.955,00	0%	42%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.658.400,00	0	543.500,00	0%	15%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.245.684,00	1	3.240.000,00	100%	52%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	5	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	31.086.300,00	2	3.631.100,00	67%	12%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	3	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	59.583.133,00	2	25.784.440,00	50%	43%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	4	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	60.450.000,00	2	26.973.000,00	50%	45%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	4	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	12.780.000,00	4	5.615.000,00	67%	44%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	12	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	8.492.620,00	0	4.622.850,00	0%	54%	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pengadaan	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	500.786.508,00	6	178.407.845,00	50%	36%	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	61.300.000,00	2	60.342.220,00	50%	98%	BIRO HUKUM
						Jumlah daftar arsip aktif	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah daftar arsip inaktif	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah daftar arsip vital	Dokumen	4	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	5	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Mebel	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket/Unit	3	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	366.706.200,00	0	160.022.301,00	0%	44%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.520.000,00	6	8.212.912,00	50%	31%	BIRO HUKUM
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	340.186.200,00	6	151.809.389,00	50%	45%	BIRO HUKUM
						Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Dokumen	7	59.412.500,00	0	14.550.000,00	0%	24%	BIRO HUKUM
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	30.888.000,00	0	0	0%	0%	BIRO HUKUM
						Jumlah Jasa	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	20	28.524.500,00	0	14.550.000,00	0%	51%	BIRO HUKUM
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket/Unit	15	0	5	0	33%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Paket	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket/Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi Jawa Timur yang disusun tepat waktu	%	0	5.859.214.500,00	0	2.018.575.881,00	0	34%	BIRO HUKUM
						Persentase Rancangan Hasil Evaluasi dan Fasilitasi terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota yang disusun tepat waktu	%	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Persentase Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	%	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Persentase Rancangan Saran / Pertimbangan Hukum yang disusun sesuai SOP	%	0	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Persentase Predikat Implementasi Aksi HAM Provinsi yang mendapat nilai "MEMUASKAN"	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM				
		Persentase Usulan Desa / Kelurahan Sadar Hukum	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM				
		Persentase Produk Hukum Provinsi yang diupload tepat waktu di Website JDIH Provinsi	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM				
		Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesesuaian Dan Kepentingan Umum	%	100	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Persentase Perkara Hukum dan HAM di Jawa Timur yang telah diputus	%	40	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesesuaian Dan Kepentingan Umum	%	100	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
4	01	05	1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan produk hukum (Peraturan Daerah) yang dihasilkan	Raperda	0	3.841.602.700,00	0	1.446.607.167,00	0	38%	BIRO HUKUM	
					Jumlah rancangan produk hukum (Peraturan Gubernur) yang dihasilkan	Rapergub	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah rancangan produk hukum (Keputusan Gubernur) yang dihasilkan	Rakepgub	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Surat Hasil Asistensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten / Kota yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesesuaian Dan Kepentingan Umum	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Evaluasi terhadap Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota yang disusun tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Rancangan Surat Sekretaris Daerah Tentang Fasilitasi terhadap Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota yang disusun tepat waktu	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Usulan Produk Hukum Provinsi yang difasilitasi (diproses) sesuai SOP	%	100	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi (diproses) sesuai SOP	%	100	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	42	924.387.300,00	37	341.115.721,00	88%	37%	BIRO HUKUM
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah I yang difasilitasi	Raperda	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur I yang difasilitasi	Rapergub	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah II yang difasilitasi	Raperda	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur II yang difasilitasi	Rapergub	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Usulan Produk Hukum Pengaturan Provinsi I yang difasilitasi (diproses)	Raperda / Rapergub	30	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Usulan Produk Hukum Pengaturan Provinsi II yang difasilitasi (diproses)	Raperda / Rapergub	42	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	290	326.896.800,00	290	114.850.964,00	100%	35%	BIRO HUKUM
					Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur I yang difasilitasi	Rakepgub	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur II yang difasilitasi	Rakepgub	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah I yang difasilitasi	Rakepsekda	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Rancangan Keputusan Sekretaris Daerah II yang difasilitasi	Rakepsekda	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Usulan Produk Hukum Penetapan Provinsi I yang difasilitasi (diproses)	Rakepgub / Rakepsekda	358	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Usulan Produk Hukum Penetapan Provinsi II yang difasilitasi (diproses)	Rakepgub / Rakepsekda	290	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Penyuluhan Hukum Melalui Media Elektronik	Kali	5	1.538.101.300,00	0	599.785.571,00	0%	39%	BIRO HUKUM
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	Dokumen	922	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya yang dihasilkan	Tamu	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Penyuluhan Hukum Secara Langsung	Desa / Kelurahan	12	0	9	0	75%	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Dokumen Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya yang dihasilkan baik secara elektronik/hardcopy	Dokumen	8	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah kunjungan ke Perpustakaan/website www.jdih.jatimprov.go.id	Kunjungan	300	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	380	1.052.217.300,00	204	390.854.911,00	54%	37%	BIRO HUKUM
					Jumlah Asistensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten / Kota Wilayah I yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesesuaian Dan Kepentingan Umum	Kegiatan	38	0	2	0	5%	0	BIRO HUKUM	
					Jumlah Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota Wilayah I yang dievaluasi	Raperda / Raperkada	39	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		umlah Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota Wilayah I yang difasilitasi	Raperda / Raperkada	91	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Jumlah Asistensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten / Kota Wilayah II yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesulitan Dan Kepentingan Umum	Kegiatan	13	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Jumlah Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota Wilayah II yang dievaluasi	Raperda / Raperkada	39	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Jumlah Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota Wilayah II yang difasilitasi	Raperda / Raperkada	91	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Jumlah Asistensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten / Kota Wilayah III yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesulitan Dan Kepentingan Umum	Kegiatan	12	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Jumlah Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota Wilayah III yang dievaluasi	Raperda / Raperkada	36	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
		Jumlah Raperda / Raperkada Kabupaten / Kota Wilayah III yang difasilitasi	Raperda / Raperkada	84	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM				
4	01	05	1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Perkara yang diputus	%	0	2.017.611.800,00	0	571.968.714,00	0	28%	BIRO HUKUM	
					Persentase Rancangan Saran / Pertimbangan Hukum yang dihasilkan	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Perkara Penerima Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Kepatuhan Kabupaten / Kota Se Jawa Timur dan Provinsi melaporkan Aksi HAM	%	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM	
					Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM di Jawa Timur	%	100	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	35	698.645.300,00	13	307.543.491,00	37%	44%	BIRO HUKUM
						Jumlah Perkara yang ditangani	Perkara	35	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	100	1.318.966.500,00	0	264.425.223,00	0%	20%	BIRO HUKUM
						Jumlah Laporan dalam rangka pemberian Saran / Pertimbangan Hukum	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Saran/Pertimbangan Hukum yang diproses	Saran / Pertimbangan	60	0	68	0	113%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Kegiatan Verifikasi berkas Perkara Penerima Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Kegiatan Pendampingan Akreditasi OBH yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Perkara Penerima Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Perkara	71	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
						Jumlah Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	BIRO HUKUM
						Persentase Kepatuhan Kabupaten / Kota Se Jawa Timur dan Provinsi melaporkan Aksi HAM	Persen	100	0	0	0	0%	0	BIRO HUKUM
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	11.572.229.465,00	25,42	4.948.657.345,00	25%	43%	BIRO PEREKONOMIAN
						Persentase realisasi anggaran	%	92	0	40,69	0	44%	0	BIRO PEREKONOMIAN
						Indeks Profesionalitas ASN	indeks	68	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	6	313.341.165,00	3	109.437.118,00	50%	35%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	88.700.000,00	3	45.885.248,00	100%	52%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.680.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.680.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.520.000,00	0	27.500,00	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.520.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	3	192.191.165,00	3	56.644.370,00	100%	29%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	12.050.000,00	2	6.880.000,00	50%	57%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	8.334.201.700,00	6	3.451.081.693,00	50%	41%	BIRO PEREKONOMIAN

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2		3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	0	7.973.279.000,00	0	3.304.239.526,00	0	41%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	50	0	50	0	100%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	259.754.400,00	6	105.706.042,00	50%	41%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	87.458.300,00	6	39.426.125,00	50%	45%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	2.510.000,00	6	0	50%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2	2.505.000,00	2	0	100%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	3.010.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12	3.680.000,00	6	1.710.000,00	50%	46%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.005.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	83.510.000,00	2	39.000.000,00	50%	47%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.840.000,00	1	0	100%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	4	1.170.000,00	2	0	50%	0%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	80.500.000,00	0	39.000.000,00	0%	48%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	399.434.100,00	6	287.567.255,00	50%	72%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	184.274.100,00	6	126.857.255,00	50%	69%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	7.680.000,00	6	2.560.000,00	50%	33%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	207.480.000,00	1	158.150.000,00	100%	76%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	1.678.324.100,00	6	747.005.758,00	50%	45%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah daftar arsip inaktif	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah daftar arsip vital	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	0	432.382.900,00	0	262.148.145,00	0	61%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dokumen	0	50.055.300,00	0	22.679.520,00	0	45%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Dokumen	0	216.731.140,00	0	107.006.000,00	0	49%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	1	0	50%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen	0	22.750.000,00	0	16.637.787,00	0	73%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	0	927.314.760,00	0	338.534.306,00	0	37%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	29.090.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PEREKONOMIAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	4	250.670.000,00	2	145.659.750,00	50%	58%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel	dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	0	250.670.000,00	0	145.659.750,00	0	58%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	352.264.000,00	2	126.200.471,00	50%	36%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen	0	103.500.000,00	0	42.574.550,00	0	41%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	0	37.200.000,00	0	15.252.879,00	0	41%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dokumen	0	17.040.000,00	0	7.390.000,00	0	43%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	0	194.524.000,00	0	60.983.042,00	0	31%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	4	160.484.400,00	2	42.705.300,00	50%	27%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dokumen	0	115.484.400,00	0	42.705.300,00	0	37%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	1	0	100%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dokumen	0	45.000.000,00	0	0	0	0%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	8.977.102.535,00	100	3.412.137.938,00	100%	38%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	%	100	3.182.669.255,00	100	1.097.761.400,00	100%	34%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	1	1.085.241.303,00	1	519.076.785,00	100%	48%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Fasilitasi Pengelolaan kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	2	2.097.427.952,00	2	578.684.615,00	100%	28%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	%	100	1.317.122.240,00	100	604.543.834,00	100%	46%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1	660.874.500,00	1	352.449.684,00	100%	53%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	271.555.753,00	1	116.097.750,00	100%	43%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	1	384.691.987,00	1	135.996.400,00	100%	35%	BIRO PEREKONOMIAN
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Rumusan Kebijakan atas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	%	100	4.477.311.040,00	100	1.709.832.704,00	100%	38%	BIRO PEREKONOMIAN
						Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen	5	0	5	0	100%	0	BIRO PEREKONOMIAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	1	1.249.170.270,00	1	535.081.816,00	100%	43%	BIRO PEREKONOMIAN												
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO PEREKONOMIAN												
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	2	2.543.721.681,00	2	887.264.097,00	100%	35%	BIRO PEREKONOMIAN												
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD	Dokumen	1	393.933.530,00	1	166.245.656,00	100%	42%	BIRO PEREKONOMIAN												
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen telaahan / bahan rumusan kebijakan tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	1	290.485.559,00	1	121.241.135,00	100%	42%	BIRO PEREKONOMIAN												
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai.	%	100	9.911.513.000,00	0	4.224.102.311,00	0%	43%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
						Persentase realisasi anggaran.	%	97	0	42,24	0	44%	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
						Indeks Profesional ASN.	%	66	0	0	0	0%	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah .	dokumen	9	159.128.400,00	4	102.058.000,00	44%	64%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah .	dokumen	4	0	1	0	25%	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	13	15.830.000,00	3	6.950.000,00	23%	44%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	dokumen	2	6.045.600,00	0	1.980.000,00	0%	33%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	dokumen	2	4.490.400,00	0	0	0%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	dokumen	2	4.370.600,00	0	1.970.000,00	0%	45%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	dokumen	2	4.593.400,00	0	1.920.000,00	0%	42%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	8	115.840.000,00	4	89.238.000,00	50%	77%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	4	7.958.400,00	2	0	50%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan.	dokumen	12	7.017.406.400,00	0	2.948.952.872,00	0%	42%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
						Jumlah dokumen administrasi keuangan	dokumen	4	0	0	0	0%	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	orang	12	6.963.884.400,00	0	2.938.830.372,00	0%	42%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	dokumen	12	25.693.800,00	0	5.985.500,00	0%	23%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	dokumen	12	7.839.000,00	6	0	50%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	2	8.506.100,00	1	0	50%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	dokumen	1	6.554.700,00	0	4.137.000,00	0%	63%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	1	4.928.400,00	0	0	0%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD	laporan	4	5.996.100,00	0	0	0%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	4	5.996.100,00	2	0	50%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	dokumen	12	303.471.200,00	0	143.870.100,00	0%	47%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	12	46.873.000,00	6	400.000,00	50%	1%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	12	31.006.500,00	6	18.688.100,00	50%	60%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	pegawai	61	225.591.700,00	61	124.782.000,00	100%	55%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa.	laporan	1	2.044.476.100,00	0	774.037.650,00	0%	38%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1				2		3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	568.691.350,00	0	295.068.530,00	0%	52%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	paket	1	505.391.467,00	0	188.334.502,00	0%	37%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	1	242.107.800,00	0	67.597.816,00	0%	28%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	12	718.795.483,00	6	223.036.802,00	50%	31%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	9.490.000,00	0	0	0%	0%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana.	laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap	paket	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	15.010.000,00	6	3.700.800,00	50%	25%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	paket	1	15.010.000,00	0	3.700.800,00	0%	25%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara.	laporan	3	366.024.800,00	0	251.482.889,00	0%	69%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	unit	12	76.384.800,00	6	41.915.149,00	50%	55%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	12	49.640.000,00	6	30.319.390,00	50%	61%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	unit	6	240.000.000,00	2	179.248.350,00	33%	75%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08			PROGRAM KEBLIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi pembangunan.	dokumen	16	6.265.511.000,00	0	2.615.143.990,00	0%	42%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.	dokumen	11	3.974.875.000,00	4	1.682.750.160,00	36%	42%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	laporan	4	724.119.920,00	2	393.020.089,00	50%	54%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	laporan	4	751.985.080,00	0	192.877.335,00	0%	26%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	laporan	3	2.498.770.000,00	2	1.096.852.736,00	67%	44%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan.	dokumen	3	2.290.636.000,00	7	932.393.830,00	233%	41%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	dokumen	3	342.905.000,00	2	265.169.388,00	67%	77%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	laporan	3	465.666.000,00	1	249.177.677,00	33%	54%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	dokumen	3	1.482.065.000,00	5	418.046.765,00	167%	28%	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	80	10.976.342.000,00	0	4.529.980.809,00	0%	41%	BIRO ORGANISASI
						Persentase realisasi anggaran	%	90	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
						Indeks profesionalitas ASN	indeks	68	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	dokumen	0	23.147.000,00	0	7.561.000,00	0	33%	BIRO ORGANISASI
						Jumlah dokumen pelaporan Perangkat Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	0	8.050.000,00	0	5.415.500,00	0	67%	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	0	4	0	50%	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	1.970.000,00	0	0	0%	0%	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	1.500.000,00	0	0	0	0%	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	0	2.131.500,00	0	0	0	0%	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	3.000.000,00	0	550.000,00	0	18%	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	0	2.886.000,00	0	951.000,00	0	33%	BIRO ORGANISASI

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
								5	6	7 = 6/5 x 100%					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	4	0	100%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	3.609.500,00	0	644.500,00	0	18%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	12	9.636.187.000,00	6	3.952.985.231,00	50%	41%	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	9.358.338.000,00	0	3.803.452.040,00	0	41%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	0	71	0	178%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	laporan	0	249.267.900,00	0	125.242.191,00	0	50%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	0	15.581.100,00	0	15.525.000,00	0	100%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	dokumen	0	3.000.000,00	0	1.520.000,00	0	51%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	0	10.000.000,00	0	7.246.000,00	0	72%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	12	132.280.000,00	6	55.955.345,00	50%	42%	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	99.000.000,00	0	49.030.345,00	0	50%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	0	15.000.000,00	0	6.925.000,00	0	46%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	laporan	0	18.280.000,00	0	0	0	0%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	0	15	0	38%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	laporan	11	791.800.400,00	7	401.490.009,00	64%	51%	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	80.697.760,00	0	43.737.854,00	0	54%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	5	0	100%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	27.870.000,00	0	14.675.000,00	0	53%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	10.000.000,00	0	5.250.000,00	0	53%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	kali	0	20.000.000,00	0	11.545.000,00	0	58%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	0	304.070.320,00	0	176.378.292,00	0	58%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	dokumen	0	37.500.000,00	0	7.438.887,00	0	20%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sitem Informasi yang didukung	paket	0	311.662.320,00	0	142.464.976,00	0	46%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	11	213.851.000,00	5	23.108.424,00	45%	11%	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	set	0	194.139.000,00	0	23.108.424,00	0	12%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	19.712.000,00	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	0	3	0	50%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	156.708.800,00	6	81.958.840,00	50%	52%	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman	paket	0	156.708.800,00	0	81.958.840,00	0	52%	BIRO ORGANISASI	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	12	22.367.800,00	6	6.921.960,00	50%	31%	BIRO ORGANISASI	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	22.367.800,00	0	6.921.960,00	0	31%	BIRO ORGANISASI	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	0	10	0	33%	0	BIRO ORGANISASI				
4	01	02			100	4.610.378.505,00	0	1.506.228.235,00	0%	33%	BIRO ORGANISASI			
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang tepat fungsi dan tepat ukuran	%	8	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal AA	%	70	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap standarisasi pelayanan kategori baik	%	47	1.375.000.000,00	0	409.451.715,00	0%	30%	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang ditata kelebagaannya	PD	100	0	70%	0	BIRO ORGANISASI			
		Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelebagaannya	PD kab/kota	73	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab sesuai dengan SOTK yang berlaku	%	40	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku	%	100	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun evaluasi jabatan sesuai dengan SOTK yang berlaku	%	0	400.000.000,00	0	148.056.800,00	0	37%	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase usulan penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi yang dievaluasi	%	1	0	0%	0	BIRO ORGANISASI		
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	dokumen	375.000.000,00	0	104.188.400,00	0	28%	0	BIRO ORGANISASI				
		Persentase usulan penataan kelembagaan Kab/ Kota yang ditindaklanjuti	%	2	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	600.000.000,00	0	157.206.515,00	0	26%	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang diasistensi dalam penyusunan Anjab dan ABK	PD	2	0	0%	0	BIRO ORGANISASI		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	30	3.235.378.505,00	0	1.096.776.520,00	0%	34%	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Reformasi Birokrasi dengan kategori Baik	PD	4	0	0%	0	BIRO ORGANISASI			
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP AA	PD	45	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang berbudaya kerja	PD	34	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang berbudaya kerja	kab/kota	55	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan	PD	39	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan publik	tidak	0	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah kabupaten/ kota yang difasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab/ kota	0	709.448.000,00	0	347.944.700,00	0	49%	BIRO ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Unit Kerja yang difasilitasi dalam pembangunan Zona Integritas	Unit Kerja	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah kabupaten/ kota yang diasistensi dalam penyusunan dokumen AKIP	kab/ kota	0	475.000.000,00	0	93.041.900,00	0	20%	BIRO ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang diasistensi dalam penyusunan dokumen AKIP	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dievaluasi dalam implementasi Sistem AKIP	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah kabupaten/ kota di Jawa Timur yang difasilitasi dalam pelaksanaan Budaya Kerja	kab/ kota	0	375.000.000,00	0	175.722.800,00	0	47%	BIRO ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi dalam pelaksanaan budaya kerja	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah kabupaten/ kota yang dibina terkait ketatalaksanaan pemerintah	kab/ kota	0	500.000.000,00	0	136.393.200,00	0	27%	BIRO ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dievaluasi terkait penerapan ketatalaksanaan pemerintahan	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ORGANISASI				
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah kabupaten/ kota yang mengembangkan/ mereplikasi inovasi pelayanan publik	kab/ kota	0	1.175.930.505,00	0	343.673.920,00	0	29%	BIRO ORGANISASI
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan inovasi pelayanan publik	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun SP	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				
		Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun SKM	PD	0	0	0	0	0	0	BIRO ORGANISASI				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	25.430.000,00	6	3.350.000,00	50%	13%	BIRO UMUM
						Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	145.568.000,00	1	86.927.570,00	50%	60%	BIRO UMUM
						Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	0	1.000.000,00	0%	20%	BIRO UMUM
						Jumlah Dokumen	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	12	3.397.268.988,00	6	1.388.011.885,00	50%	41%	BIRO UMUM
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	165.653.600,00	6	136.402.350,00	50%	82%	BIRO UMUM
						Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Terpenuhi	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	2.655.772.360,00	6	1.239.448.135,00	50%	47%	BIRO UMUM
						Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	101.290.000,00	6	7.391.400,00	50%	7%	BIRO UMUM
						Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	50.040.000,00	6	2.010.000,00	50%	4%	BIRO UMUM
						Jumlah Laporan SKP Yang Tepat Waktu	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	88.000.000,00	0	2.760.000,00	0%	3%	BIRO UMUM
						Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	9	0	0	0	0%	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	336.513.028,00	0	0	0%	0%	BIRO UMUM
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	4.002.925.778,00	4	1.559.208.904,00	36%	39%	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	278.428.300,00	6	131.603.265,00	50%	47%	BIRO UMUM
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	404.301.400,00	6	146.701.000,00	50%	36%	BIRO UMUM
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	754.341.253,00	6	285.044.430,00	50%	38%	BIRO UMUM
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	561.250.000,00	6	171.250.000,00	50%	31%	BIRO UMUM
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	90.947.000,00	6	0	50%	0%	BIRO UMUM
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	319.083.600,00	6	177.194.979,00	50%	56%	BIRO UMUM
						Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	324.050.000,00	6	122.673.744,00	50%	38%	BIRO UMUM
						Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	581.447.225,00	0	302.704.906,00	0%	52%	BIRO UMUM
						Jumlah Daftar Arsip Aktif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	689.077.000,00	6	222.036.580,00	50%	32%	BIRO UMUM
						Jumlah Sistem Informasi Yang didukung	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	laporan	5	6.720.041.500,00	2	3.259.289.731,00	40%	49%	BIRO UMUM
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	838.515.000,00	1	726.100.000,00	100%	87%	BIRO UMUM
						Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	13	4.149.165.000,00	6	1.832.400.000,00	46%	44%	BIRO UMUM
						Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	29.458.000,00	0	0	0%	0%	BIRO UMUM
						Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	30	200.200.000,00	30	197.679.900,00	100%	99%	BIRO UMUM
						Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50	1.502.703.500,00	24	503.109.831,00	48%	33%	BIRO UMUM
						Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	4	14.255.800.320,00	2	5.620.159.877,00	50%	39%	BIRO UMUM
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	402.730.220,00	6	162.443.675,00	50%	40%	BIRO UMUM

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
		Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.121.103.400,00	6	5.278.723.462,00	50%	44%	BIRO UMUM
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.324.967.200,00	5,99	66.471.240,00	50%	5%	BIRO UMUM
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	406.999.500,00	6	112.521.500,00	50%	28%	BIRO UMUM
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan	6	46.496.438.910,00	2	15.684.055.152,00	33%	34%	BIRO UMUM
4	01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	46	10.511.338.000,00	24	2.880.116.970,00	52%	27%	BIRO UMUM
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	535	17.414.574.211,00	143	5.615.131.652,00	27%	32%	BIRO UMUM
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	1.298.374.200,00	20	457.954.900,00	40%	35%	BIRO UMUM
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	1.494.493.000,00	20	441.886.560,00	40%	30%	BIRO UMUM
		Jumlah Aset Yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	57.432.800,00	1	0	50%	0%	BIRO UMUM
		Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	15.720.226.699,00	22	6.288.965.070,00	44%	40%	BIRO UMUM
		Jumlah Sarana Prasarana Gedung/Kantor yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Keuangan Dan Operasional KDH/WKDH	Laporan	4	32.080.143.000,00	2	15.862.333.474,00	50%	49%	BIRO UMUM
4	01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	2.315.503.000,00	12	1.070.037.324,00	50%	46%	BIRO UMUM
		Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	80	976.709.000,00	40	317.199.150,00	50%	32%	BIRO UMUM
		Jumlah Atribut dan Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Potong	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	37.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO UMUM
		Jumlah Laporan Pembayaran Medichal Check Up Kepala Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	840	28.750.931.000,00	522	14.475.097.000,00	62%	50%	BIRO UMUM
		Jumlah Dokumen Permintaan Kepala Daerah Yang Terealisasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah Yang Terpenuhi	%	80	154.948.108.337,00	75,22	44.849.022.083,00	94%	29%	BIRO UMUM
4	01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	300	113.959.384.447,00	221	31.724.952.292,00	74%	28%	BIRO UMUM
		Jumlah Dokumen Pengadaan sarana prasarana Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	100	17.615.563.285,00	72	5.360.450.251,00	72%	30%	BIRO UMUM
		Jumlah Dokumen Pengadaan sarana prasarana Wakil Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	150	23.373.160.605,00	113	7.763.619.540,00	75%	33%	BIRO UMUM
		Jumlah Dokumen Pengadaan sarana prasarana Sekretaris Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO UMUM	
4	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase kehumasan, Keprotokolkan dan kepegawaian	%	0	61.843.375.000,00	0	24.454.920.509,00	0	40%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Persentase indikator program yang tercapai	%	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Persentase realisasi anggaran	%	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Indeks profesionalitas ASN	%	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	9	4.081.828.900,00	0	856.174.726,00	0%	21%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	0	2	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Dokumen	0	2.120.516.000,00	0	481.585.396,00	0	23%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	17.260.000,00	0	11.220.780,00	0	65%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0,5	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	0	16.673.600,00	0	0	0	0%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	0	54.244.000,00	0	23.099.100,00	0	43%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0,5	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	63.107.400,00	0	16.973.010,00	0	27%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0,4	0	40%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	56.657.900,00	0	0	0	0%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	0	1.753.370.000,00	0	323.296.440,00	0	18%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	16.364.013.300,00	0	6.833.649.193,00	0	42%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	0	13.319.459.000,00	0	5.944.109.180,00	0	45%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	648	0	324	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Surat, Sarana, prasarana yang tersedia	Dokumen	0	2.846.597.000,00	0	829.681.040,00	0	29%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	5	0	42%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Dokumen	0	29.500.000,00	0	0	0	0%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	5	0	42%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	36.320.000,00	0	4.625.000,00	0	13%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	5,92	0	49%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	31.113.300,00	0	5.768.867,00	0	19%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	43.244.000,00	0	17.607.106,00	0	41%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	57.780.000,00	0	31.858.000,00	0	55%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pendataan dan Administrasi Kepegawaian	%	12	4.112.663.800,00	6	1.783.185.023,00	50%	43%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Orang	0	1.227.698.000,00	0	1.001.997.000,00	0	82%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8				
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	900	0	900	0	100%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	2.104.914.000,00	0	27%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	555.419.100,00	0	36%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN					
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaporan/ Evaluasi yang tersusun	Dokumen	0	224.632.700,00	0	6%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN				
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	11	219.006.200,00	5	67.215.400,00	45%	31%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	0	152.536.200,00	0	67.215.400,00	0	44%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	66.470.000,00	0	0	0	0%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	11	334.175.800,00	0	319.570.000,00	0%	96%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	334.175.800,00	0	319.570.000,00	0	96%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	0	6	0	50%	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	0	207.771.000,00	0	43.226.251,00	0	21%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Bulan	0	74.571.000,00	0	15.787.051,00	0	21%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	0	133.200.000,00	0	27.439.200,00	0	21%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase Produk Kehumasan dan Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	%	0	20.000.000.000,00	0	9.565.930.103,00	0	48%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Produk Informasi/ Dokumentasi yang Diterbitkan dan Disebarluaskan	produk	0	4.094.786.500,00	0	1.668.043.045,00	0	41%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Materi Pimpinan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Perusahaan /Lembaga Pers yang Menjalin Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol	Berita	0	12.516.679.100,00	0	5.911.484.768,00	0	47%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	50	0	25	0	50%	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah hasil Olah Konten Dokumentasi kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda	Dokumen	0	3.388.534.400,00	0	1.986.402.290,00	0	59%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Dokumentasi Pimpinan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	6	0	3	0	50%	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Prosentase Pelayanan Keprotokolan Kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	%	0	16.523.916.000,00	0	4.985.969.813,00	0	30%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wagub, Sekda dan Asisten	Kegiatan	0	10.572.685.150,00	0	2.658.869.173,00	0	25%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	850	0	425	0	50%	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Kegiatan	0	2.723.398.100,00	0	1.443.628.440,00	0	53%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	180	0	90	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Permintaan Undangan resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	Permintaan	0	3.227.832.750,00	0	883.472.200,00	0	27%	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Permintaan	0	0	0	0	0	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	750	0	375	0	50%	0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai.	%	100	20.059.979.000,00	0	7.270.105.846,00	0%	36%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Persentase realisasi anggaran.	%	96	0	35,4	0	37%	0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Indeks profesionalitas ASN.	%	80	0	0	0	0%	0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah.	Dokumen	9	140.000.000,00	4	90.352.500,00	44%	65%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah.	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	25.000.000,00	4	8.297.500,00	57%	33%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000,00	0	1.320.000,00	0%	22%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	6.000.000,00	3	2.395.000,00	60%	40%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	93.000.000,00	2	78.340.000,00	50%	84%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan.	Laporan	12	17.814.677.900,00	6	6.578.346.360,00	50%	37%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	16.951.989.000,00	0	6.153.144.250,00	0%	36%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	845.133.600,00	6	420.873.610,00	50%	50%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	2.530.000,00	6	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	2.530.000,00	1	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	3.200.000,00	1	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5.055.000,00	1	4.328.500,00	100%	86%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.350.300,00	6	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.890.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Laporan	12	12.690.000,00	6	250.000,00	50%	2%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	4	2.500.000,00	2	250.000,00	50%	10%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2.500.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	4.190.000,00	6	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	3.500.000,00	1	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian.	Laporan	12	201.400.000,00	6	6.510.000,00	50%	3%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	50.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	9.500.000,00	6	3.975.000,00	50%	42%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	10.000.000,00	6	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	11.900.000,00	6	2.535.000,00	50%	21%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
4	01	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	120.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa.	Laporan	11	253.682.000,00	6	126.037.822,00	55%	50%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000,00	0	9.903.420,00	0%	50%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	125.000.000,00	1	103.351.402,00	100%	83%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	47.140.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	4.260.000,00	0	2.550.000,00	0%	60%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20.100.000,00	0	5.208.000,00	0%	26%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	4.000.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	23.182.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000,00	0	5.025.000,00	0%	50%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana.	Laporan	1	185.417.000,00	1	183.088.950,00	100%	99%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	185.417.000,00	1	183.088.950,00	100%	99%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Laporan	12	769.018.500,00	6	202.746.434,00	50%	26%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	4.000.000,00	0	1.062.500,00	0%	27%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	510.687.500,00	6	185.699.934,00	50%	36%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	55.386.000,00	1	0	50%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	198.945.000,00	0	15.984.000,00	0%	8%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara.	Laporan	12	683.093.600,00	6	82.773.780,00	50%	12%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	78.073.600,00	2	31.833.780,00	50%	41%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	90.000.000,00	0	50.940.000,00	0%	57%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	515.020.000,00	0	0	0%	0%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07			PROGRAM KEBLJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.	%	100	8.392.000.000,00	22	3.269.749.534,00	22%	39%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	Laporan	4	2.817.000.000,00	2	1.226.919.940,00	50%	44%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	2	781.000.000,00	1	415.395.995,00	50%	53%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1.235.000.000,00	0	563.264.695,00	0%	46%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	801.000.000,00	0	248.259.250,00	0%	31%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan.	%	100	2.241.000.000,00	0	990.931.322,00	0%	44%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	1	891.000.000,00	0	491.252.127,00	0%	55%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	850.000.000,00	0	249.815.590,00	0%	29%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	1	500.000.000,00	0	249.863.605,00	0%	50%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ di Jawa Timur yang dibina.	%	100	3.334.000.000,00	33	1.051.898.272,00	33%	32%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	35	1.091.000.000,00	0	269.745.437,00	0%	25%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	341.000.000,00	0	4.692.000,00	0%	1%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1.902.000.000,00	1	777.460.835,00	100%	41%	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	02				SEKRETARIAT DPRD			168	1.491.082.289.676,00	0	513.222.226.866,00	0%	34%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	84	284.642.778.727,00	0	110.957.578.677,00	0%	39%	SEKRETARIAT DPRD
						Persentase indikator program yang tercapai	%	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
						Persentase realisasi anggaran	%	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2				3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
					Indeks profesionalitas ASN	Indeks	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	8	3.976.538.353,00	0	1.399.373.094,00	0%	35%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	3.401.763.353,00	6	1.322.723.094,00	55%	39%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	106.500.000,00	0	10.800.000,00	0	10%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	109.900.000,00	0	5.400.000,00	0	5%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	91.100.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	92.775.000,00	0	10.800.000,00	0	12%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	82.250.000,00	0	22.700.000,00	0	28%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	92.250.000,00	0	26.950.000,00	0	29%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	46.318.175.400,00	0	17.521.259.656,00	0%	38%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	36.150.360.000,00	0	14.013.776.084,00	0	39%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	121	0	65	0	54%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	9.972.950.400,00	0	3.470.093.572,00	0	35%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	56.080.000,00	0	11.040.000,00	0	20%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	36.050.000,00	0	21.500.000,00	0	60%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	Laporan	0	65.525.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	10.360.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	23.040.000,00	0	4.850.000,00	0	21%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	3.810.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah	Laporan	12	1.024.200.300,00	0	6.000.000,00	0%	1%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	51.607.750,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	851.102.550,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	9.540.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan	Kegiatan	0	53.270.000,00	0	6.000.000,00	0	11%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
4	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	Laporan	0	24.480.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	19.480.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	0	14.720.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	%	12	3.842.218.400,00	0	869.708.739,00	0%	23%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	0	10.000.000,00	0	5.240.000,00	0	52%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	1.364.380.350,00	0	673.882.099,00	0	49%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	10	0	7	0	70%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	635.966.000,00	0	56.324.000,00	0	9%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	1	0	8%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	421.900.000,00	0	3.600.000,00	0	1%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	561.360.000,00	0	300.000,00	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	120	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0	419.587.600,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Laporan	0	427.024.450,00	0	130.362.640,00	0	31%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	0	65	0	43%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	11	19.476.193.190,00	0	4.579.686.380,00	0%	24%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	816.182.700,00	0	199.682.895,00	0	24%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.422.900,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	840.091.460,00	0	213.021.953,00	0	25%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	3.619.355.560,00	0	867.879.007,00	0	24%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	2.112.321.970,00	0	618.940.537,00	0	29%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	Dokumen	0	656.065.000,00	0	265.805.000,00	0	41%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	300	0	175	0	58%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	Dokumen	0	20.250.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Kegiatan	0	8.838.149.000,00	0	1.158.279.750,00	0	13%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	0	2.462.354.600,00	0	1.236.077.238,00	0	50%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	Dokumen	0	60.000.000,00	0	20.000.000,00	0	33%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah system informasi yang didukung	Kegiatan	0	15.000.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5	6	7 = 6/5 x 100%				
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	11	3.314.951.842,00	0	305.394.300,00	0%	9%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	602.169.600,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	704.853.800,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Paket	0	100.282.000,00	0	57.642.300,00	0	57%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	0	3	0	75%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0	609.163.360,00	0	247.752.000,00	0	41%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket Aset Tetap Lainnya yang diadakan	Paket	0	74.235.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket Aset Tak Berwujud yang diadakan	Paket	0	414.388.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	262.657.324,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	547.202.758,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	12	24.730.051.311,00	0	8.948.076.491,00	0%	36%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket	0	31.496.500,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	8.813.996.000,00	0	3.352.941.491,00	0	38%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	1.610.309.000,00	0	42.600.000,00	0	3%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket	0	14.274.249.811,00	0	5.552.535.000,00	0	39%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	12	21.921.978.881,00	0	3.540.160.131,00	0%	16%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	2.690.336.600,00	0	659.672.270,00	0	25%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	89	0	32	0	36%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Paket	0	838.695.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	5.105.254.820,00	0	1.141.114.467,00	0	22%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah terpeliharanya Aset Tetap Lainnya	%	0	30.225.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah terpeliharanya Aset Tak Berwujud	%	0	1.128.000.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung	0	2.705.274.000,00	0	585.215.310,00	0	22%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	%	0	4.484.687.461,00	0	874.087.260,00	0	19%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	%	0	4.939.506.000,00	0	280.070.824,00	0	6%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan	Laporan	84	484.599.950,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Prosentase materi pimpinan yang tersedia tepat waktu	%	0	1.500.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1	458.100.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pengelolaan dokumentasi pimpinan	Kegiatan	0	24.999.950,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks kepuasan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	84	157.833.571.100,00	0	73.164.975.637,00	0%	46%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Prosentase berkas administrasi keuangan DPRD yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP	%	0	154.618.648.000,00	0	73.164.975.637,00	0	47%	SEKRETARIAT DPRD

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan	120	0	81	0	68%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang tersedia	Paket	0	2.715.898.600,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Prosesentase kegiatan Medical Check Up DPRD yang terfasilitasi sesuai dengan permintaan DPRD	%	0	499.024.500,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	120	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan administrasi	%	84	1.720.300.000,00	0	622.944.249,00	0%	36%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Prosentase berkas administrasi keanggotaan DPRD yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP	%	0	4.150.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan kegiatan fraksi	%	0	4.800.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	8	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Prosentase Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan sesuai dengan SOP dan Jadwal yang telah ditetapkan DPRD	%	0	1.692.600.000,00	0	622.944.249,00	0	37%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	5	0	1	0	20%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	%	0	18.750.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	8	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan perundang- undangan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	%	84	352.511.174.768,00	0	69.391.912.158,00	0%	20%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan sesuai jadwal	%	84	66.300.262.280,00	0	9.112.745.429,00	0%	14%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah FGD/ Publik Hearing Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang sesuai jadwal	%	84	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	41.525.000,00	0	17.325.000,00	0	42%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	65.182.082.280,00	0	9.095.420.429,00	0	14%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Prosentase penyelenggaraan kajian Perundang-Undangan yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	45.625.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang tersusun	Naskah	0	1.000.000.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Prosentase kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	31.030.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD	Dokumen	84	8.280.730.000,00	0	1.027.276.891,00	0%	12%	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Prosentase kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	109.320.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Prosentase kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	90.440.000,00	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Prosentase kegiatan Pembahasan APBD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	7.359.270.000,00	0	762.247.891,00	0	10%	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Prosentase kegiatan Pembahasan Perubahan APBD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	444.750.000,00	0	197.469.000,00	0	44%	SEKRETARIAT DPRD

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	
								5		6		7 = 6/5 x 100%			
								1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	0	83.100.000,00	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
						Prosentase kegiatan Pembahasan Laporan Semester yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0		0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Prosentase kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	193.850.000,00	0	67.560.000,00	0	35%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD	Laporan	84	603.730.000,00	0	62.121.859,00	0	10%	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	69.920.000,00	0	32.137.775,00	0	46%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	69.720.000,00	0	9.144.075,00	0	13%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	71.020.000,00	0	13.428.262,00	0	19%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	60.250.000,00	0	3.510.097,00	0	6%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Prosentase kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	51.020.000,00	0	3.901.650,00	0	8%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Prosentase kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	60.570.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Prosentase kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	52.160.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Prosentase kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	169.070.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	Laporan	84	104.742.914.000,00	0	23.259.573.698,00	0	22%	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD	Prosentase kegiatan Orientasi DPRD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	10.000.000,00	0	0	0	0%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Prosentase kegiatan Pendalaman Tugas DPRD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	4.839.160.000,00	0	1.018.748.048,00	0	21%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Prosentase kegiatan Dewan yang terpublikasi dan terdokumentasi sesuai dengan SOP	%	0	19.937.813.800,00	0	3.865.590.575,00	0	19%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan Tim Ahli yang tersedia	Orang	0	1.343.000.000,00	0	624.000.000,00	0	46%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	120	0	75	0	63%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia	Orang	0	864.000.000,00	0	344.000.000,00	0	40%	SEKRETARIAT DPRD	
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9	0	4	0	44%	0	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kehumasan yang telah diselenggarakan	%	0	77.729.190.200,00	0	17.407.235.075,00	0	22%	SEKRETARIAT DPRD	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
										Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD								
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang disusun	Dokumen	0	19.750.000,00	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD										
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	3	45.433.683.088,00	0	0	11.631.199.232,00	0%	26%	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Presentase kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	3.226.884.000,00	0	0	118.696.400,00	0	4%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	0	19.750.000,00	0	0	2.902.650,00	0	15%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	Kegiatan	0	42.187.049.088,00	0	0	11.509.600.182,00	0	27%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	84	855.635.000,00	0	0	4.620.000,00	0%	1%	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Presentase kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	56.700.000,00	0	0	4.620.000,00	0	8%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Presentase kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD yang telah difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	798.935.000,00	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan fasilitas kegiatan pembahasan kerjasama daerah oleh DPRD	Laporan	84	106.700.000,00	0	0	0	0%	0%	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Presentase kegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	53.350.000,00	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD										
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah bahan komunikasi dan publikasi yang tersusun	Dokumen	0	53.350.000,00	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD										
						Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitas tugas DPRD	Laporan	84	126.187.520.400,00	0	0	24.294.375.049,00	0%	19%	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Presentase kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	115.201.688.400,00	0	0	20.737.147.259,00	0	18%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun	Dokumen	0	86.800.000,00	0	0	53.580.000,00	0	62%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Presentase kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	155.450.000,00	0	0	59.497.500,00	0	38%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Presentase kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD yang dilaksanakan sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	%	0	10.743.582.000,00	0	0	3.444.150.290,00	0	32%	SEKRETARIAT DPRD											
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
4	02	02	1.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	SEKRETARIAT DPRD											
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			79.158,33	12.557.795.902.482,00	18.628,94	4.520.832.929.055,60	24%	36%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5	01				PERENCANAAN			556,93	405.677.117.500,00	0	148.697.764.365,00	0%	37%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	79	98.527.229.000,00	0	37.540.475.096,00	0%	38%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
						Persentase realisasi anggaran	%	93	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
						Indeks profesionalitas ASN	%	61,93	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	0	876.788.500,00	0	224.774.133,00	0	26%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	11	0	4	0	36%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	135.053.500,00	3	58.225.705,00	43%	43%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	12.700.000,00	0	1.200.000,00	0	9%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	9.700.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	0	5.770.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	5.520.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	0	693.755.000,00	0	158.815.828,00	0	23%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	3	0	75%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	14.290.000,00	0	6.532.600,00	0	46%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan	dokumen	8	65.181.920.000,00	0	28.312.582.767,00	0%	43%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	63.647.108.000,00	0	27.687.999.712,00	0	44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	143	0	286	0	200%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	1.095.512.000,00	0	419.936.330,00	0	38%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapano verifikasi penatausahaan	laporan	0	156.000.000,00	0	76.642.235,00	0	49%	PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	laporan	0	166.000.000,00	0	79.678.410,00	0	48%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	10.720.000,00	0	1.724.000,00	0	16%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	0	5.360.000,00	0	1.740.000,00	0	32%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	98.540.000,00	0	44.136.080,00	0	45%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	2.680.000,00	0	726.000,00	0	27%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	13.600.000,00	0	3.841.800,00	0	28%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	3	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	laporan	0	4.520.000,00	0	2.098.500,00	0	46%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	0	4.540.000,00	0	966.400,00	0	21%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	2	0	17%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	4.540.000,00	0	776.900,00	0	17%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	6	2.122.369.400,00	0	689.450.507,00	0%	32%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	paket	0	1.145.325.000,00	0	344.193.800,00	0	30%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	95.020.000,00	0	53.005.480,00	0	56%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	0	17.360.000,00	0	3.472.000,00	0	20%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	0	630.960.000,00	0	276.129.727,00	0	44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	0	233.704.400,00	0	12.649.500,00	0	5%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	11.097.264.988,00	0	2.383.098.969,00	0	21%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	9	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	36.041.500,00	0	35.941.800,00	0	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																					
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	paket	0	469.273.600,00	0	291.918.230,00	0	62%	BADAN PERENCANAAN																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	952.385.100,00	0	537.424.320,00	0	56%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	paket	0	296.617.988,00	0	113.885.700,00	0	38%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	kali	0	297.150.000,00	0	122.284.100,00	0	41%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan	laporan	0	8.256.415.000,00	0	1.017.338.914,00	0	12%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	0	282.972.000,00	0	40.819.455,00	0	14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	paket	0	506.409.800,00	0	223.486.450,00	0	44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	1.278.203.011,00	0	1.055.411.950,00	0	83%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	2	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	set	0	41.175.011,00	0	16.983.000,00	0	41%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	1.237.028.000,00	0	1.038.428.950,00	0	84%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	9.292.058.602,00	0	3.548.070.060,00	0	38%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	9.344.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	2.440.606.000,00	0	914.530.891,00	0	37%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	0	433.220.000,00	0	126.409.820,00	0	29%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	0	6.408.888.602,00	0	2.507.129.349,00	0	39%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	0	8.665.024.499,00	0	1.323.244.910,00	0	15%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	12	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	0	310.164.000,00	0	87.375.700,00	0	28%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	0	1.526.920.400,00	0	558.910.141,00	0	37%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	1	961.826.300,00	0	312.170.421,00	0%	32%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	4.531.021.304,00	0	252.098.760,00	0	6%	BADAN PERENCANAAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp																										
								5		6		7 = 6/5 x 100%			8																								
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	paket	0	932.942.495,00	0	37.130.388,00	0	4%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara.	unit	0	402.150.000,00	0	75.559.500,00	0	19%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah.	%	86	21.452.183.500,00	0	5.296.056.030,00	0%	25%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	dokumen	2	9.359.876.716,00	0	1.858.435.376,00	0%	20%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	dokumen	0	1.600.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	dokumen	0	1.479.525.514,00	0	557.961.852,00	0	38%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	8	0	5	0	63%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik	dokumen	0	1.996.406.000,00	0	194.688.861,00	0	10%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	0	1	0	100%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	dokumen	0	22.500.000,00	0	17.250.000,00	0	77%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	0	1	0	100%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	dokumen	0	1.734.577.600,00	0	749.457.140,00	0	43%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	0	1	0	100%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	dokumen	0	2.526.867.602,00	0	339.077.523,00	0	13%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	dokumen	3	6.377.464.081,00	1	2.313.022.434,00	33%	36%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	0	4.845.718.400,00	0	1.611.534.118,00	0	33%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	0	1	0	33%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	dokumen	0	597.693.800,00	0	238.218.008,00	0	40%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	55	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dan dimanfaatkan Data dan Informasinya	dokumen	0	505.791.881,00	0	71.441.820,00	0	14%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	38	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	dokumen	0	428.260.000,00	0	391.828.488,00	0	91%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	2	0	1	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	dokumen	29	5.413.131.703,00	14	1.065.142.617,00	48%	20%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	dokumen	0	2.763.861.703,00	0	152.873.662,00	0	6%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	dokumen	0	120.854.200,00	0	67.140.954,00	0	56%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	dokumen	0	1.049.045.800,00	0	383.875.113,00	0	37%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan	dokumen	0	1.479.370.000,00	0	461.252.888,00	0	31%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	15	0	8	0	53%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1	301.711.000,00	0	59.455.603,00	0%	20%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	1	74.111.000,00	0	0	0%	0%	BADAN PERENCANAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	01	02	1.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	162.600.000,00	0	59.455.603,00	0%	37%	PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	1.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	65.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	%	79	29.547.749.000,00	0	10.260.094.349,00	0%	35%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	%	79	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	%	79	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	dokumen	11	9.347.252.000,00	1	2.760.128.190,00	9%	30%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	dokumen	12	0	1	0	8%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	11	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sub Bidang Pemerintahan	dokumen	0	10.988.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	dokumen	0	19.430.000,00	0	13.230.000,00	0	68%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	20	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	dokumen	0	107.376.000,00	0	63.849.000,00	0	59%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	20	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan	dokumen	0	1.586.457.386,00	0	381.824.693,00	0	24%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	0	1.584.267.184,00	0	748.375.748,00	0	47%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	0	4	0	100%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	0	580.959.000,00	0	91.926.196,00	0	16%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
					Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	9	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	0	250.822.872,00	0	38.783.000,00	0	15%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
					Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	9	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	dokumen	0	5.206.951.558,00	0	1.422.139.553,00	0	27%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
					Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	0	1	0	8%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	11	9.182.044.000,00	0	2.740.583.911,00	0%	30%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
					Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	dokumen	11	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	dokumen	12	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	0	173.840.000,00	0	0	0	0%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub	dokumen	0	20.100.000,00	0	3.780.000,00	0	19%	BADAN PERENCANAAN																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral								PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	0	16.080.000,00	0	3.455.000,00	0	21%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	5	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM	dokumen	0	5.784.242.000,00	0	1.937.220.185,00	0	33%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Sub Bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	9	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	dokumen	0	86.590.000,00	0	38.120.700,00	0	44%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	dokumen	0	107.224.000,00	0	10.030.300,00	0	9%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang SDA	dokumen	0	106.460.000,00	0	16.353.000,00	0	15%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang SDA	dokumen	0	2.887.508.000,00	0	731.624.726,00	0	25%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	dokumen	11	11.018.453.000,00	2	4.759.382.248,00	18%	43%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	dokumen	10	0	1	0	10%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	dokumen	11	0	1	0	9%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Integrasi Perencanaan Program PHJD	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan	dokumen	0	6.030.000,00	0	3.015.000,00	0	50%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	6	0	3	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	dokumen	0	15.075.000,00	0	8.965.000,00	0	59%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	8	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	dokumen	0	12.060.000,00	0	5.655.000,00	0	47%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	8	0	0	0	0%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Perencanaan Program PHJD	dokumen	0	8.653.288.000,00	0	4.193.543.802,00	0	48%	PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan IPDMIP	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	10	0	1	0	10%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Kewilayahan	dokumen	0	2.332.000.000,00	0	548.203.446,00	0	24%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	02				KEUANGAN			27.611,20	11.089.074.508.356,00	17.393,26	3.950.063.531.098,60	63%	36%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur	%	76	96.832.028.475,00	40	38.041.060.935,00	53%	39%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Persentase realisasi anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	%	90	0	41,08	0	46%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Indeks profesionalitas ASN	Indeks	86,35	0	67,48	0	78%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah	Dokumen	10	938.800.000,00	3	173.891.800,00	30%	19%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	859.681.000,00	4	166.001.900,00	57%	19%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	9.530.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	9.530.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	3.150.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	1.750.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	44.319.000,00	0	5.471.900,00	0	12%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	4	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	10.840.000,00	0	2418.000,00	0	22%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	17	60.863.852.000,00	11	27.504.640.863,00	65%	45%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	59.343.853.000,00	0	26.944.776.337,00	0	45%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	124	0	124	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	1.229.592.000,00	0	483.906.000,00	0	39%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	254.457.500,00	0	69.643.276,00	0	27%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Dokumen	0	7.687.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	0	4.845.000,00	0	3.545.000,00	0	73%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	8.440.000,00	0	2.299.500,00	0	27%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	8.794.000,00	0	470.750,00	0	5%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	16	0	10	0	63%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	6.183.500,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset	Dokumen	4	6.700.000,00	0	1.675.000,00	0%	25%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset	Dokumen	0	3.350.000,00	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi dan Laporan KIB A, B, C, D, E, F dan Laporan Persediaan	Kegiatan dan Laporan	0	3.350.000,00	0	1.675.000,00	0	50%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Neraca	Laporan	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian	Dokumen	122	875.784.941,00	60	201.817.500,00	49%	23%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	0	591.100.000,00	0	184.990.000,00	0	31%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	80.000.000,00	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	6.700.000,00	0	1.662.500,00	0	25%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	0	6	0	60%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	42.200.000,00	0	11.815.000,00	0	28%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	0	3.350.000,00	0	3.350.000,00	0	100%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	124.304.941,00	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	8	0	80%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0	12.356.000,00	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0	6	0	60%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	0	15.774.000,00	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0	8	0	80%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kearsipan	Dokumen	1	15.362.237.539,00	0	4.226.854.824,00	0%	28%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	168.722.900,00	0	18.994.653,00	0	11%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	Paket	0	4.409.487.252,00	0	1.899.809.180,00	0	43%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	Paket	0	467.074.600,00	0	116.183.295,00	0	25%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	1.311.540.100,00	0	279.096.069,00	0	21%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah paket pengadaan	Paket	0	26.736.000,00	0	7.920.000,00	0	30%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	Paket	0	9.898.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	Paket	0	246.375.000,00	0	103.970.200,00	0	42%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	7.325.367.687,00	0	894.752.677,00	0	12%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	0	621.850.000,00	0	551.087.250,00	0	89%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	Paket	0	775.186.000,00	0	355.041.500,00	0	46%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana	Dokumen	6	284.658.883,00	0	0	0%	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Set	0	58.446.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Unit	0	226.212.883,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Perlengkapan Kantor	Dokumen	2	10.441.604.712,00	1	3.481.371.221,00	50%	33%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	410.692.800,00	0	147.868.426,00	0	36%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kali	0	2.111.261.250,00	0	766.309.363,00	0	36%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	paket	0	965.221.000,00	0	218.558.951,00	0	23%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	paket	0	6.954.429.662,00	0	2.348.634.481,00	0	34%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan	Dokumen	6	8.058.390.400,00	3	2.450.809.727,00	50%	30%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket	0	16.125.000,00	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	0	3	0	75%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	0	598.906.200,00	0	272.607.800,00	0	46%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	0	19	0	70%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah jasa	paket	0	20.600.000,00	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	2.726.213.600,00	0	727.152.207,00	0	27%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	141	0	71	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	paket	0	706.804.800,00	0	19.980.000,00	0	3%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	0	3.630.600.000,00	0	1.375.195.650,00	0	38%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	paket	0	359.140.800,00	0	55.874.070,00	0	16%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	01	1.09	012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah jasa pemeliharaan/pengamanan tanah	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	Dokumen	4	8.668.974.813.945,00	0	3.025.804.837.922,60	0%	35%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	Dokumen	4	1.566.927.000,00	0	365.710.600,00	0%	23%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	0	215.641.000,00	0	147.795.000,00	0	69%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD	Dokumen	0	241.790.000,00	0	75.388.000,00	0	31%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi RKA SKPD	Dokumen	0	155.360.000,00	0	500.000,00	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi RKA SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Dokumen	0	148.930.000,00	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Perubahan RKA SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi DPA SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Perubahan DPA SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Perubahan DPA SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	0	238.378.000,00	0	28.400.000,00	0	12%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	0	228.946.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD dan Perubahan APBD	Dokumen	0	337.882.000,00	0	113.627.600,00	0	34%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Draft Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi atas rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota se Jatim	Dokumen	114	3.243.245.750,00	0	756.594.116,00	0%	23%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen	0	245.196.000,00	0	11.504.000,00	0	5%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas Raperda tentang Perubahan APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen	0	264.800.600,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Draft Kepgub tentang Hasil Evaluasi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen	0	347.996.000,00	0	52.741.080,00	0	15%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
					Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%						
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Berita Acara/Notulen Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Penyusunan APBD, Penyusunan P.A.PBD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Regulasi Keuangan Daerah	Dokumen	0	714.170.000,00	0	268.936.328,00	0	38%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan terkait Permasalahan APBD yang ada di Kabupaten/Kota	Laporan	0	814.206.550,00	0	321.524.460,00	0	39%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan terkait Permasalahan Perubahan APBD yang ada di Kabupaten/Kota	Laporan	0	512.644.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.02	010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan terkait Permasalahan Pertanggungjawaban APBD yang ada di Kabupaten/Kota	Laporan	0	189.096.000,00	0	53.022.128,00	0	28%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.02	012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat	Laporan	0	155.136.600,00	0	48.866.120,00	0	31%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta Laporan Posisi Kas, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Laporan Aliran Kas	Dokumen	508	3.149.437.500,00	254	1.597.225.328,00	50%	51%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Berita Acara Posisi Kas Daerah	Laporan	0	505.955.000,00	0	354.694.678,00	0	70%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	0	1.675.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana	SKPD	0	1.675.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	364	0	182	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP	Dokumen	0	1.675.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8				
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Realisasi Transfer triwulan	Laporan	0	604.785.600,00	0	212.336.400,00	0	35%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Berita Acara Rekon BPKAD dengan Bank dan Instansi Terkait	Dokumen	0	987.915.600,00	0	508.616.050,00	0	51%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Berita Acara Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga dan Laporan ?skal daerah	Laporan	0	230.000.000,00	0	46.306.000,00	0	20%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Berita Acara	Laporan	0	1.675.000,00	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Berita Acara Rekon Penerimaan dan Pengeluaran	Laporan	0	279.305.800,00	0	181.082.200,00	0	65%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.03	010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Laporan SP2D, SPJ dan SKPP	Laporan	0	534.775.500,00	0	294.190.000,00	0	55%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2.368.120.575,00	2	445.716.866,00	100%	19%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Register Jurnal	Dokumen	0	2.953.750,00	0	2.940.500,00	0	100%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	91	0	91	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan	Dokumen	0	116.893.450,00	0	52.847.100,00	0	45%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	92	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran	Dokumen	0	295.544.000,00	0	9.681.360,00	0	3%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	16	0	12	0	75%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	0	53.097.500,00	0	32.845.130,00	0	62%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	92	0	92	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	0	878.516.875,00	0	188.515.526,00	0	21%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	Dokumen	2	0	2	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
					Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi									
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tindakan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	0	24.208.000,00	0	3.449.250,00	0	14%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan	0	31.962.250,00	0	2.210.000,00	0	7%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur atau Revisi Peraturan Gubernur terkait Kebijakan Akuntansi	Dokumen	0	263.307.250,00	0	2.598.000,00	0	1%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur atau Revisi Peraturan Gubernur terkait Kebijakan Akuntansi	Dokumen	0	22.610.250,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan Semesteran	Dokumen	0	556.395.250,00	0	140.388.000,00	0	25%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	3.276,00	0	2.457,00	0	75%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.04	012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan	Laporan	0	122.632.000,00	0	10.242.000,00	0	8%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	41	0	19	0	46%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Analisa dan Informasi Keuangan Daerah	Laporan	4	8.657.633.812.920,00	2	3.022.261.422.757,60	50%	35%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Laporan	0	39.867.000,00	0	1.301.500,00	0	3%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Dokumen	0	106.210.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Dokumen	0	106.938.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga pinjaman Pemerintah Daerah	Dokumen	0	26.110.000,00	0	12.230.300,00	0	47%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Dokumen	0	17.540.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Dokumen	0	56.217.000,00	0	18.967.125,00	0	34%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Provinsi	Dokumen	0	180.316.000,00	0	9.496.100,00	0	5%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan dan Alokasi Subsidi Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Target Alokasi Subsidi Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	0	543.244.525.500,00	0	288.972.732.819,00	0	53%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Pencairan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	0	885.548.456.022,00	0	44.353.635.974,00	0	5%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Pencairan Belanja Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.05	010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	0	7.228.307.633.398,00	0	2.688.893.058.939,60	0	37%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Pencairan Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terlayani	%	100	1.013.270.200,00	0	378.168.255,00	0%	37%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Data Bidang Keuangan Daerah	Laporan	0	101.028.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Laporan	0	45.044.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Laporan hasil pembinaan	Laporan	0	867.198.200,00	0	378.168.255,00	0	44%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	240	0	161	0	67%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah laporan barang milik daerah	Dokumen	1	5.951.854.500,00	1	817.377.779,00	100%	14%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Dokumen	1	5.951.854.500,00	1	817.377.779,00	100%	14%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen	0	261.700.000,00	0	25.260.000,00	0	10%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Bertambahnya daftar jenis produk/jasa dan update satuan harga dalam dokumen SSH	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Buku Daftar Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	88.310.000,00	0	1.005.000,00	0	1%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Daftar Rencana Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	19.225.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Buku Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Pergub tentang Kodifikasi, Buku Penatausahaan, Buku Pergub TPTGR, Buku Pergub Pemanfaatan Aset	Dokumen	0	71.200.000,00	0	15.500.000,00	0	22%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Buku Pergub tentang Kode?kasi, SOP Penatausahaan, Buku Pergub Pemanfaatan Aset, Pemindahtanganan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penatausahaan BMD oleh SKPD	Dokumen	0	925.364.600,00	0	124.133.502,00	0	13%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penatausahaan BMD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Sertifikasi Aset Kendaraan Bermotor	Dokumen	0	1.117.092.000,00	0	204.944.080,00	0	18%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Laporan Sertifikasi Aset Tanah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah dokumen laporan hasil inventarisasi BMD pada SKPD di Lingkungan Pemprov. Jatim	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	91	0	91	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	0	1.572.455.700,00	0	88.787.650,00	0	6%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Dokumen Serti?kat Aset Tanah atas nama Pemprov Jatim	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penilaian BMD yang wajar	Dokumen	0	404.020.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan dan Pengendalian atas BMD	Kegiatan	0	36.450.800,00	0	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	91	0	0	0	0%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	1.01	010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pemusnahan, Penghapusan	Kegiatan	0	840.996.000,00	0	323.149.947,00	0	38%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Aset yang digunakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Kegiatan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Dokumen Laporan Pemindahtanganan Pemusnahan, Penghapusan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Laporan Aset yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	8	0	1	0	13%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	03	1.01	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	0	107.570.400,00	0	32%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi	Dokumen	0	0	0	0	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	1.01	012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Neraca Aset Pemprov Jatim yang tepat waktu	Dokumen	0	507.470.000,00	0	0	0%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	91	0	91	0	100%	0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	100	550.844.221.022,00	50	216.374.392.567,00	50%	39%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Persentase realisasi anggaran	%	100	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Indeks profesionalitas ASN	%	87,52	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	Dokumen	6	2.023.131.800,00	3	381.504.202,00	50%	19%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	9	0	4	0	44%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	0	532.389.500,00	0	152.554.627,00	0	29%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	0	4	0	57%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	86.640.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	86.640.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	dokumen	0	42.500.000,00	0	12.463.080,00	0	29%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	42.500.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	0	991.452.500,00	0	89.948.700,00	0	9%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	2	0	40%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	0	241.009.800,00	0	126.537.795,00	0	53%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	13	403.339.803.100,00	6	168.050.396.814,00	46%	42%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Bangkalan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Banyuwangi	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Blitar	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Bojonegoro	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Bondowoso	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Jember	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Jombang	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Kediri	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Lamongan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Lumajang	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Madiun	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Magetan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Malang Kota	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Malang Selatan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Mojokerto	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Nganjuk	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Ngawi	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Pacitan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Pamekasan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Pasuruan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Ponorogo	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Probolinggo	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Sampang	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Sidoarjo	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Situbondo	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Sumenep	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Surabaya Barat	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Surabaya Selatan	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Surabaya Timur	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Surabaya Utara	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Trenggalek	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Tuban	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Tulungagung	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Laporan Keuangan UPT PPD Gresik	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	399.455.064.000,00	0	166.603.933.664,00	0	42%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	657	0	657	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	3.379.236.000,00	0	1.259.492.500,00	0	37%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	laporan	0	422.576.900,00	0	185.027.650,00	0	44%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	17.820.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	dokumen	0	24.952.500,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	dokumen	0	30.253.700,00	0	1.943.000,00	0	6%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	4.950.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	4.950.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	26.000.000,00	6	0	50%	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencann kebutuhan BMD SKPD	laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	1	4.169.751.750,00	0	11.000.000,00	0%	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	0	4.074.551.750,00	0	11.000.000,00	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	0	8	0	40%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	0	10.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	laporan	0	79.200.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan	Dokumen	0	21.785.275.967,00	0	5.993.534.741,00	0	28%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Bangkalan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Banyuwangi	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Blitar	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Bojonegoro	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Bondowoso	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Jember	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Jombang	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Kediri	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Lamongan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Lumajang	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Madiun	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Magetan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Malang Kota	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Malang Selatan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Mojokerto	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Nganjuk	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Ngawi	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Pacitan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Pamekasan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Pasuruan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Ponorogo	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Probolinggo	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Sampang	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Sidoarjo	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Situbondo	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Sumenep	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Surabaya Barat	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Surabaya Selatan	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum Surabaya Timur	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Surabaya Utara	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Trenggalek	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Tuban	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Tulungagung	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
							Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPT PPD Gresik	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	0	461.229.360,00	0	169.568.040,00	0	37%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						jumlah paket pengadaan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	02	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah daftar arsip vital	dokumen	0	85.275.000,00	0	24%	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
						jumlah daftar arsip inaktif	dokumen	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
						Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	0	2	0	50%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	paket	0	1.000.000,00	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Tersedia	Paket	150	12.194.380.393,00	36	753.665.000,00	24%	6%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	set	0	920.053.100,00	0	48.618.000,00	0	5%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	100	0	35	0	35%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	7.397.188.040,00	0	705.047.000,00	0	10%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	0	30	0	30%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	paket	0	150.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	unit	0	3.727.139.253,00	0	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Tersedia	Paket	0	81.137.552.894,00	0	30.758.136.396,00	0	38%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia	paket	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Bangkalan	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Banyuwangi	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Blitar	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Bojonegoro	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Bondowoso	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Jember	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Jombang	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia UPT PPD Kediri	dokumen	48	0	24	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	19.835.982.761,00	0	5.705.199.492,00	0	29%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
1	2	3	4							8			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	Paket	0	26.168.325.118,00	0	10.426.155.414,00	0	40%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	paket	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Bangkalan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Banyuwangi	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Blitar	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Bojonegoro	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Bondowoso	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Jember	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Jombang	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Kediri	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Lamongan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Lumajang	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Madiun	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Magetan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Malang Kota	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Malang Selatan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Mojokerto	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Nganjuk	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Ngawi	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Pacitan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Pamekasan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Pasuruan	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Ponorogo	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Probolinggo	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Sampang	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
				Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara UPT PPD Sidoarjo	paket	14	0	6	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket	0	6.626.734.412,00	0	2.136.305.676,00	0	32%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					jumlah jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah jasa	paket	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
											Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1		0	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	7.437.887.559,00	0	468.231.169,00	0	6%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																																																																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																																																																												
1											2											3											4											5											6											7 = 6/5 x 100%											8										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																								
5	02	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
5	02	01	1.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	%	80	349.984.300,00	40	87.365.371,00	50%	25%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Alokasi Bagi Hasil Pajak	Dokumen	2	349.984.300,00	1	87.365.371,00	50%	25%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
5	02	02	1.05	010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dokumen Bagi Hasil Pajak Provinsi	dokumen	0	349.984.300,00	0	87.365.371,00	0	25%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
						Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Lain-lain PAD yang sah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Target Pendapatan Asli Daerah	Milyar Rupiah	13.451,00	11.769.227.678,00	8.571,00	4.002.689.738,00	64%	34%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																																																																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																				
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
		Service Level Agreement (SLA)	%	96	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	2,2	0	9,5	0	432%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Milyar Rupiah	3,1	0	1,93	0	62%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Persentase Penurunan Temuan Berulang	%	0,03	0	0	0	0%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bangkalan	milyar rupiah	84	0	61,18	0	73%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Banyuwangi	milyar rupiah	289	0	191,81	0	66%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Blitar	milyar rupiah	288	0	174,6	0	61%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bojonegoro	milyar rupiah	178	0	119,84	0	67%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bondowoso	milyar rupiah	70	0	42,75	0	61%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jember	milyar rupiah	278	0	181,69	0	65%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jombang	milyar rupiah	215	0	143,19	0	67%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Kediri	milyar rupiah	416	0	253,19	0	61%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan	milyar rupiah	190	0	121,17	0	64%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lumajang	milyar rupiah	126	0	73,52	0	58%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Madiun	milyar rupiah	201	0	124,16	0	62%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Magetan	milyar rupiah	128	0	75,99	0	59%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Kota	milyar rupiah	377	0	252,49	0	67%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Selatan	milyar rupiah	251	0	165,33	0	66%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Utara & Batu kota	milyar rupiah	257	0	169,11	0	66%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Mojokerto	milyar rupiah	303	0	191,76	0	63%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Nganjuk	milyar rupiah	182	0	112,61	0	62%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ngawi	milyar rupiah	125	0	74,31	0	59%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pacitan	milyar rupiah	53	0	30,8	0	58%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pamekasan	milyar rupiah	85	0	61,04	0	72%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pasuruan	milyar rupiah	293	0	207,31	0	71%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ponorogo	milyar rupiah	163	0	100,58	0	62%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Probolinggo	milyar rupiah	184	0	118,66	0	64%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sampang	milyar rupiah	50	0	37,28	0	75%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sidoarjo	milyar rupiah	808	0	537,8	0	67%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Situbondo	milyar rupiah	73	0	44,72	0	61%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sumenep	milyar rupiah	81	0	55,83	0	69%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Barat	milyar rupiah	522	0	353,26	0	68%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Selatan	milyar rupiah	2.623,00	0	1.898,57	0	72%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Timur	milyar rupiah	3.117,00	0	1.666,79	0	53%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Utara	milyar rupiah	518	0	350,92	0	68%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Trenggalek	milyar rupiah	106	0	64,27	0	61%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tuban	milyar rupiah	188	0	118,68	0	63%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					
		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tulungagung	milyar rupiah	260	0	164,26	0	63%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																					

KODE PROGRAM				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN				INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)				SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1				2				3				4	5		6		7		8
								Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Gresik	miljar rupiah	352	0	231,8	0	66%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	1.01					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											
								Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi dan Penetapan Target PAD	Dokumen	4	11.769.227.678,00	2	4.002.689.738,00	50%	34%	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Pemenuhan Sarana Pendukung Teknologi Informasi	Paket	30	0	15	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Bangkalan	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Bangkalan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Bangkalan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Banyuwangi	layanan	11	0	11	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Banyuwangi	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Banyuwangi	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Blitar	layanan	11	0	11	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Blitar	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Blitar	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Bojonegoro	layanan	8	0	8	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Bojonegoro	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Bojonegoro	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Bondowoso	layanan	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Bondowoso	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Bondowoso	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Jember	layanan	10	0	10	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Jember	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Jember	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Jombang	layanan	9	0	9	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Jombang	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Jombang	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Kediri	layanan	11	0	11	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Kediri	dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Kediri	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Lamongan	layanan	8	0	8	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Lamongan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Lamongan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Lumajang	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Lumajang	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Lumajang	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Madiun	layanan	11	0	11	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
								Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Madiun	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH			

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Madiun	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Magetan	layanan	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Magetan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Magetan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Malang Kota	layanan	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Malang Kota	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Malang Kota	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Malang Selatan	layanan	7	0	7	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Malang Selatan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Malang Selatan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	layanan	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Mojokerto	layanan	10	0	10	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Mojokerto	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Mojokerto	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Nganjuk	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Nganjuk	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Nganjuk	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Ngawi	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Ngawi	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Ngawi	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Pacitan	layanan	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Pacitan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Pacitan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Pamekasan	layanan	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Pamekasan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Pamekasan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Pasuruan	layanan	10	0	10	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Pasuruan	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Pasuruan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Ponorogo	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Ponorogo	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT Ponorogo	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Probolinggo	layanan	8	0	8	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Probolinggo	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Probolinggo	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Sampang	layanan	4	0	4	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Sampang	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Sampang	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Sidoarjo	layanan	10	0	10	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Sidoarjo	dokumen	8	0	4	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Sidoarjo	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Situbondo	layanan	8	0	8	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Situbondo	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Situbondo	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Sumenep	layanan	4	0	4	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Sumenep	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Sumenep	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Barat	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Surabaya Barat	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Barat	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	layanan	7	0	7	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Surabaya Selatan	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Selatan	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Timur	layanan	9	0	9	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Surabaya Timur	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT Surabaya Timur	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Utara	layanan	7	0	7	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT Surabaya Utara	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Surabaya Utara	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Trenggalek	layanan	7	0	7	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Trenggalek	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Trenggalek	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Tuban	layanan	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Tuban	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Tuban	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Tulungagung	layanan	7	0	7	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Tulungagung	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Tulungagung	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah UPT PPD Gresik	layanan	10	0	10	0	100%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat UPT PPD Gresik	dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Gresik	dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi dan Target Pajak Daerah	dokumen	0	1.073.678.980,00	0	434.171.358,00	0	40%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rumusan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	0	1.961.616.240,00	0	632.128.575,00	0	32%	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	2.618.328.050,00	0	1.209.579.776,00	0	46%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	DOKUMEN	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5					6					7 = 6/5 x 100%
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pemeliharaan Data Pajak Daerah	paket	0	357.208.000,00	0	101.714.923,00	0	28%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Laporan	30	0	10	0	33%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Wajib Pajak Daerah	dokumen	0	195.146.000,00	0	56.332.662,00	0	29%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Dokumen Ketetapan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Standarisasi Pelayanan	dokumen	0	560.670.000,00	0	24.395.490,00	0	4%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pelayanan Pajak Daerah		dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	1.01	010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Operasi Bersama	dokumen	0	894.700.000,00	0	240.500.000,00	0	27%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Operasi Bersama		dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
											7 = 6/5 x 100%		8																		
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8			
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
					Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
5	02	04	1.01	011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penyesuaian Piutang Pajak Daerah	dokumen	0	60.951.000,00	0	0	0%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
						Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen	0	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
						Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
5	02	04	1.01	012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	dokumen	0	1.564.415.800,00	0	590.968.350,00	0	38%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	35	0	15	0	43%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
5	02	04	1.01	013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Objek Retribusi Daerah	laporan	0	564.891.200,00	0	142.318.819,00	0	25%	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
5	03				KEPEGAWAIAN			48.105,00	177.303.017.726,00	539,77	74.350.871.782,00	1%	42%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran	%	91	43.145.882.274,00	59,61	18.742.078.218,00	66%	43%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Persentase Indikator Program yang tercapai	%	91	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	%	80,3	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	7	152.575.000,00	0	45.931.400,00	0%	30%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	58.250.000,00	0	28.996.500,00	0	50%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	6.250.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	12.500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	6.250.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	12.500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	0	36.200.000,00	0	16.934.900,00	0	47%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	20.625.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	8	33.673.841.700,00	3,95	13.828.139.447,00	49%	41%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	33.067.163.000,00	0	13.599.977.447,00	0	41%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	150	0	206	0	137%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	487.548.000,00	0	227.097.000,00	0	47%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	Laporan	0	63.960.200,00	0	310.000,00	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	0	1.200.000,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan	0	8.250.000,00	0	755.000,00	0	9%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	0	12.050.000,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	30.170.500,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	0	3.500.000,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	11	366.516.000,00	5	286.085.044,00	45%	78%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	4.950.000,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	0	175.752.000,00	0	148.185.000,00	0	84%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	0	1	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	0	4.950.000,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	2.800.000,00	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	155.064.000,00	0	132.100.044,00	0	85%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	0	23.000.000,00	0	5.800.000,00	0	25%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	11	1.988.510.228,00	5	1.065.290.719,00	45%	54%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	0	114.308.000,00	0	25%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	135.685.600,00	0	90%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	1,9	48%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	0	608.192.998,00	0	48%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	0	197.575.630,00	0	49%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0	2	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Paket	0	77.500.000,00	0	90%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	0	2	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	0	26.800.000,00	0	7%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	0	2	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	788.728.000,00	0	58%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, dan Arsip Vital	Dokumen	0	39.720.000,00	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	10	1.286.840.000,00	10	100%	97%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1.251.088.000,00	1	100%	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0	35.752.000,00	0	0%	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	4	4.931.373.146,00	2	50%	42%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Dokumen	0	1.216.000,00	0	0%	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	0	2	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	875.471.924,00	0	47%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	31.844.539,00	0	0%	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	4.022.840.683,00	0	1.632.545.632,00	0	41%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	11	746.226.200,00	5	219.086.532,00	45%	29%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Paket	0	245.038.000,00	0	108.363.582,00	0	44%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	0	2	0	33%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket	0	166.000.000,00	0	11.072.700,00	0	7%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	0	2	0	10%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	0	12.360.000,00	0	12.265.500,00	0	99%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	0	257.258.200,00	0	87.384.750,00	0	34%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	0	71	0	47%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung	Paket	0	65.570.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah ASN yang lulus Uji Kompetensi	orang	1.650,00	11.966.342.726,00	337	4.531.159.282,00	20%	38%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN	%	93	0	46,25	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Persentase Database yang Lengkap	%	99,7	0	96,91	0	97%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah capaian kinerja minimal BAIK ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	pegawai	46.000,00	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	laporan	12	5.775.432.426,00	6	1.206.682.904,00	50%	21%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	0	3.350.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	0	342.992.900,00	0	243.396.547,00	0	71%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	Laporan	0	2.570.381.100,00	0	296.270.962,00	0	12%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Dokumen	0	118.775.000,00	0	0	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	0	185.000.000,00	0	22%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Laporan	0	150.000.000,00	0	11%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Laporan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Laporan	0	1.750.524.163,00	0	13%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Laporan	0	46.344.200,00	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	0	572.673.400,00	0	65%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Pegawai yang Divalidasi	Pegawai	0	10.300.000,00	0	85%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01	012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	25.091.663,00	0	0%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	laporan	3	2.200.000.000,00	1	33%	28%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Laporan Pengeloan Mutasi ASN	Laporan	0	150.000.000,00	0	13%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Laporan	0	810.000.000,00	0	30%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Promosi ASN	Laporan	0	1.240.000.000,00	0	29%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN dan Dokumen Penyusunan Standart Kompetensi	laporan	5	2.683.148.000,00	2	40%	72%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dan Jumlah Dokumen Penyusunan Standart Kompetensi	Laporan	0	1.004.453.085,00	0	50%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)					SATUAN					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
																				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2					3					4					5		6		7 = 6/5 x 100%		8
										Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	45.437,00	0	21.639,00	0	48%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Laporan Pengelolaan Assesment Center	Laporan	0	1.678.694.915,00	0	1.435.411.182,00	0	86%	0	86%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	Dokumen	1	0	0	0	0	0%	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	03	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Laporan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Laporan Pendidikan Lanjutan ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah Laporan Sertifikasi Fungsional ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	011	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
						Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	1.03	014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.03	015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Dokumen	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	laporan	10	1.307.762.300,00	5	769.633.117,00	50%	59%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Persentase Laporan Kepatuhan LHKPN	%	90	0	100	0	111%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0	44.602.000,00	0	28.241.300,00	0	63%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0	44.896.000,00	0	28.323.628,00	0	63%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	0	352.884.000,00	0	137.259.500,00	0	39%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Laporan	0	37.912.000,00	0	19.382.596,00	0	51%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	300	0	220	0	73%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah Laporan Tanda Jasa bagi Pegawai	Laporan	0	92.076.000,00	0	69.512.700,00	0	75%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	1.500,00	0	1.500,00	0	100%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	0	38.598.000,00	0	2.650.000,00	0	7%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Laporan LHKPN	Dokumen	1	265.729.000,00	1	237.464.872,00	100%	89%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Disiplin ASN	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	45.437,00	0	21.639,00	0	48%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	0	20.050.000,00	0	10.439.512,00	0	52%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Laporan Proses Izin Perceraian Pegawai	Laporan	0	59.177.300,00	0	9.569.000,00	0	16%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
5	03	02	1.04	010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Evaluasi Disiplin ASN	Dokumen	0	351.838.000,00	0	226.790.009,00	0	64%	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			614,5	479.258.697.000,00	102,04	178.142.647.540,00	17%	37%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	74.892.994.000,00	14,94	30.248.923.990,00	15%	40%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Persentase realisasi anggaran	%	85,3	0	37,94	0	44%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Indeks Profesionalitas ASN	%	85,3	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	dokumen	6	1.050.000.000,00	0	388.432.451,00	0%	37%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	810.000.000,00	0	331.714.948,00	0%	41%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000,00	0	1.300.000,00	0%	4%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	25.000.000,00	0	2.275.000,00	0%	9%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	30.000.000,00	0	8.948.000,00	0%	30%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	35.000.000,00	0	8.425.000,00	0%	24%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	25.000.000,00	0	6.382.753,00	0%	26%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1	95.000.000,00	0	29.386.750,00	0%	31%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Laporan	3	54.115.005.000,00	0	21.294.084.436,00	0%	39%	SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	170	52.274.560.000,00	1.009,00	20.545.747.826,00	594%	39%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1.197.157.088,00	0	507.593.215,00	0%	42%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	275.102.063,00	0	133.896.790,00	0%	49%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	135.781.208,00	0	62.798.250,00	0%	46%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	24.686.891,00	0	8.832.740,00	0%	36%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	79.720.070,00	0	26.258.615,00	0%	33%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	116.860.173,00	6	8.957.000,00	50%	8%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	12	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	11.137.507,00	0	0	0%	0%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	3	1.867.800.000,00	0	52.877.458,00	0%	3%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1.867.800.000,00	0	52.877.458,00	0%	3%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	1	487.622.113,00	0	163.207.420,00	0%	33%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	90.100.000,00	0	73.168.283,00	0%	81%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	397.522.113,00	0	90.039.137,00	0%	23%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1	3.767.097.622,00	0	1.990.677.035,00	0%	53%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	120.103.600,00	0	59.417.190,00	0%	49%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	240.825.500,00	0	84.383.310,00	0%	35%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	268.288.000,00	0	185.898.050,00	0%	69%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	744.560.000,00	0	217.166.750,00	0%	29%	BADAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																																				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																																					
1				2				3				4				5				6				7 = 6/5 x 100%				8																		
																																						SUMBER DAYA MANUSIA								
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																							BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	283.940.522,00	0	105.695.100,00	0%	37%																							BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																								BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0																								BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																									BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	391.140.000,00	0	183.711.950,00	0%	47%																									BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																										BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.545.540.000,00	0	1.010.545.910,00	0%	65%																										BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																											BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
5	04	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	172.700.000,00	0	143.858.775,00	0%	83%																											BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																												BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5	04	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0																												BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0																													BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	243.677.000,00	0	35.825.250,00	0%	15%																													BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
						Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																														BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	243.677.000,00	0	35.825.250,00	0%	15%																														BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0																															BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
5	04	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0																															BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0																																	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	12.265.172.065,00	0	5.844.137.850,00	0%	48%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	3.031.837.000,00	0	1.526.353.587,00	0%	50%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	5.877.206.365,00	0	2.609.325.388,00	0%	44%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	3.356.128.700,00	0	1.708.458.875,00	0%	51%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	1.096.620.200,00	0	479.682.090,00	0%	44%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	Laporan	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	314.443.000,00	0	169.420.240,00	0%	54%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	129.477.200,00	0	49.661.600,00	0%	38%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	652.700.000,00	0	260.600.250,00	0%	40%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8																												
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
5	04	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah laporan yang tersusun	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	%	81,3	50.915.943.000,00	6,62	17.479.175.114,00	8%	34%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Persentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintah Daerah SDM Aparatur	%	81,3	0	11,76	0	14%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Persentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	%	81,3	0	10,78	0	13%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	%	100	0	20	0	20%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Indeks pelayanan peserta terhadap pelayanan aparatur	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah I	orang	600	25.311.210.175,00	0	9.335.156.494,00	0%	37%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	orang	50	0	40	0	80%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah II	orang	600	0	219	0	37%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintah Umum	orang	255	0	21	0	8%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah III	orang	800	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan yang tersusun	dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah dokumen evaluasi pelatihan yang tersusun	dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah dokumen kegiatan manajemen teknologi informasi yang tersusun	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan kelembagaan, TKPK dan sumber belajar yang tersusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	orang	75	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	2	149.994.990,00	1	129.351.655,00	50%	86%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									
						Jumlah dokumen kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum								
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	7	289.278.675,00	1	139.448.260,00	14%	48%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang tersusun	Dokumen	3	0	3	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	2.420,00	23.295.048.510,00	280	8.650.624.514,00	12%	37%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Orang	383	0	420	0	110%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	22	1.576.888.000,00	8	415.732.065,00	36%	26%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah peserta fasilitasi pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Orang	2.000,00	0	1.422,00	0	71%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Dokumen	18	0	18	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan jabatan pratama dan jabatan administrator	orang	80	25.604.732.825,00	0	8.144.018.620,00	0%	32%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan I	orang	680	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan jabatan pengawas	orang	120	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan II	orang	720	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Latsar dan Pelatihan Kader Pemerintah Daerah	orang	1.817,00	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan III	orang	3.917,00	0	444	0	11%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional	orang	75	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural I	orang	270	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural	orang	60	0	30	0	50%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural II	orang	270	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
										SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Tenaga Kediklatan	orang	60	0	30	0	50%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural III	orang	360	0	58	0	16%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan yang tersusun	dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah dokumen evaluasi pelatihan yang tersusun	dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah peserta uji kompetensi yang memperoleh sertifikat kompetensi	orang	144	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah peserta penilaian dan uji kompetensi	orang	117	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
		Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan kelembagaan, TKPK dan sumber belajar yang tersusun	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi	Dokumen	1	66.927.160,00	0	4.905.000,00	0%	7%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Jumlah dokumen kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional yang tersusun	Dokumen	2	0	1	0	50%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	5	208.600.000,00	0	44.526.000,00	0%	21%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Jumlah Dokumen pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri yang tersusun	Dokumen	4	0	4	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang	261	1.409.212.000,00	0	75.765.503,00	0%	5%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Jumlah peserta sertifikasi kompetensi	Orang	261	0	193	0	74%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Dokumen	5	1.029.748.497,00	3	667.828.296,00	60%	65%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar	Dokumen	6	0	6	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	5	345.000.000,00	2	144.984.700,00	40%	42%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga yang tersusun	Dokumen	2	0	3	0	150%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	3	399.078.006,00	1	102.563.361,00	33%	26%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						Jumlah dokumen standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional	Dokumen	7	0	6	0	86%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	6.409,00	21.090.624.062,00	562	6.466.991.236,00	9%	31%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah peserta pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Orang	6.217,00	0	4.975,00	0	80%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen	10	1.055.543.100,00	4	636.454.524,00	40%	60%	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah peserta fasilitasi pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan, serta jabatan fungsional	Orang	6.217,00	0	4.975,00	0	80%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Dokumen pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelola sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan fungsional	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			314	125.309.428.000,00	101,37	51.015.700.676,00	32%	41%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	100	26.891.107.000,00	55	11.535.528.818,00	55%	43%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase realisasi anggaran	%	95	0	41,37	0	44%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Indeks profesionalitas ASN	Nilai	88	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi yang Memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	13	409.703.456,00	4	192.329.420,00	31%	47%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Laporan Perangkat Daerah	Dokumen	9	0	4	0	44%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	350.000.000,00	4	189.657.920,00	44%	54%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	2.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja (LKJIP, LKPI, LPPD, RB, PUG)	dokumen	0	45.000.000,00	0	2.077.750,00	0	5%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja (evaluasi renja triwulan)	dokumen	0	6.703.456,00	0	593.750,00	0	9%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	22.176.532.162,00	6	9.804.210.349,00	50%	44%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Realisasi Anggaran	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	0	21.719.421.000,00	0	9.644.509.249,00	0	44%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	80	0	154	0	193%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	0	404.229.720,00	0	147.654.100,00	0	37%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	0	15.356.636,00	0	6.883.750,00	0	45%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	laporan	0	8.228.764,00	0	1.760.000,00	0	21%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	dokumen	0	11.023.840,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	0	12.231.517,00	0	3.206.000,00	0	26%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	0	9	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	0	6.040.685,00	0	197.250,00	0	3%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	365.055.647,00	6	218.222.364,00	50%	60%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	paket	0	3.531.581,00	0	762.750,00	0	22%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	paket	0	7.500.000,00	0	99%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	0	41.700.077,00	0	50%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	0	8.447.476,00	0	32%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	0	303.876.513,00	0	61%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	7	0	4	0	57%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	11	1.271.082.147,00	3	459.385.392,00	27%	36%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	21.947.285,00	0	14.836.900,00	0	68%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	412.436.658,00	0	103.671.600,00	0	25%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	0	2	0	40%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	52.462.194,00	0	25.459.000,00	0	49%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	51.372.000,00	0	13.078.500,00	0	25%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	379.665.388,00	0	90.187.500,00	0	24%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	0	3	0	38%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	0	31.622.000,00	0	21.169.000,00	0	67%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	0	321.576.622,00	0	190.982.892,00	0	59%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	11	153.524.760,00	0	0	0%	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase Sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	153.524.760,00	0	0	0%	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	2.049.648.835,00	6	699.925.893,00	50%	34%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	12.957.000,00	0	650.000,00	0	5%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	0	355.329.938,00	0	102.900.553,00	0	29%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	0	16.686.000,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum kantor	paket	0	1.664.675.897,00	0	596.375.340,00	0	36%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12	465.559.993,00	6	161.455.400,00	50%	35%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memenuhi Target	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	paket	0	72.110.000,00	0	29.475.000,00	0	41%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	paket	0	264.120.000,00	0	95.167.400,00	0	36%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	0	13	0	48%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	117.528.000,00	0	36.813.000,00	0	31%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	paket	0	11.801.993,00	0	0	0	0%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	3	2.957.500.000,00	1	812.264.234,00	33%	27%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	3	0	2	0	67%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	3	0	2	0	67%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah jurnal	Dokumen	20	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah dokumen pengukuran indeks inovasi daerah dan indeks daya saing daerah	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	%	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder	%	0	637.500.000,00	0	234.359.168,00	0	37%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah jurnal Bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen litbang Bidang Pemerintahan Umum	dokumen	0	100.000.000,00	0	27.281.450,00	0	27%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah dokumen litbang Bidang Ketatalaksanaan Desa	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah dokumen litbang Bidang Aparatur Desa	Dokumen	0	100.000.000,00	0	19.044.160,00	0	19%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01	011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah dokumen litbang Bidang Badan Usaha Milik Desa	dokumen	0	100.000.000,00	0	43.352.600,00	0	43%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.01	013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	dokumen	0	337.500.000,00	0	144.680.958,00	0	43%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	%	0	637.500.000,00	0	315.700.767,00	0	50%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah jurnal Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	5	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Aspek- Aspek Sosial	dokumen	0	313.000.000,00	0	147.849.667,00	0	47%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	0	85.000.000,00	0	51.851.500,00	0	61%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Kesehatan	dokumen	0	115.000.000,00	0	50.391.600,00	0	44%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.02	010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Partisipasi Masyarakat	dokumen	0	124.500.000,00	0	65.608.000,00	0	53%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	%	0	680.000.000,00	0	142.875.500,00	0	21%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	Dokumen	7	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	7	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen litbang bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	dokumen	0	180.000.000,00	0	41.658.300,00	0	23%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen litbang bidang Perindustrian dan Perdagangan	dokumen	0	220.000.000,00	0	13.355.200,00	0	6%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen litbang Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen	0	80.000.000,00	0	37.025.000,00	0	46%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Lingkungan Hidup	Dokumen	0	100.000.000,00	0	30.656.000,00	0	31%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen litbang Bidang Kehutanan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Pekerjaan Umum	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen litbang Bidang Perhubungan	dokumen	0	100.000.000,00	0	20.181.000,00	0	20%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.03	012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan stakeholder	%	0	1.002.500.000,00	0	119.328.799,00	0	12%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan stakeholder	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah jurnal pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Inovasi yang diuji coba/ diverifikasi	inovasi	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang dihasilkan	dokumen	0	362.500.000,00	0	22.691.100,00	0	6%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah dokumen Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang dihasilkan	dokumen	0	400.000.000,00	0	84.066.549,00	0	21%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Penerima Anugerah Inotek Award Provinsi Jawa Timur	Inovator	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		Jumlah Partisipasi dalam Pameran	Pameran	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		Jumlah Inovasi yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah	Inovasi	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah edisi penerbitan jurnal	edisi	0	90.000.000,00	0	864.200,00	0	1%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Hasil Litbang yang didiseminasikan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		Jumlah Hasil Litbang yang dipublikasikan pada Jurnal	Artikel	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hasil kelitbang dan inovasi yang didaftarkan HaKI	dokumen	0	150.000.000,00	0	11.706.950,00	0	8%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	10	0	4	0	40%	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5	07				PENGLOLAAN PENGHUBUNG			1.956,70	281.173.133.900,00	492,5	118.562.413.594,00	25%	42%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	Prosentase	100	24.307.673.800,00	0	11.123.379.390,00	0%	46%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Persentase realisasi anggaran	Prosentase	95	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Indeks profesionalitas ASN	Nilai	45	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	16	80.766.000,00	0	59.741.779,00	0%	74%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	0	38.814.300,00	0	19.802.275,00	0	51%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	0	4.728.000,00	0	4.720.750,00	0	100%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	2.772.000,00	0	2.772.000,00	0	100%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Dokumen	0	34.451.700,00	0	32.446.754,00	0	94%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	13.495.224.200,00	0	5.803.392.308,00	0%	43%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan	0	11.051.793.000,00	0	4.595.366.187,00	0	42%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	44	0	82	0	186%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Laporan	0	2.403.431.200,00	0	1.185.999.871,00	0	49%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	100%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	15.000.000,00	0	14.385.750,00	0	96%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	15.000.000,00	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	0	5.000.000,00	0	2.640.500,00	0	53%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	10.348.000,00	0	9.280.280,00	0%	90%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8				
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	0	10.348.000,00	0	9.280.280,00	0	90%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	5.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	orang	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Laporan	0	5.000.000,00	0	0	0	0%	0%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	11	3.437.987.287,00	0	2.289.670.305,00	0%	67%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	100.000.000,00	0	96.847.500,00	0	97%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	167.691.800,00	0	148.562.400,00	0	89%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	0	149.954.487,00	0	94.794.000,00	0	63%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	0	122.541.000,00	0	103.864.270,00	0	85%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	0	200.000.000,00	0	122.754.900,00	0	61%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	paket	0	109.445.000,00	0	90.891.500,00	0	83%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	0	659.335.000,00	0	639.060.202,00	0	97%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	laporan	0	1.804.020.000,00	0	929.168.533,00	0	52%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Laporan	0	25.000.000,00	0	8.225.000,00	0	33%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	1	0	33%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	paket	0	100.000.000,00	0	55.502.000,00	0	56%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Laporan	11	606.055.000,00	0	37.074.000,00	0%	6%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket	0	606.055.000,00	0	37.074.000,00	0	6%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	4.109.024.813,00	0	1.546.134.277,00	0%	38%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	0	35.000.000,00	0	19.422.100,00	0	55%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa kumunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	878.361.500,00	0	298.659.953,00	0	34%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa	paket	0	3.195.663.313,00	0	1.228.052.224,00	0	38%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	12	2.563.268.500,00	0	1.378.086.441,00	0%	54%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	paket	0	833.000.000,00	0	567.445.930,00	0	68%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	0	5	0	100%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	paket	0	1.048.452.500,00	0	615.798.243,00	0	59%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	0	15	0	71%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	25.000.000,00	0	24.697.500,00	0	99%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	paket	0	119.582.000,00	0	1.900.000,00	0	2%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak terwujud	Paket	0	50.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	paket	0	487.234.000,00	0	168.244.768,00	0	35%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	paket	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Hasil SKM/IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	90,2	4.724.073.200,00	0	2.757.125.244,00	0%	58%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Prosentase pelaksanaan kegiatan yang tercapai	%	100	4.724.073.200,00	0	2.757.125.244,00	0%	58%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah paguyuban yang dibina	Paguyuban	0	800.000.000,00	0	358.641.000,00	0	45%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah unsur aparatur pemerintah yang difasilitasi	Orang	0	1.574.073.200,00	0	1.406.193.094,00	0	89%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah pelaku UKM promosi produk unggulan dan seni budaya	Orang/Sanggar	0	850.000.000,00	0	293.695.400,00	0	35%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Kab/Kota	0	1.500.000.000,00	0	698.595.750,00	0	47%	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI				
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	%	100	16.706.900.000,00	50	6.859.675.180,00	50%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Persentase Realisasi Anggaran	%	96	0	40,96	0	43%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN				
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	1	8.053.710,00	1	5.311.050,00	100%	66%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	11	2.952.400,00	7	1.367.100,00	64%	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN					INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%	8	
								5		6				
1	2					3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	767.200,00	0	640.350,00	0%	83%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen RKA	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	dokumen	1	642.200,00	0	624.100,00	0%	97%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen RKA Perubahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	767.200,00	0	491.300,00	0%	64%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen DPA	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	dokumen	1	652.200,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen DPA Perubahan	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1	1.630.310,00	0	1.561.900,00	0%	96%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen capaian kinerja	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1	642.200,00	0	626.300,00	0%	98%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	Laporan	1	13.360.171.390,00	1	5.811.319.177,00	100%	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	laporan	12	13.074.900.000,00	6	5.681.899.877,00	50%	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	277.212.000,00	0	124.644.000,00	0%	45%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	2.736.000,00	6	1.359.800,00	50%	50%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	865.900,00	6	841.300,00	50%	97%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	853.700,00	0	681.700,00	0%	80%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	665.700,00	1	651.100,00	100%	98%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	12	2.295.890,00	6	1.241.400,00	50%	54%	BADAN KOORDINASI WILAYAH

713

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1				5				7 = 6/5 x 100%		8				
2				6										
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN				
		Jumlah Laporan keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN				
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	642.200,00	1	0	100%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
					Jumlah Laporan prognosis	Jumlah Laporan prognosis	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	1	534.737.720,00	1	14.946.600,00	100%	3%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	12	528.830.000,00	6	12.180.000,00	50%	2%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
					Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	4.817.620,00	6	2.518.600,00	50%	52%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
					Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	517.200,00	6	100.000,00	50%	19%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
					Jumlah Laporan data pegawai	Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	572.900,00	6	148.000,00	50%	26%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
					Jumlah Laporan SKP	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1.377.268.550,00	1	453.949.579,00	100%	33%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.100,00	1	10.450.650,00	100%	52%	PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.726.200,00	1	25.193.660,00	100%	73%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.841.500,00	1	9.282.000,00	100%	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15.164.000,00	6	6.422.750,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.044.000,00	1	9.771.000,00	50%	97%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	50.000.000,00	6	24.246.000,00	50%	48%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.227.492.750,00	6	368.583.519,00	50%	30%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	1	1.148.318.630,00	1	494.624.770,00	100%	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000,00	6	2.641.000,00	50%	38%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah pengiriman Dokumen	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	453.460.000,00	6	191.827.801,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	687.858.630,00	1	300.155.969,00	33%	44%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Jasa	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	1	278.350.000,00	1	79.524.004,00	100%	29%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Jasa	12	51.306.000,00	6	29.345.300,00	50%	57%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	paket	0	80.819.000,00	0	40.368.704,00	0	50%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Jasa	Paket	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	1	5.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	12	29.225.000,00	6	9.810.000,00	50%	34%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket	2	112.000.000,00	1	0	50%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	%	80	700.000.000,00	40	283.405.300,00	50%	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang ditindaklanjuti	%	80	700.000.000,00	0	283.405.300,00	0%	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang PEMBANGUNAN EKONOMI II	dokumen	0	700.000.000,00	0	283.405.300,00	0	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang PEMERINTAHAN I	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang PEMERINTAHAN II	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang KEMASYARAKATAN I	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
		Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang KEMASYARAKATAN II	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang SARANA DAN PRASARANA I	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Analisis Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan sub Bidang SARANA DAN PRASARANA II	dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG PEMERINTAHAN I	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG PEMERINTAHAN II	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI I	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI II	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG KEMASYARAKATAN I	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG KEMASYARAKATAN II	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA I	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA II	rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Generasi Milenial yang difasilitasi di EJSC Bakorwil	orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah Masyarakat yang difasilitasi di EJSC Bakorwil	orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
		Jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang difasilitasi di EJSC Bakorwil	50	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	32	0	16	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	%	92	14.396.483.750,00	0	5.727.726.612,00	0%	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Persentase realisasi anggaran	%	94	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Indeks profesionalitas ASN	Nilai	60	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	7	105.622.660,00	4	48.295.790,00	57%	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.989.900,00	4	28.993.460,00	57%	63%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	5.507.560,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	5.546.900,00	0	1.560.000,00	0	28%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	6.217.700,00	0	1.910.000,00	0	31%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	5.494.150,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja [LKjIP, LKPJ, LPPD, ARG PUG dan Laporan RB]	Dokumen	0	27.550.000,00	0	7.657.500,00	0	28%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	3	0	60%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	9.316.450,00	0	8.174.830,00	0	88%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	12	10.959.480.000,00	6	4.466.256.396,00	50%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	10.676.025.000,00	0	4.325.105.896,00	0	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	43	0	86	0	200%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	219.444.000,00	0	101.341.000,00	0	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
														PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	Laporan	0	7.031.000,00	0	5.155.000,00	0	73%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	Laporan	0	10.421.000,00	0	6.190.000,00	0	59%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	0	7.050.000,00	0	2.160.000,00	0	31%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	Dokumen	0	6.517.000,00	0	4.752.000,00	0	73%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	26.613.000,00	0	16.847.500,00	0	63%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	0	6.379.000,00	0	4.705.000,00	0	74%	TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	23.446.750,00	6	14.456.800,00	50%	62%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	5.528.750,00	0	4.651.800,00	0	84%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	5.437.250,00	0	3.985.000,00	0	73%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	Laporan	0	5.588.750,00	0	2.690.000,00	0	48%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	6.892.000,00	0	3.130.000,00	0	45%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Laporan	12	662.177.450,00	6	30.909.800,00	50%	5%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Paket	0	25.049.500,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	0	11.960.000,00	0	8.195.100,00	0	69%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	7.809.750,00	0	7.270.000,00	0	93%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	601.438.200,00	0	5.904.700,00	0	1%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	0	15.920.000,00	0	9.540.000,00	0	60%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	Laporan	9	621.657.600,00	4	316.819.540,00	44%	51%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	5.281.520,00	0	2.497.500,00	0	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	4.701.800,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	26.415.200,00	0	13.799.239,00	0	52%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	43.092.280,00	0	25.132.365,00	0	58%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0	100%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	17.193.000,00	0	6.098.900,00	0	35%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Kali	0	43.560.000,00	0	10.350.000,00	0	24%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8		
										TIMUR II BOJONEGORO			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	0	4	0	80%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO			
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	468.181.800,00	0	53%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO			
5	07	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen	0	8.506.000,00	0	51%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO			
5	07	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang Didukung	Paket	0	4.726.000,00	0	97%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO			
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	Laporan	1	20.530.000,00	1	100%	93%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	0	20.530.000,00	0	93%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	0	4	0	100%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO			
5	07	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	12	1.823.625.850,00	6	747.932.686,00	50%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	0	4.436.200,00	0	2.180.100,00	0	49%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	0	248.297.668,00	0	110.671.415,00	0	45%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	25.109.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	1.545.782.982,00	0	635.081.171,00	0	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	12	179.943.440,00	6	83.915.600,00	50%	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	43.215.240,00	0	16.950.800,00	0	39%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	0	2	0	33%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan	Dokumen	0	972.341.250,00	0	424.017.170,00	0	44%	TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang tersusun	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Generasi Milenial yang difasilitasi di EJSC Bakorwil Bojonegoro	Orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Masyarakat yang difasilitasi di EJSC Bakorwil Bojonegoro	Orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang difasilitasi di EJSC Bakorwil Bojonegoro	Orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	16	0	8	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang tercapai	%	90	15.501.344.000,00	50	6.239.659.910,00	56%	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Persentase Realisasi Anggaran Bakorwil III Malang	%	94,5	0	40,69	0	43%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Indeks Profesionalitas ASN	%	65	0	74,65	0	115%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Laporan	9	199.041.000,00	4	95.694.513,00	44%	48%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	52.610.000,00	3	35.689.100,00	43%	68%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	14.533.000,00	0	3.652.000,00	0	25%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Dokumen	0	13.875.000,00	0	178.100,00	0	1%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	12.867.000,00	0	3.560.100,00	0	28%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Dokumen	0	13.527.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	0	76.031.000,00	0	40.943.800,00	0	54%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	4	0	80%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	15.598.000,00	0	11.671.413,00	0	75%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	11.860.787.500,00	6	5.121.450.636,00	50%	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	10.871.120.000,00	0	4.647.835.951,00	0	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5				6				7 = 6/5 x 100%		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 x 100%	8	8	8					
										PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	41	0	41	0	100%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	915.600.000,00	0	434.810.575,00	0	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Lapoan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Laporan	0	69.307.500,00	0	37.351.210,00	0	54%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akutansi	Laporan	0	797.000,00	0	762.500,00	0	96%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	0	1.271.000,00	0	390.400,00	0	31%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	Dokumen	0	1.683.000,00	0	300.000,00	0	18%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG				
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	0	560.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN				

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	1	449.000,00	0	0	0%	0%	PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	2.000.000,00	7	0	58%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD	Laporan	0	500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	0	500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Laporan	0	500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	0	500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	1	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan	12	1.280.032.000,00	6	253.055.580,00	50%	20%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	781.914.000,00	0	63.551.480,00	0	8%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jmlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	18.850.000,00	0	3.000.000,00	0	16%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	0	1	0	25%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	0	153.562.000,00	0	86.626.000,00	0	56%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan	0	243.002.000,00	0	20.791.000,00	0	9%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	82.704.000,00	0	79.087.100,00	0	96%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	36	1.198.087.500,00	18	405.956.320,00	50%	34%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	31.499.000,00	0	14.387.300,00	0	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	102.677.000,00	0	99.592.541,00	0	97%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	45.303.500,00	0	15.631.299,00	0	35%	BADAN KOORDINASI WILAYAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	45.887.000,00	0	19.836.020,00	0	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	28.770.000,00	0	9.687.800,00	0	34%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	18.864.000,00	0	9.420.000,00	0	50%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	Paket	0	95.736.000,00	0	25.600.000,00	0	27%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	828.851.000,00	0	211.801.360,00	0	26%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Dokumen	0	500.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	12	781.304.500,00	6	320.067.161,00	50%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	0	1.000.000,00	0	925.000,00	0	93%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Bulan	0	260.000.000,00	0	110.413.061,00	0	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	500.000,00	0	285.000,00	0	57%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	519.804.500,00	0	208.444.100,00	0	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Laporan	12	180.091.500,00	6	43.435.700,00	50%	24%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	64.000.000,00	0	23.750.000,00	0	37%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	12	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%																															
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	26.500.000,00	0	8.276.700,00	0	31%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	31	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	64.591.500,00	0	11.409.000,00	0	18%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
5	07	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Laporan	0	10.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
5	07	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Laporan	0	15.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	%	80	1.339.776.000,00	0	612.162.530,00	0%	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	20	1.339.776.000,00	10	612.162.530,00	50%	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Generasi Millennial yang difasilitasi	Orang	0	1.339.776.000,00	0	612.162.530,00	0	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	27	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang tersusun	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG																									
						Jumlah Masyarakat yang difasilitasi	Orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	7 = 6/5 x 100%		8
								5		6				
														PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Millennial	Orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program Bakorwil Pamekasan yang tercapai	%	84	11.636.106.000,00	36,5	5.012.329.452,00	43%	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
						Persentase Realisasi Anggaran	%	93	0	38,35	0	41%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
						Indeks Profesionalitas ASN	%	82	0	35,8	0	44%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	8	97.789.778,00	4	41.316.325,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
						Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Dokumen	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10	35.890.150,00	3	15.787.075,00	30%	44%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	1	5.100.328,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	5.072.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	1	3.325.000,00	1	3.323.050,00	100%	100%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	3.325.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen	5	32.310.700,00	4	16.158.100,00	80%	50%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	4	12.766.600,00	2	6.048.100,00	50%	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	8.678.708.000,00	6	3.621.472.080,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	12	8.404.792.000,00	6	3.496.394.390,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	219.216.000,00	6	97.536.000,00	50%	44%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan keuangan	Laporan	12	8.800.000,00	6	6.690.100,00	50%	76%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan Akutansi Perangkat Daerah	Laporan	12	8.800.000,00	6	4.025.340,00	50%	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	2	6.200.000,00	1	3.667.350,00	50%	59%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	1	3.900.000,00	1	3.475.000,00	100%	89%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	12	23.100.000,00	6	9.683.900,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	Laporan	1	3.900.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	8.000.000,00	6	5.076.000,00	50%	63%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	Laporan	2	2.000.000,00	2	1.538.000,00	100%	77%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	Laporan	1	2.000.000,00	1	1.219.000,00	100%	61%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	Laporan	12	2.000.000,00	6	1.100.000,00	50%	55%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	Laporan	1	2.000.000,00	1	1.219.000,00	100%	61%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	12	114.947.800,00	6	36.843.900,00	50%	32%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	paket	1	3.336.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	paket	1	42.677.800,00	1	24.960.000,00	100%	58%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	2.000.000,00	6	1.216.800,00	50%	61%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	1	2.000.000,00	1	1.630.000,00	100%	82%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	12	2.000.000,00	6	1.620.000,00	50%	81%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Laporan	2	62.934.000,00	1	7.417.100,00	50%	12%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%	8	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	12	622.786.400,00	6	372.120.972,00	50%	60%	TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	28.342.900,00	0	27.786.500,00	0%	98%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	68.313.600,00	0	62.397.822,00	0%	91%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	paket	1	17.373.300,00	1	16.621.800,00	100%	96%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	paket	1	783.600,00	0	410.000,00	0%	52%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	paket	1	4.370.000,00	1	3.750.000,00	100%	86%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	paket	3	52.200.000,00	1	16.500.000,00	33%	32%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	Laporan	50	430.643.000,00	26	239.454.850,00	52%	56%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	Dokumen	1	8.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem informasi yang didukung	paket	1	12.760.000,00	0	5.200.000,00	0%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	1.832.293.767,00	6	843.790.166,00	50%	46%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket	1	2.000.000,00	0	462.500,00	0%	23%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	295.013.150,00	6	123.446.931,00	50%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	10.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa	paket	3	1.525.280.617,00	1	719.880.735,00	33%	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	281.580.255,00	6	91.710.009,00	50%	33%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	paket	3	85.836.555,00	1	32.746.290,00	33%	38%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	paket	8	97.699.200,00	4	47.532.139,00	50%	49%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	paket	1	3.374.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket	10	44.670.500,00	4	6.759.900,00	40%	15%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	paket	1	50.000.000,00	0	4.671.680,00	0%	9%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	%	99	3.048.686.000,00	35,55	355.111.100,00	36%	12%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	3.048.686.000,00	2	355.111.100,00	50%	12%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN				
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	0	1	0	25%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN				
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN				
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	22	3.048.686.000,00	8	355.111.100,00	36%	12%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
					Jumlah Generasi Millenial yang difasilitasi		orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
					Jumlah Masyarakat yang difasilitasi		orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
					Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang difasilitasi		orang	0	0	0	0	0	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Indikator Program Bakorwil V Jember yang tercapai	%	80	12.718.407.400,00	0	5.215.600.013,00	0%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Persentase Realisasi Anggaran Bakorwil V Jember	%	95	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Indeks profesionalitas ASN	%	77	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Laporan	1	85.000.000,00	0	36.349.274,00	0%	43%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	5.000.000,00	5	0	45%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH																													
				K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
				5		6		7 = 6/5 x 100%																															
1					2					3					4					5					6					7 = 6/5 x 100%					8				
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	15.616.000,00	1	0	100%	0%	PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	15.948.500,00	0	14.339.174,00	0%	90%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	14.478.500,00	1	3.926.000,00	100%	27%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	14.478.500,00	0	517.600,00	0%	4%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	14.478.500,00	6	13.966.500,00	50%	96%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5.000.000,00	0	3.600.000,00	0%	72%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan yang tersusun	Laporan	1	9.253.304.990,00	0	3.791.912.835,00	0%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	396	8.962.820.000,00	180	3.652.196.835,00	45%	41%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	188.904.000,00	6	94.452.000,00	50%	50%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	39.240.000,00	6	19.620.000,00	50%	50%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	19.982.840,00	6	7.768.000,00	50%	39%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	19.858.000,00	1	9.288.000,00	50%	47%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER																									
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	500.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN																									

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	20.000.000,00	6	8.588.000,00	50%	43%	PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.000.150,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	3	12.015.250,00	0	795.250,00	0%	7%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	1.760.000,00	1	0	50%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2.540.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5.160.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.555.250,00	0	795.250,00	0%	31%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen	4	103.941.900,00	0	22.323.875,00	0%	21%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	Laporan	1	2.652.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	1	813.500,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan kelengkapan data pegawai	Laporan	1	11.585.000,00	0	11.003.000,00	0%	95%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP Pegawai	Laporan	1	88.891.400,00	0	11.320.875,00	0%	13%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1.060.897.140,00	0	467.246.695,00	0%	44%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.767.000,00	1	10.755.900,00	100%	100%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	155.803.840,00	0	23.536.440,00	0%	15%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.275.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	43.400.100,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	39.997.200,00	0	14.848.600,00	0%	37%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	2.162.000,00	0	2.151.180,00	0%	99%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	80.642.000,00	0	25.000.000,00	0%	31%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	721.850.000,00	0	390.954.575,00	0%	54%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	5.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan	Paket	4	1.805.496.699,00	0	757.707.334,00	0%	42%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000,00	0	86.000,00	0%	9%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	293.806.202,00	0	132.186.664,00	0%	45%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	452.023.097,00	0	204.999.745,00	0%	45%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.058.667.400,00	0	420.434.925,00	0%	40%	BADAN KOORDINASI WILAYAH

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
														PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan	Laporan	3	397.751.421,00	0	139.264.750,00	0%	35%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Paket	1	205.437.000,00	0	134.779.400,00	0%	66%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	1	42.314.421,00	0	4.485.350,00	0%	11%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	01	1.09	1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	150.000.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan yang Ditindaklanjuti	%	85	1.294.412.600,00	0	455.155.759,00	0%	35%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	1.294.412.600,00	2	455.155.759,00	50%	35%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Pembangunan Ekonomi yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Sarana dan Prasarana yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	4	0	2	0	50%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pemerintahan I	Dokumen	2	1.294.412.600,00	0	455.155.759,00	0%	35%	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pemerintahan I yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pemerintahan II	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
						Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pemerintahan II yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7 = 6/5 x 100%		
		Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi I yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Pembangunan Ekonomi II yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Kemasyarakatan I	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Kemasyarakatan I yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Kemasyarakatan II	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Kemasyarakatan II yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana I	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana I yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Analisa Permasalahan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana II	Dokumen	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan Sub Bidang Sarana dan Prasarana II yang tersusun	Rekomendasi	2	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
		Jumlah Project Millenial yang difasilitasi di EJSC Bakorwil	Orang	40	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Jumlah Masyarakat yang difasilitasi di EJSK Bakorwil	Orang	40	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER				
		Jumlah UMKM/Pelaku Usaha yang difasilitasi di EJSK Bakorwil	Orang	40	0	0	0	0%	0	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER				
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		276	244.076.598.600,00	37,32	72.557.548.045,00	14%	30%	INSPEKTORAT				
6	01	INSPEKTORAT DAERAH		276	244.076.598.600,00	37,32	72.557.548.045,00	14%	30%	INSPEKTORAT				
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	Nilai	85	76.067.773.800,00	0	23.212.587.602,00	0%	31%	INSPEKTORAT		
				Persentase indikator program yang tercapai	%	90	0	0	0	0%	0	INSPEKTORAT		
				Persentase realisasi anggaran	%	95	0	31,32	0	33%	0	INSPEKTORAT		
6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	%	85	17.612.000,00	0	1.679.500,00	0%	10%	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.581.000,00	5	1.115.500,00	71%	31%	INSPEKTORAT
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.902.000,00	1	0	100%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.902.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.057.000,00	1	0	100%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.057.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3.581.000,00	2	384.000,00	50%	11%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen capaian kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.532.000,00	2	180.000,00	50%	7%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	65.840.132.300,00	6	19.796.344.528,00	50%	30%	INSPEKTORAT
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	123	63.893.659.000,00	123	18.922.024.069,00	100%	30%	INSPEKTORAT
					Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1.923.281.500,00	6	867.616.709,00	50%	45%	INSPEKTORAT
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	14.404.000,00	6	6.703.750,00	50%	47%	INSPEKTORAT
					Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1.601.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1.372.200,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1.643.200,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen tanggapan atas LHP	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	3.364.400,00	6	0	50%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Laporan keuangan	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	807.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
					Jumlah Laporan prognosis	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dokumen	12	1.457.227.093,00	6	188.825.750,00	50%	13%	INSPEKTORAT
					Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Unit	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	194.550.000,00	1	2.200.000,00	100%	1%	INSPEKTORAT

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
		Jumlah Laporan Presensi Pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	44.892.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
		Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1.534.300,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	16.820.000,00	0	4.374.750,00	0%	26%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan data pegawai	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	201.818.000,00	6	98.784.000,00	50%	49%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan SKP	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	699.836.793,00	2	83.467.000,00	3%	12%	INSPEKTORAT
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.05 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	123	297.776.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
		Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	Dokumen	4	953.857.503,00	4	112.216.741,00	100%	12%	INSPEKTORAT
6	01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	42.631.600,00	1	2.695.699,00	100%	6%	INSPEKTORAT
		Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	416.488.450,00	1	52.852.489,00	100%	13%	INSPEKTORAT
		Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	129.417.300,00	1	25.663.660,00	100%	20%	INSPEKTORAT
		Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	174.403.210,00	1	13.073.425,00	100%	7%	INSPEKTORAT
		Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	31.825.000,00	21	16.125.718,00	42%	51%	INSPEKTORAT
		Jumlah Paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	158.511.943,00	0	1.805.750,00	0%	1%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	580.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
		Jumlah Daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Vital	Dokumen	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	Dokumen	4	1.300.121.000,00	1	204.351.000,00	25%	16%	INSPEKTORAT
6	01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1.000.065.000,00	0	0	0%	0%	INSPEKTORAT
		Jumlah Mebel	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	300.056.000,00	2	204.351.000,00	50%	68%	INSPEKTORAT
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	4	5.013.002.925,00	4	1.997.962.086,00	100%	40%	INSPEKTORAT
6	01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.180.000,00	6	4.286.220,00	50%	35%	INSPEKTORAT
		Jumlah pengiriman Dokumen	Kali	0	0	6	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.477.826.840,00	0	462.085.459,00	0%	31%	INSPEKTORAT
		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	90.000.000,00	6	27.105.506,00	50%	30%	INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3.432.996.085,00	6	1.504.484.901,00	50%	44%	INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset	Laporan	12	1.485.820.979,00	6	911.207.997,00	50%	61%	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	Laporan	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	3	142.346.000,00	3	71.848.732,00	100%	50%	INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	538.048.500,00	34	259.333.574,00	100%	48%	INSPEKTORAT
		Jumlah Jasa	Paket	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT	
6	01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	274.127.000,00	120	118.697.700,00	100%	43%	INSPEKTORAT

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8			
1	2	3	4							8				
		Pelaksanaan monev pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT				
		Jumlah peringatan hari anti korupsi	Kali	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT				
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	20	1.866.485.800,00	0	102.469.159,00	0%	5%	INSPEKTORAT
					Jumlah pelaksanaan audit berkala SNI ISO 37001:2016	Kali	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT
					Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi kerja sama APIP-APH	Kali	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT
					Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang menjadi obyek Survei Penilaian Integritas (SPI)	Obyek	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT
					Rapat kerja anggota Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur	Kali	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT
					Jumlah Pelaksanaan Rapat kerja pembahasan kasus/pengaduan masyarakat	Kali	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			452,24	394.398.016.500,00	157,06	245.860.549.039,00	35%	62%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			452,24	394.398.016.500,00	157,06	245.860.549.039,00	35%	62%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program yang Tercapai,	%	92	20.282.608.000,00	0	8.155.769.596,00	0%	40%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Persentase Realisasi Anggaran,	%	95	0	62,07	0	65%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Indeks Profesionalitas ASN	indeks	45	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	9	218.045.000,00	6	27.541.487,00	67%	13%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	7	92.000.000,00	4	6.609.848,00	57%	7%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	Dokumen	0	23.300.000,00	0	0	0%	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	0	8.650.000,00	0	2.530.000,00	0	29%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Dokumen	0	8.330.000,00	0	0	0	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	1	0	100%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	0	6.300.000,00	0	0	0	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pencapaian Kinerja	Dokumen	0	21.315.000,00	0	12.487.139,00	0	59%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	0	2	0	40%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	0	58.150.000,00	0	5.914.500,00	0	10%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Dokumen	4	15.839.894.000,00	2	6.503.249.064,00	50%	41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan	0	15.142.618.000,00	0	6.176.873.223,00	0	41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	64	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	0	609.276.000,00	0	292.145.500,00	0	48%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	Laporan	0	7.650.000,00	0	4.276.000,00	0	56%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	Laporan	0	15.000.000,00	0	7.475.841,00	0	50%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	6	0	50%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	Dokumen	0	9.350.000,00	0	1.340.000,00	0	14%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE PROGRAM	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7 = 6/5 x 100%			8
1	2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan atas LHP	Dokumen	0	5.500.000,00	0	1.500.000,00	0	27%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	Laporan	0	35.000.000,00	0	10.774.500,00	0	31%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	0	6	0	50%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	Laporan	0	15.500.000,00	0	8.864.000,00	0	57%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	Dokumen	12	249.000.000,00	6	112.716.908,00	50%	45%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan	0	20.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	Laporan	0	9.900.000,00	0	4.885.500,00	0	49%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan	0	4.100.000,00	0	0	0	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Laporan	0	215.000.000,00	0	107.831.408,00	0	50%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	11	1.173.306.640,00	0	551.342.466,00	0%	47%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	46.300.000,00	0	15.480.795,00	0	33%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	95.854.500,00	0	12.187.030,00	0	13%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	85.000.000,00	0	26.748.445,00	0	31%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	78.000.000,00	0	20.091.620,00	0	26%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	0	868.152.140,00	0	476.834.576,00	0	55%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.06 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	11	278.080.000,00	0	77.662.850,00	0%	28%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7 = 6/5 x 100%		8
						Jumlah Kendaraan	Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Paket	0	278.080.000,00	0	77.662.850,00	0	28%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.08	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	12	1.673.050.360,00	6	748.302.284,00	50%	45%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.08	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.08	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	410.000.000,00	0	228.478.184,00	0	56%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.08	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	Paket	0	1.263.050.360,00	0	519.824.100,00	0	41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	851.232.000,00	6	134.954.537,00	50%	16%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	Paket	0	227.200.000,00	0	65.158.983,00	0	29%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	Paket	0	199.500.000,00	0	49.889.304,00	0	25%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket	0	424.532.000,00	0	19.906.250,00	0	5%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang dipelihara	Paket	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelembagaan yang Melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Lembaga	72	7.700.000.000,00	0	3.212.413.578,00	0%	42%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kali	7	7.700.000.000,00	0	3.212.413.578,00	0%	42%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pelaksanaan kebijakan/kegiatan pemantapan wawasan dan pembauran kebangsaan	Orang	0	7.645.000.000,00	0	3.212.413.578,00	0	42%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	635	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	0	55.000.000,00	0	0	0	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	6	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah Partai Politik yang Melakukan Kaderisasi,	Partai Politik	11	50.849.397.500,00	8,99	34.234.577.088,00	82%	67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Kejadian terkait Politik,	Kejadian Politik	16	0	20	0	125%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Persentase Peran Serta Pemilih Pemula dalam Pengembangan Etika dan Budaya Politik	%	0,04	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partai Politik yang telah Mencairkan Bantuan Keuangan	%	100	50.849.397.500,00	81,82	34.234.577.088,00	82%	67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur	Laporan	1	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
1					2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	8
								5		6		7 = 6/5 x 100%		
						Jumlah Laporan Perkembangan Politik Kab/Kota di Jawa Timur	Laporan	38	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Poli	Kali	12	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	0	50.849.397.500,00	0	34.234.577.088,00	0	67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	800	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang Berperan Aktif	%	14,2	288.759.950,00	0	49.481.315,00	0%	17%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM Penerima Bantuan yang Mencairkan Bantuan	%	100	288.759.950,00	92,86	49.481.315,00	93%	17%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Identifikasi, Inventarisasi dan Verifikasi Keberadaan serta Bantuan Fasilitasi Ormas/LSM	Laporan	4	0	2	0	50%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kali	5	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	0	288.759.950,00	0	49.481.315,00	0	17%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	500	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kejadian terkait Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	100	1.741.240.050,00	66	1.491.684.976,00	66%	86%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kali	2	1.741.240.050,00	0	1.491.684.976,00	0%	86%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Pelaksanaan/Kebijakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	0	1.741.240.050,00	0	1.491.684.976,00	0	86%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	200	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Laporan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jawa Timur,	Laporan	4	85.636.000.000,00	0	56.967.964.559,00	0%	67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Laporan	3	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik Sosial	Laporan	6	85.636.000.000,00	0	56.967.964.559,00	0%	67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/Kebijakan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kali	7	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	0	82.386.263.800,00	0	56.656.012.150,00	0	69%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Orang	600	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE PROGRAM					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5		6		7		8
						Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga								
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	124.318.600,00	0	10.320.085,00	0	8%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	8	0	0	0	0%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	0	535.417.600,00	0	290.627.324,00	0	54%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P	Laporan	7	0	2	0	29%	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	2.590.000.000,00	0	11.005.000,00	0%	0%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan RKPD**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR****1. Urusan Pendidikan**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan 20 UPT, dengan anggaran sebesar Rp. 8.538.880.469.230 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 3.585.096.044.954. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan 20 UPT belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah)

Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.515.722.749.198 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 3.575.309.135.817. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Surabaya

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Surabaya, dengan anggaran sebesar Rp. 2.925.431.410 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 955.205.363. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Surabaya belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 5 Surabaya

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 5 Surabaya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.108.101.687 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 442.139.835. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 5 Surabaya belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 6 Surabaya

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 6 Surabaya, dengan anggaran sebesar Rp. 899.000.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 326.412.787. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 6 Surabaya belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo, dengan anggaran sebesar Rp. 1.943.932.500 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 1.035.294.003. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo, dengan anggaran sebesar Rp. 1.098.255.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 453.468.550. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 2 Malang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Malang, dengan anggaran sebesar Rp. 1.686.440.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 606.574.038. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 2 Malang belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 4 Malang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 4 Malang, dengan anggaran sebesar Rp. 1.245.730.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 470.709.703. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 4 Malang belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 11 Malang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 11 Malang, dengan anggaran sebesar Rp. 922.523.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 390.934.812. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 11 Malang belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Singosari Malang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Singosari Malang, dengan anggaran sebesar Rp. 884.070.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 448.610.862. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Singosari Malang belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Panji Situbondo

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Panji Situbondo, dengan anggaran sebesar Rp 1.871.500.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 838.751.300. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Panji Situbondo belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi, dengan anggaran sebesar Rp. 660.702.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 332.306.488. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 2 Bondowoso

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Bondowoso, dengan anggaran sebesar Rp. 1.095.409.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 448.928.059. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 2 Bondowoso belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 5 Jember

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 5 Jember, dengan anggaran sebesar Rp. 1.251.688.935 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 467.906.601. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 5 Jember belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 3 Madiun

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 3 Madiun, dengan anggaran sebesar Rp. 855.862.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 365.585.912. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 3 Madiun belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Pacitan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Pacitan, dengan anggaran sebesar Rp. 651.031.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 308.417.970. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Pacitan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 2 Pasuruan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Pasuruan, dengan anggaran sebesar Rp. 756.886.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 397.884.680. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 2 Pasuruan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung, dengan anggaran sebesar Rp. 418.714.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 386.986.900. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.053.610.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 409.483.300. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso, dengan anggaran sebesar Rp. 601.299.500 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 293.257.459. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dengan anggaran sebesar Rp. 1.227.534.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 408.050.515. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soetomo, RSUD dr. Soedono Madiun, RSUD dr. Saiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya, RS Jiwa Menur, dan 10 UPT. dengan anggaran sebesar Rp. 4.263.785.122.346 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 1.676.760.530.289. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, 5 Rumah Sakit dan 10 UPT belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Dinas Kesehatan

Pada Dinas Kesehatan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 5 program dengan anggaran sebesar Rp. 236.239.621.830 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 226.200.769.494. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

RSUD dr Soetemo

Pada RSUD dr Soetemo, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.456.881.339.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 589.343.510.415. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RSUD dr Soetemo belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

RSUD dr. Soedono Madiun

Pada RSUD dr. Soedono Madiun, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 375.819.463.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 295.169.634.200. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RSUD dr. Soedono Madiun belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

RSUD dr. Saiful Anwar Malang

Pada RSUD dr. Saiful Anwar Malang, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.226.278.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 105.587.306.776. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RSUD dr. Saiful Anwar Malang belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

RSU Haji Surabaya

Pada RSU Haji Surabaya, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 375.017.528.945 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 114.156.362.913. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RSU Haji Surabaya belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

RS Jiwa Menur

Pada RS Jiwa Menur, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 155.521.745.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah

mencapai Rp. 57.835.804.473. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Jiwa Menur belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu

Pada RS Umum Daerah Karsa Husada Batu, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 133.946.451.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 73.463.708.196. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Umum Daerah Karsa Husada Batu belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Rumah Sakit Paru Jember

Pada RS Paru Jember, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 201.846.140.725 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 27.880.269.557. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Paru Jember belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Rumah Sakit Umum Daerah Dungus

Pada RS Umum Daerah Dungus, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 47.228.608.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 18.523.055.655. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Umum Daerah Dungus belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Rumah Sakit Kusta Kediri

Pada RS Kusta Kediri, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 1 program dengan anggaran sebesar Rp. 50.227.159.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 15.779.637.105. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Kusta Kediri belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah

Pada RS Umum Daerah Sumberglagah, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 94.769.944.813 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 24.019.112.920. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Umum Daerah Sumberglagah belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Pada RS Mata Masyarakat Jawa Timur, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 165.864.153.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 24.075.582.189. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Mata Masyarakat Jawa Timur belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima

Pada RS Umum Daerah Husada Prima, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 118.947.901.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 31.684.050.771. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Umum Daerah Husada Prima belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan

Pada RS Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 175.330.592.275 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 52.912.191.594. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Pada RS Paru Manguharjo Madiun, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 28.681.318.516 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 9.329.073.654. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan RS Paru Manguharjo Madiun belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati

Pada UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 23.024.352.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 10.800.460.377. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. dengan anggaran sebesar Rp. 1.552.228.163.616 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 292.470.525.348. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah mencapai kinerja sangat baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Dinas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

Pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 523.958.566.089 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 89.760.910.189. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pada Dinas pekerjaan Umum Bina Marga, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 930.281.878.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 156.083.872.602. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 9 program dengan anggaran sebesar Rp. 621.946.285.616 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 46.625.742.557. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 dilakukan melalui 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya, dengan anggaran sebesar Rp. 65.774.461.099 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 41.065.207.353. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah. dengan anggaran sebesar Rp. 65.774.461.099 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023,

realisasi keuangan telah mencapai Rp. 50.005.412.551. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanganan Bencana Daerah telah mencapai kinerja sangat baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah)

Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Satuan Polisi Pamong Praja, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 49.674.535.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 20.177.957.498. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Badan Penanganan Bencana Daerah

Pada Badan Penanganan Bencana Daerah, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 65.774.461.099 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 29.827.455.053. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Penanganan Bencana Daerah belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2023 dilakukan melalui 6 program oleh Dinas Sosial, dengan anggaran sebesar Rp. 481.447.059.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 198.371.103.991. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Sosial belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 312.022.498.793 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 139.586.351.724. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum berkinerja dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 7 program dengan anggaran sebesar Rp. 28.897.426.394 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 13.240.673.327. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 187.360.457.135 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 80.129.210.313. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 1 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.370.000.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 471.772.989. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pada Dinas Lingkungan Hidup, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 11 program dengan anggaran sebesar Rp. 48.291.377.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 18.419.350.692. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0 % (sangat rendah).

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.327.808.160 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 847.487.506. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan belum berkinerja dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 5 program dengan anggaran sebesar Rp. 48.261.909.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 21.765.810.297. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum berkinerja dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.230.929.720 dan sampai pada

Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 786.807.553. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan belum berkinerja signifikan baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada Dinas Perhubungan, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 505.243.590.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 170.796.493.192. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dilakukan melalui 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan anggaran sebesar Rp. 58.179.520.520 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 23.909.744.103. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 dilakukan melalui 8 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 104.129.992.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 38.943.917.170. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan anggaran

sebesar Rp. 61.449.018.203 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 16.106.147.673. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga tahun 2023 dilakukan melalui 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, dengan anggaran sebesar Rp. 301.181.536.667 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 64.309.687.754. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik tahun 2023 dilakukan melalui 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan anggaran sebesar Rp 1.028.418.480 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 377.608.678. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian tahun 2023 dilakukan melalui 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan anggaran sebesar Rp 400.000.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 230.779.931. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp. 106.299.131.537 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 37.087.762.254. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan tahun 2023, urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 51.399.769.466 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 23.020.785.668. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan tahun 2023, urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 532.285.534 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 797.101.378. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan anggaran sebesar Rp. 376.025.489.667 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 88.180.045.523. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2023 dilakukan melalui 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp. 37.530.632.849 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 5.653.922.732. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija, UPT Pengembangan Benih Hortikultura, dan UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, dan Dinas Peternakan. dengan anggaran sebesar Rp. 254.044.142.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 23.400.724.295. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, dan Dinas Peternakan belum berkinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tahun 2023 dilakukan melalui 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan anggaran sebesar Rp. 33.175.154.865 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 4.805.101.164. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija

Pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 33.960.547.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 12.117.791.928. Pada Triwulan

II, seluruh program yang dilaksanakan UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

UPT Pengembangan Benih Hortikultura

Pada UPT Pengembangan Benih Hortikultura, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 8.884.727.035 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 3.643.640.014. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan UPT Pengembangan Benih Hortikultura telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, pada Tahun 2023 urusan ini diselenggarakan melalui 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 7.081.924.500 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 2.834.191.189. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Dinas Perkebunan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan, dengan anggaran sebesar Rp. 96.496.787.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 23.400.724.295. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perkebunan telah mencapai kinerja signifikan dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Dinas Peternakan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, dengan anggaran sebesar Rp. 94.104.052.500 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 33.418.694.728. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan

Dinas Perkebunan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan tahun 2023 dilakukan melalui 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, dengan anggaran sebesar Rp. 198.454.655.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 88.064.891.151. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Kehutanan telah mencapai kinerja dengan tingkat capaian terhadap target RPJMD sebesar % (Sangat rendah).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 dilakukan melalui 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, dengan anggaran sebesar Rp. 56.928.527.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 21.398.935.216. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mencapai kinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RPJMD sebesar % (Sangat rendah).

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggaran sebesar Rp. 22.405.858.647 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 8.438.449.008. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2023 dilakukan melalui 4 program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggaran sebesar Rp. 106.963.847.353 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 43.083.776.417. Pada Triwulan II,

seluruh program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0 % (Sangat rendah)

1. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2023 dilakukan melalui 1 program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 641.521.495. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

UNSUR PENDUKUNG

1. Unsur Sekretariat Daerah

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp. 1.421.566.622.777 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 313.193.832.179. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum, dan Biro Administrasi Pimpinan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 21.125.696.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 5.887.048.004. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Biro Kesejahteraan Rakyat

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2022 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp. 300.981.536.387 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 121.905.139.436. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Biro Hukum

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2022 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 20.706.947.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 7.592.543.151. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Hukum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Biro Perekonomian

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2022 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian, dengan anggaran sebesar Rp. 20.549.332.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 8.360.795.283. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Perekonomian, belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp. 28.451.979.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 10.539.855.380. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Biro Administrasi Pembangunan

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 16.177.024.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 6.839.246.301. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Administrasi Pembangunan, belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Biro Organisasi

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi, dengan anggaran sebesar Rp. 16.483.956.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 6.036.209.044. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Organisasi, belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Biro Umum

Penyelenggaraan unsur Sekretariat Daerah tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Biro Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 340.423.281.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 121.578.075.071. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Umum, belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

Biro Administrasi Pimpinan

Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah tahun 2023 dilakukan melalui 1 program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan, dengan anggaran sebesar Rp. 61.843.375.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 24.454.920.509. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Biro Administrasi Pimpinan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

2. Unsur Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan unsur Sekretariat DPRD tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, dengan anggaran sebesar Rp. 637.153.953.495 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 180.349.490.835. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

UNSUR PENUNJANG

1. Unsur Perencanaan

Penyelenggaraan unsur Perencanaan tahun 2023 dilakukan melalui 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 147.109.464.938 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 53.096.625.475. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

2. Unsur Keuangan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penyelenggaraan unsur Keuangan tahun 2023 dilakukan melalui 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 8.808.961.422.820 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 3.064.663.276.636. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Badan Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan unsur Keuangan tahun 2023 dilakukan melalui 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. - dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 220.464.447.676. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Pendapatan

Daerah belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

3. Unsur Kepegawaian

Penyelenggaraan Unsur Kepegawaian tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 55.112.225.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 23.273.237.500. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah telah mencapai kinerja sangat baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Unsur Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan anggaran sebesar Rp. 125.808.937.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 47.728.099.104. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Unsur Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dengan anggaran sebesar Rp. 29.848.607.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 12.347.793.052. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

6. Unsur Penghubung

Badan Penghubung

Penyelenggaraan Unsur Penghubung tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung, dengan anggaran sebesar Rp. 29.031.747.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 13.880.504.634.

Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Penghubung belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun

Penyelenggaraan Unsur Penghubung tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun, dengan anggaran sebesar Rp. 17.406.900.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 7.143.080.480. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun telah mencapai kinerja sangat baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro

Penyelenggaraan Unsur Penghubung tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro, dengan anggaran sebesar Rp. 15.368.825.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 6.151.743.782. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro telah mencapai kinerja cukup baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar % (sangat rendah).

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang

Penyelenggaraan Unsur Penghubung tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang, dengan anggaran sebesar Rp. 16.841.120.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 6.851.822.440. Pada Triwulan IIV, seluruh program yang dilaksanakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang belum berkinerja baik

dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan

Penyelenggaraan Unsur Penghubung tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Pamekasan, dengan anggaran sebesar Rp. 14.684.792.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 5.367.440.552. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan telah mencapai kinerja sangat baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember

Penyelenggaraan Unsur Penghubung tahun 2023 dilakukan melalui 2 program yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember, dengan anggaran sebesar Rp. 14.012.820.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 5.670.755.772. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember telah mencapai kinerja sangat baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar -% (sangat rendah).

UNSUR PENGAWASAN

1. Inspektorat

Penyelenggaraan Unsur Pengawasan tahun 2023 dilakukan melalui 3 program yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan anggaran sebesar Rp. 91.941.051.000 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 26.132.372.841. Pada Triwulan IIV, seluruh program yang dilaksanakan Inspektorat belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (sangat rendah).

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum tahun 2023 dilakukan melalui 6 program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan anggaran sebesar Rp. 166.498.005.500 dan sampai pada Triwulan II Tahun 2023, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 104.111.891.112. Pada Triwulan II, seluruh program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum berkinerja baik dengan tingkat capaian terhadap target RKPD sebesar 0% (Sangat rendah).

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

BAB III**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH****3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah yang disajikan dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur ini meliputi kondisi ekonomi pada tahun 2022 dan perkembangan perekonomian Jawa Timur hingga tahun 2023. Perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud meliputi kinerja sektor perekonomian kabupaten dan kota serta beberapa faktor yang terkait. Kondisi perekonomian ini diharapkan menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah pada triwulan III dan IV tahun 2023.

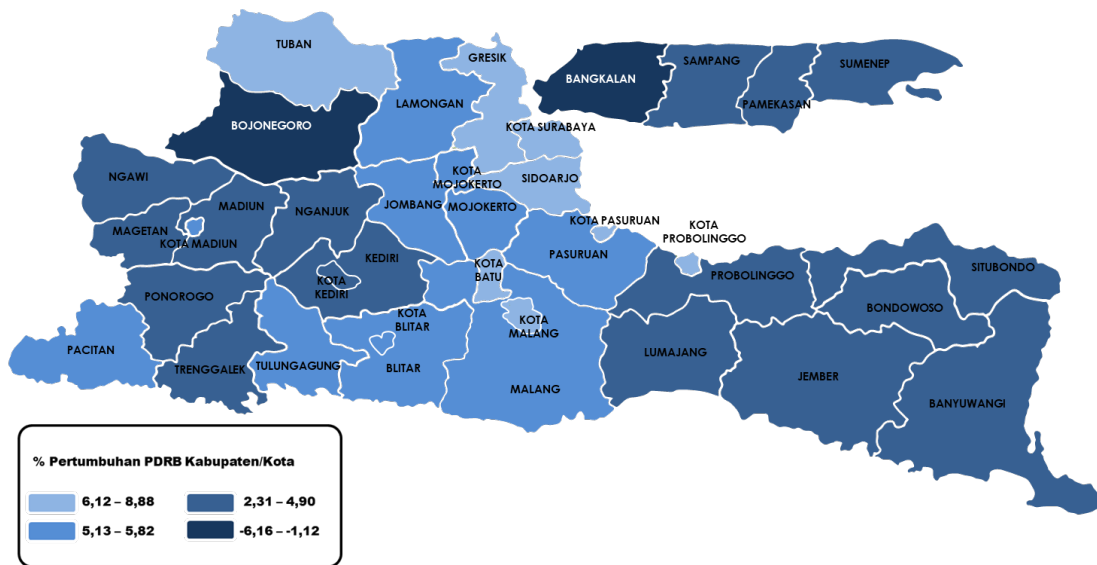
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi atau perlambatan pada tahun 2020 dan 2021. Capaian yang menggembirakan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Timur sudah pulih atau kembali pada tren sebagaimana kondisi sebelum pandemi covid-19 yaitu dengan tumbuh 5,34 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2023 juga mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu tumbuh sebesar 4,95 persen (*y-o-y*) dibandingkan dengan Triwulan I-2022 dan tumbuh sebesar 1,02 persen (*q-to-q*) apabila dibandingkan dengan dengan Triwulan IV-2022.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022 menempati peringkat tertinggi kedua, lebih tinggi dari Jawa Tengah, DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten. Perbaikan tersebut juga berlaku pada perekonomian seluruh provinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara serta Perekonomian Nasional.

Pada tingkat yang lebih detail yang menunjukkan bahwa telah pulihnya perekonomian Jawa Timur dalam era pandemi *Covid-19* dapat dilihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi pada level Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur.

Gambar 3.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2022



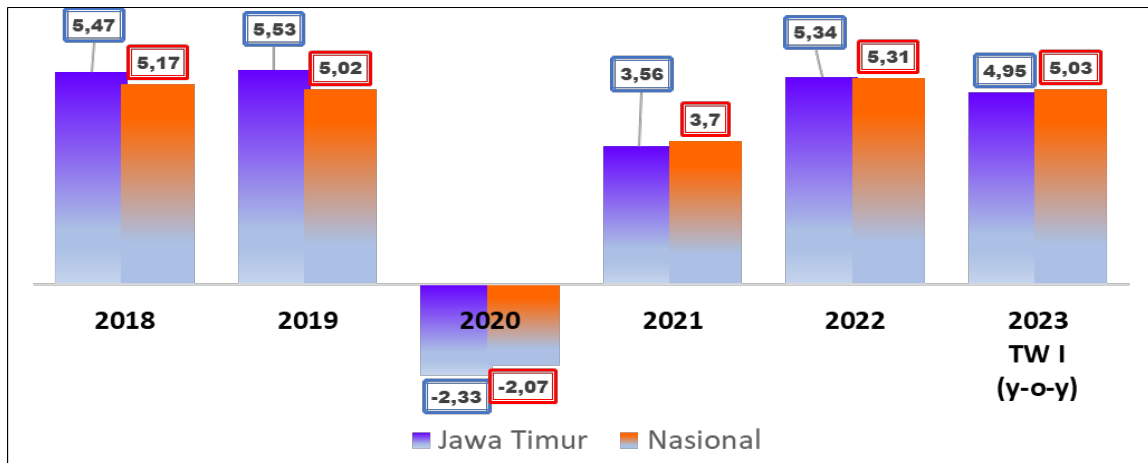
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022, diolah

Beberapa Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan yang diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bahkan Nasional, antara lain Kabupaten Tuban (8,88%), Kabupaten Sidoarjo (7,53%), Kabupaten Gresik (7,38%), Kota Surabaya (6,51%), Kota Malang (6,32%), Kota Pasuruan (6,22%), Kota Batu (6,18%), Kota Probolinggo (6,12%), Kabupaten Mojokerto (5,82%), Kota Mojokerto dan Kabupaten Lamongan (5,56%), Kabupaten Pacitan (5,54%), Kota Madiun (5,52%) dan Kabupaten Jombang (5,37%). Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Jawa Timur juga merupakan Kabupaten/Kota yang mengalami akslerasi atau *recovery* pada tahun tahun 2022, diantaranya adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kota Kediri.

Sebagai upaya untuk lebih memperjelas kondisi ekonomi Jawa Timur, berikut ini adalah beberapa sub-sub Bab yang berkaitan dengan substansi perekonomian Jawa Timur.

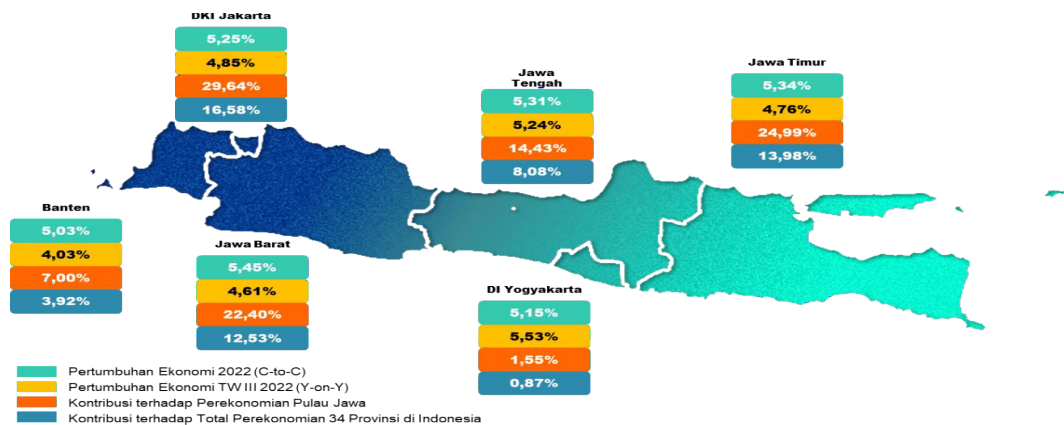
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Di era pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami kontraksi terdalam sebesar 2,33 persen pada tahun 2020 dan mulai mengalami perbaikan signifikan pada 2021, yaitu tumbuh 3,57 persen dan mengalami akselerasi pada Tahun 2022 menjadi 5,34 persen serta tumbuh sebesar 4,95 persen (*y-o-y*) pada Triwulan I-2023. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 3.2 adalah:

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023. Data Diolah

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.730,91 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp1.757,82 triliun. Ekonomi Jawa Timur tahun 2022 meningkat sebesar 5,34 persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 19,47 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 9,23 persen. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (*y-o-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,95 persen. Semua lapangan Usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 19,39 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 11,74 persen, serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,43 persen. Sedangkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap Pulau Jawa dapat ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Jawa Tahun 2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2023. Data Diolah

Pada Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada urutan ke-2 tertinggi di Pulau Jawa diatas Prov. Jawa Tengah (5,31%), DKI Jakarta (5,25%), DI Yogyakarta (5,15%), dan Banten (5,03%) serta dibawah Jawa Barat (5,45%). Jawa Timur berkontribusi terhadap perekonomian Pulau Jawa sebesar 24,99% (tahun 2022 dan Triwulan I-2023) dan sebesar 13,98% (tahun 2022) serta 14,29% (Triwulan I-2023) terhadap total perekonomian Nasional. Kontribusi tersebut masih menempatkan Provinsi Jawa Timur pada posisi kedua dibawah Provinsi DKI Jakarta.

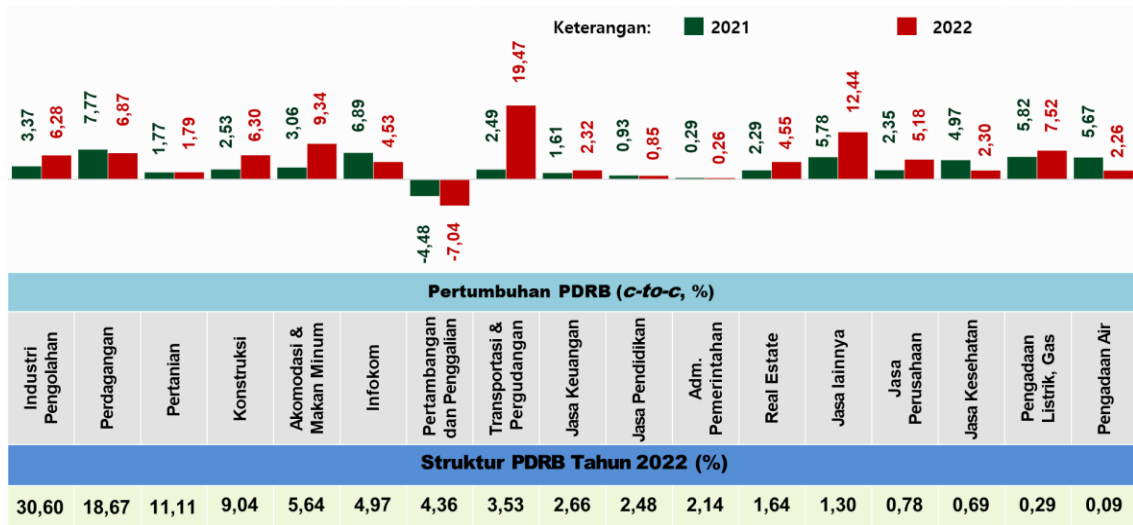
a. Pertumbuhan Sisi Produksi (Sektoral)

Ekonomi Jawa Timur tahun 2022 dibanding tahun 2021 tumbuh sebesar 5,34% (c-to- c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 9,23%; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 7,25%; Komponen PK-RT sebesar 6,03%; Komponen PMTB sebesar 5,41%; dan komponen PK-P sebesar 0,11%. Sedangkan, Komponen Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 15,47%.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,60%; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,67%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,11%; dan Konstruksi sebesar 9,04%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,42%.

Ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,76%. Delapan lapangan usaha yang dominan mengalami pertumbuhan ekonomi positif kecuali Pertambangan dan Penggalan. Lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 12,35%. Kemudian, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 10,63%, sedangkan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 9,68%. Sementara itu, secara kumulatif Tahun 2022 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 19,47%; Jasa lainnya sebesar 12,44%; dan Akomodasi & Makan Minum sebesar 9,34%. Secara grafis hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

**Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB Delapan Lapangan Usaha (y-on-y)
(persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

b. Pertumbuhan Sisi Pengeluaran

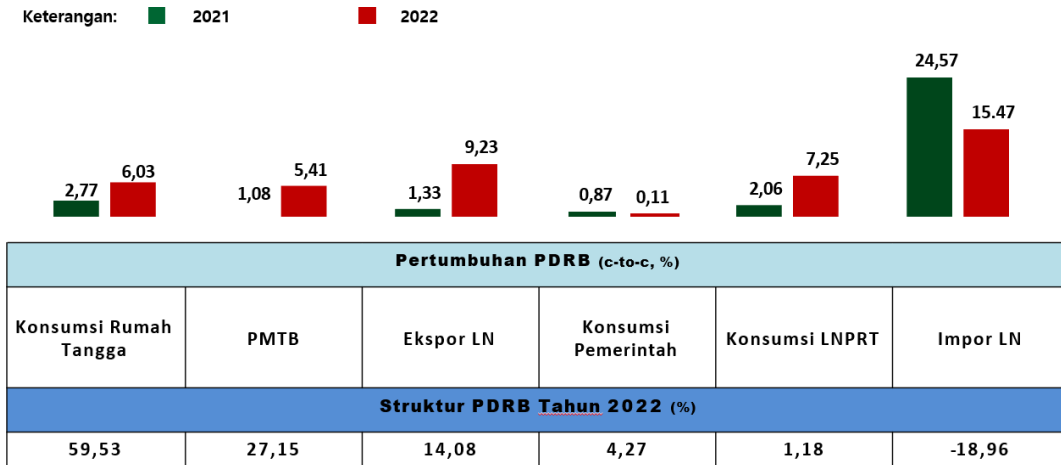
Ekonomi Jawa Timur tahun 2021 dibanding tahun 2020 tumbuh sebesar 3,57 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-RT sebesar 2,69 persen; diikuti Komponen PK-LNPRT sebesar 2,06 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 1,61 persen; Komponen PMTB sebesar 1,29 persen; dan Komponen PK-P sebesar 0,61 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 24,55 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 57,23 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,51 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 13,54 persen; Komponen PK-P sebesar 5,59 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,19 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,78 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 16,41 persen.

Ekonomi Jawa Timur pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 (*y-o-y*) tumbuh sebesar 4,76%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT yang tumbuh sebesar 7,80%; diikuti oleh Komponen PMTB dan Komponen PKRT yang masing-masing tumbuh sebesar 6,10% dan 5,00%. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 5,64%. Sedangkan secara kumulatif Tahun 2022 pertumbuhan tertinggi terjadi pada

impor luar negeri yang tumbuh sebesar 15,47%. Secara grafis hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.5 sebagai berikut:

Gambar 3.5 Daya Saing PDRB menurut Komponen Pengeluaran



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

3.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Ekspor Jawa Timur bulan Desember 2022 turun sebesar 0,65% dibandingkan bulan November 2022, yaitu dari USD 1,97 miliar menjadi USD 1,96 miliar. Sementara dibandingkan Desember 2021, nilai ekspor mengalami penurunan sebesar 4,45%. Penurunan nilai ekspor dibanding bulan lalu dipicu oleh menurunnya kinerja ekspor non migas. Apabila dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor sektor non migas turun sebesar 2,52%, yaitu dari USD 1,90 miliar menjadi USD 1,85 miliar. Nilai ekspor sektor non migas tersebut memberikan kontribusi sebesar 94,79% dari total ekspor bulan ini. Dibandingkan Desember 2021, nilai ekspor sektor nonmigas mengalami penurunan sebesar 6,47%. Sedangkan nilai ekspor sektor migas pada bulan Desember 2022 naik sebesar 52,51% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari USD 66,83 juta menjadi USD 101,92 juta. Peranan ekspor sektor migas menyumbang 5,21% total ekspor Jawa Timur pada bulan ini. Jika dibandingkan dengan Desember 2021 nilai ekspor migas naik sebesar 57,71%.

Impor Jawa Timur bulan Desember 2022 turun sebesar 2,35% dibandingkan bulan November 2022, yaitu dari USD 2,65 miliar menjadi USD 2,59 miliar. Penurunan nilai impor ini disebabkan oleh turunnya kinerja impor sektor migas Jawa Timur. Impor migas bulan Desember 2022 ke Jawa Timur turun sebesar 23,95%, dari USD 618,35 juta menjadi USD 470,28 juta. Impor migas menyumbang 18,16% dari total impor Jawa Timur pada Desember 2022. Nilai impor migas ini mengalami penurunan sebesar 31,59% bila dibandingkan dengan bulan Desember 2021.

Adapun nilai impor nonmigas pada bulan Desember 2022 naik sebesar 4,21% dibandingkan bulan sebelumnya, dari USD 2,03 miliar menjadi USD 2,12 miliar. Impor nonmigas menyumbang 81,84% dari total impor Jawa Timur pada Desember 2022. Dibandingkan Desember 2021, nilai impor nonmigas mengalami kenaikan sebesar 2,44%.

Tabel 3.1 Perkembangan Neraca Perdagangan

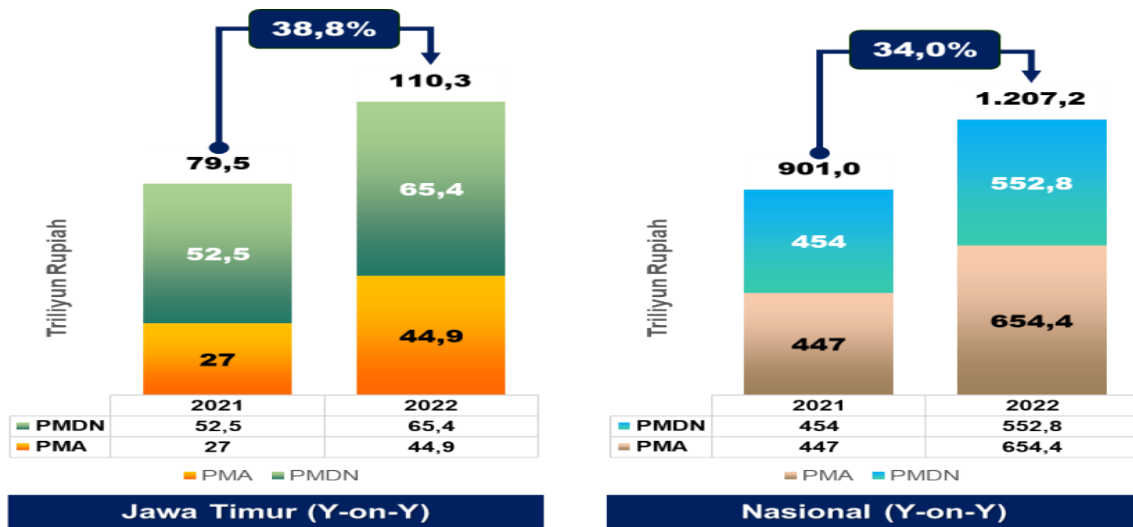
URAIAN	EKSPOR	IMPOR	NERACA PERDAGANGAN
Desember 2022			
Total Ekspor/Impor	1.956,41	2.589,70	-633,30
Migas	101,92	470,28	-368,36
Non Migas	1.854,49	2.119,43	-264,94
Januari - Desember 2022			
Total Ekspor/Impor	23.924,92	33.091,13	-9.165,88
Migas	1.172,80	8.337,11	-7.164,31
Non Migas	22.752,12	24.754,03	-2.001,57

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Neraca perdagangan Jawa Timur selama bulan Desember 2022 mengalami defisit sebesar USD 633,30 juta. Defisit ini disebabkan karena defisit nilai perdagangan pada sektor migas sebesar USD 368,36 juta, demikian juga di sektor nonmigas mengalami defisit nilai perdagangan sebesar USD 264,94 juta. Secara kumulatif selama Januari-Desember 2022 neraca perdagangan Jawa Timur juga mengalami defisit sebesar USD 9,17 miliar. Hal ini disebabkan karena defisit pada sektor migas sebesar USD 7,16 miliar dan sektor nonmigas sebesar USD 2,00 miliar. Kondisi ini membuat kedua sektor tersebut perlu peningkatan kinerja agar neraca perdagangan Jawa Timur secara kumulatif berubah menjadi surplus di periode berikutnya. Selain itu perlu diupayakan untuk menekan atau mengurangi defisit dari sektor migas.

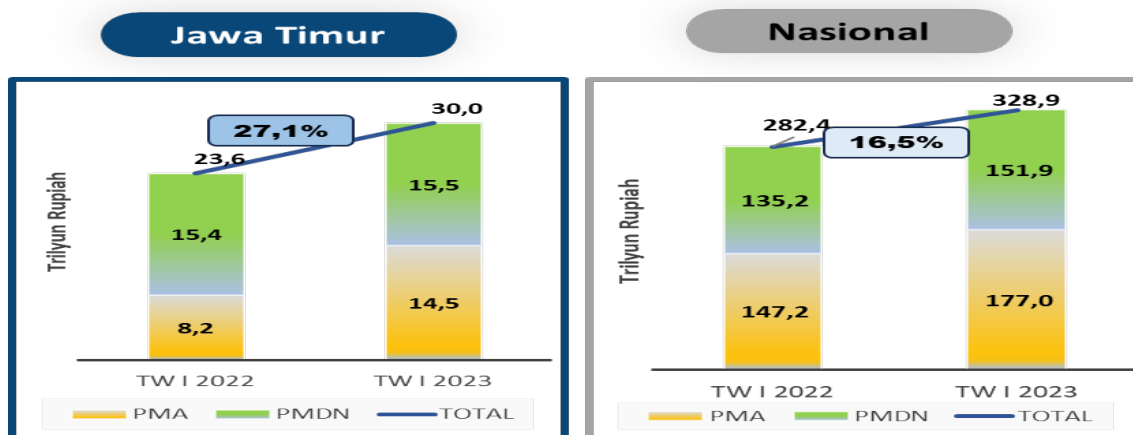
3.1.1.3 Kinerja Investasi

Kinerja Investasi Jawa Timur Tahun 2022 mencapai sebesar Rp 110,3 Trilyun, terdiri dari PMA (Rp 44,9 Trilyun) dan PMDN (Rp 65,4 Trilyun). Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 38,8% (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 34% (y-o-y) sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.6 sebagai berikut:

Gambar 3.6 Realiasi Investasi Jawa Timur Tahun 2022(y-o-y)

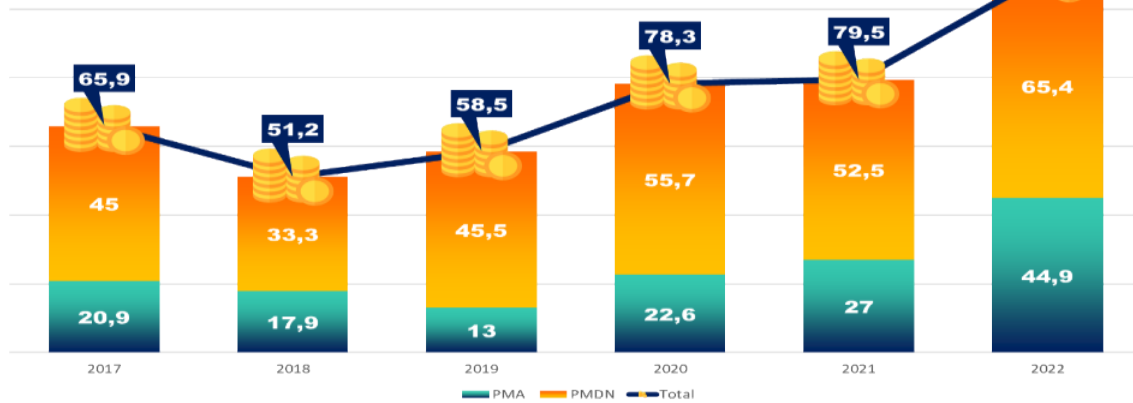
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2023

Realisasi investasi Jawa Timur pada Triwulan I-2023 tumbuh sebesar 27,1% (*y-o-y*) atau mencapai sebesar Rp 30 Trilyun, yang terdiri dari PMDN (Rp 15,5 Trilyun) dan PMA (Rp 14,5 Trilyun). Capaian tersebut tumbuh lebih tinggi dibanding capaian Nasional yang tumbuh sebesar 16,5%. Secara grafis realisasi investasi Jawa Timur Triwulan I-2023 ditunjukkan pada Gambar 3.7 sebagai berikut :

Gambar 3.7 Realisasi Investasi Jawa Timur Triwulan I-2023 (*y-o-y*)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2023

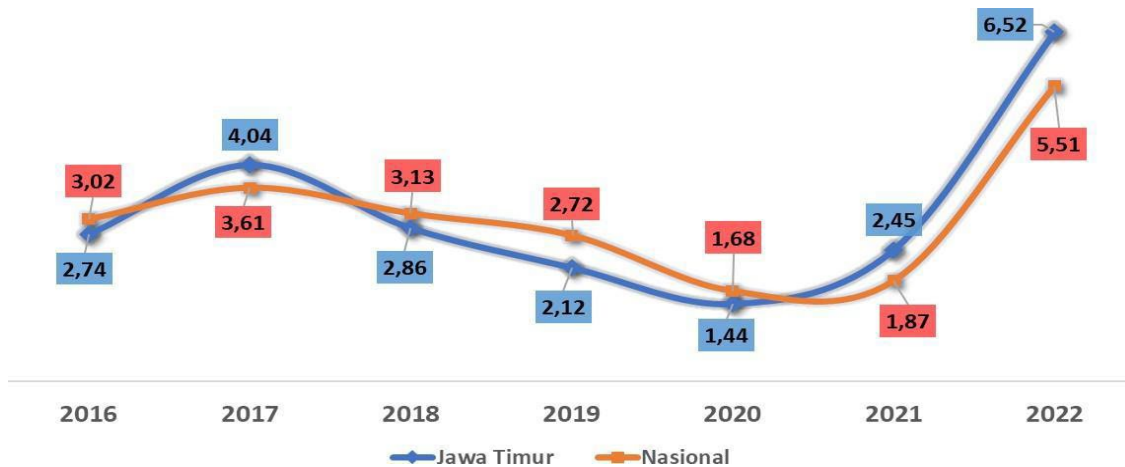
Adapun perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Timur pada 2022 menunjukkan realisasi penanaman modal tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 sebesar Rp. 65,9 Trilyun dan tahun 2022 sebesar Rp. 110,3 Trilyun. Secara grafis perkembangan realisasi investasi Jawa Timur ditunjukkan pada Gambar 3.8 sebagai berikut :

Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Investasi Jawa Timur 2017-2022

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Timur, 2023

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Inflasi Jawa Timur pada bulan Desember 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2021. Pada Desember 2022, inflasi Jawa Timur mencapai 6,52% lebih tinggi dibandingkan Desember 2020 yang mencapai 2,45%. Kondisi tersebut juga terjadi pada Inflasi secara Nasional yaitu mencapai 5,51%. Secara grafis perkembangan inflasi Jawa Timur dan Nasional ditunjukkan pada Gambar 3.9:

Gambar 3.9 Perkembangan Inflasi Jawa Timur

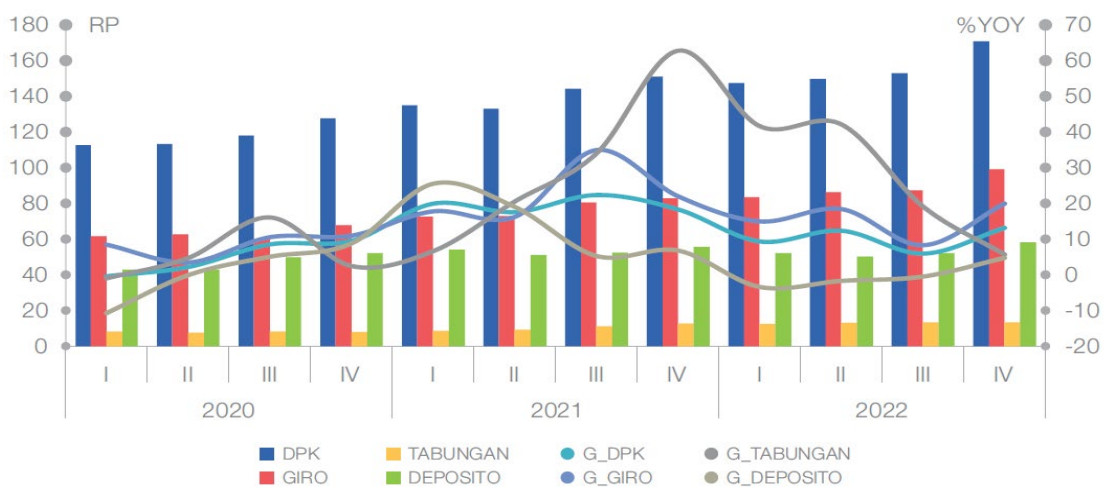
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

3.1.1.5 Kinerja Perbankan

Pertumbuhan DPK korporasi di perbankan meningkat pada triwulan IV 2022. DPK korporasi di perbankan tercatat tumbuh 13,13% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,93% (yoy). Berdasarkan komponennya, DPK korporasi masih didominasi oleh giro

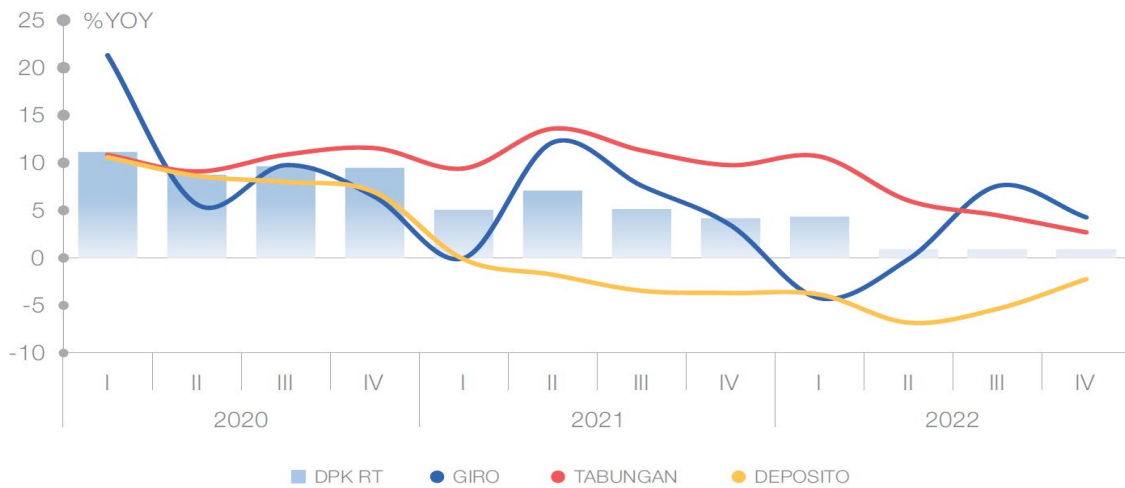
dan deposito dengan pangsa masing-masing sebesar 58,01% dan 34,08% dari total DPK di perbankan, sementara tabungan hanya sebesar 7,91%. Pada triwulan IV 2022, peningkatan DPK korporasi didorong oleh peningkatan komponen giro dan deposito yang tercatat tumbuh masing-masing sebesar 19,95% (yoy) dan 4,72% (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 8,29% (yoy) untuk komponen giro dan berkontraksi 0,51% (yoy) untuk komponen deposito. Di sisi lain, komponen tabungan tercatat melambat dari yang sebelumnya tumbuh 19,14% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi tumbuh 5,66% (yoy) pada triwulan laporan. Secara umum, peningkatan DPK korporasi di tengah perlambatan kinerja penyaluran kredit korporasi mengindikasikan bahwa korporasi masih menahan investasi maupun ekspansi usaha dan cenderung menyimpan modal di perbankan.

Gambar 3.10 Perkembangan DPK Korporasi



Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia

DPK Rumah Tangga di Jawa Timur terpantau sedikit meningkat pada triwulan IV 2022. Kinerja penghimpunan DPK RT terakselerasi pada triwulan laporan dengan pertumbuhan sebesar 0,92% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,90% (yoy). Peningkatan DPK RT di tengah perlambatan penyaluran kredit RT mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung menyimpan uang di perbankan dan menahan konsumsi. Adanya kenaikan suku bunga simpanan membuat masyarakat memilih untuk menunda konsumsi di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan jenisnya, akselerasi kinerja penghimpunan DPK bersumber dari membaiknya pertumbuhan deposito seiring peningkatan suku bunga acuan yang lebih atraktif.

Gambar 3.11 Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga

Sumber: Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 diproyeksikan masih tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan rilis IMF April 2023, ekonomi dunia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 2,8% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2022 (3,4%, yoy). Lebih rendahnya kinerja ekonomi global pada tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok global, kebijakan proteksionisme, masih tingginya inflasi global, potensi resesi di sejumlah negara (terutama Amerika Serikat dan Kawasan Eropa), dan kebijakan moneter ketat secara global. Perlambatan ekonomi global yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh pelanggaran Zero Covid Policy di Tiongkok.

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN-5 diperkirakan mengalami perlambatan ekonomi pada tahun 2023 sebelum mengalami perbaikan pada tahun 2024. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) yang merupakan salah satu tujuan ekspor luar negeri (LN) utama Jawa Timur diperkirakan tumbuh 4,5% (yoy) pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (5,2%, yoy). Masih berlangsungnya konflik geopolitik, terutama Rusia-Ukraina, pada tahun 2023 diperkirakan berdampak pada gangguan rantai pasok global, kebijakan proteksionisme, dan tingginya inflasi yang mengganggu kinerja perdagangan negara-negara di Kawasan ASEAN-5. Lebih lanjut, kenaikan suku bunga acuan bank sentral yang turut dilakukan oleh negara-negara tersebut diperkirakan turut menekan kinerja sektor riil.

Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Negara	2022	Proyeksi IMF WEO Apr'23
		2023
Dunia	3,40	2,80
Negara Maju	2,70	1,30
Amerika Serikat	2,00	1,60
Kawasan Eropa	3,50	0,80
Jepang	1,40	1,30
Negara Berkembang	4,00	3,90
Tiongkok	3,00	5,20
India	6,80	5,90
ASEAN-5	5,50	4,50
Amerika Latin	4,00	1,60
Negara Berkembang Eropa	0,80	1,20
Timur Tengah & Asia Tengah	5,30	2,90

Sumber: *World Economic Outlook (WEO) - IMF April 2023, diolah*

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 dengan kecenderungan bias tengah di kisaran 4,5-5,3% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (5,3%, yoy). Prakiraan lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 dipengaruhi oleh masih berlanjutnya konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi risiko penurunan ekspor, depresiasi nilai tukar, dan *capital outflows* yang meningkat.

Pemerintah Indonesia dan beberapa organisasi internasional cukup optimis dan percaya bahwa perekonomian Indonesia akan lebih membaik di tahun 2023 seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi dan terlaksananya program pemulihan pasca pandemi Covid-19. Terkait hal ini, berikut beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi dari berbagai sumber sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023

Organisasi/Lembaga	2023
Kementerian Keuangan RI	5,3% - 5,9%
Bank Indonesia	4,5%-5,3%
LPEM UI	5,0%-5,1%
INDEF	4,8%
OECD	4,7%
World Bank	4,8%
Asian Development Bank (ADB)	4,8%
IMF	5,0%

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Dari tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup variatif diatas, pada tahun 2023 proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berkisar antara 4,3% hingga 5,7%. Adapun berdasarkan skenario proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2022 diperoleh baseline proyeksi pertumbuhan ekonomi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Baseline Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk Proyeksi Jawa Timur

Lembaga	Proyeksi 2023
FEB Universitas Airlangga	4,70 - 5,50
FEB Universitas Brawijaya	5,43
KpW Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur	4,70 - 5,50

Sumber: Hasil FGD Bidang Ekonomi, diolah (sementara)

3.1.3 Analisis Investasi

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makro ekonomi yang dikenal sebagai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah).

Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti

investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, hasil nilai ICOR Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

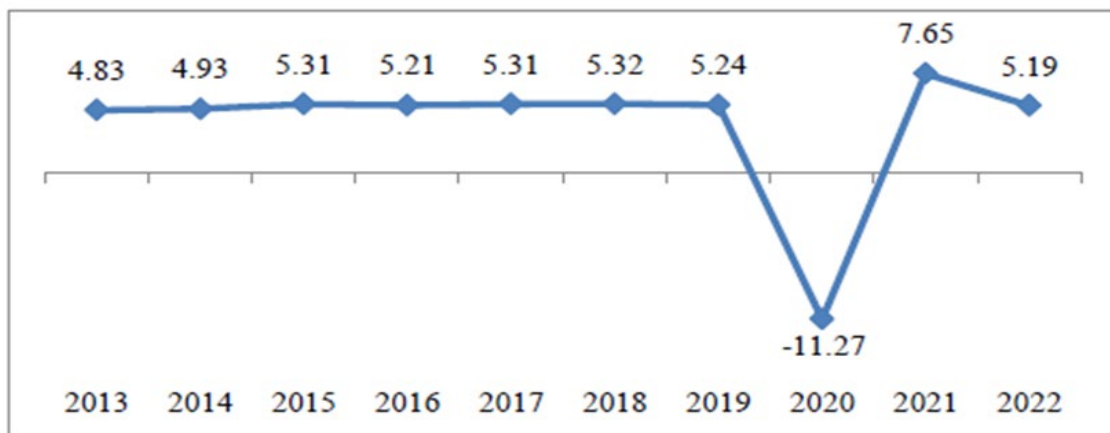
Tabel 3.5 Hasil Perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2022

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK 2010 (trilyun)	1192.79	1262.68	1331.38	1405.56	1482.30	1563.44	1649.90	1611.39	1668.75	1757.82
ΔPDRB (trilyun)	68.33	69.89	68.89	74.19	76.74	81.14	86.45	-38.50	57.36	89.07
PMTB (trilyun)	330.28	344.72	364.83	368.71	407.19	431.92	453.19	433.89	438.58	462.31
ICOR	4.83	4.93	5.31	5.21	5.31	5.32	5.24	-11.27	7.65	5.19

Sumber: BPS (2022), diolah.

Secara grafis, hasil perhitungan ICOR Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 3.12 Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS (2022), diolah

Gambar 3.13 menunjukkan bahwa nilai ICOR Provinsi Jawa Timur selama periode 2013-2022. Pada tahun 2013-2019, menunjukkan tren sedikit berfluktuatif tetapi cenderung ke arah positif. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi investasi dalam meningkatkan output (pertumbuhan ekonomi) di Jawa Timur dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan atau dengan kata lain, investasi di Jawa Timur cenderung semakin kurang efisien.

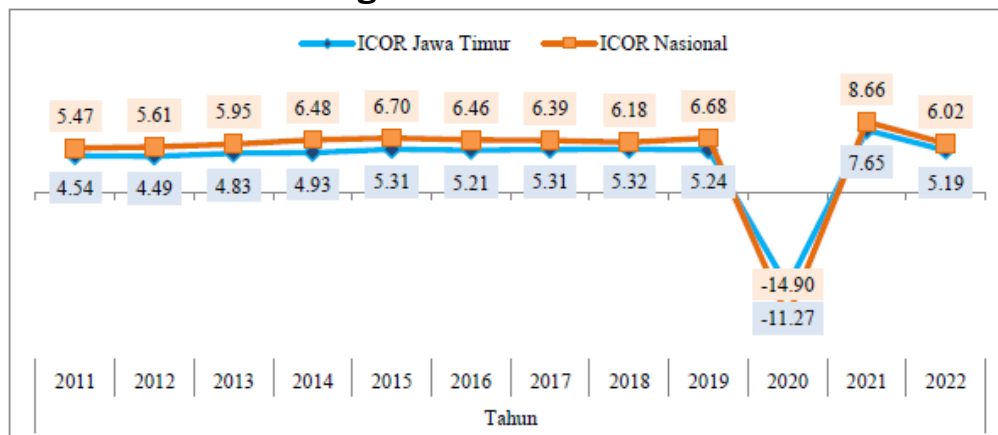
Sementara itu, pada tahun 2020, terdapat penurunan yang cukup besar, bahkan hingga negatif pada nilai ICOR. Secara umum, ICOR bernilai negatif merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19. Adapun, koefisien negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian

barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi output yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan output tahun sebelumnya. Sehingga selisih output antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien ICOR-pun menjadi negatif. Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan output secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/ tidak efisien pada saat itu.

Pada tahun 2021, nilai ICOR menunjukkan nilai yang positif meskipun dengan nilai yang relatif lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya pandemi. Namun, meskipun demikian pada tahun 2022 nilai ICOR Provinsi Jawa Timur telah mengalami perbaikan/penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya bahwa, investasi yang dilakukan pada tahun 2022 memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain itu, nilai ICOR Provinsi Jawa Timur lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Pada tahun 2022, nilai ICOR tingkat nasional mencapai 6,02 lebih tinggi 0,83 poin dibandingkan nilai ICOR di Provinsi Jawa Timur. Bahkan, nilai ICOR Provinsi Jawa Timur secara konsisten berada dibawah nasional. Hal ini menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Timur menawarkan efisiensi yang lebih tinggi dan timbal balik yang lebih menguntungkan.

Gambar 3.14 Perkembangan Nilai ICOR Jawa Timur dan Nasional

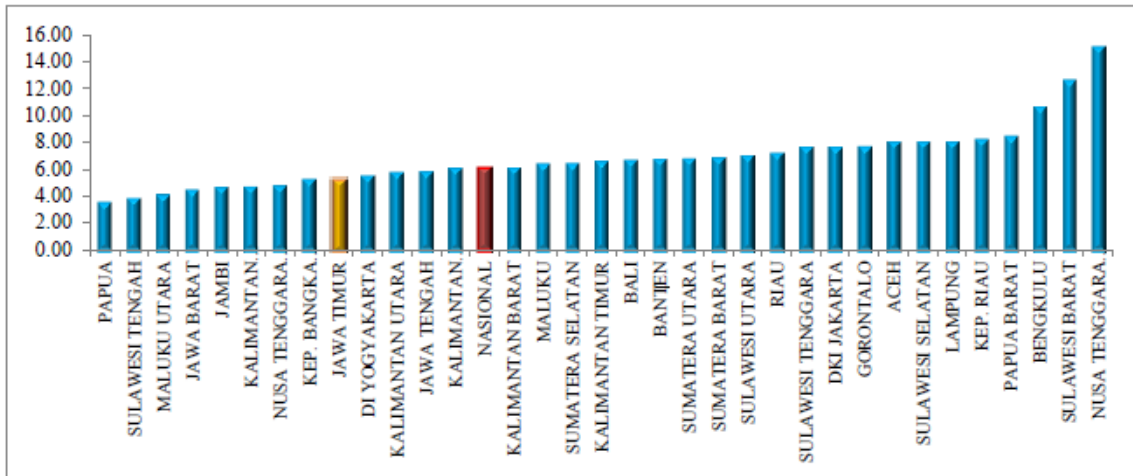


Sumber: BPS (2023), diolah

Disisi lain, ICOR Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 menempati urutan ke-9 atau dengan kata lain masuk dalam 10 besar provinsi dengan nilai ICOR terendah. Sementara itu, di Pulau Jawa pertumbuhan ekonomi Jawa

Timor menempati urutan ke 2 setelah Provinsi Jawa Barat dengan nilai ICOR 4,37.

Gambar 3.14 Perkembangan Nilai ICOR Provinsi Tahun 2022



Sumber: BPS (2023), diolah

Berdasarkan hasil perhitungan nilai ICOR Provinsi Jawa Timur pada Gambar 3.13. berikut hasil simulasi perkiraan kebutuhan investasi Jawa Timur di tahun 2023 dengan menggunakan asumsi target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.

Tabel 3.6 Simulasi Perkiraan Kebutuhan Investasi Jawa Timur Tahun 2023

Target growth	Kebutuhan Investasi Total Jatim 2023 (dlm Trilyun Rp)		
	ICOR=5.3	ICOR=5.5	ICOR=6
3.45%	305.20	316.71	345.51
5.15%	455.59	472.78	515.76

Sumber: FEB Universitas Airlangga (diolah), 2022

Secara umum, Tabel 3.6 menggunakan dua asumsi, yaitu:

- 1) Diasumsikan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 diperkirakan berada dikisaran 3,45 % sampai dengan 5,15 %.
- 2) Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai ICOR Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir (baik itu sebelum adanya pandemi maupun setelah pandemi) serta mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini yang mulai pulih pasca pandemi Covid-19, maka diasumsikan nilai ICOR Jawa Timur pada tahun 2023 berada di kisaran 5,3 sampai dengan 6.

Secara garis besar, beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil simulasi kebutuhan investasi pada Tabel 2.2 adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan sebesar 3,45 persen di tahun 2023, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,3 adalah sebesar Rp 305,20 triliun
 - b. ICOR sebesar 5,5 adalah sebesar Rp 316,71 triliun
 - c. ICOR sebesar 6 adalah sebesar Rp 345,51 triliun
- 2) Kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan sebesar 5,12% di tahun 2023, jika diasumsikan:
 - a. ICOR sebesar 5,20 adalah sebesar Rp 471,59 triliun
 - b. ICOR sebesar 5,25 adalah sebesar Rp 472,78 triliun
 - c. ICOR sebesar 5,30 adalah sebesar Rp 515,75 triliun

Berdasarkan pada hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ICOR maka investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tertentu juga akan semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi ICOR maka semakin tinggi juga tingkat inefisiensi investasi dalam mencapai target-target pertumbuhan ekonomi.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

3.1.4.1 Tantangan Perekonomian 2023

Berbagai capaian positif ekonomi di tahun 2021 kian membawa optimisme keberhasilan Indonesia dalam menggapai keberhasilan pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2023. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi bahan bakar bagi roda perekonomian untuk bergerak maju.

Pasca pandemi keberhasilan program vaksinasi merupakan salah satu formula penting bagi pemulihan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hal ini seolah menegaskan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Dampak vaksinasi tidak hanya bagi penanganan Covid-19 semata, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemulihan ekonomi dari daerah hingga nasional. Harapan pemulihan ekonomi tercipta dengan terbentuknya *herd immunity* melalui vaksinasi. Oleh sebab itu, akselerasi program vaksinasi perlu terus didorong untuk dapat mendukung berbagai program pemulihan ekonomi di setiap daerah.

Pada 2022 juga akan diberlakukan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akan mempengaruhi kerangka fiskal daerah. Pemberlakuan UU HKPD ini akan mengubah formulasi dana alokasi umum (DAU) yang akan diikuti dana-dana transfer yang lain seperti dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID)

maupun dana bagi hasil (DBH) yang akan lebih diarahkan agar mendukung program nasional dan daerah, khususnya mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga DID yang lebih bersifat insentif diarahkan pada transformasi ekonomi baik digital atau kreatif ekonomi yang saat ini menjadi kebutuhan sekaligus mendukung program transformasi struktural perekonomian nasional. Melalui pemberlakuan UU HKPD ini diharapkan daerah memiliki desain untuk mereformasi alokasi sumber daya fiskalnya serta penguatan belanja daerahnya untuk mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Beberapa tantangan lain yang dihadapi di tahun 2023 diantaranya pemulihan ekonomi yang tidak merata, *scaring effect* (kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya) yang menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi tidak optimal, proses akselerasi ekonomi dan keuangan yang semakin cepat serta dorongan untuk implementasi *green economy* serta *climate change*.

Digitalisasi perekonomian melalui optimalisasi teknologi juga perlu terus didorong dengan terus mengembangkan inovasi diantaranya melalui penggunaan *Artificial Intelligence*. Permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak, sumber daya manusia yang kompeten, dukungan infrastruktur serta regulasi yang relevan dan melindungi hak-hak konsumen serta pelaku ekonomi digital.

Shifting ekonomi perlu segera dilakukan untuk segera bangkit dari keterpurukan dengan mengadopsi kebiasaan dan perubahan perilaku selama pandemi. Upaya tersebut diantaranya melalui penataan ulang supply chain dan pemanfaatan kembali lahan-lahan produktif sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan di pedesaan yang cukup tinggi. Sudah selayaknya juga dilakukan levelling daerah-daerah dengan potensi ekonomi lokal khususnya di pedesaan yang memiliki daya ungkit dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi lokal dengan produk-produk unggulan daerah yang dimilikinya. Para pelaku UMKM sebagai bagian dari lokus pengembangan ekonomi lokal juga dituntut untuk lebih adaptif, sehingga produk yang dihasilkan lebih diarahkan ke produk-produk *creative* yang mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.

3.1.4.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Pada keseluruhan tahun 2022, perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur diperkirakan terutama ditopang oleh akselerasi konsumsi RT, konsumsi LNPRRT dan Investasi, serta ekspor LN. Komitmen Pemerintah global, nasional, dan Jawa Timur dalam percepatan vaksinasi Covid-19 diperkirakan mendorong semakin terkendalinya kasus Covid-19 yang berimplikasi pada perluasan pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif. Di Jawa Timur, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam vaksinasi Covid-19 tercermin dari tingginya realisasi vaksin Covid-19 dosis pertama dan dosis kedua di Jawa Timur hingga minggu pertama November 2021. Berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, rata-rata vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur mencapai 200 ribu dosis per hari. Dengan asumsi tersebut, *herd immunity* di Jawa Timur diperkirakan dapat tercapai pada akhir bulan Januari 2022.

Kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2022 juga menjadi pendorong dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, semakin luasnya pembukaan berbagai sektor ekonomi dan berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur sejak awal tahun 2022 juga diperkirakan akan kembali menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat untuk melakukan konsumsi.

Pada tahun 2023 tidak dapat dipungkiri keberhasilan penanganan pandemi masih menjadi kunci proses pemulihan ekonomi. Adanya ancaman varian virus yang baru perlu diperhitungkan karena akan membatasi mobilitas masyarakat serta menurunkan kepercayaan konsumen dan akan menjadi faktor penghambat yang cukup serius dalam akselerasi pemulihan ekonomi. Risiko peningkatan harga (inflasi) yang signifikan di berbagai negara yang didorong oleh gangguan rantai pasok dan kekurangan pasar tenaga kerja juga dikhawatirkan bisa terjadi sehingga mendorong lonjakan inflasi pangan dan energi. Risiko lainnya datang dari perlambatan pertumbuhan ekspor karena permintaan global yang lebih lemah, gangguan pasokan, kekurangan tenaga kerja hingga peningkatan biaya distribusi.

3.1.5 Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Di tengah penanganan pandemi yang berdampak baik dari sisi aspek social dan ekonomi selama tahun 2020 s/d 2022, optimisme baru muncul di 2023. Momentum ekonomi yang sudah rebound di tahun 2021 serta diharapkan mampu terus tumbuh positif di tahun 2022, perlu terus

dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan pemulihan ekonomi. Selain upaya percepatan vaksinasi booster untuk memenuhi target kekebalan kelompok dan penerapan protokol kesehatan, mitigasi kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, safe dan secure dari pandemi juga perlu dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pembangunan infra aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi melalui implementasi project-project strategis nasional khususnya yang mendukung infrastruktur ekonomi (Perpres 80 tahun 2019).
2. Mengatasi *scarring effect* masyarakat dengan melakukan optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah dengan menjaga keseimbangan inflasi harga kebutuhan-kebutuhan pokok, daya beli dan kemampuan konsumsi masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
3. Optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan, melalui dukungan terhadap aktivitas produksi komoditas-komoditas ekspor utama seperti lemak & minyak hewan/ nabati, tembaga, produk-produk kayu, serta ikan dan udang.
4. Sektor Pertanian dengan membangun sumber pertumbuhan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan pola musim panen, antisipasi dampak perubahan iklim, kepastian rantai pasok dan logistic pangan, peningkatan kegiatan padat karya.
5. Penguatan pemulihan sektor riil dilakukan dengan peningkatan kualitas produk UMKM (optimalisasi incubator centre, sertifikasi dan uji produk UMKM), perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan pengawasan KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha KUKM, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi, penguatan SDM KUKM, pengembangan sharing program yang difokuskan pada pemberdayaan KUKM.
6. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diarahkan melalui sertifikasi CHSE produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif menuju pariwisata berkelanjutan dan perluasan lapangan pekerjaan yang didukung pula oleh insentif bagi para pelaku industri pariwisata.

7. Sektor Investasi dengan menarik Investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata, dan infrastruktur.
8. Penurunan kasus Covid-19 serta pemulihan perekonomian negara-negara tujuan ekspor utama Jawa Timur juga disinyalir akan kembali meningkatkan permintaan terhadap ekspor Provinsi Jawa Timur, terutama untuk komoditas-komoditas utama seperti tembaga, emas dan perhiasan, maupun produk-produk pertanian.
9. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi dan pengurangan batasan mobilitas diprediksi akan semakin meningkatkan pendapatan dan konsumsi dari masyarakat yang pada akhirnya mendorong terjadinya pertumbuhan positif sektor Industri pengolahan, Perdagangan, serta penyediaan akomodasi.
10. Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini lebih pada sisi jasa agar didorong untuk lebih ke arah sisi supply dan produksi (e-commerce, inklusi keuangan dll), sehingga digitalisasi ekonomi berperan optimal.
11. Sektor Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Pertambangan melalui optimalisasi desain program penyediaan listrik melalui IR/SR (Intsalasi Rumah/Sambungan Rumah) bagi masyarakat miskin, Pembangunan Biogas, PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) serta percepatan Perijinan Pertambangan.
12. Sektor Industri dan perdagangan diarahkan pada pemulihan produktivitas melalui pelatihan wirausaha baru bagi masyarakat terdampak COVID-19, stabilisasi harga kebutuhan pokok, fasilitasi standarisasi produk IKM (Halal dan SNI), Penguatan promosi dan Misi Dagang, akselerasi industri substitusi impor, peningkatan ekspor khususnya ekspor non migas, peningkatan kapasitas teknologi industri serta pengawasan protokol kesehatan pada sektor industri dan perdagangan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mempertimbangkan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik dari segi perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya. Penanganan Dampak pandemi Covid 19 akan masih berlangsung di tahun 2023 salah satunya dengan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut akan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan dan terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya dalam kondisi saat ini merupakan tantangan yang sangat berat, tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari penerimaan fiskal daerah. Pada saat ini terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal baik APBN maupun APBD akibat pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 akan menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang struktur keuangan daerah, baik penerimaan pemerintah daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena

sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan akan berangsur pulih dampak Pandemi Covid-19.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 selain mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19, juga mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Jawa Timur.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi hanya sejumlah 5 jenis Pajak Daerah, yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dapat dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani

masyarakat atau pelaku usaha, bahkan sebaliknya masyarakat atau pelaku usaha memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2020-2021 dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu Tahun 2022-2023, disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	2023 APBD SIPD Murni	2023 Perubahan RKPD	2024 Target**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN DAERAH	31.631.024.771.618,20	34.280.709.120.323,70	31.904.776.408.087,90	29.848.710.018.940,00	31.294.642.038.966,00	28.458.382.132.277,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.950.996.508.801,00	18.935.885.925.145,60	21.256.683.247.859,50	19.167.287.503.940,00	20.612.147.723.966,00	19.124.293.699.277,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.412.667.226.293,00	15.400.864.401.471,00	17.573.322.019.811,00	16.029.901.333.427,00	17.179.901.333.427,00	15.585.901.333.427,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	84.103.244.969,90	110.950.961.634,00	119.973.645.231,69	86.689.899.845,00	91.490.599.600,00	90.470.521.600,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	417.764.005.747,60	408.640.386.025,80	441.443.929.812,28	458.147.038.568,00	457.751.967.347,00	462.912.863.208,00
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	3.036.462.031.790,53	3.015.430.176.014,81	3.121.943.653.004,57	2.592.549.232.100,00	2.883.003.823.592,00	2.985.008.981.042,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	13.575.794.898.763,20	15.194.249.240.653,00	10.563.739.586.218,00	10.654.290.100.000,00	10.654.290.100.000,00	9.304.789.761.000,00
1.2.1	Trasnfer Pemerintah Pusat	13.575.794.898.763,20	15.186.749.240.653,00	10.496.480.284.218,00	10.654.290.100.000,00	10.654.290.100.000,00	9.304.789.761.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	7.500.000.000,00	67.259.302.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	104.233.364.054,00	150.573.954.525,10	84.353.574.010,32	27.132.415.000,00	28.204.215.000,00	29.298.672.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	104.233.364.054,00	148.231.490.924,92	68.183.208.050,39	27.132.415.000,00	28.204.215.000,00	29.298.672.000,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	2.342.463.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	16.170.365.959,93	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		31.631.024.771.618,20	34.280.709.120.323,70	31.904.776.408.087,90	29.848.710.018.940,00	31.294.642.038.966,00	28.458.382.132.277,00

Keterangan :

* Inputan Perangkat Daerah pada SIPD*

** RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

3.2.2.1 Sumber Pendanaan APBD

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD, b). Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Pendapatan BLUD, b). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, c). Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, d). Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Jasa giro, f). Pendapatan bunga, g) Hasil Kerja Sama Daerah.

Peningkatan penerimaan PAD khususnya Pajak Daerah, dilakukan melalui upaya memaksimalkan (intensifikasi) potensi penerimaan yang sudah ada, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dimana jenis pungutan Pajak Daerah Provinsi bersifat *closed list*. Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah penggalan sumber penerimaan baru dilakukan melalui upaya ekstensifikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Kontribusi sektor Pendapatan Asli Daerah termasuk cukup besar, maka dalam rangka memenuhi target penerimaan pendapatan daerah fokus pemungutan lebih diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena perencanaan target dan kewenangan pemungutannya mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Upaya meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kegiatan intensifikasi sektor pungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), diantaranya penyampaian administrasi perpajakan secara

elektronik, penagihan pajak daerah serta meningkatkan/menambah jumlah titik pelayanan pembayaran pajak. Beberapa model pelayanan yang telah dikembangkan adalah: Samsat Link, Samsat *Drive-Thru*, Samsat Corner, Samsat *Payment Point*, Samsat Mobil Keliling, e-samsat, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Samsat, Samsat Pos, Samsat Kampus, Samsat Koperasi Indonesia (SAMKOPI), serta pengembangan Samsat online lainnya yang dioperasikan bersama dengan mitra swasta, *marketplace*, Lembaga Pembiayaan, BUMDesa, Pondok Pesantren maupun Perbankan.

Sektor Retribusi Daerah memiliki potensi pengembangan pada masa mendatang, hal ini disebabkan masih banyak jenis-jenis pungutan dan struktur tarif yang bisa dikembangkan sesuai dengan pemberian jasa layanan kepada masyarakat dan tentunya hal ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, manfaat langsung kepada masyarakat. Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, masih dimungkinkan peluang untuk pengembangannya (ekstensifikasi) seiring dengan kebutuhan akan jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Retribusi Jasa Usaha. Pengembangan Retribusi Jasa Usaha dilakukan pada jenis-jenis Retribusi yang memberikan jasa berupa manfaat timbal balik kepada masyarakat, sehingga pengenaan Retribusi tersebut tidak membebani masyarakat, bahkan sebaliknya masyarakat memperoleh manfaat langsung dari fasilitas yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penerimaan dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif daerah.

Prediksi penerimaan dari Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan penetapan Pemerintah Pusat melalui alokasi pembagian sementara dan definitif untuk Pemerintah Provinsi oleh Kementerian Keuangan, sehingga penetapan target hanya bersifat koordinatif dan konfirmasi, sedangkan untuk pemetaan potensi obyek pajak tetap dalam kendali Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi hanya melaksanakan fungsi rekonsiliasi/pencocokan kas antara besaran alokasi Pemerintah Pusat dan besaran penerimaan bagian Pemerintah Provinsi. Kondisi ini berlaku pula pada sektor bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam,

sehingga diperlukan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan terkait data bagi hasil penerimaan.

3.2.2.2 Sumber Pendanaan Non APBN dan Non APBD

Kebijakan yang mendukung peningkatan pendanaan Non APBD perlu dilakukan untuk menyikapi adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19, yang diperkirakan oleh IMF akan menyusut menjadi minus 2,5 persen, bahkan menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selama pandemic covid-19 proyeksi ekonomi dunia akan minus 6 sampai minus 7,6 persen, kondisi tersebut menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemunduran standar hidup baik di Negara maju maupun Negara berkembang.

Guna mengatasi keterbatasan pendanaan pembangunan akibat adanya perlambatan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan system pembiayaan untuk infrastruktur strategis seperti pembangunan pelabuhan, Rumah Sakit, Jalan Tol, retribusi umum dan retribusi jasa usaha dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan system pembiayaan tersebut diarahkan kepada :

1) Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

2) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP)

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruh modalnya menggunakan sumber dari badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. keterlibatan swasta bukan hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tapi juga meningkatkan efisiensi operasional serta menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi bagi pengguna akhir.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada saat ini telah diregulasi melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan KPBU, melalui alternative skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Jawa Timur, khususnya bidang infrastruktur publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dilakukan identifikasi terhadap hasil evaluasi kesiapan proyek yang terindikasi dapat diselesaikan pada Tahun 2024 dimana dari 218 proyek yang sudah dibahas bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, terdapat 66 Proyek/Program Prioritas yang akan dilaksanakan sebelum Tahun 2024 seperti pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Proyek/Program Prioritas yang Diselesaikan Tahun 2024

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
1	3	GKS	Pembangunan Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder	Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik	23.797,00	KPBU
2	12	GKS	Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan	Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik	40,00	APBD
3	14	GKS	Pengendalian Banjir Kali Lamong	Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya	1.040,00	APBN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
4	15	GKS	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike	Kab. Lamongan, Kab. Tuban	200,00	APBN
5	17	GKS	Pengembangan KI Sidoarjo Timur (SIERIE dan safe and lock)	Kab. Sidoarjo	4.000,00	SWASTA
6	18	GKS	Pengembangan RKI Jombang	Kab. Jombang	4.000,00	SWASTA
7	19	GKS	Pengembangan KI Tuban (pengembangan KIG)	Kab. Tuban	4.000,00	SWASTA
8	20	GKS	Pengembangan sarana prasarana situs sejarah Trowulan dan pengembangan wisata Perahu Majapahit	Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto	55,00	APBN
9	22	GKS	Pembangunan Fly Over Aloha	Kab. Sidoarjo	438,00	APBN
10	23	GKS	Pembangunan Frontage Road (FR) Waru - Gedangan	Kab. Sidoarjo	278,00	APBN
11	24	GKS	Peningkatan Lingkar Timur Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	108,00	APBN
12	25	GKS	Pembangunan Frontage JL. Akses Bandara Juanda (Sidoarjo)	Kab. Sidoarjo	83,00	APBN
13	29	GKS	Fly Over Gedangan	Kab. Sidoarjo	480,00	APBN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
14	32	GKS	Pembangunan Limbah B3 di Kab. Mojokerto	Kab. Mojokerto	250,00	KPBU
15	34	GKS	Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	Kab. Lamongan	493,00	KPBU
16	43	GKS	Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer / Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik	Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Tuban	511,50	KPBU
17	44	GKS	Peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan	Kab. Lamongan	250,00	APBN
18	52	GKS	Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP)	Kab. Bangkalan	3.000,00	KPBU
19	58	GKS	Pembangunan <i>Fly Over</i> Terminal Teluk Lamong yang terhubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya	Kota Surabaya	1.300,00	APBN
20	59	GKS	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya	Kota Surabaya	213,00	APBN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
21	61	GKS	Pembangunan Jalan Lingkar Tuban	Kab. Tuban	566,28	APBN
22	63	GKS	Pengendalian banjir sungai Bengawan Solo hilir (Kab. Tuban)	Kab. Tuban	845,00	APBN
23	68	GKS	Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko	Kab. Bojonegoro	2.550,00	APBN
24	69	GKS	Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo di Kanor	Kab. Bojonegoro	60,00	APBN
25	71	GKS	Pembangunan Jembatan Ploso	Kab. Jombang	215,00	APBN
26	76	GKS	Pengembangan KI JIPE Gresik	Kab. Gresik	5.000,00	SWASTA
27	1	Madura & Kepulauan	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep	238,10	APBN
28	2	Madura & Kepulauan	Pengadaan Kapal Perintis	Kab. Sumenep	150,00	APBN
29	8	Madura & Kepulauan	Pembangunan floodway Kali Kemuning	Kab. Sampang	1.300,00	APBN
30	21	Madura & Kepulauan	Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Kalianget	Kab Sumenep	150,00	KPBU
31	3	BTS	Pelebaran Jalan Nasional Probolinggo - Lumajang	Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang	454,41	APBN
32	6	BTS	Double Track Surabaya - Surabaya	Kota Surabaya, Kab. Pasuruan,	6.550,00	BUMN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
			Bangil - Malang - Blitar -Kertosono	Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Blitar, Kab. Nganjuk		
33	9	BTS	Revitalisasi pipa SPAM Kab - Kota Probolinggo	Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo	57,48	KPBU
34	15	BTS	Pelebaran Ruas Turen - Batas Kab. Lumajang - Kota Lumajang	Kab. Malang	814,69	APBN
35	25	BTS	Penetapan KEK Pariwisata Singhasari	Kab. Malang	4.000,00	SWASTA
36	27	BTS	Pengembangan Agropolitan Senduro Candipuro - Pasrujambe - Gucialit	Kab. Lumajang	23,00	APBN, APBD dan KPBU
37	28	BTS	Pengembangan Kawasan Pariwisata Senduro Candipuro	Kab. Lumajang	71,00	APBN, APBD dan KPBU
38	29	BTS	Pelebaran jalan Lawean - Sukapura (18,91 KM)	Kab. Probolinggo	139,39	APBN
39	32	BTS	Pengembangan Kawasan Pariwisata Air Terjun Madakaripura	Kab. Probolinggo	10,00	APBN, APBD dan KPBU
40	34	BTS	Pembangunan Gedung dan Kantor BLK, Peralatan	Kab. Probolinggo	50,00	APBN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
			Praktik dan Vokasi BLK			
41	35	BTS	Pembuatan Sudetan dan Normalisasi Kali Welang	Kab. Pasuruan	211,90	APBN
42	42	BTS	Pengembangan RSUD Probolinggo	Kota Probolinggo	195,00	KPBU
43	43	BTS	Pembangunan Kereta Gantung	Kota Batu	300,00	SWASTA
44	47	BTS	Pembangunan Pasar Induk Kota Batu	Kota Batu	200,00	APBN
45	5	Selingkar Ijen	Pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo - Ketapang	Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo	583,52	APBN
46	11	Selingkar Ijen	Pengembangan Eduwisata Alas Purwo, Meru Betiri	Kab. Banyuwangi	10,00	APBN
47	12	Selingkar Ijen	Rencana Pengembangan Pariwisata dan Marina	Kab. Banyuwangi	700,00	KPBU
48	13	Selingkar Ijen	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Banyuwangi (Wongsorejo)	Kab. Banyuwangi	4.068,00	SWASTA
49	14	Selingkar Ijen	Pembangunan Workshop PT INKA di Banyuwangi (Usulan INKA)	Kab. Banyuwangi	14.500,00	BUMN
50	16	Selingkar Ijen	Pembangunan Pariwisata	Kab. Bondowoso	348,00	KPBU

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
			Geopark Ijen Bondowoso			
51	21	Selingkar Ijen	Pengembangan pariwisata kampung kerapu	Kab. Situbondo	50,00	APBN
52	1	Selingkar Wilis	Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Kediri - Tulungagung	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Tulungagung	7.400,00	KPBU
53	3	Selingkar Wilis	Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun	2.250,00	APBN
54	4	Selingkar Wilis	Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi (230,73 KM)	Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi	8.469,00	APBN/ Loan
55	7	Selingkar Wilis	Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek	88,70	KPBU
56	12	Selingkar Wilis	Kab. Kediri	Pembangunan TPA Regional Kediri	600,00	KPBU
57	18	Selingkar Wilis	Pengembangan Minapolitan	Kab. Trenggalek	115,00	APBN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
			Panggul - Ngadipuro - Prigi			
58	21	Selingkar Wilis	Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Jeroan	Kab. Madiun	175,00	APBN
59	25	Selingkar Wilis	Pelurusan (perbaikan geometri) Jalan Nasional Brongkos Karangates (Blitar - Malang)	Kab. Blitar	257,00	APBN
60	27	Selingkar Wilis	Penataan Kawasan Geosite Pantai Klayar, Pantai Srau, Pantai Pancer Dorr	Kab. Blitar	11,50	APBN
61	28	Selingkar Wilis	Pengembangan wisata komplek Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif	Kota Blitar	66,70	APBN
62	36	Selingkar Wilis	Pembangunan Parapet dan Rehabilitasi Pengaman Tebing Sungai Asemgandok	Kab. Pacitan	14,21	APBN
63	37	Selingkar Wilis	Pengembangan Geopark Gunung Sewu	Kab. Pacitan	8,60	APBN

No.	Nomor Dalam Lampiran Perpres	Kawasan	Program/ Proyek	Kabupaten / Kota	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
64	39	Selingkar Wilis	Program Agropolitan Selingkar Wilis	Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	392,50	APBN, APBD dan KPBU
65	40	Selingkar Wilis	Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis	Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	130,00	APBN, APBD dan KPBU
66	44	Selingkar Wilis	Pembangunan & Revitalisasi Pasar Besar, dan Pasar Beran	Kab. Ngawi	102,06	APBN

Sumber : Hasil Evaluasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021

3) Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

4) Corporate Social Responsibility (CSR)

Dinamika lingkungan bisnis dan liberalisasi menuntut Perubahan pola usaha yang berorientasi lebih holistik, berbasis nilai-nilai Good Corporate Governance karena Perusahaan dalam eksistensinya ditengah-tengah masyarakat memerlukan citra yang positif. Untuk itu diperlukan adanya program tanggung jawab sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik didalam Perusahaan. Dari Segi Pemerintah CSR bisa jadi merupakan salah satu solusi yang menguntungkan dan tidak terlalu berisiko sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan

dibandingkan alternatif sumber pembiayaan lain sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Pembiayaan pembangunan semakin lama menjadi kebutuhan yang mendesak dan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas serta masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi alternatif pembiayaan tersebut dengan membentuk Forum CSR Provinsi Jawa Timur yang disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pengelolaan dana CSR yang besar jika diarahkan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah dapat meringankan beban Pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Forum CSR Provinsi Jawa Timur pertama kali dibentuk pada Tahun 2014 dengan 5 Perusahaan hingga pada Tahun 2022 telah berkembang menjadi 46 Perusahaan besar dari BUMS/BUMD/BUMN.

5) Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Internasional disebut juga dengan 'NGO' (*Non Governmental Organization*) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.

6) PINA

Pemerintah mengembangkan skema investasi yang murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek yang telah dilaksanakan dengan metode pembiayaan PINA diantaranya Kertajati International Airport, Konstruksi Nusantara Infrastruktur, Proyek Kabel Fiber Optik oleh PT. Len Industri (Persero), Proyek Toll Road oleh Citra Marga Nusaphala dan Citra Marga Lintas Jabar, Proyek Power Plant oleh PT PP Energi, Proyek Pendanaan Investasi oleh PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), Proyek Toll Road oleh Waskita, Proyek Plantation oleh PT Perkebunan Nusantara III, Islamic Bonds oleh PT PLN, Renewable Energy oleh Nusantara Infrastruktur dan Renewable Energy oleh Carpediem Elektrikal Nusantara.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan besaran pengenaan Pajak Daerah dengan mempertimbangkan harga pasaran umum yang berlaku, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
- c. Menambah jumlah mitra kerja sama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta *marketplace*;
- d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kemudahan dan kecepatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *marketplace*.

- e. Memperbesar kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) melalui media SMS yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;
- f. Melakukan optimalisasi penagihan tunggakan pajak melalui surat penagihan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah;
- g. Menambah moda atau saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;
- h. Mengembangkan sistem tax clearance dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
- i. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- j. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
- k. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus *idle* dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah. Dimana disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Dengan terbitnya regulasi tersebut diatas maka, terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat

terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan-

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023, peruntukannya harus fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;

7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Belanja Daerah Tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya tetap mempertimbangkan dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19*. Sejak tahun 2017, pemerintah telah merubah prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas pengalokasian anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih, sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2023.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
- b. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- c. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- d. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*, DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

- e. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
- f. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi belanja daerah tahun 2020-2021 serta alokasi belanja daerah tahun 2023 maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2022 – 2024 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

No	Uraian	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	2023 APBD SIPD Murni	2023 Perubahan RKPD*	2024 Target**
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	5.457.178.817.483,00	7.563.628.623.810,00	7.295.847.009.639,80	7.228.300.933.398,00	8.998.618.819.929,30	6.895.100.933.398,90
2.4.1.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6	Belanja Bagi Hasil Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	751.665.203.639,00	579.768.555.799,96	699.224.674.666,00	543.138.675.500,00	543.138.675.500,00	726.065.600.000,00

No	Uraian	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	2023 APBD SIPD Murni	2023 Perubahan RKPD*	2024 Target**
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	751.665.203.639,00	579.768.555.799,96	699.224.674.666,00	543.138.675.500,00	543.138.675.500,00	726.065.600.000,00
JUMLAH BELANJA		32.286.757.637.609,30	33.852.938.529.603,60	31.502.993.060.590,80	31.120.677.901.940,00	35.101.790.203.278,40	30.605.239.405.134,00
SURPLUS / (DEFISIT)		-655.732.865.991,04	427.770.590.720,14	401.783.347.497,08	-1.271.967.883.000,00	-3.807.148.164.312,37	-2.146.857.272.857,00

Keterangan :

* Inputan Perangkat Daerah pada SIPD

** RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 2 (dua) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Unaudited)	2023 APBD SIPD Murni	2023 Perubahan RKPD	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PEMBIAYAAN	4.355.766.063.784,83	3.651.610.820.078,86	4.044.541.429.699,13	1.271.967.883.000,00	3.807.148.164.312,37	2.146.857.272.857,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.391.517.489.882,39	3.732.430.883.400,52	4.079.381.410.799,00	1.908.850.350.000,00	4.446.324.786.552,37	2.156.033.895.097,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	4.369.342.489.882,39	3.699.546.154.375,52	4.079.381.410.799,00	1.908.850.350.000,00	4.446.324.786.552,37	1.556.033.895.097,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	22.175.000.000,00	32.884.729.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		4.391.517.489.882,39	3.732.430.883.400,52	4.079.381.410.799,00	1.908.850.350.000,00	4.446.324.786.552,37	2.156.033.895.097,60
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.751.426.097,56	80.820.063.321,66	34.839.981.099,87	636.882.467.000,00	639.176.622.240,00	9.176.622.240,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	35.751.426.097,56	80.820.063.321,66	34.839.981.099,87	6.882.467.000,00	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		35.751.426.097,56	80.820.063.321,66	34.839.981.099,87	636.882.467.000,00	639.176.622.240,00	9.176.622.240,00
PEMBIAYAAN NETTO		4.355.766.063.784,83	3.651.610.820.078,86	4.044.541.429.699,13	1.271.967.883.000,00	3.807.148.164.312,37	2.146.857.272.857,60
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)		3.700.033.197.793,79	4.079.381.410.799,00	4.446.324.777.196,21	0,00	0,00	0,00
Total APBD		32.322.509.063.706,80	33.933.758.592.925,20	31.537.833.041.690,70	31.757.560.368.940,00	35.740.966.825.518,40	30.614.416.027.374,60

Keterangan :

* Inputan Perangkat Daerah pada SIPD

** RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi acuan penyusunan RKPD 2023. Sementara itu Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, menjelaskan titik tekan pembangunan tahun berkenaan berdasarkan Arah Kebijakan dalam RPJMD. Prioritas Pembangunan tahunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, Tema RKP tahun 2023 serta peluang tantangan pembangunan daerah yang fokus pada optimisme pemulihan kondisi ekonomi dan social masyarakat akibat Pandemi Covid-19. Berbagai sector strategis yang akan didorong antara lain; sector perdagangan, industri, jasa, pariwisata dan sector lain yang menunjukkan perkembangan potensial.

Gambar 4.1
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur



Sumber: RPJMD Jatim 2019-2024, diolah

Guna meneguhkan dan mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Daerah Jawa Timur, arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 menjadi bagian integral dari RKPD Tahunan yang disusun dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jawa Timur diakhir Tahun RPJMD 2019-2024.

Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Timur periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Langkah selanjutnya untuk mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur yang berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Jawa Timur yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Jawa Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, serta mengacu pada RKP Tahun Tahun 2023 serta RPJMN 2020-2024 guna menjamin terjadinya keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Matrik Persandingan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
1	2	3	4	5	6				
1	Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.	1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah.	1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	1.1.1.1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan
				1.1.2	Indeks Theil	1.1.2	Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	1.1.2.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
						1.1.3	Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian	1.1.3.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan & Penggalian

NO.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		
1	2	3		4		5		6		
						1.1.4	Meningkatnya Produksi Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.1.4.2	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan	
								1.1.4.3	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Hortikultura	
								1.1.4.4	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Perkebunan (*)	
								1.1.4.5	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (*)	

NO.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4		5		6	
								1.1.4.6	PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penebangan Kayu (Milyar Rupiah)
								1.1.4.7	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan
						1.1.5	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1.1.5.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (Rp. Trilyun)
						1.1.6	Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM	1.1.6.1	Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur
						1.1.7	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	1.1.7.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Pariwisata

NO.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4		5		6	
						1.1.8	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur	1.1.8.1	Persentase Rasio Elektrifikasi
						1.1.9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air	1.1.9.1	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni
								1.1.9.2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
						1.1.10	Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara	1.1.10.1	Indeks Konektivitas
								1.1.10.2	Indeks Akseibilitas

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
1	2	3	4	5	6				
2	Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan memperhatikan Kelompok Rentan.	2.1	Menurunnya Angka Kemiskinan	2.1.1	Persentase Penduduk Miskin	2.1.1	Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan	2.1.1.1	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan
				2.1.2	Indeks Gini			2.1.1.2	Persentase Desa Mandiri
				2.1.2		Meningkatnya Kemandirian PMKS	2.1.2.1	Persentase PMKS yg Mandiri	
		2.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender	2.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2.2.1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	2.2.1.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2.3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	2.3.1	Indeks Pembangunan	2.3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2.3.1.1	Indeks Pendidikan

NO.	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
			n Manusia (IPM)	2.3.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2.3.2.1 Indeks Kesehatan
		2.4 Menurunnya Pengangguran	2.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.4.1 Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat	2.4.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi	3.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	3.1.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	3.1.1.1 Nilai SAKIP 3.1.1.2 Nilai LPPD 3.1.1.3 Nilai Opini BPK 3.1.1.4 Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim

NO.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4		5		6	
	Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.					3.1.2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	3.1.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Timur
						3.1.3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	3.1.3.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan
						3.1.4	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.4.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

NO.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4		5		6	
		3.2	Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat	3.2.1	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	3.2.1	Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	3.2.1.1	Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud
						3.2.2	Meningkatnya Kepedulian Sosial	3.2.2.1	Indeks Kepedulian Sosial
						3.2.3	Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal	3.2.3.1	Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan
								3.2.3.3	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan
4		4.1		4.1.1		4.1.1		4.1.1.1	Indeks Kualitas Air (IKA)

NO.	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
1	2	3		4		5		6	
	Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.		Terwujudnya Pembangunan berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4.1.1.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)
								4.1.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
								4.1.1.4	Indeks Kualitas Air Laut
				4.1.2	Indeks Risiko Bencana (IRB)	4.1.2	Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	4.1.2.1	Indeks Kapasitas Bencana

Penjabaran Visi, Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya menjadi pijakan dalam perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023. Secara lebih detil sasaran pembangunan tahun RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang harus dijadikan pijakan dalam RKPD Tahun 2023 disajikan dalam sub bab Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun 2023 di bawah ini.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas dan Sasaran RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab diatas, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2022 serta Arah Kebijakan pembangunan tahun 2023 yaitu ***Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***. Maka tema yang ditetapkan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu “ ***Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro*** “.

RKPD provinsi Jawa Timur tahun 2023 juga harus memperhatikan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Misi Presiden terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun 2023 antara Provinsi Jawa Timur dengan Nasional.

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diseleraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah terutama diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan yang terdampak Covid-19 dijabarkan sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Keselarasan Tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023

 ARAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023
<i>Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi</i>	<i>Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</i>

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro

Keselarasan antara tema RKP dengan RKPD Provinsi Jawa Timur merupakan manifestasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, tema di atas diterjemahkan dalam prioritas nasional yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2023, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023

SASARAN		SASARAN
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.
	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang	1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan

SASARAN		SASARAN
	<p>berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;</p> <p>2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB Industri pengolahan, (d) kontribusi PDB industri pengolahan, (e) nilai devisa pariwisata, (f) kontribusi PDB Pariwisata, (g) penyediaan lapangan kerja, (h) pertumbuhan investasi, (i) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (j) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (k) rasio perpajakan terhadap PDB.</p>	<p>2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan</p> <p>3. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan & Penggalian</p> <p>4. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</p> <p>5. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal</p> <p>6. Meningkatnya Nilai Tambah KUKM</p> <p>7. Meningkatnya nilai tambah pariwisata</p>
PN 2	<p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p>	<p>Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.</p>

SASARAN		SASARAN
	<p>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks pembangunan Manusia IPM di KTI serta (c) penurunan presentase penduduk miskin KTI</p> <p>2. terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Barat Indonesia dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI</p>	<p>1. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara</p>
PN 3	Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
	<p>1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK)</p> <p>2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial</p>	<p>1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan</p> <p>2. Meningkatnya Kemandirian PMKS</p> <p>3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan</p> <p>4. Meningkatnya Kualitas Pendidikan</p> <p>5. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>6. Menurunnya Pengangguran</p>

SASARAN	SASARAN
<p>3. Terpenuhi terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan Dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) prevalensi stanting (B) insiden tuberkulosis, (c) angka kematian ibu prevalensi obesitas penduduk > 18 Tahun (d) persentase perokok usia 10 - 18 tahun (e) meningkatkan nilai rata - rata PISA (membaca, matematika, sains), (f) rata rata Lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas serta (g) harapan Lama sekolah.</p> <p>4. Meningkatnya kualitas anak perempuan Dan pemuda melalui peningkatan (a) indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) indeks pembangunan gender (IPG) dan, © indeks pembangunan pemuda (IPP).</p> <p>5. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin Dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin Dan rentan yang memiliki aset produktif.</p> <p>6. Meningkatnya produktivitas Dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (B) Jumlah perguruan tinggi yang masuk Dalam Dalam world class University (C) Proporsi pekerja yang bekerja Pada bidang Keahlian menengah Dan tinggi serta (D) peningkatan peringkat global innovation index.</p>	

SASARAN		SASARAN
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indek capaian revolusi mental 2. Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indek pembangunan kebudayaan 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indek pembangunan masyarakat. 4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indek kerukunan umat beragama 5. Meningkatnya ketahan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan 6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepedulian Sosial 2. Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah 5. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 6. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

SASARAN		SASARAN
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (b) pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, peren) © luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen) dan (d) mendorong penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010) 2. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100KM) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) 3. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air 2. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas lingkungan Hidup
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan fokus Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN		SASARAN
	<p>Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Kelembagaan dan penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan fokus Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketahanan Iklim</p> <p>3. Pembangunan Rendah Karbon dengan fokus Pembangunan Energi Berkelanjutan, Pemulihan Lahan Berkelanjutan, Pengelolaan Limbah, Pengembangan Industri Hijau dan Rendah Karbon Pesisir dan Laut</p>	<p>2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana</p>
PN 7	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</p>	<p>Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur</p>
	<p>1. Konsolidasi Demokrasi</p> <p>2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri</p> <p>3. Penegakan Hukum Nasional yang Mantap</p> <p>4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</p> <p>5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional</p>	<p>1. Meningkatnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat</p>

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang terdampak covid-19,

pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Keselarasn Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur Dengan Sasaran
Pembangunan Nasional Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL 2023	TARGET RKPD JAWA TIMUR 2023	TARGET P-RKPD JAWA TIMUR 2023	Keterangan
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,5	4,59 – 6,29	4,59 - 6,29	Tidak Berubah
2	Persentase Penduduk Miskin	7,5 – 8,5	10,13 – 9,10	10,77 - 10,08	Perubahan target 2023 kembali ke angka RPJMD P dikarenakan prediksi resesi global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur
3	Indeks Gini	0,375 – 0, 378	0,3038 – 0,3690	0,3038 - 0,3690	Tidak Berubah
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49	72,44 – 73,57	72,44-73,57	Tidak Berubah
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0	5,41 - 3,82	5,41-3,82	Tidak Berubah

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Mengacu pada berbagai uraian di atas, maka prioritas Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut.


Bhakti 1
JATIM
SEJAHTERA

**Mengentaskan
 Kemiskinan menuju
 Keadilan dan
 Kesejahteraan Sosial**



Kebijakan Bhakti 1 difokuskan untuk mengatasi persoalan dasar masyarakat Provinsi yaitu kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Fokus utama dari bhakti ini adalah berupa **Program Keluarga Harapan Plus**. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat dilakukan percepatan terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Fokus selanjutnya dari Bhakti ini adalah mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi Jawa Timur. Penanganan PMKS sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan secara inklusif.


Bhakti 2
JATIM
KERJA

**Memperluas Lapangan
 Pekerjaan dan
 Membangun
 Keunggulan Ekonomi**



Kebijakan Bhakti Jatim Kerja akan fokus pada *Millineal Job Center* dengan cara memberikan *job training*, pendidikan vokasi, membantu *starting-up* usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha. **Program Dream Team Science Techno Park** (STP) dengan sasaran 5-10 anak SMK dan 2-4 anak D3/S1, membentuk STP bagi kelompok rintisan usaha di berbagai daerah. Kemudian **Belanja Inovasi Daerah (Belanova)**, memberikan jaminan bagi produksi dan distribusi produk-produk inovasi anak muda melalui informasi super koridor di 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023, program ini menjadi penopang pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

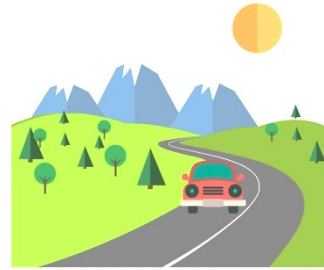


Kebijakan Bhakti Jatim Cerdas dan Sehat yaitu pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata). Penguatan BOSDA MADIN, bantuan operasional daerah Madrasah Diniyah. Memberikan akses pendidikan berbasis pesantren bagi anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak yatim dan anak yatim piatu yang kurang mampu.

Selanjutnya, komitmen kesehatan berkualitas untuk semua. Program Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan perdesaan. Memperkuat RSUD dan memperkuat RSUD rujukan di 5 koridor. Rumah Sakit terapung untuk pelayanan kesehatan di daerah kepulauan terdepan serta mendorong ketersediaan ruang laktasi. Layanan Kesehatan Gratis Berkualitas TANTISTAS merupakan program yang disiapkan untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari Santri Jatim Sehat Berkah dan Bunda Impian. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) Kegiatan Pendampingan Poskestren untuk meningkatkan kualitas Poskestren dan penerapan PHBS oleh warga pondok pesantren dan sekitarnya. Kegiatan pendampingan Poskestren dilakukan oleh seorang kader mitra yang ditunjuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan suatu surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Poskestren dan pembudayaan PHBS dengan cara memantau penyelenggaraan, membina, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Poskestren.


Bhakti 4
JATIM
AKSES

**Membangun
 Infrastruktur dalam
 Rangka Pengembangan
 Wilayah Terpadu dan
 Keadilan Akses bagi
 Masyarakat Pesisir dan
 Desa Terluar**



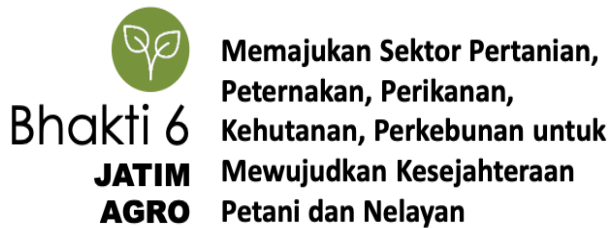
Kebijakan Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.


Bhakti 5
JATIM
BERKAH

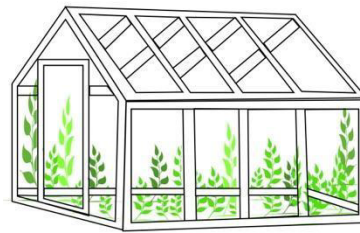
**Membangun Karakter
 Masyarakat yang Berbasis
 Nilai-nilai Kesalehan
 Sosial, Budi Pekerti Luhur
 dan Berintegritas**



Kebijakan Bhakti ini bertujuan untuk memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Kemudian perluasan tunjangan kehormatan bagi hafidz-hafidzoh. Memberikan insentif bagi penguatan peran pondok pesantren dalam mendorong partisipasi sekolah dan beasiswa guru diniyah S2. Juga membangkitkan kesetiakawanan sosial, kepahlawanan dan keperintisan. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus.



**Memajukan Sektor Pertanian,
Peternakan, Perikanan,
Kehutanan, Perkebunan untuk
Mewujudkan Kesejahteraan
Petani dan Nelayan**



Kebijakan Bhakti ini merupakan sebuah komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani. Pertanian dalam hal ini mencakup definisi yang luas, dimana didalamnya termasuk perikanan dan peternakan. Kebijakan perikanan mencakup budidaya baik tawar maupun laut (*aquaculture*) serta perikanan tangkap. Dalam kaitan dengan budidaya air tawar maupun laut, peningkatan produktivitas diawali dengan penyediaan benih yang berkualitas, jelas asal usulnya (*traceable*), dan ini dicapai dengan mendorong tersedianya benih bersertifikat secara memadai. Benih yang unggul akan mengurangi secara signifikan risiko penyakit pada ikan budidaya.

Kebijakan Jatim Agro juga menjadi dasar dalam tindak lanjut penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur yang mulai merebak sejak awal Mei 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah sigap dan segera melakukan upaya menanggulangi penyebaran wabah PMK antara lain melalui penerbitan regulasi, pengendalian mobilitas ternak, penanganan medis veteriner ternak terjangkau, diseminasi informasi dan komunikasi dengan masyarakat, dan pelaksanaan vaksin PMK yang akan dilaksanakan melalui mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bencana non alam serta belanja reguler dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat serta kolaborasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/kota, jajaran Forkopimda, perguruan tinggi dan seluruh stakeholder bekerja bersama-sama dan bersinergi dalam upaya membebaskan Jawa Timur dari wabah PMK.

Implementasi Jatim Agro juga dilaksanakan melalui sinergitas kegiatan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan karakteristik wilayah regional pada Dinas pelaksana urusan Pertanian.



Kebijakan Bhakti ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

Adapun pokok-pokok kegiatan dalam kebijakan restorasi desa, antara lain:

- a. Penataan aparatur Desa yang memadai dan professional;
- b. Diversifikasi usaha seperti pertanian, wisata, kuliner, budaya, kerajinan, dan lain-lain;
- c. Peningkatan Kelembagaan Desa melalui koperasi Rakyat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan BUMDesa yang merawat nilai kekeluargaan dan gotong-royong Rakyat desa;
- d. Memberdayakan Lembaga Keuangan Desa serta BUMDesa dan agar petani dan UKM tidak mengakses kredit usaha dari pengijon dan tengkulak dengan bunga puluhan persen per bulan;
- e. Pembinaan mata-rantai tata niaga produk desa ke pasar / Konsumen;
- f. Pengembangan riset, teknologi dan sains yang melayani kebutuhan desa dan memecahkan masalah perdesaan;
- g. Perawatan ekologi sehat desa-desa; dan
- h. Pengembangan holtikultura yang tidak membutuhkan lahan luas;

Sedangkan pokok – pokok kegiatan dalam peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM antara lain :

- a. Pembentukan jaringan rantai pasok baik produksi maupun pemasaran antar koperasi dan UMKM (*Supply demand channel*);
- b. Penguatan kemitraan Koperasi UMKM dengan BUMDesa;
- c. Pengembangan satu produk unggulan Koperasi atau UMKM di satu wilayah dengan satu merk (*communal branding*);
- d. Pengembangan koperasi perempuan, petani, dan nelayan;
- e. Penguatan daya saing produk yang dihasilkan oleh pondok pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP);
- f. Perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM melalui penguatan perdagangan antar pulau; dan
- g. Mendorong pemanfaatan digitalisasi oleh Koperasi dan UMKM



**Menyelenggarakan
Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Transparan dan Anti
Korupsi**



Kebijakan Jatim Amanah merupakan elemen kunci dalam Nawa Bhakti Satya, dimana pemerintahan yang bersih dan anti korupsi menjadi sebuah komitmen mendasar. Secara umum, potensi anti korupsi ditemukan dalam dua kelompok besar, yaitu dalam penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan. Penerapan sistem elektronik dan transaksi non tunai akan meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pendapatan daerah. Pada sisi pembelanjaan, maka penerapan *e-planning*, *e-budgeting*, akan menciptakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga meminimalisir potensi terjadinya kolusi dalam penganggaran. Komitmen untuk menjalankan Musrenbang akan turut mendorong secara bersamaan transparansi dan pembangunan partisipatif.



**Mewujudkan Harmoni
Sosial, Alam dan Lingkungan
Hidup serta Melestarikan
Kebudayaan dan
Mengembangkan Budaya
Olah Raga**



Jatim Harmoni dalam Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan *eco-tourism* tingkat Internasional, integrasi museum perpustakaan dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, *clean industries*, *green city*, *halal tourism*.

Selanjutnya difokuskan pada penguatan literasi sosial berbasis tradisi dan kearifan lokal, antara lain: dialog antarbudaya dan penguatan harmoni sosial, (seni, seniman dan budayawan); inventarisasi data budaya dan kearifan lokal serta mendukung festival desa. Memajukan prestasi olahraga, meningkatkan kesejahteraan dan pemberian beasiswa atlet berprestasi nasional dan internasional.

Pemetaan Program Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	1.970.831.048.972	520.206.151.896	Dinas Pendidikan
		Bhakti 5 - Jatim Berkah	1.850.000.000	395.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Bhakti 7 - Jatim Berdaya	2.131.092.534	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	3.300.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah	1.978.112.141.506		
2	Kesehatan	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	310.846.013.000	588.025.196.904	Dinas Kesehatan
		Jumlah	310.846.013.000		
3	Infrastruktur	Bhakti 4 - Jatim Akses	2.102.117.400		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Bhakti 4 - Jatim Akses	150.365.839.235	176.709.553.283	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
		Bhakti 4 - Jatim Akses	48.017.197.000	196.622.132.374	Dinas Perhubungan
		Bhakti 4 - Jatim Akses	64.642.970.000	227.371.124.424	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		Bhakti 4 - Jatim Akses	47.265.437.871	139.857.428.107	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
		Bhakti 8 - Jatim Amanah	1.310.000.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	335.699.500		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	12.010.397.000	8.432.689.400	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah	326.049.658.006		
4	Ekonomi	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	2.206.500.000	2.206.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	425.000.000	425.000.000	Dinas Perkebunan
		Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	600.000.000	600.000.000	Dinas Peternakan
		Bhakti 2 - Jatim Kerja	493.000.000	1.173.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Bhakti 2 - Jatim Kerja	300.000.000	300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
		Bhakti 4 - Jatim Akses	10.000.000.000	10.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Bhakti 6 - Jatim Agro	25.781.573.000	5.838.153.789	Dinas Kehutanan
		Bhakti 6 - Jatim Agro	120.103.426.450	120.103.426.450	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Bhakti 6 - Jatim Agro	17.836.627.000	17.836.627.000	Dinas Perkebunan
		Bhakti 6 - Jatim Agro	375.000.000	375.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Bhakti 6 - Jatim Agro	10.418.000.000	10.418.000.000	Dinas Peternakan
		Bhakti 7 - Jatim Berdaya	7.437.208.333	27.840.525.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		Bhakti 7 - Jatim Berdaya	10.000.000.000	12200000000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	700.000.000	20.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	30.086.680.069	30.086.680.069	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	12.303.500.000	15.750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah	249.066.514.852		
5	Pemerintahan	Bhakti 5 - Jatim Berkah	40.300.000.000	62.750.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Bhakti 8 - Jatim Amanah	2.597.812.023	2.597.812.023	Badan Penelitian Dan Pengembangan
		Bhakti 8 - Jatim Amanah	10.920.093.000	10.920.093.000	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Bhakti 8 - Jatim Amanah	4.700.000.000	4.700.000.000	Biro Organisasi
		Bhakti 8 - Jatim Amanah	354.000.000	354.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	1.160.000.000	.160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	17.524.250.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah	77.556.155.023		

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
6	Sosial	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	161.934.827.676		Dinas Sosial
		Bhakti 2 - Jatim Kerja	30.251.038.015	29.857.138.218	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	795.929.720	2.015.072.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
		Bhakti 5 - Jatim Berkah	636.240.000	698.240.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
		Bhakti 5 - Jatim Berkah	2.951.269.950		Dinas Sosial
		Bhakti 7 - Jatim Berdaya	35.446.542.000	8.736.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	18.267.000.000	27.123.273.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	846.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023		Pagu Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023	Perangkat Daerah
	Bidang	Nawa Bhakti			
1	2	3	4	5	6
		Bhakti 9 - Jatim Harmoni	2.121.837.027		Dinas Sosial
		Jumlah	253.250.684.388		
	TOTAL		3.194.881.166.775		

Selanjutnya pemetaan Prioritas Pembangunan di atas menjadi dasar dalam penurunan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan di dokumen perencanaan perangkat Daerah (PD)

4.2.3 Kebijakan Pendukung Prioritas Nasional tahun 2023

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional tahun 2023, maka kebijakan teknis/operasional yang dilakukan Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

4.2.3.1 Kebijakan Pencapaian Target SPM

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar menjadi perhatian utama pemerintah mengingat fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan bagi masyarakat. Dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara cukup dan berkesinambunga dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau dan tepat sasaran maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM inilah yang menjadi tolak ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan, sekaligus alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Untuk melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Pemerintahan telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga teknis dalam menyusun standar teknis penerapan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. Berikut merupakan kebijakan implementasi SPM yang akan dilakukan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Kebijakan Standar Pelayanan Minimum
Provinsi Jawa Timur

NO	URUSAN	KEBIJAKAN
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fokus kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Menengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Yaitu warga negara yang berusia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan jangkauan pendidikan khususnya pada Pendidikan Khusus, yaitu Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

NO	URUSAN	KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di kabupaten dan kota lingkup provinsi Jawa Timur.
3	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota. ▪ Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota
4	Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di lingkup provinsi ▪ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat lingkup provinsi
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti ▪ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti. ▪ Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti. ▪ Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti. Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti ▪ Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah provinsi. Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan

NO	URUSAN	KEBIJAKAN
		jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Target Alokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Target Alokasi Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No	Bidang Pengampu SPM	Target 2023	Target Perubahan 2023
1	Pendidikan	1.703.074.570.109,00	657.325.740.336,00
2	Kesehatan	818.646.000,00	818.646.000,00
3	Pekerjaan Umum	35.325.836.000,00	101.246.686.707,00
4	Perumahan Rakyat	600.000.000,00	661.920.000,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00
6	Sosial	92.989.045.751,00	92.989.045.751,00
TOTAL		1.832.858.097.860,00	853.092.038.794,00

4.2.3.2 Kebijakan Pencapaian Target SDGs

Kebijakan untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain sebagai berikut.

1. Perluasan Penggunaan Teknologi.

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi

informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Provinsi Jawa Timur akan mencoba merancang aplikasi pemantauan data capaian SDGs dimana dengan memanfaatkan teknologi dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Kemitraan Multipihak.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan menjadi dasar kerangka kerjasama antar multi pihak dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur dimana akan melibatkan setiap unsur baik pemangku kebijakan maupun non pemangku kebijakan.

3. Penguatan Koordinasi.

Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak

dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Bappeda akan berencana melakukan penguatan kapasitas kesekretariatan SDGs Provinsi Jawa Timur dimana akan dilakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Peningkatan Kapasitas.

Guna melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Pelaksanaan Capacity Building menjadi salah satu cara peningkatan kapasitas dari para pemangku kebijakan baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dengan demikian pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana dengan baik.

5. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.

SDGs Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs sehingga dengan pemberian penghargaan ini dapat menimbulkan motivasi serta tanggungjawab dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Penguatan Strategi Komunikasi.

Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Provinsi Jawa Timur akan melakukan kerjasama dengan

media untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai SDGs dan pencapaiannya sehingga seluruh masyarakat bisa memahami dan bisa bersama memantau pelaksanaan tujuan.

4.2.3.3 Kebijakan Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan kebijakan pembangunan yang memuat tentang ketentuan penyusunan rencana kerja kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional dan daerah yang tidak hanya berorientasi pada bidang-bidang pelaksana Rencana Aksi Nasional (RAN) /Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca (GRK) tetapi juga turut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan target-target pembangunan sektoral dan kewilayahan jangka menengah dan jangka panjang. Secara khusus, melalui implementasi PPRK Pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai target penurunan emisi GRK sebagaimana ditetapkan pasca pertemuan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada COP (Conference of The Parties) ke 21 di Paris tanggal 30 November - 11 Desember 2015 dari 26% dengan usaha sendiri pada Tahun 2020 menjadi 29% dengan usaha sendiri pada Tahun 2030.

Sebagai dukungan terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK secara nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara berkala melakukan aksi pembangunan rendah karbon yang dilakukan melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Indonesia (AKSARA) (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>). Beberapa arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah:

1. Peningkatan harmonisasi dan sinergitas program/kegiatan prioritas antara Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan PPRK;
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara PD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi pengampu bidang-bidang pelaksana RAN/RAD GRK, yaitu pertanian, kehutanan, energi, industri dan pengelolaan limbah dalam pelaksanaan kegiatan inti maupun pendukung penurunan emisi GRK;
3. Peningkatan peran serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan aksi pembangunan rendah karbon sesuai dengan

kewenangan masing – masing dan melaporkannya pada AKSARA secara berkala;

4. Peningkatan peran swasta dalam pelaksanaan aksi pembangunan rendah karbon sesuai dengan kewenangan masing – masing dan melaporkannya pada AKSARA secara berkala.

4.2.3.4 Kebijakan Pencapaian Target Pangan dan Gizi

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) menjadi perhatian strategis baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan pangan dan gizi memiliki sasaran yang paling penting dalam pembangunan, yaitu sumber daya manusia. Rencana Aksi pangan dan gizi kurang memberikan daya ungkit yang signifikan jika tidak dilakukan secara kolaboratif, integrative, dengan pendekatan multisektor. Dalam konteks pembangunan secara lebih luas, rencana aksi, pangan dan gizi juga memiliki kontribusi sangat baik dalam rangka implementasi TPB / SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals), terutama dalam tujuan mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera (Goal 3. *Good health and well-being*) yaitu tanpa adanya kelaparan dan kemiskinan (Goal 1. *No poverty* and Goal 2. *Zero hunger*). Di sisi lain, upaya intervensi pemerintah dalam pangan dan gizi dilakukan dengan pendekatan multisektor menunjukkan adanya implementasi dari penguatan partnership dalam pencapaian tujuan (Goal 17. *Partnership for the goals*). Penanganan pangan dan gizi memang dominan aspek kesehatan dan juga aspek ketahanan pangan. Namun demikian, dalam kaitan dengan kesehatan, aspek yang sensitif terhadap gizi memerlukan intervensi dari sisi diseminasi informasi untuk penguatan pengetahuan tentang pangan dan gizi, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, dan aspek terkait lainnya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan (Goal 4. *Quality education*), peningkatan ketersediaan air bersih dan sanitasi (Goal 6. *Clean water and sanitation*). Intervensi yang bersifat sensitive lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Ini berarti menyangkut optimalisasi pengelolaan sumberdaya (Goal 13. *Climate action*, Goal 14. *Life below water*, dan Goal 15. *Life on land*). Sinkronisasi program antar OPD di Jawa Timur sangat penting dilakukan sehingga juga perlu diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi Jawa Timur.

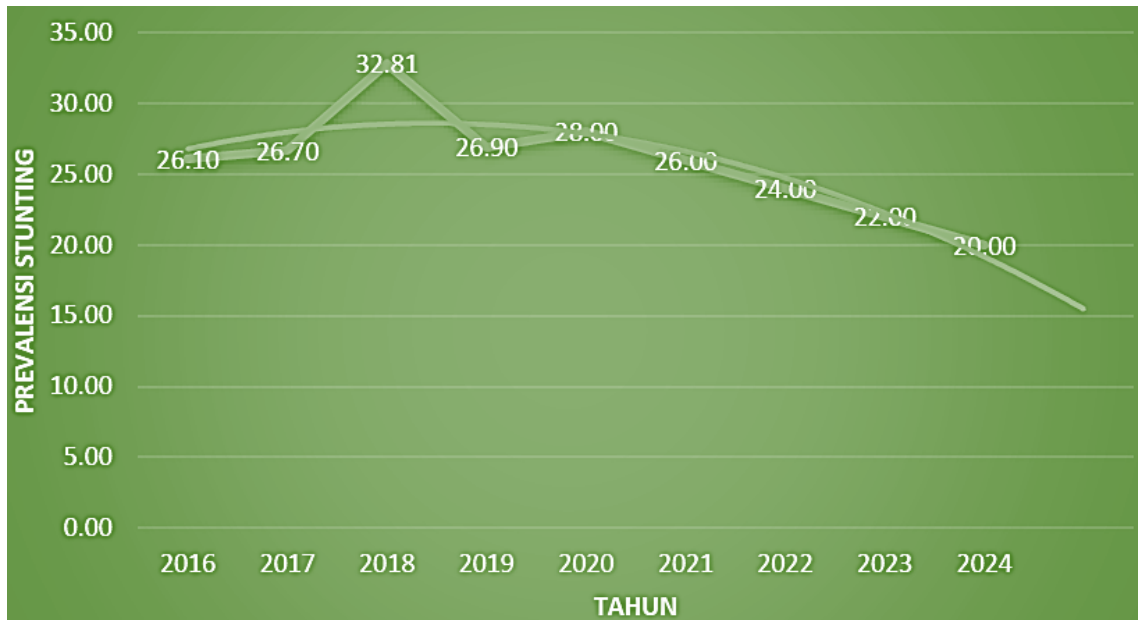
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan lima pilar sebagai pendekatan kunci konvergensi pencapaian indikator tujuan RAD-PG, yaitu:

a. Pilar 1 - Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:	1. Promosi dan pendidikan gizi masyarakat
	2. Pemberian suplementasi gizi
	3. Pelayanan kesehatan dan masalah gizi
	4. Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi
	5. Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi
	6. Pendidikan anak usia dini
b. Pilar 2 - Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:	1. Produksi pangan dalam negeri
	2. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
	3. Distribusi pangan
	4. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein dan vitamin
	5. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi
c. Pilar 3 - Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:	1. Pengawasan regulasi dan standar gizi
	2. Pengawasan keamanan pangan segar
	3. Pengawasan keamanan pangan olahan
	4. Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum
	5. Promosi keamanan pangan
d. Pilar 4 - Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:	1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
	2. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
	3. Penyediaan air bersih dan sanitasi
	4. Penerapan kawasan tanpa rokok
	5. Penerapan perilaku sehat
e. Pilar 5 - Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:	1. Perencanaan pangan dan gizi
	2. Penguatan peranan lintas sektor
	3. Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi
	4. Pelibatan pemangku kepentingan
	5. Pemantauan dan evaluasi
	6. Penyusunan dan penyampaian laporan

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan dimaksud, disusun indikator tujuan utama RAD-PG.

Tabel 4.8
Indikator Tujuan Utama Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Dasar 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Energi	KKal/kap/hari	2357	2357	2400	2400	2400	2400
Ketersediaan Protein	Gr/kap/hari	62	62	63	63	63	63



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

4.2.3.5 Kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah **US \$ 1,9 PPP** (Purchasing Power Parity). PPP dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara. Garis kemiskinan Ekstrem Jawa Timur Tahun 2021 sebesar **358.232,6** Rupiah/Kapita/bulan (konversi dari 1,9 \$PPP) atau Rp 11.941,1 /kapita/hari. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut persentase kemiskinan ekstrem Jawa Timur sebesar 4,4 Persen dari total penduduk Jawa Timur (absolut 1.746.990 jiwa).

Persentase penduduk miskin ekstrim Jawa Timur lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional. Nasional sebesar 4 Persen dan Jawa Timur sebesar 4,4 persen. Jumlah penduduk miskin Jawa Timur, Maret 2021 sebesar 4.572.730 jiwa, sedangkan penduduk miskin ekstrem sebesar 1.746.990 jiwa atau sekitar 38,20 persen dari total jumlah penduduk miskin Jawa Timur.

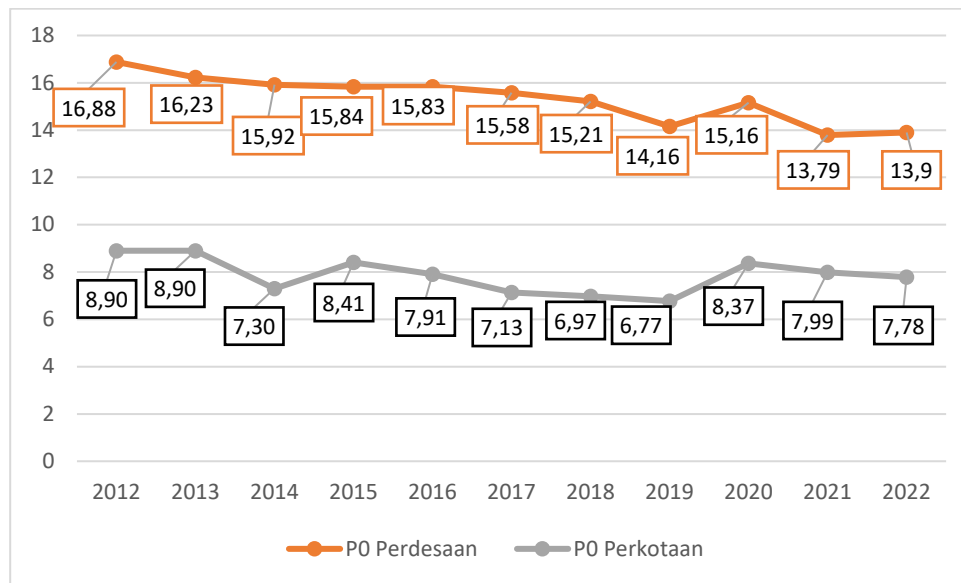
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan kebijakan nasional, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang memberikan arahan : “agar kemiskinan ekstrem (*Extreme Poverty*) pada tahun 2024 dapat mencapai 0 persen”. Menindaklanjuti kebijakan tersebut maka telah disusun roadmap penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut.

Pada tahap awal (2021) lokus penghapusan kemiskinan ekstrem diprioritaskan di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menjadi lokus prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2021 adalah Provinsi Jawa Timur, dengan prioritas 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan. Sedangkan tahap kedua (tahun 2022) lokus prioritas nasional adalah 212 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Jawa Timur sebanyak 25 Kabupaten/Kota (termasuk 5 kabupaten tahun 2021). Lokus penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

4.2.3.6 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan

Secara time series 10 tahun terakhir (periode 2011-2021) angka kemiskinan Jawa Timur menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan. Pada tahun 2012 persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 13,08 persen (4,992 juta jiwa) dan secara bertahap mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 10,49 persen (4,236 juta jiwa). Tahun 2020, angka kemiskinan Jawa Timur sempat mengalami kenaikan sebesar 1,26% sebagai dampak dari Pandemi COVID 19 dari 10,20% (4.056.000 jiwa) tahun 2019 menjadi 11,46% (4.585.970 jiwa) pada tahun 2020. Dalam sepuluh tahun tersebut persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 2,59 persen atau 756 ribu jiwa atau rata-rata penurunan persentase penduduk miskin Jawa Timur per tahun sebesar 0,259% atau 75,6 ribu jiwa. Meskipun menunjukkan tren yang semakin menurun, namun capaian persentase penduduk miskin Jawa Timur masih lebih tinggi dari capaian nasional. Secara jumlah, penduduk miskin Jawa Timur merupakan yang tertinggi nasional, sedangkan secara persentase berada pada peringkat 16 dari 34 provinsi di Indonesia.

**Gambar 4.2 Persentase Penduduk Miskin Pedesaan dan Perkotaan
Tahun 2011-2021**



Secara kewilayahan, kantong kemiskinan Jawa Timur ada di pedesaan. Data Susenas BPS, September 2022, kemiskinan pedesaan Jawa Timur sebesar 13,90 persen (2.484.010 jiwa), sedangkan kemiskinan perkotaan tahun 2022 sebesar 7,78 persen (1.752.50 jiwa). Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan pedesaan Jawa Timur hampir dua kali lipat dari kemiskinan perkotaan. Untuk itu fokus penanggulangan kemiskinan Jawa Timur adalah penanggulangan kemiskinan pedesaan.

4.2.4 Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa timur diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023, disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Penelaahan Pokok - Pokok Pikiran DPRD

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
1		BANTUAN ALAT MESIN PERTANIAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Trenggalek	1
2		BANTUAN ALAT PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PRODUK PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN	Kab. Bondowoso	1
		BANTUAN ALAT PERTANIAN PRA DAN PASCA PANEN	DINAS PERKEBUNAN	Kab. Malang	1
			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Blitar	2
				Kab. Lamongan	6
				Kab. Mojokerto	1
			Kab. Probolinggo	2	
3		BANTUAN BENIH DAN PUPUK, INFRASTRUKTUR (JARINGAN IRIGASI, dsb)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	Kab. Sumenep	1
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Mojokerto	1
				Kab. Ponorogo	1
4		BANTUAN BIBIT/BENIH PERKEBUNAN DAN ALAT PERTANIAN (KONSERVASI)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Sumenep	1
5		BANTUAN FASILITASI DAN REVITALISASI TAMBAK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Sampang	1
6			DINAS PETERNAKAN	Kab. Bojonegoro	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
		BANTUAN INDUKAN, BIBIT, PAKAN DAN BENIH PETERNAKAN		Kab. Bondowoso	1
				Kab. Malang	4
				Kab. Tuban	1
7		BANTUAN MODAL USAHA PETERNAKAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Jember	1
				Kab. Ngawi	1
			DINAS PETERNAKAN	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Gresik	1
				Kab. Jember	1
				Kab. Lumajang	3
				Kab. Ponorogo	1
				Kab. Sampang	2
				Kab. Tuban	1
8		BANTUAN PAKET BUDIDAYA (SIDAT, UDANG, RUMPUT LAUT, KERAPU, BANDENG, LELE BIOFLOK)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Blitar	1
				Kab. Lamongan	1
				Kab. Ngawi	1
9		BANTUAN PAKET PEMBENIHAN IKAN (NILA, IKAN HIAS, LELE)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Jember	1
				Kab. Lamongan	1
				Kota Blitar	1
10		BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN	Kab. Malang	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
11		BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI / YAYASAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bondowoso	3
				Kab. Situbondo	11
12		BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENANGKAPAN IKAN (MESIN, JARING, BUBU, GPS FISHFINDER, PERAHU)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Gresik	1
				Kab. Lamongan	1
				Kab. Sampang	6
13		MODAL PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK MASYARAKAT UMKM SEKTOR NON PERTANIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kab. Bondowoso	2
				Kab. Gresik	1
				Kab. Lamongan	3
				Kab. Lumajang	2
				Kab. Malang	1
14		MODAL PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI SEKTOR RIIL	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kab. Malang	1
15		PAVINGISASI JALAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Gresik	3
				Kab. Jember	54
				Kab. Lumajang	8
				Kab. Pacitan	2
				Kab. Pamekasan	4
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Situbondo	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Sumenep	1
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Gresik	2
				Kab. Jember	3
				Kab. Lumajang	1
16		PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG FASILITAS UMUM PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Jember	1
				Kab. Lamongan	1
17		PEMBANGUNAN BANGUNAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA (PAUD, TK, KB DAN SEKOLAH ISLAM SWASTA, RA, MI, MTS, MA, SEKOLAH TINGGI ISLAM SWASTA, TPQ)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Banyuwangi	1
				Kab. Bojonegoro	1
				Kab. Gresik	16
				Kab. Jember	4
				Kab. Kediri	3
				Kab. Lamongan	16
				Kab. Lumajang	15
				Kab. Magetan	1
				Kab. Malang	8
				Kab. Nganjuk	1
				Kab. Ngawi	1
Kab. Pasuruan	2				

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Ponorogo	2
				Kab. Probolinggo	4
				Kab. Sampang	1
				Kab. Sidoarjo	4
				Kab. Situbondo	8
				Kab. Tuban	3
				Kab. Tulungagung	1
				Kota Malang	1
				Kota Surabaya	1
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Lamongan	1
18		PEMBANGUNAN FASILITAS OLAH RAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Lamongan	1
				Kab. Mojokerto	1
19		PEMBANGUNAN FASILITAS SEKOLAH (JENJANG SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN KHUSUS-PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS)	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Jember	2
				Kab. Malang	1
				Kab. Sidoarjo	1
20		PEMBANGUNAN GEDUNG KEAGAMAAN LAINNYA	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Lamongan	1
				Kab. Lumajang	4
				Kab. Malang	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Situbondo	1
21		PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Jember	1
				Kab. Malang	1
22		PEMBANGUNAN GEDUNG ORGANISASI / YAYASAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lamongan	1
				Kab. Lumajang	2
				Kab. Magetan	2
				Kab. Malang	1
				Kab. Pacitan	3
				Kab. Pamekasan	2
				Kab. Ponorogo	3
				Kab. Probolinggo	1
				Kab. Sampang	1
				Kab. Trenggalek	1
				Kab. Tuban	1
				Kota Malang	1
				Kota Surabaya	2
23		PEMBANGUNAN GEDUNG PONDOK PESANTREN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kediri	1
				Kab. Lamongan	2

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Lumajang	2
				Kab. Magetan	1
				Kab. Pacitan	1
				Kab. Ponorogo	1
				Kab. Probolinggo	4
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Tuban	1
24		PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (PAVING, RABAT, BETON, MAKADAM)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	4
				Kab. Bondowoso	2
				Kab. Jember	7
				Kab. Lumajang	9
				Kab. Malang	2
				Kab. Pacitan	3
				Kab. Pamekasan	1
				Kab. Ponorogo	1
				Kab. Sampang	6
25		PEMBANGUNAN JALAN MAKADAM DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	15
				Kab. Lamongan	1
				Kab. Pacitan	2
				Kab. Sampang	2
				Kab. Tuban	2

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
26		PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	9
				Kab. Jember	1
				Kab. Jombang	7
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lamongan	11
				Kab. Lumajang	5
				Kab. Malang	25
				Kab. Pacitan	4
				Kab. Pamekasan	1
				Kab. Sampang	20
			Kab. Sumenep	1	
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Lamongan	1
				Kab. Malang	1
Kab. Pamekasan	1				
27		PEMBANGUNAN JEMBATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Jember	1
				Kab. Lumajang	1
28				Kab. Bondowoso	2

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
		PEMBANGUNAN LAPISAN PENETRASI (LAPEN) DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Jember	9
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Sampang	2
				Kab. Situbondo	6
				Kab. Tuban	1
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Blitar	1
29		PEMBANGUNAN PAGAR/GAPURA FASILITAS UMUM PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	7
				Kab. Jember	1
				Kab. Lumajang	2
				Kab. Malang	1
				Kab. Pacitan	1
				Kab. Pamekasan	2
				Kab. Probolinggo	1
				Kab. Sampang	7
Kab. Sumenep	2				
30		PEMBANGUNAN PELENGKAP JALAN DESA (SALURAN, UDITH, DRAINASE)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	2
				Kab. Sumenep	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Sumenep	1
31		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Bangkalan	3
				Kab. Jember	4
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Malang	6
				Kab. Sampang	1
				Kab. Situbondo	1
32		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (JENJANG SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN KHUSUS-PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS)	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Gresik	2
				Kab. Lamongan	2
				Kab. Malang	2
				Kab. Tulungagung	1
				Kota Malang	1
33		PEMBANGUNAN SALURAN/DRAINANSE LINGKUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	3
				Kab. Bondowoso	1
				Kab. Gresik	1
				Kab. Jember	8
				Kab. Lamongan	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Lumajang	32
				Kab. Malang	5
				Kab. Pamekasan	11
				Kab. Pasuruan	1
				Kab. Probolinggo	1
				Kab. Sampang	8
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Sumenep	5
				Kab. Trenggalek	3
34		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Bondowoso	3
				Kab. Malang	2
				Kab. Mojokerto	1
				Kab. Pamekasan	5
				Kab. Probolinggo	1
				Kab. Sampang	9
				Kab. Situbondo	1
				Kab. Sumenep	1
35		PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Sampang	3

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
36		PEMBANGUNAN TEBING/TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT) JALAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	6
				Kab. Gresik	3
				Kab. Jember	1
				Kab. Jombang	5
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lamongan	2
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Pacitan	1
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Sampang	6
				Kab. Bondowoso	1
				Kab. Jember	3
				Kab. Lamongan	15
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Sampang	2
37		PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)/PLENGSENGAN JALAN LINGKUNGAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Bangkalan	56
				Kab. Bondowoso	7
				Kab. Gresik	1
				Kab. Lamongan	2
				Kab. Lumajang	5
				Kab. Malang	3

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Mojokerto	1
				Kab. Pacitan	7
				Kab. Pamekasan	20
				Kab. Ponorogo	1
				Kab. Probolinggo	2
				Kab. Sampang	35
				Kab. Sumenep	1
				Kab. Trenggalek	1
38		PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bojonegoro	1
				Kab. Gresik	3
				Kab. Lamongan	3
				Kab. Lumajang	2
				Kab. Malang	7
				Kab. Probolinggo	2
				Kab. Situbondo	3
				Kab. Sumenep	1
				Kota Surabaya	1
39		PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN JEMBATAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	2
				Kab. Jember	4
40		PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN/PELEBARAN/PENINGKATAN JALAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	2
				Kab. Blitar	2

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Jombang	1
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lamongan	2
				Kab. Malang	2
				Kab. Mojokerto	1
				Kab. Sidoarjo	1
41		PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	Kab. Blitar	1
				Kab. Jember	4
				Kab. Jombang	1
				Kab. Lamongan	1
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	Kab. Malang	1
42		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA BANGUNAN KEAGAMAAN LAINNYA	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Lumajang	1
43		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA BANGUNAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA (PAUD, TK, KB DAN SEKOLAH ISLAM SWASTA, RA, MI, MTS, MA, SEKOLAH TINGGI ISLAM SWASTA, TPQ)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bangkalan	2
				Kab. Blitar	1
				Kab. Jember	2
				Kab. Lamongan	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Lumajang	3
				Kab. Malang	3
				Kab. Mojokerto	2
				Kab. Probolinggo	3
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Situbondo	1
				Kab. Trenggalek	1
				Kab. Tuban	1
44		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG ORGANISASI / YAYASAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Pacitan	1
				Kab. Sidoarjo	1
45		PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA GEDUNG PONDOK PESANTREN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Malang	1
46		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI BANGUNAN KEAGAMAAN LAINNYA	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Lumajang	1
47		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI BANGUNAN KEBUDAYAAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Lamongan	1
48		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI BANGUNAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA (PAUD, TK, KB DAN SEKOLAH	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bangkalan	7
				Kab. Banyuwangi	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
		ISLAM SWASTA, RA, MI, MTS, MA, SEKOLAH TINGGI ISLAM SWASTA, TPQ)		Kab. Gresik	2
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lamongan	3
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Malang	5
				Kab. Sidoarjo	2
				Kota Surabaya	1
49		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG ORGANISASI / YAYASAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Lamongan	1
				Kab. Sidoarjo	1
50		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG PONDOK PESANTREN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Pasuruan	1
				Kab. Sampang	1
51		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI TEMPAT IBADAH	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Gresik	3
				Kab. Jember	1
				Kab. Jombang	1
				Kab. Malang	3
				Kab. Mojokerto	1
				Kab. Probolinggo	3
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Situbondo	8
				Kota Surabaya	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
52		PEMELIHARAN/REHABILITAS FASILITAS SEKOLAH (JENJANG SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN KHUSUS-PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS)	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Gresik	1
				Kab. Sidoarjo	1
53		PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Kab. Lamongan	1
54		PENGADAAN PERALATAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Kab. Bangkalan	1
				Kab. Bojonegoro	1
				Kab. Jember	2
				Kab. Kediri	1
				Kab. Malang	1
				Kab. Ngawi	1
				Kab. Pacitan	3
				Kab. Trenggalek	1
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kab. Jember	1
55		PENGADAAN PERLENGKAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA (PAUD, TK, KB DAN SEKOLAH ISLAM SWASTA, RA,	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bojonegoro	1
				Kab. Bondowoso	1
				Kab. Gresik	3

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
		MI, MTS, MA, SEKOLAH TINGGI ISLAM SWASTA, TPQ)		Kab. Lamongan	4
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Magetan	4
				Kab. Situbondo	1
				Kota Surabaya	1
56		PENGADAAN PERLENGKAPAN ORGANISASI / YAYASAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Banyuwangi	3
				Kab. Blitar	1
				Kab. Bondowoso	6
				Kab. Gresik	1
				Kab. Jember	20
				Kab. Kediri	7
				Kab. Lumajang	74
				Kab. Magetan	1
				Kab. Malang	19
				Kab. Ngawi	1
				Kab. Pacitan	7
				Kab. Pasuruan	2
				Kab. Ponorogo	1
				Kab. Probolinggo	9
				Kab. Sidoarjo	2
				Kab. Situbondo	13

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Sumenep	1
				Kab. Trenggalek	1
				Kab. Tuban	1
				Kab. Tulungagung	1
				Kota Probolinggo	1
				Kota Surabaya	4
			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Kab. Pacitan	1
57		PENGADAAN PERLENGKAPAN TEMPAT IBADAH	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bondowoso	1
				Kab. Magetan	4
				Kab. Situbondo	2
58		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN KEBUDAYAAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Sumenep	1
59		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BANGUNAN PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA (PAUD, TK, KB DAN SEKOLAH ISLAM SWASTA, RA, MI, MTS, MA, SEKOLAH TINGGI ISLAM SWASTA, TPQ)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Bondowoso	1
				Kab. Gresik	1
				Kab. Lamongan	2
				Kab. Lumajang	4
				Kab. Pacitan	1
				Kab. Pasuruan	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Sidoarjo	1
				Kab. Situbondo	4
				Kota Surabaya	1
60		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG ORGANISASI / YAYASAN	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kediri	1
				Kab. Lumajang	1
				Kab. Malang	4
				Kab. Probolinggo	2
				Kab. Sidoarjo	3
61		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Pamekasan	1
			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Surabaya	2
62		PENGASPALAN JALAN DESA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	Kab. Bangkalan	165
				Kab. Bondowoso	1
				Kab. Jember	4
				Kab. Lamongan	2
				Kab. Lumajang	5
				Kab. Malang	14
				Kab. Pacitan	2
				Kab. Pamekasan	22
				Kab. Probolinggo	2
				Kab. Sampang	8
				Kab. Sidoarjo	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Sumenep	3
				Kab. Bangkalan	4
63		PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kab. Bondowoso	10
				Kab. Jember	1
				Kab. Sampang	1
				Kab. Tuban	1
64		PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BUDIDAYA (IKAN HIAS, PATIN, NILA,LELE, UDANG)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kab. Banyuwangi	1
				Kab. Blitar	1
				Kab. Lamongan	3
				Kab. Tulungagung	1
65		PENINGKATAN SARANA DESA WISATA		Kab. Pacitan	1
66		PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Lamongan	1
				Kab. Probolinggo	1
				Kota Surabaya	2
67		PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK (JENJANG SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN KHUSUS-PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS)	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Lamongan	2
68		SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Malang	1

No	Prioritas Provinsi	Kategori Permasalahan	Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	Jumlah Usulan
				Kab. Sidoarjo	1
69		SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN (JENJANG SMA, SMK, DAN PENDIDIKAN KHUSUS-PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS)	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Gresik	1
				Kab. Kediri	1
				Kab. Lumajang	1
				Kota Surabaya	1
		Grand Total			1471

BAB V**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KOTA****5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan****5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur**

Pendekatan perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
3. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan *stakeholder*, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran. Selain itu untuk membangun sumber-sumber pertumbuhan baru, dilakukan dengan penciptaan pusat kegiatan perwilayahan yang tersebar di

seluruh wilayah Jawa Timur, tidak hanya terpusat pada kawasan utara. Pusat-pusat kegiatan yang tercipta diharapkan akan mampu memberikan efek penyebaran kegiatan di seluruh wilayah Jawa Timur dan juga dapat memberikan efek positif terciptanya kegiatan – kegiatan ekonomi baru pada pusat – pusat kegiatan dimaksud.

Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan agenda pembangunan Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Adapun pembagian klaster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:

Gambar 5.1

Rencana Pembagian Klaster Pengembangan Wilayah Jawa Timur



5.1.2 Strategi Pengembangan Wilayah

5.1.2.1 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Labanegoro

Klaster Labanegoro terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan

tambang dan perikanan. Arah pengembangan pada Klaster Labanegoro adalah :

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Klaster Labanegoro secara sosial terbentuk karena persamaan geografis wilayahnya yang ada di pesisir pantai utara Pulau Jawa Timur. Masyarakat pesisir cenderung memiliki sifat terbuka, karena sebagian wilayahnya yang berbatasan langsung dengan lautan sehingga mempermudah akses untuk menuju wilayah ini. Wilayah geografis di daerah pesisir inilah yang mempengaruhi karakteristik sosial masyarakatnya. Selain masyarakatnya yang cenderung terbuka sehingga mudah berinteraksi sosial dengan masyarakat asing maupun pendatang, beberapa kebiasaan maupun ragam mata pencaharian yang sebagian ada di wilayah agraris untuk bercocok tanam sebagai petani dan ada sebagian ada di wilayah pantai untuk menangkap ikan serta ada sebagian masyarakat yang bekerja di sektor industri. Mata pencaharian yang dimiliki masyarakat ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga masyarakat di daerah pesisir memiliki karakteristik yang mengutamakan kebersamaan dan gotong royong, suka berjuang, ulet bekerja, agamis, terbuka, halus, perasaan, jujur, penuh tanggung jawab, dan memiliki jiwa sebagai petualang. Sifat Sifat masyarakat pesisir yang cenderung terbuka ditambah dengan masuknya industrialisasi sehingga mudah berinteraksi sosial dengan pendatang atau budaya baru dapat mudah diterima dan berbaur dengan budaya masyarakat lokal. Berinteraksinya budaya itu akan memunculkan kebudayaan baru yang merubah kebiasaan maupun mata pencaharian. Kebudayaan yang baru tersebut menjadikan masyarakat yang pluralistik tetapi masih memiliki sifat kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Dapat diartikan bahwa masyarakat yang tinggal di pantai utara Jawa Timur merupakan gabungan karakteristik antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat di wilayah ini cenderung bertahan hidup dengan mengandalkan pengaruh musim baik di bidang agraris maupun di bidang maritim. Pada musim tertentu masyarakat bekerja dan musim yang lain tidak akan bekerja, sehingga ketika tidak bekerja maka masyarakat akan beralih profesi untuk mencari pekerjaan yang lain. Dapat dikatakan bahwa masyarakat di wilayah ini cenderung untuk bekerja serabutan demi untuk mempertahankan hidupnya. Dengan adanya hal tersebut maka untuk membuat perencanaan program atau kegiatan di wilayah ini dengan melihat bagaimana seberapa besar pengaruh musim

terhadap tingkat pendapatan masyarakat serta pekerjaan alternatif bagi masyarakat ketika tidak sedang bercocok tanam ataupun ketika tidak sedang menangkap ikan. oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan, Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Daerah - daerah pada klaster Labanegoro ini, merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur, serta memiliki tingkat pengangguran tinggi walaupun industrialisasi sudah masuk di wilayah Bojonegoro dan Tuban, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan. Klaster Labanegoro memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penanganannya. Jenis kawasan strategis di Kabupaten dalam Klaster Labanegoro dibedakan menjadi beberapa yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial dan budaya, kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup dan kawasan strategis pertahanan dan keamanan. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kewilayahan tersebut memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten di Klaster Labanegoro. Secara umum kondisi tersebut menggambarkan bahwa kawasan ini mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah. Oleh karena itu, perlu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan, Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan, dan Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD)

dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan, Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Klaster Labanegoro memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim. Penguatan dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- c. Pembangunan Rendah Karbon;
- d. Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; serta
- e. Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai.

5.1.2.2 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Wilis Utara

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk. Hal itu

disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Upaya dari hal tersebut, maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Pada klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu daerah. Dalam Klaster Wilis Utara, peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan enkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan. Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Wilayah Klaster Wilis Utara mempunyai kantong-kantong daerah rawan bencana. Adapun kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan kebakaran, kawasan rawan banjir, kawasan rawan puting beliung, kawasan tanah longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Prosentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hydrometeorology. Permasalahan lain yang muncul saat ini adalah adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan budidaya pada beberapa titik. Peningkatan layanan prasarana transportasi untuk konektivitas dengan kabupaten/kota sekitar berkaitan dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan pembentukan desa tangguh bencana guna meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana.

5.1.2.3 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Wilis Selatan

Klaster Wilis Selatan terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Wilayah yang masuk dalam Klaster Wilis Selatan ini merupakan daerah yang secara sosial budaya masyarakatnya memiliki latar belakang yang sama yaitu Suku Jawa. Selain itu budaya Jawa pada jaman Kerajaan Mataram sangat berpengaruh di wilayah ini. Dengan adanya hal tersebut maka wilayah ini dikenal dengan daerah Matraman. Masyarakat Suku Jawa di Wilayah Matraman secara historis terpengaruh oleh kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta, sehingga sifat masyarakat orang Jawa yang memberikan penghormatan kepada sesepuh atau orang yang lebih tua masih cukup kuat di wilayah ini. Sistem organisasi dan kekerabatan dalam masyarakat masih cukup tinggi. Masyarakat masih menganut sistem kekerabatan keluarga Batih atau keluarga inti. Dimana keluarga atau kerabat adalah hal yang utama, sehingga apabila ada anggota keluarga yang menikah maka disarankan untuk tinggal bersama orang tua. Pola kehidupan masyarakatnya adalah agraris atau bercocok tanam. Adapula di beberapa tempat yang masyarakatnya bekerja mencari ikan di laut, karena sebagian tempat di Kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Klaster Wilis

Selatan adalah pesisir pantai selatan. Di wilayah Wilis Selatan daerahnya dibagi menjadi daratan, daerah pegunungan dan daerah tepi pantai selatan. Di wilayah ini masih dapat dilihat dengan adanya interaksi sosial antar masyarakat masih terjalin dengan cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan gotong – royong yang masih sangat tinggi di daerah ini walaupun sistem teknologi informasi sudah masuk di wilayah ini. Secara komunikasi atau Bahasa yang digunakan sehari – hari, masyarakat di wilayah ini dengan menggunakan Bahasa Jawa yang halus seperti masyarakat Solo atau Yogyakarta. Cara pandang masyarakat di wilayah Klaster Wilis Selatan sangat dipengaruhi dengan falsafah hidup orang Jawa yang terpengaruh dari perpaduan dua unsur kebudayaan yang masuk di Pulau Jawa, yaitu kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Dalam kehidupan sehari hari masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat Budaya Hindu dan Budaya Islam. Dengan adanya hal tersebut maka tidak ada dominasi dari agama tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai toleransi yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Masyarakat di wilayah ini cenderung tidak terjebak dalam satu pilihan atau tidak memiliki loyalitas terhadap sesuatu, cenderung rasional dan tidak terpengaruh oleh golongan atau ormas keagamaan. Masyarakat di Wilayah Wilis Selatan cenderung mudah menerima hal yang baru, namun masyarakat masih selektif dengan hal baru dan sikap kolektivitas antar masyarakat yang masih cukup kuat sehingga unsur – unsur kebudayaan dan kearifan lokal dalam masyarakat masih bertahan dan belum berubah. Dengan adanya hal tersebut maka bila akan membuat suatu program di wilayah ini harus mengetahui sistem kekerabatan yang berpengaruh di wilayah ini, kemudian dapat melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang dihormati dan disegani sehingga diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dan tepat sasaran. Klaster Wilis Selatan ini, selain terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, juga terdapat kondisi tertinggal pada daerah / desa berbasis pegunungan, pesisir, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di semua sektor oleh semua stakeholders pembangunan. Dalam rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan STP (*Science Techno Park*) Atsiri; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; dan Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional. Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal diantaranya adalah Pelabuhan Prigi dan Pelayaran Perintis, dan *Realignment* jalur Malang-Blitar.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Tidak berbeda dengan Klaster Wilis Utara, untuk klasifikasi jenis bencana terdapat kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan kebakaran, kawasan rawan banjir, kawasan rawan puting beliung, kawasan tanah longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Timbul juga adanya kekeringan di beberapa Kabupaten yang ditimbulkan oleh iklim panas yang berkepanjangan. Hal ini membuat antisipasi dalam ketahanan penanggulangan bencana kabupaten/kota dalam Klaster Wilis Selatan. Oleh karena itu perlu, Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan pembentukan desa tangguh bencana guna meningkatkan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana.

5.1.2.4 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Malang Raya

Klaster Malang Raya terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu agrowisata (sektor perkebunan dan perikanan).

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Klaster Malang Raya secara sosial budaya terbentuk dari latar belakang sejarah dan Sumber Daya Alam yang sama. Secara sosial budaya karakteristik masyarakat wilayah Malang Raya hampir sama dengan

masyarakat Surabaya yaitu Budaya Arek. Namun secara sosial masyarakat Malang Raya menyebutnya sebagai Budaya Arek Malangan atau pada saat ini dikenal dengan Kera Ngalam. Budaya Arek Malangan berasal dari adanya keberadaan kerajaan - kerajaan besar yang bersejarah di Nusantara. Kebudayaan Malangan memiliki narasi historis dan cerita-cerita rakyat yang lebih kompleks, mulai cerita rakyat yang mengandung unsur politik dan percintaan. Kehidupan Sosial masyarakat Malangan mempunyai ciri khas yaitu adanya solidaritas yang tinggi antar anggotanya, terbuka dan egaliter. Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Malang Raya membentuk karakteristik sosial masyarakatnya, dengan solidaritas yang tinggi masyarakat cenderung mandiri dalam mendapatkan mata pencaharian tanpa menggantungkan untuk mendapatkan dari orang lain. Namun masyarakat Kera Ngalam terbuka dan mudah untuk bekerja sama secara ekonomi, sedangkan secara sosial budaya masyarakat Kera Ngalam sangat mempertahankan ciri khasnya yang memiliki solidaritas yang tinggi. Di beberapa tempat yang masuk wilayah ini masyarakatnya sudah heterogen, yaitu antara masyarakat perdesaan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat yang Heterogen ini cenderung lebih patuh dan taat terhadap hukum formal yang berlaku daripada adat, sehingga aturan – aturan dan sanksi yang berlaku di masyarakat sesuai dengan hukum formal. Jadi pemecahan masalah pada masyarakat yang heterogen ini melalui hukum formal atau diselesaikan di pengadilan negara. Di beberapa tempat yang masuk di wilayah ini masih ada yang taat dan patuh terhadap hukum adat sehingga apabila ada suatu masalah dalam masyarakat dapat dipecahkan melalui kesepakatan antar keluarga masing – masing yang terlibat konflik. Apabila secara keluarga permasalahan itu tidak dapat diselesaikan maka akan melibatkan aparat desa baik Kepala Dusun maupun Kepala Desa. Namun masyarakat yang patuh terhadap hukum adat ini juga mentaati hukum formal yang berlaku terutama bagi orang asing maupun pendatang. Jadi bagi pendatang yang akan datang ke wilayah ini untuk tinggal sementara atau untuk bekerja maupun melakukan studi di wilayah ini harus mentaati hukum formal yang berlaku dan harus melengkapi berbagai administrasi sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat di wilayah ini masih ada yang berpedoman pada hukum adat dan ada pula yang menggunakan hukum formal untuk menegakkan aturan. Di daerah klaster Malang Raya ini, terdapat kondisi jumlah penduduk miskin yang tinggi seperti kabupaten Malang dengan cakupan wilayahnya yang sangat luas. Di wilayah ini juga

terdapat kondisi tertinggal khususnya di daerah dan desa berbasis pegunungan di kabupaten Malang sisi utara, selanjutnya berbasis pesisir, dan terpencil di Malang sisi selatan, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan Pengembangan *Tourism Center of Excellence*; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan. Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui *Realignment* jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, *Realignment* jalur Dampit-Lumajang serta Malang Raya Metropolitan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah. Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru terutama pada area yang mengalami alih fungsi. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, out bond, camping) terutama di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru sekaligus menanamkan gerakan cinta alam serta Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat

embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan resapan air yang lebih tinggi.

5.1.2.5 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Metropolitan

Klaster Metropolitan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor perdagangan dan jasa serta industri pengolahan.

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Klaster Metropolitan terbentuk dari wilayah yang memiliki latar belakang yang sama yaitu merupakan daerah Industrialisasi. Di daerah industri mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat urban dan cenderung heterogen. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan metropolitan ini adalah masyarakat plural yang berasal dari berbagai suku, namun tetap ada suku yang dominan di kawasan Metropolitan. Di Kawasan Metropolitan wilayah Jawa Timur mayoritas didominasi oleh masyarakat Suku Jawa, walaupun ada berbagai macam suku yaitu Madura, Batak, Bali, Sunda, dan Sulawesi serta berbagai macam suku yang ada di Nusantara. Ciri khas masyarakat Metropolitan adalah cenderung mempunyai pemikiran yang rasional dan berdasarkan logika, demokratis, toleran dan suka menolong orang lain, namun demikian masyarakat di kawasan Metropolitan sangat menjunjung tinggi nilai hukum. Semua permasalahan yang ada di masyarakat diselesaikan secara hukum. Di kawasan Metropolitan aspek sosial dan ekonomi masyarakatnya bergerak dinamis karena wilayah Metropolitan merupakan tujuan bagi masyarakat dari daerah perdesaan. Program dan kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini. Pada klaster Metropolitan ini, terdapat beberapa kondisi, sisi positifnya yaitu penduduk di klaster ini memiliki pergerakan perekonomian yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi juga tinggi selanjutnya indeks pembangunan manusia tinggi, namun demikian di sisi yang lain kebanyakan penduduk di wilayah ini mempunyai tingkat pengangguran

yang tinggi disertai dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi pula, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas dan antar sektor.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; Pengembangan koridor 4.0 Surabaya-Malang; Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif dan pengendalian tingkat inflasi daerah; dan Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan pengelolaan berbagai limbah yang mempengaruhi kelestarian daerah aliran sungai; dan Pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur melalui kemitraan stakeholder.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Kabupaten/kota dalam klaster Metropolitan yang secara umum adalah wilayah dimana kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan kebakaran, kawasan rawan banjir, kawasan rawan puting beliung, kawasan tanah longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Ancaman kekeringan pada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan pada waktu iklim panas yang terutama memang karena daerah-daerah dataran kapur. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir, peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, peningkatan sarana prasarana tanggap bencana, penanggulangan bencana dan pasca bencana

5.1.2.6 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Probomajang

Klaster Probomajang terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang. Klaster ini terbentuk karena berada pada

kawasan Bromo Tengger Semeru. Selain itu wilayah ini juga dikembangkan didasarkan pada sektor agroindustri.

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Klaster Probomajang merupakan klaster yang hampir sama dengan Klaster Ijen. Dimana masyarakat yang dominan berasal dari Suku Jawa dan Suku Madura, dapat dikatakan bahwa wilayah Klaster Probomajang juga dikenal dengan **Pandalungan**. Namun yang menjadi pembeda Klaster Probomajang dengan Klaster Ijen adalah masyarakat Suku Tengger yang hidup di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masyarakat Suku Tengger ini menjadi pembeda karena masyarakat ini mempunyai kepercayaan menganut Agama Hindu. Walaupun ada berbagai macam keyakinan yang dianut masyarakat, kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini hidup rukun berdampingan. Tidak ada yang merasa bahwa keyakinan yang dianut adalah paling benar. Sifat toleransi yang tinggi tersebut akibat dari kepatuhan masyarakat terhadap tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang mereka hormati dan disegani. Sikap toleransi dan kepatuhan terhadap tokoh panutan itulah yang mampu menyeleksi hal – hal baru yang mampu merubah kebudayaan asli masyarakat. Masyarakat di wilayah ini terbuka dengan hal – hal baru, termasuk industri yang masuk di wilayah ini. Namun hal ini memerlukan pendekatan secara berkesinambungan, terutama kepada tokoh adat maupun tokoh agama. Di daerah klaster Probomajang ini, terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi terutama kabupaten Probolinggo yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak, selanjutnya kedua kabupaten di wilayah ini mempunyai indeks pembangunan manusia yang rendah, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan antara lain Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan

jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; dan Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Peningkatan Jalan Probolinggo – Lumajang, Tol Probomajang (Probolinggo-Lumajang), Jalan Pansela; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam. Penetapan kawasan rawan bencana bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi rawan letusan gunung berapi, kawasan gerakan tanah longsor, rawan banjir, daerah rawan abrasi pantai, dan rawan angin ribut. Wilayah rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam. Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo banyak terdapat daerah yang dilanda kekeringan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya area resapan dan kurangnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan air. Tanda-tanda kekeringan berupa berkurangnya air sumur dan dam, mendangkalnya aliran sungai, serta semakin minimnya saluran irigasi. Banyaknya rekahan pada tanah akan mempercepat terjadinya penguapan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana kekeringan sewaktu-waktu di musim kemarau setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung dan penghijauan terutama di kawasan hulu.

5.1.2.7 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Klaster Ijen

Klaster Ijen terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan).

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Secara geografis Klaster Ijen terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai

potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Klaster Ijen yang meliputi wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Wilayah Klaster Ijen dikenal sebagai Pandalungan. Wilayah Pandalungan ini ditandai dengan adanya percampuran Budaya Suku Jawa dan Budaya Suku Madura. Masyarakat Pandalungan sendiri adalah masyarakat yang berada dalam posisi transisi pola sosial budayanya, yaitu masyarakat campuran antara Kebudayaan Jawa dan Kebudayaan Madura. Demikian juga dengan etika pergaulan dan komunikasi masyarakat yang terpengaruh dengan dua kebudayaan tersebut. Ciri – ciri **Masyarakat Pandalungan** ini adalah bersifat terbuka dan mudah beradaptasi, menjadikan tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai panutan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan serta tokoh Agama juga memiliki akar kuat yang digunakan sebagai kekuatan politik. suka bergotong royong, memiliki kekerabatan yang kuat, masih kuatnya tradisi dan mitos dalam kehidupan sehari – hari dan masyarakatnya sebagian besar masih petani dan nelayan tradisional. Untuk menentukan program dan kegiatan di wilayah ini adalah dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta apabila membuat program atau kegiatan yang baru hendaknya melibatkan tokoh – tokoh tersebut. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebaiknya tidak menghilangkan kearifan lokal dan kebiasaan masyarakat lokal sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat. *Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, terkecuali di kabupaten Banyuwangi, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.*

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Klaster Ijen sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan ke depan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan

menjadi lahan pemukiman serta industri, alih fungsi komoditas dari pertanian tanaman pangan ke pertanian hortikultura karena faktor keuntungan yang diperoleh petani hortikultura dirasa lebih besar daripada pertanian tanaman pangan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan melalui pengembangan Pariwisata Ijen, pembangunan *Coffee Center of Excellence*; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Penyederhanaan regulasi untuk mendorong kemudahan investasi melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan; serta Revitalisasi Puger.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten-Kabupaten dalam Klaster Ijen memaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling diwaspadai. Kabupaten yang termasuk dalam Klaster Ijen ini merupakan Kawasan rawan bencana alam yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dalam melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, maka diperlukan pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

5.1.2.8 Strategi Pengembangan Wilayah Klaster Madura

Klaster Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian lahan kering, peternakan dan perikanan.

1. Strategi Pertumbuhan dan Transformasi Kewilayahan

Masyarakat Madura didominasi oleh pemeluk Agama Islam, mulai kecil sudah ditanamkan ilmu ajaran Agama Islam sehingga banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren yang ada di Madura. Dengan adanya banyak pesantren di Madura, mereka dapat menuntut ilmu di tempat suci tersebut. Masyarakat madura sangat menghargai guru apalagi seorang kyai

dan nyai. Kesadaran masyarakat Madura untuk mengakui bahwa guru sangat berjasa itu sangat tinggi, apalagi pengakuan terhadap guru ngajinya atau seorang Kyai. Setiap perilaku masyarakat Madura patuh terhadap semua perintah dari gurunya atau seorang Kyai. Setiap pendapat atau kebijakan dalam masyarakat ditentukan oleh seorang guru atau seorang Kyai. Dengan adanya hal tersebut, apabila ada suatu pembangunan di wilayah Klaster Madura langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah dengan melakukan pendekatan kepada Tokoh Agama yang ada di wilayah Pulau Madura. Tokoh Agama tersebut bisa seorang Kyai yang dihormati dan disegani, Guru yang ada di Pondok Pesantren maupun Guru sekolah Madrasah. *Selanjutnya pada klaster ini juga mempunyai angka rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup yang cukup rendah sehingga berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan* seperti Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; dan Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil.

2. Strategi Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) dan Kawasan Ekonomi Khusus Garam. Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan Akses menuju Jalan Tol; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.

3. Memperkuat Ketahanan Bencana Wilayah

Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan

tepat tujuan. Analisis pada aspek geografi Kabupaten-Kabupaten di klaster Madura perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan rawan puting beliung, Kawasan rawan abrasi, kawasan Rawan Kekeringan. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, peningkatan sarana prasarana tanggap bencana, Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung, penghijauan kembali pada kawasan lindung dan penanaman pohon bakau pada kawasan rawan abrasi.

5.1.3 Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan

Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis yang baik di bidang ekonomi dan sosial budaya. Untuk mendorong pertumbuhan di tiap-tiap kawasan, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik tiap-tiap kawasan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, terdapat Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung yang didorong menjadi fokus pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Berikut Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung yang menjadi fokus utama dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Timur :

1. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban dengan fokus arah pengembangannya pada bidang industri, khususnya yang bersifat *capital-intensive* serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih serta *hub* arus barang dan orang.
2. Kawasan Prioritas Bromo – Tengger – Semeru, meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang dan Kota Probolinggo dengan fokus utama arah pengembangannya pada sektor pariwisata dan agroproduksi serta agroindustri.

3. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama arah pengembangannya pada sektor agroproduksi dan agroindustri serta sektor pariwisata.
4. Kawasan Madura dan Kepulauan merupakan Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi dan pariwisata.
5. Kawasan Selingkar Ijen merupakan Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas Bromo – Tengger – Semeru. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian dan perkebunan.

5.1.4 Proyek Prioritas Provinsi Tahun 2023

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, terdapat beberapa proyek prioritas yang diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan pengembangan wilayah. Berikut merupakan beberapa proyek yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023.

1. Indonesian Islamic Science Park (IISP)

Rencana pengembangan Kawasan IISP terletak di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), yang menghadirkan destinasi wisata Islami dengan konsep rekreasi dan edukasi, dengan pendekatan ekologis serta sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fasilitas yang direncanakan di dalam IISP terdiri dari: Wisata Religi/Ibadah, Wisata Kuliner Halal, MICE, Museum Religi, *Theme Park*, Hotel dan Wisata Pesisir. Berdasarkan Pra FS yang disusun tahun 2019, kebutuhan lahan untuk IISP adalah seluas 107 Ha. Namun, pada Konsep Desain IISP yang telah disusun pada tahun 2022, IISP direncanakan akan dikembangkan pada luasan lahan yang tersedia yaitu seluas 38,11 Ha. Kemudian, pada tahun 2023 akan dilaksanakan Kegiatan Persiapan dan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan IISP, Penyusunan Studi Kelayakan dan Masterplan IISP.

2. TPA Regional Kabupaten/Kota Kediri

TPA Regional Kabupaten/Kota Kediri direncanakan akan melayani Kabupaten dan Kota Kediri dengan tujuan untuk mencapai universal akses. Pembangunan TPA Regional ini tentunya sangat diperlukan untuk segera terwujud, bersinergi dengan berbagai rencana pembangunan strategis lainnya antara lain: Pembangunan Bandara Kediri yang dierncanakan beroperional pada tahun 2023, Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung, yang informasinya berdampak pada keberadaan TPA Kota Kediri, serta berbagai rencana pembangunan di Kawasan sekitarnya. Pada tahun 2022, dilaksanakan penyusunan Pra FS Pembangunan TPA Regional kab – Kota Kediri yang difasilitasi oleh Tim GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*). Kebutuhan lahan untuk TPA Regional ini diperkirakan seluas 50,54Ha. Pada Tahun 2023 akan dilaksanakan Appraisal Lahan TPA Sampah Regional Kabupaten/Kota Kediri dan Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk Pembangunan Jalan Akses menuju TPA Sampah Regional Kediri Raya.

3. Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur

Di Wilayah Selatan Jawa Timur memiliki berbagai potensi wilayah yang dapat dikembangkan kedepannya. Seperti potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Dalam rangka mendukung potensi-potensi tersebut, dibangunlah Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur sepanjang 627,57 Km. Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa Timur menghubungkan 8 (delapan) kabupaten yaitu Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, dan Kab. Banyuwangi. Saat ini Jalan Pansela Jawa Timur telah terbangun sepanjang 267,14 Km dan belum terbangun sepanjang 360,43 Km yang akan direncanakan dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB), dan *Islamic Development Bank* (IDB). Pembangunan ruas jalan ini diharapkan bisa memperlancar arus perekonomian barang jasa dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Jalan ini nantinya dapat memperkecil kesenjangan perekonomian antara jalur pantai utara dan selatan. Adapun tantangan yang terjadi selama proses pembangunan Jalan

Pansela Jawa Timur adalah kondisi topografi Wilayah Selatan Jawa Timur menyebabkan terjadinya perubahan trase sehingga menghambat pelaksanaannya. Dalam mengatasi kendala tersebut dibutuhkan peran aktif kabupaten dan *stakeholder* terkait dalam penyiapan *readiness criteria*.

5.1.4.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Dalam upaya pencapaian target kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024 sebagaimana arahan Presiden, maka strategi yang diterapkan adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan;
2. Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan;
3. Meningkatkan Pelayanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan); dan
4. Penyediaan Infrastruktur Dasar (Air Bersih dan Sanitasi)



Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple intervension*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu:

- a. *Pertama*, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
- b. *Kedua*, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.

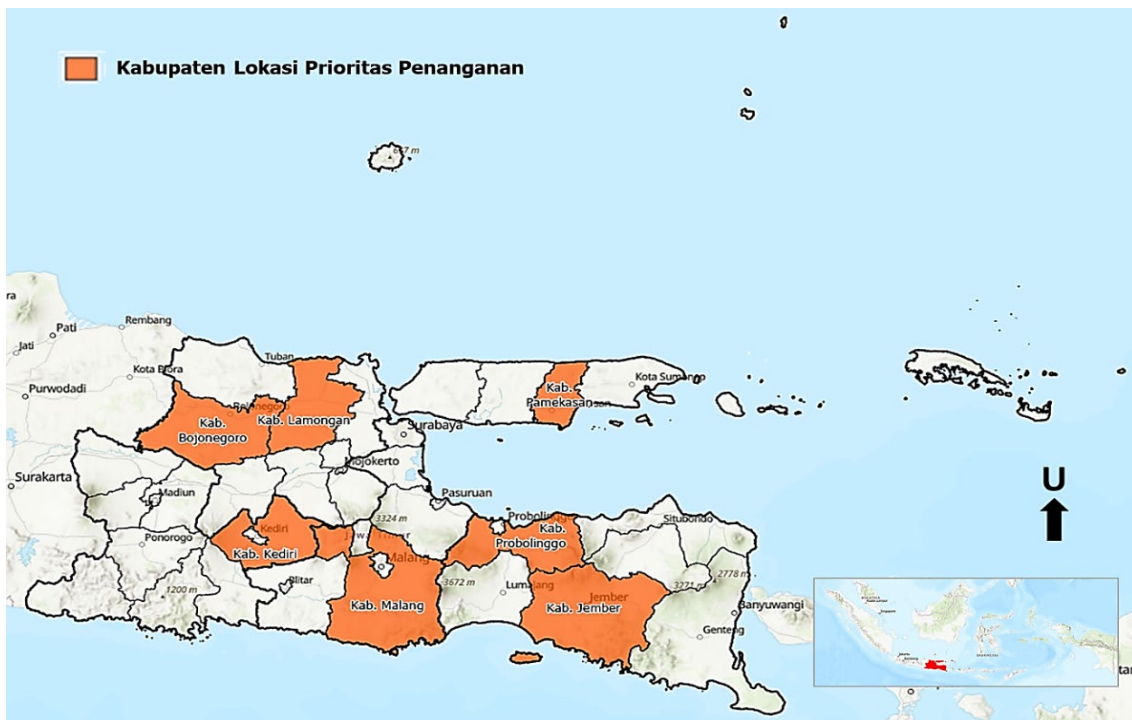
Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrim banyak terdapat di wilayah tersebut. Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah menjangkau Rumah Tangga miskin ekstrem yang belum mendapatkan program sama sekali baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, memastikan masyarakat miskin ekstrem masuk dalam DTKS dan mengutamakan menjadi penerima manfaat program.

5.1.4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pedesaan di Jawa Timur, strategi yang akan diterapkan adalah penanggulangan kemiskinan secara terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah Provinsi Jawa Timur melalui pengembangan model desa binaan.

Perumusan arahan kebijakan dan strategi Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan diawali dengan input data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Indeks Desa Membangun (IDM), yang kemudian dilakukan analisis secara teknis oleh Perguruan Tinggi dengan analisis *multi-variable* dan pembobotan berdasarkan karakteristik wilayah sehingga tersusun strategi penanggulangan kemiskinan pada lokasi prioritas.

Gambar 5.2 Arahan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan



(Sumber : Hasil analisis, 2022)

Prioritas Lokasi Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan di 7 (tujuh) Kabupaten di Jawa Timur, meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo. Penanggulangan kemiskinan pedesaan akan berjalan efektif manakala dilaksanakan secara terpadu. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan pedesaan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor, dengan lokasi dan sasaran tertentu.

2. Penajaman sasaran penerima manfaat,
3. meningkatkan keberlangsungan Usaha Mikro dan Kecil dalam Upaya menurunkan angka kemiskinan,
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (3T : Tertinggal, Terluar, Terdalam),
5. memperluas dan meningkatkan kualitas kelompok usaha bersama,
6. pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS,
7. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dan
8. mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH Plus dan Jaminan Sosial lainnya.

Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam bentuk beberapa jenis bantuan antara lain: (1) program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu (2) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, dan (3) Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Penanggulangan kemiskinan pedesaan tersebut dilakukan secara komprehensif meliputi berbagai aspek, diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar seperti bahan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih dan pekerjaan serta kebutuhan dasar lainnya dimana Pemerintah wajib melindungi warganya supaya dapat mengakses kebutuhan dasar hidup layak bagi seluruh penduduk terutama penduduk miskin.

5.2. Arahannya Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2023

5.2.1 Kabupaten Bangkalan

1. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi sektor unggulan.
2. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (Terminal, Pelabuhan dan Jalan Tol).

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional.
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
5. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak.
6. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19 dan lekuefaksi.
7. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.
9. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Bangkalan serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 8,05% (Agustus 2022).
11. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
12. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.

13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.2 Kabupaten Banyuwangi

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor konstruksi dan jasa pendidikan)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian) menjadi Sektor Unggulan
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, bandara, Stasiun, Jalan Tol, Pelabuhan, Jalan Lintas Selatan).
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (Gunung Ijen)
6. Pengembangan Minapolitan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
9. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
10. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran

hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.

11. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.
13. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Banyuwangi serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,26% (Agustus 2022).
14. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
15. Kolaborasi lintas sektor dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
16. Optimalisasi peran BUMDesa dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
17. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
18. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.3 Kabupaten Blitar

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (pertanian, pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Jalan Lintas Selatan)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas

Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Blitar serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,45% (Agustus 2022).

12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.4 Kabupaten Bojonegoro

1. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan.
2. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian) dengan pusat distribusi (Terminal, Stasiun, dan Jalan Tol)
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
5. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak.
6. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian

risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.

7. Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Bojonegoro serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,69% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen

Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.5 Kabupaten Bondowoso

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian kehutanan, dan perikanan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Tol)
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata (Gunung Ijen)
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api
10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
11. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif

masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

12. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Bondowoso serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,32% (Agustus 2022).
14. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
15. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
16. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
17. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.6 Kabupaten Gresik

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor industri pengolahan, serta pengadaan listrik dan gas).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertambangan dan penggalian) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertambangan dan Penggalian, Industri) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, Pelabuhan, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional

5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo
9. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Gresik serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 7,84% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.

16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui peningkatan komunikasi pemberdayaan masyarakat serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.7 Kabupaten Jember

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan.
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Industri) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Lintas Selatan).
5. Pengembangan Minapolitan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.'

11. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
13. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
14. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Jember serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,06% (Agustus 2022).
15. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
16. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
17. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
18. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.8 Kabupaten Jombang

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor konstruksi, perdagangan

besar dan eceran, informasi dan komunikasi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).

2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Industri, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan Meningkatkan Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, letusan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor

primer di Kabupaten Jombang serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,47% (Agustus 2022).

12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.9 Kabupaten Kediri

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Tol, Rencana Bandara)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah

domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak

7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekuefaksi, dan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Kediri serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 6,83% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku,

pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.10 Kabupaten Lamongan

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, perikanan, Industri) dengan pusat distribusi (Terminal, Stasiun, Jalan Tol, Pelabuhan).
4. Pengembangan Minapolitan Lamongan
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi
9. Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo
10. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

11. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
13. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
14. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Lamongan serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 6,05% (Agustus 2022).
15. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
16. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
17. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
18. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.11 Kabupaten Lumajang

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)

2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Perikanan, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Lintas Selatan, Rencana Jalan Tol).
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru
6. Pengembangan minapolitan.
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
9. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
10. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, leluasa, dan gunung api.
11. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
13. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

14. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Lumajang serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,97% (Agustus 2022).
15. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
16. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
17. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
18. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.12 Kabupaten Madiun

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Industri, Pariwisata) dengan pusat distribusi (Terminal, Stasiun, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan dan kesehatan.

6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Madiun serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,84% (Agustus 2022).
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi,

penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.13 Kabupaten Magetan

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (Terminal, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Magetan serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,33% (Agustus 2022).
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.14 Kabupaten Malang

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor industri pengolahan, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, serta konstruksi).
2. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sektor potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pertanian, Perikanan, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, pelabuhan, Stasiun, Jalan Tol, Bandara) melalui pengembangan konsep agrowisata.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru

5. Pengembangan Minapolitan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, leluetaksi, dan gunung api.
10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
11. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
13. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
14. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Malang serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 6,57% (Agustus 2022).
15. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.

16. Kolaborasi lintas sektor dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
17. Optimalisasi peran BUMDesa dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
18. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
19. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.15 Kabupaten Mojokerto

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Industri, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, Jalan Tol)
4. Pengembangan PLTSA dan Pengelolaan Limbah B3
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
7. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak.

8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
9. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Mojokerto serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,83% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.16 Kabupaten Nganjuk

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, serta real estate).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Industri, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Nganjuk serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,74% (Agustus 2022).
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.17 Kabupaten Ngawi

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta Jasa Lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Industri, Pariwisata) dengan pusat distribusi (Terminal, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan dan kesehatan.

6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak.
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, kegagalan teknologi, covid-19, leluasa, dan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Ngawi serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 2,48% (Agustus 2022).
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi,

serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.18 Kabupaten Pacitan

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (pertanian, pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, pelabuhan, jalan lintas selatan)
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan dan kesehatan.
7. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.
9. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Pacitan serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 3,65% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.19 Kabupaten Pamekasan

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan) menjadi Sektor Unggulan

3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian) dengan pusat distribusi (Terminal dan Pelabuhan)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Pamekasan serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 1,40% (Agustus 2022).

13. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Kolaborasi lintas sektor dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.20 Kabupaten Pasuruan

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor industri pengolahan)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pengadaan listrik dan gas, serta konstruksi) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, Jalan Tol)
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
7. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak

8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekuefaksi, dan gunung api.
9. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Pasuruan serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,91% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif

5.2.21 Kabupaten Ponorogo

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Pengembangan sektor potensial (pertanian dan pariwisata) menjadi sektor unggulan melalui konsep Agrowisata
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (pertanian, pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal)
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
7. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api
9. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Ponorogo serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,51% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif

5.2.22 Kabupaten Probolinggo

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan listrik dan gas).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Industri) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, Jalan Tol)
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
6. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
7. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, leluetaksi, dan gunung api.
9. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pelayanan dasar (Kesehatan dan Pendidikan, dan penyediaan infrastruktur dasar (Air Bersih dan Sanitasi).
11. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
12. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Probolinggo serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 3,25% (Agustus 2022).

14. Peningkatan kapasitas aparaturn Pemerintah Desa dan Optimalisasi peran lembaga pemerintah desa dalam upaya peningkatan perekonomian pedesaan.
15. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
16. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
17. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif

5.2.23 Kabupaten Sampang

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor konstruksi, dan jasa pendidikan)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian) dengan pusat distribusi (Terminal dan Pelabuhan)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian

risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, covid-19, dan lekuefaksi.

8. Pengendalian Banjir Kali Kemuning
9. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Sampang serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 3,11% (Agustus 2022).
13. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Kolaborasi lintas sektor dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.24 Kabupaten Sidoarjo

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor industri pengolahan)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, Bandara, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekuefaksi, dan luapan lumpur.
8. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor

primer di Kabupaten Sidoarjo serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 8,80% (Agustus 2022).

12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif

5.2.25 Kabupaten Situbondo

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Pengembangan kegiatan ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri, Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Jalan Tol, Pelabuhan)
5. Pengembangan Minapolitan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman,

penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak

9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
11. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
12. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Situbondo serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 3,38% (Agustus 2022).
14. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
15. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
16. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
17. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen

Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif

5.2.26 Kabupaten Sumenep

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, Pariwisata, Pertambangan dan Penggalan) dengan pusat distribusi (Terminal dan Pelabuhan)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Sumenep serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 1,36% (Agustus 2022).
12. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan upaya meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi desa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.26 Kabupaten Trenggalek

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial)
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis sub sektor perikanan melalui hilirisasi industri maritim, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dalam mendukung pembangunan Kota Baru Prigi sebagai kota baru perdagangan maritim

5. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (perikanan, pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, pelabuhan, jalan lintas selatan)
6. Pengembangan Minapolitan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
8. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
9. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
10. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, covid-19, leluetaksi, dan gunung api.
11. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
12. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
13. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
14. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Trenggalek serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,37% (Agustus 2022).
15. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.

16. Kolaborasi lintas sektor dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
17. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
18. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan dan gizi, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan inovasi dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.27 Kabupaten Tuban

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor industri pengolahan serta informasi dan komunikasi).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pertanian, perikanan dan Industri) dengan pusat distribusi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan, Jalan Tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak.
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian

risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.

8. Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo
9. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
10. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
11. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
12. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Tuban serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,54% (Agustus 2022).
13. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
14. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
15. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
16. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif.

5.2.28 Kabupaten Tulungagung

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi Sektor Unggulan.
3. Pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian melalui hilirisasi industri agro, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk
4. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (pertanian, pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, jalan lintas selatan)
5. Pengembangan Minapolitan
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
8. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
9. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, lekudefaksi, dan gunung api.
10. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
11. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

12. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kabupaten Tulungagung serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 6,65% (Agustus 2022).
14. Percepatan penanggulangan kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
16. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
17. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan dan pengembangan sistem data informasi dan inovasi, serta penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan Desa dalam konvergensi intervensi spesifik dan sensitif

5.2.29 Kota Batu

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Pariwisata dan Pertanian) dengan pusat distribusi (terminal, Rencana jalan tol)

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan gunung api.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Batu.
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Penanggulangan kemiskinan pedesaan dan meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi peran BUMDesa, serta melaksanakan percepatan penetapan dan penegasan batas desa.
14. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.

15. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

5.2.30 Kota Blitar

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan
5. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
6. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, covid-19, dan gunung api
7. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
9. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Blitar serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 5,39% (Agustus 2022).
11. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
12. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
13. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

5.2.31 Kota Kediri

1. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor industri pengolahan) menjadi Sektor Unggulan
2. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan
5. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
6. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, leluetaksi, dan gunung api.
7. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
8. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

9. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Kediri serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 4,38% (Agustus 2022).
11. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
12. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
13. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

5.2.32 Kota Madiun

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional.
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan.

6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak.
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja .
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

5.2.33 Kota Malang

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).

2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional.
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas Pendidikan.
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, dan covid-19.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Malang serta upaya penurunan pengangguran menjadi di bawah 7,66% (Agustus 2022).
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.

13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

5.2.34 Kota Mojokerto

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendudukan serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan.
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif

masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender

10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Mojokerto .
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam penguatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sistem data informasi, riset, dan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

5.2.35 Kota Pasuruan

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa keuangan dan asuransi, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah

domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak

7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi.
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan sektor primer di Kota Pasuruan
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

5.2.36 Kota Probolinggo

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial).

2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa lainnya) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan Pelabuhan Probolinggo ke wilayah Jawa Timur
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, Open Defecation Free (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi
8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Kota Probolinggo dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan industri di Kota Probolinggo
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.

13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas

5.2.37 Kota Surabaya

1. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial).
2. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Sektor Potensial (sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, serta jasa perusahaan) menjadi Sektor Unggulan
3. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (Industri dan pergudangan) dengan pusat distribusi (terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, jalan tol)
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional
5. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman antara lain akses air minum layak dan aman, penanganan daerah rawan air, akses layanan sanitasi (air limbah domestik, *Open Defecation Free* (ODF) dan penanganan persampahan) serta akses terhadap pemenuhan hunian yang layak
7. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tsunami, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi, covid-19, dan lekuefaksi

8. Peningkatan Kerjasama antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.
9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak (FA), yang merupakan inisiatif masyarakat sebagai upaya dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender
10. Peningkatan pelayanan korban kekerasan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan vokasional dan pelatihan kerja yang dilaksanakan di UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan kejuruan yang menyesuaikan kebutuhan industri di Kota Surabaya
12. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem 0 % pada tahun 2024.
13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, serta meningkatkan partisipasi mutu guru kependidikan dan menurunkan angka putus sekolah.
14. Mendukung Stranas Percepatan Penurunan Stunting melalui komitmen dalam peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat serta penguatan analisis dan pengembangan inovasi pada lokasi-lokasi prioritas.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Kondisi perekonomian dunia saat ini yang melambat ikut mempengaruhi perekonomian nasional dan Provinsi Jawa Timur, namun meskipun perekonomian sedang melambat kinerja yang positif ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Timur melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat berdampak pada meningkatnya kondisi keuangan Provinsi Jawa Timur di Tahun 2023, kondisi ini diharapkan akan terus membaik sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan di Tahun 2023 dapat tercapai. Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 telah menggunakan pendekatan money follow program dan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Artinya perencanaan dan penganggaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan Dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah tersebut maka kebijakan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah telah diarahkan sedemikian rupa agar mendukung sasaran prioritas pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan triwulan 2 serta penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKPD 2023. dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

6.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023

Sebagai upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Bab 4 dan selanjutnya dijabarkan hingga Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang diharapkan dapat

mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1 MATRIK PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN NASIONAL PADA
RKPD TAHUN 2023**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	APP (Anti Proverty Program) Bantuan sarana prasarana produksi berupa benih ikan, kolam wadah budidaya ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.206.500.000,00	2.206.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
				Pengembangan Pusat Agropolitan	Bhakti 6 - Jatim Agro	Pengembangan Kawasan Agropolitan Budidaya Gurame, Ikan Hias, Patin, Nila, Lele Bantuan sarana prasarana produksi berupa benih ikan, kolam ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	972.500.000,00	972.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Bantuan berupa rumah ikan, dan underwater restocking	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.000.000.000,00	3.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
				Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan	Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan perikanan dan masyarakat pesisir Pelatihan bagi pembudidaya ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	439.021.000,00	439.021.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Pelatihan bagi nelayan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	534.451.000,00	534.451.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	pelatihan bagi pengolah dan pemasar	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	548.335.000,00	548.335.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	pelatihan bagi masyarakat pesisir	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	449.000.000,00	449.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Pengembangan kawasan pertanian terpadu	Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan penyediaan SDI, keberlanjutan usaha dan penyempurnaan sarana prasarana Bantuan sarana produksi dan benih ikan budidaya laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	721.500.938,00	721.500.938	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Bantuan prasarana berupa kolam ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.712.000.000,00	2.712.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	penyempurnaan sarana prasarana UPT dan Instalasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	396.495.000,00	396.495.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Bantuan sarana produksi dan benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	10.696.121.000,00	10.696.121.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Penyempurnaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	83.421.268.537,00	83.421.268.537	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
				Pengembangan produk pangan berbasis agro	Bhakti 6 - Jatim Agro	Pengembangan produk olahan kelautan dan perikanan Pembinaan sertifikasi produk dan pemberian sarana peningkatan mutu produk	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.007.267.210,00	1.007.267.210	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Diversifikasi produk olahan kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	4.110.207.454,00	4.110.207.454	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
				Program petik olah kemas jual	Bhakti 6 - Jatim Agro	Nilai tambah produk olahan kelautan dan perikanan Pembinaan standar pengemasan produk perikanan. Sosialisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan di pelabuhan/pembudidaya/supplier/UPI/pasar modern	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Pertemuan Kampanye GEMARIKAN, HARKANAS, Pemilihan Duta GEMARIKAN, Lomba Masak Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.250.048.550,00	3.250.048.550	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Promosi Produk di Fasilitas Umum, Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam dan Luar Provinsi, Bazar Produk Kelautan dan Perikanan, Gelar Pasar Murah, Buyer Meet Seller	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.248.121.200,00	3.248.121.200	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Pengembangan Sistem informasi Manajemen Logistik Ikan melalui fish info	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.297.089.561,00	1.297.089.561	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
				Asuransi Petani	Bhakti 6 - Jatim Agro	Fasilitasi Asuransi Nelayan Fasilitasi Pendaftaran dan Pemanfaatan Asuransi Nelayan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.300.000.000,00	1.300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
				Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pelestarian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pertemuan sosialisasi pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	112.998.150,00	112.998.150	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di zona inti, zona penyangga, pemanfaatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	1.379.838.000,00	1.379.838.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	pertemuan pembinaan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	534.011.900,00	534.011.900	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	bantuan sarana prasarana pemberdayaan pesisir dan pulau- pulau kecil, garam rakyat.	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	2.557.180.500,00	2.557.180.500	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	pertemuan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	1.800.000.000,00	1.800.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	pertemuan dan fasilitasi sarana pengelolaan sampah plastik di wilayah pesisir dan laut	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	813.382.940,00	813.382.940	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	125.547.774,00	125.547.774	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan budidaya laut	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	620.306.555,00	620.306.555	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10-30 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.210.000.000,00	1.210.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	429.241.425,00	429.241.425	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	300.000.000,00	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	243.000.000,00	243.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi persetujuan pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	268.000.000,00	268.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	938.000.000,00	938.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	688.000.000,00	688.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	840.000.000,00	840.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	272.000.000,00	272.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	100.000.000,00	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.602.230.825,00	1.602.230.825	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	5.917.835.000,00	5.917.835.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Kegiatan pengawasan pada pemanfaatan Ruang Laut	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.385.107.000,00	8.385.107.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan tangkap di laut	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA	400.000.000,00	400.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							KELAUTAN DAN PERIKANAN			Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan budidaya di laut	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000,00	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan, Penumbuhkembangan SDM Kelompok masyarakat pengawas	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	220.000.000,00	220.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan tangkap di PUD	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	165.000.000,00	165.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Kegiatan pengawasan pada usaha perikanan budidaya di PUD	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000,00	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Kegiatan pengawasan pada usaha pengolahan dan pemasaran	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	65.000.000,00	65.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
			Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan							
			Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Ketahanan Pangan	Bhakti 6 - Jatim Agro	Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari / PEKAPARI dan Pengawasan PSAT pre market dan post market	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	375.000.000	375.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Tanam, Petik, Kemas, Olah, Jual	Bhakti 6 - Jatim Agro	Budidaya, Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Kopi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			900.000.000	900.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Budidaya, Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Kakao	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Perkebunan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SARANA PERTANIAN			
					Bhakti 6 - Jatim Agro			691.627.000	691.627.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Penguatan Usaha dan Pemasaran Hasil	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	750.000.000	750.000.000	Dinas Perkebunan
				Pengembangan Pusat Agropolitan	Bhakti 6 - Jatim Agro	Budidaya, Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Semusim Lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	260.000.000	260.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			150.000.000	150.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Budidaya, Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Tahunan Lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	280.000.000	280.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			280.000.000	280.000.000	Dinas Perkebunan
				Pengembangan produk pangan berbasis agro	Bhakti 6 - Jatim Agro	Pengolahan Hasil Produk Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	475.000.000	475.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			550.000.000	550.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	125.000.000	125.000.000	Dinas Perkebunan
				Pengembangan kawasan pertanian terpadu	Bhakti 6 - Jatim Agro	Budidaya, Penanganan Panen dan Pasca Panen Tanaman Tebu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.300.000.000	1.300.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			800.000.000	800.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			800.000.000	800.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			3.470.000.000	3.470.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Fasilitasi Perbenihan Tanaman Semusim Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	700.000.000	700.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Fasilitasi Perbenihan Tanaman Tahunan Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	1.050.000.000	1.050.000.000	Dinas Perkebunan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							SARANA PERTANIAN			
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Fasilitasi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	550.000.000	550.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Fasilitasi Pengawasan Peredaran Benih	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	425.000.000	425.000.000	Dinas Perkebunan
				Penguatan SDM Pertanian dan Gapoktan	Bhakti 6 - Jatim Agro	Penguatan kelembagaan petani perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	250.000.000	250.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			160.000.000	160.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			250.000.000	250.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Konservasi dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	400.000.000	400.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			150.000.000	150.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			70.000.000	70.000.000	Dinas Perkebunan
				Penanggulangan Kemiskinan	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Pengolahan Hasil Produk Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	300.000.000	300.000.000	Dinas Perkebunan
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			125.000.000	125.000.000	Dinas Perkebunan
				Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	APP (Anti Proverty Program) Bantuan sarana produksi berupa benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak, bahan pakan dan pakan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	600.000.000	600.000.000	Dinas Peternakan
				Pengembangan Pusat Agropolitan	Bhakti 6 - Jatim Agro	Bantuan sarana produksi berupa benih/bibit ternak, tanaman pakan ternak, bahan pakan dan pakan di kawasan Agropolitan.	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100.000.000	100.000.000	Dinas Peternakan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Pengembangan kawasan pertanian terpadu	Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan akses pemasaran produk olahan peternakan	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	800.000.000	800.000.000	Dinas Peternakan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan pengembangan budidaya ternak dan bibit	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.200.000.000	3.200.000.000	Dinas Peternakan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Pengendalian Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	600.000.000	600.000.000	Dinas Peternakan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan kualitas pakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	718.000.000	718.000.000	Dinas Peternakan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan kualitas SDM Peternak dan bantuan dalam peningkatan kualitas pakan ternak	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	300.000.000	300.000.000	Dinas Peternakan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan populasi ternak	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.200.000.000	3.200.000.000	Dinas Peternakan
				Pengembangan produk pangan berbasis agro	Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan daya saing	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	400.000.000	400.000.000	Dinas Peternakan
				Program petik olah kemas jual	Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan SDM peternak dalam meningkatkan nilai tambah dengan penanganan pasca panen	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	900.000.000	900.000.000	Dinas Peternakan
	penga			Asuransi Petani	Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan SDM peternak dalam pengelolaan resiko usaha peternakan	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	200.000.000	200.000.000	Dinas Peternakan
			Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan	ESDM berwawasan lingkungan	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pembangunan Energi Baru Terbarukan	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	20.000.000.000	20.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Energi Baru Terbarukan (EBT)							
			Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Communal Branding	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Satu merek yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, agar memiliki akses pasar yang kuat	Program Pengembangan UMKM	3.181.500.000	3.181.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
				One Pesantren One Product	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemberdayaan Santri, Pesantren dan alumni pondok pesantren untuk peningkatan kesejahteraan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	497.500.000	497.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	336.600.000	336.600.000	Dinas Koperasi dan UKM
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya					
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6.603.108.333	6.603.108.333	Dinas Koperasi dan UKM
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya					
				Revitalisasi Koperasi	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Menupayakan agar koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6.603.108.333	6.603.108.333	Dinas Koperasi dan UKM
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya					
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	497.500.000	497.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
				Pengembangan Koperasi	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Mengembangkan koperasi dengan mempermudah akses pembiayaan, memperluas akses pasar, dan pengembangan SDM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	336.600.000	336.600.000	Dinas Koperasi dan UKM
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya					
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	6.603.108.333	6.603.108.333	Dinas Koperasi dan UKM

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya					
				Kemitraan UKM dan BUMDesa	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Memfasilitasi pemasaran UKM dan BUMDesa	Program Pengembangan UMKM	3.181.500.000	3.181.500.000	Dinas Koperasi dan UKM
			Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor rill, dan industrialisasi	Service point, Pelatihan, Investasi, Co-working space dan pemberdayaan masyarakat	Bhakti 2 - Jatim Kerja	Implementasi LKPM Online bagi PMDN dan UKM	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.173.000.000	1.173.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Milenial Job Center	Bhakti 2 - Jatim Kerja		Program Pelayanan Penghubung	-	1.524.343.000	Bakorwil IV Pamekasan
				Service Point, Pelatihan, Investasi, Coworking Space dan Pemberdayaan Masyarakat	Bhakti 2 - Jatim Kerja		Program Pelayanan Penghubung	-	1.524.343.000	Bakorwil IV Pamekasan
				Milenial Job Center	Bhakti 2 - Jatim Kerja		Program Pelayanan Penghubung			Bakorwil II Bojonegoro
				Service Point, Pelatihan, Investasi, Coworking Space dan Pemberdayaan Masyarakat	Bhakti 2 - Jatim Kerja		Program Pelayanan Penghubung			Bakorwil II Bojonegoro
				Milenial Job Center	Bhakti 2 - Jatim Kerja		Program Pelayanan Penghubung	270.000.000,00	270.000.000	Bakorwil I Madiun
				Service Point, Pelatihan, Investasi, Coworking Space dan Pemberdayaan Masyarakat	Bhakti 2 - Jatim Kerja		Program Pelayanan Penghubung	150.000.000,00	150.000.000	Bakorwil I Madiun
				Millennial Job Center	Bhakti 2 - Jatim Kerja	Peningkatan daya saing KUKM melalui dukungan MJC	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	300.000.000	300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Perdagangan Antar Pulau	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Fasilitasi Promosi, Penguatan KPD dan Misi Dagang	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	12.200.000.000	12.200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Eco tourism (Pengembangan wisata berbasis lingkungan dan	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				partisipasi masyarakat)			DESTINASI PARIWISATA			
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	East Java Tourism Award (Destinasi)	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.500.000.000	3.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	East Java Tourism Award Industri Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Festival Makanan Khas Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.750.000.000	1.750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Sertifikasi Kompetensi SDM PAREKRAF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.500.000.000	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Halal tourism	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Percepatan Standarisasi Produk Usaha Pariwisata Halal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengembangan Kompetensi dan Kreatifitas SDM Ekonomi Kreatif Santri dibidang Seni	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pameran Wisata Halal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Festival Desa	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pendampingan Desa Wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Festival Dewi Cemara	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				SINANDO (Sinang Ndeso)	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pelatihan Kewirausahaan Masyarakat Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.295.000.000	4.295.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Restorasi Desa	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	pemberdayaan pemerintah Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	1.530.000.000	1.530.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Restorasi Desa	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	pemberdayaan pemerintah Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.825.000.000	1.825.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Restorasi Desa	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	pemberdayaan pemerintah Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.086.000.000	1.086.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Pengelolaan Hutan Lestari	Bhakti 6 - Jatim Agro	Optimalisasi PNPB	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	170.000.000	170.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			50.000.000	50.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			467.871.000	467.871.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			199.654.000	199.654.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			321.067.000	321.067.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			589.309.000	589.309.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan Izin Industri Hasil Hutan Bukan Kayu		43.956.000	43.956.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis		100.000.000	100.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	HHBK Premium		638.938.086	638.938.086	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			822.364.000	822.364.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan Legalitas Kayu Bulat		1.320.000.000	1.320.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan Ekspor Kayu olahan		250.738.203	250.738.203	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			781.917.900	781.917.900	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			82.338.600	82.338.600	Dinas Kehutanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur	Pengembangan sektor/komoditas /ke giatan unggulan daerah							
			Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	Pemenuhan Alat Keselamatan Jalan Dengan teknologi terbaru	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.150.000.000	17.483.358.329	Dinas Perhubungan
				Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pemeliharaan sarana prasarana keselamatan di perlintasan sebidang	Program Pengelolaan Perkeretaapian	8.300.000.000	1.492.896.500	Dinas Perhubungan
				Mudik Balik Gratis	Bhakti 4 - Jatim Akses	Mudik Balik Gratis Moda Bus	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.280.000.000	4.967.404.089	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Mudik Balik Gratis Sepeda Motor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	750.000.000	574.900.000	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses	-	Program Pengelolaan Perkeretaapian	3.479.700.000	-	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Mudik Balik Gratis Moda Kapal Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	1.200.000.000	1.233.172.800	Dinas Perhubungan
				Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut (Pelabuhan Pengumpan Regional)	Bhakti 4 - Jatim Akses	-	Program Pengelolaan Pelayaran	2.500.000.000,00	158.843.837.074	Dinas Perhubungan
				Pembangunan Kapal Perintis dan Subsidi Operasional Kapal di kepulauan Madura	Bhakti 4 - Jatim Akses	Subsidi Operasional Kapal	Program Pengelolaan Pelayaran	15.000.000.000	-	Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Pembangunan dan Pengembangan Bandara	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pengelolaan Bandara Abd. Saleh	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.000.000.000	-	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses			2.500.000.000	-	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses			15.000.000.000	1.007.969.000	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses			1.500.000.000	394.594.582	Dinas Perhubungan
				Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Bhakti 4 - Jatim Akses	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	86.436.531.500	300.000.000	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses			7.424.000.000	-	Dinas Perhubungan
					Bhakti 4 - Jatim Akses			7.424.000.000	10.324.000.000	Dinas Perhubungan
				Penanganan Jalan dan Jembatan	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Program Penyelenggaraan Jalan	3.753.750.000	24.000.000.000	Dinas PU Bina Marga
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Pemeliharaan Berkala Jalan		2.323.750.000	-	Dinas PU Bina Marga
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Pemeliharaan Rutin Jalan		36.351.201.108	110.919.635.520	Dinas PU Bina Marga
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Penggantian Jembatan		5.200.000.000	25.000.000.000	Dinas PU Bina Marga
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Rehabilitasi Jembatan		3.932.500.000	-	Dinas PU Bina Marga
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Pemeliharaan Rutin Jembatan		7.836.827.817	16.789.917.763	Dinas PU Bina Marga
			Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif							
			Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	Pembangunan jaringan backbone	Bhakti 4 - Jatim Akses	Upgrade Hardware Data Center	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.102.117.400		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	-Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional - Penanganan Desa Rawan Kekeringan	Bhakti 4 - Jatim Akses	- Pengembangan SPAM Umbulan - Penyiapan SPAM regional Probolinggo Lumajang (Probolajang)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.167.500.000	9.435.688.200	DPRKPKC

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 4 - Jatim Akses			28.000.000.000	75.029.396.707	DPRKPCK
					Bhakti 4 - Jatim Akses			26.000.000.000	9.647.208.800	DPRKPCK
				Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Bhakti 4 - Jatim Akses	Fasilitasi kerjasama TPA Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.000.000.000	766.739.000	DPRKPCK
					Bhakti 4 - Jatim Akses			1.000.000.000	780.877.000	DPRKPCK
					Bhakti 4 - Jatim Akses			49.000.000.000	-	DPRKPCK
				Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	106.270.000	285.930.100	DPRKPCK
				Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	6.263.730.000	3.273.678.300	DPRKPCK
				Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Laporan pelaksanaan pembangunan RUTILAHU	Program Kawasan Permukiman	40.600.000.000	40.637.910.000	DPRKPCK
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan							
			Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14.400.000.000		Dinas Sosial
				Pengurangan Beban 26 PMKS	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Pemberian pelayanan Dasar (makan, Sandang, Asrama, alat bantu, dan lain-lain) dan Pengembangan Potensi PMKS (Bimbingan Keterampilan, Bimbingan Spiritual dan lain-lain)	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.131.236.151		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			782.775.350		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			76.144.110		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			361.333.338		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			2.187.337.066		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera					Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			155.712.084		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			5.110.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			68.738.698		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			11.719.741.605		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			2.257.509.086		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			6.473.696.502		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			905.415.350		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			339.566.654		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			245.364.622		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			37.793.560		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			1.564.224.524		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			32.979.940		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			124.684.000		Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			70.313.600		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			432.144.524		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			9.542.409.912		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			704.203.479		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			1.095.089.744		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			406.440.989		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			2.206.403.945		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera					Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			1.261.818.432		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			10.015.600		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera					Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			180.383.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			89.016.200		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			992.259.800		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			55.188.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			51.100.000		Dinas Sosial

1000

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			119.632.765		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			6.132.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			15.841.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			51.100.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			10.220.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			3.165.543.311		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			433.973.497		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			138.482.001		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			338.059.055		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera					Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			25.550.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			51.611.000		Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera			355.668.264		Dinas Sosial
			Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Honorarium Perawat Ponkesdes	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	41.044.000.000	Dinas kesehatan
				Puskesmas Rawat Inap Standar	Bhakti 3 - Jatim	Honorarium Dokter Umum di Puskesmas Sesuai Standart	PROGRAM PENGELOLAAN		4.140.000.000	Dinas kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Cerdas dan Sehat		KEUANGAN DAERAH			
				Bunda Anak Impian (BUAIAN) melalui Pendampingan Bumil Risti	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pendampingan Bumil Risti	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.195.645.000	Dinas kesehatan
				Pencegahan Stunting bagi Ibu Hamil *)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pendampingan Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.194.770.000	Dinas kesehatan
				Konseling dari pintu ke pintu (KOPIPU)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Kunjungan konseling kesehatan (bidan, perawat ponkesdes dan ormas) memberikan Bantuan Transport Perawat Ponkesdes dan Pendampingan Konseling	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		3.166.393.500	Dinas kesehatan
				Santri Jatim Sehat Dan Berkah (SAJADAH)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pendampingan Poskestren *)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.309.194.000	Dinas kesehatan
				Penempatan dokter umum di puskesmas sangat terpencil *)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	pemberian Honor Dokter Umum Puskesmas kepulauan di Sumenep (9 org x 12 bln)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.188.000.000	Dinas kesehatan
				Roadshow promosi kesehatan	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pelaksanaan GERMAS	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	575.672.000	2.138.380.347	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	81.865.000	2.138.380.347	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Penurunan AKI - AKB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	286.526.000	1.398.718.000	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			2.972.905.000	695.909.000	Dinas kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Penurunan STUNTING	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.972.905.000	695.909.000	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			920.977.000	950.000.000	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			245.594.000	490.884.000	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			654.917.000	1.225.402.500	Dinas kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit (JANTUNG, DIABET, KANKER)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	654.917.000	1.225.402.500	Dinas kesehatan
				Pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan melalui Rumah Sakit Terapung	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Dukungan Pelayanan Kesehatan bergerak di Kepulauan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	725.203.000	2.247.820.000	Dinas kesehatan
				Kunjungan dokter spesialis/dokter resident senior ke daerah kepulauan atau koridor madura	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pemberian Honor untuk Kunjungan Pelayanan Kesehatan (Tim Dokter Spesialis) Di Kepulauan Dan Koridor Madura	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	129.527.000	1.884.428.000	Dinas kesehatan
				Tantistas (Kesehatan Gratis dan berkualitas)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	281.250.000.000	519.695.960.710	Dinas kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
			Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-Tas) (Bantuan Pengganti SPP untuk SMA, SMK dan PK-PLK)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Menggratiskan seluruh siswa jenjang pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK dari beban biaya operasional sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	291.729.045.500	117.804.880.000	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			658.871.395.300	284.610.042.896	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			18.167.709.200	7.466.250.000	Dinas Pendidikan
				Peningkatan Kualitas Sarpras Pendidikan	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Bantuan Rehab, Pengadaan Meubeler	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.011.300.904	109.851.979.000	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			7.878.729.784	473.000.000	Dinas Pendidikan
								563.641.224	8,727,953,000	
								1.073.524.104	12,321,816,000	
								-	9,241,362,000	
								200.409.784	2,566,760,000	
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1,073,524,104	178,150,367,000	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			-		Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			200.409.784		Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			226,642,744	3,000,000,000	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim			50.457.585.064		Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Cerdas dan Sehat					
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			5,129,265,144	23,523,746,108	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			10,300,275,144	16,430,400,000	Dinas Pendidikan
								-	3,000,000,000	Dinas Pendidikan
								-	530,400,000	
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	802.759.064		Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			2,675,734,584	5,877,490,000	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			2,136,425,944	11,325,170,000	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			782.589.304		Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			1.130.686.664		Dinas Pendidikan
								-	1,381,410,000	
								-	3,593,440,000	
								-	767,460,000	
				Revitalisasi SMK melalui Sekolah Pengampu	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pembentukan sekolah pengampu dalam bentuk pembangunan laboratorium/studio praktek bersama	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5,129,265,144	23,523,746,108	Dinas Pendidikan
				Double Track SMA	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Tambahan Ketrampilan bagi Siswa SMA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38,455,202,984	47,444,800	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pemberian tambahan kesejahteraan GTT dan PTT	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	74,459,035,784	96,175,826,880	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			87,206,257,544	99,758,884,440	Dinas Pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat			3,487,557,544	5,629,407,780	Dinas Pendidikan
				MILEA	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Memberikan tambahan ketrampilan bagi siswa SMK dan Guru SMK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	10,817,434,904	15,394,600	Dinas Pendidikan
				SMA Pengimbas	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Memberikan bantuan sarana prasarana bagi SMA Pengimbas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	563,641,224	-	Dinas Pendidikan
				SMA Boarding	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pembangunan asrama, sarana prasarana asrama.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	38,455,202,984	47,444,800	Dinas Pendidikan
				Beasiswa untuk SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Memberikan Beasiswa kepada siswa yang akan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Jurusan Prioritas yaitu Kelautan, Teknologi Pertanian dan Pariwisata.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	658,871,395,300	284,610,042,896	Dinas Pendidikan
				Pendidikan vokasi di pesantren	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Tambahan Ketrampilan bagi siswa SMK di Pondok Pesantren	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-		Dinas Pendidikan
				Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Memberikan tambahan ketrampilan bagi siswa yang mengikuti program kejar Paket	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	5,000,000,000	Dinas Pendidikan
				Pesantren Pengasuhan Anak Masa Depan (Pesan Aman)	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	program pengasuhan yang menyasar anak-anak dari keluarga petani dan nelayan miskin serta yatim piatu yang selama ini tidak hanya tidak bisa mengakses pendidikan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-		Dinas Pendidikan
				Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah	Bhakti 3 - Jatim	pemberian Bantuan Operasional Sekolah untuk MADRASAH DINIYAH	PROGRAM PENGELOLAAN	-	200,332,190,000	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				dan Guru Swasta (BPPDGS) atau BOSDA MADIN	Cerdas dan Sehat	(BOSDA MADIN) adalah bantuan dana penyelenggaraan pendidikan untuk Santri/Warga Belajar/Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap	KEUANGAN DAERAH			
				Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Kepala / GURU TK/ PAUD Non PNS	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	7,524,000,000	Dinas Pendidikan
				Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Guru Non PNS	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	bantuan dana yang disalurkan langsung Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk Pemberian Honorarium Kinerja Guru Non PNS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	4,270,000,000	Dinas Pendidikan
			Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Pemuda Wirausaha	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	1. Pelatihan Kader Wirausaha muda pemula; 2. Pemagangan pemuda wirausaha	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.065.546.267	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Optimalisasi pemenuhan ruang laktasi, ramah anak dan disabilitas di perkantoran, sekolahan dan berbagai ruang publik yang lain	Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pelatihan bagi fasilitator gender dari Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi sebagai pendamping mendukung pengembangan PPRG di Desa	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	360.934.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pelatihan bagi fasilitator gender dari Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi sebagai pendamping	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	564.138.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						mendukung pengembangan PPRG di Desa	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Anak, dan Kependudukan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Bimbingan Pengelolaan Usaha Bagi Perempuan Bidang hukum, Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.090.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
				Mewujudkan Kab/Kota Ramah Anak, ramah disabilitas dan ramah lansia	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Percepatan Penurunan Perkawinan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	204.988.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
					Bhakti 5 - Jatim Berkah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	101.252.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
					Bhakti 5 - Jatim Berkah	Bimtek KHA (Konvensi Hak Anak), - Kerjasama dengan NGO, Media dan Dunia Usaha dalam rangka Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	392.000.000		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
				Jatim Satya (Jawa Timur Sejahtera dan Mulya): Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan -Program Jatim Puspa	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Pemberian bantuan modal kepada Wanita Produktif		17.524.250.000		BPKAD
				Program Desa Berdaya	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemberian bantuan kepada Desa Mandiri dalam upaya Pengembangan desa tematik dengan economic branding untuk menggerakkan kembali perekonomian di desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.800.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Desa Berdaya	Bhakti 7 - Jatim Berdaya			13.200.000.000		BPKAD
				Pemberdayaan BUMDesa,	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemberian bantuan modal kepada BUMDesa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Pemberdayaan BUMDesa,	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemberian bantuan modal kepada BUMDesa		15.075.000.000		BPKAD
				PKH Plus	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Bantuan Sosial untuk Lanjut Usia	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100.000.000.000		Dinas Sosial
			Peningkatan produktivitas dan daya saing	Eco tourism (Pengembangan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat)	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.210.000.000	1.210.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Halal tourism	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengembangan Wisata Halal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	363.000.000	363.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Festival Desa	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Mengadakan Festival Desa untuk mengukir Ekonomi dan mempertahankan kebudayaan lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.480.500.000	2.480.500.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pemuda Wirausaha	Bhakti 7 - Jatim Berdaya	1. Pelatihan Kader Wirausaha muda pemula; 2. Pemagangan pemuda wirausaha	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.065.546.267	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Penghargaan bagi para pelaku olahraga yang berprestasi Nasional dan Internasional	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pemberian Penghargaan/Bonus/ Uang pembinaan bagi atlet dan pelatih yang memperoleh medali dalam kejuaraan Multi event tingkat nasional dan internasional	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	300.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Partisipasi dalam kejuaraan multi even tingkat nasional		3.000.000.000		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pelatihan kerja di 16 UPT BLK	Bhakti - 2 : Jatim Kerja.	Program pelatihan kerja reguler di 16 UPT BLK	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		25,827,572,349	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK	Bhakti - 2 : Jatim Kerja.	Program pelatihan kerja reguler di 16 UPT BLK	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Job Market Fair	Bhakti - 2 : Jatim Kerja.	Job Market Fair di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja		2,413,521,785	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				MTU (Mobile Training Unit)	Bhakti – 2 : Jatim Kerja.	Program pelatihan kerja reguler di 16 UPT BLK menggunakan sarana Mobile Training Unit	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Revitalisasi UPT BLK	Bhakti – 2 : Jatim Kerja.	Rehab gedung dan sarana prasarana pelatihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1,616,044,084	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan pelestarian Nilai-Nilai budaya lokal	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	Pembentukan karakter pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya lokal dan toleransi	Bhakti 5 - Jatim Berkah	1. Pemberdayaan Kader pemuda pelopor; 2. Pengiriman Pemuda Pelopor tingkat Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	350.000.000	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Bhakti 5 - Jatim Berkah	1. Jambore Pemuda daerah; 2. Pemberdayaan Kader Pemuda anti narkoba; 3. Pembinaan Pemuda Kader Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (PEPELENGASIH)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.500.000.000	195,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Tunjangan Kehormatan bagi penjaga Situs Budaya	Bhakti 5 - Jatim Berkah	pemberian tunjangan kepada penjaga situs budaya	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.500.000.000	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Intergrasi Perpustakaan - Museum - Galeri Seni	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	mengintegrasikan antara Museum, galeri seni dan Perpustakaan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Museum Etnografi Festival, Pemilihan Duta Museum,	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.500.000.000	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						Gelar WBTB (Warisan Budaya Tak Benda)				
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pameran Seni Rupa (Aktivasi Galeri Prabangkara)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	800.000.000	800.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Rumah Data Kebudayaan Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	500.000.000	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	500.000.000	500.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pendokumentasian Seni Budaya Jawa Timur (yang telah terdaftar dalam WBTB)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	750.000.000	750.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pendokumentasian Pergelaran Kesenian di Taman Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	600.000.000	600.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.057.000.000	2.057.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengakuan masyarakat hukum adat menuju desa adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.075.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Festival Desa	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Festival Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.175.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tunjangan Kehormatan untuk Imam Masjid @Rp. 2.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	24,000,000,000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Tunjangan Kehormatan untuk Huffadz (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tunjangan kehormatan untuk Hafidz dan Hafidzah @Rp. 250.000,- /bulan	Program Kesejahteraan Rakyat	23,000,000,000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Beasiswa S1 Ma'had Aly (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Pemberian beasiswa Ma'had Aly	Program Kesejahteraan Rakyat	4,250,000,000		Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAHTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						Beasiswa S-3 Pendidikan Guru Pendidikan Diniyah	Program Kesejahteraan Rakyat	3,000,000,000		
				Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Beasiswa S2 Pendidikan Guru Pendidikan Diniyah @Rp. 20.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	6,400,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
						Beasiswa Al-Azhar Cairo	Program Kesejahteraan Rakyat	13,000,000,000		
				Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tunjangan Kehormatan untuk Imam Masjid @Rp. 2.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	24.000.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Tunjangan Kehormatan untuk Huffadz (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tunjangan kehormatan untuk Hafidz dan Hafidzah @Rp. 250.000,- /bulan	Program Kesejahteraan Rakyat	23.000.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Bantuan Beasiswa S1 bagi Guru Madrasah Diniyah (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Beasiswa S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Diniyah @Rp. 10.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	5.100.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Beasiswa S1 Ma'had Aly (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Pemberian beasiswa Ma'had Aly	Program Kesejahteraan Rakyat	4.250.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Beasiswa S2 Pendidikan Guru Pendidikan Diniyah @Rp. 20.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	6.400.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Tali Asih Bagi Janda Perintis Kemerdekaan dan Perintis Kemerdekaan	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tali Asih dalam bentuk barang (Sembako dan Bingkisan)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.298.153.100		Dinas Sosial
				Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial						
				Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter						

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kemandirian pangan, dam pengelolaan sumber daya energi	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pembangunan Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IR SR) bagi masyarakat miskin	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	10.000.000.000	10.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			Infrastruktur Ekonomi	Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Operasi 176 Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi dengan Total Luasan 164.823 Ha dan Pemeliharaan Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan < 40%, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi dengan Tingkat Kerusakan > 40%.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	19.877.057.000	49.229.734.501	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			6.228.180.000	4.638.008.554	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			717.107.000	290.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	748.496.000	11.417.373.001	Dinas PU Sumber Daya Air
									63.737.947.001	Dinas PU Sumber Daya Air
				Penanganan Banjir	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pemantauan Banjir, Operasi dan Pemeliharaan pada 5 (lima) Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dan Pemantauan Banjir pada 2 (dua) Wilayah Sungai Kewenangan Pusat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.013.137.000	579.388.400	Dinas PU Sumber Daya Air
									140.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			6.823.789.000	290.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			1.216.632.000	1.999.923.100	Dinas PU Sumber Daya Air
									18.499.999.999	Dinas PU Sumber Daya Air

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 4 - Jatim Akses			448.494.000	1.750.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			2.507.209.000	1.307.879.272	Dinas PU Sumber Daya Air
									500.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			5.850.867.000	27.271.598.988	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			2.989.260.000	2.217.519.110	Dinas PU Sumber Daya Air
									2.500.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			2.803.967.000	4.177.369.751	Dinas PU Sumber Daya Air
									18.625.736.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			1.238.203.000	2.167.025.100	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			1.451.080.000	2.288.221.752	Dinas PU Sumber Daya Air
									1.000.000.000	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			10.417.800.000	11.717.635.535	Dinas PU Sumber Daya Air
					Bhakti 4 - Jatim Akses			311.692.000	1.025.764.360	Dinas PU Sumber Daya Air
			Infrastruktur Perkotaan							
			Energi dan Ketenagalistrikan							
			Transformasi Digital							
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Peningkatan ketahanan Bencana dan kualitas	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	800.000.000	730.168.050	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Bencana dan Perubahan Iklim	lingkungan Hidup					Kerusakan Lingkungan Hidup			
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			200.000.000	37.130.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			3.000.000.000	2.159.819.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			685.404.000	235.304.550	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			222.840.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			155.960.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			150.000.000	30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			160.796.000	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			600.000.000	532.382.900	Dinas Lingkungan Hidup
				Penaatan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Bhakti 9 - Jatim Harmoni		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	75.000.000	55.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			283.000.000	165.014.500	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			347.397.000	510.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			46.000.000	32.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni		Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup	250.000.000	185.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penguatan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	200.000.000	115.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			100.000.000	216.194.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			100.000.000	40.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penguatan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	354.000.000	270.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Hutan Lestari	Bhakti 6 - Jatim Agro	Redistribusi Manfaat hutan untuk Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	315.000.000	315.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			50.000.000	50.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan		315.000.000	315.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Optimalisasi potensi Sumber Daya Hutan		220.000.000	220.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			100.000.000	100.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Peningkatan penggunaan Bibit Bersertifikat		31.500.000	31.500.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			37.000.000	37.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			54.500.000	54.500.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			89.500.000	89.500.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			140.500.000	140.500.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Padat Karya Penyelamatan DAS		184.443.521	184.443.521	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			3.951.991.690	3.951.991.690	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			1.617.405.000	1.617.405.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			240.337.990	240.337.990	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			707.000.000	707.000.000	Dinas Kehutanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 6 - Jatim Agro			646.866.210	646.866.210	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			506.438.200	506.438.200	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Mitigasi Kebakaran Hutan		150.000.000	150.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			150.000.000	150.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			300.000.000	300.000.000	Dinas Kehutanan
				Akses Kelola Hutan untuk Masyarakat / Social Forestry	Bhakti 6 - Jatim Agro	Penyuluh handal, Kelompok Tani Hutan semakin mandiri	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	948.920.282	948.920.282	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			617.159.918	617.159.918	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			1.198.193.400	1.198.193.400	Dinas Kehutanan
				High Conservation Value (HCV)	Bhakti 6 - Jatim Agro	Efektifnya Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Tahura	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	16.000.000	16.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			4.412.560.000	4.412.560.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			37.450.000	37.450.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			12.800.000	12.800.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			1.307.514.000	1.307.514.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			67.250.000	67.250.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			38.400.000	38.400.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			63.365.000	63.365.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			65.000.000	65.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			31.324.000	31.324.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Penangkaran Satwa tidak dilindungi		103.202.000	103.202.000	Dinas Kehutanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Kawasan Ekosistem Esensial		74.510.000	74.510.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			243.877.000	243.877.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			83.593.000	83.593.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			94.818.000	94.818.000	Dinas Kehutanan
				DAS Berkualitas	Bhakti 6 - Jatim Agro	Integrasi Pemulihan DAS	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	75.000.000	75.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			100.000.000	100.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			280.000.000	280.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			50.000.000	50.000.000	Dinas Kehutanan
					Bhakti 6 - Jatim Agro			215.000.000	215.000.000	Dinas Kehutanan
			Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.	Program Penanggulangan Bencana	6.000.000.000	2.461.000.000	BPBD
				Peralatan Peringatan Dini (EWS) Bencana	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Serangkaian peralatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana.	Program Penanggulangan Bencana	3.000.000.000	1.815.000.000	BPBD
				Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat Darurat Bencana	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pemenuhan bantuan untuk korban terdampak bencana yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.	Program Penanggulangan Bencana	6.000.000.000	4.215.088.200	BPBD
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			1.000.000.000	2.069.301.600	BPBD
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			7.000.000.000	9.405.414.800	BPBD

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Pemulihan Sarana Prasarana Pasca Bencana	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pembangunan kembali prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.	Program Penanggulangan Bencana	9.000.000.000	7.157.469.000	BPBD
				Karang Taruna Siaga Bencana Berbasis Budaya (KANCANA BERDAYA)	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pelatihan/Bimtek Kebencanaan Kepada Karang Taruna	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.298.153.100		Dinas Sosial
				Kampung Siaga Bencana (KSB)	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Bantuan Lauk Pauk untuk KSB	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.385.241.791		Dinas Sosial
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			1.149.977.175		Dinas Sosial
			Pembangunan Rendah Karbon	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penanganan dan Pengurangan sampah dan Limbah B3	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	150.000.000	170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			377.000.000	130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni		Program Pengelolaan Persampahan	100.000.000	134.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			50.000.000	26.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			463.400.000	211.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			62.820.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			1.092.780.000	279.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkugan Hidup	202.000.000	60.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			228.000.000	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			75.000.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			225.000.000	177.689.400	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)	354.000.000	4.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			250.000.000	892.732.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			200.000.000	393.242.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni			450.000.000	1.209.026.000	Dinas Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Konsolidasi Demokrasi	kakanda	Bhakti 8 - Jatim Amanah	Sosialisasi Perda dan Perkada kepada Pelajar SMU/SMK	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	354.000.000	354.000.000	Satpol PP
			Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri							
			Penegakan Hukum Nasional							
			Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Aplikasi E- Government	Bhakti 8 - Jatim Amanah	Pengembangan Aplikasi BIG DATA Jawa Timur	PROGRAM PENGELOLAAN	2.500.000.000		DINAS KOMUNIKASI

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Berbasis CETTAR (Aplikasi CETTAR)			APLIKASI INFORMATIKA			DAN INFORMATIKA
				Program yang mengelola Big Data OPD, ASN, dan Penanganan Complain Terpadu (Complaint Handling System)	Bhakti 8 - Jatim Amanah	SATU DATA JAWA TIMUR	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	175.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				KOPILABORASI	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	KOPILABORASI (ngopi dan Kolaborasi Serap Aspirasi) bersama Gubernur dan/atau Wakil Gubernur	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.275.079.800		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bhakti 8 - Jatim Amanah	Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Program Penataan Organisasi	1.200.000.000	1.200.000.000	Biro Organisasi
					Bhakti 8 - Jatim Amanah	Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi Jawa Timur		1.500.000.000	1.500.000.000	Biro Organisasi
				Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Bhakti 8 - Jatim Amanah	Percepatan Inovasi Pelayanan Publik		2.000.000.000	2.000.000.000	Biro Organisasi
				Penelitian dan Pengembangan	Bhakti 8 - Jatim Amanah	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	111.843.179	130.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			345.697.099	100.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			526.679.698	313.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			449.406.229	124.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			376.199.784	80.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			228.770.139	220.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			559.215.895	362.500.000	Badan Penelitian dan Pengembangan
			Menjaga stabilitas keamanan nasional	Jarak (Jatim Anti Radikal)	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyuluh Terpadu Anti Radikalisme	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	1.160.000.000	1.160.000.000	Badan Kesatuan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU PERUBAHAN ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
							NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			Bangsa dan Politik
				Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Bhakti 8 - Jatim Amanah	Penyusunan LPPD Provinsi Jawa Timur	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.227.034.000	4.227.034.000	Biro Administrasi dan Otonomi dan Daerah
					Bhakti 8 - Jatim Amanah	Fasilitasi Layanan pengadaan tanah untuk kepentingan umum		2.421.770.000	2.421.770.000	Biro Administrasi dan Otonomi dan Daerah
					Bhakti 8 - Jatim Amanah	LKPJ Gubernur Jatim		1.523.498.000	1.523.498.000	Biro Administrasi dan Otonomi dan Daerah
					Bhakti 8 - Jatim Amanah	Fasilitasi Kerjasama antar pemerintah maupun Badan usaha		1.713.236.000	1.713.236.000	Biro Administrasi dan Otonomi dan Daerah
					Bhakti 8 - Jatim Amanah			1.034.555.000	1.034.555.000	Biro Administrasi dan Otonomi dan Daerah

6.2 Prioritas Pembangunan Pengembangan Pedesaan

Pelaksanaan pembangunan Desa merupakan salah satu agenda prioritas yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu Langkah untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sebagai bentuk percepatan pembangunan desa, provinsi Jawa Timur melaksanakan beberapa prioritas pengembangan Desa di beberapa desa yang disajikan pada tabel 6.2 berikut :

**Tabel 6.2 MATRIK PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH DAN NASIONAL PADA RKPD TAHUN 2023**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Dharma Bhakti Nagari	Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	PKH Plus	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PAD				Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PAD				Dinas Sosial
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Pemberian bantuan modal kepada Wanita Produktif (Jatim Puspa)				PAD				Dinas PMD
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemberian bantuan modal kepada BUMDesa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga	PAD				Dinas PMD

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
									Kerjasama antar Desa					
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya		BK	BK	BK	PAD				Dinas PMD
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemberian bantuan kepada Desa Mandiri dalam upaya Pengembangan desa tematik dengan economic branding untuk menggerakkan kembali perekonomian di desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	PAD				Dinas PMD
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya		BK	BK	BK	PAD				Dinas PMD

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PAD		Sejawa Timur	35,000,000,000	Dinas Kesehatan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA, SMK dan PK-PLK	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	PAD		Sejawa Timur	117,804,880,000	Dinas pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	BOSDAMADIN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	PAD		Sejawa Timur	200,332,190,000	Dinas pendidikan
					Bhakti 3 - Jatim Cerdas dan Sehat	Pembiayaan Kesehatan PBI - JKN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PAD		Sejawa Timur	519,695,960,710	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAHTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 1 - Jatim Sejahtera	Pelatihan Kerja Berbasis MTU	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PAD				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Pekarangan Pangan Lestari (Pekapari) / Rumah Pangan Lestari (RPL)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	PAD	Kediri, Lamongan, Bojonegoro, Jember, Probolinggo, Malang, Pamekasan			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Bhakti 6 - Jatim Agro	Kolam Lele Keluarga (Kolega)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau	PAD	Kediri, Lamongan, Bojonegoro, Jember, Probolinggo, Malang, Pamekasan			Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
									Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
					Bhakti 4 - Jatim Akses	Pembangunan Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IR SR) bagi masyarakat miskin	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	PAD	Jember, Probolinggo, Pamekasan	Jember, Probolinggo, Pamekasan, Blitar, Bondowoso, Trenggalek, Tulungagung, Ngawi, Situbondo	10.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Bhakti 7 - Jatim Berdaya	Pemuda Wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sikronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	PAD			200,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Penghargaan Bagi Para Pelaku Olahraga yang Berprestasi Nasional dan Internasional	Bhakti 9 - Jatim Harmoni	- KONI; - NPCI	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	PAD			50,500,000,000	
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	1. Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar (SPOP); 2. Sentra Pembinaan Olahraga Khusus (SPOK)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	PAD			2,500,000,000	
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Pemberdayaan Masyarakat (POM)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	PAD			2,500,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					Bhakti 9 - Jatim Harmoni	Partisipasi dalam Kejuaraan Multi Event Tingkat Nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	PAD			500,000,000	
		Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal		Pembentukan Karakter Pemuda yang diilhami nilai-nilai agama, budaya lokal dan toleransi	Bhakti 5 - Jatim Berkah	1. Pemberdayaan Kader Pemuda Pelopor; 2. Pengiriman Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	PAD			200,000,000	
						PPAN DAN PPAP	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	PAD			195,000,000	
						Pelaksanaan PASKIBRAKA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, Upacara Parade Senja	PAD			2,740,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
						Pemberdayaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Aset Provinsi Yang Layak Fungsi (9 Aset Provinsi)	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	PAD			5,657,574,000	
			Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata	- Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional - Penanganan Desa Rawan Kekeringan	Bhakti 4 - Jatim Akses	- Pengembangan SPAM Umbulan & Rawan Air - Penyiapan SPAM regional Probolinggo Lumajang (Probolajang)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	PAD	Kediri, Lamongan, Malang		75.029.396.707	DPRKPKC
				Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Bhakti 4 - Jatim Akses	Pembangunan infrastruktur untuk penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	Bojonegoro, Malang, Pamekasan		3.273.678.300	DPRKPKC

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAHTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Rumah Tingga Layak Huni (RUTILAHU)	Bhakti 4 - Jatim Akses	Laporan pelaksanaan pembangunan RUTILAHU	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	PAD	Rutilahu: Bojonegoro, Jember, Malang		40.637.910.000	DPRKPKK
	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi Di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6)	Pelatihan kerja di 16 UPT BLK	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PAD	16 UPT BLK		25,827,572,349	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pelatihan intensif 480 jam 16 UPT BLK	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PAD	16 UPT BLK			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
					un keunggulan Ekonomi"									
				Job Market Fair	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	PAD	16 UPT BLK		2,413,521,785	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				MTU (Mobile Training Unit)	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PAD	16 UPT BLK			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Revitalisasi UPT BLK	Bhakti - 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	16 UPT BLK		1,616,044,084	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan pelestarian Nilai-Nilai budaya lokal	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	Tunjangan kehormatan bagi Imam Masjid (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tunjangan Kehormatan untuk Imam Masjid @Rp. 2.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				24,000,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Tunjangan Kehormatan untuk	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Tunjangan kehormatan untuk Hafidz	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	PAD	Jawa Timur		23,000,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM ICON/PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	NAWA BHAKTI	URAIAN KEGIATAN PRIORITAS	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
				Huffadz (Belanja Hibah)		dan Hafidzah @Rp. 250.000,-/bulan								
				Beadiswa S1 Ma'had Aly (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Pemberian beasiswa Ma'had Aly	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	PAD	Jawa Timur		4,250,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Beadiswa S-3 Pendidikan Guru Pendidikan Diniyah	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	PAD	Jawa Timur		3,000,000,000	
				Mahasiswa S2 bagi Guru Madrasah Diniyah (Belanja Hibah)	Bhakti 5 - Jatim Berkah	Beadiswa S2 Pendidikan Guru Pendidikan Diniyah @Rp. 20.000.000,-	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	PAD	Jawa Timur		6,400,000,000	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Beadiswa Al-Azhar Cairo	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	PAD	Jawa Timur		13,000,000,000	

6.3. Standar Pelayanan Minimal

SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hadirnya SPM ini menjadi sebuah jaminan adanya pelayanan minimal yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Terjamin kuantitas dan kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan. Penerapan SPM memiliki nilai yang sangat strategis, baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik. Penerapan SPM yang dilakukan oleh setiap kepala daerah dan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah. Sebagai tolak ukur SPM di Jawa Timur disajikan pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6.3 MATRIK PENYELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA SPM

NO	URUSAN		JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pendidikan	1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sidoarjo	90880 Peserta didik	50,416,250,000	Dinas Pendidikan
								Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten Malang	26203 Peserta didik	10,937,720,000	Dinas Pendidikan
								Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Malang	25132 Peserta didik	13,207,880,000	Dinas Pendidikan
								Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Ponorogo	19003 Peserta didik	7,430,945,000	Dinas Pendidikan
								Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Tulungagung	21516 Peserta didik	9,023,069,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Gresik	20367 Peserta didik	10,917,320,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	18191 Peserta didik	8,735,740,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Jombang	19047 Peserta didik	7,177,520,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bojonegoro	29096 Peserta didik	15,269,909,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Lamongan	19208 Peserta didik	7,573,750,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Madiun	21409 Peserta didik	9,361,635,242	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pacitan	3853 Peserta didik	1,344,540,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kediri	28100 Peserta didik	14,726,391,800	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Nganjuk	14750 Peserta didik	6,027,300,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Blitar	13866 Peserta didik	5,976,922,500	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pasuruan	18157 Peserta didik	7,172,187,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Probolinggo	18923 Peserta didik	8,143,140,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMA negeri yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Jember	37208 Peserta didik	15,534,201,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bondowoso	18009 Peserta didik	6,311,855,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Banyuwangi	20432 Peserta didik	8,095,290,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bangkalan	16154 Peserta didik	5,713,870,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sampang	12264 Peserta didik	3,803,175,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pamekasan	13567 Peserta didik	4,424,400,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sumenep	14938 Peserta didik	5,480,720,000	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8504 orang	96,175,826,880	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah Sidoarjo	203 lembaga	111.541.480.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MALANG	60 lembaga	42.334.010.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah KAB MALANG	72 lembaga	38.884.700.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PONOROGO	42 lembaga	22.498.290.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah TULUNGAGUNG	41 lembaga	29.387.910.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah GRESIK	53 lembaga	21.356.350.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MOJOKERTO	51 lembaga	26.767.350.000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah JOMBANG	47 lembaga	22.982.430.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BOJONEGORO	86 lembaga	38.285.040.336	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah LAMONGAN	72 lembaga	15.788.990.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah MADIUN	46 lembaga	32.214.030.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PACITAN	11 lembaga	7.314.980.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah KEDIRI	48 lembaga	36.211.350.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah NGANJUK	29 lembaga	18.142.410.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BLITAR	33 lembaga	21.539.670.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PASURUAN	53 lembaga	28.311.920.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PROBOLINGGO	90 lembaga	17.284.350.000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah JEMBER	94 lembaga	47.121.660.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BONDOWOSO	47 lembaga	18.352.890.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BANYUWANGI	50 lembaga	28.032.990.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah BANGKALAN	71 lembaga	10.700.670.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SAMPANG	82 lembaga	7.230.420.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah PAMEKASAN	79 lembaga	9.603.360.000	Dinas Pendidikan
							Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	86 lembaga	5.438.490.000	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	13307 orang	99,758,884,440	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sidoarjo	103.155 Peserta didik	99,935,882,896	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Kab. Malang	49.974 Peserta didik	34,418,160,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Malang	38.688 Peserta didik	39,107,735,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Ponorogo	30.812 Peserta didik	20,240,530,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Tulungagung	39.134 Peserta didik	27,292,700,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Gresik	21.599 Peserta didik	19,132,870,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	30.386 Peserta didik	24,316,090,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah jombang	30.830 Peserta didik	20,224,515,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) Wilayah BOJONEGORO	43.091 Peserta didik	37,197,899,400	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Lamongan	19.996 Peserta didik	13,572,025,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah madiun	40.619 Peserta didik	30,448,440,658	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Pacitan	11.526 Peserta didik	6,974,895,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Kediri	40.344 Peserta didik	31,710,648,600	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Nganjuk	23.648 Peserta didik	16,762,795,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Blitar	27.849 Peserta didik	20,032,266,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Pasuruan	35.373 Peserta didik	26,024,027,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Probolinggo	21.101 Peserta didik	16,402,765,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Jember	63.257 Peserta didik	42,509,612,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bondowoso	25.727 Peserta didik	16,428,370,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Banyuwangi	37.887 Peserta didik	24,681,870,104	Dinas Pendidikan	
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bangkalan	14.436 Peserta didik	9,511,690,000	Dinas Pendidikan	
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Sampang	10.770 Peserta didik	6,371,501,000	Dinas Pendidikan	
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pamekasan	14.024 Peserta didik	8,944,830,000	Dinas Pendidikan	
							Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah sumenep	7.030 Peserta didik	5,093,485,000	Dinas Pendidikan	
		2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah sidoarjo	103.155 Peserta didik	2,725,650,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kabupaten Malang	49.974 Peserta didik	613,950,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Malang	38.688 Peserta didik	919,100,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah ponorogo	847 Peserta didik	669,300,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Tulungagung	39.134 Peserta didik	846,244,800	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah gresik	21.599 Peserta didik	376,950,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Mojokerto	30.836 Peserta didik	629,950,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah jombang	30.830 Peserta didik	710,100,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bojonegoro	43.091 Peserta didik	1,029,811,600	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Lamongan	363 Peserta didik	285,750,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah madiun	40.619 Peserta didik	1,003,500,500	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pacitan	180 Peserta didik	154,440,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Kediri	40.344 Peserta didik	1,246,939,600	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Nganjuk	23.648 Peserta didik	494,950,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Blitar	5.290 Peserta didik	838,580,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pasuruan	527 Peserta didik	696,967,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Probolinggo	21.101 Peserta didik	410,550,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Jember	63.257 Peserta didik	972,593,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah bondowoso	25.727 Peserta didik	304,800,000	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah banyuwangi	37.877 Peserta didik	1,044,950,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Bangkalan	14.436 Peserta didik	121,400,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Sampang	110 Peserta didik	93,544,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Pamekasan	14.024 Peserta didik	163,200,000	Dinas Pendidikan
							Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah sumenep	7.030 Peserta didik	173,250,000	Dinas Pendidikan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	7544 orang	5,629,407,780	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
2	Kesehatan	1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi yang dilayani	100 %	409.323.000	Dinas Kesehatan
		2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100 %	409.323.000	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum	1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen supervisi	1 dokumen	9.435.688.200	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah infrastruktur SPAM yang dibangun	60 unit	75.029.396.707	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	2 dokumen	110.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 dokumen	110.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	2 dokumen	110.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	2 dokumen	110.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 dokumen	110.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat.	2 dokumen	110.320.000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1 dokumen	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
6	Sosial	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permakannya	875 orang	10.278.164.500	Dinas Sosial

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya	875 orang	896.750.000	Dinas Sosial
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas di dalam panti yang menerima alat bantu mobilitas	875 orang	590.552.056	Dinas Sosial
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas di dalam panti yang menerima perbekalan kesehatan	875 orang	1.297.794.004	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas di dalam panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	875 orang	278.900.000	Dinas Sosial
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	875 orang	229.950.000	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar dalam panti yang mendapatkan layanan pemulangan ke keluarga	875 orang	5.600.000	Dinas Sosial

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar yang dilaksanakan	875 orang	5.563.171.295	Dinas Sosial	
		2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar pengasuhan di dalam panti	1745 Anak	279.672.000	Dinas Sosial
						Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permakannya	1745 Anak	9.201.369.000	Dinas Sosial	
						Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya	1745 Anak	846.425.000	Dinas Sosial	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatannya	1745 Anak	357.977.460	Dinas Sosial	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	1745 Anak	375.000.000	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari	1745 Anak	154.434.000	Dinas Sosial
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1745 Anak	1.509.840.000	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	1745 Anak	16.000.000	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan pemulangan ke keluarga	1745 Anak	88.500.000	Dinas Sosial
						Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses layanan kepada keluarga pengganti	1745 Anak	68.800.000	Dinas Sosial
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bidang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan	1745 Anak	4.698.368.363	Dinas Sosial

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
		3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permakanannya	940 orang	10.278.164.500	Dinas Sosial
						Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya	940 orang	896.750.000	Dinas Sosial	
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang menerima alat bantu mobilitas	940 orang	590.552.056	Dinas Sosial	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatannya	940 orang	1.297.794.004	Dinas Sosial	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	940 orang	278.900.000	Dinas Sosial	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari	940 orang	282.000.000	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
						Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	940 orang	229.950.000	Dinas Sosial	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan layanan pemulangan ke keluarga	940 orang	5.600.000	Dinas Sosial	
						Pemulasaraan	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang meninggal dan mendapatkan layanan pemulasaraan jenazah	940 orang	175.000.000	Dinas Sosial	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bidang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti yang dilaksanakan	940 orang	5.563.171.295	Dinas Sosial	
		4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permakanannya	200 Orang	2.715.600.000	Dinas Sosial
						Penyediaan Sandang	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya	200 Orang	95.000.000	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatannya	200 Orang	229.312.500	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	200 Orang	80.000.000	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari	200 Orang	100.000.000	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang memperoleh bimbingan ketrampilan kerja dasar	200 Orang	840.000.000	Dinas Sosial
						Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	200 Orang	93.640.000	Dinas Sosial
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bidang rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti yang dilaksanakan	200 Orang	1.463.677.670	Dinas Sosial

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permakanannya	1214 orang	14.164.190.000	Dinas Sosial
						Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar sandangnya	1214 orang	1.019.098.140	Dinas Sosial
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatannya	1214 orang	554.383.370	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	1214 orang	873.901.998	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari	1214 orang	296.576.540	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang memperoleh bimbingan ketrampilan kerja dasar	1214 orang	2.700.000.000	Dinas Sosial

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH	
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terfasilitasi pembuatan nomor induk kepedndudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1214 orang	104.000	Dinas Sosial	
						Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1214 orang	202.363.000	Dinas Sosial	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bidang rehabilitasi sosial dasar PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA	1214 orang	4.126.816.000	Dinas Sosial	
		5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah provinsi.	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan	13097 orang	900.000.000	Dinas Sosial
						Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar sandang	500 Paket	100.000.000	Dinas Sosial	

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	PROGRAM NOMENKLATUR	KEGIATAN NOMENKLATUR	SUB KEGIATAN NOMENKLATUR	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah pengungsi yang dapat ditampung ditempat penampungan pengungsi	400 Paket	750.000.000	Dinas Sosial
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	3 Lokasi	1.520.054.465	Dinas Sosial
							Jumlah kegiatan bimbingan dan pelatihan penanganan khusus bagi kelompok rentan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	-	Dinas Sosial
							jumlah fasilitasi orang terlantar untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	2 Orang	-	Dinas Sosial
						Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Tagana yang berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana	1600 orang	3.829.178.535	Dinas Sosial
							Jumlah eks korban bencana sosial yang diberikan pemulihan dan perlindungan	12000 orang	-	Dinas Sosial
									853.092.038.794	

6.4. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, yang diselaraskan dengan RPJMN tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, beserta tolok ukur Perangkat Daerah. Pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang disampaikan secara detail, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4 tentang Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Tabel 6.4. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					7.151.944.367.940,00	7.655.980.182.516	504.035.814.576	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					4.491.807.308.000,00	4.568.501.761.447,00	76.694.453.447,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.853.272.000,00	1.902.694.028,00	49.422.028,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	86.258.468,00	86.258.468,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	87.494.862,00	87.494.862,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	87.494.862,00	87.494.862,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	87.494.862,00	136.916.890,00	49.422.028,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	87.494.862,00	87.494.862,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	609.768.023,00	609.768.023,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	807.266.061,00	807.266.061,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.440.856.250.300,00	4.509.904.602.800,00	69.048.352.500,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	324 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	4.419.761.775.000,00	4.486.885.154.000,00	67.123.379.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	19.454.475.300,00	21.421.348.800,00	1.966.873.500,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	890.000.000,00	848.100.000,00	(41.900.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					250.000.000,00	1.061.480.000,00	811.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	1.061.480.000,00	811.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3.020.279.200,00	3.217.380.000,00	197.100.800,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	180 Paket	550.000.000,00	452.850.000,00	(97.150.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	236.539.600,00	508.440.000,00	271.900.400,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	233.739.600,00	256.090.000,00	22.350.400,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.665.985.468,00	28.045.707.268,00	2.379.721.800,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	900.000.000,00	1.372.690.000,00	472.690.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	750.000.000,00	1.015.380.000,00	265.380.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	113.338.800,00	152.100.000,00	38.761.200,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	9 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	9 Laporan	1.100.000.000,00	818.000.000,00	(282.000.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22.602.646.668,00	24.487.537.268,00	1.884.890.600,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000.000,00	1.172.442.000,00	972.442.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit	200.000.000,00	1.172.442.000,00	972.442.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.732.573.000,00	14.209.271.461,00	2.476.698.461,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	20.000.000,00	28.807.493,00	8.807.493,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	2.979.975.000,00	2.979.975.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	8.732.598.000,00	11.200.488.968,00	2.467.890.968,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.228.948.032,00	5.388.183.890,00	(2.840.764.142,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	550.000.000,00	479.750.000,00	(70.250.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	1.200.000.000,00	1.516.433.890,00	316.433.890,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6.478.948.032,00	3.392.000.000,00	(3.086.948.032,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					2.657.637.059.940,00	3.082.537.209.829,00	424.900.149.889,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.039.327.882.099,00	1.207.047.219.147,00	167.719.337.048,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	437 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.422.735.593,00	6.009.068.000,00	4.586.332.407,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	8.023.000.000,00	32.932.549.198,00	24.909.549.198,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	693 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	12.000.000.000,00	36.604.669.204,00	24.604.669.204,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	4.000.000.000,00	26.995.824.880,00	22.995.824.880,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	258 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Unit	2.632.500.000,00	6.925.254.680,00	4.292.754.680,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	196350 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1507 Satuan Pendidikan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1299 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1299 Peserta Didik	2.500.000.000,00	5.950.000.000,00	3.450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8504 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	8504 Orang	93.207.515.000,00	96.175.826.880,00	2.968.311.880,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1960 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1960 Orang	1.845.875.924,00	2.541.153.150,00	695.277.226,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	192 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	192 Satuan Pendidikan	26.449.830.969,00	28.418.811.919,00	1.968.980.950,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	632333 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	632333 Satuan Pendidikan	882.246.424.613,00	859.900.980.000,00	(22.345.444.613,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.489.489.567.105,00	1.678.073.236.902,00	188.583.669.797,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	9.500.000.000,00	21.000.000.000,00	11.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.304.000.000,00	1.864.040.850,00	560.040.850,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	19 Ruang	190.000.000,00	2.683.548.000,00	2.493.548.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan Dibangun	1 Ruang	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan Dibangun	5 Ruang	237.500.000,00	2.149.560.000,00	1.912.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan Dibangun	1 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan Dibangun	54 Ruang	260.800.000,00	15.940.905.000,00	15.680.105.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang akan direhab	32 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang akan direhab	64 Ruang	8.345.600.000,00	16.781.947.560,00	8.436.347.560,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	2	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			237.500.000,00	530.400.000,00	292.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Lembaga yang akan diberikan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	23 Paket	Jumlah Lembaga yang akan diberikan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	36 Paket	11.600.000.000,00	121.004.333.000,00	109.404.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3130 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3130 Peserta Didik	3.815.916.372,00	7.224.954.576,00	3.409.038.204,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	13307 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	13307 Orang	112.602.171.000,00	99.758.884.440,00	(12.843.286.560,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang	1.833.684.250,00	3.869.722.900,00	2.036.038.650,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	4.217.164.000,00	4.618.517.986,00	401.353.986,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	772757 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	772757 Satuan Pendidikan	1.335.345.231.483,00	1.320.154.990.000,00	(15.190.241.483,00)	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					128.819.610.736,00	184.232.853.780,00	55.413.243.044,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	208 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	275 Satuan Pendidikan	550.400.000,00	956.512.600,00	406.112.600,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	3487557544 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	3487557544 Orang	4.573.914.000,00	6.051.507.780,00	1.477.593.780,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	183 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	183 Orang	1.051.022.378,00	2.066.020.800,00	1.014.998.422,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	1.982.060.454,00	3.784.112.600,00	1.802.052.146,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	410 Satuan Pendidikan	120.662.213.904,00	144.097.600.000,00	23.435.386.096,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.500.000.000,00	4.941.211.240,00	2.441.211.240,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi					2.500.000.000,00	4.941.211.240,00	2.441.211.240,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	1.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	500.000.000,00	680.113.600,00	180.113.600,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	1.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	477 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	477 Laporan	2.000.000.000,00	4.261.097.640,00	2.261.097.640,00	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					136.615.560.000,00	#VALUE!		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	1.094.000.000,00	839.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.500.000,00	115.700.000,00	44.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.500.000,00	115.700.000,00	44.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000,00	25.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	18.195.839,00	(67.304.161,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	10.695.839,00	(14.304.161,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang					
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	204.177.146,00	153.177.146,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	30.000.000,00	64.600.000,00	34.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	20.000.000,00	139.577.146,00	119.577.146,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	430.927.015,00	408.927.015,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	15.000.000,00	34.927.015,00	19.927.015,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					136.360.560.000,00	153.077.782.896,00	16.717.222.896,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					46.231.330.000,00	50.416.250.000,00	4.184.920.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90880 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	90880 Peserta didik	46.216.330.000,00	50.401.250.000,00	4.184.920.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	53 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					87.865.130.000,00	99.935.882.896,00	12.070.752.896,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103155 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103155 Peserta didik	87.850.130.000,00	99.920.882.896,00	12.070.752.896,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	53 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					2.264.100.000,00	2.725.650.000,00	461.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103155 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103155 Peserta Didik	2.249.100.000,00	2.710.650.000,00	461.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					39.425.150.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	573.480.000,00	288.480.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	44.616.000,00	3.116.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	41.500.000,00	44.616.000,00	3.116.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	88.190.000,00	13.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	75.000.000,00	88.190.000,00	13.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	#VALUE!				CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	36.063.000,00	(19.437.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	33.559.500,00	8.559.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	2.503.500,00	3.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	100.200.000,00	(800.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	28.200.000,00	(1.800.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	154.411.000,00	142.411.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	19.096.200,00	12.096.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00	2.314.800,00	(2.685.200,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					39.140.150.000,00	45.969.830.000,00	6.829.680.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.816.350.000,00	10.937.720.000,00	1.121.370.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26203 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26203 Peserta didik	9.811.350.000,00	10.933.200.000,00	1.121.850.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	4.520.000,00	(480.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					28.792.000.000,00	34.418.160.000,00	5.626.160.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta didik	28.787.000.000,00	34.413.160.000,00	5.626.160.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	2	1.03											
				Pengelolaan Pendidikan Khusus										
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta Didik	526.800.000,00	613.950.000,00	82.150.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					50.133.250.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	846.000.000,00	561.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	69.300.000,00	27.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.500.000,00	69.300.000,00	27.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	137.670.000,00	62.670.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	75.000.000,00	137.670.000,00	62.670.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	38.113.876,00	(17.386.124,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	37.047.876,00	12.047.876,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	1.066.000,00	(1.434.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	170.682.124,00	69.682.124,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	32.407.855,00	2.407.855,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	137.674.269,00	67.674.269,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	280.234.000,00	268.234.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	5.000.000,00	12.234.000,00	7.234.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					49.848.250.000,00	53.234.715.000,00	3.386.465.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					12.395.020.000,00	13.207.880.000,00	812.860.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25132 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25132 Peserta didik	12.390.020.000,00	13.203.880.000,00	813.860.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					36.662.830.000,00	39.107.735.000,00	2.444.905.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta didik	36.657.830.000,00	39.103.735.000,00	2.445.905.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	65 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					790.400.000,00	919.100.000,00	128.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta Didik	785.400.000,00	917.100.000,00	131.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					26.845.140.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	1.139.000.000,00	884.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.500.000,00	0,00	(71.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	71.500.000,00	0,00	(71.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000,00	53.200.000,00	28.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	53.200.000,00	28.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	65.624.896,00	(19.875.104,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	56.624.896,00	31.624.896,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	9 Laporan	50.000.000,00	9.000.000,00	(41.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	319.394.904,00	268.394.904,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	1.800.000,00	800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	76.920.000,00	46.920.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	240.674.904,00	220.674.904,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	400.780.200,00	378.780.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	15.000.000,00	11.780.200,00	(3.219.800,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					26.590.140.000,00	28.340.775.000,00	1.750.635.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					7.280.740.000,00	7.430.945.000,00	150.205.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19003 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19003 Peserta didik	7.265.740.000,00	7.430.945.000,00	165.205.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.727.100.000,00	20.240.530.000,00	1.513.430.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30812 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30812 Peserta didik	18.712.100.000,00	20.240.530.000,00	1.528.430.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					582.300.000,00	669.300.000,00	87.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30812 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	847 Peserta Didik	567.300.000,00	669.300.000,00	102.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					35.083.120.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	1.085.820.400,00	830.820.400,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.500.000,00	90.108.000,00	18.608.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.500.000,00	90.108.000,00	18.608.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000,00	84.990.000,00	59.990.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	84.990.000,00	59.990.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	55.226.085,00	(30.273.915,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	53.273.600,00	28.273.600,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	7.500.000,00	512.485,00	(6.987.515,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	1.440.000,00	(1.560.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	143.360.315,00	92.360.315,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	41.133.473,00	11.133.473,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	101.226.842,00	81.226.842,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	412.136.000,00	390.136.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	19.500.000,00	12.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00	3.636.000,00	(11.364.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					34.828.120.000,00	37.162.014.600,00	2.333.894.600,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					8.505.920.000,00	9.023.069.800,00	517.149.800,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21516 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21516 Peserta didik	8.490.920.000,00	9.006.025.000,00	515.105.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	42 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	17.044.800,00	2.044.800,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					25.558.400.000,00	27.292.700.000,00	1.734.300.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39134 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39134 Peserta didik	25.543.400.000,00	27.263.560.000,00	1.720.160.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	29.140.000,00	14.140.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					763.800.000,00	846.244.800,00	82.444.800,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39134 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39134 Peserta Didik	748.800.000,00	839.250.000,00	90.450.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	6.994.800,00	(8.005.200,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					26.034.580.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	705.100.000,00	420.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	30.500.000,00	(11.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	41.500.000,00	30.500.000,00	(11.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	19.650.000,00	(35.850.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	18.154.000,00	(6.846.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.000.000,00	1.496.000,00	(23.504.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	240.600.000,00	139.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	36.600.000,00	6.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	70.000.000,00	204.000.000,00	134.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	264.350.000,00	252.350.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000,00	3.350.000,00	(1.650.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
												#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					25.749.580.000,00	30.427.140.000,00	4.677.560.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.854.600.000,00	10.917.320.000,00	1.062.720.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20367 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20367 Peserta didik	9.849.600.000,00	10.917.020.000,00	1.067.420.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	52 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	300.000,00	(4.700.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					15.577.680.000,00	19.132.870.000,00	3.555.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21599 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21599 Peserta didik	15.572.680.000,00	19.132.570.000,00	3.559.890.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	300.000,00	(4.700.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					317.300.000,00	376.950.000,00	59.650.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21599 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21599 Peserta Didik	312.300.000,00	376.650.000,00	64.350.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	300.000,00	(4.700.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH GRESIK	DINAS PENDIDIKAN	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					30.693.700.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	699.600.000,00	414.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	41.500.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	41.500.000,00	41.500.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	28.531.000,00	(46.469.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	75.000.000,00	28.531.000,00	(46.469.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	15.014.308,00	(40.485.692,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	25.000.000,00	15.014.308,00	(9.985.692,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	216.323.692,00	115.323.692,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	30.000.000,00	70.938.686,00	40.938.686,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	70.000.000,00	145.385.006,00	75.385.006,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	267.515.000,00	255.515.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	6.515.000,00	1.515.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					30.408.700.000,00	33.681.780.000,00	3.273.080.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					8.331.110.000,00	8.735.740.000,00	404.630.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18191 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18191 Peserta didik	8.326.110.000,00	8.735.040.000,00	408.930.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	700.000,00	(4.300.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					21.551.190.000,00	24.316.090.000,00	2.764.900.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	30386 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	30386 Orang	21.546.190.000,00	24.311.090.000,00	2.764.900.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta didik			#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					5.000.000,00	5.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					526.400.000,00	629.950.000,00	103.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30836 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30836 Peserta Didik	521.400.000,00	629.250.000,00	107.850.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	700.000,00	(4.300.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MOJOKERTO	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					24.742.030.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	706.000.000,00	421.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	38.964.000,00	(2.536.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.500.000,00	38.964.000,00	(2.536.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	12.300.000,00	(62.700.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	12.300.000,00	(62.700.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	1.255.000,00	(54.245.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	1.255.000,00	(1.245.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	246.672.146,00	145.672.146,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	180.000,00	(820.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	52.000.000,00	22.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	194.492.146,00	124.492.146,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	256.808.854,00	244.808.854,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	7.000.000,00	808.854,00	(6.191.146,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					24.457.030.000,00	28.112.135.000,00	3.655.105.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					6.462.360.000,00	7.177.520.000,00	715.160.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19047 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19047 Peserta didik	6.457.360.000,00	7.177.520.000,00	720.160.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					17.405.570.000,00	20.224.515.000,00	2.818.945.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30830 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30830 Peserta didik	17.400.570.000,00	20.224.515.000,00	2.823.945.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					589.100.000,00	710.100.000,00	121.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30830 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30830 Peserta Didik	584.100.000,00	710.100.000,00	126.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JOMBANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					51.212.220.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	1.136.360.000,00	881.360.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.500.000,00	15.096.000,00	(56.404.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	71.500.000,00	15.096.000,00	(56.404.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000,00	85.625.000,00	60.625.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	85.625.000,00	60.625.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	114.151.653,00	28.651.653,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	88.026.000,00	63.026.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	7.500.000,00	25.653,00	(7.474.347,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	50.000.000,00	20.100.000,00	(29.900.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	231.094.447,00	180.094.447,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	1.000.000,00	260.000,00	(740.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	83.600.000,00	53.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	20.000.000,00	147.234.447,00	127.234.447,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	390.392.900,00	368.392.900,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	7.000.000,00	1.027.900,00	(5.972.100,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	15.000.000,00	365.000,00	(14.635.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					50.957.220.000,00	53.497.620.000,00	2.540.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					14.814.930.000,00	15.269.909.000,00	454.979.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	29096 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	29096 Peserta didik	14.799.930.000,00	15.269.029.000,00	469.099.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	87 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	880.000,00	(14.120.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					35.223.690.000,00	37.197.899.400,00	1.974.209.400,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	43091 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	43091 Peserta didik	35.208.690.000,00	37.197.019.400,00	1.988.329.400,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	109 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	880.000,00	(14.120.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					918.600.000,00	1.029.811.600,00	111.211.600,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	43091 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	43091 Peserta Didik	903.600.000,00	1.028.931.600,00	125.331.600,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	880.000,00	(14.120.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					19.250.810.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	700.540.000,00	415.540.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	3.330.000,00	(38.170.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	41.500.000,00	3.330.000,00	(38.170.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	17.130.000,00	(57.870.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	75.000.000,00	17.130.000,00	(57.870.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	2.782.184,00	(52.717.816,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	2.664.100,00	(22.335.900,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	118.084,00	(2.381.916,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	270.691.816,00	169.691.816,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	160.000,00	(840.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.000.000,00	49.455.900,00	19.455.900,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.000.000,00	221.075.916,00	151.075.916,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	256.606.000,00	244.606.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00	606.000,00	(4.394.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					18.965.810.000,00	21.431.525.000,00	2.465.715.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					7.067.160.000,00	7.573.750.000,00	506.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19890 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta didik	7.062.160.000,00	7.568.750.000,00	506.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Lamongan	19208 Peserta didik	Jumlah siswa SMA yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Lamongan	19208 Peserta didik					
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	69 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					11.681.850.000,00	13.572.025.000,00	1.890.175.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20629 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta didik	11.676.850.000,00	13.571.565.000,00	1.894.715.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Lamongan	19996 Peserta didik	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) wilayah Lamongan	19996 Peserta didik					
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	78 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	460.000,00	(4.540.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					216.800.000,00	285.750.000,00	68.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20629 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	211.800.000,00	285.750.000,00	73.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Lamongan	363 Peserta Didik	Jumlah siswa PK-PLK yang mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Wilayah Lamongan	363 Peserta Didik					
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH LAMONGAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					38.856.300.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	883.000.000,00	628.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.500.000,00	57.084.000,00	(14.416.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.500.000,00	57.084.000,00	(14.416.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000,00	73.100.000,00	48.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	73.100.000,00	48.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	22.452.428,00	(63.047.572,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	14.584.000,00	(10.416.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	458.428,00	(7.041.572,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	50.000.000,00	2.910.000,00	(47.090.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	273.692.372,00	222.692.372,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	40.239.200,00	10.239.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.000.000,00	233.453.172,00	213.453.172,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	156.671.200,00	134.671.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	19.096.200,00	12.096.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00	4.575.000,00	(10.425.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					38.601.300.000,00	40.813.576.400,00	2.212.276.400,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.573.500.000,00	9.361.635.242,00	(211.864.758,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21409 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21409 Peserta didik	9.558.500.000,00	9.361.635.242,00	(196.864.758,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					28.154.500.000,00	30.448.440.658,00	2.293.940.658,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40619 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40619 Peserta didik	28.139.500.000,00	30.448.440.658,00	2.308.940.658,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					873.300.000,00	1.003.500.500,00	130.200.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40619 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	40619 Peserta Didik	858.300.000,00	1.003.500.500,00	145.200.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					8.560.620.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	578.515.000,00	293.515.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	23.136.000,00	(18.364.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	41.500.000,00	23.136.000,00	(18.364.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	77.010.000,00	2.010.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	77.010.000,00	2.010.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	54.918.648,00	(581.352,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	32.168.180,00	7.168.180,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	2.650.468,00	150.468,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	9 Laporan	25.000.000,00	20.100.000,00	(4.900.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	121.800.352,00	20.800.352,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	30.000.000,00	36.800.352,00	6.800.352,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	70.000.000,00	84.000.000,00	14.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	151.650.000,00	139.650.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	3.650.000,00	(1.350.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					8.275.620.000,00	8.473.875.000,00	198.255.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					1.341.320.000,00	1.344.540.000,00	3.220.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3853 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3853 Peserta didik	1.336.320.000,00	1.343.160.000,00	6.840.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	1.380.000,00	(3.620.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					6.791.000.000,00	6.974.895.000,00	183.895.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11526 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11526 Peserta didik	6.786.000.000,00	6.972.480.000,00	186.480.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	31 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	2.415.000,00	(2.585.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					143.300.000,00	154.440.000,00	11.140.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	11526 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	180 Peserta Didik	138.300.000,00	153.750.000,00	15.450.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	690.000,00	(4.310.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PACITAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					39.425.150.000,00	51.456.010.000,00	12.030.860.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	573.480.000,00	288.480.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	44.616.000,00	3.116.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	41.500.000,00	44.616.000,00	3.116.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	88.190.000,00	13.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	88.190.000,00	13.190.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	36.063.000,00	(19.437.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	33.559.500,00	8.559.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	2.503.500,00	3.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	100.200.000,00	(800.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	28.200.000,00	(1.800.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	70.000.000,00	72.000.000,00	2.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	154.411.000,00	142.411.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	19.096.200,00	12.096.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00	2.314.800,00	(2.685.200,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					39.140.150.000,00	50.882.530.000,00	11.742.380.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					9.816.350.000,00	12.815.120.000,00	2.998.770.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26203 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	26203 Peserta didik	9.811.350.000,00	12.810.600.000,00	2.999.250.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	74 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	4.520.000,00	(480.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					28.792.000.000,00	37.400.060.000,00	8.608.060.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta didik	28.787.000,00	37.395.060,00	8.608.060,00,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					531.800.000	667.350.000	135.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	49974 Peserta Didik	526.800.000	667.350.000	140.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					50.133.250.000	66.088.715.000	15.955.465.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	846.000.000	561.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	69.300.000	27.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.500.000,00	69.300.000	27.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	137.670.000	62.670.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	75.000.000,00	137.670.000	62.670.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	38.113.876	(17.386.124,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	37.047.876	12.047.876,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	1.066.000	(1.434.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	170.682.124	69.682.124,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	600.000,00	(400.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	32.407.855,00	2.407.855,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	137.674.269	67.674.269,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	280.234.000	268.234.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	12.000.000	5.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	5.000.000,00	12.234.000	7.234.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					49.848.250.000	65.242.715.000	15.394.465.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	2	1.01											
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas										
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25132 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25132 Peserta didik	12.390.020.000	16.223.140.000	3.833.120.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	4.000.000	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta didik	36.657.830.000	47.993.775.000	11.335.945.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	65 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	65 Satuan Pendidikan	5.000.000	4.000.000	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38688 Peserta Didik	785.400.000	1.015.800.000	230.400.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	5.000.000	2.000.000	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH NGANJUK	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	71.500.000,00	0,00	(71.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	53.200.000	28.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	56.624.896	31.624.896,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	7.500.000,00	3.696.000,00	(3.804.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	50.000.000,00	9.000.000	(41.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	1.800.000	800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	76.920.000	46.920.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	240.674.904	220.674.904,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	400.780.200	378.780.200,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	0	(7.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	15.000.000,00	11.780.200	(3.219.800,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					26.590.140.000,00	34.587.075.000,00	7.996.935.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					7.280.740.000,00	9.659.085.000,00	2.378.345.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19003 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	19003 Peserta didik	7.265.740.000,00	9.659.085.000,00	2.393.345.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					18.727.100.000	24.190.590.000	5.463.490.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30812 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30812 Peserta didik	18.712.100.000	20.031.645.000,00	1.319.545.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus					582.300.000	737.400.000	155.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	847 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	847 Peserta Didik	567.300.000,00	737.400.000,00	170.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	DINAS PENDIDIKAN
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					31.323.060.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	449.799.000,00	164.799.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	27.256.000,00	(14.244.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	41.500.000,00	27.256.000,00	(14.244.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	19.140.000,00	(55.860.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	19.140.000,00	(55.860.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	14.332.200,00	(41.167.800,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	9.612.200,00	(15.387.800,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	250.000,00	(2.250.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	2.460.000,00	(540.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	2.010.000,00	(22.990.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.000.000,00	235.937.000,00	134.937.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	68.044.471,00	38.044.471,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	70.000.000,00	167.392.529,00	97.392.529,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.000.000,00	3.133.800,00	(8.866.200,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	1.905.600,00	(5.094.400,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000,00	1.228.200,00	(3.771.800,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
											#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				31.038.060.000,00	33.893.181.000,00	2.855.121.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				6.660.090.000,00	7.172.187.000,00	512.097.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18157 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18157 Peserta didik	6.655.090.000,00	7.172.120.000,00	517.030.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	54 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	67.000,00	(4.933.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				23.709.970.000,00	26.024.027.000,00	2.314.057.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35373 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35373 Peserta didik	23.704.970.000,00	26.023.960.000,00	2.318.990.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	84 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	67.000,00	(4.933.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus				668.000.000,00	696.967.000,00	28.967.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35373 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik	663.000.000,00	696.900.000,00	33.900.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	67.000,00	(4.933.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				22.778.390.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				255.000.000,00	706.000.000,00	451.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				71.500.000,00	24.000.000,00	(47.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	71.500.000,00	24.000.000,00	(47.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00	21.686.000,00	(3.314.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN	
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	21.686.000,00	(3.314.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	7.442.991,00	(78.057.009,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	7.212.991,00	(17.787.009,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	230.000,00	(49.770.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	241.490.959,00	190.490.959,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	770.000,00	(230.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	25.852.000,00	(4.148.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	214.868.959,00	194.868.959,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	261.380.050,00	239.380.050,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	4.774.050,00	(2.225.950,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00	606.000,00	(14.394.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					22.523.390.000,00	24.956.455.000,00	2.433.065.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					7.329.360.000,00	8.143.140.000,00	813.780.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18923 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18923 Peserta didik	7.314.360.000,00	8.143.140.000,00	828.780.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.841.230.000,00	16.402.765.000,00	1.561.535.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21101 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21101 Peserta didik	14.826.230.000,00	16.402.765.000,00	1.576.535.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					352.800.000,00	410.550.000,00	57.750.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21101 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	21101 Peserta Didik	337.800.000,00	410.550.000,00	72.750.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					51.369.800.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	1.005.236.000,00	750.236.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.02											
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	71.500.000,00	49.944.000,00	(21.556.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	33.550.000,00	8.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	6.706.900,00	(18.293.100,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	298.616,00	(701.384,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	61.200.000,00	31.200.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000,00	287.536.484,00	267.536.484,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
												#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37208 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37208 Peserta didik	13.967.830.000,00	15.530.015.000,00	1.562.185.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	4.186.000,00	(10.814.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	63257 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	63257 Peserta didik	36.311.170.000,00	42.505.127.000,00	6.193.957.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	4.485.000,00	(10.515.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus					805.800.000,00	972.593.000,00	166.793.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik	790.800.000,00	970.500.000,00	179.700.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
					Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	63257 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	63257 Peserta Didik		#VALUE!		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	2.093.000,00	(12.907.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	DINAS PENDIDIKAN
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					21.498.540.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					255.000.000,00	1.138.964.000,00	883.964.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.500.000,00	52.704.000,00	(18.796.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	71.500.000,00	52.704.000,00	(18.796.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000,00	99.182.000,00	74.182.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	99.182.000,00	74.182.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					85.500.000,00	100.669.338,00	15.169.338,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	52.065.638,00	27.065.638,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	7.500.000,00	1.823.700,00	(5.676.300,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	3.000.000,00	1.020.000,00	(1.980.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	50.000.000,00	45.760.000,00	(4.240.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					51.000.000,00	168.358.862,00	117.358.862,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	52.967.040,00	22.967.040,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	20.000.000,00	113.891.822,00	93.891.822,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.000.000,00	418.049.800,00	396.049.800,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	7.000.000,00	19.500.000,00	12.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	15.000.000,00	9.549.800,00	(5.450.200,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					21.243.540.000,00	23.045.025.000,00	1.801.485.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					6.055.240.000,00	6.311.855.000,00	256.615.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18009 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18009 Peserta didik	6.040.240.000,00	6.311.855.000,00	271.615.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					14.897.600.000,00	16.428.370.000,00	1.530.770.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25727 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25727 Peserta didik	14.882.600.000,00	16.428.370.000,00	1.545.770.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					290.700.000,00	304.800.000,00	14.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25727 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	25727 Peserta Didik	275.700.000,00	304.800.000,00	29.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					30.022.010.000,00	#VALUE!		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	691.500.000,00	406.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	20.256.000,00	(21.244.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	41.500.000,00	20.256.000,00	(21.244.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	145.950.000,00	70.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90 Dokumen	75.000.000,00	145.950.000,00	70.950.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	2.006.909,00	(53.493.091,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.006.909,00	(493.091,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	117.287.091,00	16.287.091,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	49.022.400,00	19.022.400,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	68.264.691,00	(1.735.309,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	256.000.000,00	244.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					29.737.010.000,00	33.822.110.104,00	4.085.100.104,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					7.571.580.000,00	8.095.290.000,00	523.710.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20432 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20432 Peserta didik	7.566.580.000,00	8.087.790.000,00	521.210.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	70 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					21.276.030.000,00	24.681.870.104,00	3.405.840.104,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37887 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37887 Peserta didik	21.271.030.000,00	24.676.870.104,00	3.405.840.104,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	45 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					889.400.000,00	1.044.950.000,00	155.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37877 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	37877 Peserta Didik	884.400.000,00	1.042.950.000,00	158.550.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANYUWANGI	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					14.537.300.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks Profesionalitas ASN Persentase indikator program yang tercapai Persentase Realisasi anggaran Prosentase Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil kegiatan tepat waktu	% 88,75 % 86,43 % 92 % 100	indeks Profesionalitas ASN Persentase indikator program yang tercapai Persentase Realisasi anggaran Prosentase Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil kegiatan tepat waktu	% 88,75 % 86,43 % 92 % 100	285.000.000,00	704.500.000,00	419.500.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	41.500.000,00	0,00	(41.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	41.500.000,00	0,00	(41.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	24.500.000,00	(31.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	20.001.000,00	(4.999.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	1.497.000,00	(1.003.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan	25.000.000,00	3.002.000,00	(21.998.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.08											
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101.000.000,00	264.000.000,00	163.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN			
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	70.000.000,00	234.000.000,00	164.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	261.000.000,00	249.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					14.252.300.000,00	15.346.960.000,00	1.094.660.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					5.247.900.000,00	5.713.870.000,00	465.970.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16154 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16154 Peserta didik	5.242.900.000,00	5.713.370.000,00	470.470.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	69 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					8.892.600.000,00	9.511.690.000,00	619.090.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14436 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14436 Peserta didik	8.887.600.000,00	9.511.190.000,00	623.590.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	67 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					111.800.000,00	121.400.000,00	9.600.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14436 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14436 Peserta Didik	106.800.000,00	120.900.000,00	14.100.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BANGKALAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					9.421.440.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	706.000.000,00	421.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	45.984.000,00	4.484.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.500.000,00	45.984.000,00	4.484.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	21.281.000,00	(53.719.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	21.281.000,00	(53.719.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	35.894.529,00	(19.605.471,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.000.000,00	35.894.529,00	10.894.529,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	189.214.971,00	88.214.971,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.000.000,00	25.561.800,00	(4.438.200,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000,00	163.653.171,00	93.653.171,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	263.625.500,00	251.625.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.000.000,00	3.125.500,00	(1.874.500,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.136.440.000,00	10.268.220.000,00	1.131.780.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					3.452.120.000,00	3.803.175.000,00	351.055.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12264 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12264 Peserta didik	3.447.120.000,00	3.803.175.000,00	356.055.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					5.580.320.000,00	6.371.501.000,00	791.181.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10770 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10770 Peserta didik	5.575.320.000,00	6.371.501.000,00	796.181.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					104.000.000,00	93.544.000,00	(10.456.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10770 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110 Peserta Didik	99.000.000,00	93.544.000,00	(5.456.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SAMPANG	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					12.191.340.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	583.000.000,00	298.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	6.060.000,00	(35.440.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.500.000,00	6.060.000,00	(35.440.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	46.220.000,00	(28.780.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	46.220.000,00	(28.780.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	26.216.100,00	(29.283.900,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	11.449.020,00	(13.550.980,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	1.527.080,00	(972.920,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	3.000.000,00	3.120.000,00	120.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	9 Laporan	25.000.000,00	10.120.000,00	(14.880.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	221.503.900,00	120.503.900,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	1.000.000,00	516.000,00	(484.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	23.820.000,00	(6.180.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	70.000.000,00	197.167.900,00	127.167.900,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	133.000.000,00	121.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					11.906.340.000,00	13.532.430.000,00	1.626.090.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					3.959.480.000,00	4.424.400.000,00	464.920.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13567 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13567 Peserta didik	3.954.480.000,00	4.424.400.000,00	469.920.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					7.798.460.000,00	8.944.830.000,00	1.146.370.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14024 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14024 Peserta didik	7.793.460.000,00	8.944.830.000,00	1.151.370.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus					148.400.000,00	163.200.000,00	14.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14024 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14024 Peserta Didik	143.400.000,00	163.200.000,00	19.800.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PAMEKASAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					9.901.290.000,00		#VALUE!	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					285.000.000,00	706.000.000,00	421.000.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.500.000,00	35.184.000,00	(6.316.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324 Dokumen	41.500.000,00	35.184.000,00	(6.316.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.000.000,00	49.750.000,00	(25.250.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	75.000.000,00	49.750.000,00	(25.250.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.500.000,00	45.489.485,00	(10.010.515,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	25.000.000,00	21.458.485,00	(3.541.515,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29 Paket	2.500.000,00	22.591.000,00	20.091.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	27 Dokumen	3.000.000,00	1.440.000,00	(1.560.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.000.000,00	156.756.015,00	55.756.015,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	30.000.000,00	39.793.500,00	9.793.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	70.000.000,00	116.962.515,00	46.962.515,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12.000.000,00	268.820.500,00	256.820.500,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.000.000,00	9.750.000,00	2.750.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	30 Unit	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	30 Unit					
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	5.000.000,00	3.070.500,00	(1.929.500,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.616.290.000,00	10.747.455.000,00	1.131.165.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					5.023.860.000,00	5.480.720.000,00	456.860.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14938 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	14938 Peserta didik	5.018.860.000,00	5.480.720.000,00	461.860.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	2	1.02											
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										
1	1	2	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7030 Peserta didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7030 Peserta didik	4.434.830.000,00	5.093.485.000,00	653.655.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	88 lembaga	Jumlah lembaga SMK penerima BPOPP Wilayah SUMENEP	88 lembaga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus									
1	1	2	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7030 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7030 Peserta Didik	147.600.000,00	173.250.000,00	25.650.000,00	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SUMENEP	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase indikator program yang tercapai	86,43 %	Prosentase indikator program yang tercapai	86,43 %	500.000.000,00	500.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	345.000.000,00	345.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	345.000.000,00	345.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.000.000,00	55.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	100.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di Jenjang SMA	41,93 %	Prosentase warga negara usia 16-18 Tahun yang bersekolah di Jenjang SMA	41,93 %	1.566.508.577,00	3.604.356.282,00	2.037.847.705,00	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Prosentase Sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar	41 %	Prosentase Sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/ sistem dalam proses belajar mengajar	41 %	566.508.577,00	2.104.356.282,00	1.537.847.705,00	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	423 Satuan Pendidikan	566.508.577,00	2.104.356.282,00	1.537.847.705,00	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	297 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	UPT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2.445.368.483,00		#VALUE!	UPT PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					945.368.483,00	1.206.609.448,00	261.240.965,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.02			50.000.000,00	28.752.000,00	(21.248.000,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.000.000,00	28.752.000,00	(21.248.000,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06			150.000.000,00	119.601.800,00	(30.398.200,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	17.204.000,00	(32.796.000,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	100.000.000,00	102.397.800,00	2.397.800,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.07			395.368.483,00	9.000.000,00	(386.368.483,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	395.368.483,00	9.000.000,00	(386.368.483,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.08			20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	24.000.000,00	4.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09			330.000.000,00	1.025.255.648,00	695.255.648,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	50.000.000,00	19.096.200,00	(30.903.800,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 paket	100.000.000,00	7.725.000,00	(92.275.000,00)	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	180.000.000,00	998.434.448,00	818.434.448,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2				1.500.000.000,00	5.293.390.552,00	3.793.390.552,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	2	1.02			1.500.000.000,00	5.293.390.552,00	3.793.390.552,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN				
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1350 Peserta Didik	1.500.000.000,00	5.293.390.552,00	3.793.390.552,00	UPT PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN
1	1					2.907.918.800,00		#VALUE!					SMK NEGERI 1 SURABAYA	
1	1	1				2.817.131.800,00	2.825.331.800,00	8.200.000,00					SMK NEGERI 1 SURABAYA	
1	1	1	1.01			13.700.000,00	13.700.000,00	-					SMK NEGERI 1 SURABAYA	
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.725.000,00	3.725.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.325.000,00	3.325.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.325.000,00	3.325.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.325.000,00	3.325.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.800.000,00	19.000.000,00	8.200.000,00		SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.800.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					8.090.000,00	8.090.000,00	-		SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.325.000,00	3.325.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.765.000,00	4.765.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					743.277.000,00	743.277.000,00	-		SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	743.277.000,00	743.277.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					2.041.264.800,00	2.041.264.800,00	-		SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	2.041.264.800,00	2.041.264.800,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					90.787.000,00	82.587.000,00	(8.200.000,00)		SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					90.787.000,00	82.587.000,00	(8.200.000,00)		SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1728 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1728 Satuan Pendidikan	60.310.000,00	52.110.000,00	(8.200.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	33 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	33 Peserta Didik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang	20.477.000,00	20.477.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SURABAYA
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					978.580.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					930.395.000,00	969.711.000,00	39.316.000,00		SMK NEGERI 5 SURABAYA
					Indeks profesionalitas ASN	90 %	Indeks profesionalitas ASN	90 %						SMK NEGERI 5 SURABAYA
					Persentase Peningkatan Pendapatan	10 %	Persentase Peningkatan Pendapatan	10 %						SMK NEGERI 5 SURABAYA
					Persentase realisasi anggaran	98.7 %	Persentase realisasi anggaran	98.7 %						SMK NEGERI 5 SURABAYA
					Prosentase Indikator Program yang tercapai	98.7 %	Prosentase Indikator Program yang tercapai	98.7 %						SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.349.212,00	14.327.800,00	(21.412,00)		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	6.284.053,00	6.278.700,00	(5.353,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	3.202.053,00	3.196.700,00	(5.353,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	3.202.053,00	3.196.700,00	(5.353,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1.661.053,00	1.655.700,00	(5.353,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	118.678.053,00	109.604.500,00	(9.073.553,00)		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Laporan	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Laporan	107.808.000,00	102.216.000,00	(5.592.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 Laporan	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 Laporan	1.440.000,00	600.000,00	(840.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2 Dokumen	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2 Dokumen	2.095.053,00	2.086.400,00	(8.653,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	3.400.000,00	767.100,00	(2.632.900,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1 Laporan	Jumlah laporan prognosis	1 Laporan	335.000,00	335.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Laporan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Laporan	10.849.000,00	7.877.000,00	(2.972.000,00)		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	12 Laporan	Jumlah laporan data pegawai	12 Laporan	3.840.000,00	3.840.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 Laporan	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 Laporan	7.009.000,00	4.037.000,00	(2.972.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 Laporan	29.995.000,00	13.468.000,00	(16.527.000,00)		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	8 Kali	Jumlah paket pengadaan	2 Kali	20.100.000,00	3.350.000,00	(16.750.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	1 Laporan	Jumlah laporan	1 Laporan	9.380.000,00	9.715.000,00	335.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar Arsip Aktif	1 Dokumen	Jumlah daftar Arsip Aktif	1 Dokumen	515.000,00	403.000,00	(112.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
					Jumlah daftar Arsip Inaktif	1 Dokumen	Jumlah daftar Arsip Inaktif	1 Dokumen	-			SMK NEGERI 5 SURABAYA		
					Jumlah daftar Arsip Vital	1 Dokumen	Jumlah daftar Arsip Vital	1 Dokumen	-			SMK NEGERI 5 SURABAYA		
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	568.143.735,00	636.053.700,00	67.909.965,00		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	568.143.735,00	636.053.700,00	67.909.965,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	5 %	Persentase Peningkatan Sales Growth	5 %	188.380.000,00	188.380.000,00	-		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	8 Paket	Jumlah pengadaan barang dan jasa	8 Paket	188.380.000,00	188.380.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa SMKN 5 Surabaya	100 %	Persentase kelulusan siswa SMKN 5 Surabaya	100 %	48.185.000,00	8.869.000,00	(39.316.000,00)		SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	50 Orang	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	34 Orang	48.185.000,00	8.869.000,00	(39.316.000,00)		SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	550 Orang	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	72 Orang		#VALUE!			SMK NEGERI 5 SURABAYA
						Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	100 Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	12 Siswa		#VALUE!			SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar	550 Siswa	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar	72 Siswa	24.620.000,00	2.891.000,00	(21.729.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	12 Kali	Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa	2 Kali	14.740.000,00	2.800.000,00	(11.940.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	50 Orang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	34 Orang	8.825.000,00	3.178.000,00	(5.647.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 SURABAYA
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					899.000.000,00	#VALUE!			SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					869.915.100,00	869.915.100,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.512.125,00	11.512.125,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.621.600,00	2.621.600,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.433.251,00	2.433.251,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.170.074,00	4.170.074,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.287.200,00	2.287.200,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					75.320.100,00	91.364.100,00	16.044.000,00		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	59.787.500,00	59.787.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.112.000,00	2.112.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	4.245.100,00	4.245.100,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.400.000,00	18.444.000,00	16.044.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.175.500,00	3.175.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.233.350,00	4.233.350,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.233.350,00	4.233.350,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.028.000,00	2.028.000,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.028.000,00	2.028.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.369.000,00	35.369.000,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27.984.000,00	27.984.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.885.000,00	4.885.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					27.192.525,00	27.192.525,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27.192.525,00	27.192.525,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					526.800.000,00	526.800.000,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	526.800.000,00	526.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.460.000,00	17.416.000,00	(16.044.000,00)		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	33.460.000,00	17.416.000,00	(16.044.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					154.000.000,00	154.000.000,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	154.000.000,00	154.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					29.084.900,00	29.084.900,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					29.084.900,00	29.084.900,00	-		SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	20.381.000,00	20.381.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	2.307.500,00	2.307.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	2.594.600,00	2.594.600,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	3.801.800,00	3.801.800,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 6 SURABAYA
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.943.932.500,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.907.632.500,00	1.907.632.500,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.274.000,00	7.274.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	2.984.000,00	2.984.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen			#VALUE!	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.730.000,00	1.730.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah dokumen RKA perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA perubahan	1 dokumen					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	1.280.000,00	1.280.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA perubahan	1 dokumen	1.280.000,00	1.280.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					21.075.000,00	21.075.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah laporan	12 laporan	Jumlah laporan	12 laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan	2 dokumen	Jumlah dokumen keuangan	2 dokumen	575.000,00	575.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	7.920.000,00	7.920.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	580.000,00	580.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah laporan prognosis	1 laporan	Jumlah laporan prognosis	1 laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.400.000,00	1.400.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	12 laporan	Jumlah laporan	12 laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.950.000,00	1.950.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah laporan	12 laporan	Jumlah laporan	12 laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	750.000,00	750.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
						Jumlah laporan	12 laporan	Jumlah laporan	12 laporan					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					29.880.000,00	29.880.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.010.000,00	4.010.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket			#VALUE!		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO				
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1.250.000,00	1.250.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	10 kali	Jumlah kunjungan tamu	10 kali	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	120 Laporan	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	1 dokumen	Jumlah laporan	1 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	3 dokumen	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	3 dokumen	1.120.000,00	1.120.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					586.976.000,00	586.976.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	900.000,00	900.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah pengiriman dokumen	1 paket	Jumlah pengiriman dokumen	1 paket	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	586.076.000,00	586.076.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 bulan	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1.259.077.500,00	1.259.077.500,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit usaha yang dijalankan	12 paket	Jumlah unit usaha yang dijalankan	12 paket	1.259.077.500,00	1.259.077.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	35 orang		36.300.000,00	36.300.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
							jumlah siswa yang mengikuti lomba	35 siswa						
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					36.300.000,00	36.300.000,00	-		SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	1476 siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	1476 siswa	11.050.000,00	11.050.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	12 kali	Jumlah kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	12 kali	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pelatihan	35 orang	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pelatihan	35 orang	5.250.000,00	5.250.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	#VALUE!					SMK NEGERI 1 BUDURAN SIDOARJO
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.098.255.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
					Indeks Profesionalitas ASN	100 %	Indeks Profesionalitas ASN	100 %		1.071.344.000,00	78.084.000,00			SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Indikator Program yang tercapai	100 %	Prosentase Indikator Program yang tercapai	100 %	993.260.000,00	#VALUE!		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO		
					Prosentase Realisasi Anggaran	100 %	Prosentase Realisasi Anggaran	100 %				#VALUE!	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.559.130,00	688.600,00	(12.870.530,00)		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.953.228,00	228.650,00	(5.724.578,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.066.402,00	190.850,00	(2.875.552,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.980.750,00	154.750,00	(2.826.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.558.750,00	114.350,00	(1.444.400,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	17 laporan	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	17 laporan	78.126.600,00	80.060.800,00	1.934.200,00		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.456.000,00	78.708.000,00	9.252.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.973.350,00	150.050,00	(2.823.300,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.999.500,00	535.000,00	(2.464.500,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.731.000,00	567.000,00	(1.164.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	966.750,00	100.750,00	(866.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 dokumen	3.062.000,00	239.000,00	(2.823.000,00)		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.062.000,00	239.000,00	(2.823.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 dokumen	Jumlah dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 dokumen	18.740.000,00	4.359.070,00	(14.380.930,00)		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.240.000,00	4.120.070,00	(9.119.930,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.300.000,00	239.000,00	(2.061.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5 dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5 dokumen	451.172.270,00	557.396.530,00	106.224.260,00		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408.797.270,00	535.448.530,00	126.651.260,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.375.000,00	21.948.000,00	(20.427.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	jumlah unit produksi yang dihasilkan	10 unit	jumlah unit produksi yang dihasilkan	10 unit	428.600.000,00	428.600.000,00	-		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit usaha yang dijalankan	3 Unit	Jumlah unit usaha yang dijalankan	3 Unit	428.600.000,00	428.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase kelulusan siswa	100 %	Persentase kelulusan siswa	100 %	104.995.000,00	26.911.000,00	(78.084.000,00)		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
1	1	2	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	46 siswa	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan	46 siswa	104.995.000,00	26.911.000,00	(78.084.000,00)		SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO	
					Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri	450 orang	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri	450 orang					#VALUE!	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	1448 siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	1448 siswa					#VALUE!	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	25 siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	25 siswa					#VALUE!	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	56.400.000,00	7.200.000,00	(49.200.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik	13.575.000,00	16.111.000,00	2.536.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang	35.020.000,00	3.600.000,00	(31.420.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BUDURAN SIDOARJO
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.329.000.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesional ASN	84 %	Indeks profesional ASN	84 %			-		
						Persentase Peningkatan Pendapatan	0 0	Persentase Peningkatan Pendapatan	0 0			-		
						Persentase Indikator Program yang dicapai tercapai	81 %	Persentase Indikator Program yang dicapai tercapai	81 %			-		
						Persentase peningkatan pendapatan	5.5 %	Persentase peningkatan pendapatan	5.5 %			-		
						Persentase realisasi anggaran	80 %	Persentase realisasi anggaran	80 %			-		
1	1	1									1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	-	
1	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 dokumen	15.300.000,00	15.300.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	4.550.000,00	4.550.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	4.550.000,00	4.550.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	3.100.000,00	3.100.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	3.100.000,00	3.100.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	163.800.000,00	163.800.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	21.100.000,00	21.100.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	23.700.000,00	23.700.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	2 dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah laporan keuangan	12 laporan	Jumlah laporan keuangan	12 laporan			7.000.000,00	-	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	7.000.000,00		#VALUE!	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis	1 laporan	Jumlah Laporan prognosis	1 laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 dokumen	40.300.000,00	40.300.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah Laporan keuangan Akhir thun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	12 dokumen	Jumlah Laporan keuangan Akhir thun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	12 dokumen			-		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16.5 set	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
						Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12 laporan	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12 laporan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
		Jumlah laporan data pegawai	12 laporan	Jumlah laporan data pegawai	12 laporan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG					
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.150.000,00	29.150.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG				
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.050.000,00	2.050.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					20.000.000,00	20.000.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.450.000,00	368.450.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	5 paket	Jumlah pengiriman dokumen	5 paket	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	365.450.000,00	365.450.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.000.000,00	25.000.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					607.000.000,00	607.000.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	607.000.000,00	607.000.000,00	-			
						Jumlah pengadaan barang dan jasa	12 paket	Jumlah pengadaan barang dan jasa	12 paket			-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					60.000.000,00	60.000.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			prosentase lulusan siswa SMKN 2 Malang	100 %	60.000.000,00	60.000.000,00	-		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 orang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar	25 siswa	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajar	25 siswa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan			#VALUE!		SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Kali	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Kali	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	65 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	115 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 MALANG	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.245.730.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 4 MALANG	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Dokumen	1 paket	Jumlah Dokumen	1 paket	1.180.300.000,00	1.180.300.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG	
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1 paket	Jumlah Dokumen	1 paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 paket	54.300.000,00	54.300.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen	1 paket	5.400.000,00	5.400.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen	1 paket	70.000.000,00	70.000.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	70.000.000,00	70.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tenaga Pendidik	162 orang			#VALUE!		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.800.000,00	2.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.300.000,00	2.300.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 laporan	281.000.000,00	281.000.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	280.000.000,00	280.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen	1 berkas	7.000.000,00	7.000.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		7.000.000,00	7.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket			#VALUE!		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	681.500.000,00	681.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					65.430.000,00	65.430.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					65.430.000,00	65.430.000,00	-		SMK NEGERI 4 MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG	
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	900 Peserta Didik	10.430.000,00	10.430.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG	
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta Didik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG	
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	162 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 4 MALANG	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				#VALUE!		SMK NEGERI 4 MALANG	
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					922.523.000,00		(922.523.000,00)		SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	92 Persen	Indeks Profesionalitas ASN	92 Persen	837.737.980,00		(837.737.980,00)			
						Prosentase indikator program yang tercapai	87 Persen	Prosentase indikator program yang tercapai	87 Persen				-		
						Prosentase Peningkatan Pendapatan	83 Persen	Prosentase Peningkatan Pendapatan	83 Persen				-		
						Prosentase Realisasi Anggaran	87 Persen	Prosentase Realisasi Anggaran	87 Persen				-		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	3 Persen	Indeks Profesionalitas ASN	3 Persen	6.845.000,00		(6.845.000,00)			
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen				-		
						Prosentase realisasi anggaran	92 Persen	Prosentase realisasi anggaran	92 Persen			6.845.000,00	6.845.000,00		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	3.485.000,00	3.485.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1.630.000,00	1.630.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1.430.000,00	1.430.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	300.000,00	300.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	90.157.000,00	88.853.000,00	(1.304.000,00)		SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56.600.000,00	55.296.000,00	(1.304.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.542.000,00	5.542.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	15.700.000,00	15.700.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.660.000,00	2.660.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.580.000,00	8.580.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.075.000,00	1.075.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	5.320.000,00	5.320.000,00	-		SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.320.000,00	5.320.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	60.500.000,00	60.500.000,00	-		SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	57.000.000,00	57.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	66.700.000,00	68.004.000,00	1.304.000,00		SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.700.000,00	4.700.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	46.000.000,00	47.304.000,00	1.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah daftar arsip inaktif	1 Dokumen	jumlah daftar arsip inaktif	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
						jumlah daftar arsip vital	1 Dokumen	jumlah daftar arsip vital	1 Dokumen		#VALUE!	SMK NEGERI 11 MALANG		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		#VALUE!	SMK NEGERI 11 MALANG		
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	17.670.000,00	17.670.000,00	-		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17.670.000,00	17.670.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	303.645.980,00	303.645.980,00	-		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	420.000,00	420.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	303.225.980,00	303.225.980,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	20 Persen	Persentase Peningkatan Sales Growth	20 Persen	286.900.000,00	286.900.000,00	-		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja	286.900.000,00	286.900.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase kelulusan siswa	100 Persen	Prosentase kelulusan siswa	100 Persen	84.785.020,00	84.785.020,00	-		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	2	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas					8.761.020,00	0,00	(8.761.020,00)		SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	2	1.01	41	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Unit	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		8.761.020,00	0,00	(8.761.020,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	70 Orang	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	70 Orang	76.024.000,00	84.785.020,00	8.761.020,00		
						Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	55 Orang	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	55 Orang			-		
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	25 Orang	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	25 Orang			-		
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	275 Siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	275 Siswa	28.874.000,00	37.635.020,00	8.761.020,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa	5 kali	Jumlah kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa	5 kali	30.500.000,00	30.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	5 Orang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	5 Orang	16.650.000,00	16.650.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 11 MALANG
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					884.070.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	4 dokumen	jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	4 dokumen	861.710.000,00	875.890.000,00	14.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
					laporan	100 %	laporan	100 %	-					
1	1	1				persentase peningkatan pendapatan	0,04 %	persentase peningkatan pendapatan	0,04 %			-		
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen DPA	1 dokumen	jumlah dokumen DPA	1 dokumen	16.000.000,00	8.173.300,00	(7.826.700,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen			-		
						jumlah dokumen RKA	1 dokumen	jumlah dokumen RKA	1 dokumen			-		
						jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen			-		
						laporan	100 %	laporan	100 %			-		
												-		
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen		2.145.825,00	(2.554.175,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4.700.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	4.700.000,00	2.145.825,00	(2.554.175,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
					Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen			#VALUE!		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen		2.145.825,00	(1.154.175,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	3.300.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	3.300.000,00	1.735.825,00	(1.564.175,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2 dokumen	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2 dokumen	110.950.000,00	108.186.450,00	(2.763.550,00)		
						jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan		-			
						Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan		-			
						Jumlah laporan keuangan	12 laporan	Jumlah laporan keuangan	12 laporan		-			
						Jumlah laporan prognosis	1 laporan	Jumlah laporan prognosis	1 laporan		-			
						Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan		-			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.000.000,00	57.110.700,00	(2.889.300,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	1.250.000,00	1.394.700,00	144.700,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	17.000.000,00	16.959.300,00	(40.700,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan akuntansi perangkat daerah	12 laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2 dokumen	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2 dokumen	2.200.000,00	2.179.525,00	(20.475,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	28.600.000,00	28.599.700,00	(300,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1.900.000,00	1.942.525,00	42.525,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah laporan prognosis	1 laporan	Jumlah laporan prognosis	1 laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah kegiatan dan laporan	12 laporan	jumlah kegiatan dan laporan	12 laporan	6.500.000,00	6.427.200,00	(72.800,00)		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan dan laporan	12 laporan	Jumlah kegiatan dan laporan	12 laporan	6.500.000,00	6.427.200,00	(72.800,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan data pegawai	12 laporan	Jumlah laporan data pegawai	12 laporan	2.100.000,00	1.012.700,00	(1.087.300,00)		
						Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 laporan	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 laporan		-			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	2.100.000,00	1.012.700,00	(1.087.300,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah laporan data pegawai	12 laporan	Jumlah laporan data pegawai	12 laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	3 dokumen	jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	3 dokumen	73.350.000,00		(73.350.000,00)		
						Jumlah Laporan	1 laporan	Jumlah Laporan	1 laporan		-			
						Jumlah paket pengadaan	10 kali	Jumlah paket pengadaan	10 kali		61.528.500,00	61.528.500,00		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	39.350.000,00	28.430.400,00	(10.919.600,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						jumlah paket pengadaan	1 kali	jumlah paket pengadaan	1 kali		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	32.000.000,00	31.105.200,00	(894.800,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		#VALUE!			SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	1 dokumen	Jumlah daftar arsip aktif	1 dokumen	2.000.000,00	1.992.900,00	(7.100,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah daftar arsip inaktif	1 dokumen	Jumlah daftar arsip inaktif	1 dokumen		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
						Jumlah daftar arsip vital	1 dokumen	Jumlah daftar arsip vital	1 dokumen		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
					Jumlah mebel	1 set	Jumlah mebel	1 set			-				
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 paket	19.100.000,00	18.420.000,00	(680.000,00)		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	1 set	Jumlah mebel		2.100.000,00	1.607.000,00	(493.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	1 paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya		17.000.000,00	16.813.000,00	(187.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	448.810.000,00	488.226.850,00	39.416.850,00		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	448.810.000,00	488.226.850,00	39.416.850,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.900.000,00	915.000,00	(985.000,00)		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 paket	1.900.000,00	915.000,00	(985.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Jumlah pengadaan barang dan jasa	6 Paket	183.000.000,00	183.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 Unit Kerja	183.000.000,00	183.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Persentase Kelulusan Siswa	100 %	22.360.000,00	8.180.000,00	(14.180.000,00)		SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru yang Mendapat Pelatihan	4 orang	Jumlah Guru yang Mendapat Pelatihan	4 orang	22.360.000,00	8.180.000,00	(14.180.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Lulusan yang Tersempit di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	204 orang	Jumlah Lulusan yang Tersempit di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	204 orang						
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	10 siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	10 siswa						
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	1 unit	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	1 unit	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	57 siswa	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	57 siswa	4.800.000,00	900.000,00	(3.900.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	1 kali	Jumlah kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	1 kali	10.560.000,00	5.280.000,00	(5.280.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	1 orang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	1 orang	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang		#VALUE!	SMK NEGERI 1 SINGOSARI MALANG			
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.871.500.000,00	#VALUE!		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO		
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85 %	Indeks Profesionalitas ASN	85 %	1.849.000.000,00	1.849.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
						Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %					#VALUE!	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
						Persentase Kenaikan Pendapatan	5 %	Persentase Kenaikan Pendapatan	5 %					#VALUE!	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
						Persentase Realisasi Anggaran	100 %	Persentase Realisasi Anggaran	100 %					#VALUE!	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
					Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen					#VALUE!	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen					#VALUE!
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	1.750.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	1.750.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	12 Dokumen	76.652.000,00	76.652.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
					Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan					#VALUE!	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56.052.000,00	56.052.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					1.200.000,00	1.200.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.740.000,00	59.740.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.900.000,00	43.900.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2.400.000,00	2.400.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.240.000,00	12.240.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					522.268.000,00	522.268.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	640.000,00	640.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	521.628.000,00	521.628.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.500.000,00	6.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					1.175.140.000,00	1.175.140.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO	
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	1.175.140.000,00	1.175.140.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					22.500.000,00	22.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	2	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					22.500.000,00	22.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	2	1.02	39 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	2	1.02	41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1	2	1.02	43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 Orang	7.900.000,00	7.900.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PANJI SITUBONDO
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					660.702.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					572.072.378,00	582.855.378,00	10.783.000,00		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN	81 %	Indeks profesionalitas ASN	81 %			-		
					Persentase peningkatan pendapatan	5 %	Persentase peningkatan pendapatan	5 %			-		
					Prosentase indikator program yang tercapai	100 %	Prosentase indikator program yang tercapai	100 %			-		
					Prosentase realisasi anggaran	74.65 %	Prosentase realisasi anggaran	74.65 %	7.531.564,00	7.484.480,00	(47.084,00)		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.120.699,00	1.111.480,00	(9.219,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	703.118,00	725.400,00	22.282,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.818.029,00	2.806.900,00	(11.129,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.889.718,00	2.840.700,00	(49.018,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	96.080.724,00	96.843.724,00	763.000,00		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	65.508.000,00	66.276.000,00	768.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	3.060.000,00	3.055.000,00	(5.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 laporan	17.640.000,00	17.640.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	2 laporan	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD	2 laporan	3.357.459,00	3.357.459,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3.885.265,00	3.885.265,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	2.630.000,00	2.630.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
					Jumlah laporan prognosis	1 laporan	Jumlah laporan prognosis	1 laporan			-		
1	1	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan dan laporan	12 laporan	Jumlah kegiatan dan laporan	12 laporan	9.800.000,00	9.800.000,00	-		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	9.800.000,00	9.800.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					155.694.259,00	131.941.543,00	(23.752.716,00)		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	2 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	2 Paket			(33.381.716,00)		
1	1	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	124.732.399,00	91.350.683,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 paket	3.142.000,00	1.005.000,00	(2.137.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.960.000,00	33.726.000,00	11.766.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	5.859.860,00	5.859.860,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	131.465.831,00	165.285.631,00	33.819.800,00		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	490.831,00	490.831,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	130.975.000,00	164.794.800,00	33.819.800,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Sales Growth	5 %	Persentase Peningkatan Sales Growth	5 %	171.500.000,00	171.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 paket	171.500.000,00	171.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	30 orang	Jumlah Guru yang mendapatkan Pelatihan	30 orang	88.629.622,00	77.846.622,00	(10.783.000,00)		
				Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha		60 orang	Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	60 orang						
				Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba		50 siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	50 siswa						
				Persentase kelulusan siswa		100 %	Persentase kelulusan siswa	100 %						
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	15 unit	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	15 unit	88.629.622,00	77.846.622,00	(10.783.000,00)		
					Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	30 orang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	30 orang						SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		65.828.794,00	55.045.794,00	(10.783.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		7.382.145,00	7.382.145,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		15.418.683,00	15.418.683,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 KALIPURO BANYUWANGI
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.095.409.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	95 %	Indeks Profesionalitas ASN	95 %	1.049.701.500,00	1.048.503.400,00	(1.198.100,00)		
				Persentase Indikator Program yang tercapai		85 %	Persentase Indikator Program yang tercapai	85 %						
				Persentase Realisasi Anggaran		90 %	Persentase Realisasi Anggaran	90 %						
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.741.987,00	11.630.000,00	3.888.013,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.697.177,00	3.135.000,00	437.823,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.027.820,00	2.885.000,00	857.180,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.543.000,00	2.820.000,00	1.277.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.473.990,00	2.790.000,00	1.316.010,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					136.913.681,00	102.539.200,00	(34.374.481,00)		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.904.000,00	51.745.000,00	(8.159.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.788.315,00	1.684.500,00	(103.815,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	11.073.990,00	11.040.000,00	(33.990,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.191.887,00	3.365.200,00	173.313,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	60.686.792,00	34.597.500,00	(26.089.292,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	268.697,00	107.000,00	(161.697,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah	12 Laporan	7.616.409,00	18.685.000,00	11.068.591,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.616.409,00	18.685.000,00	11.068.591,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Laporan	43.602.240,00	49.325.300,00	5.723.060,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	40.730.641,00	47.498.200,00	6.767.559,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	544.259,00	585.000,00	40.741,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	593.719,00	1.081.500,00	487.781,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.733.621,00	160.600,00	(1.573.021,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	24.355.930,00	45.281.250,00	20.925.320,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.866.030,00	7.996.700,00	130.670,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.705.000,00	1.498.550,00	(3.206.450,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.866.000,00	3.376.000,00	(490.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.270.000,00	30.910.000,00	23.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	648.900,00	1.500.000,00	851.100,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	112.243.397,00	89.191.850,00	(23.051.547,00)		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	112.243.397,00	89.191.850,00	(23.051.547,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	210.526.856,00	216.197.800,00	5.670.944,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	526.856,00	220.000,00	(306.856,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	215.977.800,00	5.977.800,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	19.650.000,00	28.602.000,00	8.952.000,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	14.800.000,00	24.407.000,00	9.607.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.850.000,00	4.195.000,00	(655.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Produksi yang dihasilkan	14 Unit	487.051.000,00	487.051.000,00	-		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	14 Unit Kerja	487.051.000,00	487.051.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah guru yang mendapatkan pelatihan Jumlah lulusan yang terserap di Dunia Usaha/Industri dan berwirausaha Jumlah siswa yang mengikuti lomba	30 orang 160 siswa 8 siswa	45.707.500,00	46.905.600,00	1.198.100,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah alat praktik dan peraga peserta didik Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir Jumlah kegiatan pembinaan minat bakat dan kreatifitas sekolah	6 Unit 30 Orang 4 Kegiatan	45.707.500,00	46.905.600,00	1.198.100,00		SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	8.850.000,00	8.250.000,00	(600.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	30 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	30 Satuan Pendidikan	5.627.500,00	4.277.800,00	(1.349.700,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17 Peserta Didik	27.360.000,00	30.010.000,00	2.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang	3.870.000,00	4.367.800,00	497.800,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 BONDOWOSO
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.207.995.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	90 %	Indeks profesionalitas ASN	90 %	1.177.995.000,00	1.177.995.000,00	-		
						Prosentase indikator program yang tercapai	90 %	Prosentase indikator program yang tercapai	90 %					
						Prosentase peningkatan pendapatan	95 %	Prosentase peningkatan pendapatan	95 %					
						Prosentase realisasi anggaran	10 %	Prosentase realisasi anggaran	10 %					
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
					Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 dokumen						
					Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen						
					Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen						
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	164.458.450,00	164.458.450,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.156.000,00	24.156.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	24.156.000,00	24.156.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	31.146.450,00	31.146.450,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			#VALUE!		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sistem informasi	1 dokumen	Jumlah dokumen sistem informasi	1 dokumen	849.750,00	849.750,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	849.750,00	849.750,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan	1 paket	Jumlah barang cetakan	1 paket	29.000.000,00	29.000.000,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
						Jumlah fasilitas tamu	1 paket	Jumlah fasilitas tamu	1 paket					
						Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 paket	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 paket					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket dokumen terkirim	50 dokumen	Jumlah paket dokumen terkirim	50 dokumen	415.686.800,00	415.686.800,00	-		
				Jumlah penyediaan jasa		12 bulan	Jumlah penyediaan jasa	12 bulan						
				Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan air		12 bulan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan air	12 bulan						
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.686.800,00	414.686.800,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	1 paket	Jumlah pengadaan barang dan jasa	1 paket	550.000.000,00	550.000.000,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	550.000.000,00	550.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Indeks Profesionalitas ASN	90 %	Indeks Profesionalitas ASN	90 %	30.000.000,00	30.000.000,00	-		
				Presentase indikator program yang tercapai		95 %	Presentase indikator program yang tercapai	95 %						
				Presentase peningkatan pendapatan		10 %	Presentase peningkatan pendapatan	10 %						
				Presentase realisasi anggaran		97 %	Presentase realisasi anggaran	97 %						
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya fasilitas pengembangan siswa dan guru	100 %	Tersedianya fasilitas pengembangan siswa dan guru	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	-		SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	50 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	50 Satuan Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35 Peserta Didik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 5 JEMBER
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					855.862.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase realisasi Anggaran	90 %	788.607.101,00	788.607.101,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase realisasi Anggaran	90 %	12.735.808,00	12.735.808,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.515.373,00	3.515.373,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.105.373,00	3.105.373,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	3.057.531,00	3.057.531,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	#VALUE!	SMK NEGERI 3 MADIUN					
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.057.531,00	3.057.531,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Presentase Realisasi Anggaran	12 Laporan 90 %	Jumlah Presentase Realisasi Anggaran	12 Laporan 90 %	108.719.655,00	108.719.655,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.748.000,00	62.748.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.701.279,00	9.701.279,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	22.195.000,00	22.195.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.919.688,00	3.919.688,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.634.920,00	8.634.920,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.520.768,00	1.520.768,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	81 %	Indeks Profesionalitas ASN	81 %	7.081.000,00	7.081.000,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.081.000,00	7.081.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	81 %	Indeks Profesionalitas ASN	81 %	2.718.856,00	2.718.856,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.718.856,00	2.718.856,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Persentase Realisasi Anggaran	90 %	60.064.712,00	60.064.712,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.197.000,00	12.197.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.996.988,00	2.996.988,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.160.000,00	8.160.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	11.220.000,00	11.220.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	24.050.000,00	24.050.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1.440.724,00	1.440.724,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341 Laporan	341.100.000,00	341.100.000,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.500.000,00	340.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Persentase Realisasi Anggaran	90 %	6.187.070,00	6.187.070,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	6.187.070,00	6.187.070,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Unit Produksi Yang dihasilkan	2 %	Jumlah Unit Produksi Yang dihasilkan	2 %	250.000.000,00	250.000.000,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja	250.000.000,00	250.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Kelulusan Siswa	100 %	Persentase Kelulusan Siswa	100 %	67.254.899,00	67.254.899,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lulusan yang tereserap di Dunia usaha/Dunia Industri	100 Siswa	Jumlah lulusan yang tereserap di Dunia usaha/Dunia Industri	100 Siswa	67.254.899,00	67.254.899,00	-		SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	45.069.314,00	45.069.314,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	32 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	32 Satuan Pendidikan	6.700.000,00	6.700.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	32 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	32 Peserta Didik	4.615.000,00	4.615.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	10.870.585,00	10.870.585,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 MADIUN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					631.373.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					537.938.505,00	546.679.020,00	8.740.515,00		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.643.558,00	15.225.008,00	(1.418.550,00)		SMK NEGERI 1 PACITAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.279.175,00	5.601.300,00	(677.875,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.279.175,00	5.538.500,00	(740.675,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.042.604,00	2.042.604,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.042.604,00	2.042.604,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					126.321.685,00	120.622.351,00	(5.699.334,00)		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.068.000,00	67.076.000,00	(2.992.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.987.244,00	1.987.244,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	21.191.764,00	19.958.200,00	(1.233.564,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.347.764,00	4.347.764,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	23.682.149,00	26.151.043,00	2.468.894,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.044.764,00	1.102.100,00	(3.942.664,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.340.000,00	24.120.000,00	15.780.000,00		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.340.000,00	24.120.000,00	15.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.943.087,00	2.911.800,00	(31.287,00)		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.943.087,00	2.911.800,00	(31.287,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.340.814,00	55.938.700,00	597.886,00		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.958.114,00	16.068.000,00	(6.890.114,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	5.464.000,00	1.464.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.740.000,00	26.764.000,00	6.024.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.642.700,00	2.642.700,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					22.000.000,00	18.747.000,00	(3.253.000,00)		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.000.000,00	18.747.000,00	(3.253.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.316.061,00	206.316.061,00	-		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	840.000,00	840.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	205.476.061,00	205.476.061,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.533.300,00	29.298.100,00	2.764.800,00		SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	16.533.300,00	19.298.100,00	2.764.800,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.10	0	Peningkatan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		#VALUE!	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN	
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			73.500.000,00	73.500.000,00	-			SMK NEGERI 1 PACITAN	
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	73.500.000,00	73.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			93.434.495,00	84.693.980,00	(8.740.515,00)			SMK NEGERI 1 PACITAN	
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			93.434.495,00	84.693.980,00	(8.740.515,00)			SMK NEGERI 1 PACITAN	
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	24.707.000,00	28.982.000,00	4.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	6.800.000,00	1.700.000,00	(5.100.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12 Peserta Didik	19.200.000,00	19.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	143 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	143 Orang	42.727.495,00	34.811.980,00	(7.915.515,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 PACITAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			756.886.000,00		#VALUE!			SMK NEGERI 2 PASURUAN	
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	80 %	Indeks Profesionalitas ASN	80 %		714.693.883,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Persentase Indikator program yang tercapai	85 %	Persentase Indikator program yang tercapai	85 %			#VALUE!		SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Persentase realisasi anggaran	90 %	Persentase realisasi anggaran	90 %			#VALUE!		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	4 Dokumen	14.280.000,00	14.280.000,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.441.000,00	5.441.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.441.000,00	5.441.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.699.000,00	1.699.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.699.000,00	1.699.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17 Laporan	133.398.500,00	133.398.500,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.232.000,00	71.232.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.619.500,00	15.619.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.784.000,00	20.784.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.295.000,00	1.295.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18.497.000,00	18.497.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.971.000,00	5.971.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	14.047.000,00	14.047.000,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	14.047.000,00	14.047.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Laporan	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Laporan	48.579.550,00	48.579.550,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	48.000.000,00	48.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	292.350,00	292.350,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	287.200,00	287.200,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	22.020.233,00	22.020.233,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.128.593,00	6.128.593,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.115.960,00	1.115.960,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.979.000,00	13.979.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	796.680,00	796.680,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	14.199.000,00	14.199.000,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Paket					
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.199.000,00	14.199.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	5 Dokumen	361.779.600,00	361.779.600,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	180.000,00	180.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	361.599.600,00	361.599.600,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	106.390.000,00	106.390.000,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	8 Unit Kerja	106.390.000,00	106.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Guru yang Mendapatkan Pelatihan	95 Guru	Jumlah Guru yang Mendapatkan Pelatihan	95 Guru	42.192.117,00	42.192.117,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah h Lulusan yang Tersekap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	250 Orang	Jumlah h Lulusan yang Tersekap di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	250 Orang					
						Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	15 siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba	15 siswa					
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	2 Paket	jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	2 Paket	42.192.117,00	42.192.117,00	-		SMK NEGERI 2 PASURUAN
						Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	95 Guru	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	95 Guru					
						jumlah kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa	48 Kali	jumlah kegiatan pembinaan, bakat dan kreativitas siswa	48 Kali					
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	11.878.400,00	11.878.400,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	2.031.500,00	2.031.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15 Peserta Didik	9.600.000,00	9.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	95 Guru	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	95 Guru	18.682.217,00	18.682.217,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 2 PASURUAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					857.850.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Laporan yang dibuat	12 dokumen	Jumlah Laporan yang dibuat	12 dokumen	704.844.300,00	704.844.300,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat	4 dokumen	Jumlah Laporan yang dibuat	4 dokumen	11.300.000,00	11.300.000,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	3.390.000,00	3.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Perubahan	4 Dokumen	3.390.000,00	3.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	2.260.000,00	2.260.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan	4 Dokumen	2.260.000,00	2.260.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat	42 dokumen	Jumlah Laporan yang dibuat	42 dokumen	84.534.000,00	84.534.000,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	54.104.000,00	54.104.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12 Laporan	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12 Laporan	3.390.000,00	3.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	12 Laporan	3.390.000,00	3.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12 Laporan	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12 Laporan	3.390.000,00	3.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1 Laporan	Jumlah laporan prognosis	1 Laporan	2.260.000,00	2.260.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat	3 dokumen	Jumlah Laporan yang dibuat	3 dokumen	1.695.000,00	1.695.000,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 Laporan	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12 Laporan	1.695.000,00	1.695.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat	8 dokumen	Jumlah Laporan yang dibuat	8 dokumen	28.899.300,00	28.899.300,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	1 Paket	jumlah paket pengadaan	1 Paket	22.119.300,00	22.119.300,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	Jumlah Laporan	3 Laporan	3.390.000,00	3.390.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	1 Dokumen	Jumlah daftar arsip aktif	1 Dokumen	3.390.000,00		-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen			#VALUE!		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	48 dokumen	Jumlah Laporan	48 dokumen	439.136.000,00	439.136.000,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	439.136.000,00	439.136.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
					Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			#VALUE!		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	5 dokumen	Jumlah Laporan	5 dokumen	16.430.000,00	16.430.000,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	2 Paket	Jumlah Jasa	2 Paket	6.780.000,00	6.780.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Paket	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	50 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	50 Paket	5.650.000,00	5.650.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan	1 dokumen	Jumlah Laporan	1 dokumen	122.850.000,00	122.850.000,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	122.850.000,00	122.850.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Laporan	8 dokumen	Jumlah Laporan	8 dokumen	153.005.700,00	153.005.700,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	2	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan	8 dokumen	Jumlah Laporan	8 dokumen	153.005.700,00	153.005.700,00	-		SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG		
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Unit	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Unit	88.934.700,00	88.934.700,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajaran pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	823 siswa	Jumlah peserta didik yg mengikuti proses belajaran pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	823 siswa	36.500.000,00	36.500.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	3 kali	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	3 kali	14.237.000,00	14.237.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	44 Orang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	44 Orang	13.334.000,00	13.334.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 3 BOYOLANGU TULUNGAGUNG	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.053.610.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI		
1	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN SMKN 1 Glagah	81 %	Indeks profesionalitas ASN SMKN 1 Glagah	81 %	1.027.441.080,00	1.023.915.600,00	(3.525.480,00)		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI		
				Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Glagah	25 %	Persentase Peningkatan Pendapatan SMKN 1 Glagah	25 %								
				Persentase realisasi anggaran SMKN 1 Glagah	97 %	Persentase realisasi anggaran SMKN 1 Glagah	97 %								
				Persentase Indikator program yang tercapai SMKN 1 Glagah	100 %	Persentase Indikator program yang tercapai SMKN 1 Glagah	100 %								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	10.230.000,00	8.540.900,00	(1.689.100,00)		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.525.000,00	2.293.300,00	(231.700,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.960.000,00	2.188.600,00	228.600,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.010.000,00	2.217.000,00	(793.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.735.000,00	1.842.000,00	(893.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	93.360.000,00	92.607.700,00	(752.300,00)		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.205.000,00	68.292.000,00	1.087.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatuausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.000.000,00	2.965.000,00	(35.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	6.860.000,00	7.015.700,00	155.700,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.695.000,00	1.735.000,00	(1.960.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan dan Laporan	4 Laporan	Jumlah Kegiatan dan Laporan	4 Laporan	2.735.000,00	11.800.000,00	9.065.000,00		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
						Jumlah Paket Pengadaan	2 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	2 Paket					
1	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.735.000,00	11.800.000,00	9.065.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	50.380.000,00	55.419.000,00	5.039.000,00		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	9.553.000,00	(447.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	11.297.000,00	(703.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.000.000,00	9.109.000,00	1.109.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.880.000,00	23.876.000,00	5.996.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	1.584.000,00	(916.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	488.588.080,00	464.400.000,00	(24.188.080,00)		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	488.588.080,00	464.400.000,00	(24.188.080,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pengadaan barang dan jasa	4 Unit	Jumlah pengadaan barang dan jasa	4 Unit	382.148.000,00	391.148.000,00	9.000.000,00		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	4 Unit Kerja	382.148.000,00	391.148.000,00	9.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	2 Kali	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	2 Kali	26.168.920,00	29.694.400,00	3.525.480,00		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	2 Kali	Jumlah kegiatan pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	2 Kali	26.168.920,00	29.694.400,00	3.525.480,00		SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	14.199.000,00	17.501.000,00	3.302.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	30 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	30 Orang	2.500.000,00	2.211.000,00	(289.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Peserta Didik	5.917.920,00	5.582.400,00	(335.520,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	3.552.000,00	4.400.000,00	848.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					601.299.500,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesional ASN SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	81,2 %	Indeks Profesional ASN SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	81,2 %	529.743.500,00	529.743.500,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
				Presentase Indikator Program yang Tercapai SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso		100 %	Presentase Indikator Program yang Tercapai SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	100 %			#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
				Presentase Peningkatan Pendapatan SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso		10 %	Presentase Peningkatan Pendapatan SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	10 %			#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
				Presentase Realisasi Anggaran SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso		85 %	Presentase Realisasi Anggaran SMK PP Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	85 %			#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	12 Laporan	54.758.000,00	54.758.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	48.258.000,00	48.258.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.000.000,00	1.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12 Laporan	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan	12 Laporan			#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.000.000,00	2.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Dokumen			#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.000.000,00	2.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
					Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan			#VALUE!			SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	258.584.000,00	253.464.000,00	(5.120.000,00)		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	73.000.000,00	70.880.000,00	(2.120.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Paket Penggandaan	1 Paket	Jumlah Paket Penggandaan	1 Paket			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	3.350.000,00	3.350.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan	1 Laporan	108.234.000,00	108.234.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif	1 Dokumen	Jumlah Daftar Arsip Aktif	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Daftar Arsip Inaktif	1 Dokumen	Jumlah Daftar Arsip Inaktif	1 Dokumen			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Daftar Arsip Vital	1 Dokumen	Jumlah Daftar Arsip Vital	1 Dokumen			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Paket	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100.000.000,00	105.120.000,00	5.120.000,00		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100.000.000,00	105.120.000,00	5.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	7 Paket	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	7 Paket	79.401.500,00	79.401.500,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		79.401.500,00	79.401.500,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	7 Paket	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	7 Paket			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Guru yang Mendapatkan Pelatihan	47 Orang	Jumlah Guru yang Mendapatkan Pelatihan	47 Orang	71.556.000,00	71.556.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Lulusan yang Tereper di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	80 Orang	Jumlah Lulusan yang Tereper di Dunia Usaha/Dunia Industri dan Berwirausaha	80 Orang			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	15 Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	15 Siswa			#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240 Siswa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240 Siswa	71.556.000,00	71.556.000,00	-		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240 Siswa	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	240 Siswa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Bakat dan Kreativitas Siswa	2 Kali	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Bakat dan Kreativitas Siswa	1 Kali	16.556.000,00	16.556.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan Karir	47 Orang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan Karir	47 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				#VALUE!		SMK NEGERI 1 TEGALAMPEL BONDOWOSO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	1					1.111.534.000,00		#VALUE!		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO				
1	1	1				949.000.000,00	995.534.000,00	46.534.000,00		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO				
1	1	1	1.01			14.600.000,00	14.600.000,00	-		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO				
1	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00	2.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan verifikasi penatausahaan	12 Laporan	Jumlah Laporan verifikasi penatausahaan	12 Laporan	80.400.000,00	121.800.000,00	41.400.000,00		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.200.000,00	74.200.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.600.000,00	1.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.600.000,00	43.000.000,00	41.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	3 Laporan	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	3 Laporan	4.000.000,00	4.134.000,00	134.000,00		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.400.000,00	2.534.000,00	134.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1.600.000,00	1.600.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	-		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	-	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	8 Paket	Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa	8 Paket	250.000.000,00	255.000.000,00	5.000.000,00		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	9 Unit Kerja	250.000.000,00	255.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Kelulusan Siswa	100 %	Prosentase Kelulusan Siswa	100 %	162.534.000,00	116.000.000,00	(46.534.000,00)		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	2	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	60 Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti Lomba	60 Siswa	162.534.000,00	116.000.000,00	(46.534.000,00)		SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	2	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	10 Unit	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik	10 Unit	61.000.000,00	31.000.000,00	(30.000.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket					
1	1	2	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan	31.534.000,00	20.400.000,00	(11.134.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	1	2	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12 Peserta Didik	40.000.000,00	33.000.000,00	(7.000.000,00)	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	30.000.000,00	31.600.000,00	1.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN	SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					567.434.404.654,00		#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	88 0	Indeks profesionalitas ASN	88 0	105.899.084.000,00	119.174.167.975,00	13.275.083.975,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
					Persentase indikator program yang tercapai	85 persen	Persentase indikator program yang tercapai	85 persen	DINAS KESEHATAN				DINAS KESEHATAN	
					Persentase realisasi anggaran	90 persen	Persentase realisasi anggaran	90 persen						
1	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	300.000.000,00	335.228.999,00	35.228.999,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
					Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	4 Dokumen						
1	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	200.000.000,00	280.208.999,00	80.208.999,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	10.000.000,00	2.680.000,00	(7.320.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	10.000.000,00	13.400.000,00	3.400.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	3.930.000,00	(11.070.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00	3.930.000,00	(11.070.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	20.000.000,00	25.260.000,00	5.260.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	30.000.000,00	5.820.000,00	(24.180.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan keuangan	12 Laporan	96.240.953.000,00	101.992.596.500,00	5.751.643.500,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan	94.765.953.000,00	100.416.874.000,00	5.650.921.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.175.000.000,00	999.073.500,00	(175.926.500,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	150.000.000,00	275.173.000,00	125.173.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	80.736.000,00	30.736.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	50.000.000,00	100.740.000,00	50.740.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	120.000.000,00	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
												#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	203.185.000,00	3.185.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	200.000.000,00	203.185.000,00	3.185.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	100.000.000,00	476.456.000,00	376.456.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	100.000.000,00	476.456.000,00	376.456.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	1.076.100.000,00	1.667.997.315,00	591.897.315,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	24.292.500,00	4.292.500,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	32.327.800,00	(17.672.200,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	196.588.000,00	96.588.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	201.523.440,00	101.523.440,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	107.096.500,00	57.096.500,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	11.652.000,00	(3.348.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000,00	92.440.000,00	52.440.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	626.100.000,00	914.621.075,00	288.521.075,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	75.000.000,00	87.456.000,00	12.456.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	275.000.000,00	321.029.000,00	46.029.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.000.000,00	321.029.000,00	246.029.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.788.231.000,00	11.660.942.404,00	4.872.711.404,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.490.331.000,00	2.334.496.830,00	844.165.830,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.297.900.000,00	9.326.445.574,00	4.028.545.574,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					918.800.000,00	2.516.732.757,00	1.597.932.757,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	500.000.000,00	714.711.157,00	214.711.157,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	268.800.000,00	568.953.100,00	300.153.100,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	1.233.068.500,00	1.083.068.500,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup	454.870.340.654,00	582.990.340.842,00	128.120.000.188,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
				Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar		50 persen	Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen						
				Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target		55 persen	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	55 persen						
				Prevalensi Stunting pada Balita		16 persen	Prevalensi Stunting pada Balita	16 persen						
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 Persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 Persen	1.641.100.000,00	43.393.452.100,00	41.752.352.100,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	31496 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	31496 Unit	263.700.000,00	150.000.000,00	(113.700.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3000 Dokumen	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3000 Dokumen	627.400.000,00	899.518.100,00	272.118.100,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	4 Paket	750.000.000,00	42.343.934.000,00	41.593.934.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
											#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
											#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
											#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	2	1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	23 kabupaten/kota	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	23 kabupaten/kota	451.830.546.500,00	528.202.842.210,00	76.372.295.710,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 50% PKM terakreditasi	15 kabupaten/kota	Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 50% PKM terakreditasi	15 kabupaten/kota						
1	2	2	1.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	300000 Orang	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	300000 Orang	1.414.400.000,00	300.000.000,00	(1.114.400.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	500.000.000,00	807.152.000,00	307.152.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	800.000.000,00	1.398.718.000,00	598.718.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	250.000.000,00	75.000.000,00	(175.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	250.000.000,00	174.160.000,00	(75.840.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	300 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	350.000.000,00	490.884.000,00	140.884.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	727.400.000,00	125.000.000,00	(602.400.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	1.891.100.000,00	1.225.402.500,00	(665.697.500,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen					
						Jumlah Dokumen kabko hasil pemgeloalaan pelayanan kesehatan penyakit menular	1 Dokumen	Jumlah Dokumen kabko hasil pemgeloalaan pelayanan kesehatan penyakit menular	1 Dokumen					
1	2	2	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	38 Kab / Kota	Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar	38 Kab / Kota					
1	2	2	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	150.000.000,00	237.745.000,00	87.745.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	0 Orang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	400 Orang	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	400 Orang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	400 Orang					
1	2	2	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	433.406.846.500,00	519.695.960.710,00	86.289.114.210,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	300.000.000,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kabupaten/Kota dengan verifikasi alert sesuai target	38 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan verifikasi alert sesuai target	38 Kab / Kota					
1	2	2	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	31 Dokumen	8.954.800.000,00	2.247.820.000,00	(6.706.980.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	25 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	25 dokumen					
1	2	2	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450.000.000,00	100.000.000,00	(350.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	1.136.000.000,00	50.000.000,00	(1.086.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	2	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	100.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Persentase sampel/spesimen KLB yang diperiksa	100 Persentase	Persentase sampel/spesimen KLB yang diperiksa			#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Center View	16 Aplikasi	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Center View	16 Aplikasi	648.694.154,00	394.046.532,00	(254.647.622,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6 Dokumen	648.694.154,00	394.046.532,00	(254.647.622,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi penerbitan izin RS kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	14 Dokumen	Jumlah Dokumen rekomendasi penerbitan izin RS kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	14 Dokumen	750.000.000,00	11.000.000.000,00	10.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	14 Unit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	50 Unit	200.000.000,00	425.000.000,00	225.000.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	50 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	50 Unit	400.000.000,00	10.525.000.000,00	10.125.000.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	100 persen	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah dengan tenaga kesehatan memiliki izin praktik	100 persen	3.305.080.000,00	4.770.195.000,00	1.465.115.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	persentase institusi kesehatan milik pemerintah yang memiliki dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan sesuai ketentuan	69 Persen	persentase institusi kesehatan milik pemerintah yang memiliki dokumen rencana kebutuhan SDM kesehatan sesuai ketentuan	69 Persen	1.605.080.000,00	1.884.428.000,00	279.348.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.01	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2397 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2397 Orang	1.605.080.000,00	1.884.428.000,00	279.348.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	98 Persen	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	98 Persen	1.700.000.000,00	2.885.767.000,00	1.185.767.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.02	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	960 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	960 Orang	1.500.000.000,00	2.592.419.000,00	1.092.419.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	3	1.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	200.000.000,00	293.348.000,00	93.348.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase alat kesehatan yang didedarkan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan	90 persen	Persentase alat kesehatan yang didedarkan sesuai persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan	90 persen	850.300.000,00	520.300.000,00	(330.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Persentase ketersediaan obat dan vaksin	89 persen	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	89 persen					
1	2	4	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase PAK Cabang yang sesuai standar	90 persen	Persentase PAK Cabang yang sesuai standar	90 persen	650.300.000,00	440.300.000,00	(210.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Persentase PBF Cabang yang sesuai standar	84 persen	Persentase PBF Cabang yang sesuai standar	84 persen					
1	2	4	1.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	20 Sarana	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	20 Sarana	450.300.000,00	300.300.000,00	(150.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	26 Sarana	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	26 Sarana		#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	1.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	1 Dokumen	200.000.000,00	140.000.000,00	(60.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	41 Dokumen	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	41 Dokumen		#VALUE!	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase UKOT yang sesuai standar	72 Persen	Persentase UKOT yang sesuai standar	72 Persen	200.000.000,00	80.000.000,00	(120.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	4	1.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	10 Sarana	100.000.000,00	40.000.000,00	(60.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	4	1.02	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	100.000.000,00	40.000.000,00	(60.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	68 persen	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	68 persen	2.509.600.000,00	3.354.320.347,00	844.720.347,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	28 kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	28 kabupaten/kota	627.400.000,00	1.115.940.000,00	488.540.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.01	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	6 Dokumen	627.400.000,00	1.115.940.000,00	488.540.000,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media	6 Tema	Jumlah tema KIE program kesehatan prioritas yang dipromosikan melalui berbagai saluran media	6 Tema	1.100.000.000,00	2.138.380.347,00	1.038.380.347,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Dokumen	1.100.000.000,00	2.138.380.347,00	1.038.380.347,00	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Poskestren Madya, Purnama dan Mandiri sesuai standar	26 kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Poskestren Madya, Purnama dan Mandiri sesuai standar	26 kabupaten/kota	782.200.000,00	100.000.000,00	(682.200.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar	27 kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan Pembinaan Posyandu Balita Purnama Mandiri (PURI) sesuai standar	27 kabupaten/kota						
1	2	5	1.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	782.200.000,00	100.000.000,00	(682.200.000,00)	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.325.000.000,00		#VALUE!	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target Prevalensi Stunting pada Balita	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup 50 persen 55 persen 16 persen	Angka Kematian Ibu (AKI) Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target Prevalensi Stunting pada Balita	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup 50 persen 55 persen 16 persen	2.325.000.000,00	2.275.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen	1.625.000.000,00	1.671.441.000,00	46.441.000,00	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	750.000.000,00	709.850.000,00	(40.150.000,00)	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	600.000.000,00	529.216.000,00	(70.784.000,00)	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	9 Unit	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	9 Unit	95.000.000,00	90.375.000,00	(4.625.000,00)	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	180.000.000,00	342.000.000,00	162.000.000,00	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	700.000.000,00	603.559.000,00	(96.441.000,00)	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	200.000.000,00	413.559.000,00	213.559.000,00	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50 Dokumen						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	2	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	9 Dokumen	500.000.000,00	190.000.000,00	(310.000.000,00)	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	DINAS KESEHATAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.375.000.000,00		(2.375.000.000,00)		DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen	0Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen	2.275.000.000,00	2.219.550.000,00	(55.450.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
				Angka Kematian Ibu (AKI)		95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup						
				Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target		55 persen	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	55 persen						
				Prevalensi Stunting pada Balita		16 persen	Prevalensi Stunting pada Balita	16 persen						
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen	1.625.000.000,00	1.117.650.000,00	(507.350.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	500.000.000,00	178.754.000,00	(321.246.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	6 Unit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	6 Unit	600.000.000,00	31.255.000,00	(568.745.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	6 Unit	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	4 Unit	345.000.000,00	50.470.000,00	(294.530.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	180.000.000,00	857.171.000,00	677.171.000,00	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	600.000.000,00	982.100.000,00	382.100.000,00	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Kabupaten/Kota ODF		26 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota ODF	26 Kab/Kota						
1	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	100.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.02	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4 dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	4 Dokumen	100.000.000,00	282.350.000,00	182.350.000,00	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
1	2	2	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	3 dokumen	jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	3 Dokumen	400.000.000,00	99.750.000,00	(300.250.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan		0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan							
1	2	2	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi penerbitan izin RS kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	14 Dokumen	Jumlah Dokumen rekomendasi penerbitan izin RS kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	14 Dokumen	50.000.000,00	119.800.000,00	69.800.000,00	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah dokumen penjaminan mutu fasilitas layanan kesehatan	1 dokumen	jumlah dokumen penjaminan mutu fasilitas layanan kesehatan		50.000.000,00	119.800.000,00	69.800.000,00	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		0 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit						
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					100.000.000,00	80.450.000,00	(19.550.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	68 persen	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	68 persen	100.000.000,00	80.450.000,00	(19.550.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2	5	1.01	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	100.000.000,00	80.450.000,00	(19.550.000,00)	UPT LABORATORIUM GIZI	DINAS KESEHATAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.384.735.527.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	70 %	Indeks Profesionalitas ASN	70 %	1.384.735.527.000,00	1.373.888.571.000,00	(10.846.956.000,00)		
				Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar		95 %	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar	95 %						
				Persentase indikator program yang tercapai		94 %	Persentase indikator program yang tercapai	94 %						
				Persentase realisasi anggaran		92 %	Persentase realisasi anggaran	92 %						
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2 laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	2 laporan	354.735.527.000,00	343.888.571.000,00	(10.846.956.000,00)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2187 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2187 Orang/Bulan	354.735.527.000,00	343.888.571.000,00	(10.846.956.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	1.030.000.000.000,00	1.030.000.000.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
1	2	1	1.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.030.000.000.000,00	1.030.000.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO					
				Persentase indikator kegiatan mutu RS yang mencapai target	52 %	Persentase indikator kegiatan mutu RS yang mencapai target	52 %			#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOETOMO	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.065.476.110.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN RSUD Dr.Saiful Anwar	80 %	Indeks profesionalitas ASN RSUD Dr.Saiful Anwar	80 %	1.065.476.110.000,00	1.066.542.478.000,00	1.066.368.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
			Persentase elemen akreditasi RSUD Dr. Saiful Anwar yang memenuhi standar		80 %	Persentase elemen akreditasi RSUD Dr. Saiful Anwar yang memenuhi standar	80 %	#VALUE!					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
			Persentase indikator program RSUD Dr.Saiful Anwar yang tercapai		80 %	Persentase indikator program RSUD Dr.Saiful Anwar yang tercapai	80 %	#VALUE!					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
			Persentase realisasi anggaran RSUD Dr.Saiful Anwar		90 %	Persentase realisasi anggaran RSUD Dr.Saiful Anwar	90 %	#VALUE!					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	222.975.310.000,00	224.041.678.000,00	1.066.368.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	2	1	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1164 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1164 orang/bulan	222.975.310.000,00	224.041.678.000,00	1.066.368.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	2	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) RSUD Dr.Saiful Anwar yang mencapai target	86.16 %	Persentase Indikator Standar pelayanan Minimal (SPM) RSUD Dr.Saiful Anwar yang mencapai target	86.16 %	842.500.800.000,00	842.500.800.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	2	1	1.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	842.500.800.000,00	842.500.800.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					403.552.935.747,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	83.75	Indeks Profesionalitas ASN	83.75	342.501.815.000,00	356.819.463.000,00	14.317.648.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
			Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar		92.00 %	Persentase Elemen Akreditasi yang Memenuhi Standar	92.00 %						
			Persentase Indikator Program PD yang Tercapai		100 %	Persentase Indikator Program PD yang Tercapai	100 %						
			Persentase Realisasi Anggaran		94.00 %	Persentase Realisasi Anggaran	94.00 %						
1	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	775 orang/bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	775 orang/bulan	125.901.815.000,00	140.219.463.000,00	14.317.648.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	1	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	775 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	775 Orang/Bulan	125.901.815.000,00	140.219.463.000,00	14.317.648.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		#VALUE!					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	23 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	23 Unit Kerja	216.600.000.000,00	216.600.000.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	1	1.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23 Unit Kerja	216.600.000.000,00	216.600.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					61.051.120.747,00	19.000.000.000,00	(42.051.120.747,00)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	2	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.00	61.051.120.747,00	19.000.000.000,00	(42.051.120.747,00)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2	2	1.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	220 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	35 Unit	61.051.120.747,00	19.000.000.000,00	(42.051.120.747,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDONO MADIUN
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					289.844.130.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	88 Angka	Indeks Profesionalitas ASN RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	88 Angka	289.844.130.000,00	301.594.142.000,00	11.750.012.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
			Persentase elemen akreditasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standard		100 %	Persentase elemen akreditasi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang memenuhi standard	100 %						
			Persentase Indikator Program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang Tercapai		100 %	Persentase Indikator Program RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang Tercapai	100 %						
			Persentase Realisasi Anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur		94 %	Persentase Realisasi Anggaran RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	94 %						
1	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	86 %	Persentase indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	86 %	119.844.130.000,00	131.594.142.000,00	11.750.012.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1	2	1	1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	789 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	882 Orang/Bulan	119.844.130.000,00	131.594.142.000,00	11.750.012.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 2 1 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	86 %	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	86 %	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1 2 1 1.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	170.000.000.000,00	170.000.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					179.960.528.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					119.335.528.000,00	122.021.745.000,00	2.686.217.000,00		RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.035.528.000,00	70.721.745.000,00	2.686.217.000,00		RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 1 1.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 orang / bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 orang / bulan	68.035.528.000,00	70.721.745.000,00	2.686.217.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 1 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					51.300.000.000,00	51.300.000.000,00	-		RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 1 1.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	51.300.000.000,00	51.300.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					60.625.000.000,00	33.500.000.000,00	(27.125.000.000,00)		RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Jiwa Menur	83 Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Jiwa Menur	83 Angka	60.625.000.000,00	33.500.000.000,00	(27.125.000.000,00)		RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		8.125.000.000,00	0,00	(8.125.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		10.800.000.000,00	0,00	(10.800.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan / Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	100 unit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan / Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	387 Unit	25.200.000.000,00	20.000.000.000,00	(5.200.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	50 Unit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara		1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2 2 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	5 paket	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	5 paket	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA MENUR
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					122.066.716.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IP ASN	82 persen	IP ASN	82 persen	122.066.716.000,00	123.946.451.000,00	1.879.735.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
		Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar	83 persen	Persentase elemen akreditasi RS yang memenuhi standar	83 persen					
		Persentase indikator program RS yang tercapai	100 persen	Persentase indikator program RS yang tercapai	100 persen					
		Persentase realisasi anggaran	95 persen	Persentase realisasi anggaran	95 persen					
1 2 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	45.616.716.000,00	47.496.451.000,00	1.879.735.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1 2 1 1.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	271 orang/bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	335 orang/bulan	45.616.716.000,00	47.496.451.000,00	1.879.735.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1 2 1 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator SPM RS yang mencapai target	85 %	Persentase indikator SPM RS yang mencapai target	85 %	76.450.000.000,00	78.250.000.000,00	1.800.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1 2 1 1.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit kerja	76.450.000.000,00	78.250.000.000,00	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 persen	0,00	10.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana RS yang terpenuhi	95 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana RS yang terpenuhi	95 persen	0,00	10.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	49 Unit/set	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	49 Unit/set	0,00	10.000.000.000,00		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat				208.944.570.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	84 Persen	Indeks profesionalitas ASN	84 Persen	64.751.470.000,00	68.697.776.000,00	3.946.306.000,00		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
		Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	81,3 Persen	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	81,3 Persen					
		Persentase indikator program yang tercapai	86 Persen	Persentase indikator program yang tercapai	86 Persen					
		Persentase realisasi anggaran	91 Persen	Persentase realisasi anggaran	91 Persen					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/Bulan	25.556.470.000,00	29.502.776.000,00	3.946.306.000,00		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	153 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	152 Orang/ Bulan	25.556.470.000,00	29.502.776.000,00	3.946.306.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	39.195.000.000,00	39.195.000.000,00	-		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	39.195.000.000,00	39.195.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat	93 Persen	144.193.100.000,00	133.148.364.725,00	(11.044.735.275,00)		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	90 Persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	90 Persen	144.193.100.000,00	133.148.364.725,00	(11.044.735.275,00)		RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2	2	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	144.193.100.000,00	115.000.000.000,00	(29.193.100.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	48 Unit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	48 Unit	0,00	18.004.427.000		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
					Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan (Obat)	53 Item	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan (Obat)	53 Item	0,00	143.937.725		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU JEMBER
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					44.938.239.000,00		#VALUE!	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	90 %	Indeks profesionalitas ASN	90 %	44.938.239.000,00	44.885.608.000,00	(52.631.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	85 %	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	85 %					
						Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	90 %	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	90 %					
						Persentase indikator program yang tercapai	85 %	Persentase indikator program yang tercapai	85 %					
						Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %					
						Persentase realisasi anggaran	88 %	Persentase realisasi anggaran	88 %					
						Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Persentase Realisasi Anggaran	90 %					
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188 Orang/Bulan	26.470.362.000,00	26.417.731.000,00	(52.631.000,00)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188 Orang/Bulan	26.470.362.000,00	26.417.731.000,00	(52.631.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya kebutuhan operasional unit pelayanan	18 Unit Pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan operasional unit pelayanan	18 Unit Pelayanan	18.467.877.000,00	18.467.877.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	18 Unit Pelayanan	18.467.877.000,00	18.467.877.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DUNGUS
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					43.846.190.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	87 %	Indeks profesionalitas ASN	87 %	43.846.190.000,00	42.184.613.000,00	(1.661.577.000,00)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
						Persentase Elemen Akreditasi yang memenuhi Standar	90 %	Persentase Elemen Akreditasi yang memenuhi Standar	90 %					
						Persentase indikator program yang tercapai	85 %	Persentase indikator program yang tercapai	85 %					
						Persentase realisasi anggaran	90 %	Persentase realisasi anggaran	90 %					
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	32.796.190.000,00	29.634.613.000,00	(3.161.577.000,00)		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 Orang/ Bulan	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	179 Orang/ Bulan	32.796.190.000,00	29.634.613.000,00	(3.161.577.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase tersedianya bahan dan operasional pelayanan kesehatan di RSUD Daha Husada	100 %	Persentase tersedianya bahan dan operasional pelayanan kesehatan di RSUD Daha Husada	100 %	11.050.000.000,00	12.550.000.000,00	1.500.000.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit	11.050.000.000,00	12.550.000.000,00	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA HUSADA
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					84.892.781.000,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks profesionalitas ASN RSUD Sumberglagah	80 %	Indeks profesionalitas ASN RSUD Sumberglagah	80 %	84.892.781.000,00	104.458.771.865	10.565.900.865,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
						Persentase elemen akreditasi RSUD Sumberglagah yang memenuhi standar	92 %	Persentase elemen akreditasi RSUD Sumberglagah yang memenuhi standar	92 %					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
	PROVINSI	Persentase indikator program RSUD Sumberglagah yang tercapai	82 %	Persentase indikator program RSUD Sumberglagah yang tercapai	82 %					SUMBERGLAGAH				
		Persentase realisasi anggaran RSUD Sumberglagah	80 %	Persentase realisasi anggaran RSUD Sumberglagah	80 %									
1	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Dokumen	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Dokumen	38.185.143.000,00	41.768.842.000,00	3.583.699.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	259 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	259 Orang/ Bulan	38.185.143.000,00	41.768.842.000,00	3.583.699.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	2	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sumberglagah yang mencapai target	92 %	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sumberglagah yang mencapai target	92 %	46.707.638.000,00	62.689.929.865	15.982.291.865,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	46.707.638.000,00	52.207.638.000,00	5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						170.754.198.000,00	165.864.153.000	(4.890.045.000,00)		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	89 Persen	Persentase realisasi anggaran	89 Persen	72.184.198.000,00	73.200.853.000,00	1.016.655.000,00		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	14.584.198.000,00	15.600.853.000,00	1.016.655.000,00		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	104 Orang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	107 Orang			#VALUE!		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	14.584.198.000,00	15.600.853.000,00	1.016.655.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang/Bulan					RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00	-		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		0 0		0	98.570.000.000,00	92.663.300.000,00	(5.906.700.000,00)		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Persen			#VALUE!		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	2	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	98.395.000.000,00	92.663.300.000,00	(5.731.700.000,00)		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	2	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	71.600.000.000,00	67.963.300.000,00	(3.636.700.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	18.000.000.000,00	0,00	(18.000.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	3.900.000.000,00	23.572.000.000,00	19.672.000.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	0 Unit	1.200.000.000,00	0,00	(1.200.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	1 Unit	195.000.000,00	1.128.000.000,00	933.000.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2	2	1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)		RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	
1	2	2	1.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	175.000.000,00	0,00	(175.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						76.378.799.000,00	#VALUE!		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN RSUD Husada Prima	87 %	Indeks Profesionalitas ASN RSUD Husada Prima	87 %	76.378.799.000,00	77.947.901.000,00	1.569.102.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	
					Persentase elemen akreditasi RSUD Husada Prima yang memenuhi standar	87 %	Persentase elemen akreditasi RSUD Husada Prima yang memenuhi standar	87 %					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	
					Persentase indikator program RSUD Husada Prima yang tercapai	75 %	Persentase indikator program RSUD Husada Prima yang tercapai	75 %					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	
					Persentase realisasi anggaran RSUD Husada Prima	93,5 %	Persentase realisasi anggaran RSUD Husada Prima	93,5 %					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Target	Target	Target	Target					
						Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur					
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	31.083.167.000,00	32.652.269.000,00	1.569.102.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	212 orang/ bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	210 orang/ bulan	31.083.167.000,00	32.652.269.000,00	1.569.102.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Husada Prima yang mencapai target	92 %	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Husada Prima yang mencapai target	92 %	45.295.632.000,00	45.295.632.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	45.295.632.000,00	45.295.632.000,00	-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Husada Prima	84 %	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Husada Prima	84 %	0,00	41.000.000.000		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 %	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 %	0,00	41.000.000.000		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HUSADA PRIMA
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					63.130.598.000,00	176.407.399.275	113.276.801.275,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Anggaran	97 persen	Persentase Realisasi Anggaran	97 persen	63.130.598.000,00	64.105.409.000,00	974.811.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	15.630.598.000,00	16.605.409.000,00	974.811.000,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	127 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/Bulan	15.630.598.000,00	16.605.409.000,00	974.811.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase SPM yang Mencapai Target	76 Persen	Persentase SPM yang Mencapai Target	76 Persen	47.500.000.000,00	47.500.000.000,00	-		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	47.500.000.000,00		-	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			#VALUE!			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Persen	Indeks Kepuasan Masyarakat	89 Persen	0,00	112.301.990.275		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 persen	0,00	112.301.990.275		DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NOER PAMEKASAN
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					27.856.083.616,00		#VALUE!		RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Madiun	89 persen	Indeks profesionalitas ASN RS Paru Manguharjo Madiun	89 persen	26.914.418.000,00	27.739.653.000,00	825.235.000,00		RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
						Persentase Elemen Akreditasi RS Paru Manguharjo Madiun yang memenuhi standar	89 persen	Persentase Elemen Akreditasi RS Paru Manguharjo Madiun yang memenuhi standar	89 persen					
						Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Madiun yang tercapai	85 persen	Persentase indikator program RS Paru Manguharjo Madiun yang tercapai	85 persen					
						Persentase Realisasi Anggaran RS Paru Manguharjo Madiun	91 persen	Persentase Realisasi Anggaran RS Paru Manguharjo Madiun	91 persen					
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	16.764.418.000,00	15.739.303.000,00	(1.025.115.000,00)		RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan	16.764.418.000,00	15.739.303.000,00	(1.025.115.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM RS Paru Manguharjo Madiun yang mencapai target	82 persen	Persentase Indikator SPM RS Paru Manguharjo Madiun yang mencapai target	82 persen	10.150.000.000,00	12.000.350.000,00	1.850.350.000,00		RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	10.150.000.000,00	12.000.350.000,00	1.850.350.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Manguharjo Madiun	83 persen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RS Paru Manguharjo Madiun	83 persen	941.665.616,00	941.665.616,00	-		RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	2	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	100 persen	941.665.616,00	941.665.616,00	-		RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	2	1.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	0 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	0 Unit	730.000.000,00	0,00	(730.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	2	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	151.665.616,00	941.665.616,00	790.000.000,00	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN
1	2	2	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	0 Unit	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	DINAS KESEHATAN	RUMAH SAKIT PARU MANGUHARJO MADIUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				19.685.845.000,00		#VALUE!		UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				19.685.845.000,00	23.024.352.000,00	3.338.507.000,00		UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
					0Presentase Realisasi Anggaran UPT Latkesmas Murnajati	95 %	0Presentase Realisasi Anggaran UPT Latkesmas Murnajati	95 %					
					Presentasi Realisasi Anggaran UPT Latkesmas Murnajati	95 %	Presentasi Realisasi Anggaran UPT Latkesmas Murnajati	95 %					
1	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.924.845.000,00	10.900.776.000,00	1.975.931.000,00		UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
					Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 Laporan					
1	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.924.845.000,00	10.763.352.000,00	1.838.507.000,00	DINAS KESEHATAN	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan					
1	2	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				10.761.000.000,00	10.761.000.000,00	-		UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
					Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	155 Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	155 Pelatihan					
1	2	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				10.761.000.000,00	10.761.000.000,00	-	DINAS KESEHATAN	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja					
					Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	155 Pelatihan	Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	155 Pelatihan					
					Jumlah Pelatihan Yang terselenggara	155 Pelatihan	Jumlah Pelatihan Yang terselenggara	155 Pelatihan					
					Presentase Elemen Akreditasi UPT Latkesmas Yang Memenuhi standar	90 %	Presentase Elemen Akreditasi UPT Latkesmas Yang Memenuhi standar	90 %					
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.325.000.000	2.275.000.000			
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.325.000.000	2.325.000.000			
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.325.000.000	2.325.000.000			
					Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup					
					Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen	Persentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen					
					Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	55 persen	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	55 persen					
					Prevalensi Stunting pada Balita	16 persen	Prevalensi Stunting pada Balita	16 persen					
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.625.000.000	1.671.441.000			
					Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen					
					Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	750.000.000	709.850.000			
					Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	600.000.000	529.216.000			
					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	9 Unit	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	9 Unit	95.000.000	90.375.000			
					Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	180.000.000	342.000.000			
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				700.000.000	700.000.000			
					Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen					
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50 Dokumen	200.000.000,00	413.559.000,00			
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	9 Dokumen	500.000.000	190.000.000			
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen							
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.625.000.000	1.196.693.200			
1	02	02	1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.625.000.000	1.196.693.200			
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				2.275.000.000	2.402.273.200			
					0Presentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen	0Presentase Kabupaten/Kota dengan angka kesembuhan penyakit menular sesuai standar	50 persen					
					Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	95,42 per 100.000 Kelahiran Hidup					
					Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	55 persen	Persentase Kabupaten/Kota dengan Cakupan Penemuan Penyakit Tidak Menular dan Keswa sesuai target	55 persen					
					Prevalensi Stunting pada Balita	16 persen	Prevalensi Stunting pada Balita	16 persen					
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1.625.000.000	1.196.693.200			
					Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	80 persen					
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan				500.000.000	200.484.200			
					Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 Unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab						
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target											
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	6 Unit	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	6 Unit	600.000.000	88.568.000					
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	4 Unit	345.000.000	50.470.000					
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	2 Unit	180.000.000	857.171.000					
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota ODF	3 Dokumen 26 Kab/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan kegiatan di Bidang Pelayanan Kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota ODF	3 Dokumen 26 Kab/Kota	600.000.000	1.106.220.000					
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	100.000.000	600.000.000					
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	100.000.000	282.350.000					
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	3 Dokumen	400.000.000	223.870.000					
1	02	02	04		Penerbitan Isin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi penerbitan izin RS kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	14 Dokumen	Jumlah Dokumen rekomendasi penerbitan izin RS kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi	14 Dokumen	50.000.000	99.360.000					
1	02	02	04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	50.000.000	99.360.000					
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	68 persen	Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan UKBM sesuai standar	68 persen	100.000.000	109.742.000					
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	28 kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	28 kabupaten/kota	100.000.000	109.742.000					
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	4 Dokumen	100.000.000	109.742.000					
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					857.457.379.000,00	661.887.846.000	(195.569.533.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					183.651.579.000,00	183.921.781.000	270.202.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					834.737.783,00	900.543.783,00	65.806.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	805.543.783,00	805.543.783,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.840.000,00	20.000.000,00	14.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.834.000,00	20.000.000,00	14.166.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.840.000,00	20.000.000,00	14.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.840.000,00	20.000.000,00	14.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.840.000,00	15.000.000,00	9.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					152.157.009.000,00	137.113.024.620,00	(15.043.984.380,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/Bulan	150.450.953.000,00	135.629.294.000,00	(14.821.659.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.350.000.000,00	955.890.000,00	(394.110.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.642.000,00	3.642.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
1	3	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	352.414.000,00	724.198.620	371.784.620,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	3	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.853.577.000,00	2.038.577.000	185.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	1	1.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3.577.000,00	3.577.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.850.000.000,00	1.885.000.000,00	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.600.000.000,00	2.272.827.400,00	672.827.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	1	1.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	600.000.000,00	894.595.400	294.595.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	550.000.000,00	549.828.000,00	(172.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	450.000.000,00	859.604.000,00	409.604.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.925.607.000,00	4.094.609.848	2.169.002.848,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	400.000.000,00	500.000.000	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00	1.278.204.000	1.178.204.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	350.000.000,00	377.304.348,00	27.304.348,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	400.000.000,00	640.698.500	240.698.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.607.000,00	48.411.000,00	22.804.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	499.992.000,00	299.992.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.06	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	300.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000,00	101.555.000,00	1.555.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	1	1.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	243.355.000	143.355.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.667.846.217,00	12.392.723.349,00	(1.275.122.868,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.867.846.217,00	10.392.723.349,00	(1.475.122.868,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				11.512.802.000,00	24.069.920.000,00	12.557.118.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	68 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	68 Unit	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	356 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	356 Unit	1.500.000.000,00	284.920.000,00	(1.215.080.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.09	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	232 Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	232 Unit	12.802.000,00	13.145.000.000,00	13.132.198.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	370 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	370 Unit	700.000.000,00	1.340.000.000,00	640.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	1	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	650.000.000,00	650.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				673.805.800.000,00	477.966.065.000	(195.839.735.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi				673.805.800.000,00	477.966.065.000	(195.839.735.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	3	10	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	20 Dokumen	9.500.000.000,00	10.300.000.000	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2750 m2	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	2750 m2	64.076.800.000,00	120.000.000.000,00	55.923.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	500.000.000,00	650.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	18 Dokumen	597.729.000.000,00	344.416.065.000,00	(253.312.935.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3 Dokumen	2.000.000.000,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						14.357.646.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						14.357.646.000,00	16.103.346.000,00	1.745.700.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						14.357.646.000,00	16.103.346.000,00	1.745.700.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	118.82 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	118.82 KM	7.845.000.000,00	8.452.100.000,00	607.100.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	761.75 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	761.75 M	722.000.000,00	1.035.600.000,00	313.600.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	5.790.646.000,00	6.615.646.000,00	825.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						25.768.362.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						25.768.362.000,00	34.525.662.000,00	8.757.300.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						25.768.362.000,00	34.525.662.000,00	8.757.300.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	134.36 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	134.36 KM	6.865.000.000,00	9.840.300.000,00	2.975.300.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	51 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	51 M	12.000.000.000,00	17.000.000.000,00	5.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	263.2 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	263.2 M	1.218.000.000,00	1.500.000.000,00	282.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	5.685.362.000,00	6.185.362.000,00	500.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MOJOKERTO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						15.409.362.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						15.409.362.000,00	18.889.862.000,00	3.480.500.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						15.409.362.000,00	18.889.862.000,00	3.480.500.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	130.49 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	130.49 KM	8.336.000.000,00	11.000.000.000,00	2.664.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2180.64 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2180.64 M	1.388.000.000,00	1.654.500.000,00	266.500.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	5.685.362.000,00	6.235.362.000,00	550.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						8.818.636.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					8.818.636.000,00	16.344.103.000,00	7.525.467.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					8.818.636.000,00	16.344.103.000,00	7.525.467.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	81.41 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	81.41 KM	4.912.533.000,00	9.075.000.000,00	4.162.467.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	654.1 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	654.1 M	537.000.000,00	1.925.000.000,00	1.388.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	3.369.103.000,00	5.344.103.000,00	1.975.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MADIUN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					11.302.379.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					11.302.379.000,00	22.787.279.000,00	11.484.900.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					11.302.379.000,00	22.787.279.000,00	11.484.900.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	102.29 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	102.29 KM	6.374.000.000,00	7.500.000.000,00	1.126.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	914.8 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	914.8 M	717.000.000,00	1.258.400.000,00	541.400.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	4.211.379.000,00	4.736.379.000,00	525.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PACITAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					62.344.103.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					62.344.103.000,00	43.269.103.000,00	(19.075.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					62.344.103.000,00	43.269.103.000,00	(19.075.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	1.5 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	1.5 KM	24.300.000.000,00	24.000.000.000,00	(300.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	167.77 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	167.77 KM	8.336.000.000,00	12.500.000.000,00	4.164.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	51.5 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	51.5 M	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1395 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1395 M	1.339.000.000,00	2.000.000.000,00	661.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	3.369.103.000,00	4.769.103.000,00	1.400.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					12.854.802.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					12.854.802.000,00	15.686.302.000,00	2.831.500.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					12.854.802.000,00	15.686.302.000,00	2.831.500.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	116.41 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	116.41 KM	7.551.000.000,00	9.025.600.000,00	1.474.600.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	923.35 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	923.35 M	566.000.000,00	1.062.900.000,00	496.900.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	4.737.802.000,00	5.597.802.000,00	860.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN MALANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					10.280.948.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					10.280.948.000,00	14.796.948.000,00	4.516.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					10.280.948.000,00	14.796.948.000,00	4.516.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	125.93 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	125.93 KM	5.394.000.000,00	9.000.000.000,00	3.606.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	749.21 Meter	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	749.21 Meter	465.000.000,00	1.000.000.000,00	535.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	4.421.948.000,00	4.796.948.000,00	375.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PROBOLINGGO	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					14.720.535.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JEMBER	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					14.720.535.000,00	20.485.707.000,00	5.765.172.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JEMBER	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.720.535.000,00	20.485.707.000,00	5.765.172.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JEMBER	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	196.46 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	196.46 KM	10.297.000.000,00	13.334.393.000,00	3.037.393.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JEMBER	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	119 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	119 M	1.265.000.000,00	2.651.314.000,00	1.386.314.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JEMBER	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	3.158.535.000,00	4.500.000.000,00	1.341.465.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN JEMBER	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					15.722.241.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					15.722.241.000,00	22.142.341.000,00	6.420.100.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					15.722.241.000,00	22.142.341.000,00	6.420.100.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	108.16 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	108.16 KM	5.884.000.000,00	8.000.000.000,00	2.116.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	20 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	20 M	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1244.71 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1244.71 M	1.048.000.000,00	1.502.100.000,00	454.100.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	3.790.241.000,00	4.640.241.000,00	850.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN BANYUWANGI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					14.262.379.000,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					14.262.379.000,00	36.013.379.000,00	21.751.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					14.262.379.000,00	36.013.379.000,00	21.751.000.000,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	138.9 KM	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	138.9 KM	9.316.000.000,00	11.399.742.520,00	2.083.742.520,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	835.9 M	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	835.9 M	735.000.000,00	1.200.103.763,00	465.103.763,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	4 Dokumen	4.211.379.000,00	6.911.532.717,00	2.700.153.717,00	UPT PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					7.000.000.000,00		#VALUE!	UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.000.000.000,00	9.600.000.000,00	2.600.000.000,00	UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi					7.000.000.000,00	9.600.000.000,00	2.600.000.000,00	UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3	10	1.01	23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	20 Dokumen	7.000.000.000,00	9.600.000.000,00	2.600.000.000,00	UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					258.587.800.563,00	226.890.461.780	(31.697.338.783,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					136.378.290.975,00	128.523.071.389,00	(7.855.219.586,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					242.275.863,00	232.966.500,00	(9.309.363,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.929.933,00	15.429.600,00	(2.500.333,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.929.933,00	19.874.150,00	(55.783,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19.929.933,00	19.874.150,00	(55.783,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.929.933,00	19.874.150,00	(55.783,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 3 1 1.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.061.265,00	19.874.150,00	(187.115,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	60.961.933,00	53.638.150,00	(7.323.783,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	83.532.933,00	84.402.150,00	869.217,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					118.206.768.229,00	105.369.936.921,00	(12.836.831.308,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	116.666.097.000,00	103.820.041.000,00	(12.846.056.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.364.140.416,00	1.369.449.950,00	5.309.534,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	26.551.265,00	26.513.550,00	(37.715,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	21.833.765,00	21.510.950,00	(322.815,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	21.061.265,00	21.061.265,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	16.464.506,00	18.602.350,00	2.137.844,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	63.680.506,00	65.818.350,00	2.137.844,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	26.939.506,00	26.939.506,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					7.799.431.145,00	9.410.609.813,00	1.611.178.668,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	5.284.299.382,00	4.170.531.450,00	(1.113.767.932,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	542.724.130,00	659.149.930,00	116.425.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	432.646.000,00	432.646.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.539.761.633,00	4.148.282.433,00	2.608.520.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					351.443.600,00	331.367.400,00	(20.076.200,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	325.781.800,00	302.964.300,00	(22.817.500,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	25.661.800,00	28.403.100,00	2.741.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.726.356.250,00	8.928.285.760,00	3.201.929.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.163.875,00	2.163.875,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.408.989.745,00	4.095.080.276,00	1.686.090.531,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan	445.800.000,00	968.755.317,00	522.955.317,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	2.869.402.630,00	3.862.286.292,00	992.883.662,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.052.015.888,00	4.249.904.995,00	197.889.107,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	173.000.000,00	283.835.171,00	110.835.171,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 3 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	140 Unit	1.092.129.444,00	1.467.327.197,00	375.197.753,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	5.250.000,00	5.250.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	552.800.000,00	1.297.840.000,00	745.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2.228.836.444,00	1.195.652.627,00	(1.033.183.817,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					122.209.509.588,00	95.867.390.391,00	(26.342.119.197,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					107.515.238.188,00	65.326.807.518,00	(42.188.430.670,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	647.410.500,00	579.388.400,00	(68.022.100,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen	290.000.000,00	290.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	6 Kegiatan	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	6 Kegiatan	2.211.867.796,00	1.999.923.100,00	(211.944.696,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	1 Unit	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	1 Unit	1.350.000.000,00	1.750.000.000,00	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1 KM	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	5 Unit	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	5 Unit	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	60 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	60 KM	17.814.388.988,00	27.271.598.988,00	9.457.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	5 sungai	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	5 sungai	3.918.824.600,00	2.217.519.110,00	(1.701.305.490,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	10 KM	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	10 KM			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 Unit	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 Unit	500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	10 Dokumen	1.775.850.000,00	1.757.732.100,00	(18.117.900,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	45 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	45 Lembaga	71.826.000.000,00	18.625.736.000,00	(53.200.264.000,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen		2.167.025.100,00	(395.155.900,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Inventarisasi Aset di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Milk Daerah penggunaan Dinas Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Milk Daerah penggunaan Dinas Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Percepatan Sertifikasi Tanah di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi Aset Sumber Daya Air yang diusahakan di Bidang Bina Manfaat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen rekomendasi Aset Sumber Daya Air yang diusahakan di Bidang Bina Manfaat	1 Dokumen	2.562.181.000,00		#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen rekomtek terkait ijin pemakaian tanah SDA untuk komoditas tambang di WS PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur (Bidang Binafaat)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen rekomtek terkait ijin pemakaian tanah SDA untuk komoditas tambang di WS PU Sumber Daya Air Prov. Jawa Timur (Bidang Binafaat)	1 Dokumen			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pemanfaatan Sumber Daya Air di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah rekomendasi teknik yang diterbitkan	180 Rekomendasi	Jumlah rekomendasi teknik yang diterbitkan	180 Rekomendasi			#VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		1	3	2	1.01						63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Inventarisasi Data HIPPA dan G. HIPPA di Bidang Bina Manfaat	1 Dokumen
					Jumlah Dokumen naskah kerjasama yang ditanda tangani di Bidang Bina Manfaat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen naskah kerjasama yang ditanda tangani di Bidang Bina Manfaat	1 Dokumen	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan G. HIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Bidang Bina Manfaat	1 Kegiatan	Jumlah Lomba Penilaian Kinerja HIPPA dan G. HIPPA Tingkat Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan Bidang Bina Manfaat	1 Kegiatan	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Pelatihan O dan P Jaringan Irigasi Partisipatif HIPPA/G. HIPPA/L. HIPPA/F. HIPPA yang dilaksanakan di Bidang Bina Manfaat	5 Kegiatan	Jumlah Pelatihan O dan P Jaringan Irigasi Partisipatif HIPPA/G. HIPPA/L. HIPPA/F. HIPPA yang dilaksanakan di Bidang Bina Manfaat	5 Kegiatan	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Risalah Sidang Dewan SDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti	1 Risalah	Jumlah Risalah Sidang Dewan SDA yang diusulkan untuk ditindak lanjuti	1 Risalah	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
1	3	2	1.01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.000.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
1	3	2	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Jumlah Dokumen Aset Sumber Daya Air yang diamankan di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Aset Sumber Daya Air yang diamankan di Bidang Bina Manfaat	4 Dokumen	2.603.333.320,00	1.035.383.320,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Sengketa Hukum [Bidang Binafaat]	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah Sengketa Hukum [Bidang Binafaat]	4 Dokumen	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Lokasi Aset Yang Diamankan/ Diterbitkan	4 Lokasi	Jumlah Lokasi Aset Yang Diamankan/ Diterbitkan	4 Lokasi	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah Sosialisasi Pengendalian dan Pemakaian Tanah di Bidang Bina Manfaat	4 Kegiatan	Jumlah Sosialisasi Pengendalian dan Pemakaian Tanah di Bidang Bina Manfaat	4 Kegiatan	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Panjang Sungai yang Dipelihara	60 KM	Panjang Sungai yang Dipelihara	60 KM	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
1	3	2	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					14.694.271.400,00	30.540.582.873,00	15.846.311.473,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	290.000.000,00	290.000.000,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya jumlah DI Kewenangan Provinsi yang direhab	40 Daerah Irigasi	Meningkatnya jumlah DI Kewenangan Provinsi yang direhab	40 Daerah Irigasi	304.395.473,00	194.395.473,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Prosentase kondisi fisik DI. Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi	58 Persen	Prosentase kondisi fisik DI. Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi	58 Persen	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
1	3	2	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	11.417.373.001,00	619.500.987,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Meningkatnya jumlah DI Kewenangan Provinsi yang direhab	40 Daerah Irigasi	Meningkatnya jumlah DI Kewenangan Provinsi yang direhab	40 Daerah Irigasi	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Prosentase kondisi fisik DI. Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi	58 Persen	Prosentase kondisi fisik DI. Kewenangan Provinsi yang direhabilitasi	58 Persen	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI Kewenangan Provinsi yang dipelihara	40 Daerah Irigasi	Jumlah DI Kewenangan Provinsi yang dipelihara	40 Daerah Irigasi	16.579.039.435,00	15.032.415.013,00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Jumlah dokumen AKNOP yang dievaluasi	40 Laporan	Jumlah dokumen AKNOP yang dievaluasi	40 Laporan	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Presentase air irigasi untuk pertanian pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	83 Persen	Presentase air irigasi untuk pertanian pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	83 Persen	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	
					Prosentase kondisi fisik DI. Kewenangan Provinsi yang dipelihara	58 Persen	Prosentase kondisi fisik DI. Kewenangan Provinsi yang dipelihara	58 Persen	#VALUE!			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur		Tolok Ukur						
		Target	Target	Target	Target					
1 3 2 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0 Di	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0 Di	1.949.774.964,00	1.949.774.964,00	-	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah kegiatan pembinaan OP jaringan irigasi	9 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan OP jaringan irigasi	9 Kegiatan					
		Presentase air irigasi untuk pertanian pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	83 Persen	Presentase air irigasi untuk pertanian pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	83 Persen					
		Presentase Pembinaan Jumlah Tenaga Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi	28 Persen	Presentase Pembinaan Jumlah Tenaga Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi	28 Persen					
		Tersedianya debit air irigasi minimal pada daerah irigasi kewenangan provinsi	327.181 Liter/detik	Tersedianya debit air irigasi minimal pada daerah irigasi kewenangan provinsi	327.181 Liter/detik					
		Tersedianya Tata Laksana Operasi dan Pemeliharaan	5 Laporan	Tersedianya Tata Laksana Operasi dan Pemeliharaan	5 Laporan					
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					9.561.381.815,00		#VALUE!	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.161.713.870,00	870.075.626,00	(291.638.244,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					56.628.000,00	56.628.000,00	-	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	56.628.000,00	56.628.000,00	-	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan					
1 3 1 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					430.598.153,00	173.583.940,00	(257.014.213,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	1 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpenuhi	1 Paket	379.238.153,00	122.233.940,00	(257.004.213,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit					
1 3 1 1.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	51.360.000,00	51.350.000,00	(10.000,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan	Jumlah Laporan Data Pegawai	1 Laporan					
1 3 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.916.000,00	95.600.000,00	6.684.000,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	88.916.000,00	95.600.000,00	6.684.000,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					379.138.740,00	353.671.246,00	(25.467.494,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27.105.450,00	23.629.450,00	(3.476.000,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan					
1 3 1 1.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	5.269.290,00	5.269.290,00	-	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket					
1 3 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	346.764.000,00	324.772.506,00	(21.991.494,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	2 Paket	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	2 Paket					
1 3 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206.432.977,00	190.592.440,00	(15.840.537,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	6 Paket	Jumlah Jasa	6 Paket	152.432.977,00	136.592.440,00	(15.840.537,00)	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	0 Unit					
1 3 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	1 Paket	54.000.000,00	54.000.000,00	-	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8.399.667.945,00	29.475.667.294,00	21.075.999.349,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					120.705.085,00	642.120.475,00	521.415.390,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	0.1 KM	Panjang Sungai yang Dipelihara	0.1 KM	92.616.675,00	564.042.475,00	471.425.800,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	3	2	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	28.088.410,00	78.078.000,00	49.989.590,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.278.962.860,00	28.833.546.819,00	20.554.583.959,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.5 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.5 KM	7.552.257.487,00	9.323.665.925,00	1.771.408.438,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	58 DI	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	58 DI	726.705.373,00	1.283.985.016,00	557.279.643,00	UPT PSDA WS BENGAWAN SOLO BOJONEGORO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					5.485.800.000,00	39.417.386.743	33.931.586.743,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					958.816.825,00	1.306.198.625,00	347.381.800,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.188.000,00	24.000.000,00	812.000,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	23.188.000,00	24.000.000,00	812.000,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	0 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	0 Laporan	#VALUE!				UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					437.034.210,00	163.224.210,00	(273.810.000,00)	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasana yang Terpenuhi	0 Paket	Jumlah Sarana dan Prasana yang Terpenuhi	0 Paket	387.034.210,00	115.734.210,00	(271.300.000,00)	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	50.000.000,00	47.490.000,00	(2.510.000,00)	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	#VALUE!				UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	#VALUE!				UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					36.788.500,00	36.788.500,00	-	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	16.788.500,00	16.788.500,00	-	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif	0 Laporan	Jumlah Laporan Daftar Arsip Aktif	0 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					453.773.615,00	798.783.915,00	345.010.300,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan	13.200.000,00	16.200.000,00	3.000.000,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	17.733.615,00	71.183.915,00	53.450.300,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	Jumlah Paket Pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	#VALUE!				UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	#VALUE!				UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	#VALUE!				UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	0 Paket	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	0 Paket	422.840.000,00	711.400.000,00	288.560.000,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.032.500,00	283.402.000,00	275.369.500,00	UPT PSDA WS BONDYOYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	3	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	8.032.500,00	283.402.000,00	275.369.500,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.526.983.175,00	37.861.188.118,00	33.334.204.943,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.204.087.836,00	22.237.580.629,00	20.033.492.793,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	292.247.511,00	427.822.580,00	135.575.069,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	490.749.378,00	686.422.200,00	195.672.822,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga	87.525.161,00	170.075.000,00	82.549.839,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	0 KM	Panjang Sungai yang Dipelihara	0 KM	1.265.525.262,00	2.302.920.326,00	1.037.395.064,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	0 Unit	68.040.524,00	150.340.524,00	82.300.000,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.322.895.339,00	15.623.607.489,00	13.300.712.150,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	1.579.101.045,00	2.598.174.945,00	1.019.073.900,00	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	2	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0 DI	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	0 DI	743.794.294,00	152.590.294,00	(591.204.000,00)	UPT PSDA WS BONDROYUDO BARU LUMAJANG	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					10.711.542.401,00		#VALUE!	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.807.870.797,00	2.344.004.218,00	536.133.421,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67.512.400,00	64.604.400,00	(2.908.000,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	67.512.400,00	64.604.400,00	(2.908.000,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					325.931.043,00	471.332.380,00	145.401.337,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	108.431.043,00	248.972.380,00	140.541.337,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	217.500.000,00	222.360.000,00	4.860.000,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					32.996.462,00	22.780.000,00	(10.216.462,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.420.000,00	22.780.000,00	5.360.000,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.576.462,00	0,00	(15.576.462,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					984.708.193,00	1.278.868.838,00	294.160.645,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.506.191,00	21.113.560,00	10.607.369,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.638.162,00	78.541.220,00	(2.096.942,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	893.563.840,00	1.179.214.058,00	285.650.218,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					396.722.699,00	506.418.600,00	109.695.901,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 3 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	325.810.599,00	421.746.100,00	95.935.501,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	70.912.100,00	84.672.500,00	13.760.400,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8.903.671.604,00	19.982.387.822,00	11.078.716.218,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					754.766.053,00	1.022.133.200,00	267.367.147,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	32.775.399,00	0,00	(32.775.399,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	289.515.399,00	313.051.200,00	23.535.801,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	1 KM	Panjang Sungai yang Dipelihara	1 KM	349.800.260,00	506.960.000,00	157.159.740,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	82.674.995,00	202.122.000,00	119.447.005,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					8.148.905.551,00	18.960.254.622,00	10.811.349.071,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	53.653.117,00	9.560.859.790,00	9.507.206.673,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	50.522.949,00	0,00	(50.522.949,00)	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	7.696.594.927,00	8.897.037.560,00	1.200.442.633,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 DI	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 DI	348.134.558,00	502.357.272,00	154.222.714,00	UPT PSDA WS BRANTAS KEDIRI	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					5.735.155.173,00	24.491.163.352	18.756.008.179,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					417.773.054,00	756.368.659,00	338.595.605,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					32.880.000,00	32.880.000,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	32.880.000,00	32.880.000,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					181.486.719,00	499.589.294,00	318.102.575,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	102.186.754,00	420.289.329,00	318.102.575,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	79.299.965,00	79.299.965,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.794.381,00	30.794.381,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.172.000,00	21.172.000,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.622.381,00	9.622.381,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.961.954,00	30.961.954,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.568.510,00	24.568.510,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.393.444,00	6.393.444,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					141.650.000,00	162.143.030,00	20.493.030,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	125.000.000,00	135.201.830,00	10.201.830,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.650.000,00	26.941.200,00	10.291.200,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.317.382.119,00	23.484.794.693,00	18.167.412.574,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2.001.499.017,00	3.556.102.987,00	1.554.603.970,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.1 KM	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.1 KM	46.503.832,00	246.503.832,00	200.000.000,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 3 2 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	583.488.630,00	399.838.630,00	(183.650.000,00)	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	90.891.752,00	90.891.752,00	-	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	0.1 KM	Panjang Sungai yang Dipelihara	0.1 KM	1.241.129.327,00	2.679.525.097,00	1.438.395.770,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	39.485.476,00	139.343.676,00	99.858.200,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					3.315.883.102,00	19.928.691.706,00	16.612.808.604,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.1 KM	1.880.888.102,00	4.429.402.526,00	2.548.514.424,00	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 DI	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 DI	1.434.995.000,00	364.945.000,00	(1.070.050.000,00)	UPT PSDA WS KEPULAUAN MADURA PAMEKASAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					6.244.394.375,00	10.742.054.546	4.497.660.171,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.637.305.833,00	2.043.628.884,00	406.323.051,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					36.343.500,00	32.880.000,00	(3.463.500,00)	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	36.343.500,00	32.880.000,00	(3.463.500,00)	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.359.093.915,00	1.527.060.060,00	167.966.145,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.267.253.915,00	1.494.900.060,00	227.646.145,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	91.840.000,00	32.160.000,00	(59.680.000,00)	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					27.340.000,00	64.660.000,00	37.320.000,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	27.340.000,00	64.660.000,00	37.320.000,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29.266.657,00	40.963.562,00	11.696.905,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.840.062,00	21.589.762,00	1.749.700,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.426.595,00	19.373.800,00	9.947.205,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					185.261.761,00	378.065.262,00	192.803.501,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	180.011.761,00	372.815.262,00	192.803.501,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 1 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 1 Paket	5.250.000,00	5.250.000,00	-	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO #VALUE!	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					4.607.088.542,00	8.448.425.662,00	3.841.337.120,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					855.551.780,00	2.325.272.898,00	1.469.721.118,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.1 KM	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.1 KM	81.150.742,00	280.798.860,00	199.648.118,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	491.293.621,00	644.366.621,00	153.073.000,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	63.454.106,00	63.272.600,00	(181.506,00)	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	13761.7 KM	Panjang Sungai yang Dipelihara	13761.7 KM	156.073.311,00	1.113.254.817,00	957.181.506,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2 1.01 66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	63.580.000,00	223.580.000,00	160.000.000,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 3 2	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3.751.536.762,00	6.123.152.764,00	2.371.616.002,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	128.34 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.686.608.538,00	4.220.052.610,00	533.444.072,00	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.02	28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	13 DI	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	64.928.224,00	64.928.224,00	-	UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL BONDOWOSO	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4.741.385.673,00	13.345.885.619	8.604.499.946,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				478.010.100,00	844.615.175,00	366.605.075,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.601.000,00	32.948.000,00	4.347.000,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.601.000,00	32.948.000,00	4.347.000,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				52.717.500,00	157.192.300,00	104.474.800,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	52.717.500,00	157.192.300,00	104.474.800,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.360.000,00	42.587.500,00	7.227.500,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.360.000,00	42.587.500,00	7.227.500,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.041.600,00	419.582.475,00	83.540.875,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15.000.000,00	50.945.800,00	35.945.800,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	321.041.600,00	368.636.675,00	47.595.075,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.290.000,00	192.304.900,00	167.014.900,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.290.000,00	146.330.000,00	136.040.000,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.000.000,00	45.974.900,00	30.974.900,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				4.263.375.573,00	12.251.270.444,00	7.987.894.871,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1.447.151.573,00	2.948.043.660,00	1.500.892.087,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.01	35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 M	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	52.000.000,00	252.754.000,00	200.754.000,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.01	60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	407.680.000,00	375.959.000,00	(31.721.000,00)	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.01	63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	64.427.500,00	189.431.000,00	125.003.500,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.01	65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	25 M	Panjang Sungai yang Dipelihara	860.544.073,00	1.947.599.500,00	1.087.055.427,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.01	66 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	62.500.000,00	182.300.160,00	119.800.160,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.816.224.000,00	9.303.226.784,00	6.487.002.784,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.02	21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.612.000.000,00	3.182.361.500,00	570.361.500,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3 2	1.02	28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	1 DI	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	204.224.000,00	319.427.784,00	115.203.784,00	UPT PSDA WS WELANG PEKALEN PASURUAN	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
1 3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				733.739.838.822,00		#VALUE!	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Indeks Profesionalitas ASN	82 0	Indeks Profesionalitas ASN		51.589.448.822,00	(5.371.400.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90,43 Persen	Persentase indikator program yang tercapai	90,43 Persen	56.960.848.822,00	#VALUE!	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
					Persentase realisasi anggaran	90 Persen	Persentase realisasi anggaran	90 Persen			#VALUE!	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.400.000.000,00	1.652.930.000,00	(747.070.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.930.000,00	26.000.000,00	1.070.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.092.000,00	14.020.000,00	(72.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.092.000,00	14.020.000,00	(72.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.942.000,00	14.510.000,00	5.568.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.942.000,00	14.510.000,00	5.568.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2.306.062.000,00	1.520.430.000,00	(785.632.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.940.000,00	49.440.000,00	26.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 Dokumen	46.143.429.500,00	39.468.939.000,00	(6.674.490.500,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	44.729.572.000,00	38.028.172.000,00	(6.701.400.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	663.798.500,00	620.148.000,00	(43.650.500,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	233.210.000,00	340.813.500,00	107.603.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	153.891.000,00	172.380.500,00	18.489.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	184.129.000,00	135.250.000,00	(48.879.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.060.000,00	1.000.000,00	(1.060.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	3	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	174.709.000,00	170.175.000,00	(4.534.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.060.000,00	1.000.000,00	(1.060.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	34.500.000,00	22.320.000,00	(12.180.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	2.500.000,00	4.770.000,00	2.270.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	17.500.000,00	11.040.000,00	(6.460.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	6.000.000,00	3.510.000,00	(2.490.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 Dokumen	Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 Dokumen	86.142.500,00	184.233.000,00	98.090.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	86.142.500,00	184.233.000,00	98.090.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	3 Dokumen	430.500.000,00	523.510.022,00	93.010.022,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	300.000.000,00	333.820.000,00	33.820.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	8.000.000,00	4.770.000,00	(3.230.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	7.500.000,00	4.770.000,00	(2.730.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	65.000.000,00	50.150.000,00	(14.850.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	50.000.000,00	130.000.022,00	80.000.022,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	22 Dokumen	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	22 Dokumen	1.145.451.000,00	1.869.978.251,00	724.527.251,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	27.500.000,00	9.707.000,00	(17.793.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	3	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	160.000.000,00	20.000.000,00	(140.000.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	85.000.000,00	187.671.911,00	102.671.911,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	95.000.000,00	113.560.340,00	18.560.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	62.951.000,00	45.892.500,00	(17.058.500,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	50.000.000,00	61.620.000,00	11.620.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	75.000.000,00	539.977.500,00	464.977.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	575.000.000,00	887.449.000,00	312.449.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	15.000.000,00	4.100.000,00	(10.900.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	60.000.000,00	26.780.000,00	(33.220.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	60.000.000,00	26.780.000,00	(33.220.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5.760.825.822,00	6.801.039.235,00	1.040.213.413,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.500.000,00	5.100.000,00	1.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	750.000.000,00	939.202.093,00	189.202.093,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	5.007.325.822,00	5.856.737.142,00	849.411.320,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	900.000.000,00	1.039.719.314,00	139.719.314,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 unit	450.000.000,00	605.989.014,00	155.989.014,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	150.000.000,00	147.180.300,00	(2.819.700,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	270.000.000,00	260.800.000,00	(9.200.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	3	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00	25.750.000,00	(4.250.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	98,94 Persen	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	98,94 Persen	205.136.380.000,00	97.074.451.707,00	(108.061.928.293,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses air minum	2400 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses air minum	2400 Rumah Tangga	205.136.380.000,00	97.074.451.707,00	(108.061.928.293,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 Dokumen	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 Dokumen	400.000.000,00	2.700.000.000,00	2.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3	1.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 Dokumen	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional	1 Dokumen	100.000.000,00	9.435.688.200,00	9.335.688.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3	1.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	20 Liter/Detik	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	20 Liter/Detik	186.658.450.000,00	75.029.396.707,00	(111.629.053.293,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3	1.01	5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	30000 SR	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	30000 SR	17.877.930.000,00	9.647.208.800,00	(8.230.721.200,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	3	1.01	8	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	28 Kab/Kot	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM	28 Kab/Kot	100.000.000,00	262.158.000,00	162.158.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	16,63 Persen	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	16,63 Persen	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	4	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4 Sistem	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	4 Sistem	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	4	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 dokumen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	2 dokumen	500.000.000,00	780.877.000,00	280.877.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	4	1.01	6	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	1 unit	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	4	1.01	7	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	4 dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	4 dokumen	950.000.000,00	766.739.000,00	(183.261.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	4	1.01	8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50 kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	50 kelompok masyarakat	150.000.000,00	102.384.000,00	(47.616.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	89 Persen	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	89 Persen	4.800.000.000,00	7.134.393.000,00	2.334.393.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	5	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	500 Jiwa	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	500 Jiwa	4.800.000.000,00	7.134.393.000,00	2.334.393.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	5	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	1 Dokumen	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	1 Dokumen	4.050.000.000,00	500.000.000,00	(3.550.000.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	5	1.01	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	30 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	30 Rumah Tangga	650.000.000,00	6.436.000.000,00	5.786.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	3	5	1.01	6	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	35 Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	35 Kelompok Masyarakat	100.000.000,00	198.393.000,00	98.393.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8,33 Persen	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	8,33 Persen	750.000.000,00	149.533.724.137,00	148.783.724.137,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	6	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah akses drainase terbangun	1000 meter	Jumlah akses drainase terbangun	1000 meter	750.000.000,00	149.533.724.137,00	148.783.724.137,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	6	1.01	3	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	70 orang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	70 orang	100.000.000,00	198.393.000,00	98.393.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	6	1.01	5	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	1 Unit	650.000.000,00	149.335.331.137,00	148.685.331.137,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penataan Bangunan Gedung	100 Persen	Presentase Penataan Bangunan Gedung	100 Persen	456.075.729.700,00	300.298.002.364,00	(155.777.727.336,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah provinsi	7 Gedung	Jumlah gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah provinsi	7 Gedung	456.075.729.700,00	300.298.002.364,00	(155.777.727.336,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8	1.01	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	18 Dokumen	390.612.610.000,00	245.457.807.000,00	(145.154.803.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8	1.01	2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	3 Unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	3 Unit	1.500.000.000,00	3.949.000.000,00	2.449.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8	1.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	150 Dokumen	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	150 Dokumen	32.180.000.000,00	37.165.500.000,00	4.985.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8	1.01	5	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1 Unit	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1 Unit	250.000.000,00	453.703.000,00	203.703.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	8	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	45 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	45 Dokumen	31.533.119.700,00	13.271.992.364,00	(18.261.127.336,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	28,57 persen	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	28,57 persen	845.000.000,00	845.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	9	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	845.000.000,00	845.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	9	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	770.000.000,00	770.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	9	1.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 dokumen	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	9	1.01	7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	100 Persen	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	100 Persen	1.302.917.500	(188.962.800,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
					Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 Persen	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 Persen			#VALUE!	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	11	1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	1000 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	1000 Orang	1.156.801.600,00	758.774.000,00	(398.027.600,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	11	1.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	713.902.200,00	451.971.000,00	(261.931.200,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	11	1.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	270 Orang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	270 Orang	442.899.400,00	306.803.000,00	(136.096.400,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	11	1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	85 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	85 Orang	335.078.700,00	294.143.500,00	(40.935.200,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
					Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80 Persen	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80 Persen				#VALUE!	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	11	1.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	20 Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	20 Dokumen	100.041.000,00	75.097.000,00	(24.944.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	11	1.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	85 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	85 Orang	235.037.700,00	219.046.500,00	(15.991.200,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	79 0	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	79 0	6.030.000.000,00	6.030.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	12	1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	70 Persen	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	70 Persen	2.820.000.000,00	2.840.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	12	1.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	1.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	1.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	300.000.000,00	320.000.000,00	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	10 Kegiatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	10 Kegiatan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	12	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	2 Kegiatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	2 Kegiatan	1.010.000.000,00	990.000.000,00	(20.000.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
1	3	12	1.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	800.000.000,00	780.000.000,00	(20.000.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	3	12	1.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	3 Kegiatan	Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	12	1.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					529.984.000.000,00	414.648.251.725	(115.335.748.275,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatin	5 Persen	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatin	5 Persen	300.000.000,00	330.960.000,00	30.960.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	2	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	6 Dokumen	300.000.000,00	330.960.000,00	30.960.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	2	1.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	110.320.000,00	10.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	2	1.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000,00	110.320.000,00	10.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	2	1.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000.000,00	110.320.000,00	10.320.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	11,56 Persen	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	11,56 Persen	41.822.322.703,00	44.287.518.400,00	2.465.195.697,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha					558.332.671,00	285.930.100,00	(272.402.571,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3	1.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Laporan	558.332.671,00	285.930.100,00	(272.402.571,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	9 Ha	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	9 Ha	41.263.990.032,00	44.001.588.300,00	2.737.598.268,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4 Dokumen	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4 Dokumen	270.000.000,00	90.000.000,00	(180.000.000,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3	1.02	4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	12 Dokumen	35.600.000.000,00	40.637.910.000,00	5.037.910.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	3	1.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	5.393.990.032,00	3.273.678.300,00	(2.120.311.732,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	22 Persen	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	22 Persen	487.861.677.297,00	370.569.976.225,00	(117.291.701.072,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	4	5	1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	24 Kawasan	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	24 Kawasan	487.861.677.297,00	370.569.976.225,00	(117.291.701.072,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	5	1.01	1 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3 Dokumen	207.000.000,00	639.400.000,00	432.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	5	1.01	2 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	13 Lokasi	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	13 Lokasi	487.308.882.897,00	369.707.012.625,00	(117.601.870.272,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	5	1.01	3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	4 Laporan	345.794.400,00	223.563.600,00	(122.230.800,00)	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.370.000.000,00	1.470.000.000	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	3		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	100 Persen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	3	1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	20 Dokumen	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	20 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	3	1.01	1 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	20 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100 Persen	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	4	1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	2 Kasus	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	2 Kasus	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	4	1.01	2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	77 Persen	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	77 Persen	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	10	1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	2 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	2 Dokumen	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
2	10	10	1.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	2 Laporan	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					6.553.893.425,00	10.758.148.493	4.204.255.068,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	973 Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	973 Rumah Tangga	6.036.770.025,00	6.203.949.170,00	167.179.145,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	7	1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	100 Persen	Persentase Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	100 Persen	6.036.770.025,00	6.203.949.170,00	167.179.145,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	7	1.01	2 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	5 Sistem Jaringan	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	5 Sistem Jaringan	6.036.770.025,00	6.203.949.170,00	167.179.145,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	82,5 0	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	82,5 0	517.123.400,00	534.398.916,00	17.275.516,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 Persen	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	100 Persen			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	85 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	85 Orang	517.123.400,00	534.398.916,00	17.275.516,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80 Persen	Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan	80 Persen			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	3	11	1.02	5	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	100 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	100 Dokumen	517.123.400,00	534.398.916,00	17.275.516,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					3.346.106.575,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	82 0	Indeks Profesionalitas ASN	82 0	3.346.106.575,00	3.161.651.914,00	(184.454.661,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Persentase indikator program yang tercapai	90,43 Persen	Persentase indikator program yang tercapai	90,43 Persen			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						Presentase realisasi anggaran	90 Persen	Presentase realisasi anggaran	90 Persen			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan	12 Dokumen	95.412.000,00	107.412.000,00	12.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	95.412.000,00	107.412.000,00	12.000.000,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	22 Dokumen	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 Dokumen	1.524.507.670,00	1.310.343.242,00	(214.164.428,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	93.356.522,00	47.641.200,00	(45.715.322,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.507.434,00	50.507.434,00	-	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	58.494.258,00	58.462.725,00	(31.533,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.605.700,00	4.260.000,00	654.300,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	148.529.556,00	68.118.729,00	(80.410.827,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.170.014.200,00	1.081.353.154,00	(88.661.046,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	70.070.265,00	92.006.620,00	21.936.355,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70.070.265,00	92.006.620,00	21.936.355,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.572.386.640,00	1.569.937.200,00	(2.449.440,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.566.386.640,00	1.563.937.200,00	(2.449.440,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	83.730.000,00	81.952.852,00	(1.777.148,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	4	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.600.000,00	33.600.000,00	-	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	27.810.000,00	20.100.600,00	(7.709.400,00)	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	4	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.320.000,00	28.252.252,00	5.932.252,00	UPT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					45.179.767.000,00	50.878.744.000,00	5.698.977.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	64 Nilai	Indeks Profesionalitas ASN	64 Nilai	36.649.767.000,00	41.059.536.000,00	4.409.769.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	#VALUE!					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	#VALUE!					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	45.000.000,00	40.010.000,00	(4.990.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	121.635.000,00	71.635.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	125.000.000,00	76.355.000,00	(48.645.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	31.898.449.000,00	32.115.622.000,00	217.173.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang / Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang / Bulan	31.391.345.000,00	31.604.546.000,00	213.201.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	457.104.000,00	418.956.000,00	(38.148.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	52.120.000,00	42.120.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	106.676.000,00	106.310.000,00	(366.000,00)		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.005.000,00	1.005.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	5	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.471.000,00	4.105.000,00	(366.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	858.768.000,00	658.343.386,00	(200.424.614,00)		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.005.000,00	1.005.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.471.000,00	4.105.000,00	(366.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	822.000.000,00	621.337.386,00	(200.662.614,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	7.476.000,00	6.910.000,00	(566.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	8.816.000,00	9.986.000,00	1.170.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	200.531.000,00	202.259.400,00	1.728.400,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	105.094.400,00	25.094.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	12.060.000,00	12.060.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.471.000,00	4.105.000,00	(366.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	89.000.000,00	66.000.000,00	(23.000.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	50.000.000,00	9.334.000,00	(40.666.000,00)		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000,00	9.334.000,00	(40.666.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa	4 Laporan	Jumlah Laporan penyediaan jasa	4 Laporan	2.954.421.548,00	6.764.982.362,00	3.810.560.814,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.000.000,00	434.000.000,00	44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	72.125.000,00	64.541.200,00	(7.583.800,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.487.296.548,00	6.261.441.162,00	3.774.144.614,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jasa	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jasa	330.921.452,00	952.684.852,00	621.763.400,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	85.000.000,00	410.495.000,00	325.495.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	125.000.000,00	421.268.400,00	296.268.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	70.921.452,00	70.921.452,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Anggota Linmas dalam Pelindungan Masyarakat	80 %		Persentase Anggota Linmas dalam Pelindungan Masyarakat	80 %		8.015.000.000,00	85.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	80 %	7.930.000.000,00		#VALUE!		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
					Persentase SDM yang terlatih	80 %	Persentase SDM yang terlatih	80 %					#VALUE!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Penegakan Perda/Perkada	80 %	Persentase Penegakan Perda/Perkada	80 %					#VALUE!	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	90 %	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	90 %	2.310.000.000,00	2.595.750.000,00	285.750.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1	5	2	1.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	250 Kasus	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	250 Kasus	612.066.000,00	1.042.010.000,00	429.944.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	20 Kasus	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	20 Kasus	50.000.000,00	54.744.000,00	4.744.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	4 Dokumen	747.000.000,00	703.160.800,00	(43.839.200,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	750.000.000,00	600.000.000,00	(150.000.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	7.476.000,00	7.476.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	100.000.000,00	151.872.000,00	51.872.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	10 Unit	5.000.000,00	2.289.200,00	(2.710.800,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	28.458.000,00	23.448.000,00	(5.010.000,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	10.000.000,00	10.750.000,00	750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4 Kegiatan	5.495.000.000,00	5.294.250.000,00	(200.750.000,00)		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	2.725.000.000,00	3.415.802.400,00	690.802.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	2.695.000.000,00	1.803.447.600,00	(891.552.400,00)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	2	1.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	5	2	1.03	2	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	Persentase Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	600.000.000,00	600.000.000,00	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	85 %	Jumlah pemetaan daerah rawan bencana kebakaran di wilayah provinsi Jawa Timur	85 %	537.500.000,00	537.500.000,00	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	3	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	3 Laporan	62.500.000,00	62.500.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	4	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	9	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1 Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	1 Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	85 %	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	85 %	62.500.000,00	62.500.000,00	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	4	1.02	1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3 Laporan	62.500.000,00	62.500.000,00	-	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					41.359.691.000,00		#VALUE!		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					23.518.766.000,00	28.933.536.000,00	5.414.770.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					600.000.000,00	925.000.000,00	325.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	300.000.000,00	550.000.000,00	250.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	125.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.610.111.000,00	16.099.960.000,00	(510.151.000,00)		BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	12.518.766.000,00	11.933.536.000,00	(585.230.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.891.345.000,00	3.966.424.000,00	75.079.000,00	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000,00	78.021.000,00	(21.979.000,00)		BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	10.021.000,00	(14.979.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					625.000.000,00	1.179.684.000,00	554.684.000,00		BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	50.000.000,00	29.961.000,00	(20.039.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	200.000.000,00	1.066.993.000,00	866.993.000,00	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.000.000,00	11.730.000,00	(13.270.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	5	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	22.200.000,00	(2.800.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	300.000.000,00	38.800.000,00	(261.200.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.177.056.000,00	2.123.208.000,00	946.152.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	35.124.000,00	(14.876.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	7.660.000,00	(92.340.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	57.056.000,00	21.326.000,00	(35.730.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	2.500.000,00	(97.500.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	99.116.000,00	(884.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	35.000.000,00	200.750.000,00	165.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	100.000.000,00	120.654.000,00	20.654.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000,00	1.624.414.000,00	1.024.414.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	25.000.000,00	1.664.000,00	(23.336.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000,00	232.046.000,00	132.046.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	232.046.000,00	132.046.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.086.599.000,00	3.119.939.000,00	33.340.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.066.599.000,00	1.291.042.000,00	224.443.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000.000,00	423.027.000,00	(76.973.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000.000,00	1.385.870.000,00	(114.130.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.220.000.000,00	5.175.678.000,00	3.955.678.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	200.000.000,00	258.090.000,00	58.090.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	400.000.000,00	445.654.000,00	45.654.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	213.755.000,00	113.755.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.000.000,00	3.000.000.000,00	2.740.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	5	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260.000.000,00	1.258.179.000,00	998.179.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					17.840.925.000,00	36.840.925.000,00	19.000.000.000,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi					1.119.241.700,00	1.232.800.000,00	113.558.300,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	400 Orang	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	400 Orang	1.119.241.700,00	1.232.800.000,00	113.558.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					5.292.758.300,00	7.179.200.000,00	1.886.441.700,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	767.000.000,00	1.586.700.000,00	819.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Dokumen	740.000.000,00	1.815.000.000,00	1.075.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	918.580.300,00	1.316.500.000,00	397.919.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	40 Kawasan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	40 Kawasan	2.867.178.000,00	2.461.000.000,00	(406.178.000,00)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					5.309.768.000,00	16.015.269.600,00	10.705.501.600,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	6 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	6 Laporan	2.221.933.000,00	4.215.088.200,00	1.993.155.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Laporan	878.273.000,00	2.069.301.600,00	1.191.028.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang	1.884.097.000,00	9.405.414.800,00	7.521.317.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	325.465.000,00	325.465.000,00	-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					6.119.157.000,00	12.413.655.400,00	6.294.498.400,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	961.688.000,00	5.256.186.400,00	4.294.498.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	1.04	7	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	5.157.469.000,00	7.157.469.000,00	2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					351.589.330.760,00	#VALUE!		DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					200.021.277.000,00	181.226.997.813,00	(18.794.279.187,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000.000,00	1.400.000.000,00	900.000.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	308.270.525,00	548.691.810,00	240.421.285,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	43.413.651,00	37.054.900,00	(6.358.751,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	16.233.265,00	483.835.900,00	467.602.635,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	132.082.559,00	330.417.390,00	198.334.831,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					194.521.277.000,00	170.300.093.000,00	(24.221.184.000,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	191.821.277.000,00	167.800.093.000,00	(24.021.184.000,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	12 bulan	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersedia	12 bulan	2.500.000.000,00	2.300.000.000,00	(200.000.000,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen			#VALUE!	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					200.000.000,00	199.012.200,00	(987.800,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	200.000.000,00	199.012.200,00	(987.800,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.976.900.000,00	7.737.747.089,00	3.760.847.089,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.134.187.560,00	1.411.543.019,00	277.355.459,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.842.712.440,00	6.326.204.070,00	3.483.491.630,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					823.100.000,00	1.590.145.524,00	767.045.524,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	129.600.000,00	188.100.000,00	58.500.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	334.000.000,00	334.000.000,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	216.500.000,00	318.656.800,00	102.156.800,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143.000.000,00	749.388.724,00	606.388.724,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					5.572.553.760,00	7.636.000.000,00	2.063.446.240,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					81.307.706,00	136.008.100,00	54.700.394,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	81.307.706,00	136.008.100,00	54.700.394,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					5.491.246.054,00	7.499.991.900,00	2.008.745.846,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.02	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	50 Orang	39.320.550,00	63.549.600,00	24.229.050,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.02	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	666 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	666 Orang	1.998.000.000,00	4.676.909.800,00	2.678.909.800,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.02	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Lembaga	3.453.925.504,00	2.759.532.500,00	(694.393.004,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					27.515.200,00	27.515.200,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	3	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal					27.515.200,00	27.515.200,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	3	1.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	27.515.200,00	27.515.200,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.442.484.800,00	15.248.452.300,00	9.805.967.500,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.601.028.500,00	11.951.028.500,00	9.350.000.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	24 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	24 Orang	136.718.000,00	9.112.218.000,00	8.975.500.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	4	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	1.464.310.500,00	1.838.810.500,00	374.500.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1.242.973.600,00	1.290.324.799,00	47.351.199,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	828.000.000,00	929.200.000,00	101.200.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	414.973.600,00	361.124.799,00	(53.848.801,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.277.026.400,00	1.685.642.701,00	408.616.301,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	1.277.026.400,00	1.685.642.701,00	408.616.301,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					321.456.300,00	321.456.300,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	100 Dokumen	321.456.300,00	321.456.300,00	-	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					137.213.000.000,00	176.796.172.500,00	39.583.172.500,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					50.000.000,00	124.032.500,00	74.032.500,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.01	1	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	0 Orang	50.000.000,00	124.032.500,00	74.032.500,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					137.163.000.000,00	176.672.140.000,00	39.509.140.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02	1	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	54000 Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	54000 Keluarga	120.690.000.000,00	143.410.640.000,00	22.720.640.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	750.000.000,00	15.813.500.000,00	15.063.500.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02	3	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	15.723.000.000,00	17.448.000.000,00	1.725.000.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	5	1.02	3	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4320 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Penumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4320 Orang		#VALUE!		DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					3.312.500.000,00	10.113.600.000,00	6.801.100.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					3.312.500.000,00	10.113.600.000,00	6.801.100.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	0 Orang	424.723.000,00	395.880.000,00	(28.843.000,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	0 Orang	70.000.000,00	125.000.000,00	55.000.000,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	0 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	0 Unit	805.277.000,00	800.004.980,00	(5.272.020,00)	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	0 Orang	421.470.240,00	853.600.000,00	432.129.760,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6	6	1.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	0 Orang	1.591.029.760,00	7.939.115.020,00	6.348.085.260,00	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.580.375.760,00	3.391.640.640	811.264.880,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.873.875.760,00	2.469.505.224,00	595.629.464,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.873.875.760,00	2.222.505.224,00	348.629.464,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.400.000,00	154.824.347,00	88.424.347,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.807.475.760,00	2.067.680.877,00	260.205.117,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					706.500.000,00	922.135.416,00	215.635.416,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					706.500.000,00	922.135.416,00	215.635.416,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 orang	706.500.000,00	922.135.416,00	215.635.416,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.050.168.800,00	3.427.424.798	1.377.255.998,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					760.737.395,00	1.320.654.269,00	559.916.874,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					715.768.800,00	855.203.300,00	139.434.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	715.768.800,00	855.203.300,00	139.434.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPSAA Trenggalek	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPSAA Trenggalek	1 Dokumen			#VALUE!	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					14.968.595,00	407.027.049,00	392.058.454,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	14.968.595,00	407.027.049,00	392.058.454,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PPSAA TRENGGALEK	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PPSAA TRENGGALEK	1 Paket			#VALUE!	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000,00	58.423.920,00	28.423.920,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000,00	58.423.920,00	28.423.920,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.289.431.405,00	2.106.770.529,00	817.339.124,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					1.289.431.405,00	2.106.770.529,00	817.339.124,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 orang	1.101.384.000,00	1.099.718.000,00	(1.666.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 orang	82.150.586,00	193.433.400,00	111.282.814,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 orang	25.292.388,00	39.848.481,00	14.556.093,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 orang	9.830.938,00	311.336.448,00	301.505.510,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 orang	70.773.493,00	462.434.200,00	391.660.707,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK	DINAS SOSIAL	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.954.034.400,00	#VALUE!	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						738.666.400,00	1.435.782.380,00	697.115.980,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						60.648.000,00	60.648.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPSAA Situbondo	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPSAA Situbondo	1 Laporan	60.648.000,00	60.648.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.824.400,00	894.012.860,00	831.188.460,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	62.824.400,00	894.012.860,00	831.188.460,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						515.194.000,00	459.909.520,00	(55.284.480,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	110.194.000,00	151.250.000,00	41.056.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	405.000.000,00	308.659.520,00	(96.340.480,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.000.000,00	21.212.000,00	(78.788.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	21.212.000,00	(78.788.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1.215.368.000,00	1.923.229.200,00	707.861.200,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						1.215.368.000,00	1.923.229.200,00	707.861.200,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 orang	1.215.368.000,00	1.923.229.200,00	707.861.200,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO	DINAS SOSIAL	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1.728.561.280,00	2.659.692.867	931.131.587,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1				705.311.160,00	911.712.660,00	206.401.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.06			3.600.000,00	3.600.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08			599.548.160,00	905.949.660,00	306.401.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	515.548.160,00	821.949.660,00	306.401.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09			102.163.000,00	2.163.000,00	(100.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.163.000,00	2.163.000,00	(100.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	4				1.023.250.120,00	1.747.980.207,00	724.730.087,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL				
1	6	4	1.02			1.023.250.120,00	1.747.980.207,00	724.730.087,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL				
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	904.400.000,00	903.948.000,00	(452.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 orang	2.850.120,00	45.514.707,00	42.664.587,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100 orang	30.000.000,00	479.493.500,00	449.493.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	86.000.000,00	319.024.000,00	233.024.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP	DINAS SOSIAL
1	6					2.090.712.480,00	3.155.110.220	1.064.397.740,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL				
1	6	1				660.938.160,00	822.100.260,00	161.162.100,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.08			660.938.160,00	822.100.260,00	161.162.100,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.000.000,00	90.900.000,00	(14.100.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	555.938.160,00	731.200.260,00	175.262.100,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL
1	6	4				1.429.774.320,00	2.333.009.960,00	903.235.640,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL				
1	6	4	1.02			1.429.774.320,00	2.333.009.960,00	903.235.640,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL				
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 orang	1.241.250.000,00	1.238.790.000,00	(2.460.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 orang	35.000.000,00	480.482.500,00	445.482.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 orang	10.000.000,00	21.967.200,00	11.967.200,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 orang	143.524.320,00	591.770.260,00	448.245.940,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.725.338.840,00	2.282.724.567	557.385.727,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					900.269.735,00	843.838.008,00	(56.431.727,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					56.460.000,00	64.044.000,00	7.584.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	56.460.000,00	64.044.000,00	7.584.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPSPA Batu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PPSPA Batu	1 Dokumen		#VALUE!			UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					204.711.575,00	237.106.948,00	32.395.373,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	9.430.614,00	9.518.300,00	87.686,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PPSPA Batu	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PPSPA Batu	1 paket		#VALUE!			UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	35.111.660,00	36.241.300,00	1.129.640,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PPSPA BATU	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PPSPA BATU	1 paket		#VALUE!			UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	33.948.202,00	34.767.348,00	819.146,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	25.561.099,00	27.240.000,00	1.678.901,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.660.000,00	129.340.000,00	28.680.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					539.098.160,00	542.687.060,00	3.588.900,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.600.000,00	52.032.900,00	(3.567.100,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	483.498.160,00	490.654.160,00	7.156.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					825.069.105,00	1.438.886.559,00	613.817.454,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					825.069.105,00	1.438.886.559,00	613.817.454,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	1	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	600 orang	83.200.000,00	150.100.000,00	66.900.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	4	1.02	2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600 orang	255.286.000,00	626.016.800,00	370.730.800,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	600 orang	84.800.000,00	137.200.000,00	52.400.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	600 orang	117.243.656,00	33.506.810,00	(83.736.846,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	600 orang	20.214.904,00	20.214.904,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	600 orang	152.440.000,00	313.840.000,00	161.400.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	1200 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	600 Orang	35.898.545,00	56.827.045,00	20.928.500,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1200 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	600 orang	10.094.000,00	14.061.000,00	3.967.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1200 orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	600 orang	65.892.000,00	87.120.000,00	21.228.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.272.757.520,00	2.825.797.540	553.040.020,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.093.297.827,00	1.606.978.620,00	513.680.793,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					63.000.000,00	74.880.000,00	11.880.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSBR Blitar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSBR Blitar	1 Dokumen	63.000.000,00	74.880.000,00	11.880.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					506.771.847,00	716.776.200,00	210.004.353,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12.953.060,00	15.886.700,00	2.933.640,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Blitar	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Blitar	1 paket			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	226.187.944,00	508.379.300,00	282.191.356,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSBR BLITAR	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSBR BLITAR	1 paket			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	7.881.282,00	9.756.200,00	1.874.918,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR BLITAR	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR BLITAR	1 paket			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	33.659.561,00	31.074.000,00	(2.585.561,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang tersedia UPT PSBR BLITAR	1 Laporan	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang tersedia UPT PSBR BLITAR	1 Laporan	9.690.000,00	0,00	(9.690.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.400.000,00	151.680.000,00	(64.720.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					466.021.280,00	511.471.380,00	45.450.100,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	52.800.000,00	52.182.100,00	(617.900,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	413.221.280,00	459.289.280,00	46.068.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					57.504.700,00	303.851.040,00	246.346.340,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.960.000,00	44.460.000,00	(500.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	12.544.700,00	259.391.040,00	246.846.340,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.179.459.693,00	1.218.818.920,00	39.359.227,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			1.179.459.693,00	1.218.818.920,00	39.359.227,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	443.271.410,00	459.554.000,00	16.282.590,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 orang	131.500.000,00	117.110.000,00	(14.390.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 orang	82.168.466,00	115.869.640,00	33.701.174,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 orang	12.223.677,00	79.338.880,00	67.115.203,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 orang	48.087.648,00	49.700.000,00	1.612.352,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	348.008.492,00	327.356.400,00	(20.652.092,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	100 orang	114.200.000,00	69.890.000,00	(44.310.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			2.874.811.280,00	3.221.811.280	347.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.697.038.029,00	1.884.633.930,00	187.595.901,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			62.220.000,00	68.892.000,00	6.672.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	62.220.000,00	68.892.000,00	6.672.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			342.447.007,00	305.111.300,00	(37.335.707,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	14.535.010,00	15.918.800,00	1.383.790,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Jombang	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Jombang		1 Paket	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	82.872.627,00	89.490.400,00	6.617.773,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSBR JOMBANG	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSBR JOMBANG		1 Paket	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1.806.800,00	20.916.900,00	19.110.100,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR JOMBANG	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR JOMBANG		1 Paket	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.792.570,00	28.485.200,00	13.692.630,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.040.000,00	0,00	(8.040.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	220.400.000,00	150.300.000,00	(70.100.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			198.126.798,00	654.456.400,00	456.329.602,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	198.126.798,00	654.456.400,00	456.329.602,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					506.616.480,00	543.437.680,00	36.821.200,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.080.000,00	900.000,00	(180.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	80.550.200,00	103.148.400,00	22.598.200,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	424.986.280,00	439.389.280,00	14.403.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					587.627.744,00	312.736.550,00	(274.891.194,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.700.744,00	57.075.938,00	4.375.194,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	303.464.400,00	249.480.612,00	(53.983.788,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	231.462.600,00	6.180.000,00	(225.282.600,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.177.773.251,00	1.337.177.350,00	159.404.099,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant					1.177.773.251,00	1.337.177.350,00	159.404.099,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	214 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	214 Orang	425.840.500,00	453.933.000,00	28.092.500,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	214 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	274.203.786,00	117.110.000,00	(157.093.786,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	214 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	100 Orang	12.674.305,00	150.297.600,00	137.623.295,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	214 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	3.067.500,00	163.998.750,00	160.931.250,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	214 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	17.687.160,00	0,00	(17.687.160,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	214 Orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	214 Orang	244.700.000,00	373.598.000,00	128.898.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	214 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	100 Orang	199.600.000,00	78.240.000,00	(121.360.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.297.311.280,00	2.847.311.280	550.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.331.083.736,00	1.760.266.240,00	429.182.504,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.200.000,00	75.792.000,00	17.592.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	58.200.000,00	75.792.000,00	17.592.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSBR Bojonegoro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSBR Bojonegoro	1 Dokumen			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					158.424.760,00	236.325.800,00	77.901.040,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	13.271.900,00	-	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Bojonegoro	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Bojonegoro	1 Paket	#VALUE!		UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL		
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	16.715.060,00	28.593.200,00	11.878.140,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di PSBR BOJONEGORO	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di PSBR BOJONEGORO	1 paket	#VALUE!		UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL		
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	7.505.200,00	54.610.100,00	47.104.900,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR BOJONEGORO	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR BOJONEGORO	1 paket	#VALUE!		UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL		
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	23.432.600,00	26.350.600,00	2.918.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	97.500.000,00	113.500.000,00	16.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					466.162.280,00	578.185.280,00	112.023.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	55.273.000,00	64.136.000,00	8.863.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	410.889.280,00	514.049.280,00	103.160.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					648.296.696,00	869.963.160,00	221.666.464,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	62.741.696,00	58.883.160,00	(3.858.536,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	585.555.000,00	811.080.000,00	225.525.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					966.227.544,00	1.087.045.040,00	120.817.496,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					966.227.544,00	1.087.045.040,00	120.817.496,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	170 orang	420.716.500,00	453.933.000,00	33.216.500,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	170 orang	143.084.000,00	117.110.000,00	(25.974.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	170 orang	24.544.844,00	81.188.580,00	56.643.736,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 orang	36.729.200,00	56.965.460,00	20.236.260,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 Orang	48.900.000,00	49.700.000,00	800.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	170 orang	241.353.000,00	278.348.000,00	36.995.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 6 4 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	170 orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	170 orang	50.900.000,00	49.800.000,00	(1.100.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO	DINAS SOSIAL
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.452.891.920,00	2.849.891.920	397.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.364.743.206,00	1.557.407.548,00	192.664.342,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.168.448,00	63.192.000,00	(976.448,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	64.168.448,00	63.192.000,00	(976.448,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSBR Pamekasan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSBR Pamekasan	1 Dokumen				#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN
1 6 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					372.927.898,00	439.928.080,00	67.000.182,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	14.379.200,00	22.731.200,00	8.352.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Pamekasan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSBR Pamekasan	1 Paket				#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN
1 6 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	172.530.680,00	176.742.500,00	4.211.820,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSBR PAMEKASAN	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSBR PAMEKASAN	1 paket				#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN
1 6 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	19.026.900,00	26.583.880,00	7.556.980,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR PAMEKASAN	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSBR PAMEKASAN	1 paket				#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN
1 6 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.091.118,00	17.042.500,00	(48.618,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	16.750.000,00	6.700.000,00	(10.050.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	133.150.000,00	190.128.000,00	56.978.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					717.426.560,00	725.658.220,00	8.231.660,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.320.000,00	640.000,00	(680.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	61.376.000,00	61.034.300,00	(341.700,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	654.730.560,00	663.983.920,00	9.253.360,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					210.220.300,00	328.629.248,00	118.408.948,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	72.824.100,00	117.226.800,00	44.402.700,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit				#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN
1 6 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	137.396.200,00	211.402.448,00	74.006.248,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.088.148.714,00	1.292.484.372,00	204.335.658,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.088.148.714,00	1.292.484.372,00	204.335.658,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.05 1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	447.504.000,00	451.790.000,00	4.286.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.05 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 orang	55.000.000,00	85.840.000,00	30.840.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 orang	74.413.950,00	50.484.600,00	(23.929.350,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 orang	128.330.000,00	161.660.000,00	33.330.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 orang	13.148.000,00	14.784.000,00	1.636.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	369.752.764,00	527.925.772,00	158.173.008,00	UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.487.945.680,00		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.100.534.180,00	1.450.750.341,00	350.216.161,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					57.408.000,00	68.892.000,00	11.484.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	57.408.000,00	68.892.000,00	11.484.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.357.380,00	431.824.660,00	316.467.280,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	56.695.283,00	244.418.220,00	187.722.937,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW JEMBER	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW JEMBER	1 paket			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.599.000,00	19.974.600,00	15.375.600,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	54.063.097,00	167.431.840,00	113.368.743,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					827.768.800,00	950.033.680,00	122.264.880,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	61.000.000,00	81.120.000,00	20.120.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	766.768.800,00	868.913.680,00	102.144.880,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	1,00	(99.999.999,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000.000,00	1,00	(99.999.999,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.387.411.500,00	1.540.267.900,00	152.856.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.387.411.500,00	1.540.267.900,00	152.856.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	140 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	140 orang	1.341.411.500,00	1.355.719.500,00	14.308.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	140 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	140 Orang	6.000.000,00	95.837.200,00	89.837.200,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	140 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	140 Orang	6.000.000,00	66.000.000,00	60.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	140 Orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	140 Orang	24.000.000,00	22.711.200,00	(1.288.800,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	140 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	140 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.154.455.080,00		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1				1.315.170.880,00	1.672.995.280,00	357.824.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.06			83.693.190,00	399.197.050,00	315.503.860,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2.497.750,00	14.897.200,00	12.399.450,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSTW Pasuruan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSTW Pasuruan	1 Paket		#VALUE!		UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	52.569.390,00	149.540.750,00	96.971.360,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW PASURUAN	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW PASURUAN	1 Paket		#VALUE!		UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	3.180.550,00	70.645.100,00	67.464.550,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSTW PASURUAN	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSTW PASURUAN	1 Paket		#VALUE!		UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.041.500,00	9.514.000,00	7.472.500,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.854.000,00	1.800.000,00	(54.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.550.000,00	152.800.000,00	131.250.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.231.477.690,00	1.273.798.230,00	42.320.540,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	105.447.610,00	101.580.150,00	(3.867.460,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.126.030.080,00	1.172.218.080,00	46.188.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.839.284.200,00	1.870.985.600,00	31.701.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.839.284.200,00	1.870.985.600,00	31.701.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	165 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	165 Orang	1.618.925.000,00	1.625.204.400,00	6.279.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	41.250.000,00	74.250.000,00	33.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	165 Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	165 Orang	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	12.312.340,00	67.805.200,00	55.492.860,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	165 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	165 Orang	13.920.000,00	21.120.000,00	7.200.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari di UPT PSTW Pasuruan	165 Orang	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang memperoleh bimbingan aktifitas hidup sehari-hari di UPT PSTW Pasuruan	165 Orang	18.623.100,00	27.840.000,00	9.216.900,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang			#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL	
1	6 4 1.03 9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar di UPT PSTW Pasuruan	165 Orang	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar di UPT PSTW Pasuruan	165 Orang	20.640.000,00	26.640.000,00	6.000.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL	
1	6 4 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang meninggal dan mendapatkan layanan pemulasaraan jenazah di UPT PSTW Pasuruan	165 Orang	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang meninggal dan mendapatkan layanan pemulasaraan jenazah di UPT PSTW Pasuruan	165 Orang	13.613.760,00	28.126.000,00	14.512.240,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	0 Orang		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN	DINAS SOSIAL	
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.573.874.440,00		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.161.519.490,00	1.680.018.504,00	518.499.014,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				69.492.000,00	68.892.000,00	(600.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		68.892.000,00	(600.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSTW Blitar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSTW Blitar	1 Dokumen	69.492.000,00	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
1	6 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				24.407.570,00	158.680.890,00	134.273.320,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		48.214.500,00	42.214.700,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW BLITAR	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW BLITAR	1 paket	5.999.800,00	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		110.466.390,00	92.058.620,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di PSTW BLITAR	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di PSTW BLITAR	1 paket	18.407.770,00	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
1	6 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				956.970.920,00	1.020.765.320,00	63.794.400,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.094.600,00	58.057.000,00	(37.600,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	898.876.320,00	962.708.320,00	63.832.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.649.000,00	431.680.294,00	321.031.294,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	10.649.000,00	184.680.293,00	174.031.293,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	247.000.001,00	147.000.001,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.412.354.950,00	1.616.815.200,00	204.460.250,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 4 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				1.412.354.950,00	1.616.815.200,00	204.460.250,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 orang	1.327.875.000,00	1.327.667.100,00	(207.900,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
			"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi"	135 orang	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi"	135 orang		100.534.500,00	39.784.500,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6 4 1.03 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	60.750.000,00	#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 orang	6.047.950,00	159.720.800,00	153.672.850,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	1 orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	1 orang	17.682.000,00	28.892.800,00	11.210.800,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.580.820.680,00	3.082.619.870	501.799.190,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					940.996.380,00	1.205.077.970,00	264.081.590,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					940.996.380,00	1.205.077.970,00	264.081.590,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	82.073.820,00	162.379.410,00	80.305.590,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	858.922.560,00	1.042.698.560,00	183.776.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.639.824.300,00	1.877.541.900,00	237.717.600,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.639.824.300,00	1.877.541.900,00	237.717.600,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	1.491.625.000,00	1.522.596.500,00	30.971.500,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
												#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	155 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	155 orang	57.679.300,00	235.302.400,00	177.623.100,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	155 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	155 orang	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	155 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	155 Orang	13.720.000,00	0,00	(13.720.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	155 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	155 Orang	24.000.000,00	87.780.000,00	63.780.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	155 orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	155 orang	30.000.000,00	31.863.000,00	1.863.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	155 orang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	155 orang	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.518.293.800,00	3.293.985.080	775.691.280,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.135.389.800,00	1.389.692.088,00	254.302.288,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.292.000,00	163.376.000,00	95.084.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	68.292.000,00	163.376.000,00	95.084.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.852.120,00	159.211.652,00	152.359.532,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	144.971.960,00	139.471.960,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW MAGETAN	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW MAGETAN	1 Paket		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.352.120,00	14.239.692,00	12.887.572,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSTW MAGETAN	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PSTW MAGETAN	1 Paket		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					959.045.680,00	993.913.680,00	34.868.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.000.000,00	109.400.000,00	(2.600.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	847.045.680,00	884.513.680,00	37.468.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					101.200.000,00	73.190.756,00	(28.009.244,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	1.200.000,00	73.190.756,00	71.990.756,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.382.904.000,00	1.904.292.992,00	521.388.992,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					1.382.904.000,00	1.904.292.992,00	521.388.992,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	145 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	145 Orang	1.373.904.000,00	1.659.462.300,00	285.558.300,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	145 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	145 Orang	9.000.000,00	244.830.692,00	235.830.692,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.740.838.160,00	2.070.496.220	329.658.060,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					934.604.869,00	795.112.829,00	(139.492.040,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					60.384.000,00	195.751.200,00	135.367.200,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	60.384.000,00	195.751.200,00	135.367.200,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSTW Banyuwangi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSTW Banyuwangi	1 Dokumen		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					170.517.555,00	0,00	(170.517.555,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	8.337.850,00	0,00	(8.337.850,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSTW Banyuwangi	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT PSTW Banyuwangi	1 paket		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	36.681.060,00	0,00	(36.681.060,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW BANYUWANGI	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PSTW BANYUWANGI	1 paket		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.898.645,00	0,00	(7.898.645,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	117.600.000,00	0,00	(117.600.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					569.462.688,00	570.148.248,00	685.560,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.801.408,00	40.558.968,00	6.757.560,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	535.661.280,00	529.589.280,00	(6.072.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					134.240.626,00	29.213.381,00	(105.027.245,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	12.705.000,00	0,00	(12.705.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	21.535.626,00	29.213.381,00	7.677.755,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					806.233.291,00	1.275.383.391,00	469.150.100,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					806.233.291,00	1.275.383.391,00	469.150.100,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	466.896.000,00	959.646.000,00	492.750.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	2	Penyediaan Sandang	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi"	100 orang	"Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi"	100 orang	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 orang	131.840.192,00	0,00	(131.840.192,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	100 orang	15.088.167,00	0,00	(15.088.167,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 orang	73.126.381,00	97.833.181,00	24.706.800,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
												#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 orang	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	100 orang	12.570.400,00	217.904.210,00	205.333.810,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 orang	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	100 orang	27.512.151,00	0,00	(27.512.151,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.642.115.040,00		#VALUE!	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	6	1							668.375.040,00	910.561.040,00	242.186.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.02						604.975.040,00	848.961.040,00	243.986.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSTW Bondowoso	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PSTW Bondowoso	1 Dokumen	604.975.040,00	848.961.040,00	243.986.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08							63.400.000,00	61.600.000,00	(1.800.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	63.400.000,00	61.600.000,00	(1.800.000,00)	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	4								973.740.000,00	1.198.078.460,00	224.338.460,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03							973.740.000,00	1.198.078.460,00	224.338.460,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	937.125.000,00	949.262.000,00	12.137.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 orang	11.415.000,00	34.812.000,00	23.397.000,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	13.200.000,00	85.461.860,00	72.261.860,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.03	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 orang	12.000.000,00	128.542.600,00	116.542.600,00	UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO	DINAS SOSIAL
1	6									2.343.293.800,00	#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL	
1	6	1								1.134.977.605,00	1.678.248.235,00	543.270.630,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02							14.025.000,00	46.740.000,00	32.715.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	14.025.000,00	46.740.000,00	32.715.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06							107.342.038,00	394.974.035,00	287.631.997,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2.085.750,00	42.817.000,00	40.731.250,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	84.456.288,00	32.113.400,00	(52.342.888,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	3.000.000,00	73.115.750,00	70.115.750,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	15.032.000,00	12.032.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	1.440.000,00	(360.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	3.000.000,00	70.151.885,00	67.151.885,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	160.304.000,00	150.304.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				853.528.800,00	938.258.800,00	84.730.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	78.000.000,00	146.000.000,00	68.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	773.728.800,00	790.458.800,00	16.730.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.081.767,00	298.275.400,00	138.193.633,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3.000.000,00	9.750.000,00	6.750.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.000.000,00	17.050.000,00	14.050.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.081.767,00	24.475.400,00	20.393.633,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150.000.000,00	247.000.000,00	97.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.208.316.195,00	1.647.725.050,00	439.408.855,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti				1.208.316.195,00	1.647.725.050,00	439.408.855,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	927.020.000,00	926.145.500,00	(874.500,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105.367.500,00	138.600.000,00	33.232.500,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	4	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	14.700.000,00	17.325.000,00	2.625.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	84.171.615,00	134.787.250,00	50.615.635,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50.624.580,00	271.474.400,00	220.849.820,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	3.357.500,00	54.631.900,00	51.274.400,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	13.075.000,00	24.391.000,00	11.316.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5.000.000,00	80.370.000,00	75.370.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.325.495.840,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				621.029.840,00	1.355.197.420,00	734.167.580,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				129.769.540,00	385.698.670,00	255.929.130,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26.346.440,00	144.749.790,00	118.403.350,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		120.822.200,00	44.099.100,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT RSBD PASURUAN	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT RSBD PASURUAN	76.723.100,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	26.700.000,00	120.126.680,00	93.426.680,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				391.260.300,00	722.498.750,00	331.238.450,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 6 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.152.780,00	97.867.230,00	27.714.450,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	321.107.520,00	624.631.520,00	303.524.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					704.466.000,00	907.381.600,00	202.915.600,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					704.466.000,00	907.381.600,00	202.915.600,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.01 1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	75 orang	681.966.000,00	718.667.600,00	36.701.600,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.01 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	75 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	75 orang	22.500.000,00	188.714.000,00	166.214.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.440.391.920,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					829.234.728,00	1.257.737.890,00	428.503.162,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					729.234.728,00	1.010.737.890,00	281.503.162,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.465.928,00	83.099.200,00	12.633.272,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	658.768.800,00	927.638.690,00	268.869.890,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL	
1 6 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL	
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					611.157.192,00	1.224.952.700,00	613.795.508,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					611.157.192,00	1.224.952.700,00	613.795.508,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.01 1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	566.145.600,00	566.145.600,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	75 Orang	45.011.592,00	658.807.100,00	613.795.508,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.400.845.680,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					821.045.680,00	1.346.789.680,00	525.744.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					721.045.680,00	1.099.789.680,00	378.744.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	721.045.680,00	1.099.789.680,00	378.744.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					579.800.000,00	933.970.500,00	354.170.500,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					579.800.000,00	933.970.500,00	354.170.500,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	579.018.000,00	584.788.200,00	5.770.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 orang	782.000,00	349.182.300,00	348.400.300,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.476.481.960,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.902.781.660,00	2.241.464.730,00	338.683.070,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.460.000,00	41.460.000,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBL Pasuruan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBL Pasuruan	1 Dokumen	41.460.000,00	41.460.000,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					466.092.470,00	515.721.470,00	49.629.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	170.185.578,00	141.323.578,00	(28.862.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT RSBL Pasuruan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT RSBL Pasuruan	1 Paket			#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	112.072.800,00	190.452.600,00	78.379.800,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT RSBL PASURUAN	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT RSBL PASURUAN	1 Paket			#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	14.112.092,00	14.112.092,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	30.840.000,00	30.951.200,00	111.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	138.882.000,00	138.882.000,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					45.781.200,00	45.772.000,00	(9.200,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45.781.200,00	45.772.000,00	(9.200,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.236.419.690,00	1.264.682.960,00	28.263.270,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.208.730,00	78.472.000,00	28.263.270,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.186.210.960,00	1.186.210.960,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.028.300,00	373.828.300,00	260.800.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	13.000.000,00	26.800.000,00	13.800.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.028.300,00	347.028.300,00	247.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					3.573.700.300,00	3.582.017.230,00	8.316.930,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					3.573.700.300,00	3.582.017.230,00	8.316.930,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	255 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	255 Orang	2.503.243.900,00	2.503.243.900,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	255 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	255 Orang	425.402.100,00	426.551.100,00	1.149.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	255 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	255 Orang	471.367.200,00	471.967.130,00	599.930,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	254 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	254 Orang	157.872.000,00	161.040.000,00	3.168.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	255 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	255 Orang	15.815.100,00	19.215.100,00	3.400.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4.157.116.920,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.283.645.400,00	1.657.270.060,00	373.624.660,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.841.600,00	55.509.600,00	1.668.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen		55.509.600,00	1.668.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
						umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBL Kediri	1 Dokumen	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBL Kediri	1 Dokumen			#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					258.979.820,00	374.228.020,00	115.248.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket		183.287.620,00	131.173.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT RSBL Kediri	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT RSBL Kediri	1 paket	52.114.620,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	21.609.200,00	21.524.400,00	(84.800,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	185.256.000,00	169.416.000,00	(15.840.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					860.247.980,00	969.956.440,00	109.708.460,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.521.560,00	76.965.140,00	(8.556.420,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	774.726.420,00	892.991.300,00	118.264.880,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.576.000,00	257.576.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		10.576.000,00	-	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					2.873.471.520,00	2.911.111.740,00	37.640.220,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					2.873.471.520,00	2.911.111.740,00	37.640.220,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang		2.011.848.700,00	25.501.700,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
						Jumlah Penyandang Disabilitas di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permasalahannya di UPT RSBL Kediri	205 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar permasalahannya di UPT RSBL Kediri	205 Orang	1.986.347.000,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	4	1.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	205 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	205 Orang	305.902.200,00	264.042.840,00	(41.859.360,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	205 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	205 Orang	247.236.720,00	283.082.200,00	35.845.480,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	205 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	205 Orang	287.310.000,00	305.040.000,00	17.730.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	205 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	205 Orang	5.195.600,00	6.028.000,00	832.400,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar	1 Dokumen	41.480.000,00	41.070.000,00	(410.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.566.284.400,00		#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					581.779.600,00	1.103.426.750,00	521.647.150,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					311.418.000,00	300.001.349,00	(11.416.651,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	311.418.000,00	300.001.349,00	(11.416.651,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBLK Tuban	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBLK Tuban	1 Dokumen			#VALUE!	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					170.361.600,00	556.425.400,00	386.063.800,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.361.600,00	0,00	(8.361.600,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	162.000.000,00	556.425.400,00	394.425.400,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	247.000.001,00	147.000.001,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000.000,00	247.000.001,00	147.000.001,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					984.504.800,00	1.791.792.750,00	807.287.950,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti					984.504.800,00	1.791.792.750,00	807.287.950,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 orang	984.504.800,00	1.791.792.750,00	807.287.950,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.516.284.400,00	2.443.207.080	926.922.680,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					680.481.280,00	1.080.609.080,00	400.127.800,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.292.000,00	64.044.000,00	(4.248.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	68.292.000,00	64.044.000,00	(4.248.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					512.189.280,00	769.565.080,00	257.375.800,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54.600.000,00	376.240.680,00	321.640.680,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	457.589.280,00	393.324.400,00	(64.264.880,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	247.000.000,00	147.000.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					835.803.120,00	1.362.598.000,00	526.794.880,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					835.803.120,00	1.362.598.000,00	526.794.880,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	4	1.04	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	835.803.120,00	1.362.598.000,00	526.794.880,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.528.149.440,00		#VALUE!	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.423.210.929,00	1.841.139.441,00	417.928.512,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					68.292.000,00	70.792.000,00	2.500.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	68.292.000,00	70.792.000,00	2.500.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PRSMP Surabaya	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PRSMP Surabaya	1 Dokumen			#VALUE!	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					185.296.369,00	458.480.269,00	273.183.900,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	26.465.577,00	241.625.477,00	215.159.900,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PRSMP SURABAYA	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PRSMP SURABAYA	1 paket			#VALUE!	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.910.792,00	12.054.792,00	144.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	19.620.000,00	19.620.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124.900.000,00	182.780.000,00	57.880.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.069.622.560,00	1.056.078.560,00	(13.544.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	119.400.000,00	101.300.000,00	(18.100.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	948.922.560,00	954.778.560,00	5.856.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100.000.000,00	255.788.612,00	155.788.612,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
1	6	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	255.788.612,00	155.788.612,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
											#VALUE!		UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.104.938.511,00	1.301.221.059,00	196.282.548,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.104.938.511,00	1.301.221.059,00	196.282.548,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 orang	569.414.500,00	529.214.500,00	(40.200.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 orang	83.851.264,00	138.234.264,00	54.383.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 orang	90.507.166,00	68.677.166,00	(21.830.000,00)	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 orang	32.112.549,00	32.112.549,00	-	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 orang	89.400.000,00	148.590.000,00	59.190.000,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	170 orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	170 orang	239.653.032,00	384.392.580,00	144.739.548,00	UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA	DINAS SOSIAL	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.540.838.160,00	2.291.749.660	750.911.500,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					557.854.160,00	983.546.360,00	425.692.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					557.854.160,00	983.546.360,00	425.692.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	557.854.160,00	983.546.360,00	425.692.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					982.984.000,00	1.308.203.300,00	325.219.300,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					982.984.000,00	1.308.203.300,00	325.219.300,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6	4	1.04	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	982.984.000,00	1.231.059.300,00	248.075.300,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN	DINAS SOSIAL	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					1.772.534.400,00	2.689.913.665	917.379.265,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					665.196.750,00	892.284.825,00	227.088.075,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					65.532.000,00	62.064.000,00	(3.468.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL	
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	65.532.000,00	62.064.000,00	(3.468.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBKW Kediri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT RSBKW Kediri	1 Dokumen			#VALUE!		UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
1	6	1	1.06			163.982.200,00	301.898.560,00	137.916.360,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL				
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	61.671.200,00	139.191.560,00	77.520.360,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT RSBKW KEDIRI	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT RSBKW KEDIRI	1 Paket		#VALUE!		UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.836.600,00	11.732.500,00	(1.104.100,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.830.400,00	1.440.000,00	(2.390.400,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	17.644.000,00	19.334.500,00	1.690.500,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	65.700.000,00	130.200.000,00	64.500.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					405.757.825,00	469.540.600,00	63.782.775,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.880.000,00	180.000,00	(2.700.000,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.915.925,00	37.936.200,00	(1.979.725,00)	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	362.961.900,00	431.424.400,00	68.462.500,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29.924.725,00	58.781.665,00	28.856.940,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	1 Unit	29.924.725,00	58.781.665,00	28.856.940,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.107.337.650,00	1.797.628.840,00	690.291.190,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.107.337.650,00	1.797.628.840,00	690.291.190,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang	579.088.200,00	619.214.400,00	40.126.200,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	150 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	150 Orang	172.200.000,00	336.840.000,00	164.640.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	87.087.000,00	147.142.440,00	60.055.440,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
						Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatannya UPT RSBKW Kediri	180 Orang	Jumlah PMKS lainnya selain penyandang HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan perbekalan kesehatannya UPT RSBKW Kediri	180 Orang		#VALUE!		UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	150 Orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	150 Orang	226.502.450,00	602.017.000,00	375.514.550,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	150 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	150 Orang	26.560.000,00	47.280.000,00	20.720.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 6 4 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	15.900.000,00	45.135.000,00	29.235.000,00	UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI	DINAS SOSIAL
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.499.856.960,00		#VALUE!	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.627.954.960,00	1.757.501.640,00	129.546.680,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					59.328.000,00	61.092.000,00	1.764.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	59.328.000,00	61.092.000,00	1.764.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Balai PMKS Sidoarjo	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT Balai PMKS Sidoarjo	1 Dokumen					
1 6 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					76.473.760,00	140.528.080,00	64.054.320,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4.637.760,00	7.951.560,00	3.313.800,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT Balai PMKS Sidoarjo	12 Laporan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan di UPT Balai PMKS Sidoarjo	12 Laporan					
1 6 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	10.000.000,00	16.220.840,00	6.220.840,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1 PAKET	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT BALAI PMKS SIDOARJO	1 PAKET					
1 6 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	6.000.000,00	8.696.000,00	2.696.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT Balai PMKS Sidoarjo	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT Balai PMKS Sidoarjo	1 Paket					
1 6 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.062.880,00	62.880,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.400.000,00	3.036.800,00	636.800,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	38.436.000,00	94.560.000,00	56.124.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.234.153.200,00	1.394.022.960,00	159.869.760,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	-	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.132.153.200,00	1.292.022.960,00	159.869.760,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					258.000.000,00	161.858.600,00	(96.141.400,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	58.000.000,00	43.473.800,00	(14.526.200,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 1 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	118.384.800,00	18.384.800,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.871.902.000,00	1.970.885.080,00	98.983.080,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti					1.871.902.000,00	1.970.885.080,00	98.983.080,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.05 1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang	1.408.302.000,00	1.409.895.600,00	1.593.600,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1 6 4 1.05 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	150 orang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	150 orang	75.000.000,00	82.578.400,00	7.578.400,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	6	4	1.05	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	150 Orang	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	150 Orang	12.000.000,00	9.805.200,00	(2.194.800,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	150 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	150 orang	6.000.000,00	5.779.500,00	(220.500,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	150 orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	150 orang	32.000.000,00	52.800.000,00	20.800.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	150 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	150 Orang	63.000.000,00	110.727.000,00	47.727.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	150 orang	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	150 orang	100.000.000,00	123.600.000,00	23.600.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	150 orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	150 orang	600.000,00	224.380,00	(375.620,00)	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	9	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	150 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	150 orang	169.000.000,00	169.000.000,00	-	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6	4	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	150 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	150 Orang	6.000.000,00	6.475.000,00	475.000,00	BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO	DINAS SOSIAL
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1.472.891.920,00	2.055.627.040	582.735.120,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.023.604.575,00	1.002.120.635,00	(21.483.940,00)	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					45.300.000,00	45.900.000,00	600.000,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	45.300.000,00	45.900.000,00	600.000,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PTKS Malang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di UPT PTKS Malang	1 Dokumen	#VALUE!				UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					189.356.655,00	154.773.195,00	(34.583.460,00)	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	19.721.000,00	19.721.000,00	-	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PTKS MALANG	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan di UPT PTKS MALANG	1 Paket	#VALUE!				UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	21.106.000,00	21.205.940,00	99.940,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PTKS MALANG	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan di UPT PTKS MALANG	1 Paket	#VALUE!				UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.725.000,00	11.889.600,00	1.164.600,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.939.655,00	1.939.655,00	-	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	135.865.000,00	100.017.000,00	(35.848.000,00)	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					742.935.920,00	744.635.440,00	1.699.520,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUAR SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUAR SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	6	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					900.000,00	900.000,00	-	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.600.000,00	91.341.520,00	741.520,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	651.435.920,00	652.393.920,00	958.000,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.012.000,00	56.812.000,00	10.800.000,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.012.000,00	56.812.000,00	10.800.000,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					449.287.345,00	1.053.506.405,00	604.219.060,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi					449.287.345,00	1.053.506.405,00	604.219.060,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
1	6	2	1.02	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	449.287.345,00	1.053.506.405,00	604.219.060,00	UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG	DINAS SOSIAL
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					233.958.923.000,00		#VALUE!	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					224.083.923.000,00	211.262.082.592,00	(12.821.840.408,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.094.957.000,00	1.001.147.000,00	(93.810.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	509.905.000,00	343.861.200,00	(166.043.800,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32.000.000,00	31.665.200,00	(334.800,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.407.000,00	13.407.000,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	71.000.000,00	144.526.500,00	73.526.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	31.300.000,00	30.342.100,00	(957.900,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	206.293.000,00	206.293.000,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	231.052.000,00	231.052.000,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					214.438.966.000,00	199.909.257.580,00	(14.529.708.420,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	754 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	754 Orang/ Bulan	211.788.966.000,00	197.612.251.000,00	(14.176.715.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.050.000.000,00	843.848.000,00	(206.152.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.200.000.000,00	968.532.980,00	(231.467.020,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	355.000.000,00	391.636.400,00	36.636.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	19.354.100,00	4.354.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	56.960.100,00	41.960.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000,00	16.675.000,00	1.675.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1.664.268.208,00	1.221.231.297,00	(443.036.911,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	900 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	900 Paket	37.170.000,00	37.170.000,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Laporan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Laporan	709.687.309,00	781.752.979,00	72.065.670,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	243.800.000,00	223.459.818,00	(20.340.182,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	286.141.454,00	58.242.000,00	(227.899.454,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	387.469.445,00	120.606.500,00	(266.862.945,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.825.644.958,00	2.483.097.930,00	657.452.972,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	38.083.900,00	35.726.400,00	(2.357.500,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	184.686.580,00	642.624.100,00	457.937.520,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	809.310.278,00	887.130.630,00	77.820.352,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	375.964.800,00	354.771.800,00	(21.193.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	64.011.600,00	63.979.000,00	(32.600,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	24.747.800,00	9.642.000,00	(15.105.800,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	264.840.000,00	264.324.000,00	(516.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	64.000.000,00	224.900.000,00	160.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					136.760.800,00	0,00	(136.760.800,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	24 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	24 Unit	136.760.800,00	0,00	(136.760.800,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.017.028.489,00	5.598.515.183,00	1.581.486.694,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	924.553.000,00	1.058.679.160,00	134.126.160,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.056.475.489,00	4.503.836.023,00	1.447.360.534,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					906.297.545,00	1.048.833.602,00	142.536.057,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	423.789.500,00	324.175.000,00	(99.614.500,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	186.287.200,00	198.789.600,00	12.502.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	280.692.545,00	510.369.002,00	229.676.457,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.528.300,00	15.500.000,00	(28.300,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					154.497.363,00	251.371.810,00	96.874.447,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					154.497.363,00	251.371.810,00	96.874.447,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	125.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	2	1.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	6 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja	6 Perusahaan	29.497.363,00	26.371.810,00	(3.125.553,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.000.000.000,00	1.891.587.175,00	(108.412.825,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					1.305.000.000,00	1.237.044.175,00	(67.955.825,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	110 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	110 Orang	410.000.000,00	500.000.000,00	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	58 Orang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	58 Orang	895.000.000,00	737.044.175,00	(157.955.825,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					310.000.000,00	278.500.000,00	(31.500.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.02	1 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	5 LPK	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	5 LPK	310.000.000,00	278.500.000,00	(31.500.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					385.000.000,00	376.043.000,00	(8.957.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.04	1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	50 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	50 Dokumen	385.000.000,00	376.043.000,00	(8.957.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2.470.502.637,00	2.630.260.165,00	159.757.528,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.349.646.540,00	1.477.705.160,00	128.058.620,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.01	2 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	100 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	100 Orang	594.646.540,00	525.372.050,00	(69.274.490,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.01	3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 Orang	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 Orang	105.000.000,00	52.333.110,00	(52.666.890,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.01	5 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	150 Orang	650.000.000,00	900.000.000,00	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000,00	6.314.000,00	(3.686.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.02	1 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	10 Lembaga	10.000.000,00	6.314.000,00	(3.686.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					544.995.727,00	679.180.635,00	134.184.908,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	1 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	218.703.632,00	102.888.540,00	(115.815.092,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	326.292.095,00	576.292.095,00	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					565.860.370,00	467.060.370,00	(98.800.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04	1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	501.708.617,00	402.908.617,00	(98.800.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04	2 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	30 Perusahaan	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	30 Perusahaan	64.151.753,00	64.151.753,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					3.050.000.000,00	2.630.006.400,00	(419.993.600,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					424.666.955,00	284.337.289,00	(140.329.666,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.01	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	85.604.012,00	0,00	(85.604.012,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.01	2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	25 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	25 Perusahaan	74.232.754,00	0,00	(74.232.754,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.01	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	77 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	77 Laporan	264.830.189,00	284.337.289,00	19.507.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	7	5	1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		2.210.302.704,00	1.999.455.120,00	(210.847.584,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	7	5	1.02	1	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 Perkara	119.597.502,00	129.283.926,00	9.686.424,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	40 Perkara	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	369.715.706,00	332.892.640,00	(36.823.066,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Organisasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1.093.622.000,00	(354.988.742,00)	#VALUE!	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	20 Lembaga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	180.000.000,00	180.000.000,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.02	5	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	92.378.754,00	263.656.554,00	171.277.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					415.030.341,00	346.213.991,00	(68.816.350,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03	1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Jumlah Penetapan UMP	33.672.791,00	38.242.191,00	4.569.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03	3	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	Jumlah penetapan UMK	301.494.000,00	307.971.800,00	6.477.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	5	1.03	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	79.863.550,00	0,00	(79.863.550,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					2.200.000.000,00	2.657.522.400,00	457.522.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					2.200.000.000,00	2.657.522.400,00	457.522.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	400 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	970.000.000,00	1.066.814.400,00	96.814.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	25 Kasus	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	590.000.000,00	782.854.500,00	192.854.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	400 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	640.000.000,00	807.853.500,00	167.853.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					1.500.000.000,00		#VALUE!	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	(350.000.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	(350.000.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	42 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	350.003.098,00	317.576.098,00	(32.427.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	100 KK	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	220.869.908,00	107.820.885,00	(113.049.023,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	25 KK	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	65.372.296,00	65.372.296,00	-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 Orang	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	468.988.127,00	362.571.150,00	(106.416.977,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	3	1.01	18	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	3 Lokasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	394.766.571,00	296.659.571,00	(98.107.000,00)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.207.020.000,00		#VALUE!	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.100.000.000,00	858.000.000,00	(242.000.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					156.995.000,00	60.000.000,00	(96.995.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156.995.000,00	60.000.000,00	(96.995.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					13.005.000,00	20.000.000,00	6.995.000,00	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.005.000,00	10.000.000,00	6.995.000,00	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.400.000,00	10.000.000,00	3.600.000,00	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					900.000.000,00	748.000.000,00	(152.000.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	165.000.000,00	(35.000.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	700.000.000,00	583.000.000,00	(117.000.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000,00	30.000.000,00	-	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					5.050.000.000,00	5.667.000.000,00	617.000.000,00	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					5.050.000.000,00	5.667.000.000,00	617.000.000,00	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	2.980.000.000,00	4.267.000.000,00	1.287.000.000,00	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	2.070.000.000,00	1.400.000.000,00	(670.000.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					57.020.000,00	0,00	(57.020.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					57.020.000,00	0,00	(57.020.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5 Orang	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	27.020.000,00	0,00	(27.020.000,00)	UPT BLK SINGOSARI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.750.000.000,00		#VALUE!	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					750.000.000,00	670.000.000,00	(80.000.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					63.120.000,00	0,00	(63.120.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	63.120.000,00	0,00	(63.120.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					9.305.200,00	0,00	(9.305.200,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.985.200,00	0,00	(4.985.200,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.320.000,00	0,00	(4.320.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					640.860.500,00	662.138.351,00	21.277.851,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	111.585.600,00	127.103.000,00	15.517.400,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Dokumen	529.274.900,00	535.035.351,00	5.760.451,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.714.300,00	7.861.649,00	(28.852.651,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	26.960.000,00	7.861.649,00	(19.098.351,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	9.754.300,00	0,00	(9.754.300,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.975.000.000,00	4.650.000.000,00	1.675.000.000,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.975.000.000,00	4.650.000.000,00	1.675.000.000,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	2.600.000.000,00	3.950.000.000,00	1.350.000.000,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	2 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	2 Unit	375.000.000,00	700.000.000,00	325.000.000,00	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	20 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	20 Orang	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK JEMBER	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					5.956.476.460,00		#VALUE!	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.100.000.000,00	900.000.000,00	(200.000.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					78.828.000,00	0,00	(78.828.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.828.000,00	0,00	(78.828.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					165.648.400,00	52.186.400,00	(113.462.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.785.000,00	6.785.000,00	-	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.987.100,00	36.259.500,00	(24.727.600,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.220.300,00	7.341.900,00	2.121.600,00	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.600.000,00	0,00	(20.600.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.256.000,00	0,00	(70.256.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					818.963.600,00	813.253.600,00	(5.710.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.508.600,00	140.873.600,00	6.365.000,00	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	684.455.000,00	672.380.000,00	(12.075.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.560.000,00	34.560.000,00	(2.000.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	18.560.000,00	18.560.000,00	-	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.819.976.460,00	6.479.476.460,00	1.659.500.000,00	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					4.819.976.460,00	6.479.476.460,00	1.659.500.000,00	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	608 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	608 Orang	3.300.000.000,00	4.539.176.000,00	1.239.176.000,00	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	23 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	23 Unit	1.519.976.460,00	1.940.300.460,00	420.324.000,00	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					36.500.000,00	0,00	(36.500.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					36.500.000,00	0,00	(36.500.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	2 Peserta	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	2 Peserta	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	10 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	10 Orang	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	UPT BLK PASURUAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.023.200.000,00	6.525.482.427	2.502.282.427,00	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					684.665.663,00	630.000.000,00	(54.665.663,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.872.000,00	58.872.000,00	-	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.872.000,00	58.872.000,00	-	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					16.588.163,00	8.604.757,00	(7.983.406,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4.860.276,00	1.515.476,00	(3.344.800,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.602.289,00	3.448.863,00	(2.153.426,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.325.598,00	1.840.418,00	(2.485.180,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					583.828.000,00	559.537.957,00	(24.290.043,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170.800.000,00	185.303.146,00	14.503.146,00	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	413.028.000,00	374.234.811,00	(38.793.189,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.377.500,00	2.985.286,00	(22.392.214,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit	15.214.100,00	1.600.486,00	(13.613.614,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	10.163.400,00	1.384.800,00	(8.778.600,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.273.200.000,00	4.948.200.000,00	1.675.000.000,00	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					3.273.200.000,00	4.948.200.000,00	1.675.000.000,00	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	416 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	416 Orang	2.500.000.000,00	3.975.000.000,00	1.475.000.000,00	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	12 Bangunan/Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	12 Bangunan/Unit	773.200.000,00	973.200.000,00	200.000.000,00	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					65.334.337,00	0,00	(65.334.337,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					65.334.337,00	0,00	(65.334.337,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	75 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	75 Orang	65.334.337,00	0,00	(65.334.337,00)	UPT BLK MOJOKERTO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.614.500.000,00		#VALUE!	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					900.000.000,00	727.516.000,00	(172.484.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					40.260.000,00	0,00	(40.260.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.260.000,00	0,00	(40.260.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.002.880,00	0,00	(25.002.880,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.979.030,00	0,00	(6.979.030,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.423.850,00	0,00	(4.423.850,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 7 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					834.737.120,00	727.516.000,00	(107.221.120,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.203.320,00	174.238.772,00	(92.964.548,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	567.533.800,00	553.277.228,00	(14.256.572,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.694.500.000,00	5.994.500.000,00	2.300.000.000,00	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					3.694.500.000,00	5.994.500.000,00	2.300.000.000,00	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352 Orang	2.400.000.000,00	3.750.000.000,00	1.350.000.000,00	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	35 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	35 Unit	1.294.500.000,00	2.244.500.000,00	950.000.000,00	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK JOMBANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.996.000.000,00	#VALUE!		UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					700.000.000,00	635.000.000,00	(65.000.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					70.766.000,00	66.864.000,00	(3.902.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.766.000,00	66.864.000,00	(3.902.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					600.800.000,00	568.136.000,00	(32.664.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.800.000,00	151.480.800,00	20.680.800,00	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 paket	470.000.000,00	416.655.200,00	(53.344.800,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28.434.000,00	0,00	(28.434.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	28.434.000,00	0,00	(28.434.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.246.000.000,00	4.171.000.000,00	1.925.000.000,00	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.246.000.000,00	4.171.000.000,00	1.925.000.000,00	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	240 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	240 Orang	2.000.000.000,00	3.675.000.000,00	1.675.000.000,00	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 gedung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 gedung	246.000.000,00	496.000.000,00	250.000.000,00	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	UPT BLK TUBAN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.200.000.000,00	#VALUE!		UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					700.000.000,00	738.778.962,00	38.778.962,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.460.000,00	0,00	(53.460.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.460.000,00	0,00	(53.460.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.240.000,00	10.526.370,00	(27.713.630,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.200.000,00	873.600,00	(2.326.400,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.240.000,00	1.776.500,00	(8.463.500,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	972.800,00	(6.027.200,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000,00	3.434.200,00	(6.565.800,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.000.000,00	1.669.270,00	(4.330.730,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					598.300.000,00	721.602.592,00	123.302.592,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	88.988.800,00	118.981.400,00	29.992.600,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	509.311.200,00	602.621.192,00	93.309.992,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.000.000,00	6.650.000,00	(3.350.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	10.000.000,00	6.650.000,00	(3.350.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.459.002.000,00	4.506.221.038,00	2.047.219.038,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.459.002.000,00	4.506.221.038,00	2.047.219.038,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	320 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	320 Orang	1.800.000.000,00	3.507.434.038,00	1.707.434.038,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	28 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	28 Unit	659.002.000,00	998.787.000,00	339.785.000,00	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					40.998.000,00	0,00	(40.998.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					40.998.000,00	0,00	(40.998.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	15 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	15 Orang	40.998.000,00	0,00	(40.998.000,00)	UPT BLK NGANJUK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.090.561.000,00		#VALUE!	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.105.000.000,00	1.355.234.700,00	250.234.700,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					71.280.000,00	72.276.000,00	996.000,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.280.000,00	72.276.000,00	996.000,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					70.451.700,00	70.451.700,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9.527.500,00	9.527.500,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	4.532.000,00	4.532.000,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	3.724.800,00	3.724.800,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	28.539.400,00	28.539.400,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.128.000,00	24.128.000,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					938.095.900,00	1.187.334.600,00	249.238.700,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 7 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	255.670.300,00	504.909.000,00	249.238.700,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	682.425.600,00	682.425.600,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.172.400,00	25.172.400,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Paket	11.172.400,00	11.172.400,00	-	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					5.900.561.000,00	9.785.326.300,00	3.884.765.300,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					5.900.561.000,00	9.785.326.300,00	3.884.765.300,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	480 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	480 Orang	3.500.000.000,00	4.650.000.000,00	1.150.000.000,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	210.000.000,00	444.765.300,00	234.765.300,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	282 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	282 Unit	2.190.561.000,00	4.690.561.000,00	2.500.000.000,00	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	10 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	10 Orang	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	UPT BLK SURABAYA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.798.776.000,00		#VALUE!	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					680.000.000,00	712.397.353,00	32.397.353,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.260.000,00	0,00	(58.260.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		58.260.000,00	0,00	(58.260.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.107.210,00	4.718.270,00	(33.388.940,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.910.599,00	2.163.650,00	(12.746.949,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.156.531,00	0,00	(9.156.531,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.440.080,00	2.554.620,00	(7.885.460,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					563.132.790,00	697.679.083,00	134.546.293,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.200.600,00	162.200.600,00	51.000.000,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	451.932.190,00	535.478.483,00	83.546.293,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					20.500.000,00	10.000.000,00	(10.500.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	20.500.000,00	10.000.000,00	(10.500.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.068.776.000,00	4.807.378.647,00	738.602.647,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					4.068.776.000,00	4.807.378.647,00	738.602.647,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		2	7	3	1.01						1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	546 Orang
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Paket	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	16 Paket	1.268.776.000,00	1.518.776.000,00	250.000.000,00	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK SUMENEP	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.382.487.540,00		#VALUE!	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					701.949.100,00	600.000.000,00	(101.949.100,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					53.400.000,00	0,00	(53.400.000,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.400.000,00	0,00	(53.400.000,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					613.118.150,00	581.491.900,00	(31.626.250,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.676.445,00	0,00	(4.676.445,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	224.724.000,00	224.724.000,00	-	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	383.717.705,00	356.767.900,00	(26.949.805,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.430.950,00	18.508.100,00	(16.922.850,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	33.481.850,00	18.508.100,00	(14.973.750,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	1.949.100,00	0,00	(1.949.100,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.670.538.440,00	5.232.487.540,00	1.561.949.100,00	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					3.670.538.440,00	5.232.487.540,00	1.561.949.100,00	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	368 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	368 Orang	2.500.000.000,00	3.850.000.000,00	1.350.000.000,00	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	4 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	4 Unit	1.120.538.440,00	1.382.487.540,00	261.949.100,00	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	10 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	10 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK SITUBONDO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.878.000.000,00		#VALUE!	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					850.000.000,00	790.466.349,00	(59.533.651,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					60.060.000,00	55.260.000,00	(4.800.000,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	60.060.000,00	55.260.000,00	(4.800.000,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					20.292.720,00	24.516.511,00	4.223.791,00	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.856.257,00	2.846.500,00	(9.757,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2.097.739,00	2.076.800,00	(20.939,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.338.724,00	19.593.211,00	4.254.487,00	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					744.757.280,00	686.479.138,00	(58.278.142,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.737.526,00	171.028.200,00	(709.326,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	573.019.754,00	515.450.938,00	(57.568.816,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					24.890.000,00	24.210.700,00	(679.300,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	20.000.000,00	19.530.100,00	(469.900,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	4.890.000,00	4.680.600,00	(209.400,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.978.000.000,00	4.810.133.651,00	1.832.133.651,00	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.978.000.000,00	4.810.133.651,00	1.832.133.651,00	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	304 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	304 Orang	1.850.000.000,00	3.475.000.000,00	1.625.000.000,00	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	17 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	17 Unit	1.128.000.000,00	1.335.133.651,00	207.133.651,00	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	105 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	105 Orang	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK KEDIRI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.498.000.000,00		#VALUE!	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					900.000.000,00	820.000.000,00	(80.000.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					43.260.000,00	0,00	(43.260.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.260.000,00	0,00	(43.260.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.800.000,00	0,00	(21.800.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					824.440.000,00	820.000.000,00	(4.440.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	106.967.000,00	105.290.751,00	(1.676.249,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	717.473.000,00	714.709.249,00	(2.763.751,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.540.518.357,00	4.836.000.000,00	2.295.481.643,00	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					2.540.518.357,00	4.836.000.000,00	2.295.481.643,00	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	290 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	290 Orang	2.000.000.000,00	3.750.000.000,00	1.750.000.000,00	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 7 3 1.01 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	50.000.000,00	718.819.441,00	668.819.441,00	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	11 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	11 Unit	490.518.357,00	367.180.559,00	(123.337.798,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					57.481.643,00	0,00	(57.481.643,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					57.481.643,00	0,00	(57.481.643,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	35 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	35 Orang	37.481.643,00	0,00	(37.481.643,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	UPT BLK TULUNGAGUNG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.236.000.000,00	5.335.000.000	2.099.000.000,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					900.000.000,00	905.780.991,00	5.780.991,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					65.520.000,00	59.244.000,00	(6.276.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.520.000,00	59.244.000,00	(6.276.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					46.437.104,00	0,00	(46.437.104,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	17.768.628,00	0,00	(17.768.628,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	28.668.476,00	0,00	(28.668.476,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					729.617.896,00	821.536.991,00	91.919.095,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.389.600,00	193.280.800,00	17.891.200,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	554.228.296,00	628.256.191,00	74.027.895,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.425.000,00	25.000.000,00	(33.425.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	52.425.000,00	25.000.000,00	(27.425.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.271.000.000,00	3.690.219.009,00	1.419.219.009,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					2.271.000.000,00	3.690.219.009,00	1.419.219.009,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	304 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	304 Orang	1.900.000.000,00	3.317.169.009,00	1.417.169.009,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 3 1.01 3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	13 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	13 Unit	371.000.000,00	373.050.000,00	2.050.000,00	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 4 1.03 3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20 Orang	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	UPT BLK MADIUN	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.346.000.000,00		#VALUE!	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					650.000.000,00	650.177.148,00	177.148,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					69.924.000,00	0,00	(69.924.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.924.000,00	0,00	(69.924.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2 7 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					558.682.000,00	650.177.148,00	91.495.148,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.691.200,00	147.798.400,00	21.107.200,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	431.990.800,00	502.378.748,00	70.387.948,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					21.394.000,00	0,00	(21.394.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	21.394.000,00	0,00	(21.394.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.646.000.000,00	4.165.822.852,00	1.519.822.852,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					2.646.000.000,00	4.165.822.852,00	1.519.822.852,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	376 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	376 Orang	2.400.000.000,00	3.802.000.000,00	1.402.000.000,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20 Lembaga	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	6 Paket	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	6 Paket	220.000.000,00	363.822.852,00	143.822.852,00	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT BLK PONOROGO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.650.000.000,00	5.508.000.000	1.858.000.000,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					750.000.000,00	600.000.000,00	(150.000.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					56.460.000,00	0,00	(56.460.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	56.460.000,00	0,00	(56.460.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					10.951.850,00	4.666.500,00	(6.285.350,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.552.600,00	3.718.500,00	(834.100,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.399.250,00	948.000,00	(5.451.250,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					656.543.200,00	568.096.597,00	(88.446.603,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	134.832.000,00	134.140.800,00	(691.200,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	521.711.200,00	433.955.797,00	(87.755.403,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.044.950,00	27.236.903,00	1.191.953,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	15.144.950,00	19.667.003,00	4.522.053,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.900.000,00	7.569.900,00	(3.330.100,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.880.000.000,00	4.000.000.000,00	1.120.000.000,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi					2.880.000.000,00	4.000.000.000,00	1.120.000.000,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	400 Orang	2.500.000.000,00	3.600.000.000,00	1.100.000.000,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	8 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	8 Unit	380.000.000,00	400.000.000,00	20.000.000,00	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	7	4	1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	4	1.03	2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	5 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.03	3 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5 Orang	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT BLK BOJONEGORO	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.150.000.000,00		#VALUE!	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.400.000.000,00	1.246.660.000,00	(153.340.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86.824.000,00	0,00	(86.824.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	86.824.000,00	0,00	(86.824.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				14.218.000,00	2.067.200,00	(12.150.800,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.150.000,00	0,00	(10.150.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	900.000,00	627.200,00	(272.800,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.168.000,00	1.440.000,00	(1.728.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.263.671.140,00	1.205.592.800,00	(58.078.340,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000,00	286.000.000,00	16.000.000,00	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	993.671.140,00	919.592.800,00	(74.078.340,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.286.860,00	39.000.000,00	3.713.140,00	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	10 Unit	35.286.860,00	39.000.000,00	3.713.140,00	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3.735.000.000,00	5.213.340.000,00	1.478.340.000,00	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	3	1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				3.735.000.000,00	5.213.340.000,00	1.478.340.000,00	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	3	1.01	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	448 Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	448 Orang	2.800.000.000,00	4.300.000.000,00	1.500.000.000,00	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.01	3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	10 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	10 Unit	935.000.000,00	913.340.000,00	(21.660.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	4	1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	4	1.03	3 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	60 Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	60 Orang	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	UPT BLK WONOJATI MALANG	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.150.000.000,00		#VALUE!	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.750.000.000,00	2.378.779.650,00	628.779.650,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86.136.000,00	81.876.000,00	(4.260.000,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	86.136.000,00	81.876.000,00	(4.260.000,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				85.636.880,00	77.406.080,00	(8.230.800,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2	7	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.484.400,00	8.484.400,00	-	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.802.900,00	0,00	(12.802.900,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.695.900,00	5.695.900,00	-	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.461.255,00	10.237.355,00	776.100,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.088.425,00	2.088.425,00	-	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Paket	900.000,00	900.000,00	-	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	46.204.000,00	50.000.000,00	3.796.000,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					70.600.000,00	632.016.000,00	561.416.000,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	20.600.000,00	592.016.000,00	571.416.000,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.478.627.120,00	1.568.121.570,00	89.494.450,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	372.157.384,00	358.453.036,00	(13.704.348,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.106.469.736,00	1.209.668.534,00	103.198.798,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					29.000.000,00	19.360.000,00	(9.640.000,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	11.500.000,00	6.550.000,00	(4.950.000,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Mesin Lainnya Yang dipelihara	1 Unit	Jumlah Paket Pemeliharaan Mesin Lainnya Yang dipelihara	1 Unit	10.500.000,00	12.810.000,00	2.310.000,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Paket Penyediaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					1.400.000.000,00	2.180.501.808,00	780.501.808,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					1.400.000.000,00	2.180.501.808,00	780.501.808,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	6	1.01	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	150 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	150 Perusahaan	1.400.000.000,00	2.180.501.808,00	780.501.808,00	UPT KESELAMATAN KERJA (K2)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.100.000.000,00		#VALUE!	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.100.000.000,00	958.139.000,00	(141.861.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.472.000,00	45.120.000,00	(2.352.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47.472.000,00	45.120.000,00	(2.352.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					101.062.500,00	22.246.900,00	(78.815.600,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.094.200,00	3.950.000,00	(8.144.200,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.817.000,00	13.158.000,00	(45.659.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.691.300,00	3.698.900,00	(23.992.400,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.460.000,00	1.440.000,00	(1.020.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					839.017.900,00	788.098.900,00	(50.919.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.100.000,00	4.300.000,00	(1.800.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	469.127.300,00	550.419.300,00	81.292.000,00	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	363.790.600,00	233.379.600,00	(130.411.000,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					112.447.600,00	102.673.200,00	(9.774.400,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	50.975.000,00	57.142.200,00	6.167.200,00	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	61.472.600,00	45.531.000,00	(15.941.600,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					2.000.000.000,00	2.521.861.000,00	521.861.000,00	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					560.511.250,00	478.113.650,00	(82.397.600,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	560.511.250,00	478.113.650,00	(82.397.600,00)	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					1.439.488.750,00	2.043.747.350,00	604.258.600,00	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20000 Orang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20000 Orang	1.203.234.480,00	1.500.247.334,00	297.012.854,00	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	4	1.04	3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	20000 Orang	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	20000 Orang	236.254.270,00	543.500.016,00	307.245.746,00	UPT PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (P2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.920.000.000,00	1.902.226.800	(17.773.200,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					620.000.000,00	616.403.560,00	(3.596.440,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					64.104.000,00	59.232.000,00	(4.872.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	64.104.000,00	59.232.000,00	(4.872.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					112.578.000,00	109.548.368,00	(3.029.632,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	2.367.000,00	(633.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	16.400.000,00	1.287.600,00	(15.112.400,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	16.400.000,00	33.867.768,00	17.467.768,00	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000,00	1.440.000,00	(560.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.778.000,00	70.586.000,00	(4.192.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	7	1	1.07			29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08			382.593.500,00	427.662.892,00	45.069.392,00	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.354.500,00	0,00	(1.354.500,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.219.000,00	30.857.000,00	(6.362.000,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	344.020.000,00	396.805.892,00	52.785.892,00	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09			31.724.500,00	19.960.300,00	(11.764.200,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	23.174.500,00	11.648.100,00	(11.526.400,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	8.550.000,00	8.312.200,00	(237.800,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3				1.300.000.000,00	1.003.596.440,00	(296.403.560,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	3	1.03			675.707.482,00	518.136.000,00	(157.571.482,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	3	1.03	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	300 Perusahaan	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	300 Perusahaan	675.707.482,00	518.136.000,00	(157.571.482,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	7	3	1.04			624.292.518,00	485.460.440,00	(138.832.078,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
2	7	3	1.04	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	4 Dokumen	624.292.518,00	485.460.440,00	(138.832.078,00)	UPT BALAI LATHAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (BLP2TK)	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TOTAL										313.405.944.000,00		(313.405.944.000,00)		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					26.067.019.360,00	29.602.727.761	3.535.708.401,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.354.230.200,00	23.163.187.234,00	1.808.957.034,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					450.929.720,00	495.225.458,00	44.295.738,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	8	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	319.754.310,00	401.675.048,00	81.920.738,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.988.000,00	6.368.000,00	(11.620.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.234.000,00	3.734.000,00	(12.500.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.488.000,00	4.288.000,00	(8.200.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.240.000,00	4.288.000,00	(9.952.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	43.897.970,00	45.897.970,00	2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	26.327.440,00	28.974.440,00	2.647.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					18.028.522.040,00	18.517.083.040,00	488.561.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	16.978.172.000,00	17.446.733.000,00	468.561.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	508.320.000,00	473.184.000,00	(35.136.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	437.364.290,00	492.500.290,00	55.136.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	42.200.000,00	42.200.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.543.000,00	9.543.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	21.406.500,00	21.406.500,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	24.953.000,00	24.953.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.563.250,00	6.563.250,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					614.342.440,00	793.019.100,00	178.676.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	8	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	1 Paket	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00	52.666.500,00	2.666.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	43.000.000,00	68.005.000,00	25.005.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen				#VALUE!	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	496.342.440,00	614.467.200,00	118.124.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	25.000.000,00	57.880.400,00	32.880.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					404.794.034,00	743.475.249,00	338.681.215,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	20.350.000,00	14.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.635.000,00	228.268.600,00	173.633.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	51.584.750,00	66.286.460,00	14.701.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	54.768.284,00	106.760.689,00	51.992.405,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	7.000.000,00	8.580.000,00	1.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	83.000.000,00	97.850.000,00	14.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	143.116.000,00	183.429.500,00	40.313.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.690.000,00	31.950.000,00	27.260.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					941.420.395,00	1.455.116.491,00	513.696.096,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	484.658.795,00	484.658.795,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	456.761.600,00	970.457.696,00	513.696.096,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					839.221.571,00	1.016.767.896,00	177.546.325,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	8	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	163.402.529,00	203.000.000,00	39.597.471,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	45.000.000,00	66.057.600,00	21.057.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	599.819.042,00	665.500.296,00	65.681.254,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	82.210.000,00	52.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					75.000.000,00	142.500.000,00	67.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.13	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	75.000.000,00	142.500.000,00	67.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.270.000.000,00	1.519.803.000,00	249.803.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.01		Pelebngaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					385.000.000,00	485.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	55 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	55 Perangkat Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.01	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	55 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	55 Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi					505.000.000,00	504.803.000,00	(197.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	430.000.000,00	432.795.000,00	2.795.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	2	1.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	25 Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	25 Organisasi	75.000.000,00	72.008.000,00	(2.992.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	8	2	1.03			380.000.000,00	530.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	8	2	1.03	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	380.000.000,00	530.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					381.729.720,00	596.817.220,00	215.087.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					356.729.720,00	396.017.220,00	39.287.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	62.500.000,00	101.790.500,00	39.290.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	55 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	55 Perangkat Daerah	294.229.720,00	294.226.720,00	(3.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					25.000.000,00	200.800.000,00	175.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Orang	25.000.000,00	175.000.000,00	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					1.249.200.000,00	1.249.203.000,00	3.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					1.099.200.000,00	1.099.203.000,00	3.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	81.657.386,00	38.236.100,00	(43.421.286,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	100.754.024,00	100.754.024,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	916.788.590,00	960.212.876,00	43.424.286,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi					130.000.000,00	130.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.02	3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	8	4	1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	4	1.03	1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Layanan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			330.929.720,00	331.726.720,00	797.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	5	1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			330.929.720,00	331.726.720,00	797.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	5	1.01	1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	60.667.000,00	10.667.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	5	1.01	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1 Dokumen	280.929.720,00	271.059.720,00	(9.870.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			1.249.718.400,00	1.433.222.160,00	183.503.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	6	1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			251.198.160,00	500.154.760,00	248.956.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	6	1.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	251.198.160,00	500.154.760,00	248.956.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	6	1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			998.520.240,00	933.067.400,00	(65.452.840,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	6	1.02	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	500 Orang	998.520.240,00	933.067.400,00	(65.452.840,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			231.211.320,00	603.467.060,00	372.255.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7	1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			231.211.320,00	565.517.060,00	334.305.740,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7	1.01	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	38 Organisasi	231.211.320,00	164.200.480,00	(67.010.840,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			927.808.160,00	1.534.808.160	607.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			205.000.000,00	504.244.760,00	299.244.760,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	12	2	1.01			145.000.000,00	445.540.000,00	300.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	12	2	1.01	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	38 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	38 Dokumen	145.000.000,00	445.540.000,00	300.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	2	1.03							60.000.000,00	58.704.760,00	(1.295.240,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	2	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	60.000.000,00	58.704.760,00	(1.295.240,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	3								125.000.000,00	123.940.400,00	(1.059.600,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	3	1.01							65.000.000,00	65.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	3	1.01	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	38 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	38 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	3	1.03							60.000.000,00	58.940.400,00	(1.059.600,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	3	1.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	60.000.000,00	58.940.400,00	(1.059.600,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4								225.000.000,00	543.888.000,00	318.888.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4	1.01							100.000.000,00	387.228.000,00	287.228.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4	1.01	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	85.000.000,00	168.700.000,00	83.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4	1.01	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	218.528.000,00	203.528.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4	1.02							80.000.000,00	80.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4	1.02	3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	4	1.02	4	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	12	4	1.03			45.000.000,00	76.660.000,00	31.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN				
2	12	4	1.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	38 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	38 Orang	45.000.000,00	76.660.000,00	31.660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					372.808.160,00	155.735.000,00	(217.073.160,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	5	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan					372.808.160,00	155.735.000,00	(217.073.160,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	5	1.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	332.808.160,00	44.253.000,00	(288.555.160,00)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	12	5	1.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen	40.000.000,00	111.482.000,00	71.482.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					980.929.720,00	1.236.554.720	255.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					330.929.720,00	330.929.720,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	2	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					330.929.720,00	330.929.720,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	2	1.01	3	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	330.929.720,00	330.929.720,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	3	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	3	1.01	2	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					550.000.000,00	800.000.000,00	250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	4	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					100.000.000,00	133.800.000,00	33.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	4	1.01	6	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	38 Organisasi	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	38 Organisasi	50.000.000,00	66.900.000,00	16.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	14	4	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1 Dokumen	50.000.000,00	66.900.000,00	16.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	14	4	1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			450.000.000,00	666.200.000,00	216.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	14	4	1.02	4 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Dokumen	450.000.000,00	666.200.000,00	216.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.907.737.760,00	2.384.261.726	476.523.966,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			666.000.000,00	810.039.490,00	144.039.490,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.500.000,00	4.600.000,00	3.100.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1	1.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	500.000,00	3.600.000,00	3.100.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			11.500.000,00	132.172.200,00	120.672.200,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	86.482.200,00	83.982.200,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	11.790.000,00	9.290.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	5.200.000,00	2.700.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000,00	10.720.000,00	9.220.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	17.980.000,00	15.480.000,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			634.000.000,00	639.373.650,00	5.373.650,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	214.000.000,00	180.250.000,00	(33.750.000,00)	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.000.000,00	459.123.650,00	39.123.650,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.000.000,00	33.011.440,00	16.011.440,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	13.000.000,00	21.760.640,00	8.760.640,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.000.000,00	11.250.800,00	7.250.800,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	1	1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan			2.000.000,00	882.200,00	(1.117.800,00)	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		
2	8	1	1.13	3 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	2.000.000,00	882.200,00	(1.117.800,00)	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			917.737.760,00	1.022.307.807,00	104.570.047,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	8	3	1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					917.737.760,00	1.022.307.807,00	104.570.047,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.02	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	35 Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	35 Orang	757.737.760,00	921.942.807,00	164.205.047,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	3	1.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	35 Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	35 Layanan	160.000.000,00	100.365.000,00	(59.635.000,00)	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					324.000.000,00	438.544.429,00	114.544.429,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7	1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi					324.000.000,00	438.544.429,00	114.544.429,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7	1.02	1 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	129.000.000,00	296.969.429,00	167.969.429,00	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7	1.02	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50 Layanan	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	50 Layanan	170.000.000,00	117.135.000,00	(52.865.000,00)	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	8	7	1.02	4 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	25.000.000,00	24.440.000,00	(560.000,00)	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
TOTAL									29.883.495.000,00		(29.883.495.000,00)		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					209.068.502.000,00	184.415.121.000	(24.653.381.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					206.505.502.000,00	180.212.121.000,00	(26.293.381.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					800.000.000,00	800.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	375.000.000,00	374.300.000,00	(700.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.040.000,00	40.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.040.000,00	40.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.040.000,00	40.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.040.000,00	40.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	5.040.000,00	40.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	400.000.000,00	400.500.000,00	500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					203.054.926.616,00	176.721.545.616,00	(26.333.381.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1000 Orang/Bulan	190.667.569.000,00	164.334.188.000,00	(26.333.381.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	11.787.357.616,00	11.787.357.616,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	9	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					
2	9	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					4.000.000,00	15.030.000,00	11.030.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1.000.000,00	2.010.000,00	1.010.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.000.000,00	4.020.000,00	3.020.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.000.000,00	2.010.000,00	1.010.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.000.000,00	6.990.000,00	5.990.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.000.000,00	20.220.000,00	16.220.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000,00	8.735.000,00	7.735.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000,00	5.150.000,00	4.150.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.000.000,00	4.660.000,00	3.660.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1.000.000,00	1.675.000,00	675.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					170.635.000,00	142.816.858,00	(27.818.142,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000,00	25.154.500,00	24.154.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.000.000,00	47.814.958,00	46.814.958,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	2.908.000,00	1.908.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	2.928.000,00	1.928.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	1.085.400,00	85.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.000.000,00	1.085.400,00	85.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000,00	1.499.600,00	499.600,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	78.976.000,00	44.120.000,00	(34.856.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	32.709.000,00	9.150.000,00	(23.559.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	51.950.000,00	7.071.000,00	(44.879.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					64.461.000,00	23.402.500,00	(41.058.500,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	9	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	32.461.000,00	18.065.500,00	(14.395.500,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	32.000.000,00	5.337.000,00	(26.663.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.026.479.384,00	1.995.132.191,00	(31.347.193,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	661.790.000,00	763.500.000,00	101.710.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	8.632.800,00	(11.367.200,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.341.689.384,00	1.217.999.391,00	(123.689.993,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					381.000.000,00	493.973.835,00	112.973.835,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	150.000.000,00	238.192.500,00	88.192.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	150.000.000,00	220.737.100,00	70.737.100,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	80.000.000,00	24.681.500,00	(55.318.500,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.000.000,00	10.362.735,00	9.362.735,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.478.000.000,00	3.203.000.000,00	725.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					1.700.000.000,00	2.325.000.000,00	625.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 Laporan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 Laporan	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	35 Laporan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	35 Laporan	1.150.000.000,00	1.750.000.000,00	600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7 Laporan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					53.000.000,00	53.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					725.000.000,00	825.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.04	1	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Dokumen	Jumlah Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Dokumen	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	3 Laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	3	1.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				60.000.000,00	60.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	9	4	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	9	4	1.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	0 Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	0 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
							1 Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen			#VALUE!	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	4	1.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					4.837.000.000,00	13.769.945.000,00	8.932.945.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.581.000.000,00	6.214.965.000,00	3.633.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				2.581.000.000,00	6.214.965.000,00	3.633.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	1.01	1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	2.581.000.000,00	6.214.965.000,00	3.633.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.819.000.000,00	5.085.565.000,00	3.266.565.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian					1.819.000.000,00	5.085.565.000,00	3.266.565.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	1.01	1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	6 Dokumen	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	6 Dokumen	1.569.000.000,00	4.785.565.000,00	3.216.565.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	3	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					437.000.000,00	2.469.415.000,00	2.032.415.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian					30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	1.01	1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					407.000.000,00	2.439.415.000,00	2.032.415.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	510 Kelompok	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		407.000.000,00	2.439.415.000,00	2.032.415.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.500.000.000,00		#VALUE!	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.032.068.000,00	1.082.068.000,00	50.000.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					97.068.000,00	84.108.000,00	(12.960.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	443.991.000,00	443.923.800,00	(67.200,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	1	1.06			125.000.000	126.124.650	1.124.650,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.000.000	9.943.000	(57.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	4.071.400,00	(928.600,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000,00	47.309.084	(2.690.916,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1.363.000,00	3.355.000,00	1.992.000,00		
3	27	1	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000	4.620.000	(5.380.000,00)		
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	60.885.000	10.885.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			770.000.000	829.383.676	59.383.676,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	361.250.000,00	11.250.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	70.258.800,00	50.258.800,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	397.874.876	(2.125.124,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	41.747.840	1.747.840,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	40.000.000,00	41.747.840,00	1.747.840,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			467.932.000	467.932.000	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			467.932.000	467.932.000	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	1.02	2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah benih tersertifikasi tanaman hortikultura	2800 Kg	185.000.000,00	185.000.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih tersertifikasi tanaman pangan	50000 Ton	282.932.000,00	282.932.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			14.528.000.000,00		#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			620.000.000,00	1.016.625.300,00	396.625.300,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.02				65.000.000,00	83.628.000,00	18.628.000,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		65.000.000,00	83.628.000,00	18.628.000,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06				62.000.000,00	185.420.500,00	123.420.500,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.000.000,00	3.300.500,00	(1.699.500,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah pelayanan administrasi	12 B	Jumlah pelayanan administrasi				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.000.000,00	128.336.800,00	98.336.800,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah pelayanan administrasi	12 Bulan	Jumlah pelayanan administrasi				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan administrasi	12 Bulan	Jumlah pelayanan administrasi		4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pelayanan administrasi	12 Bulan	Jumlah pelayanan administrasi		3.000.000,00	1.483.200,00	(1.516.800,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.000.000,00	50.300.000,00	30.300.000,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah pelayanan administrasi	12 Bulan	Jumlah pelayanan administrasi				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08							443.000.000,00	695.640.800,00	252.640.800,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa	12 Bulan	Pelayanan Jasa		1.000.000,00	1.000.000,00	-	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Jasa	12 Bulan	Pelayanan Jasa		298.000.000,00	236.166.300,00	(61.833.700,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelayanan Jasa	12 Bulan	Pelayanan Jasa		20.000.000,00	9.268.500,00	(10.731.500,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Jasa	12 Bulan	Pelayanan Jasa		124.000.000,00	449.206.000,00	325.206.000,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09							50.000.000,00	51.936.000,00	1.936.000,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan barang	12 Bulan	Pemeliharaan barang		50.000.000,00	51.936.000,00	1.936.000,00	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	5								13.908.000.000,00	9.903.816.700,00	(4.004.183.300,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	5	1.01							13.908.000.000,00	9.903.816.700,00	(4.004.183.300,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	5	1.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Klinik Tanaman	1 Unit	Jumlah Klinik Tanaman		680.000.000,00	493.384.700,00	(186.615.300,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah laporan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura	200 Dokumen	Jumlah laporan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah lokasi menerapkan Manajemen Tanaman Sehat	1 Unit	Jumlah lokasi menerapkan Manajemen Tanaman Sehat				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
		Jumlah Pengujian mutu dan residu pestisida	140 Unit	Jumlah Pengujian mutu dan residu pestisida				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		Jumlah Petani Penerap MTS	30 Orang	Jumlah Petani Penerap MTS				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		Peningkatan Kelembagaan PPAH	1 Unit	Peningkatan Kelembagaan PPAH				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		Peningkatan Ketrampilan Petani dalam Pengendalian OPT (Petani Pengama	30 Orang	Peningkatan Ketrampilan Petani dalam Pengendalian OPT (Petani Pengama				#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
3	27	5	1.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9.410.432.000,00	(3.817.568.000,00)	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						Peningkatan Kemampuan Petugas dan Petani Dalam antisipasi DPI	150 Orang	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Petani Dalam antisipasi DPI		#VALUE!	UPT PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.200.000.000,00	#VALUE!	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				830.000.000,00	636.642.835,00	(193.357.165,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				70.008.000,00	65.208.000,00	(4.800.000,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.008.000,00	65.208.000,00	(4.800.000,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				138.931.000,00	145.756.760,00	6.825.760,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18.816.976,00	8.951.100,00	(9.865.876,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.801.399,00	53.857.960,00	18.056.561,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13.614.958,00	14.505.700,00	890.742,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.817.667,00	12.922.000,00	(2.895.667,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.880.000,00	55.520.000,00	640.000,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				495.310.000,00	339.016.575,00	(156.293.425,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	112.222.000,00	112.222.000,00	-	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	383.088.000,00	226.794.575,00	(156.293.425,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				125.751.000,00	86.661.500,00	(39.089.500,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	76.415.000,00	41.733.000,00	(34.682.000,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49.336.000,00	44.928.500,00	(4.407.500,00)	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				370.000.000,00	613.357.165,00	243.357.165,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				370.000.000,00	613.357.165,00	243.357.165,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	9 Kelompok	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	370.000.000,00	613.357.165,00	243.357.165,00	UPT PELATHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.000.000.000,00	1.215.000.000	215.000.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				674.161.000,00	824.915.000,00	150.754.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				68.256.000,00	52.296.000,00	(15.960.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.256.000,00	52.296.000,00	(15.960.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	9	1	1.06				182.033.950,00	282.661.429	100.627.479,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.500.000,00	511.000,00	(2.989.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.632.950,00	67.047.220,00	17.414.270,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.459.000,00	1.575.500,00	(7.883.500,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4 Paket		4 Paket	12.000.000,00	4.912.709,00	(7.087.291,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	107.442.000,00	208.615.000	101.173.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					368.791.800,00	445.281.071,00	76.489.271,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.709.000,00	3.000.000,00	291.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan		12 Laporan	164.798.800,00	150.577.550,00	(14.221.250,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201.284.000,00	291.703.521,00	90.419.521,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.079.250,00	44.676.500,00	(10.402.750,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33.779.250,00	29.750.000,00	(4.029.250,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	21.300.000,00	14.926.500,00	(6.373.500,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					325.839.000,00	390.085.000,00	64.246.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					325.839.000,00	390.085.000,00	64.246.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	354 Sertifikat	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	354 Sertifikat	215.275.000,00	239.210.000,00	23.935.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	9	5	1.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98 Dokumen	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	98 Dokumen	110.564.000,00	150.875.000,00	40.311.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						TOTAL				232.133.502.000,00		(232.133.502.000,00)		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
												-		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					28.594.936.000,00	27.609.796.859	(985.139.141,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 persen	Persentase realisasi anggaran	100 persen	28.594.936.000,00	27.609.796.859,00	(985.139.141,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	18.555.597.000,00	17.204.419.919,00	(1.351.177.081,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	18.379.461.000,00	16.033.283.919,00	(2.346.177.081,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/ Bulan			#VALUE!	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	176.136.000,00	1.171.136.000,00	995.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum dan Kebutuhan Operasional	12 laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum dan Kebutuhan Operasional	12 laporan	236.584.000,00	245.165.936,00	8.581.936,00		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA
2	9	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.150.000,00	0,00	(5.150.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	9	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.296.000,00	0,00	(3.296.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.879.800,00	0,00	(41.879.800,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.348.200,00	0,00	(1.348.200,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	181.310.000,00	245.165.936,00	63.855.936,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelayanan jasa	12 laporan	Jumlah laporan pelayanan jasa	12 laporan	641.230.000,00	1.010.736.004,00	369.506.004,00		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	241.740.000,00	611.316.004,00	369.576.004,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	399.490.000,00	399.420.000,00	(70.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah dan kebutuhan operasional kantor	12 laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah dan kebutuhan operasional kantor	12 laporan	59.800.000,00	72.750.000,00	12.950.000,00		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	72.750.000,00	22.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	1 unit	Jumlah Laporan Peningkatan Pelayanan BLUD	1 unit	9.076.725.000,00	9.076.725.000,00	-		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
2	9	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	9.076.725.000,00	9.076.725.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.361.250.000,00	6.350.750.141	4.989.500.141,00		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	1.361.250.000,00	0,00	(1.361.250.000,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 laporan	1.361.250.000,00	0,00	(1.361.250.000,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
3	27	2	1.02	3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	1.361.250.000,00	0,00	(1.361.250.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
TOTAL										29.956.186.000,00		(29.956.186.000,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWJIA
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					8.435.891.000,00	8.298.641.000	(137.250.000,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	80 %	Indeks Profesionalitas ASN	80 %		7.598.641.000,00	(137.250.000,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	-		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		6.898.564.800,00	(137.317.200,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Laporan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Laporan	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	0 Laporan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Laporan	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	0 Laporan	6.591.891.000,00	6.454.641.000,00	(137.250.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	443.991.000,00	443.923.800,00	(67.200,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Laporan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan	0 Laporan	116.363.000,00	126.124.650	9.761.650,00		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah paket pengadaan	4 Paket	Jumlah paket pengadaan	0 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	2.765.000,00	(235.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah paket pengadaan	1 Paket	Jumlah paket pengadaan	0 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	Jumlah paket pengadaan	0 Paket	2.000.000,00	1.986.000,00	(14.000,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	19.745.500,00	(254.500,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah paket pengadaan	1 Paket	Jumlah paket pengadaan	0 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.363.000,00	3.355.000,00	1.992.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah paket pengadaan	1 Paket	Jumlah paket pengadaan	0 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	0 laporan	90.000.000,00	98.273.150	8.273.150,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.646.000,00	199.199.350,00	(17.446.650,00)		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Pelayanan Umum Kantor	0 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	132.646.000,00	115.199.350	(17.446.650,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Bulan			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 Paket	Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Paket		29.752.200,00	7.752.200,00		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	Jumlah Gedung yang dipelihara	3 Unit			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah Jasa	1 Paket	Jumlah Jasa	0 Paket			#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	22.000.000,00		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA			
3	27	1	1.09	2	Jumlah jasa	1 Paket	Jumlah jasa	0 Paket	26.100.000	6.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	27	1	1.09	6	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Paket	3.652.200,00	1.652.200,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	27	1	1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah benih varietas unggul Biofarmaka bersertifikat terjual	3050 Kg	Jumlah benih varietas unggul Biofarmaka bersertifikat terjual	3050 Kg	344.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual	43100 Batang	Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual	43100 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah benih varietas unggul florikultura bersertifikat terjual	2050 Batang	Jumlah benih varietas unggul florikultura bersertifikat terjual	2050 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah benih varietas unggul sayur bersertifikat terjual	13350 Kg	Jumlah benih varietas unggul sayur bersertifikat terjual	13350 Kg		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Diversifikasi Usaha	3 Jenis	Jumlah Diversifikasi Usaha	3 Jenis		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah masyarakat terinformasi teknologi budidaya	100 Orang	Jumlah masyarakat terinformasi teknologi budidaya	100 Orang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah stakeholder terakses informasi benih unggul varietas baru	5 Orang	Jumlah stakeholder terakses informasi benih unggul varietas baru	5 Orang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	27	1	1.10	1	Jumlah benih varietas unggul Biofarmaka bersertifikat terjual	3050 Kg	Jumlah benih varietas unggul Biofarmaka bersertifikat terjual	3050 Kg	344.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual	43100 Batang	Jumlah benih varietas unggul buah bersertifikat terjual	43100 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah benih varietas unggul florikultura bersertifikat terjual	2050 Batang	Jumlah benih varietas unggul florikultura bersertifikat terjual	2050 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah benih varietas unggul sayur bersertifikat terjual	13350 Kg	Jumlah benih varietas unggul sayur bersertifikat terjual	13350 Kg		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Diversifikasi Usaha	3 Jenis	Jumlah Diversifikasi Usaha	3 Jenis		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah masyarakat terinformasi teknologi budidaya	100 Orang	Jumlah masyarakat terinformasi teknologi budidaya	100 Orang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah stakeholder terakses informasi benih unggul varietas baru	5 Orang	Jumlah stakeholder terakses informasi benih unggul varietas baru	5 Orang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi hortikultura	1 %	Peningkatan produksi hortikultura	1 %	700.000.000,00	700.000.000,00	-		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA
3	27	2	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	700.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi benih Biofarmaka	0 Kg	Jumlah Produksi benih Biofarmaka	0 Kg		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi benih Buah	3400 Batang	Jumlah Produksi benih Buah	0 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi benih Florikultura	0 Batang	Jumlah Produksi benih Florikultura	0 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi benih Sayur	13350 Kg	Jumlah Produksi benih Sayur	35000 Kg		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	27	2	1.02	2	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	700.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi Benih Biofarmaka	0 Kg	Jumlah Produksi Benih Biofarmaka	0 Kg		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi Benih Buah	0 Batang	Jumlah Produksi Benih Buah	0 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi Benih Florikultura	0 Batang	Jumlah Produksi Benih Florikultura	0 Batang		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
					Jumlah Produksi Benih Sayur	35000 Kg	Jumlah Produksi Benih Sayur	35000 Kg		#VALUE!		UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
TOTAL									8.435.891.000,00			UPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.990.502.500,00	7.081.924.500	91.422.000,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	27	1				6.019.553.213,00	6.090.639.993	71.086.780,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.01			1.000.000,00	1.418.000,00	418.000,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah UPT Pengembangan Agribisnis TPH	3 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah UPT Pengembangan Agribisnis TPH		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.02							UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0 Bulan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ Bulan	#VALUE!
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		#VALUE!
3	27	1	1.05							UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Pengadaan Pakaian	1 Paket	Jumlah Pengadaan Pakaian	0 Paket	#VALUE!
3	27	1	1.06							UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	0 Paket	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	#VALUE!
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	0 Paket	#VALUE!
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	0 Paket	#VALUE!
3	27	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	0 Paket	#VALUE!
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
						Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jumlah Paket Pengadaan	0 Paket	#VALUE!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.283.342.713,00	1.221.081.628,00	(62.261.085,00)		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	307.739.000,00	262.984.750,00	(44.754.250,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Internet, Sumber Daya Air, dan Listrik		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	975.603.713,00	958.096.878,00	(17.506.835,00)	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						jumlah paket pelayanan umum kantor	2 Paket	jumlah paket pelayanan umum kantor		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000,00	70.201.900,00	201.900,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	1 Paket	Jumlah Jasa	20.000.000,00	20.201.900,00	201.900,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Gedung yang Dipelihara	1 Paket	Jumlah Gedung yang Dipelihara		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				896.542.500,00	929.102.500,00	32.560.000,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	896.542.500,00	929.102.500,00	32.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						masyarakat yang dilayani sesuai dengan SOP	4600 Orang	masyarakat yang dilayani sesuai dengan SOP		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				970.949.287,00	991.284.507,00	20.335.220,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian		1020 Unit	Jumlah Analisa sampel tanah dan hasil kultur jaringan	970.949.287,00	991.284.507,00	20.335.220,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Analisa sampel tanah dan hasil kultur jaringan	1020 Unit	Jumlah Analisa sampel tanah dan hasil kultur jaringan		991.284.507,00	20.335.220,00		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	27	3	1.01	2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana	1 Dokumen	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana	970.949.287,00		#VALUE!	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah Produk Olahan	3 Unit	Jumlah Produk Olahan		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						Jumlah stakeholder terfasilitasi edukasi teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura (sertifikat)	150 Orang	Jumlah stakeholder terfasilitasi edukasi teknologi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura (sertifikat)		#VALUE!			UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
							TOTAL		6.990.502.500,00		(6.990.502.500,00)		UPT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
-													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				42.451.107.000,00	47.844.758.000,00	5.393.651.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	79 Persen	Indeks profesionalitas ASN	32.533.607.000,00	35.029.714.000	2.496.107.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase indikator program yang tercapai	95 Persen	Persentase indikator program yang tercapai		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Realisasi Anggaran	97 Persen	Persentase Realisasi Anggaran		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	475.000.000,00	475.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
	Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8 Dokumen			#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	195.000.000,00	206.100.000,00	11.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	9.200.000,00	(800.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	7.700.000,00	(2.300.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	150.000.000,00	145.000.000,00	(5.000.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	90.000.000,00	88.000.000,00	(2.000.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	28.945.663.000,00	29.780.206.000,00	834.543.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	28.110.663.000,00	28.949.920.000,00	839.257.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	690.000.000,00	647.016.000,00	(42.984.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	65.000.000,00	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	25.000.000,00	48.270.000,00	23.270.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen		10.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	25.000.000,00	59.092.800	34.092.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	59.092.800	34.092.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	1.138.000.000,00	1.514.951.490	376.951.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	1.100.000.000,00	1.378.315.690	278.315.690,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.000.000,00	13.315.800,00	(1.684.200,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	23.000.000,00	123.320.000,00	100.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5 Laporan	110.644.000,00	183.981.960,00	73.337.960,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.715.000	715.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	11	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	41.063.360	16.063.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	39.915.600	24.915.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.644.000,00	27.716.000,00	(2.928.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00	54.572.000,00	34.572.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Laporan	50.000.000,00	50.852.700,00	852.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	39.302.700,00	9.302.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000,00	11.550.000,00	(8.450.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.579.000.000,00	2.010.641.370	431.641.370,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	438.000.000,00	574.179.828,00	136.179.828,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000,00	10.790.000,00	(29.210.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.100.000.000,00	1.424.171.542,00	324.171.542,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	210.300.000,00	954.987.680,00	744.687.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85.000.000,00	99.932.160,00	14.932.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	300.000,00	138.107.000	137.807.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000,00	81.901.420	51.901.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000,00	578.000.000	528.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000,00	57.047.100	12.047.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun	2 Dokumen	625.000.000,00	1.237.125.000	612.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	30 %	Persentase Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	30 %		247.810.600,00	10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	25 %	Persentase Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	25 %		#VALUE!		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	137.310.600,00	137.310.600,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	110.500.000,00	10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase tersusunnya dokumen KLHS	75 %	Persentase tersusunnya dokumen KLHS	75 %	387.689.400,00	987.689.400,00	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	150.000.000,00	750.000.000,00	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	2	1.02	4	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	177.689.400,00	179.314.400	1.625.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkatkan kualitas udara	3 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkatkan kualitas udara	3 Kab/Kota	1.827.428.000,00	(45.417.500,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				Luas lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi	4 Ha	Luas lahan kritis yang dikonservasi/rehabilitasi	4 Ha		#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)	1.2 Milyar	PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)	1.2 Milyar		#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali	12 Kali	Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali	12 Kali		#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	3	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air	65 Titik	Jumlah titik pantau kualitas air	65 Titik	833.697.850,00	909.013.050	75.315.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Jumlah titik pantau kualitas air laut	8 Titik	Jumlah titik pantau kualitas air laut	8 Titik				#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah titik pantau kualitas udara	24 Titik	Jumlah titik pantau kualitas udara	24 Titik				#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	143 Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150 Dokumen	796.567.850,00	839.393.050	42.825.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	37.130.000,00	69.620.000	32.490.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	8 Unit	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	8 Unit	326.292.550,00	215.464.550	(110.828.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	326.292.550,00	215.464.550	(110.828.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8 Kegiatan	667.437.600,00	657.532.900	(9.904.700,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	39.000.000,00	30.000.000,00	(9.000.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.03	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	4 Dokumen	608.437.600,00	607.532.900	(904.700,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI	15 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI	15 Kab/Kota	4.860.000.000,00	6.502.600.000,00	1.642.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan di kabupaten /kota	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan di kabupaten /kota	5 Kegiatan	4.860.000.000,00	6.502.600.000,00	1.642.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0.4 Ha	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0.4 Ha	453.384.000,00	898.432.000,00	445.048.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0.06 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0.06 Ha	140.000.000,00	393.242.000,00	253.242.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	4	1.01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	200 Orang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	200 Orang	266.616.000,00	1.210.926.000	944.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	63.3 Persen	Persentase Limbah B3 yang dikelola	63.3 Persen	300.000.000,00	336.900.000	36.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi	100 Persen	Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi	100 Persen				#VALUE!	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/kota yang berhasil dikumpulkan oleh Provinsi	60 Persen	Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/kota yang berhasil dikumpulkan oleh Provinsi	60 Persen	300.000.000,00	336.900.000	36.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	5	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	170.000.000,00	205.000.000	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	11	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	3 Dokumen	130.000.000,00	131.900.000	1.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan	16 Persen	Presentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan	16 Persen	720.072.000,00	885.564.500,00	165.492.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan	65 Persen	Presentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan	65 Persen	720.072.000,00	885.564.500,00	165.492.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	65 Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	65 Dokumen	172.572.000,00	182.364.500,00	9.792.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	7 Orang	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	20 Orang	55.500.000,00	75.920.000,00	20.420.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150 Laporan	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	200 Laporan	460.000.000,00	595.280.000	135.280.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	6	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	100 Persen	Persentase Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	100 Persen	50.000.000,00	39.500.000,00	(10.500.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1 MHA	Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	1 MHA	25.000.000,00	14.500.000,00	(10.500.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	25.000.000,00	14.500.000,00	(10.500.000,00)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	4 Kegiatan	Jumlah Kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	4 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	7	1.02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup	55 Persen	Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup	55 Persen	215.000.000,00	372.819.000	157.819.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 Kegiatan	215.000.000,00	372.819.000	157.819.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	4 Lembaga	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	4 Lembaga	115.000.000,00	115.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	8	1.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	70.000.000,00	217.819.000	147.819.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	11	8	1.01	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	90 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	90 Orang	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	11 Persen	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	11 Persen	250.000.000,00	270.000.000,00	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	146 Penghargaan	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	146 Penghargaan	250.000.000,00	270.000.000,00	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	9	1.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	146 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dimilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	146 Entitas	250.000.000,00	270.000.000,00	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100 Persen	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100 Persen	370.000.000,00	370.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	48 Pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	40 Pengaduan	370.000.000,00	370.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	40 Dokumen	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	40 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	20 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang dikelola	96,5 Persen	Persentase Sampah yang dikelola	96,5 Persen	700.000.000,00	1.018.525.000,00	318.525.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Sampah padat yang dikelola	99 Persen	Persentase Sampah padat yang dikelola	99 Persen	700.000.000,00	1.018.525.000,00	318.525.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	2 Dokumen	125.000.000,00	274.000.000,00	149.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	26.000.000,00	66.000.000,00	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	4 Dokumen	250.000.000,00	376.000.000,00	126.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	1.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	4 Unit	299.000.000,00	302.525.000,00	3.525.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.889.819.000,00		#VALUE!	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara	3 Kab/ Kota	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara	3 Kab/ Kota	1.889.819.000,00	2.480.719.000,00	590.900.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi	4 Ha	Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi	4 Ha	#VALUE!		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
					PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)	1,2 Milyar	PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)	1,2 Milyar	#VALUE!		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
					Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali	12 Kali	Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali	12 Kali	#VALUE!		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	3	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air	65 Titik	Jumlah titik pantau kualitas air	65 Titik	1.889.819.000,00	2.480.719.000,00	590.900.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah titik pantau kualitas air laut	8 Titik	Jumlah titik pantau kualitas air laut	8 Titik	#VALUE!		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
					Jumlah titik pantau kualitas udara	24 Titik	Jumlah titik pantau kualitas udara	24 Titik	#VALUE!		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	3	1.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	106 Dokumen	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1600 Dokumen	1.889.819.000,00	2.480.719.000,00	590.900.000,00	UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL										44.340.926.000,00		(44.340.926.000,00)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					43.226.662.000,00	48.761.909.000,00	5.535.247.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.876.078.000,00	24.338.397.104,00	(537.680.896,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					428.500.000,00	500.000.000,00	71.500.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	228.000.000,00	322.500.000,00	94.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	13	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumn	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	76.200.000,00	(23.800.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	80.500.000,00	88.300.000,00	7.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	20.409.998.000,00	19.194.563.381,00	(1.215.434.619,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	19.428.568.000,00	18.195.565.000,00	(1.233.003.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	751.430.000,00	768.998.381,00	17.568.381,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	43.000.000,00	43.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	58.000.000,00	58.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5 Dokumen		5 Dokumen	2.882.856.800,00	2.553.537.637,00	(329.319.163,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	2.882.856.800,00	2.553.537.637,00	(329.319.163,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Paket		1 Paket	198.500.000,00	432.033.486	233.533.486,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	45.000.000	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	58.542.688	23.542.688,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	80.000.000	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.000.000,00	124.364.798	68.364.798,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	52.500.000,00	119.126.000	66.626.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					795.600.000,00	1.330.607.000	535.007.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	13	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	410.000.000,00	733.000.000	323.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	385.600.000,00	597.607.000	212.007.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Paket	150.623.200,00	354.850.000	204.226.800,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	77.500.000,00	271.080.000	193.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	53.123.200,00	83.770.000	30.646.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA					469.870.000,00	1.143.781.500,00	673.911.500,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat					469.870.000,00	1.143.781.500,00	673.911.500,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	2	1.01	3	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten / Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten / Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	2 Dokumen	469.870.000,00	1.143.781.500,00	673.911.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					789.757.500,00	1.008.007.500	218.250.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				2 Kerjasama	789.757.500,00	1.008.007.500	218.250.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	1.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	1 Dokumen	450.000.000,00	668.250.000	218.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	3	1.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	339.757.500,00	339.757.500,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					10.586.181.500,00	15.802.670.522	5.216.489.022,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					10.586.181.500,00	15.802.670.522	5.216.489.022,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	2	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	700 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	700 Dokumen	130.000.000,00	300.000.000,00	170.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	300 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	300 Dokumen	300.000.000,00	1.150.000.000,00	850.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	300 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	300 Dokumen	500.000.000,00	928.463.261,00	428.463.261,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2350 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2350 Dokumen	800.000.000,00	891.230.000	91.230.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	9	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3500 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	3500 Dokumen	70.000.000,00	125.000.000,00	55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	400 Orang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	400 Orang	400.000.000,00	1.005.841.761	605.841.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	400 Orang	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	400 Orang	325.437.500,00	606.391.500,00	280.954.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	1 Dokumen	4.395.754.000,00	5.495.754.000,00	1.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	4	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	3.499.990.000,00	5.134.990.000	1.635.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		5 Lembaga		5 Lembaga	6.504.775.000,00	6.469.052.374,00	(35.722.626,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatkan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		700 Orang		700 Orang	6.504.775.000,00	6.469.052.374,00	(35.722.626,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	13	5	1.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	104.887.500,00	104.887.500,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	380.000.000,00	300.793.000,00	(79.207.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas kelembagaannya	10 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitas kelembagaannya	10 Lembaga	450.000.000,00	263.141.700,00	(186.858.300,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10 Dokumen	1.100.000.000,00	1.400.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	499.887.500,00	499.887.500,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	520.000.000,00	615.488.674,00	95.488.674,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	450.000.000,00	284.854.000,00	(165.146.000,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	5	1.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Laporan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						TOTAL				43.226.662.000,00		(43.226.662.000,00)		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
												-		DINAS PERHUBUNGAN
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								253.784.777.114,00		#VALUE!	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Profesionalitas ASN	63 %	Indeks Profesionalitas ASN	63 %	158.491.699.114,00	156.449.069.398	(2.042.629.716,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase indikator program yang tercapai	100 %	Persentase indikator program yang tercapai	100 %	#VALUE!				DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
					Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	#VALUE!				DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	301.298.114,00	220.046.614	(81.251.500,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen	#VALUE!				DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.373.500,00	18.373.500,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	24.071.000,00	18.424.000	(5.647.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.483.000,00	11.483.000,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.071.000,00	18.424.000	(5.647.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.483.000,00	11.483.000,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	193.426.614,00	104.709.114	(88.717.500,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	18.390.000,00	37.150.000,00	18.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	129.472.915.000,00	119.036.186.000,00	(10.436.729.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	15	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	586 orang/bulan	586 orang/bulan	127.472.915.000,00	117.036.186.000,00	(10.436.729.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	1.596.981.900,00	1.398.048.300	(198.933.600,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	153.037.540,00	362.385.700	209.348.160,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 dokumen	6.000.000,00	5.300.000	(700.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	41.180.920,00	40.444.000,00	(736.920,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.036.000,00	34.516.000	11.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	157.519.640,00	215.434.000	57.914.360,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	22.244.000,00	18.872.000,00	(3.372.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	1.025.574.900,00	1.381.130.616	355.555.716,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit	30.900.000,00	24.925.000,00	(5.975.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	104.447.150,00	273.626.000	169.178.850,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	161.590.000,00	161.415.000,00	(175.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	130 Orang	130 Orang	671.385.000,00	870.911.866	199.526.866,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	57.252.750,00	50.252.750	(7.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	10 Laporan	10 Laporan	3.562.534.737,00	5.622.748.894	2.060.214.157,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	234.576.000,00	84.576.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	317.883.600,00	217.883.600,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	193.634.650,00	(6.365.350,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	965.499.620,00	966.519.271	1.019.651,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	21.054.000,00	17.040.000,00	(4.014.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.821.000,00	(179.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	1.502.568.617,00	2.173.061.873	670.493.256,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	36.260.000,00	36.260.000,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	582.152.500,00	1.678.952.500	1.096.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Laporan	5 Laporan	2.667.558.349,00	3.275.315.155	607.756.806,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	64.293.000,00	270.567.000	206.274.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	108 unit	108 unit	439.017.700,00	1.500.396.106	1.061.378.406,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	5 unit	2.164.247.649,00	1.504.352.049	(659.895.600,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	11.479.313.302,00	12.586.842.710	1.107.529.408,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	18.500.000,00	3.000.000	(15.500.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.638.597.000,00	6.211.065.907	572.468.907,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.822.216.302,00	6.372.776.803	550.560.501,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	9.982.504.712,00	14.213.774.409	4.231.269.697,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	266 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	266 Unit	850.000.000,00	867.168.000,00	17.168.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	82 Unit	1.254.508.600,00	1.329.319.600	74.811.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	244 Unit	1.303.366.200,00	1.896.428.200	593.062.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3.065.155.200,00	4.580.013.897	1.514.858.697,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	2.431.474.712,00	3.134.246.712	702.772.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	956.000.000,00	2.294.250.000	1.338.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	122.000.000,00	112.348.000,00	(9.652.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Angka Kecelakaan Angkutan Umum	2 %	Penurunan Angka Kecelakaan Angkutan Umum		54.514.380.000,00	149.596.453.805	95.082.073.805,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jawa Timur	35 %	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jawa Timur				#VALUE!	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi					14.156.562.120,00	37.423.727.580	23.267.165.460,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	2	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	8862 Unit	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	8854 Unit	8.925.986.448,00	20.013.637.290	11.087.650.842,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	281 Unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	923 Unit	5.230.575.672,00	17.410.090.290	12.179.514.618,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B					11.640.000.000,00	17.602.800.000	5.962.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	0 Dokumen	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	10.000.000,00	300.000.000,00	290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	0 Unit	1.120.000.000,00	0,00	(1.120.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	11 Unit	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	31 Unit	9.000.000.000,00	17.302.800.000	8.302.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1.500.000.000,00	0,00	(1.500.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					2.224.646.880,00	5.603.737.725	3.379.090.845,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	1	Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Laporan	1.279.014.880,00	2.514.842.763	1.235.827.883,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	4 Unit	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	4 Unit	469.776.000,00	2.610.649.962	2.140.873.962,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	475.856.000,00	478.245.000,00	2.389.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi					373.856.000,00	763.959.500	390.103.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen	160.320.000,00	288.812.500	128.492.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	Jumlah penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	121.416.000,00	301.627.000,00	180.211.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.06	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	92.120.000,00	173.520.000,00	81.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					3.146.935.000,00	4.683.774.000	1.536.839.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	2	1.07	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Orang	606.515.000,00	149.554.000,00	(456.961.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	110.420.000,00	110.420.000,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	2.200.000.000,00	4.193.800.000	1.993.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		230.000.000,00	230.000.000,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					22.932.380.000,00	83.518.455.000	60.586.075.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.08	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	70 Unit	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	70 Unit	22.922.380.000,00	83.518.455.000	60.596.075.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.08	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0 Laporan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.09	1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.09	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.15	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.15	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					37.494.698.000,00	192.180.308.314	154.685.610.314,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional					100.000.000,00	4.000.000.000	3.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.08	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		100.000.000,00	4.000.000.000	3.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional					36.517.538.000,00	184.346.507.314	147.828.969.314,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	8.227.160.000,00	158.843.837.074,00	150.616.677.074,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	8 Unit	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	17 Unit	12.970.378.000,00	14.787.202.740	1.816.824.740,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	5	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	3 Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	4 Unit	15.120.000.000,00	10.515.467.500	(4.604.532.500,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					877.160.000,00	3.833.801.000	2.956.641.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	3	1.10	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	0 Unit	227.160.000,00	0,00	(227.160.000,00)	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.10	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	3 Unit	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	3 Unit	300.000.000,00	2.014.408.500,00	1.714.408.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.10	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Laporan	350.000.000,00	1.087.426.500,00	737.426.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					3.284.000.000,00	4.150.744.200,00	866.744.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian					3.284.000.000,00	4.150.744.200,00	866.744.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	3 Dokumen	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	3 Dokumen	1.791.103.500,00	2.038.427.200	247.323.700,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	5	1.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	2 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	2 laporan	1.492.896.500,00	2.112.317.000	619.420.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.966.279.300,00	3.161.885.000	195.605.700,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.821.279.300,00	2.845.877.100	24.597.800,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen	53.904.000,00	43.054.000,00	(10.850.000,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.904.000,00	43.054.000,00	(10.850.000,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	10.000.000,00	45.250.000,00	35.250.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	10.000.000,00	45.250.000,00	35.250.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan		10 Laporan	15.689.608,00	15.762.500,00	72.892,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	689.400,00	(810.600,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.500.000,00	967.600,00	(532.400,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.889.608,00	12.665.500,00	1.775.892,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	1.440.000,00	(360.000,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	2.720.185.692,00	2.722.418.803,00	2.233.111,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.720.185.692,00	2.722.418.803,00	2.233.111,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	21.500.000,00	19.391.797,00	(2.108.203,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.000.000,00	1.414.897	(8.585.103,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	10.000.000,00	16.764.900	6.764.900,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	1.500.000,00	1.212.000,00	(288.000,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					145.000.000,00	316.007.900,00	171.007.900,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Laporan		1 Laporan	100.000.000,00	49.999.900,00	(50.000.100,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	75 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	75 Unit	100.000.000,00	49.999.900,00	(50.000.100,00)	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					20.000.000,00	157.700.000	137.700.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	20.000.000,00	157.700.000	137.700.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					25.000.000,00	108.308.000	83.308.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	10.000.000,00	24.580.000,00	14.580.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	15.000.000,00	88.728.000,00	73.728.000,00	UPT P3 LLAJ SURABAYA	DINAS PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										1.311.180.400,00	1.509.790.000,00	198.609.600,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										1.116.180.400,00	1.229.790.000,00	113.609.600,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12 Dokumen	12 Dokumen	50.172.000,00	41.028.000,00	(9.144.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	50.172.000,00	41.028.000,00	(9.144.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										12 Laporan	12 Laporan	43.500.000,00	120.196.509,00	76.696.509,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	43.500.000,00	120.196.509,00	76.696.509,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Administrasi Umum Perangkat Daerah										10 Laporan	10 Laporan	94.868.400,00	20.313.000,00	(74.555.400,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.200.000,00	1.532.000,00	(1.668.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	11.500.000,00	4.158.000,00	(7.342.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	78.368.400,00	12.823.000,00	(65.545.400,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										850.200.000,00	969.696.368,00	119.496.368,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	850.200.000,00	969.696.368,00	119.496.368,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										77.440.000,00	78.556.123,00	1.116.123,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	42.860.000,00	42.860.123,00	123,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	9.580.000,00	5.696.000,00	(3.884.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										195.000.000,00	280.000.000,00	85.000.000,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi										1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	36 unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	36 unit	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi										70.000.000,00	130.000.000,00	60.000.000,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 laporan	70.000.000,00	130.000.000,00	60.000.000,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan										25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit Pemantauan Terminal	3 laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit Pemantauan Terminal	3 laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 laporan	15.000.000,00	95.000.000,00	80.000.000,00	UPT P3 LLAJ MALANG	DINAS PERHUBUNGAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										1.659.724.484,00	1.759.700.000,00	99.975.516,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										1.469.724.484,00	1.526.547.200,00	56.822.716,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12 Dokumen	12 Dokumen	50.172.000,00	50.172.000,00	-	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.172.000,00	50.172.000,00	-	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	65.312.000,00	15.312.000,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50.000.000,00	65.312.000,00	15.312.000,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN		
Administrasi Umum Perangkat Daerah										10 Laporan	10 Laporan	26.585.700,00	26.578.760,00	(6.940,00)	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.996.400,00	4.996.400,00	-	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.998.600,00	4.994.100,00	(4.500,00)	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.790.700,00	14.788.260,00	(2.440,00)	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.317.490.810,00	1.358.704.858,00	41.214.048,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.317.490.810,00	1.358.704.858	41.214.048,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.475.974,00	25.779.582,00	303.608,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	-	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	2 Unit	15.000.000,00	15.259.680,00	259.680,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	3.475.974,00	3.519.902,00	43.928,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					190.000.000,00	233.152.800,00	43.152.800,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	39 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	39 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					45.000.000,00	64.746.000,00	19.746.000,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	45.000.000,00	64.746.000,00	19.746.000,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					45.000.000,00	118.406.800,00	73.406.800,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	30.000.000,00	25.642.000,00	(4.358.000,00)	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	15.000.000,00	92.764.800,00	77.764.800,00	UPT P3 LLAJ PROBOLINGGO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					1.001.141.850,00	1.084.950.000	83.808.150,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					836.141.850,00	848.241.000	12.099.150,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen	44.016.000,00	35.256.000,00	(8.760.000,00)	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	44.016.000,00	35.256.000,00	(8.760.000,00)	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	33.180.000,00	37.050.000,00	3.870.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	33.180.000,00	37.050.000,00	3.870.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan		10 Laporan	39.800.000,00	39.883.500,00	83.500,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000,00	10.005.300,00	5.300,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8.000.000,00	8.071.200,00	71.200,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000,00	20.007.000,00	7.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 laporan		12 laporan	685.145.850,00	689.665.884,00	4.520.034,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	685.145.850,00	702.165.884,00	17.020.034,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 laporan		12 laporan	34.000.000,00	33.885.616,00	(114.384,00)	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	10.000.000,00	14.175.578,00	4.175.578,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	14.000.000,00	9.710.038,00	(4.289.962,00)	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					165.000.000,00	236.709.000,00	71.709.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Laporan		1 Laporan	100.000.000,00	50.440.000,00	(49.560.000,00)	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 unit	100.000.000,00	50.440.000,00	(49.560.000,00)	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					25.000.000,00	64.850.000	39.850.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 laporan	25.000.000,00	64.850.000	39.850.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					40.000.000,00	121.419.000	81.419.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 laporan	25.000.000,00	34.560.000,00	9.560.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 laporan	15.000.000,00	86.859.000,00	71.859.000,00	UPT P3 LLAJ KEDIRI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					1.022.318.260,00	1.106.930.000	84.611.740,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					859.278.260,00	900.509.600	41.231.340,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen	43.236.000,00	41.028.000	(2.208.000,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.236.000,00	41.028.000	(2.208.000,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	39.380.000,00	58.854.224	19.474.224,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	39.380.000,00	58.854.224	19.474.224,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan		10 Laporan	37.050.000,00	38.306.700,00	1.256.700,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000,00	7.375.600,00	2.375.600,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	7.850.000,00	10.101.600,00	2.251.600,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	22.400.000,00	19.229.500	(3.170.500,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	660.737.042,00	698.454.176	37.717.134,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	660.737.042,00	698.454.176	37.717.134,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	78.875.218,00	63.666.500	(15.208.718,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.000.000,00	32.451.000,00	451.000,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	36.875.218,00	23.994.500,00	(12.880.718,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10.000.000,00	7.221.000,00	(2.779.000,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					163.040.000,00	206.420.400,00	43.380.400,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Laporan		1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	39 Unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	39 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					28.040.000,00	58.372.400	30.332.400,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	28.040.000,00	58.372.400	30.332.400,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				35.000.000,00	98.048.000,00	63.048.000,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	20.000.000,00	8.630.000,00	(11.370.000,00)	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	15.000.000,00	89.418.000,00	74.418.000,00	UPT P3 LLAJ TULUNGAGUNG	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				1.232.680.364,00		#VALUE!	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.020.736.364,00	1.056.596.600	35.860.236,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen	50.172.000,00	41.028.000,00	(9.144.000,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	50.172.000,00	41.028.000,00	(9.144.000,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	46.996.000,00	58.200.000,00	11.204.000,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 Dokumen	46.996.000,00	58.200.000,00	11.204.000,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan		10 Laporan	38.800.000,00	19.947.900,00	(18.852.100,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	5.000.000,00	3.065.600,00	(1.934.400,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	12.000.000,00	4.611.700	(7.388.300,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	12.270.600,00	(7.729.400,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	1.800.000,00	0	(1.800.000,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	829.559.947,00	867.226.190	37.666.243,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		829.559.947,00	867.226.190,00	37.666.243,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	55.208.417,00	70.261.710,00	15.053.293,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	12.000.000,00	20.623.400,00	8.623.400,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	23.208.417,00	41.910.810,00	18.702.393,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	20.000.000,00	7.660.300,00	(12.339.700,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				211.944.000,00	262.273.400,00	50.329.400,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Laporan		1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	82 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	82 Unit	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					35.676.000,00	92.562.000,00	56.886.000,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	35.676.000,00	92.562.000,00	56.886.000,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				76.268.000,00	119.711.400,00	43.443.400,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	48 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	48 Laporan	61.268.000,00	36.162.000,00	(25.106.000,00)	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan inspeksi, Audit dan pemantauan sistim manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	6 Laporan	Jumlah laporan inspeksi, Audit dan pemantauan sistim manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	6 Laporan	15.000.000,00	83.549.400,00	68.549.400,00	UPT P3 LLAJ JEMBER	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				1.265.783.000,00	1.461.222.000	195.439.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.140.783.000,00	1.170.644.000	29.861.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					50.172.000,00	50.172.000,00	-	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.172.000,00	50.172.000,00	-	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	20.000.000,00	35.181.000,00	15.181.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		20.000.000,00	35.181.000,00	15.181.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan		10 Laporan	86.000.000,00	16.808.300,00	(69.191.700,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	2.472.700,00	(2.527.300,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	5.242.200,00	(24.757.800,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	7.293.400,00	(42.706.600,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.000.000,00	1.800.000,00	800.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	922.852.586,00	1.038.486.948	115.634.362,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Paket	922.852.586,00	1.038.486.948	115.634.362,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					61.758.414,00	29.995.752,00	(31.762.662,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	12.000.000,00	10.440.000,00	(1.560.000,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	29.758.414,00	13.180.952,00	(16.577.462,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	20.000.000,00	6.374.800,00	(13.625.200,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					125.000.000,00	290.578.000	165.578.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		1 Laporan		1 Laporan	100.000.000,00	58.148.000,00	(41.852.000,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	38 Unit	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	38 Unit	100.000.000,00	58.148.000,00	(41.852.000,00)	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					5.000.000,00	99.049.000	94.049.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	5.000.000,00	99.049.000	94.049.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					20.000.000,00	133.381.000,00	113.381.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	5.000.000,00	38.781.000,00	33.781.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	15.000.000,00	94.600.000,00	79.600.000,00	UPT P3 LLAJ MADIUN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					1.381.928.764,00	1.469.500.000	87.571.236,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.166.928.764,00	1.231.849.400	64.920.636,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					41.028.000,00	41.028.000,00	-	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.028.000,00	41.028.000,00	-	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	112.688.000,00	88.984.960	(23.703.040,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	112.688.000,00	88.984.960	(23.703.040,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan		10 Laporan	48.850.444,00	37.952.700	(10.897.744,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	1.997.600,00	(502.400,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	9.984.000,00	(16.000,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.650.444,00	23.982.100	(7.668.344,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.700.000,00	1.989.000,00	(2.711.000,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	838.362.320,00	981.873.069	143.510.749,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	838.362.320,00	981.873.069,00	143.510.749,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan		12 Laporan	126.000.000,00	82.010.671	(43.989.329,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.000.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	75.000.000,00	48.044.311,00	(26.955.689,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.000.000,00	9.952.100,00	(5.047.900,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					215.000.000,00	237.650.600	22.650.600,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					100.000.000,00	49.179.000,00	(50.821.000,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	150 unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		100.000.000,00	49.179.000,00	(50.821.000,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					50.000.000,00	75.416.600	25.416.600,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		50.000.000,00	75.416.600,00	25.416.600,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					65.000.000,00	113.055.000,00	48.055.000,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		50.000.000,00	23.403.200	(26.596.800,00)	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		15.000.000,00	89.651.800,00	74.651.800,00	UPT P3 LLAJ BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					1.573.838.050,00		#VALUE!	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.423.838.050,00	1.470.425.200	46.587.150,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen		12 Dokumen	50.952.000,00	1.470.425.200	1.419.473.200,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.952.000,00	41.028.000	(9.924.000,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Laporan		12 Laporan	18.960.000,00	81.956.000	62.996.000,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	18.960.000,00	81.956.000	62.996.000,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		10 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	10 Laporan	21.362.300,00	11.797.600	(9.564.700,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.401.600,00	0	(1.401.600,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.100.700,00	1.493.200,00	(6.607.500,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	8.504.400,00	(1.495.600,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.860.000,00	1.800.000,00	(60.000,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.296.875.516,00	1.289.009.354	(7.866.162,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.296.875.516,00	1.289.009.354	(7.866.162,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.688.234,00	46.634.246	10.946.012,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	17.856.234,00	19.285.700	1.429.466,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	14.832.000,00	23.526.546,00	8.694.546,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3.000.000,00	3.822.000,00	822.000,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					150.000.000,00	202.294.800,00	52.294.800,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					103.000.000,00	59.341.000,00	(43.659.000,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	88 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	38 Unit	103.000.000,00	59.341.000,00	(43.659.000,00)	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					20.000.000,00	45.214.000,00	25.214.000,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	12 Laporan	20.000.000,00	45.214.000,00	25.214.000,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15	2	1.07											
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			27.000.000,00	97.739.800	70.739.800,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	12.000.000,00	15.874.000,00	3.874.000,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 Laporan	15.000.000,00	81.865.800	66.865.800,00	UPT P3 LLAJ LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.451.167.364,00	1.542.340.000	91.172.636,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1.243.831.364,00	1.279.355.200	35.523.836,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50.172.000,00	41.028.000,00	(9.144.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	50.172.000,00	41.028.000,00	(9.144.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			66.940.000,00	76.040.000,00	9.100.000,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	66.940.000,00	76.040.000,00	9.100.000,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.679.220,00	36.500.600,00	(15.178.620,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 PAKET	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 PAKET	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 PAKET	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 PAKET	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.279.220,00	34.000.600,00	(278.620,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	2.500.000,00	700.000,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			935.024.160,00	1.060.399.749	125.375.589,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	935.024.160,00	1.060.399.749	125.375.589,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140.015.984,00	65.386.851	(74.629.133,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 UNIT	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 UNIT	27.450.000,00	0,00	(27.450.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	25.194.000,00	0,00	(25.194.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	87.371.984,00	65.386.851,00	(21.985.133,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			207.336.000,00	262.984.800	55.648.800,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			58.760.000,00	58.760.000,00	-	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	88 UNIT	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	88 UNIT	58.760.000,00	58.760.000,00	-	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			41.240.000,00	42.600.000,00	1.360.000,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 LAPORAN	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 LAPORAN	41.240.000,00	42.600.000,00	1.360.000,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			107.336.000,00	131.624.800,00	24.288.800,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 LAPORAN	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 LAPORAN	92.336.000,00	41.625.000,00	(50.711.000,00)	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 LAPORAN	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 LAPORAN	15.000.000,00	89.999.800,00	74.999.800,00	UPT P3 LLAJ BANGKALAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			1.126.764.447,00	1.164.070.000	37.305.553,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			878.420.080,00	882.430.800	4.010.720,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			58.980.000,00	41.028.000	(17.952.000,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.980.000,00	41.028.000,00	(17.952.000,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			39.000.000,00	62.560.000	23.560.000,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	39.000.000,00	62.560.000,00	23.560.000,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			107.000.000,00	52.150.300,00	(54.849.700,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	2.833.800,00	(9.166.200,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	18.277.400,00	(11.722.600,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00	24.071.900	(30.928.100,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	6.967.200	(3.032.800,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					606.840.080,00	672.276.210	65.436.130,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	606.840.080,00	672.276.210	65.436.130,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.600.000,00	54.416.290	(12.183.710,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	24.000.000,00	26.281.873	2.281.873,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	27.600.000,00	13.898.417	(13.701.583,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	15.000.000,00	14.236.000,00	(764.000,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 kali	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			#VALUE!		UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					248.344.367,00	281.639.200	33.294.833,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi					100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan Terpelihara		100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi					99.280.000,00	132.747.200	33.467.200,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.05	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi		99.280.000,00	132.747.200	33.467.200,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		34.064.367,00	26.910.000	(7.154.367,00)	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	1.07	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	1 Laporan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan		15.000.000,00	71.982.000,00	56.982.000,00	UPT P3 LLAJ MOJOKERTO	DINAS PERHUBUNGAN
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					8.259.748.000,00	8.361.518.000	101.770.000,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					8.259.748.000,00	8.361.518.000	101.770.000,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					101.016.000,00	74.952.000	(26.064.000,00)	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	101.016.000,00	74.952.000	(26.064.000,00)	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					706.035.576,00	753.671.860	47.636.284,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	25.855.500,00	33.616.660,00	7.761.160,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	235.829.876,00	237.717.500	1.887.624,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	62.872.200,00	69.800.200,00	6.928.000,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.221.000,00	24.684.000,00	(5.537.000,00)	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.257.000,00	387.853.500	36.596.500,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.172.122.424,00	6.152.125.053	(19.997.371,00)	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000	(2.000.000,00)	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	6.166.122.424,00	6.148.125.053	(17.997.371,00)	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.280.574.000,00	1.380.769.087	100.195.087,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	70.000.000,00	157.098.200,00	87.098.200,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	1.210.574.000,00	1.223.670.887	13.096.887,00	UPT BANDAR UDARA	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	15					753.819.603,00	765.470.000	11.650.397,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1				614.489.167,00	635.137.200	20.648.033,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.02			43.236.000,00	43.236.000,00	-	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.236.000,00	43.236.000,00	-	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05			25.000.000,00	33.750.000,00	8.750.000,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	25.000.000,00	33.750.000,00	8.750.000,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06			33.940.000,00	26.997.750	(6.942.250,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	4.648.000,00	(352.000,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	1.252.500	(1.247.500,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	19.777.250,00	(5.222.750,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	-	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08			500.334.000,00	511.118.160	10.784.160,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	500.334.000,00	511.118.160	10.784.160,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09			11.979.167,00	20.035.290	8.056.123,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2.312.500,00	11.290.500	8.978.000,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2.166.667,00	2.796.790,00	630.123,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7.500.000,00	5.948.000,00	(1.552.000,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3				139.330.436,00	130.332.800,00	(8.997.636,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	3	1.09			139.330.436,00	130.332.800,00	(8.997.636,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	3	1.09	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3 Unit	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	3 Unit	50.000.000,00	46.268.000,00	(3.732.000,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3	1.09	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Laporan	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	3 Laporan	89.330.436,00	84.064.800,00	(5.265.636,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL LAMONGAN	DINAS PERHUBUNGAN
2	15					217.780.000,00	917.680.000,00	699.900.000,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1				217.780.000,00	917.680.000,00	699.900.000,00	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN				
2	15	1	1.02			43.236.000,00	35.256.000,00	(7.980.000,00)	UPT PELABUNGAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	15	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.236.000,00	35.256.000,00	(7.980.000,00)	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					63.480.000,00	64.045.000,00	565.000,00	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	63.480.000,00	64.045.000,00	565.000,00	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					72.327.040,00	778.565.600,00	706.238.560,00	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.327.040,00	778.565.600,00	706.238.560,00	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					38.736.960,00	39.813.400,00	1.076.440,00	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	21.936.000,00	21.645.000,00	(291.000,00)	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	16.800.960,00	18.168.400,00	1.367.440,00	UPT PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BANYUWANGI	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL										279.008.931.000,00		(279.008.931.000,00)		DINAS PERHUBUNGAN
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					48.675.844.000,00	65.704.520.520,00	17.028.676.520,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					40.229.844.000,00	45.609.722.800,00	5.379.878.800,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31.000.000,00	40.005.000,00	9.005.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen DPA Perubahan	4 dokumen	Jumlah dokumen DPA Perubahan	4 dokumen	11.000.000,00	16.395.000,00	5.395.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.000.000,00	5.050.000,00	1.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.000.000,00	3.100.000,00	(900.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.000.000,00	4.235.000,00	1.235.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.000.000,00	6.125.000,00	3.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					31.960.115.000,00	31.353.206.000,00	(606.909.000,00)		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/ Bulan	31.162.347.000,00	30.794.442.000,00	(367.905.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	779.268.000,00	540.264.000,00	(239.004.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.500.000,00	3.500.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					4.500.000,00	4.500.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.500.000,00	1.500.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					105.870.000,00	346.371.200	240.501.200,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	26.700.000,00	10.800.000,00	(15.900.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 16 1 1.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	43.000.000,00	151.622.000,00	108.622.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	10.000,00	97.600.000,00	97.590.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	36.160.000,00	86.349.200,00	50.189.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.065.916.680,00	2.049.329.753	983.413.073,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	18.082.850,00	52.811.700,00	34.728.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	470.633.049,00	1.014.657.290,00	544.024.241,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	34.774.345,00	23.256.000,00	(11.518.345,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	9.759.250,00	13.051.000,00	3.291.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	484.271.686,00	924.968.763,00	440.697.077,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		48.395.500,00	20.585.000,00	(27.810.500,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.215.687.220,00	9.652.774.447	3.437.087.227,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					29.700.000,00	14.000.000,00	(15.700.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	993.719.250,00	1.572.961.000,00	579.241.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.192.267.970,00	8.065.813.447,00	2.873.545.477,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					851.255.100,00	2.168.036.400	1.316.781.300,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	285.750.000,00	403.600.000,00	117.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	462.585.100,00	473.286.000,00	10.700.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 1 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102.920.000,00	1.291.150.400,00	1.188.230.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.636.000.000,00	13.887.781.520	9.251.781.520,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					4.636.000.000,00	13.887.781.520	9.251.781.520,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	665.544.500,00	1.727.670.580,00	1.062.126.080,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	394.140.000,00	1.857.424.150,00	1.463.284.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	378.000.000,00	1.204.446.570,00	826.446.570,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	621.560.000,00	4.718.610.800,00	4.097.050.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	1.514.756.000,00	2.630.329.420,00	1.115.573.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Orang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	4 Orang	335.699.500,00	723.000.000,00	387.300.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 2 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	726.300.000,00	1.026.300.000,00	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.810.000.000,00	6.207.016.200	2.397.016.200,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 3 1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					663.700.950,00	828.124.175,00	164.423.225,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	16	3	1.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	0 Dokumen	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah penambahan sub domain jatimprov.go.id	15 Sub Domain	Jumlah penambahan sub domain jatimprov.go.id	15 Sub Domain				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah pembangunan jaringan backbone perangkat daerah	1 Perangkat Daerah	Jumlah pembangunan jaringan backbone perangkat daerah		513.700.950,00	728.124.175,00	214.423.225,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Pemeliharaan perangkat jaringan backbone	1 kali	Jumlah Pemeliharaan perangkat jaringan backbone					#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					3.146.299.050,00	5.378.892.025	2.232.592.975,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	0 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah pelaksanaan evaluasi internal SPBE	1 aplikasi	Jumlah pelaksanaan evaluasi internal SPBE	1 aplikasi				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah dokumen pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1 dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1 dokumen				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan perangkat pusat data	4 kali	Jumlah pemeliharaan perangkat pusat data	4 kali	722.716.600,00	1.902.376.340	1.179.659.740,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	1 aplikasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	1 aplikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	0 Unit	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	0 Unit	1.050.000.000,00	1.811.581.520	761.581.520,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah aplikasi yang terbangun	1 aplikasi	Jumlah aplikasi yang terbangun					#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Layanan	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 Layanan	523.582.450,00	764.934.165,00	241.351.715,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah layanan virtual Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda Prov. Jatim	100 kali	Jumlah layanan virtual Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda Prov. Jatim	100 kali				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah monitoring dan evaluasi pengendalian bandwidth	4 laporan	Jumlah monitoring dan evaluasi pengendalian bandwidth	4 laporan				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen monitoring smart city	1 dokumen	Jumlah dokumen monitoring smart city	1 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah workshop TIK bagi aparatur	2 kali	Jumlah workshop TIK bagi aparatur	2 kali				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah workshop TIK bagi masyarakat	8 kali	Jumlah workshop TIK bagi masyarakat	8 kali				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					900.000.000,00	1.278.418.480,00	378.418.480,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					900.000.000,00	1.278.418.480,00	378.418.480,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					900.000.000,00	1.278.418.480,00	378.418.480,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 Dokumen	100.000.000,00	268.900.000	168.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah pendampingan OPD dan Kab/Kota dalam	4 kali	Jumlah pendampingan OPD dan Kab/Kota dalam	4 kali				#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah pelatihan bidang statistik	4 kali	Jumlah pelatihan bidang statistik	4 kali			122.600.000	22.600.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	20	2	1.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 Orang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0 Orang	100.000.000,00		#VALUE!	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	350.000.000,00	410.000.000,00	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah workshop metadata	2 kali	Jumlah workshop metadata	2 kali		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	0 Orang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	0 Orang	150.000.000,00	169.246.000	19.246.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah sosialisasi kebijakan satu data Indonesia	4 kali	Jumlah sosialisasi kebijakan satu data Indonesia	4 kali		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	0 Unit	Jumlah Infrastruktur Statistik	0 Unit	100.000.000,00	171.754.000	71.754.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	1.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	100.000.000,00	135.918.480	35.918.480,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Rekomendasi statistik sektoral	5 kali	Jumlah Rekomendasi statistik sektoral	5 kali		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					400.000.000,00	650.000.000	250.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					400.000.000,00	650.000.000	250.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					300.000.000,00	550.000.000	250.000.000,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0 Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan tata kelola keamanan informasi	50 kali	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan tata kelola keamanan informasi	50 kali		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aparaturnya pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang keamanan informasi	80 orang	Jumlah aparaturnya pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi di bidang keamanan informasi	80 orang	50.000.000,00	250.000.000	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	10 unit	Jumlah infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	10 unit		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	0 Laporan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	0 Laporan		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan informasi	12 laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di bidang keamanan informasi	12 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Laporan		#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	0 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		100.000.000,00	150.000.000	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Persentase insiden keamanan informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan	50 %	Persentase insiden keamanan informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan			#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					100.000.000,00	100.000.000,00	-		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	1.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	0 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Persentase keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaringan komunikasi sandi	100 %	Persentase keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaringan komunikasi sandi			#VALUE!		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL										49.975.844.000,00		(49.975.844.000,00)		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
												-		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					94.038.233.000,00	91.231.101.075	(2.807.131.925,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	74 Persen	Indeks profesionalitas ASN	74 Persen		34.109.184.075	(771.331.925,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen	Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen	34.880.516.000,00		#VALUE!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
		Persentase realisasi anggaran	100 Persen	Persentase realisasi anggaran	100 Persen			#VALUE!	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
2	17	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun	4 Dokumen	1.677.154.768,00	1.542.855.768	(134.299.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	716.745.022,00	739.247.400	22.502.378,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.563.442,00	7.015.000	(548.442,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.563.442,00	7.015.000	(548.442,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.063.442,00	3.553.600,00	(509.842,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.063.442,00	3.553.600,00	(509.842,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	908.254.978,00	769.874.168,00	(138.380.810,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	28.901.000,00	12.597.000,00	(16.304.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	1 Dokumen	26.668.867.732,00	25.653.032.732	(1.015.835.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/ Bulan	25.504.748.000,00	24.478.913.000	(1.025.835.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	522.288.000,00	446.044.000	(76.244.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	561.572.001,00	633.158.232	71.586.231,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7.509.478,00	20.803.800,00	13.294.322,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.022.223,00	7.612.500,00	590.277,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	44.327.145,00	45.141.100,00	813.955,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17.201.846,00	17.180.900,00	(20.946,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.199.039,00	4.179.200,00	(19.839,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 Dokumen	1.560.831.096,00	1.483.888.114	(76.942.982,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	260.069.996,00	14.828.400,00	(245.241.596,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	970.501.600,00	994.797.200	24.295.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	330.259.500,00	474.262.514	144.003.014,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	2.481.182.218,00	2.459.185.729	(21.996.489,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2	17	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.137.095,00	30.274.500,00	4.137.405,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	293.244.129,00	350.262.479	57.018.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.987.999,00	118.473.300,00	64.485.301,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	224.289.400,00	218.029.450,00	(6.259.950,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	17	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Laporan	15.264.600,00	10.260.000,00	(5.004.600,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Laporan	59.877.250,00	44.841.000,00	(15.036.250,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	132.020.500,00	266.430.000,00	134.409.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.676.361.245,00	1.420.615.000,00	(255.746.245,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.814.155.186,00	1.954.966.627,00	140.811.441,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	620.204.186,00	762.515.800,00	142.311.614,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	108.951.000,00	87.219.600,00	(21.731.400,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.075.000.000,00	1.100.231.227,00	25.231.227,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Dokumen	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Dokumen	678.325.000,00	1.015.255.105	336.930.105,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	217.100.000,00	276.037.100,00	58.937.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	148.940.000,00	251.804.000,00	102.864.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	182.285.000,00	177.756.000,00	(4.529.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			#VALUE!		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130.000.000,00	309.658.005	179.658.005,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	87 Persen	Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP	87 Persen	800.000.000,00	800.000.000,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	35 Unit	Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi	35 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 Unit Usaha	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 Unit Usaha	400.000.000,00	400.000.000,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	100 Persen	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi	100 Persen	400.000.000,00	400.000.000,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	2	1.02	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25 Unit Usaha	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25 Unit Usaha	400.000.000,00	400.000.000,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Berkualitas	63 Persen	Persentase Koperasi yang Berkualitas	63 Persen	1.103.993.480,00	1.103.993.480,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	45 Persen	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	45 Persen	1.103.993.480,00	1.103.993.480,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	3	1.01	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	56 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	56 Dokumen	1.103.993.480,00	1.103.993.480,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	22 Persen	Persentase koperasi sehat	22 Persen	609.437.520,00	609.437.520,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	4	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	27 Persen	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	27 Persen	609.437.520,00	609.437.520,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	17	4	1.01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	25 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	25 Unit Usaha	609.437.520,00	609.437.520,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	69 Persen	Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	69 Persen	13.537.121.850,00	12.931.024.149,00	(606.097.701,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	30 Persen	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	30 Persen	13.537.121.850,00	12.931.024.149,00	(606.097.701,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	44 Persen	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan	44 Persen					
						Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	31 Persen	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha	31 Persen					
						Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	24 Persen	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	24 Persen					
2	17	6	1.01	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	270 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	270 Unit Usaha	1.100.000.000,00	1.061.000.000	(39.000.000,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	6	1.01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1545 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1545 Unit Usaha	12.437.121.850,00	12.057.024.149	(380.097.701,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang telah diberdayakan	33 Persen	Persentase UKM yang telah diberdayakan	33 Persen	39.030.838.400,00	35.527.211.101	(3.503.627.299,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	7	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	75 Unit	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	75 Unit	39.030.838.400,00	35.527.211.101	(3.503.627.299,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan	720 Unit	Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan	720 Unit					
						Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	350 Unit	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	350 Unit					
						Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha	350 Unit	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha	350 Unit					
2	17	7	1.01	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1890 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1890 Unit Usaha	39.030.838.400,00	35.527.211.101	(3.503.627.299,00)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	33 Persen	Persentase UKM yang telah dikembangkan	33 Persen	4.076.325.750,00	5.957.950.750	1.881.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	75 Unit	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	75 Unit	4.076.325.750,00	5.957.950.750	1.881.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	150 Unit	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	150 Unit					
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	877 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	877 Unit Usaha	3.848.833.000,00	5.730.458.000	1.881.625.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01	2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	250 Orang	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	250 Orang	227.492.750,00	227.492.750,00	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.488.031.000,00	14.361.116.000	8.873.085.000,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	74 Persen	Indeks profesionalitas ASN	74 Persen	3.557.261.000,00	3.712.833.000	155.572.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen	Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen					
						Persentase realisasi anggaran	100 Persen	Persentase realisasi anggaran	100 Persen					
2	17	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 Dokumen	848.548.585,00	943.816.840,00	95.268.255,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	182.548.585,00	198.761.740,00	16.213.155,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	650.000.000,00	729.055.100,00	79.055.100,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	17	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	-	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	372.897.335,00	139.742.000,00	(233.155.335,00)	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	327.818.335,00	129.692.000,00	(198.126.335,00)	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	45.079.000,00	10.050.000,00	(35.029.000,00)	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.968.875.080,00	2.062.125.742	93.250.662,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	444.300.960,00	469.700.000,00	25.399.040,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.524.574.120,00	1.592.425.742	67.851.622,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Dokumen	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Dokumen	366.940.000,00	567.148.418,00	200.208.418,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	140.629.000,00	101.638.418,00	(38.990.582,00)	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	71.390.000,00	21.393.500,00	(49.996.500,00)	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	154.921.000,00	444.116.500,00	289.195.500,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	96 Persen	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	96 Persen	1.016.000.000,00	7.457.433.520,00	6.441.433.520,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	32 Persen	Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	32 Persen	1.016.000.000,00	7.457.433.520,00	6.441.433.520,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	5	1.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	232 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	232 Orang	1.016.000.000,00	7.457.433.520,00	6.441.433.520,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UKM yang telah dikembangkan	33 Persen	Persentase UKM yang telah dikembangkan	33 Persen	914.770.000,00	1.218.395.650	303.625.650,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang bermitra	75 Unit	Jumlah UKM yang bermitra	75 Unit	914.770.000,00	1.218.395.650	303.625.650,00	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	250 Unit	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM	250 Unit		#VALUE!		UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	150 Unit	Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	150 Unit		#VALUE!		UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	8	1.01	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	306 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	306 Unit Usaha	914.770.000,00	910.564.650,00	(4.205.350,00)	UPT PELATIHAN KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TOTAL										99.526.264.000,00		(99.526.264.000,00)		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					37.021.476.000,00	38.177.403.000	1.155.927.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.788.132.000,00	27.396.659.000	(391.473.000,00)		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					216.000.000,00	216.000.000,00	-		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	130.252.000,00	130.252.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.758.000,00	3.758.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	18	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.460.000,00	3.460.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	59.500.000,00	59.500.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.030.000,00	6.030.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					19.195.460.000,00	19.078.987.000,00	(116.473.000,00)		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	18.357.589.000,00	18.241.116.000,00	(116.473.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	750.000.000,00	570.370.000,00	(179.630.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52.530.000,00	235.792.500,00	183.262.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10.050.000,00	10.050.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.256.000,00	2.740.500,00	(515.500,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	13.400.000,00	14.070.000,00	670.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.635.000,00	10.050.000,00	1.415.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.810.000,00	0,00	(3.810.000,00)		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3.810.000,00	0,00	(3.810.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.789.592.800,00	1.721.330.000,00	(1.068.262.800,00)		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	268.000.000,00	205.700.000,00	(62.300.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.285.231.800,00	1.343.851.000,00	(941.380.800,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	194.611.000,00	142.271.000,00	(52.340.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	24.880.000,00	29.508.000,00	4.628.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	16.870.000,00	0,00	(16.870.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.772.659.470,00	1.811.234.412,00	38.574.942,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.078.330,00	15.095.700,00	17.370,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	18	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	163.431.000,00	97.832.000,00	(65.599.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	269.506.600,00	219.407.200,00	(50.099.400,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	574.718.240,00	532.206.200,00	(42.512.040,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	187.822.800,00	120.888.812,00	(66.933.988,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	49.800.000,00	122.650.000,00	72.850.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	495.000.000,00	703.154.500	208.154.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	17.302.500,00	0,00	(17.302.500,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.555.938.230,00	4.246.745.088	690.806.858,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.174.311.030,00	1.773.162.000	598.850.970,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	61.800.000,00	90.000.000,00	28.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.319.827.200,00	2.383.583.088,00	63.755.888,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					254.671.500,00	317.160.500	62.489.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	62 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	62 Unit	79.171.500,00	184.750.000	105.578.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	100.500.000,00	79.619.200,00	(20.880.800,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000,00	52.791.300,00	(22.208.700,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					1.689.742.000,00	1.989.742.000	300.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.214.742.000,00	1.314.742.000	100.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	1.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	464.742.000,00	564.742.000	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	1.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	8 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	8 Kegiatan Usaha	750.000.000,00	750.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					475.000.000,00	675.000.000	200.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	1.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2	1.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					1.771.974.000,00	2.287.349.000	515.375.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					1.771.974.000,00	2.287.349.000	515.375.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	18	3	1.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	625.000.000,00	442.750.000	(182.250.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	3	1.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	25 Dokumen	1.146.974.000,00	1.844.599.000	697.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					3.928.149.000,00	4.078.149.000	150.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					640.000.000,00	740.000.000	100.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Pelaku Usaha	82.000.000,00	382.000.000,00	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	435.000.000,00	135.000.000,00	(300.000.000,00)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140 Orang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140 Orang	100.000.000,00	200.000.000	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	38 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	38 Kegiatan Usaha	23.000.000,00	23.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					3.288.149.000,00	3.338.149.000	50.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.02	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	5500 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	5500 Pelaku Usaha	2.282.131.000,00	2.323.256.000	41.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.02	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	2000 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	2000 Kegiatan Usaha	220.000.000,00	220.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.02	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	2000 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	2000 Orang	763.018.000,00	771.893.000	8.875.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4	1.02	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	38 Kegiatan usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	38 Kegiatan usaha	23.000.000,00	23.000.000,00	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					941.260.000,00	1.473.285.000,00	532.025.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					941.260.000,00	1.473.285.000,00	532.025.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	304.260.000,00	305.885.000	1.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	5	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	352.000.000,00	747.396.800	395.396.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	18	5	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	285.000.000,00	420.003.200	135.003.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					902.219.000,00	952.219.000,00	50.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi					902.219.000,00	952.219.000,00	50.000.000,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	6	1.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	902.219.000,00	952.219.000	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TOTAL										37.021.476.000,00		(37.021.476.000,00)		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					112.596.340.000,00	130.995.672.000	18.399.332.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					33.923.686.000,00	37.657.721.000	3.734.035.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000,00	284.479.895,00	84.479.895,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	45.000.000,00	70.000.000,00	25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlahdokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	jumlahdokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	43.479.895,00	3.479.895,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	50.000.000,00	106.000.000,00	56.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					30.509.594.000,00	31.016.139.000,00	506.545.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/ Bulan	29.909.594.000,00	30.355.629.000,00	446.035.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	495.000.000,00	555.510.000,00	60.510.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					88.000.000,00	302.091.705,00	214.091.705,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	63.000.000,00	69.850.000,00	6.850.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000,00	149.968.977,00	139.968.977,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	19	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	5.000.000,00	72.272.728,00	67.272.728,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					449.787.740,00	1.197.810.903	748.023.163,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.987.740,00	34.987.740,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	68.540.000,00	56.854.800,00	(11.685.200,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	50.000.000,00	90.101.500,00	40.101.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000,00	90.825.500,00	20.825.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	31.260.000,00	31.716.000,00	456.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	19 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	19 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000,00	758.325.363	698.325.363,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00	74.228.000,00	64.228.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	74.228.000,00	64.228.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.266.304.260,00	3.711.889.697	1.445.585.437,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.840.000,00	5.840.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	546.200.000,00	1.561.931.000	1.015.731.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	98.024.260,00	113.865.000,00	15.840.740,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.616.240.000,00	2.030.253.697	414.013.697,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					400.000.000,00	1.071.081.800	671.081.800,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	150.000.000,00	404.856.000,00	254.856.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	112 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	112 Unit	100.000.000,00	113.120.800,00	13.120.800,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	498.000.000	398.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	50.000.000,00	55.105.000,00	5.105.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					4.386.000.000,00	3.440.000.000	(946.000.000,00)		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi					4.385.000.000,00	3.390.000.000	(995.000.000,00)		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	165 orang	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	165 orang	200.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirasaha Muda Provinsi	Jumlah Wirasaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	135 orang	Jumlah Wirasaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	135 orang	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	195.000.000,00	100.000.000,00	(95.000.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	400 orang	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	400 orang	2.740.000.000,00	1.300.000.000,00	(1.440.000.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	19	2	1.01	6	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	1 Dokumen	950.000.000,00	1.200.000.000	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.01	8	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi					1.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	2	1.02	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 Dokumen	1.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					63.290.654.000,00	82.762.951.000	19.472.297.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					8.158.574.000,00	10.672.701.000	2.514.127.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	1.000.000,00	100.000.000,00	99.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1 Dokumen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	5.657.574.000,00	8.072.701.000	2.415.127.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga					701.000.000,00	3.050.000.000,00	2.349.000.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	420 orang	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	420 orang	500.000.000,00	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional					53.730.080.000,00	67.580.250.000	13.850.170.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	250 orang	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	250 orang	430.080.000,00	0,00	(430.080.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	2.500.000.000,00	1.800.000.000	(700.000.000,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan	600 orang	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan	600 orang	50.500.000.000,00	55.700.000.000,00	5.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Olahraga Berprestasi Provinsi yang menerima penghargaan	13 orang	Jumlah Olahraga Berprestasi Provinsi yang menerima penghargaan	131 orang	150.000.000,00	9.880.250.000	9.730.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					701.000.000,00	1.460.000.000,00	759.000.000,00		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	1.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	500.000.000,00	1.250.000.000,00	750.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	3	1.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					10.996.000.000,00	7.135.000.000,00	(3.861.000.000,00)		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					10.996.000.000,00	7.135.000.000,00	(3.861.000.000,00)		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	10.200.000.000,00	1.271.505.494	(8.928.494.506,00)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	19	4	1.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	200.000.000,00	2.185.051.180	1.985.051.180,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	200.000.000,00	827.772.840	627.772.840,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah laporan kegiatan Kepramukaan Provinsi	4 laporan	Jumlah laporan kegiatan Kepramukaan Provinsi	4 laporan	300.000.000,00	2.650.670.486,00	2.350.670.486,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	4	1.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	96.000.000,00	200.000.000,00	104.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TOTAL										112.596.340.000,00		(112.596.340.000,00)		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					72.127.858.800,00	78.087.933.800	5.960.075.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					60.950.086.800,00	65.990.161.800,00	5.040.075.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.200.000.000,00	963.242.000,00	(236.758.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	385.000.000,00	385.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	45.000.000,00	69.700.000,00	24.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	750.000.000,00	488.542.000	(261.458.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					47.966.544.000,00	47.840.637.000	(125.907.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	183 Orang/ Bulan	45.586.520.000,00	45.576.595.000,00	(9.925.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183 Dokumen	2.370.024.000,00	2.254.042.000	(115.982.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.768.800.000,00	4.754.620.000	1.985.820.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 triwulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		75.000.000,00	75.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 triwulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	235.400.000	235.400.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	100.000.000	1.600.000.000,00	1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket	1.852.400.000	2.363.349.500,00	510.949.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	150.000.000	150.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	24.870.500,00	(25.129.500,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21 Laporan	150.000.000	150.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	156.000.000	156.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					10.000.000,00	2.499.916.000	2.489.916.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10.000.000,00	2.499.916.000	2.489.916.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.853.288.800,00	7.273.902.656	420.613.856,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	312 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	312 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.164.000.400,00	2.486.881.900,00	322.881.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82 Laporan	4.686.788.400,00	4.784.520.756,00	97.732.356,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.136.454.000,00	2.642.844.144	506.390.144,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	550.000.000,00	550.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000,00	30.900.000,00	(19.100.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	320.500.000,00	471.658.000	151.158.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	703.977.000,00	903.965.500,00	199.988.500,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	511.977.000,00	430.320.644,00	(81.656.356,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					8.057.468.400,00	8.977.468.400	920.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					6.360.760.000,00	7.157.205.100	796.445.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	55 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	55 Objek	6.360.760.000,00	7.157.205.100	796.445.100,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi					1.696.708.400,00	1.820.263.300,00	123.554.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2	1.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	4 Laporan	846.708.400,00	970.263.300,00	123.554.900,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	850.000.000,00	850.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					225.000.000,00	225.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	4	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi					225.000.000,00	225.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	4	1.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	125.000.000,00	115.260.000,00	(9.740.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	4	1.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	210 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	210 Dokumen	100.000.000,00	109.740.000,00	9.740.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					2.895.303.600,00	2.895.303.600,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					225.000.000,00	225.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	11450 Objek	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	11450 Objek	100.000.000,00	91.191.000,00	(8.809.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	344 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	344 Objek	125.000.000,00	133.809.000,00	8.809.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi					2.670.303.600,00	2.670.303.600,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	22	5	1.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	467 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	467 Objek	1.950.585.000,00	1.957.102.280,00	6.517.280,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	100.000.000,00	101.800.000,00	1.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	494.718.600,00	467.258.000,00	(27.460.600,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	5	1.02	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Orang	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Orang	125.000.000,00	144.143.320,00	19.143.320,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.468.518.000,00	11.913.712.000,00	1.445.194.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					7.113.506.000,00	7.089.889.300,00	(23.616.700,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					2.610.506.000,00	4.729.889.300,00	2.119.383.300,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	450.000.000,00	825.000.000,00	375.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (DTWP)	20 dtwp	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (DTWP)			681.189.300,00	(168.810.700,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	0 Kawasan	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	2 Kawasan	850.000.000,00		#VALUE!	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang dikembangkan	82 usaha	Jumlah Usaha Pariwisata yang dikembangkan				#VALUE!	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	810.506.000,00	810.500.000,00	(6.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan	500.000.000,00	2.413.200.000,00	1.913.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi					4.503.000.000,00	2.360.000.000,00	(2.143.000.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	2	1.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4.503.000.000,00	2.360.000.000,00	(2.143.000.000,00)	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.146.708.400,00	3.196.708.400,00	1.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi					2.146.708.400,00	3.196.708.400,00	1.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3	1.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	35 Dokumen	546.708.400,00	571.208.400,00	24.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3	1.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Laporan	1.040.000.000,00	2.065.500.000,00	1.025.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3	1.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	3	1.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	340.000.000,00	340.000.000,00	-	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.208.303.600,00	1.627.114.300,00	418.810.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	5	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan					1.208.303.600,00	1.627.114.300,00	418.810.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	5	1.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan	651 Orang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan	Kompetensinya	1.208.303.600,00	1.627.114.300,00	418.810.700,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.629.416.800,00	4.429.416.800	1.800.000.000,00	UPT. MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2.629.416.800,00	4.429.416.800,00	1.800.000.000,00	UPT. MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi					2.629.416.800,00	4.429.416.800,00	1.800.000.000,00	UPT. MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6	1.01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1500 Unit	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1500 Unit	50.000.000,00	590.327.750,00	540.327.750,00	UPT. MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6	1.01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10500 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10500 Unit	300.000.000,00	1.231.743.650,00	931.743.650,00	UPT. MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	6	1.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	5 Unit	2.279.416.800,00	2.607.345.400,00	327.928.600,00	UPT. MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	22					2.697.012.000,00	5.447.012.000	2.750.000.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	1				497.600.000,00	854.723.000,00	357.123.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	1	1.07			70.000.000,00	153.123.000,00	83.123.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	70.000.000,00	153.123.000	83.123.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08			147.374.000,00	165.374.000	18.000.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	35.000.000,00	28.000.000	(7.000.000,00)	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	112.374.000,00	137.374.000	25.000.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09			280.226.000,00	536.226.000	256.000.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	15.000.000,00	15.000.000	-	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	65.226.000,00	65.226.000	-	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	456.000.000	256.000.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	2				2.199.412.000,00	2.592.289.000	392.877.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	2	1.02			2.199.412.000,00	2.592.289.000	392.877.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
2	22	2	1.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	2.199.412.000,00	2.592.289.000	392.877.000,00	UPT. TAMAN BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26					7.770.958.800,00	8.220.958.800,00	450.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	1				3.620.958.800,00	4.040.808.320,00	419.849.520,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	1	1.06			258.787.200,00	399.091.200,00	140.304.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
3	26	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	73.675.000,00	58.675.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	-	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00	58.824.000,00	46.824.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	29.860.200,00	14.860.200,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.387.200,00	17.004.000,00	616.800,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	116.400.000,00	135.728.000,00	19.328.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	78.000.000,00	78.000.000,00	-	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	26	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.162.171.600,00	3.385.717.120,00	223.545.520,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.162.171.600,00	3.385.717.120,00	223.545.520,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000,00	256.000.000,00	56.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000,00	256.000.000,00	56.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				3.250.000.000,00	3.600.000.000,00	350.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	4	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				3.250.000.000,00	3.600.000.000,00	350.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	4	1.01	2	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Laporan	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	4	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	4	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	2.850.000.000,00	3.000.000.000,00	150.000.000,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				900.000.000,00	580.150.480,00	(319.849.520,00)	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	5	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				900.000.000,00	580.150.480,00	(319.849.520,00)	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
3	26	5	1.01	8	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	400.000.000,00	80.000.000,00	(320.000.000,00)	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	5	1.01	9	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	520 Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	520 Orang	500.000.000,00	500.150.480,00	150.480,00	UPT. PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI DAN EKONOMI KREATIF WILWATIKTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.793.315.600,00	2.793.315.600,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				1.175.984.710,00	1.175.984.710,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				825.496.960,00	825.496.960,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
2	22	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		825.496.960,00	825.496.960,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.454.100,00	124.209.100	5.755.000,00	UPT. LABORATORIUM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	22	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	23.822.300,00	23.822.300,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	4.167.800,00	4.167.800,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	90.464.000,00	96.219.000,00	5.755.000,00	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					15.175.950,00	9.420.950	(5.755.000,00)	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15.175.950,00	9.420.950,00	(5.755.000,00)	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					142.628.000,00	142.628.000,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		142.628.000,00	142.628.000,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					74.229.700,00	74.229.700,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		74.229.700,00	74.229.700,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.617.330.890,00	1.617.330.890,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	3	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1.617.330.890,00	1.617.330.890,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	3	1.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	566 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	566 Orang	717.322.090,00	717.322.090,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	3	1.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	182 lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	182 lembaga	900.008.800,00	900.008.800,00	-	UPT. LABORATORIUM PELATHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TOTAL										98.487.080.000,00		(98.487.080.000,00)		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					53.192.946.141,00	54.800.905.230,00	1.607.959.089,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	48.542.790.000,00	50.594.021.962,00	2.051.231.962,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	11 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	11 Dokumen	299.902.541,00	242.546.269,00	(57.356.272,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	143.873.649,00	136.097.969,00	(7.775.680,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.217.459,00	9.935.900,00	(8.281.559,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.217.459,00	9.378.100,00	(8.839.359,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.217.459,00	8.834.600,00	(9.382.859,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	23	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.217.459,00	8.834.600,00	(9.382.859,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	18.217.459,00	25.886.400,00	7.668.941,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	64.941.597,00	43.578.700,00	(21.362.897,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17 Dokumen	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	17 Dokumen	44.056.565.187,00	39.639.412.187,00	(4.417.153.000,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	43.477.250.000,00	39.031.711.000,00	(4.445.539.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	451.792.975,00	524.332.975,00	72.540.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.217.459,00	12.415.459,00	(5.802.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	18.217.459,00	14.349.459,00	(3.868.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	18.217.459,00	12.877.459,00	(5.340.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.217.459,00	12.281.459,00	(5.936.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	36.434.917,00	19.028.917,00	(17.406.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	18.217.459,00	12.415.459,00	(5.802.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.286.983,00	7.394.300,00	107.317,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.286.983,00	7.394.300,00	107.317,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian	5 Dokumen	640.828.023,00	321.712.557,00	(319.115.466,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	14.573.967,00	14.450.000,00	(123.967,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.304.752,00	153.776.500	44.471.748,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.389.001,00	7.385.500,00	(3.501,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.286.983,00	7.242.500,00	(44.483,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	415.558.217,00	21.311.300,00	(394.246.917,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	86.715.103,00	117.546.757,00	30.831.654,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	11 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	11 Dokumen	863.155.637,00	980.381.762	117.226.125,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.652.376,00	38.355.600,00	(16.296.776,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.757.716,00	30.363.500,00	(16.394.216,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	39.754.139,00	39.582.500,00	(171.639,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.392.045,00	179.397.700,00	(20.994.345,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	91.087.293,00	83.362.000,00	(7.725.293,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	36.332.900,00	37.980.000,00	1.647.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	23	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		7.286.983,00	12.590.000,00	5.303.017,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		72.869.835,00	69.970.000,00	(2.899.835,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	270.864.462,00	404.694.462	133.830.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	21.296.938,00	18.166.000,00	(3.130.938,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	21.860.950,00	65.920.000,00	44.059.050,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					306.053.306,00	92.099.000	(213.954.306,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	306.053.306,00	92.099.000	(213.954.306,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.504.762.086,00	6.231.998.487	4.727.236.401,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.930.475,00	360.000,00	(10.570.475,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	728.698.347,00	1.087.162.481,00	358.464.134,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	765.133.264,00	5.144.476.006	4.379.342.742,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					864.236.237,00	3.078.477.400	2.214.241.163,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	137.359.638,00	226.229.400	88.869.762,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	154.119.700,00	243.464.000	89.344.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	36.434.917,00	10.815.000,00	(25.619.917,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	150.111.859,00	179.969.000	29.857.141,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	386.210.123,00	2.418.000.000	2.031.789.877,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					3.760.717.954,00		(20.538.916,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.1 %	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.1 %		3.740.179.038	(20.538.916,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1 : 296 Rasio	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1 : 296 Rasio			#VALUE!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	2.1 %	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	2.1 %			#VALUE!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						1.693.309.489	(1.062.308.812,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase Kepuasan Pemustaka	80.35 Indeks	Persentase Kepuasan Pemustaka	80.35 Indeks				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Persentase keterampilan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	11.71 %	Persentase keterampilan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	11.71 %		2.755.618.301,00	#VALUE!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
						Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi	0.12 %	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi	0.12 %			#VALUE!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	2	1.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service)	1 Perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service)	1 Perpustakaan	233.463.999,00	162.618.810	(70.845.189,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	1 Perpustakaan	621.939.962,00	270.484.275,00	(351.455.687,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	110 Eksemplar	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	110 Eksemplar	97.158.569,00	357.773.569,00	260.615.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	459.620.039,00	44.436.000	(415.184.039,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	23	2	1.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	75 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	75 Perpustakaan	205.344.466,00	50.000.000	(155.344.466,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	125 Orang	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	125 Orang	173.426.408,00	224.175.600,00	50.749.192,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	86.178.757,00	52.358.757,00	(33.820.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	8	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	45.632.610,00	45.632.610,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2500 Eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2500 Eksemplar	563.672.908,00	294.176.408,00	(269.496.500,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	100 Dokumen	269.180.583,00	191.653.460,00	(77.527.123,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	10 Kegiatan	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	10 Kegiatan	1.005.099.653,00	2.046.869.549,00	1.041.769.896,00		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	275.722.231,00	361.755.369,00	86.033.138,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Perpustakaan	109.798.120,00	1.218.540.584	1.108.742.464,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9 Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	9 Orang	20.874.410,00	25.874.410,00	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	562.318.306,00	390.612.600	(171.705.706,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	2	1.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	36.386.586,00	50.086.586,00	13.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	10 %	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	10 %		466.704.230	(422.733.957,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	0.51 %	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	0.51 %	889.438.187,00		#VALUE!		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	58 %	Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Menjadi Koleksi Nasional	58 %			#VALUE!		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang dilestarikan	38015 Eksemplar	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah yang dilestarikan	38015 Eksemplar	191.710.072,00	154.635.413,00	(37.074.659,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.01	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3000 eksemplar	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3000 eksemplar	104.254.592,00	98.679.933,00	(5.574.659,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.01	2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit	87.455.480,00	55.955.480,00	(31.500.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Literatur Sekunder yang diterbitkan	1 Naskah	Jumlah Literatur Sekunder yang diterbitkan	1 Naskah	253.748.563,00	81.539.938,00	(172.208.625,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.02	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	0 Entry	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	0 Entry	167.250.625,00	77.365.200,00	(89.885.425,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						Jumlah Entry Dokumen dan Literatur Sekunder yang diterbitkan	2000 entry	Jumlah Entry Dokumen dan Literatur Sekunder yang diterbitkan				#VALUE!		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.02	2	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	86.497.938,00	4.174.738,00	(82.323.200,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	25 Eksemplar	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	25 Eksemplar	348.225.377,00	174.569.850,00	(173.655.527,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.03	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	50 orang	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	50 orang	190.997.660,00	103.145.600,00	(87.852.060,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
2	23	3	1.03	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25 Eksemplar	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25 Eksemplar	157.227.717,00	71.424.250,00	(85.803.467,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dikembangkan	300 Eksemplar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan dikembangkan	300 Eksemplar	95.754.175,00	55.959.029,00	(39.795.146,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.04	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300 Judul	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300 Judul	79.795.146,00	40.000.000,00	(39.795.146,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	3	1.04	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300 eksemplar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	300 eksemplar	15.959.029,00	15.959.029,00	-	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					2.984.647.859,00	1.757.376.234	(1.227.271.625,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	50 %	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	50 %	2.283.761.133,00	1.395.489.134,00	(888.271.999,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	48 %	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	48 %	1.072.320.170,00	694.226.000,00	(378.094.170,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	35 %	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	35 %	#VALUE!					
2	24	2	1.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	47 Berkas	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	47 Berkas	194.588.442,00	34.152.600	(160.435.842,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4500 Berkas	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4500 Berkas	153.206.680,00	28.091.000,00	(125.115.680,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	85 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	85 Laporan	724.525.048,00	631.982.400	(92.542.648,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	13 %	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	13 %	764.588.148,00	511.002.517,00	(253.585.631,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.02	1	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	2 Arsip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	2 Arsip	63.836.116,00	43.230.000,00	(20.606.116,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.02	2	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	10 Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	10 Arsip	700.752.032,00	467.772.517	(232.979.515,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	15 %	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	15 %	446.852.815,00	190.260.617	(256.592.198,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3000 Pengguna	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	3000 Pengguna	63.836.116,00	32.299.400	(31.536.716,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	2	1.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	60 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	60 Laporan	383.016.699,00	157.961.217	(225.055.482,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan ketuhanan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	75.5 %	Persentase Tingkat keberadaan dan ketuhanan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	75.5 %	478.770.874,00	267.406.700,00	(211.364.174,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.01		Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	82.986.951,00	44.783.000,00	(38.203.951,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	35.109.864,00	23.358.000,00	(11.751.864,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	17 Berkas	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	17 Berkas	47.877.087,00	21.425.000,00	(26.452.087,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	80.5 %	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	80.5 %	111.713.204,00	58.848.200	(52.865.004,00)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.02	1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2 Arsip	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2 Arsip	41.493.476,00	28.900.000,00	(12.593.476,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	550 Arsip	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	550 Arsip	70.219.728,00	29.948.200	(40.271.528,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	24	3	1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	91.5 %	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK	91.5 %	185.124.738,00	104.165.000,00	(80.959.738,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	3	1.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	76.603.340,00	42.275.000,00	(34.328.340,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	3 Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	3 Arsip	63.836.116,00	33.230.000,00	(30.606.116,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.03	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	1 Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	1 Arsip	44.685.282,00	28.660.000,00	(16.025.282,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	81.5 %	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK	81.5 %	38.301.670,00	23.140.000,00	(15.161.670,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	3	1.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2200 Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2200 Arsip	19.150.835,00	11.570.000,00	(7.580.835,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2500 Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2500 Arsip	19.150.835,00	11.570.000,00	(7.580.835,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100 %	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK	100 %	60.644.311,00	36.470.500,00	(24.173.811,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	3	1.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	2 Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	2 Arsip	19.150.835,00	11.570.000,00	(7.580.835,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.05	2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	3 Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	3 Arsip	19.150.835,00	11.570.500,00	(7.580.335,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	3	1.05	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2 Arsip	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2 Arsip	22.342.641,00	13.330.000,00	(9.012.641,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100 %	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100 %	222.115.852,00	94.480.400,00	(127.635.452,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2	24	4	1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	1 Dokumen	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	1 Dokumen	222.115.852,00	94.480.400,00	(127.635.452,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	24	4	1.01	1	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	2 SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	2 SOP	187.005.988,00	65.103.400,00	(121.902.588,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	4	1.01	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	35.109.864,00	29.377.000,00	(5.732.864,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TOTAL									56.177.594.000,00		(56.177.594.000,00)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					167.594.308.000,00	283.987.694.000	116.393.386.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	124.852.371.000	113.487.206.000,00	11.365.165.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %	#VALUE!			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				Persentase realisasi anggaran	92 %	Persentase realisasi anggaran	92 %	#VALUE!			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	2.626.850.000,00	4.047.614.001	1.420.764.001,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	#VALUE!			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	3.436.330.101,00	1.436.330.101,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.400.000,00	14.400.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	25	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	12.450.000,00	12.150.000,00	(300.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	600.000.000,00	594.733.900,00	(5.266.100,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	90.028.586.128,00	84.038.751.128,00	(5.989.835.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	387 Orang/ Bulan	86.183.545.000,00	80.168.710.000,00	(6.014.835.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.227.695.928,00	2.277.695.928,00	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.069.030.000,00	1.069.030.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	513.315.200,00	488.315.200	(25.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	511.940.000,00	778.067.500	266.127.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	150.000.000,00	311.167.500	161.167.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	161.940.000,00	103.500.000	(58.440.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.000.000,00	13.400.000,00	(36.600.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 dokumen	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 laporan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 laporan	100.000.000,00	300.504.000,00	200.504.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50.000.000,00	50.504.000,00	504.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 laporan	2.285.058.211,00	6.504.266.475	4.219.208.264,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	458.491.230,00	658.253.674	199.762.444,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.072.168.211,00	4.731.494.031	3.659.325.820,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	558.905.271,00	958.905.270	399.999.999,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	94.245.000,00	94.245.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	50.120.000,00	120.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	51.248.500,00	11.248.500	(40.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	16.393.738.121,00	25.446.843.437	9.053.105.316,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	31.167.952,00	31.167.952	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.525.479.400,00	6.646.183.796	2.120.704.396,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.837.090.769,00	18.769.491.689	6.932.400.920,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	25	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	1.533.033.540,00	3.728.324.459	2.195.290.919,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	72.835.000,00	72.835.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	247 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	247 Unit	1.310.198.540,00	1.435.198.540	125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	150.000.000,00	1.923.278.530,00	1.773.278.530,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah produksi garam rakyat	306000 Ton	Jumlah produksi garam rakyat	306000 Ton	5.861.020.520,00	13.461.020.518,00	7.599.999.998,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Guna	10 Ha	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Guna			#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Persentase kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan Rencana Zonasi	1 %	Persentase kawasan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan Rencana Zonasi			#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	2	1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan rencana zonasi	36500 ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sesuai dengan rencana zonasi	36500 ha	2.842.724.020,00	4.279.779.588,00	1.437.055.568,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Luasan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut sesuai zonasinya	200 ha	Luasan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut sesuai zonasinya			#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	2	1.01	1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	691.882.500,00	841.882.500,00	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.01	2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	36476.78 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	36476.78 Ha	498.311.125,00	398.311.123,00	(100.000.002,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.01	3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	7 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	7 Ha	1.510.370.575,00	2.900.470.175,00	1.390.099.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.01	4 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	142 Orang	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	142 Orang	142.159.820,00	139.115.790,00	(3.044.030,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang Diterbitkan	12 rekomendasi izin	Jumlah rekomendasi izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang Diterbitkan	12 rekomendasi izin	873.500.000,00	823.500.000,00	(50.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah stakeholder terakses informasi pengajuan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	60 orang	Jumlah stakeholder terakses informasi pengajuan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	60 orang		#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	2	1.02	2 Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	40 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	40 Rekomendasi	537.500.000,00	437.500.000,00	(100.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	3 Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	136.000.000,00	136.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	4 Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.02	5 Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	300 Orang	Jumlah masyarakat pesisir yang diberdayakan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil	300 Orang	2.144.796.500,00	8.357.740.930,00	6.212.944.430,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 Orang	800.000.000,00	6.809.900.400,00	6.009.900.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	3 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40 Orang	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	40 Orang	250.000.000,00	180.000.000,00	(70.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	2	1.03	4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2 Kelompok	1.094.796.500,00	1.367.840.530,00	273.044.030,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Target	Target	Target	Target						
					Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur	Tolok Ukur						
3	25	3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	447460 Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap	447460 Ton	19.518.284.713,00	77.934.863.239	58.416.578.526,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0,08 %	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0,08 %				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah KUB nelayan yang terfasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap	52 kelompok	Jumlah KUB nelayan yang terfasilitasi sarana prasarana perikanan tangkap	52 kelompok	6.818.899.875,00	7.419.652.857,00	600.752.982,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan	148197 ton	Jumlah produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan	148197 ton				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	300.000.000,00	1.262.080.300,00	962.080.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Unit	700.000.000,00	1.333.252.000,00	633.252.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	5.818.899.875,00	4.824.320.557,00	(994.579.318,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	455 rekomendasi izin	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	455 rekomendasi izin	598.226.500,00	326.973.200,00	(271.253.300,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.03	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	450 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	450 Rekomendasi	598.226.500,00	326.973.200,00	(271.253.300,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.04		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	13 rekomendasi izin	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil yang diterbitkan	13 rekomendasi izin	409.620.713,00	253.872.900,00	(155.747.813,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.04	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	7 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	7 Rekomendasi	409.620.713,00	253.872.900,00	(155.747.813,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	243 tanda daftar	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	243 tanda daftar	350.000.000,00	369.694.000,00	19.694.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.05	2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	190 Dokumen	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	190 Dokumen	350.000.000,00	369.694.000,00	19.694.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	10.359.132.250,00	68.622.277.607	58.263.145.357,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	14 lokasi	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	14 lokasi				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06	1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	11 Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	11 Pelabuhan Perikanan	2.000.000.000,00	16.813.585.149,00	14.813.585.149,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1234 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1234 Unit	5.550.000.000,00	47.686.034.394	42.136.034.394,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	17 Layanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	17 Layanan	2.809.132.250,00	4.122.658.064	1.313.525.814,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	17 rekomendasi izin	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diterbitkan	17 rekomendasi izin	265.333.750,00	187.560.750,00	(77.773.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.07	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	265.333.750,00	187.560.750,00	(77.773.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	14 rekomendasi izin	Jumlah Rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	14 rekomendasi izin	239.877.125,00	203.314.925,00	(36.562.200,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	3	1.08	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	11 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	11 Rekomendasi	239.877.125,00	203.314.925,00	(36.562.200,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	25	3	1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar	73 kapal	Jumlah kapal perikanan diatas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terdaftar	73 kapal	233.194.500,00	283.525.700,00	50.331.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1.09	2 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	150 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	150 Rekomendasi	233.194.500,00	283.525.700,00	50.331.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	16 kapal	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	16 kapal	244.000.000,00	267.991.300,00	23.991.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	3	1.10	2 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomendasi	244.000.000,00	267.991.300,00	23.991.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1326373.33 Ton	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1326373.33 Ton	14.474.835.702,00	42.881.905.520,00	28.407.069.818,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 rekomendasi izin	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 rekomendasi izin	137.772.163,00	137.772.162,00	(1,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.01	2 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	125.547.774,00	125.547.774,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.01	3 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen	12.224.389,00	12.224.388,00	(1,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	1 rekomendasi izin	Jumlah Rekomendasi izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan	1 rekomendasi izin	435.153.278,00	205.153.278,00	(230.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.02	2 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	435.153.278,00	205.153.278,00	(230.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah ketersediaan benih bermutu	4400000 ekor	Jumlah ketersediaan benih bermutu	4400000 ekor	5.706.290.723,00	10.223.238.892	4.516.948.169,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pelaku usaha budidaya laut yang terakses pembinaan budidaya laut	20 orang	Jumlah pelaku usaha budidaya laut yang terakses pembinaan budidaya laut	20 orang				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	2 kelompok	Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	2 kelompok				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah produksi perikanan budidaya	18800 kg	Jumlah produksi perikanan budidaya	18800 kg				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.05	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	231.272.216,00	231.272.216,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.05	2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	450.000.000,00	950.000.000,00	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.05	4 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	2.294.890.700,00	2.646.559.724,00	351.669.024,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.05	6 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	512 Dokumen	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	512 Dokumen	1.606.742.900,00	5.272.022.044	3.665.279.144,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.05	7 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	577 Orang	Jumlah Pembudidaya	577 Orang	1.123.384.908,00	1.123.384.908,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	4	1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah ketersediaan benih bermutu	16000000 ekor	Jumlah ketersediaan benih bermutu	16000000 ekor	8.195.619.539,00	32.315.741.188	24.120.121.649,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
					Jumlah pelaku usaha budidaya yang terakses pembinaan budidaya ikan di perairan darat	800 orang	Jumlah pelaku usaha budidaya yang terakses pembinaan budidaya ikan di perairan darat	800 orang				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	110 kelompok	Jumlah POKDAKAN yang terfasilitasi sarana prasarana Perikanan Budidaya	110 kelompok				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah produksi perikanan budidaya	56400 kg	Jumlah produksi perikanan budidaya	56400 kg				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	4	1.06	1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26 Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26 Unit	2.919.700.944,00	16.916.765.173	13.997.064.229,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	25	4	1.06	2	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	5.275.918.595,00	15.398.976.015	10.123.057.420,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	90 %	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	90 %	4.810.053.500,00	9.064.626.156,00	4.254.572.656,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah penanganan pelanggaran usaha kelautan dan perikanan	20 Kasus	Jumlah penanganan pelanggaran usaha kelautan dan perikanan	20 Kasus	4.715.053.500,00	8.907.626.156,00	4.192.572.656,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	4.215.053.500,00	7.992.716.183	3.777.662.683,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	20 Dokumen	300.000.000,00	704.909.973,00	404.909.973,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5 Dokumen	50.000.000,00	62.000.000,00	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.01	4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	100 Kelompok	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	100 Kelompok	150.000.000,00	148.000.000,00	(2.000.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penanganan pelanggaran usaha Kelautan dan Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Kasus	Jumlah penanganan pelanggaran usaha Kelautan dan Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Kasus	95.000.000,00	157.000.000,00	62.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	30.000.000,00	52.000.000,00	22.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	5	1.02	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Dokumen	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan UPI yang bersertifikat	1093955.63 Ton	Jumlah produk olahan UPI yang bersertifikat	1093955.63 Ton	9.442.907.567,00	15.792.907.567,00	6.350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	65 rekomendasi izin	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	65 rekomendasi izin	1.873.002.735,00	2.673.002.734,00	799.999.999,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30 Rekomendasi	851.115.413,00	651.115.412,00	(200.000.001,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.01	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1.021.887.322,00	2.021.887.322,00	1.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengguna Layanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	800 orang	Jumlah Pengguna Layanan Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	800 orang	5.069.904.832,00	8.419.904.833,00	3.350.000.001,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah produk perikanan terstandarisasi jaminan mutu	360 produk	Jumlah produk perikanan terstandarisasi jaminan mutu	360 produk			#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	25	6	1.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	350 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	350 Unit Usaha	2.820.000.000,00	5.386.129.599,00	2.566.129.599,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.02	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	200 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	200 Unit Usaha	2.249.904.832,00	3.033.775.234,00	783.870.402,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersalurkan	175000 ton	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersalurkan	175000 ton	2.500.000.000,00	4.700.000.000,00	2.200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	220000 ton	Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia	220000 ton				#VALUE!	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03	1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	12 Dokumen	1.000.000.000,00	1.672.753.800,00	672.753.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03	2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	6 Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	6 Unit Usaha	1.000.000.000,00	2.363.023.200,00	1.363.023.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	6	1.03	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	48 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	48 Dokumen	500.000.000,00	664.223.000,00	164.223.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TOTAL										167.594.308.000,00		(167.594.308.000,00)		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					9.557.652.000,00	9.383.443.000	(174.209.000,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	9.157.652.000,00		8.911.417.600	(246.234.400,00)	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	70 %	Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	70 %				#VALUE!	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %				#VALUE!	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase realisasi anggaran	92 %	Persentase realisasi anggaran	92 %				#VALUE!	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	70.000.000,00	56.888.800	(13.111.200,00)	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	#VALUE!			UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN		
3	25	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	8.212.000,00	(1.788.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	12.248.600,00	2.248.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	12.248.600,00	2.248.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	3.309.400,00	(6.690.600,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	3.309.400,00	(6.690.600,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	7.048.400,00	(2.951.600,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	10.000.000,00	10.512.400	512.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	3.382.124.000,00	3.229.969.300	(152.154.700,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	2.857.652.000,00	2.683.443.000,00	(174.209.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	464.472.000,00	479.003.000	14.531.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000,00	34.311.300	9.311.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000,00	8.212.000	(1.788.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 laporan	243.235.000,00	134.262.815	(108.972.185,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	11.826.000,00	1.826.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	9.956.700,00	(43.300,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	203.235.000,00	92.410.315,00	(110.824.685,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.069.800,00	69.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	1.482.293.000,00	1.344.647.552,00	(137.645.448,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	1.521.000,00	(8.479.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	534.931.400,00	588.559.261,00	53.627.861,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	937.361.600,00	754.567.291,00	(182.794.309,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	30.000.000,00	45.649.133,00	15.649.133,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	10.000.000,00	21.900.000,00	11.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	13.935.533,00	3.935.533,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	10.000.000,00	9.813.600,00	(186.400,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	88 %	Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan		3.950.000.000,00	4.100.000.000,00	150.000.000,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD	5 %	Persentase peningkatan pendapatan BLUD				#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.950.000.000,00	4.100.000.000,00	150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0.08 %	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0.08 %	400.000.000,00	472.025.400,00	72.025.400,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Produksi Perikanan Tangkap	447460 Ton	Produksi Perikanan Tangkap	447460 Ton			#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	400.000.000,00	472.025.400,00	72.025.400,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
						Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	15 lokasi	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	15 lokasi			#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	84 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	84 Unit	200.000.000,00	344.036.400,00	144.036.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	18 Layanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	18 Layanan	200.000.000,00	127.989.000,00	(72.011.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN
							TOTAL			9.557.652.000,00		(9.557.652.000,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MAYANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.273.003.520,00	3.922.411.520,00	649.408.000,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	3.263.003.520,00	3.564.406.385,00	301.402.865,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	60 %	Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	60 %					UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %					UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Persentase realisasi anggaran	92 %	Persentase realisasi anggaran	92 %					UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	5.913.000,00	4.325.600,00	(1.587.400,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen					UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	478.250,00	81.400,00	(396.850,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	478.250,00	81.400,00	(396.850,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	478.250,00	81.400,00	(396.850,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	478.250,00	81.400,00	(396.850,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	1.899.992.222,00	2.021.741.681	121.749.459,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/ Bulan	1.716.990.456,00	1.742.015.000,00	25.024.544,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	175.501.766,00	271.765.961	96.264.195,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.500.000,00	4.530.000	1.030.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.000.000,00	90.720,00	(1.909.280,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2.000.000,00	3.040.000,00	1.040.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen					UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	11 laporan	Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	11 laporan	22.147.498,00	159.840.450,00	137.692.952,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	27.116.000,00	25.116.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	21.370.250,00	19.370.250,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	4.463.000,00	2.463.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.147.498,00	104.546.400,00	89.398.902,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.000.000,00	2.344.800,00	1.344.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	669.450.000,00	622.624.785	(46.825.215,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	2.000.000,00	2.520.000,00	520.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	303.450.000,00	300.604.455	(2.845.545,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	364.000.000,00	319.500.330	(44.499.670,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	20.000.000,00	75.477.349	55.477.349,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	10.000.000,00	12.600.000	2.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	54.679.549	49.679.549,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	5.000.000,00	8.197.800	3.197.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	100 %	Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	70 %	645.500.800,00	680.396.520,00	34.895.720,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD	11.39 %	Persentase peningkatan pendapatan BLUD	2.51 %		#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	645.500.800,00	680.396.520,00	34.895.720,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0.08 %	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0.08 %	10.000.000,00	358.005.135,00	348.005.135,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
						Produksi Perikanan Tangkap	447460 Ton	Produksi Perikanan Tangkap	447460 Ton		#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	10.000.000,00	358.005.135,00	348.005.135,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
						Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	15 lokasi	Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	15 lokasi		#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	43 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	43 Unit	5.000.000,00	248.070.527,00	243.070.527,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	5.000.000,00	109.934.608,00	104.934.608,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
TOTAL										3.273.003.520,00		#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.819.538.000,00	4.022.495.000	202.957.000,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85.6 -	Indeks profesionalitas ASN		3.632.038.000,00	3.876.476.300,00	244.438.300,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	
						Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai	88 %	Persentase indikator kegiatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan yang tercapai			#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai	92 %	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai			#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase realisasi anggaran	92 %	Persentase realisasi anggaran			#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah		820.000,00	1.540.800,00	720.800,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah			#VALUE!				UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	175.000,00	224.100,00	49.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	
3	25	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	175.000,00	224.100,00	49.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	
3	25	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	175.000,00	224.100,00	49.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	
3	25	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	175.000,00	224.100,00	49.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	120.000,00	149.400,00	29.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 dokumen	1.851.314.000,00	2.102.510.200,00	251.196.200,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8 Orang/ Bulan	1.716.388.000,00	1.919.345.000,00	202.957.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131.190.000,00	178.544.000,00	47.354.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	3.736.000,00	3.127.200,00	(608.800,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 laporan	21.000.000,00	38.989.200,00	17.989.200,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	5.356.000,00	(644.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	21.040.400,00	6.040.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	1.100.192.000,00	1.042.460.200,00	(57.731.800,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	192.000,00	192.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000,00	396.959.802,00	96.959.802,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	800.000.000,00	645.308.398,00	(154.691.602,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	55.562.000,00	87.825.900,00	32.263.900,00		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	55.562.000,00	87.825.900,00	32.263.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan Pelabuhan Perikanan	88 %		603.150.000,00	-		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Persentase peningkatan pendapatan BLUD	5 %			#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	1	1.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	603.150.000,00	603.150.000,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	0,08 %		146.018.700,00	(41.481.300,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Produksi Perikanan Tangkap	447460 Ton			#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	3	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah kapal perikanan yang terlayani	8686 kapal	187.500.000,00	146.018.700,00	(41.481.300,00)		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
						Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi yang ditetapkan	15 lokasi			#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	3	1.06	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	10 Unit	100.000.000,00	87.196.000,00	(12.804.000,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	25	3	1.06	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	2 Layanan	87.500.000,00	58.822.700,00	(28.677.300,00)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
TOTAL								3.819.538.000,00		#VALUE!		UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI PONDOKDADAP
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			92.452.313.000,00	100.187.087.004	7.734.774.004,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			31.520.794.000,00	30.584.975.000,00	(935.819.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000.000,00	900.000.000,00	(100.000.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	734.124.000,00	699.474.000,00	(34.650.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23.800.000,00	5.375.000,00	(18.425.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.450.000,00	5.375.000,00	(15.075.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.650.000,00	5.375.000,00	(5.275.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.650.000,00	5.375.000,00	(5.275.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	86.032.000,00	79.332.000,00	(6.700.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	114.294.000,00	99.694.000,00	(14.600.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.357.819.000,00	24.777.000.000,00	(1.580.819.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	24.392.819.000,00	22.407.000.000,00	(1.985.819.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.567.200,00	2.121.096.000,00	367.528.800,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	63.572.800,00	53.211.000,00	(10.361.800,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	111.910.000,00	169.546.000,00	57.636.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.675.000,00	5.675.000,00	-	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	19.600.000,00	15.732.000,00	(3.868.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.675.000,00	4.740.000,00	(5.935.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.405.000,00	3.405.000,00	-	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.405.000,00	3.405.000,00	-	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					424.918.300,00	519.538.500,00	94.620.200,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	175.647.500,00	208.440.500,00	32.793.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	223.370.800,00	149.418.000,00	(73.952.800,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	25.900.000,00	161.680.000,00	135.780.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					900.255.100,00	1.163.714.500,00	263.459.400,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.388.400,00	34.745.400,00	2.357.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	602.008.932,00	867.052.932,00	265.044.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	88.893.518,00	88.893.518,00	-	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	56.690.250,00	49.361.650,00	(7.328.600,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105.274.000,00	106.279.000,00	1.005.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	17.382.000,00	2.382.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.724.045.900,00	2.074.556.035,00	350.510.135,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	469.750.000,00	619.125.000,00	149.375.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.254.295.900,00	1.455.431.035,00	201.135.135,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.110.350.700,00	1.146.760.965,00	36.410.265,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	179.850.700,00	124.603.600,00	(55.247.100,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3 27 1 1.09 1	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit			#VALUE!	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	60.500.000,00	60.498.900,00	(1.100,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	870.000.000,00	961.658.465,00	91.658.465,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					43.499.990.000,00	42.535.529.954	(964.460.046,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 2 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					41.499.990.000,00	35.010.615.754,00	(6.489.374.246,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 2 1.01 1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	62 Laporan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	62 Laporan	41.499.990.000,00	35.010.615.754,00	(6.489.374.246,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 2 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					2.000.000.000,00	7.524.914.200	5.524.914.200,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 2 1.02 4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	5 Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	8 Laporan	2.000.000.000,00	7.524.914.200,00	5.524.914.200,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.669.353.000,00	2.366.322.000,00	(303.031.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3 1.01	Penataan Prasarana Pertanian					2.669.353.000,00	2.366.322.000,00	(303.031.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3 1.01 1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8 Dokumen	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	8 Dokumen	1.847.000.000,00	655.298.000,00	(1.191.702.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3 1.01 2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	15 Dokumen	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	15 Dokumen	500.000.000,00	1.366.995.000,00	866.995.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 3 1.01 9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	19 Laporan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	19 Laporan	322.353.000,00	344.029.000,00	21.676.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					2.665.000.000,00	4.390.000.000,00	1.725.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 5 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi					2.665.000.000,00	4.390.000.000,00	1.725.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 5 1.01 1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	159 Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	165 Ha	1.850.000.000,00	3.800.000.000	1.950.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 5 1.01 2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	40 Ha	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	40 Ha	215.000.000,00	400.000.000,00	185.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 5 1.01 4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Ha	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Ha	600.000.000,00	190.000.000,00	(410.000.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					162.176.000,00	165.500.000,00	3.324.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 6 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					162.176.000,00	165.500.000,00	3.324.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 6 1.01 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	5 Dokumen	29.020.000,00	77.000.000,00	47.980.000,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 6 1.01 3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	133.156.000,00	88.500.000,00	(44.656.000,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					11.935.000.000,00	20.144.760.050,00	8.209.760.050,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 7 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					11.935.000.000,00	20.144.760.050,00	8.209.760.050,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 7 1.02 1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	5 Dokumen	1.092.045.700,00	12.504.158.250,00	11.412.112.550,00	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 7 1.02 2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25 Kelompok	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	25 Kelompok	10.842.954.300,00	7.640.601.800,00	(3.202.352.500,00)	DINAS PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.410.500.000,00	2.405.500.000	(5.000.000,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					450.000.000,00	445.000.000,00	(5.000.000,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 1 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					5.200.000,00	144.904.000,00	139.704.000,00	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3 27 1 1.05 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		5.200.000,00	144.904.000,00	139.704.000,00	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.06				91.770.000,00	112.855.524,00	21.085.524,00	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN			
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	963.500,00	2.071.000,00	1.107.500,00	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	83.407.400,00	105.710.400,00	22.303.000,00	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.399.100,00	5.074.124,00	(2.324.976,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.040.000,00	0,00	(15.040.000,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.040.000,00	0,00	(15.040.000,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					337.990.000,00	187.240.476,00	(150.749.524,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	17.800.000,00	16.912.500,00	(887.500,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	320.190.000,00	170.327.976,00	(149.862.024,00)	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.460.500.000,00	1.460.500.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					1.460.500.000,00	1.460.500.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	24 Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	24 Laporan	1.460.500.000,00	1.460.500.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					500.000.000,00	500.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					500.000.000,00	500.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.909.500.000,00	1.904.199.996,00	(5.300.004,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					509.500.000,00	504.199.996,00	(5.300.004,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					202.603.200,00	212.410.800,00	9.807.600,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	202.603.200,00	212.410.800,00	9.807.600,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					82.776.800,00	84.071.320,00	1.294.520,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.339.000,00	1.421.100,00	82.100,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	26.977.800,00	28.190.220,00	1.212.420,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	54.460.000,00	54.460.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.220.000,00	87.800.000,00	(22.420.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11.400.000,00	12.000.000,00	600.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	98.820.000,00	75.800.000,00	(23.020.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					113.900.000,00	119.917.876,00	6.017.876,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5.100.000,00	4.307.600,00	(792.400,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	108.800.000,00	115.610.276,00	6.810.276,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					869.754.000,00	1.161.053.000,00	291.299.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman					869.754.000,00	1.161.053.000,00	291.299.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2	1.02	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	450 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Benih	450 Sertifikat	469.754.000,00	469.754.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	2	1.02	4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	12 Laporan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	12 Laporan	400.000.000,00	691.299.000,00	291.299.000,00	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					30.246.000,00	30.246.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					30.246.000,00	30.246.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	6	1.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.246.000,00	30.246.000,00	-	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					500.000.000,00	208.701.000,00	(291.299.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					500.000.000,00	208.701.000,00	(291.299.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	500.000.000,00	208.701.000,00	(291.299.000,00)	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	DINAS PERKEBUNAN
TOTAL										96.772.313.000,00		(96.772.313.000,00)		DINAS PERKEBUNAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					75.007.497.000,00	85.738.572.500	10.731.075.500,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85 %	Indeks Profesionalitas ASN	85 %		61.967.829.700	5.152.332.700,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	56.815.497.000,00		#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	15 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	15 dokumen	600.000.000,00	1.035.797.500	435.797.500,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	400.400.000,00	834.432.800,00	434.032.800,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	5.264.700,00	1.764.700,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	116.600.000,00	116.600.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan	8 dokumen	Jumlah dokumen Administrasi keuangan	8 dokumen	50.742.990.000,00	52.367.362.000,00	1.624.372.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 Orang/ Bulan	49.666.072.000,00	51.236.383.000,00	1.570.311.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	848.604.000,00	902.665.000,00	54.061.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Laporan Verifikasi penatausahaan	1 laporan	Jumlah Laporan Verifikasi penatausahaan	1 laporan			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	180.314.000,00	180.314.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah	3 dokumen	212.000.000,00	238.344.200	26.344.200,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	113.000.000,00	13.000.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.000.000,00	36.544.200	8.544.200,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	84.000.000,00	88.800.000,00	4.800.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	6 dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian	6 dokumen	2.913.395.000,00	3.026.392.000	112.997.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	3.700.000,00	3.700.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	177.160.000,00	9.702.000,00	(167.458.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.668.335.000,00	2.968.840.000	300.505.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	27.000.000,00	18.500.000,00	(8.500.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	1 laporan	Jumlah laporan SKP	1 laporan	3.700.000,00	3.000.000,00	(700.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	33.500.000,00	22.650.000,00	(10.850.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum	9 dokumen	Jumlah dokumen administrasi umum	9 dokumen	289.136.000,00	2.464.235.000	2.175.099.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.000.000,00	21.250.000	2.250.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	50.956.000,00	2.082.160.000	2.031.204.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	18.100.000,00	16.500.000,00	(1.600.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 paket	28.000.000,00	19.000.000,00	(9.000.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	46.000.000,00	64.375.000	18.375.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan				#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN				
3	27	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	1 Laporan	Jumlah paket pengadaan	1 Laporan	8.280.000,00	13.800.000,00	5.520.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	Jumlah laporan	1 laporan	101.800.000,00	215.280.000,00	113.480.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	4.500.000,00	(5.500.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan	1 dokumen	Jumlah dokumen pengadaan	1 Dokumen	94.500.000,00	94.500.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	94.500.000,00	94.500.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	1.522.268.600,00	2.414.549.000	892.280.400,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.133.268.600,00	1.743.989.000,00	610.720.400,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	1 Laporan	Jumlah Jasa	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	382.000.000,00	663.560.000,00	281.560.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan	2 dokumen	Jumlah dokumen pemeliharaan		441.207.400,00	326.650.000,00	(114.557.400,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa		Jumlah jasa			272.000.000,00	2.000.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Jasa		Jumlah Jasa				#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	171.207.400,00	54.650.000,00	(116.557.400,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	2.086.000.000,00	2.616.480.000	530.480.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %			#VALUE!	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan	1 Laporan	Jumlah Laporan pengelolaan sumber daya Genetik (SDG) Hewan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.03	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	Jumlah laporan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	835.000.000,00	1.203.600.000	368.600.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.04	1	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen	500.000.000,00	864.400.000,00	364.400.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.04	2	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Laporan	285.000.000,00	289.200.000,00	4.200.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.04	3	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Orang	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	915.000.000,00	1.073.240.000	158.240.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	27	2	1.05	2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	30000000 Ton	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	30000000 Ton	600.000.000,00	758.240.000	158.240.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.05	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	4 Laporan	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	4 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	2 laporan	Jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	2 laporan	286.000.000,00	287.000.000,00	1.000.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.06	1	Periksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 laporan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	2 laporan	80.000.000,00	74.000.000,00	(6.000.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.06	2	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	5 Kasus	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	5 Kasus	206.000.000,00	215.640.000	9.640.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	3 %	Persentase peningkatan populasi ternak di wilayah sumber bibit	3 %	250.000.000,00	8.278.000.000,00	8.028.000.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan pembangunan / pemeliharaan yang dilakukan	3 laporan	Jumlah Laporan pembangunan / pemeliharaan yang dilakukan	3 laporan	100.000.000,00	8.128.000.000,00	8.028.000.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3	1.01	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Jumlah Rumah Sakit Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3	1.01	6	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2 laporan	Jumlah laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	2 laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3	1.02	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	3	1.02	2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	4.750.000.000,00	5.639.134.800	889.134.800,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
				Persentase peningkatan status kesehatan hewan		80 %	Persentase peningkatan status kesehatan hewan	80 %	#VALUE!				DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
				Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH		5 %	Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %	#VALUE!				DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan bimbingan zoonosis kepada masyarakat	1 laporan	Jumlah laporan bimbingan zoonosis kepada masyarakat	1 laporan	2.850.000.000,00	3.344.863.600	494.863.600,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah laporan pengendalian PHMS	1 laporan	Jumlah laporan pengendalian PHMS	1 laporan		#VALUE!		DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.01	1	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2 Laporan	250.000.000,00	252.800.000	2.800.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.200.000.000,00	2.452.863.600	252.863.600,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					#VALUE!		DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.01	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	400.000.000,00	639.200.000	239.200.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan	2 laporan	Jumlah laporan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan	2 laporan	900.000.000,00	1.108.671.200	208.671.200,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2 Laporan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	2 Laporan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	13 Laporan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	13 Laporan	270.000.000,00	387.600.000	117.600.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.02	3	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	16 Laporan	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	16 Laporan	500.000.000,00	591.071.200	91.071.200,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 laporan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 laporan	600.000.000,00	566.400.000	(33.600.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.03	1	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	3 Unit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	3 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	4	1.03	2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	20 Laporan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	20 Laporan	100.000.000,00	101.400.000	1.400.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.03	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 Dokumen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 Dokumen	200.000.000,00	165.000.000,00	(35.000.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			#VALUE!		DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sertifikasi persyaratan teknis yang diterbitkan	20 sertifikat	Jumlah sertifikasi persyaratan teknis yang diterbitkan	20 sertifikat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.04	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	20 Sertifikat	Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	20 Sertifikat	100.000.000,00	100.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.05		Kesejahteraan Hewan	Jumlah laporan kesejahteraan Hewan	2 dokumen	Jumlah laporan kesejahteraan Hewan	2 dokumen	300.000.000,00	519.200.000	219.200.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.05	1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	20 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	20 Sertifikat	100.000.000,00	116.400.000	16.400.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			#VALUE!		DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4	1.05	2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus	200.000.000,00	402.800.000	202.800.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	2 %	Persentase peningkatan pelaku usaha yang mengurus perizinan	2 %	300.000.000,00	317.700.000,00	17.700.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	6	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Izin Usaha Pertanian	1 laporan	Jumlah laporan Izin Usaha Pertanian	1 laporan	300.000.000,00	317.700.000,00	17.700.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	6	1.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	4 Laporan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	4 Laporan	300.000.000,00	317.700.000,00	17.700.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan	5 %	Persentase peningkatan pelaku usaha agribisnis peternakan	5 %	10.806.000.000,00	6.919.428.000,00	(3.886.572.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	2 dokumen	Jumlah Laporan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	2 dokumen	10.356.000.000,00	6.465.388.000,00	(3.890.612.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	1.02	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	400.000.000,00	1.002.800.000,00	602.800.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	1.02	2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	50 Kelompok	9.956.000.000,00	5.462.588.000,00	(4.493.412.000,00)	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2 dokumen	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2 dokumen	450.000.000,00	454.040.000,00	4.040.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	1.03	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1 Unit	300.000.000,00	304.040.000,00	4.040.000,00	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	7	1.03	2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	DINAS PETERNAKAN	DINAS PETERNAKAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.183.319.000,00	1.285.240.000,00	101.921.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85%	Indeks profesionalitas ASN	85%	900.160.000,00	30.160.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN	
						Persentase Indikator Program yang tercapai	94%	Persentase Indikator Program yang tercapai	94%	870.000.000,00	#VALUE!	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN	
						Persentase Realisasi Anggaran	95%	Persentase Realisasi Anggaran	95%	#VALUE!	#VALUE!	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	870.000.000,00	900.160.000,00	30.160.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	870.000.000,00	900.160.000,00	30.160.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	313.319.000,00	385.080.000,00	71.761.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN
						Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	#VALUE!	#VALUE!	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN	
						Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	#VALUE!	#VALUE!	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	313.319.000,00	385.080.000,00	71.761.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	0 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	0 Laporan	313.319.000,00	385.080.000,00	71.761.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN
						Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan			#VALUE!	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MAGETAN	DINAS PETERNAKAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					935.300.000,00	1.010.300.000	75.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN	85 %	435.300.000,00	435.300.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
					Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN	
					Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	435.300.000,00	450.700.000	15.400.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	435.300.000,00	450.700.000	15.400.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi daging	2,5 %	Persentase peningkatan produksi daging	2,5 %	500.000.000,00	559.600.000,00	59.600.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
					Persentase peningkatan produksi susu	2 %	Persentase peningkatan produksi susu	2 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN	
					Persentase peningkatan produksi telur	2,2 %	Persentase peningkatan produksi telur	2,2 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah ketersediaan Benih/ Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/ Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	4 Laporan	500.000.000,00	559.600.000,00	59.600.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	500.000.000,00	559.600.000,00	59.600.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK KEDIRI	DINAS PETERNAKAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.100.000.000,00	1.205.120.000,00	105.120.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN	85 %	515.000.000,00	552.230.900,00	37.230.900,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
					Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN	
					Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	515.000.000,00	552.230.900,00	37.230.900,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	515.000.000,00	552.230.900,00	37.230.900,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	585.000.000,00	652.889.100,00	67.889.100,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
					Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN	
					Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	-			UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	585.000.000,00	652.889.100,00	67.889.100,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	585.000.000,00	652.889.100,00	67.889.100,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER	DINAS PETERNAKAN
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.300.000.000,00	1.431.360.000,00	131.360.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN	715.000.000,00	805.960.000,00	90.960.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN			
				Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai			94 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN		
				Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran			95 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN		
3	27	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	715.000.000,00	805.960.000,00	90.960.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	715.000.000,00	805.960.000,00	90.960.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	585.000.000,00	625.400.000,00	40.400.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN			
				Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu			2 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN		
				Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur			2,2 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN		
3	27	2	1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 Laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 Laporan	585.000.000,00	625.400.000,00	40.400.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	585.000.000,00	625.400.000,00	40.400.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK MALANG	DINAS PETERNAKAN
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.250.000.000,00	1.406.580.000,00	156.580.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN	665.000.000,00	696.580.000,00	31.580.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN			
				Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai			94 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN		
				Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran			95 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN		
3	27	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	665.000.000,00	696.580.000,00	31.580.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	665.000.000,00	696.580.000,00	31.580.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	585.000.000,00	710.000.000,00	125.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN			
				Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu			2 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN		
				Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur			2,2 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN		
3	27	2	1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	585.000.000,00	710.000.000,00	125.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2	1.05	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	585.000.000,00	710.000.000,00	125.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK BATU	DINAS PETERNAKAN
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.300.000.000,00	1.432.500.000,00	132.500.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	85 %	Indeks Profesionalitas ASN	715.000.000,00	722.500.000,00	7.500.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN			
				Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai			94 %	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %			-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	715.000.000,00	722.500.000,00	7.500.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN
3	27 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	715.000.000,00	722.500.000,00	7.500.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN
3	27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,2 %	585.000.000,00	710.000.000,00	125.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %			-		
			Persentase Peningkatan Produksi Susu	1,7 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu	1,7 %			-		
			Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %			-		
			Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %			-		
3	27 2 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	585.000.000,00	710.000.000,00	125.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN
3	27 2 1.05 1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	585.000.000,00	710.000.000,00	125.000.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TUBAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.600.000.000,00	1.717.940.000,00	117.940.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
3	27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN	85 %	1.150.000.000,00	1.267.940.000,00	117.940.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %			-		
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %			-		
3	27 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	1.150.000.000,00	1.267.940.000,00	117.940.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
3	27 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.150.000.000,00	1.267.940.000,00	117.940.000,00	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
3	27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	350.000.000,00	350.000.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %			-		
			Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %			-		
3	27 2 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	Jumlah laporan pengendalian, pengawasan dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak	3 laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
3	27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	4 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
3	27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	100.000.000,00	100.000.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan status kesehatan hewan	80 %	Persentase peningkatan status kesehatan hewan	80 %			-		
			Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %	Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %			-		
3	27 4 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN
3	27 4 1.03 3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30 Dokumen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN KESEHATAN HEWAN MADURA	DINAS PETERNAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	27					1.550.000.000,00	2.056.840.000,00	506.840.000,00	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1				750.000.000,00	1.256.840.000,00	506.840.000,00	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
			Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN			85 %	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai			94 %	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN		
3	27	1	1.08			750.000.000,00	1.256.840.000,00	506.840.000,00	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08	4		750.000.000,00	1.256.840.000,00	506.840.000,00	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2				800.000.000,00	800.000.000,00	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	2,5 %	Persentase Peningkatan Produksi Daging			2,5 %	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Peningkatan Produksi Susu	2 %	Persentase Peningkatan Produksi Susu			2 %	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,2 %	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN		
3	27	2	1.05			800.000.000,00	800.000.000,00	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
3	27	2	1.05	1		800.000.000,00	800.000.000,00	-	UPT INSEMINASI BUATAN SURABAYA	DINAS PETERNAKAN	
3	27					900.000.000,00	978.780.000,00	78.780.000,00		DINAS PETERNAKAN	
3	27	1				600.000.000,00	678.780.000,00	78.780.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN	
			Indeks Profesionalitas ASN	85 %	Indeks Profesionalitas ASN			85 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai			94 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN		
3	27	1	1.08			600.000.000,00	678.780.000,00	78.780.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08	4		600.000.000,00	678.780.000,00	78.780.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN	
3	27	4				300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN	
			Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium			3 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan status kesehatan hewan	80 %	Persentase peningkatan status kesehatan hewan			80 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN
			Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %	Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN		
3	27	4	1.03			300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN	
			Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 laporan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 laporan					
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1853 dokumen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1853 dokumen					
3	27	4	1.03	3		300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN MALANG	DINAS PETERNAKAN	
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1285 Dokumen					
3	27					900.000.000,00	982.820.000,00	82.820.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1				600.000.000,00	682.820.000,00	82.820.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
			Indeks profesionalitas ASN	85 %	Indeks profesionalitas ASN			85 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %	Persentase Indikator Program yang tercapai			94 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN
			Persentase Realisasi Anggaran	95 %	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	27	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	Jumlah dokumen layanan	4 dokumen	600.000.000,00	682.820.000,00	82.820.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000,00	682.820.000,00	82.820.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	Persentase peningkatan pengguna layanan laboratorium	3 %	300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
					Persentase peningkatan status kesehatan hewan	80 %	Persentase peningkatan status kesehatan hewan	80 %			-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
					Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %	Persentase peningkatan unit usaha produk hewan yang memenuhi standar ASUH	5 %			-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	4	1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 laporan	Jumlah Laporan Penerapan Persyaratan teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	3 laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN	
3	27	4	1.03	3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	217 Dokumen	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	217 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	-	UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN TUBAN	DINAS PETERNAKAN
TOTAL										87.026.116.000,00		(87.026.116.000,00)		DINAS PETERNAKAN
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					164.989.759.000,00	170.148.294.000,00	5.158.535.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	0.60 indeks	Indeks profesionalitas ASN	0.60 indeks	163.589.759.000,00	166.363.294.000,00	2.773.535.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
					Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %			-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
					Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	2 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	2 dokumen	400.000.000,00	824.840.000,00	424.840.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	3 dokumen			-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	246.748.000,00	625.760.400,00	379.012.400,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.450.000,00	2.235.200,00	(3.214.800,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.950.000,00	2.336.600,00	(3.613.400,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.440.000,00	2.100.000,00	(340.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.940.000,00	2.100.000,00	(840.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	119.672.000,00	75.176.960,00	(44.495.040,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.800.000,00	115.130.840,00	98.330.840,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	160.213.191.000,00	160.349.342.000,00	136.151.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	771 Orang/ Bulan	159.120.791.000,00	159.492.995.000,00	372.204.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
												#VALUE!	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
												#VALUE!	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	737.676.000,00	561.982.640,00	(175.693.360,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	116.880.000,00	62.292.520,00	(54.587.480,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	210.000.000,00	182.404.840,00	(27.595.160,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	27.844.000,00	49.667.000,00	21.823.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	7.600.000,00	256.000,00	(7.344.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.600.000,00	256.000,00	(7.344.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 dokumen	289.671.000,00	271.312.971,00	(18.358.029,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	155.244.000,00	204.932.971,00	49.688.971,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	52.000.000,00	3.350.000,00	(48.650.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	20.000.000,00	300.000,00	(19.700.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	62.427.000,00	62.730.000,00	303.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	535.770.000,00	1.975.686.533,00	1.439.916.533,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	949.135.500,00	919.135.500,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	34.278.100,00	(35.721.900,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	140.000.000,00	90.394.200,00	(49.605.800,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	74.264.633,00	34.264.633,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	8.220.000,00	(3.780.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	750.100,00	(4.249.900,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	29.270.000,00	28.408.000,00	(862.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000,00	790.236.000,00	590.236.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 laporan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	1.695.027.000,00	2.565.160.096,00	870.133.096,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	544.254.000,00	604.277.096,00	60.023.096,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.140.773.000,00	1.957.883.000,00	817.110.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	408.500.000,00	376.696.400,00	(31.803.600,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	248.500.000,00	304.366.500,00	55.866.500,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	60.000.000,00	72.329.900,00	12.329.900,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kemantapan kawasan hutan	68 %	Persentase kemantapan kawasan hutan	68 %	950.000.000,00	1.985.000.000,00	1.035.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah dokumen data dan informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1 dokumen	Jumlah dokumen data dan informasi Neraca Sumber Daya Hutan	1 dokumen			150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	28	3	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penggunaan kawasan hutan	1 dokumen	Jumlah dokumen penggunaan kawasan hutan	1 dokumen	350.000.000,00	500.000.000,00	-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Penetapan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	1 dokumen	Jumlah Penetapan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	1 dokumen			-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	350.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	2 laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	2 laporan	180.000.000,00	465.130.000,00	285.130.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	69.303.000,00	213.775.000,00	144.472.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	20.697.000,00	20.697.000,00	-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	10 Dokumen	42.500.000,00	170.658.000,00	128.158.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	10 Dokumen	47.500.000,00	60.000.000,00	12.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kelompok masyarakat terakses informasi perlindungan hutan	15 kelompok	Jumlah kelompok masyarakat terakses informasi perlindungan hutan	15 kelompok	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	24 Ha	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	24 Ha	75.000.000,00	60.000.000,00	(15.000.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 laporan	72.097.400,00	15.472.000,00	(56.625.400,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	2 Unit Managemen	Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	2 Unit Managemen	72.097.400,00	15.472.000,00	(56.625.400,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	2 Laporan	97.902.600,00	354.398.000,00	256.495.400,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	45 Unit Managemen	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	45 Unit Managemen	20.364.000,00	22.298.000,00	1.934.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPBPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	30 Unit Managemen	Jumlah Permohonan BPBPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	31 Unit Managemen	77.538.600,00	332.100.000,00	254.561.400,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	237943.38 Ha	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	237943.38 Ha	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	4	1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah desa konservasi terbina	1 desa	Jumlah desa konservasi terbina	1 desa	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah jasa lingkungan terbina	1 unit	Jumlah jasa lingkungan terbina	1 unit			-	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	4	1.03	5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	100 Orang	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	100 Orang	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	200.000.000,00	1.433.400.000,00	1.233.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1 laporan	200.000.000,00	1.433.400.000,00	1.233.400.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	82.500.000,00	143.000.000,00	60.500.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	61.500.000,00	1.123.600.000,00	1.062.100.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	56.000.000,00	166.800.000,00	110.800.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	6												
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0.49 %	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	0.49 %	150.000.000,00	166.600.000,00	16.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dinilai keberhasilannya	1396 Ha	Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dinilai keberhasilannya	1396 Ha	150.000.000,00	166.600.000,00	16.600.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	116.500.000,00	166.600.000,00	50.100.000,00	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	6	1.01	5	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	0 Lembaga	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	DINAS KEHUTANAN	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				2.472.000.000,00	2.972.009.000,00	500.009.000,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	1.306.235.160,00	1.694.617.800,00	388.382.640,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	2.700.000,00	4.252.400,00	1.552.400,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	900.000,00	1.676.200,00	776.200,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000,00	1.376.200,00	776.200,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	75.397.000,00	70.453.000,00	(4.944.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	68.640.000,00	63.696.000,00	(4.944.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.357.000,00	4.357.000,00	-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	2.540.000,00	4.300.000,00	1.760.000,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.340.000,00	1.340.000,00	-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.200.000,00	2.960.000,00	1.760.000,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di UPT PPHH	79 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di UPT PPHH	79 orang	87.325.000,00	56.174.000,00	(31.151.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	87.325.000,00	56.174.000,00	(31.151.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	146.505.960,00	155.902.690,00	9.396.730,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.800.000,00	1.800.000,00	-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.884.390,00	25.596.390,00	19.712.000,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.774.260,00	73.506.900,00	(8.267.360,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.927.310,00	7.671.400,00	(25.255.910,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24.120.000,00	47.328.000,00	23.208.000,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	140.080.000,00	0,00	(140.080.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	140.080.000,00	0,00	(140.080.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	792.111.200,00	1.330.921.000,00	538.809.800,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	167.100.000,00	203.265.000,00	36.165.000,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	625.011.200,00	1.127.656.000,00	502.644.800,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	59.576.000,00	72.614.710,00	13.038.710,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	43.776.000,00	56.814.710,00	13.038.710,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.800.000,00	15.800.000,00	-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan unit usaha terbit penatausahaan hasil hutan	5 %	Persentase peningkatan unit usaha terbit penatausahaan hasil hutan	5 %	1.165.764.840,00	1.227.391.200,00	61.626.360,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah tenaga teknis unit usaha tereduksi pengukuran/pengujian hasil hutan	40 orang	Jumlah tenaga teknis unit usaha tereduksi pengukuran/pengujian hasil hutan	40 orang	39.180.000,00	34.812.000,00	(4.368.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen BPBH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 Unit Managemen	Jumlah Unit Managemen BPBH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 Unit Managemen	39.180.000,00	34.812.000,00	(4.368.000,00)	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah kayu legal diperiksa	1750000 m3	Jumlah kayu legal diperiksa	1750000 m3	1.126.584.840,00	1.242.579.200,00	115.994.360,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH	35000 dokumen	Jumlah surat keterangan sahnya hasil hutan/SKSHH	35000 dokumen			-	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	1.126.584.840,00	1.242.579.200,00	115.994.360,00	UPT. PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN (PPHH)	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					930.000.000,00		#VALUE!	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	655.000.000,00	795.700.000,00	140.700.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Laporan	38.000.000,00	51.410.000,00	13.410.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	30.000.000,00	43.092.000,00	13.092.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.000.000,00	8.318.000,00	318.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.500.000,00	2.800.000,00	(700.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di UPT PTH	23 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di UPT PTH	23 orang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	144.500.000,00	431.361.800,00	286.861.800,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	5.101.600,00	1.101.600,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.500.000,00	287.453.300,00	281.953.300,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	23.388.900,00	(1.611.100,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.400.000,00	1.440.000,00	(960.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.600.000,00	2.278.000,00	678.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	97.000.000,00	99.700.000,00	2.700.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 Laporan	155.000.000,00	0,00	(155.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	237.000.000,00	225.833.200,00	(11.166.800,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000,00	96.850.000,00	(8.150.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	132.000.000,00	128.983.200,00	(3.016.800,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	72.000.000,00	79.295.000,00	7.295.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	49.000.000,00	59.295.000,00	10.295.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	23.000.000,00	20.000.000,00	(3.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan bibit tanaman hutan tersertifikasi	0,25 %	Persentase peningkatan bibit tanaman hutan tersertifikasi	0,25 %	275.000.000,00	381.800.000,00	106.800.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah benih tersertifikasi	100 Kg	Jumlah benih tersertifikasi	100 Kg			106.800.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09			Jumlah bibit tersertifikasi	1555000 batang	Jumlah bibit tersertifikasi	1555000 batang			-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09			Jumlah pengada dan pengedar benih/bibit terdaftar (baru) yang ditetapkan	1 unit	Jumlah pengada dan pengedar benih/bibit terdaftar (baru) yang ditetapkan	1 unit	275.000.000,00	381.800.000,00	-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09			Jumlah sumber benih tersertifikasi	2 unit	Jumlah sumber benih tersertifikasi	2 unit			-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09			Sumber benih tanaman hutan yang terkelola	6 unit	Sumber benih tanaman hutan yang terkelola	6 unit			-	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	2	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	2 Sertifikat	35.000.000,00	26.000.000,00	(9.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	3	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	5 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	5 Sertifikat	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	4	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	20 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	20 Sertifikat	115.000.000,00	118.780.000,00	3.780.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.09	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	55.000.000,00	182.020.000,00	127.020.000,00	UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SELELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	28					6.707.856.000,00	6.959.847.000,00	251.991.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1				1.160.000.000,00	1.216.866.445,00	56.866.445,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN	
								-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01			7.740.000,00	10.320.000,00	2.580.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN	
								-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	2.580.000,00	3.440.000,00	860.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.580.000,00	3.440.000,00	860.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.580.000,00	3.440.000,00	860.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	121.052.000,00	121.563.200,00	511.200,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	93.432.000,00	94.800.000,00	1.368.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25.040.000,00	24.183.200,00	(856.800,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.580.000,00	2.580.000,00	-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	12.040.000,00	10.320.000,00	(1.720.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.880.000,00	6.880.000,00	-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.160.000,00	3.440.000,00	(1.720.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177 orang	77.480.000,00	67.160.000,00	(10.320.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	68.880.000,00	58.560.000,00	(10.320.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	8.600.000,00	8.600.000,00	-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	258.697.600,00	313.752.945,00	55.055.345,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	5.030.045,00	5.019.600,00	(10.445,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	36.608.244,00	21.450.100,00	(15.158.144,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	46.166.906,00	67.432.060,00	21.265.154,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	33.972.100,00	36.538.185,00	2.566.085,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.057.305,00	10.050.000,00	(5.007.305,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	121.863.000,00	173.263.000,00	51.400.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 laporan	78.000.000,00	121.180.500,00	43.180.500,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	1 Paket	30.000.000,00	29.924.000,00	(76.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	48.000.000,00	91.256.500,00	43.256.500,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	487.940.400,00	455.054.800,00	(32.885.600,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127.900.000,00	127.500.000,00	(400.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	358.540.400,00	326.054.800,00	(32.485.600,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	117.050.000,00	117.515.000,00	465.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	98.100.000,00	98.945.000,00	845.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18.950.000,00	18.570.000,00	(380.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode METT	82 %	Persentase nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Tahura Raden Soerjo dengan metode METT	82 %	5.547.856.000,00	5.742.980.555,00	195.124.555,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah kemitraan masyarakat desa penyangga	1 dokumen	Jumlah kemitraan masyarakat desa penyangga	1 dokumen	5.547.856.000,00	5.742.980.555,00	195.124.555,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan	11 Spot	Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan	11 Spot			-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah penurunan gangguan keamanan Kawasan Tahura	8 kejadian	Jumlah penurunan gangguan keamanan Kawasan Tahura	8 kejadian			-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah promosi potensi kawasan Tahura	2 kali	Jumlah promosi potensi kawasan Tahura	2 kali			-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	4.273.943.600,00	4.516.619.780,00	242.676.180,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	10 Ha	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	10 Ha	125.570.000,00	71.810.000,00	(53.760.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	6	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	30 Permohonan	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	30 Permohonan	1.014.884.600,00	984.040.975,00	(30.843.625,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	7	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	26.998.000,00	0,00	(26.998.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	64.732.087,00	64.732.087,00	-	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	30.109.000,00	0,00	(30.109.000,00)	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28	4	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	11.618.713,00	105.777.713,00	94.159.000,00	UPT. TAHURA RADEN SOERJO	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					810.000.000,00	1.474.340.000,00	664.340.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	415.843.700,00	(84.156.300,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	8.960.000,00	5.160.000,00	(3.800.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.210.000,00	1.720.000,00	(1.490.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.210.000,00	1.720.000,00	(1.490.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.540.000,00	1.720.000,00	(820.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	94.807.000,00	46.186.000,00	(48.621.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		3	28	1	1.02						2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.167.000,00	5.778.000,00	(11.389.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	15.240.000,00	1.720.000,00	(13.520.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	6.350.000,00	2.580.000,00	(3.770.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.540.000,00	1.720.000,00	(820.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.810.000,00	860.000,00	(2.950.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Pacitan	48 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Pacitan	48 orang	8.363.000,00	1.720.000,00	(6.643.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.080.000,00	1.720.000,00	(3.360.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	3.283.000,00	0,00	(3.283.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	105.844.018,00	124.201.690,00	18.357.672,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.080.483,00	4.773.400,00	(307.083,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	873.240,00	0,00	(873.240,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.048.265,00	7.239.600,00	(1.808.665,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.423.380,00	15.441.690,00	(3.981.690,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.542.650,00	6.235.000,00	(5.307.650,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000,00	7.072.000,00	(7.928.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40.916.000,00	83.440.000,00	42.524.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	197.076.000,00	182.333.750,00	(14.742.250,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.500.000,00	47.933.750,00	(14.566.250,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131.576.000,00	134.400.000,00	2.824.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	78.599.982,00	53.662.260,00	(24.937.722,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	71.299.982,00	46.559.660,00	(24.740.322,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.300.000,00	7.102.600,00	(197.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Pacitan	0.01 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Pacitan	0.01 %	244.237.000,00	884.997.600,00	640.760.600,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Pacitan	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Pacitan	2 Laporan	54.280.000,00	62.697.200,00	8.417.200,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	27.140.000,00	45.335.600,00	18.195.600,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	27.140.000,00	17.361.600,00	(9.778.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Pacitan	22.5 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Pacitan	22.5 Ha	59.237.000,00	726.543.200,00	667.306.200,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	10.160.000,00	8.160.000,00	(2.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	14.507.000,00	624.183.200,00	609.676.200,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	12.5 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	12.5 Ha	4.670.000,00	94.200.000,00	89.530.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	0 Unit	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	0 Unit	29.900.000,00	0,00	(29.900.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Pacitan	100 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Pacitan	100 Kg	78.720.000,00	38.663.200,00	(40.056.800,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	2 Unit Managemen	Jumlah Permohonan BPBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	2 Unit Managemen	78.720.000,00	38.663.200,00	(40.056.800,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Pacitan	240000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Pacitan	240000 m3	52.000.000,00	57.094.000,00	5.094.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	10 Unit Managemen	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	10 Unit Managemen	20.870.000,00	31.081.600,00	10.211.600,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPBPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	5 Unit Managemen	Jumlah Permohonan BPBPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	5 Unit Managemen	31.130.000,00	26.012.400,00	(5.117.600,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Pacitan	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Pacitan	80 %	65.763.000,00	173.498.700,00	107.735.700,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Pacitan	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Pacitan	1 laporan	65.763.000,00	173.498.700,00	107.735.700,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	33.863.000,00	33.767.300,00	(95.700,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	12 Kelompok	31.900.000,00	139.731.400,00	107.831.400,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. PACITAN	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					845.000.000,00	2.028.944.000,00	1.183.944.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	460.000.000,00	(40.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	16.238.000,00	10.118.000,00	(6.120.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.730.000,00	2.390.000,00	(1.340.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.730.000,00	2.390.000,00	(1.340.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.778.000,00	5.338.000,00	(3.440.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Laporan	106.959.000,00	76.798.800,00	(30.160.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.356.000,00	43.848.000,00	(14.508.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	33.123.000,00	25.160.800,00	(7.962.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	15.480.000,00	7.790.000,00	(7.690.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	6.580.000,00	2.490.000,00	(4.090.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.140.000,00	720.000,00	(2.420.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.440.000,00	1.770.000,00	(1.670.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Madiun	55 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Madiun	55 orang	8.778.000,00	5.405.000,00	(3.373.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.778.000,00	5.405.000,00	(3.373.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	111.789.000,00	46.760.101,00	(65.028.899,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.030.000,00	0,00	(1.030.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.622.000,00	13.531.700,00	5.909.700,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.296.900,00	7.147.000,00	(50.149.900,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.034.100,00	2.091.401,00	(6.942.699,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.354.000,00	3.350.000,00	(12.004.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.452.000,00	20.640.000,00	(812.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	200.906.000,00	296.105.499,00	95.199.499,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.200.000,00	93.660.000,00	2.460.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	31.930.000,00	0,00	(31.930.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	76.776.000,00	202.445.499,00	125.669.499,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	48.750.000,00	22.322.600,00	(26.427.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40.250.000,00	22.322.600,00	(17.927.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Madiun	0.08 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Madiun	0.08 %	290.013.000,00	1.340.805.500,00	1.050.792.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Madiun	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Madiun	2 Laporan	60.000.000,00	85.000.000,00	25.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Madiun	18.25 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Madiun	18.25 Ha	154.413.000,00	1.155.205.500,00	1.000.792.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	60.013.000,00	134.561.500,00	74.548.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	18.25 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	18.25 Ha	94.400.000,00	1.020.644.000,00	926.244.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Madiun	72200 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Madiun	72200 m3	75.600.000,00	100.600.000,00	25.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Terbit Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	4 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Terbit Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBPH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	4 Unit Manajemen	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Iain Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPBPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	4 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan BPBPH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	4 Unit Manajemen	40.600.000,00	40.600.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	54.987.000,00	228.138.500,00	173.151.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Madiun	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Madiun	1 laporan	54.987.000,00	228.138.500,00	173.151.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	39.987.000,00	18.354.500,00	(21.632.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	15.000.000,00	209.784.000,00	194.784.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MADIUN	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					820.000.000,00	2.282.944.000,00	1.462.944.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	954.100.000,00	454.100.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	6.720.000,00	3.440.000,00	(3.280.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.720.000,00	3.440.000,00	1.720.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	109.958.000,00	91.392.000,00	(18.566.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	76.008.000,00	91.392.000,00	15.384.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	30.960.000,00	0,00	(30.960.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	2.990.000,00	0,00	(2.990.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 laporan	5.740.000,00	0,00	(5.740.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	2.460.000,00	0,00	(2.460.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	3.280.000,00	0,00	(3.280.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Trenggalek	44 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Trenggalek	0 orang	44.272.800,00	0,00	(44.272.800,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	25.352.800,00	0,00	(25.352.800,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	18.920.000,00	0,00	(18.920.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	125.883.547,00	140.863.636,00	14.980.089,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.730.793,00	1.886.000,00	(4.844.793,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.136.992,00	5.924.500,00	1.787.508,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.543.423,00	9.322.200,00	2.778.777,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.129.517,00	8.958.900,00	(1.170.617,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.469.132,00	8.790.036,00	(679.096,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.400.000,00	4.320.000,00	(1.080.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		31.261.690,00	9.752.000,00	(21.509.690,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	52.212.000,00	91.910.000,00	39.698.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 laporan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	127.213.654,00	358.264.864,00	231.051.210,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	1.300.000,00	(700.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76.314.654,00	70.384.200,00	(5.930.454,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	48.899.000,00	286.580.664,00	237.681.664,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	60.211.999,00	360.139.500,00	299.927.501,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.011.999,00	92.750.000,00	49.738.001,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	17.200.000,00	267.389.500,00	250.189.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Trenggalek	0,29 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Trenggalek	0 %	295.000.000,00	0,00	(295.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Trenggalek	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Trenggalek	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Trenggalek	111,99 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Trenggalek	0 Ha	220.000.000,00	0,00	(220.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Trenggalek	349000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Trenggalek	0 m3	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	0 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	0 Unit Manajemen	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	0 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	0 Unit Manajemen	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Trenggalek	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Trenggalek	80 %	25.000.000,00	1.328.844.000,00	1.303.844.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Trenggalek	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Trenggalek	1 laporan	25.000.000,00	1.328.844.000,00	1.303.844.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	25.000.000,00	1.328.844.000,00	1.303.844.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. TRENGGALEK	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28					920.000.000,00	1.886.644.000,00	966.644.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN				
3	28	1				500.000.000,00	619.144.000,00	119.144.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN				
								-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN				
3	28	1	1.01			12.040.000,00	12.040.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN				
								-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN				
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.440.000,00	3.440.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.440.000,00	3.440.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.160.000,00	5.160.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	70.163.000,00	73.006.700,00	2.843.700,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	53.976.000,00	53.976.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	16.187.000,00	19.030.700,00	2.843.700,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	6.880.000,00	6.880.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.440.000,00	3.440.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.440.000,00	3.440.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Malang	40 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Malang	40 orang	3.440.000,00	5.160.000,00	1.720.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	3.440.000,00	5.160.000,00	1.720.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	170.960.000,00	215.907.700,00	44.947.700,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.575.000,00	1.110.300,00	(1.464.700,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.333.500,00	0,00	(10.333.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.175.900,00	3.437.500,00	(2.738.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.553.500,00	15.804.000,00	(8.749.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.151.600,00	10.991.900,00	(3.159.700,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	98.726.500,00	44.610.000,00	(54.116.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.444.000,00	139.954.000,00	125.510.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	28.265.000,00	26.780.000,00	(1.485.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	10.815.000,00	0,00	(10.815.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	17.450.000,00	26.780.000,00	9.330.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan	113.459.200,00	236.405.000,00	122.945.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	540.000,00	(460.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.339.200,00	32.220.200,00	(2.119.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	78.120.000,00	203.644.800,00	125.524.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	94.792.800,00	42.964.600,00	(51.828.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.792.800,00	33.946.200,00	153.400,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.500.000,00	9.018.400,00	5.518.400,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Malang	0.01 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Malang	0.01 %	373.396.000,00	1.106.896.000,00	733.500.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Malang	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Malang	2 Laporan	80.000.000,00	77.500.000,00	(2.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	40.000.000,00	42.500.000,00	2.500.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Malang	22.5 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Malang	22.5 Ha	123.396.000,00	949.396.000,00	826.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	16.704.000,00	16.704.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	45.116.000,00	745.116.000,00	700.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	17.5 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	17.5 Ha	61.576.000,00	187.576.000,00	126.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Malang	80000 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Malang	80000 Kg	120.000.000,00	20.000.000,00	(100.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	2 Unit Managemen	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	2 Unit Managemen	120.000.000,00	20.000.000,00	(100.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Malang	710000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Malang	710000 m3	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	4 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	4 Unit Manajemen	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	4 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	4 Unit Manajemen	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Malang	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Malang	80 %	46.604.000,00	160.604.000,00	114.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Malang	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Malang	1 laporan	46.604.000,00	160.604.000,00	114.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	46.604.000,00	160.604.000,00	114.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. MALANG	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					820.000.000,00	2.060.810.000,00	1.240.810.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	736.000.000,00	236.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	7.620.000,00	6.030.000,00	(1.590.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.270.000,00	1.005.000,00	(265.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.270.000,00	1.005.000,00	(265.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.080.000,00	4.020.000,00	(1.060.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 Laporan	89.006.000,00	79.858.700,00	(9.147.300,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.128.000,00	63.288.000,00	(3.840.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.718.000,00	1.330.700,00	(387.300,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.160.000,00	15.240.000,00	(4.920.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.270.000,00	1.270.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.270.000,00	1.270.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Nganjuk	45 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Nganjuk	45 orang	13.050.000,00	7.160.000,00	(5.890.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	13.050.000,00	7.160.000,00	(5.890.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	182.392.800,00	246.803.600,00	64.410.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.738.000,00	1.881.600,00	(2.856.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.800.750,00	156.290.600,00	144.489.850,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.638.350,00	19.660.900,00	(18.977.450,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.096.700,00	8.005.500,00	(6.091.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.915.000,00	11.800.000,00	(4.115.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	97.204.000,00	49.165.000,00	(48.039.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 Laporan	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	103.701.200,00	300.650.000,00	196.948.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	74.151.200,00	90.000.000,00	15.848.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.050.000,00	210.150.000,00	181.100.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	98.840.000,00	94.227.700,00	(4.612.300,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	91.440.000,00	88.549.500,00	(2.890.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	7.400.000,00	5.678.200,00	(1.721.800,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Nganjuk	0,23 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Nganjuk	0,23 %	197.060.000,00	1.037.906.800,00	840.846.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Nganjuk	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Nganjuk	2 Laporan	49.044.000,00	50.000.000,00	956.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	32.298.000,00	50.000.000,00	17.702.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	0 Dokumen	16.746.000,00	0,00	(16.746.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Nganjuk	25 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Nganjuk	25 Ha	37.060.000,00	962.906.800,00	925.846.800,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	2.250.000,00	2.236.800,00	(13.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	34.810.000,00	960.670.000,00	925.860.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	600000 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	600000 Kg	32.420.000,00	5.040.000,00	(27.380.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPPIH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	3 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan BPPIH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	3 Unit Manajemen	32.420.000,00	5.040.000,00	(27.380.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	125000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Nganjuk	125000 m3	78.536.000,00	19.960.000,00	(58.576.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	12 Unit Managemen	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang BPBHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	12 Unit Managemen	17.186.000,00	19.960.000,00	2.774.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan BPBHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Managemen	Jumlah Permohonan BPBHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	0 Unit Managemen	61.350.000,00	0,00	(61.350.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan	80 %	122.940.000,00	286.903.200,00	163.963.200,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Nganjuk	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Nganjuk	1 laporan	122.940.000,00	286.903.200,00	163.963.200,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	57.750.000,00	23.155.100,00	(34.594.900,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	65.190.000,00	263.748.100,00	198.558.100,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. NGANJUK	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					820.000.000,00	3.106.502.000,00	2.286.502.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	530.000.000,00	720.338.000,00	190.338.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	13.760.000,00	9.190.000,00	(4.570.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.160.000,00	2.970.000,00	(2.190.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.440.000,00	2.970.000,00	(470.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.160.000,00	3.250.000,00	(1.910.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	110.655.000,00	97.468.800,00	(13.186.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.328.000,00	71.328.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.887.000,00	23.600.800,00	(12.286.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.440.000,00	2.540.000,00	(900.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	5.840.000,00	4.940.000,00	(900.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.440.000,00	2.540.000,00	(900.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Bojonegoro	39 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Bojonegoro	39 orang	17.754.000,00	17.740.000,00	(14.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	17.754.000,00	17.740.000,00	(14.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	168.050.000,00	121.094.331,00	(46.955.669,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.414.722,00	4.414.722,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.218.216,00	5.188.216,00	(1.030.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.307.214,00	28.492.982,00	(7.814.232,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.583.848,00	10.194.411,00	(15.389.437,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	7.380.000,00	0,00	(7.380.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.790.000,00	12.745.000,00	(12.045.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	63.356.000,00	60.059.000,00	(3.297.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	147.251.000,00	253.727.469,00	106.476.469,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.815.000,00	83.293.020,00	1.478.020,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.436.000,00	169.434.449,00	104.998.449,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	66.690.000,00	216.177.400,00	149.487.400,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	54.290.000,00	84.035.000,00	29.745.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	12.400.000,00	132.142.400,00	119.742.400,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Bojonegoro	0.15 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Bojonegoro	0.15 %	264.242.000,00	2.087.722.500,00	1.823.480.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Bojonegoro	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Bojonegoro	2 Laporan	53.780.000,00	79.835.000,00	26.055.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	53.780.000,00	30.305.000,00	(23.475.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Bojonegoro	36 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Bojonegoro	36 Ha	123.348.000,00	1.962.190.000,00	1.838.842.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	8.004.500,00	8.004.500,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	35 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha	94.180.000,00	1.941.723.000,00	1.847.543.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	7	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Ha	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Ha	21.163.500,00	12.462.500,00	(8.701.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	3	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	120000 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	120000 Kg	38.754.000,00	11.620.000,00	(27.134.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	3 Unit Managemen	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	3 Unit Managemen	38.754.000,00	11.620.000,00	(27.134.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	30000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Bojonegoro	30000 m3	48.360.000,00	34.077.500,00	(14.282.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	5 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	5 Unit Manajemen	17.330.000,00	17.377.500,00	47.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	5 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	5 Unit Manajemen	31.030.000,00	16.700.000,00	(14.330.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Bojonegoro	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Bojonegoro	80 %	25.758.000,00	298.441.500,00	272.683.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Bojonegoro	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Bojonegoro	1 laporan	25.758.000,00	298.441.500,00	272.683.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN	
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	12.739.000,00	268.763.000,00	256.024.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	13.019.000,00	29.678.500,00	16.659.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BOJONEGORO	DINAS KEHUTANAN
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					820.000.000,00	2.513.916.000,00	1.693.916.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	586.890.835,00	86.890.835,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	
					Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	0 dokumen	6.738.000,00	0,00	(6.738.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	0 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	660.000,00	0,00	(660.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dokumen	660.000,00	0,00	(660.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen	5.418.000,00	0,00	(5.418.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	77.328.000,00	62.304.000,00	(15.024.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.088.000,00	47.064.000,00	(15.024.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	15.240.000,00	15.240.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 laporan	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Lumajang	50 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Lumajang	50 orang	2.332.000,00	0,00	(2.332.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	2.332.000,00	0,00	(2.332.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	214.569.040,00	148.832.263,00	(65.736.777,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.511.691,00	5.644.900,00	133.209,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.944.667,00	5.807.700,00	(8.136.967,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.076.442,00	27.324.950,00	(11.751.492,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.650.240,00	8.888.713,00	(2.761.527,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	28.700.000,00	6.350.000,00	(22.350.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	113.886.000,00	94.816.000,00	(19.070.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	137.752.960,00	225.557.972,00	87.805.012,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	650.000,00	(1.850.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.372.960,00	85.707.972,00	16.335.012,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.880.000,00	139.200.000,00	73.320.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	59.560.000,00	150.196.600,00	90.636.600,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	39.000.000,00	22.540.000,00	(16.460.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	15.560.000,00	12.169.600,00	(3.390.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	115.487.000,00	110.487.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Lumajang	0,44 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Lumajang	0,44 %	234.525.000,00	1.645.909.165,00	1.411.384.165,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Lumajang	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Lumajang	2 Laporan	23.600.000,00	30.000.000,00	6.400.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	23.600.000,00	30.000.000,00	6.400.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Lumajang	140 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Lumajang	140 Ha	139.525.000,00	1.523.461.000,00	1.383.936.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	4.400.000,00	3.245.000,00	(1.155.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	125 Ha	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	125 Ha	70.125.000,00	1.520.216.000,00	1.450.091.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.5 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Lumajang	556000 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Lumajang	556000 Kg	32.200.000,00	48.000.000,00	15.800.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.06	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	3 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	1 Unit Manajemen	32.200.000,00	48.000.000,00	15.800.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Lumajang	1199000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Lumajang	1199000 m3	39.200.000,00	44.448.165,00	5.248.165,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	40 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	40 Unit Manajemen	39.200.000,00	44.448.165,00	5.248.165,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Lumajang	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Lumajang	80 %	85.475.000,00	281.116.000,00	195.641.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Lumajang	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Lumajang	1 laporan	85.475.000,00	281.116.000,00	195.641.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	27.895.000,00	0,00	(27.895.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	35.290.000,00	245.700.000,00	210.410.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	669.2 Ha	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	669.2 Ha	22.290.000,00	35.416.000,00	13.126.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. LUMAJANG	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					780.000.000,00	937.000.000,00	157.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	679.749.396,00	179.749.396,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	77.168.000,00	67.484.000,00	(9.684.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.568.000,00	47.388.000,00	(15.180.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.200.000,00	2.236.000,00	36.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12.400.000,00	17.860.000,00	5.460.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Jember	30 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Jember	30 orang	21.000.000,00	19.008.000,00	(1.992.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	21.000.000,00	19.008.000,00	(1.992.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	126.392.000,00	90.612.560,00	(35.779.440,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	1.938.600,00	1.138.600,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.400.000,00	5.659.360,00	3.259.360,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.120.000,00	19.950.600,00	(2.169.400,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.600.000,00	8.250.000,00	2.650.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	86.072.000,00	54.814.000,00	(31.258.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	20.000.000,00	171.822.000,00	151.822.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000,00	171.822.000,00	151.822.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	211.140.000,00	301.505.596,00	90.365.596,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.000.000,00	54.236.750,00	11.236.750,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	167.140.000,00	245.768.846,00	78.628.846,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	44.300.000,00	29.317.240,00	(14.982.760,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	2 Unit	42.500.000,00	26.885.140,00	(15.614.860,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.800.000,00	2.432.100,00	632.100,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Jember	0,16 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Jember	0,16 %	230.000.000,00	134.322.604,00	(95.677.396,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Jember	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Jember	2 Laporan	56.300.000,00	4.320.000,00	(51.980.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	56.300.000,00	4.320.000,00	(51.980.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Jember	30 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Jember	30 Ha	146.100.000,00	127.002.604,00	(19.097.396,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	6.500.000,00	1.800.000,00	(4.700.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	22.600.000,00	56.569.604,00	33.969.604,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000,00	62.933.000,00	32.933.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	87.000.000,00	5.700.000,00	(81.300.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Jember	330000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Jember	330000 m3	27.600.000,00	3.000.000,00	(24.600.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	3	1.07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Manajemen	5.600.000,00	3.000.000,00	(2.600.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	2 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	0 Unit Manajemen	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Jember	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Jember	80 %	50.000.000,00	122.928.000,00	72.928.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Jember	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Jember	1 laporan	50.000.000,00	122.928.000,00	72.928.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	17 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	17 Orang	22.400.000,00	4.840.000,00	(17.560.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	15.000.000,00	110.948.000,00	95.948.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	12.600.000,00	7.140.000,00	(5.460.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. JEMBER	DINAS KEHUTANAN
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					820.000.000,00	972.800.000,00	152.800.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	548.552.500,00	48.552.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
						Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	86.413.000,00	60.616.800,00	(25.796.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	58.788.000,00	48.264.000,00	(10.524.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	24.185.000,00	12.352.800,00	(11.832.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.440.000,00	0,00	(3.440.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	2.580.000,00	0,00	(2.580.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	860.000,00	0,00	(860.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	1.720.000,00	0,00	(1.720.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Banyuwangi	31 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Banyuwangi	31 orang	19.337.000,00	5.265.000,00	(14.072.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	12.000.000,00	5.265.000,00	(6.735.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	7.337.000,00	0,00	(7.337.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	114.910.000,00	121.899.400,00	6.989.400,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	4.994.800,00	(5.200,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	4.985.500,00	(14.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	14.966.200,00	8.966.200,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	13.327.500,00	1.327.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00	6.616.900,00	616.900,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	9.698.500,00	(301.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	67.310.000,00	67.310.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 laporan	92.000.000,00	0,00	(92.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	61.000.000,00	0,00	(61.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	122.760.000,00	325.944.000,00	203.184.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	57.960.000,00	7.960.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	69.760.000,00	264.984.000,00	195.224.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	62.000.000,00	34.827.300,00	(27.172.700,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	12.000.000,00	4.827.300,00	(7.172.700,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Banyuwangi	0.15 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Banyuwangi	0.15 %	225.000.000,00	146.932.500,00	(78.067.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Banyuwangi	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Banyuwangi	2 Laporan	35.000.000,00	10.000.000,00	(25.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	25.000.000,00	7.000.000,00	(18.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.03	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Banyuwangi	10 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Banyuwangi	10 Ha	110.000.000,00	116.932.500,00	6.932.500,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	10.000.000,00	1.110.000,00	(8.890.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	30.000.000,00	72.160.000,00	42.160.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3 28 3 1.04 8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	70.000.000,00	43.662.500,00	(26.337.500,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	2500 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	2500 Kg	60.000.000,00	8.000.000,00	(52.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.06 2	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	1 Unit Managemen	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	1 Unit Managemen	60.000.000,00	8.000.000,00	(52.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	100000 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Banyuwangi	100000 m3	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.07 1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Terbit Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit Manajemen	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Terbit Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.07 3	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	1 Unit Manajemen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	1 Unit Manajemen	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Banyuwangi	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Banyuwangi	80 %	95.000.000,00	277.315.000,00	182.315.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Banyuwangi	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Banyuwangi	1 laporan	95.000.000,00	277.315.000,00	182.315.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	19 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	19 Orang	20.000.000,00	2.325.000,00	(17.675.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	20.000.000,00	141.650.000,00	121.650.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01 3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3 Ha	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3 Ha	55.000.000,00	133.340.000,00	78.340.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. BANYUWANGI	DINAS KEHUTANAN
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					904.000.000,00	2.070.605.000,00	1.166.605.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	Persentase indikator program yang tercapai	93 %	500.000.000,00	356.000.000,00	(144.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
		Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.01	Percencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	1 dokumen	12.700.000,00	5.200.000,00	(7.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	2 dokumen			-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.150.000,00	670.000,00	(2.480.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.150.000,00	670.000,00	(2.480.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.400.000,00	3.860.000,00	(2.540.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	1 laporan	104.720.000,00	54.260.000,00	(50.460.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.400.000,00	39.100.000,00	(39.300.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	14.320.000,00	10.100.000,00	(4.220.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12.000.000,00	5.060.000,00	(6.940.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	8.400.000,00	2.400.000,00	(6.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.200.000,00	1.200.000,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.200.000,00	1.200.000,00	(3.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Sumenep	50 orang	Jumlah pegawai yang dikelola di CDK Wilayah Sumenep	50 orang	14.550.000,00	4.650.000,00	(9.900.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	9.750.000,00	3.450.000,00	(6.300.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 laporan	178.630.000,00	74.840.000,00	(103.790.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12.180.000,00	0,00	(12.180.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21.300.000,00	4.950.000,00	(16.350.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.500.000,00	18.690.000,00	(12.810.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.350.000,00	18.500.000,00	(23.850.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	58.400.000,00	24.900.000,00	(33.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	0 laporan	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 laporan	92.500.000,00	178.200.000,00	85.700.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	57.700.000,00	57.700.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31.800.000,00	117.500.000,00	85.700.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	67.500.000,00	36.450.000,00	(31.050.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUAR SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUAR SEBELUM PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3 28 1 1.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	46.000.000,00	32.000.000,00	(14.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.500.000,00	4.450.000,00	(2.050.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Sumenep	0.12 %	Persentase luas areal rehabilitasi di CDK Wilayah Sumenep	0.12 %	354.000.000,00	339.900.000,00	(14.100.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Sumenep	2 Laporan	Jumlah Laporan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan di CDK Wilayah Sumenep	2 Laporan	23.000.000,00	17.500.000,00	(5.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.03 6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	11.500.000,00	10.500.000,00	(1.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.03 7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	11.500.000,00	7.000.000,00	(4.500.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas area penanaman di CDK Wilayah Sumenep	50 Ha	Luas area penanaman di CDK Wilayah Sumenep	50 Ha	195.000.000,00	229.900.000,00	34.900.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.04 1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.04 4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	145.000.000,00	189.900.000,00	44.900.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.04 8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Sumenep	30000 Kg	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (bukan kayu) di CDK Wilayah Sumenep	30000 Kg	114.000.000,00	42.400.000,00	(71.600.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.06 2	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	4 Unit Managemen	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	4 Unit Managemen	114.000.000,00	42.400.000,00	(71.600.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Sumenep	36700 m3	Jumlah produksi hasil hutan rakyat (kayu) di CDK Wilayah Sumenep	36700 m3	22.000.000,00	50.100.000,00	28.100.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.07 1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	3 Unit Managemen	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	3 Unit Managemen	7.500.000,00	7.500.000,00	-	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 3 1.07 3	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	4 Unit Managemen	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilyani	4 Unit Managemen	14.500.000,00	42.600.000,00	28.100.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Sumenep	80 %	Persentase Produktifitas SDM Penyuluh Kehutanan di CDK Wilayah Sumenep	80 %	50.000.000,00	1.374.705.000,00	1.324.705.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Sumenep	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di CDK Wilayah Sumenep	1 laporan	50.000.000,00	1.374.705.000,00	1.324.705.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	23 Orang	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
3 28 5 1.01 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	38 Kelompok	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	38 Kelompok	25.000.000,00	1.354.705.000,00	1.329.705.000,00	CABANG DINAS KEHUTANAN (CDK) WIL. SUMENEP	DINAS KEHUTANAN
TOTAL						183.458.615.000,00		(183.458.615.000,00)		DINAS KEHUTANAN
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					47.130.399.800,00	56.739.050.480,00	9.608.650.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3 29 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	63 Poin	Indeks profesionalitas ASN	63 Poin			5.731.474.113,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
		Persentase indikator program yang tercapai	80 %	Persentase indikator program yang tercapai	80 %	26.596.449.480,00	32.327.923.593,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
			Persentase realisasi anggaran	90 %	Persentase realisasi anggaran	90 %		-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL				
3	29	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dokumen	866.236.684,00	616.236.684,00	(250.000.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	7 Dokumen			-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	543.957.048,00	293.957.048,00	(250.000.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.999.880,00	5.999.880,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.999.880,00	5.999.880,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.712,00	1.999.712,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.712,00	1.999.712,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	158.724.688,00	158.724.688,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	147.555.764,00	147.555.764,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	21.614.778.001,00	21.673.108.001,00	58.330.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 org / bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 org / bulan	20.796.829.000,00	20.837.751.000,00	40.922.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	711.000.163,00	724.100.163,00	13.100.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	37.949.328,00	25.929.328,00	(12.020.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	15.699.919,00	15.699.919,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.999.838,00	15.799.838,00	(200.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.999.958,00	14.999.958,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	13.199.838,00	13.199.838,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan			-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	9.099.957,00	5.931.957,00	(3.168.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah	12 Laporan	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah	12 Laporan	122.969.198,00	111.551.360,00	(11.417.838,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	831.913,00	677.000,00	(154.913,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	101.137.860,00	96.398.360,00	(4.739.500,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	29	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.499.655,00	2.000.000,00	(2.499.655,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.999.860,00	9.176.000,00	(823.860,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.499.910,00	400.000,00	(2.099.910,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	647.962.240,00	901.669.130,00	253.706.890,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	530.367.040,00	533.297.200,00	2.930.160,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	35.995.200,00	244.847.530,00	208.852.330,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	81.600.000,00	123.524.400,00	41.924.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pengadaan	7 Dokumen	jumlah pengadaan	7 Dokumen	945.530.381,00	4.580.076.353,00	3.634.545.972,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.822.194,00	43.701.050,00	29.878.856,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	79.331.737,00	2.615.801.791,00	2.536.470.054,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	33.433.834,00	393.702.200,00	360.268.366,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	517.032.470,00	411.947.600,00	(105.084.870,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	168.510.146,00	174.478.696,00	5.968.550,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	26.040.000,00	33.996.000,00	7.956.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	107.360.000,00	906.449.016,00	799.089.016,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase penambahan aset	5 %	persentase penambahan aset	5 %	329.098.000,00	191.074.000,00	(138.024.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	269.098.000,00	173.738.000,00	(95.360.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000,00	17.336.000,00	(42.664.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang	100 %	persentase jasa penunjang	100 %	1.632.970.076,00	1.929.753.066,00	296.782.990,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.600.000,00	579.199.992,00	143.599.992,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.197.370.076,00	1.350.553.074,00	153.182.998,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pengadaan	1 paket	jumlah pengadaan	1 paket	436.904.900,00	2.374.454.999,00	1.937.550.099,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	19.425.000,00	19.425.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	25 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	25 Unit	93.800.000,00	249.465.010,00	155.665.010,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	123.319.900,00	122.811.800,00	(508.100,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit			-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	29	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	183.860.000,00	910.675.400,00	726.815.400,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	16.500.000,00	1.072.077.789,00	1.055.577.789,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan	94 %	Persentase Pengusahaan Air Tanah yang taat aturan	94 %	1.458.965.390,00	1.289.150.280,00	(169.815.110,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Realisasi Produksi Air Tanah	81 %	Realisasi Produksi Air Tanah	81 %	511.144.680,00	422.448.430,00	(88.696.250,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	250.854.960,00	162.158.710,00	(88.696.250,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.01	2	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	156.107.770,00	156.107.770,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.01	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	94 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	94 Laporan	104.181.950,00	104.181.950,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah dokumen SOP Pemanfaatan Air Tanah	1 Dokumen	Jumlah dokumen SOP Pemanfaatan Air Tanah	1 Dokumen	763.886.410,00	687.167.550,00	(76.718.860,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.02	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah prosedur dan persyaratan pemakaian air tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah prosedur dan persyaratan pemakaian air tanah yang ditetapkan	1 Dokumen	184.318.200,00	180.334.200,00	(3.984.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.02	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomtek pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	1817 rekomtek	Jumlah rekomtek pemanfaatan air tanah yang diterbitkan	1817 rekomtek	379.830.640,00	311.495.780,00	(68.334.860,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.02	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah pemilik izin air tanah yang diawasi	202 badan usaha	Jumlah pemilik izin air tanah yang diawasi	202 badan usaha	199.737.570,00	195.337.570,00	(4.400.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang ditetapkan	1 Dokumen	183.934.300,00	179.534.300,00	(4.400.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.03	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	83.402.260,00	79.002.260,00	(4.400.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.03	2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	14.641.200,00	14.641.200,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.03	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	67 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	67 laporan	85.890.840,00	85.890.840,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah dokumen harga patokan mineral bukan logam	87 %	Jumlah dokumen harga patokan mineral bukan logam	87 %	2.050.189.100,00	3.558.062.000,00	1.507.872.900,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Realisasi Produksi pertambangan Mineral berizin	53 %	Persentase Realisasi Produksi pertambangan Mineral berizin	53 %	1.325.189.930,00	1.895.812.000,00	570.622.070,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	jumlah dokumen wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 Daerah Provinsi atau Wilayah laut sampai dengan 1 mil yang terkumpul dan teroleh	1 Dokumen	jumlah dokumen wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 Daerah Provinsi atau Wilayah laut sampai dengan 1 mil yang terkumpul dan teroleh	1 Dokumen	1.075.190.060,00	1.645.812.000,00	570.621.940,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.01	2	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah rekomendasi teknis WIUP	95 Rekomtek	Jumlah rekomendasi teknis WIUP	95 Rekomtek	249.999.870,00	250.000.000,00	130,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah dokumen wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen wilayah usaha pertambangan yang ditetapkan	1 Dokumen	534.999.770,00	1.522.200.000,00	987.200.230,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	150.000.000,00	145.300.000,00	(4.700.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	29	3	1.03	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis IUP	75 Rekomtek	Jumlah Rekomendasi Teknis IUP	75 Rekomtek	224.999.900,00	175.000.000,00	(49.999.900,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.03	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan	159.999.870,00	1.201.900.000,00	1.041.900.130,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah Laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal Dalam Negeri pada Wilayah	1 Laporan	Jumlah Laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal Dalam Negeri pada Wilayah	1 Laporan	-	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	
3	29	3	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan Perizinan Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	Jumlah laporan Perizinan Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	64.999.590,00	36.400.000,00	(28.599.590,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.04	3	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	3 Dokumen	34.999.950,00	10.000.000,00	(24.999.950,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.04	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	14.999.820,00	13.200.000,00	(1.799.820,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.04	5	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah laporan hasil reklamasi dan pascatambang bersama pemegang izin pertambangan rakyat (IPR)	1 Laporan	Jumlah laporan hasil reklamasi dan pascatambang bersama pemegang izin pertambangan rakyat (IPR)	1 Laporan	14.999.820,00	13.200.000,00	(1.799.820,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perizinan IUJP	1 Dokumen	Jumlah dokumen perizinan IUJP	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.06	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis IUJP	15 Rekomtek	Jumlah rekomendasi teknis IUJP	10 Rekomtek	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah dokumen harga patokan mineral bukan logam	1 Dokumen	Jumlah dokumen harga patokan mineral bukan logam	1 Dokumen	79.999.810,00	78.650.000,00	(1.349.810,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.07	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	64.999.810,00	65.000.000,00	190,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.07	2	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000,00	8.650.000,00	(1.350.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.07	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.08		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perizinan IUPK Pengangkutan dan Penjualan	15 Dokumen	Jumlah dokumen perizinan IUPK Pengangkutan dan Penjualan	15 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.08	1	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah rekomendasi teknis IUPK Pengangkutan dan Penjualan	15 Rekomtek	Jumlah rekomendasi teknis IUPK Pengangkutan dan Penjualan	15 Rekomtek	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.09		Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perizinan IUP untuk Penjualan	10 Dokumen	Jumlah dokumen perizinan IUP untuk Penjualan	10 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.09	1	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan	Jumlah rekomendasi teknis IUP untuk penjualan	10 Rekomtek	Jumlah rekomendasi teknis IUP untuk penjualan	3 Rekomtek	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.10		Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah dokumen persetujuan perubahan direksi bagi pemegang IUP	15 Dokumen	Jumlah dokumen persetujuan perubahan direksi bagi pemegang IUP	15 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.10	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Jumlah persetujuan perubahan direksi bagi pemegang IUP	15 Rekomtek	Jumlah persetujuan perubahan direksi bagi pemegang IUP	3 Rekomtek	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	29	5		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Presentase Peningkatan EBT yang terbangun	14 %	Presentase Peningkatan EBT yang terbangun	14 %	2.851.362.230,00	11.425.784.360,00	8.574.422.130,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah pemanfaatan panas bumi skala provinsi	2 Lokasi	Jumlah pemanfaatan panas bumi skala provinsi	2 Lokasi	20.843.460,00	20.843.460,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.01	3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	2 laporan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	2 laporan	20.843.460,00	20.843.460,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengusahaan bahan bakar nabati skala provinsi	1 badan usaha	Jumlah pengusahaan bahan bakar nabati skala provinsi	1 badan usaha	21.474.710,00	21.474.710,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.03	4 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 laporan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 laporan	21.474.710,00	21.474.710,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah EBT yang terbangun	60 Unit	Jumlah EBT yang terbangun	60 Unit	2.809.044.060,00	11.383.466.190,00	8.574.422.130,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	1 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah dokumen kebijakan konservasi	1 Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan konservasi	2 Dokumen	485.162.330,00	830.000.000,00	344.837.670,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pembinaan SDM yang memahami konservasi skala provinsi	2 Laporan	Jumlah pembinaan SDM yang memahami konservasi skala provinsi	2 Laporan	369.933.060,00	281.555.190,00	(88.377.870,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	3 Sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi	45 instansi	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi	45 instansi	233.274.030,00	306.762.590,00	73.488.560,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	4 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	70 orang	Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi	70 orang			-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	6 Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah KK yang dapat EBT	130 KK	Jumlah KK yang dapat EBT	180 KK	1.546.831.990,00	9.755.211.760,00	8.208.379.770,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	7 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mengikuti bimtek	40 Lembaga	Jumlah lembaga yang mengikuti bimtek	40 Lembaga	39.616.590,00	39.616.590,00	-	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	5	1.04	7 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil audit energi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil audit energi	1 Dokumen	134.226.060,00	170.320.060,00	36.094.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teralir listrik	7 %	Persentase peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teralir listrik	7 %	14.173.433.600,00	8.088.130.247,00	(6.085.303.353,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha yang memiliki IUPTL	1 badan usaha	Jumlah badan usaha yang memiliki IUPTL	1 badan usaha	4.999.100,00	210.200,00	(4.788.900,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.01	2 Penyesunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Rekomtek	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1 Rekomtek	4.999.100,00	210.200,00	(4.788.900,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha yang memiliki izin operasi	94 Laporan	Jumlah badan usaha yang memiliki izin operasi	94 Laporan	622.348.069,00	653.578.576,00	31.230.507,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.02	2 Penyesunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomtek IO	54 Rekomtek	Jumlah Rekomtek IO	54 Rekomtek	467.349.429,00	498.580.036,00	31.230.607,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.02	3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	154.998.640,00	154.998.540,00	(100,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah badan usaha yang taat aturan	96 badan usaha	Jumlah badan usaha yang taat aturan	96 badan usaha	254.995.550,00	300.729.230,00	45.733.680,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	29	6	1.05	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	56 Rekomtek	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	56 Rekomtek	169.997.100,00	177.704.540,00	7.707.440,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.05	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40 Laporan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	40 Laporan	84.998.450,00	123.024.690,00	38.026.240,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rumah tangga miskin (RTM) yang mendapat aliran listrik	3966 RTM	Rumah tangga miskin (RTM) yang mendapat aliran listrik	3966 RTM	13.291.090.881,00	7.133.612.241,00	(6.157.478.640,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.06	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	124.995.490,00	125.042.290,00	46.800,00	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.06	6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6170 Unit	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6170 Unit	12.971.098.811,00	6.813.574.471,00	(6.157.524.340,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	6	1.06	7	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 laporan	194.996.580,00	194.995.480,00	(1.100,00)	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					1.336.024.200,00	3.489.476.520,00	2.153.452.320,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	IKM (UPT)	97 %	IKM (UPT)	97 %	1.075.938.565,00	1.466.475.267,00	390.536.702,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	74.047.680,00	69.132.000,00	(4.915.680,00)	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (UPT)	13 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (UPT)	13 orang	74.047.680,00	69.132.000,00	(4.915.680,00)	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	214.148.027,00	235.999.189,00	21.851.162,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT)	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT)	1 paket	8.210.486,00	8.210.486,00	-	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT)	1 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT)	1 paket	14.694.656,00	16.698.656,00	2.004.000,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT)	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT)	1 paket	72.796.885,00	65.499.600,00	(7.297.285,00)	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	1 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	1 laporan	118.446.000,00	145.590.447,00	27.144.447,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang	100 %	Persentase jasa penunjang	100 %	743.184.658,00	1.073.441.628,00	330.256.970,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	12 laporan	93.930.000,00	154.620.000,00	60.690.000,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT)	7 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT)	7 laporan	649.254.658,00	918.821.628,00	269.566.970,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan	1 paket	Jumlah pengadaan	1 paket	44.558.200,00	87.902.450,00	43.344.250,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT)	8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT)	8 Unit	44.558.200,00	87.902.450,00	43.344.250,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(UPT)	4 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(UPT)	4 unit	0,00	0,00	-	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	29	2	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	IKM (UPT)	97 %	IKM (UPT)	97 %	218.630.805,00	257.142.643,00	38.511.838,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	2	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Realisasi Produksi Air Tanah	79 %	Realisasi Produksi Air Tanah	79 %	218.630.805,00	257.142.643,00	38.511.838,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
						Jumlah hasil uji sampel air (UPT)	892 sertifikat hasil uji	Jumlah hasil uji sampel air (UPT)	892 sertifikat hasil uji					DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase kegiatan yang berizin	87 %	Persentase kegiatan yang berizin	87 %	41.454.830,00	1.765.858.610,00	1.724.403.780,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Realisasi Produksi Pertambangan Mineral Berizin	87 %	Persentase Realisasi Produksi Pertambangan Mineral Berizin	87 %	41.454.830,00	1.765.858.610,00	1.724.403.780,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
3	29	3	1.01	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah sertifikat uji mineral batuan (UPT)	60 sertifikat uji	Jumlah sertifikat uji mineral batuan (UPT)	60 sertifikat uji	41.454.830,00	1.765.858.610,00	1.724.403.780,00	UPT PENGUJIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
TOTAL										48.466.424.000,00		(48.466.424.000,00)		DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
												-		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					9.576.921.000,00	34.076.921.000,00	24.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Ijin yang diterbitkan	135062 dokumen	Jumlah Ijin yang diterbitkan	135062 dokumen	180.244.000,00	445.416.000,00	265.172.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Beas dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Beas dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	1 dokumen	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Beas dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	1 dokumen	18.350.000,00	22.470.000,00	4.120.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Beas dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Beas dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Beas dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	18.350.000,00	22.470.000,00	4.120.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	35.964.000,00	57.016.000,00	21.052.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.02	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	5 Dokumen	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	5 Dokumen	35.964.000,00	57.016.000,00	21.052.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	135060 Dokumen	Jumlah SKA dan API yang diterbitkan	135060 Dokumen	125.930.000,00	365.930.000,00	240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	135000 Dokumen	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	135000 Dokumen	82.186.000,00	282.186.000,00	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	2	1.04	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6 Dokumen	43.744.000,00	83.744.000,00	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	1 %	Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	1 %	406.200.600,00	274.218.000,00	(131.982.600,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	4 sarana perdagangan	Jumlah Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	4 sarana perdagangan	406.200.600,00	274.218.000,00	(131.982.600,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	1.01	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	4 Laporan	272.616.600,00	112.790.000,00	(159.826.600,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	1.01	3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2 Orang	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2 Orang	133.584.000,00	161.428.000,00	27.844.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	2 %	Tingkat Inflasi Bahan Makanan	2 %	1.060.886.000,00	11.433.788.000,00	10.372.902.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok	90 %	Prosentase Ketersediaan Bahan Pokok	90 %	14.040.000,00	15.486.000,00	1.446.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	30	4	1.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	14.040.000,00	15.486.000,00	1.446.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 informasi	Jumlah Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 informasi	1.031.980.000,00	11.324.786.000,00	10.292.806.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	923.660.000,00	1.060.208.000,00	136.548.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.02	2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500 Laporan	108.320.000,00	10.264.578.000,00	10.156.258.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	37 kali	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	37 kali	14.866.000,00	93.516.000,00	78.650.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.03	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	1 Laporan	3.960.000,00	12.776.000,00	8.816.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	3.960.000,00	12.776.000,00	8.816.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	3.946.000,00	57.664.000,00	53.718.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	4	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1 Laporan	3.000.000,00	10.300.000,00	7.300.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Non Migas	1 milyar US\$	Net Ekspor Non Migas	1 milyar US\$	274.070.000,00	12.734.070.000,00	12.460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	98 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	98 Pelaku Usaha	274.070.000,00	12.734.070.000,00	12.460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	52 Pelaku Usaha	63.450.000,00	2.523.450.000,00	2.460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	3	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	80 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	80 Pelaku Usaha	134.620.000,00	10.134.620.000,00	10.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	120 Produk	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	120 Produk	38.000.000,00	38.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	5	1.01	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	120 Pelaku Usaha	38.000.000,00	38.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	90 pelaku usaha	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	90 pelaku usaha	7.655.520.400,00	9.189.429.000,00	1.533.908.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	10 Kali	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pembinaan, Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor	10 Kali	7.639.416.400,00	9.139.665.000,00	1.500.248.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	1.01	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	200 UMKM	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	200 UMKM	7.639.416.400,00	9.139.665.000,00	1.500.248.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 kali	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 kali	16.104.000,00	49.764.000,00	33.660.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	1.03	2	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Laporan	11.664.000,00	12.564.000,00	900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	7	1.03	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	4.440.000,00	37.200.000,00	32.760.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	31					88.696.822.000,00	99.516.158.000,00	10.819.336.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1				79.561.822.000,00	77.168.682.000,00	(2.393.140.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01			410.000.000,00	510.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	1		200.000.000,00	228.987.000,00	28.987.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	2		2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	3		2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	4		2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	5		2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	6		2.000.000,00	2.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.01	7		200.000.000,00	271.013.000,00	71.013.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02			67.045.963.000,00	61.152.611.000,00	(5.893.352.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	1		65.418.646.000,00	59.402.506.000,00	(6.016.140.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	2		1.567.116.000,00	1.198.944.000,00	(368.172.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	3		25.000.000,00	514.577.600,00	489.577.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	4		19.591.600,00	19.006.600,00	(585.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	5		9.000.000,00	9.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	6		1.039.400,00	1.039.400,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	7		4.200.000,00	6.167.400,00	1.967.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.02	8		1.370.000,00	1.370.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03			71.000.000,00	79.938.000,00	8.938.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03	1		1.000.000,00	1.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03	2		20.000.000,00	19.986.000,00	(14.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03	3		10.000.000,00	18.540.000,00	8.540.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03	4		10.000.000,00	9.822.000,00	(178.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	31	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	10.644.000,00	644.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	9.946.000,00	(54.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Laporan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Laporan	254.000.000,00	624.065.000,00	370.065.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	74.000.000,00	132.086.000,00	58.086.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000,00	18.400.000,00	(1.600.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000,00	270.760.000,00	250.760.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	50.000.000,00	23.325.000,00	(26.675.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	50.000.000,00	167.032.000,00	117.032.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	20.000.000,00	7.300.000,00	(12.700.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	20.000.000,00	5.162.000,00	(14.838.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	740.859.000,00	1.503.724.150,00	762.865.150,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	100.367.000,00	75.367.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	266.775.000,00	166.775.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	20.946.000,00	(29.054.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	56.350.000,00	(13.650.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	276 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	241 Dokumen	31.000.000,00	23.655.750,00	(7.344.250,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	263.788.900,00	223.788.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7 Laporan	25.000.000,00	27.850.000,00	2.850.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	164.859.000,00	437.435.500,00	272.576.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	6.056.000,00	(3.944.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	500.000,00	(24.500.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	40.000.000,00	82.015.000,00	42.015.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	64.017.000,00	44.017.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000,00	17.998.000,00	(2.002.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	10.500.000.000,00	11.357.754.078,00	857.754.078,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000.000,00	1.603.742.000,00	(396.258.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	7.192.000,00	2.192.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	31	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.490.000.000,00	9.731.820.078,00	1.241.820.078,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	umlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	500.000.000,00	1.858.574.772,00	1.358.574.772,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.000.000,00	33.088.000,00	(6.912.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 Unit	100.000.000,00	643.061.672,00	543.061.672,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	1.081.500,00	(8.918.500,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	25.000.000,00	124.012.500,00	99.012.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	100.000.000,00	59.657.000,00	(40.343.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	977.674.100,00	777.674.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	1,2 %	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	1,2 %	9.010.000.000,00	22.248.476.000,00	13.238.476.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 dokumen	9.010.000.000,00	22.248.476.000,00	13.238.476.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	28 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	28 Dokumen	4.335.000.000,00	7.397.476.000,00	3.062.476.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	4.050.000.000,00	14.085.000.000,00	10.035.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	500.000.000,00	626.000.000,00	126.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	10 %	Prosentase peningkatan pengendalian izin usaha industri	10 %	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	3	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	24 unit usaha	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	24 unit usaha	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	3	1.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	3	1.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	20 %	Persentase Industri yang telah terdaftar dalam SIINas	20 %	90.000.000,00	59.000.000,00	(31.000.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	31	4	1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 informasi	90.000.000,00	59.000.000,00	(31.000.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	4	1.01	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	4	1.01	2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	65.000.000,00	34.000.000,00	(31.000.000,00)	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	4	1.01	3 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.070.000.000,00	1.552.000.000,00	482.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	770.000.000,00	1.102.000.000,00	332.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase indikator program yang tercapai	90 %	90 %			-	-		
				Persentase realisasi anggaran	88,5 %	88,5 %			-	-		
3	31	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	3 Laporan	77.460.000,00	77.460.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.460.000,00	2.460.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	656.540.000,00	788.540.000,00	132.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	28.200.000,00	28.200.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	628.340.000,00	760.340.000,00	132.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	36.000.000,00	236.000.000,00	200.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	21.000.000,00	21.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.000.000,00	208.000.000,00	200.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15 Dokumen	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					790.000.000,00	1.214.000.000,00	424.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	600.000.000,00	875.000.000,00	275.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
					Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-							
					Persentase realisasi anggaran	88,5 %	Persentase realisasi anggaran	88,5 %	-							
3	31	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	140.533.000,00	279.880.400,00	139.347.400,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.157.500,00	29.395.300,00	9.237.800,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.239.500,00	18.360.800,00	9.121.300,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.779.500,00	20.076.300,00	1.296.800,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.700.000,00	94.700.000,00	79.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	69.956.500,00	110.648.000,00	40.691.500,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	25.600.000,00	110.460.000,00	84.860.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.600.000,00	110.460.000,00	84.860.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	366.228.000,00	416.506.400,00	50.278.400,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.087.000,00	87.000,00	(1.000.000,00)	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	83.182.500,00	80.495.576,00	(2.686.924,00)	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	31	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	281.958.500,00	335.923.824,00	53.965.324,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	31	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	67.639.000,00	68.153.200,00	514.200,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	56.539.000,00	57.011.000,00	472.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit			-	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	11.100.000,00	11.142.200,00	42.200,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	190.000.000,00	339.000.000,00	149.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	190.000.000,00	339.000.000,00	149.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	190.000.000,00	339.000.000,00	149.000.000,00	UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.640.000.000,00	2.015.000.000,00	375.000.000,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	1.326.086.889,00	1.436.086.889,00	110.000.000,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %			-		
						Persentase realisasi anggaran	88.5 %	Persentase realisasi anggaran	88.5 %			-		
3	31	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	8 Laporan	180.716.250,00	278.742.167,00	98.025.917,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.998.861,00	6.870.861,00	3.872.000,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.899.550,00	13.837.506,00	(62.044,00)	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	25.024.110,00	95.000.000,00	69.975.890,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.783.729,00	25.608.800,00	825.071,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.038.000,00	15.038.000,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.250.000,00	2.665.000,00	(1.585.000,00)	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.708.000,00	24.708.000,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.014.000,00	95.014.000,00	25.000.000,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	31	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	843.161.964,00	1.027.425.556,00	184.263.592,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.436.964,00	196.141.200,00	71.704.236,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	718.725.000,00	831.284.356,00	112.559.356,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	287.208.675,00	379.919.166,00	92.710.491,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	69.388.675,00	72.388.625,00	2.999.950,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14.820.000,00	14.546.900,00	(273.100,00)	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000,00	284.530.541,00	84.530.541,00	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					313.913.111,00	313.913.111,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi					313.913.111,00	313.913.111,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24 Dokumen	313.913.111,00	313.913.111,00	-	UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU DI PASURUAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.900.000.000,00	2.440.000.000,00	540.000.000,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	1.670.000.000,00	2.030.726.753,00	360.726.753,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %			-			
					Persentase realisasi anggaran	88.5 %	Persentase realisasi anggaran	88.5 %			-			
3	31	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	154.528.300,00	193.928.712,00	39.400.412,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.275.300,00	3.510.300,00	235.000,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.320.500,00	3.148.000,00	(172.500,00)	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	214.500,00	35.607.700,00	35.393.200,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.108.000,00	17.365.870,00	257.870,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.610.000,00	4.606.842,00	(3.158,00)	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	1.440.000,00	(360.000,00)	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124.200.000,00	128.250.000,00	4.050.000,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	36.930.000,00	36.930.000,00	-	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.930.000,00	36.930.000,00	-	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	31	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.392.350.000,00	1.707.093.541,00	314.743.541,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	590.000,00	504.000,00	(86.000,00)	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	205.000.000,00	210.000.000,00	5.000.000,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.186.760.000,00	1.496.589.541,00	309.829.541,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	86.191.700,00	92.774.500,00	6.582.800,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	70.160.900,00	76.772.200,00	6.611.300,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	16.030.800,00	16.002.300,00	(28.500,00)	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1,2 %	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1,2 %	230.000.000,00	409.273.247,00	179.273.247,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	230.000.000,00	409.273.247,00	179.273.247,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	2	1.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	230.000.000,00	409.273.247,00	179.273.247,00	UPT INDUSTRI KULTI DAN PRODUK KULTI DI MAGETAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.000.000.000,00	2.720.000.000,00	720.000.000,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	1.925.206.390,00	2.614.655.569,00	689.449.179,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-					
				Persentase realisasi anggaran	88,5 %	Persentase realisasi anggaran	88,5 %	-					
3	31	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	55.309.000,00	272.251.180,00	216.942.180,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.530.826,00	7.003.440,00	3.472.614,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1.110.500,00	185.821.200,00	184.710.700,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11.593.674,00	24.501.740,00	12.908.066,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.030.000,00	1.606.800,00	576.800,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	1.440.000,00	(360.000,00)	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 Laporan	36.244.000,00	51.878.000,00	15.634.000,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.837.572.307,00	2.289.618.289,00	452.045.982,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.030.000,00	1.000.000,00	(30.000,00)	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	210.616.000,00	181.428.075,00	(29.187.925,00)	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	33 Laporan	1.625.926.307,00	2.107.190.214,00	481.263.907,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	31	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	32.325.083,00	52.786.100,00	20.461.017,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	22.825.083,00	33.968.200,00	11.143.117,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	9.500.000,00	18.817.900,00	9.317.900,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	74.793.610,00	105.344.431,00	30.550.821,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	74.793.610,00	105.344.431,00	30.550.821,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	1.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	21 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	21 Dokumen	74.793.610,00	105.344.431,00	30.550.821,00	UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN DI SIDOARJO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.000.000.000,00	2.425.000.000,00	425.000.000,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	200.000.000,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-			-	-	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase realisasi anggaran	88,5 %	Persentase realisasi anggaran	88,5 %	-			-	-	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5 Laporan	45.439.236,00	44.830.000,00	(609.236,00)	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.706.855,00	5.000.000,00	2.293.145,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.266.000,00	3.500.000,00	234.000,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.391.381,00	30.000.000,00	(5.391.381,00)	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	2.575.000,00	4.830.000,00	2.255.000,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.627.821.496,00	1.861.428.609,00	233.607.113,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	171.200.000,00	160.740.000,00	(10.460.000,00)	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.456.621.496,00	1.700.688.609,00	244.067.113,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	126.739.268,00	318.741.391,00	192.002.123,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	53.999.268,00	52.171.591,00	(1.827.677,00)	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	44.900.000,00	32.742.600,00	(12.157.400,00)	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.840.000,00	233.827.200,00	205.987.200,00	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	200.000.000,00	200.000.000,00	-	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3	31	2	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-	UPT INDUSTRI MAKANAN , MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3 31 2 1.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	22 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	-	UPT INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KEMASAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.100.000.000,00	2.600.000.000,00	500.000.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	1.966.800.000,00	2.438.600.000,00	471.800.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-					
	Persentase realisasi anggaran	88.5 %	Persentase realisasi anggaran	88.5 %	-					
3 31 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	156.060.615,00	301.156.200,00	145.095.585,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.212.400,00	24.630.500,00	23.418.100,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.864.130,00	49.989.800,00	13.125.670,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.127.750,00	6.920.900,00	(3.206.850,00)	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.701.335,00	2.419.000,00	(282.335,00)	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	950.000,00	85.918.000,00	84.968.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	7.127.000,00	980.000,00	(6.147.000,00)	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	97.078.000,00	130.298.000,00	33.220.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.770.339.000,00	2.075.290.800,00	304.951.800,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	207.735.000,00	214.911.430,00	7.176.430,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.562.604.000,00	1.860.379.370,00	297.775.370,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	40.400.385,00	62.153.000,00	21.752.615,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	28.552.500,00	23.725.000,00	(4.827.500,00)	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	11.847.885,00	38.428.000,00	26.580.115,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 2	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	Prosentase peningkatan unit usaha industri	1.2 %	133.200.000,00	161.400.000,00	28.200.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 2 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri	2 Dokumen	133.200.000,00	161.400.000,00	28.200.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 2 1.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	133.200.000,00	161.400.000,00	28.200.000,00	UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.170.000.000,00	1.550.000.000,00	380.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	915.760.925,00	1.067.620.003,00	151.859.078,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-					
	Persentase realisasi anggaran	88.5 %	Persentase realisasi anggaran	88.5 %	-					
3 30 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	8 Laporan	52.590.417,00	113.147.728,00	60.557.311,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.285.891,00	35.433.202,00	16.147.311,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.506.126,00	3.506.126,00	1.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.780.000,00	3.350.000,00	(430.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.968.400,00	69.808.400,00	43.840.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	18.230.000,00	69.069.000,00	50.839.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	30	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00	9.002.000,00	1.002.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10.230.000,00	60.067.000,00	49.837.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	812.709.001,00	1.009.323.397,00	196.614.396,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.441.001,00	69.939.701,00	12.498.700,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	753.768.000,00	937.883.696,00	184.115.696,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	32.231.507,00	157.194.878,00	124.963.371,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	29.231.507,00	45.513.678,00	16.282.171,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	111.681.200,00	108.681.200,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	254.239.075,00	201.264.997,00	(52.974.078,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	187.844.575,00	124.270.497,00	(63.574.078,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	56.626.575,00	51.437.497,00	(5.189.078,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	127.218.000,00	71.233.000,00	(55.985.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	65 Pengaduan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	65 Pengaduan	4.000.000,00	1.600.000,00	(2.400.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.03		Selaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	66.394.500,00	76.994.500,00	10.600.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	53.568.000,00	67.820.000,00	14.252.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.03	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	5 Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani	5 Kasus	12.826.500,00	9.174.500,00	(3.652.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					900.000.000,00	1.212.000.000,00	312.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %			182.740.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	630.000.000,00	812.740.000,00	-		
						Persentase realisasi anggaran	88,50 %	Persentase realisasi anggaran	88,50 %			-		
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	122.515.700,00	295.229.800,00	172.714.100,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.481.800,00	8.784.000,00	1.302.200,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	14.232.400,00	56.095.700,00	41.863.300,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	13.232.800,00	17.906.100,00	4.673.300,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.066.300,00	35.526.000,00	11.459.700,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.192.600,00	22.726.000,00	8.533.400,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.120.000,00	2.460.000,00	(660.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	46.189.800,00	151.732.000,00	105.542.200,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	475.164.300,00	577.932.179,00	102.767.879,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.600.000,00	2.200.000,00	(1.400.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.595.100,00	29.595.100,00	(8.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.969.200,00	546.137.079,00	112.167.879,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	32.320.000,00	137.477.921,00	105.157.921,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	25.070.000,00	56.224.621,00	31.154.621,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	7.250.000,00	81.253.300,00	74.003.300,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	270.000.000,00	201.360.100,00	(68.639.900,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	217.740.000,00	110.130.600,00	(107.609.400,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	63.090.100,00	93.631.100,00	30.541.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	9 LPKSM	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	9 LPKSM	11.369.900,00	16.499.500,00	5.129.600,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	12 Pengaduan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	12 Pengaduan	143.280.000,00	0,00	(143.280.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	52.260.000,00	91.229.500,00	38.969.500,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	31.780.000,00	67.335.000,00	35.555.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.03	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	12 Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani	12 Kasus	20.480.000,00	23.894.500,00	3.414.500,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					810.000.000,00	1.064.000.000,00	254.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	540.000.000,00	794.000.000,00	254.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %			-		
						Persentase realisasi anggaran	88.5 %	Persentase realisasi anggaran	88.5 %			-		
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	159.500.000,00	157.423.200,00	(2.076.800,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	40.072.000,00	10.072.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	2.911.200,00	(12.088.800,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	20.500.000,00	500.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000,00	1.440.000,00	(560.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	338.500.000,00	365.459.591,00	26.959.591,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	28.000.000,00	(7.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	301.000.000,00	334.959.591,00	33.959.591,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	42.000.000,00	271.117.209,00	229.117.209,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya	3 Unit	32.000.000,00	61.549.809,00	29.549.809,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3 30 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	10.000.000,00	209.567.400,00	199.567.400,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	270.000.000,00	270.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	200.000.000,00	200.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.01 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	90.000.000,00	91.800.000,00	1.800.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.01 2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	16 LPKSM	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	16 LPKSM	10.000.000,00	8.200.000,00	(1.800.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	20 Pengaduan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.03 1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.03 2	Facilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	12 Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani	12 Kasus	20.000.000,00	20.000.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					850.000.000,00	1.350.000.000,00	500.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	688.390.000,00	1.181.600.000,00	493.210.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %			-		
		Persentase realisasi anggaran	88,50 %	Persentase realisasi anggaran	88,50 %			-		
3 30 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	6 Laporan	65.223.783,00	101.412.450,00	36.188.667,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.665.200,00	2.378.700,00	(286.500,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.445.880,00	0,00	(15.445.880,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.538.400,00	5.042.600,00	(2.495.800,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.920.200,00	10.430.550,00	3.510.350,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.390.103,00	4.896.600,00	(6.493.503,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.264.000,00	78.664.000,00	57.400.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	583.199.517,00	903.843.000,00	320.643.483,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.100.000,00	1.800.000,00	700.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.330.000,00	48.966.000,00	636.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	533.769.517,00	853.077.000,00	319.307.483,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	39.966.700,00	176.344.550,00	136.377.850,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	16.890.600,00	26.443.150,00	9.552.550,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	23.076.100,00	149.901.400,00	126.825.300,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	161.610.000,00	168.400.000,00	6.790.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	136.996.000,00	120.200.000,00	(16.796.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.01 1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	8 BPSK	121.800.000,00	48.200.000,00	(73.600.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6 1.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	10 Pengaduan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	10 Pengaduan	15.196.000,00	72.000.000,00	56.804.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 6	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	24.614.000,00	48.200.000,00	23.586.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab						
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target											
3	30	6	1.03	2	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	8000 Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani	8000 Kasus	24.614.000,00	48.200.000,00	23.586.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					870.000.000,00	1.140.000.000,00	270.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	625.021.990,00	847.284.740,00	222.262.750,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
					Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-							
					Persentase realisasi anggaran	88,50 %	Persentase realisasi anggaran	88,50 %	-							
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	7 Laporan	118.827.960,00	207.751.960,00	88.924.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.652.000,00	31.308.000,00	20.656.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.852.015,00	3.852.015,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.609.040,00	38.245.300,00	(5.363.740,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.795.905,00	24.159.645,00	5.363.740,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.620.000,00	1.620.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.516.000,00	4.516.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.783.000,00	104.051.000,00	68.268.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	460.356.000,00	525.231.000,00	64.875.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	480.000,00	480.000,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.956.000,00	32.956.000,00	4.000.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	430.920.000,00	491.795.000,00	60.875.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	45.838.030,00	114.301.780,00	68.463.750,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	2 Unit	36.348.030,00	41.281.080,00	4.933.050,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	9.490.000,00	73.020.700,00	63.530.700,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	244.978.010,00	292.715.260,00	47.737.250,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	80 Kali	172.318.010,00	170.207.260,00	(2.110.750,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6	1.01	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	135.000.000,00	89.000.000,00	(46.000.000,00)	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6	1.01	2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	8.649.530,00	8.649.530,00	-	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6	1.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	36 Pengaduan	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	36 Pengaduan	28.668.480,00	72.557.730,00	43.889.250,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	Jumlah barang/jasa yang diawasi	612000 Barang/Jasa	72.660.000,00	122.508.000,00	49.848.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	6	1.03	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	72.660.000,00	122.508.000,00	49.848.000,00	UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.500.000.000,00	1.865.000.000,00	365.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	93 %	Indeks profesionalitas ASN	93 %	1.279.253.360,00	1.444.253.360,00	165.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
					Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %	-							
					Persentase realisasi anggaran	88,5 %	Persentase realisasi anggaran	88,5 %	-							
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	2 Laporan	25.766.680,00	25.766.680,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.766.680,00	25.766.680,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1.227.095.000,00	1.392.095.000,00	165.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.570.000,00	3.570.000,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	241.700.000,00	241.700.000,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	981.825.000,00	1.146.825.000,00	165.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	26.391.680,00	26.391.680,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	26.391.680,00	26.391.680,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	220.746.640,00	420.746.640,00	200.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6000 6000	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6000 6000	220.746.640,00	420.746.640,00	200.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	9 Komoditi	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	9 Komoditi	123.083.440,00	123.083.440,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1200 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1200 Dokumen	56.527.200,00	156.527.200,00	100.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	10 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	10 Sertifikat	41.136.000,00	141.136.000,00	100.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI SURABAYA	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.610.000.000,00	1.940.000.000,00	330.000.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	90 %	Indeks profesionalitas ASN	90 %	1.101.854.000,00	1.431.844.000,00	329.990.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Persentase indikator program yang tercapai	88,5 %	Persentase indikator program yang tercapai	88,5 %	-					
					Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %	-					
3	30	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	8 Laporan	155.588.500,00	183.792.136,00	28.203.636,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.700.000,00	2.928.390,00	(3.771.610,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.450.000,00	31.578.800,00	2.128.800,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.196.000,00	2.868.600,00	(4.327.400,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
3	30	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.157.000,00	18.542.860,00	(7.614.140,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.861.500,00	6.962.586,00	3.101.086,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	960.000,00	1.020.000,00	60.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.400.000,00	10.653.000,00	(2.747.000,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67.864.000,00	109.237.900,00	41.373.900,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	867.453.550,00	957.476.664,00	90.023.114,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.860.000,00	3.500.000,00	(1.360.000,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	255.395.550,00	224.472.500,00	(30.923.050,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	607.198.000,00	729.504.164,00	122.306.164,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	78.811.950,00	290.575.200,00	211.763.250,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	41.349.200,00	61.724.000,00	20.374.800,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	34.480.000,00	25.475.600,00	(9.004.400,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.982.750,00	201.875.600,00	199.892.850,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	Prosentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan perundang-undangan	80 %	508.146.000,00	508.156.000,00	10.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6000 Sertifikat	Jumlah sertifikat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6000 Sertifikat	508.146.000,00	508.156.000,00	10.000,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	4 Komoditi	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	4 Komoditi	360.400.000,00	356.578.900,00	(3.821.100,00)	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	6	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	2000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	2000 Dokumen	27.616.000,00	27.616.000,00	-	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	30	6	1.02	3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	1 Sertifikat	120.130.000,00	123.961.100,00	3.831.100,00	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG - LEMBAGA TEMBAKAU DI JEMBER	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
						TOTAL				117.483.743.000,00		(117.483.743.000,00)		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
													-	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
4	1	SEKRETARIAT DAERAH									17.898.686.000,00	22.549.754.000,00	4.651.068.000,00		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Indeks Profesionalitas ASN	80,5 Nilai	Indeks Profesionalitas ASN	80,5 Nilai	10.285.261.000,00	9.615.805.750,00	(669.455.250,00)		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
						Persentase indikator program yang tercapai	97 %	Persentase indikator program yang tercapai	97 %			-			
						Persentase realisasi anggaran	92 %	Persentase realisasi anggaran	92 %			-			
4	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	10.005.592.000,00	8.198.890.000,00	(1.806.702.000,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
				Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Laporan	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Laporan	-							
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	8.651.020.000,00	6.629.668.000,00	(2.021.352.000,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
					Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	-						
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.354.572.000,00	1.569.222.000,00	214.650.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan data pegawai	2 Laporan	Jumlah laporan data pegawai	2 Laporan	14.155.000,00	383.946.000,00	369.791.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
				Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	39 Laporan	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	39 Laporan	-							
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	14.155.000,00	383.946.000,00	369.791.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan	12 Laporan	249.535.000,00	638.039.850,00	388.504.850,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
				jumlah paket pengadaan	10 Paket	jumlah paket pengadaan	10 Paket	-							
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	145.168.745,00	200.138.745,00	54.970.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.302.500,00	38.102.500,00	4.800.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.520.000,00	154.488.750,00	87.968.750,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.543.755,00	245.309.855,00	240.766.100,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa	2 Paket	Jumlah Jasa	2 Paket	5.479.000,00	108.337.000,00	102.858.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.479.000,00	108.337.000,00	102.858.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa	2 Paket	Jumlah Jasa	2 Paket	10.500.000,00	286.592.900,00	276.092.900,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Paket	-							
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.500.000,00	286.592.900,00	276.092.900,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara	1 Paket			-			
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			Jumlah Rumusan Kebijakan dibidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	3 Dokumen	Jumlah Rumusan Kebijakan dibidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	3 Dokumen	7.613.425.000,00	12.933.948.250,00	5.320.523.250,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	3	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan terkait penataan wilayah dan pemerintahan umum	12 Dokumen	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan terkait penataan wilayah dan pemerintahan umum	12 Dokumen	2.664.698.750,00	3.598.335.349,00	933.636.599,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
4	1	3	1.01	1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	0 Dokumen	982.698.750,00	2.136.098.349,00	1.153.399.599,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen			-			
						Jumlah fasilitasi penyusunan LPPD Kab/kota di Jatim	4 Kegiatan	Jumlah fasilitasi penyusunan LPPD Kab/kota di Jatim	5 Kegiatan			-			
						Jumlah fasilitasi tindaklanjut kegiatan MPU dan APPSI	1 Laporan	Jumlah fasilitasi tindaklanjut kegiatan MPU dan APPSI	1 Laporan			-			
						Jumlah kegiatan pembinaan kecamatan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan pembinaan kecamatan	2 Kegiatan			-			
						Jumlah laporan kegiatan MPU dan APPSI	2 Laporan	Jumlah laporan kegiatan MPU dan APPSI	2 Laporan			-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
4	1	3	1.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	800.000.000,00	480.237.000,00	(319.763.000,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.01	3	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	882.000.000,00	982.000.000,00	100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah di Jawa Timur	1 Kegiatan	Jumlah fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah di Jawa Timur	1 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah fasilitasi penyelesaian pertanahan di Jawa Timur	2 Kegiatan	Jumlah fasilitasi penyelesaian pertanahan di Jawa Timur	2 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah rumusan rekomendasi atau kebijakan batas daerah, penamaan rupabumi/toponimi/kode data wilayah di Jawa Timur	1 Dokumen	Jumlah rumusan rekomendasi atau kebijakan batas daerah, penamaan rupabumi/toponimi/kode data wilayah di Jawa Timur	1 Dokumen			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan terkait administrasi Kepala Daerah dan DPRD di Jawa Timur serta pengembangan otonomi dan penataan urusan	10 Dokumen	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan terkait administrasi Kepala Daerah dan DPRD di Jawa Timur serta pengembangan otonomi dan penataan urusan	10 Dokumen	3.045.370.000,00	4.900.296.400,00	1.854.926.400,00		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02	1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	60 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	60 Dokumen	1.440.370.000,00	1.375.370.000,00	(65.000.000,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02	2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	0 Dokumen	475.000.000,00	4.949.630.000,00	4.474.630.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Peralihan Kewenangan Urusan Pemerintahan di Jawa Timur	2 Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Peralihan Kewenangan Urusan Pemerintahan di Jawa Timur	2 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	2 Kegiatan	Jumlah Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	2 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Rumusan Rekomendasi atau Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Rumusan Rekomendasi atau Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah	1 Dokumen			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.02	3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur	1 Dokumen	1.130.000.000,00	1.075.296.400,00	(54.703.600,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Fasilitasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur	1 Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Timur	1 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Fasilitasi Penyusunan SPM di Jawa Timur	1 Kegiatan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan SPM di Jawa Timur	1 Kegiatan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	0 Laporan			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Jumlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen	Jumlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Jawa Timur	1 Dokumen			-		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antar Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	60 Dokumen	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antar Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	60 Dokumen	1.903.356.250,00	1.935.316.501,00	31.960.251,00		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	848.706.552,00	908.008.666,00	59.302.114,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03	2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	15 Dokumen	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	15 Dokumen	627.346.220,00	600.214.295,00	(27.131.925,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1	3	1.03	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan	427.303.478,00	427.093.540,00	(209.938,00)	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
TOTAL										17.898.686.000,00		(17.898.686.000,00)		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					1.702.098.998.000,00	614.143.811.667,00	(1.087.955.186.333,00)		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalisme ASN	82 Prosentase	Indeks profesionalisme ASN	82 Prosentase	28.659.524.000,00	32.301.160.000,00	3.641.636.000,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Prosentase indikator program yang tercapai	85 Prosentase	Prosentase indikator program yang tercapai	85 Prosentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Prosentase realisasi anggaran	97 Prosentase	Prosentase realisasi anggaran	97 Prosentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai	85 Prosentase	Prosentase indikator program Biro Kesejahteraan Rakyat yang tercapai	85 Prosentase	134.080.645,00	166.038.000,00	31.957.355,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	24.562.000,00	20.292.000,00	(4.270.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.142.395,00	4.520.000,00	(3.622.395,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.736.250,00	4.520.000,00	(2.216.250,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.736.250,00	5.770.000,00	(966.250,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.243.750,00	5.770.000,00	(2.473.750,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	34.387.500,00	9.996.000,00	(24.391.500,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	45.272.500,00	115.170.000,00	69.897.500,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat	97 Prosentase	Persentase realisasi anggaran biro Kesejahteraan Rakyat	97 Prosentase	19.818.424.000,00	17.846.085.200,00	(1.972.338.800,00)		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	15.326.808.000,00	13.618.906.000,00	(1.707.902.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.426.311.000,00	4.189.721.200,00	(236.589.800,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	11.658.500,00	13.230.000,00	1.571.500,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.910.000,00	2.010.000,00	(3.900.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	20.196.500,00	6.138.000,00	(14.058.500,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	7.645.000,00	8.040.000,00	395.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.340.000,00	4.020.000,00	(10.320.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.555.000,00	4.020.000,00	(1.535.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Prosentase	Persentase realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Prosentase	3.048.982.100,00	712.322.000,00	(2.336.660.100,00)		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 dokumen	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 dokumen	11.975.000,00	20.600.000,00	8.625.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	40.534.000,00	6.700.000,00	(33.834.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.400.000,00	13.900.000,00	8.500.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	37.270.000,00	8.500.000,00	(28.770.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	2.953.803.100,00	662.622.000,00	(2.291.181.100,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	85 Prosentase	Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	85 Prosentase	1.952.880.652,00	2.571.181.642,00	618.300.990,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.941.732,00	43.266.450,00	5.324.718,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.215.531,00	759.897.400,00	614.681.869,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	818.972.664,00	1.036.071.500,00	217.098.836,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	490.505.725,00	526.772.992,00	36.267.267,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.721.200,00	52.980.000,00	(4.741.200,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.780.000,00	36.560.000,00	(3.220.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	232.650.000,00	12.820.000,00	(219.830.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	130.093.800,00	102.813.300,00	(27.280.500,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 Dokumen	Jumlah Paket Pengadaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	2 Dokumen	898.940.300,00	1.729.432.100,00	830.491.800,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	898.940.300,00	1.729.432.100,00	830.491.800,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Menunjang Pelayanan Ketatausahaan	4 Dokumen	Jumlah Jasa yang Menunjang Pelayanan Ketatausahaan	4 Dokumen	1.674.987.655,00	8.151.143.310,00	6.476.155.655,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.600.000,00	9.120.000,00	(3.480.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.140.226.800,00	1.528.590.500,00	388.363.700,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.000.000,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	494.160.855,00	6.599.432.810,00	6.105.271.955,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Untuk Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	Jumlah Jasa Untuk Pemeliharaan Aset Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	1.131.228.648,00	1.124.957.748,00	(6.270.900,00)		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	539.797.500,00	624.553.200,00	84.755.700,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	156.231.148,00	183.337.000,00	27.105.852,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	435.200.000,00	317.067.548,00	(118.132.452,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritua	87 %	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritua	87 %	1.673.439.474.000,00	581.842.651.667,00	(1.091.596.822.333,00)		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	87 %	Prosentase hasil fasilitasi rumusan kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	87 %	-					
					Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	87 %	Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang bina mental spiritual	87 %	-					
					Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	80 %	Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	80 %	-					
					Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat p	80 %	Prosentase Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang ditindaklanjuti di bidang kesejahteraan rakyat p	80 %	-					
4	1	4	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Indeks Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Bina Mental Spiritual	85 %	Indeks Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Bina Mental Spiritual	85 %	424.939.700.500,00	570.237.478.167,00	145.297.777.667,00		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kelembagaan Bina Spiritual	2 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kelembagaan Bina Spiritual	2 dokumen	-					
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sarana Prasarana Spiritual	2 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Sarana Prasarana Spiritual	2 dokumen	-					
					Prosentase Lembaga Bina Spiritual yang Terasilitasi	87 %	Prosentase Lembaga Bina Spiritual yang Terasilitasi	87 %	-					
					Prosentase Sarana Prasarana Keagamaan yang Terkelola	87 %	Prosentase Sarana Prasarana Keagamaan yang Terkelola	87 %	-					
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi di bidang Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi di bidang bina kehidupan spiritual	2 Unit	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi di bidang Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi di bidang bina kehidupan spiritual	2 Unit		156.029.195.360,00			BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan					INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4	1	4	1.01	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	0 Unit	157.523.125.000,00	313.552.320.360,00	-	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						JUMLAH SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL YANG DIKELOLA	1 Unit	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL YANG DIKELOLA	1 Unit			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (ditanggihkan karena tidak bsa terukur)	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (ditanggihkan karena tidak bsa terukur)	1 Unit			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Presentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual yang ditindaklanjuti	90 Presentase	Presentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang sarana prasarana spiritual yang ditindaklanjuti	90 Presentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.01	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur	85 Presentase	Indeks kepuasan Peserta terhadap pelaksanaan peringatan Hari Besar Keagamaan di Jawa Timur	85 Presentase	267.416.575.500,00	256.685.157.807,00	(10.731.417.693,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi di bidang bina kehidupan spiritual	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi di bidang bina kehidupan spiritual	3 Dokumen			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	0 Lembaga	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	0 Lembaga			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Unit	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Unit			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						JUMLAH LEMBAGA BINA SPIRITUAL YANG DIFASILITASI	10 Lembaga	JUMLAH LEMBAGA BINA SPIRITUAL YANG DIFASILITASI	10 Lembaga			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Presentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kelembagaan yang ditindaklanjuti	87 Presentase	Presentase Rekomendasi permohonan bantuan hibah di bidang Kelembagaan yang ditindaklanjuti	87 Presentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Indeks Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	85 Presentase	Indeks Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	85 Presentase	317.524.543.000,00	3.678.293.000,00	(313.846.250.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Presentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	87 Presentase	Presentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	87 Presentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Presentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	87 Presentase	Presentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	87 Presentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Presentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	87 Presentase	Presentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	87 Presentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02	1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	2 Dokumen	105.090.355.450,00	241.605.450,00	(104.848.750.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	104.759.820.300,00	161.070.300,00	(104.598.750.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.02	3	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen	107.674.367.250,00	3.275.617.250,00	(104.398.750.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	4	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	87 Presentase	Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	87 Presentase	930.975.230.500,00	7.926.880.500,00	(923.048.350.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Indeks Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	85 Presentase	Indeks Kepuasan Peserta Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	85 Presentase			-		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		Prosentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	87 Prosentase	Prosentase Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	87 Prosentase			-			
4	1 4 1.03 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen	464.680.475.250,00	134.225.250,00	(464.546.250.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1 4 1.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	466.294.755.250,00	7.792.655.250,00	(458.502.100.000,00)	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
TOTAL							1.702.098.998.000,00		(1.702.098.998.000,00)		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				18.448.596.000,00	21.506.947.000,00	3.058.351.000,00			BIRO HUKUM
4	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalisme ASN	75 Persen	Indeks Profesionalisme ASN	75 Persen	13.589.801.000,00	1.507.237.815,00			BIRO HUKUM
			Persentase indikator program Biro Hukum yang tercapai	76 Persen	Persentase indikator program Biro Hukum yang tercapai	76 Persen		-			BIRO HUKUM
			Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum	93 Persen	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum	93 Persen		-			BIRO HUKUM
4	1 1 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	11 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	11 Dokumen	20.463.559,00	4.080.600,00	(16.382.959,00)		BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.220.000,00	485.000,00	(1.735.000,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.412.000,00	373.500,00	(2.038.500,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.957.000,00	529.500,00	(3.427.500,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.754.058,00	667.000,00	(2.087.058,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.957.000,00	1.200.000,00	(2.757.000,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.957.000,00	544.500,00	(3.412.500,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.206.501,00	281.100,00	(925.401,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	12.795.147.811,00	13.481.790.900,00	686.643.089,00		BIRO HUKUM
4	1 1 1.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12.485.054.000,00	13.243.405.000,00	758.351.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	300.936.000,00	236.064.000,00	(64.872.000,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.544.761,00	821.500,00	(1.723.261,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	575.000,00	679.800,00	104.800,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
4	1 1 1.02 6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.680.000,00	653.500,00	(4.026.500,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.358.050,00	167.100,00	(1.190.950,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	2.370.991,00	1.395.100,00	(975.891,00)		BIRO HUKUM	
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.340.991,00	373.500,00	(967.491,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.030.000,00	1.021.600,00	(8.400,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	116.962.000,00	136.283.100,00	19.321.100,00		BIRO HUKUM	
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.500.000,00	14.603.600,00	7.103.600,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.050.000,00	5.150.000,00	(900.000,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.700.000,00	49.123.500,00	40.423.500,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang 15 Orang 20 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang 15 Orang 20 Orang	94.712.000,00	67.406.000,00	- - -	(27.306.000,00)	BIRO HUKUM BIRO HUKUM BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	351.447.739,00	985.487.215,00	634.039.476,00		BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.661.742,00	3.658.400,00	(3.342,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.245.684,00	43.745.684,00	37.500.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	45.174.530,00	34.206.300,00	(10.968.230,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.583.133,00	59.583.133,00	-	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	49.500.000,00	60.450.000,00	10.950.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	10.827.200,00	12.780.000,00	1.952.800,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.490.000,00	9.492.620,00	1.002.620,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	105.105.450,00	700.271.078,00	595.165.628,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	62.860.000,00	61.300.000,00	(1.560.000,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	245.708.900,00	420.589.400,00	174.880.500,00		BIRO HUKUM	
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.540.000,00	24.520.000,00	11.980.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	233.168.900,00	396.069.400,00	162.900.500,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Asset Tetap Yang Terpelihara	7 Laporan	Jumlah Laporan Asset Tetap Yang Terpelihara	7 Laporan	57.700.000,00	67.412.500,00	9.712.500,00		BIRO HUKUM	
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.500.000,00	38.888.000,00	27.388.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 15 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 15 Unit	46.200.000,00	28.524.500,00	(17.675.500,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
					Persentase Perkara Hukum dan HAM di Jawa Timur Yang Telah Diputus	40 Persen		Persentase Perkara Hukum dan HAM di Jawa Timur Yang Telah Diputus	40 Persen						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAHAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
4	1	5		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesuksesan Dan Kepentingan Umum	100 Persen	Persentase Produk Hukum Provinsi yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kesuksesan Dan Kepentingan Umum	100 Persen	4.858.795.000,00	6.409.908.185,00	1.551.113.185,00		BIRO HUKUM		
					Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesuksesan dan Kepentingan Umum	100 Persen	Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi, Kesuksesan dan Kepentingan Umum	100 Persen							
4	1	5	1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Usulan Produk Hukum Provinsi yang difasilitasi (diproses) sesuai SOP	100 Persen	Persentase Usulan Produk Hukum Provinsi yang difasilitasi (diproses) sesuai SOP	100 Persen	3.342.683.200,00	4.069.694.600,00	727.011.400,00		BIRO HUKUM		
4	1	5	1.01	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	42 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	42 Dokumen	804.387.300,00	1.184.387.300,00	380.000.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	5	1.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	290 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	290 Dokumen	267.977.300,00	346.896.800,00	78.919.500,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
4	1	5	1.01	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Penyuluhan Hukum secara Langsung	12 Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Penyuluhan Hukum secara Langsung	12 Desa/Kelurahan	1.318.101.300,00	1.658.101.300,00	340.000.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
						Jumlah Penyuluhan HUKUM Melalui Media Elektronik	4 Kali	Jumlah Penyuluhan HUKUM Melalui Media Elektronik	4 Kali					-	BIRO HUKUM
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	0 Dokumen	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	0 Dokumen					-	BIRO HUKUM
						Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	72 Dokumen	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	72 Dokumen					-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.01	4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Asistensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kab/Kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi, Kesuksesan dan Kepentingan Umum	38 Kegiatan	Jumlah Asistensi Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kab/Kota yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi, Kesuksesan dan Kepentingan Umum	38 Kegiatan	952.217.300,00	880.309.200,00	(71.908.100,00)	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	0 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	0 Dokumen					-	BIRO HUKUM
						Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	380 Dokumen	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	380 Dokumen					-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM di Jawa Timur	100 Persen	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum dalam rangka Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM di Jawa Timur	100 Persen	1.516.111.800,00	2.340.213.585,00	824.101.785,00		BIRO HUKUM		
4	1	5	1.02	1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	0 Kasus	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	0 Kasus	547.145.300,00	738.247.085,00	191.101.785,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
						Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	35 Kasus	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	35 Kasus					-	BIRO HUKUM
4	1	5	1.02	2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Kegiatan Pendampingan Akreditasi OBH yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pendampingan Akreditasi OBH yang dilaksanakan	1 Kegiatan	968.966.500,00	1.601.966.500,00	633.000.000,00	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM	
						Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	0 Kasus	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	0 Kasus					-	BIRO HUKUM
						Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	100 Kasus	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	100 Kasus					-	BIRO HUKUM
						Jumlah Saran/Pertimbangan Hukum yang diproses	60 Saran/Pertimbangan	Jumlah Saran/Pertimbangan Hukum yang diproses	60 Saran/Pertimbangan					-	BIRO HUKUM
						Persentase Kepatuhan Kab/Kota Se Jawa Timur dan Provinsi Melaporkan Aksi HAM	100 Persen	Persentase Kepatuhan Kab/Kota Se Jawa Timur dan Provinsi Melaporkan Aksi HAM	100 Persen					-	BIRO HUKUM
TOTAL										18.448.596.000,00	22.049.332.000,00	(18.448.596.000,00)		BIRO HUKUM	
4	1			SEKRETARIAT DAERAH						22.286.440.000,00	22.049.332.000,00	(237.108.000,00)		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	70 Indeks	Indeks profesionalitas ASN	70 Indeks	12.330.470.002,00	11.572.229.465,00	(758.240.537,00)		BIRO PEREKONOMIAN		
					Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen	Persentase indikator program yang tercapai	100 Persen					BIRO PEREKONOMIAN		
					Persentase realisasi anggaran	98 Persen	Persentase realisasi anggaran	98 Persen					BIRO PEREKONOMIAN		
4	1	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 Dokumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	3 Dokumen	126.260.000,00	313.341.165,00	187.081.165,00		BIRO PEREKONOMIAN		
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen					BIRO PEREKONOMIAN		
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	92.840.000,00	88.700.000,00	(4.140.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.840.000,00	3.680.000,00	840.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.180.000,00	3.680.000,00	(500.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.520.000,00	6.520.000,00	(1.000.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.020.000,00	6.520.000,00	500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.180.000,00	192.191.165,00	186.011.165,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.680.000,00	12.050.000,00	5.370.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	10.223.480.250,00	8.334.201.700,00	(1.889.278.550,00)		BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	9.710.387.000,00	7.973.279.000,00	(1.737.108.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	401.112.000,00	259.754.400,00	(141.357.600,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	90.901.250,00	87.458.300,00	(3.442.950,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	2.680.000,00	2.510.000,00	(170.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	4.010.000,00	2.505.000,00	(1.505.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.520.000,00	3.010.000,00	(2.510.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.860.000,00	3.680.000,00	(3.180.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.010.000,00	2.005.000,00	(5.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	82.680.000,00	83.510.000,00	830.000,00		BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1.340.000,00	1.840.000,00	500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.340.000,00	1.170.000,00	(170.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000,00	80.500.000,00	500.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	153.057.447,00	399.434.100,00	246.376.653,00		BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	101.058.000,00	184.274.100,00	83.216.100,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.680.000,00	7.680.000,00	-	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	44.319.447,00	207.480.000,00	163.160.553,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	1.361.566.873,00	1.678.324.100,00	316.757.227,00		BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	256.214.429,00	432.382.900,00	176.168.471,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	35.530.000,00	50.055.300,00	14.525.300,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	142.913.375,00	216.731.140,00	73.817.765,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
4	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.620.000,00	22.750.000,00	(870.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	875.689.069,00	927.314.760,00	51.625.691,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	27.600.000,00	29.090.000,00	1.490.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	4 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	4 Laporan	5.107.832,00	250.670.000,00	245.562.168,00		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.107.832,00	250.670.000,00	245.562.168,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	224.703.800,00	352.264.000,00	127.560.200,00		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	101.980.000,00	103.500.000,00	1.520.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.818.800,00	37.200.000,00	3.381.200,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	960.000,00	17.040.000,00	16.080.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	87.945.000,00	194.524.000,00	106.579.000,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	4 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	4 Laporan	153.613.800,00	160.484.400,00	6.870.600,00		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	96.613.800,00	115.484.400,00	18.870.600,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	57.000.000,00	45.000.000,00	(12.000.000,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100 Persen	9.955.969.998,00	10.477.102.535,00	521.132.537,00		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	3 Dokumen	Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	3 Dokumen	3.696.185.162,00	3.182.669.255,00	(513.515.907,00)		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.01	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1 Dokumen	757.849.797,00	1.085.241.303,00	327.391.506,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dan Sarana Perekonomian	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dan Sarana Perekonomian	2 Dokumen	2.938.335.365,00	2.097.427.952,00	(840.907.413,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	3 Dokumen	Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	3 Dokumen	1.100.977.743,00	2.317.122.240,00	1.216.144.497,00		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	375.193.681,00	1.660.874.500,00	1.285.680.819,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.02	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	295.151.823,00	271.555.753,00	(23.596.070,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.02	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	430.632.239,00	384.691.987,00	(45.940.252,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	5 Dokumen	Penyediaan rekomendasi kebijakan lingkup bidang perekonomian	5 Dokumen	5.158.807.093,00	4.977.311.040,00	(181.496.053,00)		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.03	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	1.478.014.947,00	1.249.170.270,00	(228.844.677,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.03	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD serta Kebijakan Investasi Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD serta Kebijakan Investasi Daerah	2 Dokumen	2.923.851.686,00	3.043.721.681,00	119.869.995,00	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	435.674.914,00	393.933.530,00	(41.741.384,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
4	1	6	1.03	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	321.265.546,00	290.485.559,00	(30.779.987,00)	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN	
TOTAL										22.286.440.000,00		(22.286.440.000,00)		BIRO PEREKONOMIAN	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					15.855.636.000,00	16.877.024.000,00	1.021.388.000,00		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN	66 persen	Indeks Profesionalitas ASN	66 persen						
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran	97 persentase	Persentase Realisasi Anggaran	97 persentase	10.014.810.000,00	10.206.513.000,00	191.703.000,00		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
	PROVINSI										
		Presentase Indikator Program yang tercapai	100 persen	Presentase Indikator Program yang tercapai	100 persen						
4	1	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dokumen	142.760.000,00	149.128.400,00	6.368.400,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	14.700.000,00	15.830.000,00	1.130.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.100.000,00	6.045.600,00	(54.400,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.900.000,00	4.490.400,00	(409.600,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.550.000,00	4.370.600,00	(2.179.400,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	6.550.000,00	4.593.400,00	(1.956.600,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	95.960.000,00	105.840.000,00	9.880.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8.000.000,00	7.958.400,00	(41.600,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	12 dokumen	7.448.365.000,00	7.061.950.400,00	(386.414.600,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	7.373.840.000,00	6.993.428.400,00	(380.411.600,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.195.000,00	40.693.800,00	1.498.800,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	14.170.000,00	7.839.000,00	(6.331.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	8.540.000,00	8.506.100,00	(33.900,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	8.250.000,00	6.554.700,00	(1.695.300,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13 Dokumen	4.370.000,00	4.928.400,00	558.400,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD	4 laporan	6.050.000,00	5.996.100,00	(53.900,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	6.050.000,00	5.996.100,00	(53.900,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan kepegawaian PD	12 laporan	246.855.000,00	261.606.853,00	14.751.853,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.950.000,00	46.873.000,00	20.923.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	34.820.000,00	31.006.500,00	(3.813.500,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang	186.085.000,00	183.727.353,00	(2.357.647,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	1 laporan	1.829.262.000,00	2.274.235.947,00	444.973.947,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	536.500.000,00	647.487.850,00	110.987.850,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	530.950.000,00	564.223.614,00	33.273.614,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	253.260.000,00	262.147.800,00	8.887.800,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	498.552.000,00	790.886.683,00	292.334.683,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	9.490.000,00	(510.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan	1 paket jasa	25.000.000,00	15.010.000,00	(9.990.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000,00	15.010.000,00	(9.990.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan BMD	3 paket	Jumlah paket pemeliharaan BMD	3 paket	316.518.000,00	438.585.300,00	122.067.300,00		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	34 Unit	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	12 Unit	98.480.000,00	124.125.300,00	25.645.300,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	88.038.000,00	74.460.000,00	(13.578.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 aplikasi	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 aplikasi	130.000.000,00	240.000.000,00	110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan		Jumlah dokumen rumusan kebijakan administrasi Pembangunan	16 dokumen	5.840.826.000,00	6.670.511.000,00	829.685.000,00		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11 dokumen	jumlah dokumen rumusan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan	11 dokumen	3.675.190.000,00	4.179.875.000,00	504.685.000,00		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	748.934.000,00	724.119.920,00	(24.814.080,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	677.486.000,00	756.985.080,00	79.499.080,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.01	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	3 Laporan	2.248.770.000,00	2.698.770.000,00	450.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	3 dokumen	jumlah dokumen rumusan kebijakan pelaporan pelaksanaan pembangunan	5 dokumen	2.165.636.000,00	2.490.636.000,00	325.000.000,00		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.02	1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	3 Dokumen	317.905.000,00	427.905.000,00	110.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.02	2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Laporan	465.666.000,00	480.666.000,00	15.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	1	8	1.02	3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1.382.065.000,00	1.582.065.000,00	200.000.000,00	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TOTAL										15.855.636.000,00		(15.855.636.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					15.360.406.000,00	16.137.920.505,00	777.514.505,00	BIRO ORGANISASI	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	68 %	Indeks Profesionalitas ASN	68 %	11.825.958.000,00	11.126.342.000,00	(699.616.000,00)		BIRO ORGANISASI
					Persentase indikator program yang tercapai	80 %	Persentase indikator program yang tercapai	80 %						
					Persentase realisasi anggaran	90 %	Persentase realisasi anggaran	90 %						
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan Perangkat Daerah	4 dokumen	32.000.000,00	23.147.000,00	(8.853.000,00)		BIRO ORGANISASI
					Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	9 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	9 dokumen						
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.000.000,00	8.050.000,00	(6.950.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	1.970.000,00	(1.030.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	2.131.500,00	(868.500,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.000.000,00	2.886.000,00	(114.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.500.000,00	3.609.500,00	109.500,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 laporan	10.687.954.000,00	9.636.187.000,00	(1.051.767.000,00)	BIRO ORGANISASI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	10.357.954.000,00	9.358.338.000,00	(999.616.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	300.000.000,00	249.267.900,00	(50.732.100,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.000.000,00	15.581.100,00	(1.418.900,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 dokumen	165.000.000,00	123.640.000,00	(41.360.000,00)		BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	100.000.000,00	99.000.000,00	(1.000.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	50.000.000,00	9.640.000,00	(40.360.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 laporan	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 laporan	721.004.000,00	946.300.400,00	225.296.400,00		BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	85.990.000,00	86.697.760,00	707.760,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	27.870.000,00	17.870.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	454.070.320,00	154.070.320,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	22.500.000,00	2.500.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	280.014.000,00	312.662.320,00	32.648.320,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	11 laporan	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	11 laporan	40.000.000,00	221.991.000,00	181.991.000,00		BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	20.000.000,00	202.279.000,00	182.279.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000,00	19.712.000,00	(288.000,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	90.000.000,00	152.708.800,00	62.708.800,00		BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	90.000.000,00	152.708.800,00	62.708.800,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 laporan	90.000.000,00	22.367.800,00	(67.632.200,00)		BIRO ORGANISASI
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	90.000.000,00	22.367.800,00	(67.632.200,00)	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1	2			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal AA	70 %	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal AA	70 %			1.477.130.505,00		BIRO ORGANISASI
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap standarisasi pelayanan kategori baik	70 %	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap standarisasi pelayanan kategori baik	70 %	3.534.448.000,00	5.011.578.505,00			
						Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %					
4	1	2	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelembagaannya	100 PD Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelembagaannya	100 PD Kab/ Kota			200.000.000,00		BIRO ORGANISASI
						Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang ditata kelembagaannya	47 PD	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang ditata kelembagaannya	47 PD					
						Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku	40 %	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun ABK sesuai dengan SOTK yang berlaku	40 %	1.175.000.000,00	1.375.000.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab sesuai dengan SOTK yang berlaku	73 %	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun Anjab sesuai dengan SOTK yang berlaku	73 %						
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun evaluasi jabatan sesuai dengan SOTK yang berlaku	100 %	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun evaluasi jabatan sesuai dengan SOTK yang berlaku	100 %						
4	1 2 1.01 1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.01 2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.01 3	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	400.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang berbudaya kerja	34 Kab/ kota	Jumlah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur yang berbudaya kerja	34 Kab/ kota	2.359.448.000,00	3.636.578.505,00	1.277.130.505,00		BIRO ORGANISASI
			Jumlah Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang berbudaya kerja	45 %	Jumlah Perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang berbudaya kerja	45 %					
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan	42 PD	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan	42 PD					
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	30 PD	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	30 PD					
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan publik	40 PD	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan publik	40 PD					
4	1 2 1.02 1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	509.448.000,00	709.448.000,00	200.000.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.02 2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	475.000.000,00	526.200.000,00	51.200.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.02 3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	375.000.000,00	375.000.000,00	-	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.02 4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
4	1 2 1.02 5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	600.000.000,00	1.525.930.505,00	925.930.505,00	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
TOTAL							15.360.406.000,00		(15.360.406.000,00)		BIRO ORGANISASI
4	1	SEKRETARIAT DAERAH				220.519.694.000,00	342.717.436.240,00	122.197.742.240,00			BIRO UMUM
4	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 nilai	220.519.694.000,00	342.717.436.240,00	122.197.742.240,00		BIRO UMUM
			Indeks Profesionalitas ASN	60 %	Indeks Profesionalitas ASN	60 %					
			Persentase Indikator Program Yang Tercapai	85 nilai	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	85 nilai					
			Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Persentase Realisasi Anggaran	90 %					
4	1 1 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	4 Dokumen	180.291.848,00	105.703.076,00	(74.588.772,00)		BIRO UMUM
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen					
4	1 1 1.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	33.880.956,00	12.208.000,00	(21.672.956,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1 1 1.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.473.827,00	15.000.000,00	2.526.173,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1 1 1.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.524.800,00	8.838.000,00	313.200,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1 1 1.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.341.308,00	11.982.576,00	(4.358.732,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1 1 1.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.491.610,00	8.206.500,00	(1.285.110,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1 1 1.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	68.012.660,00	34.228.000,00	(33.784.660,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1 1 1.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	31.566.687,00	15.240.000,00	(16.326.687,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	8 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	8 Laporan	75.925.799.012,00	77.912.359.091,00	1.986.560.079,00		BIRO UMUM
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/ Bulan	72.692.008.000,00	74.542.450.000,00	1.850.442.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.753.261.750,00	1.774.932.840,00	21.671.090,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	842.943.843,00	921.273.420,00	78.329.577,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	305.497.751,00	310.982.331,00	5.484.580,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	247.540.856,00	291.656.000,00	44.115.144,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	8.254.656,00	11.700.000,00	3.445.344,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	65.476.807,00	43.300.000,00	(22.176.807,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	10.815.349,00	16.064.500,00	5.249.151,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	7 Laporan	596.624.414,00	504.492.000,00	(92.132.414,00)		BIRO UMUM
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	63.813.915,00	1.720.000,00	(62.093.915,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	107.281.076,00	95.000.000,00	(12.281.076,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Kali	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Kali	53.102.400,00	69.664.000,00	16.561.600,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	119.776.400,00	162.110.000,00	42.333.600,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	28 Laporan	25.285.800,00	25.430.000,00	144.200,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	223.664.823,00	145.568.000,00	(78.096.823,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.700.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketausahaan dan Kepegawaian	12 Laporan	Jumlah Dokumen Ketausahaan dan Kepegawaian	12 Laporan	2.874.516.633,00	3.397.268.988,00	522.752.355,00		BIRO UMUM
4	1	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	233.100.000,00	165.653.600,00	(67.446.400,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	2.111.058.633,00	2.655.772.360,00	544.713.727,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	102.598.780,00	101.290.000,00	(1.308.780,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	39.793.500,00	50.040.000,00	10.246.500,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	131.720.000,00	88.000.000,00	(43.720.000,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	256.245.720,00	336.513.028,00	80.267.308,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Jasa	11 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Jasa	11 Laporan	4.098.411.737,00	4.002.925.778,00	(95.485.959,00)		BIRO UMUM
4	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	567.567.975,00	278.428.300,00	(289.139.675,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	437.253.741,00	404.301.400,00	(32.952.341,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	656.178.556,00	754.341.253,00	98.162.697,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	505.235.000,00	561.250.000,00	56.015.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	150.424.240,00	90.947.000,00	(59.477.240,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	243.348.750,00	319.083.600,00	75.734.850,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	138.229.010,00	324.050.000,00	185.820.990,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	554.629.745,00	581.447.225,00	26.817.480,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	845.544.720,00	689.077.000,00	(156.467.720,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Laporan	10.382.737.548,00	10.289.123.500,00	(93.614.048,00)		BIRO UMUM
4	1	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	2.957.188.000,00	838.515.000,00	(2.118.673.000,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	4.488.801.428,00	7.718.247.000,00	3.229.445.572,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	48.840.000,00	29.458.000,00	(19.382.000,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	30 Unit	785.202.598,00	200.200.000,00	(585.002.598,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	2.102.705.522,00	1.502.703.500,00	(600.002.022,00)	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	10.467.656.303,00	18.282.823.920,00	7.815.167.617,00		BIRO UMUM
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	273.079.980,00	402.730.220,00	129.650.240,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.885.772.000,00	16.148.127.000,00	7.262.355.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.076.444.323,00	1.324.967.200,00	248.522.877,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.360.000,00	406.999.500,00	174.639.500,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap Yang Dipelihara	6 Laporan	Jumlah Laporan Aset Tetap Yang Dipelihara	6 Laporan	31.206.940.720,00	46.496.438.650,00	15.289.497.930,00		BIRO UMUM
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	46 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	46 Unit	3.190.849.231,00	10.511.338.000,00	7.320.488.769,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	535 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	535 Unit	14.496.753.553,00	17.414.574.211,00	2.917.820.658,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	1.268.374.371,00	1.298.374.200,00	29.999.829,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	990.037.490,00	1.494.493.000,00	504.455.510,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	37.000.000,00	57.432.800,00	20.432.800,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	11.223.926.075,00	15.720.226.439,00	4.496.300.364,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	4 Laporan	21.238.607.448,00	34.374.298.240,00	13.135.690.792,00		BIRO UMUM
4	1	1	1.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	254.167.000,00	2.315.503.000,00	2.061.336.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	80 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	80 Paket	627.489.660,00	976.709.000,00	349.219.340,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	37.000.000,00	37.000.000,00	-	BIRO UMUM	BIRO UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	1	1	1.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	840 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	840 Orang/ Bulan	20.319.950.788,00	31.045.086.240,00	10.725.135.452,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terpenuhi	80 %	Persentase Penyediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Yang Terpenuhi	80 %	63.548.108.337,00	147.352.002.997,00	83.803.894.660,00		BIRO UMUM
4	1	1	1.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	300 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	300 Paket	40.959.384.447,00	106.363.279.107,00	65.403.894.660,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 Paket	8.615.563.285,00	17.615.563.285,00	9.000.000.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	1	1	1.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	150 Paket	13.973.160.605,00	23.373.160.605,00	9.400.000.000,00	BIRO UMUM	BIRO UMUM
TOTAL										220.519.694.000,00		(220.519.694.000,00)		BIRO UMUM
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					39.407.638.000,00	62.143.375.000,00	22.735.737.000,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					39.407.638.000,00	62.143.375.000,00	22.735.737.000,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.075.850.700,00	4.381.828.900,00	2.305.978.200,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.688.015.000,00	2.120.516.000,00	432.501.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	16.457.300,00	17.260.000,00	802.700,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.475.200,00	16.673.600,00	198.400,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	48.814.500,00	54.244.000,00	5.429.500,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	62.380.500,00	63.107.400,00	726.900,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	48.386.000,00	56.657.900,00	8.271.900,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	195.322.200,00	2.053.370.000,00	1.858.047.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.326.543.050,00	16.364.013.300,00	37.470.250,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	14.583.722.000,00	13.319.459.000,00	(1.264.263.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.491.200.200,00	2.846.597.000,00	1.355.396.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	35.910.000,00	29.500.000,00	(6.410.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	38.839.500,00	36.320.000,00	(2.519.500,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	31.311.000,00	31.113.300,00	(197.700,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	93.060.350,00	43.244.000,00	(49.816.350,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	52.500.000,00	57.780.000,00	5.280.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					3.241.959.250,00	4.112.663.800,00	870.704.550,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	900 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	900 Paket	1.011.126.200,00	1.227.698.000,00	216.571.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.048.758.200,00	2.104.914.000,00	1.056.155.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	727.868.480,00	555.419.100,00	(172.449.380,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	454.206.370,00	224.632.700,00	(229.573.670,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					415.000.000,00	219.006.200,00	(195.993.800,00)		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	210.000.000,00	152.536.200,00	(57.463.800,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	205.000.000,00	66.470.000,00	(138.530.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					405.000.000,00	334.175.800,00	(70.824.200,00)		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	405.000.000,00	334.175.800,00	(70.824.200,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					343.285.000,00	207.771.000,00	(135.514.000,00)		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	113.925.000,00	74.571.000,00	(39.354.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	229.360.000,00	133.200.000,00	(96.160.000,00)	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan					9.300.000.000,00	20.000.000.000,00	10.700.000.000,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	3 Dokumen	1.686.789.300,00	4.094.786.500,00	2.407.997.200,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50 Laporan	5.050.408.300,00	12.516.679.100,00	7.466.270.800,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.13	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	6 Laporan	2.562.802.400,00	3.388.534.400,00	825.732.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14		Fasilitas Keprotokolan					7.300.000.000,00	16.523.916.000,00	9.223.916.000,00		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14	1	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	850 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	850 Laporan	4.430.501.050,00	10.572.685.150,00	6.142.184.100,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14	2	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180 Laporan	1.544.098.100,00	2.723.398.100,00	1.179.300.000,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1	1	1.14	3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	750 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	750 Laporan	1.325.400.850,00	3.227.832.750,00	1.902.431.900,00	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
TOTAL										39.407.638.000,00		(39.407.638.000,00)		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
4	1				SEKRETARIAT DAERAH					24.891.766.000,00	28.451.979.000,00	3.560.213.000,00		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	80	Indeks profesionalitas ASN	80	16.925.762.000,00	20.741.351.000,00	3.815.589.000,00		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
					Persentase indikator program yang tercapai	100 %	Persentase indikator program yang tercapai	100 %						
					Persentase realisasi anggaran	96 %	Persentase realisasi anggaran	96 %						
4	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Dokumen	54.000.000,00	140.000.000,00	86.000.000,00		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.000.000,00	93.000.000,00	86.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Dokumen	15.618.376.000,00	17.964.858.800,00	2.346.482.800,00		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	14.891.776.000,00	16.951.989.000,00	2.060.213.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	709.044.700,00	995.314.500,00	286.269.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.530.000,00	2.530.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.530.000,00	2.530.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.055.000,00	5.055.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.350.300,00	1.350.300,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.890.000,00	2.890.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	17.500.000,00	12.690.000,00	(4.810.000,00)		
4	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.000.000,00	4.190.000,00	(4.810.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan Kepegawaian	12 Laporan	Jumlah Dokumen Ketatausahaan Kepegawaian	12 Laporan	196.000.000,00	201.400.000,00	5.400.000,00		
4	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	9.500.000,00	9.500.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	6.500.000,00	11.900.000,00	5.400.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76 Laporan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	71 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	225.500.000,00	270.482.000,00	44.982.000,00		
4	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	46.880.800,00	47.140.000,00	259.200,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.519.200,00	6.060.000,00	1.540.800,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	19.000.000,00	15.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daftar Arsip Aktif Jumlah Daftar Arsip Inaktif Jumlah Daftar Arsip Vlt; Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Daftar Arsip Aktif Jumlah Daftar Arsip Inaktif Jumlah Daftar Arsip Vlt; Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	20.000.000,00	23.182.000,00	3.182.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
4	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana		Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	1 Laporan	15.000.000,00	421.982.000,00	406.982.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	421.982.000,00	406.982.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	539.386.000,00	550.848.600,00	11.462.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	405.000.000,00	316.892.500,00	(88.107.500,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	55.386.000,00	65.386.000,00	10.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000,00	164.570.100,00	89.570.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap Yang Terpelihara		Jumlah Laporan Aset Tetap Yang Terpelihara	4 Laporan	260.000.000,00	1.179.089.600,00	919.089.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	70.000.000,00	97.073.600,00	27.073.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	992.016.000,00	892.016.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 %	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 %	7.966.004.000,00	7.710.628.000,00	(255.376.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan pengadaan Barang/Jasa	100 Persen	Persentase pengelolaan pengadaan Barang/Jasa	100 Persen	2.700.000.000,00	2.817.000.000,00	117.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01	1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen strategi Pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	Jumlah dokumen strategi Pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	850.000.000,00	781.000.000,00	(69.000.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan	850.000.000,00	781.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa	2 Rumusan	Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa	2 Rumusan	850.000.000,00	1.235.000.000,00	385.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah barang/jasa Katalog Elektronik Lokal yang dikelola	2 Item	Jumlah barang/jasa Katalog Elektronik Lokal yang dikelola	2 Item	850.000.000,00	1.235.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan	850.000.000,00	1.235.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tindaklanjut usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa	100 Persen	Persentase tindaklanjut usulan proses pemilihan penyedia barang/jasa	100 Persen	850.000.000,00	1.235.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen strategi Pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	Jumlah dokumen strategi Pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	1.000.000.000,00	801.000.000,00	(199.000.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Laporan	1.000.000.000,00	801.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.01		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa	2 Rumusan	Jumlah rumusan kebijakan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa	2 Rumusan	1.000.000.000,00	801.000.000,00	-	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan	100 Persen	Persentase penggunaan SPSE terhadap belanja pengadaan	100 Persen	2.000.000.000,00	2.176.728.000,00	176.728.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.02	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	775.000.000,00	891.000.000,00	116.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.02	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Sistem	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	725.000.000,00	850.000.000,00	125.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.02	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	500.000.000,00	435.728.000,00	(64.272.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ Kab/Kota yang dibina	100 Persen	Persentase UKPBJ Kab/Kota yang dibina	100 Persen	3.266.004.000,00	2.716.900.000,00	(549.104.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.03	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	35 Orang	1.432.762.000,00	1.091.000.000,00	(341.762.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.03	2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	38 UKPBJ	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	324.752.000,00	341.000.000,00	16.248.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
4	1	7	1.03	3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	100 Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1.508.490.000,00	1.284.900.000,00	(223.590.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
TOTAL													24.891.766.000,00		(24.891.766.000,00)	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	2					509.685.908.000,00	707.153.953.495,00	197.468.045.495,00		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1				290.754.651.481,00	284.642.778.727,00	(6.111.872.754,00)		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	1.01			4.956.485.600,00	3.976.538.353,00	(979.947.247,00)		SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	2.620.474.400,00	3.401.763.353,00	781.288.953,00	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	214.040.000,00	106.500.000,00	(107.540.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	200.440.000,00	109.900.000,00	(90.540.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	222.440.000,00	91.100.000,00	(131.340.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	279.440.000,00	92.775.000,00	(186.665.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	553.050.400,00	82.250.000,00	(470.800.400,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	866.600.800,00	92.250.000,00	(774.350.800,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	55.285.492.400,00	46.318.175.400,00	(8.967.317.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/ Bulan	45.020.243.000,00	36.150.360.000,00	(8.869.883.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.270.878.000,00	9.972.950.400,00	1.702.072.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.745.211.400,00	56.080.000,00	(1.689.131.400,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	42.480.000,00	36.050.000,00	(6.430.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	92.040.000,00	65.525.000,00	(26.515.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	49.500.000,00	10.360.000,00	(39.140.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	53.960.000,00	23.040.000,00	(30.920.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	11.180.000,00	3.810.000,00	(7.370.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan barang milik daerah	12 Laporan	1.062.647.900,00	1.024.200.300,00	(38.447.600,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	51.607.900,00	51.607.750,00	(150,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	863.120.000,00	851.102.550,00	(12.017.450,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	16.980.000,00	9.540.000,00	(7.440.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	57.240.000,00	53.270.000,00	(3.970.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	24.480.000,00	24.480.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	34.480.000,00	19.480.000,00	(15.000.000,00)	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.740.000,00	14.720.000,00	(20.000,00)	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	3.942.526.600,00	3.842.218.400,00	(100.308.200,00)		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	1.411.915.000,00	1.364.380.350,00	(47.534.650,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.000.000,00	2.000.000,00	(23.000.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	811.074.000,00	635.966.000,00	(175.108.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	480.120.000,00	421.900.000,00	(58.220.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	181.200.000,00	561.360.000,00	380.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	515.368.800,00	419.587.600,00	(95.781.200,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	507.848.800,00	427.024.450,00	(80.824.350,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	Jumlah laporan penyediaan Barang dan Jasa	11 Laporan	17.665.079.320,00	19.476.193.190,00	1.811.113.870,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	816.295.500,00	816.182.700,00	(112.800,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.500.000,00	36.422.900,00	(77.100,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	840.093.000,00	840.091.460,00	(1.540,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.550.944.220,00	3.619.355.560,00	68.411.340,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.112.322.000,00	2.112.321.970,00	(30,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300 Dokumen	656.120.000,00	656.065.000,00	(55.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.250.000,00	20.250.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.512.800.000,00	8.838.149.000,00	1.325.349.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.729.754.600,00	2.462.354.600,00	732.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	375.000.000,00	60.000.000,00	(315.000.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	Jumlah laporan pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Laporan	14.076.877.500,00	3.314.951.842,00	(10.761.925.658,00)		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	2.500.000.000,00	602.169.600,00	(1.897.830.400,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.000.000.000,00	704.853.800,00	(1.295.146.200,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	2.140.125.000,00	100.282.000,00	(2.039.843.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.887.602.500,00	609.163.360,00	(5.278.439.140,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	75.000.000,00	74.235.000,00	(765.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	620.000.000,00	414.388.000,00	(205.612.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	264.220.000,00	262.657.324,00	(1.562.676,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	589.930.000,00	547.202.758,00	(42.727.242,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan	19.560.833.951,00	24.730.051.311,00	5.169.217.360,00		SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	31.496.605,00	31.496.500,00	(105,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.826.465.496,00	8.813.996.000,00	2.987.530.504,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.074.000.000,00	1.610.309.000,00	(463.691.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.628.871.850,00	14.274.249.811,00	2.645.377.961,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12 Laporan	11.919.976.210,00	21.921.978.881,00	10.002.002.671,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	89 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	89 Unit	3.362.241.210,00	2.690.336.600,00	(671.904.610,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	850.000.000,00	838.695.000,00	(11.305.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.815.595.000,00	5.105.254.820,00	1.289.659.820,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	30.240.000,00	30.225.000,00	(15.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	86.400.000,00	1.128.000.000,00	1.041.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.100.500.000,00	2.705.274.000,00	1.604.774.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.600.000.000,00	4.484.687.461,00	2.884.687.461,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.075.000.000,00	4.939.506.000,00	3.864.506.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan fasilitas materi dan komunikasi pimpinan	1 Laporan	Jumlah laporan fasilitas materi dan komunikasi pimpinan	1 Laporan	311.600.000,00	484.599.950,00	172.999.950,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.13	1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	1 Dokumen	36.600.000,00	1.500.000,00	(35.100.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.13	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	250.000.000,00	458.100.000,00	208.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.13	3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.950,00	(50,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks kepuasan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	84 Indeks	Indeks kepuasan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	84 Indeks	161.433.132.000,00	157.833.571.100,00	(3.599.560.900,00)		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	120 Orang/ Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	120 Orang/ Bulan	158.171.282.000,00	154.618.648.000,00	(3.552.634.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	2.601.850.000,00	2.715.898.600,00	114.048.600,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120 Orang	660.000.000,00	499.024.500,00	(160.975.500,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan administrasi	84 Indeks	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan administrasi	84 Indeks	540.000.000,00	1.720.300.000,00	1.180.300.000,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	50.000.000,00	4.150.000,00	(45.850.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	9 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	9 Laporan	75.000.000,00	4.800.000,00	(70.200.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	5 Laporan	350.000.000,00	1.692.600.000,00	1.342.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	1	1.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	65.000.000,00	18.750.000,00	(46.250.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan perundang-undangan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	84 Indeks	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan perundang-undangan, penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	84 Indeks	218.931.256.519,00	422.511.174.768,00	203.579.918.249,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1. Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan sesuai jadwal	10 Kegiatan	1. Jumlah Pembahasan Raperda yang dilaksanakan sesuai jadwal	10 Kegiatan	105.617.378.619,00	66.300.262.280,00	(39.317.116.339,00)		SEKRETARIAT DPRD
						2. Jumlah FGD/ Publik Hearing Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang sesuai jadwal	10 Kegiatan	2. Jumlah FGD/ Publik Hearing Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD yang sesuai jadwal	10 Kegiatan					
4	2	2	1.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	74.850.000,00	41.525.000,00	(33.325.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
4	2	2	1.01	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	104.413.388.619,00	65.182.082.280,00	(39.231.306.339,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
					Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	84 %		Prosentase kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah ditentukan DPRD	84 %					
4	2	2	1.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	71.100.000,00	45.625.000,00	(25.475.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	58.040.000,00	31.030.000,00	(27.010.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD	2 Laporan	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD	2 Laporan	7.968.025.750,00	8.280.730.000,00	312.704.250,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	169.500.000,00	109.320.000,00	(60.180.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	129.500.000,00	90.440.000,00	(39.060.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	6.787.100.750,00	7.359.270.000,00	572.169.250,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	4	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	356.500.000,00	444.750.000,00	88.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	129.800.000,00	83.100.000,00	(46.700.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	395.625.000,00	193.850.000,00	(201.775.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD	5 Laporan	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD	5 Laporan	1.974.640.000,00	603.730.000,00	(1.370.910.000,00)		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	242.520.000,00	69.920.000,00	(172.600.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	242.520.000,00	69.720.000,00	(172.800.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	242.520.000,00	71.020.000,00	(171.500.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	252.000.000,00	60.250.000,00	(191.750.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	242.520.000,00	51.020.000,00	(191.500.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	242.520.000,00	60.570.000,00	(181.950.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	267.520.000,00	52.160.000,00	(215.360.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	242.520.000,00	169.070.000,00	(73.450.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	1 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	1 Laporan	18.719.556.900,00	144.742.914.000,00	126.023.357.100,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	4.958.075.000,00	4.839.160.000,00	(118.915.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	10.162.013.600,00	19.937.813.800,00	9.775.800.200,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120 Orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	120 Orang	1.984.000.000,00	1.343.000.000,00	(641.000.000,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	864.000.000,00	864.000.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	721.718.300,00	117.729.190.200,00	117.007.471.900,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	19.750.000,00	19.750.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	2	2	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.	1 Laporan	55.483.836.000,00	45.433.683.088,00	(10.050.152.912,00)		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	3.226.884.000,00	3.226.884.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	19.750.000,00	19.750.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	52.237.202.000,00	42.187.049.088,00	(10.050.152.912,00)	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	306.900.000,00	855.635.000,00	548.735.000,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	56.700.000,00	56.700.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	250.200.000,00	798.935.000,00	548.735.000,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan fasilitas kegiatan pembahasan kerjasama daerah oleh DPRD	1 Laporan	Jumlah laporan fasilitas kegiatan pembahasan kerjasama daerah oleh DPRD	1 Laporan	106.700.000,00	106.700.000,00	-		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	53.350.000,00	53.350.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	53.350.000,00	53.350.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan fasilitas tugas DPRD	1 Laporan	Jumlah laporan fasilitas tugas DPRD	1 Laporan	28.754.219.250,00	156.187.520.400,00	127.433.301.150,00		SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	17.768.387.250,00	145.201.688.400,00	127.433.301.150,00	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	86.800.000,00	86.800.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	155.450.000,00	155.450.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	1.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	10.743.582.000,00	10.743.582.000,00	-	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
TOTAL										509.685.908.000,00		(509.685.908.000,00)		SEKRETARIAT DPRD
5	1				PERENCANAAN					196.954.696.998,00	149.527.161.500	(47.427.535.498,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	61,93 %	Indeks Profesionalitas ASN	61,93 %	106.962.681.000	99.777.229.000	(7.185.452.000,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Persentase Indikator Program yang Tercapai	79 %	Persentase Indikator Program yang Tercapai	79 %			-		
						Persentase Realisasi Anggaran	93 %	Persentase Realisasi Anggaran	93 %			-		
5	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	391.243.000	571.948.500	180.705.500,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	135.950.000	135.053.500	(896.500,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.874.000	12.700.000	(1.174.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.055.000	9.700.000	(355.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.854.000	5.770.000	(2.084.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.854.000	5.520.000	(2.334.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	201.395.000	388.915.000	187.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.261.000	14.290.000	29.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					65.374.280.000	65.181.920.000	(192.360.000,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/ Bulan	63.817.352.000	63.647.108.000	(170.244.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.022.436.000	1.095.512.000	73.076.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	202.444.000	156.000.000	(46.444.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	203.907.000	166.000.000	(37.907.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.183.000	10.720.000	537.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.091.000	5.360.000	269.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	110.322.000	98.540.000	(11.782.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.545.000	2.680.000	135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	24.585.000	55.600.000	31.015.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	8.195.000	4.520.000	(3.675.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	8.195.000	4.540.000	(3.655.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.195.000	46.540.000	38.345.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 laporan	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 laporan	1.685.378.000	2.122.369.400	436.991.400,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	720.985.000	1.145.325.000	424.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	110.808.000	95.020.000	(15.788.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	14.495.000	17.360.000	2.865.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	601.610.000	630.960.000	29.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	237.480.000	233.704.400	(3.775.600,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	9 laporan	21.806.881.000	11.047.820.588	(10.759.060.412,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	131.484.000	36.041.500	(95.442.500,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	568.920.000	469.273.600	(99.646.400,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	768.085.000	952.385.100	184.300.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	233.126.000	247.173.588	14.047.588,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	297.721.000	297.150.000	(571.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	19.512.067.000	8.256.415.000	(11.255.652.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	72.110.000	282.972.000	210.862.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	223.368.000	506.409.800	283.041.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 laporan	1.374.482.000,00	1.468.703.011	94.221.011,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	374.482.000,00	41.175.011,00	(333.306.989,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	1.427.528.000	427.528.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	7.574.418.000	10.074.058.602	2.499.640.602,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.500.000	9.344.000	(156.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.282.377.000	2.440.606.000	1.158.229.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	420.491.000	433.220.000	12.729.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.862.050.000	7.190.888.602	1.328.838.602,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	8.731.414.000	9.254.808.899	523.394.899,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	275.663.000	310.164.000	34.501.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	1.097.049.000	1.526.920.400	429.871.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.653.994.000	1.305.389.900	(348.604.100,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.397.961.000	4.777.242.104	379.281.104,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	873.826.000	932.942.495	59.116.495,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	432.921.000	402.150.000	(30.771.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	86 %	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah	86 %	25.609.474.998	17.281.431.200	(8.328.043.798,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	2 dokumen	17.681.787.014	6.300.685.970	(11.381.101.044,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	11.267.106.000	2.200.000.000	(9.067.106.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 Dokumen	1.185.912.014	1.076.229.407	(109.682.607,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	498.100.000	1.296.969.670	798.869.670,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	49.206.000	22.500.000	(26.706.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1.184.921.000	718.077.600	(466.843.400,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.01	6	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3.496.542.000	986.909.293	(2.509.632.707,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	3 dokumen	4.341.956.281,00	5.844.083.081	1.502.126.800,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen			1.256.352.400,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	2.728.700.000,00	3.985.052.400	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan			-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	1	2	1.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	55 Orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	55 Orang	720.000.000	637.682.800	(82.317.200,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.02	3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	38 Orang	538.256.281	472.737.881	(65.518.400,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.02	4	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	355.000.000	748.610.000	393.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29 dokumen	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	29 dokumen	3.293.131.703	4.834.951.149	1.541.819.446,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1.333.131.703	2.644.155.703	1.311.024.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.03	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	175.000.000	171.859.646	(3.140.354,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan	874.900.000	1.065.230.800	190.330.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.03	4	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	15 Dokumen	910.100.000	953.705.000	43.605.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	292.600.000	301.711.000	9.111.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.04	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	65.000.000	74.111.000	9.111.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	162.600.000	162.600.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	1.04	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	65.000.000	65.000.000	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	79 %	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	79 %		32.468.501.300	(31.914.039.700,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	79 %	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	79 %			-		
						Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	79 %	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	79 %	64.382.541.000		-		
5	1	3	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	11 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesejahteraan Rakyat	11 dokumen		10.197.252.000	(13.984.792.000,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	12 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pembangunan Manusia	12 dokumen			-		
						Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan	11 dokumen	24.182.044.000		-		
5	1	3	1.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	80.504.000,00	10.988.000,00	(69.516.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	7.838.000,00	19.430.000,00	11.592.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	20 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	12 Perangkat Daerah			-		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	188.307.417,00	107.376.000,00	(81.021.417,00)	BADAN PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	20 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	20 Perangkat Daerah			-	PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	1	3	1.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	1.364.907.969	1.586.457.386	221.549.417,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.607.333.384	1.684.267.184	76.933.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	15.022.647.000,00	580.959.000,00	(14.441.688.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah			#VALUE!		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	250.822.872,00	250.822.872,00	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah			#VALUE!		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	5.659.593.358,00	5.956.951.558	297.358.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	11 dokumen	19.182.044.000,00	10.742.772.300	-	-	-	-
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pariwisata, Koperasi dan UKM		12 dokumen							
			Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		11 dokumen							
5	1	3	1.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	266.280.000,00	173.840.000,00	(92.440.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah			#VALUE!		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	16.080.000,00	16.080.000,00	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah			#VALUE!		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	9 Laporan	15.691.802.000,00	7.096.742.000	(8.595.060.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	1.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	86.590.000,00	86.590.000,00	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	1	3	1.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	1	3	1.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	1	3	1.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	248.228.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	1	3	1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebimargaan dan Perhubungan	10 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Kebimargaan dan Perhubungan	10 dokumen	(9.489.976.000,00)	-	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
					Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	11 dokumen	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	11 dokumen						
					Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11 dokumen	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup	11 dokumen						
5	1	3	1.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.030.000,00	6.030.000,00	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	3	1.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	9 Perangkat Daerah	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	1	3	1.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	9 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	9 Perangkat Daerah	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	1	3	1.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10.163.312.000	10.163.312.000	(3.489.976.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	1	3	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6.000.000.000,00	1.332.000.000	(6.000.000.000,00)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
TOTAL									196.954.696.998,00		(196.954.696.998,00)		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	2			KEUANGAN					102.518.344.000,00		#VALUE!		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	86.35	Indeks Profesionalitas ASN	86.35	92.031.254.000,00	101.186.317.525	9.155.063.525,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Persentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur	76 %	Persentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur	76 %			-			
					Persentase realisasi anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	90 %	Persentase realisasi anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	90 %			-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah	10 Dokumen	938.800.000,00	938.800.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	805.773.000,00	888.224.500	82.451.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.525.000,00	9.530.000	4.005.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.525.000,00	9.530.000	4.005.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.167.000,00	3.150.000	983.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.167.000,00	1.750.000	(417.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	106.830.000,00	15.775.500	(91.054.500,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.813.000,00	10.840.000	27.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	17 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	17 Laporan	75.796.505.000,00	60.788.517.500	(15.007.987.500,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/Bulan	74.276.506.000,00	59.343.853.000	(14.932.653.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.371.984.000,00	1.225.344.000	(146.640.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	133.865.750,00	192.600.500	58.734.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3.300.250,00	7.201.500	3.901.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.988.000,00	4.845.000	1.857.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.063.000,00	5.490.000	2.427.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.686.500,00	3.000.000	313.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.111.500,00	6.183.500	4.072.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset	4 Dokumen	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset	4 Dokumen	6.700.000,00	6.700.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0,00	0,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.350.000,00	3.350.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.350.000,00	3.350.000,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	122 Dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian	122 Dokumen	544.880.776	1.298.563.316	753.682.540,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	380.000.000,00	494.340.000	114.340.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	74.030.776,00	599.538.375	525.507.599,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	3.350.000,00	6.700.000	3.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.850.000,00	42.200.000	34.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	3.350.000,00	3.350.000	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	30.400.000,00	124.304.941	93.904.941,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.568.000,00	12.356.000	(3.212.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	30.332.000,00	15.774.000	(14.558.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kearsipan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kearsipan	1 Dokumen	5.597.258.452,00	20.976.088.264	15.378.829.812,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.279.832,00	50.821.100	2.541.268,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.300.000.000,00	5.020.801.196	2.720.801.196,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	217.136.620,00	250.566.700	33.430.080,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.000,00	1.065.018.800	65.018.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.560.000,00	26.736.000	7.176.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.225.000,00	293.617.500	191.392.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000,00	8.495.513.287	7.895.513.287,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	694.577.000,00	1.021.850.000	327.273.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	615.480.000,00	4.751.163.681	4.135.683.681,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana	6 Dokumen	35.503.524,00	262.014.000	226.510.476,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	0	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		35.503.524,00	37.022.000,00	1.518.476,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Perlengkapan Kantor	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Jasa Perlengkapan Kantor	2 Dokumen	6.165.336.250,00	7.485.329.345	1.319.993.095,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	400.640.000,00	323.980.000,00	(76.660.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.074.800.000,00	1.597.493.850,00	522.693.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	568.488.750,00	754.561.750,00	186.073.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.121.407.500,00	4.809.293.745,00	687.886.245,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan	6 Dokumen	2.946.269.998,00	9.430.305.100	6.484.035.102,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.782.000,00	9.725.000,00	(1.057.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	30 Unit	361.048.398,00	848.715.300,00	487.666.902,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	1.789.439.600,00	2.200.724.000,00	411.284.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000,00	5.512.000.000,00	5.412.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	285.000.000,00	359.140.800,00	74.140.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan P APBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan P APBD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan P APBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan P APBD	4 Dokumen	7.589.941.000,00	11.610.898.425	4.020.957.425,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan P APBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan P APBD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan P APBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan P APBD	4 Dokumen	1.389.462.000,00	1.566.927.000,00	177.465.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	244.536.000,00	202.591.000,00	(41.945.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	207.945.000,00	183.896.000,00	(24.049.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	75.400.000,00	125.660.000,00	50.260.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	154.060.000,00	119.230.000,00	(34.830.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0,00	0,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	0,00	0,00	-	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	211.525.000,00	238.378.000,00	26.853.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	299.059.000,00	228.946.000,00	(70.113.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	196.937.000,00	337.882.000,00	140.945.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	2	2	1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Draft Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi atas Rancangan Perda tentang APBD, PAPB dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Jatim	114 Dokumen	Jumlah Draft Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi atas Rancangan Perda tentang APBD, PAPB dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se-Jatim	114 Dokumen	1.983.256.000,00	3.971.413.350	1.988.157.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	258.919.000,00	394.540.200	135.621.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	279.396.000,00	334.086.600	54.690.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	230.649.000,00	320.220.000	89.571.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	257.443.000,00	1.022.850.000	765.407.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	8	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	565.599.000,00	1.120.589.950	554.990.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	9	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	112.102.000,00	493.444.000	381.342.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	157.898.000,00	125.096.000	(32.802.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	121.250.000,00	160.586.600	39.336.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta Laporan Posisi Kas, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Laporan Aliran Kas	508 Dokumen	Jumlah Dokumen SPD, SP2D (Gaji, UP, GU, TU, LS), SPJ, dan SKPP serta Laporan Posisi Kas, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Laporan Aliran Kas	508 Dokumen	2.711.763.000,00	3.149.437.500,00	437.674.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	498.354.000,00	465.955.000	(32.399.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.000.000,00	1.675.000	(325.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	364 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2.000.000,00	1.675.000	(325.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2.000.000,00	1.675.000	(325.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	90.354.000,00	644.785.600	554.431.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen	899.384.000,00	939.915.600	40.531.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	300.000.000,00	230.000.000	(70.000.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	2.000.000,00	1.675.000	(325.000,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	150.357.000,00	367.305.800	216.948.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	765.314.000,00	494.775.500	(270.538.500,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	1.505.460.000,00	2.923.120.575	1.417.660.575,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	91 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	91 Laporan	9.423.600,00	2.953.750	(6.469.850,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	92 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	92 Dokumen	514.181.400,00	110.115.200	(404.066.200,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	32.190.900,00	566.443.600	534.252.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	92 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	92 Laporan	25.556.700,00	297.513.500	271.956.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	790.959.050,00	934.713.775	143.754.725,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	14.688.600,00	18.808.000	4.119.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	19.567.200,00	19.692.250	125.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	2	2	1.04	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	13.520.400,00	401.748.250	388.227.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	22.760.950,00	22.610.250	(150.700,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	3276 Orang	30.947.200,00	426.114.000	395.166.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	41 Lembaga	31.664.000,00	122.408.000	90.744.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.897.149.000,00	8.951.854.500	6.054.705.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.897.149.000,00	8.951.854.500	6.054.705.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	192.978.480,00	261.700.000	68.721.520,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	4.020.000,00	71.210.000	67.190.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.005.000,00	26.225.000	25.220.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	49.850.000,00	53.200.000	3.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	500.727.720,00	992.248.350	491.520.630,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	91 Laporan	5.092.000,00	1.883.092.000	1.878.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.395.790.000,00	1.027.717.950	(368.072.050,00)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	4.020.000,00	504.020.000	500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	91 Laporan	36.450.800,00	98.025.800	61.575.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8 Dokumen	631.719.000,00	3.354.875.000	2.723.156.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	70.136.000,00	178.570.400	108.434.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	91 Laporan	5.360.000,00	500.970.000	495.610.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2				KEUANGAN			7.166.184.666.786,00		#VALUE!	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	86.35			1.009.393.900,00		
						Persentase capaian kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur	76 %	4.867.629.450,00	5.877.023.350	-	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Persentase realisasi anggaran BPKAD Provinsi Jawa Timur	90 %			-		
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kearsipan	1 Dokumen	1.080.901.600,00	1.037.121.400	(43.780.200,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.512.200,00	86.753.000	(11.759.200,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	327.753.400,00	354.114.000	26.360.600,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	215.000.000,00	133.940.000	(81.060.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.466.000,00	41.630.000	(2.836.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	9.898.000	2.398.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	167.700.000,00	26.532.000	(141.168.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	219.970.000,00	384.254.400	164.284.400,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana	6 Dokumen	235.730.000,00	247.636.883	11.906.883,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	9.750.000,00	21.424.000	11.674.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225.980.000,00	226.212.883	232.883,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Perlengkapan Kantor	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Jasa Perlengkapan Kantor	2 Dokumen	2.499.535.350,00	2.822.407.467	322.872.117,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	483.469.500,00	517.727.400	34.257.900,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	145.916.250,00	237.659.250	91.743.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.870.149.600,00	2.067.020.817	196.871.217,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Kendaraan	6 Dokumen	1.051.462.500,00	1.769.857.600	718.395.100,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	20.000.000,00	20.600.000	600.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141 Unit	793.482.500,00	687.652.800	(105.829.700,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	12.000.000,00	156.804.800	144.804.800,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	225.980.000,00	904.800.000	678.820.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.1 Ha	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.1 Ha	0,00	0	-	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	4 Laporan	Jumlah Dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan PAPBD serta Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dan PAPBD	4 Laporan	7.161.317.037.336,00	10.014.057.359.603	2.852.740.322.267,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Analisa dan Informasi Keuangan Daerah	4 Laporan	Laporan Analisa dan Informasi Keuangan Daerah	4 Laporan	7.160.600.165.786,00	10.012.543.169.403	2.851.943.003.617,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	1	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	35.360.000,00	39.867.000	4.507.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	121.286.000,00	106.210.000	(15.076.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	2	1.05	3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	154.696.000,00	106.938.000	(47.758.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	37.970.000,00	26.110.000	(11.860.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	5	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	15.360.000,00	17.540.000	2.180.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	6	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	29.604.000,00	40.817.000	11.213.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	75.008.000,00	180.316.000	105.308.000,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	490.208.437.000,00	543.244.525.500	53.036.088.500,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	622.069.990.600,00	225.155.325.974	(396.914.664.626,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	6.047.852.454.186,00	9.243.625.519.929	3.195.773.065.743,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				100 %	716.871.550,00	1.514.190.200	797.318.650,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.06	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	36.776.250,00	281.028.000	244.251.750,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.06	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	60.724.000,00	45.044.000	(15.680.000,00)	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	1.06	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	240 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	400 Orang	619.371.300,00	1.188.118.200	568.746.900,00	UPT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						TOTAL				7.268.703.010.786,00		(7.268.703.010.786,00)		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2				KEUANGAN					462.438.720.324,00		#VALUE!	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	87,52 %	Indeks profesionalitas ASN	87,52 %	454.604.072.551,00		96.102.679.191,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100 %	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100 %				-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %			550.706.751.742	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	6 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan	6 dokumen	907.326.472,00		1.215.805.328,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 dokumen			2.123.131.800	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	527.087.472,00	532.389.500	5.302.028,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	46.432.000,00	86.640.000	40.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	47.432.000,00	86.640.000	39.208.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.325.000,00	42.500.000	26.175.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	42.500.000	12.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	100.000.000,00	1.091.452.500	991.452.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	140.050.000,00	241.009.800	100.959.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	13 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan	13 dokumen	372.646.101.000,00	432.397.527.100	59.751.426.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	371.349.595.000,00	431.080.064.000	59.730.469.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	956.292.000,00	807.360.000	(148.932.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	275.966.000,00	427.176.900	151.210.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	18.452.000,00	17.820.000	(632.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20.796.000,00	24.952.500	4.156.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	15.000.000,00	30.253.700	15.253.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	4.950.000	(50.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	4.950.000	(50.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 laporan	26.000.000,00	26.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian	1 dokumen	800.130.000,00	4.169.751.750,00	3.369.621.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0,00	0,00	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	580.830.000,00	6.478.198.940	5.897.368.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	10.000.000,00	10.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	103.300.000,00	133.200.000	29.900.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	11.656.933.000,00	20.392.286.175	8.735.353.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	101.127.000,00	101.086.400	(40.600,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.000.000.000,00	6.692.170.375	4.692.170.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	400.000.000,00	412.436.400	12.436.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000,00	307.269.800	7.269.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.815.356.000,00	8.102.608.600	287.252.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	103.500.000,00	120.640.000	17.140.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.212.600	212.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	67.980.000,00	89.500.000	21.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	859.970.000,00	4.403.083.000	3.543.113.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3.000.000,00	157.279.000	154.279.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Tersedia	150 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Tersedia	150 paket	9.803.974.030,00	20.004.780.919	10.200.806.889,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	632.910.000,00	920.053.100	287.143.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	2.486.500.000,00	15.007.588.566	12.521.088.566,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5.274.564.030,00	350.000.000	(4.924.564.030,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	700.000.000,00	3.727.139.253	3.027.139.253,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 paket	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 paket	50.717.172.225,00	56.966.553.037	6.249.380.812,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	85.000.000,00	95.000.000	10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.408.605.000,00	9.860.989.769	1.452.384.769,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351.789.000,00	539.965.153	188.176.153,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.871.778.225,00	46.470.598.115	4.598.819.890,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	12 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	12 paket	8.046.435.824,00	12.169.073.771	4.122.637.947,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	51.200.000,00	199.926.000	148.726.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	12 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	12 Unit	934.820.000,00	1.031.757.700	96.937.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6.511.317.000,00	9.115.755.659	2.604.438.659,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	549.098.824,00	1.821.634.412	1.272.535.588,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	2	2		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	80 %		80 %	350.000.000,00	349.984.300,00	(15.700,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Alokasi Bagi Hasil Pajak	2 dokumen		2 dokumen	350.000.000,00	349.984.300,00	(15.700,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	2	1.05	10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	0 Laporan		0 Laporan	350.000.000,00	349.984.300,00	(15.700,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	10 Laporan		10 Laporan			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	3.1 Milyar Rupiah		3.1 Milyar Rupiah	7.484.647.773,00	7.774.290.630,00	289.642.857,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2.2 %		2.2 %			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Persentase Penurunan Temuan Berulang	-0.03 %		-0.03 %			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Target Pendapatan Asli Daerah	13,451 Milyar Rupiah		13,451 Milyar Rupiah			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	12 dokumen		12 dokumen	7.484.647.773,00	7.774.290.630,00	289.642.857,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi dan Penetapan Target PAD	4 dokumen		4 dokumen			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	12 dokumen		12 dokumen			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Pemenuhan Sarana Pendukung Teknologi Informasi	30 paket		30 paket			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan	3 dokumen		3 dokumen			-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	973.680.000,00	1.296.143.980	322.463.980,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	1.000.000.000,00	2.161.178.240	1.161.178.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	30 Sarana dan Prasarana		30 Sarana dan Prasarana	2.703.345.775,00	1.757.761.910	(945.583.865,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan		30 Laporan	357.621.998,00	1.286.708.500	929.086.502,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	7 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen Ketetapan		2 Dokumen Ketetapan	500.000.000,00	195.146.000	(304.854.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	8 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan		2 Laporan	500.000.000,00	560.670.000	60.670.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	11 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					50.000.000,00	60.951.000,00	10.951.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	35 dokumen		35 dokumen	700.000.000,00	1.564.415.800,00	864.415.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 laporan		12 laporan	700.000.000,00	816.874.200	116.874.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2			KEUANGAN					1.314.021.591,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran				1.248.144.382,00	1.492.169.230	244.024.848,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 dokumen		12 dokumen	5.646.000,00	69.792.000	64.146.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan		12 laporan	5.646.000,00	69.792.000	64.146.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen		12 dokumen	240.321.814,00	134.696.620	(105.625.194,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket		12 paket	4.768.464,00	9.738.400	4.969.936,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket		12 paket	13.497.526,00	23.484.900	9.987.374,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		5	2	1	1.06						3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	3.320.100,00	3.498.000	177.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.708.000,00	2.880.000	(828.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	90.018.420,00	4.590.000	(85.428.420,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	117.607.000,00	75.053.000	(42.554.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	749.566.568,00	462.702.862,00	(286.863.706,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	198.785.000,00	192.300.965,00	(6.484.035,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	275.390.784,00	0,00	(275.390.784,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	275.390.784,00	270.401.897,00	(4.988.887,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	252.610.000,00	824.977.748	572.367.748,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	37.200.000,00	154.399.100	117.199.100,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	0,00	0	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	13.410.000,00	7.179.000,00	(6.231.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	192.000.000,00	663.399.648	471.399.648,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bangkalan	84 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bangkalan	84 milyar rupiah	65.877.209,00	55.299.750,00	(10.577.459,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Timur	3117 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Timur				-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	65.877.209,00	65.877.209	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELURAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	35.124.000,00	45.798.250,00	10.674.250,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	25.953.209,00	7.901.500,00	(18.051.709,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANGKALAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.755.490.428	2.323.257.107	567.766.679,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.588.781.428	2.138.258.107	549.476.679,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	66.216.000	57.600.000	(8.616.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	66.216.000	57.600.000	(8.616.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	412.472.960,00	271.931.180,00	(140.541.780,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	5.620.820	5.606.900	(13.920,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	81.629.700	42.216.280	(39.413.420,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	8.879.966	8.869.100	(10.866,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	7.596.250	4.452.500	(3.143.750,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	10.011.600	9.720.000	(291.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	124.478.624	4.348.400	(120.130.224,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	174.256.000	196.718.000	22.462.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	844.092.468	893.843.415,00	49.750.947,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	11.703.552	11.700.000	(3.552,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	301.293.000	321.417.362	20.124.362,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.360.000	12.360.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	518.735.916	548.366.053	29.630.137,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	266.000.000	914.883.512	648.883.512,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	6.000.000	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	24.000.000	145.681.800	121.681.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	15.000.000	0,00	(15.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit			(7.454.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	29.000.000	21.546.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	192.000.000	747.655.712	555.655.712,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Banyuwangi	289 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Banyuwangi	289 milyar rupiah	166.709.000	184.999.000	18.290.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen			18.290.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	166.709.000	184.999.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan			29.754.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	68.837.000	98.591.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	33.072.000	23.208.000	(9.864.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD			(1.600.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	0 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	0 Dokumen SSPD	64.800.000	63.200.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BANYUWANGI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2			KEUANGAN					1.453.734.967,00	2.149.600.114	695.865.147,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.410.979.087,00	2.103.931.514	692.952.427,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	66.756.000,00	59.136.000	(7.620.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.756.000,00	59.136.000	(7.620.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 Dokumen	337.828.844,00	196.905.760,00	(140.923.084,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.372.054,00	7.570.500,00	1.198.446,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	78.312.890,00	2.889.600,00	(75.423.290,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.280.200,00	51.283.300,00	46.003.100,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.949.800,00	9.843.360,00	(106.440,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.880.000,00	2.460.000,00	(420.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	109.173.900,00	8.700.000,00	(100.473.900,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125.860.000,00	114.159.000,00	(11.701.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	779.614.243,00	835.947.959,00	56.333.716,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.983.488,00	4.500.000,00	(1.483.488,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.829.135,00	265.957.429,00	5.128.294,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000,00	10.300.000,00	1.300.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	503.801.620,00	555.190.530,00	51.388.910,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	226.780.000,00	1.011.941.795	785.161.795,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.000.000,00	143.965.500,00	128.965.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9.780.000,00	8.077.000,00	(1.703.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	400.198.409,00	208.198.409,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Blitar	288 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Blitar	288 milyar rupiah	42.755.880,00	45.668.600,00	2.912.720,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen			2.912.720,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	42.755.880,00	45.668.600,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	29.060.000,00	33.306.600,00	4.246.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	8.895.880,00	6.362.000,00	(2.533.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BLITAR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.302.401.998,00	1.706.607.198	404.205.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.202.139.998,00	1.600.882.198	398.742.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	73.608.000,00	80.448.000,00	6.840.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	73.608.000,00	80.448.000,00	6.840.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	243.603.018,00	168.415.800,00	(75.187.218,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.241.860,00	18.220.000	4.978.140,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.150.408,00	15.299.800	(4.850.608,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.707.500,00	24.808.400	9.100.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.901.250,00	3.169.000	267.750,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.800.000,00	2.460.000	660.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	98.805.000,00	3.610.000	(95.195.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.997.000,00	100.848.600	9.851.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	625.998.980,00	639.024.238	13.025.258,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.600.000,00	10.800.000	(1.800.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	279.312.000,00	266.435.604	(12.876.396,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.240.000,00	9.270.000	1.030.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	325.846.980,00	352.518.634	26.671.654,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	258.930.000,00	712.994.160	454.064.160,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	44.800.000,00	132.395.500,00	87.595.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	14.130.000,00	7.394.700,00	(6.735.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	573.203.960	381.203.960,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bojonegoro	178 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bojonegoro	178 milyar rupiah	100.262.000,00	105.725.000,00	5.463.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	100.262.000,00	105.725.000,00	5.463.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan			-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 2 4 1.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	69.750.000,00	86.606.000,00	16.856.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	10.512.000,00	14.119.000,00	3.607.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BOJONEGORO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2	KEUANGAN					1.059.983.998,00	1.383.922.330	323.938.332,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	951.113.198,00	1.272.653.330	321.540.132,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	81.240.000,00	81.756.000,00	516.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.240.000,00	81.756.000,00	516.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	272.724.278,00	173.334.500	(99.389.778,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.500.858,00	8.490.100	(10.758,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.902.820,00	17.902.000	(820,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.294.600,00	4.247.600	(47.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.236.000,00	8.626.800	1.390.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.628.000,00	5.820.000	192.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	100.800.000,00	12.780.000	(88.020.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	128.362.000,00	115.468.000	(12.894.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	350.348.920,00	356.989.079	6.640.159,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.585.600,00	7.150.000	564.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	106.234.200,00	111.693.600	5.459.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000,00	10.300.000	1.300.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	228.529.120,00	227.845.479	(683.641,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14 paket	246.800.000,00	660.573.751	413.773.751,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	4 Unit	21.800.000,00	134.760.500	112.960.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.000.000,00	11.859.000,00	(141.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	207.000.000,00	266.382.808,00	59.382.808,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bondowoso	70 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Bondowoso	70 milyar rupiah	108.870.800,00	111.269.000,00	2.398.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	108.870.800,00	111.269.000,00	2.398.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	59.700.000,00	81.033.000,00	21.333.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	10.770.800,00	11.036.000,00	265.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	38.400.000,00	19.200.000,00	(19.200.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.848.729.762,00	2.253.831.951	405.102.189,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.661.198.912,00	2.055.457.451	394.258.539,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	6.451.000,00	73.596.000	67.145.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.451.000,00	73.596.000	67.145.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					499.224.942,00	266.236.840	(232.988.102,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.453.108,00	10.822.200	1.369.092,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	62.533.014,00	67.964.840	5.431.826,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	21.790.820,00	21.883.800	92.980,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.590.000,00	8.380.000	(210.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.960.000,00	7.200.000	(2.760.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	186.120.000,00	11.804.000	(174.316.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.778.000,00	138.182.000	(62.596.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	896.692.970,00	942.265.066,00	45.572.096,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000,00	9.900.000,00	(4.600.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	341.897.770,00	351.741.106,00	9.843.336,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540.295.200,00	580.623.960	40.328.760,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 2 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	258.830.000,00	773.359.545	514.529.545,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	28.000.000,00	195.551.300	167.551.300,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	24.830.000,00	20.015.000,00	(4.815.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	192.000.000,00	249.357.779,00	57.357.779,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jember	278 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jember	278 milyar rupiah	187.530.850,00	198.374.500,00	10.843.650,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	187.530.850,00	198.374.500,00	10.843.650,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan			-		
5 2 4 1.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	77.200.000,00	98.886.500,00	21.686.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	59.930.850,00	49.088.000,00	(10.842.850,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	50.400.000,00	50.400.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2	KEUANGAN					1.654.615.603,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100%	Persentase realisasi anggaran	100%	1.552.381.393,00	1.657.472.139	105.090.746,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	73.608.000,00	69.792.000	(3.816.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.608.000,00	69.792.000	(3.816.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	326.465.637,00	174.943.500	(151.522.137,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.410.540,00	6.389.400	(21.140,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.040.918,00	4.640.200	(40.400.718,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.972.129,00		17.272.271,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket			-		
5 2 1 1.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.261.500,00	4.662.500	(2.599.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.090.000,00	2.400.000	(690.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	115.431.000,00	9.864.000	(105.567.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	127.259.550,00	107.743.000	(19.516.550,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	916.397.756,00	931.352.536,00	14.954.780,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.451.136,00	5.800.000,00	(1.651.136,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	398.102.300,00	376.482.250,00	(21.620.050,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.360.000,00	12.360.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	498.484.320,00	536.710.286,00	38.225.966,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14 paket	235.910.000,00	367.210.910,00	131.300.910,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	19.450.000,00	147.147.700,00	127.697.700,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	18.460.000,00	19.291.000,00	831.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	200.772.210,00	8.772.210,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jombang	215 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Jombang	215 milyar rupiah	102.234.210,00	122.811.000,00	20.576.790,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen			20.576.790,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	102.234.210,00	122.811.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	9 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	9 layanan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	51.034.210,00	46.067.000,00	(4.967.210,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	18.800.000,00	22.744.000,00	3.944.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	32.400.000,00	54.000.000,00	21.600.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JOMBANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					2.388.965.408,00	3.245.565.252	856.599.844,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	2.263.930.408,00	3.145.597.892	881.667.484,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	88.056.000,00	84.240.000,00	(3.816.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	88.056.000,00	84.240.000,00	(3.816.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	407.923.542,00	270.774.700,00	(137.148.842,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.598.485,00	29.060.900,00	(3.537.585,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	47.275.316,00	42.788.600,00	(4.486.716,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.887.791,00	33.169.400,00	2.281.609,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.488.650,00	8.577.500,00	(1.911.150,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.854.000,00	2.400.000,00	546.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	171.915.300,00	66.222.000,00	(105.693.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	112.904.000,00	88.556.300,00	(24.347.700,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	1.456.420.866,00	1.590.066.831,00	133.645.965,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.250.000,00	4.500.000,00	1.250.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	471.979.490,00	530.796.541,00	58.817.051,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.100.000,00	5.400.000,00	(2.700.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	973.091.376,00	1.049.370.290,00	76.278.914,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	311.530.000,00	395.931.677,00	84.401.677,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50.000.000,00	221.709.700,00	171.709.700,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	61.530.000,00	26.085.400,00	(35.444.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	192.000.000,00	148.136.577,00	(43.863.423,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Kediri	416 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Kediri	416 milyar rupiah	125.035.000,00	99.967.360,00	(25.067.640,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	12 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	12 dokumen	125.035.000,00	99.967.360,00	(25.067.640,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	72.472.000,00	66.574.000,00	(5.898.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	16.563.000,00	11.793.360,00	(4.769.640,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	36.000.000,00	21.600.000,00	(14.400.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEDIRI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.280.397.393,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.204.258.790,00	1.698.596.152	494.337.362,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	85.260.000,00	80.448.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		5	2	1	1.02						2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	261.710.308,00	148.457.190,00	(113.253.118,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.057.265,00	5.111.490	(2.945.775,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.390.250,00	10.748.200	357.950,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	26.582.393,00	20.034.400	(6.547.993,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.400.000,00	5.225.000	(4.175.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.690.000,00	2.460.000	(3.230.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	128.396.400,00	4.576.700	(123.819.700,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.194.000,00	100.301.400	27.107.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	588.838.482,00	619.113.855	30.275.373,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.425.000,00	4.416.000	(9.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.430.650,00	207.395.030	11.964.380,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.200.000,00	9.270.000	(930.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	378.782.832,00	398.032.825	19.249.993,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	268.450.000,00	548.589.194,00	280.139.194,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	60.800.000,00	200.493.400,00	139.693.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7.650.000,00	12.200.000	4.550.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	637.883.707	445.883.707,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan	190 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan	190 milyar rupiah	76.138.603,00	67.117.900	(9.020.703,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	76.138.603,00	67.117.900	(9.020.703,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-			UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	-			UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	29.575.000,00	28.560.750	(1.014.250,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	6.563.603,00	6.557.150	(6.453,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	40.000.000,00	32.000.000	(8.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LAMONGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.201.827.945,00	1.652.218.495	450.390.550,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.080.627.945,00	1.500.272.495	419.644.550,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	73.080.000,00	68.268.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	73.080.000,00	68.268.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	284.534.000,00	195.554.240	(88.979.760,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.124.800,00	14.912.000	8.787.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.475.000,00	35.422.200	13.947.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.761.200,00	9.331.200	3.570.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.816.000,00	9.568.340	(247.660,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.520.000,00	4.800.000	(720.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	147.714.000,00	13.680.000	(134.034.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	88.123.000,00	107.840.500	19.717.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	463.423.945,00	447.065.542,00	(16.358.403,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.400.000,00	12.000.000	3.600.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	212.419.405,00	168.899.417	(43.519.988,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.800.000,00	10.300.000	(500.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	231.804.540,00	255.866.125	24.061.585,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					259.590.000,00	789.384.713	529.794.713,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	43.200.000,00	171.897.300	128.697.300,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.390.000,00	22.845.000	10.455.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	594.642.413	402.642.413,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lumajang	126 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lumajang	126 milyar rupiah	121.200.000,00	151.946.000,00	30.746.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	121.200.000,00	151.946.000,00	30.746.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	54.500.000,00	85.246.000,00	30.746.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	60.000.000,00	60.000.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH LUMAJANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.480.227.768,00	1.970.184.728	489.956.960,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.394.064.758,00	1.871.316.978	477.252.220,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	70.584.000,00	68.268.000,00	(2.316.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	70.584.000,00	68.268.000,00	(2.316.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	333.382.266,00	187.221.900,00	(146.160.366,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.669.250,00	6.654.600,00	(14.650,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.661.416,00	39.655.200,00	(6.216,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	6.004.000,00	9.432.100,00	3.428.100,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	12.502.500,00	502.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.270.000,00	9.180.000,00	(90.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	146.242.000,00	7.632.000,00	(138.610.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	113.535.600,00	102.165.500,00	(11.370.100,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	728.548.492,00	775.159.517,00	46.611.025,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.585.600,00	6.570.000,00	(15.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	276.040.000,00	283.425.000,00	7.385.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445.922.892,00	485.164.517,00	39.241.625,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	261.550.000,00	840.667.561	579.117.561,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.180.000,00	0,00	(6.180.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	18.070.000,00	205.450.500,00	187.380.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	45.300.000,00	22.256.000,00	(23.044.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	192.000.000,00	612.961.061	420.961.061,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Madiun	201 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Madiun	201 milyar rupiah	86.163.010,00	98.867.750,00	12.704.740,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	86.163.010,00	98.867.750,00	12.704.740,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	11 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	46.950.000,00	57.557.750,00	10.607.750,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	39.213.010,00	41.310.000,00	2.096.990,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MADIUN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.206.826.014,00	1.639.416.671	432.590.657,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.143.368.312,00	1.587.012.169	443.643.857,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	73.080.000,00	76.428.000	3.348.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	73.080.000,00	76.428.000	3.348.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	240.839.124,00	164.303.700	(76.535.424,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.852.024,00	11.857.600	5.576,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.446.000,00	14.705.200	259.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	32.291.340,00		3.660.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		35.951.740	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.860.000,00	10.610.000	8.750.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.057.000,00	3.057.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	82.892.360,00	3.125.800	(79.766.560,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	94.440.400,00	84.996.360	(9.444.040,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	605.449.188,00	540.507.451	(64.941.737,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	4.500.000,00	1.800.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000		UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	332.229.444,00	243.451.742	(88.777.702,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.719.744,00	284.755.709	22.035.965,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	224.000.000,00	805.773.018	581.773.018,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	20.000.000,00	190.983.400,00	170.983.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	430.831.017,00	238.831.017,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Magetan	128 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Magetan	128 milyar rupiah	63.457.702,00	52.404.502,00	(11.053.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	63.457.702,00	52.404.502,00	(11.053.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	30.700.000,00	34.646.800,00	3.946.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	12.757.702,00	12.757.702,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MAGETAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.411.887.094,00	1.753.740.150	341.853.056,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.311.576.904,00	1.654.218.300	342.641.396,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	86.568.000,00	76.416.000	(10.152.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	86.568.000,00	76.416.000	(10.152.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	275.170.480,00	190.737.280	(84.433.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.184.696,00	7.184.200	(496,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.080.892,00	39.174.080	2.093.188,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3.983.592,00	12.216.800	8.233.208,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.551.300,00	8.395.200	(156.100,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.654.000,00	3.240.000	(414.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	103.230.000,00	2.880.000	(100.350.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.486.000,00	117.647.000	6.161.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	704.978.424,00	694.289.011,00	(10.689.413,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	259.203.276,00	248.600.745,00	(10.602.531,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.200.000,00	6.180.000,00	(1.020.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	433.175.148,00	434.108.266,00	933.118,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	244.860.000,00	692.776.009	447.916.009,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	16.360.000,00	177.459.700,00	161.099.700,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	21.500.000,00	21.363.600	(136.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	493.952.709	301.952.709,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Kota	377 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Kota	377 milyar rupiah	100.310.190,00	99.521.850	(788.340,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	100.310.190,00	99.521.850,00	(788.340,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	46.753.190,00	43.929.600,00	(2.823.590,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	24.757.000,00	26.792.250,00	2.035.250,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	28.800.000,00	28.800.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.330.652.592,00	1.651.631.300	320.978.708,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.296.916.192,00	1.590.173.950	293.257.758,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	62.940.000,00	68.256.000	5.316.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.940.000,00	68.256.000	5.316.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	218.327.444,00	161.887.600	(56.439.844,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.509.220,00	5.506.100	(3.120,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.767.500,00	39.767.500	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	927.000,00	4.944.000	4.017.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.445.924,00	5.321.000	(4.124.924,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.460.000,00	2.880.000	420.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	116.268.000,00	13.780.000	(102.488.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43.949.800,00	89.689.000	45.739.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48 dokumen	783.598.748,00	660.337.990	(123.260.758,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.704.000,00	4.704.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	377.519.600,00	222.517.000	(155.002.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	401.375.148,00	433.116.990,00	31.741.842,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	232.050.000,00	699.692.360	467.642.360,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	16.400.000,00	179.984.500,00	163.584.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	13.650.000,00	13.332.000	(318.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	506.375.860	314.375.860,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Selatan	251 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Malang Selatan	251 milyar rupiah	33.736.400,00	61.457.350	27.720.950,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	33.736.400,00		27.720.950,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan		61.457.350	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	21.200.000,00	41.057.350	19.857.350,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan				INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	5.336.400,00	10.800.000	5.463.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	7.200.000,00	9.600.000	2.400.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.508.410.020,00	1.861.883.743	353.473.723,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.396.270.020,00	1.750.644.243	354.374.223,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					73.080.000,00	68.268.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	73.080.000,00	68.268.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					315.801.020,00	165.205.950,00	(150.595.070,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.945.848,00	24.742.800,00	(1.203.048,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.283.632,00	51.483.300,00	1.199.668,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8.623.540,00	3.279.600,00	(5.343.940,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.894.000,00	5.904.250,00	10.250,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.594.000,00	3.240.000,00	(354.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	136.230.000,00	11.340.000,00	(124.890.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.230.000,00	65.216.000,00	(20.014.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					703.914.000,00	775.329.058,00	71.415.058,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.400.000,00	5.000.000,00	(1.400.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	389.390.000,00	208.327.500,00	(181.062.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.200.000,00	12.360.000,00	2.160.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297.924.000,00	549.641.558,00	251.717.558,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.475.000,00	741.841.235	438.366.235,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	36.000.000,00	189.066.698,00	153.066.698,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	12.650.000,00	10.815.000,00	(1.835.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.725.000,00	12.096.900,00	(628.100,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	232.100.000,00	529.862.637	297.762.637,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					112.140.000,00	111.239.500,00	(900.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					112.140.000,00	111.239.500,00	(900.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	68.136.000,00	67.235.500,00	(900.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	15.204.000,00	15.204.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	28.800.000,00	28.800.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG UTARA DAN BATU KOTA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.708.436.363,00	2.342.380.592	633.944.229,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.645.614.863,00	2.259.972.292	614.357.429,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	74.604.000,00	69.792.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.604.000,00	69.792.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	257.850.437,00	123.138.670,00	(134.711.767,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.288.670,00	2.288.670,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.707.572,00	26.252.500,00	4.544.928,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.340.560,00	5.331.400,00	(9.160,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 2 1 1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.835.135,00	7.212.500,00	2.377.365,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.040.000,00	2.400.000,00	360.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	142.835.000,00	8.750.800,00	(134.084.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	78.803.500,00	70.902.800,00	(7.900.700,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	1.084.160.426,00	1.100.171.610,00	16.011.184,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.704.300,00	4.692.000,00	(12.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	363.642.250,00	362.190.950,00	(1.451.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.300.000,00	10.300.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	705.513.876,00	722.988.660,00	17.474.784,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	229.000.000,00	966.870.012	737.870.012,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	21.000.000,00	190.657.100,00	169.657.100,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	5 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.000.000,00	10.204.300,00	(1.795.700,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	192.000.000,00	766.008.612	574.008.612,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Mojokerto	303 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Mojokerto	303 milyar rupiah	62.821.500,00	82.408.300,00	19.586.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	62.821.500,00	82.408.300,00	19.586.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	40.500.000,00	60.076.750,00	19.576.750,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	12.721.500,00	12.731.550,00	10.050,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	9.600.000,00	9.600.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MOJOKERTO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2	KEUANGAN					1.212.573.350,00	1.524.523.967	311.950.617,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.129.773.350,00	1.435.569.167	305.795.817,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	74.604.000,00	75.120.000	516.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.604.000,00	75.120.000	516.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	317.108.660,00	180.903.470	(136.205.190,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.673.800,00	4.673.400	(400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.983.500,00	6.835.300	(148.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	64.188.440,00	64.188.020	(420,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.676.000,00	4.794.750	118.750,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	3.840.000	240.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	133.198.920,00	6.810.000	(126.388.920,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	99.788.000,00	89.762.000	(10.026.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	488.060.690,00	523.615.917	35.555.227,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	187.126.170,00	202.736.766	15.610.596,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000,00	12.360.000	3.360.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.734.520,00	301.319.151	16.584.631,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	250.000.000,00	655.929.780	405.929.780,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.000.000,00	155.665.500	125.665.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	22.000.000,00	19.027.200	(2.972.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	481.237.080	289.237.080,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Nganjuk	182 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Nganjuk	182 milyar rupiah	82.800.000,00	88.954.800	6.154.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	82.800.000,00	88.954.800	6.154.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	33.600.000,00	39.218.800	5.618.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	10.800.000,00	11.336.000	536.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggunya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggunya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	38.400.000,00	38.400.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGANJUK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.242.250.939,00	1.548.512.481	306.261.542,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.175.556.134,00	1.463.350.611	287.794.477,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	78.408.000,00	69.792.000	(8.616.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	78.408.000,00	69.792.000,00	(8.616.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	289.556.274,00	180.648.590,00	(108.907.684,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	7.389.756,00	10.778.400,00	3.388.644,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	28.756.995,00	10.483.700,00	(18.273.295,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	2.091.478,00	42.772.960,00	40.681.482,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	10.448.320,00	7.220.480,00	(3.227.840,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	137.824.725,00	7.544.550,00	(130.280.175,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	99.445.000,00	98.248.500,00	(1.196.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	548.791.860,00	567.746.444,00	18.954.584,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	10.263.000,00	13.062.000,00	2.799.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	239.059.548,00	228.078.434,00	(10.981.114,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.360.000,00	12.360.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	287.109.312,00	314.246.010,00	27.136.698,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	258.800.000,00	645.163.577	386.363.577,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 unit	31.300.000,00	176.600.000,00	145.300.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 unit	21.000.000,00	10.815.000,00	(10.185.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Perabot	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	960.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	257.287.677,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ngawi	125 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ngawi	125 milyar rupiah	18.467.065,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	18.467.065,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan	-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	14.934.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	3.533.065,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NGAWI	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					303.070.586,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	305.163.786,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 laporan	(90.832.752,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.381.300,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.495.048,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	2.681.120,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	54.380,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	(840.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	(84.965.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	(11.639.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	47.340.939,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.074.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	124.629.500,00	161.960.666	37.331.166,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.360.000	360.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	229.713.440,00	238.288.313	8.574.873,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14 paket	243.750.000,00	597.217.599	353.467.599,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	32.000.000,00	113.577.220	81.577.220,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9.750.000,00	14.295.000,00	4.545.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	469.345.379	277.345.379,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pacitan	53 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pacitan	53 milyar rupiah	51.253.200,00	49.160.000,00	(2.093.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	51.253.200,00	49.160.000,00	(2.093.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	28.090.000,00	36.760.000,00	8.670.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	3.963.200,00	4.400.000,00	436.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	19.200.000,00	8.000.000,00	(11.200.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PACITAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.007.203.966,00	1.672.738.586	665.534.620,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					926.698.466,00	1.592.437.886	665.739.420,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					62.424.000,00	68.268.000	5.844.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	62.424.000,00	68.268.000	5.844.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					190.461.503,00	111.227.030	(79.234.473,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.523.175,00	6.750.400	(772.775,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.515.568,00	23.515.568	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.805.760,00	6.224.440	418.680,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.500.000,00	4.500.000	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.000.000,00	9.600.000	600.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	101.304.000,00	4.402.800	(96.901.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.813.000,00	56.233.822	17.420.822,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	430.812.963,00	428.482.656	(2.330.307,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.763.200,00	3.756.000,00	(7.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164.981.475,00	171.460.000,00	6.478.525,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.068.288,00	253.266.656,00	(8.801.632,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	243.000.000,00	984.460.200	741.460.200,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	25.000.000,00	142.937.600,00	117.937.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	20.000.000,00	19.825.000,00	(175.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	821.697.600	629.697.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pamekasan	85 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pamekasan	85 milyar rupiah	80.505.500,00	80.300.700,00	(204.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	80.505.500,00	80.300.700,00	(204.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-					
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	5 layanan	-					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	53.200.000,00	52.995.200,00	(204.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	8.105.500,00	8.105.500,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	19.200.000,00	19.200.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAMEKASAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.879.382.013,00	2.632.207.680	752.825.667,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.783.712.013,00	2.570.683.560	786.971.547,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	111.900.000,00	94.908.000,00	(16.992.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	111.900.000,00	94.908.000,00	(16.992.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	330.581.181,00	182.855.770,00	(147.725.411,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.819.325,00	5.816.800,00	(2.525,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.853.266,00	7.651.400,00	(27.201.866,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	16.526.850,00	41.174.440,00	24.647.590,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.920.950,00	20.256.380,00	11.335.430,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.316.790,00	2.640.000,00	(1.676.790,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	135.390.000,00	4.649.950,00	(130.740.050,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.754.000,00	100.666.800,00	(24.087.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	1.077.900.832,00	1.132.247.735,00	54.346.903,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.983.488,00	5.980.000,00	(3.488,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	353.704.400,00	344.383.784,00	(9.320.616,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.000.000,00	10.300.000,00	2.300.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	710.212.944,00	771.583.951,00	61.371.007,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	263.330.000,00	1.160.672.055	897.342.055,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	40.400.000,00	176.737.600,00	136.337.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	22.930.000,00	16.066.700,00	(6.863.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	192.000.000,00	967.867.755	775.867.755,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pasuruan	293 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Pasuruan	293 milyar rupiah	95.670.000,00	61.524.120,00	(34.145.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	95.670.000,00	61.524.120,00	(34.145.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	43.300.000,00	35.580.000,00	(7.720.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	19.970.000,00	17.544.120,00	(2.425.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	32.400.000,00	8.400.000,00	(24.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PASURUAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.358.497.708,00	1.604.039.760	245.542.052,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0Persentase realisasi anggaran	100 %	0Persentase realisasi anggaran	100 %	1.239.827.323,00	1.513.371.760	273.544.437,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan	12 dokumen	81.768.000,00	72.624.000	(9.144.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	81.768.000,00	72.624.000	(9.144.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	302.432.931,00	212.656.400	(89.776.531,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.428.225,00	16.218.200	5.789.975,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.322.496,00	17.641.600	(25.680.896,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.618.210,00	55.830.500	45.212.290,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6.750.000,00	4.933.600	(1.816.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.260.000,00	1.440.000	(2.820.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	104.780.000,00	4.375.500	(100.404.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	122.274.000,00	112.217.000	(10.057.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	600.076.392,00	645.272.404	45.196.012,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.400.000,00	12.600.000	4.200.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.648.000,00	219.474.615	5.826.615,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000,00	10.300.000	4.300.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	372.028.392,00	402.897.789	30.869.397,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	14 paket	Jumlah Jasa yang Tersedia	14 paket	255.550.000,00	582.818.956	327.268.956,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	22.900.000,00	148.478.100	125.578.100,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Unit	12.650.000,00	10.815.000	(1.835.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	18.000.000,00	18.240.000	240.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	405.285.856	213.285.856,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ponorogo 163 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Ponorogo 163 milyar rupiah	118.670.385,00	90.668.000	(28.002.385,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 4 dokumen Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah 2 dokumen Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 4 dokumen Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah 2 dokumen Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan	118.670.385,00	90.668.000,00	(28.002.385,00) - -	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan	77.576.000,00	60.630.000,00	(16.946.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan	13.494.385,00	15.738.000,00	2.243.615,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak 2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak 2 Dokumen SSPD	27.600.000,00	14.300.000,00	(13.300.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PONOROGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2			KEUANGAN			1.645.630.414,00	2.028.122.568	382.492.154,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran 100 %	Persentase realisasi anggaran 100 %	1.530.730.414,00	1.907.748.568	377.018.154,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan 12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan 12 laporan	74.604.000,00	69.792.000,00	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen	74.604.000,00	69.792.000,00	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum 12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum 12 Dokumen	325.598.754,00	155.444.900,00	(170.153.854,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	7.618.104,00	7.606.100,00	(12.004,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket	53.829.000,00	32.626.700,00	(21.202.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket	3.816.150,00	3.797.600,00	(18.550,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen	5.400.000,00	4.320.000,00	(1.080.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket	151.640.000,00	11.938.000,00	(139.702.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	97.295.500,00	89.156.500,00	(8.139.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia 48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia 48 dokumen	865.457.660,00	935.781.509,00	70.323.849,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan	4.995.000,00	6.240.000,00	1.245.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan	363.628.520,00	393.059.450,00	29.430.930,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan	12.000.000,00	12.360.000,00	360.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan	484.834.140,00	524.122.059,00	39.287.919,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara 14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara 14 paket	265.070.000,00	746.730.159	481.660.159,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
		5	2	1	1.09						1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	31.200.000,00	167.649.700,00	136.449.700,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		36.870.000,00	38.479.000,00	1.609.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		192.000.000,00	540.601.459	348.601.459,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Probolinggo	184 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Probolinggo	184 milyar rupiah	114.900.000,00	120.374.000,00	5.474.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	8 dokumen	114.900.000,00	120.374.000,00	-	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen						
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan						
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	55.700.000,00	61.174.000,00	5.474.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	20.800.000,00	20.800.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	38.400.000,00	38.400.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROBOLINGGO	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2				KEUANGAN					980.370.056,00	1.232.565.698	252.195.642,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	909.681.056,00	1.170.925.578	261.244.522,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	48.204.000,00	52.284.000	4.080.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	48.204.000,00	52.284.000,00	4.080.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	202.561.328,00	126.207.100,00	(76.354.228,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.540.760,00	8.672.800,00	132.040,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.994.700,00	8.979.800,00	(14.900,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	15.735.268,00	18.409.100,00	2.673.832,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.518.800,00	3.518.800,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.708.000,00	3.288.000,00	(420.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	75.190.000,00	5.337.400,00	(69.852.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	86.873.800,00	78.001.200,00	(8.872.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	430.575.728,00	442.577.069,00	12.001.341,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	3.465.000,00	(1.535.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELAH PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	176.489.340,00	203.264.097,00	26.774.757,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	249.086.388,00	235.847.972,00	(13.238.416,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	228.340.000,00	549.857.409	321.517.409,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.180.000,00	0,00	(6.180.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 Unit	19.860.000,00	114.860.894,00	95.000.894,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	10.300.000,00	12.246.600,00	1.946.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	422.749.915	230.749.915,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sampang	50 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sampang	50 milyar rupiah	70.689.000,00	61.640.120,00	(9.048.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen			(9.048.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	70.689.000,00	61.640.120,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 layanan			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	38.975.000,00	51.999.000,00	13.024.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	10.114.000,00	8.841.120,00	(1.272.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	21.600.000,00	800.000,00	(20.800.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPANG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					2.618.009.723,00	3.712.974.875	1.094.965.152,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	2.466.128.923,00	3.570.814.875	1.104.685.952,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	129.192.000,00	124.380.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.192.000,00	124.380.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	334.669.950,00	256.471.000	(78.198.950,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dsedidakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dsedidakan	12 Paket	11.050.980,00	10.333.200	(717.780,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	103.127.570,00	18.865.800	(84.261.770,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	19.652.400,00	139.914.000	120.261.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.500.000,00	2.502.800	2.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.200.000,00	3.420.000	(780.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	135.505.000,00	20.023.200	(115.481.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5 2 1 1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	58.634.000,00	61.412.000	2.778.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	1.701.716.973,00	1.722.954.022	21.237.049,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	555.453.875,00	559.696.026,00	4.242.151,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.139.963.098,00	1.157.257.996,00	17.294.898,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	300.550.000,00	1.467.009.853	1.166.459.853,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	38.400.000,00	165.252.900,00	126.852.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	60.150.000,00	50.045.300,00	(10.104.700,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	192.000.000,00	1.251.711.653	1.059.711.653,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sidoarjo	808 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sidoarjo	808 milyar rupiah	151.880.800,00	142.160.000,00	(9.720.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 dokumen 2 dokumen 10 layanan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 dokumen 2 dokumen 10 layanan	151.880.800,00	142.160.000,00	(9.720.800,00) - -	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	132.676.000,00	135.360.000,00	2.684.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	7.204.800,00	4.800.000,00	(2.404.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2		KEUANGAN					1.104.544.069,00	1.620.067.946	515.523.877,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.032.014.569,00	1.545.152.466	513.137.897,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	78.408.000,00	73.596.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78.408.000,00	73.596.000,00	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	242.165.192,00	161.864.300,00	(80.300.892,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.840.264,00	5.429.100,00	1.588.836,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	34.021.428,00	34.016.400,00	(5.028,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.658.500,00	4.692.900,00	34.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.575.000,00	6.676.000,00	(2.899.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.708.000,00	4.920.000,00	1.212.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	94.512.000,00	7.704.000,00	(86.808.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	91.850.000,00	98.425.900,00	6.575.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	482.241.377,00	470.891.378,00	(11.349.999,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.090.000,00	7.212.000,00	(1.878.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.013.665,00	183.054.780,00	(13.958.885,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.400.000,00	6.180.000,00	780.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270.737.712,00	274.444.598,00	3.706.886,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	229.200.000,00	838.800.788	609.600.788,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	16.200.000,00	144.187.600,00	127.987.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	15.000.000,00	15.501.000	501.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	679.112.188	487.112.188,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Situbondo	73 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Situbondo	73 milyar rupiah	72.529.500,00	74.915.480,00	2.385.980,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	72.529.500,00	74.915.480,00	2.385.980,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-					
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	-					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	38.600.000,00	41.273.000,00	2.673.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	5.129.500,00	4.842.480,00	(287.020,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	28.800.000,00	28.800.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SITUBONDO	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.043.342.142,00	1.404.251.230	360.909.088,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	931.988.142,00	1.300.306.350	368.318.208,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	67.752.000,00	62.940.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.752.000,00	62.940.000,00	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	246.194.342,00	157.058.779,00	(89.135.563,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.238.000,00	8.200.000,00	(38.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.634.788,00	14.627.100,00	(7.688,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.686.904,00	7.678.980,00	(7.924,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.257.500,00	3.255.100,00	(2.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.854.000,00	2.880.000,00	1.026.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	80.415.150,00	3.738.000,00	(76.677.150,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.108.000,00	116.679.599,00	(13.428.401,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	384.841.800,00	415.351.853,00	30.510.053,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	147.276.000,00	164.680.000,00	17.404.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.800.000,00	12.360.000,00	1.560.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	221.515.800,00	233.061.853,00	11.546.053,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	233.200.000,00	664.955.718	431.755.718,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	16.800.000,00	133.877.600,00	117.077.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	14.400.000,00	5.881.600,00	(8.518.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	525.196.518	333.196.518,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sumenep	81 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Sumenep	81 milyar rupiah	111.354.000,00	103.944.880,00	(7.409.120,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	111.354.000,00	103.944.880,00	(7.409.120,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-					
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 layanan	-					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	52.750.000,00	52.890.800,00	140.800,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	7.004.000,00	6.854.080,00	(149.920,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	51.600.000,00	44.200.000,00	(7.400.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SUMENEP	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2					1.808.608.370,00	2.362.392.062	553.783.692,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran 100 %	1.540.531.960,00	2.075.082.862	534.550.902,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan 12 laporan	101.244.000,00	91.104.000	(10.140.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen	101.244.000,00	91.104.000,00	(10.140.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum 12 dokumen	307.700.264,00	193.817.400,00	(113.882.864,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	9.977.116,00	10.654.800,00	677.684,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket	50.869.154,00	57.354.400,00	6.485.246,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket	24.991.000,00	26.529.600,00	1.538.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket	20.949.994,00	26.553.600,00	5.603.606,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen	3.090.000,00	2.460.000,00	(630.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket	104.957.000,00	4.425.000,00	(100.532.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	92.866.000,00	65.840.000,00	(27.026.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia 48 dokumen	888.707.696,00	913.111.466,00	24.403.770,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan	7.056.000,00	7.056.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan	354.389.600,00	360.362.284,00	5.972.684,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan	527.262.096,00	545.693.182,00	18.431.086,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara 14 paket	242.880.000,00	877.049.996	634.169.996,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit	4.120.000,00	0,00	(4.120.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit	17.960.000,00	140.409.700,00	122.449.700,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit	28.800.000,00	8.058.000,00	(20.742.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit	192.000.000,00	728.582.296	536.582.296,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Barat 522 milyar rupiah	268.076.410,00	287.309.200,00	19.232.790,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 4 dokumen Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah 2 dokumen Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 6 layanan	268.076.410,00	287.309.200,00	19.232.790,00 - -	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	51.586.810,00	183.520.000,00	131.933.190,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	120.489.600,00	7.789.200,00	(112.700.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	96.000.000,00	96.000.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA BARAT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.973.308.372,00	2.023.392.871	50.084.499,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					1.704.983.772,00	1.750.182.871	45.199.099,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %					
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					67.752.000,00	52.284.000	(15.468.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan					
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.752.000,00	52.284.000,00	(15.468.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					307.868.200,00	221.790.723,00	(86.077.477,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen					
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.210.000,00	14.628.000,00	7.418.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	116.487.200,00	87.602.800	(28.884.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	9.600.000,00	9.000.000,00	(600.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	99.375.000,00	7.298.123,00	(92.076.877,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.756.000,00	66.478.000,00	(7.278.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.100.943.572,00	1.134.880.128,00	33.936.556,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen					
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	426.300.320,00	425.060.320,00	(1.240.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	674.643.252,00	709.819.808,00	35.176.556,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					228.420.000,00	376.571.820,00	148.151.820,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket					
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	18.000.000,00	125.543.900,00	107.543.900,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.420.000,00	7.970.700,00	(4.449.300,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	243.057.220,00	51.057.220,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					268.324.600,00	273.210.000,00	4.885.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Selatan	2623 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Surabaya Selatan	2623 milyar rupiah					
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen 12 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen 12 dokumen	268.324.600,00	273.210.000,00	4.885.400,00 -	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan			-						
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	202.144.000,00	207.810.000,00	5.666.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	13.380.600,00	12.600.000,00	(780.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	52.800.000,00	52.800.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA SELATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					2.029.588.818,00	3.059.535.370	1.029.946.552,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.801.366.970,00	2.821.535.220	1.020.168.250,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	81.240.000,00	76.428.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81.240.000,00	76.428.000,00	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	311.944.890,00	200.528.185,00	(111.416.705,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.955.080,00	14.004.200,00	3.049.120,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.851.010,00	40.190.700,00	(1.660.310,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	39.627.000,00	43.881.780,00	4.254.780,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.508.300,00	8.536.290,00	27.990,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.240.000,00	5.820.000,00	(420.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	112.325.500,00	10.479.000,00	(101.846.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	92.438.000,00	77.616.215,00	(14.821.785,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	1.137.612.080,00	1.326.576.030,00	188.963.950,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	568.806.040,00	567.206.221,00	(1.599.819,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	568.806.040,00	759.369.809,00	190.563.769,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	270.570.000,00	1.218.003.005	947.433.005,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	32.000.000,00	153.479.400	121.479.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	12.650.000,00	10.815.000	(1.835.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	8.920.000,00	8.808.400	(111.600,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 2 1 1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	212.000.000,00	1.044.900.205	832.900.205,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3117 milyar rupiah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3117 milyar rupiah	228.221.848,00	238.000.150	9.778.302,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 dokumen 2 dokumen 9 layanan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4 dokumen 2 dokumen 9 layanan	228.221.848,00	238.000.150,00	9.778.302,00 - -	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	187.900.000,00	196.623.500,00	8.723.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	16.321.848,00	17.376.650,00	1.054.802,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 4 1.01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	24.000.000,00	24.000.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA TIMUR	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2	KEUANGAN					1.948.957.058,00	2.253.756.617	304.799.559,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.623.621.376,00	1.942.055.217	318.433.841,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	99.708.000,00	94.896.000	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	99.708.000,00	94.896.000,00	(4.812.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	289.673.608,00	136.131.280,00	(153.542.328,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13.018.320,00	13.016.200,00	(2.120,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.004.300,00	27.003.200,00	(1.100,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20.567.800,00	17.346.380,00	(3.221.420,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.746.488,00	8.987.500,00	(8.758.988,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.368.000,00	3.900.000,00	(468.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	123.046.700,00	8.165.000,00	(114.881.700,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83.922.000,00	57.713.000,00	(26.209.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	923.439.768,00	1.030.221.133,00	106.781.365,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	420.477.600,00	448.639.060,00	28.161.460,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	502.962.168,00	581.582.073,00	78.619.905,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	310.800.000,00	680.806.804	370.006.804,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5 2 1 1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	36.800.000,00	169.968.100,00	133.168.100,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	38.000.000,00	11.928.000	(26.072.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	232.000.000,00	498.910.704	266.910.704,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan	190 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Lamongan	190 milyar rupiah	325.335.682,00	311.701.400,00	(13.634.282,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	325.335.682,00	311.701.400,00	(13.634.282,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendaftaran dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendaftaran dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-					
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	8 layanan	-					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	256.903.390,00	256.465.900,00	(437.490,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	10.832.292,00	8.435.500,00	(2.396.792,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	57.600.000,00	46.800.000,00	(10.800.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SURABAYA UTARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.181.061.089,00	1.698.140.628	517.079.539,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.104.726.754,00	1.637.332.782	532.606.028,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	73.080.000,00	62.940.000	(10.140.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	73.080.000,00	62.940.000,00	(10.140.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	289.939.412,00	198.753.800,00	(91.185.612,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	1.048.540,00	5.743.200,00	4.694.660,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	32.895.248,00	48.400.200,00	15.504.952,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	16.426.624,00	11.743.800,00	(4.682.824,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	#VALUE!		UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	3.236.000,00	3.090.800,00	(145.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.600.000,00	2.880.000,00	(720.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	135.055.000,00	2.616.200,00	(132.438.800,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	97.678.000,00	124.279.600,00	26.601.600,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	502.107.342,00	526.291.665,00	24.184.323,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 12	5.980.000,00	10.360.000,00	4.380.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	167.237.790,00	179.287.205,00	12.049.415,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	-				UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.000.000,00	6.180.000,00	(5.820.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	316.889.552,00	330.464.460,00	13.574.908,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	239.600.000,00	849.347.317	609.747.317,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen				-	
						Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket				-	
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	17.600.000,00	137.890.500,00	120.290.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	26.000.000,00	24.496.800,00	(1.503.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				#VALUE!	
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	192.000.000,00	686.960.017	494.960.017,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				-	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Trenggalek	106 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Trenggalek	106 milyar rupiah	76.334.335,00	60.807.846,00	(15.526.489,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	76.334.335,00	60.807.846,00	(15.526.489,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah		2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-					
				Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		7 laporan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 laporan	-					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	63.435.400,00	48.100.000,00	(15.335.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan				#VALUE!	
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	3.298.935,00	3.107.846,00	(191.089,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	9.600.000,00	9.600.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TRENGGALEK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	0 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	0 Dokumen SSPD				#VALUE!	
5	2				KEUANGAN					1.217.734.170,00	1.544.668.058	326.933.888,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.164.154.170,00	1.487.635.558	323.481.388,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	78.408.000,00	82.356.000	3.948.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	78.408.000,00	82.356.000,00	3.948.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	303.213.090,00	201.066.450,00	(102.146.640,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	16.110.082,00	19.343.000,00	3.232.918,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	38.756.424,00	39.238.400,00	481.976,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	17.209.584,00	21.340.000,00	4.130.416,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	4.200.000,00	5.117.400,00	917.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.920.000,00	4.800.000,00	(120.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	110.879.000,00	1.715.800,00	(109.163.200,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	111.138.000,00	109.511.850,00	(1.626.150,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	540.933.080,00	565.338.033,00	24.404.953,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	7.500.000,00	7.490.000,00	(10.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	208.143.800,00	216.623.775,00	8.479.975,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.000.000,00	10.300.000,00	300.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	315.289.280,00	330.924.258,00	15.634.978,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	241.600.000,00	638.875.075	397.275.075,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
5	2	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket			-		
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	25.600.000,00	138.107.500,00	112.507.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	12.000.000,00	10.980.000,00	(1.020.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	192.000.000,00	489.787.575	297.787.575,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tuban	188 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tuban	188 milyar rupiah	53.580.000,00	57.032.500,00	3.452.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen			3.452.500,00		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	2	4	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	53.580.000,00	57.032.500,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		6 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	6 layanan						
5	2	4	1.01	3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	32.980.000,00	44.432.500,00	11.452.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan						
5	2	4	1.01	5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	10.600.000,00	10.600.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TUBAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		0 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD						
5	2			KEUANGAN					1.274.437.781,00	1.803.098.181	528.660.400,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.192.527.266,00	1.710.353.181	517.825.915,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	67.752.000,00	62.928.000	(4.824.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	67.752.000,00	62.928.000,00	(4.824.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	324.910.852,00	205.016.920,00	(119.893.932,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.985.578,00	4.399.800,00	414.222,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	63.440.554,00	65.155.600,00	1.715.046,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4.072.620,00	4.097.600,00	24.980,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5.562.000,00	4.597.920,00	(964.080,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	111.990.100,00	3.580.000,00	(108.410.100,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	129.860.000,00	118.386.000,00	(11.474.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	551.674.414,00	585.775.060,00	34.100.646,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.200.000,00	7.176.000,00	(24.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	209.036.110,00	215.040.000,00	6.003.890,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	335.438.304,00	363.559.060,00	28.120.756,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	248.190.000,00	856.633.201	608.443.201,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	38.400.000,00	155.898.500,00	117.498.500,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	11.790.000,00	8.327.000,00	(3.463.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	192.000.000,00	692.407.701	500.407.701,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tulungagung	260 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Tulungagung	260 milyar rupiah	81.910.515,00	92.745.000,00	10.834.485,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	81.910.515,00	92.745.000,00	10.834.485,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen			-		
						Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	7 layanan			-		
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	49.680.000,00	59.145.000,00	9.465.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	13.030.515,00	14.400.000,00	1.369.485,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertanggungnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	19.200.000,00	19.200.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TULUNGAGUNG	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2				KEUANGAN					1.692.648.562,00		#VALUE!	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	100 %	Persentase realisasi anggaran	100 %	1.617.229.062,00	2.494.009.523	876.780.461,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	73.080.000,00	2.427.759.903	2.354.679.903,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	73.080.000,00	69.792.000	(3.288.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	319.370.358,00	195.149.800,00	(124.220.558,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	7.637.407,00	7.605.700,00	(31.707,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	52.823.324,00	51.564.500,00	(1.258.824,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	21.082.127,00	18.718.500,00	(2.363.627,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	5.282.500,00	5.264.000,00	(18.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.400.000,00	4.800.000,00	(600.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	129.220.000,00	17.949.600,00	(111.270.400,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	97.925.000,00	89.247.500,00	(8.677.500,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	Jumlah Jasa yang Tersedia	48 dokumen	939.978.704,00	1.332.392.756,00	392.414.052,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	360.343.400,00	411.293.268,00	50.949.868,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.800.000,00	6.180.000,00	(4.620.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	565.235.304,00	911.319.488,00	346.084.184,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan yang Terpelihara	14 paket	284.800.000,00	830.425.347	545.625.347,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	32.800.000,00	152.250.700,00	119.450.700,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	50.000.000,00	49.490.000,00	(510.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	192.000.000,00	628.684.647	436.684.647,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Gresik	352 milyar rupiah	Jumlah Penerimaan PAD di UPT PPD Gresik	352 milyar rupiah	75.419.500,00	66.249.620,00	(9.169.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	75.419.500,00	66.249.620,00	(9.169.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	-					
					Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	10 layanan	-					
5	2	4	1.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	32.219.500,00	32.368.500,00	149.000,00	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	16.200.000,00	11.881.120,00	(4.318.880,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	2	4	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2 Dokumen SSPD	27.000.000,00	22.000.000,00	(5.000.000,00)	UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH GRESIK	BADAN PENDAPATAN DAERAH
TOTAL										514.571.772.000,00		(514.571.772.000,00)		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	3				KEPEGAWAIAN					55.618.494.000,00	59.179.415.282	3.560.921.282,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN)	80,2 Nilai	Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN)	80,2 Nilai	43.902.151.274,00	44.763.072.556	860.921.282,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
					Persentase Indikator Program yang Tercapai	90 %	Persentase Indikator Program yang Tercapai	90 %	-					
					Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Persentase Realisasi Anggaran	90 %	-					
5	3	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	223.943.150,00	152.575.000,00	(71.368.150,00)		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	60.107.650,00	58.250.000,00	(1.857.650,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.025.000,00	6.250.000,00	(2.775.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.677.000,00	12.500.000,00	5.823.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.889.000,00	6.250.000,00	(3.639.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.757.000,00	12.500.000,00	3.743.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	68.210.000,00	36.200.000,00	(32.010.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	61.277.500,00	20.625.000,00	(40.652.500,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	3	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Laporan	35.778.718.500,00	33.673.841.700,00	(2.104.876.800,00)		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	35.073.432.000,00	33.067.163.000,00	(2.006.269.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	550.380.000,00	487.548.000,00	(62.832.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.131.500,00	63.960.200,00	3.828.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	1.200.000,00	(18.800.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	13.090.000,00	8.250.000,00	(4.840.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	12.522.500,00	12.050.000,00	(472.500,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.815.000,00	30.170.500,00	(10.644.500,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.347.500,00	3.500.000,00	(4.847.500,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Laporan	292.573.000,00	441.516.000	148.943.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	3.708.000,00	4.950.000,00	1.242.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.750.000,00	250.752.000	225.002.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.236.000,00	4.950.000,00	3.714.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	69.080.500,00	2.800.000,00	(66.280.500,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	182.798.500,00	155.064.000,00	(27.734.500,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.05	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Laporan	2.568.507.498,00	2.446.976.510	(121.530.988,00)		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.085.018,00	114.308.000,00	(777.018,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	152.979.049,00	135.685.600,00	(17.293.449,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	789.697.798,00	608.192.998,00	(181.504.800,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	197.575.630,00	197.575.630,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	183.194.820,00	77.500.000,00	(105.694.820,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	26.800.000,00	26.800.000,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.075.040.000,00	788.728.000,00	(286.312.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	28.135.183,00	39.720.000,00	11.584.817,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	165.545.092,00	1.286.840.000,00	1.121.294.908,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	1.251.088.000,00	1.201.088.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115.545.092,00	35.752.000,00	(79.793.092,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	3	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4.141.022.939,00	5.805.097.146	1.664.074.207,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5 3 1 1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	1.216.000,00	(1.784.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	476.514.000,00	1.058.971.924	582.457.924,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	31.844.539,00	31.844.539,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.629.664.400,00	4.713.064.683	1.083.400.283,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	731.841.095,00	956.226.200	224.385.105,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	155.488.528,00	245.038.000,00	89.549.472,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	159.490.167,00	166.000.000,00	6.509.833,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	10.500.000,00	12.360.000,00	1.860.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	330.349.400,00	257.258.200,00	(73.091.200,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 1 1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	76.013.000,00	65.570.000,00	(10.443.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi	1650 orang	Jumlah ASN yang lulus uji kompetensi	1650 orang			2.700.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Jumlah capaian kinerja minimal BAIK ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	46000 Pegawai	Jumlah capaian kinerja minimal BAIK ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	46000 Pegawai	11.716.342.726,00	14.416.342.726	-		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
			Persentase Database yang Lengkap	99,7 %	Persentase Database yang Lengkap	99,7 %			-		
			Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN	93 %	Persentase Penyelesaian SK Mutasi ASN	93 %			-		
5 3 2 1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	12 laporan	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	12 laporan	5.177.088.263,00	6.825.432.426	1.648.344.163,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	3.350.000,00	3.350.000,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	451.048.000,00	342.992.900,00	(108.055.100,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2.462.326.000,00	2.570.381.100,00	108.055.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	118.775.000,00	118.775.000,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Laporan	0,00	0,00	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1.152.180.000,00	2.200.524.163	1.048.344.163,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen	46.344.200,00	46.344.200	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	572.673.400,00	572.673.400	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	10.300.000,00	10.300.000	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	25.091.663,00	25.091.663	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 3 2 1.02		Mutasi dan Promosi ASN				3 Laporan	2.200.000.000,00	2.200.000.000	-		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5 3 2 1.02	1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000	-	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.02	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	810.000.000,00	756.000.000	(54.000.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.02	3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1.240.000.000,00	1.294.000.000	54.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi dan Dokumen Penyusunan Standart Kompetensi	5 laporan	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi dan Dokumen Penyusunan Standart Kompetensi	5 laporan	2.433.148.000,00	4.083.148.000	1.650.000.000,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.03	1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	45437 Orang	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	45437 Orang	1.383.148.000,00	1.004.453.085	(378.694.915,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.03	2 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1.050.000.000,00	3.078.694.915	2.028.694.915,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan Penilaian Kinerja Aparatur	12 laporan	Jumlah laporan Penilaian Kinerja Aparatur	12 laporan	1.906.106.463,00	1.307.762.300,00	(598.344.163,00)		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	106.645.592,00	44.602.000,00	(62.043.592,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	66.902.717,00	44.896.000,00	(22.006.717,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	177.092.000,00	352.884.000,00	175.792.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	161.112.000,00	37.912.000,00	(123.200.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	5 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1500 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1500 Orang	304.200.000,00	92.076.000,00	(212.124.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	6 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	294.238.000,00	38.598.000,00	(255.640.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	7 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	45437 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	45437 Orang	360.417.497,00	265.729.000,00	(94.688.497,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	31.750.000,00	20.050.000,00	(11.700.000,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	71.910.117,00	59.177.300,00	(12.732.817,00)	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 3 2 1.04	10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	331.838.540,00	351.838.000,00	19.999.460,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
TOTAL						55.618.494.000,00		(55.618.494.000,00)		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					98.003.132.000,00		#VALUE!		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	100 %	Indeks Profesionalitas ASN	100 %	70.727.989.000,00	75.408.218.365	4.680.229.365,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Persentase indikator program yang tercapai	100 %	Persentase indikator program yang tercapai	100 %			-			BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Realisasi Anggaran	85.3 %	Persentase Realisasi Anggaran	85.3 %			-			BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 4 1 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	6 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah	6 dokumen	740.000.000,00	1.050.000.000,00	310.000.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4 1 1.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	500.000.000,00	810.000.000,00	310.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4 1 1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4 1 1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4 1 1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 4 1 1.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	4	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	3 Laporan	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Keuangan	3 Laporan	54.260.000.000,00	54.115.005.000,00	(144.995.000,00)		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184 Orang/ Bulan	52.468.755.000,00	52.274.560.000,00	(194.195.000,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.307.457.088,00	1.197.157.088,00	(110.300.000,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	200.502.063,00	275.102.063,00	74.600.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100.881.208,00	135.781.208,00	34.900.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	24.686.891,00	24.686.891,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	79.720.070,00	79.720.070,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	66.860.173,00	116.860.173,00	50.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.137.507,00	11.137.507,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersusun	1 Laporan	48.300.000,00	1.867.800.000,00	1.819.500.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	48.300.000,00	1.867.800.000,00	1.819.500.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	320.650.000,00	487.622.113,00	166.972.113,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	31.650.000,00	90.100.000,00	58.450.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	289.000.000,00	397.522.113,00	108.522.113,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	1 Laporan	3.126.123.639,00	3.767.097.622,00	640.973.983,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	120.215.995,00	120.103.600,00	(112.395,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	252.568.670,00	240.825.500,00	(11.743.170,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	248.853.425,00	268.288.000,00	19.434.575,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	760.550.000,00	744.560.000,00	(15.990.000,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	270.385.549,00	283.940.522,00	13.554.973,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	107.000.000,00	391.140.000,00	284.140.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.153.150.000,00	1.545.540.000,00	392.390.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	213.400.000,00	172.700.000,00	(40.700.000,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah yang tersusun	1 Laporan	125.000.000,00	243.677.000,00	118.677.000,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	125.000.000,00	243.677.000,00	118.677.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang tersusun	1 Laporan	11.056.915.361,00	12.780.396.430	1.723.481.069,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.644.850.000,00	3.547.061.365	902.211.365,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	4	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.714.209.761,00	5.877.206.365,00	162.996.604,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.697.855.600,00	3.356.128.700,00	658.273.100,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	1 Laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun	1 Laporan	1.051.000.000,00	1.096.620.200,00	45.620.200,00		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	323.000.000,00	314.443.000,00	(8.557.000,00)	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	108.000.000,00	129.477.200,00	21.477.200,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	620.000.000,00	652.700.000,00	32.700.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	81.2 %	Persentase Alumni Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural SDM Aparatur	81.2 %	27.275.143.000,00	50.915.943.000,00	23.640.800.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					Persentase Alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	92.2 %	Persentase Alumni Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS	92.2 %	-					
					Persentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	81.2 %	Persentase Alumni Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah SDM Aparatur	81.2 %	-					
					Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100 %	Persentase dokumen manajemen pengajaran dan sertifikasi kompetensi yang tersusun	100 %	-					
5	4	2	1.01		Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah I	600 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah I	600 Orang	600 Orang	4.512.474.000,00	25.311.210.175,00	20.798.736.175,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah II	600 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah II	600 Orang	600 Orang			-		
					Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah III	800 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Daerah III	800 Orang	800 Orang			-		
					Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Umum	255 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Pemerintahan Umum	255 Orang	255 Orang			-		
					Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	50 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	50 Orang	50 Orang			-		
					Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	75 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	75 Orang	75 Orang			-		
					Jumlah dokumen evaluasi pelatihan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			-		
					Jumlah dokumen kegiatan Manajemen Teknologi Informasi yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen kegiatan Manajemen Teknologi Informasi yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			-		
					Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan kelembagaan, TKPK dan sumber belajar yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan kelembagaan, TKPK dan sumber belajar yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			-		
					Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			-		
5	4	2	1.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	2 Dokumen	149.994.990,00	149.994.990,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.01	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	7 Dokumen	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	7 Dokumen	260.542.500,00	289.278.675,00	28.736.175,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4	2	1.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2610 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	2610 Orang	2.975.048.510,00	23.295.048.510,00	20.320.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab					
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target										
5	4	2	1.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	22 Dokumen	1.126.888.000,00	1.576.888.000,00	450.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	1	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar dan Pelatihan Kader Pemerintah Daerah	1817 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Latsar dan Pelatihan Kader Pemerintah Daerah	1817 Orang	22.762.669.000,00	30.688.892.825	7.926.223.825,00	-	-	-
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional	75 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional	75 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural I	270 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural I	270 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural II	270 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural II	270 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural III	360 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional dan Sosial Kultural III	360 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan I	680 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan I	680 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan II	720 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan II	720 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan III	3917 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan III	3917 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pengawas	120 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pengawas	120 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pratama dan Jabatan Administrator	80 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Jabatan Pratama dan Jabatan Administrator	80 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural	60 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Sosial Kultural	60 Orang			-			
						Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Tenaga Kediklatan	60 Orang	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Tenaga Kediklatan	60 Orang			-			
						Jumlah dokumen evaluasi pelatihan yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi pelatihan yang tersusun	1 Dokumen			-			
						Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan kelembagaan, TKPK dan sumber belajar yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen kegiatan pengelolaan kelembagaan, TKPK dan sumber belajar yang tersusun	1 Dokumen			-			
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan yang tersusun	2 Dokumen	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelatihan yang tersusun	2 Dokumen	-											
Jumlah peserta penilaian dan uji kompetensi	117 Orang	Jumlah peserta penilaian dan uji kompetensi	117 Orang	-											
Jumlah peserta uji kompetensi yang memperoleh sertifikat kompetensi	144 Orang	Jumlah peserta uji kompetensi yang memperoleh sertifikat kompetensi	144 Orang	-											
5	4	2	1.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	4 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	4 Dokumen	66.927.000,00	66.927.160,00	160,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	5 Dokumen	208.600.000,00	208.600.000,00	-	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	244 Orang	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	244 Orang	965.000.000,00	1.409.212.000,00	444.212.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	5 Laporan	894.615.000,00	1.029.748.497,00	135.133.497,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	5	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	5 Dokumen	305.000.000,00	345.000.000,00	40.000.000,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	3 Dokumen	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	3 Dokumen	380.654.000,00	399.078.006,00	18.424.006,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5	4	2	1.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3890 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6573 Orang	19.270.540.000,00	21.090.624.062,00	1.820.084.062,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	4	2	1.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10 Dokumen	671.333.000,00	1.055.543.100,00	384.210.100,00	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL								98.003.132.000,00	(98.003.132.000,00)		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					29.669.917.000,00	30.598.607.000	928.690.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			0Indeks profesionalitas ASN	100 %	0Indeks profesionalitas ASN	88 Nilai	26.652.417.000,00	738.690.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					Persentase indikator program yang tercapaiPerangkat Daerah	95 %	Persentase indikator program yang tercapaiPerangkat Daerah	100 %		-			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					Persentase realisasi anggaran	95 %	Persentase realisasi anggaran	95 %		27.391.107.000	-		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	13 Dokumen	1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	13 Dokumen	409.703.456,00	409.703.456,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
					2. Jumlah dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2. Jumlah dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	9 Dokumen			-		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	45.000.000,00	45.000.000	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.703.456,00	6.703.456	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	22.151.174.162,00	22.146.568.162	(4.606.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	21.540.731.000,00	21.719.421.000	178.690.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	557.061.720,00	374.265.720	(182.796.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12.946.636,00	15.356.636	2.410.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	8.228.764,00	8.228.764	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.023.840,00	11.023.840	(2.000.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.231.517,00	12.231.517	2.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.950.685,00	6.040.685	(2.910.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5	5	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	346.026.647,00	365.055.647,00	19.029.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	5	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	3.531.581,00	3.531.581,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.05	2	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	41.700.077,00	41.700.077,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.447.476,00	8.447.476,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	284.847.513,00	303.876.513,00	19.029.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	11 Laporan	1.246.956.359,00	1.894.647.747	647.691.388,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.947.285,00	21.947.285	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	511.690.482,00	468.048.658	(43.641.824,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.582.306,00	52.462.194	17.879.888,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	51.372.000	1.372.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	297.899.388,00	379.665.388	81.766.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.836.898,00	31.622.000	785.102,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000,00	889.530.222	589.530.222,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	11 Laporan	150.000.000,00	82.615.760	(67.384.240,00)		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	150.000.000,00	82.615.760	(67.384.240,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12	1.891.028.353,00	2.032.962.835	141.934.482,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.957.000,00	12.957.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	354.129.938,00	355.329.938,00	1.200.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	16.686.000,00	0	(16.686.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.507.255.415,00	1.664.675.897,00	157.420.482,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	12	457.528.023,00	465.559.993,00	8.031.970,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	76.493.277,00	72.110.000,00	(4.383.277,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	251.704.753,00	264.120.000,00	12.415.247,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	117.528.000,00	117.528.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.801.993,00	11.801.993,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen pengukuran indeks inovasi dan indeks daya saing daerah	2 Dokumen	3.017.500.000,00	3.207.500.000	190.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				Jumlah naskah jurnal	20 Dokumen	1 Unit						
				Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dokumen	20 Dokumen						
5	5	2	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah hasil kelitbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen	637.500.000,00	720.500.000	83.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah naskah jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen	Jumlah naskah jurnal Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen			-		PENGEMBANGAN				
5	5	2	1.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	110.000.000,00	183.000.000	73.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.01	9	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	110.000.000,00	100.000.000,00	(10.000.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	110.000.000,00	100.000.000,00	(10.000.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	307.500.000,00	337.500.000,00	30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil kelitbitan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen	Jumlah hasil kelitbitan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen	637.500.000,00	721.000.000	83.500.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah Naskah Jurnal Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen	Jumlah Naskah Jurnal Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	5 Dokumen			-		
5	5	2	1.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	313.000.000,00	313.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	124.500.000,00	124.500.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil kelitbitan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	7 Dokumen	Jumlah hasil kelitbitan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	7 Dokumen	680.000.000,00	763.500.000	83.500.000,00		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
						Jumlah naskah jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	7 Dokumen	Jumlah naskah jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	7 Dokumen			-		
5	5	2	1.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	umlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan stakeholder	3 Dokumen	umlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan stakeholder	3 Dokumen	1.062.500.000,00	1.002.500.000,00	(60.000.000,00)		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dokumen	362.500.000,00	362.500.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	3 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitan	2 Laporan	150.000.000,00	90.000.000,00	(60.000.000,00)	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	5	2	1.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	10 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	10 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TOTAL										29.669.917.000,00		(29.669.917.000,00)		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 7	PENGLOLAAN PENGHUBUNG					28.440.672.000,00		#VALUE!		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.440.672.000,00	24.307.673.800,00	(132.998.200,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					128.814.300,00	80.766.000,00	(48.048.300,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	38.814.300,00	38.814.300,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	4.728.000,00	(10.272.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	2.772.000,00	(12.228.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	34.451.700,00	19.451.700,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.030.183.200,00	13.555.224.200	(474.959.000,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 0 Orang/ Bulan	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 0 Orang/ Bulan	11.566.752.000,00	11.051.793.000,00	(514.959.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	2.403.431.200,00	2.463.431.200	60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.000.000,00	10.348.000,00	(19.652.000,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	10.348.000,00	5.348.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					153.200.000,00	5.000.000,00	(148.200.000,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pengadaan pengadaan pakaian dinas	0 Paket 70 ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pengadaan pengadaan pakaian dinas	0 Paket 70 ASN	58.200.000,00	0,00	(58.200.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.05	3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan pengolahan Administrasi kepegawaian	0 Dokumen 12 bulan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan pengolahan Administrasi kepegawaian	0 Dokumen 12 bulan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan data pegawai	0 Dokumen 12 bulan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah laporan data pegawai	0 Dokumen 12 bulan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5 7 1.1.05	5 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	9	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan SKP	12 bulan	Jumlah laporan SKP	12 bulan	#VALUE!	PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	(45.000.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.320.000.000,00	3.437.987.287,00	117.987.287,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Buah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Buah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	#VALUE!			BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100.000.000,00	167.691.800,00	67.691.800,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	149.954.487,00	49.954.487,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	122.541.000,00	22.541.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	109.445.000,00	9.445.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	800.000.000,00	659.335.000,00	(140.665.000,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.695.000.000,00	1.804.020.000,00	109.020.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	#VALUE!			BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100.000.000,00	606.055.000,00	506.055.000,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	100.000.000,00	606.055.000,00	506.055.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.249.774.500,00	4.109.024.813,00	(140.749.687,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah pengiriman dokumen	12 bulan	Jumlah pengiriman dokumen	12 bulan	#VALUE!			BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	878.361.500,00	878.361.500,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	#VALUE!			BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jasa	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Jasa	3.336.413.000,00	3.195.663.313,00	(140.749.687,00)	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.428.700.000,00	2.563.268.500,00	134.568.500,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	833.000.000,00	833.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	976.700.000,00	1.048.452.500,00	71.752.500,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000,00	119.582.000,00	19.582.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
5	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	444.000.000,00	487.234.000,00	43.234.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI
						Jumlah gedung yang dipelihara	1 Paket	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Paket	#VALUE!			BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	7	2		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					4.000.000.000,00	4.889.753.200	889.753.200,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	2	1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					4.000.000.000,00	4.889.753.200	889.753.200,00		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	2	1.01	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		800.000.000,00	800.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
					Jumlah paguyuban yang dibina	50 Paguyuban	Jumlah paguyuban yang dibina	50 Paguyuban			#VALUE!		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	2	1.01	2 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah unsur aparatur pemerintah yang difasilitasi	350 Orang	Jumlah unsur aparatur pemerintah yang difasilitasi	350 Orang	850.000.000,00	1.739.753.200	889.753.200,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	2	1.01	3 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan		850.000.000,00	850.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
					Jumlah pelaku UKM promosi produk unggulan dan seni pelestarian budaya	30 UKM/Sanggar	Jumlah pelaku UKM promosi produk unggulan dan seni pelestarian budaya				#VALUE!		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7	2	1.01	4 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian Seni Budaya	15 Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang terfasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian Seni Budaya		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
					Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				#VALUE!		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
					TOTAL				28.440.672.000,00		(28.440.672.000,00)		BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		
5	7			PENGELOLAAN PENGHUBUNG					16.913.106.000,00		#VALUE!		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalisme ASN	82,5 %	Indeks Profesionalisme ASN	82,5 %	15.913.106.000,00	16.706.900.000,00	793.794.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
					Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %	Persentase Indikator Program yang Tercapai	100 %			-				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
					Persentase Realisasi Anggaran	96 %	Persentase Realisasi Anggaran	96 %			-				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1 dokumen	27.818.565,00	8.053.710,00	(19.764.855,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah	7 dokumen	Jumlah dokumen perangkat daerah	7 dokumen	8.318.565,00	2.952.400,00	(5.366.165,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	5.000.000,00	767.200,00	(4.232.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	3.000.000,00	642.200,00	(2.357.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen	3.000.000,00	767.200,00	(2.232.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA	1 dokumen	2.500.000,00	652.200,00	(1.847.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian kinerja	1 dokumen	Jumlah dokumen Capaian kinerja	1 dokumen	3.000.000,00	1.630.310,00	(1.369.690,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		
5	7	1	1.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja	1 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja	1 dokumen	3.000.000,00	642.200,00	(2.357.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 laporan	Jumlah laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	1 laporan	13.344.360.303,00	13.330.887.390	(13.472.913,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	13.014.580.000,00		60.320.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	302.976.000,00		(55.048.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Lapoan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 laporan	Jumlah Lapoan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	6.261.800,00		(3.525.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akutansi	12 laporan	Jumlah Laporan Akutansi	12 Dokumen	7.190.200,00		(6.324.300,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD	2 dokumen	Jumlah dokumen Keuangan SKPD	2 Laporan	3.772.703,00		(2.919.003,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	1 dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	1 Dokumen	3.195.100,00		(2.529.400,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 laporan	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	4.333.000,00		(2.037.110,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1 laporan	Jumlah laporan prognosis	1 Dokumen	2.051.500,00		(1.409.300,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 laporan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		59.433.142,00	551.737.720	492.304.578,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah laporan presensi pegawai	1 Unit	Jumlah laporan presensi pegawai	1 laporan	44.680.000,00		501.150.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Unit	3.834.242,00		983.378,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	12 Dokumen	Jumlah laporan data pegawai	12 Dokumen	3.275.400,00		(2.758.200,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	12 Dokumen	Jumlah laporan SKP	12 Dokumen	7.643.500,00		(7.070.600,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	1 laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	1 laporan	1.117.417.385,00	1.366.523.251	249.105.866,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	14.597.492,00	20.000.100	5.402.608,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000,00	34.726.200	(40.273.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	32.641.500	(17.358.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket pengadaan	12 paket	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	1.996.140,00	15.164.000	13.167.860,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.607.219,00	15.164.000,00	556.781,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket pengadaan	2 paket	Jumlah paket pengadaan	2 Paket	3.626.638,00	10.044.000	6.417.362,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	12 paket	Jumlah paket pengadaan	12 Laporan	25.690.000,00	50.000.000	24.310.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	931.899.896,00	1.203.947.451	272.047.555,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	1 laporan	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	1 laporan	1.054.098.580,00	1.110.347.929	56.249.349,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	12 paket	Jumlah pengiriman dokumen	12 Laporan	5.150.000,00	7.000.000,00	1.850.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 dokumen	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	385.776.000,00	415.489.299	29.713.299,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 paket	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	663.172.580,00	687.858.630,00	24.686.050,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	1 laporan	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	1 laporan	309.978.025,00	339.350.000	29.371.975,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	12 paket	Jumlah jasa	32 Unit	35.895.200,00	62.306.000	26.410.800,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	12 paket	Jumlah jasa	32 Unit	68.357.825,00	80.819.000	12.461.175,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 paket	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 paket	1.500.000,00	5.000.000	3.500.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 paket	29.225.000,00	29.225.000	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	175.000.000,00	162.000.000	(13.000.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	99 %	Persentase rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	99 %	1.000.000.000,00	700.000.000,00	(300.000.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	2	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	18 rekomendasi	Jumlah rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang ditindaklanjuti	18 rekomendasi	1.000.000.000,00	700.000.000,00	(300.000.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7	2	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	16 Laporan	1.000.000.000,00	700.000.000,00	(300.000.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
						TOTAL				16.913.106.000,00		(16.913.106.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR I MADIUN
5	7				PENGLOLAAN PENGHUBUNG					14.309.281.000,00		#VALUE!		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	94 Persen	Indeks Profesionalitas ASN	94 Persen		14.396.483.750,00	1.100.002.750,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Persentase Indikator Program Bakorwil Bojonegoro yang Tercapai	50.04 Nilai	Persentase Indikator Program Bakorwil Bojonegoro yang Tercapai	50.04 Nilai	13.296.481.000,00		#VALUE!		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
						Persentase Realisasi Anggaran	94 Persen	Persentase Realisasi Anggaran	94 Persen			#VALUE!		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	11 Dokumen	100.000.000,00	105.622.660,00	5.622.660,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	40.133.600,00	45.989.900,00	5.856.300,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.763.500,00	5.507.560,00	(3.255.940,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.003.800,00	5.546.900,00	(3.456.900,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.217.900,00	6.217.700,00	(200,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.473.200,00	5.494.150,00	(3.979.050,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	18.716.100,00	27.550.000,00	8.833.900,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.691.900,00	9.316.450,00	1.624.550,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	10.535.079.000,00	10.947.713.000	412.634.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	10.216.481.000,00	10.676.025.000,00	459.544.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	257.472.000,00	219.444.000,00	(38.028.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7.031.000,00	7.031.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10.421.000,00	13.001.000	2.580.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.630.000,00	7.050.000,00	(2.580.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.852.000,00	6.517.000,00	(335.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17.306.000,00	30.053.000	12.747.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.886.000,00	6.379.000,00	(3.507.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	24.253.500,00	24.550.000	296.500,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.528.750,00	6.880.000	1.351.250,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	5.437.250,00	5.160.000	(277.250,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.588.750,00	6.020.000	431.250,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.698.750,00	6.490.000	(1.208.750,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	12 Dokumen	67.839.850,00	665.707.700	597.867.850,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18.860.800,00	25.049.500,00	6.188.700,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.460.100,00	12.980.000	2.519.900,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.809.950,00	10.320.000	2.510.050,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	13.671.000,00	601.438.200,00	587.767.200,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	17.038.000,00	15.920.000,00	(1.118.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	9 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersusun	9 Laporan	662.449.586,00	709.127.410	46.677.824,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.198.910,00	5.351.330	152.420,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.229.800,00	4.701.800,00	(3.528.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	30.570.900,00	26.415.200,00	(4.155.700,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.721.460,00	43.092.280,00	(1.629.180,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15.559.000,00	17.193.000,00	1.634.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	47.220.000,00	33.940.000	(13.280.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	483.765.200,00	563.481.800	79.716.600,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	13.957.600,00	8.506.000,00	(5.451.600,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	13.226.716,00	6.446.000	(6.780.716,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersusun	1 Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersusun	1 Laporan	19.676.000,00	34.729.000	15.053.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19.676.000,00	34.729.000	15.053.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	12 Laporan	1.713.168.575,00	1.856.870.540	143.701.965,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.436.200,00	5.036.200	600.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	244.285.784,00	228.252.596	(16.033.188,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.750.000,00	75.218.762	67.468.762,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.456.696.591,00	1.548.362.982	91.666.391,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	12 Laporan	174.014.489,00	200.443.440	26.428.951,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	22.500.000,00	43.215.240	20.715.240,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	91.718.489,00	139.470.400	47.751.911,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	59.796.000,00	17.757.800,00	(42.038.200,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR II BOJONEGORO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ Bulan	11.073.649.000,00	10.871.120.000,00	(202.529.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.017.330.000,00	915.600.000,00	(101.730.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	978.000,00	69.307.500,00	68.329.500,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.019.500,00	797.000,00	(222.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.647.500,00	1.271.000,00	(376.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.177.000,00	1.683.000,00	506.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	59.646.000,00	560.000,00	(59.086.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.163.000,00	449.000,00	(1.714.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	500.000,00	500.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	12 Laporan	395.937.000,00	1.280.032.000,00	884.095.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5	7	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	104.457.000,00	781.914.000,00	677.457.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	10.450.000,00	18.850.000,00	8.400.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	87.400.000,00	153.562.000,00	66.162.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	193.130.000,00	243.002.000,00	49.872.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	500.000,00	82.704.000,00	82.204.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	36 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	36 Laporan	878.305.000,00	1.198.087.500,00	319.782.500,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.244.000,00	31.499.000,00	6.255.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	180.760.000,00	102.677.000,00	(78.083.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	77.978.000,00	45.303.500,00	(32.674.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.419.000,00	45.887.000,00	3.468.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	28.259.000,00	28.770.000,00	511.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	19.750.000,00	18.864.000,00	(886.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket					
5	7	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.400.000,00	95.736.000,00	45.336.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	452.995.000,00	828.851.000,00	375.856.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	918.560.000,00	781.304.500,00	(137.255.500,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	657.060.000,00	519.804.500,00	(137.255.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	296.360.500,00	180.091.500,00	(116.269.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	85.000.000,00	64.000.000,00	(21.000.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	33.450.000,00	26.500.000,00	(6.950.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	87.910.500,00	64.591.500,00	(23.319.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					1.602.040.000,00	1.339.776.000,00	(262.264.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	2	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					1.602.040.000,00	1.339.776.000,00	(262.264.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG
5	7	2	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	27 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	27 Laporan	1.602.040.000,00	1.339.776.000,00	(262.264.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
		TOTAL				16.393.649.000,00		(16.393.649.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR III MALANG		
5	7	PENGLOLAAN PENGHUBUNG				14.335.423.000,00	14.784.792.000	449.369.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN		
5	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	82 0	Indeks profesionalitas ASN	82	11.505.423.000,00	11.636.106.000,00	130.683.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	
				Persentase indikator program yang tercapai	84 %	Persentase indikator program yang tercapai	84 %				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	
				Persentase realisasi anggaran	93 %	Persentase realisasi anggaran	93 %				BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	
5	7	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	8 DOKumen	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	8 DOKumen	77.362.450,00	97.789.778,00	20.427.328,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	26.206.150,00	35.890.150,00	9.684.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.072.000,00	5.100.328,00	28.328,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.072.000,00	5.072.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	3.325.000,00	(1.675.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	3.325.000,00	(1.675.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	26.309.700,00	32.310.700,00	6.001.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.702.600,00	12.766.600,00	8.064.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	12 Laporan	8.755.631.000,00	8.678.708.000,00	(76.923.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	8.455.423.000,00	8.404.792.000,00	(50.631.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	245.508.000,00	219.216.000,00	(26.292.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8.800.000,00	8.800.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	8.800.000,00	8.800.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	23.100.000,00	23.100.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	-		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	55.125.347,00	114.947.800,00	59.822.453,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	3.336.000,00	3.336.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	43.089.347,00	42.677.800,00	(411.547,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	2.700.000,00	62.934.000,00	60.234.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	12 Laporan	601.777.573,00	622.786.400,00	21.008.827,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	28.350.750,00	28.342.900,00	(7.850,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.022.657,00	68.313.600,00	(3.709.057,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.384.571,00	17.373.300,00	(11.271,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	798.250,00	783.600,00	(14.650,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	500.000,00	4.370.000,00	3.870.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	52.200.000,00	52.200.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	420.521.345,00	430.643.000,00	10.121.655,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	12.760.000,00	10.760.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	1.725.840.880,00	1.832.293.767,00	106.452.887,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	209.064.000,00	295.013.150,00	85.949.150,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.504.776.880,00	1.525.280.617,00	20.503.737,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 Laporan	281.685.750,00	281.580.255,00	(105.495,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	92.327.850,00	85.836.555,00	(6.491.295,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	85.457.900,00	97.699.200,00	12.241.300,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5.250.000,00	3.374.000,00	(1.876.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	48.650.000,00	44.670.500,00	(3.979.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Presentase Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	99 %	Presentase Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti	99 %	2.830.000.000,00	3.148.686.000	318.686.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	2	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	16 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	16 Rekomendasi	2.830.000.000,00	3.148.686.000	318.686.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN
5	7	2	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	22 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	22 Laporan	2.830.000.000,00	3.148.686.000	318.686.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
		TOTAL				14.335.423.000,00		(14.335.423.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR IV PAMEKASAN		
5	7	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				12.803.776.000,00	14.404.820.000	1.601.044.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER		
5	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.076.598.950,00	12.955.407.400	878.808.450,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER		
5	7	1	1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.000.000,00	115.000.000	30.000.000,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER		
5	7	1	1.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.616.000,00	15.616.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.948.500,00	15.948.500,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.478.500,00	14.478.500,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.478.500,00	14.478.500,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	14.478.500,00	14.478.500,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000,00	35.000.000	30.000.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.503.189.200,00	9.253.304.990,00	750.115.790,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER		
5	7	1	1.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	8.203.776.000,00	8.962.820.000,00	759.044.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	224.413.200,00	188.904.000,00	(35.509.200,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	39.240.000,00	34.240.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20.000.000,00	19.982.840,00	(17.160,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20.000.000,00	19.858.000,00	(142.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	(4.500.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	2.000.150,00	(2.999.850,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					47.400.000,00	12.015.250,00	(35.384.750,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.700.000,00	1.760.000,00	(940.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	2.540.000,00	(27.460.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.000.000,00	5.160.000,00	(6.840.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.700.000,00	2.555.250,00	(144.750,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					37.000.000,00	103.941.900,00	66.941.900,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	5.000.000,00	2.652.000,00	(2.348.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.000.000,00	813.500,00	(186.500,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	30.000.000,00	11.585.000,00	(18.415.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	1.000.000,00	88.891.400,00	87.891.400,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.258.000.000,00	1.130.897.140	(127.102.860,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	10.767.000,00	(1.233.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	155.803.840,00	55.803.840,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	1.275.000,00	(3.725.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	43.400.100,00	(6.599.900,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	39.997.200,00	(10.002.800,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00	2.162.000,00	(8.838.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 paket	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 paket	75.000.000,00	80.642.000,00	5.642.000,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	950.000.000,00	791.850.000	(158.150.000,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.631.000.000,00	1.827.496.699	196.496.699,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	231.000.000,00	293.806.202,00	62.806.202,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	450.000.000,00	452.023.097,00	2.023.097,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	950.000.000,00	1.058.667.400,00	108.667.400,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	7	1	1.09			515.009.750,00	512.751.421	(2.258.329,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER				
5	7	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	60.000.000,00	260.437.000,00	320.437.000	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	79.000.000,00	42.314.421,00	(36.685.579,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	376.009.750,00	150.000.000,00	(226.009.750,00)	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	2			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					727.177.050,00	1.294.412.600,00	567.235.550,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	2	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					727.177.050,00	1.294.412.600,00	567.235.550,00		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
5	7	2	1.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	16 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	16 dokumen	727.177.050,00	1.449.412.600	722.235.550,00	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER	BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
TOTAL										12.803.776.000,00		(12.803.776.000,00)		BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR V JEMBER
6	1				INSPEKTORAT DAERAH					88.914.802.000,00		#VALUE!		INSPEKTORAT
6	1	1				Indeks profesionalitas ASN	85 Nilai	Indeks profesionalitas ASN	85 Nilai					
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					75.330.837.067,00	76.067.773.800,00	736.936.733,00		INSPEKTORAT
						Persentase indikator program yang tercapai	90 %	Persentase indikator program yang tercapai	90 %					
						Persentase realisasi anggaran	95 %	Persentase realisasi anggaran	95 %					
6	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	85 %	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	85 %	18.979.000,00	17.612.000,00	(1.367.000,00)		INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.766.000,00	3.581.000,00	(185.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.206.000,00	1.902.000,00	(304.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.206.000,00	1.902.000,00	(304.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.153.000,00	2.057.000,00	(96.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.153.000,00	2.057.000,00	(96.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.765.000,00	3.581.000,00	(184.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.730.000,00	2.532.000,00	(198.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	65.085.116.747,00	65.840.132.300,00	755.015.553,00		INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	63.367.410.000,00	63.893.659.000,00	526.249.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
6	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.685.861.247,00	1.923.281.500,00	237.420.253,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	21.254.500,00	14.404.000,00	(6.850.500,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.940.000,00	1.601.000,00	(339.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.473.000,00	1.372.200,00	(100.800,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.916.000,00	1.643.200,00	(1.272.800,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.793.000,00	3.364.400,00	(428.600,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	469.000,00	807.000,00	338.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian	12 Dokumen	1.641.790.000,00	1.457.227.093,00	(184.562.907,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	209.200.000,00	194.550.000,00	(14.650.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	214.100.000,00	44.892.000,00	(169.208.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.144.000,00	1.534.300,00	(609.700,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.440.000,00	16.820.000,00	(4.620.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	169.006.000,00	201.818.000,00	32.812.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	784.091.000,00	699.836.793,00	(84.254.207,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	123 Orang	241.809.000,00	297.776.000,00	55.967.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Habis Pakai	4 Dokumen	1.240.302.495,00	953.857.503,00	(286.444.992,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.299.980,00	42.631.600,00	1.331.620,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	433.924.865,00	416.488.450,00	(17.436.415,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	141.769.000,00	129.417.300,00	(12.351.700,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	288.344.000,00	174.403.210,00	(113.940.790,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	23.850.000,00	31.825.000,00	7.975.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	310.109.650,00	158.511.943,00	(151.597.707,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	1.005.000,00	580.000,00	(425.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana	4 Dokumen	1.749.446.800,00	1.300.121.000,00	(449.325.800,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.379.498.800,00	1.000.065.000,00	(379.433.800,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	369.948.000,00	300.056.000,00	(69.892.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4.122.237.025,00	5.013.002.925,00	890.765.900,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	12.180.000,00	180.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.069.409.800,00	1.477.826.840,00	408.417.040,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.120.000,00	90.000.000,00	(17.120.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
6	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.933.707.225,00	3.432.996.085,00	499.288.860,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset	12 Laporan	Jumlah Laporan Aset	12 Laporan	1.472.965.000,00	1.485.820.979,00	12.855.979,00		INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	297.229.600,00	142.346.000,00	(154.883.600,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	34 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	34 Unit	558.812.400,00	538.048.500,00	(20.763.900,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	256.573.000,00	274.127.000,00	17.554.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	360.350.000,00	531.299.479,00	170.949.479,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	Level Maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	9.473.661.934,00	9.233.083.900,00	(240.578.034,00)		INSPEKTORAT
6	1	2	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah diperiksa	3 Nilai	Nilai rata-rata maturitas SPIP pada perangkat daerah diperiksa	3 Nilai	8.055.081.934,00	7.965.883.900,00	(89.198.034,00)		INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	848.624.000,00	572.408.000,00	(276.216.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	90 Laporan	5.043.921.715,00	5.337.206.700,00	293.284.985,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	47.825.850,00	94.630.000,00	46.804.150,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	103.264.369,00	164.862.000,00	61.597.631,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	38 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	38 Laporan	1.057.870.000,00	853.280.000,00	(204.590.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2	1.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	953.576.000,00	943.497.200,00	(10.078.800,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	2	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Jenis Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Jenis Kegiatan	1.418.580.000,00	1.267.200.000,00	(151.380.000,00)		INSPEKTORAT
6	1	2	1.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	1.418.580.000,00	1.267.200.000,00	(151.380.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	Level Kapabilitas APIP Provinsi Jawa Timur	3 Level	4.110.303.000,00	6.640.193.300,00	2.529.890.300,00		INSPEKTORAT
6	1	3	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Teknis Pengawasan	2 Dokumen	208.992.000,00	305.098.100,00	96.106.100,00		INSPEKTORAT
6	1	3	1.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	208.992.000,00	305.098.100,00	96.106.100,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85 %	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	85 %	3.901.311.000,00	6.335.095.200,00	2.433.784.200,00		INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	604.752.000,00	581.852.000,00	(22.900.000,00)	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 Perangkat Daerah	62.920.000,00	280.636.000,00	217.716.000,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	1.849.900.000,00	3.606.121.400,00	1.756.221.400,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	1	3	1.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20 Perangkat Daerah	1.383.739.000,00	1.866.485.800,00	482.746.800,00	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
TOTAL										88.914.802.000,00		(88.914.802.000,00)		INSPEKTORAT
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					146.819.536.500,00	167.748.005.500	20.928.469.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN	45.5 Indeks	Indeks profesionalitas ASN	45.5 Indeks	17.536.034.000,00		3.146.574.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Persentase indikator program yang tercapai	92 %	Persentase indikator program yang tercapai	92 %						
					Persentase realisasi anggaran	95 %	Persentase realisasi anggaran	95 %						
8	1	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Document	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Document	68.020.000,00	218.045.000,00	150.025.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.000.000,00	92.000.000,00	42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab				
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
8	1	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	23.300.000,00	21.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	8.650.000,00	7.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	8.330.000,00	6.830.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	6.300.000,00	4.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.000.000,00	21.315.000,00	18.315.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	9.020.000,00	58.150.000,00	49.130.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	4 Dokumen	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	4 Dokumen	15.821.649.000,00	15.839.894.000,00	18.245.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	15.304.149.000,00	15.142.618.000,00	(161.531.000,00)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	500.000.000,00	609.276.000,00	109.276.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.500.000,00	7.650.000,00	6.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	1.500.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.500.000,00	9.350.000,00	7.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000,00	15.500.000,00	14.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Dokumen	35.500.000,00	249.000.000,00	213.500.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.500.000,00	9.900.000,00	8.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	2.000.000,00	4.100.000,00	2.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	30.000.000,00	215.000.000,00	185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Laporan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Laporan	177.865.000,00	1.173.306.640,00	995.441.640,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	46.300.000,00	31.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	95.854.500,00	85.854.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	85.000.000,00	65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	78.000.000,00	58.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	112.865.000,00	868.152.140,00	755.287.140,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
8	1	1	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Laporan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11 Laporan	50.000.000,00	441.600.000	391.600.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	50.000.000,00	441.600.000	391.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	1.250.000.000,00	1.749.405.720	499.405.720,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000,00	472.000.000	72.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	850.000.000,00	1.277.405.720	427.405.720,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	133.000.000,00	877.057.640	744.057.640,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	40.000.000,00	227.200.000,00	187.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	70.000.000,00	199.500.000,00	129.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	1	1.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	23.000.000,00	424.532.000,00	401.532.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	72 Lembaga	Jumlah Kelembagaan yang melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	72 Lembaga	3.750.000.000,00	8.050.000.000	4.300.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	11 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	11 Kegiatan	3.750.000.000,00	8.050.000.000	4.300.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	3.440.000.000,00	7.645.000.000,00	4.205.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	2	1.01	4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 Orang	310.000.000,00	55.000.000,00	(255.000.000,00)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jumlah kejadian terkait politik	20 Kejadian Politik	Jumlah kejadian terkait politik	20 Kejadian Politik					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah partai politik yang melakukan kaderisasi	11 Parpol	Jumlah partai politik yang melakukan kaderisasi	11 Parpol	51.763.397.500,00	51.049.397.500	(714.000.000,00)		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Persentase peran serta pemilih pemula dalam pengembangan etika dan budaya politik	0,045 %	Persentase peran serta pemilih pemula dalam pengembangan etika dan budaya politik	0,045 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan perkembangan politik Kab/Kota di Jatim	38 Laporan	Jumlah laporan perkembangan politik Kab/Kota di Jatim	38 Laporan	51.763.397.500,00	51.049.397.500	(714.000.000,00)		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	3	1.01	3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	51.763.397.500,00	51.049.397.500	(714.000.000,00)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	14,10 %	Persentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	14,10 %	1.000.000.000,00	288.759.950,00	(711.240.050,00)		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1	4	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas/LSM	4 Laporan	Jumlah laporan identifikasi, inventarisasi dan verifikasi keberadaan serta bantuan fasilitasi Ormas/LSM	4 Laporan	1.000.000.000,00	288.759.950,00	(711.240.050,00)		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan bidang pemberdayaan dan pengawasan Ormas	2 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan bidang pemberdayaan dan pengawasan Ormas	2 Kegiatan					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN (RKPD 2023)		INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN (APBD Mendahului 2)		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	Sub Unit Penanggung Jawab	Unit Penanggung Jawab	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		Persentase Ormas/LSM penerima bantuan yang mencairkan bantuan	100 %	Persentase Ormas/LSM penerima bantuan yang mencairkan bantuan	100 %						
8	1 4 1.01 3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	330 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	330 Orang	600.000.000,00	288.759.950,00	(311.240.050,00)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 4 1.01 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah kejadian terkait ekonomi, sosial dan budaya	100 Kejadian	Jumlah kejadian terkait ekonomi, sosial dan budaya	100 Kejadian	500.105.000,00	1.741.240.050,00	1.241.135.050,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 5 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	8 Kegiatan	500.105.000,00	1.741.240.050,00	1.241.135.050,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 5 1.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang	500.105.000,00	1.741.240.050,00	1.241.135.050,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan Aksi Terpadu penanganan konflik sosial	3 Laporan	Jumlah laporan Aksi Terpadu penanganan konflik sosial	3 Laporan	72.270.000.000,00	85.636.000.000,00	13.366.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah laporan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jawa Timur	4 Laporan	Jumlah laporan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Jawa Timur	4 Laporan					
8	1 6 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	6 Laporan	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	6 Laporan	72.270.000.000,00	85.636.000.000,00	13.366.000.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	14 Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kebijakan/kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	14 Kegiatan					
8	1 6 1.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	480 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	480 Orang	71.520.000.000,00	82.386.263.800,00	10.866.263.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 6 1.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Orang	400.000.000,00	124.318.600,00	(275.681.400,00)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 6 1.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	350.000.000,00	535.417.600,00	185.417.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Guna mengukur keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan sebanyak 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada setiap urusan sesuai RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Perubahan Provinsi Jawa Timur tahun 2023.

7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan program pembangunan diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun. Target pada RKPD tahun 2023 berbeda dengan target yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Perubahan target Indikator Kinerja Utama didasarkan pada pengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Pada tahun 2022 tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat Jawa Timur kembali pulih/normal dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Atas dasar tersebut, maka tahun 2023 ini beberapa target Indikator Kinerja Utama. Adapun penyesuaian target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur tahun 2022 dituangkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target 2023		KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P - RKPD	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,59 - 6,29	4,59 - 6,29	Tidak Berubah
2	Indeks Theil	0,3136	0,3179	0,3077	0,3120	0,3147	0,33362 - 0,31162	0,33362 - 0,31162	Tidak Berubah
3	Persentase Penduduk Miskin	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49	10,13 - 9,10	10,77 - 10,08	Perubahan target 2023 kembali ke angka RPJMD P dikarenakan prediksi resesi global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur
4	Indeks Gini	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365	0,3038 - 0,3690	0,3038 - 0,3690	Tidak Berubah

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target 2023		KETERANGAN	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P - RKPD		
5	Indeks Pembangunan Gender	90,77	90,91	91,07	91,67	92,08	91,23 - 91,99	91,99 - 92,10	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75	72,44 - 73,57	72,44 - 73,57	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022
7	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49	5,41-3,82	5,41-3,82	Tidak Berubah
9	Indeks Reformasi Birokrasi	72,81	73,83	76,38	76,71	80,11	77,25 - 79,75	79,15 - 80,15	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022
9	Indeks Kesalehan Sosial	62,52	63,26	63,50	66,33	72,03	66,44 - 71,96	66,44 - 71,96	Tidak Berubah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,36	67,10	67,70	68,49	69,92	68,10 - 69,30	69,31 - 69,96	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target 2023		KETERANGAN	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P - RKPD		
11	Indeks Risiko Bencana	152,40	137,88	126,42	117,26	108,69	116,26 - 115,26	108,26 - 107,26	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022

7.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019 – 2024 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Realisasi Investasi.

Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 mengalami perubahan seperti halnya dengan Indikator Kinerja Utama karena pada tahun 2022 ini tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat Jawa Timur m lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Adapun penyesuaian Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 secara rinci disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2

Target Indikator Kinerja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	5,47	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,59 - 6,29	4,59 - 6,29	Tidak Berubah
1.2	Indeks Theil	0,3136	0,3179	0,3077	0,3120	0,3147	0,33362 - 0,31162	0,33362 - 0,31162	Tidak Berubah
1.3	Persentase Penduduk Miskin	10,85	10,20	11,46	10,59	10,49	10,13 - 9,10	10,77 - 10,08	Perubahan target 2023 kembali ke angka RPJMD P dikarenakan prediksi resesi global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur
1.4	Indeks Gini	0,371	0,364	0,364	0,364	0,365	0,3038 - 0,3690	0,3038 - 0,3690	Tidak Berubah
1.5	Indeks Pembangunan Gender	90,77	90,91	91,07	91,67	92,08	91,23 -91,99	91,99 -92,10	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022
1.6	Indeks Pembangunan Manusia	70,77	71,5	71,71	72,14	72,75	72,44-73,57	72,44-73,57	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
1.7	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91	3,82	5,84	5,74	5,49	5,41-3,82	5,41-3,82	Tidak Berubah
1.8	Indeks Reformasi Birokrasi	72,81	73,83	76,38	76,71	80,11	77,25-79,75	79,15-80,15	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
1.9	Indeks Kesalehan Sosial	62,52	63,26	63,50	66,33	72,03	66,44-71,96	66,44-71,96	Tidak Berubah
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,36	67,10	67,70	68,49	69,92	68,10-69,30	69,31-69,96	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
1.11	Indeks Risiko Bencana	152,40	137,88	126,42	117,26	108,69	116,26-115,26	108,26 - 107,26	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
								terlampau di Tahun 2022	
B. ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar								
1.1.	Pendidikan								
1.1.1	Indeks Pendidikan	0,61	0,619	0,626	0,634	0,639	0,66	0,66	Tidak Berubah
1.1.2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah ^(a)	69,92	70,01	71,04	74,47	73,40	79,33	79,33	Tidak Berubah
1.2.	Kesehatan								
1.2.1	Indeks Kesehatan	0,784	0,787	0,789	0,79	0,796	0,791	0,798	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
1.2.2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana ^(a)	-	-	100	100	100	100	100	Tidak Berubah
1.2.3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa ^(a)	-	-	100	100	100	100	100	Tidak Berubah
1.2.4	Angka Kematian Ibu ^(a)	91,45	89,81	98,39	234,70 (89,92)	93	95,42	95,42	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
1.2.5	Prevalensi Stunting (a)	32,7	26,9	-	23,5	19,2	16	16	Tidak Berubah
1.2.6	<i>Treatment Succes Rate Tuberculosis</i> (a)	90	90	88,9	89,13	89	90	90	Tidak Berubah
1.2.7	<i>Treatment Coverage Tuberculosis</i> (a)	50	66	44,7	45,1	64	55	90	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
1.2.8	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria (a)	37	38	38	38	38	38	38	Tidak Berubah
1.2.9	API (<i>Annual Parasite Incidence</i>) Malaria (per mil) (a)	0,012	0,02	0,01	0,01	0,01	< 1	< 1	Tidak Berubah
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
1.3.1	Indeks Konektivitas	0,686	0,713	0,758	0,707	0,824	0,848	0,848	Tidak Berubah
1.3.2	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	68,7	69,15	68,79	68,86	68,90	68,95	68,95	Tidak Berubah
1.4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1.4.1	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	76,3	79,59	81,54	80,97	80,82	86,85	86,85	Tidak Berubah
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
1.5.1	Persentase Perkembangan Kejadian Poleksosbud	67,77	80,42	93,04	77,57	75,90	91,5	87,5	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampaui di Tahun 2022, memasuki agenda pilkada

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									serentak pada tahun 2023 sehingga terdapat kejadian poleksosbud yang menonjol yang memiliki kemungkinan dapat menimbulkan kejadian lain yang lebih besar dampaknya
1.5.2	Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	99,47	99,57	85	85	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
	serta perlindungan masyarakat ^(a)								
1.5.3	Indeks Kapasitas Bencana	0,49	0,54	0,57	0,6	0,63	0,62-0,63	0,63-0,64	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
1.6.	Sosial								
1.6.1	Persentase PMKS yg Mandiri	1,19	1,2	1,26	1,29	1,30	1,32	1,32	Tidak Berubah
2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar								
2.1	Ketenagakerjaan								
2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,56	69,61	70,33	70,00	71,23	69,70 – 72,62	69,70	Tidak Berubah
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,71	73,04	73,03	72,36	74,42	71 - 74	74,42 - 74,75	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.2.2	Indeks Perlindungan Anak (IPA) ^(a)	67,93	71,8	72,25	64,59	Belum Ada	72,5	66,09	Penyesuaian Target dengan Hasil Rakortek Tahun 2023
2.3	Pangan								
2.3.1	Ketersediaan Beras (Ton) ^(a)	6.002.14 0	5.503.7 26	5.618.1 01	7.160. 483	6.301.9 18	5.650.000	7.632.271,08	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.3.2	Skor Pola pangan Harapan ^(a)	85	92,5	91,2	88,7	92,8	90	91,26	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
								terlampau di Tahun 2022	
2.4	Pertanahan								
2.4.1	Persentase kasus sengketa yang termediasi ^(b)	-	-	-	-	100	60	60	Tidak Berubah
2.5	Lingkungan Hidup								
2.5.1	Indeks Kualitas Air	52,96	56,13	56,13	53,57	56,13	53,73	56,13	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.5.2	Indeks Kualitas Udara	83,5	83,32	84,59	83,68	84,28	83,94	84,40	Tidak Berubah
2.5.3	Indeks Kualitas Lahan	63,56	63,16	63,72	47,36	47,36	47,50	47,34	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									terlampau di Tahun 2022
2.5.4	Indeks Kualitas Air Laut ^(a)	-	-	-	82,46	85,45	82,71	85,45	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.6.1	Prosentase Data Penduduk yang Akurat ^(a)	-	99,47	99,95	100	100	99,5	100	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
2.7.1	Persentase Penduduk Miskin Perdesaan	15,21	14,16	15,16	13,79	13,90	12,98 – 11,29	15,00 – 13,44	Perubahan target 2023 kembali ke angka RPJMD P

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									dikarenakan prediksi resesi global sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina yang berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur.
2.7.2	Persentase Desa tertinggal dan sangat tertinggal ^(c)	21,46	4,687	0,013	-	-	-	-	-
2.7.3	Persentase Desa Mandiri ^(a)	0,89	2,21	4,3	9	19,30	10,61	19,95	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
								terlampau di Tahun 2022	
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2.8.1	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) ^(a)	-	-	75,55	75,65	67,24	66,5	66,5	Tidak Berubah
2.9	Perhubungan								
2.9.1	Indeks Aksesibilitas	51,8	51,9	51,27	53,2	76,17	75,45	76,499	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.1	Komunikasi dan Informatika								
2.10.1	Indeks Sistem Pemerintahan	2,92	3,1	3,4	2,82	3,30	3,8	3,8	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
	Berbasis Elektronik (SPBE)								
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
2.11.1	Persentase Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur (*)	5,5	5,78	-3,5	8,8	7,19	2,25-2,75	6 - 7,35	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.12	Penanaman Modal								
2.12.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (trilyun Rp.)	155	58,45	78,3	79,5	110,3	72	112	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.13	Kepemudaan dan Olahraga								
2.13.1	Indeks Pembangunan Pemuda ^(a)	53,17	52,5	53	53,50	56,33	56,02	56,50	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
								terlampau di Tahun 2022	
2.14	Statistik								
2.14.1	Persentase Release Data Statistik Akurat yang Tepat Waktu ^(a)	-	70	0,37	50	100	50	50	Tidak Berubah
2.15	Persandian								
2.15.1	Persentase Informasi Persandian yang Diamankan ^(a)	27,5	35	35,4	40,9	45,2	50	50	Tidak Berubah
2.16	Kebudayaan								
2.16.1	Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	10,58	8,78	9,62	2,14	2,40	2,40	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
2.16.2	Persentase Peningkatan Seni Budaya yang Dilestarikan ^(c)	5	5,3	5,99	-	-	-	-	
2.16.3	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan ^(a)	5,65	5,45	5,99	7,72	10,09	7,09	7,09	Tidak Berubah
2.17	Perpustakaan								
2.17.1	Indeks Kegemaran Membaca Mesyarakat ^(a)	36,69	62,65	63,96	64,20	68,54	65	69,5	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
2.18	Kearsipan								
2.18.1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan ^(a)	88,18	76,7	81,42	82,59	91,44	85	92	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
								terlampau di Tahun 2022	
3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan								
3.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan								
3.1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ^(c)	-2,13	1,31	1,01	1,77	1,79			
3.2	Pariwisata								
3.2.1	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	6,83	6,92	-9,6	6,33	13,53	5,95-6,55	12,32	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
3.3	Kelautan dan Perikanan								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
3.3.1	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan ^(a)	-0,86	-0,09	-0,69	2,99	5,71	1,87 - 4,85	1,87 - 4,85	Tidak Berubah
3.4	Pertanian								
3.4.1	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Pangan ^(a)	-4,1	-1,26	1,02	-0,09	-1,39	(0,67) -1,47	(0,67) -1,47	Tidak Berubah
3.4.2	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Hortikultura ^(a)	-2,62	3,69	6,60	0,67	6,15	1,75 - 4,25	1,75 - 4,25	Tidak Berubah
3.4.3	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Tanaman Perkebunan ^(a)	-0,07	4,21	-0,33	1,04	-0,28	0,62 - 2,78	0,62 - 2,78	Tidak Berubah
3.4.4	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan ^(a)	-1,3	2,56	2,38	3,31	1,79	1,21 - 2,46	1,21 - 2,46	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
3.5	Kehutanan								
3.5.1	PDRB ADHB Sub Kategori Kehutanan dan Penembangan Kayu (Milyar Rupiah) ^(a)	9.814,40	10.618, 23	10.189, 31	11.291 ,9	12.241, 1	11.000 – 12.000	11.000 – 12.000	Tidak Berubah
3.6	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.6.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan & Penggalian	2,38	1,47	-4,18	-4,48	-7,04	(4,44) - 3,43	(4,44) - 3,43	Tidak Berubah
3.6.2	Persentase Rasio Elektrifikasi	94,64	99,29	102,57	105,17	99,39	100	100	Tidak Berubah
3.6.3	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan ^(a)	4,47	4,60	4,61	6,42	9,36	6,55	9,00	Terdapat perubahan formulasi baru perhitungan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
								Bauran Energi dari Dewan Energi Nasional (DEN) berupa Pemutakhiran Faktor Konversi pada energi primer yakni Batubara (perubahan factor konversi 3,4417 menjadi 4,200) dan kayu bakar (formulasi awal energi kayu bakar belum dimasukkan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									sedangkan formulasi baru kayu bakar dihitung dalam bauran energi), sehingga mempengaruhi energi primer lainnya.
3.7	Perdagangan								
3.7.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	5,96	-5,77	7,77	6,87	2,51-5,71	4,01-5,71	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									Motor dari tahun 2014-2019 rata-rata tumbuh 6,01 persen dengan asumsi kondisi perekonomian stabil sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19.
3.7.2	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Perundang-undangan ^(a)	-	96,68	95,36	95,42	96,14	95	96	Semakin tingginya kesadaran Masyarakat terhadap tertib

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									tata niaga perdagangan
3.8	Perindustrian								
3.8.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	7,55	6,82	-2,06	3,37	6,28	2,16 - 6,11	3,88-6,11	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan dari tahun 2014- 2019 rata-rata tumbuh 6,26 persen dengan asumsi kondisi perekonomian stabil sebagaimana kondisi sebelum

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
								pande mi Covid-19.	
3.9	Transmigrasi								
3.9.1	Persentase Transmigran yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonominya ^(a)	-	75,99	-	72,07	76,22	70	70	Tidak Berubah
4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan								
4.1	Perencanaan Pembangunan								
4.1.1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan ^(a)	100	100	94,36	100	99,35	100	100	Tidak Berubah
4.2	Keuangan								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
4.2.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	58,04	57,77	56,75	55,24	66,63	58	64,21	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
64,21	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tidak Berubah
4.3	Kepegawaian								
4.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	88,05	82,00	85,00	85,30	86,27	85,4	86,50	Target pada dokumen RKPD 2023 sudah terlampau di Tahun 2022
4.4	Pendidikan dan Pelatihan								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
4.4.1	Presentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikasi kompetensi dengan skor evaluasi minimal 70 ^(a)	-	-	99,99	96,94	100	86,0	90,0	Tidak Berubah
4.5	Penelitian dan Pengembangan								
4.5.1	Predikat Inovasi Daerah ^(a)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Tidak Berubah
4.6	Kesatuan Bangsa dan Politik								
4.6.1	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi ^(a)	76,57	75,97	80,55	81,09	74,81	82	75	Terdapat perubahan metodologi dalam perhitungan indeks

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
									demokrasi Indonesia terutama pada indeks aspek lembaga demokrasi
4.7	Penghubung								
4.7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penghubung ^(a)	-	-	90,96	90,15	90,18	92	92	Tidak Berubah
4.7.2	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti ^(a)	95	99	99,2	100	100	99	99	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan	
		2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD		
4.8	Pengawasan								
4.8.1	Indeks Integritas Pemerintah Prov. Jatim	74,96	76,42	76,09	70,03	73,11	77	77	Tidak Berubah
4.9	Sekretariat Dewan								
4.9.1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (a)	80,69	80,79	81,05	82,32	83,91	84	84	Tidak Berubah
4.1	Kesekretariatan Daerah								
4.10.1	Nilai SAKIP	81,7	81,71	82,38	83,18	83,83	85	85	Tidak Berubah
4.10.2	Status LPPD	Sangat Tinggi	-	-	Tinggi	Belum Ada	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berubah
4.10.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,24	83,32	84,02	85,44	85,69	86	86	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
	Provinsi Jawa Timur								
4.10.4	Indeks Kepedulian Sosial	72,51	74,28	74,4	78,62	81,70	78,86-87,06	78,86-87,06	Tidak Berubah
4.10.5	Persentase Produk Hukum yang tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum ^(a)	100	100	100	100	100	100	100	Tidak Berubah
4.10.6	Jumlah Kebijakan Lingkup Bidang Perekonomian ^(a)	-	-	10	11	11	11	11	Tidak Berubah

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Awal Thn. 2018	Realisasi				Target		Keterangan
			2019	2020	2021	2022	RKPD	P-RKPD	
4.10.7	Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan ^(b)	100	100	100	100	100	100	100	Tidak Berubah
4.10.8	Persentase kesesuaian jadwal tender dengan jadwal tender yang ditetapkan dalam RUP ^(b)	-	-	-	-	28,38	30	30	Tidak Berubah

Ket.

(a) : IKD baru yang dimulai tahun 2021

(b) : IKD baru yang dimulai tahun 2022

(c) : IKD berhenti di tahun 2020/2021

(**) : Target di Perubahan RPJMD 2019-2024

BAB VIII PENUTUP

Menegaskan bahwa perubahan RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan perubahan APBD Provinsi.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA